BUMN UNTUK INDONESIA

Jasa Tirta II

LAPORAN TAHUNAN 2023



TERUS MAJU UNTUK NEGERIKU



TERUS MAJU UNTUK NEGERIKU

Moving Forward for My Country

Perum Jasa Tirta II memahami pentingnya menjaga keberlanjutan bumi melalui kolaborasi, inovasi, dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Kami berkomitmen untuk secara aktif mendorong dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktik yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjadi mitra bagi semua pihak yang berkomitmen untuk menjaga bumi.

Perum Jasa Tirta II terus berinovasi dalam mengelola produk dan layanan yang handal, serta menyediakan solusi yang memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kami bertekad untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air di Asia Tenggara pada tahun 2030.

Kami senantiasa beroperasi dengan pendekatan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan serta berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip(prinsip tata kelola yang baik

Perum Jasa Tirta II understands the importance of maintaining the sustainability of the earth through collaboration, innovation, and sustainable business practices.

We are committed to actively encouraging and supporting sustainable development by implementing socially, economically, and environmentally responsible practices, and becoming a partner for all parties committed to protecting the earth.

Perum Jasa Tirta II continues to innovate in managing reliable products and services, and providing solutions that provide added value to stakeholders. We are determined to be a pioneer in the management and business of water resources in Southeast Asia by 2030.

We always operate with a modern approach that is able to accommodate the needs of stakeholders and contribute to sustainable regional development in accordance with the principles of good governance



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang(undangan yang berlaku, kecuali hal(hal yang bersifat historis. Pernyataan(pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Informasi keuangan tahun 2023 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini telah mendapatkan persetujuan pemilik modal Perusahaan bedasarkan Peraturan Menteri BUMN termasuk didalam surat tersebut adalah persetujuan kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023.

Pernyataan(pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen(dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil(hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", dan "Perusahaan" yang didefinisikan sebagai Perum Jasa Tirta II yang menjalankan bisnis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

This Annual Report contains statements of financial condition, results of operations, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward(looking statements in the implementation of applicable laws, except for historical matters. Such forward(looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results.

The 2023 financial information presented in this Annual Report has obtained the approval of the Company's capital owners based on the Minister of SOE Regulation included in the letter is the re(approval of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Years.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current and future conditions of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Perum Jasa Tirta II", "PJT II", and "Company" which is defined as Perum Jasa Tirta II, which conducts business in the field of Water Resources Management.



TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM JASA TIRTA II

About Perum Jasa Tirta II Annual Report



Selamat datang pada Laporan Tahunan 2023 Perum Jasa Tirta II dengan tema Terus Maju Untuk Negeriku. Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis Perusahaan sepanjang tahun 2023 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Laporan Tahunan 2023 Perum Jasa Tirta II menjadi sumber dokumentasi komprehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip(prinsip corporate governance.

Laporan Tahunan 2023 Perum Jasa Tirta II disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per(2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II, dan Kriteria Annual Report Award.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada otoritas terkait serta menjadi buku tahunan yang turut membangun rasa bangga dan solidaritas di antara karyawan.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang Perusahaan dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian Perusahaan sepanjang tahun 2023.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II 2023 disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Perusahaan yaitu www.jasatirta2.co.id.

Welcome to Perum Jasa Tirta II's 2023 Annual Report with the theme Moving Forward for My Country. The theme was chosen based on in(depth analysis and study based on the facts and developments of the Company's business throughout 2023 and the future of the Company's business sustainability.

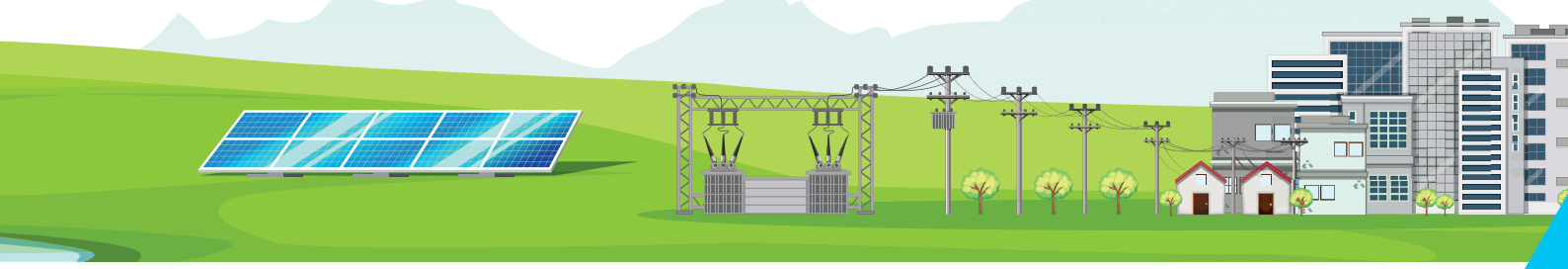
2023 Annual Report of Perum Jasa Tirta II is a comprehensive source of documentation containing information on the Company's performance in a year. This information contains complete documentation describing the Company's profile; operational, marketing and financial performance; information about the tasks, roles and structural functions of the Company organization that applies the concepts of best practices and the principles of corporate governance.

Perum Jasa Tirta II's 2023 Annual Report was prepared based on SOE Ministerial Regulation No. Per(2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, Government Regulation No. 25 of 2022 on Perum Jasa Tirta II, and Annual Report Award Criteria.

The main purpose of the preparation of this Annual Report is to increase the disclosure of information of the Company to relevant authorities and to become an annual book that helps build pride and solidarity among employees.

In addition, this Annual Report also aims to build understanding and trust about the Company by providing appropriate, balanced and relevant information. Shareholders and all other stakeholders can obtain adequate information related to policies that have been and will be carried out as well as the Company's achievements throughout 2023.

Perum Jasa Tirta II 2023 Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English using types and sizes of fonts that are easy to read and print with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on the Company's official website, www.jasatirta2.co.id.



Kesinambungan Tema
Theme Continuation



Perum Jasa Tirta II memahami pentingnya menjaga keberlanjutan bumi melalui kolaborasi, inovasi, dan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Kami berkomitmen untuk secara aktif mendorong dan mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan praktik yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjadi mitra bagi semua pihak yang berkomitmen untuk menjaga bumi.

Perum Jasa Tirta II terus berinovasi dalam mengelola produk dan layanan yang handal, serta menyediakan solusi yang memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Kami bertekad untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya air di Asia Tenggara pada tahun 2030.

Kami senantiasa beroperasi dengan pendekatan modern yang mampu mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan serta berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip(prinsip tata kelola yang baik

Perum Jasa Tirta II understands the importance of maintaining the sustainability of the earth through collaboration, innovation, and sustainable business practices.

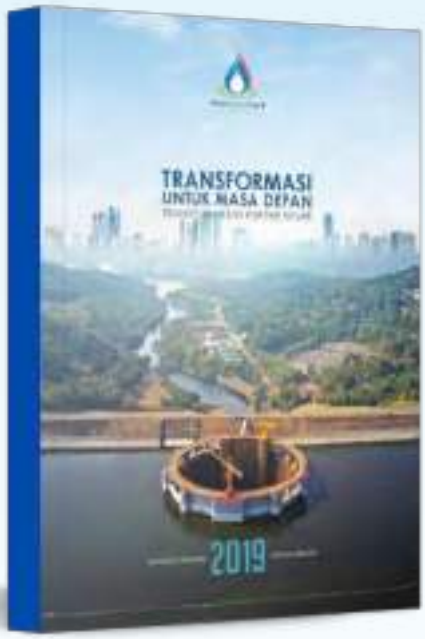
We are committed to actively encouraging and supporting sustainable development by implementing socially, economically, and environmentally responsible practices, and becoming a partner for all parties committed to protecting the earth.

Perum Jasa Tirta II continues to innovate in managing reliable products and services, and providing solutions that provide added value to stakeholders. We are determined to be a pioneer in the management and business of water resources in Southeast Asia by 2030.

We always operate with a modern approach that is able to accommodate the needs of stakeholders and contribute to sustainable regional development in accordance with the principles of good governance

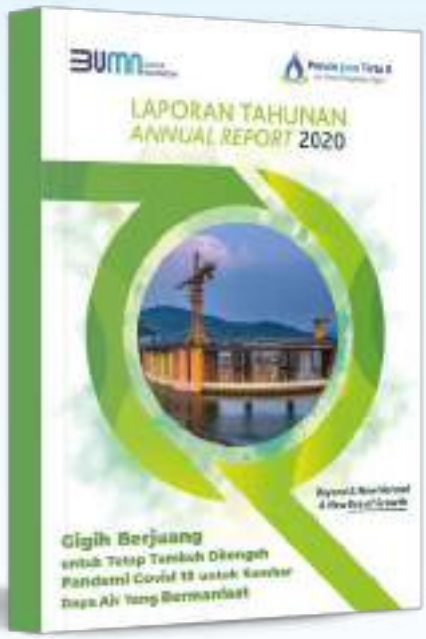
2019

Transformasi
Menuju Masa Depan
Transformation for the Future



2020

Gigih Berjuang Tetap Tumbuh
Ditengah Pandemi Covid 19 untuk
Sumber Daya Air Yang Bermanfaat
Beyond A New Normal A new Era of Growth



2021

Merangkul Perubahan Membangun
Daya Tahan Menyongsong
Tantangan Kedepan
Embracing Change Builds Endurance in Facing Future Challenges



2022

Moving Beyond
Eskalasi Kinerja Berkelanjutan
Sustainable Performance Escalation



Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Highlights

Laporan Posisi Keuangan
Statement of Financial Position

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

URAIAN / *Description*	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ASET / *Assets*						
Kas dan Setara Kas / *Cash and Cash Equivalent*	732.176	567.815	452.330	518.162	597.052	434.206
Piutang Usaha / *Trade Receivables*	321.633	343.689	284.399	230.178	153.570	297.271
Persediaan / *Inventories*	1.556	1.928	1.903	2.074	2.548	2.147
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka / *Prepaid Expenses and Advances*	14.799	24.989	8.467	20.915	9.824	14.838
Aset Keuangan Lancar Lainnya / *Other Current Financial Assets*	1.927	701	781	2.901	2.194	2.792
Jumlah Aset Lancar / *Total Current Assets*	**1,072.091**	**939.122**	**747.880**	**774.230**	**765.188**	**751.254**
Penyertaan pada Perusahaan Asosiasi / *Participation in Associated Companies*	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap / *Fixed Asses*	852.984	804.197	752.743	599.694	540.399	476.051
Aset Tak Berwujud/ *Intangible Asses*	7.503	9.017	-	-	-	-
Aset Hak Guna / *Right(Of(Use Assets*	8.462	15.057	12.544	6.253	-	-
Aset Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Assets*	101.460	97.494	74.712	57.433	39.018	41.042
Aset Tidak Lancar Lainnya / *Other Non(Current Assets*	21.765	48.529	101.875	102.125	79.970	48.442
Jumlah Aset Tidak Lancar / *Total Non(Current Assets*	**992.174**	**974.294**	**941.874**	**765.505**	**659.387**	**565.535**
Jumlah Aset / *Total Assets*	**2,064.265**	**1,913.416**	**1,689.754**	**1,539.735**	**1,424.575**	**1,316.789**
LIABILITAS / *Liabilities*						
Utang Usaha / *Trade Payables*	34.112	14.653	12.297	46.541	39.620	76.453
Beban Akrual / *Accrual Expense*	86.627	71.777	37.638	21.379	33.271	34.344
Utang Pajak / *Tax Payable*	58.250	58.886	26.306	25.987	21.411	15.748
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / *Short(Term Contract Liabilities*	1.383	6.160	6.023	1.907	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / *Other Short(Term Financial Liabilities*	77.880	84.724	94.909	58.333	47.037	36.385
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / *Total Short(Term Liabilities*	258.252	236.200	177.173	154.147	141.339	162.930
Utang Sewa Jangka Panjang / *Long(Term Lease Liabilities*	7.362	8.922	6.697	4.351	-	-
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / *Post Retirement Liabilities*	279.080	274.739	212.748	150.037	72.762	79.403
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / *Other Long(Term Liabilities*	9.730	10.830	11.930	14.265	22.130	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / *Total Long(Term Liabilities*	**296.172**	**294.491**	**231.375**	**168.653**	**94.892**	**79.403**
Jumlah Liabilitas / *Total Liabilities*	**554.424**	**530.691**	**408.548**	**322.800**	**236.231**	**242.333**
EKUITAS / *Equity*						
Modal Pemerintah / *Government Share*	164.548	164.548	164.548	164.548	164.548	164.548
Cadangan Umum / *Reserved*	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943	13.943
Cadangan Bertujuan / *Reserved Appropriated*	1,027.001	1,027.001	1,027.001	1,027.001	885.253	760.306
Komponen Ekuitas Lainnya / *Other Equity Components*	(190.253)	(179.351)	(135.622)	(92.447)	(30.392)	(49.605)
Saldo Laba / *Profit Balance*	349.068	203.264	95.818	(17.616)	145.580	8.669
Laba Tahun Berjalan / *Current Year Profit*	138.793	145.803	107.446	113.235	-	166.596
Kepentingan Non Pengendali / *Non Controling*	6.741	7.517	8.072	8.271	9.412	9.999
Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	**1,509.841**	**1,382.725**	**1,281.206**	**1,216.935**	**1,188.344**	**1,074.456**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / *Total Liabilities and Equity*	**2,064.265**	**1,913.416**	**1,689.754**	**1,539.735**	**1,424.575**	**1,316.789**

Laporan Laba Rugi
Statement of Profit or Loss

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

URAIAN / *Description*	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Pendapatan Usaha / *Operating Revenues*	1080.171	981.047	856.518	839.387	816.472	825.544
Beban Usaha / *Operating Expenses*	(713.501)	(600.271)	(544.877)	(518.623)	(472.146)	(456.753)
Laba Usaha / *Profit From Operations*	366.670	380.776	311.641	320.764	344.326	368.791
Beban Promosi dan Pemasaran / *Promotion and Marketing Expenses*	(6.548)	(5.794)	(4.731)	(5.371)	(14.424)	(5.398)
Beban Administrasi dan Umum / *General and Administration Expenses*	(200.430)	(187.160)	(170.030)	(164.637)	(167.799)	(139.908)
Pendapatan Lain(lain / *Other Income*	48.571	31.950	15.336	28.245	56.330	31.255
Beban Lain(lain / *Other Expenses*	(34.611)	(27.917)	(20.081)	(35.513)	(20.619)	(18.209)
Laba Sebelum Pajak / *Profit (Loss) Before Tax*	173.652	191.855	132.135	143.488	197.814	236.531
Beban Pajak Penghasilan / *Income Tax Expense*	(35.635)	(46.607)	(24.689)	(30.253)	(43.818)	(69.935)
Laba Bersih Tahun Berjalan / *Current Year Net Profit*	138.017	145.248	107.446	113.235	153.996	166.596
Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*	(10.902)	(43.729)	(43.175)	(62.055)	1.177	54.062
Laba Komprehensif Tahun Berjalan / *Comprehensive Income for the Current Year*	127.115	101.519	64.271	51.180	155.173	220.658

*) Penyajian kembali / *Restatement*

Rasio Keuangan
Financial Ratio

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

URAIAN / *Description*	2023	2022	2021	2020*	2019*	2018
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / *Return on Equity*	10,19%	12,28	9,53	11,49	15,07	120,33
Imbalan Investasi (ROI) / *Return on Investment*	13,12%	15,23	13,04	12,43	16,35	22,13
Laba terhadap Aset (ROA) / *Return on Assets*	8.41	10.03	8,56	9,32	13,29	17,96
Rasio Kas / *Cash Ratio*	291,98	245,40	269,22	355,44	422,43	266,5
Rasio Lancar / *Current Ratio*	425,3	405,87	445,12	528,50	541,39	461,09
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset / *Own Capital Ratio to Total Assets*	73,14	72,26	75,82	70,35	71,18	65,18
Perputaran Persediaan (dalam satuan hari) / *Inventory Turnover (in units of days)*	0	1	1	1	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / *Billing Period (in units of days)*	26	125	121	91	69	81

*) Penyajian kembali / *Restatement*



Ikhtisar Kinerja Keuangan
Financial Performance Highlights

Jumlah Aset
Total Assets

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

	Pendapatan (Milyar)
2018	1,316,789
2019	1,424,575
2020	1,539,735
2021	1,689,754
2022	1,913,416
2023	**2,064,265**

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

	Pendapatan (Milyar)
2018	242.333
2019	236.231
2020	322.800
2021	408.548
2022	530.691
2023	**554.424**

Jumlah Ekuitas
Total Equity

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

	Pendapatan (Milyar)
2018	1,074.456
2019	1,188.344
2020	1,216.935
2021	1,281.206
2022	1,382.725
2023	**1,509.841**

Jumlah Pendapatan Usaha
Total Operating Revenues

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

	Pendapatan (Milyar)
2018	825.544
2019	816.472
2020	839.387
2021	856.518
2022	981.047
2023	**1,080.171**

Jumlah Laba Usaha
Total Operating Profit

(dalam juta Rupiah / *in million rupiah*)

	Pendapatan (Milyar)
2018	368.791
2019	344.326
2020	320.764
2021	311.641
2022	380.776
2023	**366.670**





Kinerja Perum Jasa Tirta II 2023
Performance of Jasa Tirta II Public Corporation 2023

Faktor Ekonomi
Economic Factors

Pada tahun 2023, Perum Jasa Tirta II melanjutkan berbagai inisiatif dan aktivitas untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi fokus utama atau perkembangan pada tahun 2023 untuk Perum Jasa Tirta II:

In 2023, Perum Jasa Tirta II will continue various initiatives and activities to improve water resources management and its contribution to sustainable development. Here are some aspects that can be the main focus or development in 2023 for Perum Jasa Tirta II:



Peningkatan Infrastruktur / *Infrastructure Improvement* 1

a. Proyek Pengembangan: Perum Jasa Tirta II melanjutkan proyek(proyek baru untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi infrastruktur pengelolaan air, seperti bendungan, saluran irigasi, dan fasilitas pengolahan air.

a. Development Projects: Perum Jasa Tirta II continues new projects to increase the capacity and efficiency of water management infrastructure, such as dams, irrigation channels, and water treatment facilities.

b. Modernisasi Teknologi: Implementasi teknologi baru untuk meningkatkan pemantauan dan manajemen sumber daya air, termasuk sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi sensor.

b. Technology Modernization: Implementation of new technologies to improve monitoring and management of water resources, including geographic information systems (GIS) and sensor technology.

Pendukung Kebutuhan Pertanian dan Industri / *Supporting Agricultural and Industrial Needs* 2

a. Layanan Pengairan: Meningkatkan layanan pengairan untuk mendukung sektor pertanian dan industri, memastikan distribusi air yang efisien dan merata.

a. Irrigation Services: Improving irrigation services to support the agricultural and industrial sectors, ensuring efficient and equitable water distribution.

b. Kolaborasi dengan Petani dan Industri**: Bekerja sama dengan petani dan industri untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan produktivitas.

*b. Collaboration with Farmers and Industry**: Working with farmers and industry to optimize water use and increase productivity.*

Inisiatif Keberlanjutan / *Sustainability Initiatives* 3

a. Praktik Ramah Lingkungan; Menerapkan praktik ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya air, seperti pengurangan limbah dan konservasi air.
a. Environmentally Friendly Practices Implementing environmentally friendly practices in water resource management, such as waste reduction and water conservation.

b. Pengelolaan Risiko; Mengelola risiko terkait perubahan iklim dan dampak lingkungan terhadap sumber daya air.
b. Risk Management: Managing risks related to climate change and environmental impacts on water resources.

Pembangunan Berkelanjutan dan Komitmen Sosial / *Sustainable Development and Social Commitment* 4

a. Program CSR: Menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi.
a. CSR Programs: Implementing corporate social responsibility (CSR) programs to support the welfare of surrounding communities and contribute to social and economic development.

b. Edukasi dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan melalui program edukasi dan pelatihan.
b. Education and Awareness: Raising awareness of the importance of sustainable water management through education and training programs.

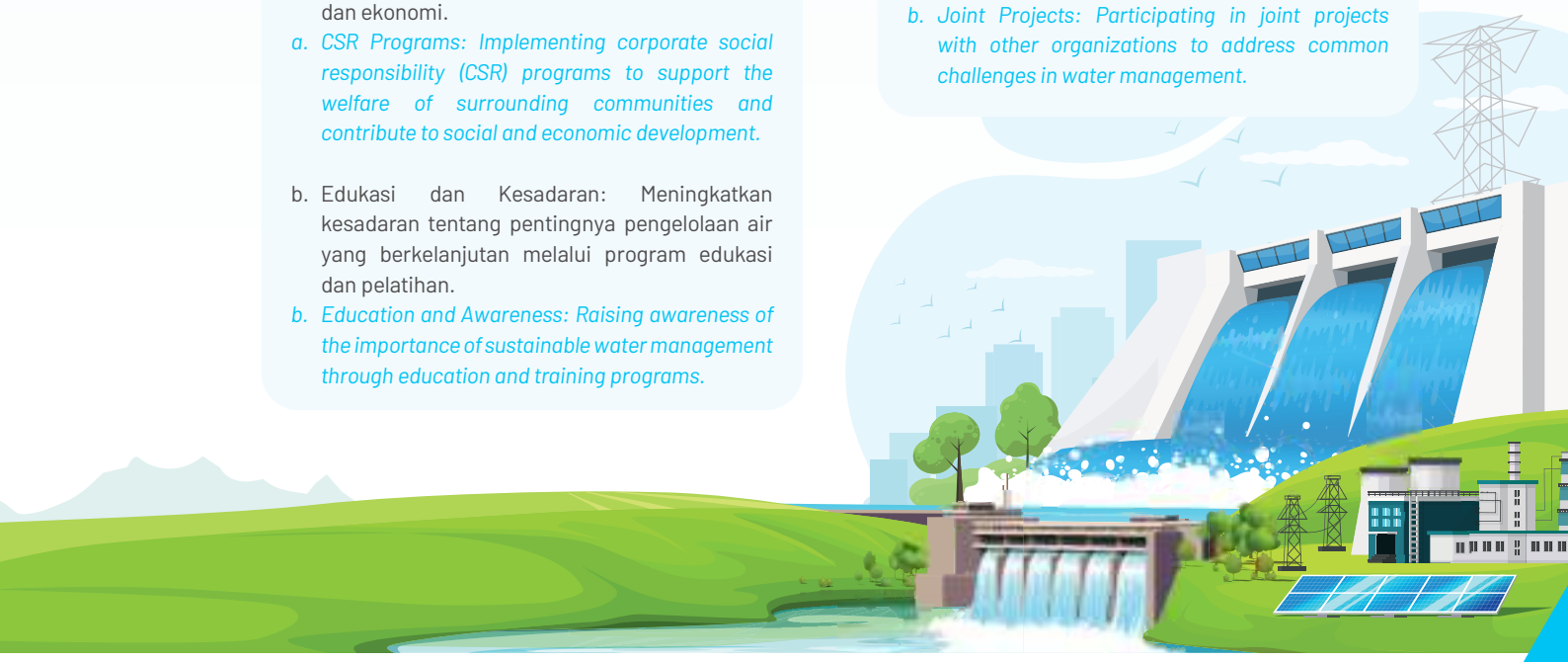
Kinerja dan Governance / *Performance and Governance* 5

Kami senantiasa meningkatkan transparansi dalam pelaporan kinerja dan aktivitas perseroan kepada publik dan pemangku kepentingan.
We continuously improve transparency in reporting the company's performance and activities to the public and stakeholders.

Kemitraan dan Kolaborasi / *Partnership and Collaboration* 6

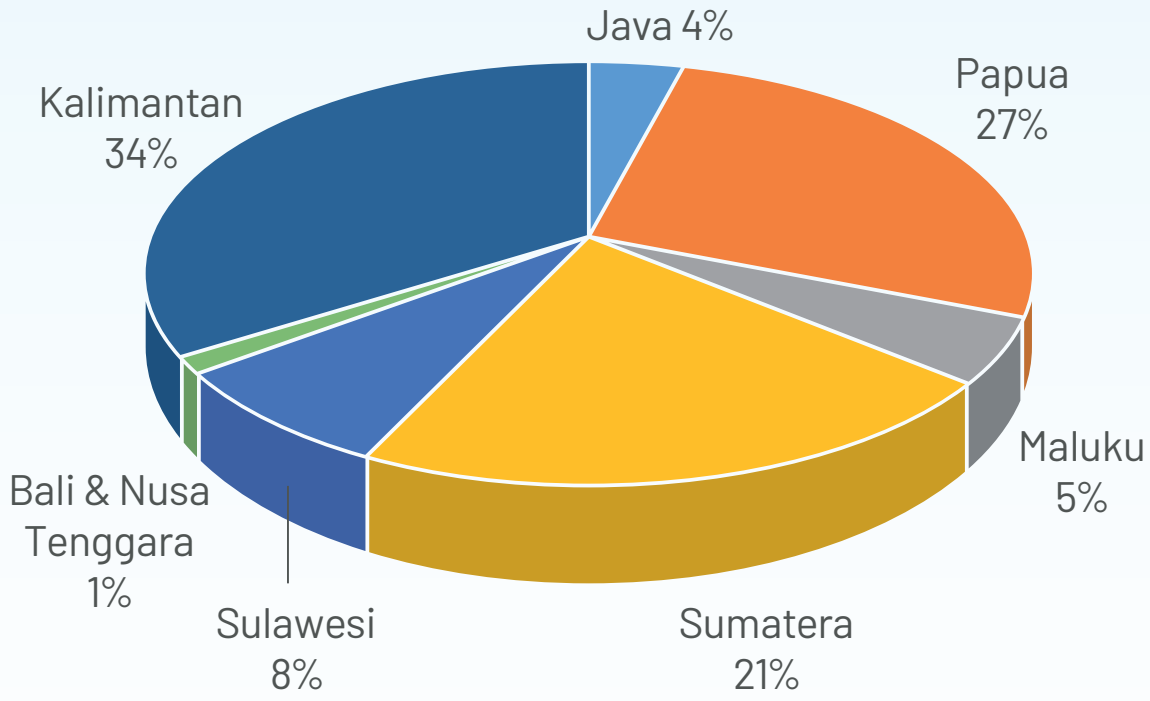
a. Kemitraan Strategis: Mengembangkan kemitraan dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya air.
a. Strategic Partnership: Developing partnerships with the government, non(governmental organizations, and the private sector to achieve common goals in water resource management.

b. Proyek Bersama: Berpartisipasi dalam proyek bersama dengan organisasi lain untuk mengatasi tantangan bersama dalam pengelolaan air.
b. Joint Projects: Participating in joint projects with other organizations to address common challenges in water management.



PENGELOLAAN SU
CITARUM RIVER MA

PROCENTAGE OF WATER OF INDONESIA'S TOTAL AVERAGE BY ISLAND

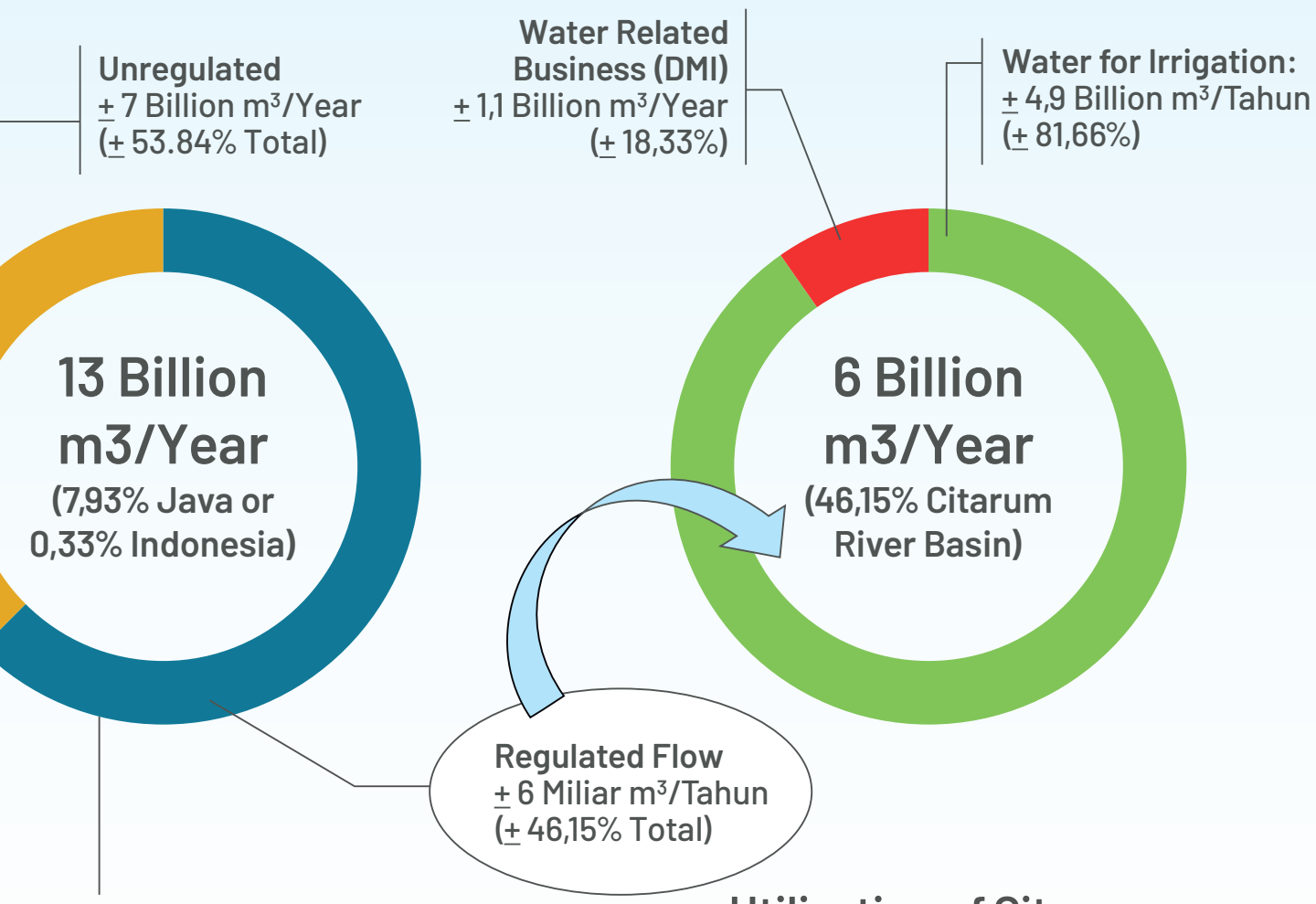


Surface Water in Indonesia

Total Available of Average Surface Water in Indonesia is 3.906,47 billion m3/year (Puslitbang SDA PUPR 2012)



UNGAI CITARUM JASA TIRTA II
ANAGEMENT BY JASA TIRTA II



Citarum Total Discharge

Total Flow : ± 13 Billion m³/Year
S. Citarum : ± 6 Billion m³/Year
Other Rivers : ± 7 Billion m³/Year or 7.93% Surface Water Availability in Java Island (164.00 Billion m³/Year)

Utilization of Citarum River Water

Perum Jasa Tirta II must innovate to increase the market value of the business portion (18,33%) while strengthening operations on the Social Aspect (81,66%).

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

1 PENJELASAN TEMA
Theme Explanation

4 TENTANG LAPORAN TAHUNAN PERUM JASA TIRTA II
About Perum Jasa Tirta II Annual Report

6 KESINAMBUNGAN TEMA
Continuity of Theme

8 IKHTISAR KINERJA KEUANGAN
Summary of financial performance

14 DAFTAR ISI
Table of Content

16 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)
Anti (Breeding Management System (SMAP)

18 KILAS KINERJA 2023
2023 Performance Highlight

20 PERISTIWA PENTING 2023
Important Events 2023

36 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certification

40 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

42 Identitas Perusahaan
Company Identity

49 Sekilas Perusahaan
A Glimpse Of The Company

52 Jejak Langkah
Milestone

54 Visi, Misi, Motto Dan Kompetensi Inti Perusahaan
Company Vision, Mission, Motto And Core Competencies

60 Bidang Usaha Perusahaan
Company Business Sector

68 LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

70 LAPORAN DEWAN PENGAWAS
Report of the Supervisory

80 LAPORAN DIREKSI
Board Of Directors Report

88 PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2022 PERUM JASA TIRTA II
Statement of the Supervisory Board and Directors regarding responsibility for Annual Report 2022 Perum Jasa Tirta II

89 Struktur Organisasi
Organizational Structure

90 Profil Dewan Pengawas
Profile of The Supervisory Board

100 Profil Direksi
Directors Profile

111 Profil Pejabat Eksekutifs
Executive Officer Profile

120 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion and Analysis

122 Tinjauan Makroekonomi Dan Industri
Macroeconomic And Industrial Review

126 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha
Operation Review per Business Segment

151 Kinerja Anak Perusahaan
Subsidiary Performance

153 Tinjauan Keuangan
Financial Overview

162 Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Statements Profit of Loss And Other Comprehensive Income

166 Kemampuan Memenuhi Kewajiban, Tingkat Kolektibilitas Piutang, Dan Profitabilitas Perusahaan
The Ability To Meet Obligations, Levels of Collectibility of Receivables, and Company Profitability

170 Struktur Modal Dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Capital Structure And Management Policy On Capital Structur

173 Prospek Usaha
Business Prospect

188 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Good Corporate Governance

192 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basic Application Of Corporate Governance

198 Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Perum Jasa Tirta II
Structure and Governance Mechanism of Perum Jasa Tirta II

199 Struktur Organ Perum Jasa Tirta II
Organs Structure Of Perum Jasa Tirta II

206 Penilaian Penerapan GCG
GCG Implementation Assessment

209 Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
Joint Discussion Meeting (RPB)

212 Dewan Pengawas
Supervisory Board

232 Direksi
Directors' Board

251 Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi
The Supervisory Board's Remuneration Policy

254 Organ Pendukung Dewan Pengawas
Supporting Organs Of The Supervisory Board

258 Komite Audit
Audit Committee

266 Komite Nominasi Dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

268 Komite Pemantau Manajemen Risiko
Risk Management Monitoring Committee

271 Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

278 Satuan Pengawasan Internal
Internal Supervision Unit

279 Struktur Organisasi Karyawan Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II
Employee Organizational Structure Perum Jasa Tirta II Supervision Unit

307 Manajemen Risiko
Risk Management

332 Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Gratification Control Guidelines

348 Program Anti Korupsi
Anti(Corruption Program

356 TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS
Business Support Review

358 Sumber Daya Manusia
Human Resources

359 Struktur Pengelola SDM
HR Management Structure

360 Komposisi Dan Jumlah Karyawan Perum Jasa Tirta II
Composition and number of employees of Jasa Jasa Tirta II

374 Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2022
Education and training in 2022

384 Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Jasa Tirta II Tahun 2023
Remuneration of Supervisory Board and Board of Directors of Jasa Tirta II in 2023

386 TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

391 Peta Strategi TI
IT Strategy Map

391 Rantai Nilai Pengelolaan Bisnis
Business Management Value Chain

400 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
Social and Environmental Responsibility

403 Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial
Commitment to social responsibility

404 7 Prinsip Utama CSR Berdasarkan ISO 26000
7 Main Principles Of CSR Based On ISO 26000

412 Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik Yang Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban
The scope of corporate social responsibility both which is an obligation and that exceeds obligations

413 Strategi Dan Program Kerja Dalam Dalam Upaya Stekeholders Engagement Dan Meningkatkan Nilai Stakeholders
Work strategies and programs in the Stekeholders Engagement effort and increase the value of stakeholders

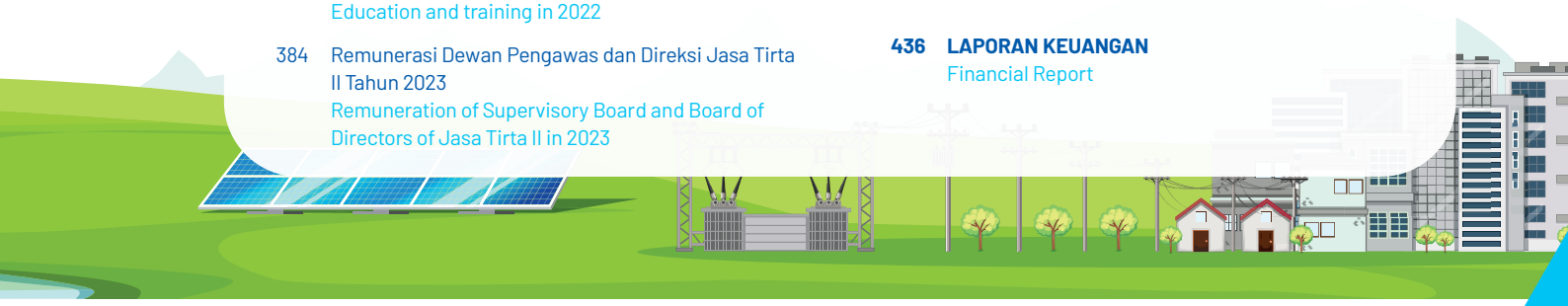
415 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Hak Asasi Manusia
Corporate Social Responsibility Related To Human Rights

418 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Dengan Operasi Yang Adil
Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations

421 Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
Commitment and Policy of Corporate Social Responsibility for Environment

427 Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup
Implementation Of Corporate Social Responsibility Initiatives In The Environmental Sector

436 LAPORAN KEUANGAN
Financial Report



Water Information System

SMART**WATER**OPERATION **MANAGEMENT**(SWOM)



Perum Jasa Tirta II conducts monitoring and evaluation of water resources with a telemetry system monitored from the Network Operation Center (NOC) with high accuracy and without geographical restrictions, so that management can make decisions effectively and efficiently.

Mechanical and Electrical SCADA of Supply System for Global City Jakarta



Realtime Monitoring
Actual Monitoring Data

Smart Access
Easy Access via Mobile Phone

Appraisal System
Instrument Condition Monitored

Easy Configuration
Tool configuration with softling feature

IoT & Big Data
Use of IoT instruments and large data collections

Cyber Security
Security of Information exchange from each component



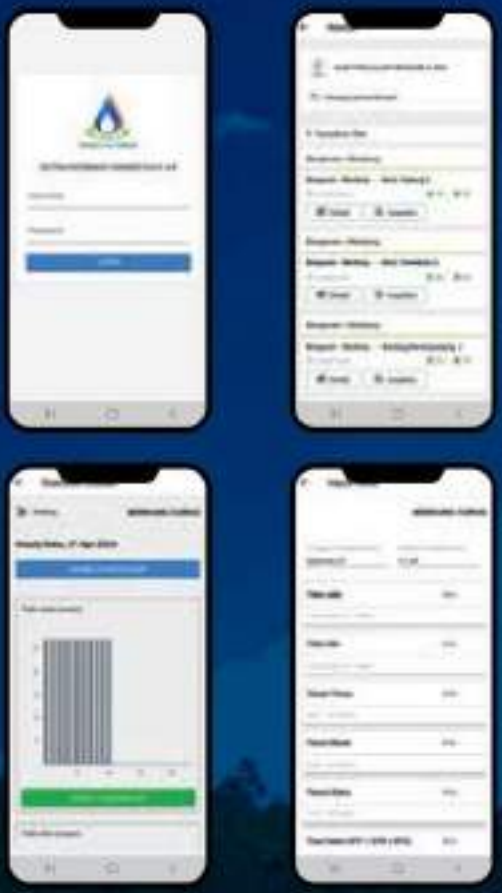
Realtime Monitoring
Actual Monitoring Data

Risk Mitigation
Provide early information if anomalies occur

Accuracy
Good accuracy of monitoring Dam movement

Monitoring Conducted
- Longitudinal Displacement
- Height Displacement
- Transverse Displacement

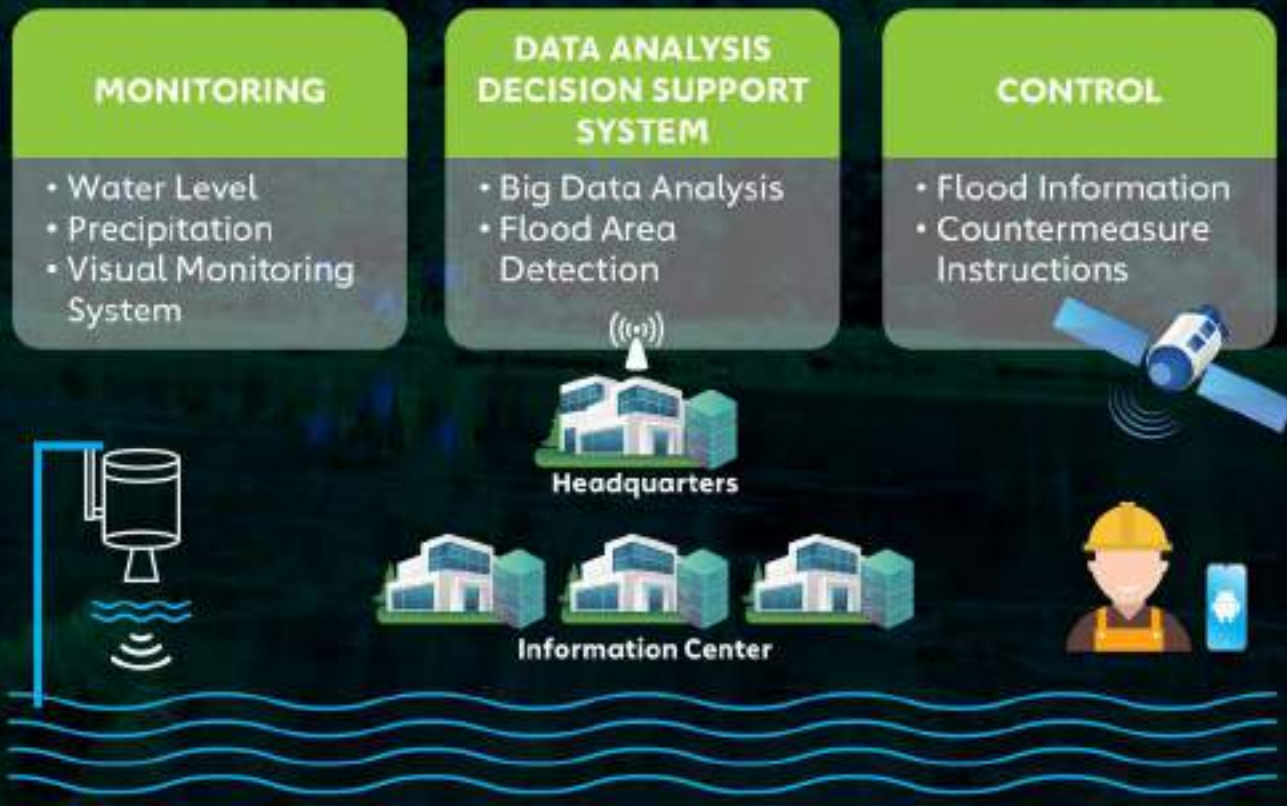
Water Information System



Industry 4.0

- Robotics
- Big Data
- Augmented Reality
- 3D Printing
- Cloud Computing
- Cybersecurity
- Internet of Things
- System Integration
- Simulation

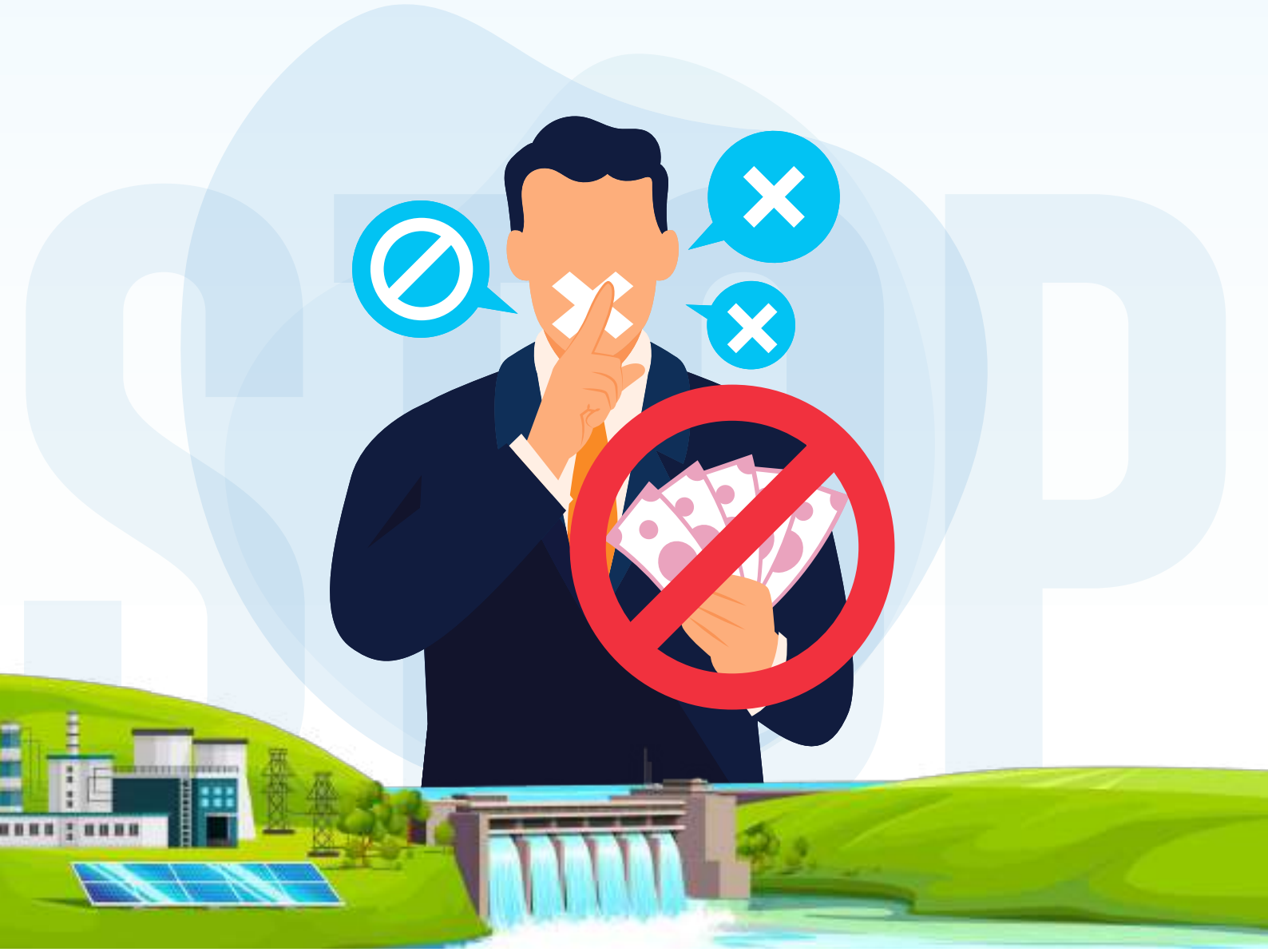
Perum Jasa Tirta II developed a water resources information system (SISDA), a website-based and mobile application with smartphones integrated with telemetry instrumentation. This strategic step underscores Jasa Tirta II's readiness to face the disruptive landscape of the Industrial Revolution 4.0.



Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Anti(Bribery Management System (SMAP)

Perum Jasa tirta II telah mengukuhkan komitmennya untuk menegakan Intregitas dan transparasi melalui Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa divisi dan unit Kerja Perum Jasa Tirta juga telah mempunyai Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pijakan Anti Penyuapan PJT II yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan dan meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen anti Penyuapan guna mencegah, medekteksi dan menangani penyuapan dilingkungan Perum Jasa Tirta II telah dilaksanakan pula *Assesment* kedua untuk tahun 2023 oleh *Sucofindo International Sertification Service*.

Perum Jasa Tirta II has confirmed its commitment to uphold integrity and transparency through the implementation and certification of ISO 37001: 2016 Anti(Bribery Management System (SMAP) in several divisions and work units Perum Jasa Tirta has also had Perum Jasa Tirta II Board of Directors Regulation concerning PJT II Anti(Bribery Policy which aims to provide a comprehensive overview in implementing and improving the effectiveness of the Anti(Bribery Management System in order to prevent, detect and handle bribery within Perum Jasa Tirta II has also carried out the second assessment for 2023 by Sucofindo International Certification Service.



SIPPID Mobile Mempermudah Informasi Dalam Genggaman

SIPPID Mobile Easy Information In The Hands

Perum Jasa Tirta II menghadirkan aplikasi yang membantu sebagai sarana layanan *online* bagi pemohon informasi public guna memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi secara cepat, mudah, tepat dan transparan dan sebagai salah satu inovasi pelaksanaan keterbukaan informasi public di PJT II.

Aplikasi SIPPID di rancang dengan tampilan yang mudah dipahami dan digunakan bagi pengunduhnya, tersedia berbagai menu yang diperuntukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik perusahaan. Aplikasi ini pun berkolaborasi dengan *influencer* local yang tersebar dibeberapa kota.

Perum Jasa Tirta II presents an application that helps as an online service facility for applicants for public information to make it easier for the public to access information quickly, easily, precisely and transparently and as one of the innovations in implementing public information disclosure at PJT II.

The SIPPID application is designed with a display that is easy to understand and use for downloaders, there are various menus that are intended for the public to obtain company public information. This application also collaborates with local influencers spread across several cities.

Scan disini / *Scan here:*

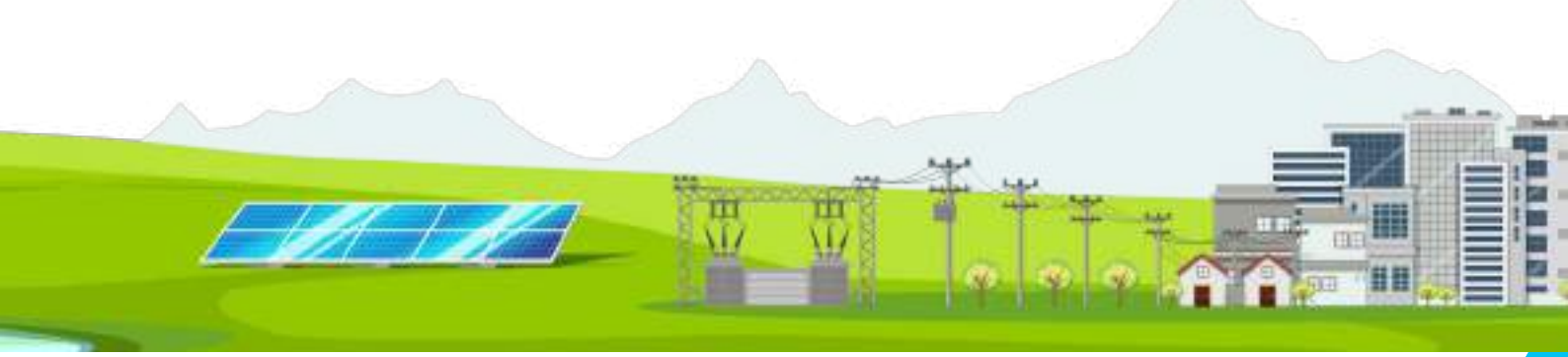
GET IT ON Google Play

Download on App Store



Seluruh pertanyaan dan masukan yang terangkum dalam lembar umpan balik dapat disampaikan kepada:
Seluruh pertanyaan dan masukan yang terangkum dalam lembar umpan balik dapat disampaikan kepada:

PERUM JASA TIRTA II
Sekretariat Perusahaan
Jl. Lurah Kawa No.1, Jatiluhur,
Purwakarta, Jawa Barat 41152
Tel (0264) 201972
Email : pjt2@jasatirta2.co.id




PERFOR
HIGHLIGHT
2023



KILAS KINERJA 2023

2023 Performance Highlight

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights

JANUARI / *JANUARY*



04 Januari / *January*

Jasa Tirta II mengawali Tahun 2023 dengan menggelar Doa Bersama di Kantor Pusat dan seluruh unit wilayah.

Jasa Tirta II started 2023 by holding a Joint Prayer at the Head Office and all regional units.



05 Januari / *January*

Jasa Tirta II bersinergi dengan Kementerian PUPR dan BBWS Citarum melaksanakan FGD membahas neraca ketersediaan air Wilayah Sungai Citarum di Graha Vidya, JVR.

Jasa Tirta II synergizes with the Ministry of PUPR and BBWS Citarum to conduct FGDs to discuss the water availability balance of the Citarum River Basin at Graha Vidya, JVR.



06 Januari / *January*

Direktur Utama Imam Santoso dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Anton Mardiyono ikut serta dalam kegiatan Jumat Menanam bersama Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

President Director Imam Santoso and Director of Operations and Maintenance Anton Mardiyono participated in the Friday Planting activity with Acting Governor of DKI Jakarta Heru Budi Hartono.



06 Januari / *January*

Penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS tentang Penataan Lahan Kolong Tol Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) Sepanjang Saluran Kalimalang di Wilayah Prov. DKI Jakarta.

Signing of Joint Agreement and PKS on Land Arrangement under the Bekasi Cawang Kampung Melayu (Becakayu) Toll Road Along the Kalimalang Canal in the DKI Jakarta Province.



09 Januari / *January*

Dalam rangka meningkatkan pelayanan air baku, Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja PAM Jaya ke Bendungan dan PLTA Ir. H. Djuanda.

In order to improve raw water services, Jasa Tirta II received a working visit from PAM Jaya to the Ir. H. Djuanda Dam and Hydroelectric Power Plant.



13 Januari / *January*

Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Banten dalam rangka mengetahui informasi, kegiatan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh Jasa Tirta II.

Jasa Tirta II received a working visit from the Banten Provincial DPRD in order to obtain information and tourism management activities carried out by Jasa Tirta II.



14-15 Januari / *January*

Jasa Tirta II sebagai tuan rumah ikut menyukseskan event ITB Jatiluhur International Triathlon 2023 yang diselenggarakan di Waduk Jatiluhur.

Jasa Tirta II as the host also contributed to the success of the ITB Jatiluhur International Triathlon 2023 event held at the Jatiluhur Reservoir.



14-15 Januari / *January*

Jasa Tirta II mengadakan talkshow mengenai cara menciptakan Produk UMKM yang berkualitas dan terstandarisasi pada gelaran ITB Jatiluhur International Triathlon 2023.

Jasa Tirta II held a talk show on how to create quality and standardized MSME products at the ITB Jatiluhur International Triathlon 2023.



16 Januari / *January*

Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja Direktorat Keamanan dan Sandi Industri BSSN RI sebagai tindaklanjut Assesment Cyber Security Maturity (CSM) oleh CSM BSSN RI ke Jasa Tirta II.

Jasa Tirta II received a working visit from the Directorate of Security and Industrial Cryptography of the BSSN RI as a follow-up to the Cyber Security Maturity (CSM) Assessment by the CSM BSSN RI to Jasa Tirta II.



17 Januari / *January*

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 03/KPTS/M/2023, Jasa Tirta II mendapatkan penugasan khusus sebagai pelaksana sebagian tugas PJPK pemerintah dengan badan usaha SPAM Regional Karian – Serpong.

Based on the Decree of the Minister of PUPR Number 03/KPTS/M/2023, Jasa Tirta II was given a special assignment as the executor of part of the government's PJPK duties with the Karian - Serpong Regional SPAM business entity.



18 Januari / *January*

Jasa Tirta II kembali menggiatkan implementasi AKHLAK Culture Journey membahas dan berdiskusi program kerja Implementasi core values AKHLAK BUMN Tahun 2023.

Jasa Tirta II is again intensifying the implementation of AKHLAK Culture Journey discussing and discussing the work program for the Implementation of AKHLAK BUMN core values in 2023.



19 Januari / *January*

Jasa Tirta II hadir dalam Focus Group Discussion Urgensi Green Data Center pada Waduk Jatiluhur Sebagai Upaya Dekarbonisasi Sektor Teknologi Informasi.

Jasa Tirta II attended the Focus Group Discussion on the Urgency of Green Data Centers at the Jatiluhur Reservoir as an Effort to Decarbonize the Information Technology Sector.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



19 Januari / *January*

Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Andi Islamuddin beserta anggota tim lainnya dalam rangka study tiru kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi.

Jasa Tirta II received a working visit from the Regional Secretary of Bone Regency, South Sulawesi Province, Mr. Andi Islamuddin and other team members in the context of a study tour of irrigation operation and maintenance activities.



25 Januari / *January*

Dalam rangka memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) Nasional Tahun 2023, Jasa Tirta II menggelar Apel K3 Nasional.

In order to commemorate the 2023 National Occupational Health and Safety (K3) Month, Jasa Tirta II held a National K3 Roll Call.



26 Januari / *January*

Ketua Dewan Pengawas Jasa Tirta II Kelik Wirawan Wahyu Widodo beserta anggota Dewan Pengawas melakukan kunjungan kerja ke wilayah kerja Unit Wilayah I Bekasi.

Chairman of the Jasa Tirta II Supervisory Board, Kelik Wirawan Wahyu Widodo and members of the Supervisory Board made a working visit to the work area of Unit Region I Bekasi.

FEBRUARI / *FEBRUARY*



01 Februari / *February*

Jasa Tirta II mengadakan sosialisasi implementasi aplikasi E-Governance Risk Compliance di Kantor Pusat Jasa Tirta II, Jatiluhur – Purwakarta.

Jasa Tirta II held a socialization of the implementation of the E-Governance Risk Compliance application at the Jasa Tirta II Head Office, Jatiluhur - Purwakarta



07 Februari / *February*

Seiring dengan penambahan wilayah kerja dan penugasan dari Kementerian PUPR, Jasa Tirta II membentuk unit khusus untuk mengelola setiap wilayah sungai perluasan dan unit kerja terkait SPAM Karian.

Along with the addition of work areas and assignments from the Ministry of PUPR, Jasa Tirta II formed a special unit to manage each expansion river area and work units related to SPAM Karian.



08 Februari / *February*

Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja Tim Korean International Cooperation Agency (KOICA) dalam rangka membahas mengenai pengembangan Flood Forecasting and Warning System (FFWS) di Sungai Citarum fase ke-2.

Jasa Tirta II received a working visit from the Korean International Cooperation Agency (KOICA) Team in order to discuss the development of the Flood Forecasting and Warning System (FFWS) in the Citarum River phase 2.



13 Februari / *February*

Jasa Tirta II Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001:2015 yang di hadiri oleh Para Direksi, BOD-1 dan BOD-2 dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

Jasa Tirta II Conducted an ISO 9001:2015 Management Review Meeting attended by the Board of Directors, BOD-1 and BOD-2 with the aim of evaluating the company's performance.



15 Februari / *February*

Jasa Tirta II yang diwakili oleh Direktur Utama Imam Santoso dan Direktur Operasional dan Pemeliharaan Bapak Anton Mardiyono menghadiri acara Kick Off Meeting 10th World Water Forum (1st Stakeholders Meeting) di Jakarta Convention Center (JCC), Indonesia.

Jasa Tirta II, represented by President Director Imam Santoso and Director of Operations and Maintenance Mr. Anton Mardiyono, attended the Kick Off Meeting of the 10th World Water Forum (1st Stakeholders Meeting) at the Jakarta Convention Center (JCC), Indonesia.



17 Februari / *February*

Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono mendukung dan hadir pada forum High-Level Meeting on Water Resources Innovation.

President Director of Jasa Tirta II Imam Santoso and Director of Operations and Maintenance of Jasa Tirta II Anton Mardiyono supported and attended the High-Level Meeting on Water Resources Innovation forum.



21 Februari / *February*

Seluruh Insan Jasa Tirta II Bergerak Serentak Bersihkan Sampah dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional.

All Jasa Tirta II Personnel Move Simultaneously to Clean Up Garbage in Commemoration of National Garbage Awareness Day.



21-23 Februari / *February*

Sebanyak 8 calon karyawan Perum Jasa Tirta II melakukan Company Tour berupa Walkthrough ke seluruh wilayah kerja Jasa Tirta II dari hulu hingga Hilir.

A total of 8 prospective employees of Perum Jasa Tirta II conducted a Company Tour in the form of a Walkthrough to all Jasa Tirta II work areas from upstream to downstream.



26 Februari / *February*

Jasa Tirta II berkolaborasi dengan SIG dan Jasa Marga mensukseskan kegiatan Jalan Sehat Bersama BUMN di Kota Bandar Lampung yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi Lampung Chusnunia Chalim, Direksi SIG, dan Direksi Semen Baturaja.

Jasa Tirta II collaborated with SIG and Jasa Marga to make the Joint Healthy Walk with BUMN in Bandar Lampung City a success, which was opened directly by the Deputy Governor of Lampung Province Chusnunia Chalim, the Board of Directors of SIG, and the Board of Directors of Semen Baturaja.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights

MARET / *MARCH*



27-28 Februari / *February*

Jasa Tirta II melaksanakan audit Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016 untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Anti Penyuapan telah dilaksanakan secara efektif.

Jasa Tirta II conducted an audit of the Anti-Bribery Management System Surveillance (SMAP) ISO 37001: 2016 to ensure that the Anti-Bribery Management System has been implemented effectively.



28 Februari / *February*

Unit PLTA Jasa Tirta II meraih penghargaan nihil kecelakaan kerja (zero accident) pada Tahun 2022 dalam acara Fire Safety Festival 2023 yang diselenggarakan Pemkab Purwakarta.

Jasa Tirta II Hydroelectric Power Plant Unit won the zero accident award in 2022 at the 2023 Fire Safety Festival held by the Purwakarta Regency Government.



01 Maret / *March*

Jasa Tirta II bersama Network of Asian River Basin Organization (NARBO) menggelar webinar internasional membahas terkait "The Role Water Related Infrastructure for Mitigation Disaster".

Jasa Tirta II together with the Network of Asian River Basin Organization (NARBO) held an international webinar discussing "The Role of Water Related Infrastructure for Mitigating Disasters".



01 Maret / *March*

Jasa Tirta II diwakili oleh General Manajer Wilayah II Resky Heraveno menghadiri rapat koordinasi penanganan pasca bencana dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Jasa Tirta II represented by General Manager of Region II Resky Heraveno attended the coordination meeting for post-disaster management and mitigation of hydrometeorological disasters.



02 Maret / *March*

Jasa Tirta II meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan transaksi tertinggi ke-3 pada aplikasi PaDi UMKM pada kegiatan Business Matching PaDi UMKM.

Jasa Tirta II won an award as the company with the 3rd highest transaction on the PaDi UMKM application in the PaDi UMKM Business Matching activity.



04 Maret / *March*

Anggota Dewan Pengawas Jasa Tirta II Romy Marcandi, Nuning Sri Rejeki Wulandari dan Fatkhurohman Taufik melakukan kunjungan kerja ke Bendung Curug, SPAM Curug Kab. Karawang serta peninjauan aset optimalisasi lahan.

Members of the Jasa Tirta II Supervisory Board Romy Marcandi, Nuning Sri Rejeki Wulandari and Fatkhurohman Taufik conducted a working visit to the Curug Dam, SPAM Curug, Karawang Regency and reviewed land optimization assets.



05 Maret / *March*

Ribuan masyarakat Provinsi Jawa Tengah menyemarakkan kegiatan Jalan Sehat Bersama BUMN yang diselenggarakan oleh sinergi BUMN termasuk Jasa Tirta II.

Thousands of people in Central Java Province enlivened the Joint BUMN Healthy Walk activity organized by BUMN synergy including Jasa Tirta II.



07-10 Maret / *March*

Jasa Tirta II bersama PT. Pegadaian, PT. AirNav Indonesia siap mengajak Relawan Bakti BUMN terlibat langsung dalam program pengolahan eceng gondok di Waduk Jatiluhur.

Jasa Tirta II together with PT. Pegadaian, PT. AirNav Indonesia is ready to invite BUMN Bakti Volunteers to be directly involved in the water hyacinth processing program at the Jatiluhur Reservoir.



06 Maret / *March*

Rapat Koordinasi pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum bertujuan untuk membahas rencana kerja operasi dan evaluasi 3 waduk Kaskade Citarum meliputi Saguling, Cirata dan Jatiluhur.

The Coordination Meeting for the operation of the Citarum Cascade Dam aims to discuss the operational work plan and evaluation of the 3 Citarum Cascade reservoirs including Saguling, Cirata and Jatiluhur.



09 Maret / *March*

Direktur Utama Imam Santoso didampingi Ketua Koperasi Karyawan Jasa Tirta II Karya Bhakti Raharja (KBR) Andriyanto meresmikan unit bisnis baru yakni "Pertashop" dan Pembangunan Pencucian Kendaraan Bermotor.

President Director Imam Santoso accompanied by the Chairman of the Jasa Tirta II Karya Bhakti Raharja (KBR) Employee Cooperative Andriyanto inaugurated a new business unit, namely "Pertashop" and the Construction of a Motor Vehicle Wash.



10-12 Maret / *March*

Jasa Tirta II berpartisipasi untuk mendukung UMKM dalam "Pameran Terintegrasi" yang diadakan di Ciwalk - Bandung untuk memperluas akses pasar UMKM serta promosi produk.

Jasa Tirta II participated in supporting MSMEs in the "Integrated Exhibition" held at Ciwalk - Bandung to expand MSME market access and product promotion.



14 Maret / *March*

Jasa Tirta II menerima field trip dan peninjauan Dharma Wanita PAM Jaya yang diterima oleh Ketua Srikandi Jasa Tirta II Endang Budi Utami di Istora Cafe & Resto, Kawasan Jatiluhur Valley & Resort.

Jasa Tirta II received a field trip and review of the Dharma Wanita PAM Jaya which was received by the Chairperson of Srikandi Jasa Tirta II Endang Budi Utami at Istora Cafe & Resto, Jatiluhur Valley & Resort Area.



15 Maret / *March*

Jasa Tirta II melaksanakan Sosialisasi RKAP Tahun 2023 untuk memudahkan seluruh unit kerja mengetahui target yang harus harus dicapai yang tepat sasaran dan sesuai dengan skala prioritas program.

Jasa Tirta II carried out the Socialization of the 2023 RKAP to make it easier for all work units to know the targets that must be achieved that are right on target and in accordance with the program priority scale.



15 Maret / *March*

Jasa Tirta II meraih prestasi dengan memperoleh penghargaan kategori Program Pengembangan UMKM Terbaik ke-3 dalam ajang Anugerah BUMN ke-12 yang diselenggarakan oleh BUMN Track.

Jasa Tirta II achieved an achievement by winning the 3rd Best MSME Development Program category award in the 12th BUMN Award event organized by BUMN Track.



15 Maret / *March*

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono didampingi Sekretaris Perusahaan dan General Manajer Wilayah VII melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung di Provinsi Lampung.

Director of Operations and Maintenance of Jasa Tirta II Anton Mardiyono accompanied by the Corporate Secretary and General Manager of Region VII made a working visit to the Mesuji Sekampung River Basin Center (BBWS) in Lampung Province.



16-17 Maret / *March*

Jasa Tirta II melaksanakan workshop & training pengelolaan risiko pada Sub Klaster Pengelolaan Air Holding Danareksa untuk menyelaraskan strategi risiko.

Jasa Tirta II conducted a risk management workshop & training at the Danareksa Water Holding Management Sub Cluster to align risk strategies.



18 Maret / *March*

Jasa Tirta II melaksanakan pelatihan pengembangan dan pemanfaatan limbah ternak sapi menjadi biogas, peternakan cacing dan pembuatan pupuk kepada 20 peserta di Kampung Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Jasa Tirta II conducted training on the development and utilization of cattle waste into biogas, worm farming and fertilizer production for 20 participants in Pulosari Village, Pangalengan District, Bandung Regency.



20 Maret / *March*

Jasa Tirta II melaksanakan Kick Off Meeting Penyusunan FS Pengembangan SPAM Kota Bandung Terintegrasi.

Jasa Tirta II conducted a Kick Off Meeting for the Preparation of the Integrated Bandung City SPAM Development FS.



30 Maret / *March*

Jasa Tirta II berpartisipasi dan menghadiri kegiatan workshop bertajuk "Menggali Potensi Pemanfaatan Gulma di Saluran Kalimalang Untuk Pemberdayaan Masyarakat".

Jasa Tirta II participated in and attended a workshop entitled "Exploring the Potential of Weed Utilization in the Kalimalang Channel for Community Empowerment".

APRIL / *APRIL*



03 April / *April*

Jasa Tirta II diwakili Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II Dikdik Permadi Yoffana beserta melaksanakan Studi Banding Kerjasama Hotel dan Aset bertempat di Sari Hotel Kamboti, Kota Bandung.

Jasa Tirta II was represented by Jasa Tirta II Business Development Director Dikdik Permadi Yoffana and conducted a Comparative Study of Hotel and Asset Cooperation at the Sari Hotel Kamboti, Bandung City.



03 April / *April*

Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja ASDP Ferry Indonesia hari ini yang di terima langsung oleh Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko Indriani Widiastuti bertujuan untuk studi banding terkait dengan Pengelolaan Piutang.

Jasa Tirta II received a working visit from ASDP Ferry Indonesia today which was received directly by the Director of Finance, HR and Risk Management Indriani Widiastuti for a comparative study related to Accounts Receivable Management.



04 April / *April*

Jasa Tirta II melakukan kerjasama strategis terkait rencana kerja sama pengembangan kawasan Cikarang International City (Cinity) dengan PT. Sri Pertiwi Sejati (SPS) Agus Suryono.

Jasa Tirta II conducted a strategic collaboration related to the development cooperation plan for the Cikarang International City (Cinity) area with PT. Sri Pertiwi Sejati (SPS) Agus Suryono.



06 April / *April*

Direksi dan Dewan Pengawas Jasa Tirta II mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri BUMN terbaru yang digelar oleh Kementerian BUMN bertujuan untuk memberikan informasi dan mengoptimalisasi penerapan Peraturan Menteri BUMN.

The Board of Directors and Supervisory Board of Jasa Tirta II attended the socialization of the latest Regulation of the Minister of SOEs held by the Ministry of SOEs with the aim of providing information and optimizing the implementation of the Regulation of the Minister of SOEs.



10 April / *April*

Direktur Pengembangan Usaha Dikdik Permadi Yoffana menerima kunjungan kerja Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon membahas potensi kerjasama pengembangan SPAM.

Director of Business Development Dikdik Permadi Yoffana received a working visit from Perumda Air Minum Tirta Jati, Cirebon Regency to discuss the potential for cooperation in developing SPAM.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



28 Maret - 13 April / *March - April*

Pada bulan suci Ramadhan 1444 H, Jasa Tirta II membagikan 1000 paket sembako untuk masyarakat dan santuan kepada anak yatim yang dilakukan secara bertahap dan bergantian di seluruh wilayah kerja.

In the holy month of Ramadhan 1444 H, Jasa Tirta II distributed 1000 basic food packages to the community and donations to orphans which were carried out in stages and alternately throughout the work area.



18-19 April / *April*

Jasa Tirta II mendukung program Mudik Gratis BUMN Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dengan memberikan kesempatan mudik gratis bagi masyarakat melalui 4 rute perjalanan.

Jasa Tirta II supports the 2023 BUMN Free Homecoming program organized by the Ministry of BUMN by providing free homecoming opportunities for the community through 4 travel routes.

MEI / *MAY*



05 Mei / *May*

Jasa Tirta II resmi menempati kantor wilayah baru di Kota Serang Provinsi Banten sebagai salah satu progres tindaklanjut dari perluasan wilayah kerja Perusahaan untuk mengelola Wilayah Sungai (WS) Ciujung, Cidanau, Cidurian.

Jasa Tirta II officially occupies a new regional office in Serang City, Banten Province as one of the follow-up progress of the expansion of the Company's work area to manage the Ciujung, Cidanau, Cidurian River Areas (WS).



12 Mei / *May*

Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja Pangdam III/Siliwangi dan Ketua Persit KCK PD III/Siliwangi beserta rombongan di Waduk Jatiluhur dalam rangka peninjauan Program Citarum Harum.

Jasa Tirta II received a working visit from the Pangdam III/Siliwangi and the Chairperson of Persit KCK PD III/Siliwangi and their entourage at the Jatiluhur Reservoir in order to review the Citarum Harum Program.



16 Mei / *May*

Direksi mendukung penuh dan hadir dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Lanjutan dengan tema The Future of Data Centre: Green Energy and Its Benefits Jasa Studi Kelayakan Multi Energi Baru dan Terbarukan untuk Green Data Center di Jatiluhur.

The Board of Directors fully supports and is present at the Continued Forum Group Discussion (FGD) with the theme The Future of Data Center: Green Energy and Its Benefits Feasibility Study Services for New and Renewable Multi Energy for Green Data Center in Jatiluhur.



17 Mei / *May*

Jasa Tirta II bersama Perumda Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon melakukan rencana kerjasama penyediaan air curah di Kabupaten Cirebon untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

Jasa Tirta II together with Perumda Air Minum Tirta Jati Cirebon Regency carried out a cooperation plan to provide bulk water in Cirebon Regency to meet the clean water needs of the community.



15-22 Mei / *May*

Jasa Tirta II melaksanakan pelatihan kehumasan yang diikuti oleh 10 peserta ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi karyawan bidang komunikasi khususnya terkait kehumasan.

Jasa Tirta II conducted public relations training attended by 10 participants with the aim of improving the competence of employees in the communications sector, especially related to public relations.



19 Mei / *May*

Ketua Dewan Pengawas Jasa Tirta II Kelik Wirawan Wahyu Widodo beserta anggota Dewan Pengawas didampingi Direktur KSMR melakukan kunjungan kerja ke Bendungan Jatigede Unit Wilayah V di Kabupaten Sumedang Jawa Barat.

Chairman of the Jasa Tirta II Supervisory Board Kelik Wirawan Wahyu Widodo and members of the Supervisory Board accompanied by the Director of KSMR conducted a working visit to the Jatigede Dam Unit Region V in Sumedang Regency, West Java.



29 Mei / *May*

Monitoring Implementasi Roadmap Human Capital Triwulan 1 Tahun 2023 bersama dengan Anggota Holding BUMN Danareksa.

Monitoring the Implementation of the Human Capital Roadmap for Quarter 1 of 2023 together with Members of the Danareksa BUMN Holding.

JUNI / *JUNE*



1-4 Juni / *June*

Jatiluhur Valley Resort (JVR) berkolaborasi dengan Panorama Group dan HIG menampilkan program wisata Jatiluhur Istimewa pada pameran Indonesia Outdoord Festival (Indofest) 2023.

Jatiluhur Valley Resort (JVR) collaborated with Panorama Group and HIG to present the Jatiluhur Istimewa tourism program at the 2023 Indonesia Outdoord Festival (Indofest) exhibition.



05 Juni / *June*

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Anton Mardiyono menyampaikan pembahasan mengenai "Peran Strategis Dunia Usaha Pasca Program Citarum Harum" pada acara Focus Group Discussion (FGD) Keberlanjutan Citarum Harum.

Director of Operations and Maintenance Anton Mardiyono delivered a discussion on "The Strategic Role of the Business World Post Citarum Harum Program" at the Focus Group Discussion (FGD) Sustainability of Citarum Harum.



5-6 Juni / *June*

Guna mendorong peningkatan pemanfaatan aset dan properti perusahaan, Jasa Tirta II menggelar pelatihan strategi optimalisasi aset dan properti bagi tim pengelolaan aset.

In order to encourage increased utilization of company assets and properties, Jasa Tirta II held asset and property optimization strategy training for the asset management team.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



08 Juni / *June*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti melakukan kunjungan kerja ke meninjau Kantor Seksi Cipamingkis, Unit Wilayah I dalam rangka mensurvey dan memberikan arahan untuk peningkatan optimalisasi aset yang telah disertifikasi.

Director of Finance, HR and Risk Management of Jasa Tirta II Indriani Widiastuti conducted a working visit to review the Cipamingkis Section Office, Regional Unit I in order to survey and provide direction for increasing the optimization of certified assets.



16 Juni / *June*

Plt. Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II Anton Mardiyono melakukan kunjungan kerja ke PT. Kawasan Industri Medan dalam rangka peninjauan penggunaan air bawah tanah di Kawasan Industri Medan.

Acting Director of Business Development of Jasa Tirta II Anton Mardiyono conducted a working visit to PT. Kawasan Industri Medan in order to review the use of groundwater in the Medan Industrial Area.



16 Juni / *June*

Jasa Tirta II menggelar sharing session bertajuk "Implementasi Kebijakan Akuntansi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan membahas mengenai PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang disampaikan oleh Sri Yanto.

Jasa Tirta II held a sharing session entitled "Implementation of Accounting Policies in the Preparation of Company Financial Reports discussing PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers presented by Sri Yanto.



20 Juni / *June*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Indriani Widiastuti melakukan penandatangan platform Anaplan sebagai media penyampaian data dari seluruh BUMN kepada Kementerian BUMN.

Director of Finance, HR and Risk Management Indriani Widiastuti signed the Anaplan platform as a medium for delivering data from all BUMN to the Ministry of BUMN.



20 Juni / *June*

Jasa Tirta II hadir dan mendukung Expo Pengawasan Intern yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tema "Inovasi dan Kolaborasi Pengawasan Adaptif untuk Pertumbuhan Berkelanjutan".

Jasa Tirta II attended and supported the Internal Supervision Expo organized by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with the theme "Innovation and Collaboration of Adaptive Supervision for Sustainable Growth".



21 Juni / *June*

Jasa Tirta II memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar melalui program "Jasa Tirta II Berbagi dan Bazar UMKM" dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian.

Jasa Tirta II provided assistance to the surrounding community through the "Jasa Tirta II Berbagi and UMKM Bazaar" program in order to commemorate Krida Pertanian Day.



22 Juni / *June*

Jasa Tirta II Bersama dengan Panorama Group menandatanani MOU Pengembangan Ekowisata Pamundingan yang diwakili oleh Plt. Direktur Pengembangan Usaha Anton Mardiono dan Direktur Utama Panorama Group Satrijanto Tirtawisata.

Jasa Tirta II together with Panorama Group signed the MOU for the Development of Pamundingan Ecotourism represented by Plt. Director of Business Development Anton Mardiono and President Director of Panorama Group Satrijanto Tirtawisata.



22 Juni / *June*

Jasa Tirta II telah diakui atas Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) berkat keberhasilan dalam melaksanakan Audit Eksternal SMK3 tahun 2022.

Jasa Tirta II has been recognized for its Occupational Safety and Health Management System (SMK3) thanks to its success in implementing the SMK3 External Audit in 2022.



26 Juni / *June*

Jasa Tirta II, dalam upaya memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan, telah melibatkan Babinsa, BimasPol, dan Petugas Pintu Air SDA dalam aksi penanggulangan pembersihan sampah di Desa Sindangmulya, Cibarusah, Bekasi.

Jasa Tirta II, in an effort to improve and maintain environmental cleanliness, has involved Babinsa, BimasPol, and SDA Water Gate Officers in the action of cleaning up garbage in Sindangmulya Village, Cibarusah, Bekasi.



26 Juni / *June*

General Manajer Wilayah III Jasa Tirta II Fembry Setyawan menerima kunjungan kerja Anggota DPR RI Dedi Wahidi di saluran irigasi yang berada di Kecamatan Patrol dan sekitarnya.

General Manager of Region III Jasa Tirta II Fembry Setyawan received a working visit from Member of the Indonesian House of Representatives Dedi Wahidi at the irrigation channel in Patrol District and its surroundings.



27 Juni / *June*

Jasa Tirta II menggelar kegiatan Sosialisasi Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) untuk meningkatkan edukasi karyawan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Jasa Tirta II held a Socialization activity for the Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance to improve employee education about the Guidelines for Good Corporate Governance.



Juni / *June*

Untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang sumber daya air (SDA), Jasa Tirta II melaksanakan sertifikasi ahli teknik bendungan besar yang diikuti 29 peserta.

To increase the company's credibility as one of the BUMN engaged in the water resources (SDA) sector, Jasa Tirta II held a certification of large dam engineering experts which was attended by 29 participants.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights

JULI / *JULY*



05 Juli / *July*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti melakukan kunjungan kerja dalam rangka meninjau lapangan aset lahan PJT II yang terdampak pembangunan Jalan Tol Cipularang.

Director of Finance, HR and Risk Management of Jasa Tirta II Indriani Widiastuti conducted a working visit to review the field of PJT II land assets affected by the construction of the Cipularang Toll Road.



06 Juli / *July*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Indriani Widiastuti hadir berdialog lapang dengan Pendiri Kampung Ilmu Imam B. Prasodjo, Ph. D beserta anggota Kampung Ilmu di Desa Cisarua, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.

Director of Finance, HR and Risk Management Indriani Widiastuti attended a field dialogue with the Founder of Kampung Ilmu Imam B. Prasodjo, Ph. D along with members of Kampung Ilmu in Cisarua Village, Tegalwaru District, Purwakarta Regency, West Java.



11 Juli / *July*

Jasa Tirta II melaksanakan rangkaian acara penyusunan Laporan Manajemen Risiko RKT II Tahun 2023 yang di hadiri oleh Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko dan seluruh Risk Owner.

Jasa Tirta II held a series of events for the preparation of the 2023 RKT II Risk Management Report which was attended by the Directors of Finance, HR, and Risk Management and all Risk Owners.



12 Juli / *July*

Jasa Tirta II menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2023 yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan menciptakan pelaksanaan pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar instansi/ entitas Pengelola SDA di Wilayah Kerja PJT II.

Jasa Tirta II held a 2023 Water Resources Management Coordination Meeting aimed at implementing and creating the implementation of the division of authority and responsibility between agencies/entities that manage natural resources in the PJT II Work Area.



14-15 Juli / *July*

Dalam rangka rencana kerjasama pengelolaan kawasan wisata Jatiluhur dengan PT. Panorama, Ketua Dewan Pengawas Kelik Wirawan Wahyu Widodo beserta anggota Dewas dan Direksi melakukan kunjungan kerja ke PT. Destinasi Tirta Nusantara.

In the context of the planned cooperation in managing the Jatiluhur tourist area with PT. Panorama, Chairman of the Supervisory Board Kelik Wirawan Wahyu Widodo along with members of the Supervisory Board and the Board of Directors made a working visit to PT. Destinasi Tirta Nusantara.



Juli / *July*

Jasa Tirta II menggelar Employee Gathering yang diikuti seluruh karyawan Jasa Tirta II di Cikole, Lembang Kota Bandung.

Jasa Tirta II held an Employee Gathering attended by all Jasa Tirta II employees in Cikole, Lembang, Bandung City.



26 Juli / *July*

Guna meningkatkan pemahaman mengenai implementasi Pajak Air Permukaan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jasa Tirta II menggelar focus group discussion (FGD) dengan topik "Pajak Air Permukaan dalam Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I sebagai Proyek Strategis Nasional".

In order to improve understanding regarding the implementation of Surface Water Tax in the West Java Province, Jasa Tirta II held a focus group discussion (FGD) with the topic "Surface Water Tax in the Jatiluhur I Regional SPAM KPBU Project as a National Strategic Project".



27 Juli / *July*

Dalam rangka memperingati Hari Sungai Nasional, Jasa Tirta II mendukung dan ikut terlibat aktif dalam kegiatan susur dan bersih-bersih Sungai sebagai salah satu upaya untuk merevitalisasi sungai-sungai yang rusak dan tercemar di Indonesia.

In order to commemorate National River Day, Jasa Tirta II supports and is actively involved in river tracing and cleaning activities as an effort to revitalize damaged and polluted rivers in Indonesia.



31 Juli / *July*

Direktur Operasi dan Pemeliharaan Anton Mardiyono menerima kunjungan kerja Danrem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) dan Ketua Persit KCK Koorcab Rem 063 PD III/Slw dengan meninjau lapangan tembak Kodim 0619/Pwk.

Director of Operations and Maintenance Anton Mardiyono received a working visit from Danrem 063/Sunan Gunung Jati (SGJ) and the Head of Persit KCK Koorcab Rem 063 PD III/Slw by reviewing the Kodim 0619/Pwk shooting range.



31 Juli / *July*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Indriani Widiastuti menyerahkan petikan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan kepada 8 (delapan) Calon Karyawan hasil rekrutmen bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Director of Finance, HR and Risk Management Indriani Widiastuti handed over excerpts of the Employee Appointment Decree to 8 (eight) Prospective Employees as a result of joint recruitment with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI).

AGUSTUS / *AUGUST*



01-02 August / *August*

Jasa Tirta II melakukan sinkronisasi dan evaluasi Program Kerja Tahun 2023 melalui kegiatan Rapat Kerja untuk mengevaluasi dan penguatan program kerja yang sudah dan belum terlaksana selama Tahun 2023.

Jasa Tirta II synchronizes and evaluates the 2023 Work Program through a Work Meeting to evaluate and strengthen work programs that have and have not been implemented during 2023.



07 August / *August*

Direktur Utama Imam Santoso memimpin dan membuka Upacara Peringatan HUT ke-56 Jasa Tirta II yang mengusung tema "Terus Maju Untuk Negeriku".

President Director Imam Santoso led and opened the 56th Anniversary Commemoration Ceremony of Jasa Tirta II with the theme "Keep Moving Forward for My Country".

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



07 August / *August*

Dalam rangka mendukung perfilman nasional produksi BUMN, Jasa Tirta II menggelar nonton bersama film "Kutukan Peti Mati" yang diproduksi oleh PT. Balai Pustaka.

In order to support national films produced by BUMN, Jasa Tirta II held a joint screening of the film "Kutukan Peti Mati" produced by PT. Balai Pustaka.



08 August / *August*

Direktur Utama Imam Santoso didampingi Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono menerima kunjungan kerja Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia Utilitas dalam rangka silaturahmi dan penjajakan potensi kerjasama.

President Director Imam Santoso accompanied by the Director of Operations and Maintenance of Jasa Tirta II Anton Mardiyono received a working visit from the President Director of PT. Pupuk Indonesia Utilities in order to foster friendship and explore potential cooperation.



10 August / *August*

Direksi Jasa Tirta II melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Purwakarta yang diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta Hj. Rohayatie, S.H., M.H.

The Board of Directors of Jasa Tirta II conducted a working visit to the Purwakarta District Attorney's Office which was received by the Head of the Purwakarta District Attorney's Office, Hj. Rohayatie, S.H., M.H.



10 August / *August*

Jasa Tirta II kembali meraih penghargaan TJSL & CSR Award Tahun 2023 Pilar Lingkungan kategori Platinum karena berhasil menerapkan Program Pengolahan Limbah Eceng Gondok di Waduk Jatiluhur untuk kelestarian lingkungan dan mendukung bisnis perusahaan.

Jasa Tirta II again won the 2023 TJSL & CSR Award for the Environmental Pillar in the Platinum category for successfully implementing the Water Hyacinth Waste Processing Program in the Jatiluhur Reservoir for environmental sustainability and supporting the company's business.



14 August / *August*

Dharma Wanita Jasa Tirta II menyalurkan bantuan berupa santunan dan peralatan sekolah kepada 30 Anak Yatim dan 700 paket sembako untuk pensiunan Jasa Tirta II.

Dharma Wanita Jasa Tirta II distributes assistance in the form of compensation and school equipment to 30 orphans and 700 basic food packages for Jasa Tirta II retirees.



16 August / *August*

Jasa Tirta II melakukan FGD membahas rencana pengembangan SPAM Kota Bandung Terintegrasi untuk membahas kajian rencana pengembangan SPAM Kota Bandung Terintegrasi dengan kapasitas 3.500 liter per detik melalui kerjasama BUMN dan BUMD Kota Bandung.

Jasa Tirta II conducts FGD to discuss the development plan for the Integrated Bandung City SPAM to discuss the study of the development plan for the Integrated Bandung City SPAM with a capacity of 3,500 liters per second through cooperation between BUMN and BUMD of Bandung City.



17 August / *August*

Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78 Jasa Tirta II melakukan upacara hari Kemerdekaan.

In the framework of the 78th Independence Day of the Republic of Indonesia, Jasa Tirta II held an Independence Day ceremony.



29 August / *August*

Jasa Tirta II menggelar Jalan Santai bertajuk "Grateful Pathway" yang diikuti sekitar 4000 masyarakat yg terdiri dari karyawan dan keluarga, purnabhakti dan masyarakat terlihat senang dan memadati rute jalan santai yang start dari Ghra Vidya dan finish di Jatiluhur Water World.

Jasa Tirta II held a Fun Walk entitled "Grateful Pathway" which was attended by around 4000 people consisting of employees and their families, retirees and the community looked happy and filled the fun walk route which started from Ghra Vidya and finished at Jatiluhur Water World.



29 August / *August*

Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono hadir dan mengikuti acara Evaluasi Capaian Program PPK DAS Citarum Tahun Anggaran 2023.

President Director of Jasa Tirta II Imam Santoso and Director of Operations and Maintenance of Jasa Tirta II Anton Mardiyono attended and attended the Evaluation of the Achievements of the PPK DAS Citarum Program for the 2023 Fiscal Year.



29 August / *August*

Jasa Tirta II menerima Mistery Guest Ibu Dian Hapsari dari Perum Jasa Tirta I dalam rangka kegiatan Testimoni Implementasi AKHLAK sebagai Salah Satu Rangkaian Kegiatan 3 Tahun AKHLAK BUMN.

Jasa Tirta II received a Mystery Guest, Mrs. Dian Hapsari from Perum Jasa Tirta I in the context of the Testimony of AKHLAK Implementation as One of the Series of 3-Year AKHLAK BUMN Activities.



30 August / *August*

Finalisasi dan Pengesahan draf surat perjanjian pengusahaan air baku (SPPAB) area salamdarma RU IV Balongan, PT Kilang Internasional dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian pengusahaan air baku (SPPAB) Area Salamdarma RU VI Balongan.

Finalization and Ratification of the draft of the raw water business agreement (SPPAB) for the Salamdarma RU IV Balongan area, PT Kilang Internasional continued with the signing of the raw water business agreement (SPPAB) for the Salamdarma RU VI Balongan Area.



30 August / *August*

Jasa Tirta II yang diwakili oleh manajer POHI menjadi Mistery Guest dalam kegiatan Testimoni Implementasi AKHLAK sebagai Salah Satu Rangkaian Kegiatan 3 Tahun AKHLAK BUMN di Perum LKBN Antara Biro Papua.

Jasa Tirta II represented by the manager of POHI became the Mystery Guest in the Testimony of AKHLAK Implementation as One of the Series of 3-Year AKHLAK BUMN Activities at Perum LKBN Antara Papua Bureau.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights

SEPTEMBER / *SEPTEMBER*



01 September / *September*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Indriani Widiastuti melakukan kunjungan kerja untuk meninjau pengamanan asset lahan dan pemanfaatan gulma eceng gondok di saluran-wilayah kerja serta rencana pengembangan holtikultura.

Director of Finance, HR and Risk Management Indriani Widiastuti conducted a working visit to review the security of land assets and the utilization of water hyacinth weeds in the work area channels as well as the horticulture development plan.



07-09 September / *September*

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola risiko di lingkungan holding Danareksa, Jasa Tirta II hadir dalam Forum Group Discussion (FGD) Majanejemen Resiko pada subklauster Pengelolaan Air Holding Danareksa.

In order to improve the capacity of risk management in the Danareksa holding environment, Jasa Tirta II attended the Risk Management Forum Group Discussion (FGD) in the Water Management sub-clause of the Danareksa Holding.



08 September / *September*

Dalam rangka koordinasi pengelolaan sumber daya air (SDA) di salah satu wilayah kerja Jasa Tirta II, Direktur Operasi dan Pemeliharaan Anton Mardiyono didampingi General Manager UW III menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.

In order to coordinate the management of water resources (SDA) in one of Jasa Tirta II's working areas, the Director of Operations and Maintenance Anton Mardiyono accompanied by the General Manager of UW III received a working visit from the Deputy Minister of Agriculture Harvick Hasnul Qolbi.



18 September / *September*

Direktur Utama Jasa Tirta II Imam Santoso, Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

President Director of Jasa Tirta II Imam Santoso, Director of Finance, HR and Risk Management of Jasa Tirta II Indriani Widiastuti and Director of Operations and Maintenance of Jasa Tirta II Anton Mardiyono paid a working visit to the West Java High Prosecutor's Office.



21 September / *September*

Sebanyak 14 Calon Karyawan Jasa Tirta II mengikuti Walktrough dalam rangka memperkenalkan Sebagian wilayah kerja PJT II mulai dari Hulu sampai dengan sebagian Hilir Sungai Citarum.

A total of 14 prospective Jasa Tirta II employees participated in a walkthrough in order to introduce part of the PJT II working area from the upstream to the downstream of the Citarum River.



26 September / *September*

Direktur Operasi & Pemeliharaan Jasa Tirta II Anton Mardiyono hadir pada Sidang Pleno II Komisi Irigasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Director of Operations & Maintenance of Jasa Tirta II Anton Mardiyono attended the Plenary Session II of the Commission Regional Irrigation of West Java Province.



26 September / *September*

Menghadapi kondisi musim kemarau yang panjang, insan Jasa Tirta II berikhtiar untuk menyelenggarakan kegiatan sholat istisqo pada Selasa, 26 September 2023. Sholat istisqa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kerja Jasa Tirta II.

Facing the long dry season, Jasa Tirta II personnel made an effort to hold an istisqa prayer activity on Tuesday, September 26, 2023. The istisqa prayer was carried out simultaneously in all Jasa Tirta II work areas.



27 September / *September*

Direktur Utama Imam Santoso bersama Menteri BUMN dan Para Direktur Utama BUMN serta perwakilan 1 (satu) karyawan mendukung perbaikan kualitas udara dengan melakukan penanaman pohon bertajuk Gotong Royong Boyong Pohon yang diinisiasi Kementerian BUMN.

President Director Imam Santoso together with the Minister of SOEs and the President Directors of SOEs and representatives of 1 (one) employee supported the improvement of air quality by planting trees entitled Gotong Royong Boyong Pohon which was initiated by the Ministry of SOEs.



27 September / *September*

Sebanyak 30 anak mengikuti khitanan massal yang diselenggarakan oleh Jasa Tirta II. Peserta merupakan warga Kecamatan Jatiluhur dan sekitarnya. Khitanan Massal dilaksanakan di Poliklinik Kesehatan Jasa Tirta II.

A total of 30 children participated in the mass circumcision organized by Jasa Tirta II. Participants were residents of Jatiluhur District and its surroundings. The Mass Circumcision was carried out at the Jasa Tirta II Health Polyclinic.



29 September / *September*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti melakukan kunjungan kerja ke mitra binaan Usaha Menengah Kecil (UMK) Kelompok Pemuda Tani Anggur di Kabupaten Purwakarta.

Director of Finance, HR and Risk Management of Jasa Tirta II Indriani Widiastuti made a working visit to the fostered partner of the Small and Medium Enterprises (UMK) of the Grape Farmers Youth Group in Purwakarta Regency.

OKTOBER / *OCTOBER*



01 Oktober / *October*

Hari Minggu ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Jasa Tirta II lakukan Upacara peringatan yang di pimpin langsung oleh Direktur Operasi & Pemeliharaan Jasa Tirta II Bapak Anton Mardiyono.

This Sunday coincides with the commemoration of Pancasila Sanctity Day, Jasa Tirta II held a commemoration ceremony led directly by Jasa Tirta II Operations & Maintenance Director Mr. Anton Mardiyono.



03 Oktober / *October*

WRE Learning Center Jasa Tirta II berkolaborasi dengan NARBO kembali menghelat webinar internasional bertajuk "The 3rd NARBO Webinar: Water-related Disaster Management and Water Infrastructure Development at the Basin Level to Enhance Water Security".

Jasa Tirta II's WRE Learning Center collaborated with NARBO to once again hold an international webinar entitled "The 3rd NARBO Webinar: Water-related Disaster Management and Water Infrastructure Development at the Basin Level to Enhance Water Security".

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



09 Oktober / *October*

Sebanyak 14 calon karyawan Jasa Tirta II memaparkan initiative strategic untuk perusahaan dalam beberapa tema yaitu Corporate Branding and Digital Communication Strategy, Pembangunan SPAM Komunal, Innovation through integration: integrated business services.

A total of 14 prospective Jasa Tirta II employees presented strategic initiatives for the company in several themes, namely Corporate Branding and Digital Communication Strategy, Communal SPAM Development, Innovation through integration: integrated business services.



11 Oktober / *October*

Menteri PUPR Bapak Basuki Hadimuljono, bersama dengan Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah turut hadir dalam momen penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 dan mitra sponsor di Bali.

Minister of PUPR Mr. Basuki Hadimuljono, together with Secretary General of the Ministry of PUPR Mohammad Zainal Fatah also attended the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the National Organizing Committee of the 10th World Water Forum and sponsor partners in Bali.



15 Oktober / *October*

Jasa Tirta II memberangkatkan 13 karyawan yang terpilih untuk melaksanakan ibadah umroh dan 1 Wisatawan Rohani (Non Islam) secara gratis yang terdiri dari karyawan yang akan memasuki masa purnabhakti.

Jasa Tirta II sent 13 selected employees to perform the Umrah pilgrimage and 1 Spiritual Tourist (Non-Muslim) for free consisting of employees who will enter retirement.



18 Oktober / *October*

Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang Jawa Barat menyelenggarakan Webinar Sumber Daya Air dengan tema "Adaptasi Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Menghadapi Fenomena El-Nino".

The Association of Indonesian Hydraulic Engineering Experts (HATHI) West Java Branch held a Water Resources Webinar with the theme "Adaptation of Water Resources Management in Facing the El-Nino Phenomenon".



18 Oktober / *October*

Jasa Tirta II diwakili Plt. Direktur OP Dikdik Permadi Yoffana hadir dalam pembahasan Penanganan Permasalahan Air Baku Perumda Tirta Patriot guna membahas mengenai rencana relokasi intake air baku Perumda Tirta Patriot ke Saluran Tarum Barat.

Jasa Tirta II represented by Plt. Director of OP Dikdik Permadi Yoffana attended the discussion on Handling Raw Water Problems of Perumda Tirta Patriot to discuss the plan to relocate Perumda Tirta Patriot's raw water intake to the West Tarum Canal.



23 Oktober / *October*

Jasa Tirta II dan Kejaksaan Negeri Purwakarta melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama penanganan masalah hukum bidang hukum perdata dan tata usaha negara.

Jasa Tirta II and the Purwakarta District Attorney's Office signed a cooperation agreement to handle legal issues in the fields of civil law and state administration.



26 Oktober / *October*

Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Indriani Widiastuti beserta dengan Karyawan Jasa Tirta II menghadiri Coffee Morning membahas Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja dan tantangan pencapaian Sasaran Kerja Individu.

Director of Finance, HR, and Risk Management Indriani Widiastuti along with Jasa Tirta II Employees attended a Coffee Morning discussing the Main Duties and Functions of the Work Unit and the challenges of achieving Individual Work Targets.



28 Oktober / *October*

Jasa Tirta II melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda hari ini, Sabtu 28 Oktober 2023 yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II - Dikdik Permadi Y.

Jasa Tirta II held a ceremony to commemorate Youth Pledge Day today, Saturday, October 28, 2023, led by the Director of Business Development of Jasa Tirta II - Dikdik Permadi Y.



30 Oktober / *October*

Jasa Tirta II bersama dengan BBWS Citarum Kementerian PUPR melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan PKS terkait Pemanfaatan dan Pertukaran Data untuk Mendukung Kegiatan Flood Forecasting and Warning System di WS Citarum (2nd Phase).

Jasa Tirta II together with BBWS Citarum, Ministry of PUPR signed a memorandum of understanding and PKS regarding the Utilization and Exchange of Data to Support Flood Forecasting and Warning System Activities in WS Citarum (2nd Phase).

NOVEMBER / *NOVEMBER*



01 November / *November*

Jasa Tirta II yang diwakili Sekretaris Perusahaan Udien Yulianto hadir dalam Kick-Off Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lapangan Udara (Lanud) Husein Sastranegara.

Jasa Tirta II, represented by Corporate Secretary Udien Yulianto, attended the Kick-Off of the Implementation of Weather Modification Technology (TMC) at Husein Sastranegara Airfield (Lanud).



31 Okt - 02 Nov / *October-November*

Indonesia menjadi tuan rumah Gelaran World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua, Bali dengan mengusung tema Powering Sustainable Growth untuk mengingatkan bahwa PLTA adalah salah satu tulang punggung penyediaan energi berkelanjutan untuk pertumbuhan.

Indonesia hosted the 2023 World Hydropower Congress (WHC) in Nusa Dua, Bali with the theme Powering Sustainable Growth to remind that hydropower is one of the backbones of providing sustainable energy for growth.



03 November / *November*

Jasa Tirta II lakukan kunjungan kerja ke Bendungan Sindangheula. Pada kesempatan ini dilakukan program konservasi sebagai andil menjaga ekosistem dengan menebarkan benih ikan sebanyak 5.000 ekor ke Bendungan Sindangheula.

Jasa Tirta II conducted a working visit to the Sindangheula Dam. On this occasion, a conservation program was carried out as a contribution to maintaining the ecosystem by spreading 5,000 fish seeds into the Sindangheula Dam.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



06 November / *November*

Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001 (2015) Ke 87 digelar di Ruang Rapat Tarum Barat Unit Usaha Wilayah I Bekasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan terhadap penerapan sistem mutu dalam hubungan dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu.

The 87th ISO 9001 (2015) Management Review Meeting was held at the Tarum Barat Meeting Room, Bekasi Region I Business Unit, which was carried out periodically and continuously regarding the implementation of the quality system in relation to quality policies and quality targets.



07 November / *November*

Pj. Gubernur Jawa Barat bersama Kepala BBWS Citarum dan GM Wilayah III Perum Jasa Tirta II meninjau kondisi kualitas air dan lingkungan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Cilamaya.

Acting Governor of West Java together with the Head of BBWS Citarum and GM Region III of Perum Jasa Tirta II reviewed the condition of water quality and the environment in the Cilamaya River Basin (DAS).



08 November / *November*

Direksi Jasa Tirta II menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam rangka meninjau ketersediaan air di cakupan wilayah kerja Perum Jasa Tirta II dan kinerja korporasi.

The Board of Directors of Jasa Tirta II received a specific working visit from Commission VI of the People's Representative Council (DPR) of the Republic of Indonesia in order to review the availability of water in the work area of Perum Jasa Tirta II and corporate performance.



08 November / *November*

Jasa Tirta II yang diwakili oleh Unit Wilayah III hadiri Rapat Koordinasi Persiapan Musim Tanam I (Rendeng) tahun 2023/2024 dan Musim Tanam II 2024.

Jasa Tirta II, represented by Unit Region III, attended the Coordination Meeting for Preparation of Planting Season I (Rendeng) 2023/2024 and Planting Season II 2024.



10 November / *November*

Jasa Tirta II melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan yang dipimpin oleh Direktur Operasional dan Pemeliharaan, Anton Mardiyono. Upacara ini juga diikuti oleh Direktur Pengembangan Usaha, Dikdik Permadi dan segenap karyawan Jasa Tirta II.

Jasa Tirta II held a ceremony to commemorate Heroes' Day led by the Director of Operations and Maintenance, Anton Mardiyono. This ceremony was also attended by the Director of Business Development, Dikdik Permadi and all employees of Jasa Tirta II.



10 November / *November*

Direktur Utama Jasa Tirta II, Dr. Ir. Imam Santoso memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Magister PSDA FTSL ITB mengenai topik mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum.

President Director of Jasa Tirta II, Dr. Ir. Imam Santoso gave a public lecture to PSDA FTSL ITB Masters students on the topic of Integrated Water Resources Management of Citarum.



13-17 November / *November*

Sebanyak 22 orang yang tergabung dari Karyawan Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 Tahun 2022 dan Calon Karyawan rekrutmen bersama BUMN Tahun 2023 mengikuti program bela negara di Markas Komando Depo Pendidikan RINDAM III Siliwangi.

A total of 22 people from the 2022 BUMN Joint Recruitment Employees Batch 2 and 2023 BUMN Joint Recruitment Candidate Employees participated in the national defense program at the RINDAM III Siliwangi Education Depot Command Headquarters.



08 November / *November*

Jasa Tirta II berhasil meraih dua penghargaan dalam Indonesia Digital innovation and Achievement Awards 2023 (IDIA 2023) yaitu Best Digital Technology and IoT Implementation 2023 (Water Resources Management) dan Best CFO.

Jasa Tirta II won two awards at the 2023 Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards (IDIA 2023), namely Best Digital Technology and IoT Implementation 2023 (Water Resources Management) and Best CFO.



16 November / *November*

Jasa Tirta II berkolaborasi dengan TNI, POLRI, Satpol PP dan petugas tpop melakukan penataan bangunan liar di sempadan Saluran Sekunder Agem Desa Cibuaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.

Jasa Tirta II collaborated with the TNI, POLRI, Satpol PP and tpop officers to organize illegal buildings on the border of the Agem Secondary Channel, Cibuaya Village, Cibuaya District, Karawang Regency.



21 November / *November*

Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II, Ibu Indriani Widiastuti bersama dengan Tim TJSL mengunjungi Biogas di Desa Cibodas Bandung Pada tahun ini, Jasa Tirta II melalui TJSL telah memperbaiki sebanyak 35 Unit Digister Biogas hingga kini dapat beroperasi kembali.

Director of Finance, HR and Risk Management of Jasa Tirta II, Mrs. Indriani Widiastuti together with the TJSL Team visited Biogas in Cibodas Village, Bandung. This year, Jasa Tirta II through TJSL has repaired 35 Biogas Digister Units so that they can now operate again.



23 November / *November*

Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II, Dikdik Permadi Yoffana menghadiri pertemuan untuk menindaklanjuti rencana kerja sama pembangunan SPAM Kota Bandung Terintegrasi di Bandung.

Director of Business Development of Jasa Tirta II, Dikdik Permadi Yoffana attended a meeting to follow up on the planned cooperation for the construction of the Integrated Bandung City SPAM in Bandung.



23 November / *November*

Jasa Tirta II melakukan pembongkaran bangunan liar yang berada di bantaran irigasi Batu Jaya bersinergi dengan Kementerian PUPR, pembongkaran ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan air irigasi bagi petani di Karawang Utara.

Jasa Tirta II demolished illegal buildings located on the banks of the Batu Jaya irrigation in synergy with the Ministry of PUPR, this demolition was carried out to meet the irrigation water needs of farmers in North Karawang.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



25 November / *November*

Jasa Tirta II diwakili Mario Mora Pangestu selaku General Manajer Wilayah II dan Imas Aan selaku Project Manager holding AMDK hadir dan mendukung penuh Kejurnas Dayung 2023 Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional XXI Aceh-Sumut 2024.

Jasa Tirta II represented by Mario Mora Pangestu as General Manager of Region II and Imas Aan as Project Manager of the AMDK holding attended and fully supported the 2023 National Rowing Championship Qualification of the XXI Aceh-North Sumatra National Sports Week 2024.



29 November / *November*

Jasa Tirta II diwakili oleh Sekretaris Perusahaan, Udien Yulianto didampingi Manajer Humas, Iskandar Harahap hadir untuk menyampaikan Presentasi sebagai media Uji Publik atas Inovasi dan Strategi dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Jasa Tirta II represented by the Corporate Secretary, Udien Yulianto accompanied by the Public Relations Manager, Iskandar Harahap was present to deliver a Presentation as a media for Public Testing of Innovation and Strategy in implementing Public Information Disclosure.



30 November / *November*

Jasa Tirta II menyelenggarkan Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko "RISK MATURITY INDEX AND CORPORATE PERFORMANCE" yang berlangsung hybrid secara offline dan daring melalui zoom meeting dan live Youtube Channel WRE Learning Center.

Jasa Tirta II held a Risk Management Forum Group Discussion (FGD) "RISK MATURITY INDEX AND CORPORATE PERFORMANCE" which took place in a hybrid offline and online manner via zoom meeting and live Youtube Channel WRE Learning Center.

DESEMBER / *DECEMBER*



01 Desember / *December*

Jasa Tirta II berhasil melaksanakan Audit Eksternal Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilakukan oleh PT. Alkon Indo Sertifikasi di lingkungan Unit Layanan Laboratorium.

Jasa Tirta II successfully carried out the External Audit of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) Certification conducted by PT. Alkon Indo Sertifikasi in the Laboratory Service Unit environment.



03 Desember / *December*

Jasa Tirta II menghadiri upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 78 pada Minggu (3/12/2023). Upacara peringatan diselenggarakan di beberapa tempat termasuk di halaman Gedung Sate Bandung dan di BBWS Mesuji Sekampung, Lampung.

Jasa Tirta II attended the 78th Public Works Service Day commemoration ceremony on Sunday (3/12/2023). The commemoration ceremony was held in several places including the yard of Gedung Sate Bandung and at BBWS Mesuji Sekampung, Lampung.



04 Desember / *December*

Jasa Tirta II diwakili Kadiv Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Esthi Pambangun dan tim menghadiri sosialisasi terkait Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum.

Jasa Tirta II represented by the Head of Commercial and Customer Service Division, Esthi Pambangun and the team attended the socialization related to the Arrangement of Licensing and Approval in the Water Resources Sector in the Citarum River Basin.



05 Desember / *December*

Jasa Tirta II menyelenggarakan Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dan Prosedur Kerja Perusahaan (Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Prosedur Nomor 47 tentang Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja K3).

Jasa Tirta II held a Socialization of the Good Corporate Governance Guidelines and Company Work Procedures (Good Corporate Governance Guidelines and Procedure Number 47 concerning Job Safety Analysis (JSA) and K3 Work Permits).



06 Desember / *December*

General Manajer Wilayah IV Anom Soal Herudjito beserta Tim menerima dan mendampingi kunjungan evaluasi Dam Operational Improvement and Safety Project Phase 2 (DOISP-2) oleh Perwakilan dari World Bank dan Direktorat Bina Operasi Kementerian PUPR.

General Manager of Region IV Anom Soal Herudjito and Team received and accompanied the evaluation visit of Dam Operational Improvement and Safety Project Phase 2 (DOISP-2) by Representatives from the World Bank and the Directorate of Operations Development of the Ministry of PUPR.



07 Desember / *December*

Jasa Tirta II diwakili Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Rina Rismayanti dan Manajer Operasional Jaringan Unit PLTA, Kostaman menerima Penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Jasa Tirta II represented by the Head of the Human Resources Division, Rina Rismayanti and the Operations Manager of the Hydroelectric Power Plant Unit Network, Kostaman received the Zero Work Accident Award at the West Java Province Level.



08 Desember / *December*

Jasa Tirta II diwakili oleh Sekretaris Perusahaan, Udien Yulianto menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan PNBP atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).

Jasa Tirta II represented by the Corporate Secretary, Udien Yulianto attended the Coordination Meeting for PNBP Management for Water Resources Management Service Fees (BJPSDA).



12 Desember / *December*

Jasa Tirta II diwakili Kadiv Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Esthi Pambangun hadir menjadi narasumber dalam kegiatan Kosultasi Publik Usulan Tarif BJPSDA membahas terkait usulan tarif BJPSDA untuk pengguna SDA bagi PDAM, Industri, dan PLTA di WS Cidanau-Ciujung-Cidurian.

Jasa Tirta II represented by the Head of Commercial and Customer Service Division, Esthi Pambangun attended as a resource person in the Public Consultation on BJPSDA Tariff Proposal discussing the BJPSDA tariff proposal for SDA users for PDAM, Industry, and Hydroelectric Power Plants in the Cidanau-Ciujung-Cidurian WS.



14 Desember / *December*

Jasa Tirta II diwakili Direktur Pengembangan Usaha, Dikdik Permadi Yoffana menghadiri Rapat Pleno Pembahasan Usulan Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) bagi Kegiatan Usaha Pertanian pada Wilayah Kerja Jasa Tirta II.

Jasa Tirta II represented by the Director of Business Development, Dikdik Permadi Yoffana attended the Plenary Meeting to Discuss the Proposed Tariff for Water Resaources Management Services (BJPSDA) for Agricultural Business Activities in the Jasa Tirta II Work Area.

Peristiwa Penting 2023
2023 Event Highlights



11-15 Desember / *December*

Jasa Tirta II diwakili General Manajer Wilayah IV, Anom Soal Herudjito beserta jajarannya turut serta dalam Kegiatan Bimtek Pengukuran Topografi dan Bathimetri Bendungan yang diselenggarakan oleh Pusat Monitoring Bendungan Dit. Bina OP Kementerian PUPR.

Jasa Tirta II represented by General Manager of Region IV, Anom Soal Herudjito and his staff participated in the Topography and Bathymetry Measurement Technical Guidance Activity for Dams organized by the Dam Monitoring Center of the Directorate of OP Development, Ministry of PUPR.



19 Desember / *December*

Jasa Tirta II mendapatkan predikat Kategori BUMN "Informatif" yang diterima oleh Plt. Direktur Utama, Indriani Widiastuti dan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Donny Yoesgiantoro serta disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Jasa Tirta II received the title of "Informative" BUMN Category which was received by the Acting President Director, Indriani Widiastuti and handed over directly by the Chairman of the Central Information Commission (KI), Donny Yoesgiantoro and witnessed directly by the Vice President of the Republic of Indonesia, Ma'ruf Amin.



20 Desember / *December*

Jasa Tirta II tanda tangani Surat Perjanjian Pengusahaan Air Baku (SPPAB) dengan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat & Banten KPH Bandung Utara dari Mata Air Cikole (Kab. Bandung Barat) dan Air Mata Petak 36D Blok Lemahneundeut Desa Cibiru Wetan.

Jasa Tirta II signed the Raw Water Business Agreement (SPPAB) with Perum Perhutani, West Java & Banten Regional Division, North Bandung KPH from Cikole Springs (West Bandung Regency) and Air Mata Petak 36D, Lemahneundeut Block, Cibiru Wetan Village.



23 Desember / *December*

Himpunan Sumber Daya Air (HIMASDA) Prodi TPSDA FTSL-ITB bekerja sama dengan World Water Forum ke-10 mengadakan Seminar Nasional Water Project 2023 yang mengusung tema Smart Watershed Management.

The Water Resources Association (HIMASDA) of the TPSDA Study Program, FTSL-ITB, in collaboration with the 10th World Water Forum held the 2023 National Water Project Seminar with the theme Smart Watershed Management.



28 Desember / *December*

Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, Jasa Tirta II melaksanakan kegiatan Jasa Tirta II Berbagi dan Bazar Bersama UMK Binaan yang berlangsung di Kantor Pusat Jasa Tirta II.

Coinciding with the commemoration of Mother's Day, Jasa Tirta II held the Jasa Tirta II Sharing and Bazaar with Fostered UMK activities which took place at the Jasa Tirta II Head Office.



28 Desember / *December*

Dalam rangka peringatan Hari Ibu Tahun 2023, Srikandi Jasa Tirta II menggelar seminar dengan tema "Kesehatan, Kebahagiaan, dan Keseimbangan Bekerja di Perusahaan" yang dibawakan oleh dr. Nurly Hestika, M.Gizi, SpGK.

In commemoration of Mother's Day 2023, Srikandi Jasa Tirta II held a seminar with the theme "Health, Happiness, and Work Balance in the Company" presented by dr. Nurly Hestika, M.Gizi, SpGK.



Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications



Jasa Tirta II memperoleh capaian membanggakan dengan memperoleh penghargaan pada acara BUMN Award ke-11 dengan kategori "Driving Transformation". / *Jasa Tirta II obtained a proud achievement by obtaining an award at the 11th BUMN Award event with the category "Driving Transformation".*



Jasa Tirta II meraih tiga penghargaan sekaligus dalam bidang keselamatan kerja yaitu Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tingkat Lanjutan dengan pencapaian Kategori Emas, dan Bendera Emas dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Penghargaan Zero Accident tiga tahun berturut turut. / *Jasa Tirta II won three awards at once in the field of occupational safety, namely the Advanced level Occupational Safety and Health Management System Certification (SMK3) with the achievement of the Gold Category, and the Gold Flag from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, and the Zero Accident Award for three consecutive years.*



Jasa Tirta II meraih penghargaan spesial sebagai Perusahaan yang konsisten dalam mendukung Pilar Lingkungan TJSL dalam Manfaat Program Olah Limbah dalam BUMN Track TJSL & CSR Award Tahun 2022 dan penghargaan kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Jasa Tirta II Indriani Widiastuti Kategori Commited Leader to TJSL Initiative on Natural Resources. / *Jasa Tirta II won three awards at once in the field of occupational safety, namely the Advanced level Occupational Safety and Health Management System Certification (SMK3) with the achievement of the Gold Category, and the Gold Flag from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia,* and the Zero Accident Award for three consecutive years.



Jasa Tirta II meraih penghargaan brand strategy pada ajang 10th BUMN Branding & Marketing Award Tahun 2022. */ Jasa Tirta II won the brand strategy award at the 10th BUMN Branding & Marketing Award in 2022.*





Sustainability Report Award









PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Identitas Perusahaan
Company Identity

NAMA PERUSAHAAN
Company Name

PERUM JASA TIRTA II

TANGGAL PENDIRIAN
Date of Establishment

26 Agustus 1967
August 26, 1967

DASAR HUKUM PENDIRIAN
Legal Basis of Establishment

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022
Government Regulation No. 25 of 2022

BENTUK BADAN HUKUM
Legal Entity

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum.
State Owned Enterprise (SOE) in the form of Public Utility Company.

NPWP
Tax Identification Number

010000552-409.003

ENTITAS ANAK
Subsidiary Entity

PT. Jasa Tirta Luhur

KEPEMILIKAN
Ownership

100% milik Negara Republik Indonesia
100% Indonesia owned by the Republic of Indonesia

STATUS PERUSAHAAN
Company Status

Perusahaan Umum (Perum)
Public Utility Company

BIDANG USAHA
Line of Business

Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA).
Management and Exploitation of Water Resources (SDA).

MODAL DASAR
Authorized Capital

Rp164.547.635.935,00

JUMLAH KARYAWAN
Total Employee

1.046 Karyawan (Tidak termasuk karyawan anak perusahaan, Pegawai Waktu Tertentu, dan Outsource)
1.046 employees (Excluding subsidiary employees, Specific Ti me Employees, and Outsources)





ALAMAT KANTOR PUSAT
Head Office Address

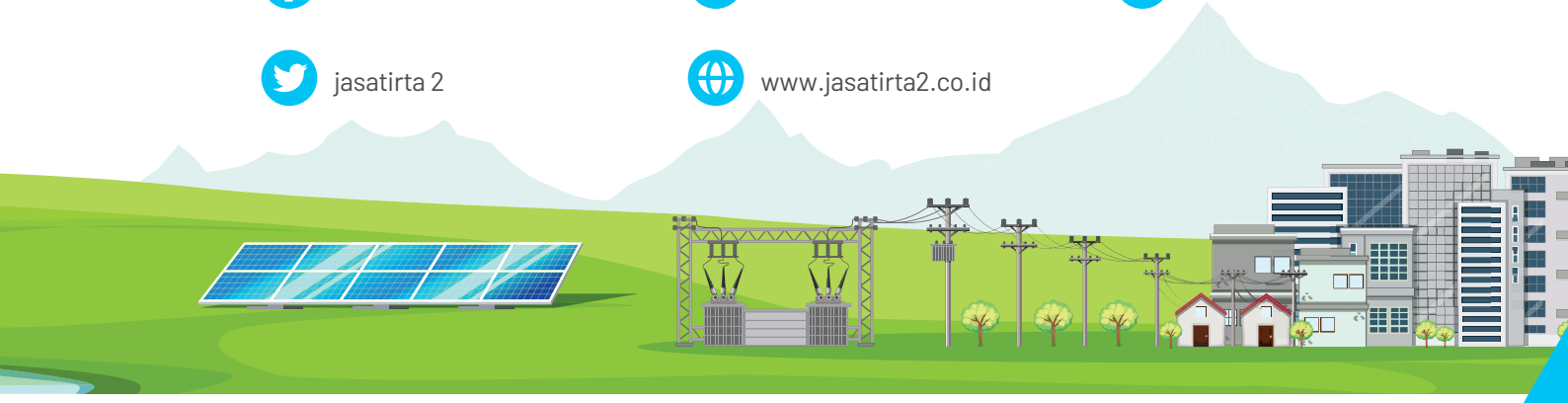
Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur – Purwakarta, Jawa Barat

KANTOR LAYANAN
Service Offices

1. Kantor Pusat / *Head Office*
2. Kantor Perwakilan / *Representative Office*
3. Kantor Unit Wilayah / *Regional Unit Offices*
4. Kantor Unit / *Unit Offices*
5. Kantor Unit Usaha / *Business Unit Offices*

LAYANAN INFORMASI
Information Service

pjt2@jasatirta2.co.id
(0264) 201972
(0264) 201971
Perum Jasa Tirta II
jasatirta.2
Perum Jasa Tirta II
jasatirta 2
www.jasatirta2.co.id



Identitas Perusahaan
Company Identity



KANTOR PUSAT / *Head Office*
Jalan Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur
Purwakarta - Jawa Barat
Telp & Fax (0264) 201 971-72



KANTOR PERWAKILAN / *Representive Office*
Jalan H. Agus Salim No. 69, Jakarta Pusat
Telp. (021) 314 5827



KANTOR UNIT WILAYAH I / *Regional Unit Office I*
Jalan Ir. Djuanda No. 124D, Bekasi - Jawa Barat
Telp & Fax. (021) 880 1884



Identitas Perusahaan
Company Identity



KANTOR UNIT WILAYAH II / *Regional Unit Office II*
Jalan Curug Klari, Karawang Jawa Barat
Telp. (0264) 200 487 | Fax. (0264) 203 580



KANTOR UNIT WILAYAH III / *Regional Unit Office III*
Jalan Arief Rahman Hakim No. 16, Subang-Jawa Barat
Telp. (0260) 411510 | Fax. (0260) 415 684



KANTOR UNIT WILAYAH IV / *Regional Unit Office IV*
Jalan Rasamala Raya, Bendungan Jatiluhur,
Purwakarta-Jawa Barat. Telp. / Fax. (0264) 822 2537



KANTOR UNIT WILAYAH V / *Regional Unit Office V*
Komplek Perumahan Cimanuk No 105 Karyamulya
Kec. Kesambi Kota Cirebon



KANTOR UNIT WILAYAH VI / *Regional Unit Office VI*
Jl. Kagungan No. 21 RT. 001 RW. 002 Kel. Lontar Baru
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten



KANTOR UNIT WILAYAH VII / *Regional Unit Office VII*
Jl. Way Sekampung No.32 Pahoman, Kec. Tlk. Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35228



KANTOR UNIT PLTA / *Hydropower Unit Office*
Jalan Rasamala Raya, Bendungan Jatiluhur,
Purwakarta-Jawa Barat
Telp. (0264) 200 565 & Fax. (0264) 200 060



KANTOR UNIT USAHA PARIWISATA DAN HOTEL
Hotel Business Unit Office
Jatiluhur Valley & Resort, Jl. Rasamala No. 1,
Jatiluhur - Purwakarta, Jawa Barat
Telp. (0264) 201087, 201989





Peta Wilayah Operasi
Working Area Map





Profil Singkat Wilayah Operasi
Brief Profile of the Operating Region

Deskripsi Wilayah Sungai Citarum / *Description of the Citarum River Basin*

Sungai Citarum mengalir dari hulu yang berada di daerah Gunung Wayang, di sebelah Selatan Kota Bandung, menuju ke Utara dan bermuara di Laut Jawa. Dengan pantjang sekitar 297 km. Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Jawa Barat. Sungai Citarum mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Air Sungai Citarum digunakan sebagai sumber air baku, irigasi pertanian, perikanan, sumber bagi pembangkit tenaga listrik tenaga air untuk pasokan Pulau Jawa dan Bali, serta sebagai pemasok air untuk kegiatan industri.

The Citarum River flows from its headwaters in the Gunung Wayang area, south of Bandung City, to the north and empties into the Java Sea. It has a length of about 297 km. Citarum is the longest and largest river in West Java Province. The Citarum River plays a very important role in the socio-economic life of the community, especially in West Java and DKI Jakarta. Citarum River water is used as a source of raw water, agricultural irrigation, fisheries, a source for hydroelectric power plants to supply Java and Bali, as well as a water supplier for industrial activities.

Sungai Citarum merupakan sungai yang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) terbesar di Provinsi Jawa Barat. WS Citarum seluas kurang lebih 12.000 km2 mencakup 12 wilayah administrasi kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi. Curah hujan tahunan di WS Citarum rata-rata sebesar 2.358 mm.

Citarum River is the river with the largest watershed in West Java Province. The Citarum River Basin covers an area of approximately 12,000 km2 and covers 12 districts/cities within the West Java Province, namely: Bandung Regency, West Bandung Regency, Bekasi Regency, Cianjur Regency, Indramayu Regency, Karawang Regency, Purwakarta Regency, Subang Regency, Sumedang Regency, Bandung City, Bekasi City and Cimahi City. The average annual rainfall in the Citarum River Basin is 2,358 mm.

Deskripsi Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane / *Description of the Ciliwung-Cisadane River Basin*

Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane secara geografis terletak pada posisi 106°20' BT sampai 106°40' BT dan 6°0' LS sampai 6°20' LS. Luas WS Ciliwung Cisadane kurang lebih 5.293,01 km2, mencakup 14 wilayah administrasi kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Banten. Sungai utama yang melintasi WS Ciliwung Cisadane adalah Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane yang berhulu di Jakarta Utara.

The Ciliwung Cisadane River Basin is geographically located at 106°20' East to 106°40' East and 6°0' LS to 6°20' LS. The area of WS Ciliwung Cisadane is approximately 5,293.01 km2, covering 14 district/city administrative areas within Banten Province. The main rivers that cross the Ciliwung Cisadane WS are the Ciliwung River and Cisadane River, which have their headwaters in North Jakarta.

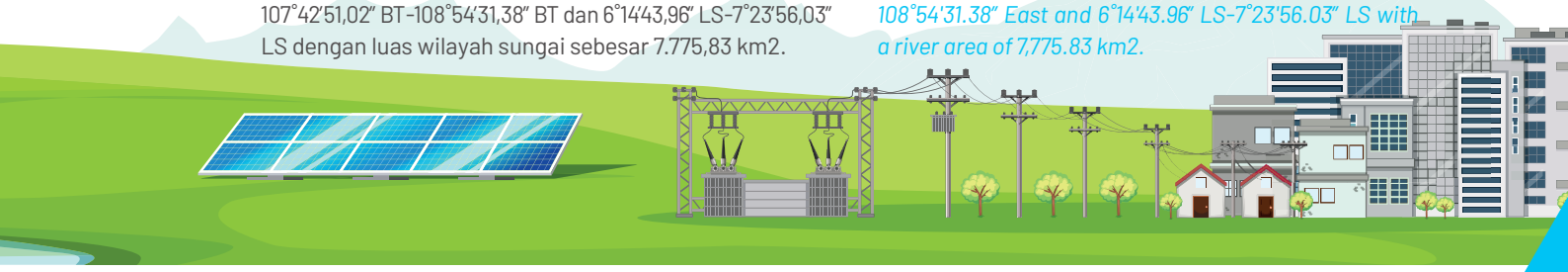
WS Ciliwung Cisadane terdiri atas 15 DAS, namun yang menjadi kewenangan Perum Jasa Tirta II berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2022 meliputi DAS Bekasi seluas 1.447,35 km2.

WS Ciliwung Cisadane consists of 15 watersheds, but the authority of Perum Jasa Tirta II based on PP No. 25 of 2022 includes Bekasi watershed covering an area of 1,447.35 km2.

Deskripsi Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung
Description of the Cimanuk-Cisanggarung River Basin

Wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung secara administrasi terletak di Provinsi Jawa Barat dan 7,40% berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah, secara astronomis terletak pada 107°42'51,02" BT-108°54'31,38" BT dan 6°14'43,96" LS-7°23'56,03" LS dengan luas wilayah sungai sebesar 7.775,83 km2.

The Cimanuk-Cisanggarung river basin is administratively located in West Java Province and 7.40% in Central Java Province, astronomically located at 107°42'51.02" East-108°54'31.38" East and 6°14'43.96" LS-7°23'56.03" LS with a river area of 7,775.83 km2.



Profil Singkat Wilayah Operasi
Brief Profile of the Operating Region

Kewenangan Perum Jasa Tirta II berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2022 meliputi DAS Cimanuk seluas 3.773 km2, Das Cisanggarung seluas 1.003,99 km2, dan DAS Kalicilet seluas 419,93 km2.

The authority of Perum Jasa Tirta II based on Government Regulation No. 25 of 2022 covers 3,773 km2 of Cimanuk watershed, 1,003.99 km2 of Cisanggarung watershed, and 419.93 km2 of Kalicilet watershed.

Deskripsi Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian

Description of the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin

Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian yang selanjutnya disebut dengan WS 3Ci dengan luas 4.170,85 km2 terbagi menjadi 37 DAS besar dan kecil. Secara administratif meliputi 5 wilayah Kabupaten dan 2 Kota yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Banten serta 1 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

The Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin, hereinafter referred to as WS 3Ci with an area of 4,170.85 km2, is divided into 37 large and small watersheds. Administratively, it covers 5 regencies and 2 cities consisting of 4 regencies and 2 cities in Banten Province and 1 regency in West Java Province.

Potensi air yang ada di Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terutama berasal dari 3 Sungai besar yaitu Sungai Cidanau, Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian. Sedangkan secara geografis WS Cidanau-Ciujung-Cidurian terletak pada posisi antara 60 43' 55.5" LS sampai 50 52' 24.7" LS dan antara 1050 51' 1.2 " BT sampai 1060 3' 58.3" BT dan berada dalam wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian.

The water potential in the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin mainly comes from 3 major rivers, namely the Cidanau River, Ciujung River and Cidurian River. Geographically, the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin is located in a position between 60 43' 55.5" N to 50 52' 24.7" LS and between 1050 51' 1.2" East to 1060 3' 58.3" East and is within the working area of the Cidanau-Ciujung-Cidurian River Basin Center.

WS Cimanuk-Cisanggarung memiliki 34 DAS, dengan DAS terbesar adalah DAS Cidanau, DAS Ciujung, dan DAS Cidurian. Kewenangan Perum Jasa Tirta II berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2022 meliputi DAS Cidanau seluas 204,74 km2, DAS Ciujung seluas 432,53 km2, DAS Cidurian seluas 148 km2, dan Cibanten seluas 126,21 km2.

WS Cimanuk-Cisanggarung has 34 watersheds, with the largest watersheds being the Cidanau, Ciujung, and Cidurian watersheds. The authority of Perum Jasa Tirta II based on Government Regulation Number 25 Year 2022 covers 204.74 km2 of Cidanau watershed, 432.53 km2 of Ciujung watershed, 148 km2 of Cidurian watershed, and 126.21 km2 of Cibanten watershed.

Deskripsi Wilayah Sungai Seputih Sekampung

Description of the Seputih Sekampung River Basin

Wilayah Sungai Seputih-Sekampung secara administratif berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. WS Seputih Sekampung memiliki luas wilayah sebesar 14.637 km2 terdiri dari 42 DAS, namun yang menjadi kewenangan Perum Jasa Tirta II berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2022 meliputi DAS Seputih seluas 7.259 km2 dan DAS Sekampung seluas 4.928 km2.

The Seputih-Sekampung River Basin is administratively located in South Lampung Regency, East Lampung Regency, Central Lampung Regency, Pringsewu Regency, Pesawaran Regency, Tanggamus Regency, West Lampung Regency, North Lampung Regency, West Tulang Bawang Regency, Bandar Lampung City and Metro City. The Seputih Sekampung WS has an area of 14,637 km2 consisting of 42 watersheds, but the authority of Perum Jasa Tirta II based on PP No. 25 of 2022 includes the Seputih watershed covering an area of 7,259 km2 and the Sekampung watershed covering an area of 4,928 km2.





Sekilas Perusahaan
Company at a Glance

Sejarah perusahaan kami bermula dari proyek nasional Pemerintah Republik Indonesia untuk pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Pembangunan Bendungan Ir. H. Djuanda merupakan bagian dari tahap Pengembangan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum, dan berfungsi sebagai pendukung ketahanan pangan nasional melalui penyediaan air irigasi pertanian di sebagian wilayah Jawa Barat, penyediaan air baku untuk PDAM, Industri dan Pembangkitan Listrik. Bendungan Ir. H. Djuanda juga berfungsi untuk pengendalian banjir di sebagian wilayah Karawang, Bekasi dan daerah subur di sekitarnya, serta sebagai salah satu tujuan wisata dan olahraga air di wilayah Jawa Barat.

The history of our company began with the national project of the Government of the Republic of Indonesia for the construction of the Ir. H. Djuanda Dam in 1957 and was completed in 1967. The construction of the Ir. H. Djuanda Dam is part of the Water Resources Development phase in the Citarum River Basin, and serves as a supporter of national food security through the provision of agricultural irrigation water in parts of West Java, raw water supply for PDAM, Industry and Electricity Generation. The Ir. H. Djuanda Dam also serves to control flooding in parts of Karawang, Bekasi and surrounding fertile areas, as well as one of the tourist and water sports destinations in the West Java region.

Dengan selesainya pembangunan tersebut, maka berdasarkan PP No. 8 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur. Badan ini bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya.

With the completion of the development, in conform to Government Regulation No.8 on July 24, 1967, the Government of the Republic of Indonesia established the Jatiluhur Board of Management and Supervisory under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur. This agency is in charge of carrying out Exploitation and Maintenance of Facilities and Infrastructure of Dams/ Reservoirs and PLTA Ir. H. Djuanda as well as pioneering the development of subsequent projects.

Dengan bertambah luasnya ruang lingkup tugas Perusahaan serta sejalan dengan usainya sebagian besar pembangunan Proyek Nasional Serba Guna Jatiluhur yang meliputi Waduk, Bendungan Utama, Stasiun PLTA serta sarana-sarana Sistem Pengairan dan Irigasi, menjadi dasar pertimbangan Pemerintah untuk membentuk Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970 yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 Tahun 1980, PP No. 42 Tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998. POJ diberi mandat oleh Pemerintah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan Otorita, dan harus diusahakan pemasukannya semaksimal mungkin untuk dipergunakan bagi biaya rehabilitasi, perbaikan berat dan pembangunan jaringan.

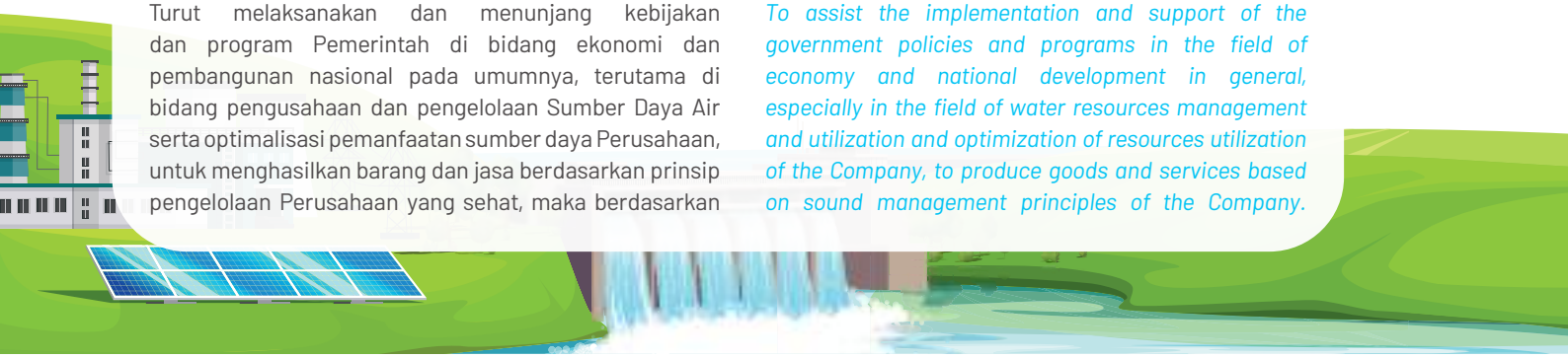
With the expansion of the Company's scope of work, in line with the majority of the construction of the Jatiluhur Multipurpose Project which includes the Reservoir, the Main Dam, the Hydroelectric Station, and the Irrigation System facilities, this became the basis of Government Consideration to form the established Jatiluhur Authority (POJ) based on PP No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Government Regulation No.35 of 1980, PP No.42 of 1990, and PP No.13 of 1998. POJ is mandated by the Government to manage the sources of income of the Authority, and must cultivate as much as possible to be used for rehabilitation, heavy repair, and network construction.

RIWAYAT PERUBAHAN NAMA

Turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan, untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat, maka berdasarkan

HISTORY OF COMPANY'S NAME

To assist the implementation and support of the government policies and programs in the field of economy and national development in general, especially in the field of water resources management and utilization and optimization of resources utilization of the Company, to produce goods and services based on sound management principles of the Company.





PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

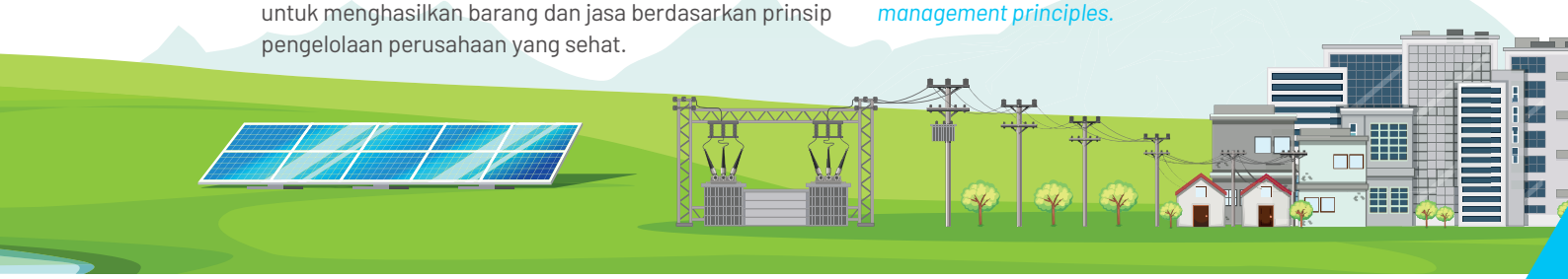
Therefore, based on Government Regulation No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its duties and business activities with PP No.7 of 2010.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan Perum Jasa Tirta II bertransformasi menjadi lebih dinamis, responsif, dan mampu meningkatkan perannya sebagai perusahaan yang terkemuka di bidang pengelolaan Sumber Daya Air. Sesuai dengan tujuan didirikannya Perum Jasa Tirta II, manajemen tetap berkomitmen terhadap misi yang diemban Perum Jasa Tirta II yaitu menyelenggarakan pengelolaan Sumber Daya Air dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan inovatif melalui penyediaan air baku.

With these changes, Perum Jasa Tirta II is expected to transform into a more dynamic, responsive and able to improve its role as a leading company in the field of water resources management. In accordance with the purpose of the establishment of Perum Jasa Tirta II, management remains committed to the mission carried out by Perum Jasa Tirta II, namely organizing the management of Water Resources with Good Corporate Governance and innovation through the provision of raw water.

Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) dan/atau selain PT PLN (Persero), pengembangan kepariwisataan dan pemanfaatan lahan yang bertujuan memberikan kontribusi dalam menunjang ketahanan pangan nasional dan keuntungan bagi Negara, turut melaksanakan kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang pengusahaan dan pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Generation and distribution of electricity to PT PLN (Persero) and / or other than PT PLN (Persero), tourism development and land use aimed at contributing to supporting national food security and benefits for the State, participating in implementing Government program policies in the economic sector and national development in general, especially in the field of exploitation and management of Water Resources and optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.



Jejak Langkah
Milestone

1957–1967

Proyek pembangunan Bendungan Serbaguna Jatiluhur dinyatakan selesai dibangun pada tahun 1967 dan diresmikan Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Bendungan Ir. H. Djuanda.

Construction of Jatiluhur Multipurpose Dam project was declared completed in 1967 and inaugurated by the Government of the Republic of Indonesia under the name of Ir. H. Djuanda Dam.



1967–1970

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 1967 tanggal 24 Juli 1967, Pemerintah membentuk Badan Pengelola dan Pembina Danau Jatiluhur dengan nama Perusahaan Negara Jatiluhur yang selanjutnya disebut PN Jatiluhur, berkedudukan di Jatiluhur.

Based on Govt. Reg. No.8 of 1967, on July 24, 1967, the Government established the Board of Management and Advisory of Jatiluhur Lake under the name of Jatiluhur State Company, hereinafter referred to as PN Jatiluhur, domiciled in Jatiluhur.

2021

Perusahaan kini tergabung kedalam sub klaster holding Danareksa-PPA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.113 tanggal 10 November tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 25 tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Danareksa". Dimana PT Danareksa ditunjuk sebagai holding perusahaan lintas sektor salah satunya sebagai Holding Perusahaan Sumber Daya Air.

The company is now incorporated into the Danareksa-PPA holding sub-cluster. Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 113 dated November 10, 2021 concerning amendments to Government Regulation No. 25 of 1976 concerning State Equity Participation of the Republic of Indonesia for the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) "Danareksa". Where PT Danareksa was appointed as a holding company across sectors, one of which was as a Holding Company for Water Resource.

2018

Perusahaan mendirikan anak perusahaan yakni PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, dengan Akta nomor 46 tanggal 29 Agustus 2018.Perseroan bergerak dalam bidang jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi. Pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pemilik modal.

The company established a subsidiary, namely PT Jasa Tirta Luhur which was established based on the Notary Deed of Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, by Deed number 46 dated August 29, 2018. The Company is engaged in Drinking Water Supply System and Construction services. The establishment has obtained the approval of the owner of the capital.

2017

Perusahaan melakukan perubahan logo sebagai bentuk implementasi transformasi. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

The company changes the logo as a form. of implementing transformation. The latest logo has been ratified pursuant to Regulation

1997–1999

Pemerintah membentuk Perum Otorita Jatiluhur yang didirikan berdasarkan PP No. 20 tanggal 23 Mei 1970, yang kemudian disesuaikan dengan PP No. 35 tahun 1980, PP No. 42 tahun 1990 serta PP No. 13 Tahun 1998.

The government established the Perum Otorita Jatiluhur under Govt. Reg. No.20 on May 23, 1970, which was then adjusted with Govt. Reg. No.35 of 1980, Govt. Reg. No.42 of 1990, and Govt. Reg. No.13 of 1998.

1999

Pegawai/Pekerja dari Proyek PLTA Jatiluhur beserta bangunan Waduk, PLTA serta Gardu Induknya diserahkan kepada PN Jatiluhur untuk menyelenggarakan Pengelolaan dan Pengusahaan potensi-potensi yang timbul setelah selesainya sebagian Proyek PLTA Jatiluhur.

Officers/Workers from Jatiluhur Hydroelectric Project and Reservoir building, hydropower, and substation were handed over to PN Jatiluhur to organize the Management and Exploitation of potentials that arise after the completion of part of Jatiluhur Hydroelectric Project.

of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/ DIR/35/PRD-PED/2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/01/PRT/2014 concerning the Guideline of Service Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

2010

Berdasarkan PP No. 94 tanggal 13 Oktober 1999, Pemerintah mengubah dan menyesuaikan nama Perum Otorita Jatiluhur menjadi Perum Jasa Tirta II, yang kemudian disesuaikan kembali ruang lingkup tugas dan kegiatan usahanya dengan PP No. 7 Tahun 2010.

Based on Govt. Reg. No.94 on October 13, 1999, the Government changed and adjusted the name of Perum Otorita Jatiluhur to Perum Jasa Tirta II, which then re-adjusted the scope of its tasks and business activities with Govt. Reg. No. 7 of 2010.

2022

Secara Optimal terus melakukan upaya pengusahaan Sumber Daya Air guna mendukung pengembangan usaha berbasis One River Basin One Management dan perluasan Wilayah Kerja berdasarkan PP NO.25 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dengan kewenangan pengusahaan serta optimalisasi aset Negara yang semula 2 (dua) Wilayah Sungai (1.WS Citarum, WS Ciliwung-Cisadane, menjadi 5 yaitu (sebagian wilayah Sungai 1.Ciliwung-Cisadane, 2. Cimanuk-Cisanggarung, 3. Cidanau-Ciujung-Cidurian dan Seputih-Sekampung).

Optimally continue to make efforts to manage Water Resources to support the development of One River Basin One Management-based businesses and the expansion of the Work Area based on PP NO.25 of 2022 concerning the Public Company (Perum) Jasa Tirta II with the authority to manage and optimize State assets which were originally 2 (two) River Areas (1. WS Citarum, WS Ciliwung-Cisadane, to 5, namely (part of the River Areas 1. Ciliwung-Cisadane, 2. Cimanuk-Cisanggarung, 3. Cidanau-Ciujung-Cidurian and Seputih-Sekampung).

2023

Perum Jasa Tirta 2 komitmen terus mengengelola sumber daya air secara profesional demi keberlanjutan.

Perum Jasa Tirta 2 is committed to continuing to manage water resources professionally for sustainability.





Visi, Misi, Motto dan Kompetensi Inti Perusahaan

Company Vision, Mission, Motto and Core Competencies



VISI
Vison

Menjadi Perusahaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Terkemuka di Asia Tenggara Tahun 2030.

Being the Reputable Water Resource Managemenet and Enterprise Company in Southeast Asia 2030.

MISI
Mission

1. Pengoptimalan pengusahaan Sumber Daya Air dengan cara yang efisien, efektif, inovatif dan berkelanjutan dengan tujuan menjaga kelestarian dan pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang mempunyai daya kreativitas dan inovasi serta berdaya saing tinggi dalam pengelolaan Sumber Daya Air dan turunannya.
3. Penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan dalam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

1. *Optimizing the utilization of Water Resources in an efficient, effective, innovative and sustainable manner with the objective of maintaining the sustainability and management of Water Resources and derivatives.*
2. *Creating Human Resources that have the power of creativity and innovation and high competitiveness in the management of Water Resources and derivatives.*
3. *Implementing appropriate technology and environmentally friendly, especially in the Development of New and Renewable Energy (EBT).*

Visi dan Misi Perusahaan telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023.
The Company's Vision and Mission have been determined based on the 2023 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

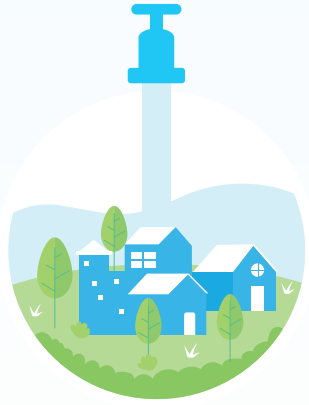




MOTTO PERUSAHAAN
Company Motto

Air Untuk Menghidupi Negeri
Water for Wellness

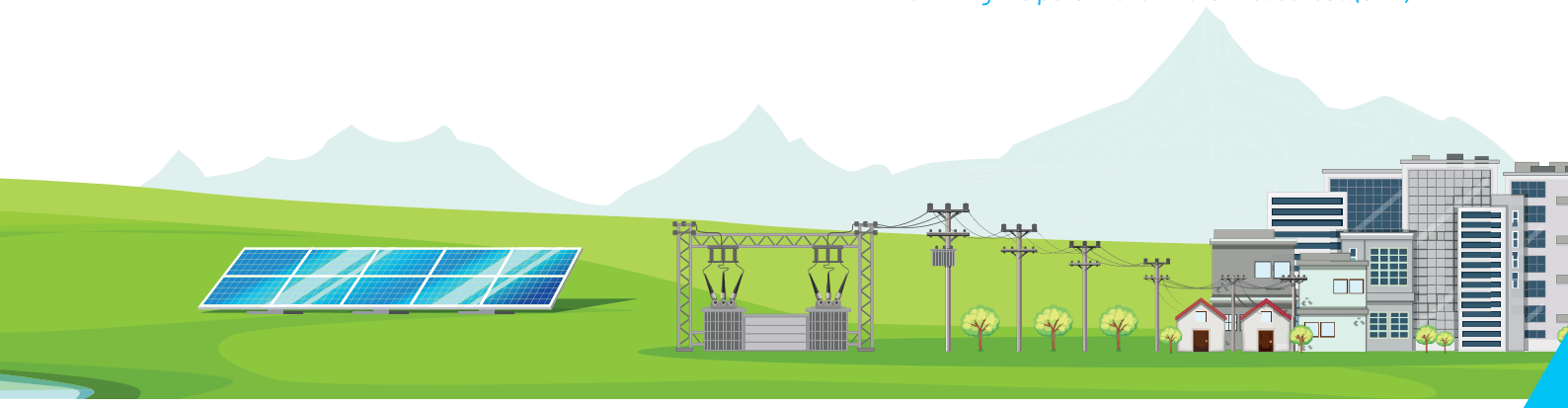
KOMPETENSI INTI PERUSAHAAN
Company Core Competencies



1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
   Management of Water Resources (SDA).



2. Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan dengan memanfaatkan potensi Sumber Daya Air (SDA).
   Development of New and Renewable Energy by utilizing the potential of Water Resources (SDA).



Akhlak BUMN dan Nilai-Nilai Utama
Akhlak BUMN and Core Values

AKHLAK

AMANAH
TRUST
adalah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Hold on to the trust.

KOMPETEN
COMPETENT
adalah terus belajar dan mengembangkan kapasitas.
Continue to learn and develop capacity.

HARMONIS
HARMONY
adalah saling peduli dan menghargai perbedaan.
Care for each other and respect differences.

LOYAL
LOYAL
adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and prioritizing the interests of the Nation and the State.

ADAPTIF
ADAPTIVE
adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan ataupun menghadapi perubahan.
Continue to innovate and enthusiastic in moving or facing change.

KOLABORATIF
COLLABORATIVE
adalah membangun kerjasama yang sinergis.
Build synergistic cooperation.



Filosofi Logo

Logo Perusahaan telah berubah sebanyak 1 (satu) kali sejak berdirinya Perum Jasa Tirta II. Logo terbaru telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/DIR/35/PRD-PED/2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/01/PRT/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Perum Jasa Tirta II.

Logo Perusahaan merupakan representasi dari bentuk tetesan air, sebagai manifestasi filosofi air yang mengajarkan kerendahan hati, kebaikan, kegigihan, fleksibilitas, dan keseimbangan.

Logo Philosophy

Company logo has changed once since the establishment of Perum Jasa Tirta II. The latest logo has been ratified pursuant to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/DIR/35/PRD-PED/ 2017 concerning the Fifth Amendment to Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No.1/01/ PRT/2014 on Guidelines for Manuscript of Perum Jasa Tirta II.

The Company logo is a representation of the shape of water droplets, as a manifestation of water philosophy that teaches humility, kindness, tenacity, flexibility, and balance.

Tagline

Tagline tersebut memberikan pemahaman bahwa Perusahaan sebagai Perusahaan Pengelola Sumber Daya Air (SDA) berkomitmen untuk selalu memberikan kontribusi dan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan menjaga SDA tersebut untuk keberlangsungan negeri.

Tagline

The tagline provides an understanding that the Company as a Water Resources Management Company (SDA) is committed to always contribute and benefit to the welfare and prosperity of the country and maintain the water resources for the sustainability of the country.

Warna

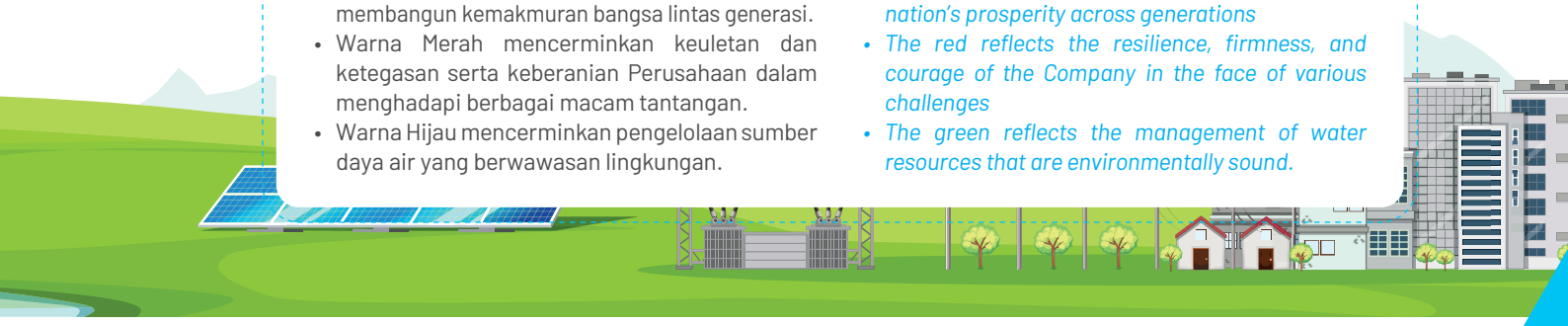
Gradasi warna menunjukkan Langkah Besar yang diambil PJT II dan Aspirasi Perusahaan terhadap masa depan yang lebih Positif dan Dinamis.

- Warna Biru mencerminkan Perusahaan yang andal, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab;
- Warna Putih melambangkan kesucian amanah yang diemban Perusahaan dalam ikut berkontribusi membangun kemakmuran bangsa lintas generasi.
- Warna Merah mencerminkan keuletan dan ketegasan serta keberanian Perusahaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan.
- Warna Hijau mencerminkan pengelolaan sumber daya air yang berwawasan lingkungan.

Color

The color gradation shows the Big Step taken by PJT II and the Company's Aspiration towards a more Positive and Dynamic future.

- *The Blue reflects a reliable, trustworthy, and responsible Company;*
- *The white symbolizes the sanctity of the trust that the Company carries in contributing to build the nation's prosperity across generations*
- *The red reflects the resilience, firmness, and courage of the Company in the face of various challenges*
- *The green reflects the management of water resources that are environmentally sound.*



Panduan Warna
Color Guide

ABU-ABU / GREY
R = 102 **G** = 102 **B** = 102
C = 62 **M** = 53 **Y** = 53 **K** = 25

HIJAU / GREEN
R = 153 **G** = 204 **B** = 51
C = 47 **M** = 0 **Y** = 100 **K** = 0

MERAH / RED
R = 255 **G** = 0 **B** = 0
C = 0 **M** = 100 **Y** = 100 **K** = 0

BIRU MUDA / LIGHT BLUE
R = 0 **G** = 157 **B** = 224
C = 78 **M** = 23 **Y** = 0 **K** = 0

NAVY
R = 0 **G** = 74 **B** = 169
C = 100 **M** = 83 **Y** = 5 **K** = 0

Logogram

Struktur logo terdiri dari logo gram (bentuk tetesan air) maupun *logotype* (Perum Jasa Tirta II) dan *tagline* (Air untuk Menghidupi Negeri).

The logo structure consists of logogram (water droplets), logotype (Perum Jasa Tirta II), and tagline (Water for Wellness).

Jasa Tirta II

Logotype Perum Jasa Tirta II, font Diavlo Black.otf dan *Tagline Air* untuk Menghidupi Negeri, font Amperzand.

Logotype Perum Jasa Tirta II, font: Diavlo Black.otf
Tagline Air untuk menghidupi negeri, font: Amperzand

Tujuan Perusahaan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan yang sehat.

Company's Objectives

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the field of national economy and development in general, particularly in the field of Water Resources Enterprise and Management, as well as optimizing the use of Company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.



Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business

Bidang dan Kegiatan Usaha

Profile Perum Jasa Tirta II sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Business Fields and Activities

Profile of Perum Jasa Tirta II in accordance with Government Regulation (PP) No. 25 Year 2022 on Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

Penguasaan SDA *Natural Resources Control*	Pengelolaan SDA *Natural Resources Control*	5 Wilayah Sungai *5 River Areas*	Wilayah Kerja *5 River Areas*
Penyediaan Air Baku, Air Bersih, PLTA dan PLTMH, Pengembangan SPAM, Hotel & Pariwisata, Laboratorium, Sewa Lahan. *Raw Water Supply, Clean Water, Hydropower and MHP, SPAM Development, Hotel & Tourism, Laboratory, Land Lease.*	Penyediaan Air Irigasi, Pelayanan & Penjaminan Ketersediaan Air, Konservasi, Pelaksanaan OP Prasaran SDA, Pengendalian Banjir. *Irrigation Water Supply, Services & Water Availability Assurance, Conservation, Implementation of Natural Resources Infrastructure OP, Flood Control.*	Wilayah Sungai Citarum sebagai wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, Cimanuk-Cisanggarung, Ciujung-Cidurian, Way Sekampung-Way Seputih. *Citarums River Basin as Ciliwung-Cisadane, Cimanuk-Cisanggarung, Ciujung-Cidurian, Way Sekampung-Way Seputih River Basins.*	Prov. DKI Jakarta, Prop. Jawa barat meliputi: Kab/kota Bandung, Kab. Indramayu, Kab. Subang, Kab. Purwakarta, Kab. Karawang, Kab/Kota Bekasi, Kab/Kota Bogor, Kab. Sumedang, Kab. Cirebon, Prop. Banten dan Prop. Lampung. *Prov. DKI Jakarta, Prop. West Java includes: Bandung district, Indramayu district, Subang district, Purwakarta district, Karawang district, Bekasi district, Bogor district, Sumedang district, Cirebon district, Banten province and Banten province. Banten and Prop. Lampung.*

Kegiatan Usaha

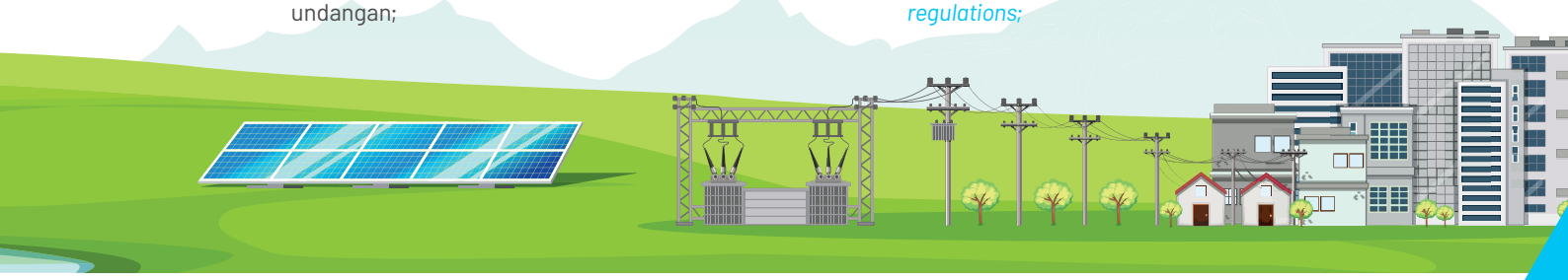
Dalam melaksanakan maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022, Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama dan dapat melakukan kegiatan usaha berupa:

- Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
- Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/ atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

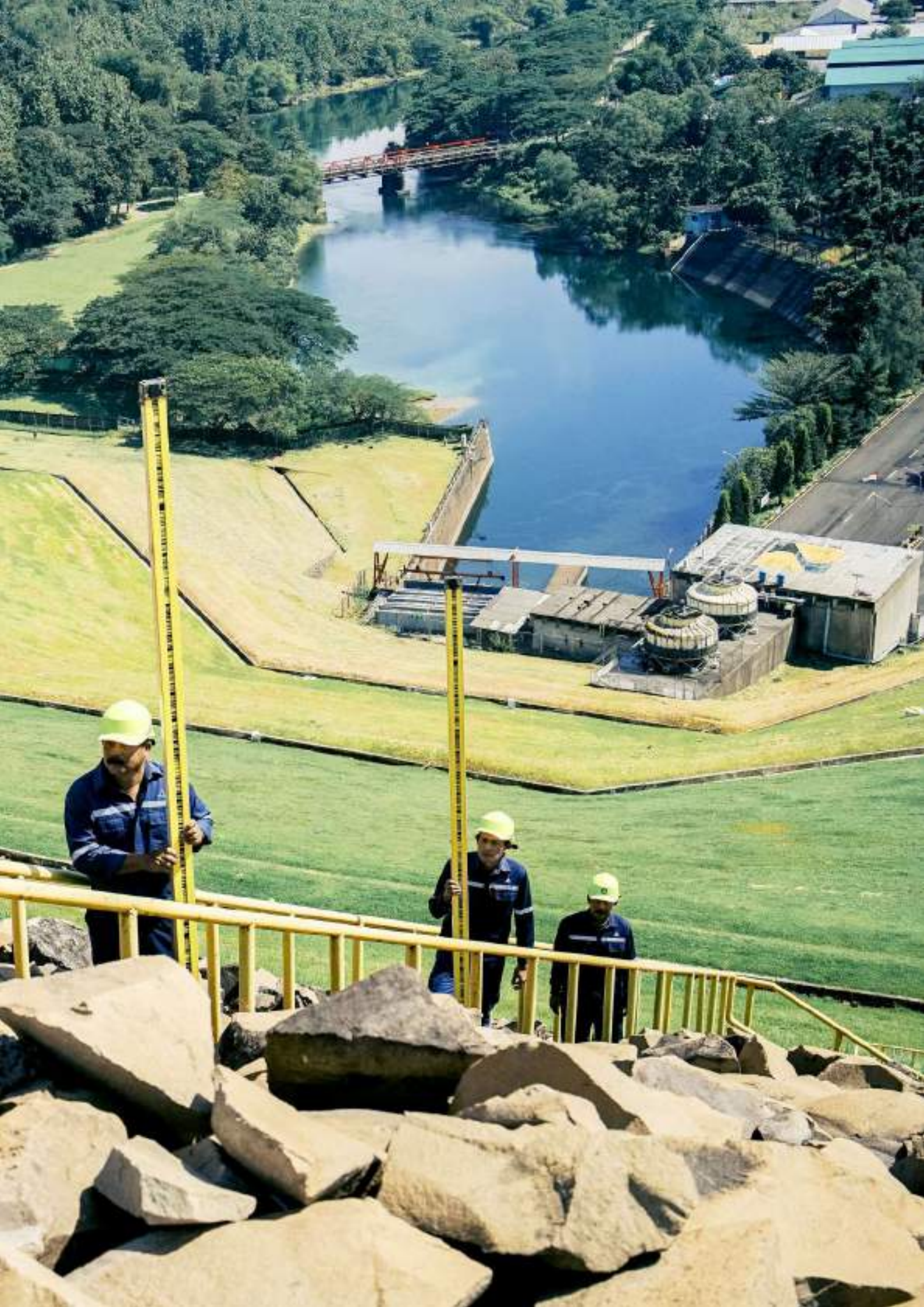
Business Activities

In carrying out the purposes and objectives of the Company in accordance with Government Regulation No. 25 of 2022, the Company carries out the main business activities and can carry out business activities in the form of:

- *Raw water services for drinking water, industry, agriculture, drainage, ports, power plants and fulfilment of other water needs;*
- *Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other than PT Perusahaan Listrik Negara in accordance with the provisions of laws and regulations;*







Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business

- Perusahaan menyelenggarakan pengembangan SPAM secara lokal dan / atau regional sampai dengan unit produksi, beserta perlengkapan dan perangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhan air minum dan / atau penyelenggara SPAM lainnya, dengan didasarkan pada rencana induk pengembangan SPAM yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan / atau pemerintah Daerah;
- Mengembangkan pembangkit listrik melalui Energi Baru Terbarukan (EBT);
- Penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan usaha minuman dalam kemasan lainnya;
- Perikanan budi daya pada Sumber Air;
- Usaha air bersih untuk kebutuhan industri termasuk tetapi tidak terbatas pada membantu proses Produksi, seperti air untuk sistem pendingin mesin; dan
- Melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air;
- Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi kemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan.

- *The company organises the development of SPAM locally and / or regionally up to the production unit, along with its operational equipment and devices for the fulfilment of drinking water needs and / or other SPAM providers, based on the SPAM development master plan stipulated by the Central Government and / or Regional government;*
- *Developing power plants through New Renewable Energy (EBT);*
- *Provision of Bottled Drinking Water (AMDK) and other bottled beverage businesses;*
- *Aquaculture fisheries on Water Sources;*
- *Clean water business for industrial needs including but not limited to assisting the Production process, such as water for engine cooling systems; and*
- *Conducting exploration, exploitation, and refining of mining materials from Water Sources;*
- *Conducting business activities in order to optimise the benefits of the potential resources owned by the Company.*

Produk dan Jasa

Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Perum Jasa Tirta II mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air Ir. H. Djuanda di Jatiluhur. Hingga saat ini, daya terpasang pada PLTA Ir. H. Djuanda telah meningkat menjadi 187,5 MW. Produksi listrik rata-rata dalam setahun adalah sebesar 830 juta kWh yang sebagian digunakan untuk pemakaian sendiri dan penugasan Pemerintah, sedangkan selebihnya dipasok ke PT PLN (Persero) melalui jaringan tegangan 150 kV dan 70 kV.

Penyediaan Air Baku

Sebagai pengelola bendungan Ir. H. Djuanda, Perum Jasa Tirta II bertugas mendistribusikan air baku, di mana saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar meter kubik per tahun yang disalurkan ke 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor, dan Bandung. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Products and Services

Electricity Generation and Distribution

Perum Jasa Tirta II manages the Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant in Jatiluhur. To date, the installed power of the Ir. H. Djuanda Hydropower Plant has increased to 187.5 MW. The average electricity production in a year is 830 million kWh which is partly used for own use and Government assignments, while the rest is supplied to PT PLN (Persero) through the 150 kV and 70 kV voltage networks.

Raw Water Supply

As the manager of the Ir. H. Djuanda dam, Perum Jasa Tirta II is in charge of distributing raw water, which currently has a production capacity of up to 1 billion cubic metres per year which is distributed to 15 Regional Drinking Water Companies (PDAMs) in the DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor and Bandung areas. It is also distributed to a number of industries in Bekasi, Karawang, Purwakarta, and Bandung.



Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business

Kepariwisataan
Untuk memanfaatkan potensi wisata, Perum Jasa Tirta II telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, dan wahana rekreasi air. Fasilitas pariwisata di kawasan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi bangunan hotel bintang tiga dengan nama Jatiluhur Valley and Resort yang beroperasi sejak 1967.

Di kawasan hotel ini, terdapat 33 bungalow dengan 30 kamar Hotel, dan 7 ruang pertemuan yang 5 diantaranya berada di Gedung Graha Vidya (terdiri dari 1 ruang pertemuan utama berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan lain sebagainya.

Pemanfaatan Lahan
Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan yang berupa lahan pertanian dan non pertanian seluas 689,18 ha melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta.

Jasa Laboratorium Kualitas Air
Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga menyediakan Jasa Pelayanan Laboratorium untuk pengujian kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan "Komite Akreditasi Nasional" Jawa Barat. Beberapa perusahaan besar industri makanan dan minuman di Indonesia seperti ABC dan Indofood telah menggunakan jasa laboratorium milik PJT II. Kemudian Rumah Sakit, perhotelan, dan pabrik tekstil dan kertas berskala besar juga telah menggunakan jasa pelayanan laboratorium milik PJT II selama ini.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah menyusun rencana strategis, di antaranya adalah diversifikasi usaha dengan berinvestasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PJT II menjalankan proyek SPAM Regional Jatiluhur I serta pengembangan SPAM Non Regional yang akan memperkuat posisi PDAM.

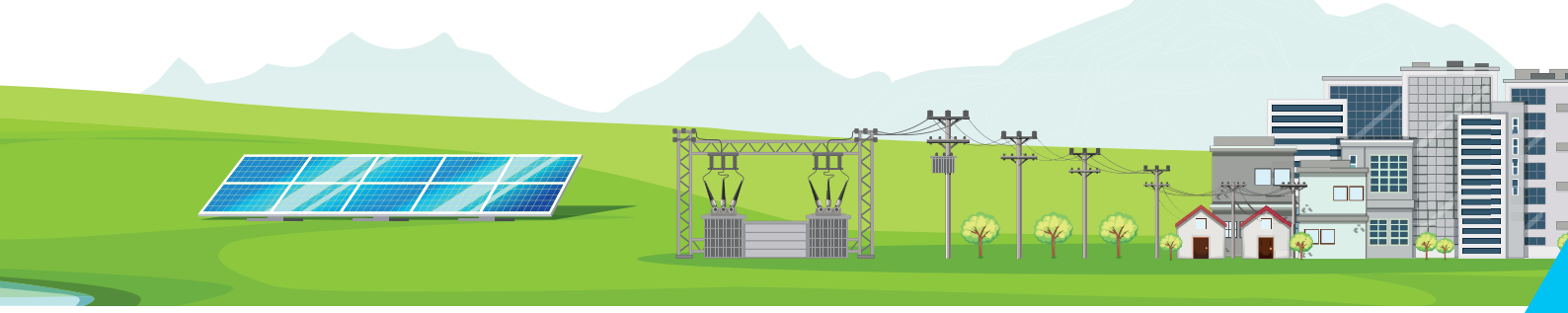
Tourism
To utilise the tourism potential, Perum Jasa Tirta II has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, and water recreation rides. Tourism facilities in the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Dam area have been equipped with a three-star hotel building with the name Jatiluhur Valley and Resort which has been operating since 1967.

In this hotel area, there are 33 bungalows with 30 hotel rooms, and 7 meeting rooms, 5 of which are located in the Graha Vidya Building (consisting of 1 main meeting room with a maximum capacity of 60 people), and 2 separate meeting rooms located in the Istora Restaurant area with a capacity of 80 people each. The tourism area is also equipped with swimming pool and water recreation facilities in the form of a waterboom under the name Jatiluhur Water World (JWW), cruise ships, water ski boating, and so on.

Land Utilisation
As an effort to optimise and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilises land in the form of agricultural and non-agricultural land covering an area of 689.18 ha through a lease system and business cooperation with various agencies, both State-Owned Enterprises (BUMN) or private.

Water Quality Laboratory Services
Perum Jasa Tirta II (PJT II) also provides Laboratory Services for water quality testing which is one of the reference laboratories of the West Java "National Accreditation Committee". Several large food and beverage industry companies in Indonesia such as ABC and Indofood have used PJT II's laboratory services. Hospitals, hotels, and large-scale textile and paper factories have also used PJT II's laboratory services over the years.

Development of Drinking Water Supply System
Throughout 2020, the Company has developed strategic plans, including business diversification by investing in the Drinking Water Supply System (SPAM). PJT II is running the Jatiluhur I Regional SPAM project as well as the development of Non-Regional SPAM which will strengthen the position of PDAM.



Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Demineral". AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan pH antara 5 -7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (03) dan ultraviolet. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan serta mitra/stakeholders Perusahaan. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) "Jatiluhur Demineral" di produksi dengan beberapa variant kemasan, sebagai berikut:

Bottled Drinking Water (AMDK)

Along with the increasing need for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to providing drinking water for people in the Company's service area. This commitment is realised in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Demineral". Jatiluhur AMDK includes Demineral drinking water with pH between 5 -7.5 and TDS below 10 mg/litre. Jatiluhur Demineral Water is processed with Reverse Osmosis (RO) system, sterilised with ozone (03) and ultraviolet. The target market of Jatiluhur Demineralised Water includes the Company's employees and their families, the community in the Company's working area and the Company's partners/stakeholders. Bottled Drinking Water (AMDK) "Jatiluhur Demineral" is produced with several variants of packaging, as follows:

KEMASAN DAN ISI BERSIH *Packaging and Net Content*	NOMOR PENDAFTARAN PANGAN *Food Registration Number*	SERTIFIKAT HALAL *Halal Certification*	SERTIFIKAT SNI *SNI Certification*	KAPASITAS PRODUKSI *Production Capacity*
Gelas Plastik 240 ml *Plastic Glass 240 ml*	BPOM RI MD 265228001325	No. 01121081261212	01-3553-2006 Nomor 597/LSIPB/ SNIPr/2015SNI ISO 9001:2008	6.500 Gelas/jam
Botol Plastik 330 ml *Plastic Bottle 330 ml*				1.500 Botol/jam
Botol Plastik 600 ml *Plastic Bottle 600 ml*	BPOM RI MD 265228003325			1.200 Botol/jam
Galon Plastik (19 Ltr) *Plastic Gallon (19 Ltr)*	BPOM RI MD 256228002325			200 Galon/jam





Selain itu, pada sistem pengairan milik Perusahaan juga terdapat banyak bangunan terjunan dengan potensi minihidro yang banyak menghasilkan listrik mulai dari 50 kVa hingga 5.000 kVa.

Penyediaan Air Baku

Sebagai pengelola bendungan Ir. H. Djuanda, Perum Jasa Tirta II bertugas mendistribusikan air baku, di mana saat ini memiliki kapasitas produksi hingga 1 miliar meter kubik per tahun yang disalurkan ke 15 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor, dan Bandung. Selain itu juga disalurkan ke sejumlah industri yang ada di wilayah Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.

Kepariwisataan

Keberadaan bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perum Jasa Tirta II telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, *resort*, bungalow, restoran, dan wahana rekreasi air.

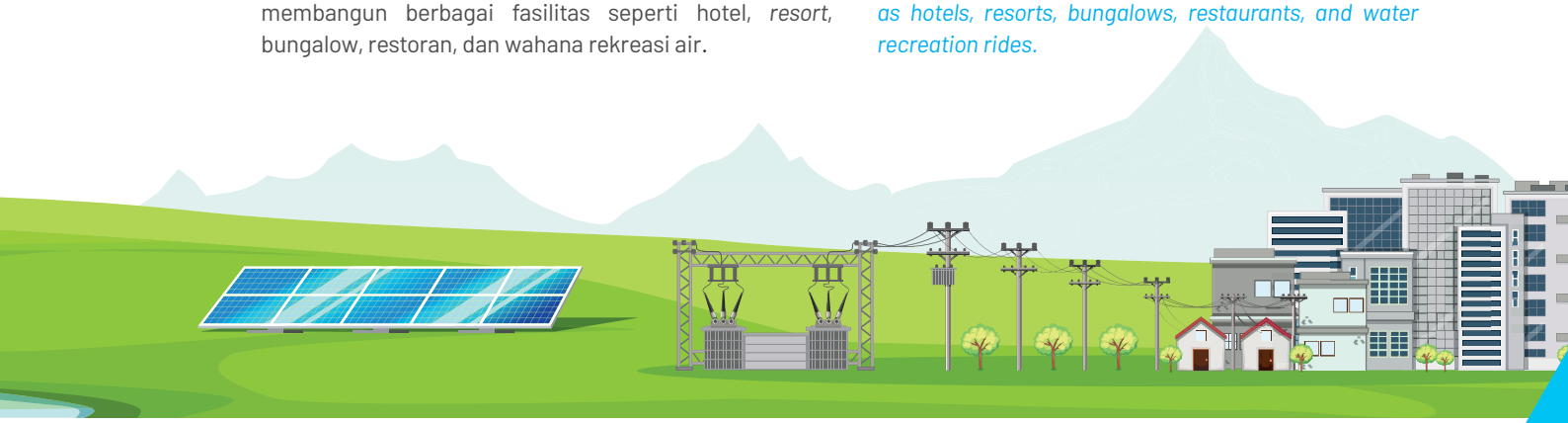
In addition, there are numerous spillway constructions with minihidro potential on the Company's irrigation systems that can generate electricity ranging from 50 kVA to 5,000 kVA.

Raw Water Supply

As the manager of Ir. H. Djuanda dam, Perum Jasa Tirta II is in charge of distributing raw water, which currently has the production capacity of up to 1 billion cubic meters per year which is distributed to 15 Municipal Water Companies (PDAM) in Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Indramayu, Bogor and Bandung. It is also channeled to a number of industries in the region of Bekasi, Karawang, Purwakarta, and Bandung.

Tourism

The existence of Ir. H. Djuanda Jatiluhur dam with its beautiful scenery, combined with the splendor of the dam building is a special attraction for tourists and become one of the destinations of tourism in West Java. In order to take advantage of tourism potential in this area, Perum Jasa Tirta II has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, and water recreation rides.



Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business



Fasilitas pariwisata di kawasan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi bangunan hotel bintang tiga dengan nama Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan hotel ini, terdapat 33 bungalow dengan 30 kamar Hotel, dan 7 ruang pertemuan yang 5 di antaranya berada di Gedung Graha Vidya (terdiri dari 1 ruang pertemuan utama berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing-masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa *waterboom* dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan lain sebagainya.

Tourism facilities in the area of Ir.H.Danda Jatiluhur Dam has been equipped with three-star hotel building under Jatiluhur Hotel Resort which operated since 1967. There are 33 bungalows with 30 hotel rooms in the area of this hotel. Also, seven meeting rooms, five of which are located in Graha Vidya Building (consisting of one main meeting room with the capacity of 800 people, and 4 meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 separate meeting rooms located in the Istora Restaurant with the capacity of 80 people, each. The tourism area is also equipped with a swimming pool and water recreation facilities such as waterboom Jatiluhur Water World (JWW), cruises, water ski boating, and so forth.

Pemanfaatan Lahan
Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan yang berupa lahan pertanian dan non pertanian seluas 689,18 ha melalui sistem sewa dan kerja sama

Land Utilization
As an effort to optimize and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilizes land in the form of agricultural and non-agricultural land covering 689.18 ha through leasing system and business cooperation



Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business



usaha dengan berbagai instansi baik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau swasta, seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PDAM Kabupaten/Kota, dan industri serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian.

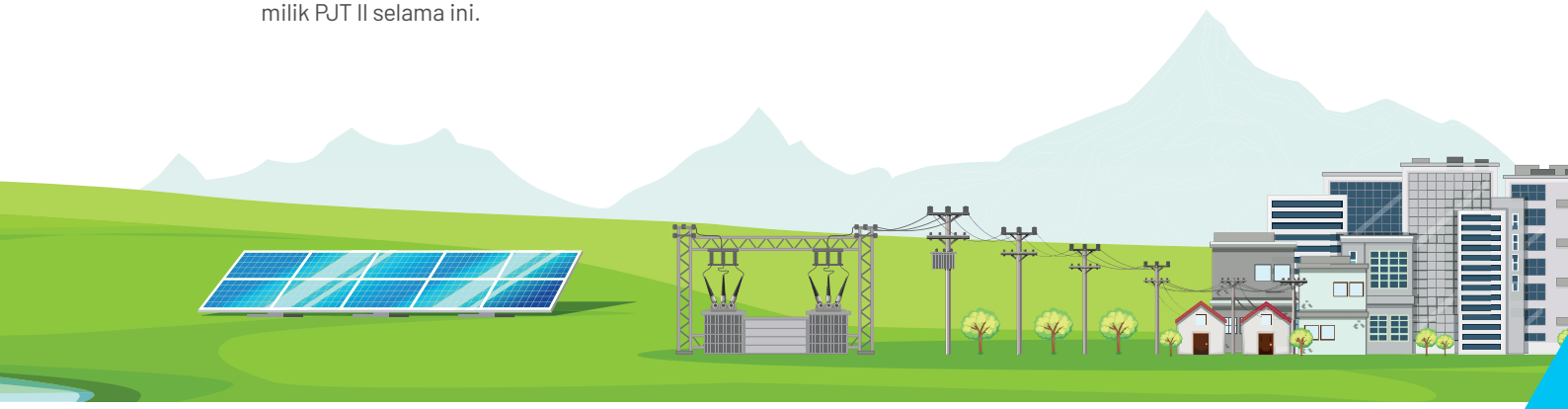
Jasa Laboratorium Kualitas Air

Perum Jasa Tirta II (PJT II) juga menyediakan Jasa Pelayanan Laboratorium untuk pengujian kualitas air yang merupakan salah satu laboratorium rujukan "Komite Akreditasi Nasional" Jawa Barat. Beberapa perusahaan besar industri makanan dan minuman di Indonesia seperti ABC dan Indofood telah menggunakan jasa laboratorium milik PJT II. Kemudian Rumah Sakit besar, perhotelan, dan apartemen hingga pabrik tekstil dan kertas berskala besar juga telah menggunakan jasa pelayanan laboratorium milik PJT II selama ini.

with various agencies, either state-owned (SOE) or private sector such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Regency/Municipal Water Company, industry, and individual communities that rent land for agriculture.

Water Quality Laboratory Services

Perum Jasa Tirta II (PJT II) also provides Laboratory Services for water quality testing, which is one of the reference laboratories for West Java's National Accreditation Committee. Some major food and beverage industries in Indonesia, such as ABC and Indofood, have used this laboratory service owned by PJT II. Then large hospitals, hotels and apartments, to large-scale textile and paper factories have also used the services owned by PJT II to date.



Bidang Usaha Perusahaan
Company's Line of Business

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Sepanjang tahun 2023 Perusahaan telah menyusun rencana strategis, di antaranya adalah pengembangan usaha Sumber Daya Air (SDA) dengan berinvestasi di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). PJT II mendukung pengembangan proyek-proyek SPAM untuk mendukung kecukupan penyediaan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait.

Development of Drinking Water Supply System
In 2023, the company has developed strategic plan, among them is the development of the Water Resources (SDA) business by investing in the Drinking Water Supply System (SPAM). PJT II supports the development of SPAM projects to support the adequacy of providing clean water for the community in collaboration with relevant stakeholders.

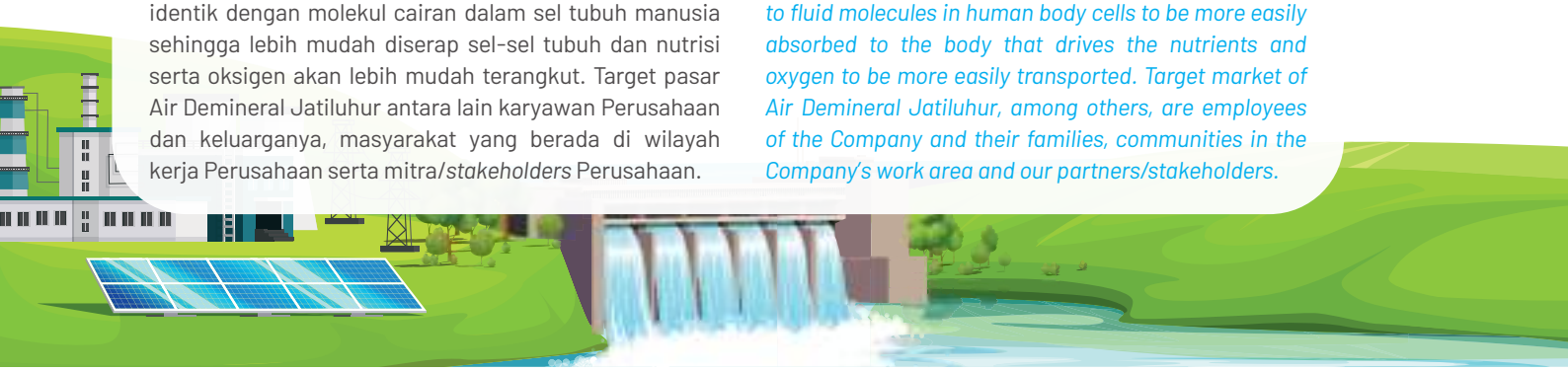
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral" dengan keterangan sebagai berikut:

Bottled Drinking Water
Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to provide drinking water to communities in the Company's service areas. This commitment is realized in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral" with the following information:

KEMASAN DAN ISI BERSIH / Packaging And Net Content	NOMOR PENDAFTARAN PANGAN Food Registration Number	SERTIFIKAT HALAL Halal Certification	SERTIFIKAT SNI SNI Certification	KAPASITAS PRODUKSI Production Capacity
Gelas Plastik 240 ml *Plastic Glass 240 ml*	BPOM RI MD 265228001325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	6.500 gelas/jam cup/ hour
Botol Plastik 330 ml *Plastic Bottle 330 ml*	BPOM RI MD 265228003325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	1.500 botol/jam bottle/ hour
Botol Plastik 600 ml *Plastic Bottle 600 ml*	BPOM RI MD 256228002325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	1.200 botol/jam bottle/ hour
Galon Plastik *Plastic Gallon*	BPOM RI MD 256228002325	No. 01121081261212	01-3553-2006 nomor 597/LSIPB /SNIPr/2015 SNI ISO 9001:2008	200 galon/jam gallon/ hour

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan PH antara 5 -7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan ozon (O3) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Biomagnetic serta *Far Infrared* untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H2O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan serta mitra/*stakeholders* Perusahaan.

AMDK Jatiluhur is demineralized drinking water with PH between 5 – 7.5 and TDS below 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur is processed by Reverse Osmosis (RO) system, sterilized with ozone (O3) and ultraviolet, and processed again with Biomagnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecule. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 (H2O) molecules that are identical to fluid molecules in human body cells to be more easily absorbed to the body that drives the nutrients and oxygen to be more easily transported. Target market of Air Demineral Jatiluhur, among others, are employees of the Company and their families, communities in the Company's work area and our partners/stakeholders.






MANAG
REPORT



LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

2023

Laporan Dewan Pengawas
Supervisiory Board Report



Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of Supervisory Board

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pemilik Modal dan para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Laporan Tugas pengawasan periode Januari – Desember 2023 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jalannya perusahaan, sekaligus perwujudan GCG. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Pengawas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta didukung penuh oleh Komite Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berupaya menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara lebih efektif dan efisien.

Perkembangan tindaklanjut permasalahan strategis dibahas secara intensif dalam kesempatan rapat Dewan Pengawas dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi. Dewan Pengawas memberikan saran/ masukan kepada Direksi guna percepatan penyelesaian permasalahan stategis dimaksud.

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai kiranya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, sementara itu, untuk program yang capaian kinerjanya belum mencapai target, Dewan Pengawas akan mendorong dalam peningkatannya. Ke depan, Dewan Pengawas akan terus berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Sepanjang tahun 2023, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tercermin dari sejumlah program kerja yang direalisasikan, di antaranya kunjungan kerja untuk melihat proses operasi secara langsung, meninjau kesesuaian prosedur yang diterapkan, dan menyelaraskan proses kerja dengan prinsip-prinsip GCG. Dewan Pengawas berupaya mengawasi dan meninjau seluruh langkah strategi yang diambil Direksi dengan memberikan arahan atau rekomendasi yang disampaikan melalui mekanisme rapat gabungan maupun penerbitan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Our respected Capital Owners and stakeholders,

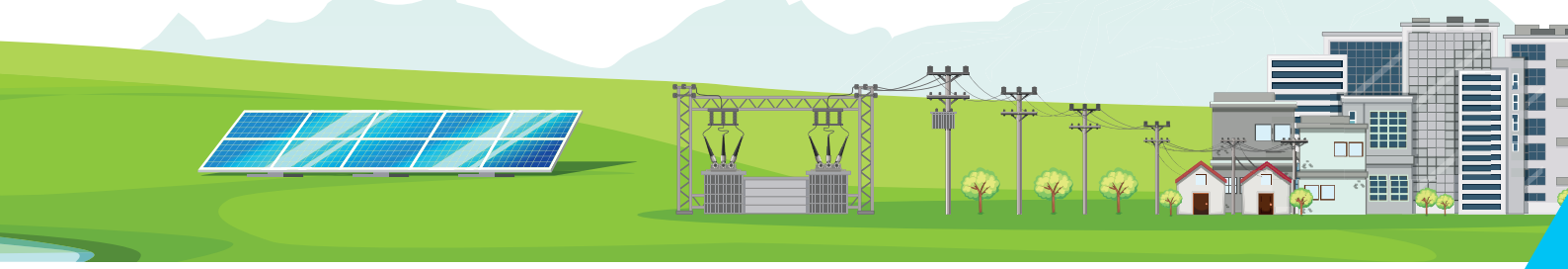
The Supervisory Task Report for the period January - December 2023 is a form of accountability of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II in carrying out its supervisory and advisory duties on the running of the company, as well as a manifestation of GCG. In carrying out supervisory and advisory activities, the Supervisory Board is guided by the provisions of the applicable laws and regulations and is fully supported by the Supervisory Board Committee and the Secretary of the Supervisory Board. The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II endeavours to perform its supervisory and advisory duties more effectively and efficiently.

The progress of follow-up on strategic issues is discussed intensively in the Supervisory Board meetings and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors. The Supervisory Board provides advice/input to the Board of Directors to accelerate the resolution of these strategic issues.

Various performance successes that have been achieved should be maintained and even improved in the coming years, while for programmes whose performance achievements have not yet reached the target, the Supervisory Board will encourage their improvement. In the future, the Supervisory Board will continue to strive to make improvements and improvements in the implementation of the company's supervisory duties.

SUPERVISION OF STRATEGY IMPLEMENTATION

Throughout 2023, the supervisory function carried out by the Supervisory Board was reflected in a number of work programs that were realised, including working visits to see the operating process firsthand, reviewing the suitability of the procedures implemented, and aligning work processes with GCG principles. The Supervisory Board endeavours to supervise and review all strategic steps taken by the Board of Directors by providing direction or recommendations delivered through the mechanism of joint meetings and the issuance of letters/responses



surat/tanggapan baik kepada Direksi maupun Pemilik Modal. Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin dilaksanakan setiap bulannya, baik rapat internal maupun gabungan. Agenda rapat Dewan Pengawas membahas hal-hal yang bersifat rutin yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengawas beserta Organ serta melakukan reviu kinerja berkala perseroan (baik operasional produksi maupun keuangan) dan permasalahan yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen serta membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Selama periode Tahun 2023, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan 15 (lima belas) Rapat Internal Dewan Pengawas dan 12 (dua belas) Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Pengawas,

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 13 kali dan menerbitkan 15 surat/tanggapan kepada Direksi dan Pemilik Modal. Rangkuman pokok-pokok arahan atau rekomendasi yang disampaikan Dewan Pengawas kepada Direksi selama tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Internal, Tata Kelola Aset Dan Audit Internal
2. Penguatan Manajemen Risiko
3. Pelaksanaan Investasi

PROSPEK USAHA

Dewan Pengawas telah melakukan peninjauan atas rancangan target usaha yang diajukan oleh Direksi dalam Rancangan Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023. Meninjau RKAP tersebut, Dewan Pengawas menanggapi secara positif prospek usaha yang telah disusun Direksi yang mana pada prosesnya telah disandarkan pada analisis yang komprehensif mengenai asumsi-asumsi ekonomi makro tahun 2023 dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja Perusahaan.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas secara periodik (tahunan) melakukan penilaian atas efektivitas kinerja komite dibawah Dewan Pengawas. Sepanjang tahun 2023, komite-komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas tersebut telah menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan seluruh

to both the Board of Directors and the Capital Owners. Supervisory Board meetings are regularly held every month, both internal and joint meetings. The agenda of the Supervisory Board meetings discusses matters of a routine nature which include the implementation and evaluation of the activities of the Supervisory Board and its Organs as well as reviewing the company's periodic performance (both production and financial operations) and issues that need clarification from management and discussing matters that require the approval of the Supervisory Board. During the 2023 period, the Supervisory Board held 15 (fifteen) Internal Meetings of the Supervisory Board and 12 (twelve) Joint Meetings of the Board of Directors and Supervisory Board,

The Supervisory Board held 13 joint meetings with the Board of Directors and issued 15 letters/responses to the Board of Directors and Capital Owners. A summary of the main directions or recommendations submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors during 2023 includes the following:

1. Strengthening the Internal Control System, Asset Governance and Internal Audit.
2. Strengthening Risk Management
3. Investment Implementation

BUSINESS OUTLOOK

The Supervisory Board has reviewed the draft business targets proposed by the Board of Directors in the Company Budget Work Plan (RKAP) for 2023. In reviewing the RKAP, the Supervisory Board responded positively to the business outlook which in the process has been based on a comprehensive analysis of macroeconomic assumptions for 2023 and other factors affecting the Company's performance.

ASSESSMENT OF THE PERFORMANCE OF THE COMMITTEES UNDER THE SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board periodically (annually) assesses the effectiveness of the performance of the committees under the Supervisory Board. Throughout 2023, the committees established by the Supervisory Board have performed their functions, duties and responsibilities well. This is reflected in the



rencana kerja masing-masing komite sesuai dengan yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023.

Pelaksanaan rencana kerja komite-komite tersebut dapat dilakukan dilakukan melalui forum rapat komite dengan mengundang Direktorat, Divisi maupun Unit kerja terkait maupun secara tidak langsung dengan melakukan evaluasi terhadap laporan yang telah diterima untuk kemudian seluruhnya dilakukan penelaahan secara mendalam oleh masing-masing komite dan kemudian hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengawas.

Selama tahun 2023, Komite Dewan Pengawas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan melaksanakan rapat selama tahun 2023.

Selain itu Dewan Pengawas dan Komite telah menyusun berbagai Kebijakan dan Tata Tertib Kerja, yang selalu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi. Kebijakan dan Tata Tertib Kerja tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan setiap tindakan dan kepastian pertanggung-jawaban. Struktur dan komposisi keanggotaan Dewan Pengawas dan Komite telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dewan Pengawas memberikan apresiasi atas pencapaian program maupun rencana kerja dan berharap kinerja Komite dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih dalam menjaga Perusahaan agar lebih resilient dalam menghadapi segala tantangan dan memperoleh kinerja terbaik dalam industri di Indonesia.

PENILAIAN ATAS KINERJA MANAJEMEN

Penilaian Dewan Pengawas mengenai kinerja Manajemen Perusahaan Tahun 2023 terdiri dari aspek kuantitatif maupun kualitatif atas realisasi dari Rencana Kerja Tahunan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menilai kinerja Perusahaan masih baik terlihat dari Perusahaan tetap dapat membukukan laba dan merealisasikan strategi inisiatif untuk mendukung pencapaian target tahun 2023 meskipun di tengah

implementation of all work plans of each committee in accordance with those set at the beginning of 2023.

The implementation of the work plans of these committees can be carried out through the committee meeting forum by inviting the Directorate, Division and related work units or indirectly by evaluating the reports that have been received and then all of them are reviewed in depth by each committee and then the results are submitted in writing to the Supervisory Board.

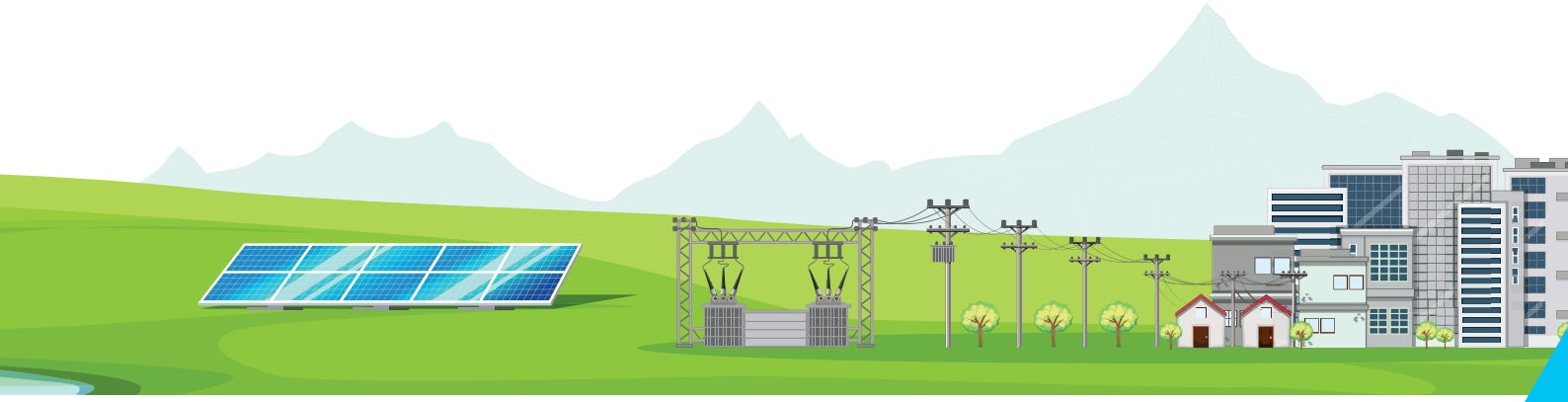
During 2023, the Supervisory Board Committees have carried out their duties and responsibilities well and held meetings during 2023.

In addition, the Supervisory Board and Committees have developed various Policies and Work Rules, which are always adjusted to the applicable provisions and challenges faced. These policies and procedures are used as guidelines in carrying out every action and ensuring accountability. The structure and composition of the Supervisory Board and Committee membership are in accordance with applicable regulations.

The Supervisory Board appreciates the achievement of the programme and work plan and hopes that the Committee's performance can be further improved so that it can contribute more in maintaining the Company to be more resilient in facing all challenges and obtain the best performance in the industry in Indonesia.

ASSESSMENT OF MANAGEMENT PERFORMANCE

The Supervisory Board's assessment of the Company's Management performance in 2023 consists of quantitative and qualitative aspects of the realization of the Annual Work Plan that was previously submitted by the Board of Directors and approved by the Supervisory Board. The Supervisory Board assesses that the Company's performance is still good, as seen from the Company's continued ability to record profits and realize strategic initiatives to support the achievement of the 2023 target even in the midst of



PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Peran dan amanat dalam menjaga dan mengelola Sumber Daya Air bagi kepentingan sosial dan komersial mendorong Perum Jasa Tirta II untuk senantiasa menempatkan praktik usaha yang bertanggung jawab dan etis sebagai sebuah nilai yang harus terpelihara dengan baik. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan melalui pengelolaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan dan pemeliharaan hubungan yang sinergis dan harmonis dengan pemangku kepentingan dalam integrasi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). Sebagai salah satu aspek prioritas, Dewan Pengawas berupaya memastikan bahwa Perusahaan menaruh komitmen dalam memerhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sebagai modal

PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS TERHADAP STRATEGIS PERUSAHAAN

Dewan Pengawas telah menjalankan tugasnya sebagai fungsi pengawasan kepada Perusahaan antara lain dengan memberikan nasihat maupun pendapat kepada Direksi dalam menetapkan kebijakan dan dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan selama tahun 2023. Dewan Pengawas juga memfokuskan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan strategis Perusahaan, terutama pada hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Pengawas selama tahun 2023, yaitu beberapa aspek namun tidak terbatas pada aspek perkreditan, operasional, perkembangan teknologi informasi, tata kelola terintegrasi dan budaya perusahaan.

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dewan Pengawas menyadari bahwa komitmen internal dalam mewujudkan prinsip-prinsip dan praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) harus senantiasa dipelihara untuk mendukung budaya sadar GCG yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Dewan Pengawas sebagai organ manajemen utama memegang peranan penting dalam mengawasi dan menjamin bahwa setiap aktivitas usaha telah menerapkan prinsip GCG dan kepatuhan sebagai fondasinya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan tujuan GCG dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan daya saing, serta menghindari segala praktik kecurangan (fraud) yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi reputasi Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

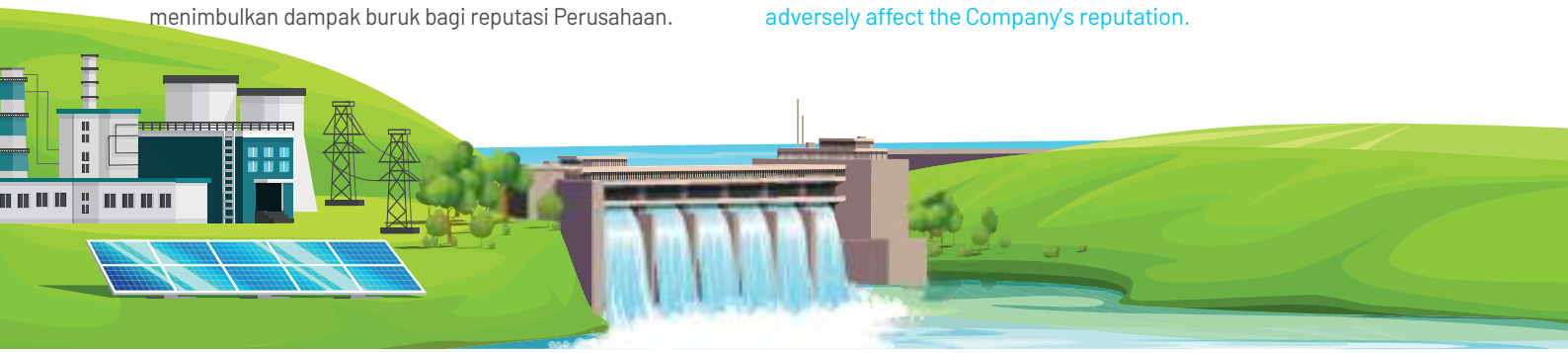
The role and mandate in maintaining and managing Water Resources for social and commercial interests encourages Perum Jasa Tirta II to always place responsible and ethical business practices as a value that must be well maintained. The commitment is then realised through sustainable management of social, economic and environmental impacts and the maintenance of synergistic and harmonious relationships with stakeholders in the integration of Corporate Social Responsibility programmes. As one of the priority aspects, the Supervisory Board endeavours to ensure that the Company is committed to the welfare of the community and environmental sustainability as capital.

SUPERVISORY BOARD'S STRATEGIC SUPERVISION OF THE COMPANY

The Supervisory Board has carried out its duties as a supervisory function to the Company, among others, by providing advice and opinions to the Board of Directors in determining policies and in carrying out the management of the Company during 2023. The Supervisory Board also focused its supervision on the implementation of the Company's strategic policies, especially on matters of concern to the Supervisory Board during 2023, namely several aspects but not limited to lending, operations, information technology development, integrated governance and corporate culture.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

The Supervisory Board recognises that internal commitment in realising the principles and best practices of Good Corporate Governance must always be maintained to support a comprehensive and sustainable GCG-aware culture. In this regard, the Supervisory Board as the main management organ plays an important role in overseeing and ensuring that every business activity has implemented GCG principles and compliance as its foundation. This is intended to optimise the role and purpose of GCG in creating a healthy business climate, increasing competitiveness, and avoiding any fraudulent practices that may adversely affect the Company's reputation.



Dilatarbelakangi kesadaran akan pentingnya GCG dalam mendukung usaha yang berkelanjutan, Dewan Pengawas mendorong optimalisasi penerapan GCG melalui penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG demi menjamin praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal, serta relevan dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan. Perum Jasa Tirta II telah memiliki Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan sebagai acuan pedoman dasar bagi seluruh insan PJT II dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Untuk menggenapkan komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap optimalisasi penerapan GCG, Perusahaan telah membentuk road map GCG yang berperan sebagai kerangka acuan arah implementasi dan pengembangan GCG 5 tahun ke depan. Road map GCG Perum Jasa Tirta II merupakan grand strategy dan milestone implementasi GCG berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun sasaran akhir road map GCG adalah terciptanya tata kelola yang berkelanjutan pada seluruh proses bisnis oleh seluruh organ perusahaan.

With the awareness of the importance of GCG in supporting sustainable business, the Supervisory Board encourages the optimization of GCG implementation through strengthening various GCG policies and manuals to ensure best practices, reliable systems and procedures, and relevance to the Company's business development and regulations. Perum Jasa Tirta II has a Corporate Governance Guideline Book as a basic reference for all PJT II personnel in implementing the principles. To fulfill Perum Jasa Tirta II's commitment to optimizing GCG implementation, the Company has formed a GCG road map that acts as a reference framework for the direction of GCG implementation and development for the next 5 years. The Perum Jasa Tirta II GCG road map is a grand strategy and milestone for the implementation of sustainable GCG by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The final target of the GCG road map is the creation of sustainable governance in all business processes by all company organs.

STRATEGI ANTI FRAUD

Perum Jasa tirta II telah mengukuhkan komitmennya untuk menegakan Intregitas dan transparasi melalui Implementasi dan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di beberapa divisi dan unit Kerja Perum Jasa Tirta juga telah mempunyai Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II nomor: KBS- 11 DIR/05/2022 tentang Pijakan Anti Penyuapan PJT II yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dalam mengimplementasikan dan meningkatkan keefektifan Sistem Manajemen anti Penyuapan guna mencegah, mendekteksi dan menangani penyuapan dilingkungan Perum Jasa Tirta II Pengawas sangat mendukung upaya yang dilakukan Perusahaan dalam pemberantasan KKN Khususnya terkait strategi dan manajemen anti penyuapan.

ANTI FRAUD STRATEGY

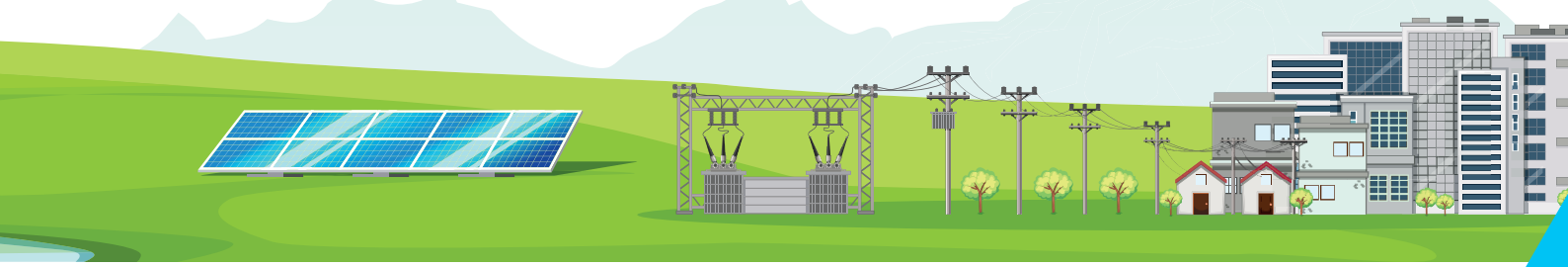
Perum Jasa Tirta II has confirmed its commitment to uphold integrity and transparency through the implementation and certification of ISO 37001: 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) in several divisions and work units Perum Jasa Tirta has also had Perum Jasa Tirta II Board of Directors Regulation number: KBS- 11 DIR/05/2022 concerning PJT II Anti-Bribery Policy which aims to provide a comprehensive overview in implementing and improving the effectiveness of the Anti-Bribery Management System to prevent, detect and handle bribery within Perum Jasa Tirta II Supervisors strongly support the efforts made by the Company in the eradication of KKN, especially related to anti-bribery strategies and management.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Perusahaan melarang pemberian dan penerimaan gratifikasi dalam bentuk apapun dan dengan siapapun sesuai undang-undang yang berlaku. Komitmen Perusahaan terhadap larangan gratifikasi terus digaungkan, antara lain dengan menerbitkan kebijakan mengenai Ketentuan Anti Penyuapan dan Pengendalian Gratifikasi yang dijadikan pedoman seluruh insan PJT II dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi dan penyuapan yang dapat merugikan kepentingan PJT II dan bertentangan dengan prinsip GCG

GRATIFICATION CONTROL

The Company prohibits the giving and receiving of gratuities in any form and with anyone in accordance with applicable laws. The Company's commitment to the prohibition of gratuities continues to be echoed, among others, by issuing a policy on Anti-Bribery Provisions and Gratuities Control which is used as a guideline for all PJT II personnel in preventing gratuities and bribery practices that can harm the interests of PJT II and conflict with GCG principles so as to create a



sehingga tercipta lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai dengan Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomer: KBS-01/DIR/06/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Lampiran VII): Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.

PENGELOLAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Dewan Pengawas memandang WBS memiliki peran penting dalam mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan pelaporan pelanggaran WBS merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan publikasi negatif terhadap Perusahaan yang berpengaruh terhadap reputasi Perusahaan yang sejalan dengan salah satu pilar pada Strategi Anti Fraud yaitu pilar deteksi sebagaimana ketentuan yang di atur oleh regulator. Dalam pelaksanaannya, Perusahaan telah memiliki sarana pelaporan pelanggaran yang bersifat independen dan rahasia serta memiliki mekanisme perlindungan pelapor.

PENGADUAN PELANGGARAN

Dewan Pengawas berpendapat bahwa secara umum penerapan WBS di Perusahaan telah berjalan dengan baik. Dewan Pengawas menyarankan agar sosialisasi dan penerapan WBS dilakukan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional dan berintegritas.

RENCANA KERJA 2023

Dewan Pengawas telah memberikan tanggapan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 yang telah disusun oleh Direksi terkait Kinerja keuangan, Kinerja Operasional, Rencana Investasi, Manajemen Resiko dan hal-hal yang harus menjadi perhatian. Untuk peningkatan efektivitas anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian manajemen serta sebagai media akuntabilitas, Dewan Pengawas menyampaikan beberapa catatan.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU01/2020tanggal3Januari2020,SK-092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/ MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota

conducive control environment in accordance with the Joint Decree of the Board of Supervisors and Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II Number: KBS-01/DIR/06/2023 on Good Corporate Governance Guidelines (Appendix VII): About Gratification Control Guidelines.

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) MANAGEMENT

The Supervisory Board views that the WBS has an important role in encouraging the implementation of good corporate governance. The implementation of WBS violation reporting is part of efforts to prevent violations and negative publications against the Company that affect the Company's reputation, which is in line with one of the pillars in the Anti Fraud Strategy, namely the detection pillar as regulated by the regulator. In its implementation, the Company has a means of reporting violations that is independent and confidential and has a whistleblower protection mechanism.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

The Supervisory Board is of the opinion that in general the implementation of WBS in the Company has been running well. The Supervisory Board recommends that the socialisation and implementation of WBS be carried out on an ongoing basis so as to create a clean, professional and integrity work environment.

WORK PLAN 2023

The Supervisory Board has responded to the proposed 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors regarding financial performance, operational performance, investment plans, risk management and matters of concern. To increase the effectiveness of the budget as a management planning and control tool and as a medium of accountability, the Supervisory Board submitted several notes.

COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD

In accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II Number: SK-4/MBU01/2020 dated 3 January 2020, SK- 092/MBU/03/2020 dated 23 March 2020, SK-340/ MBU/10/2020 dated 21 October 2020, SK-214/MBU/09/2022 dated 21 September 2022 concerning the



Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, maka susunan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

1. Kelik Wirawan Wahyu Widodo - Ketua Dewan Pengawas
2. Nuning Sri Rejeki Wulandari - Anggota Dewan Pengawas
3. Romy Marcandi - Anggota Dewan Pengawas
4. Fakhturohman Taufik - Anggota Dewan Pengawas Independen

dismissal and appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, the composition of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II is as follows:

1. *Kelik Wirawan Wahyu Widodo - Chairman of the Supervisory Board*
2. *Nuning Sri Rejeki Wulandari - Member of the Supervisory Board*
3. *Romy Marcandi - Member of the Supervisory Board*
4. *Fatkhurohman Taufik - Independent Supervisory Board Member*

PENUTUP

Atas nama Dewan Pengawas, kami memberikan apresiasi kepada Direksi yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu menghadapi tantangan global dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola secara konsisten sehingga Perusahaan masih dapat terus berjalan berkesinambungan dan optimal.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh stakeholder atas kepercayaan dan dukungannya kepada Perusahaan. Kepada seluruh pekerja PJT II dan Perusahaan Anak kami memberikan penghargaan disertai ungkapan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2023 walau dalam kondisi yang sulit, seluruh pekerja memberikan seluruh daya upayanya dan menjadi tangguh demi memajukan Perusahaan agar tetap tumbuh.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

CLOSING STATEMENT

On behalf of the Supervisory Board, we would like to express our appreciation to the Board of Directors for performing their duties well and facing global challenges while consistently implementing the principles of governance so that the Company can continue to run sustainably and optimally.

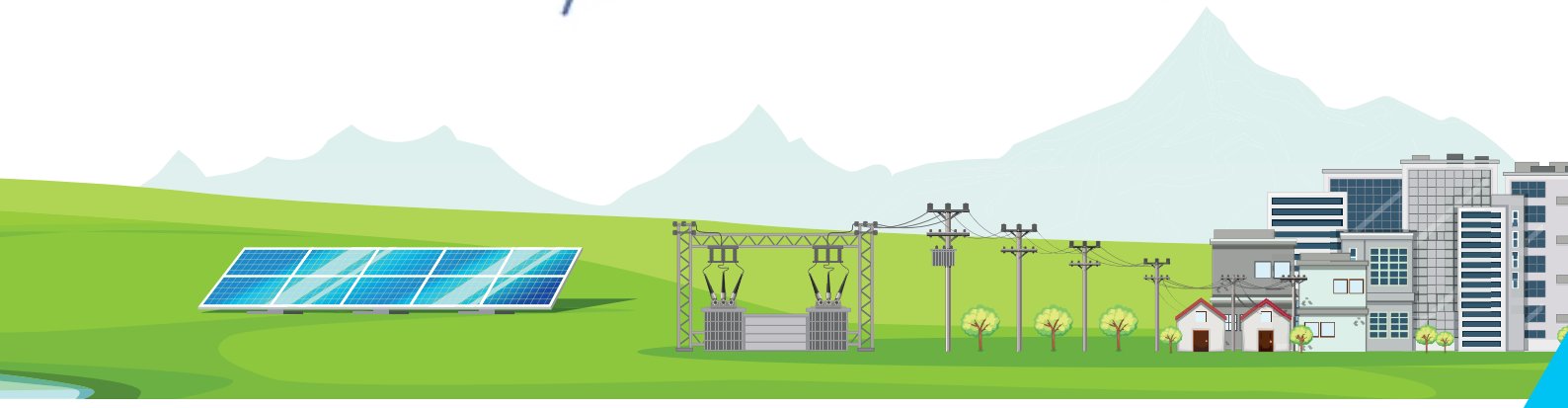
Our gratitude also goes to all stakeholders for their trust and support to the Company. To all employees of PJT II and its subsidiaries, we would like to express our appreciation and gratitude for the dedication and hard work that has been shown throughout 2023. Despite the difficult conditions, all employees gave all their efforts and became resilient in order to advance the Company to continue to grow.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jatiluhur 21 Juni 2024 / *Jatiluhur 21 June 2024*

Ketua Dewan Pengawas /
Chairman of Supervisory Board

Kelik Wirawan Wahyu Widodo







Laporan Direksi
Board of Directors Report



Imam Santoso
Direktur Utama
President Director

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kerja keras seluruh jajaran Perusahaan, PJT II kembali mencatat kinerja yang menggembirakan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023, Perum Jasa Tirta II telah genap 56 tahun telah hadir sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) memberikan dedikasi dan dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.

Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 mengusung tema "TERUS MAJU UNTUK NEGERIKU" yang merupakan wujud Perum Jasa Tirta II selaku perusahaan BUMN yang bergerak dalam Pengelolaan Sumber Daya Air untuk tetap mempertahankan kinerja perusahaan di bidang pengelolaan SDA dan tumbuh serta tetap berupaya untuk melebihi target pencapaian kinerja perusahaan.

Seiring dengan penambahan wilayah kerja baru Perum Jasa Tirta II di Wilayah Sungai (WS) Cimanuk-Cisanggarung (Cirebon), Sebagian WS Cidanau-Ciujung-Cidurian (Prov. Banten), dan Sebagian WS Seputih-Sekampung (Prov. Lampung), Perusahaan dituntut untuk bergerak cepat, optimis, bersinergi, beradaptasi dan meningkatkan kinerja dan peluang bisnis usaha khususnya di wilayah kerja baru serta terus konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas dalam pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan SDA, serta pengusahaan SDA yang sehat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kokoh di tengah perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2023 tumbuh sebesar 5,04% (YoY), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (YoY). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2023 tercatat tumbuh kuat sebesar 5,05% (YoY), lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%.

KINERJA PERUSAHAAN

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Praise be to God Almighty, thanks to the hard work of all level of the Company, PJT II again recorded an encouraging performance for the year ending on December 31, 2023. In 2023, Perum Jasa Tirta II has been present for 56 years as a State-Owned Enterprise (BUMN) company engaged in Water Resources Management (SDA) providing dedication and support for national food and energy security.

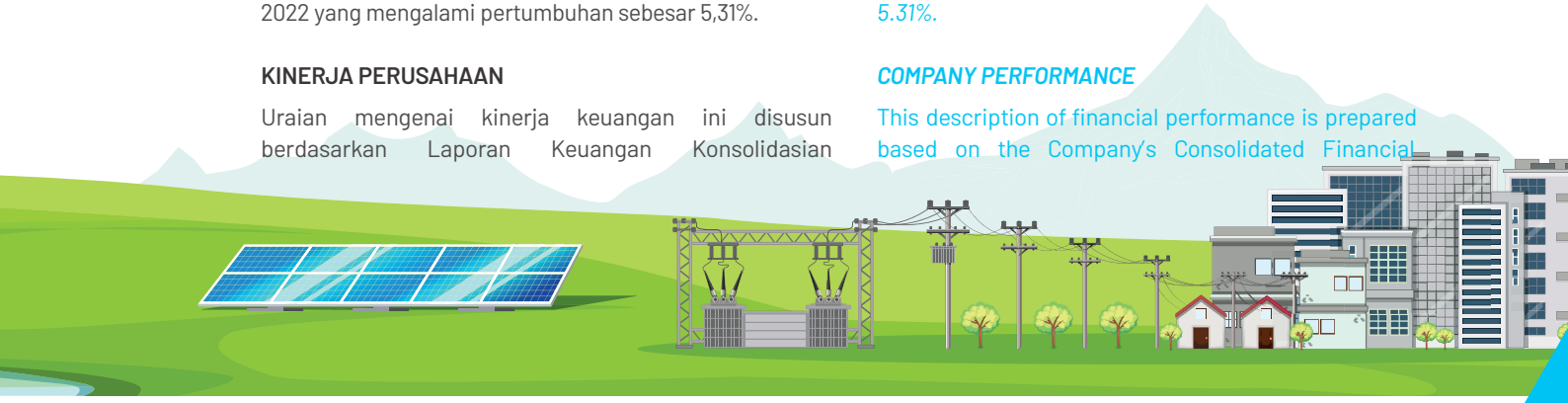
The 2023 Annual Report of Perum Jasa Tirta II carries the theme "KEEP MOVING FORWARD FOR MY COUNTRY" which is a manifestation of Perum Jasa Tirta II as a state-owned company engaged in Water Resources Management to maintain the company's performance in the field of natural resource management and grow and continue to strive to exceed the company's performance achievement targets.

Along with the addition of a new working area of Perum Jasa Tirta II in the Cimanuk-Cisanggarung (Cirebon) River Area (WS), part of the Cidanau-Ciujung-Cidurian WS (Prov. Banten), and part of the Seputih-Sekampung WS (Prov. Lampung), the Company is required to move quickly, be optimistic, synergize, adapt and improve business performance and opportunities, especially in new work areas and continue to consistently provide quality services in the management, operation and maintenance of natural resources, as well as healthy natural resources management.

Indonesia's economic growth remains solid amid the global economic slowdown. Based on data released by the Central Statistics Agency (BPS), economic growth in the fourth quarter of 2023 grew by 5.04% (YoY), an increase compared to the growth in the previous quarter of 4.94% (YoY). With these developments, Indonesia's overall economic growth in 2023 was recorded to grow strongly by 5.05% (YoY), lower than the achievement in 2022 which experienced growth of 5.31%.

COMPANY PERFORMANCE

This description of financial performance is prepared based on the Company's Consolidated Financial



Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Statements which have been audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & partners with a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries as of 31 December 2023 and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Total Aset Tahun 2023 meningkat 7,88% atau Rp150.848.949.647 yaitu sebesar Rp2.064.265.445.767 jika dibandingkan dengan dengan total aset Tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.913.416.496.070 dikarenakan peningkatan kas & setara kas, biaya dibayar dimuka & uang muka, aset keuangan lancar lainya, aset tetap, dan aset pajak tangguhan. Ekuitas sebesar Rp1.509.841.391.316 meningkat sebesar Rp127.115.404.490 atau 9,19% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.382.725.986.825 dikarenakan kenaikan Saldo Laba.

Total Assets in 2023 increased by 7.88% or IDR 150,848,949,647, which is IDR 2,064,265,445,767 when compared to total assets in 2022, which is IDR 1,913,416,496,070 due to an increase in cash & cash equivalents, prepaid costs & advances, other current financial assets, fixed assets, and deferred tax assets. Equity of IDR 1,509,841,391,316 increased by Rp127,115,404,490 or 9.19% when compared to the realization in 2022 of IDR 1,382,725,986,825 due to the increase in Profit Balance.

Posisi arus kas Perum Jasa Tirta I Tahun 2023 Rp732.175.855.725 naik 28,95% atau sebesar Rp164.360.777.899 dari posisi arus kas Tahun 2022 sebesar Rp567.815.077.826 dikarenakan CFO surplus penerimaan pelanggan, pendapatan bunga dan penerimaan restitusi pajak dibandingkan dengan pembayaran kepada pemasok & karyawan serta pembayaran pajak sebesar Rp299.352.937.430 pembayaran untuk aktifitas investasi sebesar Rp129.569.736.060 dari rencana sebesar Rp244.496.990.000 dan aktivitas pendanaan sebesar Rp5.422.423.471.

The cash flow position of Perum Jasa Tirta I in 2023 of IDR 732,175,855,725 increased by 28.95% or amounted to IDR 164,360,777,899 from the cash flow position in 2022 of IDR 567,815,077,826 due to the CFO surplus of customer revenues, interest income and tax refund receipts compared to payments to suppliers & employees as well as tax payments of IDR 299,352,937,430, payments for investment activities of IDR 129,569,736,060 from the plan of IDR 244,496,990,000 and funding activities of IDR 5,422,423,471.

Realisasi pendapatan usaha mencapai 116,19% yaitu sebesar Rp1.080.171.110.420 dari target sebesar Rp929.697.770.000 dan bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp981.047.151.875 naik 10,10%, hal in disebabkan karena adanya penyesuaian kenaikan tarif BJPSDA bag PAM Jaya, PDAM Kab/ Kota dan industri, penerbitan SIPSDA, terealisasinya perjanjian BJPSDA PLTA Saguling (PLN IP) dan PLTA Cirata (PLN NP), peningkatan penyaluran air baku bagi PLTA Djuanda selaras dengan kenaikan penyaluran listrik ke PT PLN dan adanya konversi penggunaan Air Bersih untuk Pendingin Turbin PLTA Djuanda yang semula kategorinya untuk Pemakaian Sendiri menjadi Air Bersih untuk Industri (komersil).

The realization of operating income reached 116.19%, amounting to IDR 1,080,171,110,420 from the target of IDR 929,697,770,000 and when compared to the realization in 2022 of IDR 981,047,151,875, an increase of 10.10%, this is due to the adjustment of the increase in BJPSDA tariffs for PAM Jaya, PDAM Regency/City and industry, the issuance of SIPSDA, the realization of the BJPSDA agreement for Saguling Hydropower Plant (PLN IP) and Cirata Hydropower Plant (PLN NP), the increase in raw water distribution for the Djuanda Hydropower Plant in line with the increase in distribution electricity to PT PLN and the conversion of the use of Clean Water for Cooling the Djuanda Hydropower Plant, which was originally categorized for Self-Use to Clean Water for Industry (commercial).



Sedangkan realisasi Beban Usaha Tahun 2023 mencapai 128,90% yaitu sebesar Rp713.501.411.336 dari target sebesar Rp553.510.440.000, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp600.271.302.588 naik 18,86%, dikarenakan adanya peningkatan beban air baku, dan beban non sumber daya air.

Meanwhile, the realization of Operating Expenses in 2023 reached 128.90%, amounting to IDR 713,501,411,336 from the target of IDR 553,510,440,000, when compared to the realization in 2022 of IDR 600,271,302,588, an increase of 18.86%, due to an increase in raw water loads, and non-water resource loads.

Laba Tahun Berialan mencapai 104,47% vaitu sebesar Rp138.017.006.092 dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp132.109.740.000 dikarenakan peningkatan pendapatan dan pengendalian beban, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp145.248.125.865 turun 4,98%.

The annual profit reached 104.47% or IDR 138,017,006,092 from the 2023 RKAP of Rp132,109,740,000 due to an increase in revenue and load control, when compared to the realization in 2022 of IDR 145,248,125,865, down 4.98%.

PROSPEK USAHA

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha penyaluran listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun- tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, maka kebutuhan akan air bersih, air minum dalam kemasan, dan air untuk pertanian cenderung meningkat sehingga mendorong terciptanya penyaluran air yang lebih besar dan luas. Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 – 2035 milik Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk diprediksi naik antara 3% - 7% setiap lima tahun. Dalam laporan tersebut, penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi berjumlah 256 juta jiwa, meningkat 6% hingga tahun 2020 menjadi 271 juta jiwa, meningkat 5% hingga tahun 2025 menjadi 285 juta jiwa, meningkat lagi 4% hingga tahun 2030 menjadi 296 juta jiwa, dan kembali meningkat 3% hingga akhir tahun 2035 menjadi 306 juta jiwa.

BUSINESS PROSPECTS

The company is optimistic that the prospects for the electricity distribution business and the water industry will still be well maintained in the coming years. This optimism is supported by projections of global, national, and industrial economic growth that are also in line with population growth.

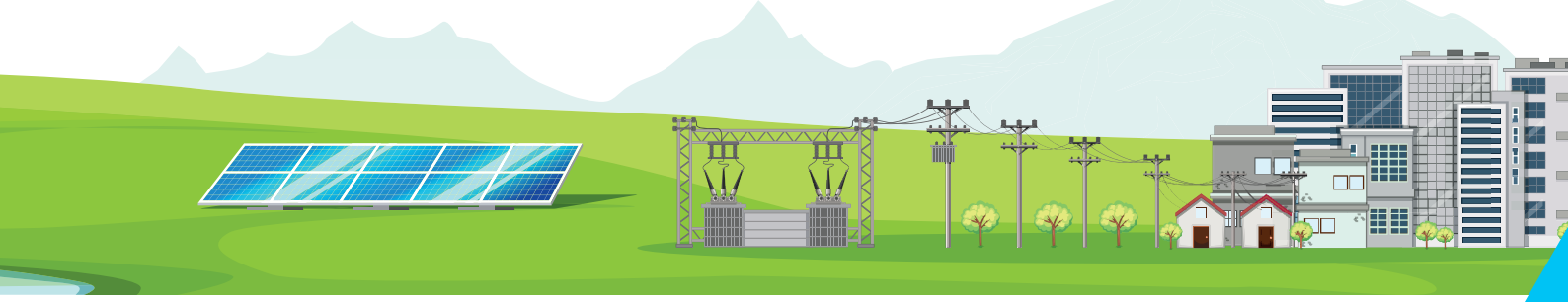
In line with the projected population growth every year, the need for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture tends to increase, encouraging the creation of a larger and wider distribution of water. Population Projection Data for 2010 – 2035 owned by the Central Statistics Agency (BPS) reports that the population is predicted to increase between 3% - 7% every five years. In the report, Indonesia's population in 2015 is predicted to amount to 256 million people, an increase of 6% until 2020 to 271 million people, an increase of 5% until 2025 to 285 million people, an increase of 4% until 2030 to 296 million people, and a 3% increase by the end of 2035 to 306 million people.

PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022 tentang Perum Jasa Tirta II, Direksi PJT II telah menetapkan Peraturan Direksi Nomor : PRD-2/DIR/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-16/DIR/12/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Peraturan Direksi Nomor : PRD-3/DIR/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang

ORGANIZATIONAL AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

To be able to implement Government Regulation No. 25 of 2022 concerning Perum Jasa Tirta II, The Board of Directors of PJT II has stipulated the Board of Directors Regulation Number: PRD-2/DIR/02/2023 dated 6 February 2023 Regarding the Amendment to the Board of Directors Regulation of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-16/DIR/12/2021 Regarding the Organisational Structure and Work Procedures of Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Board of Directors Regulation Number: PRD-3/



Perubahan Pertama Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-17/DIR/12/2021 Serta PRD-7/DIR04/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-17/DIR/12/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah dan Satuan Unit Kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

DIR/02/2023 dated 6 February 2023 Regarding the First Amendment to the Board of Directors Regulation of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-17/DIR/12/2021 and PRD-7/DIR04/2023 on the Second Amendment to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-17/DIR/12/2021 on the Organisation Structure and Work Procedures under the Internal Audit Unit, Corporate Secretariat, Divisions, Business Units, Regional Units and Work Units in Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

Dengan ditetapkannya dua Peraturan Direksi di atas, diharapkan terciptanya efektifitas proses bisnis dan meningkatkan sistem pengendalian internal seiring dengan adanya upaya startegis dalam pengembangan bisnis dan optimalisasi pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja baru.

With the establishment of the two Regulations of the Board of Directors above, it is hoped that the effectiveness of business processes will be created and the internal control system will be improved in line with strategic efforts in business development and optimization of water resources management in the new work area.

Selain itu, untuk dapat mempersiapkan Pengembangan Bisnis dan Wilayah Kerja Perusahaan, perusahaan melakukan upaya untuk mempersiapkan SDM untuk Pengembangan Wilayah dan Usaha serta Penguatan Program pengembangan sumber daya manusia berupa sertifikasi dan pelatihan bagi karyawan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Perusahaan.

In addition, to be able to prepare for Business Development and the Company's Work Area, the company makes efforts to prepare human resources for Regional and Business Development as well as Strengthening human resource development programs in the form of certification and training for employees needed to meet the demands of the duties and responsibilities given by the Company.

Dalam rangka mempersiapkan talent-talent internal Perusahaan serta talent-talent BUMN, telah dilakukan Fit And Proper Test, sebagai upaya untuk mendapatkan talent-talent yang profesional, berintegritas, berdedikasi dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan.

In order to prepare the Company's internal talents and SOE talents, a Fit And Proper Test has been carried out, as an effort to get talents who are professional, integrity, dedicated and competent in carrying out the Company's management duties.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PJT II meyakini bahwa penerapan GCG secara konsisten akan memperkuat posisi Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha, meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan nilai dalam jangka panjang serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Untuk itu, GCG perlu diimplementasikan sedemikian rupa agar menjadi penunjang dalam proses bisnis di Perusahaan.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PJT II believes that the consistent implementation of GCG will strengthen the Company's position in facing business competition, increase effectiveness and efficiency in managing resources, maximize value in the long term and increase stakeholder trust. For this reason, GCG needs to be implemented in such a way that it supports business processes in the Company.

PJT II terus meningkatkan kualitas maupun cakupan implementasi GCG secara bertahap dan berkelanjutan.

PJT II continues to improve the quality and scope of GCG implementation gradually and sustainably. The



Penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan, dengan lima prinsip utamanya, yaitu : Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Kemandiriann (Independency), Kewajaran (Fairness) dan Sikap Kepedulian (Social Awareness) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Pengawas dan Direksi sampai pada seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II sesuai kaidah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan perusahaan yang sehat.

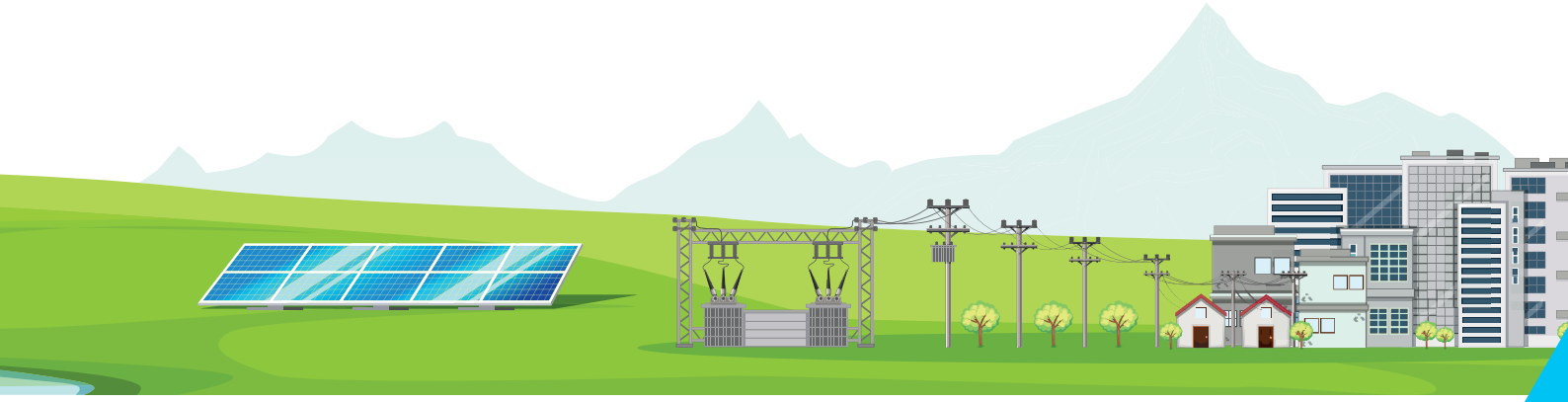
implementation of GCG consistently and sustainably is guided by the Regulation of the Minister of State for SOEs Number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for the Management and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, while still paying attention to the applicable provisions and norms as well as the company's articles of association, with five main principles, namely: Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness and Social Awareness in every business activity at all levels or levels of the organization starting from the Board of Supervisors and Directors to all employees of Perum Jasa Tirta II in accordance with the rules, norms or corporate guidelines required in a healthy corporate management system.

Untuk dapat mengimplementasikan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara tersebut, PJT II telah perubahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama (KBS) Dewan Pengawas dan Direksi PJT II Nomor : KBS-1/DIR/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Perum Jasa Tirta II. Hal ini merupakan komitmen untuk senantiasa beradaptasi mengikuti dinamika perubahan kebijakan maupun perubahan peraturan yang berlaku.

To be able to implement the Regulation of the State Minister of SOEs Number: PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for the Management and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, PJT II has amended the Corporate Governance Guidelines have been determined based on the Joint Decree (KBS) of the Board of Supervisors and Directors of PJT II Number: KBS-1/DIR/06/2023 dated June 21, 2023 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) of Perum Jasa Tirta II. This is a commitment to always adapt to the dynamics of policy changes and changes in applicable regulations.

Pada tahun 2023, parameter penilaian GCG sebagai standar implementasi GCG di Perusahaan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN resmi dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara namun belum ada parameter pengganti terkait penerapan GCG.

In 2023, the GCG assessment parameters as a standard for GCG implementation in the Company in accordance with the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs were officially revoked and replaced by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of Owned Enterprises However, there are no replacement parameters related to the implementation of GCG.



KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2023, tidak ada perubahan komposisi Direksi, sehingga komposisi Direksi hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama : Imam Santoso
- Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko : Indriani Widiastuti
- Direktur Operasi dan Pemeliharaan : Anton Mardiyono
- Direktur Pengembangan Usaha : Dikdik Permadi Yoffana

APRESIASI

Sebagai penutup laporan Direksi ini, kami sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pemilik Modal. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pelanggan, mitra usaha, penyedia barang / jasa, karyawan, serta para pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan, kontribusi, kerjasamanya dan dukungan yang telah diberikan kepada Perum Jasa Tirta II. Semoga hubungan kerjasama yang selama ini telah terjaga ini menjadikan PJT II sebagai perusahaan yang makin maju dan semakin mampu menjawab tantangan di tahun – tahun mendatang. Kami mempunyai satu keyakinan bahwa dengan kemampuan, kerja keras disertai dengan semangat yang kuat akan membawa PJT II mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Kami tetap berkomitmen untuk selalu memberikan upaya terbaik guna perbaikan pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Semoga PJT II terus dapat turut berkontribusi menjaga ketahanan air, pangan dan energi di Indonesia.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2023, there will be no change in the composition of the Board of Directors, so the composition of the Board of Directors until the end of 2023 is as follows:

- *President Director : Imam Santoso*
- *Director of Finance, Human Resources and Risk Management : Indriani Widiastuti*
- *Director of Operations and Maintenance : Anton Mardiyono*
- *Director of Business Development : Dikdik Permadi Yoffana*

APPRECIATION

As a closing of this report, we would like to express our highest appreciation to the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II who has given full trust to the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II to carry out the duties as mandated by the Capital Owner. We would also like to express our gratitude to all customers, business partners, providers of goods/ services, employees, and other stakeholders for their trust, contribution, cooperation and support that has been given to Perum Jasa Tirta II. Hopefully, this cooperative relationship that has been maintained so far will make PJT II a more advanced company and more able to answer challenges in the coming years. We have one belief that with ability, hard work accompanied by a strong spirit will bring PJT II to achieve the Vision and Mission that has been set. We remain committed to always providing the best efforts to improve performance in a sustainable manner. Hopefully, PJT II can continue to contribute to water, food and energy security in Indonesia.

Jatiluhur 21 Juni 2024 /
Jatiluhur 21 June 2024

Atas Nama Direksi /
For the benefit of the Board of Directors

Imam Santoso



PERNYATAAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PERUM JASA TIRTA II

Responsibility Statement of Supervisory Board and Board of Directors for 2023 Annual Report of Perum Jasa Tirta II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that every information contained in Perum Jasa Tirta II Annual Report 2023 has been fully disclosed and take full responsibility for the authenticity of the Annual Report content. This statement has been made truthfully.

Jatiluhur, 21 Juni 2024 / *Jatiluhur, June 21, 2024*

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas /
Chairman of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Fatkhurohman Taufik
Anggota Dewan Pengawas Independen /
Member Independent Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Nuning Sri Rejeki Wulandari
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Dewan Pengawas /
Supervisory Board

Romy Marsandi
Anggota Dewan Pengawas /
Member of Supervisory Board

Direksi /
Board of Directors

Imam Santoso
Direktur Utama /
President Director

Direksi /
Board of Directors

Indriani Widiastuti
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko / *Director of Business Development of Supervisory Board*

Direksi /
Board of Directors

Anton Mardiyono
Direktur Operasi dan Pemeliharaan /
Operation and Maintenance Director of Supervisory Board

Direksi /
Board of Directors

Dikdik Permadi Yoffana
Direktur Pengembangan Usaha /
Director of Business Development

Struktur Organisasi
Organization Structure

Struktur Organisasi Perum Jasa Tirta II berdasarkan Peraturan Direksi Nomor : PRD-2/DIR/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-16/DIR/12/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Peraturan Direksi Nomor : PRD-3/DIR/02/2023 tanggal 6 Februari 2023 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-17/DIR/12/2021 Serta PRD-7/DIR04/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor : PRD-17/DIR/12/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja dibawah Satuan Pengawasan Intern, Sekretariat Perusahaan, Divisi, Unit Usaha, Unit Wilayah dan Satuan Unit Kerja di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

The organizational structure of Perum Jasa Tirta II based on the Decree of the Board of Directors number PRD-16/DIR/12/2021 is as follows:



DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN MANAJEMEN RISIKO
Director of Finance, HR and Risk Management

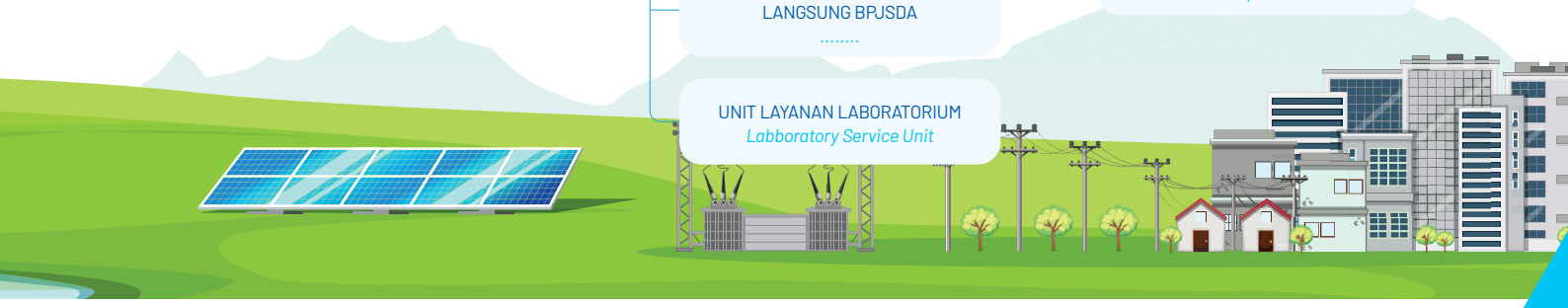
- DIVISI RENSTRA, MANAJEMEN RISIKO & TIK
  Strategic, Risk Management & ITC Division
- DIVISI KEUANGAN & AKUNTANSI
  Finance & Accounting Division
- DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA
  Human Resources Division
- DIVISI UMUM & TJSK
  HR General Affairs & TJSL Division
- DIVISI INVENTARISASI, PENGENDALIAN ASET DAN KEARSIPAN
  Inventory and Asset Control Division
- UNIT LAYANAN PENGADAAN
  HR Division Procurement Service Unit
- UNIT LAYANAN DIKLAT
  Training Service Unit
- PROJECT MANAGER INFORMASI KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI
  Project Manager Information Communication and Technology

DIREKTUR OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Director of Operation and Maintenance

- DIVISI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA DAN SDL
  SDA and SDL Operation and Maintenance Division
- DIVISI SUPERVISI TEKNIK
  Technical Supervision Division
- UNIT WILAYAH I
  Region I Unit
- UNIT WILAYAH II
  Region II Unit
- UNIT WILAYAH III
  Region III Unit
- UNIT WILAYAH IV
  Region IV Unit
- UNIT WILAYAH V
  Region V Unit
- UNIT WILAYAH VI
  Region VI Unit
- UNIT WILAYAH VII
  Region VII Unit
- UNIT PLTA
  PLTA Unit
- UNIT KERJA KHUSUS SPAM REGIONAL
  Jatiluhur Regional Spam Special Unit I
- UNIT PENGELOLA PROGRAM MANFAAT LANGSUNG BPJSDA
  .....
- UNIT LAYANAN LABORATORIUM
  Labboratory Service Unit

DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA
Director of Business Development

- DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
  Business Development Division
- DIVISI KEMERSIL DAN PELAYANAN PELANGGAN
  Commercial and Customer Service Division
- UNIT USAHA PARIWISATA DAN HOTEL
  Tourism and Hotel Business Unit
- PROJECT MANAGER SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
  Project Manager for Drinking Water Supply System
- PROJECT MANAGER PUMP STORAGE POWER PLANT DAN ENERGI BARU TERBARUKAN
  Project Manager Pump Storage Power Renewable New Energy and Plant
- PROJECT MANAGER HOLDING AIR MINUM DALAM KEMASAN
  Project Manager for Holding Bottled Drinking Water
- PROJECT MANAGER PENGEMBANGAN WILAYAH
  Regional Development Project Manager
- PROJECT MANAGER PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WISATA DAN DESTINASI
  Project Manager and Tourism and Destination Infrastructure Development
- PROJECT MANAGER OPTIMALISASI BMN & ASET PERUSAHAAN
  Project Manager for Optimizing BMN and Compant Assets



Dewan Pengawas
Supervisory Board







Kelik Wirawan Wahyu Widodo
Ketua Dewan Pengawas
Chairman of the Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir	:	Klaten, 5 Desember 1969
Place and date of birth	:	*Klaten, December 5, 1969*
Usia	:	55 Tahun
Age	:	*55 Years*
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Citizenship	:	*Indonesia*
Domisili	:	Jakarta
Domicile	:	*Jakarta*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*
Beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-340/MBU/10/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tanggal 21 Oktober 2020.
He has served as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-340 / MBU / 10/2020 Regarding Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II on 21 October 2020.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*
Beliau memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Politik (Jurusan Administrasi Negara) Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo pada tahun 1994.
He obtained his Bachelor's degree from the Faculty of Social and Political Sciences (Department of Public Administration) Sebelas Maret State University, Solo in 1994.

Riwayat Karier / *Employment History*
Dalam perjalanan kariernya, beliau Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (2019-Sekarang), dan Ketua Umum PP PERPANI (Persatuan Panahan Seluruh Indonesia) (2018-2019).
In the course of his career, he is the Special Staff of the Indonesian Minister of Environment and Forestry (2019-Present), and Chairman of PP PERPANI (Indonesian Archery Association) (2018-2019).

Rangkap Jabatan / *Concurrent Position*
Selain menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau menjabat Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
In addition to serving as Chairman of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he also serves as Special Staff to the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia.

Hubungan Afiliasi / *Affiliation*
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal.
He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*
- *ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GRC Integrated Information for Supervisory Board (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- Pelatihan dan Uji Sertifikasi *Certified Governance Oversight Professional (CGOP)(PPA&K-2023)*





Nuning Sri Rejeki W
Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir	:	Bogor, 6 Juli 1963
Place and date of birth	:	*Bogor, July 6, 1963*
Usia	:	60 Tahun
Age	:	*60 years*
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Citizenship	:	*Indonesia*
Domisili	:	Depok, Jawa Barat
Domicile	:	*Depok, West Java*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*
Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK- 4/MBU/01/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II.
She serves as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK- 4/MBU/01/2020 Dated 3 January 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*
Beliau memperoleh gelar sarjana dari IPB pada tahun 1987. Master dari Universitas Detroit Mercy Tahun 1994.
She obtained a bachelor's degree from IPB in 1987, a Master from Detroit Mercy University in 1994.

Riwayat Karier / *Employment History*
Dalam perjalanan kariernya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Tenaga Pengkaji Harmonisasi, Strukturiasi, Privatisasi dan Efektivitas Kekayaan Negara pada Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
In the course of his career, Head of the Regional Office of the Directorate General of State Assets, Reviewers of the Harmonization, Structure, Privatization and Effectiveness of State Assets at the Directorate General of State Assets.

Rangkap Jabatan / *Concurrent Position*
Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Banten sekaligus sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten.
In addition to serving as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he serves as the Head of the Banten Regional Office of the Directorate General of State Assets as well as the Head of the Banten Province Representative of the Ministry of Finance.

Hubungan Afiliasi / *Affiliation*
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal.
She has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*
- *Riskhub International Webinar: Optimizing Business Continuity Strategy to Achieve Sustainable Objectives (IRMAPA & ERMA-2023)*
- *ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GRC Integrated Information for Supervisory Board (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- Pelatihan dan Uji Sertifikasi *Certified Governance Oversight Professional (CGOP)(PPA&K-2023)*



Romy Marcandi
Anggota Dewan Pengawas
Member Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir	:	Malang, 17 Januari 1976
Place and date of birth	:	*Malang, January 17, 1976*
Usia	:	47 Tahun
Age	:	*47 Years*
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Citizenship	:	*Indonesia*
Domisili	:	Tangerang Selatan
Domicile	:	*South Tangerang*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*
Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-92/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II.
He serves as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-92/MBU/03/2020 dated 23 March 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*
Beliau memperoleh gelar Magister dari Universitas Pembangunan Nasional.
He obtained his Master's degree from National Development University.

Riwayat Karier / *Employment History*
Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT. Djakarta Lloyd (Persero) Tahun 2015-2017,Komisaris PT. PANN (Persero) Tahun 2017-2020, Kepala Bidang PMN, PSO dan Penerusan Pinjaman Kementerian BUMN.
In the course of his career, he has served as Secretary of the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) in 2015-2017, Commissioner of PT PANN (Persero) in 2017-2020, Head of PMN, PSO and Loan Forwarding of the Ministry of SOEs.

Rangkap Jabatan / *Concurrent Position*
Selain menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II, beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Bidang PMN, PSO dan Penerusan Pinjaman Kementerian BUMN.
In addition to serving as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II, he has a position as Head of PMN, PSO and Loan Forwarding Division of the Ministry of SOEs.

Hubungan Afiliasi / *Affiliation*
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan Pemilik Modal.
He has no affiliation with other members of the Supervisory Board, Directors and Capital Owners.

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*
- *Result-Focused Project Design and Monitoring (Mandiri University & Asian Development Bank-2023)*
- *ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GRC Integrated Information for Supervisory Board (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- Pelatihan dan Uji Sertifikasi *Certified Governance Oversight Professional (CGOP)(PPA&K-2023)*





Fatkhurohman Taufik
Anggota Dewan Pengawas Independen
Independent Member of Supervisory Board

Tempat dan Tanggal lahir	:	Trenggalek, 10 April 1980
Place and date of birth	:	*Trenggalek, April 10, 1980*
Usia	:	43 Tahun
Age	:	*43 years*
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Citizenship	:	*Indonesia*
Domisili	:	Surabaya, Jawa Timur
Domicile	:	*Surabaya, East Java*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*

Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

He serves as a Member of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II based on SK-214/MBU/09/2022 dated 21 September 2022 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004

He received a Bachelor of Communication Science degree from the Sunan Ampel State Islamic University (UIN) Surabaya in 2004.

Profil / *Profile*

Beliau pernah menjadi jurnalis di Tempo media (Majalah Tempo, Koran Tempo dan Tempo.co) selama 10 tahun dan sempat menjadi wartawan di Suara Surabaya selama 5 tahun. Pengalaman pekerjaan juga pernah dilalui dengan menjadi Staf Khusus Komisaris Utama PTPN X dan PTPN III (Holding).

He has been a journalist at Tempo media (Tempo Magazine, Tempo Newspaper and Tempo.co) for 10 years and was a journalist at Suara Surabaya for 5 years. His work experience has also been passed by being a Special Staff to the President Commissioner of PTPN X and PTPN III (Holding).

Riwayat Karier / *Employment History*

- *GRC Summit 2023 (CRMS-2023) / GRC Summit 2023 (CRMS-2023)*
- *ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of*
- *Excellence/BSE-2023) / ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GRC Integrated Information for Supervisory Board (BUMN School of Excellence/BSE-2023) / GRC Integrated Information for Supervisory Board (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE-2023) / GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE-2023)*
- *Pelatihan dan Uji Sertifikasi Certified Governance Oversight Professional (CGOP) (PPA&K-2023) / Training and Certification Examination for Certified Governance Oversight Professional (CGOP) (PPA&K-2023)*

Direksi
Directors







Imam Santoso
Direktur Utama
President Director

Tempat dan Tanggal lahir : Yogyakarta 8 Maret 1958
Place and date of birth : *Yogyakarta March 8, 1958*

Usia : 65 Tahun
Age : *65 Years*

Kewarganegaraan : Indonesia
Citizenship : *Indonesia*

Domisili : Jakarta
Domicile : *Jakarta*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*
Beliau menjabat sebagai Direktur Utama berdasarkan SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
He served as President Director based on SK-350/MBU/10/2020 dated 27 October 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the President Director of Jasa Tirta II Public Company (Perum).

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*
Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil UGM pada tahun 1982, Master Sains dari Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University pada tahun 1990, dan Doktor dari Universitas Diponegoro pada tahun 2018.
He earned a Bachelor's degree in Civil Engineering from UGM in 1982, Master of Science from the Institute of Irrigation And Water Resources Southampton University in 1990, and a Doctorate from Diponegoro University in 2018.

Riwayat Karier / *Employment History*
Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya (Persero), dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
In the course of his career, he has served as President Commissioner of PT Wijaya Karya (Persero), and Director General of Water Resources, Ministry of PUPR.

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*
- Workshop Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) secara Blended Learning (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)
  Blended Learning Administrator Leadership Training Workshop (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)
- Peningkatan Kompetensi Teknis Pengajar Bidang SDA (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)
  Technical Competence Improvement for Natural Resources Sector Teachers (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)
- Pelatihan Pengembangan Kapasitas Fasilitator (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)
  Facilitator Capacity Building Training (LAN & BPSDM PUPR Jakarta - 2020)
- Pelatihan Asesor Kompetensi Tenaga Kerja (AKTK) LPJKN Jakarta – 2018)
  Training for Labour Competency Assessors (AKTK) LPJKN Jakarta - 2018)
- Training on Design and Construction of Dry Dam (JICA Tokyo, Jepang – 2016)
  Training on Design and Construction of Dry Dam (JICA Tokyo, Japan - 2016)
- Integrated Water Resources Management Training And On Site Lesson (IHE-Delt, Nederland – 2010)
  Integrated Water Resources Management Training and On Site Lesson (IHE-Delt, Nederland - 2010)





Indriani Widiastuti
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko
Director of Finance, HR and Risk Management

Tempat dan Tanggal lahir	: Klaten, 13 Desember 1968
Place and date of birth	*: Klaten, December 13, 1968*
Usia	: 56 Tahun
Age	*: 56 Years*
Kewarganegaraan	: Indonesia
Citizenship	*: Indonesia*
Domisili	: Jakarta
Domicile	*: Jakarta*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*
Beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko berdasarkan SK-420/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.
She serves as Director of Finance, Human Resources and Risk Management based on SK-420/MBU/12/2021 dated 29 December 2021 concerning Dismissal, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*
Beliau memperoleh gelar Sarjana Sains dari UGM tahun 1993, Master Teknologi Informasi dari UI tahun 2007, dan MBA dari UGM tahun 2019.
She obtained his Bachelor of Science degree from UGM in 1993, Master of Information Technology from UI in 2007, and MBA from UGM in 2019.

Riwayat Karier / *Employment History*
Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat Dewan Pengawas Perum Perhutani sampai dengan September 2019-Juni 2020, Asdep Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, Komisaris PT Asuransi Jiwasraya.
In the course of his career, he served on the Supervisory Board of Perum Perhutani until September 2019-June 2020, Deputy Assistant for Transportation Facilities and Infrastructure Construction II Ministry of SOEs, Commissioner of PT Asuransi Jiwasraya.

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*
- Business Model Canvas, PPM Manajemen.
  Business Model Canvas, PPM Management.
- Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA Universitas Indonesia.
  Certified Management Accountant (CMA) Review Course, PPA University of Indonesia.



Anton Mardiyono
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director

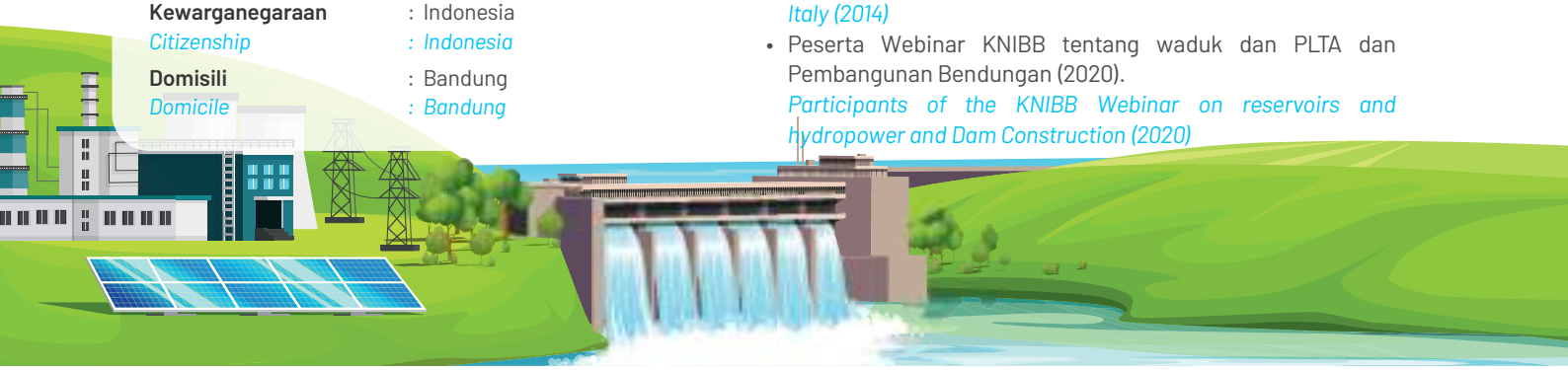
Tempat dan Tanggal lahir *Place and date of birth*	: Semarang, 02 Maret 1975 *: Semarang, March 02, 1975*
Usia *Age*	: 48 Tahun *: 48 Years*
Kewarganegaraan *Citizenship*	: Indonesia *: Indonesia*
Domisili *Domicile*	: Bandung *: Bandung*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*
Beliau menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan Jasa Tirta II sejak 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK - 196/MBU/06/2020 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II.
He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since June 11, 2020 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*
Beliau Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998) dan Magister WRDM di IIT Roorkee New Delhi, India (2006).
He obtained a Bachelor of Civil Engineering degree from Diponegoro University (1998) and a Masters in WRDM at IIT Roorkee New Delhi, India (2006).

Riwayat Karier / *Employment History*
Dalam perjalanan kariernya di Perum Jasa Tirta II, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Biro Pengendalian dan Pengelolaan Data & Alokasi Air (2014), Kepala Divisi Pengelolaan Air II (2015), Kepala Divisi Rencana Strategis & Litbang (2016), General Manajer Wilayah III (2017), General Manajer Unit Usaha Wilayah I (2018), Kepala Divisi Pengembangan Usaha (2019), dan Komisaris PT Jasa Tirta Luhur (2020 sd sekarang).
In his career at Perum Jasa Tirta II, he served as Head of Data & Water Allocation of Controlling and Management Bureau, 2014; Head of Water Manajement Division II, 2015; Head of Planning and Research & Development Bureau, 2016; General Manager of Wilayah III, 2017; General Manager of Wilayah I, 2018, Head of Business Development, 2019 and Commisioner of PT Jasa Tirta Luhur (since 2020 until now).

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*
- Peserta Twinning Program on Integrated Water Resources Management (Beasiswa NARBO-2007).
  Participants of the Twinning Program on Integrated Water Resources Management (NARBO-2007 Scholarship).
- Peserta Dam Operation and Maintenance Expert Training (Beasiswa JICA-2010)
  Participants of Dam Operation and Maintenance Expert Training (JICA-2010 Scholarships)
- Pembicara di Hydro International Conference and Exhibition, Italy (2014)
  Speakers at the Hydro International Conference and Exhibition, Italy (2014)
- Peserta Webinar KNIBB tentang waduk dan PLTA dan Pembangunan Bendungan (2020).
  Participants of the KNIBB Webinar on reservoirs and hydropower and Dam Construction (2020)





Dikdik Permadi Yoffana
Direktur Pengembangan Usaha
Director of Business Development

Tempat dan Tanggal lahir	: Bandung, 16 Juni 1972
Place and date of birth	*: Bandung, June 16, 1972*
Usia	: 51 Tahun
Age	*: 51 Years*
Kewarganegaraan	: Indonesia
Citizenship	*: Indonesia*
Domisili	: Jakarta
Domicile	*: Jakarta*

Dasar Pengangkatan / *Basis of Appointment*

Beliau menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha Jasa Tirta II sejak 29 Desember 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-420/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum/Perum Jasa Tirta II.

He has served as Director of Operations and Maintenance of Tirta II Services since 29 December, 2021 based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK - 196/MBU/06/2020 concerning Termination of Changes in Position Nomenclature and Appointment of Directors of Public Companies/Perum Jasa Tirta II.

Riwayat Pendidikan / *Educational Background*

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1995) dan Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada (2019).

He obtained his Bachelor of Economics from Universitas Padjadjaran (1995) and Master of Business Administration (MBA) from Universitas Gadjah Mada (2019).

Riwayat Karier / *Employment History*

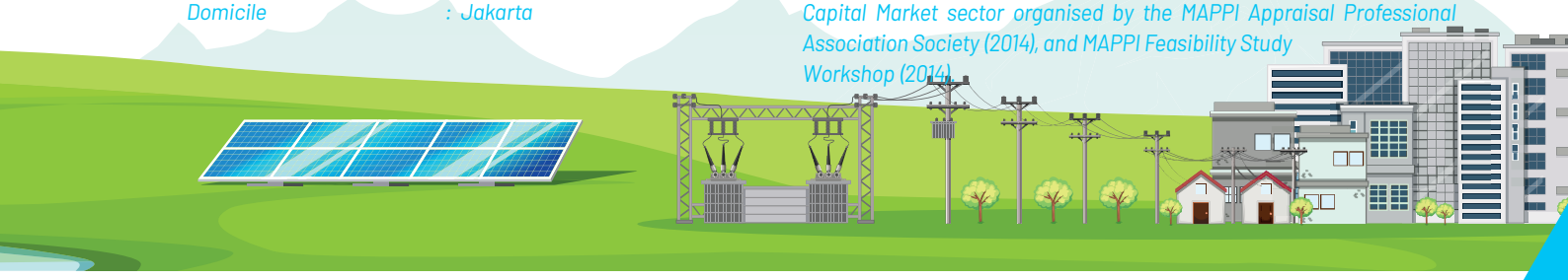
Dalam perjalanan kariernya, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero). Direktur Business Advisory & Asset Management PT. Perusahaan Pengelola Asset (Persero), Komisaris Utama PT. PPA Finance Anak Perusahaan PT. PPA (Persero).

In the course of his career, he has served as President Director of PT Batam Island Industrial Area (Persero). Director of Business Advisory & Asset Management of PT Asset Management Company (Persero), President Commissioner of PT PPA Finance, a subsidiary of PT PPA (Persero).

Pelatihan yang Diikuti / *Trainings Participated*

Mengikuti Pendidikan dan mendapat sertifikasi dengan gelar Qualified Risk Governance Professional (QRGP) dari Lembaga Sertifikasi Profesi MKS Indonesia (2021) dan Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) dari Enterprise Risk Managemente Academy (ERMA) Singapore (2021), Pelatihan Supply Chain Management Training yang diselenggarakan oleh Supply Chain Indonesia (2020), Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan - Executing Business Strategy (2015), Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai di bidang Pasar Modal yang diselenggarakan Masyarakat Asosiasi Profesi Penilai MAPPI (2014), dan Workshop Feasibility Study MAPPI (2014).

Attended Education and received certification with the title of Qualified Risk Governance Professional (QRGP) from the Professional Certification Institute MKS Indonesia (2021) and Certified in Enterprise Risk Governance (CERG) from Enterprise Risk Managemente Academy (ERMA) Singapore (2021), Supply Chain Management Training organised by Supply Chain Indonesia (2020), Leadership Development Training - Executing Business Strategy (2015), Advanced Professional Education for Appraisers in the Capital Market sector organised by the MAPPI Appraisal Professional Association Society (2014), and MAPPI Feasibility Study Workshop (2014).



Daftar Nama Pengurus dan Organ Dewan Pengawas

List of Names of Management and Organs of the Supervisory Board

NO.	NAMA *Name*	JABATAN *Position*	KEP. MENTERI TENTANG PENGANGKATAN / *Decision Of The Minister On Appointment*	KETERANGAN *Description*
1.	**KELIK WIRAWAN WAHYU WIDODO**	Ketua Dewan Pengawas *Chairman of the Supervisory Board*	SK - 340/MBU10/2020 21 Oktober 2020 / *October 21, 2020*	Sejak 21 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / *Since 21 October 2020 until now*
2.	**FATKHUROHMAN TAUFIK**	Anggota Dewan Pengawas Independen *Independent Supervisory Board Member*	SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 / *September 21,2022*	Sejak 21 September 2022 sampai dengan sekarang / *Since September 21, 2022 until now*
3.	**NUNING SRI REJEKI WULANDARI**	Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	SK - 4/MBU/01/2020 3 Januari 2020 / *January 3, 2020*	Sejak 3 Januari 2020 sampai dengan sekarang / *Since January 3, 2020 until now*
4.	**ROMY MARCANDI**	Anggota Dewan Pengawas *Member of the Supervisory Board*	SK - 92/MBU/03/2020 23 Maret 2020 / *March 23, 2020*	Sejak 23 Maret 2020 sampai dengan sekarang / *Since March 23, 2020 until now*
5.	**IMAM SANTOSO**	Direktur Utama *President Director*	SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 / *October 27, 2020*	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / *Since October 27, 2020 until now*
6.	**ANTON MARDIONO**	Direktur Operasi dan Pemeliharaan *Director of Operations and Maintenance*	SK-196/MBU/06/2020 Tanggal 11 Juni 2020 / *June 11, 2020*	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / *Since June 11, 2020 until now*
7.	**INDRIANI WIDIASTUTI**	Direktur Keuangan ,Sumber Daya Manusia & Manajemen Risiko *Director of Finance, Human Resources & Risk Management*	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan / *December 29, 2021 Regarding Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Company's Board of Directors*	Sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d Sekarang / *Since December 29, 2021 until now*
8..	**DIKDIK PERMADI YOFFANA**	Direktur Pengembangan Usaha *Director of Business Development*	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II / *December 29, 2021 Regarding the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)*	Sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d Sekarang / *Since January 29, 2021 until now*



Profil Pejabat Eksekutif
Executive Officer Profile

Direktorat Utama
Main Directorate



UDIEN YULIANTO, ST., M.TECH
Sekretaris Perusahaan /
Corporate Secretary

Warga Negara Indonesia Lahir di Sidoarjo 10 Juli 1970. Memperoleh gelar sarjana pengairan dari Iniversitas Brawijaya, Master Teknik Pengairan dari University Of Roorkee India. / *Indonesian citizen Born in Sidoarjo July 10, 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from the University of Brawijaya, Master of Water Engineering from the University of Roorkee India.*



DADANG HIDAYAT, ST., MT
Kepala Satuan Pengawasan Intern /
Head of Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 6 November 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1997) dan gelar Magister Teknik Mesin dari Universitas ISTN (2012). / *Indonesian citizen, born in Ciamis, November 6, 1970. He holds a Bachelor of Engineering degree majoring in Mechanical Engineering from the University of Pasundan (1997) and a Master's degree in Mechanical Engineering from the University of ISTN (2012).*



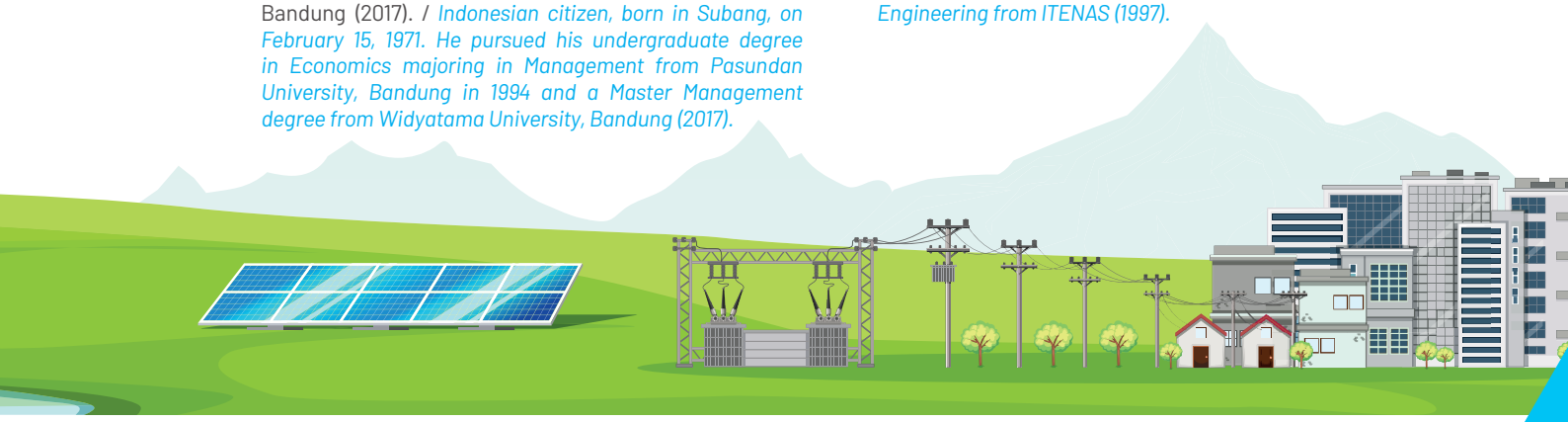
ANDRIYANTO, SE., M.M
Kepala Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen / *Head of the Division of Performance Control, Risk and Management Systems.*

Warga Negara Indonesia, lahir di Subang, 15 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Pasundan, Bandung (1994) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Widyatama, Bandung (2017). / *Indonesian citizen, born in Subang, on February 15, 1971. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from Pasundan University, Bandung in 1994 and a Master Management degree from Widyatama University, Bandung (2017).*



DINDIN HENDRIANA, ST
Special Expertise Tingkat I, Bidang Pemeriksaan, Satuan Pengawasan Intern / *Special Expertise Levell, Field of Examination, Internal Audit Unit*

Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang, 19 Januari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS Bandung (1997). / *Indonesian citizen, born in Karawang on January 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1997).*



Direktorat Keuangan, SDM & Manajemen Risiko
Directorate of Finance, Human Resources & Risk Management



HERI HERMAWAN, SE
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi /
Head of Finance and Accounting Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / *Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).*



EUIS RINA RISMAYANTI, SE., MM
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia /
Head of Human Resources Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 19 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Unisba dan Master Manajemen dari Universitas Tama Jagakarsa. / *Indonesian citizen, born in Bandung, November 19, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Unisba and Master Management from Tama Jagakarsa University.*



RIMPUN RAJAB HARAHAP, SE., MM
Kepala Divisi Renstra, Manajemen Risiko dan TIK /
Head of Strategic Plan, Risk Management and ICT Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 31 Agustus 1972. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (1997) dan Magister Manajemen dari Universitas Budi Luhur (2012). / *Indonesian citizen, born in Jakarta, August 31, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from the Univers Prof. Dr. Moestopo (Beragama) (1997) and Master of Management from Budi Luhur University (2012).*



I.S BUDI SATRIJO, SH., MH
Kepala Divisi Umum dan TJSL /
Head of General Division and TJSL

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 27 April 1968. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1983) dan gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran. / *Indonesian citizen, born in Bandung on April 27, 1968. He obtained Bachelor of Laws degree from Parahyangan Catholic University, Bandung in 1983, and Business Law Masters Degree from Padjajaran University.*



DERI DAMANHURI, SE., MM
Kepala Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan /
Head of Inventory, Asset Control and Archives Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 23 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Manajemen dari UNPAS. Gelar Magister Management dari Universitas Widyatama. / *Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 23, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Management Economics from UNPAS. Master's Degree in Management from Widyatama University.*



Direktorat Operasi & Pemeliharaan
Operations & Maintenance Directorate



HERRY RACHMADYANTO, ST., MM., MSC
Kepala Divisi Operasi dan Pemeliharaan SDA dan SDL /
Head of Operation and Maintenance Division of SDA and SDL

Warga Negara Indonesia, Lahir di Langsa pada 12 Juni 1977. Memperoleh gelar sarjana teknik dari ITB tahun 2000, Master Manajemen dari UGM, dan Master Teknik Pengairan dari Institute For Water Education, Netherlands. / *Indonesian citizen, born in Langsa on June 12, 1977. Obtained a bachelor's degree in engineering from ITB in 2000, Master of Management from UGM, and Master of Water Engineering from Institute For Water Education, Netherlands.*



BUDIYO, ST
Kepala Divisi Supervisi Teknik /
Head of Technical Supervision Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 12 April 1972. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari ITENAS (1998). / *Indonesian citizen, born in Bandung on April 12, 1972. Obtained a Bachelor's degree in Engineering from ITENAS (1998).*



JOHN RICO, ST., MT
General Manajer Unit Wilayah I /
General Manager Unit Region I

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 19 April 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik sipil dari Universitas Andalas (1996), dan Master Teknik Pengairan dari ITB Bandung pada tahun 2003. / *Indonesian citizen, born in Jakarta on April 19, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from Andalas University (1996), and a Master of Water Engineering from ITB Bandung in 2003.*



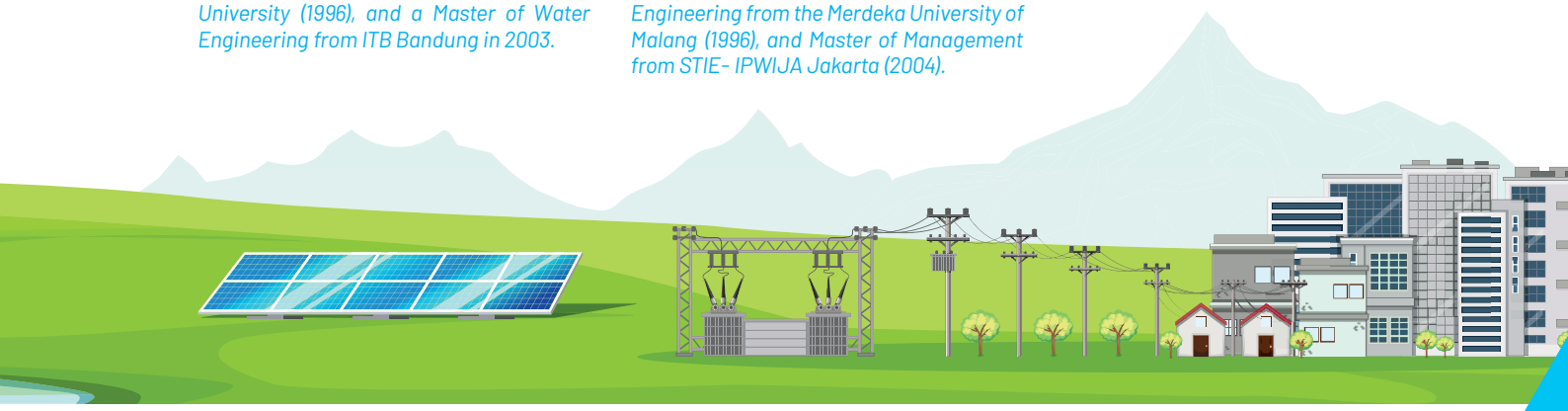
MARIO MORA PANGESTU, ST., MM
General Manajer Wilayah II /
General Manager of Regional Unit II

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Februari 1969. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Merdeka Malang (1996) dan gelar Magister Manajemen dari STIE-IPWIJA (2004). / *Indonesian citizen, born in Jakarta on February 13, 1969. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from the Merdeka University of Malang (1996), and Master of Management from STIE- IPWIJA Jakarta (2004).*



FEMBRI SETYAWAN, ST
General Manajer Unit Wilayah III /
General Manager of Region III Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, 3 November 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (2000). / *Indonesian citizen, born in Nganjuk on November 3, 1975. He obtained Bachelor's degree in Water Engineering from Brawijaya University, Malang (2000)..*



Direktorat Operasi & Pemeliharaan
Operations & Maintenance Directorate



ANOM SOAL HERUDJITO, ST., MT
General Manajer Wilayah IV / *General Manager of Regional Unit IV*

Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 25 Februari 1974 Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1997) dan gelar Magister Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2007). / *Indonesian citizen, born in Sukabumi, on February 25, 1974. He obtained his undergraduate degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology (1997) and a Master degree in Civil Engineering from the Bandung Institute of Technology (2007).*



CUCU HARNANTO, ST., MM
General Manajer Wilayah V /
General Manager of Regional Unit V

Warga negara Indonesia Lahir di Majalengka 13 Desember 1971. Memperoleh gelar Master dari Universitas Bhayangkara Jakarta dan Sarjana Teknik Elektro dari STTNas Yogyakarta. / *Indonesian citizen Born in Majalengka December 13, 1971. He obtained a Master's degree from Bhayangkara University, Jakarta and a Bachelor's degree in Electrical Engineering from STTNas Yogyakarta.*



BUDY GUNADY, ST., MPSDA
General Manjer Unit Wilayah VI /
General Manager Unit Region VI

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 11 November 1969. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Padjadjaran (1995) dan Magister dari Institut Teknologi Bandung (2010). / *Indonesian citizen, born in Bandung on November 11, 1969. Obtained Bachelor's degree from UNPAD in 1995 and Masters from ITB (2010).*



EMIL MUHAMMAD NUR, ST
General Manajer Wilayah VII /
General Manager of Regional Unit VII

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada 29 November 1976. Memperoleh gelar Sarjana Elektro dari Universitas Jenderal Ahmad Yani pada 1998. / *Indonesian citizen, born in Bandung on November 29, 1976. Obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from Univ General Ahmad Yani in 1998.*





AGUS KUSNADI, ST., ME
General Manajer PLTA /
General Manager of Hydroelectric Power

Warga Negara Indonesia, lahir di Tasikmalaya, 5 Februari 1970. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Pasundan (1996) dan gelar *Master Enginering* dari Universitas Padjadjaran (2009). / *Indonesian citizen, born in Tasikmalaya,on February 5, 1970. He pursued his undergraduate degree in Mechanical Engineering from Pasundan University (1996), and a Master Enginering degree from Universitas Padjadjaran (2009).*



BIMA KAWINDRA, ST
Kepala Unit Kerja Khusus SPAM Regional /
Head of Regional SPAM Special Work Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 28 Mei 1974. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro (1998). / *Indonesian citizen, born in Yogyakarta, on May 28, 1974. He obtained Bachelor's degree in Civil Engineering from Diponegoro University (1998).*



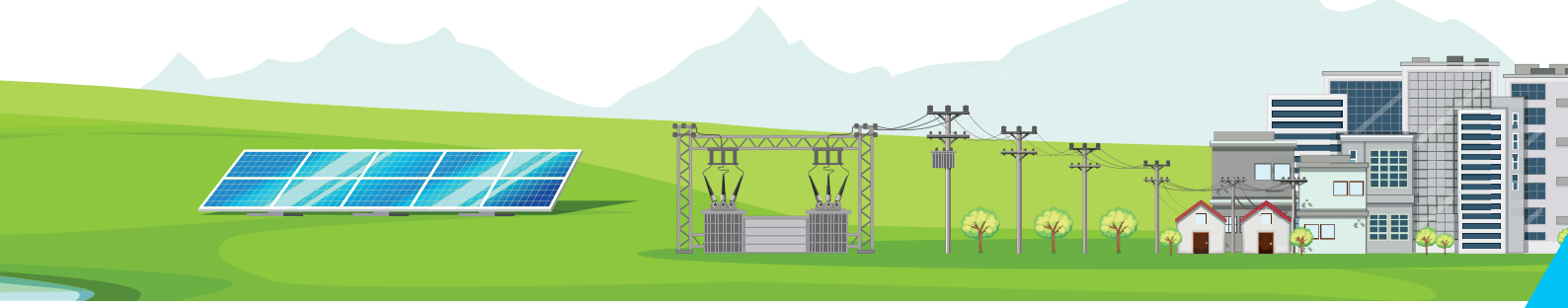
RESKY HERAVENO, ST
General Manajer Pengelola Program Manfaat Langsung BJPSDA / *General Manager of Direct Benefit Program Management BJPSDA*

Negara Indonesia lahir di Tanjung Pandan pada 22 Februari 1971. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari ITB pada tahun 1995. / *The State of Indonesia was born in Tanjung Pandan on February 22, 1971. Obtained a Bachelor's degree in Civil Engineering from ITB in 1995.*



DEWI SYAFITRI, ST.
Special Expertise Tk. I, Bidang Pemantauan dan/atau Analisis Kinerja Direktorat Operasi dan Pemeliharaan / *Special Expertise Tk. I, Division of Monitoring and/or Performance Analysis of the Directorate of Operations and Maintenance*

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 12 Desember 1969. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Pancasila (1995)./ *Indonesian citizen, born in Jakarta on December 12, 1969. She obtained a Bachelor of Engineering degree in Civil Engineering from the University of Pancasila (1995).*



Direktorat Pengembangan Usaha
Directorate of Business Development



ADE FERRY FIRMANSYAH, SE., MM
Kepala Divisi Pengembangan Usaha /
Head of Business Development Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Ciamis, 29 Desember 1974. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (1998) dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia (2004). / *Indonesian citizen, born in Ciamis on December 29, 1974. He earned a bachelor's degree in economics from the Islamic University of Indonesia (1998) and a Masters in Management from the University of Indonesia (2004).*



ESTHI PAMBANGUN, SE
Kepala Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan /
Head of Commercial and Customer Service Division

Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 2 Juli 1976. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro (1998). / *Indonesian citizen, born in Semarang, July 2, 1976. Obtained a Bachelor's degree in Economics from Diponegoro University (1998).*



DADAN HIDAYAT, ST., ME
General Manajer Unit Usaha Pariwisata dan Hotel /
General Manager of the Tourism and Hotel Business Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 19 November 1973 . Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari ITENAS(1998) dan gelar Magister Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (2010). / *Indonesian citizen, born in Cirebon, 19 November 1973. He obtained a Bachelor's degree in Electrical Engineering from ITENAS(1998) and a Master's degree in Economics from Padjadjaran University (2010).*



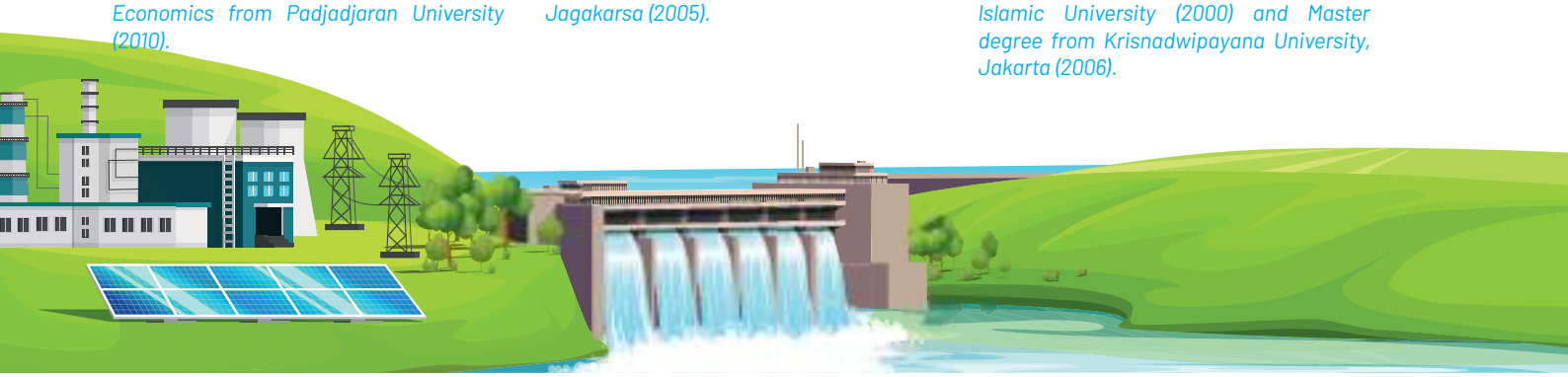
IMAS AAN, SE., MM
Project Manager Holding Air Minum Dalam Kemasan /
Project Manager Holding Bottled water

Warga Negara Indonesia, lahir di Garut, 13 November 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari Ikopin Jatinangor (1996) dan gelar Magister Keuangan dari Universitas Tama Jagakarsa (2005). / *Indonesian citizen, born in Garut on November 13, 1972. He obtained a bachelor's degree from Ikopin Jatinangor (1996) and a Masters in Finance from the University of Tama Jagakarsa (2005).*



RENI MAYASARI, ST., M.Si
Project Manager Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi / *Project Manager for Tourism and Destination Infrastructure Development*

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 9 Agustus 1975. Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Islam Bandung (2000) dan gelar Master Kebijakan Publik dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2006)./ *Indonesian citizen, born in Purwakarta on August 9, 1975. She obtained Bachelor degree in engineering from Bandung Islamic University (2000) and Master degree from Krisnadwipayana University, Jakarta (2006).*



Pejabat Anak Perusahaan & Dana Pensiun
Officers of Subsidiaries & Pension Funds



HERRISON TOGATOROP, SE., AK
Direktur Utama merangkap Direktur Investasi Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II / *President Director concurrently Investment Director of Perum Jasa Tirta II Pension Fund*

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan, 2 Juni 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (1999). / *Indonesian citizen, born in Medan on June 2, 1972. He earned a Bachelor of Economics degree at the University of North Sumatra (1999).*



ANDRIJANTO, Ir, MT
Special Expertise Tingkat I Bidang Analisa Kinerja Direktorat Pengembangan Usaha, secara teknis operasional berada pada Direktur Pengembangan Usaha. / *Special Expertise Level I in the Field of Performance Analysis of the Directorate of Business Development, technically and operationally falls under the Director of Business Development.*

Warga Negara Indonesia, lahir di Pangkal Pinang, 5 Maret 1968. Memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (1993) dan gelar Magister Manajemen SDA dari Institut Teknologi Bandung (2007). / *Indonesian citizen, born in Pangkal Pinang, March 5, 1968 He obtained a degree in Engineering from Bandung Institute of Technology (1993) and Masters of Water Resources Management from the Bandung Institute of Technology (2007).*



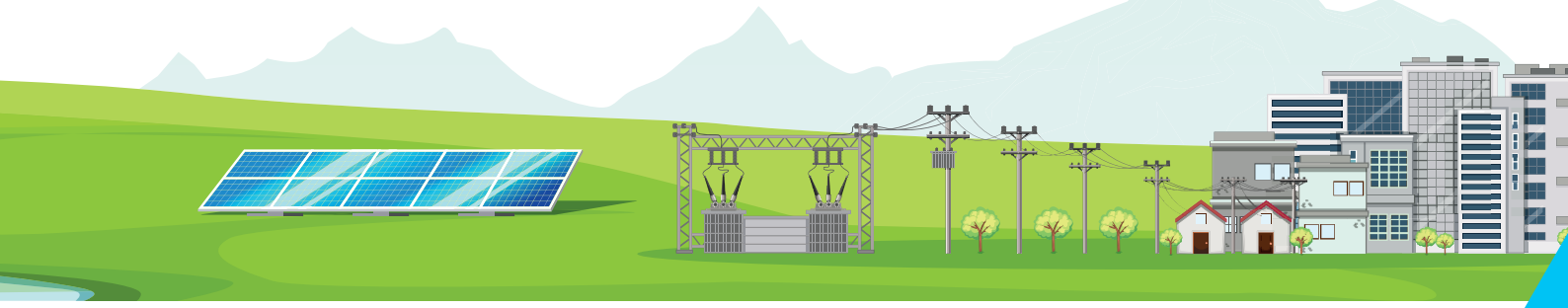
EEF SYAEFUL AMIEN, SE. M.M
Direktur Keuangan & Administrasi Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II / *Director of Finance & Administration of Perum Jasa Tirta II Pension Fund*

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 7 April 1972. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen dari Universitas Islam Bandung (1997). / *Indonesian citizen born in Purwakarta, on April 7, 1972. He pursued his undergraduate degree in Economics majoring in Management from the Islamic University, Bandung (1997).*



NANDANG MUNANDAR, SE, M. AKT
Direktur PT Jasa Tirta Luhur / *Director of PT Jasa Tirta Luhur*

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 12 Februari 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP dan Magister Akuntansi dari Universitas Budi Luhur Jakarta (2010). / *Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 12, 1972. He obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP and Master's Degree in Accounting from Budi Luhur University, Jakarta (2010).*




KILAS KINERJA PERUSAHAAN
Jasa Tirta II Water For Wellness
RKAP 2022



ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Tinjauan Makro Ekonomi Dan Industri

Macroeconomic and Industrial Review

Pada tahun 2023, hubungan antara sumber daya air untuk pembangkit listrik, pasokan air baku, dan pasokan air bersih semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor makroekonomi, sosial, dan politik. Ketika tantangan global seperti perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan ketidakstabilan ekonomi semakin meningkat, pengelolaan strategis dan pemanfaatan berkelanjutan dari sumber daya air menjadi semakin krusial. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana dinamika makro ekonomi, sosial, dan politik membentuk permintaan dan ketersediaan air di berbagai sektor.

In 2023, the relationship between water resources for electricity generation, raw water supply, and clean water supply has become increasingly influenced by macroeconomic, social, and political factors. As global challenges such as climate change, population growth, and economic instability intensify, strategic management and sustainable utilization of water resources are becoming ever more crucial. This analysis explores how macroeconomic, social, and political dynamics are shaping the demand and availability of water across various sectors.

FAKTOR EKONOMI

Pada tahun 2023, ekonomi global ditandai oleh volatilitas yang dipicu oleh fluktuasi harga energi, gangguan rantai pasokan, dan tekanan inflasi. Kondisi ekonomi ini berdampak langsung pada biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air, termasuk bendungan dan fasilitas pengolahan air. Di sektor listrik, dorongan menuju energi terbarukan, terutama tenaga air, dipandang sebagai cara untuk mengurangi risiko ekonomi yang terkait dengan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun, keterbatasan ekonomi dapat membatasi investasi dalam proyek baru atau peningkatan infrastruktur yang ada, yang berpotensi mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya air.

Selain itu, meningkatnya permintaan air di sektor industri dan pertanian, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi, memberikan tekanan tambahan pada sumber daya air. Permintaan yang meningkat ini dapat menyebabkan persaingan antar sektor yang berbeda, meningkatkan biaya air, dan mempengaruhi ketersediaannya untuk pembangkit listrik, pasokan air baku, dan pasokan air bersih.

Perekonomian Indonesia, yang sedang bangkit dari dampak pandemi COVID-19, telah berfokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk di sektor air. Investasi dalam pembangunan bendungan dan infrastruktur air telah menjadi prioritas, didorong oleh kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan industri,

ECONOMIC FACTORS

In 2023, the global economy was characterized by volatility driven by energy price fluctuations, supply chain disruptions, and inflationary pressures. These economic conditions directly impacted the costs of developing and maintaining water infrastructure, including dams and water treatment facilities. In the electricity sector, the push toward renewable energy, particularly hydropower, was seen as a way to mitigate economic risks associated with reliance on fossil fuels. However, economic constraints could limit investments in new projects or the upgrading of existing infrastructure, potentially leading to inefficiencies in water resource management.

Moreover, the growing demand for water in the industrial and agricultural sectors, which are major drivers of economic growth, placed additional pressure on water resources. This rising demand could lead to competition between different sectors, increasing the cost of water and affecting its availability for electricity generation, raw water supply, and clean water supply.

Indonesia's economy, recovering from the impacts of the COVID-19 pandemic, has focused on infrastructure development, including in the water sector. Investments in dam construction and water infrastructure have become a priority, driven by the need to support industrial growth, urbanization, and



urbanisasi, dan kebutuhan energi. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sebagai sumber energi terbarukan, semakin diperhitungkan dalam campuran energi nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan berkontribusi pada ketahanan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sangat erat terkait dengan industri air, dengan investasi signifikan diarahkan pada pengembangan pembangkit listrik tenaga air baru dan peningkatan sistem pasokan air yang ada. Ketersediaan air baku sangat penting bagi industri, khususnya di sektor manufaktur dan pertanian, yang merupakan salah satu kontributor utama PDB Indonesia. Selain itu, permintaan akan air bersih meningkat tajam, didorong oleh urbanisasi dan peningkatan standar hidup. Hal ini menciptakan peluang bagi keterlibatan sektor swasta dalam pengolahan dan distribusi air, yang didukung oleh kemitraan publik-swasta.

FAKTOR SOSIAL

Faktor sosial, termasuk pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan kesadaran publik terhadap isu lingkungan, memainkan peran penting dalam membentuk permintaan dan distribusi air. Pada tahun 2023, urbanisasi yang cepat telah meningkatkan tekanan pada sistem pasokan air, terutama di negara-negara berkembang. Kepadatan populasi yang semakin tinggi di daerah perkotaan menyebabkan peningkatan permintaan air bersih, sehingga diperlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur air untuk memastikan pasokan yang memadai.

Lebih jauh lagi, penekanan sosial terhadap praktik berkelanjutan telah meningkatkan pengawasan publik terhadap praktik pengelolaan air. Ada permintaan yang semakin besar untuk transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah dan entitas sektor swasta terkait bagaimana sumber daya air dialokasikan dan digunakan. Tekanan sosial ini dapat mempengaruhi keputusan kebijakan dan mengarah pada regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan air, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk pembangkit listrik dan penggunaan penting lainnya.

energy needs. Hydropower plants, as a renewable energy source, are increasingly being considered as part of the national energy mix, reducing dependence on fossil fuels and contributing to economic resilience.

Economic growth was closely tied to the water industry, with significant investments directed towards the development of new hydropower plants and the upgrading of existing water supply systems. The availability of raw water was crucial for industries, particularly in the manufacturing and agricultural sectors, which are one of major contributors to Indonesia's GDP. Additionally, the demand for clean water surged, fueled by urbanization and rising living standards. This created opportunities for private sector involvement in water treatment and distribution, supported by public-private partnerships.

SOCIAL FACTORS

Social factors, including population growth, urbanization, and public awareness of environmental issues, play a crucial role in shaping water demand and distribution. In 2023, rapid urbanization has placed increasing pressure on water supply systems, particularly in developing countries. The rising population density in urban areas has led to greater demand for clean water, necessitating significant investments in water infrastructure to ensure adequate supply.

Furthermore, the social emphasis on sustainable practices has heightened public scrutiny of water management practices. There is a growing demand for transparency and accountability from governments and private sector entities in how water resources are allocated and used. This social pressure can influence policy decisions, leading to stricter regulations on water use, which, in turn, can affect the availability of water for electricity generation and other critical uses.



Di Indonesia, dinamika sosial seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi juga sangat mempengaruhi industri air. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat telah meningkatkan permintaan akan air bersih dan aman. Urbanisasi juga meningkatkan konsumsi air, terutama di kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, di mana pasokan air bersih sering kesulitan memenuhi permintaan.

In Indonesia, social dynamics such as population growth, urbanization, and shifting consumption patterns also have significantly impacted the water industry. Increased public awareness of environmental sustainability and public health has driven demand for clean and safe water. Urbanization has further intensified water consumption, particularly in metropolitan areas like Jakarta, Surabaya, and Bandung, where clean water supplies often struggle to meet demand.

Di daerah pedesaan, ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan, dengan banyak komunitas yang bergantung pada sumber air yang belum diolah. Ketimpangan akses air ini memiliki implikasi sosial, termasuk risiko kesehatan dan potensi migrasi ke pusat-pusat kota, yang semakin memperburuk tantangan pasokan air di perkotaan. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini termasuk memperluas infrastruktur air ke daerah-daerah yang kurang terlayani dan meningkatkan standar kualitas air, meskipun pelaksanaannya masih belum merata di seluruh negeri.

In rural areas, access to clean water remains a challenge, with many communities relying on untreated water sources. This disparity in water access carries social implications, including health risks and potential migration to urban centers, exacerbating the water supply challenges in cities. Government efforts to address these issues include expanding water infrastructure to underserved areas and improving water quality standards, though implementation remains uneven across the country.

FAKTOR POLITIK

Dinamika politik pada tahun 2023 ditandai oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan perubahan aliansi, yang memiliki implikasi signifikan terhadap pengelolaan sumber daya air. Air semakin dipandang sebagai sumber daya strategis, dan pengendaliannya dapat menjadi sumber kekuasaan dan pengaruh. Di wilayah dimana sumber daya air dibagi lintas batas, ketegangan politik dapat meningkat, menyebabkan konflik atas hak dan akses air.

POLITICAL FACTORS

The political dynamics in 2023 were marked by escalating geopolitical tensions and shifting alliances, which had significant implications for water resource management. Water is increasingly viewed as a strategic asset, and controlling it can be a source of power and influence. In regions where water resources are shared across borders, political tensions may intensify, leading to conflicts over water rights and access.

Selain itu, stabilitas politik sangat penting untuk pengelolaan sumber daya air yang efektif. Di negara-negara dengan pemerintahan yang tidak stabil atau lembaga yang lemah, pelaksanaan kebijakan air dan proyek infrastruktur dapat terhambat secara serius, mengakibatkan ketidakefisienan dan potensi kekurangan. Sebaliknya, kepemimpinan politik yang kuat dan kerja sama internasional sangat penting untuk

Furthermore, political stability is crucial for effective water resource management. In countries with unstable governments or weak institutions, the implementation of water policies and infrastructure projects can be severely hindered, resulting in inefficiency and potential shortages. Conversely, strong political leadership and international cooperation are essential for successful cross-border

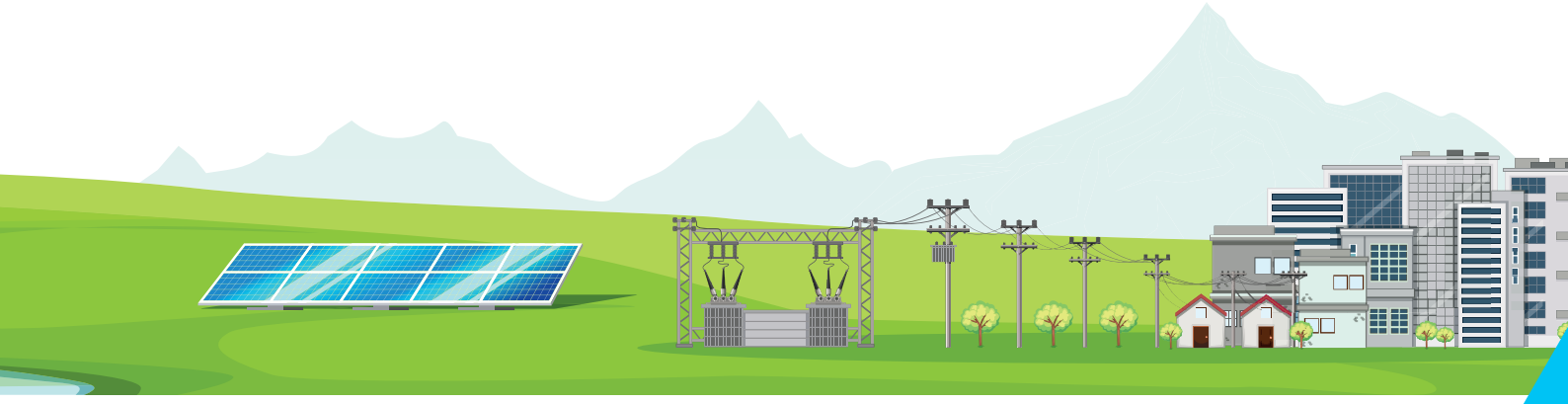


pengelolaan sumber daya air lintas batas yang sukses dan pengembangan proyek-proyek berskala besar seperti bendungan pembangkit listrik tenaga air.

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya air dibentuk oleh kebijakan nasional dan regional, dengan fokus pada pencapaian keamanan air dan mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pengelolaan sumber daya air sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, dengan menekankan pembangunan bendungan dan perluasan sistem pasokan air. Upaya ini sejalan dengan tujuan yang lebih luas untuk mencapai kemandirian energi melalui sumber-sumber terbarukan seperti PLTA.

water resource management and the development of large-scale projects such as hydroelectric dams.

In Indonesia, the management of water resources is shaped by national and regional policies, with a focus on achieving water security and supporting economic development. The Indonesian government has prioritized water resource management as part of its national development agenda, emphasizing the construction of dams and the expansion of water supply systems. These efforts align with broader goals to achieve energy independence through renewable sources like hydropower.



Tinjauan per segemen usaha

Review per business segment

Perum Jasa Tirta II bertugas menyelenggarakan kemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Untuk menjalankan tugas tersebut, Perusahaan melakukan 5 (lima) kegiatan usaha utama, meliputi:

1. Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;
2. Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan/atau Perusahaan pengelolaan tenaga listrik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air;
4. Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum); dan
5. Menyelenggarakan usaha optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk perkantoran, pergudangan, pariwisata, perhotelan dan resort, olah raga dan rekreasi, rumah sakit, prasarana telekomunikasi dan sumber daya energi, jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan.

Seluruh kegiatan usaha tersebut dikelompokkan menjadi 6 (enam) segmen sebagai berikut:

1. **Pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik;**
2. **Penyediaan air;**
3. **Kepariwisataan;**
4. **Pemanfaatan lahan;**
5. **Jasa laboratorium kualitas air;**
6. **Air minum dalam kemasan (AMDK).**

Kegiatan wilayah/usaha tersebut dijalankan oleh 7 (tujuh) unit usaha yang terdiri dari, Unit Wilayah I (UWI), Unit Wilayah II (UW II), Unit Wilayah III (UW III), Unit Wilayah IV (UW IV), Unit PLTA, Unit Usaha Pariwisata dan Hotel, Unit Layanan Laboratorium dan 1 (satu) anak Perusahaan yaitu PT. Jasa Tirta Luhur.

Seluruh unit wilayah/usaha yang berada di Wilayah I, II, III, dan IV utamanya bertugas mengembangkan usaha usaha jasa air; menyelenggarakan kegiatan pelestarian, perlindungan air, pengelolaan SDA serta pelaksanaan

Perum Jasa Tirta II is tasked with organising public benefits for quality and adequate water and water sources for the fulfilment of people's life needs and carrying out certain tasks given by the Government in river basin management. To carry out these tasks, the Company conducts 5 (five) main business activities, including:

1. *Raw water services for drinking water, industry, agriculture, drainage, ports, power plants and fulfilment of other water needs;*
2. *Provision of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and/or other electricity management companies in accordance with the provisions of laws and regulations;*
3. *Generation, distribution of hydropower, drinking water, consulting services in the field of Water Resources technology, rental of large equipment and water quality laboratory services;*
4. *Development of SPAM (Drinking Water Supply System); and*
5. *Optimising the potential of resources owned by the Company for offices, warehousing, tourism, hotels and resorts, sports and recreation, hospitals, telecommunications infrastructure and energy resources, leasing services and exploitation of facilities and infrastructure owned by the Company.*

All business activities are grouped into 6 (six) segments as follows:

1. ***Electricity generation and distribution;***
2. ***Water supply***
3. ***Tourism;***
4. ***Land utilisation***
5. ***Water quality laboratory services***
6. ***Bottled drinking water (AMDK).***

The region/business activities are carried out by 7 (seven) business units consisting of, Region I Unit (UWI), Region II Unit (UW II), Region III Unit (UW III), Region IV Unit (UW IV), Hydropower Unit, Tourism and Hotel Business Unit, Laboratory Service Unit and 1 (one) subsidiary, namely PT Jasa Tirta Luhur.

All regional/business units located in Regions I, II, III, and IV are primarily tasked with developing water services businesses; organising preservation activities, water protection, natural resources management and



konstruksi; Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (OPSDA) dan monitoring kualitas air; penyediaan air baku; pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas masyarakat lainnya.

construction implementation; Operation and Maintenance of Water Resources (OPSDA) and water quality monitoring; provision of raw water; fostering relationships with local governments, the private sector, and other communities.

Perusahaan juga memiliki Unit PLTA yang bertugas dibidang pengembangan dan pengoperasian PLTA serta pengusahaan non Sumber Daya Air (non SDA). Uraian lebih lanjut mengenai tinjauan operasi, produktivitas, pendapatan usaha, serta profitabilitas per segmen usaha disajikan dalam deskripsi sebagai berikut:

The Company also has a Hydropower Unit that is in charge of the development and operation of hydropower and non-water resources business. Further description of the review of operations, productivity, operating income, and profitability per business segment is presented in the following description:

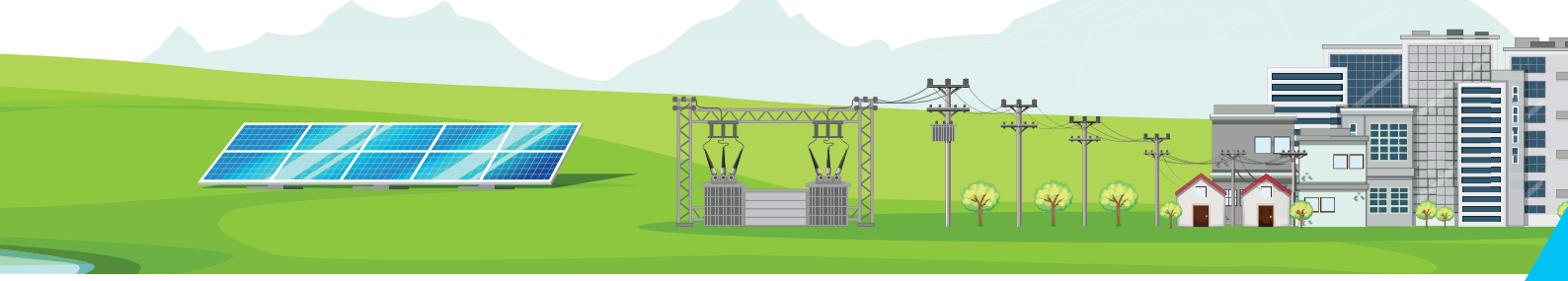
Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik
Generation and Distribution of Electric Power

Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. H. Djuanda Jatiluhur yang dikelola oleh PJT II memiliki 6 (enam) turbin dengan kapasitas total daya terpasang sebesar 187,5 Mega Watt (MW). PLTA Ir. H. Djuanda dapat memproduksi listrik dengan rata-rata dalam setahun sebesar 830 juta kWh untuk didistribusikan ke PT PLN (Persero) serta industri di sekitar kawasan Jatiluhur – Purwakarta melalui jaringan transmisi 150 kV dan 70 kV. Sesuai dengan karakteristiknya, PLTA Ir. H. Djuanda juga merupakan PLTA serbaguna, di mana selain berfungsi sebagai Pembangkit Tenaga Listrik, PLTA ini juga berfungsi untuk menyediakan air irigasi, pengendalian banjir, perikanan dan pariwisata, sehingga dalam pembangkitan tenaga listriknya perlu dikoordinasikan dengan keperluan irigasi dan musim tanam padi.

Ir. H. Djuanda Jatiluhur Hydroelectric Power Plant (PLTA) managed by PJT II has 6 (six) turbines with a total installed power capacity of 187.5 Mega Watt (MW). PLTA Ir. H. Djuanda can produce electricity with an annual average of 830 million kWh to be distributed to PT PLN (Persero) and industries around the Jatiluhur - Purwakarta area through 150 kV and 70 kV transmission networks. In accordance with its characteristics, the Ir. H. Djuanda Hydropower Plant is also a multipurpose hydropower plant, where in addition to functioning as an Electric Power Plant, this hydropower plant also functions to provide irrigation water, flood control, fisheries and tourism, so that the generation of electricity needs to be coordinated with irrigation needs and the rice planting season.

Di samping PLTA Ir. H. Djuanda, PJT II juga mengoperasikan dan memelihara PLTA Mini Hydro yang bertempat di Curug – Klari – Karawang, sehingga lebih dikenal dengan nama PLTA Mini Hydro Curug. PLTA Mini Hydro Curug dibangun pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang pada tahun 2000 dengan kapasitas daya terpasang sebesar 2 x 3,2 Mega Watt dan mulai dioperasikan pada tahun 2002 untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pompa Tarum Barat dan Tarum Timur guna menaikkan level air baku agar dapat disalurkan ke wilayah irigasi dan sekitarnya. Selain itu, penyaluran daya listrik juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Bendung Curug serta area perkantoran dan perumahan di sekitar Bendung tersebut.

In addition to the Ir. H. Djuanda Hydropower Plant, PJT II also operates and maintains the Mini Hydro Hydropower Plant located in Curug - Klari - Karawang, so it is better known as the Curug Mini Hydro Hydropower Plant. PLTA Mini Hydro Curug was built in 2000 with an installed power capacity of 2 x 3.2 Mega Watts and began operating in 2002 to meet the electricity needs of the West Tarum and East Tarum Pumps in order to raise the level of raw water so that it can be distributed to irrigation areas and surrounding areas. In addition, the distribution of electricity is also intended to meet the electricity needs at Curug Dam as well as office and residential areas around the Dam.



Produktivitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik

Productivity of the Electricity Generation and Distribution Segment

Realisasi produksi listrik 2023 dalam kWh

No	Uraian	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyaluran ke PLN	641.960.012	486.416.039	554.008.319	113,90%	86,30%
b	Penyaluran ke non PLN	329.462.356	399.771.319	378.657.913	94,72%	114,93%
c	Pemakaian sendiri	40.482.632	38.888.000	40.470.768	104,07%	99,97%
	Total	**1.011.905.000**	**925.075.358**	**973.137.000**	**105,20%**	**96,17%**

Realisasi produksi listrik Tahun 2023 sebesar 973.137.000 kWh atau 105,20% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 925.075.358 kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1.011.905.000 kWh turun 3.83%.

Produksi listrik total sampai dengan bulan Desember 2023 tercapai sebesar 105,20% dari RKAP Tahun 2023, hal ini dikarenakan :

- Tinggi Muka Air (TMA) sd. TW III diatas asumsi rencana
- Kehandalan unit turbin yang baik.
- Terdapat Permintaan dari Kementerian PUPR untuk menyediakan daya tampung banjir sehubungan dengan perkiraan lanina di akhir tahun 2022 sd. pertengahan tahun 2023 dan air keluar waduk selama 7 (tujuh) bulan di atas target.

Penyaluran ke PT PLN (Persero) sebesar 554.008.319 kWh atau 56,93% dari total produksi, sedangkan penyaluran ke Non PT PLN / Swasta sebesar 378.657.913 kWh atau 38,91% dari total produksi dan pemakaian sendiri sebesar 40.470.768 kWh atau 4,16% dari total produksi sebesar 973.137.000 kWh.

Realisasi produksi yang disalurkan ke PT PLN (Persero) Tahun 2023 sebesar 554.008.319 kWh atau 113,90% dari RKAP Tahun 2023 sebessar 486.416.039 kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 641.960.012 kWh turun 13,70%.

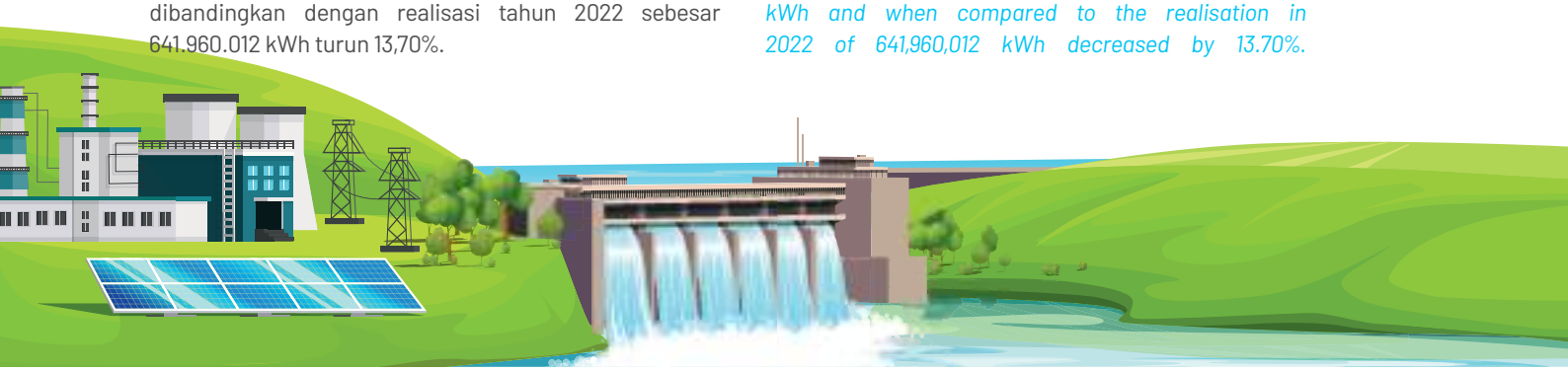
The realisation of electricity production in 2023 amounted to 973,137,000 kWh or 105.20% of the 2023 RKAP of 925,075,358 kWh and when compared to the 2022 realisation of 1,011,905,000 kWh decreased by 3.83%.

Total electricity production until December 2023 was achieved by 105.20% of the 2023 RKAP, this is due to :

- *Water Level (TMA) sd. TW III above plan assumptions*
- *Good reliability of turbine units.*
- *There is a request from the Ministry of PUPR to provide flood storage capacity in connection with the estimated lanina at the end of 2022 until mid-2023 and reservoir outflow for 7 (seven) months above target.*

Distribution to PT PLN (Persero) amounted to 554,008,319 kWh or 56.93% of total production, while distribution to Non PT PLN / Private amounted to 378,657,913 kWh or 38.91% of total production and self-use of 40,470,768 kWh or 4.16% of total production of 973,137,000 kWh.

The realisation of production distributed to PT PLN (Persero) in 2023 amounted to 554,008,319 kWh or 113.90% of the 2023 RKAP of 486,416,039 kWh and when compared to the realisation in 2022 of 641,960,012 kWh decreased by 13.70%.



Realisasi penyaluran ke Non PT PLN (Persero) sebesar 378.657.913 kWh atau 94,72% dari RKAP 2023 sebesar 399.771.319 kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 329.462.356 kWh naik 14,93%.

The realisation of distribution to Non PT PLN (Persero) was 378,657,913 kWh or 94.72% of the 2023 RKAP of 399,771,319 kWh and when compared to the 2022 realisation of 329,462,356 kWh up 14.93%.

Tidak tercapainya penyaluran listrik ke Non PT PLN (Persero) dalam hal ini Industri / Swasta dikarenakan adanya penurunan penyerapan penyaluran listrik akibat dari:

- Penyerapan PT IFA pada Tungku 3 belum beroperasi karena dalam proses AMDAL;
- Adanya Overhaul mesin produksi Tungku II di PT. Indotama Ferro Alloys;
- Adanya pemadaman listrik SUTT 70 kV Jatiluhur curug sehubungan adanya pekerjaan rehabilitasi tower transmisi SUTT 70 kV GI Jatiluhur - GI. Curug (PT IFA dan PT BPAS) pada tanggal 11 Desember 2023 s.d 20 Desember 2023.

The non-achievement of electricity distribution to Non PT PLN (Persero) in this case Industry / Private is due to a decrease in the absorption of electricity distribution as a result of:

- *PT IFA's absorption of Furnace 3 has not yet operated because it is in the AMDAL process;*
- *Overhaul of Furnace II production machines at PT Indotama Ferro Alloys;*
- *There is a power outage of SUTT 70 kV Jatiluhur curug due to rehabilitation work on the SUTT 70 kV transmission tower GI Jatiluhur - GI. Curug (PT IFA and PT BPAS) on 11 December 2023 to 20 December 2023.*

Realisasi pemakaian sendiri sebesar 40.470.768 kWh atau 104,07% dari RKAP 2023 sebesar 38.888.000 kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 40.482.632 kWh turun 3,00%.

Self-use realisation of 40,470,768 kWh or 104.07% of the 2023 RKAP of 38,888,000 kWh and when compared to the 2022 realisation of 40,482,632 kWh decreased by 3.00%.

Pendapatan Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik
Revenue from the Electricity Generation and Distribution Segment

Realisasi pendapatan listrik tahun 2023 sebesar Rp500.051 juta, jika dibandingkan dengan Pendapatan Listrik tahun 2022 sebesar Rp493.119 juta mengalami peningkatan 1,40%.

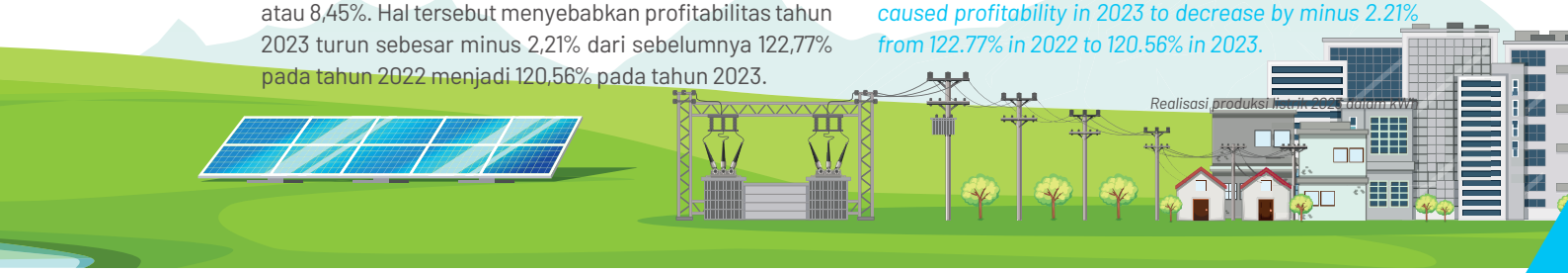
The realisation of electricity revenue in 2023 amounted to Rp500,051 million, when compared to electricity revenue in 2022 of Rp493,119 million, an increase of 1.40%.

Profitabilitas Segmen Pembangkitan dan Penyaluran Tenaga Listrik
Profitability of the Electricity Generation and Distribution Segment

Uraian / *Description*	2022	2023	Nominal pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Listrik / *Electricity Revenue*	493.119	500.052	6.933	1,41%
Beban Listrik / *Electricity Expenses*	(112.300)	(102.807)	9.493	8,45%
Laba/Rugi Operasi / *Operating Profit/Loss*	605.419	602.859	-2.560	-0.42%
Profitabilitas / *Profitability*	122.77%	120.56%	-	-2.21%

Pendapatan dari penyaluran listrik tahun 2023 berjumlah Rp500.052 juta dengan beban operasi sebesar Rp102.807 juta. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan listrik tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp6.932 juta atau 1,41%, beban listrik turun sebesar Rp9.492 juta atau 8,45%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2023 turun sebesar minus 2,21% dari sebelumnya 122,77% pada tahun 2022 menjadi 120,56% pada tahun 2023.

Revenues from electricity distribution in 2023 totalled Rp500,052 million with operating expenses of Rp102,807 million. When compared to 2022, electricity revenue in 2023 increased by Rp6,932 million or 1.41%, electricity expenses decreased by Rp9,492 million or 8.45%. This caused profitability in 2023 to decrease by minus 2.21% from 122.77% in 2022 to 120.56% in 2023.






WADUK SERBA GUNA
IR.H.DJUANDA

Jasa Air
Water Services

Segmen operasi penyediaan air meliputi air baku, air bersih, dan air irigasi. Perusahaan tergabung dalam Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) yang berpedoman pada Rencana Operasi Waduk Kaskade Citarum tahun 2021.

The water supply operation segment includes raw water, clean water, and irrigation water. The company is a member of the Citarum Cascade Dam Operation Coordination Team (TKPBKC) which is guided by the 2021 Citarum Cascade Dam Operation Plan.

Sebagai BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM), pelaksanaan tugas PJT II terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek sosial dan aspek komersial. Berdasarkan volume air yang disalurkan serta ditinjau dari aspek komersial, penyediaan air baku yang dipasok ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota, Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya serta Air Bersih hanya sebesar 13%. Selebihnya merupakan kontribusi PJT II dalam membantu Pemerintah terkait dengan pengelolaan irigasi, penanganan banjir, konservasi, penyuluhan, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional di bidang pertanian, khususnya untuk pertanian di daerah irigasi utara dan selatan Jatiluhur yang mendapatkan supply/pasokan air dari sumber setempat dan Bendungan Ir. H. Djuanda (Jatiluhur).

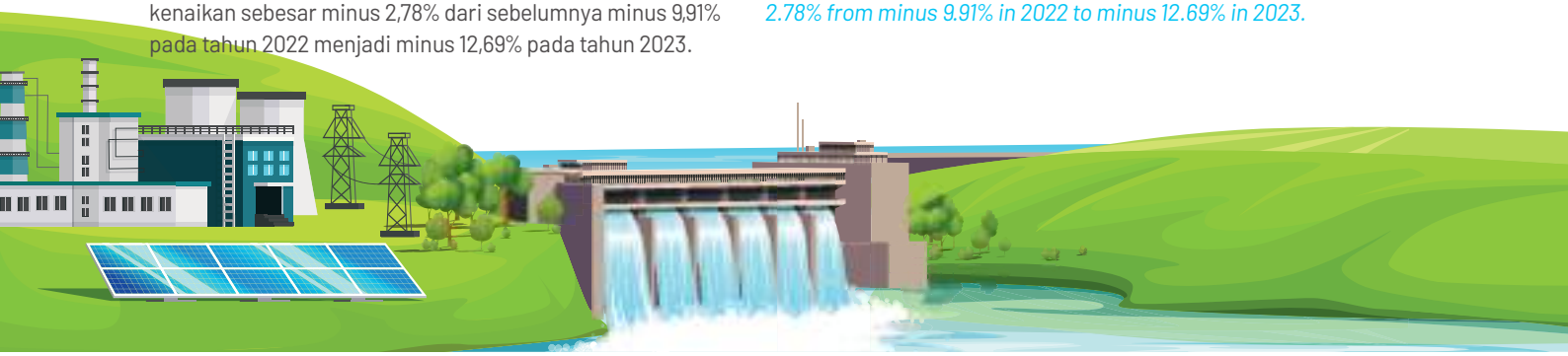
As a state-owned enterprise in the form of a Public Company (PERUM), the implementation of PJT II's duties consists of 2 (two) aspects, namely social aspects and commercial aspects. Based on the volume of water supplied and viewed from a commercial aspect, the provision of raw water supplied to the Regency / City Regional Drinking Water Company (PDAM), Jaya Drinking Water Company (PAM) and Clean Water is only 13%. The rest is PJT II's contribution in assisting the Government related to irrigation management, flood management, conservation, extension, and support for the national food security programme in agriculture, especially for agriculture in the northern and southern irrigation areas of Jatiluhur which get water supply from local sources and Ir. H. Djuanda Dam (Jatiluhur).

Profitabilitas Air Baku
Raw Water Profitability

Uraian / *Description*	2022	2023	Nominal pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Air Baku / *.....*	368.008	456.052	88.044	23,92%
BBeban Air Baku / *.....*	(404.471)	(513.928)	(109.457)	27,06%
Laba/Rugi Operasi / *Operating Profit/Loss*	(36.463)	(57.877)	(21.413)	58,73%
Profitabilitas / *Profitability*	(9,91%)	(12,69%)	-	(2,78%)

Pendapatan dari segmen Air Baku tahun 2023 berjumlah Rp456.052 juta dengan beban operasi sebesar Rp513.928 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp57.877 juta dan profitabilitas sebesar minus 13,4%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan Segmen Air Baku tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp88.044 juta atau 23,92%, beban Segmen Air Baku naik Rp109.457 juta atau 27,06%, dan rugi operasi naik Rp21.413 juta atau 58,73%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar minus 2,78% dari sebelumnya minus 9,91% pada tahun 2022 menjadi minus 12,69% pada tahun 2023.

Revenues from the Raw Water segment in 2023 totalled Rp456,052 million with operating expenses of Rp513,928 million resulting in an operating loss of Rp57,877 million and profitability of minus 13.4%. When compared to 2022, Raw Water Segment revenue in 2023 increased by Rp88,044 million or 23.92%, Raw Water Segment expenses increased by Rp109,457 million or 27.06%, and operating loss increased by Rp21,413 million or 58.73%. This caused profitability in 2023 to increase by minus 2.78% from minus 9.91% in 2022 to minus 12.69% in 2023.



Produktivitas Segmen Jasa Air
Water Services Segment Productivity

Air Baku / *Raw Water*

Realisasi produksi 2023 dalam m3

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
a	Air baku ke PAM Jaya, PDAM Kab/Kota & Industri	1.094.274.209	1.085.273.590	1.142.515.664	105,27%	104,41%
	Pam Jaya	536.209.758	528.945.848	544.126.306	102,87%	101,48%
	PDAM Kab/Kota	242.869.617	212.051.870	259.389.915	122,32%	106,80%
	Industri	283.554.463	314.708.115	296.087.069	94,08%	104,42%
	PT Sang Hyang Seri	31.640.371	29.567.757	42.912.374	145,13%	135,63%
b	Air baku ke PLTA/BJPSDA	5.271.014.902	486.416.039	3.704.323.736	761,55%	70,28%
	PLTA Ir. Juanda	641.960.012	486.416.039	554.008.319	113,90%	86,30%
	PLTA Saguling	2.981.867.000	-	1.959.419.313	-	65,71%
	PLTA Cirata	1.647.178.890	-	1.190.896.104	-	72,30%
	PLTA Rajamandala	-	-	-	-	-

Realisasi penyaluran air baku (PAM Jaya, PDAM Kab/Kota, Industri & PT.Sang Hyang Seri) tahun 2023 sebesar 1.142.515.664 m^3 atau 105,27% dari RKAP 2023 sebesar 1.085.273.590 m^3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1.094.274.209 m^3 naik 4,41%.

The realisation of raw water distribution (PAM Jaya, District / City PDAMs, Industry & PT.Sang Hyang Seri) in 2023 amounted to 1,142,515,664 m3 or 105.27% of the 2023 RKAP of 1,085,273,590 m3 and when compared to the realisation in 2022 of 1,094,274,209 m3 up 4.41%.

Kenaikan penyaluran air baku dikarenakan pemakaian PLN, PLN IP dan PLN NP :

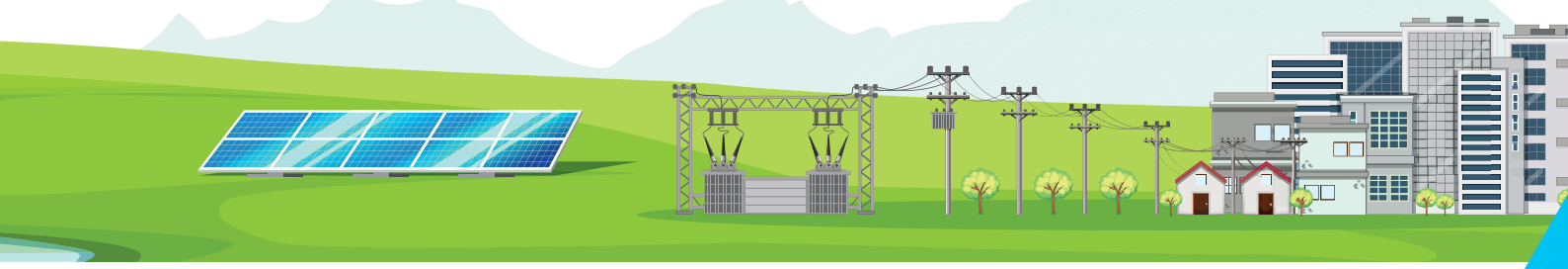
- Adanya Realisasi PLN IP Saguling yang dalam RKAP 2023 belum ditargetkan sedangkan terdapat realisasi sd. Desember 1.959.419.312,83 kWh
- Adanya Realisasi PLN NP Cirata belum ditargetkan di RKAP 2023 sedangkan terdapat Realisasi s.d Desember 1.190.896.104,00 kWh
- Rencana s.d Desember PLTA Djuanda 486.416.039,48 kWh Realisasi s.d Desember 554.008.319,00 kWh

The increase in raw water distribution was due to the use of PLN, PLN IP and PLN NP:

- *The realisation of PLN IP Saguling which in the 2023 RKAP has not been targeted while there is a realisation up to. December 1,959,419,312.83 kWh*
- *The realisation of PLN NP Cirata has not been targeted in the 2023 RKAP while there is a realisation up to December of 1,190,896,104.00 kWh.*
- *Plan s.d December PLTA Djuanda 486,416,039.48 kWh Realisation s.d December 554,008,319.00 kWh*

Realisasi penyaluran air baku PAM Jaya Tahun 2023 sebesar 544.126.306 m^3 atau 102,87% dari RKAP 2023 sebesar 528.945.848 m^3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 536.209.758 m^3 naik 1,48%.

The realisation of PAM Jaya's raw water distribution in 2023 amounted to 544,126,306 m3 or 102.87% of the 2023 RKAP of 528,945,848 m3 and when compared to the realisation in 2022 of 536,209,758 m3 increased by 1.48%.



Realisasi penyaluran air baku ke PDAM Kabupaten/Kota Tahun 2023 sebesar 259.389.915 m^3 atau 122,32% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 212.051.870 m^3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 242.869.617 m^3 naik 6,80%.

The realisation of raw water distribution to Regency / City PDAMs in 2023 amounted to 259,389,915 m3 or 122.32% of the 2023 RKAP of 212,051,870 m3 and when compared to the realisation in 2022 of 242,869,617 m3 increased by 6.80%.

Realisasi penyaluran air baku ke Industri Tahun 2023 sebesar 296.087.069 m^3 atau 94,08% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 314.708.115 m^3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 283.554.463 m^3 naik 4,42%.

The realisation of raw water distribution to industry in 2023 was 296,087,069 m3 or 94.08% of the 2023 RKAP of 314,708,115 m3 and when compared to the realisation in 2022 of 283,554,463 m3 up 4.42%.

Penurunan penyaluran air baku industri dikarenakan :

- Ketersediaan air di hulu sedikit akibat musim kemarau sehingga pemanfaat air di Hulu tidak maksimal pengambilan airnya;
- Adanya Perusahaan yang belum ditagihkan karena habis masa berlaku SIPSDA.

The decrease in industrial raw water distribution is due to:

- *The availability of water upstream is low due to the dry season so that water users upstream are not maximising their water intake;*
- *There are companies that have not been billed because the SIPSDA expires.*

Realisasi penyaluran air baku ke PT Sang Hyang Seri tahun 2023 sebesar 42.912.374 m^3 atau 145,13% dari RKAP tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 31.640.371 m^3 naik 16,17%.

The realisation of raw water distribution to PT Sang Hyang Seri in 2023 was 42,912,374 m3 or 145.13% of the 2023 RKAP and when compared to the realisation in 2022 of 31,640,371 m3 increased by 16.17%.

Air Baku ke PLTA / BJPSDA
Raw Water to Hydroelectric Power Plant / BJPSD

Realisasi penyaluran air baku ke PLTA / BJPSDA PLTA Ir.H.Djuanda Tahun 2023 sebesar 554.008.319 kWh atau 113,90% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 486.416.039 kWh dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 641.960.012 kWh turun 13,70%.

The realisation of raw water distribution to PLTA / BJPSDA PLTA Ir.H.Djuanda in 2023 amounted to 554,008,319 kWh or 113.90% of the 2023 RKAP of 486,416,039 kWh and when compared to the 2022 realisation of 641,960,012 kWh decreased by 13.70%.

Realisasi penyaluran air baku ke PLTA / BJPSDA PLTA Ir.H.Djuanda Tahun 2023 sebesar 554.008.319 kWh atau 113,90% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 486.416.039 kWh, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 641.960.012 kWh turun 13,70%.

The realisation of raw water distribution to PLTA / BJPSDA PLTA Ir.H.Djuanda in 2023 amounted to 554,008,319 kWh or 113.90% of the 2023 RKAP of 486,416,039 kWh, when compared to the realisation in 2022 of 641,960,012 kWh decreased by 13.70%.

Realisasi penyaluran air baku ke PLTA / BJPSDA PLTA Saguling Tahun 2023 sebesar 1.959.419.313 kWh, JIka dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 2.981.876.000 kWh turun 34,29%.

The realisation of raw water distribution to Saguling Hydroelectric Power Plant / BJPSDA in 2023 amounted to 1,959,419,313 kWh, compared to the realisation in 2022 of 2,981,876,000 kWh decreased by 34.29%.

Realisasi penyaluran air baku ke PLTA / BJPSDA PLTA Cirata Tahun 2023 sebesar 1.190.896.104 kWh, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 1.647.178.890 turun 27,70%.

The realisation of raw water distribution to PLTA / BJPSDA PLTA Cirata in 2023 amounted to 1,190,896,104 kWh, when compared to the realisation in 2022 of 1,647,178,890 decreased by 27.70%.



Air Bersih
Clean Water

Realisasi produksi 2023 dalam m3

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
a	Air bersih ke industri	179.902	770.362	623.112	80,89%	346,36%
b	Pemakaian sendiri	1.092.461	1.194.315	92.326	7,73%	8,45%
c	Air bersih ke penduduk	711.069	936.547	425.556	45,44%	59,85%
d	Air bersih curah ke PDAM	835.769	2.444.040	967.726	39,60%	115,79%

Realisasi penyaluran air bersih Tahun 2023 sebesar 2.108.731 m3 atau 39,45% dari RKAP Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 2.819.201 m3 turun 25,20%.

Realisasi penyaluran air bersih ke Industri Tahun 2023 sebesar 623.112 m3 atau 80,89% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 770.362 m3 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 179.902 m3 naik 246,36%.

Realisasi penyaluran air bersih ke Penduduk tahun 2023 sebesar 425.566 m3 atau 45,44% dari RKAP Tahun 2023 sebesar 936.547 m3 dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 711.069 m3 turun 40,15%.

Penyaluran air bersih curah ke PDAM/Kawasan Industri Tahun 2023 sebesar 967.726 m3 atau 39,60% dari RKAP tahun 2023 sebesar 2.444.040 m3 dan jika dibandingkan dengan realisasi s.d. tahun 2022 sebesar 835.769 m3 naik 15,79%.

Hal-hal yang mempengaruhi ketercapaian penyaluran produksi air bersih sebagai berikut:

a) SPAM MARUNDA

- Karena penyerapan dari Kawasan Industri Marunda tidak optimal karena tenant di Kawasan industri stagnan dan tenant yang baru hanya untuk pergudangan bukan unit produksi sehingga pemakaian air bersihnya kecil;
- Kawasan Industri Marunda di suplai air bersih oleh 3 (tiga) SPAM, terdiri dari SPAM Marunda dan 2 (dua) unit SPAM milik PT. Marunda Mandiri Internasional

The realisation of clean water distribution in 2023 was 2,108,731 m3 or 39.45% of the 2023 RKAP. When compared to the realisation in 2022 of 2,819,201 m3, it decreased by 25.20%.

The realisation of clean water distribution to industry in 2023 amounted to 623,112 m3 or 80.89% of the 2023 RKAP of 770,362 m3 and when compared to the 2022 realisation of 179,902 m3 up 246.36%.

The realisation of clean water distribution to residents in 2023 was 425,566 m3 or 45.44% of the 2023 RKAP of 936,547 m3 and when compared to the 2022 realisation of 711,069 m3 decreased by 40.15%.

Bulk clean water distribution to PDAMs / Industrial Areas in 2023 amounted to 967,726 m3 or 39.60% of the 2023 RKAP of 2,444,040 m3 and when compared to the realisation s.d. in 2022 of 835,769 m3 up 15.79%.

Matters affecting the achievement of clean water production distribution are as follows:

a) MARUNDA SPAM

- *Because absorption from the Marunda Industrial Estate is not optimal because tenants in the industrial estate are stagnant and new tenants are only for warehousing not production units so that the use of clean water is small;*
- *Marunda Industrial Estate is supplied with clean water by 3 (three) SPAMs, consisting of SPAM Marunda and 2 (two) SPAM units owned by PT*



(MMI) sehingga penyerapan SPAM Marunda masih dibawah target.

b) SPAM BIKI, SPAM CURUG DAN PASOK AIR INDUSTRI KE KAWASAN JISC (PT.MOS)

Suplai air dari SPAM Biki ke Kawasan Industri Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) – PT.MOS yang sudah ditargetkan Tahun 2023 belum bisa direalisasikan karena pekerjaan konstruksi masih berlangsung, sampai dengan saat ini (Pekerjaan SPK I ± 96,91% dan SPK II ± 83,99%) dan juga pekerjaan oleh Pihak lain. Melihat kondisi saat ini diperkirakan konstruksi selesai pada akhir RKT I 2024 (Bulan Maret 2024) sehingga suplai air ke Kawasan tersebut dapat terealisasi pada bulan April 2024.

c) SPAM PAMANUKAN

SPAM Pamanukan telah resmi beroperasi per 20 Juni 2023 karena Addendum antara PJT II dengan PERUMDA TRS telah ditandatangani begitupun sebaliknya Addendum PJT II dengan JTL telah ditandatangani. Produksi dan Pendapatan bulan Desember 2023 masih mengacu kepada jumlah penyerapan minimum (10 Lps) sesuai dengan addendum perjanjian O&M.

d) SPAM KOTA BARU PARAHYANGAN (KBP) :

- Penyaluran air bersih oleh SPAM KBP belum terealisasi karena progres pembangunan SPAM KBP per 31 Desember 2023 untuk investasi PT. Belaputera Intiland (Pengelola KBP) sebesar 77,64% dan progress investasi JTL sebesar 65,30%.
- Perizinan Intake dengan PT. PLN Indonesia Power yang masih berlangsung hingga saat ini, diperkirakan pekerjaan SPAM KBP baru dapat selesai di akhir RKT I 2024 (Bulan Maret 2024) sehingga baru dapat beroperasi di bulan April 2024.

Marunda Mandiri Internasional (MMI) so that the absorption of SPAM Marunda is still below the target.

b) SPAM BIKI, SPAM CURUG AND INDUSTRIAL WATER SUPPLY TO JISC KAWASAN (PT.MOS)

Water supply from SPAM Biki to the Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) Industrial Estate - PT.MOS which has been targeted for 2023 has not been realised because construction work is still ongoing, until now (SPK I work ± 96.91% and SPK II ± 83.99%) and also work by other parties. Looking at the current conditions, it is estimated that construction will be completed by the end of RKT I 2024 (March 2024) so that water supply to the area can be realised in April 2024.

c) SPAM PAMANUKAN

SPAM Pamanukan has officially operated as of 20 June 2023 because the Addendum between PJT II and PERUMDA TRS has been signed and vice versa PJT II Addendum with JTL has been signed. Production and Revenue in December 2023 still refers to the minimum absorption amount (10 Lps) in accordance with the addendum of O&M agreement.

d) SPAM KOTA BARU PARAHYANGAN (KBP):

- *The distribution of clean water by SPAM KBP has not been realised because the progress of SPAM KBP development as of 31 December 2023 for PT Belaputera Intiland (KBP Manager) investment is 77.64% and JTL investment progress is 65.30%.*
- *Intake licensing with PT PLN Indonesia Power which is still ongoing, it is estimated that the KBP SPAM work can only be completed at the end of RKT I 2024 (March 2024) so that it can only operate in April 2024.*



Irigasi
Irrigation

Realisasi produksi 2023 dalam Ha dan Juta m3

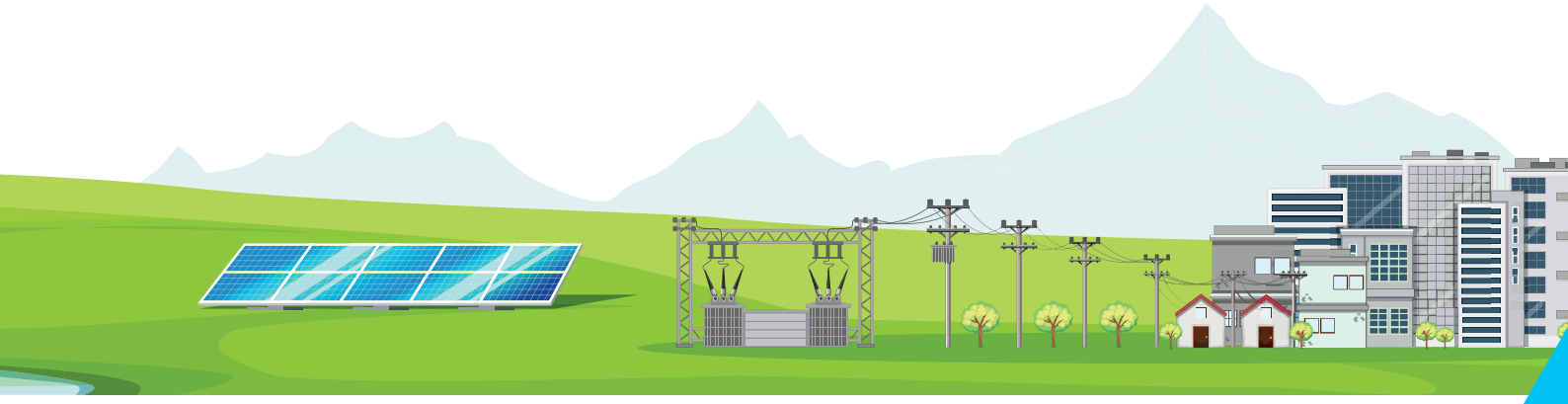
No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Realisasi tanam daerah DI utara dan selatan irigasi Jatiluhur	569.112,00	431.085	566.901,00	131,29%	99,61%
	Total rendeng + gadu					
	Pemberian air MT. I 2022/2023 dan MT II 2023	7.870,70	4.881,51	5.211,13	66,21%	35,55%
	Sumber setempat dan waduk Ir. Juanda					

Pencapaian Luas Realisasi Tanam MT.I 2022-2023 Daerah Irigasi Jatiluhur dan Pencapaian Luas Realisasi Tanam MT.II 2023 Daerah Irigasi Jatiluhur total seluas 566.901 Ha atau 131,29% dari rencana sebesar 431.805 Ha terdiri dari dalam target dan luar target.

Realisasi pemberian air M.T I 2022/2023 dan M.T II 2023 (Sumber setempat + Waduk Ir.H.Djuanda) sebesar 5.211,13 juta m3 atau 106,75% dari rencana pemberian air MT.I 2022/2023 dan M.T II 2023 sebesar 4.881,51 juta m3. Rencana produksi tanam padi MT. Rendeng tahun 2022/2023 DI. Jatiluhur berdasarkan pembagian golongan air dimulai 1 Oktober 2022.

Achievement of the Area of Realisation of Planting MT.I 2022-2023 Jatiluhur Irrigation Area and Achievement of the Area of Realisation of Planting MT.II 2023 Jatiluhur Irrigation Area totalled 566,901 Ha or 131.29% of the plan of 431,805 Ha consisting of within the target and outside the target.

The realisation of water supply for MT.I 2022/2023 and MT.II 2023 (Local source + Ir.H.Djuanda Reservoir) was 5,211.13 million m3 or 106.75% of the planned water supply for MT.I 2022/2023 and MT.II 2023 of 4,881.51 million m3. Rice planting production plan MT. Rendeng year 2022/2023 DI. Jatiluhur based on the division of water groups starting 1 October 2022.



Kepariwisataan
Tourism

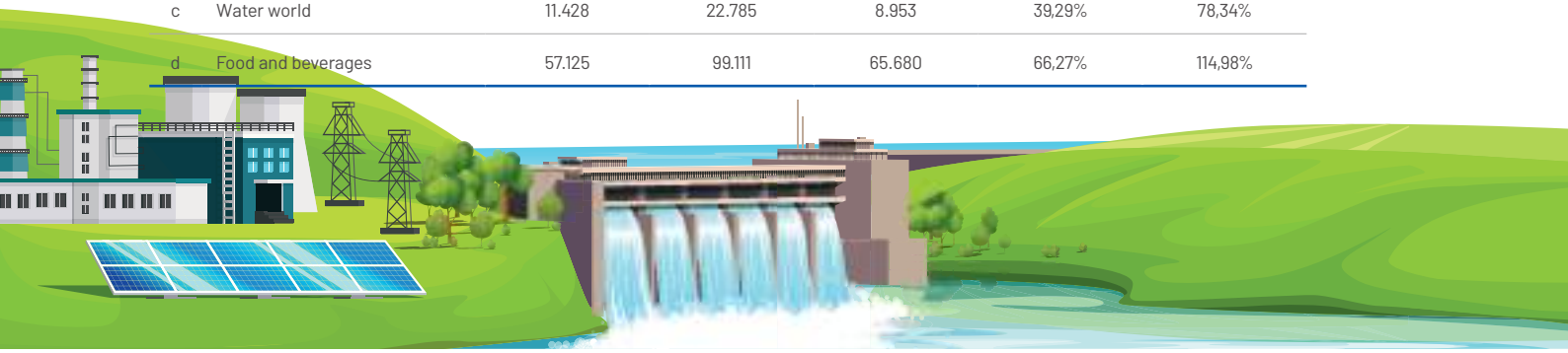
Keberadaan Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur dengan pemandangan alam yang indah dipadukan dengan kemegahan bangunan bendungan merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan menjadi salah satu tujuan Pariwisata di Jawa Barat. Demi memanfaatkan potensi wisata di kawasan ini, Perusahaan telah membangun berbagai fasilitas seperti hotel, resort, bungalow, restoran, playground, lapangan tenis, perkemahan, dan wahana rekreasi air serta sarana olahraga air.

The existence of the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Dam with beautiful natural scenery combined with the splendour of the dam building is a special attraction for tourists and has become one of the Tourism destinations in West Java. In order to utilise the tourism potential in this area, the Company has built various facilities such as hotels, resorts, bungalows, restaurants, playgrounds, tennis courts, campgrounds, and water recreation and water sports facilities.

Fasilitas pariwisata di kawasan Bandungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur telah dilengkapi dengan bangunan hotel bintang tiga dengan nama kawasan Jatiluhur Hotel Resort yang beroperasi sejak 1967. Di kawasan ini, terdapat 33 bungalow dan 30 kamar hotel, juga terdapat 7 (tujuh) ruang pertemuan yang 5 (lima) diantaranya berada di Gedung Graha Vidya (terdiri dari satu ruang utama berkapasitas 800 orang dan empat ruang pertemuan berkapasitas maksimum 60 orang), serta 2 (dua) ruang pertemuan terpisah berada di kawasan Restoran Istora dengan kapasitas masing masing 80 orang. Kawasan pariwisata dilengkapi juga dengan fasilitas kolam renang dan rekreasi air berupa waterboom dengan nama Jatiluhur Water World (JWW), kapal pesiar, ski air boating, dan fasilitas rekreasi lainnya.

Tourism facilities in the Ir. H. Djuanda Jatiluhur Bandungan area have been equipped with a three-star hotel building under the name Jatiluhur Hotel Resort area which has been operating since 1967. In this area, there are 33 bungalows and 30 hotel rooms, as well as 7 (seven) meeting rooms, 5 (five) of which are located in Graha Vidya Building (consisting of one main room with a capacity of 800 people and four meeting rooms with a maximum capacity of 60 people), and 2 (two) separate meeting rooms located in the Istora Restaurant area with a capacity of 80 people each. The tourism area is also equipped with swimming pool and water recreation facilities in the form of a waterboom under the name Jatiluhur Water World (JWW), cruises, water ski boating, and other recreational facilities.

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
a	Hotel dan bungalow					
	Kamar	9.708	13.987	9.172	65,58%	94,48%
	Extra bed	478	-	620	-	129,71%
b	Rekreasi					
	Kapal motor	51	226	107	47,35%	209,80%
	Ticketing	65.762	174.075	61.036	35,06%	92,81%
c	Water world	11.428	22.785	8.953	39,29%	78,34%
d	Food and beverages	57.125	99.111	65.680	66,27%	114,98%





Tinjauan per segemen usaha
Review per business segment

Realisasi Hotel dan Bungalow Tahun 2023 sebanyak 9.172 kamar atau 65,58% dari RKAP Tahun 2023 sebanyak 13.987 unit jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 9.708 unit turun 5,52%.

Realisation of Hotels and Bungalows in 2023 was 9,172 rooms or 65.58% of the 2023 RKAP of 13,987 units when compared to the 2022 realisation of 9,708 units down 5.52%.

Realisasi Kapal Motor tahun 2023 sebanyak 107 trip atau 47,35% dari RKAP Tahun 2023 sebanyak 226 trip dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 51 trip naik 209,80%.

Realisation of Motorboats in 2023 was 107 trips or 47.35% of the 2023 RKAP of 226 trips and when compared to the 2022 realisation of 51 trips up 209.80%.

Realisasi pengunjung Rekreasi *(Ticketing)* Tahun 2023 sebanyak 61.036 orang atau 35,06% dari RKAP Tahun 2023 sebanyak 174.075 orang dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 65.762 orang turun 7,19%.

The realisation of Recreation visitors (Ticketing) in 2023 was 61,036 people or 35.06% of the 2023 RKAP of 174,075 people and when compared to the realisation in 2022 of 65,762 people down 7.19%.

Realisasi pengunjung *Water World* tahun 2023 sebanyak 8.953 orang atau 39,29% dari RKAP Tahun 2023 sebanyak 22.785 orang dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 11.428 orang turun 21,66%.

The realisation of Water World visitors in 2023 was 8,953 people or 39.29% of the 2023 RKAP of 22,785 people and when compared to the realisation in 2022 of 11,428 people decreased by 21.66%.

Realisasi Food & Beverages tahun 2023 sebanyak 65.680 porsi atau 66,27% dari RKAP Tahun 2023 sebanyak 99.111 porsi dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 57.125 porsi naik 14,98%.

Realisation of Food & Beverages in 2023 was 65,680 servings or 66.27% of the 2023 RKAP of 99,111 servings and when compared to the realisation in 2022 of 57,125 servings up 14.98%.

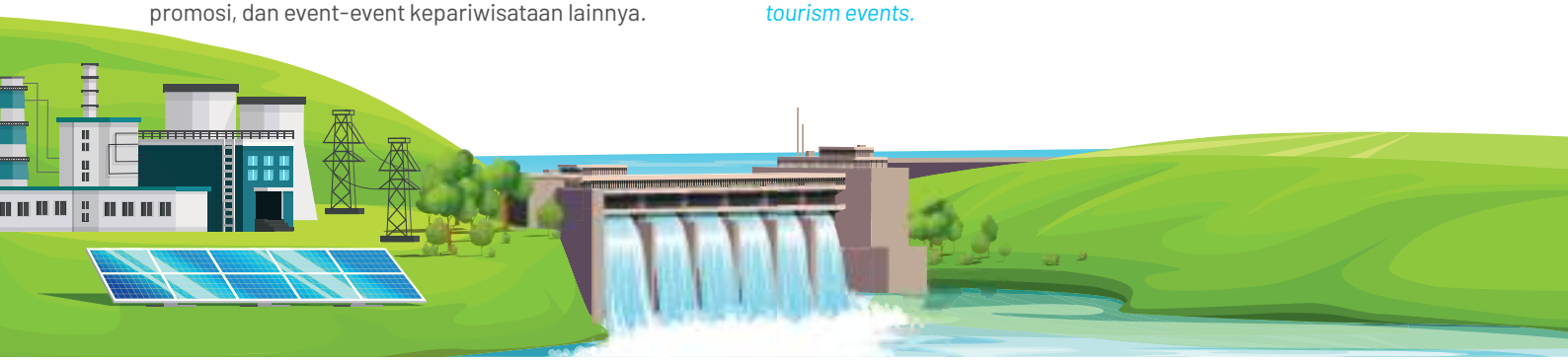
Penurunan Produksi Pariwisata & Hotel:
Tourism & Hotel Production Decline:

- Review kerjasama pengelolaan hotel dengan HIG belum dapat diimplementasikan karena addendum perjanjian kerjasama belum disepakati.
- *Review of hotel management cooperation with HIG cannot be implemented because the addendum to the cooperation agreement has not been agreed.*
- Bertambahnya jumlah competitor dengan wahana yang lebih menarik pengunjung.
- *Increasing number of competitors with rides that attract more visitors.*

Pendapatan Segmen Pariwisata
Tourism Segment Revenue

Pada tahun 2023 Segmen Pariwisata mencatatkan Pendapatan sebesar Rp11.780 juta, meningkat Rp764 juta atau 6,94% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp11.015 juta. Peningkatan pendapatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana, promosi, dan event-event kepariwisataan lainnya.

In 2023 the Tourism Segment recorded revenue of Rp11,780 million, an increase of Rp764 million or 6.94% when compared to 2022 of Rp11,015 million. This increase in revenue was mainly due to improved services, facilities and infrastructure, promotions, and other tourism events.



Profitabilitas Segmen Pariwisata
Tourism Segment Profitability

Uraian / *Description*	2022	2023	Nominal pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Pariwisata / *Tourism Revenue*	11.015	11.780	765	6,9%
Beban Pariwisata / *Tourism Expenses*	(26.488)	(25.027)	(1.461)	(5,51%)
Rugi Operasi / *Operating Loss*	(15.473)	(13.247)	2.226	14,38%
Profitabilitas / *Profitability*	(140,47%)	(112,46%)	-	28,07%

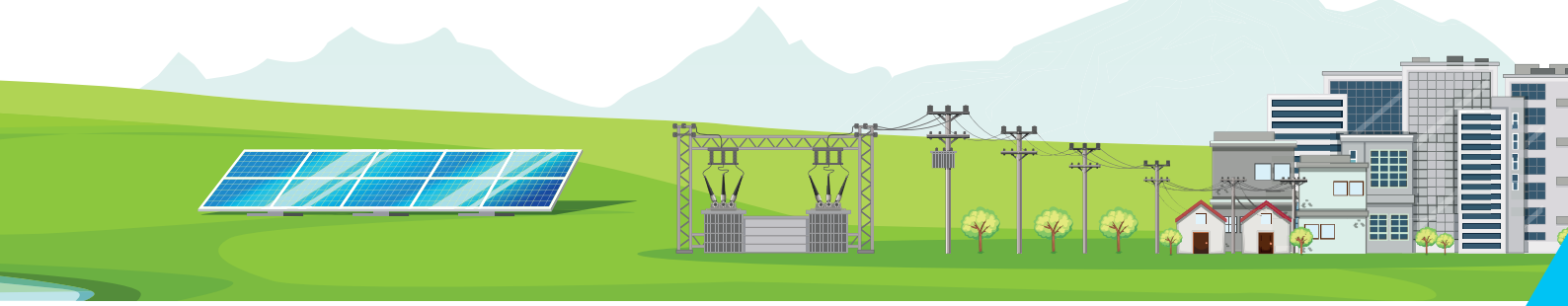
Pendapatan dari segmen Pariwisata tahun 2023 berjumlah Rp11.780 juta dengan beban operasi sebesar Rp25.027 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp13.247 juta dan profitabilitas sebesar minus 112,46%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan pariwisata tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp765 juta atau 6,9%, beban pariwisata turun Rp1.461 juta atau 5,51%, dan rugi operasi turun Rp2.226 juta atau 14,38%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,07% dari sebelumnya minus 140,47% pada tahun 2022 menjadi minus 112,4% pada tahun 2023.

Revenue from the Tourism segment in 2023 totalled Rp11,780 million with operating expenses of Rp25,027 million resulting in an operating loss of Rp13,247 million and profitability of minus 112.46%. When compared to 2022, tourism revenue in 2023 increased by Rp765 million or 6.9%, tourism expenses decreased by Rp1,461 million or 5.51%, and operating loss decreased by Rp2,226 million or 14.38%. This caused profitability in 2023 to increase by 29.07% from minus 140.47% in 2022 to minus 112.4% in 2023.

Lahan
Land

Sebagai upaya optimalisasi dan pengamanan aset Perusahaan, Perum Jasa Tirta II melakukan pemanfaatan lahan berupa pertanian darat maupun pertanian sawah, dan non pertanian seperti perikanan kolam, lahan komersil, jalan, halaman pabrik, lahan parkir, hingga jalur pipa & kabel, jalur hijau, jembatan, serta lahan untuk tower komunikasi dan listrik seluas 7.788,37 m^3. Kegiatan usaha ini dijalankan melalui sistem sewa dan kerja sama usaha dengan berbagai instansi baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten/Kota, instansi swasta, serta masyarakat perorangan yang melakukan sewa lahan untuk pertanian. Pemanfaatan lahan ini dikelola oleh unit wilayah I, II, III, dan IV.

As an effort to optimise and safeguard the Company's assets, Perum Jasa Tirta II utilises land in the form of land agriculture and paddy fields, and non-agriculture such as fishery ponds, commercial land, roads, factory yards, parking lots, to pipelines & cables, green lanes, bridges, and land for communication and electricity towers covering an area of 7,788.37 m^3. This business activity is carried out through a lease system and business cooperation with various agencies including State-Owned Enterprises (SOEs) such as PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Regency / City Regional Drinking Water Companies (PDAMs), private agencies, and individual communities who lease land for agriculture. This land utilisation is managed by regional units I, II, III and IV.



Produktivitas Segmen Pemanfaatan Lahan
Land Use Segment Productivity

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Lahan petani	3.396.125	2.561.344	2.940.743	114,81%	86,59%
	Lahan non petani	2.855.941	2.636.075	2.763.712	104,84%	96,77%

Realisasi atas pemanfaatan lahan untuk disewakan Tahun 2023 seluas 5.704.455 ha atau 109,76% dari RKAP Tahun 2023 seluas 5.197.419 ha dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 seluas 6.252.066 ha turun 8,76%.

Realisation of land utilisation for lease in 2023 was 5,704,455 ha or 109.76% of the 2023 RKAP of 5,197,419 ha and when compared to the 2022 realisation of 6,252,066 ha decreased by 8.76%.

Produksi Lahan mencapai 109,76 % dikarenakan:
Land Production reached 109.76% due to:

- Penambahan perluasan Volume Lahan akibat adanya pelanggan baru mulai bulan April 2023 (PT Astakona, PT Papanmas Agung, PT Pamindo dan penambahan usaha perorangan);
- Penambahan luasan dari kontrak dengan PT Pertamina EP 7 besar yaitu : 403.904,28 m2.
- Pengurangan luasan sewa lahan Non Petani akibat adanya alih fungsi lahan menjadi jalan TOL dan Fasum.

- *Additional expansion of Land Volume due to new customers starting April 2023 (PT Astakona, PT Papanmas Agung, PT Pamindo and additional individual businesses);*
- *Additional area from the contract with PT Pertamina EP 7 large, namely : 403.904,28 m2.*
- *Reduction of Non Farmer land lease area due to land conversion into TOL and Fasum roads.*

Profitabilitas Segmen Pemanfaatan Lahan
Profitability of Land Utilisation Segment

Uraian / *Description*	2022	2023	Nominal pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Lahan / *Land Income*	67.511	57.826	(9.685)	(14,34%)
Beban Lahan / *Land Load*	(10.943)	(11.353)	410	3,74%
Laba/(Rugi) Operasi / *Profit/(Loss) Operation*	56.568	46.473	(9.275)	(10,60%)
Profitabilitas / *Profitability*	83,79%	80,36%	-	(3,43%)



Pendapatan dari segmen Pemanfaatan Lahan tahun 2023 berjumlah Rp57.826 juta dengan beban operasi sebesar Rp11.353 juta sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp46.473 juta dan profitabilitas sebesar 80,36%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan pemanfaatan lahan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp9.685 juta atau 14,34%, beban pemanfaatan lahan meningkat Rp410 juta atau 3,74%, dan laba operasi turun Rp9.276 juta atau 10,60%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 3,43% dari sebelumnya 83,79% pada tahun 2022 menjadi 80,36% pada tahun 2023.

Revenue from the Land Utilisation segment in 2023 amounted to Rp57,826 million with operating expenses of Rp11,353 million resulting in an operating profit of Rp46,473 million and profitability of 80.36%. When compared to 2022, land utilisation revenue in 2023 increased by Rp9,685 million or 14.34%, land utilisation expenses increased by Rp410 million or 3.74%, and operating profit decreased by Rp9,276 million or 10.60%. This caused profitability in 2023 to decrease by 3.43% from 83.79% in 2022 to 80.36% in 2023.

Laboratorium
Laboratory

Laboratorium Perum Jasa Tirta II merupakan salah satu laboratorium rujukan di Jawa Barat yang sudah terakreditasi ISOIEC 17025: 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional sejak tahun 2003, dengan Nomor Akreditasi: LP-174-IDN serta telah teregister Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016, dengan Nomor Registrasi 00108 / LPJAABLING-1/ LRK/KLHK.

Perum Jasa Tirta II Laboratory is one of the reference laboratories in West Java that has been accredited ISOIEC 17025: 2017 by the National Accreditation Committee since 2003, with Accreditation Number: LP-174-IDN and has been registered Environmentally at the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) in 2016, with Registration Number 00108 / LPJAABLING-1 / LRK / KLHK.

Jumlah parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Akreditasi ISONEC 17025:2017 adalah sebanyak 114 parameter terakreditasi meliputi parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi dari 9 (Sembilan) komoditi produk, yaitu: Air Limbah, Air Sungai/Danau, Air untuk keperluan Higiene Sanitasi, Air Minum, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan Kerja, Kebisingan Lingkungan dan Sampling. Sedangkan parameter yang masuk ke dalam Ruang Lingkup Registrasi Labling KLHK adalah sebanyak 68 parameter dari 6 (enam) komoditi produk, yaitu: Air Limbah, Air Sungai/Danau, Udara Ambien, Emisi Sumber Tidak Bergerak, Kebisingan Lingkungan dan Sampling.

The number of parameters included in the Scope of ISONEC 17025:2017 Accreditation is 114 accredited parameters covering physical, chemical, and microbiological parameters from 9 (Nine) product commodities, namely: Wastewater, River/Lake Water, Water for Sanitary Hygiene purposes, Drinking Water, Ambient Air, Non-Moving Source Emissions, Work Environment Noise, Environmental Noise and Sampling. While the parameters included in the Scope of KLHK Labling Registration are 68 parameters from 6 (six) product commodities, namely: Wastewater, River/ Lake Water, Ambient Air, Stationary Source Emissions, Environmental Noise and Sampling.

Peningkatan kualitas jasa pelayanan yang diberikan laboratorium kepada para pengguna jasa didukung oleh tenaga analis yang kompeten (dilengkapi dengan sertifikasi dan pelatihan terkait), alat instrumen yang lengkap serta penggunaan bahan kimia dan pemilihan metode pengujian yang sesuai dengan standar internasional/regional dan nasional. Pengguna jasa laboratorium meliputi pengguna internal dan eksternal Seperti industri/kegiatan usaha, kawasan industri, rumah sakit/klinik kesehatan, hotel/apartemen/mall, instansi dan perorangan yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, dan sekitarnya.

Improving the quality of services provided by the laboratory to service users is supported by competent analysts (equipped with relevant certifications and training), complete instrumentation as well as the use of chemicals and the selection of testing methods in accordance with international/regional and national standards. Laboratory service users include internal and external users such as industries/business activities, industrial estates, hospitals/health clinics, hotels/ apartments/malls, agencies and individuals spread across Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta, and surrounding areas.

Produktivitas Segmen Laboratorium
Laboratory Segment Productivity

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Laboratorium	9.181	8.861	9.325	105,24%	101,57%

Realisasi jasa analisa laboratorium Tahun 2023 sebanyak 9.325 sampel atau 105,24% dari RKAP 2023 sebanyak 8.861 sampel dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 9.181 sampel naik 1,57%.

Pencapaian produksi laboratorium 105,24% karena kenaikan uji sampel laboratorium dari kawasan industri Deltamas dari rata-rata 60 sampel per bulan menjadi 80 sampel per bulan.

The realisation of laboratory analysis services in 2023 was 9,325 samples or 105.24% of the 2023 RKAP of 8,861 samples and when compared to the 2022 realisation of 9,181 samples increased by 1.57%.

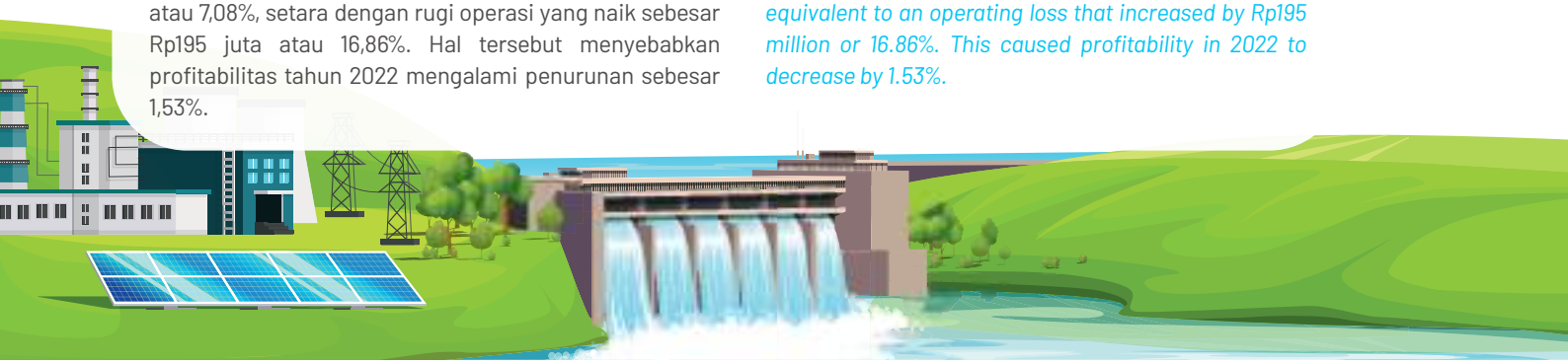
Achievement of 105.24% laboratory production due to an increase in laboratory sample tests from the Deltamas industrial area from an average of 60 samples per month to 80 samples per month.

Profitabilitas Segmen Laboratorium
Laboratory Segment Profitability

Uraian / *Description*	2022	2023	Nominal pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Laboratorium / *Laboratory Income*	7.934	8.453	519	6.94%
Beban Laboratorium / *Laboratory Load*	(9.155)	(9.804)	649	7,09%
Laba/(Rugi) Operasi / *Profit/(Loss) Operation*	(1.221)	(1.351)	195	10,67%
Profitabilitas / *Profitability*	(14,45%)	(15,98%)	-	(1,53%)

Pendapatan dari segmen Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2023 berjumlah Rp8.453 juta dengan beban operasi sebesar Rp9.804 juta. Hal ini masih menunjukkan kerugian operasi sebesar Rp9.804 juta dengan profitabilitas minus 15,98%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan Jasa Laboratorium Kualitas Air tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp454 juta atau 5,67%, beban Jasa Laboratorium Kualitas Air meningkat sebesar Rp649 juta atau 7,08%, setara dengan rugi operasi yang naik sebesar Rp195 juta atau 16,86%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,53%.

Revenues from the Water Quality Laboratory Services segment in 2023 totalled Rp8,453 million with operating expenses of Rp9,804 million. This still shows an operating loss of Rp9,804 million with a profitability of minus 15.98%. When compared to 2022, Water Quality Laboratory Services revenue in 2023 increased by Rp454 million or 5.67%, Water Quality Laboratory Services expenses increased by Rp649 million or 7.08%, equivalent to an operating loss that increased by Rp195 million or 16.86%. This caused profitability in 2022 to decrease by 1.53%.



AMDK
Bottled Drinking Water

Seiring peningkatan kebutuhan akan air minum, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk menyediakan air minum bagi masyarakat yang berada di daerah pelayanan Perusahaan. Komitmen ini diwujudkan dalam penyediaan air baku untuk air minum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek "Jatiluhur Air Demineral".

Lokasi pengolahan AMDK dibangun pada Oktober 2009, kemudian pindah ke Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Juni 2012. Lokasi pengolahan AMDK diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada 29 Mei 2013.

AMDK Jatiluhur termasuk air minum Demineral dengan pH antara 5 – 7,5 dan TDS di bawah 10 mg/liter. AMDK Jatiluhur diproses dengan sistem Reverse Osmosis (RO), disterilisasi dengan Ozon (O3) dan ultraviolet serta diproses lagi dengan Bio Magnetic serta Far Infrared untuk mengubah ke molekul Hexagonal. Air Hexagonal adalah air dengan rangkaian molekul Hexagonal 6 (H2O) yang identik dengan molekul cairan dalam sel tubuh manusia sehingga lebih mudah diserap sel-sel tubuh dan nutrisi serta oksigen akan lebih mudah terangkut. Target pasar Air Demineral Jatiluhur antara lain karyawan Perusahaan dan keluarganya, masyarakat yang berada di wilayah kerja Perusahaan, serta mitra/stakeholders Perusahaan.

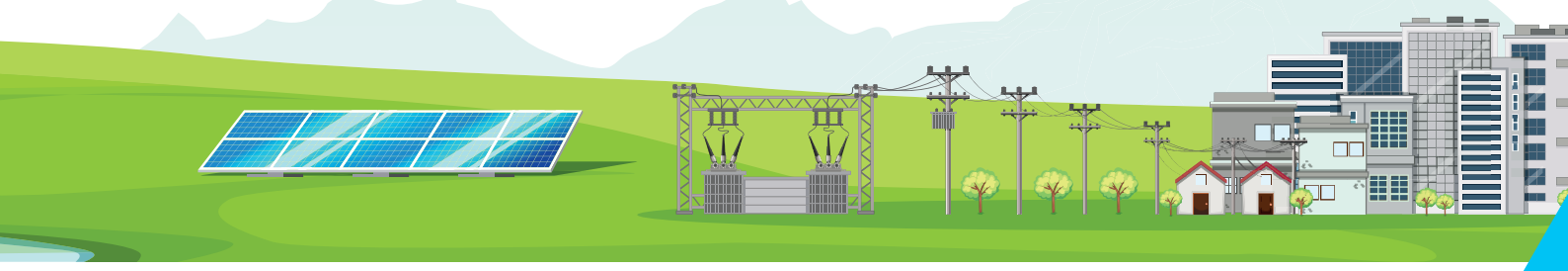
Along with the increasing demand for drinking water, Perum Jasa Tirta II is committed to providing drinking water to the people in the Company's service area. This commitment is realised in the provision of raw water for drinking water and Bottled Drinking Water (AMDK) under the brand "Jatiluhur Air Demineral".

The AMDK processing site was built in October 2009, then moved to Jatimekar Village, Jatiluhur District, Purwakarta Regency, West Java in June 2012. The AMDK processing site was inaugurated by the Governor of West Java, Ahmad Heryawan on 29 May 2013.

Jatiluhur AMDK includes Demineral drinking water with a pH between 5 - 7.5 and TDS below 10 mg/litre. Jatiluhur bottled water is processed with a Reverse Osmosis (RO) system, sterilised with Ozone (O3) and ultraviolet and processed again with Bio Magnetic and Far Infrared to convert to Hexagonal molecules. Hexagonal water is water with a series of Hexagonal 6 molecules (H2O) which is identical to the fluid molecules in human body cells so that it is more easily absorbed by body cells and nutrients and oxygen will be more easily transported. The target market of Jatiluhur Demineralised Water includes the Company's employees and their families, the community in the Company's working area, and the Company's partners/stakeholders.

Produksi AMDK Tahun 2023
AMDK Production in 2023

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
	Galon 19L	147.484	162.000	149.198	92,10%	101,16%
	Botol 1500ml	0	1.200	0	0	0
	Botol 600ml	8.977	24.000	6.967	29,03%	77,61%
	Botol 330ml	45.661	57.600	50.847	88,28%	111,36%
	Cup 240ml	21.772	21.600	19.761	91,49%	90,76%







Tinjauan per segemen usaha
Review per business segment

Realisasi produksi galon 19 liter Tahun 2023 sebanyak 149.198 galon atau 92,10% dari RKAP 2023 sebanyak 162.000 galon dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 147.484 galon naik 1,16%.

The realisation of 19 litre gallon production in 2023 was 149,198 gallons or 92.10% of the 2023 RKAP of 162,000 gallons and when compared to the realisation in 2022 of 147,484 gallons up 1.16%.

Realisasi produksi botol 600 ml Tahun 2023 sebanyak 6.967 karton atau 29,03% dari RKAP tahun 2023 sebanyak 24.000 karton dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 8.977 karton turun 22,39%.

Realised production of 600 ml bottles in 2023 was 6,967 cartons or 29.03% of the 2023 Work Plan of 24,000 cartons and when compared to the 2022 realisation of 8,977 cartons down 22.39%.

Realisasi produksi botol 330 ml Tahun 2023 sebanyak 50.847 karton atau 88,28% dari RKAP tahun 2023 sebanyak 57.6000 karton dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 45.661 dus naik 11,36%.

Realised production of 330 ml bottles in 2023 was 50,847 cartons or 88.28% of the 2023 Work Plan of 57,6000 cartons and when compared to the 2022 realisation of 45,661 boxes up 11.36%.

Realisasi produksi gelas 240 ml pada Tahun 2023 sebanyak 19.761 karton atau 91,49% dari RKAP 2023 sebanyak 21.600 dus dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 21.772 dus turun 9,24%.

The realisation of 240 ml glass production in 2023 was 19,761 cartons or 91.49% of the 2023 RKAP of 21,600 boxes and when compared to the 2022 realisation of 21,772 boxes decreased by 9.24%.

Produksi AMDK belum tercapai disebabkan karena belum efektifnya strategi pemasaran dimana rata-rata efektivitas penjualan hanya mencapai 50% dari kapasitas atau kemampuan produksi sehingga realisasinya saat ini jumlah produksi bergantung kepada demand yang ada.

AMDK production has not been achieved due to the ineffectiveness of the marketing strategy where the average sales effectiveness only reaches 50% of the capacity or production capability so that the current realisation of the amount of production depends on the existing demand.

Profitabilitas Segmen Laboratorium
Laboratory Segment Profitability

Uraian / *Description*	2022	2023	Nominal pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / *Bottled Drinking Water (AMDK) Revenue*	2.732	2.789	57	2,08%
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / *Bottled Drinking Water (AMDK) Expenses*	(4.688)	(5.725)	1.037	22,12%
Rugi Operasi / *Operating Loss*	(1.956)	(2.936)	980	50,10%
Profitabilitas / *Profitability*	(71,60%)	(105,27%)	-	33,67



Pendapatan dari segmen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2023 berjumlah Rp2.789 juta dengan beban operasi sebesar Rp5.725 juta sehingga menghasilkan rugi operasi sebesar Rp2.936 juta dan profitabilitas sebesar minus 105,27%. Bila dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp57 juta atau 2,08%, beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) naik Rp1.037 juta atau 17,61%, dan rugi operasi naik Rp980 juta atau 50,10%. Hal tersebut menyebabkan profitabilitas tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 33,67% dari sebelumnya minus 71,60% pada tahun 2022 menjadi minus 10,27% pada tahun 2023.

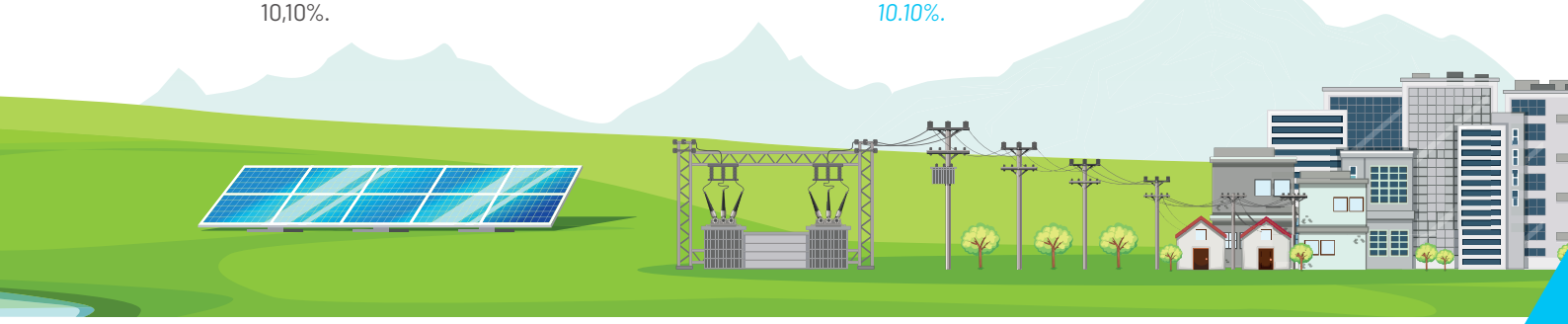
Revenues from the Packaged Drinking Water (AMDK) segment in 2023 totalled Rp2,789 million with operating expenses of Rp5,725 million resulting in an operating loss of Rp2,936 million and profitability of minus 105.27%. When compared to 2022, bottled drinking water (AMDK) revenue in 2023 increased by Rp57 million or 2.08%, bottled drinking water expenses increased by Rp1,037 million or 17.61%, and operating loss increased by Rp980 million or 50.10%. This caused profitability in 2023 to decrease by 33.67% from minus 71.60% in 2022 to minus 10.27% in 2023.

Pendapatan usaha
Operating revenues

No	Uraian / *Description*	Realisasi 2022	RKAP 2023	Realisasi 2023	Prosen	
		SD. DES (AUDITED)	SD.DES	SD.DES (AUDITED)	(5:4)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7
♦	**Pendapatan SDA**	**870.180.878.007**	**806.958.959.009**	**964.785.650.967**	**119,56%**	**101,39%**
1	Listrik	493.119.023.962	499.430.657.539	500.051.834.612	100,12%	85,19%
2	Air baku	360.007.894.097	290.720.039.636	456.051.811.449	156,87%	117,01%
3	Air bersih	9.053.959.948	16.808.261.835	8.682.004.906	51,65%	48,94%
♦	**Pendapatan non SDA**	**110.866.273.868**	**122.738.810.684**	**115.385.459.453**	**94,01%**	**94,86%**
1	Pariwisata	11.015.802.013	21.970.121.083	11.780.666.032	53,62%	64,55%
2	Sewa lahan	67.510.752.785	62.588.251.001	57.826.111.768	92,39%	100,87%
3	Laboratorium	7.998.874.351	7.202.988.600	8.453.587.100	117,36%	128,58%
4	AMDK	2.732.059.290	5.506.800.000	3.533.426.853	64,16%	99,99%
5	Pendapatan usaha lainnya	21.608.785.429	25.470.650.000	33.791.667.700	132,67%	91,19%
Total pendapatan SDA dan non SDA		**981.047.151.875**	**929.697.769.693**	**1.080.171.110.420**	**116,19%**	**100,75%**

Realisasi Pendapatan Usaha Tahun 2023 sebesar Rp1.080.171,11 juta atau 116,19% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp929.697,77 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 981.047,15 juta naik 10,10%.

Realisation of Operating Income in 2023 amounted to Rp1,080,171.11 million or 116.19% of the 2023 RKAP of Rp929,697.77 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp 981,047.15 million increased by 10.10%.



Hal tersebut disebabkan:

a. Pendapatan Sumber Daya Air

1) Realisasi pendapatan listrik tahun 2023 sebesar Rp500.051,83 juta atau 100,12% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp499.430,65 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 493.119,02 juta naik 1,41%. Pendapatan Listrik sebesar 100,12% melampaui target walaupun kenaikan tarif Listrik PLN sebesar Rp356/kWh belum dapat direalisasikan, tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp346/kWh, selisih pendapatan yang belum direalisasikan s.d Desember 2023 sebesar Rp5,5 M.

2) Realisasi pendapatan air baku Tahun 2023 sebesar Rp456.051,81 juta atau 156,87% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp290.720,04 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 368.007,89 juta naik 23,92%.

   Hal ini disebabkan :
   a) Kenaikan pendapatan air baku karena penyesuaian tarif BJPSDA PAM Jaya (semula Rp272,50 menjadi Rp294,00), Industri (semula Rp224,71 menjadi Rp244,93), PDAM Kabupaten/ Kota (semula Rp130,81 menjadi Rp141,27);
   b) Peningkatan Produksi dari penambahan pengakuan Pendapatan Saguling dan Cirata yang berlaku surut sejak tahun 2022 berdasarkan :
      i) Perjanjian JPSDA PLTA Saguling Nomor : SP-1/DIR/04/2023 dengan PT Indonesia Power tanggal 12 April 2023.
      ii) Perjanjian JPSDA PLTA Cirata Nomor : SP-2/ DIR/04/2023 dengan PT PLN Nusantara Power tanggal 14 April 2023.

3) Realisasi pendapatan air bersih tahun 2023 sebesar Rp8.682,00 juta atau 51,65% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp16.808,26 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 9.053,96 juta turun 4,11%.

   Hal ini disebabkan :
   1. Produksi SPAM MARUNDA hanya mencapai 85,48% yang disebabkan :

This is due to:

a. Water Resources Revenue

1) The realisation of electricity revenue in 2023 amounted to Rp500,051.83 million or 100.12% of the 2023 RKAP of Rp499,430.65 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp493,119.02 million increased by 1.41%. Electricity Revenue of 100.12% exceeded the target even though the increase in PLN Electricity tariff of Rp356/kWh could not be realised, the current tariff is Rp346/ kWh, the difference in unrealised revenue until December 2023 is Rp5.5 M.

2) The realisation of raw water revenue in 2023 amounted to Rp456,051.81 million or 156.87% of the 2023 RKAP of Rp290,720.04 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp368,007.89 million increased by 23.92%.

   This is due to:
   a) Increase in raw water revenue due to tariff adjustment of BJPSDA PAM Jaya (originally Rp272.50 to Rp294.00), Industry (originally Rp224.71 to Rp244.93), Regency/City PDAM (originally Rp130.81 to Rp141.27);
   b) Increased Production from the additional recognition of Saguling and Cirata Revenues retroactive to 2022 based on:
      i) Saguling Hydroelectric Power Plant JPSDA Agreement Number: SP-1/DIR/04/2023 with PT Indonesia Power dated 12 April 2023.
      ii) JPSDA Agreement of Cirata Hydroelectric Power Plant Number: SP-2/DIR/04/2023 with PT PLN Nusantara Power dated 14 April 2023.

3) Realisation of clean water revenue in 2023 amounted to Rp8,682.00 million or 51.65% of the 2023 RKAP of Rp16,808.26 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp9,053.96 million decreased by 4.11%.

   This is due to:
   1. MARUNDA SPAM production only reached 85.48% due to:



a. Penyerapan dari Kawasan Industri Marunda tidak optimal karena tenant di Kawasan industri stagnan dan tenant yang baru hanya untuk pergudangan bukan unit produksi sehingga pemakaian air bersihnya kecil;
b. Kawasan Industri Marunda di suplay air bersih oleh 3 (tiga) SPAM, terdiri dari SPAM Marunda dan 2 (dua) unit SPAM milik PT. Marunda Mandiri Internasional (MMI) sehingga penyerapan SPAM Marunda masih dibawah target.

2. SPAM BIKI, SPAM CURUG DAN PASOK AIR INDUSTRI KE KAWASAN JISC (PT.MOS) hanya mencapai 80,88%, Penduduk hanya mencapai 45,44%, hal ini disebabkan tidak teralisasinya penyerapan air bersih oleh PT MOS.

3. SPAM KOTA BARU PARAHYANGAN (KBP) tidak terealisasi karena progres pembangunan SPAM KBP per 31 Desember 2023 untuk investasi PT. Belaputera Intiland (Pengelola KBP) sebesar 77,64% dan progress investasi JTL sebesar 65,30% dan Perizinan Intake dengan PT. PLN Indonesia Power yang masih berlangsung hingga saat ini, diperkirakan pekerjaan SPAM KBP baru dapat selesai di akhir RKT I 2024 (Bulan Maret 2024) sehingga baru dapat beroperasi di bulan April 2024.

b. Pendapatan Non Sumber Daya Air

1) Realisasi pendapatan pariwisata tahun 2023 sebesar Rp11.780,67 juta atau 53,62% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp21.970,12 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 11.015,80 juta naik 6,94%. Realisasi Pendapatan Pengelolaan Hotel melalui Kerjasama dengan HIG hanya mencapai 65% dan realisasi pendapatan rekreasi hanya mencapai 47%.

2) Realisasi pendapatan sewa lahan tahun 2023 sebesar Rp57.826,11 juta atau 92,39% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp62.588,25 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 67.510,75 juta turun 14,35%.

Pendapatan sewaan hanya mencapai 92,39% hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi lahan menjadi

a. Absorption from the Marunda Industrial Estate is not optimal because tenants in the industrial estate are stagnant and new tenants are only for warehousing not production units so that the use of clean water is small;
b. Marunda Industrial Estate is supplied with clean water by 3 (three) SPAMs, consisting of SPAM Marunda and 2 (two) SPAM units owned by PT Marunda Mandiri Internasional (MMI) so that the absorption of SPAM Marunda is still below the target.

2. SPAM BIKI, SPAM CURUG AND INDUSTRIAL WATER SUPPLY TO JISCASAN (PT.MOS) only reached 80.88%, residents only reached 45.44%, this is due to the unrealised absorption of clean water by PT MOS.

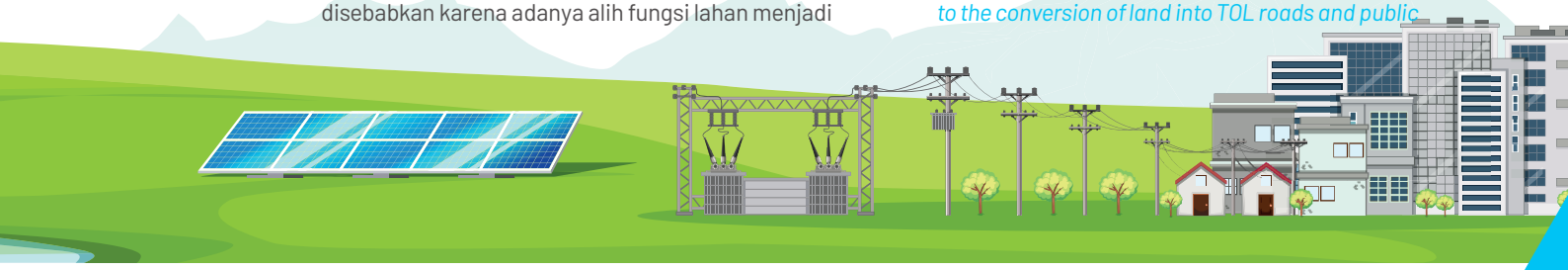
3. SPAM KOTA BARU PARAHYANGAN (KBP) was not realised due to the progress of KBP SPAM development as of 31 December 2023 for PT Belaputera Intiland (KBP Manager) investment of 77.64% and JTL investment progress of 65.30% and Intake Licensing with PT PLN Indonesia Power which is still ongoing, it is estimated that the KBP SPAM work can only be completed at the end of RKT I 2024 (March 2024) so that it can only operate in April 2024.

b. Non Water Resources Revenue

1) The realisation of tourism revenue in 2023 amounted to Rp11,780.67 million or 53.62% of the 2023 RKAP of Rp21,970.12 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp 11,015.80 million increased by 6.94%. The realisation of Hotel Management Revenue through Cooperation with HIG only reached 65% and the realisation of recreation revenue only reached 47%.

2) Realisation of land rental income in 2023 amounted to Rp57,826.11 million or 92.39% of the 2023 RKAP of Rp62,588.25 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp67,510.75 million decreased by 14.35%.

Rental income only reached 92.39% this was due to the conversion of land into TOL roads and public



jalan TOL dan fasilitas umum/jalan umum (Bekasai) di daerah yang tarif sewa lahannya mahal, sedangkan di daerah lain terdapat kenaikan produksi dengan tarif sewa yang lebih murah sehingga walaupun ada kenaikan produksi tetapi pendapatan tidak tercapai karena perbedaan tersebut.

3) Realisasi pendapatan laboratorium tahun 2023 sebesar Rp8.453,59 juta atau 117,36% dari RKAP 2023 sebesar Rp7.202,99 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 7.934,39 juta naik 6,54%.

   Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi sampel sehingga mencapai 105,24% akibat adanya kenaikan tambahan uji sampel laboratorium dari Kawasan Industri Deltamas dari rata-rata 60 sampel per bulan menjadi 80 sample per bulan dan adanya tambahan sampel udara.

4) Realisasi pendapatan air minum kemasan (AMDK) tahun 2023 sebesar Rp3.533,43 juta atau 64,16% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp5.506,80 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 2.796,54 juta naik 26,35%.

   Hal ini disebabkan karena belum efektifnya strategi pemasaran dimana rata-rata efektivitas penjualan hanya mencapai 50% dari kapasitas atau kemampuan produksi sehingga realisasinya saat ini jumlah produksi bergantung kepada demand yang ada.

5) Realisasi pendapatan usaha lainnya tahun 2023 sebesar Rp33.791,67 juta atau 132,67% dari RKAP tahun 2023 sebesar Rp25.470,65 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 21.608,79 juta naik 56,38%.

   Hal ini disebabkan : Pendapatan usaha lainnya mencapai 132,67% disebabkan karena kenaikan pendapatan konstruksi dari PT KIM dan PT KIMA yang tidak dianggarkan di tahun 2023.

facilities / public roads (Bekasai) in areas where land rental rates were expensive, while in other areas there was an increase in production with cheaper rental rates so that even though there was an increase in production but revenue was not achieved due to this difference.

3) The realisation of laboratory revenue in 2023 amounted to Rp8,453.59 million or 117.36% of the 2023 RKAP of Rp7,202.99 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp7,934.39 million increased by 6.54%.

This was due to an increase in sample production to reach 105.24% due to an increase in additional laboratory sample tests from the Deltamas Industrial Estate from an average of 60 samples per month to 80 samples per month and additional air samples.

4) Realisation of bottled drinking water (AMDK) revenue in 2023 amounted to Rp3,533.43 million or 64.16% of the 2023 RKAP of Rp5,506.80 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp 2,796.54 million increased by 26.35%.

This is due to the ineffectiveness of the marketing strategy where the average sales effectiveness only reaches 50% of the capacity or production capability so that the current realisation of the amount of production depends on the existing demand.

5) Realisation of other business income in 2023 amounted to Rp33,791.67 million or 132.67% of the 2023 RKAP of Rp25,470.65 million and when compared to the realisation in 2022 of Rp 21,608.79 million increased by 56.38%.

This is due to : Other operating income reached 132.67% due to an increase in construction revenue from PT KIM and PT KIMA which was not budgeted for in 2023.

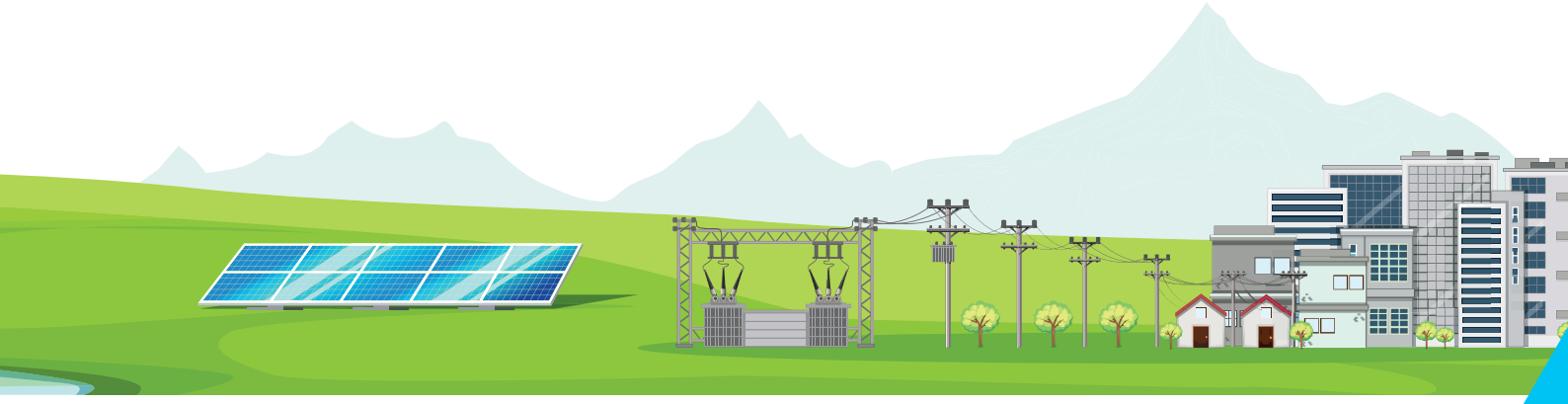


Profitabilitas
Profitability

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal.

Profitability is the company's ability to generate profits using the resources within the company itself. The ultimate goal that a company wants to achieve most importantly is to obtain maximum profit or profit.

No	Jenis rasio	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Perubahan / *Change*
1	Return on Equity (ROE)	12,28%	10,19%	(2,08)%
2	Return on Investment (ROI)	15,23%	13,12%	(2,11)%
3	Cash ratio	245,40%	291,98%	46,58%
4	Current ratio	405,87%	427,53%	21,66%
5	Collection periods	127 hari	26 hari	101 hari
6	Perputaran persediaan	1 hari	0 hari	1 hari
7	Total asset turnover (TATO)	54,43%	55,64%	1,21%
8	Rasio total modal sendiri terhadap total aset	72,26%	73,14%	0,88%







Tinjauan Keuangan
Financial Overview

Uraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

This description of financial performance is prepared based on the Company's Consolidated Financial Statements audited by Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & partners with a fair opinion in all material respects, the consolidated financial position of Perum Jasa Tirta II and its subsidiaries as at 31 December 2023 and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan posisi keuangan
Statement of financial position

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
ASET / Assets	2.064.265	1.913.416	1.689.754	150.849	7.88%
Jumlah Aset Lancar / Total Current Assets	1.072.091	939.122	747.880	132.969	14.16%
Jumlah Aset Tidak Lancar / Total Non-Current Assets	992.174	974.294	941.874	17.880	1.84%
Jumlah Aset / Total Assets	2.064.265	1.913.416	1.689.754	150.849	7.88%
LIABILITAS / Liabilities	**554.424**	**530.691**	**408.548**	**23.733**	**4.47%**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Total Short-Term Liabilities	258.252	236.200	177.173	22.052	9.34%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Total Long-Term Liabilities	296.172	294.491	231.375	1.681	0.57%
Jumlah Liabilitas / Total Liabilities	554.424	530.691	408.548	23.733	4.47%
EKUITAS / Equity	**1.509.841**	**1.382.725**	**1.281.206**	**127.116**	**9.19%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / *Total Liabilities and Equity*	**2.064.265**	**1.913.416**	**1.689.754**	**150.849**	**7.88%**

Pada tahun 2023, Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp2.064.265 juta, meningkat Rp150.849 juta atau 7,88% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.913.416 juta. Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp554.424 juta, meningkat Rp23.733 juta atau 4,47% dari sebelumnya sebesar Rp530.691 juta pada tahun 2022. Ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp1.509.841 juta, meningkat Rp127.115 juta atau 9.19% bila dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.382.726 juta

In 2023, the Company's assets were recorded at Rp2,064,265 million, an increase of Rp150,849 million or 7.88% when compared to 2022 of Rp1,913,416 million. The Company's liabilities were recorded at Rp554,424 million, an increase of Rp23,733 million or 4.47% from Rp530,691 million in 2022. The Company's equity was recorded at Rp1,509,841 million, an increase of Rp127,115 million or 9.19% when compared to the realisation in 2022 of Rp1,382,726 million.



Aset
Assets

Pada tahun 2023, jumlah Aset Perusahaan tercatat sebesar Rp2.064.265 juta yang terdiri dari 52,04% Aset Lancar dan 47,96% Aset Tidak Lancar. Nilai Jumlah Aset ini meningkat Rp150.849 juta atau 7,88% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.913.416 juta. Peningkatan ini disumbangkan oleh kontribusi merata dari aset lancar maupun aset tidak lancar.

In 2023, the Company's Total Assets was recorded at Rp2,064,265 million consisting of 52.04% Current Assets and 47.96% Non-Current Assets. The value of Total Assets increased by Rp150,849 million or 7.88% compared to the year 2022 of Rp1,913,416 million. This increase was contributed by an even contribution from both current and non-current assets.

Aset Lancar
Current Assets

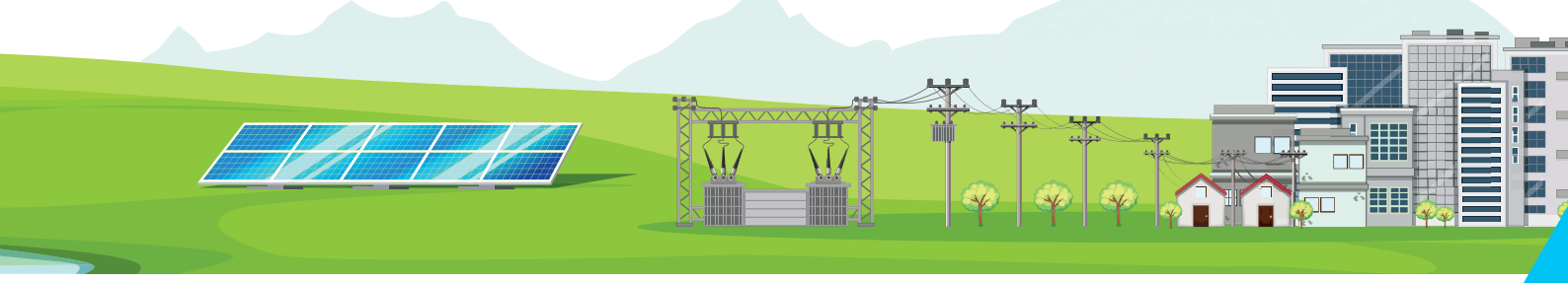
Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Kas dan Setara Kas / *Cash and Cash Equivalents*	732.176	567.815	452.330	164.461	28.95%
Piutang Usaha / *Trade Receivables*	321.633	343.689	284.399	(22.056)	(6.42%)
Aset Keuangan Lancar Lainnya / *Other Current*	1.556	1.928	1.903	(372)	(19.29%)
Persediaan / *Inventories*	14.799	24.989	8.467	(10.190)	(40.78%)
Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka / *Prepaid Fees and Down Payment*	1.927	701	781	1.226	174.89%
Jumlah Aset Lancar / *Total Current Assets*	**1.072.091**	**939.122**	**747.880**	**132.969**	**14.16%**

Pada tahun 2023, Aset Lancar Perusahaan sebesar Rp 1.072.091 juta, meningkat 14.16% atau setara dengan Rp 132.969 juta bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp939.122 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pos jumlah kas dan setara kas sebesar 28.95% atau setara dengan Rp164.461 juta dan biaya dibayar dimuka sebesar 174.89% atau setara dengan Rp1.226 juta.

In 2023, the Company's Current Assets amounted to Rp 1,072,091 million, an increase of 14.16% or equivalent to Rp 132,969 million when compared to 2022 of Rp 939,122 million. The increase was mainly due to the increase in cash and cash equivalents by 28.95% or equivalent to Rp164,461 million and prepaid expenses by 174.89% or equivalent to Rp1,226 million.

Kas dan setara kas / *Cash and cash equivalents*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Kas dan Bank / *Cash and Bank*	182.176	107.815	42.331	74.361	68.97%
Deposito Berjangka / *Time Deposit*	550.000	460.000	410.000	90.000	19.57%
Jumlah / *Total*	**732.176**	**567.815**	**452.331**	**164.361**	**28.95%**



Kas dan Setara Kas pada tahun 2023 sebesar Rp732.176 juta, meningkat Rp164.361 juta atau 28,95% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp567.815 juta. Meningkatnya kas dan setara kas disebabkan oleh kenaikan pos Kas dan Bank sebesar Rp74.361 juta atau 68,37%, kenaikan pos deposito berjangka sebesar Rp90.000 juta atau 19,57%. Adapun deposito yang digunakan merupakan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehan.

Cash and cash equivalents in 2023 amounted to Rp732,176 million, an increase of Rp164,361 million or 28.95% when compared to 2022 of Rp567,815 million. The increase in cash and cash equivalents was due to an increase in the Cash and Bank post of Rp74,361 million or 68.37%, an increase in the time deposit post of Rp90,000 million or 19.57%. The time deposits used are time deposits with maturities of three months or less from the date of acquisition.

Piutang usaha / *Trade receivables*

Pada tahun 2023, Piutang Usaha sebesar Rp321.633 juta, turun Rp22.506 juta atau (6,42%) bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp343.689 juta. Disebabkan oleh penurunan piutang usaha yang belum difakturkan.

In 2023, Accounts Receivable amounted to Rp321,633 million, a decrease of Rp22,506 million or (6.42%) when compared to 2022 of Rp343,689 million. Caused by a decrease in undisbursed trade receivables.

Aset keuangan lancar lainnya / *Other current financial assets*

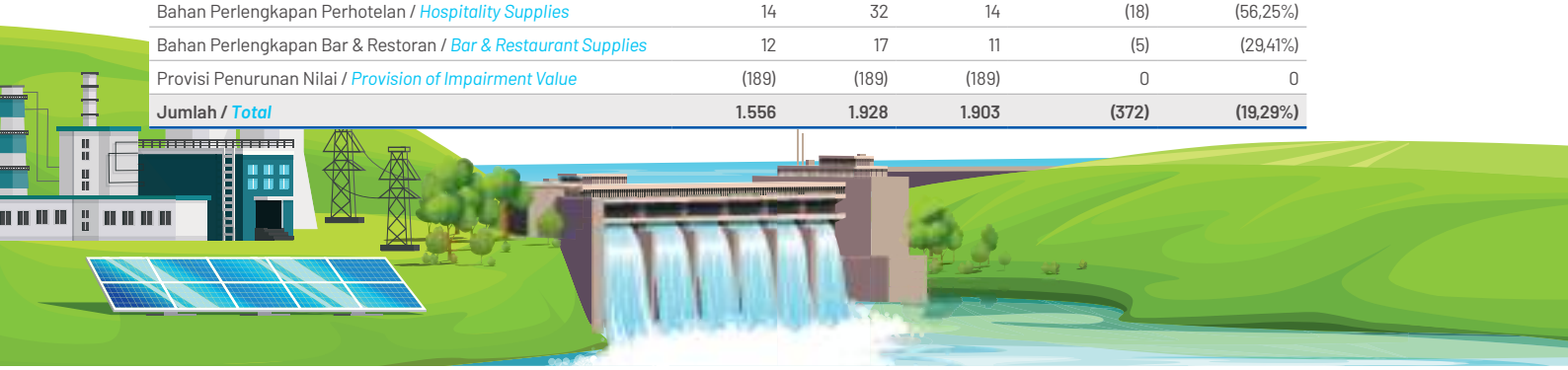
Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Entitas induk / *Holding*	877	701	430	176	25,10%
Entitas anak / *Subsidiary*	1.050	-	350	1.050	∞
Jumlah / *Total*	**1.927**	**701**	**780**	**1.226**	**174,89%**

Aset Keuangan Lancar Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp1.927 juta, naik Rp1.226 juta atau 174,89% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp701 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh aset keuangan lain dari entitas anak.

Other Current Financial Assets in 2023 amounted to Rp1,927 million, an increase of Rp1,226 million or 174.89% when compared to 2022 of Rp701 million. This increase was due to other financial assets from subsidiaries.

Persediaan / *Supplies*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Suku Cadang / *Spareparts*	747	747	747	0	0
Bahan Baku – AMDK / *Raw Material – AMDK*	397	610	449	(213)	(34,91%)
Bahan Kimia / *Chemicals*	313	307	268	6	1,95%
Bahan & Perlengkapan Lain / *Material & Other Supplies*	148	154	215	(6)	(3,8%)
Bahan Farmasi / *Pharmaceuticals*	55	161	230	(106)	65,83%
Barang Jadi – AMDK / *Finished Goods – AMDK*	-	32	120	(32)	(100%)
Bahan Makanan & Minuman / *Food & Beverage*	59	57	37	2	3,5%
Bahan Perlengkapan Perhotelan / *Hospitality Supplies*	14	32	14	(18)	(56,25%)
Bahan Perlengkapan Bar & Restoran / *Bar & Restaurant Supplies*	12	17	11	(5)	(29,41%)
Provisi Penurunan Nilai / *Provision of Impairment Value*	(189)	(189)	(189)	0	0
Jumlah / *Total*	**1.556**	**1.928**	**1.903**	**(372)**	**(19,29%)**



Pada tahun 2023, Persediaan tercatat sebesar Rp1.556 juta, menurun Rp372 juta atau 19,29% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.928 juta. Penurunan tersebut berasal pada bahan baku dan jadi AMDK, bahan dan perlengkapan lain, dan bahan perlengkapan perhotelan dan bar dan restoran, sisanya mengalami peningkatan. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perusahaan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

In 2023, Inventories were recorded at Rp1,556 million, a decrease of Rp372 million or 19.29% when compared to 2022 of Rp1,928 million. The decrease came from raw and finished bottled water, other materials and supplies, and hotel and bar and restaurant supplies, the rest experienced an increase. Management believes that the Company's inventory is located in several locations, so the possibility of losses arising at the same time for several locations is very small.

Biaya dibayar dimuka dan uang muka / *Prepaid expenses and advances*

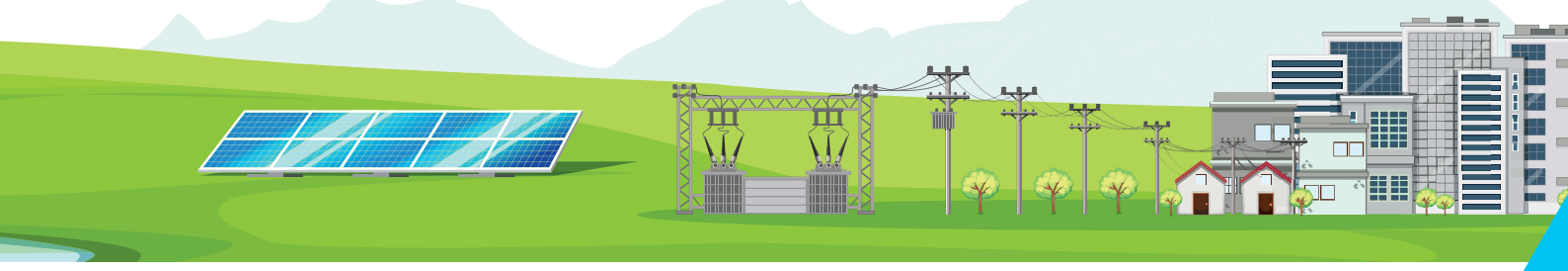
Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Biaya Dibayar Dimuka / *Prepaid Expenses*	7.237	6.650	5.593	587	8.83%
Uang Muka / *Advances*	5.505	505	1.874	5.000	990.75%
Pajak Dibayar Dimuka / *Prepaid Tax*	2.057	17.834	-	(15.778)	-
Jumlah / *Total*	**14.799**	**24.989**	**7.467**	**(10.191)**	**(40.78%)**

Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka tahun 2023 tercatat sebesar Rp14.799 juta, turun Rp10.191 juta atau (40,87%) bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp24.989 juta.

Prepaid Expenses and Advances in 2023 were recorded at Rp14,799 million, a decrease of Rp10,191 million or (40.87%) compared to Rp24,989 million in 2022.

Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Penyertaan pada Perusahaan Asosiasi / *Participation in Associated Companies*	-	-	-	-	-
Aset Tetap / *Fixed Asses*	852.984	804.197	752.743	48.787	6.07%
Aset Tak Berwujud/ *Intangible Asses*	7.503	9.017	-	(1.514)	(16.79%)
Aset Hak Guna / *Right(Of(Use Assets*	8.462	15.057	12.544	(6.595)	(43.80%)
Aset Pajak Tangguhan / *Deferred Tax Assets*	101.460	97.494	74.712	3.966	4.07%
Aset Tidak Lancar Lainnya / *Other Non(Current Assets*	21.765	48.529	101.875	(26.764)	55.15%
Jumlah Aset Tidak Lancar / *Total Non(Current Assets*	**992.174**	**974.294**	**941.874**	**17.880**	**1.84%**



Pada tahun 2023, Aset Tidak Lancar tercatat sebesar Rp992.174 juta, meningkat Rp17.880 juta atau 1,84% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp974.294 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap dan pajak tangguhan.

Aset Hak Guna

Aset hak guna merupakan dampak penerapan PSAK 73 yang berasal dari kegiatan sewa pembiayaan anak dan cucu perusahaan. Hal tersebut secara lebih rinci diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan kami.

Aset Tetap

Pada tahun 2023, Aset Tetap tercatat sebesar Rp852.984 juta, meningkat Rp48.787 juta atau 6,06% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp804.197 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan sarana, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, serta peralatan. Manajemen memiliki liabilitas dan aset kontinjensi berupa tanah milik Perum Jasa Tirta II yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas yang hingga saat ini telah diselesaikan, sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan

Aset Pajak Tangguhan

Pada tahun 2023, Aset Pajak Tangguhan sebesar Rp101.460 juta, meningkat Rp3.966 juta atau 4,06% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp97.494 juta.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Pada tahun 2023, Aset Tidak Lancar Lainnya sebesar Rp21.765 juta, menurun Rp26.764 juta atau (55,15%) bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp48.529 juta.

In 2023, Non-Current Assets was recorded at Rp992,174 million, an increase of Rp17,880 million or 1.84% compared to 2022 of Rp974,294 million. The increase mainly came from an increase in fixed assets and deferred taxes.

Right of Use Assets

Right-of-use assets are the impact of the adoption of PSAK 73 from finance lease activities of subsidiaries and grandchildren. This is disclosed in more detail in the notes to our financial statements.

Fixed Assets

In 2023, Fixed Assets were recorded at Rp852,984 million, an increase of Rp48,787 million or 6.06% compared to Rp804,197 million in 2022. The increase was due to the addition of facilities, spare parts, installation & network, conveyance & heavy equipment, and equipment. Management has contingent liabilities and assets in the form of land owned by Perum Jasa Tirta II located in Ciganea with replacement land located in Kampung Bongas which until now has been settled, so that the replacement land located in Kampung Bongas is recorded as an asset of the Company.

Deferred Tax Assets

In 2023, Deferred Tax Assets amounted to Rp101,460 million, an increase of Rp3,966 million or 4.06% when compared to 2022 of Rp97,494 million.

Other Non-Current Assets

In 2023, Other Non-Current Assets amounted to Rp21,765 million, a decrease of Rp26,764 million or (55.15%) when compared to 2022 of Rp48,529 million.



Liabilitas
Liabilities

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / *Total Short-Term Liabilities*	258.252	236.200	177.173	22.052	9.34%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / *Total Long-Term Liabilities*	296.172	294.491	231.375	1.681	0.57%
Jumlah Liabilitas / *Total Liabilities*	**554.424**	**530.691**	**408.548**	**23.733**	**4.47%**

Pada tahun 2023, jumlah Liabilitas Perusahaan tercatat sebesar Rp554.424 juta yang terdiri dari 46,58% Liabilitas Jangka Pendek dan 53,40% Liabilitas Jangka Panjang.

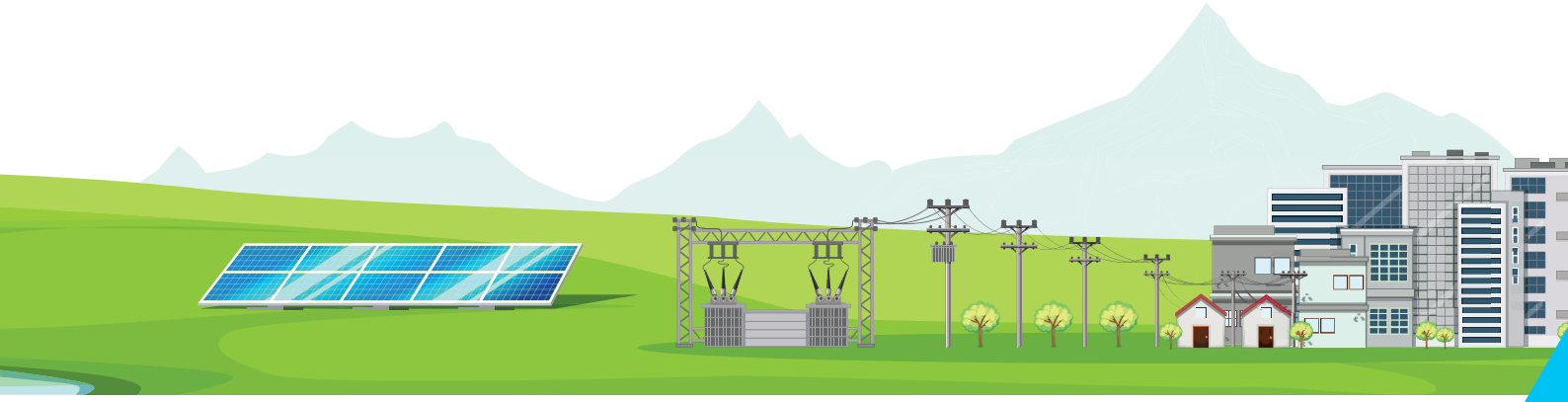
In 2023, the Company's total liabilities were recorded at Rp554,424 million, consisting of 46.58% short-term liabilities and 53.40% long-term liabilities.

Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Utang Usaha / *Trade Payables*	34.112	14.653	12.297	19.459	132.80%
Beban Akrual / *Accrued Expenses*	86.627	71.777	37.638	14.850	20.69%
Utang Pajak / *Tax Payables*	58.250	58.886	26.306	(636)	(1.08%)
Liabilitas Kontrak Jangka Pendek / *Short-Term Contract Liabilities*	1.383	6.160	6.023	(4.777)	(77.55%)
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya / *Other Short-Term Financial Liabilities*	77.880	84.724	94.909	(6.844)	(8.08%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / *Total Short-Term Liabilities*	**258.252**	**236.200**	**177.173**	**22.052**	**9.34%**

Pada tahun 2023, Liabilitas Jangka Pendek Perusahaan sebesar Rp258.252 juta, meningkat 9,34% atau setara dengan Rp22.052 juta bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp236.200 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos utang usaha sebesar 132,80% atau setara dengan Rp19.459 juta dan beban akrual sebesar 20,69% atau setara dengan Rp14.850 juta.

In 2023, the Company's Short-Term Liabilities amounted to Rp258,252 million, an increase of 9.34% or equivalent to Rp22,052 million when compared to 2022 of Rp236,200 million. The increase was mainly due to an increase in trade payables by 132.80% or equivalent to Rp19,459 million and accrued expenses by 20.69% or equivalent to Rp14,850 million.



Utang Usaha / *Trade Payables*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pihak Ketiga / *Third Parties*	20.449	5.112	6.227	15.337	299.99%
Pihak Berelasi / *Related Parties*	12.280	8.361	6.069	3.919	46.88%
Utang Retensi / *Retention Payable*	1.382	1.180	-	202	17.12%
Jumlah / *Total*	**34.111**	**14.653**	**12.297**	**19.458**	**132.79%**

Pada tahun 2023, Utang Usaha sebesar Rp34.111 juta, meningkat Rp19.458 juta atau 132,79% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp14.653 juta. Kenaikan tersebut terutama berasal dari kenaikan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar 129,99% atau setara dengan Rp15.337 juta dan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp3.919 juta atau 146,88%. Kenaikan juga berasal dari utang retensi sebesar Rp1.382 atau 17,12%.

In 2023, Accounts Payable amounted to Rp34,111 million, an increase of Rp19,458 million or 132.79% when compared to 2022 of Rp14,653 million. The increase mainly came from an increase in trade payables to third parties by 129.99% or equivalent to Rp15,337 million and payables to related parties by Rp3,919 million or 146.88%. The increase also came from retention payables of Rp1,382 or 17.12%.

Beban Akrual / *Accrued Expenses*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Beban Pegawai / *Employee Expenses*	67.014	61.254	22.505	5.760	9,40%
Beban Non Pegawai / *Non Employee Expenses*	19.613	10.523	15.133	9.090	86,38%
Jumlah / *Total*	**86.626**	**71.777**	**37.638**	**14.849**	**20,68%**

Pada tahun 2023, Beban Akrual sebesar Rp86.626 juta, berkurang Rp14.849 juta atau 20,68% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp71.777 juta. Peningkatan tersebut terutama berasal dari bertambahnya beban non pegawai yang masih harus dibayarkan per 31 Desember 2023.

In 2023, Accrued Expenses amounted to Rp86,626 million, a decrease of Rp14,849 million or 20.68% when compared to 2022 of Rp71,777 million.The increase mainly came from the increase in accrued non-employee expenses as of 31 December 2023.

Utang Pajak / *Tax Payables*

Pada tahun 2023, Utang Pajak sebesar Rp58.250 juta, berkurang Rp636 juta atau 1,08% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp58.886 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan Titipan PPN.

In 2023, Tax Payable amounted to Rp58,250 million, a decrease of Rp636 million or 1.08% when compared to 2022 of Rp58,886 million.This increase mainly came from an increase in VAT Deposits.



Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / *Other Current Financial Liabilities*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Utang Lain-lain / *Other Payables*	36.152	44.702	57.859	(8.550)	(19,12%)
Pendapatan Diterima Dimuka / *Prepaid Income*	22.829	25.213	26.794	(1384)	(5,48%)
Jumlah / *Total*	**58.981**	**69.915**	**84.653**	**(10.934)**	**(15,63%)**

Pada tahun 2023, Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp77.880 juta, menurun Rp6.844 juta atau 8,08% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp84.724 juta. Penurunan ini disebabkan utang lain-lain dan pendapatan diterima dimuka.

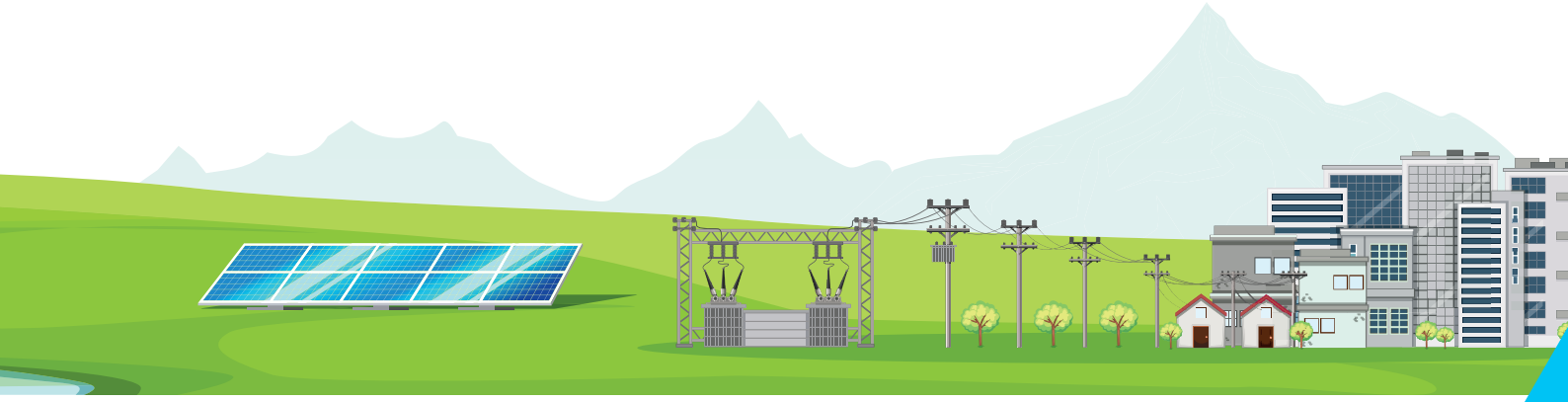
In 2023, Other Short-Term Financial Liabilities amounted to Rp77,880 million, a decrease of Rp6,844 million or 8.08% when compared to 2022 of Rp84,724 million. This decrease was due to other payables and unearned income.

Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Utang Sewa Jangka Panjang / *Long term lease debt*	7.362	8.922	6.697	(1.560)	(17.47%)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja / *Post Employment Benefits*	279.080	274.739	212.748	4.341	1.58%
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya / *Other Non Current Liabilities*	9.730	10.830	11.930	(1.100)	(10.15%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / *Total Long Term Liabilities*	**296.172**	**294.491**	**231.375**	**1.681**	**0.57%**

Pada tahun 2023, Liabilitas Jangka Panjang Perusahaan sebesar Rp296.172 juta, meningkat 1,68% atau setara dengan Rp1.681 juta bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp294.491 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas pasca kerja lainnya 2023.

In 2023, the Company's Long-Term Liabilities amounted to Rp296,172 million, an increase of 1.68% or equivalent to Rp1,681 million when compared to 2022 of Rp294,491 million. The increase was mainly due to an increase in other post-employment liabilities in 2023.







Ekuitas
Equity

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Modal Pemerintah / *Government Capital*	164.548	164.548	164.548	0	0
Cadangan Umum / *General Reserves*	13.943	13.943	13.943	0	0
Cadangan Bertujuan / *Appropriated Reserves*	1.027.001	1.027.001	1.027.001	0	0
Komponen Ekuitas Lainnya / *Other Equity Components*	(190.253)	(179.351)	(135.622)	(10.902)	6.08%
Saldo Laba / *Retained Earnings*	349.068	203.264	95.818	145.804	71.73%
Laba Tahun Berjalan / *Current Year Profi*	138.793	145.803	107.446	(7.010)	(4.81%)
Kepentingan Non Pengendali / *Non Controling*	6.741	7.517	8.072	(776)	(10.32%)
Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	**1.509.841**	**1.382.725**	**1.281.206**	**127.116**	**9.19%**

Pada tahun 2023, jumlah Ekuitas sebesar Rp1.509.841 juta, meningkat Rp127.115 juta atau 9,19% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.382.726 juta. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan Saldo Laba sebesar 71,73% atau setara dengan Rp95.818 juta.

In 2023, total Equity was Rp1,509,841 million, an increase of Rp127,115 million or 9.19% when compared to 2022 of Rp1,382,726 million. The increase came from an increase in Retained Earnings of 71.73% or equivalent to Rp95,818 million.

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Consolidated Table of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Usaha / *Revenues*	1.080.171	981.047	856.518	99.124	10,10%
Beban Pokok / *Cost of Goods Sale*	(713.501)	(600.271)	(544.687)	(113.230)	(18,86%)
Laba Kotor / *Gross Profit*	366.670	380.776	311.831	(14.106)	(3,70%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / *Profit Before Income Tax*	173.653	191.855	144.582	(18.202)	(9,48%)
Beban Pajak / *Tax Expenses*	(35.635)	(46.607)	(37.135)	(10.972)	(23,54%)
Laba Bersih Tahun Berjalan / *Net Profit for the Year*	138.017	145.248	107.446	(7.231)	(4,97%)
Penghasilan Komprehensif Lain / *Other Comprehensive Income*	(10.902)	(43.729)	43.175	(32.827)	(75,06%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / *Total Comprehensive Income for the Year*	**127.115**	**101.519**	**64.272**	**25.596**	**20,13%**



Pada tahun 2023, Pendapatan Usaha sebesar Rp1.080.171 juta, meningkat Rp99.124 juta atau 10,10% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp981.047 juta.

In 2023, Operating Revenues amounted to Rp1,080,171 million, an increase of Rp99,124 million or 10.10% when compared to 2022 of Rp981,047 million.

Beban Pokok di tahun 2023 meningkat Rp113.230 juta atau 18,86% dari sebelumnya Rp600.271 juta pada tahun 2022 menjadi Rp713.501 juta pada tahun 2023.

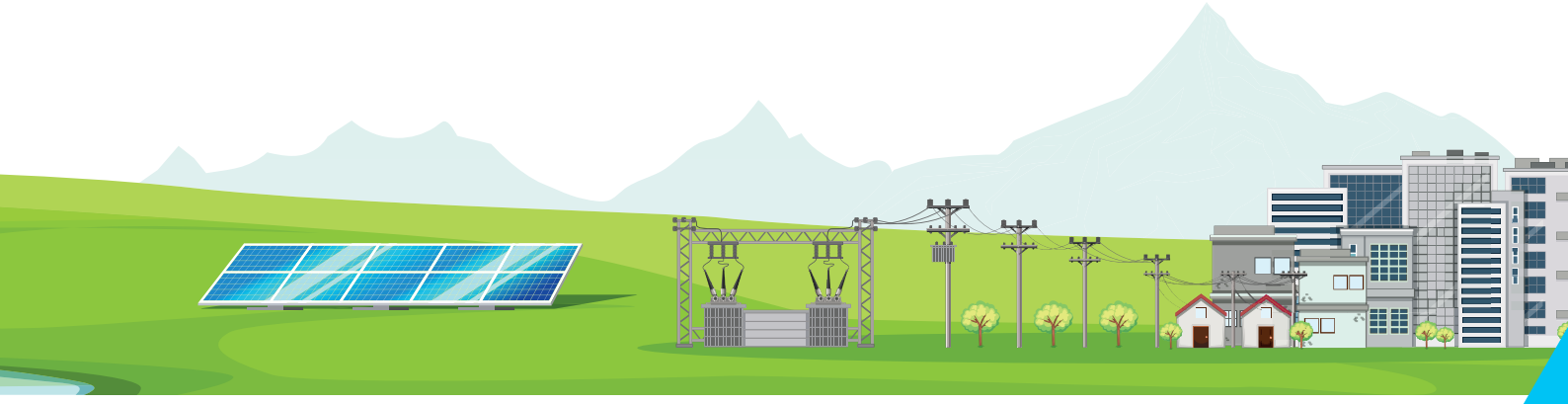
Cost of Goods and Services in 2023 increased by Rp113,230 million or 18.86% from Rp600,271 million in 2022 to Rp713,501 million in 2023.

Sementara itu, Laba Bersih Tahun Berjalan di tahun 2023 sebesar Rp138.017 juta, turun Rp7.231 juta atau 4,97% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp145.248 juta. Laba Komprehensif Tahun Berjalan tercatat sebesar Rp127.115 juta, meningkat 20,13% atau setara dengan Rp25.596 juta bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp101.519 juta.

Meanwhile, Net Profit for the Year in 2023 was Rp138,017 million, a decrease of Rp7,231 million or 4.97% compared to Rp145,248 million in 2022. Comprehensive Income for the Year was recorded at Rp127,115 million, an increase of 20.13% or equivalent to Rp25,596 million when compared to 2022 of Rp101,519 million.

Pendapatan Usaha / *Revenues*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Pendapatan Listrik / *Electricity Revenues*	500.051	493.119	454.556	6.932	1,40%
Pendapatan Air Baku / *Raw Water Revenues*	456.052	368.008	292.436	88.044	23,92%
Pendapatan Air Bersih / *Clean Water Revenues*	8.682	9.054	8.918	(372)	(4,10%)
Pemanfaatan Lahan / *Land Utilization*	57.826	67.511	60.802	(9.685)	(14,34%)
Pariwisata / *Tourism*	11.781	11.016	10.655	765	6,94%
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / *Bottled Drinking Water (AMDK)*	3.533	2.732	2.928	801	29,31%
Pendapatan Sewa / *Rent revenues*	699	38	128	661	1739,47%
Pendapatan Konstruksi / *Construction Revenues*	32.732	21.193	17.475	11.539	54,44%
Laboratorium / *Laboratory*	8.454	7.999	6.984	455	5,68%
Usaha Lainnya / *Other Businesses*	360	378	1.635	(18)	(4,76%)
Jumlah / *Total*	**1.080.171**	**981.047**	**856.518**	**99.124**	**10,10%**



Beban Usaha / *Operating Expenses*

Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Beban Listrik / *Electricity Expenses*	102.807	112.300	94.475	(9.493)	(8,45%)
Beban Air Baku / *Raw Water Expenses*	513.928	404.471	383.371	109.457	27,06%
Beban Air Bersih / *Clean Water Expenses*	13.104	10.936	9.800	2.168	19,82%
Beban Pemanfaatan Lahan / *Land Utilization Expenses*	11.353	10.944	8.447	409	3,73%
Beban Pariwisata / *Tourism Expenses*	25.027	26.489	18.687	(1.462)	(5,51%)
Beban Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / *Bottled Drinking Water Expenses*	5.275	4.688	5.690	587	12,52%
Beban Laboratorium / *Laboratory Expenses*	9.805	9.155	7.268	650	7,09%
Beban Konstruksi / *Construction expenses*	31.627	20.381	15.963	11.246	55,17%
Beban Usaha Lainnya / *Other Operating Expenses*	574	906	987	(332)	(36,64%)
Jumlah / *Total*	**713.501**	**600.271**	**544.687**	**113.230**	**18,86%**

Pada tahun 2023, Beban Usaha Perusahaan sebesar Rp713.501 juta, meningkat Rp113.230 juta atau setara dengan 18,86% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp600.271 juta. Peningkatan ini terbesar berasal dari kenaikan Air Baku, Air Bersih dan Konstruksi.

In 2023, the Company's Operating Expenses amounted to Rp713,501 million, an increase of Rp113,230 million or equivalent to 18.86% when compared to 2022 of Rp600,271 million. The largest increase came from the increase in Raw Water, Clean Water and Construction.

Laba Kotor

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatatkan Laba Kotor sebesar Rp366.670 juta, turun Rp14.106 juta atau 3,70% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp380.776 juta. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya Pendapatan Usaha sebesar Rp99.124 juta atau 10,10% di tahun 2023.

Gross Profit

In 2023, the Company recorded Gross Profit of Rp366,670 million, a decrease of Rp14,106 million or 3.70% compared to Rp380,776 million in 2022. This increase was in line with the increase in Operating Income of Rp99,124 million or 10.10% in 2023.

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Pada tahun 2023, Perusahaan mencatatkan Laba Sebelum Pajak Penghasilan sebesar Rp173.653 juta, turun Rp18.202 juta atau 9,48% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp191.855 juta.

Profit Before Income Tax

In 2023, the Company recorded Profit Before Income Tax of Rp173,653 million, a decrease of Rp18,202 million or 9.48% compared to 2022 of Rp191,855 million.

Beban Pajak

Pada tahun 2023, Beban Pajak sebesar Rp35.635 juta, turun Rp10.972 juta atau 23,54% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp46.607 juta.

Tax Expense

In 2023, Tax Expense amounted to Rp35,635 million, a decrease of Rp10,972 million or 23.54% when compared to 2022 of Rp46,607 million.



Laba Bersih Tahun Berjalan
Pada tahun 2023, Laba Bersih Tahun Berjalan sebesar Rp138.017 juta, turun Rp7.231 juta atau 4,97% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp145.248 juta.

Net Profit for the Year
In 2023, Net Profit for the Year amounted to Rp138,017 million, a decrease of Rp7,231 million or 4.97% compared to 2022 of Rp145,248 million.

Penghasilan Komprehensif Lain
Pada tahun 2023, Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan sebesar minus Rp10.902 juta, turun Rp32.827 juta atau 75,06% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp43.729 juta.

Other Comprehensive Income
In 2023, Other Comprehensive Income for the Year amounted to minus Rp10,902 million, a decrease of Rp32,827 million or 75.06% compared to 2022 of Rp43,729 million.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Pada tahun 2023, Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp127.115 juta, meningkat Rp25.596 juta atau 20,13% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp101.519 juta. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya Pendapatan Usaha sebesar 10,10% atau setara dengan Rp99.124 juta dan penurunan beban pajak yang cukup signifikan sebesar 23,54%

Comprehensive Income for the Year
In 2023, Comprehensive Income for the Year amounted to Rp127,115 million, an increase of Rp25,596 million or 20.13% compared to 2022 of Rp101,519 million. This increase is in line with the increase in Operating Income by 10.10% or equivalent to Rp99,124 million and a significant decrease in tax expense of 23.54%.

Arus Kas Konsolidasian / *Consolidated Cash Flow*

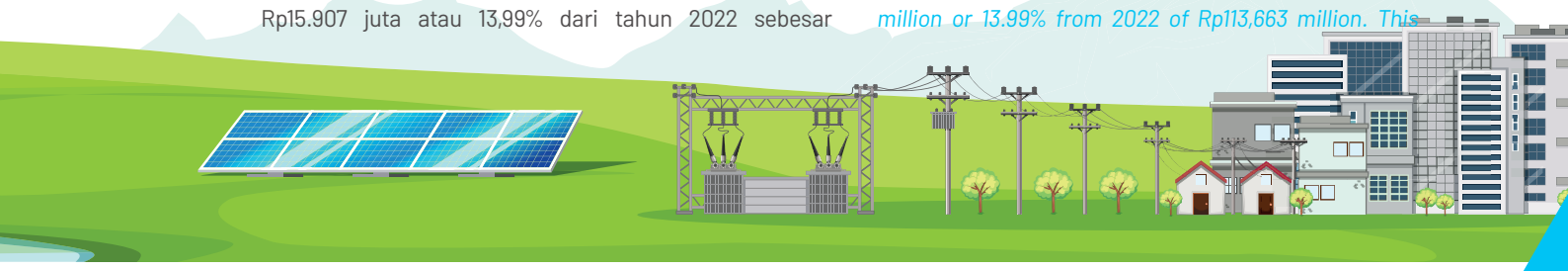
Keterangan / *Information*	2023 (RP)	2022 (RP)	2021 (RP)	Nominal Pertumbuhan 2022-2023	Perubahan 2022-2023 (%) *Changes (%)*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi / *Net Cash Flows from Operating Activities*	299.353	236.735	112.562	62.618	26,45%
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi / *Net Cash Flows Used for Investing Activities*	(129.570)	(133.663)	(169.713)	(15.907)	(13,99%)
Arus Kas Bersih (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan / *Net Cash Flows (Used for) Financing Activities*	(5.422)	(7.587)	(8.681)	(2.165)	(23,53%)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / *Net Increase (Decrease) of Cash and Cash*	164.360	115.484	(65.831)	48.876	42,69%
Kas dan Setara Kas – Saldo Awal / *Cash and Cash Equivalent – Beginning Balance*	567.815	452.331	518.162	115.484	25,53%
Kas dan Setara Kas – Saldo Akhir / *Cash and Cash Equivalent – Ending Balance*	732.176	567.815	452.331	164.361	28,94%

Pada tahun 2023, Perusahaan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar Rp299.353 juta, meningkat Rp62.618 juta atau 26,45%% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp236.735 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh faktor kenaikan jumlah penerimaan dari pelanggan dan penerimaan bunga.

In 2023, the Company obtained net cash flow from operating activities of Rp299,353 million, an increase of Rp62,618 million or 26.45%% when compared to 2022 of Rp236,735 million. This increase was due to an increase in the amount of revenue from customers and interest receipts.

Arus kas bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2023 tercatat sebesar Rp129.570 juta, meningkat Rp15.907 juta atau 13,99% dari tahun 2022 sebesar

Net cash flows used in investing activities in 2023 was recorded at Rp129,570 million, an increase of Rp15,907 million or 13.99% from 2022 of Rp113,663 million. This



Rp113.663 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh perolehan aset tetap dan pembayaran rehab aset kelola.

Sementara Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan sebesar Rp5.422 juta, menurun Rp2.165 juta atau 23,53% bila dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp7.587 juta. Penurunan ini disebabkan oleh perusahaan yang menambah liabilitas keuangan lainnya.

KEMAMPUAN MEMENUHI KEWAJIBAN, TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG, DAN PROFITABILITAS PERUSAHAAN

Selama tahun 2023, Perusahaan memiliki tingkat kemampuan untuk memenuhi kewajiban dengan baik. Hal ini terlihat dari rasio likuiditas dan solvabilitas Perusahaan. Tingkat kolektibilitas piutang meningkat dengan lebih cepatnya piutang tertagih, sedangkan profitabilitas perusahaan menurun dari tahun sebelumnya.

Kemampuan Memenuhi Kewajiban

Kemampuan memenuhi kewajiban Perusahaan untuk jangka pendek tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang dimiliki. Likuiditas adalah rasio yang mencerminkan tentang kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Tingkat likuiditas tercermin dalam Rasio Kas dan Rasio Lancar. Sementara kemampuan untuk memenuhi kewajiban secara keseluruhan dicerminkan melalui rasio solvabilitas, yaitu Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) dan Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER).

was mainly due to the acquisition of fixed assets and payment for rehabilitation of managed assets.

Meanwhile, Net Cash Flow Used for Financing Activities amounted to Rp5,422 million, a decrease of Rp2,165 million or 23.53% when compared to 2022 of Rp7,587 million. This decrease was due to the company adding other financial liabilities.

ABILITY TO FULFIL OBLIGATIONS, COLLECTABILITY OF RECEIVABLES, AND PROFITABILITY OF THE COMPANY

During 2023, the Company has a good level of ability to fulfil its obligations. This can be seen from the Company's liquidity and solvency ratios. The collectibility rate of receivables increased with faster collection of receivables, while the company's profitability decreased from the previous year.

Ability to fulfil obligations

The ability to fulfil the Company's short-term obligations is reflected in its financial ratios. Liquidity is a ratio that reflects the Company's ability to fulfil short-term obligations with its current assets. The level of liquidity is reflected in the Cash Ratio and Current Ratio. While the ability to meet overall obligations is reflected through solvency ratios, namely the Liability to Asset Ratio (DAR) and the Liability to Equity Ratio (DER).

Rasio Likuiditas / *Liquidity Ratio*

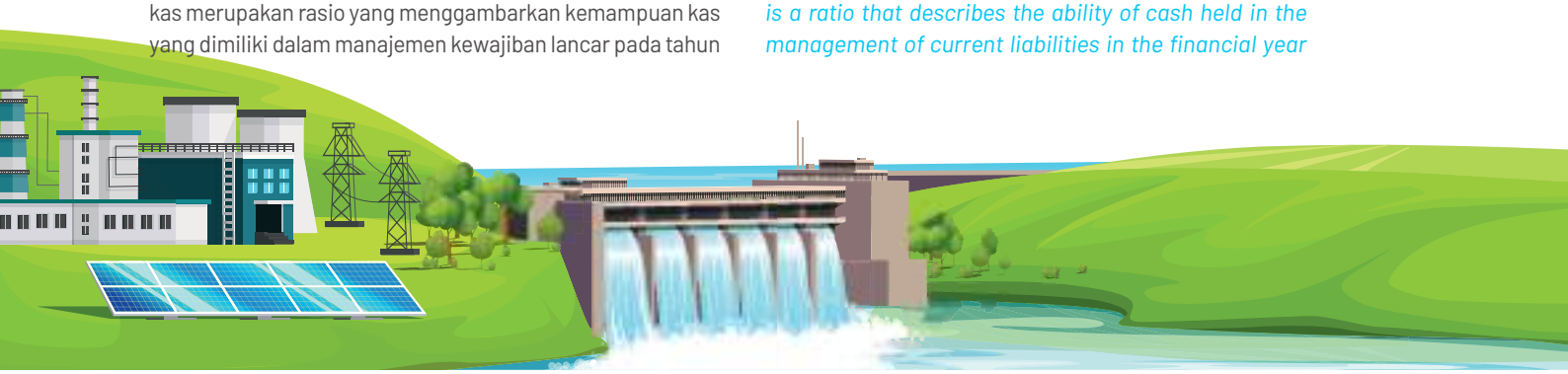
Keterangan / *Information*	2023	2022	2021
Rasio Kas / *Cash Ratio*	291,98	245,40	269,22
Rasio Lancar / *Current Ratio*	425,33	405,87	445,12

Rasio Kas

Rasio Kas merupakan rasio yang menunjukkan posisi kas yang dapat menutupi utang lancar, dengan kata lain rasio kas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan kas yang dimiliki dalam manajemen kewajiban lancar pada tahun

Cash Ratio

Cash Ratio is a ratio that shows the cash position that can cover current debt, in other words, the cash ratio is a ratio that describes the ability of cash held in the management of current liabilities in the financial year



buku yang bersangkutan. Rasio Kas tahun 2023 sebesar 291,98%, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 245,40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Kas dan Setara Kas meningkat di tahun 2023 .

concerned. The Cash Ratio in 2023 was 291.98%, an increase compared to 2022 of 245.40%. This shows that the Company's ability to settle its short-term obligations using Cash and Cash Equivalents increased in 2023.

Rasio Lancar

Rasio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar dan merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan suatu Perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Lancar tahun 2023 sebesar 425,33%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 405,87%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan Aset Lancar yang tersedia meningkat di tahun 2023.

Current Ratio

The ratio is a comparison between current assets and current liabilities and is the most commonly used measure to determine the ability of a company to meet its short-term obligations. The Current Ratio in 2023 is 425.33%, higher than in 2022 of 405.87%. This shows that the Company's ability to pay its short-term liabilities using available Current Assets increased in 2023.

Rasio Solvabilitas / *Solvency Ratio*

Perusahaan menggunakan Rasio Solvabilitas untuk mengukur jumlah Aset Perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio Solvabilitas yang dipakai adalah Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) dan Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR).

The company uses the Solvency Ratio to measure the amount of the company's assets financed by debt. The Solvency Ratios used are the Liability to Equity Ratio (DER) and the Liability to Total Assets Ratio (DAR).

Keterangan / *Information*	2023	2022	2021
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) / *Liabilities/Debt to Equity Ratio*	36,72	36,00	31,89
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (DAR) / *Liabilities /Debt to Asset Ratio*	26,85	26,47	24,18

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER)

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebesar 36,72%, sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebesar 36,00%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan Ekuitas yang tersedia meningkat dari tahun 2022 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Liability to Equity Ratio (DER)

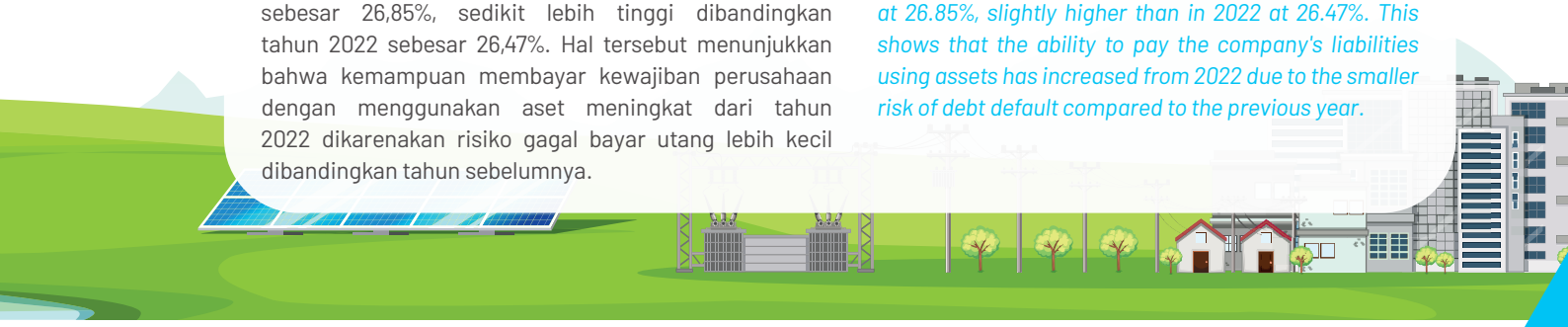
The Liability to Equity Ratio (DER) by the end of 2023 was recorded at 36.72%, slightly higher than in 2022 which was recorded at 36.00%. This shows that the ability to pay the company's obligations using available Equity increased from 2022 due to the risk of debt default is greater than the previous year.

Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR)

Rasio Liabilitas terhadap Aset (DAR) tahun 2023 tercatat sebesar 26,85%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 26,47%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar kewajiban perusahaan dengan menggunakan aset meningkat dari tahun 2022 dikarenakan risiko gagal bayar utang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Liability to Asset Ratio (DAR)

The Liability to Asset Ratio (DAR) in 2023 was recorded at 26.85%, slightly higher than in 2022 at 26.47%. This shows that the ability to pay the company's liabilities using assets has increased from 2022 due to the smaller risk of debt default compared to the previous year.



Tingkat Kolektibilitas Piutang / *Receivables Collectability Level*

Pengukuran tingkat kolektibilitas piutang Perum Jasa Tirta II dilakukan menggunakan rasio Perputaran Persediaan, Periode Penagihan, dan Perbandingan Modal Sendiri terhadap Total Ekuitas.

Measurement of the collectibility level of Perum Jasa Tirta II's receivables is carried out using the ratio of Inventory Turnover, Collection Period, and Comparison of Own Capital to Total Equity.

Keterangan / *Information*	2023	2022	2021
Perputaran Persediaan (dalam satuan kali) / *Inventory Turnover (in times)*	0	1	1
Periode Penagihan (dalam satuan hari) / *Collection Period (in day)*	26	127	121
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (dalam %) / *Equity to Total Assets Ratio (in %)*	73,14	72,26	53,19

Perputaran Persediaan

Perputaran Persediaan adalah rasio yang digunakan untuk mengukur periode yang diperlukan dalam menjual persediaan Perusahaan. Rasio Perputaran Persediaan tahun 2023 adalah 0, berbeda dengan tahun 2022 dan 2021.

Inventory Turnover

Inventory Turnover is a ratio used to measure the period required to sell the Company's inventory. The Inventory Turnover Ratio in 2023 is 0, in contrast to 2022 and 2021.

Periode Penagihan

Periode Penagihan adalah rasio yang mengukur periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang (dalam satuan hari). Rasio Periode Penagihan tahun 2023 adalah 26 hari, lebih cepat dibandingkan tahun 2022 yang memakan waktu selama 127 hari.

Collection Period

Collection Period is a ratio that measures the average period required to collect receivables (in days). The Collection Period ratio in 2023 was 26 days, faster than in 2022 which took 127 days.

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah rasio yang menunjukkan tingkat total aset yang dibiayai oleh modal sendiri. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset tahun 2023 adalah 73,14%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,26%.

Own Capital to Total Assets Ratio

The ratio of Own Capital to Total Assets is a ratio that shows the level of total assets financed by own capital. The ratio of Own Capital to Total Assets in 2023 was 73.14%, an increase from 2022 of 72.26%.

Profitabilitas Usaha / *Business Profitability*

Profitabilitas usaha dihitung untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Perusahaan. Adapun perhitungan profitabilitas usaha menggunakan Rasio Imbalan kepada Pemilik Modal (Return on Equity), Imbalan Investasi (Return on Investment), dan Laba terhadap Aset (Return on Asset).

Business profitability is calculated to measure the Company's ability to increase profits, as well as to measure the level of business efficiency and profitability achieved by the Company. The calculation of business profitability uses the Return on Equity Ratio, Return on Investment, and Return on Assets.



Keterangan / *Information*	2023	2022	2021
Imbalan kepada Pemilik Modal (ROE) / *Return on Equity*	10,19	12,28	10,50
Imbalan Investasi (ROI) / *Return on Investment*	12,13	15,23	13,04
Imbalan Aset (ROA) / *Return on Asset*	8,41	10,03	8,56

Imbalan Kepada Pemilik Modal
Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh Pemilik Modal. Pada tahun 2023, nilai ROE sebesar 10,19%, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 12,28%.

Return to Equity Owners
Return on Equity (ROE) shows the ability of own capital to generate profits for all capital owners. In 2023, the ROE value was 10.19%, down from 12.28% in 2022.

Imbalan Investasi
Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola investasi untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2023, nilai ROI sebesar 12,13%, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 15,23%.

Return on Investment
Return on Investment (ROI) shows the Company's ability to manage investments to generate profits. In 2023, the ROI value was 12.13%, down from 15.23% in 2022.

Imbalan Aset
Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Pada tahun 2023, nilai ROA sebesar 8,41%, turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 10,03%.

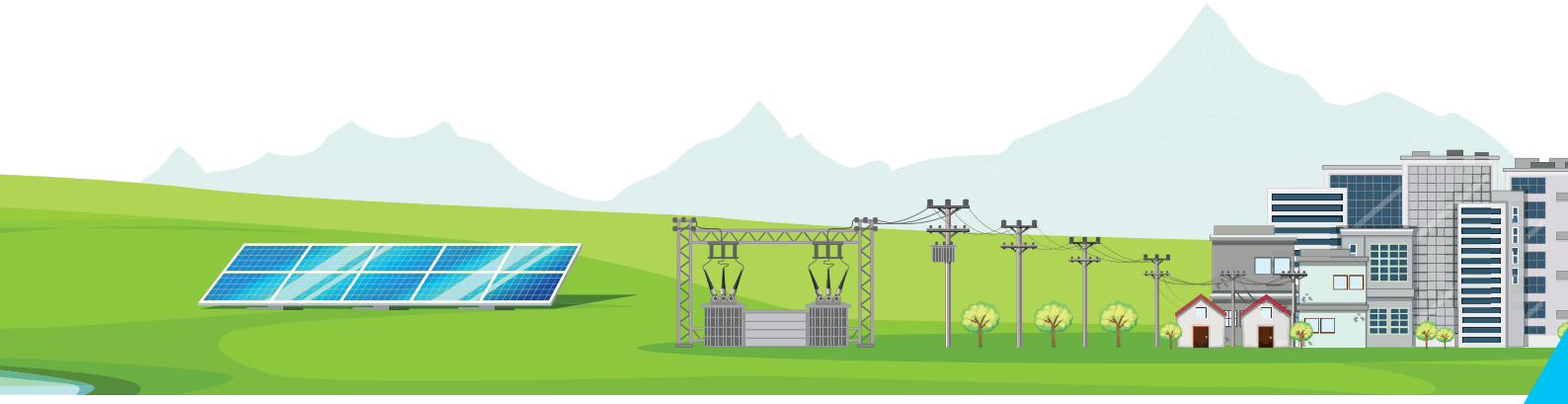
Return on Assets
Return on Asset (ROA) shows the Company's ability to manage assets to generate profits. In 2023, the ROA value was 8.41%, down from 10.03% in 2022.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan, Pendapatan Bersih dan Kinerja Perusahaan
Perusahaan tidak dipengaruhi oleh volatilitas harga harga komoditas global dan perusahaan juga belum menerapkan kebijakan lindung nilai (hedging).

Oleh karena itu dampak perubahan harga komoditas tidak berpengaruh terhadap penjualan, pendapatan bersih dan kinerja perusahaan.

Impact of Price Changes on Sales, Net Income and Company Performance
The company is not affected by the price volatility of global commodity prices and the company has not implemented a hedging policy.

Therefore, the impact of commodity price changes does not affect sales, net income and company performance.






INA
INA

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal
Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Rincian Struktur Modal
Capital Structure Details

Permodalan yang kuat sangat diperlukan untuk menunjang ekspansi bisnis dan mempertahankan pangsa pasar yang dimiliki. Struktur modal Perum Jasa Tirta II untuk tahun 2023 dapat terlihat dari jumlah Aset yang dibiayai melalui Liabilitas sebesar 26,85%. Porsi liabilitas dalam struktur modal Perusahaan mengalami penurunan dari semula sebesar 27,74% pada tahun 2022 menjadi 26,85% pada tahun 2023.

Strong capital is needed to support business expansion and maintain market share. Perum Jasa Tirta II's capital structure for 2023 can be seen from the total assets financed through liabilities of 26.85%. The portion of liabilities in the Company's capital structure has decreased from 27.74% in 2022 to 26.85% in 2023.

Keterangan / *Information*	2023	2022	2021
Liabilitas / *Liabilities*	26,85	27,74	24,18
Ekuitas / *Equity*	73,14	72,26	75,82
Aktiva / *Assets*	100,00	100,00	100,00

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Management Policy on Capital Structure

Manajemen secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi Pemilik Modal dengan senantiasa mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Management actively and regularly reviews and manages its capital to ensure an optimal capital structure and return for the Capital Owners by constantly considering the efficient use of capital based on operating cash flows and capital expenditures and considering future capital requirements.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Material Bonds for Investment in Capital Goods

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Ekuitas, transaksi material diklasifikasikan sebagai transaksi yang bernilai di atas 20% ekuitas. Selama tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal dengan pihak manapun.

Based on Bapepam-LK Regulation No. IX.E.2 regarding Material Transactions and Changes in Equity Activities, material transactions are classified as transactions valued above 20% of equity. During 2019, the Company did not have any material ties for investment in capital goods with any party.



Investasi Barang Modal Tahun 2023
Capital Goods Investment in 2023

Untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan konsumen, Perusahaan melakukan pengadaan barang modal yang dibukukan sebagai aset tetap. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan memiliki investasi barang modal sebesar Rp1.592040 juta yang terdiri dari tanah, sarana, bangunan, suku cadang, instalasi & jaringan, alat angkut & alat berat, perabot & peralatan, dan aset tanaman konservasi.

To increase capacity and customer service, the Company procures capital goods which are recorded as fixed assets. Throughout 2023, the Company has invested Rp1,592040 million in capital goods consisting of land, facilities, buildings, spare parts, installations & networks, conveyances & heavy equipment, furniture & equipment, and conservation plant assets.

Investasi Barang Modal / *Capital Goods Investment*

Keterangan / *Information*	SUMBER DANA *Fund Source*	MATA UANG *Currency*	NILAI *Value* *
Tanah / *Land*	Internal	Rupiah	25.167
Sarana / *Facilities*	Internal	Rupiah	27.931
Bangunan / *Building*	Internal	Rupiah	272.853
Suku Cadang / *Spare Parts*	Internal	Rupiah	3.828
Instalasi & Jaringan / *Installation & Network*	Internal	Rupiah	912.834
Alat Angkut & Alat Berat / *Transportation & Heavy Equipment*	Internal	Rupiah	126.988
Perabot & Peralatan / *Furniture & Equipment*	Internal	Rupiah	222.437
Aset Tanaman Konservasi / *Conservation Plant Assets*	Internal	Rupiah	1.592.040

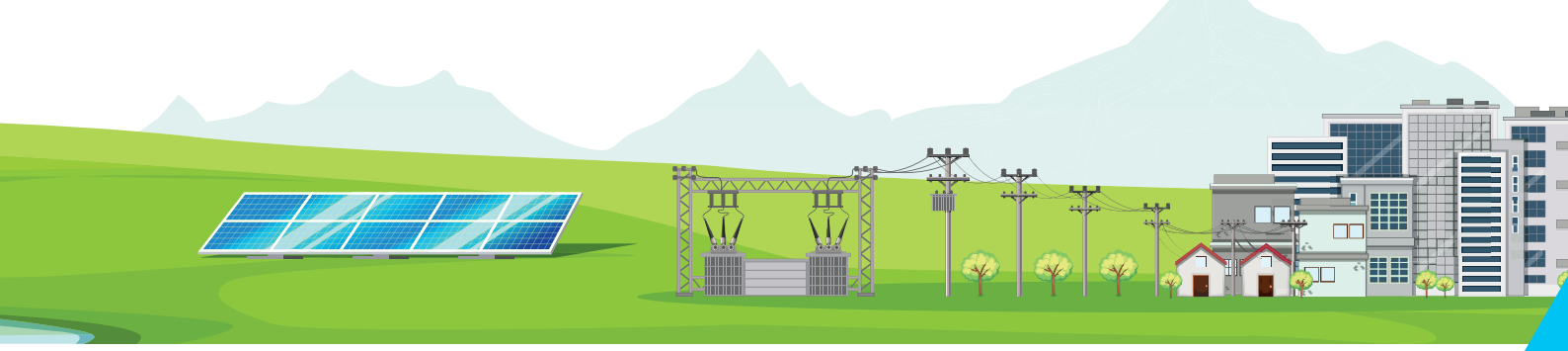
Tujuan investasi barang modal ini adalah untuk meningkatkan operasional layanan dan fasilitas pendukung guna mewujudkan layanan prima bagi pelanggan. Seluruh pengadaan barang modal tersebut menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran sehingga Perusahaan tidak memiliki risiko mata uang asing.

The purpose of this capital goods investment is to improve service operations and supporting facilities in order to realise excellent service for customers. All procurement of capital goods uses Rupiah as a means of payment so that the Company has no foreign currency risk.

Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts Occurring After the Date of the Accountant's Report

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

There are no significant events/occurrences after the date of the consolidated statement of financial position (balance sheet) that have a significant effect on the consolidated financial statements as a whole.



Kontribusi Kepada Negara / *Contribution to The Country*

Selama tahun 2023, Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai wajib pajak badan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

During 2023, the Company has fulfilled all its obligations as a corporate taxpayer. The tax contribution from the Company in 2023 is as follows:

Keterangan / *Information*	2023	2022	2021
Pajak Penghasilan (PPh) / *Income Tax*			
PPh Pasal 21 / Income Tax Article 21	49.505.197.748	21.468.455.316	18.762.597.331
PPh Pasal 22 / Income Tax Article 22	611.923.837	634.667.343	1.829.682.780
PPh Pasal 23 / Income Tax Article 23	1.450.655.107	1.389.876.416	1.987.330.955
PPh Pasal 4 ayat 2 / Income Tax Article 4 paragraph 2	3.414.002.675	4.738.048.414	3.246.370.859
PPh Pasal 25 / Income Tax Article 25	34.576.978.434	37.776.257.868	75.139.487.628
	89.558.757.801	72.007.305.357	100.965.469.553
Pajak Pertambahan nilai (PPn) / Value Added Tax (VAT)			
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) / Value Added Tax (VAT)	47.102.725.978	34.421.080.689	38.842.217.823
PPN Wajib Pungut / VAT Taxpayer	23.763.349.223	19.398.925.320	26.343.769.487
	70.866.075.201	53.820.006.009	65.185.987.310
Pajak Daerah / Regional Tax			
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) / Street Lighting Tax	9.177.563.511	6.822.268.877	8.278.972.784
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemakaian Sendiri / Self-use street lighting tax (PPJ)	248.949.021	246.111.010	227.817.806
Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Penduduk / Resident street lighting tax	47.427.896	38.481.049	35.875.439
Pajak Air Permukaan / Surface Water Tax	3.029.872.000	3.513.102.429	2.666.677.300
Pajak Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant Tax	1.124.889.828	1.043.992.797	1.037.913.584
Pajak Bumi & Bangunan (PBB) / Land & Building Tax	7.656.997.977	8.560.505.205	8.449.560.759
	21.285.700.233	21.377.829.902	20.696.817.672



Prospek Usaha
Business Outlook

Perusahaan optimis bahwa prospek usaha industri listrik dan industri air masih terjaga dengan baik hingga tahun-tahun mendatang. Optimisme ini didukung oleh proyeksi pertumbuhan ekonomi global, nasional, dan industri yang sejalan pula dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 yang kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,4% - 6,0%. Pemerintah optimis bahwa target tersebut akan tercapai didorong oleh beberapa hal, seperti revitalisasi industri pengolahan, transformasi sektor pertanian, hilirisasi pertambangan, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan transformasi sektor jasa.

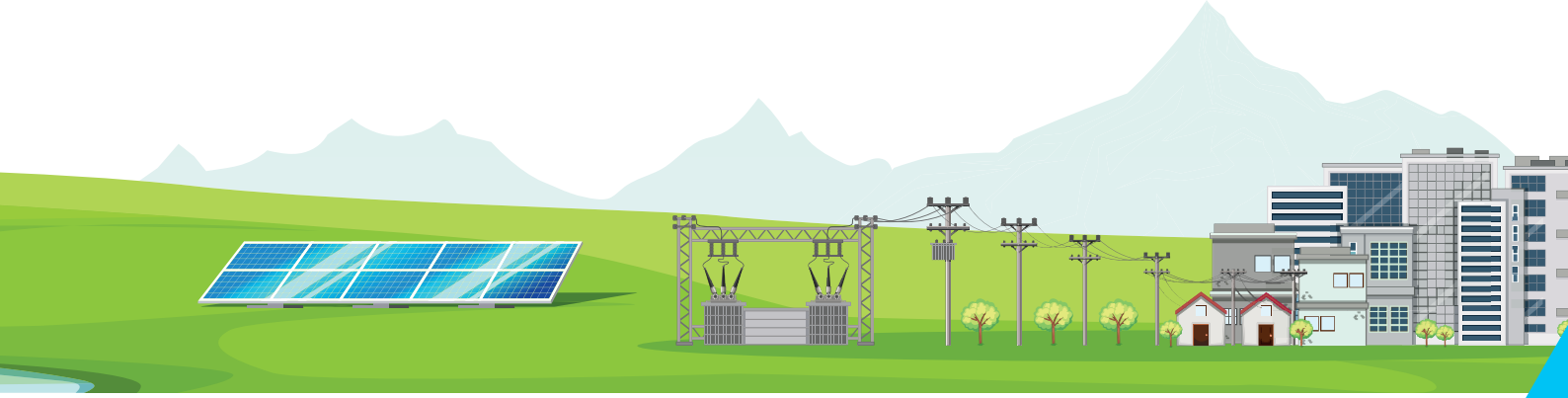
The Company is optimistic that the business prospects for the electricity and water industries will remain favourable in the coming years. This optimism is supported by projections of global, national and industrial economic growth, which are also in line with population growth. This is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024 which then targets national economic growth in the range of 5.4% - 6.0%. The government is optimistic that the target will be achieved driven by several things, such as the revitalisation of the processing industry, transformation of the agricultural sector, downstream mining, sustainable infrastructure development and transformation of the service sector.

Sementara itu, prospek pertumbuhan industri listrik didukung oleh proyeksi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana tertuang dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019-2038 yang memproyeksikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan energi listrik sekitar 6,9% per tahun. Hal tersebut diperkuat oleh pertumbuhan penjualan listrik oleh PT PLN (Persero) selaku pihak tersalur utama Perusahaan kepada pelanggan. Pertumbuhan ini diperkirakan akan tetap terjaga seiring dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahun dan adanya potensi demand untuk sektor industri, rumah tangga, bisnis, publik, dan transportasi.

Meanwhile, the growth prospect of the electricity industry is supported by the projection of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) as stated in the 2019-2038 National Electricity General Plan, which projects an average growth in electricity demand of around 6.9% per year. This is reinforced by the growth in electricity sales by PT PLN (Persero) as the Company's main distributor to customers. This growth is expected to be maintained along with the projected population growth each year and the potential demand for the industrial, household, business, public, and transportation sectors.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, maka kebutuhan akan air bersih, air minum dalam kemasan, dan air untuk pertanian cenderung meningkat sehingga mendorong terciptanya penyaluran air yang lebih besar dan luas. Data Proyeksi Penduduk Tahun 2010 – 2035 milik Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa jumlah penduduk diprediksi naik antara 3% - 7% setiap lima tahun. Dalam laporan tersebut, penduduk Indonesia pada tahun 2015 diprediksi berjumlah 256 juta jiwa, meningkat 6% hingga tahun 2020 menjadi 271 juta jiwa, meningkat 5% hingga tahun 2025 menjadi 285 juta jiwa, meningkat lagi 4% hingga tahun 2030 menjadi 296 juta jiwa, dan kembali meningkat 3% hingga akhir tahun 2035 menjadi 306 juta jiwa.

In line with the projected population growth each year, the need for clean water, bottled drinking water, and water for agriculture tends to increase, thus encouraging the creation of larger and wider water distribution. The Central Bureau of Statistics' 2010-2035 Population Projection Data reports that the population is predicted to increase between 3% - 7% every five years. In the report, Indonesia's population in 2015 is predicted to be 256 million, increasing by 6% until 2020 to 271 million, increasing by 5% until 2025 to 285 million, increasing by another 4% until 2030 to 296 million, and increasing by another 3% until the end of 2035 to 306 million.



Proyeksi Penduduk
Population Projection

DATA PENDUDUK / *Population Date*	2015	2020	2025	2030	2035
Proyeksi Penduduk (dalam jutaan) / *Population Projection (in million)*	256	271	285	296	306
Persentase Penduduk Daerah Perkotaan (%) / Population Percentage in Urban Areas (%)	53,3	56,7	60,0	63,4	66,6

Kenaikan persentase pertumbuhan penduduk daerah perkotaan turut mendukung kenaikan permintaan air bersih dan air minum. Selain didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, tingkat ketersediaan air bersih di lingkungan sekitar, dan gaya hidup yang mengutamakan kepraktisan mendukung permintaan air minum dari perusahaan air minum (PAM) maupun permintaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) karena alasan kebersihan. Faktor pendukung lainnya seperti momen Ramadhan, Natal, dan Tahun Baru diprediksi menjadi momen andalan untuk menggenjot penjualan AMDK di setiap tahunnya. Meninjau faktor-faktor tersebut, Manajemen menilai bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang masih terjaga dengan baik

The increase in the percentage of population growth in urban areas also supports the increase in demand for clean water and drinking water. Besides being driven by population growth, the level of availability of clean water in the neighbourhood, and a lifestyle that prioritises practicality support the demand for drinking water from drinking water companies (PAM) as well as the demand for Bottled Drinking Water (AMDK) for hygiene reasons. Other supporting factors such as Ramadhan, Christmas, and New Year are predicted to be the mainstay moments to boost AMDK sales every year. Reviewing these factors, the Management considers that the Company's business prospects in 2023 and the coming years are still well maintained.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Produksi
Comparison between Target and Realisation of Production Aspects

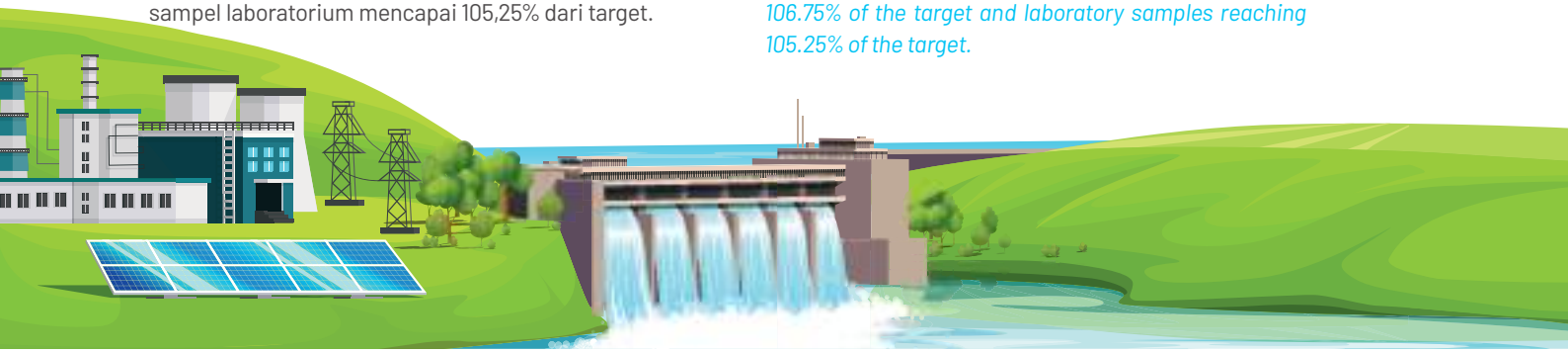
Perusahaan telah menetapkan target yang ingin dicapai pada tahun buku 2023, khususnya untuk kinerja operasional dan keuangan pokok. Dalam pencapaiannya, Perusahaan senantiasa melakukan review terhadap target yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal Perusahaan.

The Company has set targets to be achieved by financial year 2023, particularly for key operational and financial performance. In achieving this, the Company constantly reviews the targets set in accordance with the development of the Company's internal and external conditions.

Aspek Produksi
Production Aspects

Capaian aspek produksi di sepanjang tahun 2023 menunjukkan hasil yang positif. Beberapa aspek produksi dapat mencapai 100% atau lebih, antara lain produksi listrik 105,20% dari target, penyaluran air baku mencapai 105,27% dari target, penyaluran air irigasi 106,75% dari target dan sampel laboratorium mencapai 105,25% dari target.

The achievement of production aspects throughout 2023 showed positive results. Some aspects of production can reach 100% or more, including electricity production 105.20% of the target, raw water distribution reaching 105.27% of the target, irrigation water distribution 106.75% of the target and laboratory samples reaching 105.25% of the target.



Informasi mengenai pencapaian aspek produksi dengan target RKAP tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Information regarding the achievement of production aspects with the 2023 RKAP target is presented in the following table:

Uraian / *Description*	Satuan *Unit*	Realisasi Tahun 2023 / *Realization in 2023*	RKAP 2023	% Pencapaian / *% Achievement*
Produksi listrik / *Electricity production*	kWh	973.137.000	925.075.358	105,20%
Penyaluran air baku / *Raw water distribution*	Juta m3	1.142.515.664	1.085.273.590	105,27%
Penyaluran air baku ke PLTA / *Raw water distribution to hydropower plant*	kWh	554.008.319	486.416.039	113,90%
Penyaluran air bersih / *Clean water distribution*	m3	2.108.731	5.345.264	39,45%
Penyaluran air irigasi / *Irrigation water distribution*	Juta m3	5.211,13	4.881,51	106,75%
Sampel laboratorium / *Laboratory sample*	sampel	8.861	9.325	105,24%
Pemanfaatan lahan / *Land utilization*				
Pertanian / *Agriculture*	Ha	2.940.743	2.561.344	114,81%
Non Pertanian / *Non Agriculture*	Ha	2.763.712	2.636.075	104,84%
Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) / *Bottled Drinking Water*				
Galon 19 liter / *19 liter Gallon*	Galon	149.198	162.000	92,10%
Botol 600 ml / *600 ml bottle*	Dus	6.967	24.000	29,03%
Botol 330 ml / *330 ml bottle*	Dus	50.847	57.600	88,28%
Gelas 240 ml / *240 ml bottle*	Dus	19.761	21.600	91,49%

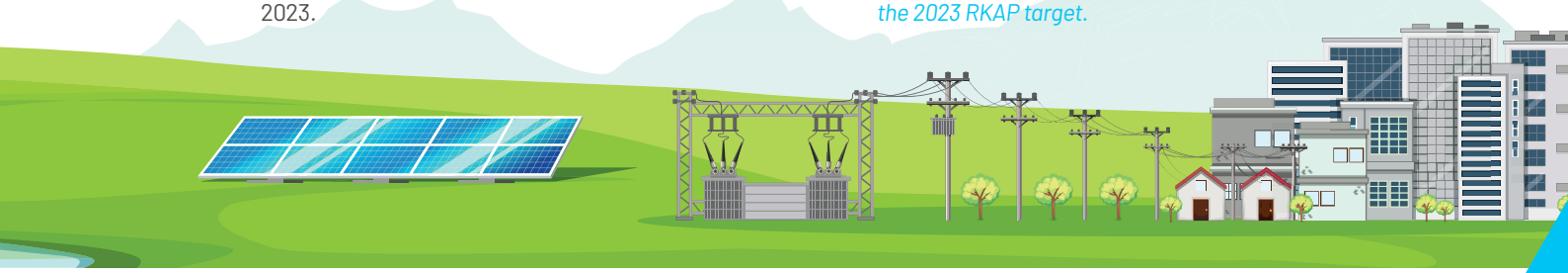
Aspek Keuangan
Financial Aspects

Dari sisi Laporan Laba Rugi Konsolidasian, hampir seluruh komponennya belum mampu mencapai target RKAP tahun 2023. Perusahaan membukukan Pendapatan Usaha sebesar Rp1.080.171,11 juta, terealisasi 116,19% dari RKAP Tahun 2023 sebesar Rp929.697,76 juta, laba kotor tercapai 97,47% dari target RKAP 2023, dan Laba Bersih Tahun Berjalan mencapai 104,47% dari target yang ditetapkan.

In terms of the Consolidated Income Statement, almost all of its components have not been able to achieve the 2023 RKAP target. The Company booked Operating Revenue of Rp1,080,171.11 million, realised 116.19% of the 2023 RKAP of Rp929,697.76 million, gross profit achieved 97.47% of the 2023 RKAP target, and Net Profit for the Year reached 104.47% of the set target.

Dari sisi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, realisasi Aset dan Liabilitas per 31 Desember 2023 masing-masing mencapai 104,81% dan 125,84% dari target RKAP tahun 2023. Sedangkan jumlah Ekuitas yang berhasil direalisasikan mencapai 98,75% dari target RKAP tahun 2023.

In terms of the Consolidated Statement of Financial Position, the realisation of Assets and Liabilities as of 31 December 2023 reached 104.81% and 125.84% of the 2023 RKAP target, respectively. While the amount of Equity that was successfully realised reached 98.75% of the 2023 RKAP target.



Perbandingan antara Target dan Realisasi Aspek Keuangan
Comparison between Target and Realisation of Financial Aspects

Keterangan / *Information*	RKAP 2023	Realisasi Tahun 2023 / Realization in 2023	% Pencapaian / % Achievement
Pendapatan Usaha / *Revenues*	929.697,76	1.080.171,11	116,19%
Beban Pokok / *Cost of Goods Sale*	(553.510,44)	(713.501,41)	128,90%
Laba Kotor / *Gross Profit*	376.187,33	366.669,70	97,47%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / *Profit Before Income Tax*	169.371,46	173.652,68	102,53%
Laba Tahun Berjalan / *Profit for the Year*	132.017,01	138.017,01	104,47%
Jumlah Aset / *Total Assets*	1.969.495,56	2.064.265,44	104,81%
Aset Lancar / *Current Assets*	733.908,38	1.066.586,50	145,32%
Aset Tidak Lancar / *Non Current Assets*	1.235.587,18	997.678,93	80,74%
Jumlah Liabilitas / *Total Liabilities*	440.565,71	554.424,15	125,84%
Liabilitas Jangka Pendek / *Current Liabilities*	183.086,00	250.761,10	136,96%
Liabilitas Jangka Panjang / *Non Current Liabilities*	257.479,71	303.663,04	117,93%
Jumlah Ekuitas / *Total Equity*	1.528.929,85	1.509.841,39	98,75%



Proyeksi Tahun 2024
Projected Year 2024

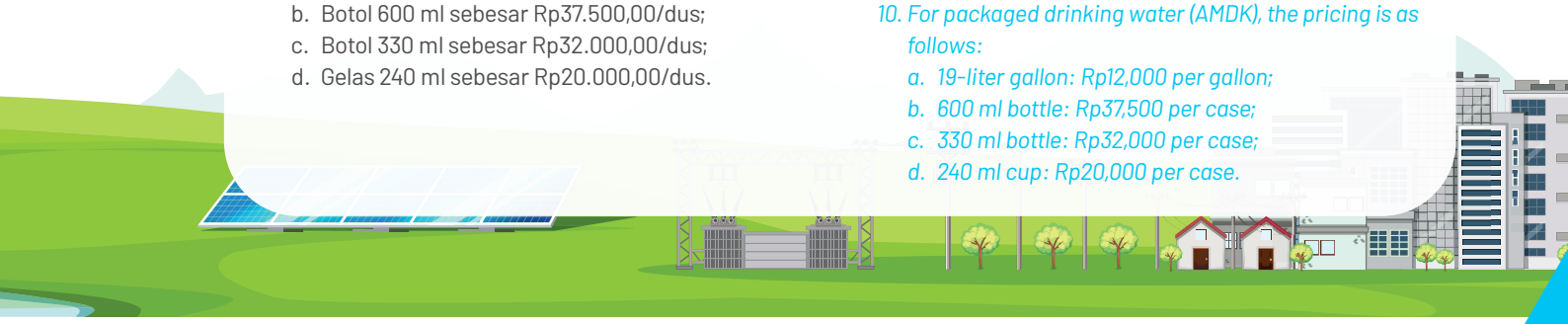
Perusahaan telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 sebagai acuan pokok Perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Pencapaian target finansial untuk tahun 2024 didasarkan oleh berbagai asumsi kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi aktivitas Perusahaan.

The company has developed its 2024 Work Plan and Budget (RKAP) as a fundamental reference for guiding its business activities throughout the year. The achievement of financial targets for 2024 is based on a variety of assumptions regarding both internal and external conditions that may impact the company's operations.

Kondisi internal
Internal Conditions

1. Peningkatan pendapatan penjualan listrik PLTA Ir. H. Djuanda melalui porsi penjualan kepada pelanggan Non PLN diharapkan dapat tercapai di tahun 2023.
2. Tarif Jual Tenaga Listrik ke PT PLN (Persero) rata-rata sebesar Rp346,00/kWh.
3. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Pemakaian Sendiri rata-rata sebesar Rp825,00/kWh.
4. Tarif Jual Tenaga Listrik ke Industri/Swasta rata-rata sebesar Rp825,00/kWh
5. Tarif pemakaian jasa fasilitas tenaga listrik PLTA Ir. H. Djuanda bagi pelanggan Non PLN tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor: 1/3/PRT/2015 tanggal 30 Januari 2015 untuk semua golongan tarif sebesar 80% dari Tarif Tenaga Listrik (TTL) yang ditetapkan olehPemerintah.
6. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air:
   a. PAM Jaya sebesar Rp294/m^3;
   b. PDAM Kabupaten/Kota sebesar Rp141,27/m^3;
   c. Industri dan PT Sang Hyang Seri sebesar Rp244,93/m^3;
7. Tarif/Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air ke PLTA:
   a. BPJSDA PLTA Djuanda sebesar Rp85,28/kWh;
   b. BPJSDA PLTA Saguling sebesa Rp14,01/kWh;
   c. BPJSDA PLTA Cirata sebesar Rp45,69/kWh;
8. Tarif jual rata-rata Air Bersih adalah sebagai berikut:
   a. Air Bersih Industri Rp9.300/m^3;
   b. Air Bersih Penduduk/Perumahan Rp3.000/m^3;
   c. Air Bersih curah Rp2.500/m^3;
9. Tarif Jasa Laboratorium rata-rata sebesar Rp813.070/sampel
10. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
    a. Galon 19 liter sebesar Rp12.000,00/galon;
    b. Botol 600 ml sebesar Rp37.500,00/dus;
    c. Botol 330 ml sebesar Rp32.000,00/dus;
    d. Gelas 240 ml sebesar Rp20.000,00/dus.

1. *In 2023, the Ir. H. Djuanda Hydroelectric Power Plant (PLTA) aims to increase its electricity sales revenue by expanding sales to non-PLN customers.*
2. *The average electricity selling rate to PT PLN (Persero) is set at Rp346.00 per kWh,*
3. *The rate for self-consumption sector usage is Rp825.00 per kWh.*
4. *The rate for industrial/private sector usage is Rp825.00 per kWh.*
5. *For non-PLN customers, the facility usage rate for electricity is regulated by Director's Regulation No. 1/3/PRT/2015, dated January 30, 2015, which stipulates that the tariff be 80% of the government-determined Electricity Tariff (TTL) for all customer categories.*
6. *The management fees for water resource services are structured as follows:*
   a. PAM Jaya is charged Rp294 per m^3;
   b. Municipal Water Companies (PDAM) in districts/cities are charged Rp141.27 per m^3;
   c. Industries and PT Sang Hyang Seri are charged Rp244.93 per m^3.
7. *The water resource management fees for hydroelectric plants (PLTA) are:*
   a. PLTA Djuanda at Rp85.28 per kWh;
   b. PLTA Saguling at Rp14.01 per kWh;
   c. PLTA Cirata at Rp45.69 per kWh.
8. *The average rates for clean water are as follows:*
   a. Industrial clean water: Rp9,300 per m^3;
   b. Residential clean water: Rp3,000 per m^3;
   c. Bulk clean water: Rp2,500 per m^3.
9. *In terms of laboratory services, the average fee is Rp813,070 per sample.*
10. *For packaged drinking water (AMDK), the pricing is as follows:*
    a. 19-liter gallon: Rp12,000 per gallon;
    b. 600 ml bottle: Rp37,500 per case;
    c. 330 ml bottle: Rp32,000 per case;
    d. 240 ml cup: Rp20,000 per case.







Kondisi Eksternal
External Conditions

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 mengikuti asumsi ekonomi makro pada RAPBN tahun 2023 dan perubahan asumsi kurs RAPBN 2023 serta tercantum dalam Aspirasi Pemegang Saham Tahun 2023, adalah sebagai berikut:
   a. Pertumbuhan ekonomi 5,10%
   b. Tingkat laju inflasi kisaran 3,10%
   c. Nilai Tukar Rupiah sebesar Rp15.100/US$
   d. Suku bunga SPN 3 bulan rata-rata 6,80%

2. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) dengan mempertimbangkan kondisi curah hujan yang berpengaruh terhadap Tinggi Muka Air (TMA) Waduk, sehingga perlu dilakukan pengaturan air di waduk, yang dilaksanakan secara terpadu untuk mengendalikan TMA dan menjaga ketersediaan cadangan/tampungan air tersebut melalui forum Rapat Tim Koordinasi Pengoperasian Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) setiap bulan dengan tetap mempertimbangkan Rencana Tahunan Operasi Waduk (RTOW).

1. *The formulation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 follows the macroeconomic assumptions in the 2023 Draft State Budget (RAPBN), adjustments to the exchange rate assumptions in the 2023 RAPBN, and is aligned with the 2023 Shareholders' Aspirations. The assumptions are as follows:*
   a. Economic growth: 5.10%
   b. Inflation rate: around 3.10%
   c. Rupiah exchange rate: IDR 15,100/USD
   d. 3-month Treasury Bill interest rate: average of 6.80%

2. *Based on the analysis from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG), which considered the rainfall conditions that affect the Reservoir Water Level (TMA), it is necessary to regulate the water levels in the reservoir. This will be carried out in an integrated manner to control the TMA and maintain the availability of water reserves/ storage. This will be managed through the Citarum Cascade Dam Operations Coordination Team (TKPBKC) monthly meetings, while also considering the Annual Reservoir Operation Plan (RTOW).*



Aspek Pemasaran
Marketing Aspects

Pangsa Pasar / *Market Share*

Listrik
Sampai dengan tahun 2023, pembeli listrik PLTA masih didominasi oleh PT PLN (Persero). Namun, Perusahaan terus berupaya memberikan pasokan listrik kepada pelanggan non-PLN di sekitar wilayah Jatiluhur sebagai upaya diversifikasi pelanggan dengan memperhatikan serta mengupayakan perijinan baru sesuai ketentuan yang berlaku.

Air Baku dan Air Bersih
Sampai dengan tahun 2023, pertumbuhan permintaan pemanfaatan Air Baku dari industri mengalami stagnasi, tetapi disisi lain permintaan pemenuhan kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan terbukanya peluang kerja sama dengan pihak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia Air Bersih.

Jasa Laboratorium
Pengguna Jasa Laboratorium adalah industri, PDAM dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Laboratorium dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Sampai dengan tahun 2023, penetrasi pasar untuk segmen jasa laboratorium dikhususkan ke beberapa industri guna menambah pengguna jasa laboratorium. Adapun sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 9.325 sampel yang diuji di Laboratorium PJT II, meningkat 5,24% dibandingkan tahun 2022 sebanyak 8.861 sampel.

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Pangsa pasar produk AMDK adalah Industri, Perorangan dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas AMDK dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat. Pada tahun 2023, penetrasi pasar untuk segmen AMDK dilakukan melalui penguatan sinergi BUMN untuk membuka pasar di tengah maraknya merek-merek AMDK yang terlebih dahulu beredar di masyarakat.

Kepariwisataan
Pengguna jasa Pariwisata di kawasan waduk Jatiluhur adalah Industri, masyarakat umum, dan Instansi

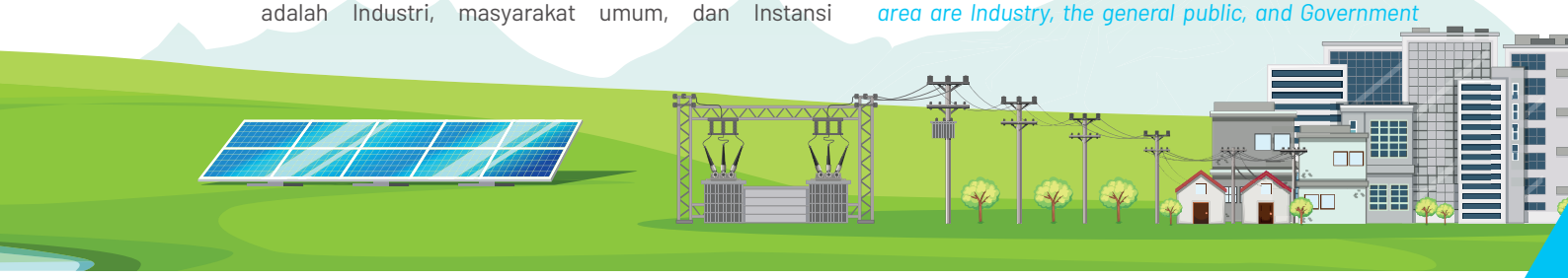
Electricity
Until 2023, the buyer of hydropower electricity is still dominated by PT PLN (Persero). However, the Company continues to provide electricity supply to non-PLN customers around the Jatiluhur area as an effort to diversify customers by paying attention and seeking new licences in accordance with applicable regulations.

Raw Water and Clean Water
Until 2023, the growth in demand for Raw Water utilisation from industry has stagnated, but on the other hand the demand for the fulfilment of clean water needs continues to increase along with population growth and the opening of opportunities for cooperation with the Regional Drinking Water Company (PDAM) as a provider of Clean Water.

Laboratory Services
Laboratory Services users are industries, PDAMs and Government Agencies in the PJT II working area. The company continues to strive to improve the quality of the Laboratory and cooperate with the local government. Until 2023, market penetration for the laboratory services segment is devoted to several industries to increase laboratory service users. As for the end of 2023, there were 9,325 samples tested at PJT II Laboratory, an increase of 5.24% compared to 2022 of 8,861 samples.

Bottled Drinking Water (AMDK)
The market share of bottled drinking water products is Industry, Individuals and Government Agencies in the PJT II working area. The company continues to strive to improve the quality of bottled water and work closely with the local government. In 2023, market penetration for the bottled water segment is carried out through strengthening the synergy of SOEs to open up the market amid the proliferation of bottled water brands that have been circulating in the community.

Tourism
Users of Tourism services in the Jatiluhur reservoir area are Industry, the general public, and Government



Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan daya tarik kawasan pariwisata Jatiluhur dengan mengikutsertakan peran pihak-pihak swasta dalam pemasarannya.

Pemanfaatan Lahan

Sampai dengan tahun 2023, pangsa pasar pemanfaatan lahan dibagi ke dalam dua kategori, yaitu pemanfaatan lahan untuk pertanian dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan non pertanian. Pengguna lahan milik PJT II masih didominasi oleh Industri, PDAM, Perorangan, dan Instansi Pemerintah di wilayah kerja PJT II. Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan penatagunaan lahan sesuai peruntukan, seperti optimalisasi pengusahaan dan peruntukan lainnya.

Strategi Pemasaran

Perusahaan melakukan berbagai kegiatan pemasaran menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19 dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan (untuk paragraf pembuka) serta bekerja sama dengan instansi terkait. Berikut adalah strategi dan kegiatan pemasaran yang dilakukan selama tahun 2022:

1. **Pariwisata**
   a. Digital Marketing
   b. Kolaborasi dengan ekosistem pariwisata
   c. Infrastruktur IT untuk Pariwisata
   d. Upgrading bisnis proses Pariwisata berbasis IT
   e. Penerapan Cashless Payment
   f. Pemenuhan Sertifikasi kesiapan New Normal (Safeguard)
   g. Standarisasi Hospitality (SDM & Infrastruktur)
   h. Sertifikasi Hotel Bintang

2. **AMDK**
   a. Pemasaran akan dilakukan dengan menambahkan/meningkatkan target pemasaran yang sudah ada (intensifikasi) di kab. Purwakarta, Subang dan Karawang (Purwasuka) dan Jabodetabek dengan pendekatan agen-agen loyal.
   b. Melakukan ekspansi pemasaran ke pelanggan-pelanggan baru (ekstensifikasi) antar lain Pemda Kab. Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi dan Kota Bekasi yang menjadi jalur distribusi eksisting.

Agencies in the PJT II working area. The company continues to strive to increase the attractiveness of the Jatiluhur tourism area by involving the role of private parties in its marketing.

Land Utilisation

Until 2023, the market share of land utilisation is divided into two categories, namely land utilisation for agriculture and land utilisation for non-agricultural activities. Land users owned by PJT II are still dominated by Industry, PDAM, Individuals, and Government Agencies in the PJT II working area. The company continues to strive to improve land stewardship according to designation, such as optimisation of business and other designations.

Marketing Strategy

The Company carries out various marketing activities in accordance with the conditions of the co-19 pandemic while still prioritising health protocols (for the opening paragraph) and collaborating with relevant agencies. The following are the marketing strategies and activities carried out during 2022:

1. ***Tourism***
   a. Digital Marketing
   b. Collaboration with tourism ecosystem
   c. IT Infrastructure for Tourism
   d. Upgrading IT-based Tourism business processes
   e. Cashless Payment Implementation
   f. Fulfilment of New Normal (Safeguard) readiness certification
   g. Hospitality Standardisation (HR & Infrastructure)
   h. Star Hotel Certification

2. ***AMDK***
   a. Marketing will be carried out by adding/increasing existing marketing targets (intensification) in Purwakarta, Subang and Karawang (Purwasuka) districts and Jabodetabek by approaching loyal agents.
   b. Expanding marketing to new customers (extensification), among others, the local governments of Purwakarta, Subang Karawang, Bekasi and Bekasi City which are existing distribution channels.



c. Melakukan ekspansi ke BUMN-BUMN Karya (Konstruksi) dan lainnya, serta Kementerian/ Lembaga/Badan di Jakarta. Mengingat terdapat agen/gudang milik PJT II di Jakarta (Cempaka Putih).

3. Laboratorium

Mengembangkan pasar dengan melakukan pendekatan ke Lab-Lab milik Pemda. Kab/Kota untuk menerima kelebihan/limpasan sampel yang tidak dapat dilaksanakan antara lain Lab. Dinas LH Kab. Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Kota Bekasi dan DKI yang satu jalur dengan pelanggan yang ada saat ini (untuk efisiensi beban sampling).

4. Pemanfaatan lahan

a. Mengadakan evaluasi atas perpanjangan izin pemanfaatan lahan;
b. Pemasangan patok dan papan larangan;
c. Mengadakan pengukuran, pemetaan, dan pencatatan lahan;
d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk inventarisasi;
e. Membuat skala prioritas penyelesaian masalah;
f. Selektif dengan memperhatikan lingkungan; dan
g. Pembuatan sertifikat lahan.

c. Expanding to state-owned enterprises (construction) and others, as well as ministries/ institutions/agencies in Jakarta. Given that there is an agent / warehouse owned by PJT II in Jakarta (Cempaka Putih).

3. Laboratory

Expand the market by approaching Labs owned by LG. District / City to receive excess / runoff samples that cannot be carried out, including the Lab. LH Agency Purwakarta, Subang, Karang, Bekasi, Bekasi City and DKI which are one line with existing customers (for sampling load efficiency).

4. Land utilisation

a. Evaluate the extension of land utilisation permits;
b. Installing stakes and prohibition boards;
c. Conducting land measurement, mapping, and recording;
d. Coordinating with relevant agencies for inventory;
e. Establishing a priority scale for problem solving;
f. Selective with respect to the environment; and
g. Creation of land certificates.

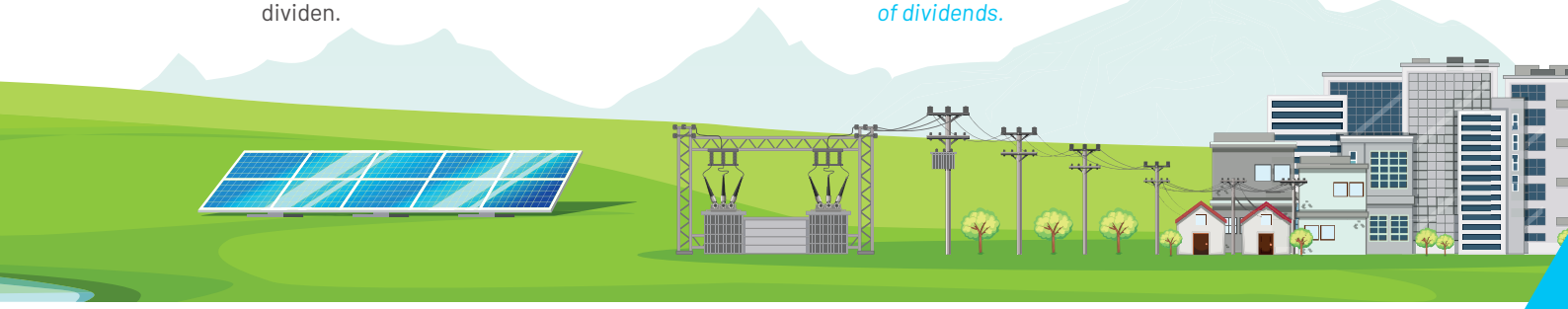
Kebijakan Dividen
Dividend Policy

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, operasi Perusahaan turut diorientasikan pada perolehan laba guna meningkatkan nilai bagi Pemilik Modal dengan tetap memperhatikan efektivitas operasi dan efisiensi beban sehingga dapat menghasilkan laba yang dapat didistribusikan kepada Pemilik Modal dalam bentuk dividen.

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting the Government's program policies in the economic sector and national development in general, especially in the field of Water Resources Exploitation and Management and optimising the use of company resources to produce goods and services based on sound corporate management principles.

Based on these aims and objectives, the Company's operations are also oriented towards profit generation in order to increase value for Capital Owners while taking into account the effectiveness of operations and efficiency of expenses so as to generate profits that can be distributed to Capital Owners in the form of dividends.



Tabel Dividen 5 (Lima) Tahun Terakhir / *Dividend Table for the Last 5 (Five) Years*

Keterangan / *Information*	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Laba Bersih (Rp juta) / *Net Profit (Rp million)*	138.017	145.25	107.446	113.235	166.596	174.551
Dividen (Rp juta) / Dividends (Rp million)	7	-	-	20.764	41.649	17.455
Rasio Dividen / Dividend Ratio	5.04%	-	-	13,5%	40%	10%
Tanggal Pengumuman Dividen / Dividend Announcement Date	8 Juli 2024 / July 8, 2024	-	-	26 Juni 2020/ June 26, 2020	07 Mei 2019 / May 07, 2019	04 Mei 2018 / May 30, 2017
Tanggal Pembayaran Dividen / Dividend Payment Date	5 Agustus 2024 / August 5, 2024	-	-	22 Juli 2020/ July 22, 2020	29 Mei 2019 / May 16, 2018	16 Mei 2018 / June 08, 2017

Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan Manajemen (MESOP)
Employee and Management Share Ownership Programme

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut PERUM adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 di mana seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II tidak memiliki program tersebut.

Public Company, hereinafter referred to as PERUM, is a State-Owned Enterprise as stipulated in Law No. 19 Year 2003 in which the entire capital is owned by the State and is not divided into shares. Therefore, Perum Jasa Tirta II does not have such a programme.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realisation of Use of Proceeds from Public Offering

Sebagai Perusahaan Umum, Perum Jasa Tirta II tidak melakukan aktivitas terkait penawaran umum di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak ada informasi terkait dengan perolehan dana, rencana penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas penggunaan dana dari hasil penawaran umum.

As a Public Company, Perum Jasa Tirta II does not conduct activities related to public offerings on the Indonesia Stock Exchange so there is no information related to the acquisition of funds, planned use of funds, balance of funds, and date of GMS approval of the use of funds from the public offering.



Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Akuisisi Dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition and Debt/Capital Restructuring

Investasi / *Investment*

Sampai dengan 31 Desember 2023, investasi Perusahaan diwujudkan melalui pendirian Anak Perusahaan dan Cucu Perusahaan, dengan rincian kepemilikan sebagai berikut:

Up to 31 December 2023, the Company's investment is manifested through the establishment of Subsidiaries and Subsidiaries, with ownership details as follows:

Anak Perusahaan / *Subsidiary*	Kepemilikan / *Ownership*	Lembar Saham / *Shares*
PT Jasa Tirta Luhur	99% kepemilikan langsung	Rp19.800.000.000
PT Tegar Mandiri Cemerlang	51% kepemilikan tidak langsung	Rp10.800.000.000

Ekspansi / *Expansion*

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan ekspansi sehingga tidak terdapat informasi terkait ekspansi yang relevan untuk diungkapkan.

As of 31 December 2023, the Company has not undertaken any expansion, therefore there is no relevant expansion information to be disclosed.

Divestasi / *Divestment*

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan divestasi sehingga tidak terdapat informasi terkait divestasi yang relevan untuk diungkapkan.

Until 31 December 2023, the Company has not divested so there is no information related to divestment that is relevant to be disclosed.

Penggabungan/Peleburan usaha / *Business Merger/Consolidation*

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha sehingga tidak terdapat informasi terkait penggabungan/ peleburan usaha yang relevan untuk diungkapkan.

Up to 31 December 2023, the Company did not conduct any business merger/consolidation, therefore there is no information related to business merger/consolidation that is relevant to be disclosed.

Akuisisi / *Acquisition*

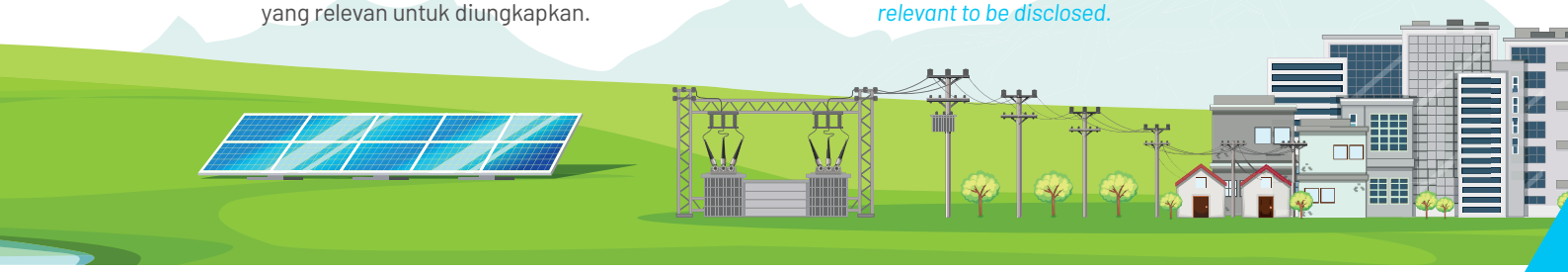
Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan akuisisi sehingga tidak terdapat informasi terkait akuisisi yang relevan untuk diungkapkan.

Up to 31 December 2023, the Company did not make any acquisitions, therefore there is no relevant acquisition-related information to be disclosed.

Restrukturisasi Utang/Modal / *Debt/Capital Restructuring*

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang/modal sehingga tidak terdapat informasi terkait restrukturisasi utang/modal yang relevan untuk diungkapkan.

Until 31 December 2023, the Company did not conduct any debt/capital restructuring, therefore there is no information related to debt/capital restructuring that is relevant to be disclosed.



Informasi Transaksi Material Yang Mengandung Benturan Kepentingan Dan/ Atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi/ Pihak Berelasi

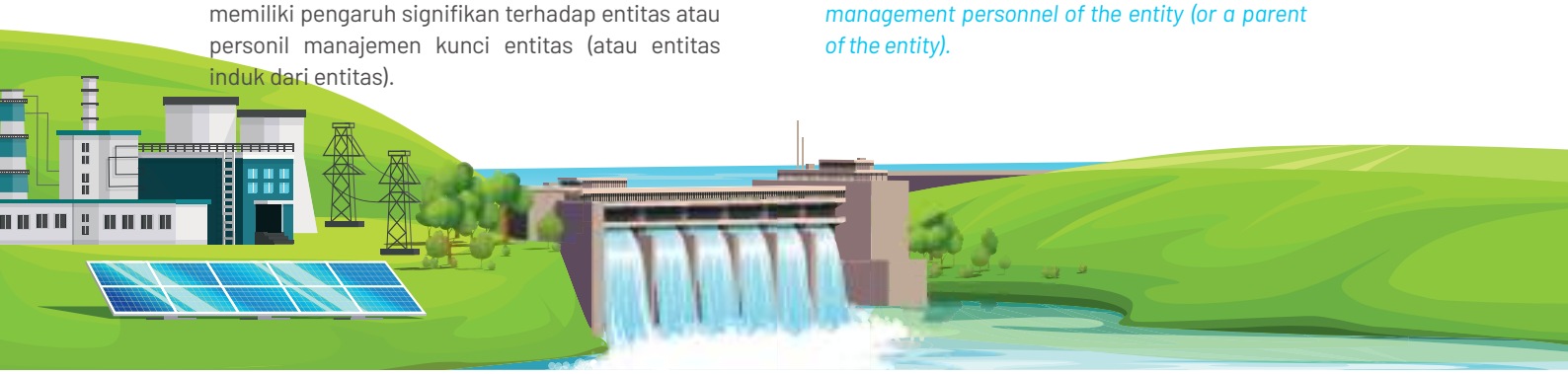
Information on Material Transactions Containing Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties/Related Parties

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor, jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Personil manajemen kunci entitas pelaporan atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
   b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelaporan atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir a.
   g. Orang yang diidentifikasi dalam butir a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Throughout 2023, the Company has conducted transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Adjustment 2015), concerning Related Party Disclosures. A related party is a person or entity related to the reporting entity:

1. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
   a. *Has control or joint control over the reporting entity;*
   b. *Has significant influence over the reporting entity; or*
   c. *Key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.*
2. *An entity is related to a reporting entity if it fulfils any of the following:*
   a. *The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent entity, subsidiaries, and subsequent subsidiaries are related to each other).*
   b. *One entity is an associate or joint venture of another entity (or an associate or joint venture that is a member of a group of which the other entity is a member).*
   c. *Both entities are joint ventures of the same third party.*
   d. *One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
   e. *The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the plan, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity.*
   f. *An entity controlled or jointly controlled by a person identified in point a.*
   g. *The person identified in item a, number 1) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*



h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci pada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

h. The entity, or a member of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to a parent of the reporting entity.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

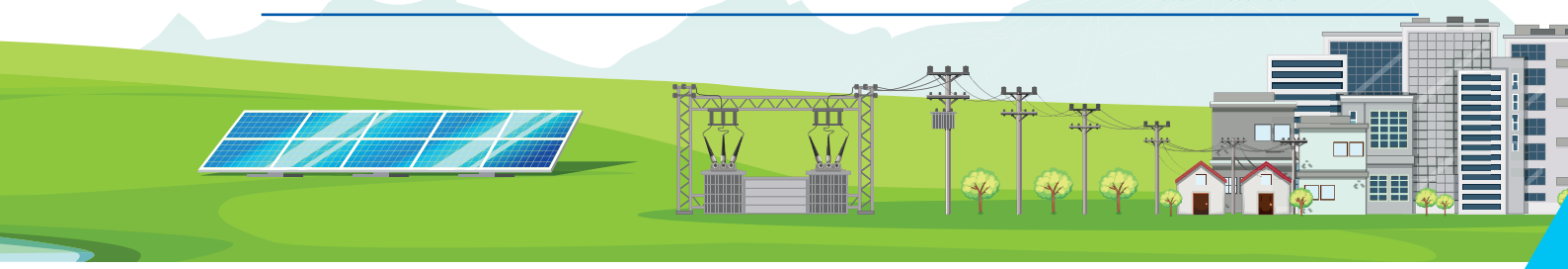
Significant transactions entered into with related parties, whether or not entered into on terms and conditions with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

Nama Pihak, Sifat hubungan, dan Jenis Transaksi Berelasi
Name of Party, Nature of Relationship, and Type of Related Transaction

Sampai dengan 31 Desember 2022, Perusahaan tidak melakukan restrukturisasi utang/modal sehingga tidak terdapat informasi terkait restrukturisasi utang/modal yang relevan untuk diungkapkan.

Until 31 December 2022, the Company did not conduct any debt/capital restructuring, therefore there is no information related to debt/capital restructuring that is relevant to be disclosed.

No	Pihak-Pihak Berelasi *Related Parties*	Sifat Hubungan *Nature of Relationship*	Jenis Transaksi *Type of Transaction*
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Giro / *Bank Account*
2	PT Bank BRI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Giro / *Bank Account*
3	PT Bank BNI (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Giro / *Bank Account*
4	PT Bank BTN (Persero) Tbk	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Piutang Usaha / *Account Receivable*
5	PT PLN (Persero)	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Piutang Usaha / *Account Receivable*
6	PT Pertamina (Persero)	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Piutang Usaha / *Account Receivable*
7	PT Sang Hyang Seri (Persero)		Piutang Usaha / *Account Receivable*
8	PT Indra Karya (Persero)		Piutang Usaha / *Account Receivable*
9	PT BUMN Hijau Lestari	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Piutang Usaha / *Account Receivable*
10	Care LPPM IPB	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Piutang Usaha / *Account Receivable*
11	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Institusi keuangan yang dikendalikan Pemerintah RI / *Financial institution controlled by The Government R. I*	Piutang Usaha / *Account Receivable*
12	Hotel Indonesia Group		Piutang Usaha / *Account Receivable*



Rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi tahun 2023 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Details of balances and transactions with related parties in 2023 and 2023 are as follows:

Keterangan / *Information*	2023		2023	
	Rp (juta) / Rp (million)	% Terhadap Jumlah Aset % To Total Assets	Rp (juta) / Rp (million)	% Terhadap Jumlah Aset % To Total Assets
Kas dan Setara Kas / *Cash and Cash Equivalents*	567.815	29,68	732.175	35,46
Piutang Usaha / *Trade Receivables*	98.950	5,17	113.718	5,50
Piutang Usaha yang Belum Difakturkan / *Unbilled Receivables*	237.031	12,39	198.613	9,62
Utang Usaha / *Accounts Payable*	14.653	0,77	34.111	1,65

Manajemen menganalisis bahwa seluruh transaksi dengan Pihak Berelasi diperlukan guna mendukung kelancaran kegiatan operasional Perusahaan yang dapat mendorong kinerja finansial pada tahun buku 2022 dan 2023.

Management analyses that all transactions with Related Parties are necessary to support the Company's smooth operational activities that can drive financial performance in the financial years 2022 and 2023.

Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berpengaruh Signifikan
Changes in Laws and Regulations that have Significant Effects

Perubahan Undang-Undang *Amendment Of Law*	Perihal *Subject*	Dampak Terhadap Perusahaan *Impact On The Company*
Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2022 / Government Regulation No 25 Year 2022	Perum Jasa Tirta II	Penambahan Wilayah Kerja

Perubahan Kebijakan Akuntansi
Changes in Accounting Policies

Perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Catatan 2 dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perum Jasa Tirta II dan Entitas Anaknya.

Changes in accounting policies are presented in Note 2 in the Notes to the Consolidated Audited Financial Statements of Perum Jasa Tirta II and Subsidiaries.



Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan usaha Perusahaan Tahun 2023
Matters that Potentially Significantly Affect the Company's Business Continuity in 2023

Sepanjang tahun 2023, Manajemen menilai bahwa Perusahaan tidak memiliki hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat dari stabilitas kinerja operasional dan keuangan setiap tahunnya.

Throughout 2023, the Management considers that the Company does not have any matters that have the potential to significantly affect the continuity of its business. This can be seen from the stability of operational and financial performance each year.

Assessment Manajemen akan Kelangsungan usaha Tahun 2023
Management Assessment of Business Continuity in 2023

Analisis terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dilakukan melalui assessment terhadap beberapa indikator, yaitu :
1. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
2. Penilaian tingkat kesehatan perusahaan berdasarkan kriteria Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
3. Hasil perhitungan Z-score model tahun 2022; dan
4. Gugatan atau tuntutan hukum yang dihadapi.

Analysis of the Company's business continuity is conducted through assessment of several indicators, namely:
1. *Financial statements issued by the Public Accounting Firm (KAP);*
2. *Assessment of the company's health level based on the criteria of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 concerning Health Level Assessment of State-Owned Enterprises;*
3. *The results of the Z-score model calculation in 2022; and*
4. *Lawsuits or lawsuits faced.*

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan assessment
Assumptions Used by Management in Conducting the Assessment

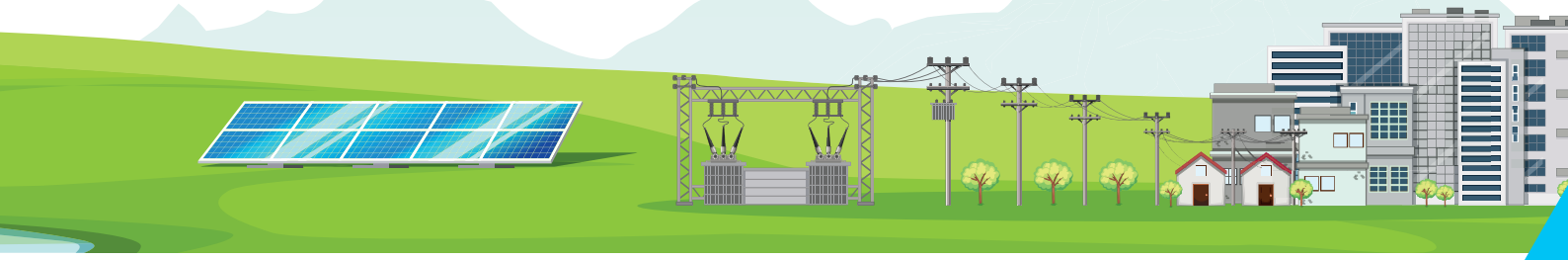
Asumsi kelangsungan usaha terutama didasarkan pada upaya internal Perusahaan dalam memperkuat kinerja operasionalnya. Uraian mengenai analisis tingkat kesehatan Perusahaan dan penilaian Key Performance Indicator (KPI) tahun 2023 untuk mendukung keberlangsungan usaha Perusahaan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

The assumption of business continuity is mainly based on the Company's internal efforts in strengthening its operational performance. A description of the analysis of the Company's health level and the assessment of Key Performance Indicator (KPI) in 2023 to support the Company's business continuity in the future is as follows.

Laporan Keuangan yang Diterbitkan KAP
Financial Statements Issued by KAP

Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material baik pada posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. KAP tersebut memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2023.

The Financial Statements issued by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan stated that the Company's financial statements have presented fairly in all material respects both on financial position, results of operations, and cash flows. The KAP gave an unqualified opinion on the Company's 2023 Financial Statements.



Tingkat Kesehatan Perusahaan
Company Health Level

Penilaian kinerja Manajemen Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 dengan hasil KPI sebesar 99,40%. Tingkat kesehatan untuk Perum Jasa Tirta II pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat (AAA) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81.

Management performance assessment of Perum Jasa Tirta II in 2023 with KPI result of 99.40%. The health level for Perum Jasa Tirta II in Financial Year 2023 is Very Healthy (AAA) in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 article 81.

No	URAIAN / Description	KPI
	Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia	53,33
	Aspek Keuangan / *Financial Aspects*	
1	*EBITDA*	5,00
2	*ROIC > WACC*	5,45
	Debt Service Ratio	
	a. Interest Bearing Debt to EBITDA	3,10
	b. Interest Bearing Debt to Invested Capital	2,04
	Aspek Operasional	
4	Biaya pengelolaan SDA	8,80
5	Kehandalan Fungsi Infrastruktur SDA	
	a. Gangguan keandalan PLTA Ir. H. Djuanda *(Sudden Outage Frequency / SdOF)*	8,60
	b. Gangguan keandalan pasok air baku PAM DKI	8,60
	Sosial	
6	Penyaluran Air Baku Irigasi dan Realisasi Luas Tanam Padi	
	a. Penyaluran Air Baku Irigasi	8,54
	b. Realisasi Luas Tanam Padi	7,19
	Inovasi Model Bisnis	9,05
1	Penguatan Bisnis	
	a. Penguatan Bisnis Entitas Anak Perusahaan	2,40
	b. Implementasi Indonesia *Water Fund (WF)*	1,65
2	Pelaksanaan rencana inbreng tahap 2	5,00
	Kepemimpinan Teknologi	16,00
1	Implementasi ERP & Integrasi GRC	
	a. Implementasi ERP sesuai dengan standardisasi pengelolaan IT	4,00
	b. Integrasi GRC Anggota holding ke platform E-GRC Danareksa	4,00
2	Pemenuhan standarisasi pengelolaan IT	8,00
	Peningkatan Investasi	11,37
1	Penyerapan Investasi	5,15
2	Assessment River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO-PB)	8,22
	Pengembangan Talenta	9,65
1	Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko (Rasio kualifikasi)	3,27
2	Transformasi HC & roadmap penyehatan dana pensiun	
	a. Pencapaian penyelesaian transformasi HC sesuai dengan roadmap 2023	2,18
	b. Penyusunan roadmap penyehatan dana pensiun	2,00
3	Talenta wanita & talenta muda	
	a. % Nominasi talenta wanita	2,20
	b. % Nominasi talenta muda < 42 tahun	0,00
	Total Skor / *Total Score*	99,40
	Tingkat Kesehatan / *Health Level*	AAA







TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance /GCG)* telah menjadi landasan yang kuat bagi Perum Jasa Tirta II untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis di masa depan. Segala keputusan strategis yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* yang merupakan komitmen kuat Perum Jasa Tirta II , bukan hanya demi kepentingan Pemilik Modal *(shareholders)* namun bagi seluruh Pemilik Modal *(stakeholders)*. Oleh karenanya Perum Jasa Tirta II selalu menjaga kepercayaan, kredibilitas serta upaya kontinyuitas terkait produk dan jasa perPerusahaan an yang mana menjadi faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perusahaan .

PJT II berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

a. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pemangku Kepentingan;
b. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
c. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para Pemilik Modal lainnya;
d. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan;
e. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan ; dan
f. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh Karyawan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemilik Modal Perusahaan.

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan staf untuk taat dan patuh pada seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di bidang perPerusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) implementation has established a solid platform for Perum Jasa Tirta II to deal with future changes in the business environment. The principles of GCG—Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness—are consistently taken into account by the Supervisory Board and the Board of Directors when making strategic decisions. GCG represents a strong commitment by Perum Jasa Tirta II to protect all owners' interests, not just those of the Capital Owners (shareholders). Capital (stakeholders). As a result, Perum Jasa Tirta II consistently upholds credibility, trust, and continuity efforts in relation to the Company's goods and services, all of which are crucial for the growth and continuation of the Company's commercial enterprise.

PJT II is dedicated to applying GCG principles in accordance with the following goals:

a. Managing and directing good relations between the Supervisory Board, Board of Directors, and all of the Company's Capital Owners;
b. Increasing accountability to stakeholders;
c. Achieve maximum growth and returns to boost the company's prosperity and realize the value of the capital owners over time without sacrificing the interests of other capital owners;
d. Support the company's internal control and development activities;
e. Improving the work culture; and
f. Making the company value-added, which includes enhancing the welfare of all company employees and raising the benefits for the company's shareholders.

GCG is implemented in the Firm's environment based on a shared commitment from all levels of management and staff to follow and comply with all applicable rules and regulations as well as generally recognized ethical standards in the industry per company.



Dalam melaksanakan implementasi GCG, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi secara terus-menerus yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya GCG, mengkomunikasikan dan menginternalisasikan berbagai kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan terkait GCG.

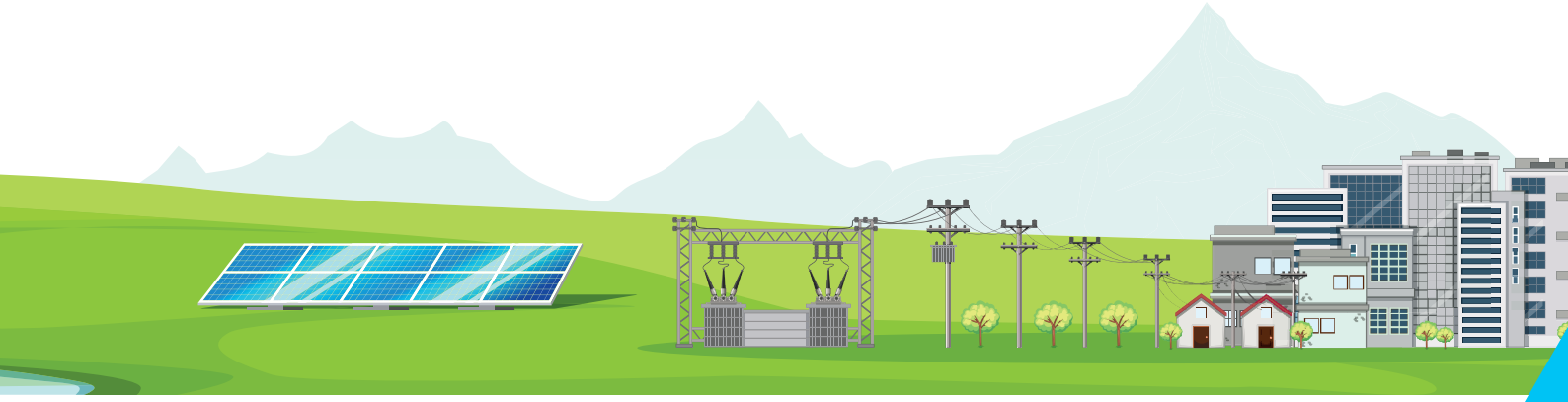
Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik GCG dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemilik Modal dengan efektif. Prinsip-prinsip GCG meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independesi dan Kewajaran.

1. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan visi dan misi yang jelas dan realistis.
2. Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perum Jasa Tirta II memiliki nilai-nilai Perusahaan yang menggambarkan sikap moral Perusahaan yang baik dalam pelaksanaan usahanya.
4. Perum Jasa Tirta II memiliki rumusan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan. Etika bisnis dan pedoman perilaku dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, sehingga membentuk budaya Perusahaan yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai Perusahaan.
5. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan antar organ Perusahaan yaitu Rapat Pembahasan Bersama dengan Pemilik Modal dan Dewan Pengawas serta Direksi.
6. Perum Jasa Tirta II memiliki pedoman tata kerja Dewan Pengawas dan Direksi dalam menjalankan peran dan tugasnya.
7. Perum Jasa Tirta II memiliki tata kelola hubungan dengan *stakeholders*.
8. Perum Jasa Tirta II dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan sebagai bagian dari dunia bisnis harus peduli dan berperan aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

In order to implement GCG, Perum Jasa Tirta II engages in ongoing socialization that tries to convey and internalize numerous policies, programs, and GCG-related activity implementation in order to help people understand how important GCG is.

To successfully protect the Capital Owners, the Company has incorporated GCG concepts and practices into the management and operation of its business. Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness are among the GCG's guiding ideals.

1. *The vision and objectives of Perum Jasa Tirta II are crystal clear and grounded in reality.*
2. *Perum Jasa Tirta II abides with all relevant laws and rules.*
3. *Perum Jasa Tirta II has core values that characterize the organization's upright conduct in conducting business.*
4. *Perum Jasa Tirta II has developed a code of conduct and corporate ethics. Continuous and consistent observance of the company's code of conduct and business ethics results in the development of a corporate culture that embodies those ideals.*
5. *The Joint Discussion Meeting with the Capital Owners, the Supervisory Board, and the Board of Directors have a governance connection with Perum Jasa Tirta II.*
6. *Perum Jasa Tirta II contains instructions for the Supervisory Board and the Board of Directors' work practices in carrying out their responsibilities.*
7. *Stakeholders and Perum Jasa Tirta II have a governance connection.*
8. *Perum Jasa Tirta II must be concerned about protecting the environment and natural resources as part of its duty as an intermediary organization and a member of the business community.*



Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Basic Application Of Corporate Governance

Perum Jasa Tirta II senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola Perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata Kelola Perusahaan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KoRPBi;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah

- PP No 25 Tahun 2022 Tentang Perum Jasa Tirta II;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara;

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

By making use of numerous pertinent laws, Perum Jasa Tirta II is constantly devoted to adopting strong corporate governance. The following laws and rules form the foundation for achieving excellent corporate governance:

- *Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2008 on Public Information Disclosure;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 1974 concerning Irrigation;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 Concerning the Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 Concerning the Eradication of the Crime of KoRPBi;*
- *Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.*

Government Regulation

- *Government Regulation No 25 Year 2022 on Perum Jasa Tirta II*
- *Governmental Regulation Number 7 of 2010 concerning Perum Jasa Tirta II.*

Regulation of the Minister of BUMN

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

- *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-1/MBU/03/2023 Concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises.*
- *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.*



- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Lainnya

- Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor: KBS-2/DIR/06/2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Perum Jasa Tirta II
- Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang diterbitkan oleh Komite National Kebijakan *Governance*;
- Pedoman Governansi Korporat dalam Badan Usaha Milik Negara OECD.

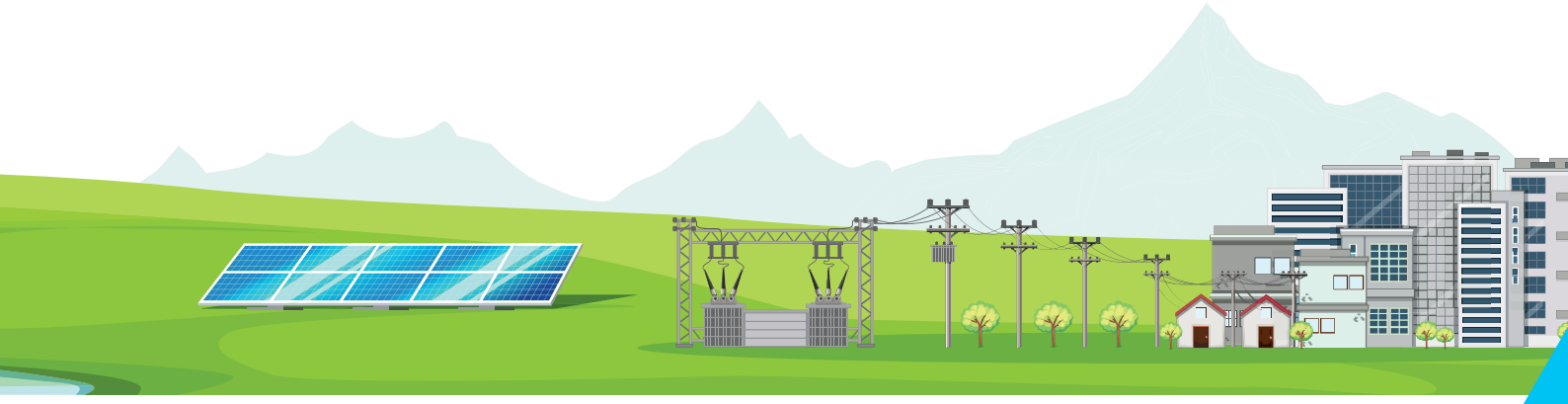
Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan GCG dalam mewujudkan visi dan misinya, serta mewujudkan pertumbuhan dan akselerasi bisnis diseluruh segmen untuk menjadi Leading Regional Perusahaan di masa mendatang. Manajemen Perum Jasa Tirta II selalu memberikan dorongan agar semua karyawan konsisten dalam melaksanakan prinsip GCG untuk setiap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab untuk pencapaian tujuan Perusahaan.

- *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.*

Other Regulations

- *Joint Decree of the Board of Directors and Supervisory Board Number: KBS-2/DIR/06/2023 dated 29 June 2023 on Good Corporate Governance Guidelines of Perum Jasa Tirta II*
- *General Guidelines for Indonesian Corporate Governance issued by the National Governance Policy Committee;*
- *Guidelines for Corporate Governance in OECD State-Owned Enterprises.*

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG in realizing its vision and mission, as well as realizing business growth and acceleration in all segments to become the Company's Leading Regional in the future. The management of Perum Jasa Tirta II always provides encouragement so that all employees are consistent in implementing GCG principles for each task and responsibility implementation to achieve the Company's goals.



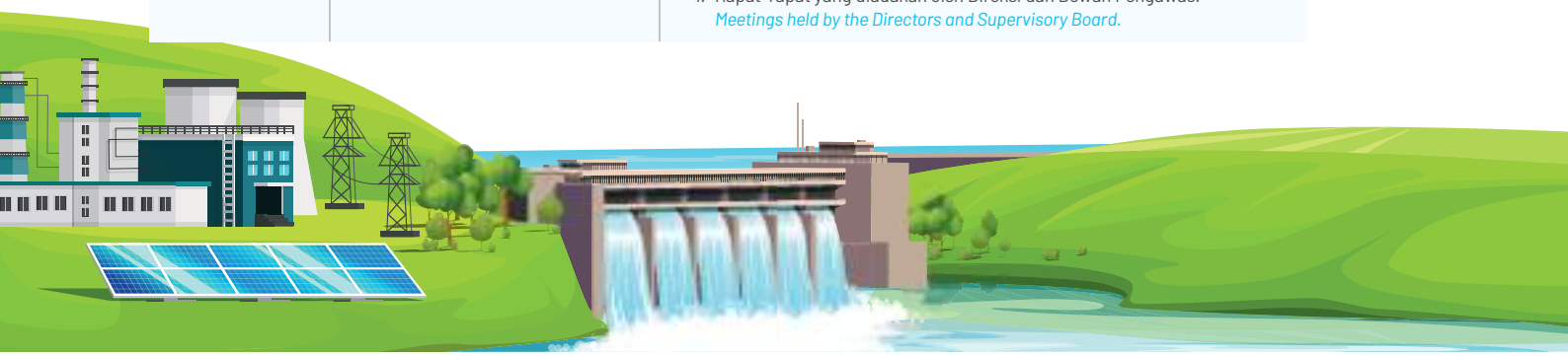
Prinsip-Prinsip Utama Penerapan GCG

Main Principles of GCG Implementation

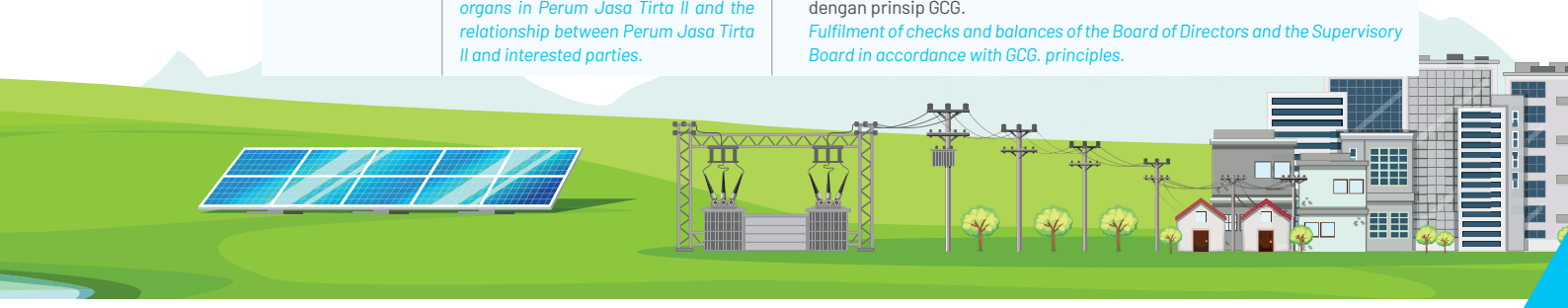
Perum Jasa Tirta menilai pentingnya penerapan dan pelaksanaan best practices GCG dengan berlandaskan pada kepatuhan dan standar yang berlaku. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara berprinsip pada prinsip-prinsip dasar, yaitu Transparansi *(Transparency)*, Akuntabilitas *(Accountability)*, Pertanggungjawaban *(Responsibility)*, Kemandirian *(Independency)*, Kewajaran (Fairness), dan Sikap Kepedulian *(Social Awareness)* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mulai dari Dewan Pengawas dan Direksi sampai pada seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II.

Perum Jasa Tirta assesses the importance of implementing and executing GCG best practices based on compliance and applicable standards. Fulfilling the provisions in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises is based on the basic principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness, and Social Awareness in every business activity at all levels or levels of the organization starting from the Supervisory Board and Board of Directors to all employees of Perum Jasa Tirta II.

PRINSIP GCG *GCG Principles*	DEFINISI *Definition*	BENTUK IMPLEMENTASI *Implementation*
Transparansi *Transparency*	Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, Perusahaan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan mengambil inisiatif mengungkapkan tidak hanya masalah yang diatur dalam regulasi, tetap juga hal penting lainnya dalam pengambilan keputusan oleh Pemilik Modal dan pemangku kepentingan lainnya. *To maintain objectivity in conducting business, the Company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The company takes the initiative to disclose not only the problems required by laws and regulations, but also matters that are important for decision making by Capital Owners and other stakeholders.*	1. Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II memuat informasi penting dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II, antara lain tetapi tidak terbatas kepada: *Perum Jasa Tirta II Annual Report contains important information in the management of Perum Jasa Tirta II, including but not limited to:* a. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Usaha, dan Strategi Perum Jasa Tirta II; *Vision, Mission, Objectives, Business Objectives, and Strategy of Perum Jasa Tirta II;* b. Kondisi keuangan hasil audit oleh eksternal auditor; *Financial condition of audit results by external auditors;* c. Susunan pengurus (Direksi dan Dewan Pengawas); *Management composition (Board of Directors and Supervisory Board);* d. Informasi Pemilik Modal Pengendali; *Information on Controlling Capital Owners.* e. Kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Pengawas beserta anggota keluarganya dan Perum Jasa Tirta II lainnya memiliki benturan kepentingan; *Share ownership by members of the Board of Directors and the Supervisory Board and their family members and Perum Jasa Tirta II who have a conflict of interest;* f. Sistem manajemen risiko; *Risk Managemet System* g. Sistem pengawasan dan pengendalian internal; *Internal supervision and control system;* h. Sistem dan pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya; *System and implementation of GCG and the level of compliance;* i. Kejadian-kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi; *Important events that can affect the condition;* j. Biodata anggota Direksi dan Dewan Pengawas; *Profile of members of the Board of Directors and Supervisory Board;* k. Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; *Remuneration of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board;* l. Rapat-rapat yang diadakan oleh Direksi dan Dewan Pengawas. *Meetings held by the Directors and Supervisory Board.*



PRINSIP GCG *GCG Principles*	DEFINISI *Definition*	BENTUK IMPLEMENTASI *Implementation*
		2. Informasi penting kepada stakeholders, antara lain: *Important information to stakeholders, including:* m. Laporan triwulanan yang berisi laporan rutin manajemen, disampaikan kepada Pemilik Modal; *Quarterly reports containing routine management reports, submitted to the Capital Owners;* n. Prosedur pengadaan dan hubungan dengan rekanan; *Procurement procedures and relations with partners;* o. Ketaatan dalam pembayaran pajak; *Compliance with tax payments;* p. Mekanisme manajemen SDM, sesuai dengan PKB. *HR management mechanism, in accordance with PKB.*
Kewajaran *Fairness*	Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perum Jasa Tirta II menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and applicable laws and regulations. Perum Jasa Tirta II guarantees that every party concerned has fair treatment in accordance with the applicable laws and regulations.*	1. Pemilik Modal berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RPB sesuai dengan ketentuan yang berlaku; *The Capital Owner has the right to attend and vote in the RPB in accordance with the applicable provisions;* 2. Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan; *Perum Jasa Tirta II will treat all partners fairly and transparently;* 3. Perum Jasa Tirta II akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap karyawan sesuai dengan kemampuan Perum Jasa Tirta II dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Perum Jasa Tirta II will provide good and safe working conditions for each employee in accordance with Perum Jasa Tirta II capabilities and applicable laws and regulations.* 4 Perum Jasa Tirta II akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal usul, jenis kelamin, atau hal- hal yang tidak berkaitan dengan kinerja. *Perum Jasa Tirta II will treat every employee fairly and be free from bias due to differences in ethnicity, religion, origin, gender or other matters that have no relation to performance.*
Akuntabilitas *Accountability*	Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dan seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Perum Jasa Tirta II meyakini bahwa akuntabilitas berhubungan dengan keberadaan sistem yang mengendalikan hubungan antara individu dan/atau organ yang ada di Perusahaan maupun hubungan antara Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan. *Accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Organ and the entire ranks of Perum Jasa Tirta II so that the management of Perum Jasa Tirta II is carried out effectively. Perum Jasa Tirta II believes that accountability is related to the existence of a system that controls relations between individuals and or organs in Perum Jasa Tirta II and the relationship between Perum Jasa Tirta II and interested parties.*	1. Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Perum Jasa Tirta II (Direksi, Dewan Pengawas, SPI, Sekper, dan organ struktural lainnya) dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan *(Corporate Values)*, dan strategi Perum Jasa Tirta II; *Sets out the details of the duties and responsibilities of each organ of Perum Jasa Tirta II (Directors, Supervisory Board, SPI, CORSEC and other Structural Organ) and all employees clearly and in harmony with Perum's vision, mission, values Jasa Tirta II (corporate values), and thestrategy of Perum Jasa Tirta II;* 2. Berupaya agar semua organ Perusahaan dan seluruh karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG; *Strive to ensure that all organs of the Company and all employees have the ability in accordance with their duties, responsibilities and roles in the implementation of GCG;* 3. Menciptakan sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Perusahaan; *Creates an effective internal control system in managing the Company.* 4. Menyelenggarakan RPB untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, persetujuan laporan tahunan, penetapan pembagian keuntungan dan dividen yang dibayarkan; *Carrying out RPB to ratify long-term plans, annual budget plans, approval of annual reports, determination of profit sharing and dividends paid;* 5. Pemenuhan check and balances Direksi dan Dewan Pengawas yang sesuai dengan prinsip GCG. *Fulfilment of checks and balances of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with GCG. principles.*



Prinsip-Prinsip Utama Penerapan GCG
Main Principles of GCG Implementation

PRINSIP GCG *GCG Principles*	DEFINISI *Definition*	BENTUK IMPLEMENTASI *Implementation*
Pertanggung jawaban *Responsibility*	Kesesuaian di dalam pengelolaan Perum Jasa Tirta II dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Perum Jasa Tirta II bertanggungjawab untuk mematuhi hukum dan perundang- undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha yang tidak sehat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta aspek lainnya. *Compliance in the management of Perum Jasa Tirta II with applicable laws and regulations and sound corporate principles. Perum Jasa Tirta II is responsible for complying with applicable laws and regulations, including provisions relating to employment, taxation, unfair business competition, occupational safety and health, and other aspects.*	1. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik; *Carry out tax obligations properly;* 2. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan; *Comply with the provisions of the laws on occupational safety and health and the environment;* 3. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi; *Carry out the obligation of fostering the surrounding community, for example by participating in fostering small businesses and cooperatives.* 4. Melaksanakan UU Tenaga Kerja, UU Jasa Konstruksi, pedoman GCG, dan regulasi lainnya; *Implement the Manpower Act, Construction Services Law, GCG guidelines, and other regulations;* 5. Community Development (0,3% dari anggaran) sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat tidak mampu. *Community Development (0.3% of the budget) as a form of concern for the community in improving the welfare of the lives of disadvantaged people.*
Kemandirian *Independence*	Pengelolaan Perusahaan yang profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Implementasi prinsip kemandirian secara optimal mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas seluruh organ Perusahaan dan pengelolaan terbaik bagi Perum Jasa Tirta II. *Professional company management without conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with applicable laws and regulations and sound corporate principles. The optimal implementation of the principle of independence is able to optimize the implementation of the duties of all Company organs and the best management for Perum Jasa Tirta II.*	1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab masing-masing organ dan tidak saling mendominasi satu sama lain; *Mutual respect for the rights, obligations, duties, authority, and responsibilities of each organ and not dominating each other;* 2. Tidak mencampuri pengurusan Perusahaan selain organ yang berkepentingan; *Do not interfere in the management of the Company other than organs of interest;* 3. Selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II. *Always avoid conflicts of interest in making decisions made by the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II.*
SikapKepedulian *Social Awareness*	Rasa peduli kepada masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan kemanusiaan dan sosial. / *A sense of caring for the community and the environment through humanitarian and social activities.*	Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibility)* setiap tahunnya dengan membidik isu-isu lingkungan dan sosial yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. *The implementation of Corporate Social Responsibility activities every year by targeting environmental and social issues that are relevant to the needs of stakeholders.*





Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perum Jasa Tirta II

Structure and Governance Mechanism Of Perum Jasa Tirta II

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, Organ Perusahaan terdiri dari Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan *(two tier system)*, yaitu Dewan Pengawas dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Based on the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2003 concerning BUMN, the Company Organs consist of Capital Owners, Supervisory Board and Board of Directors. The management system adopts a two-tier system, namely the Supervisory Board and the Board of Directors, which have clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in the articles of association and laws and regulations.

Perum Jasa Tirta II telah menetapkan Road Map GCG tahun 2010-2017 sebagai *grand strategy* dan *millestone* implementasi GCG sampai tahun 2023 menuju tata kelola Perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan. Tahapan *Road Map GCG* Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

The 2010-2017 GCG Road Map, designed by Perum Jasa Tirta II, serves as the overarching strategy and cornerstone for GCG implementation up until 2018 in the direction of sustainable corporate governance by integrating elements of compliance, internal control, risk management, and CSR. The following are the stages of the Perum Jasa Tirta II GCG Road Map:



Perum Jasa Tirta II merancang dan terus menyempurnakan model yang selaras serta saling melengkapi antara struktur GCG, kebijakan *(soft structure)* dan mekanisme implementasi GCG Perusahaan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung dan memenuhi berbagai aspek khususnya yang terkait dengan kepatuhan, pencapaian kinerja dan tanggung jawab kepada lingkungan serta masyarakat.

Models that align and complement GCG structure, policy (soft structure), and GCG execution method Company were created and refined by Perum Jasa Tirta II. This is anticipated to be able to support and address a variety of needs, including those linked to compliance, performance attainment, and social and environmental responsibility.



Struktur Organ Perum Jasa Tirta II

Organs Structure Of Perum Jasa Tirta II

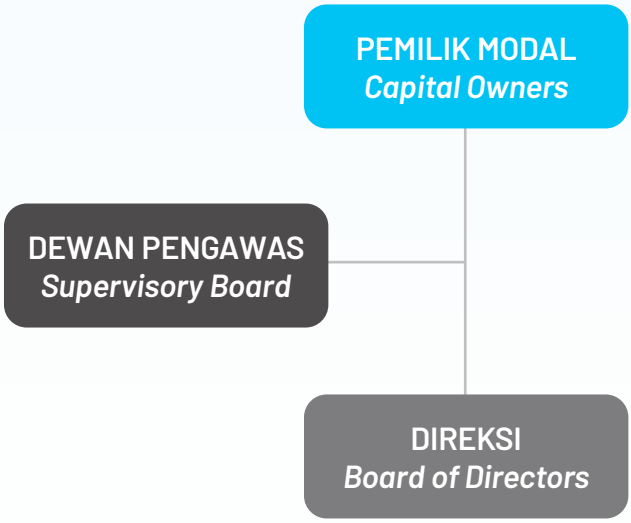
Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di Perum Jasa Tirta II berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini dimulai dari puncak kepengurusan Perum Jasa Tirta II yang dilakukan oleh Dewan Pengawas dan Direksi yang independen dan profesional.

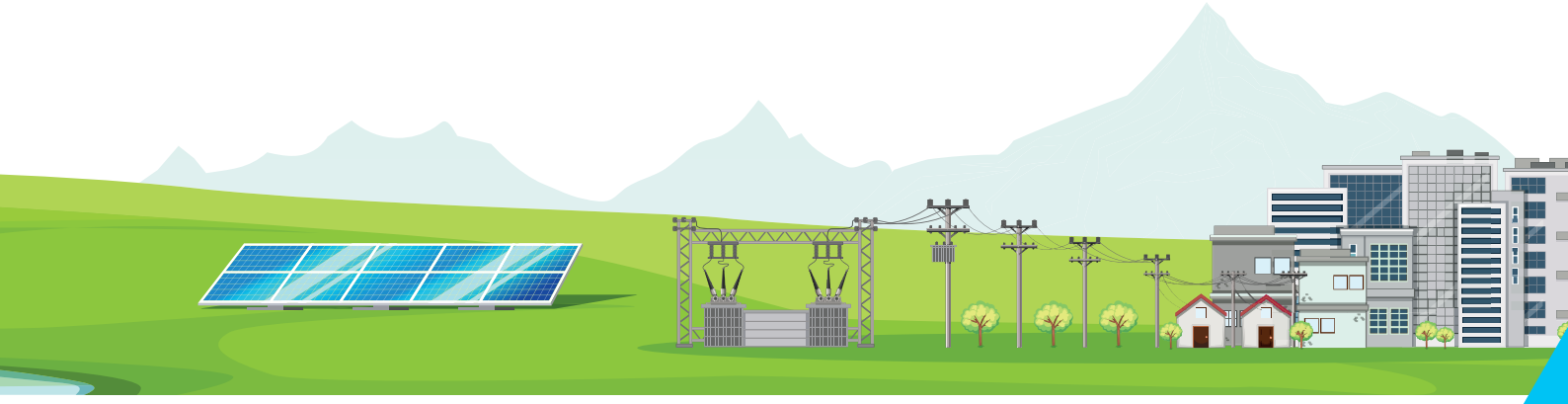
Secara umum, kegiatan Perusahaan dilakukan oleh Direksi. Dewan Pengawas mewakili pemilik modal mengkaji kebijakan-kebijakan dan melaksanakan pengawasan serta memberikan saran terhadap pengelolaan Perusahaan, sedangkan Direksi memimpin pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan pengelolaan sehari-hari.

All levels of management and staff of Perum Jasa Tirta II have a shared commitment to uphold and uphold all applicable rules and regulations, which serves as the foundation for the execution of good corporate governance. This began during the height of Perum Jasa Tirta II's management, which was carried out by an impartial and competent Supervisory Board and Board of Directors.

In general, the Company's activities are carried out by the Board of Directors. The Supervisory Board, representing the owners of capital, reviews policies and carries out supervision and provides advice on the management of the Company, while the Board of Directors leads the implementation of policies, procedures, and day-to-day management.

Struktur Organ Utama Perusahaan
Company Main Organ Structure





Kebijakan Tata Kelola Perum Jasa Tirta II

Perum Jasa Tirta II Governance Policy

Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II has developed and implemented operational policies for all work units in accordance with corporate governance principles in order to improve the quality and scope of sustainable governance implementation.

Kebijakan Tata Kelola

Penerapan GCG Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perPerusahaan an. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain:

- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)*;
- *Charter* Dewan Pengawas
- *Charter* Direksi
- *Charter* Komite Audit
- *Charter* Komite Pemantau Resiko
- *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
- *Charter* Internal Audit
- *Code of Conduct*
- Kebijakan dan SOP Lainnya

Policy on Governance

Perum Jasa Tirta II is carried out optimally by strengthening various GCG policies and manuals to achieve best practices, reliable systems, and procedures in accordance with company business developments and regulations. Perum Jasa Tirta II supplements GCG implementation with various policies and Standard Operating Procedures (SOP), including:

- *Preparation of Good Corporate Governance Guidelines;*
- *Supervisory Board Charter*
- *Board of Directors Charter*
- *Audit Committee Charter*
- *Risk Monitoring Committee Charter*
- *Charter of the Remuneration and Nomination Committee*
- *Charter of the Director in Charge of Compliance Function and Compliance Work Unit with the Supervisory Board*
- *Charter of Internal Audit*
- *Code of Conduct*
- *Other Policies and SOPs*

Roadmap Tata Kelola Perusahaan

The Corporate Governance Roadmap

Roadmap Tata Kelola Perusahaan Perum Jasa Tirta II merupakan grand strategy dan millstone implementasi GCG sampai tahun 2023 menuju tata kelola Perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko dan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II is a grand strategy and cornerstone of GCG implementation until 2023 that integrates aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The following are the stages of Perum Jasa Tirta II's Corporate Governance Roadmap:



Soft Structure dan Kelengkapan Kebijakan GCG

Penerapan GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, sistem dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai pedoman dan *Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain:

- Pedoman Tata Kelola Perusahaan
- *Board Manual*
- Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku
- Pedoman Manajemen Risiko
- SPI Charter
- Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *(Whistleblowing System)*
- Pedoman Gratifikasi
- Pedoman Benturan Kepentingan
- Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi
- Pedoman Pengendalian Intern
- Komite Audit Charter

GCG Policies' Soft Structure and Completeness

The optimal implementation of GCG in Perum Jasa Tirta II is accomplished by strengthening various GCG policies and manuals in order to achieve best practices, dependable systems, and procedures in accordance with business developments and company regulations.

Perum Jasa Tirta II complements the implementation of GCG with various guidelines and Standard Operating Procedures (SOP), among others:

- *Code of Corporate Governance*
- *Board Manual*
- *Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct*
- *Risk Management Guidelines*
- *SPI Charter*
- *Guidelines for Management of Complaints of Violations (Whistleblowing System)*
- *Guidelines for Gratification*
- *Guidelines for Conflicts of Interest*
- *Guidelines for Information Technology Governance*
- *Internal Control Guidelines*
- *Audit Committee Charter*

Tujuan Penerapan GCG

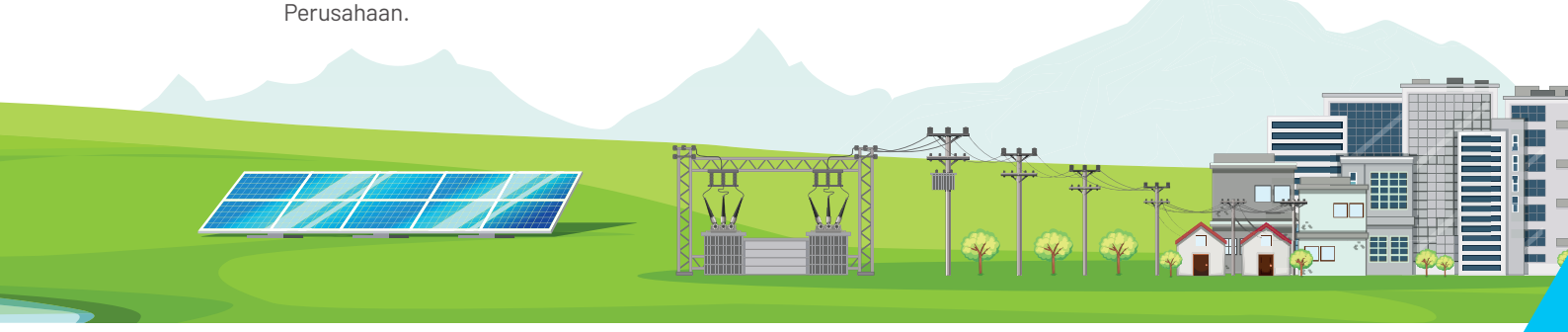
Targets Of GCG Implementation

Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencapai pertumbuhan dan imbal hasil yang maksimal sehingga meningkatkan kemakmuran Perusahaan, serta mewujudkan nilai Pemilik Modal dalam jangka panjang tanpa mengabaikan kepentingan para Pemilik Modal lainnya;
2. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan yang baik antara Pemilik Modal, Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh Pemilik Modal Perusahaan ;
3. Mendukung aktivitas pengendalian internal dan pengembangan Perusahaan ;
4. Mengelola sumber daya secara lebih amanah;
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan;
6. Memperbaiki budaya kerja Perusahaan ; dan
7. Menjadikan Perusahaan bernilai tambah, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh insan Perusahaan berikut peningkatan kemanfaatan bagi Pemilik Modal Perusahaan.

Perum Jasa Tirta II is committed to implementing GCG principles in accordance with the following goals:

1. *To achieve maximum growth and returns in order to increase the Company's prosperity and to realize the long-term value of the Capital Owners without sacrificing the interests of other Capital Owners;*
2. *Managing and directing good relations among Capital Owners, the Supervisory Board, the Board of Directors, and all Capital Owners of the Company;*
3. *Assisting with internal control and development activities at the company;*
4. *Improved resource management;*
5. *Increase stakeholder accountability;*
6. *Improving the Company's work culture; and*
7. *Making the Company value-added, namely increasing the welfare of all Company personnel along with increasing benefits for the Company's Capital Owners. Company Capital Owners.*





Governance Structure

Governance structure mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola Perusahaan demi menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Perum Jasa Tirta II melengkapi struktur organisasinya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, mulai dari level tertinggi sampai level terendah. Perum Jasa Tirta II memenuhi jumlah Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Selain itu, Perum Jasa Tirta II juga membentuk Satuan Pengawasan Intern dan Pengendalian Kinerja Sistem Manajemen. Struktur organisasi yang dimiliki didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, antara lain ketersediaan sarana Informasi dan Teknologi (IT) hingga aturan yang mengatur kegiatan operasional Perum Jasa Tirta II seperti kebijakan, SOP, surat edaran internal harus dipatuhi semua organ Perusahaan.

Governance Process

Governance process merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan organ Perusahaan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Adapun proses yang dilakukan dapat berupa rapat koordinasi Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, penerapan sistem *reward* dan *punishment* secara konsisten, serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* disosialisasikan kepada seluruh karyawan dengan tujuan agar seluruh jajaran Perum Jasa Tirta II dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan tugas. Sedangkan proses evaluasi dilakukan melalui proses penilaian sendiri *(Self Assessment)* atas pelaksanaan GCG Perum Jasa Tirta II setiap semester.

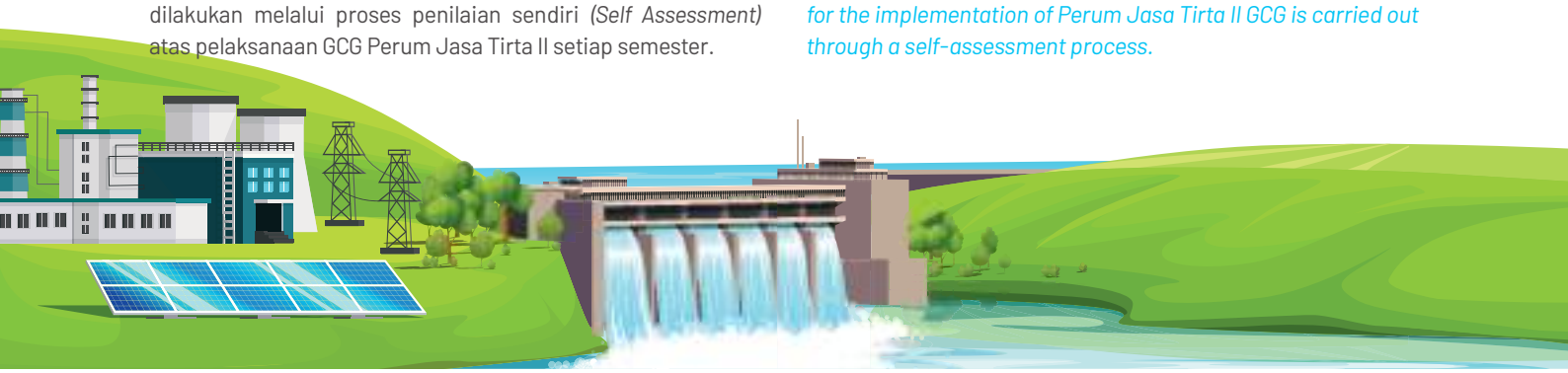
Structure of Governance

Governance structure refers to the structure and infrastructure of corporate governance used to produce results that meet stakeholder expectations. Perum Jasa Tirta II has completed its organizational structure in accordance with the provisions and requires support for its operational activities, beginning at the highest level and working down. The number of Supervisory Boards at Perum Jasa Tirta II is in accordance with the applicable laws and regulations. Furthermore, Perum Jasa Tirta II established an Internal Control Unit as well as Management System Performance Control. Its organizational structure is supported by adequate facilities and infrastructure, including the availability of Information and Technology (IT) facilities to the rules governing Perum Jasa Tirta II's operational activities such as policies, SOPs, internal circulars that must be followed by all Company organs.

Process of Governance

The governance process is a method or mechanism used by the organs of the company to carry out their functions and duties. The process can take the form of coordinating meetings of the Supervisory Board, Board of Directors, and Committees, as well as the consistent application of reward and punishment systems and policies to prevent fraud.

The implementation of the GCG principles contained in the Good Corporate Governance Guidelines is disseminated to all employees with the goal of understanding and implementing GCG principles in carrying out their duties at all levels of Perum Jasa Tirta II. Meanwhile, every semester, the evaluation process for the implementation of Perum Jasa Tirta II GCG is carried out through a self-assessment process.

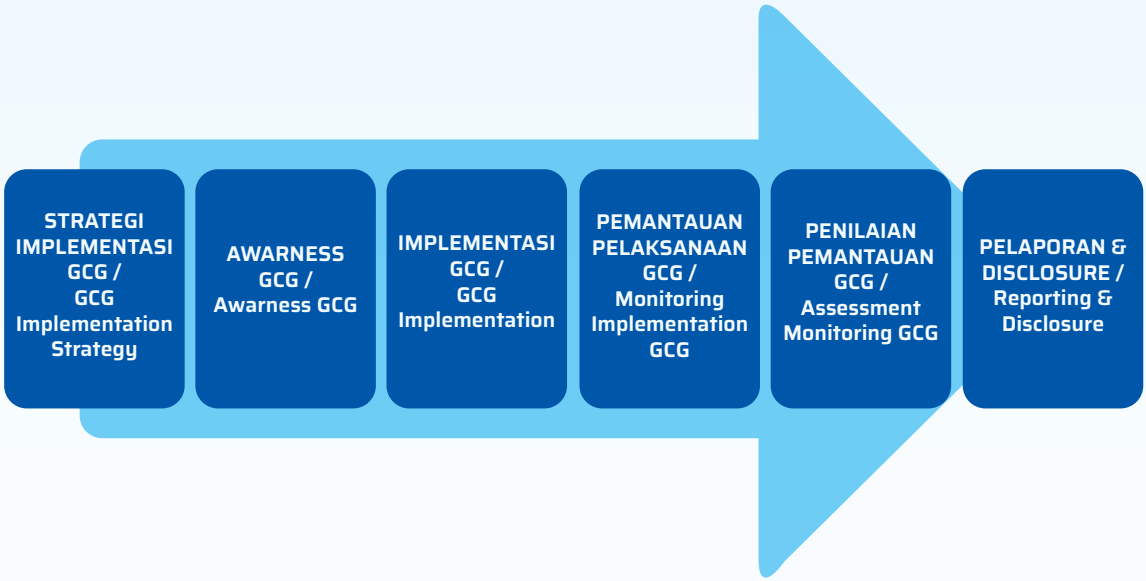


Governance Outcome

Governance outcome merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan dan infrastruktur tata kelola Perusahaan . Dalam menilai dan mengevaluasi *governance outcome*, Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara internal melalui *self assessment* dan secara eksternal oleh pihak independen. Merangkum ketiga kerangka utama tersebut, penerapan GCG kemudian diimplementasikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Governance Outcome

The governance outcome is the result of the process of implementing GCG principles, which is supported by corporate governance adequacy and infrastructure. The Company assesses the implementation of GCG internally through self-assessment and externally by independent parties when assessing and evaluating governance outcomes. After summarizing the three main frameworks, GCG implementation proceeds through the following stages:



Strategi Implementasi GCG

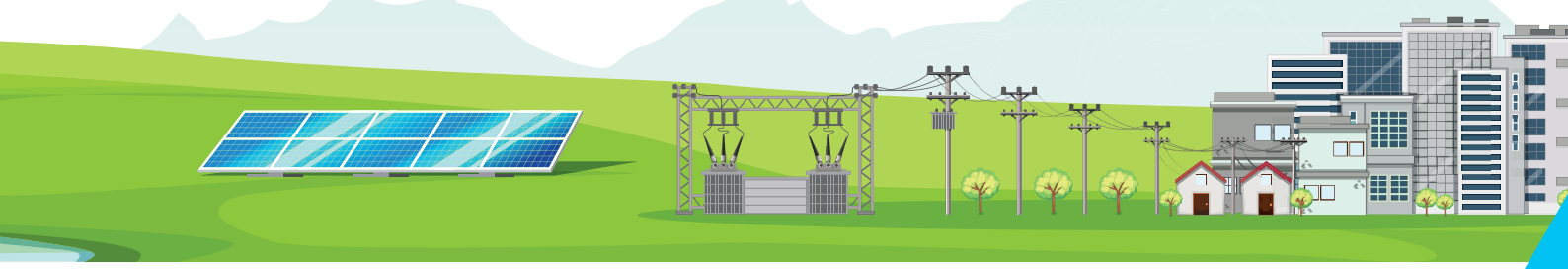
Strategi implementasi GCG dirancang agar mampu mendorong penerapan GCG Perusahaan yang konsisten dan efektif serta sesuai dengan *business plan* maupun *strategic plan* yang dimiliki Perusahaan. Strategi implementasi GCG Perum Jasa Tirta II selama tahun 2017 sampai 2023 dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak pemegang saham;
2. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas, Direksi dan Komite;
3. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
4. Efektivitas penanganan pengaduan konsumen ;
5. Peningkatan fungsi kepatuhan;
6. Peningkatan Teknologi Informasi yang memadai.

Strategy for GCG Implementation

The GCG implementation strategy is intended to encourage the consistent and effective implementation of the Company's GCG in accordance with the business plan and strategic plan owned by the Company. The following initiatives were implemented as part of Perum's GCG implementation strategy Jasa Tirta II from 2017 to 2023.

1. *Safeguarding shareholder rights;*
2. *Optimizing the roles and functions of the Supervisory Board, Board of Directors, and Committees;*
3. *Enhancements to risk management and internal control functions;*
4. *Increased efficiency in handling consumer complaints;*
5. *Improved compliance function;*
6. *Adequate information technology advancement.*



GCG Awareness

Tahapan *Awareness GCG* bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi GCG dalam proses bisnis Perum Jasa Tirta II sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bersama insan Perum Jasa Tirta II dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang berkelanjutan. Kegiatan *awareness* GCG dilakukan mulai dari karyawan baru melalui Pendidikan Dasar PerPerusahaan an sampai dengan dilaksanakannya GCG *refreshment* bagi karyawan. Selain itu, Perum Jasa Tirta II melakukan sosialisasi GCG melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam aktivitas sosialisasi GCG. Pelaksanaan awareness GCG tersebut didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang diperlukan dalam kegiatan *assessment* GCG maupun penyusunan Laporan Tahunan *(Annual Report)*.

Implementasi GCG

Implementasi GCG secara umum diformulasikan dalam bentuk revitalisasi proses bisnis, serta kegiatan lain yang diwujudkan dalam beberapa aktivitas, antara lain:

1. Menata struktur organisasi yang sejalan dengan praktek terbaik dalam tata kelola Perusahaan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan;
2. Menyusun dan menyempurnakan berbagai kebijakan dan prosedur pengelolaan Perusahaan, mencakup bidang dana, bidang kredit dan pengendalian internal;
3. Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi *Self Assessment* GCG dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi *Self Assessment* sebelumnya; dan
4. Menciptakan dan membangun iklim budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab, seperti menyusun dan meng-*update* secara berkala Surat Pernyataan Independensi Direksi dan Dewan Pengawas , serta mengkoordinasikan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan *(Code of Conduct)*. Disamping itu Perum Jasa Tirta II telah merancang kebijakan sistem pengendalian kecurangan, termasuk di dalamnya sistem perlindungan terhadap pelaporan pelanggaran.

GCG Awareness

The GCG Awareness stage aims to introduce and explain the importance of GCG implementation in Perum Jasa Tirta II's business processes in order to raise awareness among Perum Jasa Tirta II personnel about the importance of implementing sustainable corporate governance. GCG awareness activities are carried out beginning with new employees and progressing to the implementation of GCG refreshment for employees through the Company's Basic Education. Furthermore, Perum Jasa Tirta II disseminates GCG through various print and electronic media and coordinates with parties interested in GCG socialization activities. The implementation of GCG awareness is documented in the form of a formal report as evidence for GCG assessment activities and the Annual Report (Annual Report).

Implementation of GCG

GCG implementation is generally formulated in the form of revitalizing business processes, as well as other activities manifested in several activities, such as:

1. *Organizing an organizational structure that is in line with best practices in corporate governance to improve the Company's performance;*
2. *Developing and improving various policies and procedures for the Company's management, covering the areas of funds, credit, and internal control;*
3. *Implement the GCG Self Assessment recommendations and evaluate the implementation of the previous Self Assessment recommendations; and*
4. *Creating and maintaining an ethical and responsible work culture climate, such as compiling and updating the Statement of Independence of the Board of Directors and the Supervisory Board, and coordinating the signing of the Statement of Compliance with the Code of Conduct. Furthermore, Perum Jasa Tirta II has created a fraud control system policy, which includes a reporting violation protection system.*



Monitoring Implementasi GCG

Dewan Pengawas secara aktif melakukan pengawasan atas efektivitas implementasi GCG yang dilaksanakan oleh Direksi dengan dibantu Komite Audit. Selain itu, Direksi secara terus-menerus memastikan dan memonitor implementasi GCG berjalan sesuai dengan strategi yang ditetapkan, mulai dari tahapan *awareness* sampai dengan pelaporan. Proses *monitoring* atas implementasi tersebut dilakukan guna memastikan keberhasilan pelaksanaannya dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, pelaksanaan *monitoring* GCG ini didokumentasikan dalam bentuk laporan formal sebagai bukti yang nantinya akan diperlukan dalam kegiatan *assessment* GCG maupun penyusunan *Annual Report*.

Assessment Monitoring GCG

Dalam Upaya Menjaga dan Meningkatkan Kualitas Penerapan GCG, Perum Jasa Tirta II Secara Berkala Melakukan Penilaian Sendiri *(Self Assessment)* Untuk Mengukur Pelaksanaan GCG Yang Mendasar Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Perusahaan Umum.

Pelaporan dan *Disclosure*

Laporan Implementasi GCG Perusahaan merujuk pada ketentuan, pelaksanaan kegiatan GCG Perum Jasa Tirta II selama 1 (satu) tahun juga terdapat dalam Laporan Tahunan, dengan cakupan informasi GCG sesuai dengan standar pengungkapan informasi.

GCG Implementation Monitoring

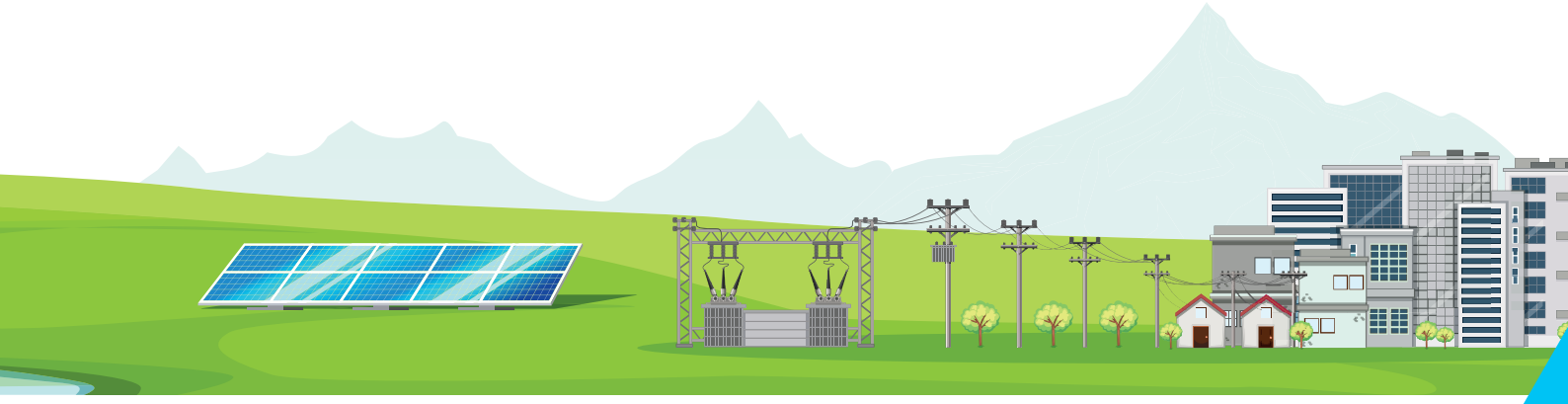
The Supervisory Board actively monitors the effectiveness of GCG implementation by the Board of Directors, with assistance from the Audit Committee. Furthermore, the Board of Directors continuously ensures and monitors GCG implementation in accordance with the established strategy, from awareness to reporting. The implementation monitoring process is carried out to ensure the success of its implementation by coordinating with interested parties. Furthermore, GCG monitoring implementation is documented in the form of a formal report as evidence that will later be required in GCG assessment activities and the preparation of the Annual Report.

GCG Monitoring Evaluation

Perum Jasa Tirta II Conducts Periodic Self-Assessment to Measure Basic GCG Implementation Regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies in an Effort to Maintain and Improve the Quality of GCG Implementation.

Disclosure and Reporting

The GCG Implementation Report of the Company refers to the provisions, the implementation of GCG activities of Perum Jasa Tirta II for 1 (one) year is also contained in the Annual Report, with the scope of GCG information in accordance with information disclosure standards.



Penilaian Penerapan GCG
GCG Implementation Assessment

Sebagai bagian dari tujuan penerapan GCG yang berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II melakukan mekanisme penilaian penerapan GCG guna menilai kualitas penerapan GCG, memperoleh rekomendasi perbaikan kinerja dan implementasi di masa mendatang, serta memelihara kredibilitas dan akuntabilitas Perusahaan di mata Pemilik Modal dan pemangku kepentingan.

Perum Jasa Tirta II conducts a GCG implementation assessment mechanism to assess the quality of GCG implementation, obtain recommendations for future performance improvement and implementation, and maintain the Company's credibility and accountability in the eyes of Capital Owners and stakeholders.

Penilaian *(Assessment)* GCG dilakukan setiap dua tahun oleh konsultan independen dengan mengacu kepada kriteria dalam Keputusan Sekretaris Kementerian Negara BUMN No. SK-16/S-MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola.

An independent consultant conducts GCG Assessment every two years in accordance with the criteria in the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK16/S-MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Governance Implementation.

Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada BUMN. Selain melakukan penilaian GCG berlandaskan kriteria tersebut, Perusahaan juga mempertimbangkan capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dan *Key Performance Indikator (KPI)* dalam menilai kualitas dan keberhasilan implementasi selama tahun buku.

BUMN has a good company (good corporate governance). In addition to conducting GCG assessments based on these criteria, the Company evaluates the quality and success of implementation during the fiscal year based on the accomplishments of the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) and Key Performance Indicators (KPI).

KPI / *KPI*

TAHUN / *Year*	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Target / *Target*	-	100	100	100	100	100
Realisasi/ *Realization*	-	100,96	83,6013	80,33	86,85	85,94

Penilaian GCG berdasarkan kriteria yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S. MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG pada BUMN terdiri dari 6 (enam) Faktor/Aspek Penerapan GCG yang meliputi:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata
2. Pemilik Modal dan RPB/Pemilik Modal;
3. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
6. Aspek Lainnya

GCG assessment based on regulated criteria in the Secretary of the Ministry BUMN Number SK-16 / S. MBU/ 2012 Decree on Indicators/Assessment and Evaluation of GCG implementation in SOEs consists of 6 (six) factors/ aspects of GCG implementation, which are as follows:

1. *Commitment to Governance Implementation*
2. *Capital Owner and GMS/Capital Owner;*
3. *Board of Trustees/Board of Directors;*
4. *Board of Directors;*
5. *Information Disclosure and Transparency; and*
6. *Other Factors*



Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian kinerja Manajemen Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 dengan hasil KPI sebesar 99,40%. Tingkat kesehatan untuk Perum Jasa Tirta II pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat (AAA) dari Perusahaan Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

Company Health Level

Management performance assessment of Perum Jasa Tirta II in 2023 with KPI result of 99.40%. The health level for Perum Jasa Tirta II in Financial Year 2023 is Very Healthy (AAA) from the Rating Company PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).

No	URAIAN / *Description*	KPI
	Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia	53,33
	Aspek Keuangan / Financial Aspects	
1	EBITDA	5,00
2	ROIC > WACC	5,45
	Debt Service Ratio	
	a. Interest Bearing Debt to EBITDA	3,10
	b. Interest Bearing Debt to Invested Capital	2,04
	Aspek Operasional	
4	Biaya pengelolaan SDA	8,80
5	Kehandalan Fungsi Infrastruktur SDA	
	a. Gangguan keandalan PLTA Ir. H. Djuanda (Sudden Outage Frequency / SdOF)	8,60
	b. Gangguan keandalan pasok air baku PAM DKI	8,60
	Sosial	
6	Penyaluran Air Baku Irigasi dan Realisasi Luas Tanam Padi	
	a. Penyaluran Air Baku Irigasi	8,54
	b. Realisasi Luas Tanam Padi	7,19
	Inovasi Model Bisnis	9,05
1	Penguatan Bisnis	
	a. Penguatan Bisnis Entitas Anak Perusahaan	2,40
	b. Implementasi Indonesia Water Fund (WF)	1,65
2	Pelaksanaan rencana inbreng tahap 2	5,00
	Kepemimpinan Teknologi	16,00
1	Implementasi ERP & Integrasi GRC	
	a. Implementasi ERP sesuai dengan standardisasi pengelolaan IT	4,00
	b. Integrasi GRC Anggota holding ke platform E-GRC Danareksa	4,00
2	Pemenuhan standarisasi pengelolaan IT	8,00
	Peningkatan Investasi	11,37
1	Penyerapan Investasi	5,15
2	Assessment River Basin Organization Performance Benchmarking (RBO-PB)	8,22
	Pengembangan Talenta	9,65
1	Rasio pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko (Rasio kualifikasi)	3,27
2	Transformasi HC & roadmap penyehatan dana pensiun	
	a. Pencapaian penyelesaian transformasi HC sesuai dengan roadmap 2023	2,18
	b. Penyusunan roadmap penyehatan dana pensiun	2,00
3	Talenta wanita & talenta muda	
	a. % Nominasi talenta wanita	2,20
	b. % Nominasi talenta muda < 42 tahun	0,00
	Total Skor / Total Score	99,40
	Tingkat Kesehatan / Health Level	AAA

Pengukuran terhadap penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara BAB XII Pasal 44. Ibdikator /parameter penilaian *(assesment)* sesuai yang termuat dalam Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: 16 Tahun 2012 tentang Indikator dan Parameter Penilaian Penerapan GCG BUMN.

Measurement of the implementation of good corporate governance practices is an implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises CHAPTER XII Article 44. The indicators / parameters of assessment are in accordance with those contained in the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: 16 of 2012 concerning Indicators and Parameters of Assessment of GCG Implementation of SOEs.



Evaluasi penerapan GCG tahun 2023 di Perum JAsa Tirta II dilakukan oleh tim internal Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Penugasan direktur Utama PJT II Nomor: SPN-34/DU/01/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Tim Evaluasi/*Self Assesment* Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance (GCG)* tahun 2023 di Lingkungan Peru Jasa Tirta II.

The evaluation of the implementation of GCG in 2023 at Perum Jasa Tirta II was carried out by the Company's internal team which was determined based on the Assignment Letter of the President Director of PJT II Number: SPN-34/DU/01/2023 dated 27 October 2023 concerning the Evaluation / Self-Assessment Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2023 within Peru Jasa Tirta II.

Hasil Evaluasi/penilaian mandiri terhadap GCG tahun 2023 di lingkungan Perum Jasa Tirta II mencapai predikat Baik dengan capaian skor 84,98.

The results of the evaluation / self-assessment of GCG in 2023 within Perum Jasa Tirta II achieved a Good predicate with a score of 84.98.

Secara garis besarnya capaian untuk masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

Broadly speaking, the achievements for each aspect are as follows:

	TAHUN / *Year*	BOBOT *Benefits*	CAPAIAN SKOR *Score Achievement*	% CAPAIAN *% Capacity*
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik Secara Berkelanjutan / *Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance*	7.00	6,6335	94,76
II	Pemilik Modal / *Capital Owner*	9,00	8,1924	91,02
III	Dewan Pengawas / *Supervisory Board*	35,00	30,4095	86,88
IV	Direksi / *Board of Directors*	35,00	31,0294	88,65
V	Pengungkapan Informasi dan Transparasi / *Information Disclosure and Transparency*	9,00	8,7236	96,92
VI	Aspek Lainnya / *Other Aspects*	5,00	0,0000	0,00
	SKOR PERUSAHAAN / *COMPANY SCORE*	**100,00**	**84,9883**	**84,98**

Tabel diatas menggambarkan kecukupan infrastruktur dan praktik GCG di lingkungan Perum Jasa Tirta II dibandingkan dengan praktik yang dianggap terbaik sebagaimana yang terdapat pada indikator/parameter penilaian.

The table above illustrates the adequacy of GCG infrastructure and practices within Perum Jasa Tirta II compared to best practices as contained in the assessment indicators/parameters.

Pemilik Modal Dan Pengendali
Capital Owner And Control

Perum Jasa Tirta II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum), yang 100% modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia oleh karena itu Menteri BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku pemilik modal merupakan pengendali Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022. Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modal Negara pada Perum Jasa Tirta II, jumlahnya sebesar Rp164.547.635.935,-.

Perum Jasa Tirta II is a State-Owned Enterprise (BUMN) in the form of a Public Company (Perum), whose 100% capital is owned by the Republic of Indonesia, therefore the Minister of BUMN as the representative of the Government as the owner of capital is the controller of the Company based on Government Regulation Number 25 of 2022. The amount of the Company's capital is the entire value of the State's capital participation in Perum Jasa Tirta II, amounting to Rp164,547,635,935.





Rapat Pembahasan Bersama (RPB)

Joint Discussion Meeting (RPB)

Perum Jasa Tirta II yang berstatus sebagai Perusahaan Umum (Perum) membuat Perum Jasa Tirta II tidak memiliki Rapat Umum Pemegang Saham. Namun demikian, Perum Jasa Tirta II tetap melaksanakan pertemuan dengan Pemilik Modal yakni Negara yang diwakili oleh Kementerian BUMN setiap tahunnya dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB).

Perum Jasa Tirta II is a Public Company (Perum), so it does not have a General Meeting of Shareholders. However, every year in the Joint Discussion Meeting, Perum Jasa Tirta II continues to meet with the Capital Owners, namely the State, which is represented by the Ministry of SOEs (RPB).

Selama tahun 2023, Perum Jasa Tirta II melaksanakan 1 (satu) kali RPB Tahunan dan 1 (satu) RPB yakni RPB Pengesahan Laporan Keuangan 2021 dan 1(satu) RPB Revisi RKAP 2023.

Perum Jasa Tirta II implements 1 (one) Annual RPB, 1 (one) RPB for Ratification of 2020 Financial Statements, and 1 (one) RPB Revised RKAP 2021 in 2023.

Risalah Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Perusahaan Umum Jasa Tirta II Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023

Problems of The Joint Discussion Meeting (RPB) of The General Company Jasa Tirta II On The Approval of The Company's Working Plan And Budget (RKAP) Year 2023

1. Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Perusahaan Umum Jasa Tirta Ii atau Perum Jasa Tirta II, diselenggarakan pada:
   Hari/Tanggal : Jumat, 21 Januari 2023
   Waktu : 13.30 s.d Selesai
   Tempat : *Teleconference Zoom Meeting*
   Acara :
   1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023;
   2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun 2023;
   3. Pembacaan Catatan Hasil Pembahasan Rapat Teknis sebelum Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
   4. Usulan Keputusan RPB Kepada Menteri BUMN

2. Hadir dalam Rapat Pembahasan Bersama:
   a. Perwakilan Pemilik Modal
   - Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media : YB. Priyatmo Hadi

   b. Danareksa
   - Direktur Investasi : Chris Soemijantoro
   - Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : M. Teguh Wirahadikusumah

   c. Dewan Pengawas
   - Ketua Dewan Pengawas : Kelik Wirawan
   - Anggota Dewan Pengawas : 1. Romy Marcandi
     2. Nuning Sri Rejeki W
     3. Mohamad Sofwan

   d. Direksi
   - Direktur Utama : Imam Santoso
   - Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko : Indriani Widiastuti
   - Direktur Operasi dan Pemeliharaan : Anton Mardiyono
   - Direktur Pengembangan Usaha : Dikdik Permadi Yoffana

1. Joint Discussion Meeting (RPB) of Perusahaan Umum Jasa Tirta Ii or Perum Jasa Tirta II, held on:
Day/Date : Friday January 21, 2023
Time : 13.30 to Finish
Place : Teleconference Zoom Meeting
Events :
1. Ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Year 2023;
2. Ratification of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility (CSR) Programme for 2023;
3. Reading of the Discussion Notes of the Technical Meeting before the Joint Discussion Meeting (RPB);
4. Proposed RPB Decision to the Minister of SOEs

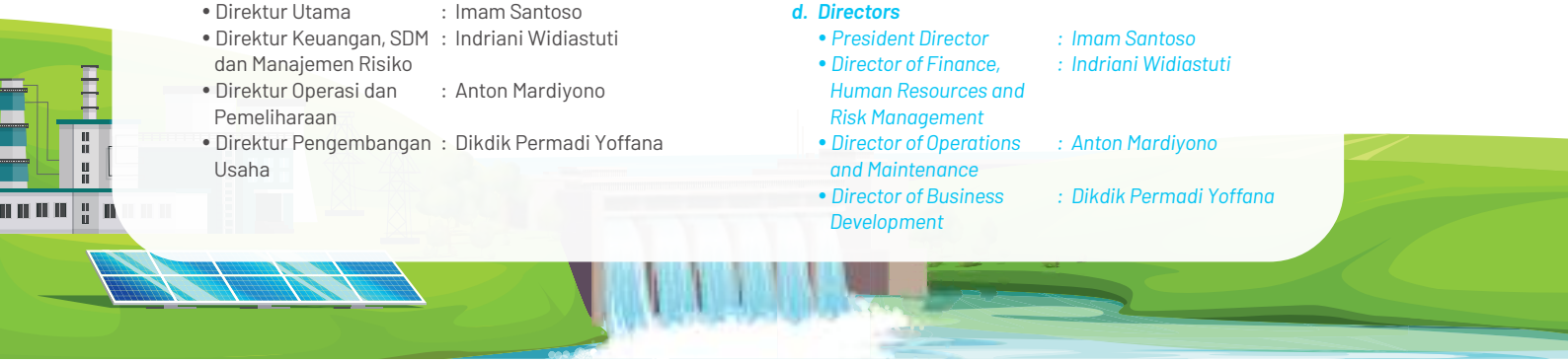
2. Hadir dalam Rapat Pembahasan Bersama:

a. Capital Owner's Representative
- *Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services : YB. Priyatmo Hadi*

b. Danareksa
- *Director of Investment : Chris Soemijantoro*
- *Director of Finance and Risk Management : M. Teguh Wirahadikusumah*

c. Supervisory Board
- *Chairman of the Supervisory Board : Kelik Wirawan*
- *Chairman of the Supervisory Board : 1. Romy Marcandi*
  2. Nuning Sri Rejeki W
  3. Mohamad Sofwan

d. Directors
- *President Director : Imam Santoso*
- *Director of Finance, Human Resources and Risk Management : Indriani Widiastuti*
- *Director of Operations and Maintenance : Anton Mardiyono*
- *Director of Business Development : Dikdik Permadi Yoffana*

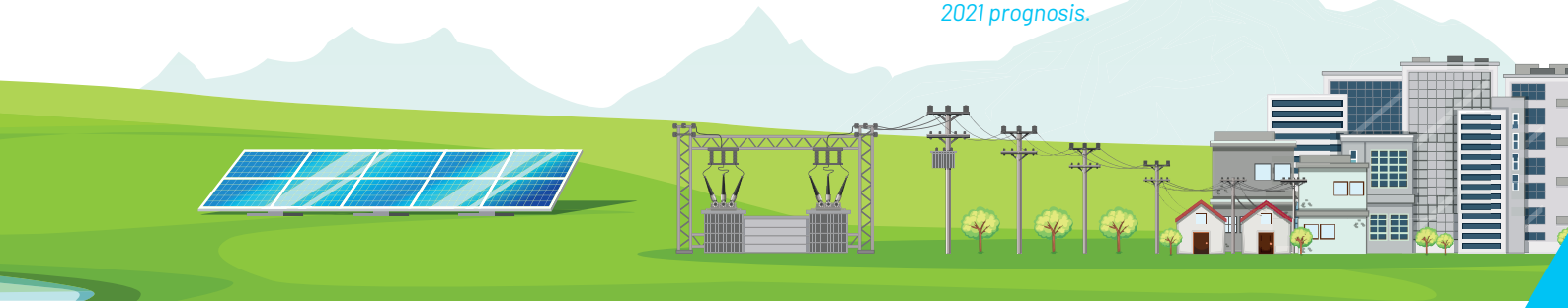


3. Jalannya Rapat Pembahasan Bersama
   a. Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media Bapak YB. Priyatmo Hadi.
   b. Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perum Jasa Tirta I mengenai RKAP Tahun 2023 dan RKA TJSL Tahun 2023.
   c. Tanggapan dari Dewan Pengawas PUT | i mengenai RKAP Tahun 2023 dan RKA TJSL Tahun 2023.
   d. Tanggapan dari Danareksa mengenai RKAP Tahun 2023 dan RKA TJSL Tahun 2023.
   e. Pembacaan Catatan Hasil Rapat Pembahasan Teknis sebelum Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
   f. Pembacaan Usulan Keputusan Rapat Pembahasan Bersama.

4. Catatan Hasil Pembahasan Rapat Teknis sebelum Rapat Pembahasan Bersama (RPB).
   a. Penyusunan RKAP 2023 secara garis besar sesuai KEP-101/MBU/2002, yaitu memuat:
      1) Rencana Kerja Perusahaan;
      2) Anggaran Perusahaan;
      3) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan;
      4) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan;
      5) Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
   b. Asumsi sudah sesuai APBN Tahun 2023 dan Surat Menteri BUMN No: S-787/MBU/10/2021 tentang Aspirasi Pemegang Saham.
   c. Pemenuhan APS Tahun 2023, baik dari Fungsi Keuangan, Fungsi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Fungsi SDM, Fungsi Hukum, Fungsi TI, dan Fungsi TJSL, seluruhnya telah terpenuhi/sesuai.
   d. KPI sudah Inline dengan APS dan KPI Turunan Danareksa.
   e. Angka target:
      1) Pendapatan Usaha naik 12,17% dari prognosa 2021, utamanya berasal dari pendapatan listrik, yaitu sebesar Rp475,82 Miliar dan pendapatan Air Baku sebesar Rp320,85 Miliar.
      2) Pada tahun 2023 terdapat asumsi kenaikan tarif PAM Jaya yang semula Rp272,50 menjadi Rp294,00 sehingga pendapatan Air Baku mengalami kenaikan dari prognosa 2021.

3. Conduct of the Joint Discussion Meeting
   a. The meeting was chaired by Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services Mr YB. Priyatmo Hadi.
   b. Presentation of President Director and Board of Directors of Perum Jasa Tirta I regarding RKAP Year 2023 and RKA TJSL Year 2023
   c. Responses from the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta I regarding the 2023 RKAP and the 2023 TJSL RKA.
   d. Responses from Danareksa regarding the 2023 RKAP and 2023 TJSL RKA
   e. Reading of Notes on the Results of the Technical Discussion Meeting before the Joint Discussion Meeting (RPB).
   f. Reading of the Proposed Decision of the Joint Discussion Meeting

4. Discussion Results of the Technical Meeting before the Joint Discussion Meeting (RPB)
   a. The preparation of the 2023 RKAP is broadly in accordance with KEP-101/MBU/2002, which contains:
      1) Company Work Plan;
      2) Company Budget;
      3) Company's Basic Financial Projections;
      4) Principal Financial Projections of Subsidiaries;
      5) Other matters that require a resolution of the General Meeting of Shareholders (GMS).
   b. The assumptions are in accordance with the 2023 State Budget and SOE Minister Letter No. S-787/MBU/10/2021 on Shareholder Aspirations: S-787/MBU/10/2021 on Shareholder Aspirations
   c. Fulfilment of APS in 2023, both from the Finance Function, Risk Management and Compliance Function, HR Function, Legal Function, IT Function, and TJSL Function, have all been fulfilled / appropriate.
   d. KPIs have been Inline with APS and Danareksa Derived KPIs.
   e. Target numbers:
      1) Operating Revenue increased by 12.17% from 2021 prognosis, mainly derived from electricity revenue, which amounted to IDR475.82 Billion and Raw Water revenue of IDR320.85 Billion.
      2) In 2023, there is an assumption of an increase in PAM Jaya tariff from Rp272.50 to Rp294.00 so that Raw Water revenue has increased from the 2021 prognosis.



3) Di tahun 2023, terdapat target pendapatan Air Baku dari PLTA Saguling, Cirata dan Rajamandala. Perlu dilakukan koordinasi dengan PLN Group, BPKP dan pihak terkait agar permasalahan BJPSDA dengan PLN Group dapat bisa diselesaikan.
4). Pada RKAP 2023, semua unit bisnis (kecuali Air Baku) ditargetkan dapat memberikan margin positif pada perusahaan, namun di prognosa 2021, unit usaha Air Baku, Air Bersih, Pariwisata dan AMDK masih memberikan margin negatif. Kiranya perlu disusun langkah strategis agar target RKAP 2023 dapat tercapai.
5) Laba Bersih naik 15,53% dari prognosa 2021
6) Total Aset naik 7,8% dari prognosa 2021
7) Cash Flow Operation positif sebesar Rp188,85 Miliar
8) Investasi hanya 97,96% dari prognosa 2021. Namun demikian investasi untuk pengembangan usaha meningkat 249% dari prognosa 2021. Diharapkan investasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pendapatan.

5. Usulan Keputusan RPB Kepada Menteri BUMN
Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP dan RKA TJSL Tahun Buku 2023 serta memperhatikan tanggapan Dewan Pengawas maka Rapat Pembahasan Bersama akan mengusulkan kepada Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta I! terkait:
a. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk Rencana Kerja dan Anggran (RKA) Dewan Pengawas Tahun 2023.
1) Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2023 ditargetkan mencapai Total Aset sebesar Rp1.793,15 Miliar dan Total Ekuitas sebesar Rp1.476,86 Miliar.
2) Laba Bersih tahun 2023 sebesar Rp143,92 Miliar
3) Total Capex ditargetkan sebesar Rp206,66 Miliar
4) Total Skor Tingkat Kesehatan perusahaan sebesar 87,75 dengan kriteria Sehat AA"
b. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun Buku 2023 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
1) Program TJSL non PUMK yang dijalankan oleh Unit TJSL Perum Jasa Tirta II dan bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai beban pada laporan RKAP Tahun 2023 sebesar Rp7.525.000.000,00.

3) In 2023, there are Raw Water revenue targets from Saguling, Cirata and Rajamandala hydropower plants. It is necessary to coordinate with PLN Group, BPKP and related parties so that BJPSDA's problems with PLN Group can be resolved.
4) In the 2023 RKAP, all business units (except Raw Water) are targeted to provide positive margins to the company, but in the 2021 prognosis, the Raw Water, Clean Water, Tourism and AMDK business units still provide negative margins. It is necessary to develop strategic steps so that the 2023 RKAP target can be achieved.
5) Net Profit increased by 15.53% from 2021 prognosis
6) Total Assets increased by 7.8% from 2021 prognosis
7) Positive Cash Flow Operation of IDR188.85 Billion
8) Investment is only 97.96% of 2021 prognosis. However, investment for business development increased 249% from 2021 prognosis. It is expected that the investment can make a positive contribution to revenue.

5. Proposed RPB Decision to the Minister of SOEs
After discussing the RKAP and RKA TJSL for Financial Year 2023 and taking into account the responses of the Supervisory Board, the Joint Discussion Meeting will propose to the Minister of BUMN as the relevant Capital Owner of Perum Jasa Tirta II:
a. Ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2023, including the Work Plan and Budget (RKA TJSL) for the Financial Year 2023 including the Work Plan and Budget (RKA) of the Supervisory Board for 2023.
1) The Financial Position Report as of 31 December 2023 is targeted to reach Total Assets of Rp1,793.15 Billion and Total Equity of Rp1,476.86 Billion.
2) Net Profit in 2023 of Rp143.92 Billion
3) Total Capex is targeted at Rp206.66 Billion
4) Total company Health Level Score of 87.75 with Healthy AA criteria"
b. To approve the Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Programme (RKA-TJSL) for Financial Year 2023 with the following points:
1) The non-PUMK TJSL programme run by the TJSL Unit of Perum Jasa Tirta II and sourced from the budget that is calculated as an expense in the 2023 RKAP report amounting to Rp7,525,000,000.00.



2) Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK Tahun 2023 sebesar Rp1.600.000.000,00.

c. Menetapkan *Key Performance Indicator (KPI)* yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal.

d. Menetapkan *Key Performance Indicator (KPI)* Dewan Pengawas Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.

e. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023.

2) MSE Funding TJSL Programme sourced from revolving funds of MSE Funding Programme in 2023 amounting to Rp1,600,000,000.00.

c. Determine the Key Performance Indicator (KPI) of the Supervisory Board in 2023 as stated in the Management Contract in 2023 between the Supervisory Board and the Capital Owner.

d. Establishing the Key Performance Indicator (KPI) of the Supervisory Board for 2023 as set out in the Management Contract for 2023 between the Supervisory Board and the Capital Owner.

e. Determining the Operational Aspect Indicators for the Measurement of the Company's Health Level in 2023.

No.	Uraian / *Description*	Bobot / *Benefits*
1.	Pelayanan Kepala Pelanggan/Masyarakat / *Customer/Community Head Service*	15.00
2.	Hasil Pelaksanaan Penugasan Pemerintah untuk Pelayanan Umum (Aspek Non Komersial) / *Results of Implementation of Government Assignments for Public Services (Non-Commercial Aspects)*	10.00
3.	Efisiensi Produksi dan Produktifitas / *Production Efficiency and Productivity*	5.00
4.	Kepedulian Terhadap Lingkungan / *Concern for the Environment*	5.00
	TOTAL / *Total*	**35.00**

6. Penutup

Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media Bapak YB. Priyatmo Hadi menutup Rapat Pembahasan Bersama untuk kemudian menunggu keputusan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II atas agenda-agenda yang diusulkan dalam Rapat Pembahasan Bersama ini.

6. Closing

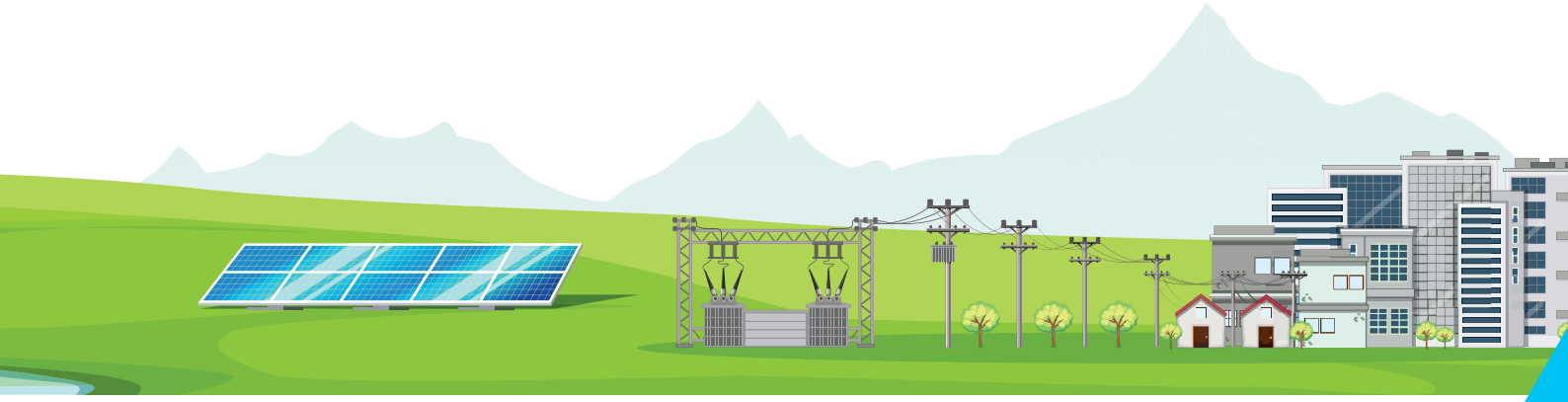
Assistant Deputy for Telecommunication and Media Services Mr YB. Priyatmo Hadi closed the Joint Discussion Meeting to then await the decision of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II on the agendas proposed in this Joint Discussion Meeting.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan RPB Tahun Sebelumnya

Follow-up on the RPB Decision from the Previous Year

Perum Jasa Tirta II telah menindaklanjuti dan merealisasikan seluruh keputusan RPB tahun sebelumnya dan tidak terdapat keputusan RPB yang belum dilaksanakan.

Perum Jasa Tirta II has followed up on and implemented all RPB decisions made in the previous year, and no RPB decisions have not been implemented.



Dewan Pengawas
Supervisory Board

Dewan Pengawas melakukan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi bertanggung jawab atas penentuan dan penerapan strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan usaha Perusahaan.

The Supervisory Board serves as a watchdog, whereas the Board of Directors is in charge of developing and implementing strategies to achieve the Company's business goals and objectives.

Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Komposisi Dewan Pengawas terdiri dari satu orang ketua dan beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

Sesuai Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-4/MBU/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, SK-092/MBU/03/2020 tanggal 23 Maret 2020, SK-340/MBU/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020, SK- 392/ MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II. Jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Supervisory Board Size and Composition

The Supervisory Board is composed of one chairman and several members, the number of whom is adjusted to allow for effective, precise, and timely decision making in accordance with the needs of the Company.

In accordance with the Minister of State-Owned Enterprises' Decree Number: SK-4/MBU/01/2020 dated January 3, 2020, SK-092/MBU/03/2020 dated March 23, 2020, SK-340/MBU/10/2020 dated October 21, 2020, SK-392/MBU/12/2020, dated December 15, 2020, regarding the dismissal and appointment of members of Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board. The number and composition of Perum Jasa Tirta II's Supervisory Board in 2020 are as follows:

No.	Peserta Undangan *Invited Participants*	Jabatan / *Position*	Tugas / *Job*
1,	**Kelik Wirawan Wahyu Widodo**	Ketua Dewan Pengawas / *Chairman of the Supervisory Board*	Mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi seluruh Dewan Pengawas serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan. / *Coordinate all duties and functions of the entire Supervisory Board and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business.*
	Nuning Sri Rejeki Wulandari	Anggota Dewan Pengawas / *Member of the Supervisory Board*	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Hukum, SDM dan Hubungan Antar Lembaga. / *Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the fields of Law, Human Resources and Inter-Institutional Relations.*
	Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas / *Member of the Supervisory Board*	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Aset dan Keuangan. / *Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the field of Assets and Finance.*
	Fatkhurohman Taufik	Anggota Dewan Pengawas Independen / *Independent Supervisory Board Member*	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha perusahaan bidang Pengembangan Usaha dan Pemantauan Risiko. / *Carry out supervisory duties and provide direction to the Board of Directors on the management of the company's business in the field of Business Development and Risk Monitoring.*



Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Nomor: SK-214/MBU/09/2023 tanggal 21 September 2023, maka susunan Dewan Pengawas menjadi:

a. Kelik Wirawan Wahyu Widodo
- Ketua Dewan Pengawas

b. Nuning Sri Rejeki Wulandari
- Anggota Dewan Pengawas

c. Romy Marcandi
- Anggota Dewan Pengawas

d. Fatkhurohman Taufik
- Anggota Dewan Pengawas Independen

Furthermore, in accordance with the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Capital Owner of Perum Jasa Tirta II Number: SK-214/MBU/09/2023 dated 21 September 2023, the composition of the Supervisory Board becomes:

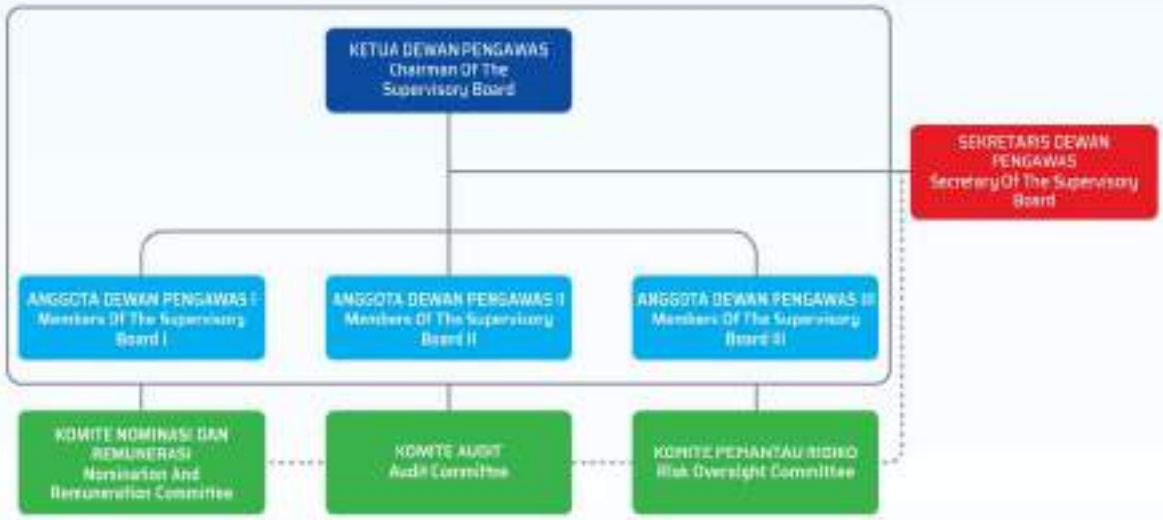
a. Kelik Wirawan Wahyu Widodo
- *Chairman of the Supervisory Board*

b. Nuning Sri Rejeki Wulandari
- *Member of the Supervisory Board*

c. Romy Marcandi
- *Member of the Supervisory Board*

d. Fatkhurohman Taufik
- *Independent Supervisory Board Member*

Struktur Organisasi Dewan Pegawas
Organizational Structure Of The Supervisory Board



Kriteria Dewan Pengawas

Kendati Pemilik Modal memiliki wewenang untuk mengangkat anggota Dewan Pengawas, pengangkatan dan penetapan Dewan Pengawas wajib memperhatikan kriteria-kriteria yang diatur dalam Pedoman Kerja, Anggaran Dasar, maupun peraturan dan regulasi lain yang berlaku.

Kriteria Dewan Pengawas antara lain meliputi:
1. Perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau

Supervisory Board Evaluation Criteria

Although the Capital Owner has the authority to appoint Supervisory Board members, the appointment and determination of the Supervisory Board must adhere to the criteria outlined in the Work Guidelines, Articles of Association, and other applicable rules and regulations.

The following are the Supervisory Board criteria:
1. A person who is legally capable and has never been declared bankrupt, or a member of the Board of



menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit;
2. Orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;
3. Mantan anggota Direksi BUMN yang sudah tidak menjabat anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya satu tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan BUMN yang bersangkutan, sepanjang tidak ada ketentuan perundang-undangan lain yang melarangnya;
4. Memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah- masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
5. Komposisi Dewan Pengawas paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas Independen;
6. Komposisi Dewan Pengawas harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, cepat, serta dapat bertindak secara independen;
7. Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur- unsur pejabat di bawah Menteri Teknis, Menteri Keuangan, maupun kementerian dan pimpinan departemen/ lembaga lain yang kegiatannya berhubungan langsung dengan Perusahaan;
8. Antar anggota Dewan Pengawas dan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi demikian, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut;
9. Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangka sebagai:
    1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Milik Swasta;
    2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
10. Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah;

Directors or Supervisory Board who is found guilty of causing a company or public corporation to be declared bankrupt;
2. *People who have never been punished for committing a financial crime against the state;*
3. *A former member of the BUMN's Board of Directors who has not served as a member of the BUMN's Board of Directors for at least one year, except for certain considerations decided by the Minister in order to maintain the sustainability of the BUMN's restructuring program, as long as no other statutory provisions prohibit it;*
4. *Have integrity, dedication, understand the Company's management issues related to one of the management functions, have sufficient knowledge in the Company's business field and can provide sufficient time to carry out their duties;*
5. *The composition of the Supervisory Board includes at least 20% (twenty percent) members of the Independent Supervisory Board;*
6. *The Supervisory Board's composition must be such that it can make effective, timely decisions and act independently;*
7. *Members of the Supervisory Board may include elements from the Technical Minister, the Minister of Finance, and other ministries and heads of departments/institutions whose activities are directly related to the Company;*
8. *Members of the Supervisory Board and the Board of Directors are prohibited from having family or marital relations up to the third degree, either straight or sideways. In such a case, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.*
9. *Members of the Supervisory Board are not permitted to hold the following positions:*
    1. *Board of Directors in BUMN, BUMD, and Private Owned Enterprises;*
    2. *Other positions in accordance with the provisions of the legislation;*
    3. *Other positions that may cause a conflict of interest;*
10. *Members of the Supervisory Board are prohibited from being administrators of political parties, candidates for legislative members, legislative members, candidates for Regional Heads, candidates for Deputy Regional Heads, Regional Heads, and/or Deputy Regional Heads.*



11. Anggota Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan , selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Dewan Pengawas;
12. Masa jabatan Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:
    1. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
    2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;
    3. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
        i) Meninggaldunia;
        ii) Masa jabatan berakhir;
        iii) Diberhentikan berdasarkan keputusan Menteri;
        iv) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan peraturan perundang- undangan lainnya; Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya masa jabatan tersebut, Menteri sudah harus mengisi kekosongan jabatan tersebut.

11. Members of the Supervisory Board are not permitted to benefit personally from the Company's activities, other than the income received as a member of the Supervisory Board.
12. The Supervisory Board's term of office is governed as follows:
    1. Members of the Supervisory Board are appointed for a five-year term and may be reappointed for a one-year term.
    2. Members of the Supervisory Board may be dismissed before their term expires based on the Minister's decision, which must be justified;
    3. The position of a member of the Supervisory Board terminates when:
        i) The member dies;
        ii) The term of office expires; or
        iii) The member is dismissed by the Minister.
        iv) No longer meets the requirements for membership on the Supervisory Board under Government Regulation Number 25 of 2023 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II and other laws and regulations; In the event of a vacancy on the Supervisory Board, the Minister must fill the vacancy within 30 (thirty) days at the latest from the end of the term of office.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas sebagai organ Perusahaan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran serta rekomendasi kepada Direksi atas pengelolaan Perusahaan serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab

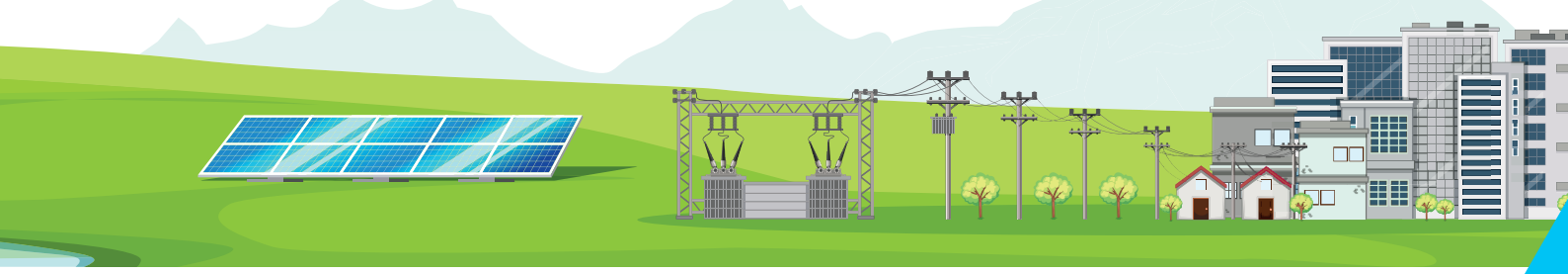
1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri, dan peraturan perundang- undangan untuk

Supervisory Duties and Responsibilities

The Supervisory Board, as an organ of the Company, is collectively responsible for supervising and advising the Board of Directors on the management of the Company, as well as ensuring that GCG principles are properly implemented. The Supervisory Board's duties, responsibilities, and authorities are as follows:

Responsibilities and Duties

1. Oversee management policies, the general course of management for the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, and provide advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the Term Plan Company Length (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), provisions of the Articles of Association and Ministerial Decrees, and laws and regulations



kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
2. Melakukan pemantauan efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang diterapkan di Perusahaan;
3. Bertanggung jawab penuh atas pengawasan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan;
4. Bertanggung jawab penuh kepada Pemilik Modal;
5. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Wewenang Dewan Pengawas

1. Memperoleh akses yang cukup atas informasi Perusahaan, dalam hal ini melihat buku-buku, surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perusahaan;
2. Meminta penjelasan Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
3. Melakukan penilaian atas akurasi informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya dalam laporan keuangan dan laporan tahunan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
6. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan, dengan menyebutkan alasannya;
7. Membentuk komite-komite lain selain komite audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
8. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan keputusan RPB.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Pengawas

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas berjalan dengan baik, Perum Jasa Tirta II telah menyusun Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang

in accordance with the Company's purposes and objectives;
2. *Monitoring the effectiveness of the Company's implementation of Good Corporate Governance;*
3. *Fully responsible for the supervision of the Company in the interests and objectives of the Company;*
4. *Fully responsible to the Capital Owner;*
5. *Each member of the Supervisory Board is personally liable for the Company's loss if the person is guilty or negligent in carrying out his duties in the interests and business of the Company.*

The Supervisory Board's Authority

1. *Obtaining sufficient access to the Company's information, in this case seeing books, securities, and inspecting the Company's assets;*
2. *Requesting explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company;*
3. *To assess the accuracy of information prepared for other parties, particularly in financial reports and annual reports;*
4. *Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;*
5. *Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Supervisory Board meetings;*
6. *Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the provisions, stating the reasons;*
7. *Form other committees in addition to the audit committee, if deemed necessary by taking into account the Company's capabilities;*
8. *Use experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;*
9. *Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations and RPB decisions.*

Supervisory Guidelines and Rules

To ensure the proper implementation of the Supervisory Board's functions, duties, and responsibilities, Perum Jasa Tirta II compiled a Board Manual, which was ratified in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II



Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas merupakan hasil modifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik GCG, hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemilik Modal, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.

Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas memuat petunjuk tata laksana kerja Dewan Pengawas bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan, sehingga dapat terciptanya standar kerja yang tinggi dan selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Adapun hal-hal yang diatur dalam pedoman kerja dan tata tertib Dewan Pengawas meliputi penjelasan fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab serta hak dan wewenang Dewan Pengawas, keanggotaan Dewan Pengawas, komposisi Dewan Pengawas dan masa jabatannya, standar penilaian kinerja Dewan Pengawasan, kebijakan independensi bagi Pengawas Independen, mekanisme rapat Dewan Pengawas, penjelasan komite-komite di bawah Dewan Pengawas, dan tata laksana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Prosedur mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilaksanakan oleh Kementerian BUMN dengan mengacu pada ketentuan dalam yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. **Pengangkatan Dewan Pengawas**
   1. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
   2. Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
   3. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi;
   4. Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis.

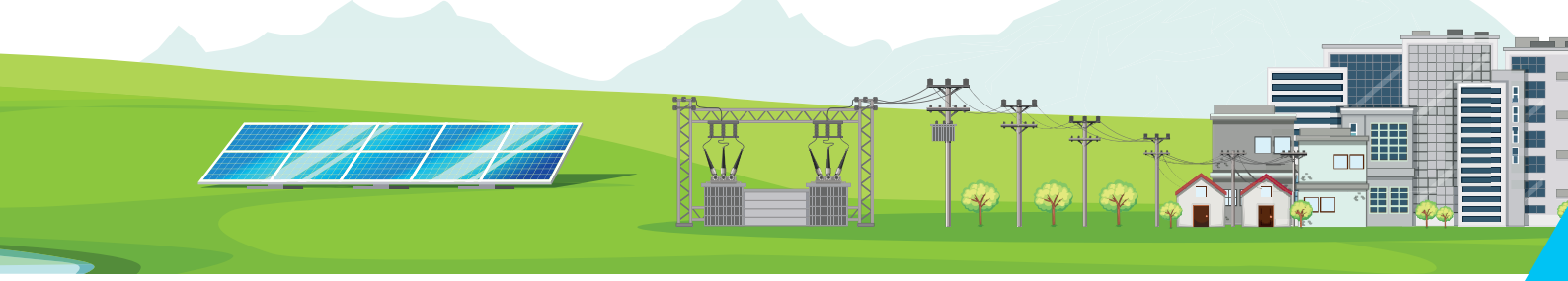
on Governance Principles Dated 30 October 2019, Good Corporate Governance No. 1/DP/68/KBS/10/2019. The Supervisory Board's work guidelines and rules are a modification of various applicable regulations and GCG best practices, corporate law, applicable laws and regulations, capital owner directives, and provisions of the Company's Articles of Association.

The Supervisory Board's work guidelines and rules contain instructions for the Supervisory Board's work procedures for each member of the Supervisory Board in carrying out their duties in accordance with the Company's vision and mission, so that high work standards can be established and in accordance with GCG principles The Supervisory Board's work guidelines and rules include an explanation of the functions, duties, obligations, and responsibilities, as well as the Supervisory Board's rights and authorities, the membership of the Supervisory Board, the composition of the Supervisory Board and the term of office, standards for evaluating the Supervisory Board's performance, policies independence for the Independent Supervisor, and the mechanism.

Supervisory Board Appointment and Removal

The procedure for the appointment and dismissal of the Supervisory Board within Perum Jasa Tirta II is carried out by the Ministry of SOEs with reference to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The mechanism for the appointment and dismissal of the Supervisory Board is as follows:

1. ***Formation of the Supervisory Board***
   1. *The Minister of SOEs appoints and dismisses members of the Supervisory Board;*
   2. *Members of the Supervisory Board are appointed for the same term of office as members of the Board of Directors and may be reappointed for one (one) term of office;*
   3. *The appointment of members of the Supervisory Board does not coincide with the appointment of members of the Board of Directors;*
   4. *If deemed necessary, the Minister of SOEs may request input from the Technical Minister in the context of appointing the Supervisory Board.*



2. Pemberhentian Dewan Pengawas

1. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Menteri BUMN, apabila berdasarkan kenyataan anggota Dewan Pengawas:
   - Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
   - Tidak melaksanakan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
   - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
   - Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap;
   - Meninggal dunia atau berhalangan tetap;
   - Mengundurkan diri.
2. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam poin a diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri :
   - Pembelaan diri dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut;
   - Selama rencana pemberhentian masih dalam proses maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap menjalankan tugasnya; Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri Menteri BUMN tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal;
   - Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian dari Menteri BUMN.

2. Dissolution of the Supervisory Board

1. Members of the Supervisory Board may be dismissed by the Minister of SOEs before the end of their term of office if they:
   - *Fail to carry out their duties properly;*
   - *Failure to comply with current laws and regulations;*
   - *Engaging in actions that are detrimental to the Company;*
   - *Being found guilty by a court decision with permanent legal consequences;*
   - *Death or permanent disability;*
   - *Resign.*

2. The decision to dismiss, as mentioned in point a, is made after the person in question has been given the opportunity to defend himself:
   - *Self-defense is carried out in writing and submitted to the Minister of BUMN within 1 (one) month of the date the member of the Supervisory Board concerned is notified in writing by the Minister of BUMN regarding the planned termination;*
   - *The member of the Supervisory Board concerned will continue to carry out his/her duties as long as the dismissal plan is still in process; If the Minister of SOEs does not make a decision to dismiss the member of the Supervisory Board within 2 (two) months of the date of submission of the self-defense, the planned dismissal will be cancelled;*
   - *His position as a member of the Supervisory Board ends with the issuance of a decision on the dismissal of the Minister of SOEs.*

Program Orientasi bagi Anggota Dewas Baru

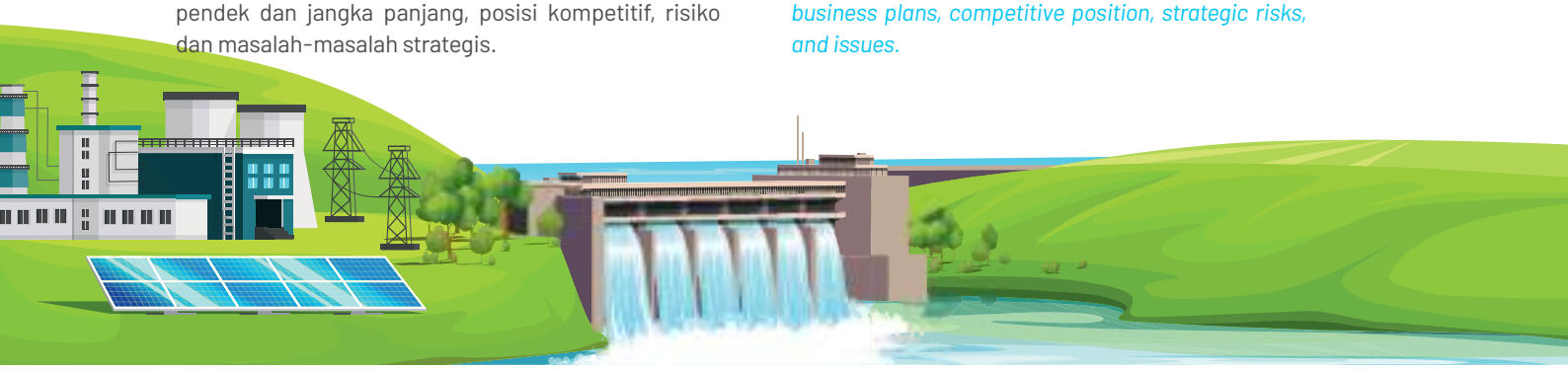
Anggota Dewan Pengawas yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan. Materi program orientasi yang telah diberikan kepada Dewan Pengawas baru antara lain sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis.

New Board Member Orientation Program

New members of the Supervisory Board are given an orientation/introduction program to Perum Jasa Tirta II. The Corporate Secretary is in charge of putting the orientation program into action. The following are the orientation program materials provided to the new Supervisory Board:

1. A summary of Perum Jasa Tirta II's objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, strategic risks, and issues.



2. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit.
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas .

Program orientasi yang dilaksanakan dapat disampaikan melalui presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Pada tahun 2023 tidak ada penggantian anggota Dewan Pengawas. Bapak Fatkhurohman Taufik diangkat pada tahun 2022.

Kebijakan Suksesi Dewan Pengawas

Dalam menjamin kecukupan jumlah dan komposisi Dewan Pengawas, Perum Jasa Tirta II menjalankan kebijakan suksesi Dewan Pengawas yang dilaksanakan dengan tunduk pada regulasi yang berlaku dan ketentuan internal yang disusun Perusahaan . Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, sumber bakal calon Dewan Pengawas berasal dari:

1. Mantan Direksi BUMN;
2. Dewan Pengawas BUMN;
3. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemerintah; dan/atau
4. Sumber lain.

Dalam mendukung kebijakan suksesi tersebut, Perum Jasa Tirta II tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan kualifikasi calon anggota Dewan Pengawas, hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), program pengenalan dan orientasi bagi anggota Dewan.

Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas

Kriteria hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas, Direksi, dan Pemilik Modal Pengendali meliputi:

1. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
2. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi.

2. *Perum Jasa Tirta II's application of GCG principles*
3. *Details on delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, and the Audit Committee.*
4. *Information on the Supervisory Board's duties and responsibilities.*

The orientation program was delivered through presentations, meetings, visits to branch offices, document reviews, and other programs in accordance with the Company's policies. In 2023, there were no changes in the composition of the Board of Supervisors. Mr. Fatkhurohman Taufik was appointed in 2022.

Supervisory Board Succession Policy

In ensuring the adequacy of the number and composition of the Supervisory Board, Perum Jasa Tirta II implements a Supervisory Board succession policy that is implemented subject to applicable regulations and internal provisions prepared by the Company. Referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises, the source of candidates for the Supervisory Board comes from:

1. *Former SOE Directors;*
2. *Supervisory Board of SOEs;*
3. *Structural Officials. Perum Jasa supports the succession policy.*
4. *Additional sources*

In order to support the succession policy, Perum Jasa Tirta II continues to focus on meeting the qualification requirements of prospective Supervisory Board members, the results of the Fit and Proper Test, and introduction and orientation programs for Board members.

Supervisory Board Affiliation

Affiliate relationships between members of the Supervisory Board and other members of the Supervisory Board are among the criteria for :

1. *Relationships of affiliation between members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Owners of Controlling Capital.*
2. *Relationship of affiliation between members of the Supervisory Board and the Board of Directors.*



3. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal Utama dan/atau Pengendali.
4. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas ; dan
5. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemilik Modal Utama dan/atau Pengendali.

Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)* Dewan Pengawas

Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Dewan Pengawas telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)*.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Hingga 31 Desember 2023 Perum Jasa Tirta II tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek manapun dan tidak pernah melakukan program kepemilikan saham untuk manajemen (Management Stock Option Program / MSOP) maupun program kepemilikan saham oleh karyawan *(Employee Stock Option Program / ESOP)*. Sehingga tidak ada saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas Independen

Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II telah memenuhi persyaratan jumlah yang diatur dalam ketentuan GCG Perusahaan yang menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Independen sekurang-kurangnya 20% dari seluruh anggota Dewan Pengawas yang ada. Jumlah Dewan Pengawas Independen Perum Jasa Tirta II adalah 1 (satu) orang. Masing-masing Dewan Pengawas telah menandatangani Surat Pernyataan untuk menunjukkan independensi Dewan Pengawas.

Kriteria Penentuan Dewan Pengawas Independen

Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau Pemilik Modal

3. Affiliation relationship between Supervisory Board members and Main and/or Controlling Capital Owners.
4. Affiliation relationship between Board of Directors members and Supervisory Board members; and
5. Affiliation relationship between Board of Directors members and the Main and/or Controlling Capital Owner.

Fit and Proper Testing The Supervisory Board

Perum Jasa Tirta II strives to ensure that all Supervisory Board members have the integrity, competence, reputation, and experience required to carry out their respective functions and duties. All members of the Supervisory Board have passed the Fit & Proper Test to ensure that their background of competence, expertise, reputation, and work experience is appropriate for the needs of the position.

Supervisory Board for Share Ownership

As of December 31, 2023 Perum Jasa Tirta II had never conducted a public offering of shares on any stock exchange, nor had it ever conducted a share ownership program for management (Management Stock Option Program / MSOP) or an employee stock option program (Employee Stock Option Program / ESOP). As a result, no shares are owned by members of the Supervisory Board.

Independent Supervisory Board

The Independent Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II has met the number requirements stipulated in the Company's GCG, which states that the number of Independent Supervisory Board must be at least 20% of all existing Supervisory Board members. The number of Independent Supervisory Board appointed by Perum Jasa Tirta II is 1 (one). To demonstrate the Supervisory Board's independence, each member has signed a Statement Letter.

Selection Criteria for the Independent Supervisory Board

All members of the Supervisory Board have no financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Supervisory Board, the Board of Directors, and/or the Company. The Company



Pengendali atau hubungan dengan Perusahaa Perusahaan menerapkan kriteria pemilihan Dewan Pengawas sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meliputi:

- Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan terafiliasi;
- Tidak bekerja pada Pemerintah termasuk di departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak bekerja di BUMN yang bersangkutan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir;
- Tidak memiliki keterkaitan finansial baik langsung maupun tidak langsung dengan BUMN yang bersangkutan atau Perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada BUMN yang bersangkutan dan afiliasinya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Pernyataan Independensi Dewan Pengawas

Dalam memenuhi persyaratan independensi Dewan Pengawas yang disyaratkan, Dewan Pengawas dipastikan telah memenuhi kriteria kualifikasi dalam hal administratif dan kepatuhan serta dinyatakan dalam kondisi sesungguhnya terkait pribadi anggota Dewan Pengawas sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Kriteria non administratif yang disyaratkan dan dipenuhi anggota Dewan Pengawas yaitu Dewan Pengawas diharuskan untuk bebas dari hubungan keluarga ataupun ikatan perkawinan satu sama lain hingga derajat ketiga secara vertikal maupun horizontal, bebas benturan kepentingan pribadi, dan memenuhi komitmen untuk tidak memanfaatkan Perusahaan demi kepentingan pribadi.

Mengukuhkan kriteria tersebut, Dewan Pengawas menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan independensi dan integritas yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan Kerja Dewan Pengawas dan Direksi

Pemeliharaan hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan untuk menjaga agar kedua organ dapat menjalankan *check and balances* dengan efektif dan efisien demi terciptanya kemajuan Perusahaan. Adapun mekanisme hubungan kerja Dewan Pengawas dan Direksi dilakukan melalui:

selects the Supervisory Board in accordance with Decision Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises (BUMN), which includes the following criteria:

- *Not serving as a Board of Directors in an affiliated company;*
- *Not working for the Government, including in departments, institutions, and the military within the last three years;*
- *Not working in the relevant BUMN or affiliate within the last three years;*
- *Has no financial relationship, either directly or indirectly, with the relevant BUMN or the company that provides services and products to the relevant BUMN and its affiliates. which may affect its ability to act independently.*

Supervisory Board Declaration of Independence

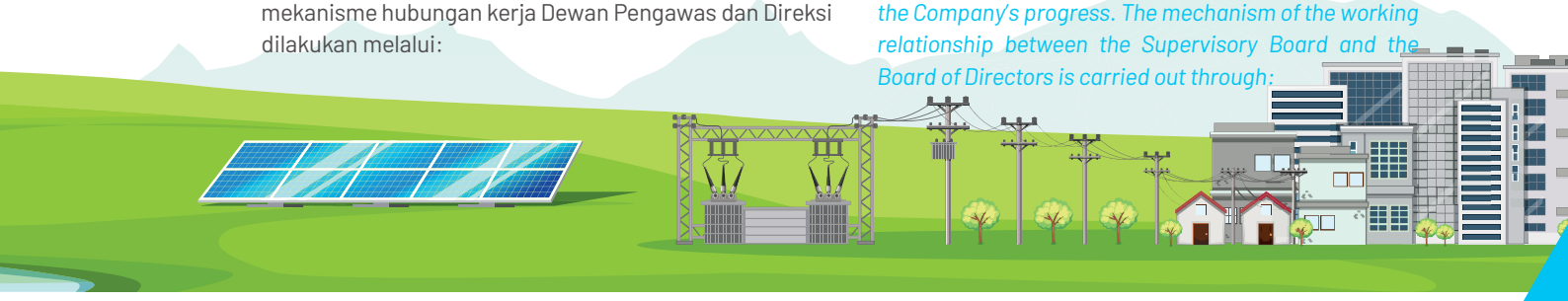
In fulfilling the Supervisory Board's required independence requirements, it is ensured that the Supervisory Board has met the qualification criteria in terms of administrative and compliance and is stated in actual conditions regarding the personal of the Supervisory Board members in accordance with the specified criteria.

Non-administrative criteria that members of the Supervisory Board must meet include being free from family relationships or marital ties with each other up to the third degree vertically or horizontally, being free from personal conflicts of interest, and fulfilling commitments not to use the Company for personal gain.

Confirming these criteria, the Supervisory Board signed an Integrity Pact as a form of independence and integrity statement required by applicable laws and regulations.

Working Relationships of the Supervisory Board and the Board of Directors

The working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is maintained to ensure that the two organs can carry out checks and balances effectively and efficiently for the creation of the Company's progress. The mechanism of the working relationship between the Supervisory Board and the Board of Directors is carried out through:



- Terlaksananya pengendalian internal dan manajemen risiko yang tepat dan cermat;
- Tercapainya imbal hasil (return) yang wajar bagi Pemilik Modal;
- Terlindunginya kepentingan Pemilik Modal secara wajar;
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan manajemen di semua lini organisasi;
- Terpenuhinya pelaksanaan GCG.

Keberagaman Komposisi Dewan Pengawas

Pemilik Modal dalam menetapkan komposisi Dewan Pengawas senantiasa memperhatikan unsur keberagaman, baik dari segi latar belakang pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin guna menghadirkan pendekatan yang solutif dan beragam dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di Perusahaan.

Kebijakan penetapan persyaratan komposisi anggota Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Keberagaman komposisi Dewan Pengawas tercermin dari latar belakang pendidikan, keahlian, usia, dan jenis kelamin yang dapat yang terdapat dalam profil dewan pengawas pada bagian profil dalam laporan ini.

Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas secara berkala menyelenggarakan rapat internal Dewan Pengawas maupun rapat gabungan bersama Direksi dan komite-komite. Adapun rapat Dewan Pengawas dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengawasan, penyusunan saran dan rekomendasi atas kegiatan operasional, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Dewan Pengawas. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Pengawas.

- *Implementation of appropriate and careful internal control and risk management;*
- *Achieving a reasonable return for Capital Owners;*
- *Protecting the Capital Owner's interests in a reasonable manner;*
- *Implementation of leadership and management succession across all organizational lines;*
- *Completion of GCG implementation.*

The Diversity of the Capital Owners

Supervisory Board In determining the composition of the Supervisory Board, the elements of diversity, both in terms of educational background, expertise, work experience, age, and gender, are always considered in order to present a solution-oriented and diverse approach in decision making and problem solving in the Company.

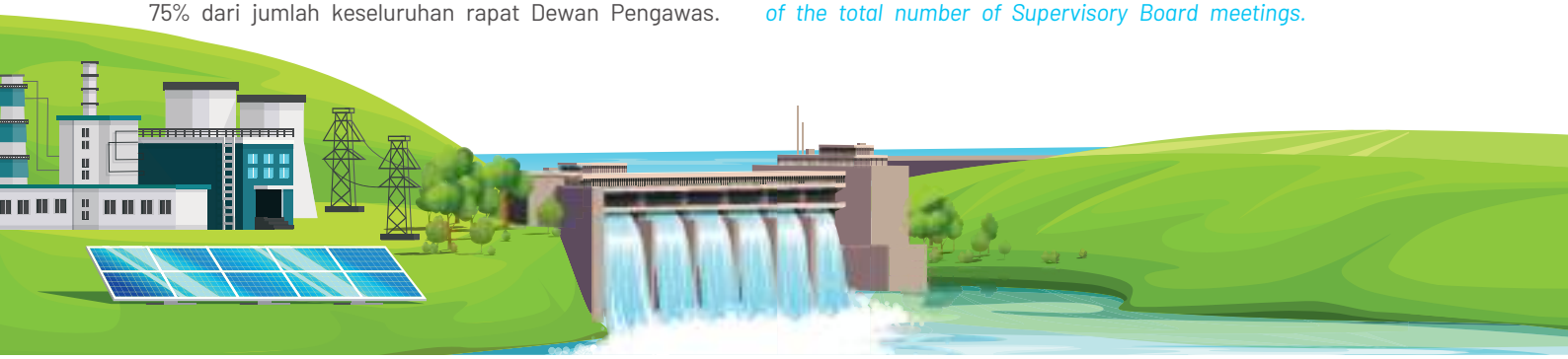
The policy for determining the requirements for the composition of the Supervisory Board members refers to the provisions of Minister of SOE Regulation No. PER02/MBU/02/2015 concerning the Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The educational background, expertise, age, and gender of the Supervisory Board's members are reflected in the supervisory board profile in the profile section of this report.

Meetings of the Supervisory Board

The Supervisory Board holds internal Supervisory Board meetings on a regular basis, as well as joint meetings with the Board of Directors and committees. Meanwhile, the Supervisory Board meeting is used as a medium for discussion and discussion of various supervisory needs, preparing suggestions and recommendations on operational activities, and making Supervisory Board decisions.

*The Supervisory Board is required to hold a meeting at least once a month, attended by a majority of all Supervisory Board members. Each Supervisory Board member must attend at least 75%
of the total number of Supervisory Board meetings.*



Keputusan rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode *voting*. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

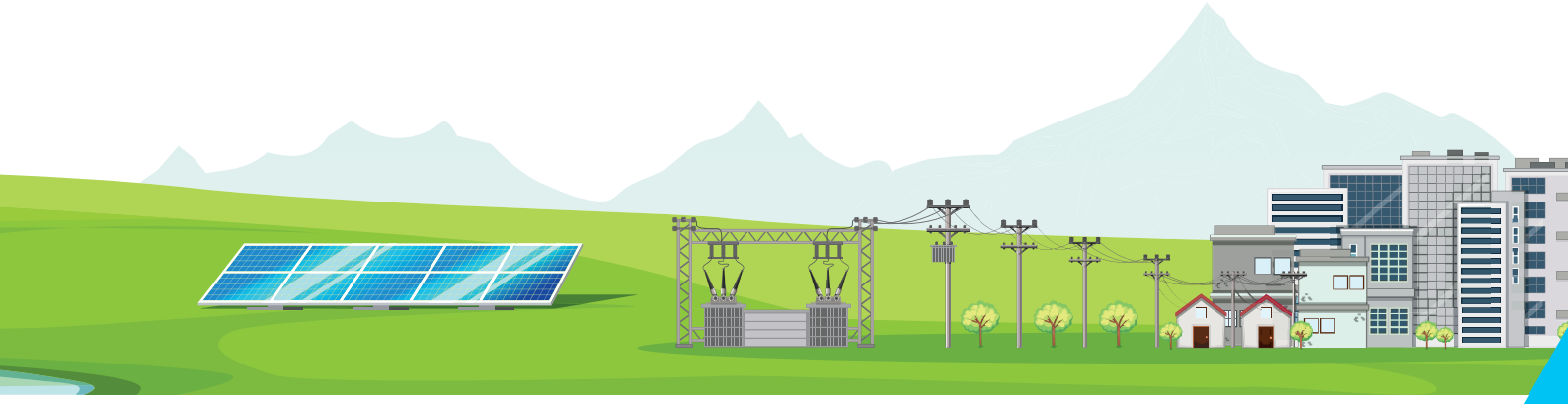
Agenda Rapat Dewan Pengawas

Pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin dilaksanakan setiap bulannya, baik rapat internal maupun gabungan. Agenda rapat Dewan Pengawas membahas hal-hal yang bersifat rutin yang meliputi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Dewan Pengawas beserta Organ serta melakukan reviu kinerja berkala perseroan (baik operasional produksi maupun keuangan) dan permasalahan yang perlu mendapat klarifikasi dari manajemen serta membahas hal-hal yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas. Selama Tahun 2023, Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat, sebagai berikut:

The Supervisory Board meeting's decisions are carried out in accordance with the principle of deliberation to reach consensus, and if deliberation to reach consensus fails, the decision is made using the voting method. The meeting's results are recorded in the minutes of the meeting, including dissenting opinions and their reasons, signed by all participants present, and properly documented.

Agenda for the Supervisory Board Meeting

Supervisory Board meetings are regularly held every month, both internal and joint meetings. The agenda of the Supervisory Board meetings discusses matters of a routine nature which include the implementation and evaluation of the activities of the Supervisory Board and its Organs as well as reviewing the company's periodic performance (both production and financial operations) and issues that need clarification from management and discussing matters that require the approval of the Supervisory Board. During 2023, the Supervisory Board held the following meetings:



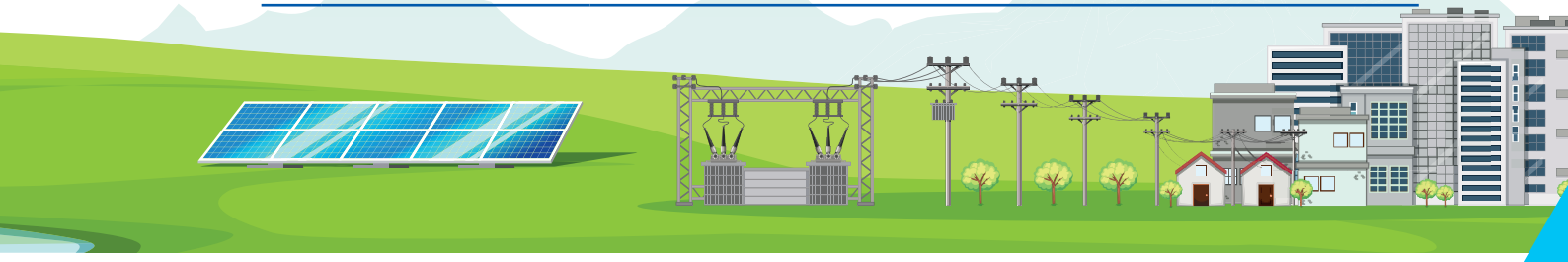
a. Rapat Internal Dewan Pengawas / *Supervisory Board Internal Meetings*

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	24 Januari 2023	• Laporan Manajemen Tahun 2022 *Unaudited* • Realisasi KPI Perusahaan 2022 • Lain-lain
2	23 Februari 2023	• Laporan Komite • Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Tahun 2022 • Lain-lain
3	29 Maret 2023	• Tindak Lanjut Rapat Internal Sebelumnya • Kinerja Keuangan s/d Bulan Februari 2023 • Update Pedoman dan Piagam Manajemen Resiko
4	14 April 2023	• Kinerja perusahaan Triwulan I 2023 • Usulan Penghapusan Barang Inventaris Kantor • Lain-lain
5	25 Mei 2023	• Laporan Komite • Usulan Penghapusan Barang Inventaris Kantor
6	22 Juni 2023	• Kinerja Perusahaan s/d Mei 2023 • Laporan Komite • Lain-lain
7	21 Juli 2023	• Tinjauan Manajemean Puncak SMAP Tahun 2022 • Kinerja Perusahaan s/d Semester I 2023 • Update Progress Investasi • Lain-lain
8	25 Agustus 2023	• Kinerja Perusahaan s/d Bulan Juli 2023 • Update Progress Investasi • Lain-lain
9	26 September 2023	• Kinerja Perusahaan s/d Bulan Agustus 2023 • Update Progress Investasi • RKA Dewan Pengawas Tahun 2024 • Lain-lain
10	26 Oktober 2023	• Kinerja Perusahaan s/d Triwulan III 2023 • Lain-lain
11	16 November 2023	• Progress Tindak Lanjut Atas Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal per Triwulan III 2023 • Kinerja Perusahaan s/d Oktober 2023 • Update Progress Investasi • Lain-lain
12	27 Desember 2023	• Kinerja Perusahaan s/d November 2023 • Update Progress Investasi • Tanggapan Atas RKAP Tahun 2024 • Lain-lain



b. Rapat Gabungan bersama Direksi / *Joint Meeting with the Board of Directors*

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	26 Januari 2023	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Desember 2022 • Pembahasan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2022 • Presentasi dan Penandatanganan Bersama Hasil Self-Assessment Penerapan GCG Tahun 2022 • Lain-lain
2	28 Februari 2023	• Pembahasan RJPP Tahun 2023 – 2027 • Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Januari 2023 • Realisasi Capaian KPI • Realisasi Investasi • Lain-lain
3	29 Maret 2023	• Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Februari 2023 • Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Februari 2023 • Lain-lain
4	14 April 2023	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Dewan Pengawas Direksi Bulan Maret 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Maret 2023 • Pembahasan Laporan Keuangan Audited Tahun 2022
5	25 Mei 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan April 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Mei 2023 • Lain-lain
6	22 Juni 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Mei 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Mei 2023 • Ekpose Rencana Kerja Sama Pengembangan Wisata di Kawasan Wisata Jatiluhur dan Penandatanganan MoU • Lain-lain
7	26 Juli 2023	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Dewan Pengawas Direksi Bulan Juni 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Juni 2023 • Lain-lain
8	28 Agustus 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Juli 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Juli 2023 • Lain-lain
9	27 September 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Agustus 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Agustus 2023 • Lain-lain
10	27 Oktober 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan September 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja dan Laporan KPI s/d Triwulan III • Pembahasan Usulan KPI 2024 • Lain-lain
11	23 November 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Oktober 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Oktober 2023 • Lain-lain
12	11 Desember 2023	• Persetujuan Nilai Asset Settlement PT Sang Hyang Seri • Persetujuan atas Kewajiban Dana Pensiun Pada Tahun Buku 2023 • Pembahasan RKAP 2024 Perum Jasa Tirta II • Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan November 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan November 2023 • Lain-lain



Rapat Lain-lain

Selain rapat internal dan rapat gabungan bersama Direksi, Dewan Pengawas juga melakukan rapat selaku Komite, sebagai berikut:

Rapat Lain-lain

Selain rapat internal dan rapat gabungan bersama Direksi, Dewan Pengawas juga melakukan rapat selaku Komite, sebagai berikut:

1) Rapat Komite Audit

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	11 Januari 2023	• Pembahasan Porgres Tindak Lanjut Temuan Interim KAP 2022
2	16 Januari 2023	• Pembahasan Program Kerja Komite Audit Tahun 2023 • *Discussion and Sharing Session* dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perusahaan Oleh KAP • Lain-lain
3	15 Februari 2023	• Pembahasan Permohonan Tanggapan Atas Penghapusbukuan Aset Milik Perum Jasa Tirta II yang Terdampak PSN Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu)
4	20 Maret 2023	• Progress Audit KAP • Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Maret 2023
5	12 April 2023	• Progress Penyelesaian Audit KAP • Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Maret Tahun 2023
6	02 Mei 2023	• Telahaan Komite Audit Nomor TA-05/KA/2023/perihal Hasil Evaluasi Komite Audit Atas Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022
7	24 Mei 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan April 2023
8	08 Juni 2023	• Temuan Pengawasan Internal per Triwulan I 2023
9	16 Juni 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Mei 2023
10	20 Juli 2023	• Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2023 • Kinerja Produksi dan Pemasaran s/d Semester I 2023
11	22 Agustus 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Juli 2023 • Kinerja Keuangan s/d Juli Tahun 2023 • Highlight Progres Investasi 2023
12	20 September 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Agustus 2023 • Kinerja Keuangan s/d Agustus Tahun 2023 • Prognosa s/d Desember Tahun 2023
13	05 Oktober 2023	• Pembahasan Draft RKAP 2024 Tahun 2024
14	24 Oktober 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan September 2023 • Kinerja Keuangan s/d September Tahun 2023
15	10 November 2023	• Progres Tindak Lanjut atas Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal per Triwulan III 2023
16	15 November 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Oktober 2023 • Kinerja Keuangan s/d Oktober Tahun 2023 • Update Prognosa Tahun 2023
17	21 Desember 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan November 2023 • Kinerja Keuangan s/d November Tahun 2023 • Update Prognosa Tahun 2023



Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Frekuensi dan Tata Cara Pemberian Nasihat kepada Direksi

Pemberian nasihat dari Dewan Pengawas kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal terdiri dari 3 (tiga) jenis rapat, yaitu:

1. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Pengawas, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
2. Rapat Dewan Pengawas (RAKOM) yaitu rapat internal Dewan Pengawas dan/atau dengan mengundang Direktur bidang yang terkait.
3. Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi (RAKOMDIR) yaitu Rapat Dewan Pengawas bersama-sama dengan Direksi.

Pengawasan Dewan Pengawas terhadap Implementasi Strategi Perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas

Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk dapat menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, oleh karenanya Dewan Pengawas senantiasa berusaha menambah dan memutakhirkan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi Dewan Pengawas, Perusahaan memberikan kesempatan bagi untuk mengikuti berbagai pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, dan/ atau *conference* baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya ditanggung oleh Perum Jasa Tirta II.

Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas selama tahun 2023 telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab "Profil Perusahaan", sub bab "Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern".

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Penerapan Tata Kelola Bagi Perusahaan Umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

Implementation of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities

Advice to the Board of Directors: Frequency and Procedures

The Supervisory Board provides advice to the Board of Directors both formally and informally through meetings. Formal meetings are divided into three types:

1. *Committee Meetings, which are overseen by the Supervisory Board and include Audit Committee Meetings, Risk Monitoring Committee Meetings, and Remuneration and Nomination Committee Meetings.*
2. *Supervisory Board Meeting (RAKOM) is an internal meeting of the Supervisory Board and/or by inviting the relevant field's Director.*
3. *Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors (RAKOMDIR), i.e. Meeting of the Supervisory Board with the Board of Directors.*

Implementation of Corporate Strategy Competency Development Supervisory Board

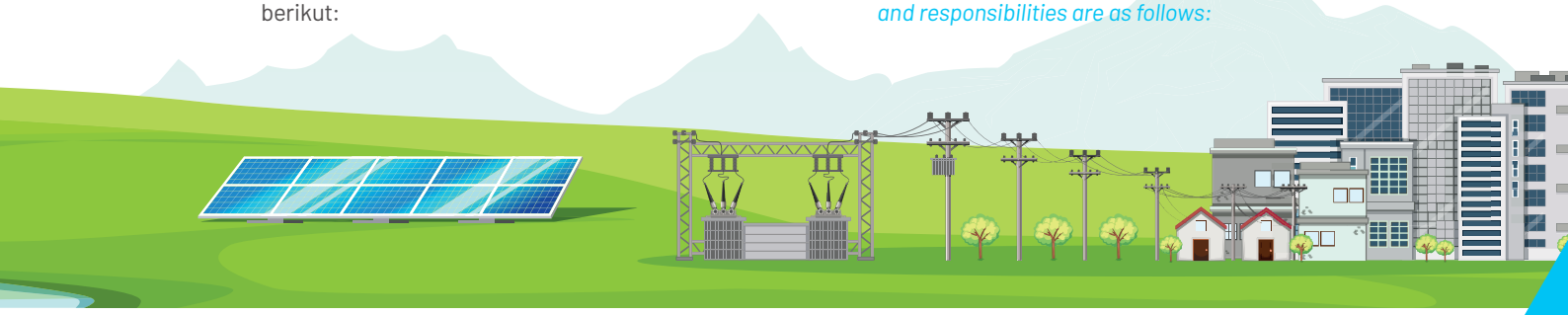
Supervisory's Board

The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out its supervisory duties and providing advice to the Board of Directors, so the Supervisory Board is constantly attempting to add and update its knowledge or competence. To facilitate the implementation of improving the Supervisory Board's competence, the Company provides opportunities for Perum Jasa Tirta II to participate in various special education, training, workshops, seminars, and/or conferences held both domestically and abroad.

Information on competency development programmes attended by the Supervisory Board during 2023 has been presented in this Annual Report, chapter "Company Profile", sub-chapter "Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit".

Implementation of the Supervisory Board's Duties

For the Implementation of Good Corporate Governance for Public Companies, the Supervisory Board's duties and responsibilities are as follows:



1. Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas dilakukan melalui *self assessment* atas kinerja Dewan Pengawas dan dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam RPB.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh pemegang saham. Kinerja Dewan Pengawas dievaluasi berdasarkan berbagai aspek sebagaimana diuraikan sebagai berikut,

1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD). Pelaksanaan penilaian dilakukan secara berkala.
2. Hasil *Self Assessment* GCG Penilaian kinerja Dewan Pengawas dapat diukur dari hasil pencapaian *self assessment* GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya. Pelaksanaan self assessment GCG merujuk pada Peraturan Perusahaan Indonesia.
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan:
   a. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Pengawas merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.
   b. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing Anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab

1. *Ensuring that Good Governance is implemented in all business activities of the Company at all levels or levels of the organization.*
2. *Oversee the execution of the Board of Directors' duties and responsibilities and provide advice to the Board of Directors.*
3. *The Supervisory Board is responsible for directing, monitoring, and evaluating the Company's strategic policies.*

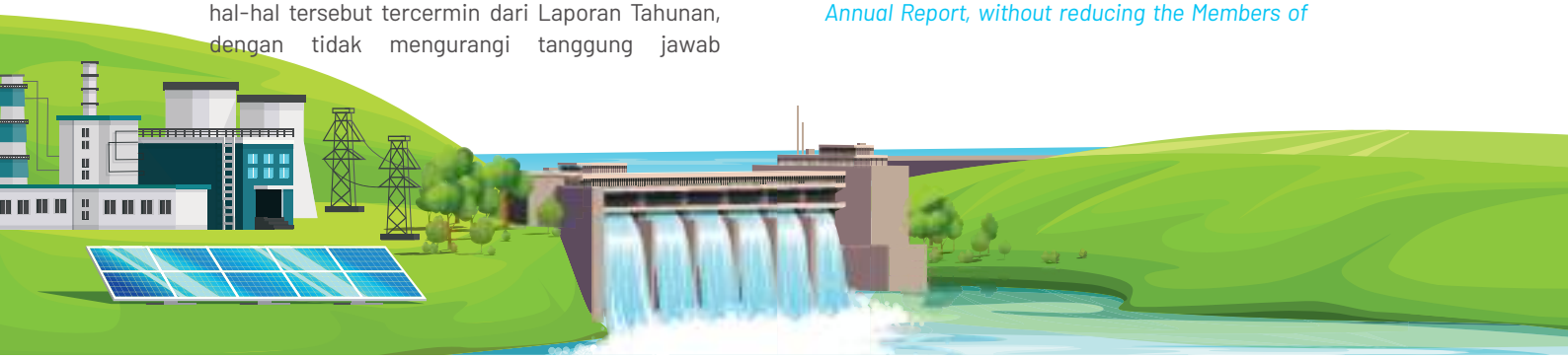
Supervisory Board Performance Evaluation

The Supervisory Board's Performance Assessment is carried out through a self-assessment of the Supervisory Board's performance and is reported and accounted for at the GMS.

Procedure for Carrying Out the Supervisory Board's Performance

Evaluation The shareholders conduct the Supervisory Board's performance evaluation. The Supervisory Board's performance is evaluated based on a number of factors, which are detailed below.

1. *Overseeing the implementation of the Board of Directors' General Policy (KUD). The assessment is done on a regular basis.*
2. *GCG Self-Assessment Findings The Supervisory Board's performance can be assessed using the results of the GCG self-assessment achievement, Particularly in evaluating aspects of the Supervisory Board and its supporting organs. The GCG self-assessment implementation is based on the Indonesian Company Regulations.*
3. *Accountability for the Annual Report and Work Report of the Company:*
   a. *In its capacity as a supervisor, the Supervisory Board submits a supervisory responsibility report on the Company's management to the Board of Directors. The Supervisory Board's supervisory report is included in the Annual Report, which is submitted to the RPB for approval.*
   b. *With the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements, the RPB has given each Member of the Supervisory Board full release and discharge of responsibilities insofar as these matters are reflected in the Annual Report, without reducing the Members of*



Anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II.

c. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka perlaksanaan atas GCG.

4. Penilaian Mandiri *(Self Assessment)* Dewan Pengawas Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Pengawas dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan.

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Pemilik Modal. Evaluasi dan penilaian kinerja Dewan Pengawas dilakukan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan kinerja kolegial maupun individual. Hasil penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal menjadi bagian tak terpisahkan dalam penentuan skema dan besaran remunerasi dan kompensasi Dewan Pengawas maupun pertimbangan dalam penunjukan kembali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Prosedur penilaian kinerja Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal dilakukan melalui penyelenggaraan RPB, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas dalam fungsinya sebagai pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengawasan atas pengelolaan Perusahaan oleh Direksi. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RPB untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RPB telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas sejauh hal-hal tersebut tercermin dari Laporan Tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Pengawas dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan/atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang dapat dipenuhi dengan aset Perum Jasa Tirta II.
3. Pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada RPB merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perum Jasa Tirta II dalam rangka pelaksanaan GCG.

the Supervisory Board's responsibility in the event of criminal acts or errors and/or omissions that cause losses to third parties, which can be fulfilled with Perum Jasa.

c. The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of the Supervisory Board's accountability for the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.

4. Supervisory Board Self-Assessment

The disclosure of the Supervisory Board's self-evaluation policy is done not only to meet the transparency requirement, but also as a form of accountability for implementation.

Supervisory Board Performance Evaluation

The Capital Owner is in charge of the Supervisory Board's performance evaluation. The Supervisory Board's performance is evaluated and assessed as a whole, taking into account both collegial and individual performance. The results of the Capital Owners' evaluation of the Supervisory Board's performance become an integral part of determining the Supervisory Board's remuneration and compensation scheme and amount, as well as considerations in the re-appointment of the members of the Supervisory Board concerned.

Procedure for Supervisory Board

Performance Evaluation The Capital Owner evaluates the performance of the Supervisory Board through the implementation of RPB, which uses the following mechanism:

1. The Supervisory Board, in its capacity as a supervisor, submits a report on the Board of Directors' responsibility for supervision of the Company's management. This report is included in the Annual Report, which is forwarded to the RPB for approval.
2. With the approval of the Annual Report and ratification of the financial statements, the RPB has granted full release and discharge of responsibilities to each member of the Supervisory Board insofar as these matters are reflected in the Annual Report, without prejudice to the members of the Supervisory Board's responsibility in the event of a criminal act or error and/or negligence that causes losses to third parties that can be met with Perum Jasa Tirta II's assets
3. The Supervisory Board's accountability to the RPB is a manifestation of supervision over the management of Perum Jasa Tirta II in the context of implementing GCG.



Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Pemilik Modal menilai dan mengevaluasi kinerja pengawas Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain:

1. Pengawasan terhadap realisasi Kebijakan Umum Direksi (KUD) yang dilakukan secara berkala;
2. Penilaian mandiri *(self-assessment)* GCG pada aspek Dewan Pengawas dan organ penunjangnya dengan merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pertanggungjawaban Laporan Tahunan dan Laporan Kerja Perusahaan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Dewan Pengawas dalam Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dilakukan oleh Pemilik Modal.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas

Berdasarkan hasil keputusan RPB, Pemilik Modal menilai Dewan Pengawas telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Pengawas atas pengawasan yang dilakukan hingga akhir tahun buku.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Pengawas

Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing komite Dewan Pengawas secara rutin setiap tahun sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tugas organ pendukung Dewan Pengawas. Masing-masing komite Dewan Pengawas dinilai dan dievaluasi berdasarkan kinerja pelaksanaan tugas komite yang mencakup realisasi pelaporan pelaksanaan tugas komite sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, frekuensi kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan dalam tugasnya membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan Dewan Pengawas yang pada tahun buku 2023 telah dilaksanakan dengan baik.

Criteria for Capital Owners Supervisory Board Performance

Assessment assesses and evaluates the Supervisory Board's supervisory performance by taking into account several criteria, including:

1. *Periodic supervision of the implementation of the Board of Directors General Policy (KUD);*
2. *Self-assessment of GCG on aspects of the Supervisory Board and its supporting organs using the applicable laws and regulations;*
3. *Accountability for the Annual Report and Work Report of the Company*

The Capital Owner is the party conducting

The assessment of the Supervisory Board's performance in the Joint Discussion Meeting (RPB).

Results of the Supervisory Board's Performance Evaluation

Based on the RPB decision, the Capital Owner determined that the Supervisory Board had carried out its duties properly and granted the Supervisory Board full waiver of responsibility for the supervision performed until the end of the fiscal year.

Evaluation of the Supervisory Board Committee's Performance

Every year, the Supervisory Board conducts performance assessments of each committee of the Supervisory Board as a material consideration in order to improve the quality of the Supervisory Board's supporting organs' duties implementation. Each Supervisory Board committee is assessed and evaluated based on the performance of the committee's task implementation, which includes the realization of reporting on the implementation of the committee's duties in accordance with their respective responsibilities, the frequency of meeting attendance, and recommendations given in their duties to assist the implementation of the Supervisory Board's supervisory and advisory functions, which in the fiscal year 2003.



Key Performance Indicators (KPI) Dewan Pengawas

Dewan Pengawasan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam KPI Dewan Pengawasan Tahun 2023. Komposisi KPI Dewan Pengawas Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Aspek, yaitu Aspek Perencanaan, Asep Pengawasan dan Nasehat, Aspek Pelaporan serta Aspek Dinamis. Realisasi Pencapaian KPI Dewan Pengawas Tahun 2023 adalah sebesar 109,08 dengan rincian sebagai berikut:

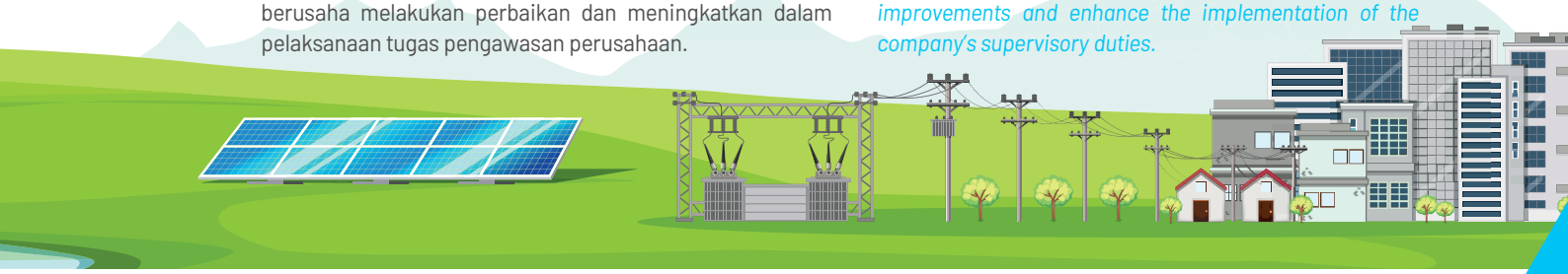
Supervisory Board Key Performance Indicators

The Supervisory Board has carried out the activities set out in the KPIs of the Supervisory Board for 2023. The composition of the KPIs of the Supervisory Board in 2023 consists of 4 (four) aspects, namely the Planning Aspect, the Supervision and Advice Aspect, the Reporting Aspect and the Dynamic Aspect. The realisation of the KPI Achievement of the Supervisory Board Year 2023 is 109.08 with the following details:

No	Indikator	Periodik	Satuan	Bobot	Rencana Output	Realisasi Output	Nilai Capaian
A.	**Aspek Perencanaan**			**10**			**10**
	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas tahun 2024	Tahunan	Dokumen	10	1	1	10
B.	**Aspek Pengawasan dan Nasehat**			**60**			**73,08**
	1. Memberikan tanggapan kepada Pemilik Modal terhadap:						
	a. RKAP	Tahunan	Surat	4	1	1	4
	b. Laporan Tahunan	Tahunan	Surat	4	1	1	4
	c. Analisis Kinerjan Triwulanan	Triwulan	Surat	6	3	3	6,00
	2. Memberikan Nasehat kepada Direksi	Setahun	Surat/Risalah	12	12	23	23
	3. Rapat Internal Dewan Pengawas						
	a. Jumlah Rapat	Bulanan	Kali	10	12	12	10,00
	b. Kehadiran Rapat	Bulanan	%	4	100	100	4
	c. Penyelesaian Risalah Rapat	Bulanan	Risalah	4	12	12	4,00
	4. Rapat Komite Audit	Setahun	Risalah	5	12	17	7,08
	5. Rapat Komite Pemantau Manajemen Resiko	Setahun	Risalah	5	12	12	5
	6. Kunjungan Kerja Dewan Pengawas	Setahun	Kunjungan	6	6	6	6
C.	**Aspek Pelaporan**			**15**			**15**
	1. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Semesteran	Semester	Laporan	5	1	1	5
	2. Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Tahunan	Tahunan	Laporan	10	1	1	10
D.	**Aspek Dinamis**			**15**			**11**
	1. Pengusulan Eksternal Auditor Kepada Pemilik Modal	Tahunan	Surat	4	1	1	4
	2. Peningkatan Kompetensi	Setahun	Kali	4	2	2	4
	3. Hasil *Assessment* GCG Dewan Pengawas	Tahunan	Skor	4	27	n/a	n/a
	4. Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Temuan SPI/Auditor/*Assessor* GCG	Setahun	Surat	3	1	1	3
	Total			**100**			**109,08**

Laporan Tugas Pengawasan Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap jalannya perusahaan, sekaligus perwujudan *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Pengawas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta didukung penuh oleh Komite Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas. Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berupaya menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara lebih efektif dan efisien. Dewan Pengawas terus mendorong agar manajemen dapat meningkatkan kinerja serta akan terus berusaha melakukan perbaikan dan meningkatkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan.

The 2023 Supervisory Task Report is a form of accountability of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II in carrying out its supervisory and advisory duties towards the running of the company, as well as a manifestation of Good Corporate Governance (GCG). In carrying out supervisory and advisory activities, the Supervisory Board is guided by the provisions of the applicable laws and regulations and is fully supported by the Supervisory Board Committee and the Supervisory Board Secretariat. The Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II endeavours to perform its supervisory and advisory duties more effectively and efficiently. The Supervisory Board continues to encourage management to improve performance and will continue to strive to make improvements and enhance the implementation of the company's supervisory duties.



Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perum Jasa Tirta II. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dapat dilakukan apabila:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara;
4. Melanggar ketentuan anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengundurkan diri Selain itu, jabatan anggota Dewan Pengawas juga dapat berakhir apabila:
   a. Meninggal dunia;
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Masa jabatannya berakhir; dan
   d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RPB.

Mechanism for Supervisory Board Resignation and Dismissal

According to the Articles of Association of Perum Jasa Tirta II, all members of the Supervisory Board must have adequate integrity, competence, and reputation. Members of the Supervisory Board may be dismissed if they:

1. *Are unable to carry out their duties properly;*
2. *Are found guilty by a court decision with permanent legal force;*
3. *Engage in actions that are detrimental to the Company and/or the state;*
4. *Violate the provisions of the articles of association or applicable laws and regulations.*
5. *Resigning Furthermore, a member of the Supervisory Board's position may be terminated if they:*
   a. *die;*
   b. *No longer meets the requirements for membership on the Supervisory Board under the provisions of the articles of incorporation and applicable laws and regulations;*
   c. *His term of office expires;*
   d. *Dismissed based on the GMS decision.*

Penyampaian Tanggapan/Persetujuan

Dalam rangka menjalankan tugas terkait dengan pemberian tanggapan dan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Menteri BUMN, Dewan Pengawas telah menerbitkan 31 (tiga puluh satu) surat tanggapan/ persetujuan selama tahun 2023, yaitu;

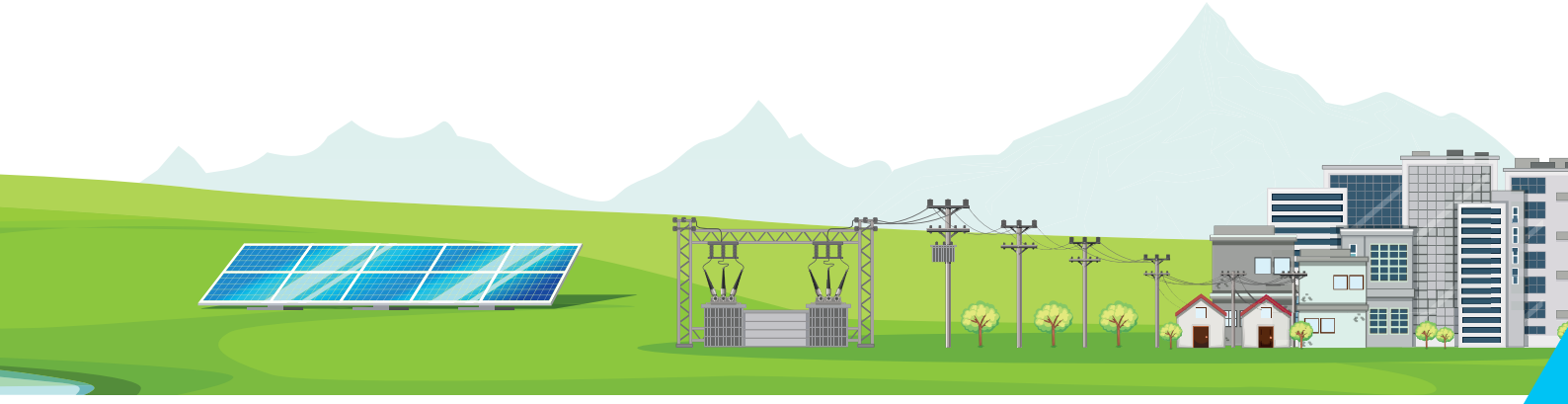
Submission of Response/Approval

In order to carry out its duties related to the provision of responses and approvals of the Supervisory Board in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the Regulations of the Minister of SOEs, the Supervisory Board has issued 31 (thirty-one) response/approval letters during 2023, namely;

NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
1	S-01/DP/2023	04 Januari 2023	Tanggapan atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jasa Tirta II Tahun 2023
2	S-03/DP/2023	09 Januari 2023	Tanggapan Tertulis Rencana Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Milik Perum Jasa Tirta II yang terkena dampak PSN SPAM Regional Jatiluhur I
3	S-06/DP/2023	27 Februari 2023	Pelaksanaan Program Investasi Perum Jasa Tirta II
4	S-07/DP/2023	28 Februari 2023	Penyampaian Usulan *Nominated Talent* Perum Jasa Tirta II Tahun 2023
5	S-09/DP/2023	15 Maret 2023	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tahun 2022
6	S-10/DP/2023	16 Maret 2023	Tanggapan Tertulis Rencana Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset milik Perum Jasa Tirta II yang tekena dampak PSN Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu)



NO	NOMOR SURAT	TANGGAL	PERIHAL
7	S-11/DP/2023	17 Maret 2023	*Key Performance Indicators (KPI)* Direksi secara Individu
8	S-13/DP/2023	12 April 2023	Persetujuan Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perum Jasa Tirta II
9	S-14/DP/2023	12 April 2023	Persetujuan *Key Performance Indicators (KPI)* Direksi Perum Jasa Tirta II secara Individu Tahun 2023
10	S-15/DP/2023	27 April 2023	Tanggapan Atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 *(Audited)* Perum Jasa Tirta II
11	S-16/DP/2023	02 Mei 2023	Usulan Agenda Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuagan Tahun Buku 2022 Perum Jasa Tirta II
12	SR-17/DP/2023	03 Mei 2023	Usulan Keputusan Pemilik Modal Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2022 untuk Agenda Remunerasi
13	S-18/DP/2023	08 Mei 2023	Laporan Evaluasi Pelaksana Jasa Audit atas Laporan Keuangan Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2022
14	S-21/DP/2023	17 Mei 2023	Tanggapan dan Analisa Kinerja Triwulan I Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II
15	S-22/DP/2023	25 Mei 2023	Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Milik Perum Jasa Tirta II berupa Barang Inventaris dengan umur Ekonomis di bawah 5 Tahun
16	S-23/DP/2023	07 Juni 2023	Penyesuaian Anggaran Program Investasi RKAP Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II
17	S-24/DP/2023	22 Juni 2023	Tanggapan Atas Usulan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perum Jasa Tirta II (Perum Jasa Tirta Luhur)
18	S-25/DP/2023	22 Juni 2023	Usulan Agenda Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 Perum Jasa Tirta II
19	S-26/DP/2023	21 Juli 2023	Permintaan Informasi Tambahan tekait Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perum Jasa Tirta II
20	S-27/DP/2023	09 Agustus 2023	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Semester I Tahun 2023
21	S-28/DP/2023	10 Agustus 2023	Tanggapan dan Analisis Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II
22	S-29/DP/2023	11 Agustus 2023	Penetapan Klasifikasi Risiko Perum Jasa Tirta II
23	S-30/DP/2023	15 Agustus 2023	Rencana Perbaikan Kinerja Perum Jasa Tirta II
24	S-31/DP/2023	15 Agustus 2023	Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangam Perum Jasa Tirta II Tahun Buku 2023
25	S-35/DP/2023	12 September 2023	Penyesuaian Anggaran Program Investasi RKAP Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II – Rehabilitasi Pompa Tarum Barat
26	S-37/DP/2023	29 September 2023	Kegiatan *Assessment GCG* Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II
27	S-38/DP/2023	16 Oktober 2023	Penyesuaian Anggaran Program Investasi RKAP Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II
28	S-39/DP/2023	23 Oktober 2023	Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan *Key Performance Indicatos (KPI)* Dewan Pengawas Tahun 2024
29	S-44/DP/2023	10 November 2023	Tanggapan dan Analisa Kinerja s/d Triwulan III Tahun 2023 Perum Jasa Tirta
30	S-45/DP/2023	24 November 2023	Penguatan Implentasi Sistem Pengendalian Intern
31	S-50/DP/2023	29 Desember 2023	Tanggapan Atas Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jasa T5rta II Tahun 2024



Pelaksanaan Kunjungan Lapangan
Field Trip Implementation

Dewan Pengawas telah mengadakan kunjungan lapangan ke Divisi/Unit Usaha Sebanyak 5 (lima) kali sebagai evaluasi dan monitoring pengelolaan perusahaan dan satu (1) kali kunjungan lapangan dalam rangka benchmark pengelolaan destinasi wisata sebagai berikut;

The Supervisory Board has conducted field visits to Divisions/Business Units 5 (five) times as evaluation and monitoring of company management and one (1) field visit in the context of benchmark management of tourist destinations as follows;



#1 I 26 Januari 2023	#2 I 3-4 Maret 2023	#3 I 18-19 Mei 2023
Kunjungan Kerja ke Pompa Air Baku Cawang, Program Penghijauan Saluran Tarum Barat dan Bangunan Eks Kantor Seksi untuk SPAM Regional Jatiluhur I	Kunjungan Kerja Optimalisasi Aset Perusahaan	Kunjungan Kerja Pengembangan Wilayah Kerja Baru ke Bendung Jatigede Sumedang

#4 I 14-15 Juli 2023	#5 I 29 September 2023	#6 I 27 Oktober 2023
Kunjungan Lapangan Pengelolaan Destinasi Wisata oleh PT Destinasi Tirta Nusantara (Panorama) – Caldera Resort, Sukabumi	Kunjungan Kerja Dewan Pengawas ke Divisi PLTA	Kunjungan Lapangan Dewan Pengawas ke Situ Cipule Karawang

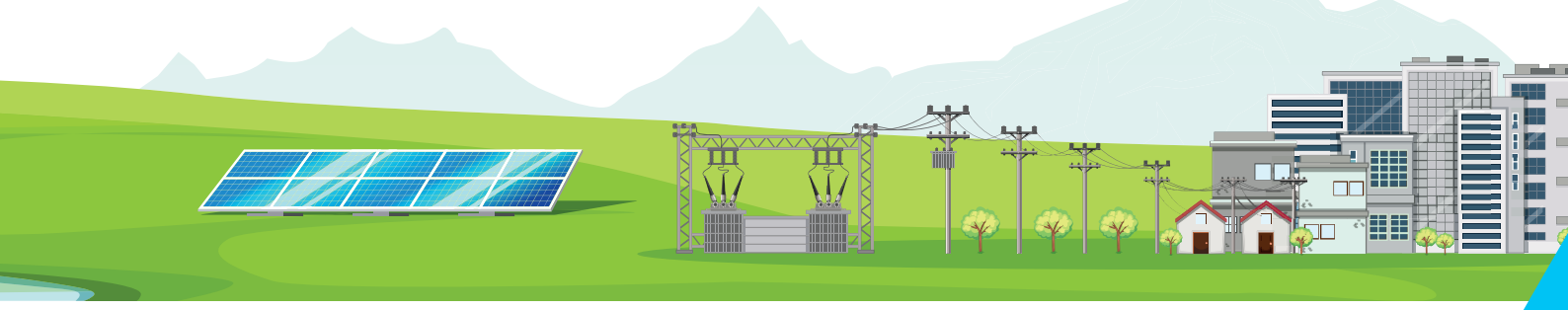
Peningkatan Kompetensi Dewan Pengawas
Supervisory Board Competence Improvement

Program pengembangan kompetensi bagi Dewan Pengawas dilaksanakan dengan mengikuti seminar/ *workshop/training online* yang diselenggarakan oleh berbagai institusi training, Adapun pelatihan yang diikuti oleh Dewan Pengawas sebagai berikut:

The competency development programme for the Supervisory Board is carried out by attending seminars/ workshops/online training organised by various training institutions, The training attended by the Supervisory Board is as follows:



Nama	Jabatan	Kegiatan Workshop Yang Diikuti	Tanggal Pelaksanaan
Kelik Wirawan Wahyu Widodo	Ketua Dewan Pengawas	• Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	13 Juni 2023
		• Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	14 September 2023
		• ESG for Boards: Governance of ESG	28 September 2023
		• GRC Integrated Information for Supervisory Board	05 Oktober 2023
		• Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham Untuk RKAP Tahun 2024	20 Oktober 2023
		• CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023
		• Sosialisai Juknis Penyusunan KPI, Proses Manajemen Risiko dan Pelaporan Manajemen Risiko	14 November 2023
		• Pelatihan Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	16-17 November 2023
		• Sosialisasi Juknis Penilaian Indek Kematang Risiko (RMI) di Lingkungan BUMN	20 Desember 2023
Nuning Sri Rejeki Wulandari	Anggota Dewan Pengawas	• Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	13 Juni 2023
		• Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	14 September 2023
		• Riskhub International Webinar: Optimizing Business Continuity Strategy to Achieve Sustainable Objectives	27 September 2023
		• ESG for Boards: Governance of ESG	28 September 2023
		• GRC Integrated Information for Supervisory Board	05 Oktober 2023
		• Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham Untuk RKAP Tahun 2024	20 Oktober 2023
		• CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023
		• Sosialisai Juknis Penyusunan KPI, Proses Manajemen Risiko dan Pelaporan Manajemen Risiko	14 November 2023
		• Pelatihan Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	16-17 November 2023
		• Sosialisasi Juknis Penilaian Indek Kematang Risiko (RMI) di Lingkungan BUMN	20 Desember 2023
Romy Marcandi	Anggota Dewan Pengawas	• Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN	06 April 2023
		• Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	13 Juni 2023
		• Result-Focused Project Design and Monitoring	20 Juni 2023
		• Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	14 September 2023
		• ESG for Boards: Governance of ESG	28 September 2023
		• GRC Integrated Information for Supervisory Board	05 Oktober 2023
		• Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham Untuk RKAP Tahun 2024	20 Oktober 2023
		• Sosialisai Juknis Penyusunan KPI, Proses Manajemen Risiko dan Pelaporan Manajemen Risiko	14 November 2023
		• Pelatihan Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	16-17 November 2023
		• Sosialisasi Juknis Penilaian Indek Kematang Risiko (RMI) di Lingkungan BUMN	20 Desember 2023
Fatkhurohman Taufik	Anggota Dewan Pengawas Independen	• Sosialisasi Peraturan Menteri BUMN	06 April 2023
		• Sosialisasi Juknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	13 Juni 2023
		• GRC Summit 2023: Building Resilient Future Through GRC and ESG	24-25 Agustus 2023
		• Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	14 September 2023
		• ESG for Boards: Governance of ESG	28 September 2023
		• GRC Integrated Information for Supervisory Board	05 Oktober 2023
		• Sosialisasi Aspirasi Pemegang Saham Untuk RKAP Tahun 2024	20 Oktober 2023
		• CG Methodology and Environmental and Social Management Systems	25 Oktober 2023
		• Sosialisai Juknis Penyusunan KPI, Proses Manajemen Risiko dan Pelaporan Manajemen Risiko	14 November 2023
		• Pelatihan Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	16-17 November 2023
		• Sosialisasi Juknis Penilaian Indek Kematang Risiko (RMI) di Lingkungan BUMN	20 Desember 2023







Direksi
Board of Directors

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan. Direksi mengelola Perusahaan sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

The Board of Directors is fully responsible for the management of the Company and the establishment of strategies and policies within the Company and their implementation in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the authority and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The Company's Articles of Association explain the duties and responsibilities of the Board of Directors.

Jumlah dan Komposisi Direksi / *Number and Composition of Directors*

No	Nama / Name	Jabatan / Position	Kep. Menteri Tentang Pengangkatan	Keterangan / Description
	Imam Santoso	Direktur Utama / *President Director*	SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 *SK-350/MBU/10/2020 27 October 2020*	Sejak 27 Oktober 2020 sampai dengan sekarang / *SK-350/MBU/10/2020 27 Oktober 2020 until now*
	Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan / *Director of Operations and Maintenance*	SK-196/MBU/06/2020 11 Juni 2020 *SK-196/MBU/06/2020 June 11, 2020*	Sejak 11 Juni 2020 sampai dengan sekarang / *Since June 11, 2020 until now*
	Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan ,Sumber Daya Manusia & MANRISK / *Director of Finance, Human Resources & MANRISK*	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan / *SK 420/MBU/12/2021 Dated December 29, 2021 concerning the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)*	Sejak tanggal 29 Desember 2021 s/d Sekarang / *From December 29, 2021 to now*
	Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Usaha / *Director of Business Development*	SK 420/MBU/12/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Pemberhentian Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota2 Direksi Perusahaan Umum(Perum) Jasa Tirta II / *SK 420/MBU/12/2021 Dated December 29, 2021 concerning the Dismissal of the Transfer of Duties and the Appointment of Members of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum)*	Sejak tanggal 29 Januari 2021 s/d Sekarang / *From January 29, 2021 to now*



Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman tata kelola perusahaan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah:

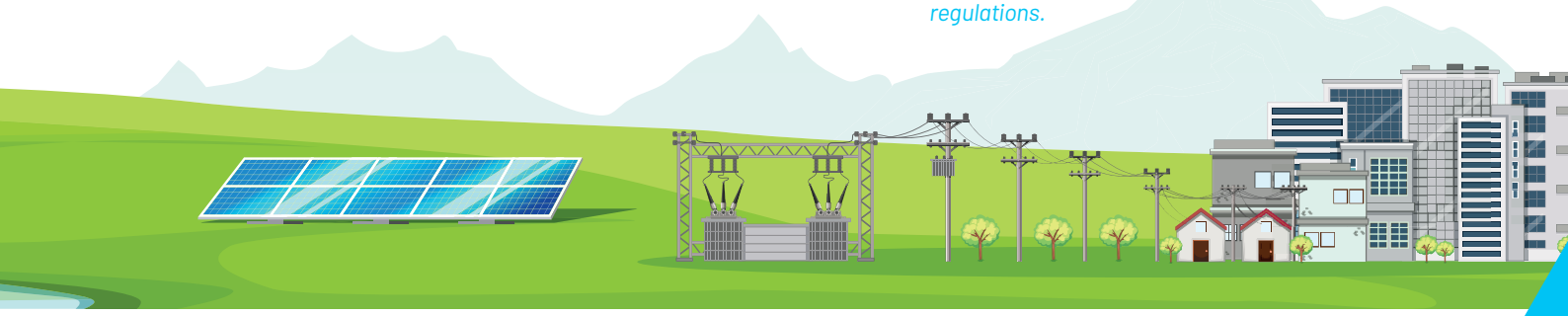
a. Orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.
b. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal pengangkatan kembali pada posisi jabatan yang sama bagi anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, tidak berlaku mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.
c. Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan Lulus uji kelayakan dan kepatutan dan anggota Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.
d. Antar anggota dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping. Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka Menteri berwenang memberhentikan salah seorang dari Dewan Pengawas tersebut.
e. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
    1. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, atau badan usaha milik swasta.
    2. Anggota Dewan Pengawas atau Dewan
    3. Pengawas pada BUMN.
    4. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi atau lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah.

Board of Directors Evaluation Criteria

All members of the Board of Directors meet the criteria outlined in the applicable laws and regulations, as well as the corporate governance guidelines.

People who can be appointed to the Board of Directors are:

a. Individuals who can carry out legal actions and have never been declared bankrupt or become members of the Board of Directors or Supervisory Board who are found guilty of causing a company or Perum to be declared bankrupt or people who have never been convicted of committing a crime that is detrimental to the state's finances.
b. Members of the Board of Directors are appointed using a fit and proper test mechanism administered by a team and/or professional institution established and/or appointed by the Minister. The fit and proper test mechanism does not apply in the case of reappointment to the same position for members of the Board of Directors who are considered capable of carrying out their duties well during their term of office.
c. Candidates for Board of Directors who have been declared to have passed the fit and proper test, as well as members of the Board of Directors who have been reappointed, must sign a management contract before being appointed to the Board of Directors.
d. It is prohibited to have blood relations or marital relations up to the third degree between members and between members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board, either in a straight line or a sideways line. If such circumstances arise, the Minister has the authority to dismiss one of the Supervisory Boards.
e. Board members are not permitted to hold concurrent positions as:
    1. Members of the Board of Directors in BUMN, BUMD, or privately owned enterprises.
    2. Supervisory Board Member
    3. Supervisory Board Member in BUMN
    4. Positions in central or regional government agencies or institutions with structural and functional responsibilities.
    5. Other positions as defined by applicable laws and regulations.



5. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
7. Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah, dan/atau Wakil Kepala Daerah.
8. Anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kepengurusan Perusahaan dan penetapan strategi dan kebijakan di lingkungan Perusahaan serta pelaksanaannya sesuai dengan tujuan usaha Perusahaan. Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2022.

Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Direksi menyusun rencana kerja jangka panjang *(Corporate Plan)*, Rencana Bisnis Perusahaan *(Business Plan)*, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemilik Modal untuk mendapatkan persetujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi kepada Pemilik Modal;
4. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perusahaan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
5. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (Surat Keputusan AI), auditor eksternal, hasil audit atau hasil audit lain;
6. Direksi menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Perusahaan;

6. *Other positions that could lead to conflicts of interest.*
7. *Members of the Board of Directors are prohibited from being administrators of political parties, candidates for legislative members, legislative members, candidates for Regional Heads, candidates for Deputy Regional Heads, Regional Heads, and/or Deputy Regional Heads.*
8. *Members of the Board of Directors are not permitted to benefit personally from the Company's activities other than the income received as a member of the Board of Directors.*

Board of Directors Duties and Responsibilities

The Board of Directors is fully responsible for the Company's management, as well as the development and implementation of strategies and policies within the Company in accordance with the Company's business objectives. The Board of Directors manages the Company in accordance with the authorities and responsibilities outlined in Government Regulation No. 25 of 2023's Articles of Association.

The duties and responsibilities of the Board of Directors include:

1. *The Board of Directors is fully responsible for the Company's management implementation;*
2. *The Board of Directors develops a long-term work plan (Corporate Plan), a Company Business Plan (Business Plan), and a Corporate Work Plan and Budget (RKAP);*
3. *The Board of Directors submits an annual report to the General Meeting of Capital Owners for approval as a form of accountability for the implementation of the Board of Directors' duties to the Capital Owners;*
4. *The Board of Directors incorporates GCG principles into all aspects of the Company's operations at all levels or levels of the organization;*
5. *The Board of Directors follows up on internal audit findings and recommendations (AI Decision Letter), external auditors, audit findings, or other audit findings;*
6. *The Board of Directors develops the Company's risk management policies and strategies and is responsible for putting those policies and strategies into action.*



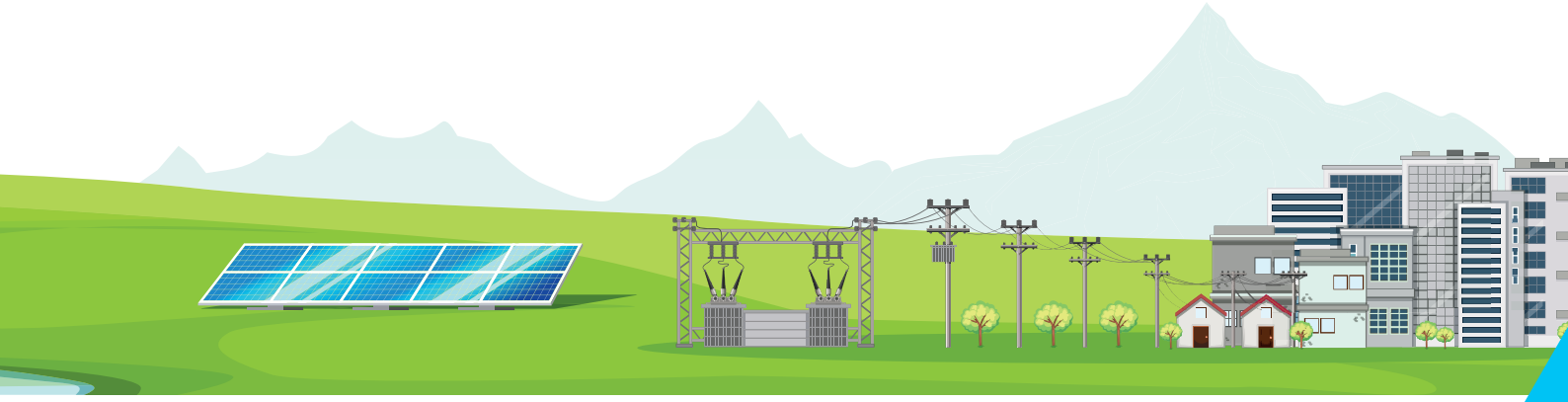
7. Direksi mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan dengan lancar dan sehat;
8. Direksi menyediakan atau memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

7. It is the responsibility of the Board of Directors to develop and maintain an effective internal control system, as well as to ensure that the system runs smoothly and securely.
8. The Board of Directors provides or provides the Supervisory Board with accurate, relevant, and timely data and information.

Adapun penetapan pembagian tugas dan pelimpahan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

The Board of Directors has determined the division of tasks and delegation of authority as follows:

JABATAN / *Position*	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / *Description of Duties and Authorities*
Direktur Utama / ***President Director***	Direktur Utama mempunyai tugas untuk melaksanakan kepengurusan Perusahaan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian di Bidang Keuangan, SDM, Operasi dan Pemeliharaan, Pengembangan Usaha, Kesekretariatan, Pengawasan Intern, Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen Perusahaan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / *The President Director has the duty to carry out the management of the Company which includes guidance, supervision, control in the fields of Finance, Human Resources, Operations and Maintenance, Business Development, Secretariat, Internal Control, Performance Control and Company Management System in order to fulfill the purposes and objectives of the Company.* Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama mempunyai fungsi: / *In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the President Director has the following functions:* a. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Keuangan dan Manajemen Risiko; / *Establish the Company's management policies in the Management of Financial and Risk Management tasks;* b. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Operasi dan Pemeliharaan; / *Establishing the Company's management policy in the Management of Operation and Maintenance tasks;* c. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam Pengelolaan tugas Pengembangan usaha yang meliputi kebijakan: Pengembangan Usaha; / *Establishing company management policies in the management of business development tasks which include the following policies: Business Development;* d. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko, Direktur Operasi dan Pemeliharaan dan Direktur Pengembangan Usaha; / *Improve coordination and working relationships with the Director of Finance, HR and Risk Management, Director of Operations and Maintenance and Director of Business Development;* e. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan; / *Establishing the Company's management policy*; f. Melakukan pembinaan dan pengendalian tugas Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen; / *Conducting coaching and controlling the duties of the Corporate Secretariat, Internal Control Unit, Performance Control Division and Management System;* g. Melakukan pembinaan hubungan dengan instansi pemerintah, swasta dan komunitas masyarakat yang berkaitan dengan tugas Perusahaan; / *Conducting relationship development with government agencies, private sector and community related to the Company's duties;* h. Melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan; dan / *Implementing Good Corporate Governance; and* i. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri dan Menteri Teknis. / *Submit a report on the results of the implementation of tasks to the Government in this case the Minister and the Technical Minister.* **Susunan Organisasi /** ***Organization Structure*** Direktur Utama membina, mengawasi dan mengendalikan para Direktur dan Unit Kerja sebagai berikut: / *The President Director fosters, supervises and controls the following Directors and Work Units:* a. Direktorat Keuangan SDM dan Manajemen Risiko; / *Directorate of HR Finance and Risk Management;* b. Direktorat Operasi dan Pemeliharaan; / *Directorate of Operations and Maintenance;* c. Direktorat Pengembangan Usaha; / *Directorate of Business Development;* d. Sekretariat Perusahaan; / *Corporate Secretariat;* e. Satuan Pengawasan Intern; dan / *Internal Control Unit; and* f. Divisi Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen. / *Performance Control and Management System* Division.



JABATAN / *Position*	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / *Description of Duties and Authorities*
Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko / ***Director of Finance, HR and Risk Management***	Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / *The Director of Finance, HR and Risk Management has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on the company's strategic planning activities which include RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and development of ICT to fulfill the purposes and objectives of the Company.* Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko mempunyai fungsi: / *In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Finance, HR and Risk Management has the following functions:* a. Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / *Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;* b. Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / *Fostering, controlling and supervising management in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;* c. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusi; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / *Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;* d. Menyampaikan laporan kinerja di bidang perencanaan strategis perusahaan yang meliputi RJP, RKAP dan Blue Print Perusahaan serta teknologi informasi komunikasi; keuangan dan akuntansi; sumber daya manusia; umum dan TJSL; inventarisasi; pengendalian aset dan kearsiapan; layanan pengadaan; pengelolaan diklat; dan pengembangan ICT; / *Submit a performance report in the field of corporate strategic planning which includes RJP, RKAP and Company Blue Print as well as information and communication technology; finance and accounting; human Resources; general and TJSL; inventory; asset control and archives; procurement services; management of education and training; and ICT development;* e. Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Keuangan dan SDM; dan / *Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, Company Long Term Plan (RJPP) and Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Finance and HR; and* f. Mengkoordinasikan ketersediaan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). / *Coordinate the availability of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Company's Budget Work Plan (RKAP).* **Susunan Organisasi** / ***Organization Structure*** Direktur Keuangan dan SDM membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / *The Director of Finance and HR fosters, supervises and controls the following Work Units:* a. Divisi Rencana Strategis dan Teknologi Informasi Komunikasi; / *Division of Strategic Planning and Information and Communication Technology;* b. Divisi Keuangan dan Akuntansi; / *Finance and Accounting Division;* c. Divisi Sumber Daya Manusia; / *Human Resources Division;* d. Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan / *General Division and Social and Environmental Responsibility;* e. Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan; / *Inventory, Asset Control and Archives Division;* f. Unit Layanan Pengadaan; dan / *Procurement Service Unit; and* g. Unit Layanan Diklat. / *Training Service Unit.*



JABATAN / *Position*	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / *Description of Duties and Authorities*
Direktur Operasi dan Pemeliharaan / *Director of Operation and Maintenance*	Direktur Operasi dan Pemeliharaan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan saran prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan laboratorium; untuk memenuhi maksud dan tujuan Perushaaan. / *The Director of Operations and Maintenance has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on planning and controlling activities for the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; laboratory management; to fulfill the purposes and objectives of the Company.* Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi: / *In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Operations and Maintenance has the following functions:* a. Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasaran ketenagalistrikan; ; pengelolaan SPAM regional 1, pengelolaan laboratorium; / *Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of natural resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; ; regional SPAM management 1, laboratory management.* b. Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan saran prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; pengelolaan SPAM regional 1 dan laboratorium; / *Fostering, controlling and supervising management in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; SPAM Regional 1 and laboratory management;* c. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan saran prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; SPAM Regiopnal 1 , pengelolaan laboratorium; / *Improve coordination and working relationships with Stakeholders in carrying out tasks in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and improvement of SDA infrastructure suggestions; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; SPAM Regional 1 ; laboratory management;* d. Menyampaikan laporan kinerja di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian operasi dan pemeliharaan sumber daya air dan sumber daya listrik; supervisi teknis; pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana SDA; pelaksanaan operasi, pemeliharaan, perbaikan dan pengusahaan sarana prasarana ketenagalistrikan; Pengelolaan SPAM Regional 1; pengelolaan laboratorium; / *Submitting performance reports in the field of planning and controlling the operation and maintenance of water resources and electricity resources; technical supervision; implementation of operation, maintenance and repair of water resources infrastructure; implementation of operation, maintenance, repair and exploitation of electricity infrastructure facilities; management SPAM Regional 1; laboratory management;* e. Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Operasi dan Pemeliharaan. / *Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Operations and Maintenance Directorate.* **Susunan Organisasi / *Organization Structure*** Direktur Operasi dan Pemeliharaan membina, megawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / *The Director of Operations and Maintenance fosters, supervises and controls the following Work Units:* a. Divisi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik; / *Division of Operation and Maintenance of Water Resources and Electrical Resources;* b. Divisi Supervisi Teknis; / *Technical Supervision Division;* c. Unit Wilayah I; / *Regional Unit I;* d. Unit Wilayah II; / *Region II Units;* e. Unit Wilayah III; / *Regional Unit III;* f. Unit Wilayah IV; / *Region IV Units;* g. Unit Wilayah V; / *Region V Units;* h. Unit Wilayah VI; / *Region VI Units;* i. Unit Wilayah VII; / *Region VII Units;* j. Unit PLTA; / *Hydropower Units;* k. Unit Kerja Khusus SPAM Regional Jatiluhur 1 dan / *Jatiluhur Regional SPAM Special Work Unit 1 and* l. Unit Pengelola Program Manfaat Langsung BJPSDA / *BJPSDA Direct Benefit Programme Management Unit* m. Unit Layanan Laboratorium. / *Laboratory Service Unit.*



JABATAN / *Position*	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG / *Description of Duties and Authorities*
Direktur Pengembangan Usaha / *Director of Business Development*	Direktur Pengembangan Usaha memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dalam kegiatan merencanakan, menetapkan, mengendalikan, menganalisis dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan; Pengusahaan Pariwisata dan Hotel untuk memenuhi maksud dan tujuan Perusahaan. / *The Director of Business Development has the main task of carrying out guidance in planning, determining, controlling, analyzing and evaluating activities as well as reporting on Business Development activities; Commercial and Customer Service; Tourism and Hotel Business to fulfill the purposes and objectives of the Company.* Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Pengembangan Usaha mempunyai fungsi: / *In carrying out the duties as referred to in paragraph (1), the Director of Business Development has the following functions:* a. Menyusun, membina, memantau dan mengevaluasi kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / *Develop, develop, monitor and evaluate the Company's management policies in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development of AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;* b. Membina, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dalam bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / *Fostering, controlling and supervising management in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;* c. Meningkatkan koordiansi dan hubugnan kerja dengan Stakeholder dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / *Improve coordination and work relations with Stakeholders in carrying out tasks in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;* d. Menyampaikan laporan kinerja di bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / *Submit performance reports in the field of Business Development; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;* e. Bidang Pengembangan Usaha; Komersil dan Pelayanan Pelanggan, Pengusahaan Pariwisata dan Hotel; dan Pengembangan SPAM, pengembangan Pump Storage Power Plant dan EBT pengembangan holding AMDK; Pengembangan Wilayah; Pengembangan Infrastruktur Wisata dan Destinasi; Optimalisasi BMN dan Aset Perusahaan; / *Business Development Sector; Commercial and Customer Service, Tourism and Hotel Business; and SPAM development, Pump Storage Power Plant development and EBT development for AMDK holding; Area Development; Tourism and Destination Infrastructure Development; Optimization of BMN and Company Assets;* f. Mengkoordinasikan penyusunan Blue Print Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Direktorat Pengembangan Usaha. / *Coordinate the preparation of the Company's Blue Print, the Company's Long Term Plan (RJPP) and the Corporate Budget Work Plan (RKAP) of the Directorate of Business Development.* **Susunan Organisasi / *Organization Structure*** Direktur Pengembangan Usaha membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Kerja sebagai berikut: / *The Director of Business Development fosters, supervises and controls the following Work Units:* a. Divisi Pengembangan Usaha; / *Business Development Division;* b. Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan; dan / *Commercial and Customer Service Division; and* c. Divisi Usaha Pariwisata dan Hotel. / *Tourism and Hotel Business Division.*



Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja dan Tata Tertib Direksi yang memuat tata laksana kerja Direksi serta tahapan aktivitas secara terstruktur dan sistematis dengan pembagian tugas yang jelas. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi tersebut telah dimuat dalam Board Manual yang disahkan dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Pokok-pokok yang dimuat dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi telah diselaraskan dengan visi dan misi Perum Jasa Tirta II serta standar kerja yang tinggi sesuai best practices GCG dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip GCG. Pedoman dan tata tertib Direksi antara lain mengatur mengenai:

Ketentuan Umum

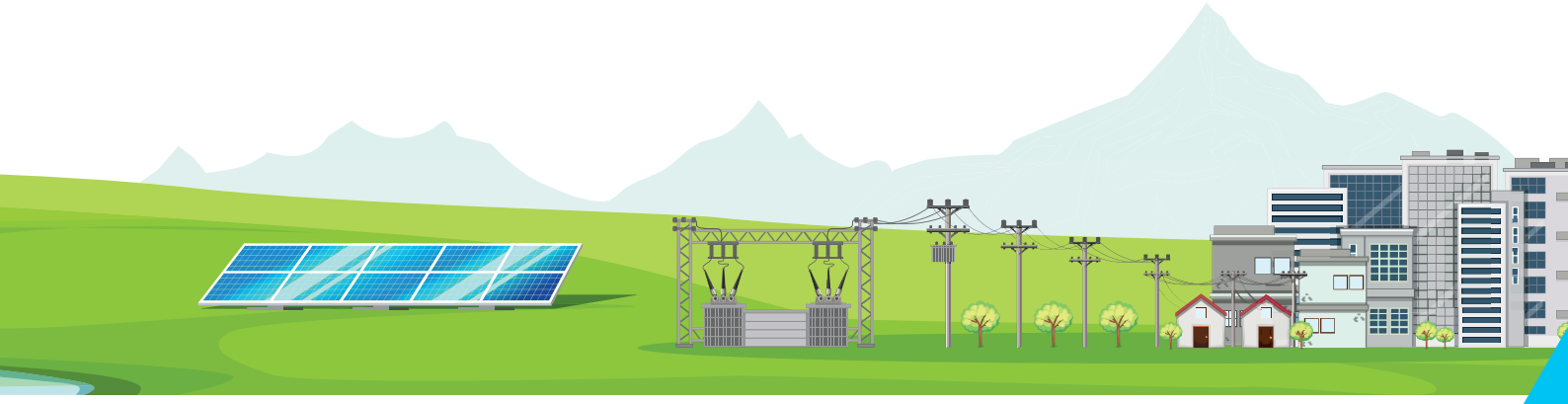
- Pembagian tugas dan wewenang Direksi
- Susunan Direksi
- Tugas, wewenang dan tanggung jawab
- Waktu dan Kerja Direksi
- Rapat Direksi
- Etika kerja Direksi
- Perjalanan dinas
- Laporan
- Pengangkatan dan Pemberhentian

Guidelines and Work Rules of the Board of Directors

The implementation of the Board of Directors' functions, duties, and responsibilities is guided by the Board of Directors' Work Guidelines and Code of Conduct, which contain the Board of Directors' work procedures and the stages of activities in a structured and systematic manner with a clear division of tasks. The Board Manual contains the guidelines and work procedures for the Board of Directors, which were ratified in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company regarding Guidelines for Good Corporate Governance Number: 1/DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The points contained in the Board of Directors' work guidelines and regulations have been harmonized with the vision and mission of Perum Jasa Tirta II, as well as high work standards in accordance with GCG best practices, by taking into account corporate law principles, provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, and GCG principles. Among other things, the Board of Directors' guidelines and rules of conduct govern:

General Requirements

- *Board of Directors' Duties and Authorities*
- *Board of Directors' Composition*
- *Board of Directors' Duties, Authorities, and Responsibilities*
- *Board of Directors' Time and Work*
- *Board of Directors' Meetings*
- *Board of Directors' Work Ethics*
- *Business Trips*
- *Reports*
- *Appointment and Rejection*



Mekanisme Pengangkatan Direksi

Board Of Directors Appointment Mechanism

Mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut kemudian diinternalisasikan ke dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi. Adapun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Direksi adalah sebagai berikut:

Pengangkatan Direksi

- Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN;
- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- Apabila dipandang perlu, dalam rangka pengangkatan Direksi, Menteri BUMN dapat meminta masukan dari Menteri Teknis;
- Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas melalui surat penunjukan yang disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat 14 (empat belas) hari. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Dewan Pengawas, Menteri BUMN menunjuk anggota Direksi yang baru untuk memangku jabatan yang terluang;
- Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.
- Pemberhentian Direksi Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alasan bahwa pada kenyataannya anggota Direksi yang bersangkutan:

The mechanism and procedures for the appointment and dismissal of the Board of Directors refer to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The provisions stipulated in the regulation are then internalized into the work guidelines and rules of procedure of the Board of Directors. The mechanism for the appointment and dismissal of the Board of Directors is as follows:

Board of Directors Appointment

- Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the Minister of BUMN;
- Members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years and can be appointed again for 1 (one) time the following term of office;
- When deemed necessary, the BUMN Minister can request input from the Technical Minister in the framework of the appointment of the Board of Directors;
- If one or more members of the Board of Directors are permanently unable to carry out their duties, or if a position is vacant and the replacement has not been appointed or has not yet assumed the position, the position is assumed by another member of the Board of Directors who is temporarily appointed by the Board of Supervisors via a letter of appointment submitted to the Minister of BUMN by the latest late 14 (fourteen) days. The Minister of BUMN appoints new members of the Board of Directors to fill vacant positions within 2 (two) months of receiving notification from the Board of Supervisors;
- If all of the members of the Board of Directors are permanently unable to carry out their duties, or if the position of the Board of Directors is completely vacant and has not been filled, the Company's management is temporarily carried out by the Board of Supervisors.
- Dismissal of Directors Members of the Board of Directors may be dismissed before the expiry of their term The dismissal of a member of the Board of Directors as referred to in paragraph (1) is carried out based on the reason that in fact the member of the Board of Directors concerned:



(i) Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
(ii) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
(iii) Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan;
(iv) Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
(v) Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
(vi) Meninggal dunia; Mengundurkan diri.

- Keputusan pemberhentian karena alasan (i) sampai (vii) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri disampaikan secara tertulis kepada Menteri BUMN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Menteri BUMN tentang rencana pemberhentian tersebut. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya, dan bila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri kepada Menteri BUMN tidak memberikan keputusannya, maka rencana tersebut menjadi batal;
- Pemberhentian karena alasan (v) tersebut di atas merupakan pemberhentian tidak hormat;
- Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Menteri BUMN jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri dengan menyebutkan alasannya;

Program Orientasi Direksi Baru

Program orientasi atau pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II diberikan kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya. Pelaksanaan program orientasi dilaksanakan oleh anggota Direksi yang lebih senior. Adapun materi program orientasi yang diberikan kepada Direksi baru meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perum Jasa Tirta II;
2. Gambaran mengenai Perum Jasa Tirta II berkaitan dengan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi.

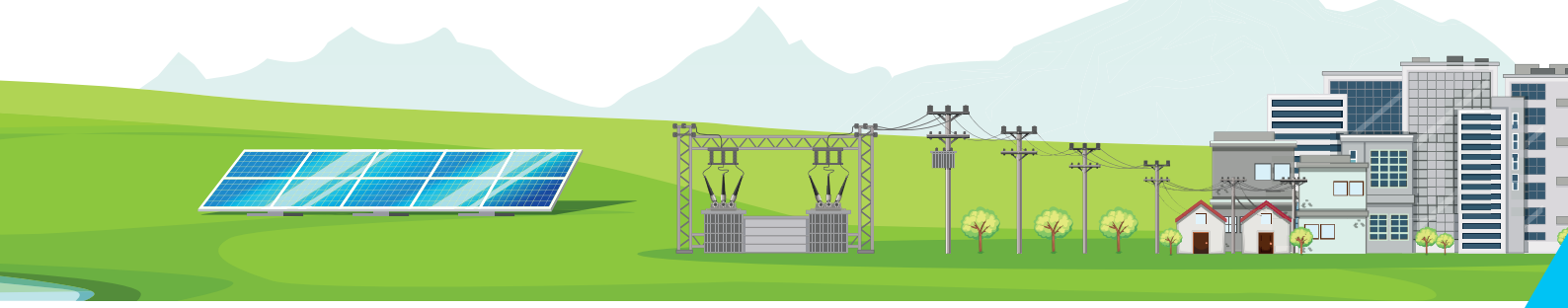
(i) The management contract stipulates that he is unable to fulfill his obligations.
(ii) Unable to perform his duties well;
(iii) Failure to implement legislative and/or regulatory provisions;
(iv) Involved in actions detrimental to the Company;
(v) Found guilty by a court decision with permanent legal force;
(vi) Died; Resigned.

- *The decision to dismiss for reasons (i) to (vii) shall be made after the member concerned has been given an opportunity to defend himself/herself. The defence shall be submitted in writing to the Minister of SOEs within a period of 1 (one) month from the time the member of the Board of Directors concerned is notified in writing by the Minister of SOEs of the dismissal plan. As long as the dismissal plan is still in process, the member of the Board of Directors concerned may continue his/her duties, and if within a period of 2 (two) months from the date of submission of the self-defence to the Minister of SOEs does not give his/her decision, then the plan becomes void;*
- *Termination due to reason (v) above is a dishonorable termination;*
- *His position as a member of the Board of Directors ends with the Minister of BUMN issuing a termination decision based on the Minister's Decision stating the reasons;*

New Director Orientation Program

An orientation programme or introduction to Perum Jasa Tirta II is given to members of the Board of Directors who are appointed for the first time. The implementation of the orientation programme is carried out by more senior members of the Board of Directors. The orientation programme materials given to new Directors include:

1. *Perum Jasa Tirta II's implementation of GCG principles;*
2. *A summary of Perum Jasa Tirta II's activities, financial and operational performance, strategy, short- and long-term business plans, competitive position, risks, and strategic issues;*
3. *Information relating to delegated authority;*
4. *A description of the Board of Directors' duties and responsibilities.*



Program orientasi yang dilaksanakan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke kantor cabang dan pengkajian dokumen serta program lainnya yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Selain itu juga diperhatikan tingkat kehadiran dan efektivitas anggota Direksi dalam mengikuti rangkaian program pengenalan Perum Jasa Tirta II kepada Direksi baru.

The orientation programme was conducted in the form of presentations, meetings, visits to branch offices and document review as well as other programmes in accordance with the Company's policies. In addition, the level of attendance and effectiveness of the members of the Board of Directors in participating in a series of introductory programmes of Perum Jasa Tirta II to the new Board of Directors were also considered.

Pada tahun 2023 terdapat 1 pelaksanaan program orientasi Direksi baru yaitu untuk Bapak Dikdik Permadi Yoffana.

In 2023, there was 1 implementation of the orientation programme for new Directors, namely for Mr Dikdik Permadi Yoffana.

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam rangka memastikan bahwa Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang disyaratkan, Perusahaan memiliki kebijakan suksesi Direksi di mana penetapan calon Direksi Perum Jasa Tirta II mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari:

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Pengawas /Dewan Pengawas BUMN;
3. Talenta BUMN yang terdiri atas :
   a) Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat yang mempunyai prestasi istimewa;
   b) Direksi anak Perusahaan BUMN/Perusahaan patungan BUMN;
4. Talenta Kementerian BUMN;
5. Pejabat BUMN lain dan sumber lainnya.

Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian. Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemanggilan terhadap calon anggota Direksi yang termasuk dalam Daftar Calon yang telah disetujui oleh Menteri untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
2. Melakukan pengujian terhadap calon anggota Direksi, jika pengujian tidak menggunakan lembaga profesional;
3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengujian lembaga profesional, jika pengujian menggunakan lembaga profesional;

Succession Policy for the Board of Directors

To ensure that the Company is managed by management with the necessary skills and competencies, the Company has a Board of Directors succession policy in place, with the determination of candidates for the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II referring to the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-03/ MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of Stat Candidates for the Board of Directors can be found in the following places:

1. *Directors of SOEs;*
2. *Supervisory Board / Supervisory Board of SOEs;*
3. *BUMN talents comprised of:*
   a) *Officials one level below the Board of Directors or officials with special accomplishments;*
   b) *Directors of subsidiaries of BUMN/BUMN joint venture companies;*
4. *Ministry of SOEs talents;*
5. *Other BUMN officials and sources*

The Board of Directors is chosen by an Evaluation Team appointed by the Minister based on proposals from the relevant Echelon I and the Secretary of the Ministry. The Evaluation Team's selection procedure is as follows:

1. *Calling for candidates for members of the Board of Directors who are on the Minister-approved Candidate List to take the Fit and Proper Test (UKK);*
2. *Conduct testing on candidates for Board of Directors members if no professional institution is used;*
3. *Evaluate the results of testing conducted by professional institutions, if testing is conducted by professional institutions;*



4. Mengambil keputusan dan memberikan rekomendasi atas penilaian yang dilakukan;
5. Menetapkan hasil akhir evaluasi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim Evaluasi untuk disampaikan kepada Menteri guna mendapatkan penetapan;
6. Menyampaikan seluruh dokumen Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) kepada Sekretaris Kementerian untuk diadministrasikan;
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri dalam rangka memperlancar proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

4. Make decisions and provide recommendations on the assessments conducted;
5. Determine the final result of the evaluation, which is signed by the Chair and Deputy Chair of the Evaluation Team and submitted to the Minister for stipulation;
6. Submit all Fit and Proper Test (UKK) documents to the Ministry's Secretary for administration;
7. Perform any other tasks assigned by the Minister to expedite the Fit and Proper Test (UKK) process.

Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)*

Direksi Perum Jasa Tirta II berupaya memastikan bahwa seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta keahlian yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Untuk menjamin kesesuaian antara latar belakang kompetensi, keahlian, reputasi dan pengalaman kerja terhadap kebutuhan posisi, seluruh anggota Direksi telah melalui Uji Kelayakan dan Kepatutan *(Fit & Proper Test)*.

The Fit and Proper Test

Perum Jasa Tirta II's Board of Directors works hard to ensure that all members of the Board of Directors have the integrity, competence, reputation, and experience required to carry out their respective functions and duties. All members of the Board of Directors have passed the Fit & Proper Test to ensure that their background of competence, expertise, reputation, and work experience is appropriate for the needs of the position.

Rapat Direksi

Direksi secara berkala menyelenggarakan rapat internal Direksi maupun rapat gabungan bersama Dewan Pengawas. Adapun rapat Direksi dimanfaatkan sebagai media pembahasan dan diskusi berbagai keperluan pengelolaan Perusahaan, kegiatan operasi, serta pengambilan keputusan yang menjadi tanggung jawab Direksi.

Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah keseluruhan rapat Direksi. Keputusan rapat Direksi dilaksanakan dengan menganut prinsip musyawarah untuk mufakat dan dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan berdasarkan metode *voting*. Hasil rapat dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat *(dissenting opinion)* disertai alasannya, ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir, dan didokumentasikan dengan baik.

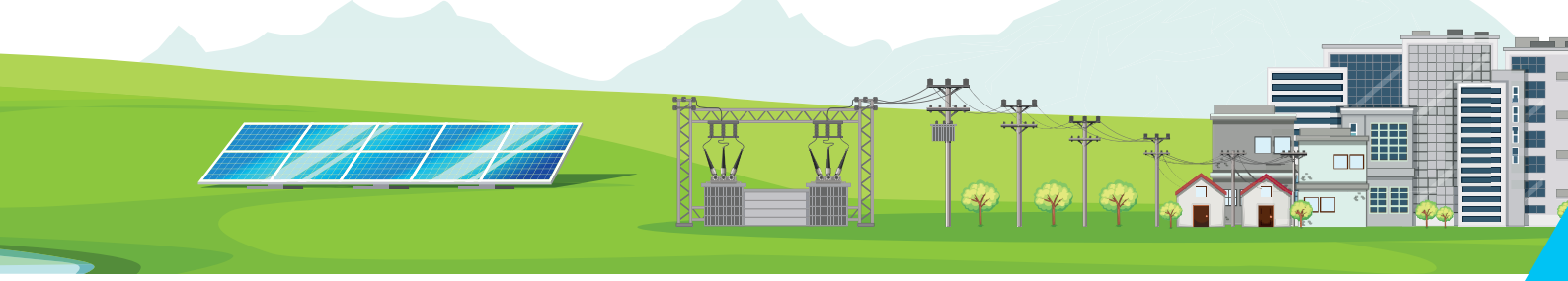
Selama tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal secara *offline* maupun online sebanyak 14 kali.

Meetings of the Board of Directors

The Board of Directors regularly organises internal meetings of the Board of Directors and joint meetings with the Supervisory Board. The meetings of the Board of Directors are utilised as a medium for discussion and discussion of various purposes of the Company's management, operating activities, and decision-making which are the responsibility of the Board of Directors.

The BOD shall hold a meeting at least 1 (one) time in 1 (one) month attended by the majority of all members of the BOD. Each member of the BOD shall attend at least 75% of the total BOD meetings. Resolutions of the Board of Directors meetings shall be implemented by adhering to the principle of deliberation for consensus and in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision making shall be based on the voting method. The results of the meeting are set out in the minutes of the meeting, including in the event of a dissenting opinion along with the reasons, signed by all participants present, and well documented.

During 2023, the Board of Directors held 14 internal meetings offline and online.



Rekapitulasi Kehadiran Direksi Dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta Ii Dalam Rapat Gabungan Dewan Pengawas - Direksi Perum Jasa Tirta II Periode Tahun 2023 /

Recapitulation Of The Attendance Of Directors And Supervisory Board Of Perum Jasa Tirta Ii In The Joint Meeting Of Supervisory Board - Directors Of Perum Jasa Tirta Ii Period 2023

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	26 Januari 2023	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Desember 2022 • Pembahasan Laporan Keuangan *Unaudited* Tahun 2022 • Presentasi dan Penandatanganan Bersama Hasil Self-Assessment Penerapan GCG Tahun 2022 • Lain-lain
2	28 Februari 2023	• Pembahasan RJPP Tahun 2023 – 2027 • Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Januari 2023 • Realisasi Capaian KPI • Realisasi Investasi • Lain-lain
3	29 Maret 2023	• Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Februari 2023 • Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan Februari 2023 • Lain-lain
4	14 April 2023	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Dewan Pengawas Direksi Bulan Maret 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Maret 2023 • Pembahasan Laporan Keuangan Audited Tahun 2022
5	25 Mei 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan April 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja Bulan Mei 2023 • Lain-lain
6	22 Juni 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Mei 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Mei 2023 • Ekpose Rencana Kerja Sama Pengembangan Wisata di Kawasan Wisata Jatiluhur dan Penandatanganan MoU • Lain-lain
7	26 Juli 2023	• Evaluasi dan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Dewan Pengawas Direksi Bulan Juni 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Juni 2023 • Lain-lain
8	28 Agustus 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Juli 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Juli 2023 • Lain-lain
9	27 September 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Agustus 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Agustus 2023 • Lain-lain
10	27 Oktober 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan September 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja dan Laporan KPI s/d Triwulan III • Pembahasan Usulan KPI 2024 • Lain-lain
11	23 November 2023	• Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Gabungan Bulan Oktober 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan Oktober 2023 • Lain-lain
12	11 Desember 2023	• Persetujuan Nilai Asset Settlement PT Sang Hyang Seri • Persetujuan atas Kewajiban Dana Pensiun Pada Tahun Buku 2023 • Pembahasan RKAP 2024 Perum Jasa Tirta II • Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Gabungan Bulan November 2023 • Pembahasan Laporan Kinerja s/d Bulan November 2023 • Lain-lain



Keberagaman Komposisi Direksi

Perum Jasa Tirta II mengedepankan pentingnya penyesuaian diri di industri dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal dan profesional secara komprehensif, termasuk dalam tingkatan manajemen kunci. Dalam hal ini, Perusahaan memperhatikan keberagaman komposisi dan karakteristik Direksi berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta keahlian guna meng-hadirkan solusi pemecahan masalah yang beragam dari berbagai perspektif sesuai dengan keahliannya masing-masing.

Hubungan Afiliasi Direksi

Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Pengawas .

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Pengawas dan/atau Pemilik Modal Pengendali atau hubungan dengan Perusahaan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.

The Board of Directors is diverse in its composition

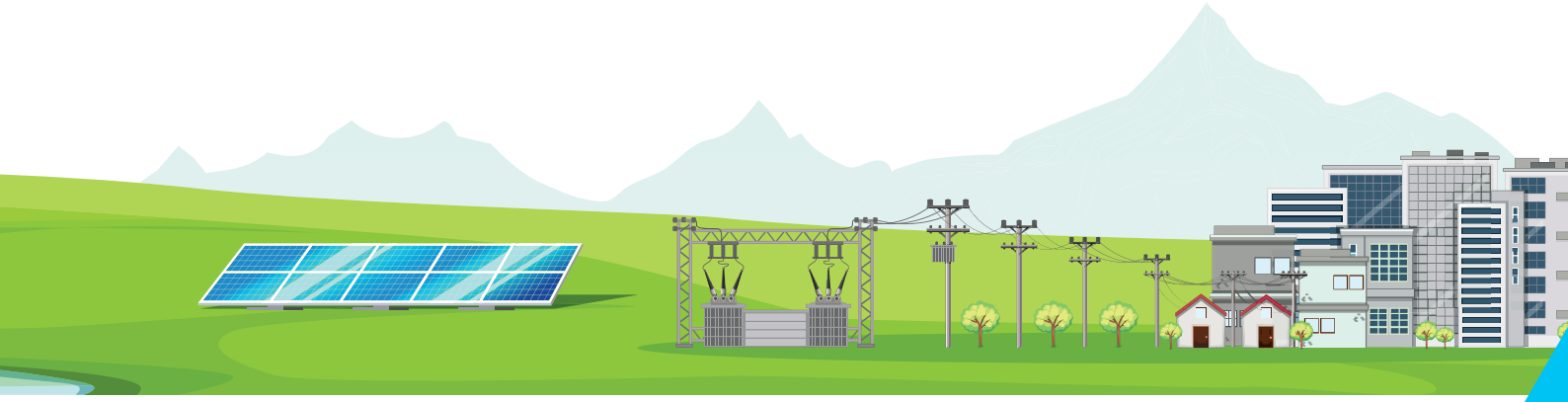
Perum Jasa Tirta II emphasizes the importance of industry adaptation by comprehensively preparing reliable and professional Human Resources (HR), including at key management levels. In this case, the Company emphasizes the diversity of the Board of Directors' composition and characteristics based on age, educational background, work experience, and expertise in order to present various problem-solving solutions from various perspectives based on their respective expertise.

Board of Directors Affiliation

Directors always act independently, in the sense that there are no conflicts of interest that could impair their ability to carry out tasks independently and critically, both in relation to one another and in relation to the Supervisory Board.

The Board of Directors has no financial, management, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Directors, Supervisory Board, and/or Controlling Capital Owner, and they can carry out their duties and responsibilities independently.

The Board of Directors does not hold concurrent positions as President Director or other Director in State-Owned, Regional, and Private Enterprises, as well as other positions related to the Company's management, structural positions, and other functional positions. in central and local government agencies/institutions, as well as other positions, in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and other applicable laws and regulations.



Independensi Direksi dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

The table below shows the independence of the Board of Directors:

Nama *Name*	Hubungan Keluarga Dengan *Family Relations With*						Hubungan Keuangan Dengan *Financial Relations With*						Kepengurusan Dan Kepemilikan Saham Dengan Perusahaan Lain *Management And Share Ownership With Other Companies*					
	Dewan Pengawas *Supervisory Board*		Direksi *Board Of Director*		Pemilik Modal *Capital Owners*		Dewan Pengawas *Supervisory Board*		Direksi *Board Of Director*		Pemilik Modal *Capital Owners*		Dewan Pengawas *Supervisory Board*		Direksi *Board Of Director*		Pemilik Modal *Capital Owners*	
	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*	Ya *Yes*	Tidak *No*
Imam Santoso	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dikdik Permadi Yoffana	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anton Mardiyono	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Indriani Widiastuti	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Pengawas /Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif;
5. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Board of Directors Policy on Concurrent Positions

Based on the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/02/2015 dated 17 February 2015, members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:

1. *Directors of State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, and/or Private-Owned Enterprises;*
2. *Members of the Supervisory Board / Supervisory Board of State-Owned Enterprises;*
3. *Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;*
4. *Administrators of political parties and/or legislative candidates/members;*
5. *Positions that may cause conflicts of interest and/or other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations;*
6. *Legislative candidates or regional head/deputy regional heads.*



Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi disajikan dalam tabel berikut:

Information regarding the concurrent positions of members of the Directors is presented in the following table:

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Jabatan Pada Perseroan Lain *Position In Other Companies*	Nama Perseroan *Name Company*
Imam Santoso	Direktur Utama *President Director*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *No Positin*
Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Usaha *Director of Business Development*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *No Positin*
Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia & MANRISK *Director of Finance, Human Resources & MANRISK*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *No Positin*
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan *Director of Operations and Maintenance*	KOMISARIS *Commissioner*	PT Jasa Tirta Luhur

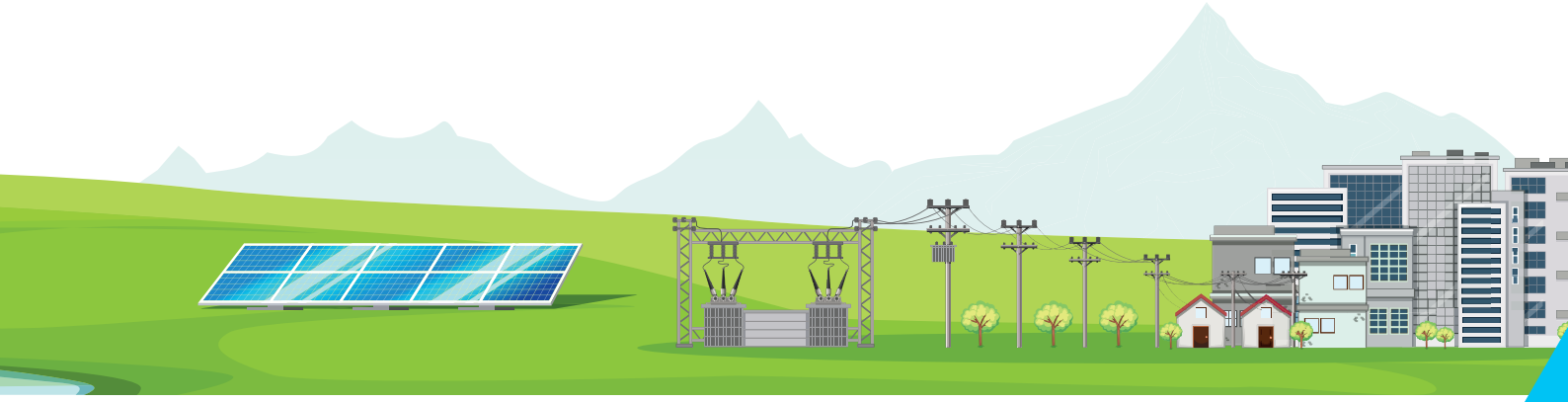
Kepemilikan Saham Direksi

Hingga 31 Desember 2023, Perum Jasa Tirta II tidak pernah melakukan penawaran umum saham di bursa efek manapun dan tidak pernah melakukan program kepemilikan saham oleh manajemen *(Management Stock Option Program / MSOP)* maupun program kepemilikan saham oleh karyawan *(Employee Stock Option Program / ESOP)*. Sehingga tidak ada saham yang dimiliki oleh Direksi.

Share Ownership of the Board of Directors

As of December 31, 2023, Perum Jasa Tirta II has never conducted a public offering of shares on any stock exchange and has never conducted a share ownership program by management (Management Stock Option Program / MSOP) as well as employee stock ownership program (Employee Stock Option Program / ESOP). So that there are no shares owned by the Board of Directors.

Nama *Name*	Jabatan *Position*	Kepemilikan Saham / *Share Ownership In*	
		Perum Jasa Tirta II	Perusahaan Lain *Other Companies*
Imam Santoso	Direktur Utama *President Director*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *No Positin*
Dikdik Permadi Yoffana	Direktur Pengembangan Usaha *Director of Business Development*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *No Positin*
Indriani Widiastuti	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia & MANRISK *Director of Finance, Human Resources & MANRISK*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *No Positin*
Anton Mardiyono	Direktur Operasi dan Pemeliharaan *Director of Operations and Maintenance*	TIDAK ADA *Nothing*	TIDAK ADA *Nothing*



Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Keputusan Direksi yang telah dikeluarkan selama tahun 2023, antara lain sebagai berikut.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menjalankan pengelolaan Perusahaan dengan berpedoman pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Rencana Perusahaan Jangka Panjang yang telah ditetapkan dengan senantiasa memperhatikan visi, misi, dan tujuan Perusahaan. Uraian pelaksanaan tugas Direksi selama tahun buku 2023 adalah sebagai berikut:

- Direksi telah menetapkan kebijakan terkait kepengurusan Perusahaan ;
- Direksi telah mengambil keputusan dalam mewakili Perusahaan ;
- Direksi telah melakukan pengembangan Perusahaan dan Entitas Anak melalui keputusan yang dibuat selama tahun 2023.

Penilaian Kinerja Direksi

Perum Jasa Tirta II melakukan penilaian secara berkala terhadap kinerja Direksi melalui beberapa metode, yaitu mekanisme penilaian GCG, khususnya aspek Direksi dan metode penilaian *Key Performance Indicator (KPI)* yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan Assessment GCG

Perusahaan melakukan penilaian atas implementasi GCG aspek Direksi yang dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang dikembangkan oleh Kementerian Negara BUMN berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara.

Penilaian kinerja Direksi melalui assessment GCG aspek Direksi mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan, antara lain kontribusi Direksi dalam penyusunan rencana

Decisions and Implementation of Duties of the Board of Directors

Decisions of the Board of Directors that have been issued during 2023, among others, are as follows.

Report on the Implementation of the Duties of the Board of Directors in 2023

Throughout 2023, the Board of Directors has carried out the management of the Company based on the Company's Work Plan and Budget as well as the Long-Term Corporate Plan that has been determined by always paying attention to the Company's vision, mission and goals. The description of the implementation of the duties of the Board of Directors during the 2023 financial year is as follows:

- *The Board of Directors has established policies related to the management of the Company;*
- *The Board of Directors has made a decision to represent the Company;*
- *The Board of Directors has developed the Company and its Subsidiaries through decisions made during 2023.*

Board of Directors Performance Evaluation

Perum Jasa Tirta II conducts periodic assessments of the Board of Directors' performance using several methods, including the GCG assessment mechanism, specifically the Board of Directors' aspects, and the Key Performance Indicator (KPI) assessment method determined by the Ministry of SOEs.

Board of Directors Performance Evaluation Based on the GCG Assessment

The Company evaluates the implementation of GCG aspects of the Board of Directors in accordance with the framework of reference for the implementation of the GCG assessment developed by the Ministry of State-Owned Enterprises based on the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The GCG assessment of the aspects of the Board of Directors takes into account relevant criteria, such as the contribution of the Board of Directors in the



pengembangan Perusahaan jangka pendek dan jangka panjang, penetapan strategi dan inisiatif pengelolaan Perusahaan , pemenuhan target kinerja Perusahaan, penyelenggaraan rapat, pemberian keputusan Direksi, dan sejumlah kriteria lainnya.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan *Key Performance Indicator (KPI)*

Selain melalui assessment GCG, tolok ukur penilaian kinerja Direksi memperhitungkan pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* berbasis Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan berpedoman pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pedoman Penentuan KPI pada BUMN.

Kriteria yang dinilai berdasarkan KPKU mencakup 6 (enam) indikator utama, yaitu Keuangan dan Pasar, Fokus Pelanggan, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan, dan *Agent of Development (AOD)*.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian dapat dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan :

1. Mengundurkan diri;
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan RPB dengan menyebutkan alasan-alasannya.

preparation of short-term and long-term Company development plans, the determination of strategies and initiatives for managing the Company, meeting the Company's performance targets, holding meetings, making decisions, and a variety of other criteria.

Performance Evaluation of the Board of Directors Using Key Performance Indicators (KPI)

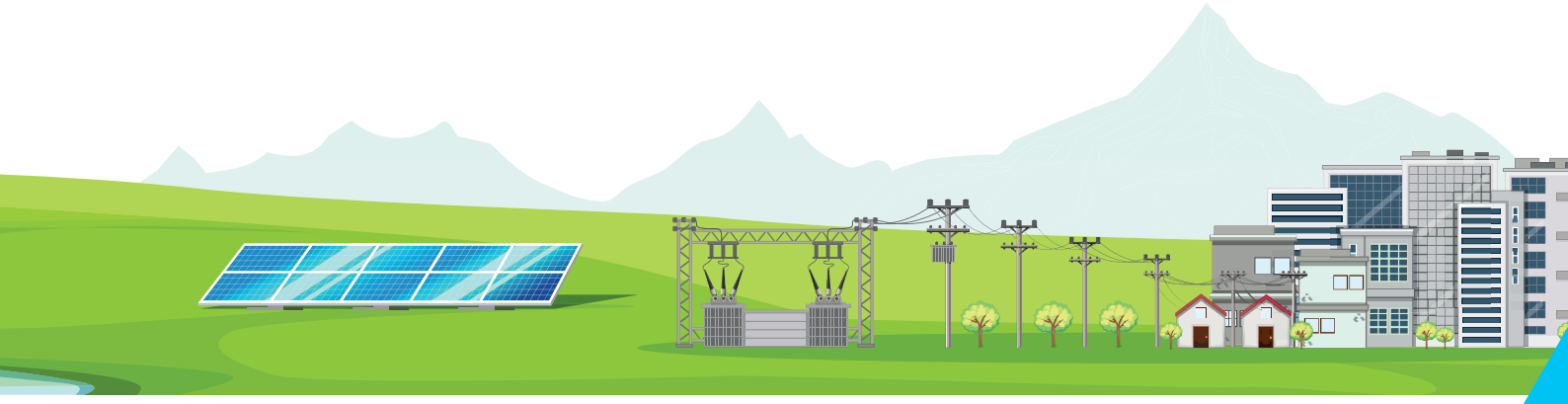
In addition to the GCG assessment, the performance assessment benchmarks of the Board of Directors take into account the achievement of Key Performance Indicators (KPI) based on the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) based on the Ministry of SOE Letter No. S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013 concerning Guidelines for Determining KPIs in BUMN.

Finance and Markets, Customer Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Governance Leadership and Community Responsibility, and Agent of Development are among the criteria assessed using the KPKU (AOD).

Board of Directors Resignation and Dismissal Mechanism

Dismissal can be carried out if the member of the Board of Directors in question:

1. *Resigns;*
2. *No longer meets the requirements of the applicable legislation;*
3. *Dies; or*
4. *Is dismissed based on the RPB's decision, with reasons given.*



Kebijakan Remunerasi Dewan Pengawas Dan Direksi

The Supervisory Board's Remuneration Policy

Dewan Pengawas dan Direksi berhak memperoleh remunerasi dan beberapa fasilitas lainnya sebagai bayaran atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan penetapan, skema, dan prosedur remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

The Supervisory Board and the Board of Directors are entitled to remuneration and other benefits in exchange for carrying out their duties and responsibilities. The policy for determining, schemes, and remuneration procedures for the Supervisory Board and the Board of Directors refers to the provisions stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-06/MBU/06/2018 Jo. PER-01/MBU/05/2019 Jo. PER-12/MBU/11/2020 dated November 25, 2020 regarding Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisory Boards, and Supervisory Boards of State-Owned Enterprise.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi mengikuti kaidah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas melakukan kajian mengenai remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Direksi, baik dilakukan secara mandiri atau dapat meminta bantuan dari pihak independen;
2. Dewan Pengawas mengusulkan penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi kepada kepada pemilik modal;
3. Pemilik Modal selanjutnya mengkaji dan menelaah usulan dari Dewan Pengawas;
4. Pemilik Modal menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi.

Procedure for Determining Supervisory Board and Board of Directors Remuneration

The following rules govern the procedure for determining the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. *The Supervisory Board reviews the remuneration received by the Supervisory Board and the Board of Directors, either independently or by requesting assistance from an independent party;*
2. *The Supervisory Board proposes to determine the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors to the owners of capital;*
3. *The Capital Owner shall further review and review the proposal from the Supervisory Board;*
4. *The Capital Owner shall determine the remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors;*

Indikator Penetapan Remunerasi

Penetapan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi memperhatikan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dan tingkat perolehan keuntungan Perusahaan pada tahun buku;
2. Prestasi dan capaian kinerja Dewan Pengawas dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
3. Pencapaian prestasi kerja dan KPI individual;
4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.

Indicators of Remuneration Determination

The following indicators are considered when determining remuneration for the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. *The Company's financial performance and profitability in the fiscal year;*
2. *The Supervisory Board's and Board of Directors' achievements and performance achievements in accordance with their duties and responsibilities;*
3. *Meeting work performance and individual KPIs;*
4. *Taking into account the Company's long-term goals and strategies.*



Struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi

Ketentuan penentuan struktur Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur adalah 85% dari Direktur Utama;
2. Honorarium Anggota Dewan Pengawas adalah 90% dari Ketua Dewan Pengawas;
3. Tantiem Direktur dan Ketua Dewan Pengawas masing-masing 85% dan 45% dari tantiem Direktur Utama;
4. Tantiem anggota Dewan Pengawas adalah sebesar 90% dari tantiem Ketua Dewan Pengawas;
5. Tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Tahun 2021 mengacu pada ketetapan Nomor SR-143/WK2.MBU.C/10/2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II;
6. Pembayaran dihitung dengan memperhitungkan masa kerja efektif pada tahun buku. Pajak penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima.

Structure of the Supervisory Board and the Board of Directors' Remuneration

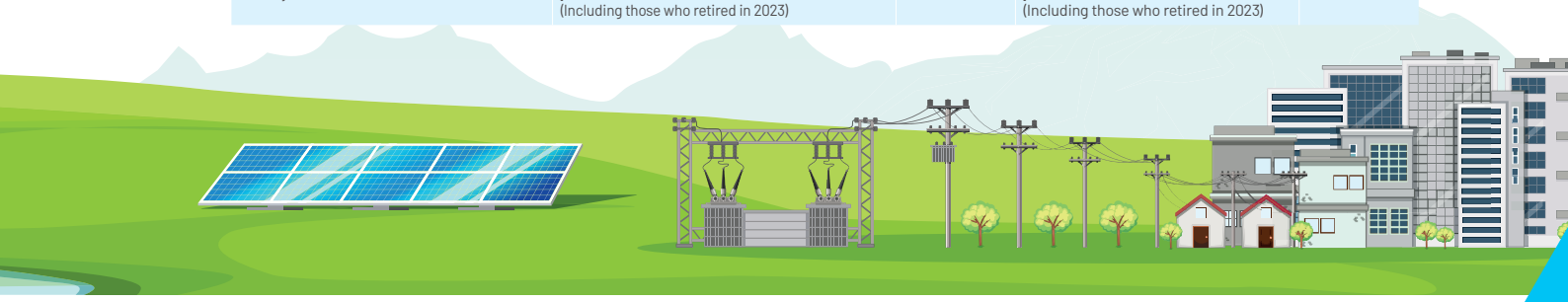
The following provisions govern the structure of the Remuneration of the Supervisory Board and the Board of Directors:

1. *The Director's salary is 85 percent that of the President Director.*
2. *The Honorarium for Members of the Supervisory Board is 90% of the Chairperson of the Supervisory Board;*
3. *Bonuses for the Director and Chairman of the Supervisory Board are 85% and 45% of the bonuses for the President Director, respectively.*
4. *The bonus for Supervisory Board members is 90% of the bonus for the Chairman of the Supervisory Board.*
5. *Allowances and facilities for the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Year 2020 refers to the stipulation Number SR-143/WK2.MBU.C/10/2021 dated October 1, 2021 regarding the determination of the income of the Board of Directors and Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II;*
6. *Payment is calculated by taking the effective working period in the financial year into account of income tax (PPh) on bonuses.*

Struktur Remunerasi Dewan Pengawas *Remuneration Structure Of Supervisory Board*	**Struktur Remunerasi Direksi** *Remuneration Structure Of Board Of Directors*
Honorarium / *Honorarium*	Gaji / *Honorarium*
Fasilitas / *Facilities:* a) Transportasi / *Transportation* b) Tunjangan Hari Raya (THR) / *Holiday Allowance* c) Tantiem / *Tantiem* d) Premi Asuransi / *Insurance Premium*	Fasilitas / *Facilities:* a) Tunjangan Hari Raya (THR) / *Holiday Allowance (THR)* b) Tunjangan Asuransi / *Insurance Benefits* c) Tunjangan Rumah Jabatan / *Housing Allowance*
Bantuan Hukum / *Legal Assistance*	

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi Jasa Tirta II Tahun 2023
Remuneration of Supervisory Board and Board of Directors of Jasa Tirta II in 2023

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain / *Types of Remuneration and Others Facilities*	**Jumlah Diterima /** *Amount Received*			
	Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*		**Direksi /** *Board of Directors*	
	Jumlah Orang / *Number of People*	**Nilai /** *Amount*	**Jumlah Orang /** *Number of People*	**Nilai /** *Amount*
Honorarium/Gaji Honorarium/ Salary	**Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) /** Board of Commissioners (Including those who retired in 2023)	3,529,103,232	**Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) /** Board of Directors (Including those who retired in 2023)	7,620,110,484
Tantiem/Insentif Khusus Dewan Komisaris/ Tantiem Special Incentive for the Board of Commissioners	**Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) /** Board of Commissioners (Including those who retired in 2023)	2,111,376,500	**Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) /** Board of Directors (Including those who retired in 2023)	5,458,422,820
Tunjangan / Allowance				
Tunjangan Hari Raya Keagamaan/ Religious Holiday Allowance	**Dewan Komisaris (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) /** Board of Commissioners (Including those who retired in 2023)	227,272,500	**Direksi (termasuk yang sudah berhenti pada tahun 2023) /** Board of Directors (Including those who retired in 2023)	484,575,000







Organ Pendukung Dewan Pengawas
Supporting Organs Of The Supervisory Board

Profil Sekretaris Dewan Pengawas
Profile of The Supervisory Board Secretary



YUSUF ABDULLAH MUSTHOFA
Sekretaris Dewan Pengawas
The Supervisory Board Secretary

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Beliau menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KEP-05/DEWAS/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II.
Indonesian citizen, residing in Jakarta. He served as The Supervisory Board Secretary of Perum Jasa Tirta II in accordance with the Supervisory Board of Public Company (Perum) Jasa Tirta II's Decree Number: KEP-05/DEWAS/III/2021 dated March 30, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of The Supervisory Board Secretary of Perum Jasa Tirta II.

Organ dan Komite di bawah Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan, Dewan Pengawas dibantu oleh Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite-komite dibawah Dewan Pengawas. Komite-komite di bawah Dewan Pengawas terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Organ dan Komite di bawah Dewan Pengawas tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sekretaris Dewan Pengawas

Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ Dewan Pengawas yang diangkat oleh Perusahaan yang bertugas membantu kelancaran kegiatan administrasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan identifikasi, perencanaan dan pelaksanaan strategi pengelolaan kegiatan kesekretariatan dan protokoler Dewan Pengawas demi terciptanya fungsi Kesekretariatan Dewan Pengawas yang berjalan efektif,efisien dan mendukung kelancaran aktivitas Dewan Pengawas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Dewan Pengawas telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan Job Description. Fungsi Sekretaris Dewan Pengawas dilakukan oleh Sekretariat Dewan Pengawas.

The Supervisory Board's Organs and Committees

The Supervisory Board is assisted in supervising the Company by the Secretary of the Supervisory Board and the Committees under the Supervisory Board. The Supervisory Board's committees are the Audit Committee, The Risk Oversight Committee, and the Remuneration and Nomination Committee. The Supervisory Board's organs and committees are described below.

The Supervisory Board Secretary

The Supervisory Board Secretary is an organ of the Supervisory Board appointed by the Company to assist in the smooth administration of the Supervisory Board's duties and responsibilities. The Supervisory Board Secretary is responsible for coordinating the identification, planning, and implementation of strategies for managing the Supervisory Board's secretarial and protocol activities in order to create an effective, efficient, and effective Supervisory Board Secretarial function and to support the smooth operation of the Supervisory Board's activities.

The Supervisory Board Secretary has been provided with Work Guidelines known as Job Descriptions to help him carry out his duties. The Supervisory Board Secretary performs the duties of The Supervisory Board Secretary.



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Pengawas

Kehadiran Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat *(briefing sheet)* Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan ;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas;
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas;
7. Memastikan bahwa Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
9. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
10. Sebagai penghubung *(liaison officer)* Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas

Penyelenggaraan fungsi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Pengawas mengacu pada Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Pengawas yang tercantum dalam *Board Manual Board of Commissioners & Board of Directors* yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Pengawas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Pengawas, meliputi:

The Secretary of the Supervisory Board's Duties and Responsibilities

The Secretary of the Supervisory Board's attendance has the following duties and responsibilities:

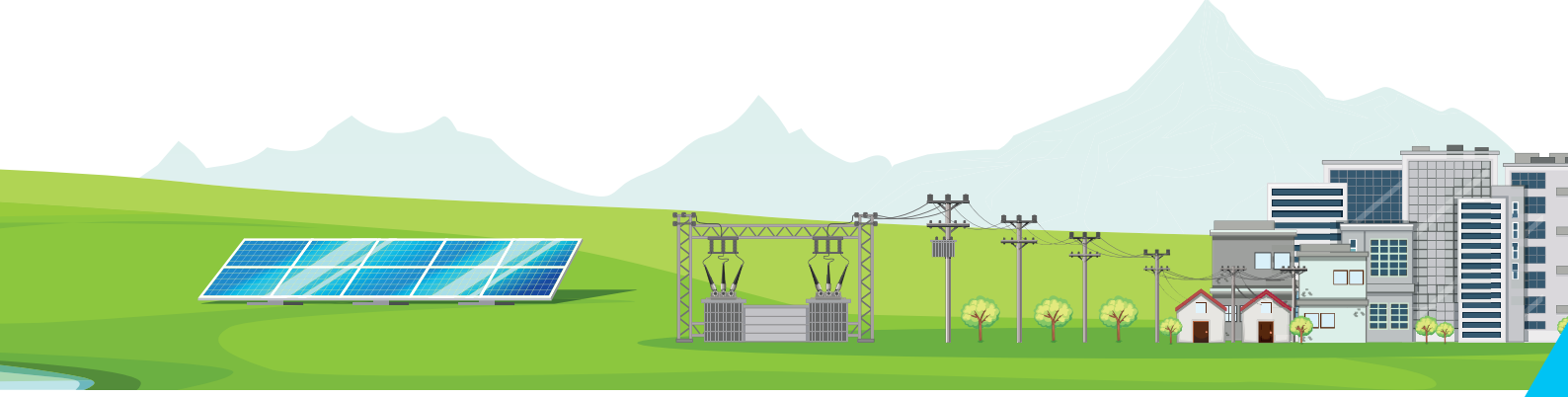
1. *Meeting preparation, including the Supervisory Board's meeting material (briefing sheet);*
2. *Keep minutes of the Supervisory Board meetings in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association;*
3. *Managing the Supervisory Board's documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents;*
4. *Creating the Supervisory Board's Work Plan and Budget;*
5. *Writing Supervisory Board reports;*
6. *Carrying out other Supervisory Board duties;*
7. *Ensure that the Supervisory Board abides by the laws and regulations, as well as the GCG principles;*
8. *Provide information requested by the Supervisory Board on a regular basis and/or at any time;*
9. *Coordinate Committee members as needed to expedite Supervisory Board duties;*
10. *Serve as the Supervisory Board's liaison officer with other parties.*

Work Instructions for the Supervisory Board Secretary

Implementation of functions and duties and responsibilities of the Supervisory Board Secretary refers to the Work Guidelines for the Secretary of the Supervisory Board, which are listed in the Board Manual of the Board of Commissioners & Board of Directors and are stipulated by a Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Companies (PERUM).

Implementation of the Supervisory Board Secretary's Duties

During 2023, the Secretary of the Supervisory Board engaged in a variety of activities to support the Supervisory Board's supervisory function, including:



1. Membantu Dewan Pengawas dalam menjalankan pelaksanaan tata tertib Direksi dan prinsip-prinsip GCG secara tertib dan patuh.
2. Membuat risalah rapat baik internal maupun rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi dan mendokumentasikannya dengan baik.
3. Menjalankan proses administrasi dokumen Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, dan dokumen lainnya.
4. Menyampaikan dan membuat rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Pengawas selama tahun 2023.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan-laporan Dewan Pengawas secara akurat dan tepat waktu.
6. Menyediakan informasi yang dibutuhkan Dewan Pengawas apabila dibutuhkan.
7. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas.
8. Menjalankan fungsi penghubung (liaison officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain yang berkepentingan.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Pengawas

Selama tahun 2023, Sekretaris Dewan Pengawas mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi *Certified Governance Oversight Professional* (CGOP) yang diselenggarakan oleh PPA&K pada 16-17 November 2023.

Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertanggung jawab dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Sekretaris Dewan Pengawas dengan memperhitungkan capaian tugas dan tanggung jawab sebagai penghubung Dewan Pengawas dengan manajemen Perusahaan dan fungsi kesekretariatan lainnya. Selama tahun 2023, Dewan Pengawas menilai bahwa Sekretaris Dewan Pengawas telah dilakukan dengan baik dan memuaskan.

1. *Assisting the Supervisory Board in the orderly and obedient implementation of the Board of Directors' governance orderliness and the GCG principles.*
2. *Take and properly document minutes of all internal and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors.*
3. *Manage the administrative process for the Supervisory Board's documents, including incoming and outgoing letters, as well as other documents.*
4. *Submit and draft the Supervisory Board's Work Plan and Budget for 2023.*
5. *Prepare and submit accurate and timely reports to the Supervisory Board.*
6. *If necessary, provide information to the Supervisory Board.*
7. *If necessary, coordinate Committee members in order to expedite the Supervisory Board's duties.*
8. *Serve as the Supervisory Board's liaison officer with other interested parties.*

Supervisory Board Secretary Competency Development

In 2023, the Secretary of the Board of Supervisors attended the Certified Governance Oversight Professional (CGOP) Training and Competency Test organized by PPA&K on November 16–17, 2023.

Evaluation of the Supervisory Secretary's Performance

Board The Supervisory Board is responsible for assessing and evaluating the Secretary of the Supervisory Board's performance, taking into account the accomplishments of the duties and responsibilities as a liaison between the Supervisory Board and the Company's management, as well as other secretarial functions. The Supervisory Board considered the Secretary of the Supervisory Board to have performed well and satisfactorily in 2023.



Komite Audit
Audit Committee

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai salah satu organ kelengkapan Dewan Pengawas yang berfungsi untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG, pengendalian internal, proses audit, dan pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as one of the organs of the Supervisory Board that functions to ensure the implementation of GCG principles, internal control, audit processes, and monitoring compliance with laws and regulations in every business activity at all levels in the Company's organization. In carrying out its duties, the Audit Committee is independent and reports to the Supervisory Board.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Komite Audit Perum Jasa Tirta II dibentuk sebagai wujud kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara

Basis for the Establishment of the Audit Committee

Audit Committee of Perum Jasa Tirta II was established as a form of compliance with the laws and regulations, namely:

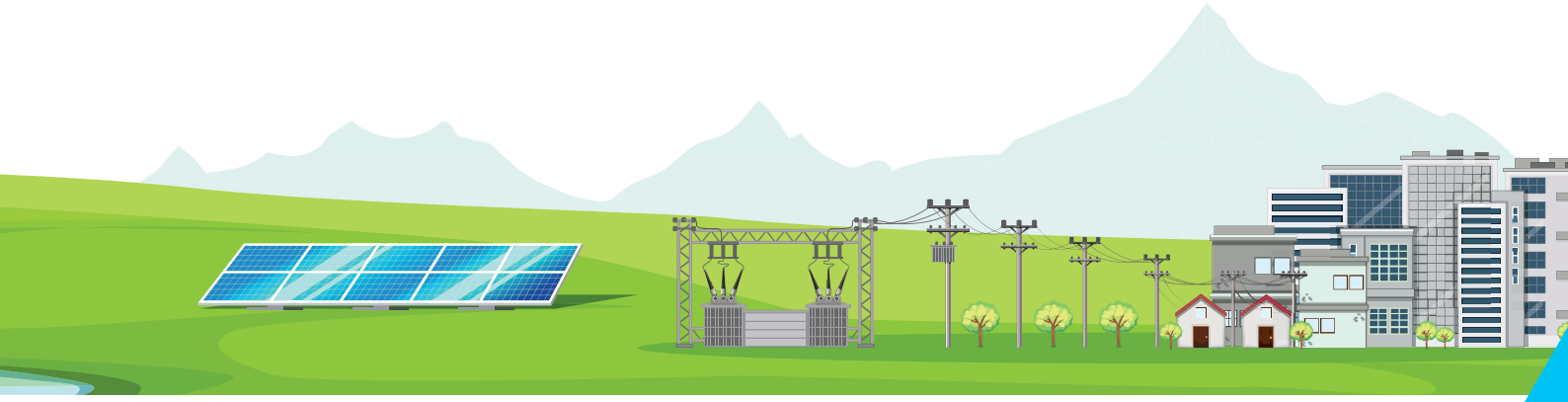
1. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises*
2. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises*

Jumlah dan Komposisi Komite Audit

Selama tahun 2023, tidak terdapat perubahan dalam keanggotaan Komite Audit Perum Jasa Tirta II. Jumlah anggota Komite Audit Perum Jasa Tirta II pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari anggota dewan pengawas sebagai Ketua Komite dan 2 (dua) anggota Komite Audit yang berasal dari pihak eksternal independen yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan korporasi.

Number and Composition of the Audit Committee

In 2023 there were no changes in the membership of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II. The number of members of the Audit Committee of Perum Jasa Tirta II in 2023 is 3 (three) people, consisting of a member of the supervisory board as the Chairman of the Committee and 2 (two) members of the Audit Committee from independent external parties who are experts in accounting and corporate finance.



Profil Komite Audit
Profile of Audit Committee



NUNING SRI REJEKI WULANDARI
Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas)
Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)

Profil Ibu Nuning Sri Rejeki Wulandari telah dimuat dalam Laporan Tahunan ini, bab 'Profil Perusahaan', sub bab 'Profil Dewan Pengawas'.
Profile of Mrs. Nuning Sri Rejeki Wulandari has been provided in this Annual Report on 'Company Profile' chapter, 'Profile of Supervisory Board' sub-chapter.

Nama / *Name*	Jabatan / *Position*	Dasar Penetapan / *Basic Of Appointment Position*	Keahlian / *Expertise*	Masa Jabatan / *Terms Of Office*
NUNING SRI REJEKI WULANDARI	Ketua Komite Audit (Anggota Dewan Pengawas) / *Head of Audit Committee (Supervisory Board Member)*	Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor: KEP-83/DEWAS/XI/2020 / *Supervisory Board Decree: KEP-83/ DEWAS/XI/2020*	Pengelolaan Barang Milik Negara / *State Property Management*	5 tahun *5 years*

a. Komite Audit

Untuk membantu kelancaran tugas-tugas pengawasan secara teknis, khususnya dalam hal pengendalian internal, Dewan Pengawas dibantu oleh Komite Audit. Susunan Komite Audit pada tahun 2023 sebagai berikut:

Ketua : Nuning Sri Rejeki Wulandari (KEP-83/DEWAS/XI/2020)
Anggota : Agus Waluyo (KEP-02/DEWAS/II/2021)
Anggota : Emirio Fajar (KEP-04/DEWAS/XI/2022)

a. Audit Committee

To support the effective execution of supervisory duties, particularly with respect to internal control, the Board of Supervisors is assisted by the Audit Committee. The composition of the Audit Committee in 2023 is as follows:

Chairperson : Nuning Sri Rejeki Wulandari (KEP-83/DEWAS/XI/2020)
Member : Agus Waluyo (KEP-02/DEWAS/II/2021)
Member : Emirio Fajar (KEP-04/DEWAS/XI/2022)



Profil Anggota Komite Audit
Profile of Audit Committee Member



AGUS WALUYO

Tempat, Tanggal Lahir (Usia): KAB.CILACAP, 23 Agustus 1973 /
Date of Birth (Age): 23 August 1973, KAB. CILACAP
Pangkat:Penata Tk. I/III / Rank: Tk. I, III/D

Riwayat Penugasan: / *Assignment History:*
- Anggota Komite PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (Juni 2019 - sekarang) / *Member of the Committee of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (June 2019 - present).*
- Anggota Komite PT Angkasa Pura I (Persero) (Oktober 2015 - Juni 2019) / *PT Angkasa Pura I (Persero) Committee Member (October 2015 - June 2019) S1 - SE.*

Pendidikan Terakhir / *Last Education:*
S1 - SE / *S1 - SE*

Riwayat Pendidikan: / *Educational Background:*
- S1 STIE Widya Wiwaha (2009, Jalan Sorosutan, Yogyakarta) / *S1 STIE Widya Wiwaha (2009, Jalan Sorosutan, Yogyakarta)*
- D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta (1994, Jalan Bintaro Utama Sektor V, Tangerang Selatan, Banten 15222) / *D3 State Accounting College Jakarta (1994, Jalan Bintaro Utama Sector V, South Tangerang, Banten 15222)*

Riwayat Jabatan: / *Position History:*
- Auditor Ahli Muda (09 Juni 2020 - sekarang) / *Young Expert Auditor (09 June 2020 - present)*
- Auditor Muda (22 Oktober 2015 - 08 Juni 2020) / *Young Auditor (22 October 2015 - 08 June 2020)*
- Auditor Penyelia (05 Mei 2015 - 21 Oktober 2015) / *Auditor in Charge (05 May 2015 - 21 October 2015)*

Riwayat Pelatihan: / *History of Training:*
- Individual Leadership Training: Workskills - Steps to Your Success - ELEVATE / *Individual Leadership Training: Workskills - Steps to Success - ELEVATE*
- Diklat Sertifikasi Auditor Muda - Pusdiklatwas BPKP / *Pusdiklatwas BPKP Young Auditor Certification Training*
- Diklat SPIP - Pusdiklatwas BPKP / *BPKP Pusdiklatwas SPIP Training*
- Diklat Sertifikasi Auditor Ahli - Pusdiklatwas BPKP / *BPKP TMT Expert Auditor Certification Training*

TMT Pensiun: 23 September 2024/
Retirement date: September 24th



Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Member



EMIRIO FAJAR

Tempat, Tanggal Lahir (Usia): Jakarta, 05 November 1987 /
Date of Birth (Age): 05 November 1987, Jakarta
Pangkat: Anggota Komite Perum Jasa Tirta II /
Committee Member of Perum Jasa Tirta II

Riwayat Penugasan: / *Assignment History:*
- VP Portofolio Management PT Danarekasa /
  VP Portfolio Management PT Danarekasa

Pendidikan Terakhir / *Last Education:*
Sarjana Ekonomi Universitas Prasetiya Mulya (2005-2009) /
Bachelor of Economics Prasetiya Mulya University (2005-2009)

Pengangkatan / *Appointment:*
07 November 2022 / *November 07, 2022*

Riwayat Jabatan:/ *Position History:*
- Senior Manager Business Advisory & Asset Management (2017-2019) PT PPA /
  Senior Manager Business Advisory & Asset Management (2017-2019) PT PPA
- Assistant Vice Presidet Manager Advisory & Asset Managent PT PPA (2019-2021) / *Assistant Vice Presidet Manager Advisory & Asset Management PT PPA (2019-2021)*
- VP Portofolio Management PT Danarekasa (2021 – Sekarang) /
  VP Portfolio Management PT Danarekasa (2021 – Present)



Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan dan program sebagai berikut:

1. Evaluasi Kinerja Perusahaan tahun 2023
2. Pertemuan Rutin Triwulanan dan Koordinasi dengan SPI
3. Rapat Internal Dewan Pengawas
4. Rapat Gabungan Dewan Pengawas & Direksi
5. RKAP 2024 dan RJPP 2020-2024 harus sejalan dengan Tugas dalam PP 25 Tahun 2022 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan tentang pengusahaan dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air di wilayah Kerja.
6. Dalam melaksanakan investasi agar dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dan melihat Analisa risiko strategis yang berpengaruh kepada penugasan perusahaan dalam PP 7 tahun 2010.
7. Perlunya melihat kembali urgensi Project Investasi agar dana Investasi yang dilaksanakan dapat memberikan value added bagi perusahaan dan menjadi penunjang dalam rangka Penugasan Pemerintah yang termuat dalam PP 7 tahun 2010.

Kriteria Komite Audit

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki independensi, integritas, akhlak, dan moral yang baik. Selain itu, anggota Komite Audit memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas, hak, dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan auditor internal;
2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengandalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas Dewan Pengawas lainnya;
6. Melaksanakan tugas lainnya dari Dewan Pengawas, berupa namun tidak terbatas pada:
7. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai Perusahaan, serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya;
8. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan ;
9. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan ;

During 2023, the Audit Committee has carried out the following activities and programs:

1. *Evaluation of Company Performance in 2023*
2. *Regular Quarterly Meetings and Coordination with SPI*
3. *Internal Meetings of the Supervisory Board*
4. *Joint Meetings of the Board of Supervisors & Directors*
5. *RKAP 2024 and RJPP 2020-2024 must be in line with the Task in PP 25 OF 2022 article 4 paragraph (1) and paragraph (2) which states about the exploitation and part of the task of managing water resources in the Work area.*
6. *In carrying out investments, it must be carried out with the principles of efficiency and prudence and look at the strategic risk analysis that affects the company's assignment in PP 7 of 2010.*
7. *The need to reconsider the urgency of the investment Project so that the Investment funds implemented can add value to the company and serve as a support for the Government Assignments outlined in PP 7 of 2010.*

The Audit Committee

Criteria The general requirements for appointment to the Audit Committee are independence, integrity, good character, and morals. Members of the Audit Committee also have experience in finance and accounting.

Audit Committee Duties and Responsibilities

The Audit Committee has the following duties, rights, and responsibilities in carrying out its functions:

1. *Assisting the Supervisory Board in ensuring the effectiveness of the internal control system and the implementation of the External Auditor's and Internal Auditor's duties;*
2. *Evaluating activity implementation as well as the results of audits conducted by the Internal Audit Unit and the External Auditor;*
3. *Make recommendations for improving the management control system and putting it into action.*
4. *Ensure that all information issued by the Company is subject to a satisfactory review procedure.*
5. *Identifying matters that require the Supervisory Board's attention and other Supervisory Board duties;*
6. *Carry out other Supervisory Board duties, including but not limited to:*
7. *Examining information about the company, such as the Long Term Plan, Work Plan, and Company Budget, as well as management reports and other information;*
8. *Examining the Company's compliance with laws and regulations pertaining to its activities;*
9. *Reviewing Company-related complaints;*



10. Mengkaji kecukupan fungsi pemeriksaan internal, termasuk jumlah pemeriksa, rencana kerja tahunan, dan penugasan yang telah dilaksanakan;
11. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk di dalamnya perencanaan audit dan jumlah auditor;
12. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Pengawas;
13. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebelum tahun buku berjalan;
14. Melakukan klarifikasi dengan Direksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja tahunan dan melaporkan secara tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan;
15. Membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya Ketua Komite Audit dan salah seorang anggota Komite Audit;
16. Anggota Komite Audit yang bukan Dewan Pengawas berhak mendapatkan honorarium atas beban Perusahaan yang besarnya ditetapkan Dewan Pengawas yang maksimum nilainya 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

10. Examining the internal audit function's adequacy, including the number of examiners, annual work plans, and completed assignments;
11. Examine the external audit's adequacy, including the audit plan and the number of auditors;
12. Based on a written assignment letter from the Supervisory Board, the Audit Committee may access records or information about employees, funds, assets, and other Company resources related to the performance of their duties and report the results to the Supervisory Board in writing;
13. Prepare and submit to the Supervisory Board an annual work program to be determined before the current fiscal year;
14. Clarify with the Board of Directors their responsibilities in carrying out their duties in accordance with the annual work program, and report in writing to the Supervisory Board with recommendations if necessary;
15. Prepare quarterly and annual reports for the Supervisory Board that are signed by at least the Chairman of the Audit Committee and one Audit Committee member;
16. Audit Committee members who are not members of the Supervisory Board are entitled to an honorarium at the expense of the Company, the amount of which is determined by the Supervisory Board and has a maximum value of 20% (twenty percent) of the President Director's salary.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Audit

Komite Audit diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Dewan Pengawas Nomor: (KEP-83/DEWAS/XI/2020), (KEP-02/DEWAS/II/2021), dan (KEP-04/DEWAS/XI/2022). Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Auditor Appointment and Removal

The Audit Committee is appointed and dismissed pursuant to the Supervisory Board Decrees (No. KEP-83/DEWAS/XI/2020), (KEP-02/DEWAS/II/2021), and (KEP-04/DEWAS/XI/2022). The dismissal of Audit Committee members may be carried out upon the expiration of their term of office and based on the decision of the Supervisory Board if they fail to meet the established performance standards and/or are deemed incompetent in carrying out their duties.

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi, dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, hubungan keluarga, dan/atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemilik Modal Utama/Pengendali.

The Audit Committee's Independence

All members of the Audit Committee have met the criteria of independence, evidenced by not having financial relationships, management relationships, share ownership, family relationships, and/or other relationships that may affect their ability to act independently with other members of the Audit Committee, Supervisory Board, Board of Directors, and/or Majority/Controlling Shareholders.



ASPEK INDEPENDENSI / *Independence Aspect*	NUNING SRI REJEKI WULANDARI	AGUS WALUYO	EMIRIO FAJAR
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / *No Financial relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members*	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas dan Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit / *No family relation with Supervisory Board and Board of Directors and/or with Audit Committee Members*	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perum Jasa Tirta II, Anak Perusahaan maupun Perusahaan Patungan / *No managerial relation in Perum Jasa Tirta II, subsidiaries or Joint Ventures*	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perum Jasa Tirta II / *No shareholding in Perum Jasa Tirta II*	√	√	√

Piagam Komite Audit

Perum Jasa Tirta II memberikan Komite Audit dengan Piagam *(Charter)* Komite Audit sebagai pedoman tata laksana kerja Komite Audit sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik No. 1/DP/68/KBS/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019. Adapun piagam tersebut memuat dan mengatur aspek- aspek pelaksanaan tugas Komite Audit, di antaranya visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, kode etik, persyaratan auditor, pelaksanaan rapat, dan mekanisme kerja lainnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit melaksanakan rapat secara berkala dengan auditor eksternal setidaknya satu kali dalam 1 (satu) tahun guna membahas progres pemeriksaan audit. Komite Audit juga dapat mengundang manajemen Perusahaan melalui Satuan Pengawasan Intern untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menunjang kebutuhan proses audit.

Seluruh keputusan yang diambil dalam rapat dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat, termasuk dalam hal terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan disebutkan alasannya. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit baik yang hadir maupun yang berhalangan hadir dalam rapat.

The Perum Audit Committee's Charter

The Audit Committee Charter is provided by Jasa Tirta II as a guideline for the Audit Committee's work, as stipulated by the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance No. 1/ DP/68/KBS/10/2019 dated October 30, 2019. The charter includes and governs aspects of the Audit Committee's duties, such as the vision and mission, structure and position, duties and responsibilities, authority, work relations, code of ethics, auditor requirements, holding meetings, and other working mechanisms.

Meetings of the Audit Committee

The Audit Committee conducts regular meetings with the external auditor at least once in 1 (one) year to discuss the progress of the audit examination. The Audit Committee may also invite the Company's management through the Internal Audit Unit to obtain information needed to support the needs of the audit process.

All decisions made at the meeting are properly recorded and documented in the meeting minutes, including dissenting opinions, and the reasons are stated. The meeting minutes are signed by the chairman and distributed to all members of the Audit Committee, both present and unable to attend the meeting.



Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan audit Perusahaan, Perum Jasa Tirta II memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Komite Audit untuk mengikuti pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau *workshop* sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Informasi mengenai program pengembangan kompetensi yang diikuti Komite Audit selama tahun 2023 telah dipaparkan dalam bab Profil Perusahaan, sub bab Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawasan Intern dalam Laporan Tahunan ini.

Remunerasi Komite Audit

Struktur dan jumlah remunerasi Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari honorarium sebesar 20% dari pendapatan Direktur Utama sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER- 12/ MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Pengawas / Dewan Pengawas BUMN.

Audit Committee Competency Development

To improve the Audit Committee's competence in carrying out the Company's audit supervisory function, Perum Jasa Tirta II provides the Audit Committee with the most opportunities to attend training, education, seminars, and/or workshops in accordance with the required competencies. In this Annual Report, information about the Audit Committee's competency development program for 2023 is presented in the Company Profile chapter, Education and/or Training sub-chapter for the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit.

Audit Committee Remuneration

The Supervisory Board has determined the structure and amount of the remuneration of the Audit Committee that is not a member of the Supervisory Board, which consists of an honorarium of 20% of the President Director's income in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Supervisory Board/Board SOE Supervisor.





Komite Nominasi Dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Peraturan BUMN mewajibkan Perusahaan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai penerapan GCG sehingga Perusahaan dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-05/DEWAS/XI/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan menjadi :

Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota :

1. Ketua merangkap Anggota : Kelik Wirawan Wahyu Widodo
2. Sekretaris merangkap Anggota : Nuning Sri Rejeki Wulandari
3. Anggota : Fatkhurohman Taufik

Adapun Profil Ketua dan Anggota Komite terdapat dalam profil dewan pengawas dalam laporan tahunan ini.

Terkait dengan fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai:
2. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
3. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
4. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas;
5. Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

Nomination and Remuneration Committee

The Remuneration and Nomination Committee was formed to assist the Board of Directors and the Supervisory Board in carrying out its functions and duties related to the remuneration and nomination of members of the Board of Directors and the Supervisory Board. As part of the implementation of GCG, SOE regulations require the Company to establish a Remuneration and Nomination Committee so that the Company can be managed on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

The Foundation for the Remuneration and Nomination Committee

Furthermore, in accordance with the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-05/DEWAS/XI/2022 dated 10 November 2022 concerning Changes in the Membership Composition of the Nomination and Remuneration Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the membership composition becomes:

Chairperson concurrently Member Secretary concurrently Member Members:

1. *Chairperson concurrently Member : Kelik Wirawan Wahyu Widodo*
2. *Secretary concurrently Member : Nuning Sri Rejeki Wulandari*
3. *Member : Fatkhurohman Taufik*

The Chair's and Committee members' profiles are listed on the supervisory board profile in this annual report.

Concerning the Nomination function:

1. *Make recommendations to the Supervisory Board on:*
2. *The composition of positions on the Board of Directors and/or the Supervisory Board;*
3. *The policies and criteria required in the Nomination process; and*
4. *performance evaluation policies for members of the Board of Directors and/or the Supervisory Board.*
5. *Assist the Supervisory Board in evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board using the benchmarks prepared as evaluation material*



6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas; dan
7. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Pemilik Modal.

6. *Make recommendations to the Supervisory Board about the capacity building program for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board; and*
7. *Make proposals to the Supervisory Board about candidates who meet the requirements for members of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board to be submitted to the Capital Owners.*

Terkait dengan fungsi Remunerasi:

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai struktur Remunerasi;
1. Kebijakan atas Remunerasi; dan
2. Besaran atas Remunerasi;

Membantu Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.

Realisasi Kegiatan Komite Nominasi Dan Remunerasi Tahun 2023

Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2023 mengadakan 12 kali rapat.

Concerning the Remuneration function:

Provide recommendations to the Supervisory Board regarding the structure of the Remuneration:
1. *Remuneration policy; and*
2. *The amount of Remuneration;*

Assist the Supervisory Board in assessing performance in relation to the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or members of the Supervisory Board.

Realization of Nomination and Remuneration Committee Activities in 2023

The Nomination and Remuneration Committee met twelve times in 2023.



Komite Pemantau Risiko
Risk Oversight Committee

1. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II I.29 dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, maka susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated 5 November 2020 on the Appointment of the Chairman of the Risk Oversight Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II I.29 and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated 5 November 2020 on the Appointment of Members of the Risk Oversight Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II, the membership composition of the Risk Oversight Committee is as follows:



ROMMY MARCANDI
Ketua / *Chairman*

Tempat/Tanggal Lahir: Malang, 17 Januari 1976 /
Date and place of birth: January 17, 1976, Malang

Jabatan Saat Ini / *Current Position:*
Pada tahun 2021 pernah menjabat sebagai PLT Asdep Manajemen Risiko selanjutnya Kabid PMN PSO sampai dengan saat ini. / *In 2021, he served as PLT Assistant for Risk Management and then Head of PMN PSO until now.*

Riwayat Pendidikan / *Educational Background:*
Strata II (S2): Universitas Pembangunan Nasional /
S2 (Strata II): National University of Development

Sertifikasi/Kursus / *Certification/Course:*
- *Result-Focused Project Design and Monitoring (Mandiri University & Asian Development Bank-2023) / Result-Focused Project Design and Monitoring (Mandiri University & Asian Development Bank - 2023)*
- *ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of Excellence/BSE-2023) / ESG for Boards: Governance of ESG (BUMN School of Excellence/BSE - 2023)*
- *GRC Integrated Information for Supervisory Board (BUMN School of Excellence/BSE-2023) / GRC Integrated Information for Supervisory Boards (BUMN School of Excellence/BSE - 2023)*
- *GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE-2023) / GC Methodology and Environmental and Social Management Systems (BUMN School of Excellence/BSE - 2023)*
- Pelatihan dan Uji Sertifikasi *Certified Governance Oversight Professional (CGOP) (PPA&K-2023) / Training and Certification Examination for Certified Governance Oversight Professional (CGOP) (PPA&K - 2023)*





KANDIANAWATI
Anggota / *Member*

Lahir di Jakarta, June 13, 1977. Sarjana dari Universitas Indonesia pada 2000 dan Master dari IPB pada 2019. Memiliki pengalaman kerja di PAM Jaya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Influx, INC dan PT Aetra Air Tangerang. Memiliki Kehalian bidang Manajemen risiko, GCG, Manajemen Air dan lain lain. /
Born in Jakarta, June 13, 1977. In 2000, she received a bachelor's degree from the University of Indonesia, and in 2019, she received a master's degree from IPB. Previously worked for PAM Jaya, the National Development Planning Agency, Influx, INC, and PT Aetra Air Tangerang. Has knowledge of risk management, GCG, water management, and other areas.

Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan, serta melaporkan pelaksanaan rencana kerja tahunan tersebut kepada Dewan Pengawas;
2. Memberikan masukan kepada Dewan Pengawas tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Pemantau Risiko;
3. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, termasuk kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaannya, serta menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas atas kebijakan yang telah diambil Direksi terkait dengan manajemen risiko;
4. Melakukan penelahaan atas informasi mengenai Perusahaan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
5. Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko secara berkala serta memantau potensi risiko yang dihadapi Perusahaan dan implementasi mitigasinya;
6. Melakukan penelaahan atas kebijakan Perusahaan dalam mengelola risiko yang terkait dengan sasaran kinerja dan bidang usaha Perusahaan ;
7. Memberikan saran dan/atau rekomendasi kepada Dewan Pengawas untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan dalam hal manajemen risiko;
8. Membantu Dewan Pengawas dalam hal pengawasan kepatuhan Direksi terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk jika ada potensi benturan kepentingan;

The Risk Oversight Committee's Responsibilities

1. *Prepare and submit an annual work plan to the Supervisory Board for approval, and report to the Supervisory Board on its implementation;*
2. *Make recommendations to the Supervisory Board on the development and improvement of the Risk Monitoring Committee Charter;*
3. *Evaluate the Board of Directors' risk management policies and strategies, including the suitability of policies and their implementation, and make recommendations to the Supervisory Board on risk management policies adopted by the Board of Directors;*
4. *Examining information about the company, the Long Term Plan (RJPP), and the Work Plan and Budget (RKAP);*
5. *Evaluate and analyze risk profile reports on a regular basis, as well as monitor the Company's potential risks and mitigation efforts;*
6. *Reviewing the Company's risk management policies in relation to the Company's performance targets and business fields;*
7. *Make suggestions and/or recommendations to the Supervisory Board for necessary improvements and risk management improvements;*
8. *Assist the Supervisory Board in supervising the Board of Directors' compliance with prevailing laws and regulations, including if there's a potential conflict of interest;*



9. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Pengawas sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Dewan Pengawas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Pengawas untuk selanjutnya

9. Carry out other Supervisory Board duties as long as they are within the scope of the Supervisory Board's duties and obligations as defined by the provisions of the applicable laws and regulations;
10. Submit a report to the Supervisory Board on the implementation of special tasks for further realization

Realisasi Kegiatan Komite Pemantau Risiko 2023

Secara umum, program kegiatan Komite Pemantau Risiko dapat berjalan secara optimal. Komite Pemantau Risiko secara periodik melakukan pembahasan dengan unit kerja yang membidangi risiko, dan sudah mengadakan rapat sebanyak 12 kali.

Realization of Risk Oversight Committee Activities in 2023

In general, the Risk Oversight Committee's activity program can run smoothly. The Risk Oversight Committee meets 12 times a year to discuss risk management with the work unit in charge of risk management.

Tata Cara Penggantian Komite Di Bawah Dewan Pengawas

Tata cara penggantian anggota Komite di bawah Dewan Pengawas dari Pihak Independen dijelaskan sebagai berikut.

1. Anggota Komite dipilih dan ditetapkan berdasarkan notulen Rapat Dewan Pengawas;
2. Pemilihan dan Penetapan Anggota Komite, salah satunya didasarkan pada rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Pemilihan dan Penetapan Anggota Komite sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Dewan Pengawas, diputuskan melalui Keputusan Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Direksi untuk dilakukan Pengangkatan sebagai Anggota Komite;
4. Keanggotaan Komite dapat berakhir sesuai dengan masa jabatannya ataupun sebelum akhir masa jabatannya;
5. Terhadap keanggotaan Komite yang berakhir sesuai dengan masa jabatannya, dapat dilakukan pengangkatn kembali oleh Direksi, berdasarkan surat rekomendasi pengangkatan kembali yang disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi;
6. Dalam hal keanggotaan komite berakhir sebelum masa jabatannya, disebabkan salah satu faktor sebagai berikut:
   a. Anggota Komite berdasarkan evaluasi penilaian kinerja oleh keputusan rapat Dewan Pengawas, dinilai melalaikan tuga dan tanggungjawabnya sehingga dianggap tidak cakap untuk menjadi komite.
   b. Melanggar tata tertib kerja komite serta melanggar ketentuan internal Perusahaan lainnya.
   c. Terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau merusak citra Perusahaan.

Procedures for Committee Substitution in the Supervisory Board

The procedures for replacing members of the Supervisory Board's Committees with independent parties are as follows:

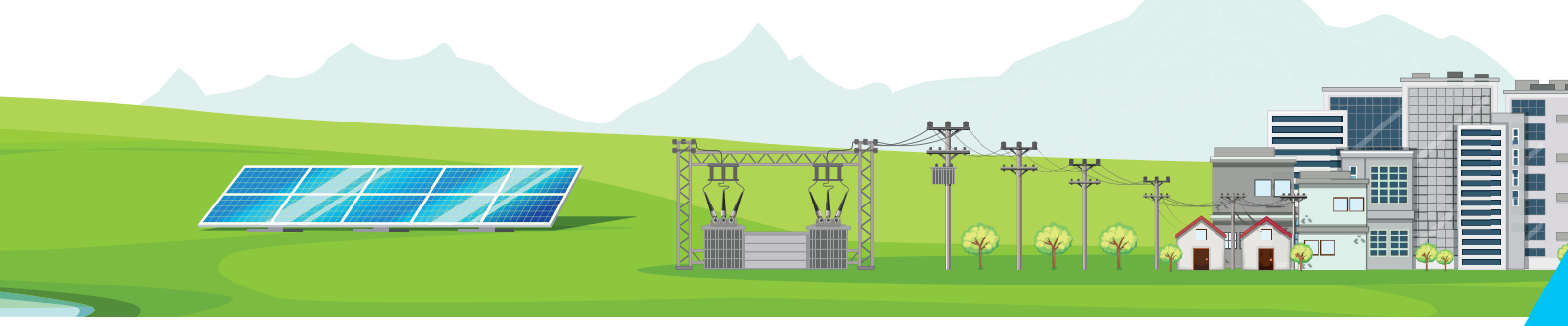
1. *Committee members are elected and determined based on the minutes of the Supervisory Board Meeting;*
2. *Committee Member Selection and Appointment, one of which is based on the Remuneration and Nomination Committee's recommendation;*
3. *The selection and appointment of Committee Members as stated in the Supervisory Board Meeting Minutes, shall be decided by a Supervisory Board Decision and submitted to the Board of Directors for appointment as a Committee Member.*
4. *Committee membership may end in accordance with their term of office or before the end of their term of office;*
5. *For Committee membership that ends in accordance with their term of office, the Board of Directors may reappointment, based on a letter of recommendation for reappointment submitted by the Supervisory Board to the Board of Directors;*
6. *If committee membership ends before the end of their term of office, it is due to one of the following reasons:*
   a. *Committee members are deemed incompetent to serve on committees based on the evaluation of the performance appraisal by the Supervisory Board meeting.*
   b. *Violate the committee's work rules and other internal Company regulations.*
   c. *Proven to take actions that are detrimental to the Company or its image.*



Rapat Komite Dewan Pengawas
Supervisory Board Committee Meetings

Rapat Komite Audit / *Audit Committee Meeting*

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	11 Januari 2023	• Pembahasan Porgres Tindak Lanjut Temuan Interim KAP 2022
2	16 Januari 2023	• Pembahasan Program Kerja Komite Audit Tahun 2023 • *Discussion and Sharing Session* dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Perusahaan Oleh KAP • Lain-lain
3	15 Februari 2023	• Pembahasan Permohonan Tanggapan Atas Penghapusbukuan Aset Milik Perum Jasa Tirta II yang Terdampak PSN Proyek Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu)
4	20 Maret 2023	• Progress Audit KAP • Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Maret 2023
5	12 April 2023	• Progress Penyelesaian Audit KAP • Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Maret Tahun 2023
6	02 Mei 2023	• Telahaan Komite Audit Nomor TA-05/KA/2023/perihal Hasil Evaluasi Komite Audit Atas Pelaksanaan Audit Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022
7	24 Mei 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan April 2023
8	08 Juni 2023	• Temuan Pengawasan Internal per Triwulan I 2023
9	16 Juni 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Mei 2023
10	20 Juli 2023	• Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2023 • Kinerja Produksi dan Pemasaran s/d Semester I 2023
11	22 Agustus 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Juli 2023 • Kinerja Keuangan s/d Juli Tahun 2023 • Highlight Progres Investasi 2023
12	20 September 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Agustus 2023 • Kinerja Keuangan s/d Agustus Tahun 2023 • Prognosa s/d Desember Tahun 2023
13	05 Oktober 2023	• Pembahasan Draft RKAP 2024 Tahun 2024
14	24 Oktober 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan September 2023 • Kinerja Keuangan s/d September Tahun 2023
15	10 November 2023	• Progres Tindak Lanjut atas Temuan Pengawasan Internal dan Eksternal per Triwulan III 2023
16	15 November 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan Oktober 2023 • Kinerja Keuangan s/d Oktober Tahun 2023 • Update Prognosa Tahun 2023
17	21 Desember 2023	• Kinerja Produksi dan Pendapatan s/d Bulan November 2023 • Kinerja Keuangan s/d November Tahun 2023 • Update Prognosa Tahun 2023



Rapat Komite Pemantau Risiko / *Risk Monitoring Committee Meeting*

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	06 Januari 2023	• Pembahasan Program Kerja KPR Tahun 2023
2	20 Februari 2023	• Progress Investasi Carry Over 2019-2022 • Persiapan Program Investasi 2023 • Pengendalian Top Risk
3	20 Maret 2023	• Review Pedoman Manajemen Risiko Tahun 2023 • Tindak Lanjut Surat Dewan Pengawas Nomor S-06/DP/2023
4	17 April 2023	• Progress Investasi Carry Over dan Investasi Tahun 2023 • Pengendalian Top Risk
5	17 Mei 2023	• Progress Investasi Carry Over dan Investasi Tahun 2023 • Pengendalian Top Risk
6	20 Juni 2023	• Pemenuhan Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko • Hasil Stress Testing dan Internal Control Testing Triwulan I Tahun 2023 • Progress Investasi Carry Over dan Investasi Tahun 2023
7	12 Juli 2023	• Progress Investasi Carry Over 2019-2022 • Progress Investasi Tahun 2023 • Evaluasi Penerapan Risiko s/d Juni 2023 • Penetapan Klasifikasi Risiko PJT II dan PT JTL
8	18 Agustus 2023	• Progress Investasi Carry Over 2019-2022 • Progress Investasi Tahun 2023 • Pengendalian Risiko Utama • Penerapan Risiko di Anak Perusahaan • Monitoring Realisasi Kualifikasi Organ Pengelola Risiko
9	22 September 2023	• Progress Investasi Carry Over 2019-2022 • Progress Investasi Tahun 2023 • Pemenuhan KPI Organ Pengelola Risiko • Pengendalian Top Risk
10	24 Oktober 2023	• Profil Risiko 2024 • Rencana Pemenuhan APS 2023 Aspek Risiko • Progress Investasi Carry Over • Progress Investasi Tahun 2023
11	15 November 2023	• Profil Risiko 2024 • Rencana Pemenuhan APS 2024 Aspek Risiko • Progress Investasi Carry Over • Progress Investasi Tahun 2023
12	15 Desember 2023	• Evaluasi Pelaksanaan Risiko Tahun 2023 • Progress Investasi Carry Over dan Investasi 2023 • Finalisasi Top Risk Tahun 2024



Rapat Komite Nominasi Dan Remunerasi / *Nomination and Remuneration Committee Meeting*

NO	TANGGAL RAPAT	AGENDA RAPAT
1	06 Februari 2023	• Wawancara Seleksi Staf Sekretariat Perum Jasa Tirta II
2	24 Februari 2023	• Pembahasan Usulan Top 20% Talenta Perum Jasa Tirta II
3	12 April 2023	• Pembahasan Usulan Perubahan SOTK
4	12 April 2023	• Pembahasan KPI Direksi Tahun 2023 Secara Individual • Pembahasan Usulan Perubahan SOTK
5	02 Mei 2023	• Pembahasan Usulan Remunerasi Tahun 2023
6	27 Juni 2023	• Pembahasan Usulan Calon Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan Perum Jasa Tirta II (PT Jasa Tirta Luhur)
7	25 Agustus 2023	• Kebijakan Tantiem Ditangguhkan • Fasilitas Kendaraan Dinas Direksi
8	31 Agustus 2023	• Pembahasan Usulan Calon Kepala SPI
9	14 September 2023	• Penjelasan dan Dokumen Kelengkapan Tantiem yang Ditangguhkan
10	09 November 2023	• Wawancara Seleksi Anggota Komite Pemantau Risiko
11	13 November 2023	• Evaluasi Tugas Dewan Pengawas Serta Organ Pendukung • Wawancara Seleksi Anggota Komite Pemantau Risiko
12	11 Desember 2023	• Wawancara Seleksi Anggota Komite Pemantau Risiko



Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta II mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi utama dalam rangka membantu tugas Direksi, yaitu sebagai public relation/*Corporate communication, institution relations, GCG implementation, monitoring* pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)*, monitoring pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Perusahaan *(Corporate Social Responsibility/CSR)* serta administrasi dokumen kebijakan dan notulensi rapat Direksi. Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan. Ruang lingkup tugas Sekretaris Perusahaan meliputi Kesekretariatan Direksi, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, serta Hubungan Internasional.

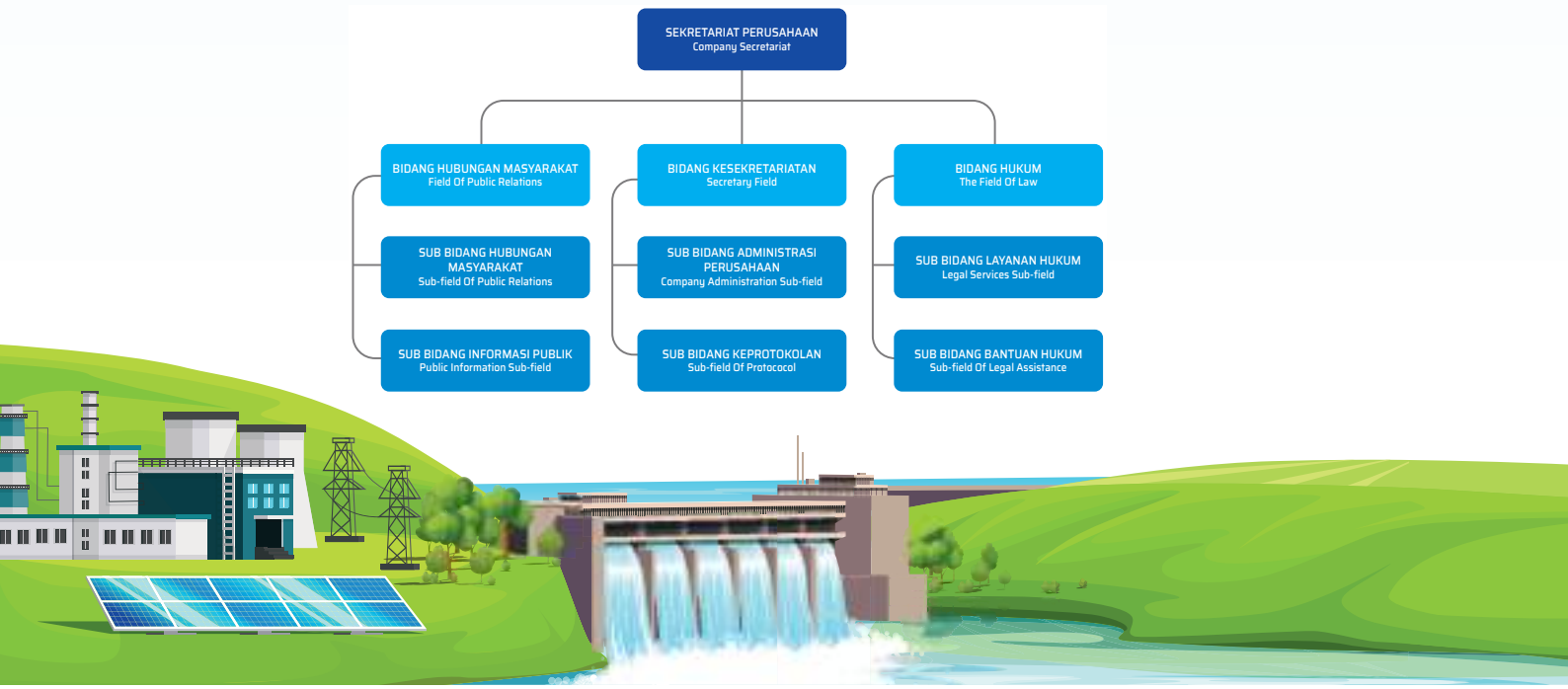
The mission of Perum Jasa Tirta II's Corporate Secretary is to consistently and continuously support the creation of a good corporate image through the management of effective communication programs to all stakeholders. The Corporate Secretary's main function is to assist the Board of Directors' duties, which include public relations/ Corporate communication, institution relations, GCG implementation, monitoring the achievement of Key Performance Indicators (KPI), monitoring the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) activities, and document administration. The Corporate Secretary reports directly to the President Director and is responsible for assisting in the creation of a positive corporate image through effective communication programs with all stakeholders. The Corporate Secretary reports directly to the President Director and is responsible for assisting in the creation of a positive corporate image through effective communication programs with all stakeholders. The Corporate Secretary's responsibilities include Board of Directors Secretariat, Public Relations, Inter-Agency Relations, and International Relations.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Sebagaimana ditetapkan pada Struktur Organisasi Peraturan direksi Perusahaan Umum (Perus Jasa Tirta II) Nomor PRD-17/DIR/12/2021, tentang Struktur Organisasi, dan tata kerja Perusahaan umum Jasa Tirta II struktur organisasi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Corporate Secretary Organization

As stipulated in the Organizational Structure of the Board of Directors of a Public Company (Perus Jasa Tirta II) Number PRD-17/DIR/12/2021, regarding the Organizational Structure and working procedures of Jasa Tirta II Public Company, the organizational structure of the Corporate Secretary is as follows:



Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile



UDIEN YULIANTO, ST., M.TECH
Sekretaris Perusahaan
Company Secretary

Warga Negara Indonesia Lahir di Sidoarjo 10 Juli 1970. Memperoleh gelar sarjana pengairan dari Iniversitas Brawijaya, Master Teknik Pengairan dari University Of Roorkee India. / *Indonesian citizen Born in Sidoarjo 10 July 1970. Obtained a bachelor's degree in irrigation from Brawijaya University, Master of Irrigation Engineering from University Of Roorkee India.*

Kualifikasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan wajib memenuhi kriteria kualifikasi yang disyaratkan, antara lain wajib memiliki pengetahuan mengenai peraturan yang berkaitan dengan Perusahaan, hubungan masyarakat, keterampilan administratif, dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga harus memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Mengh adiri rapat Direksi dan membuat Risalah Rapat;
2. Menyiapkan Daftar Khusus, yaitu daftar yang berisikan kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi beserta keluarganya sebagai sebuah dokumen benturan kepentingan;
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);

Corporate Secretary Qualifications

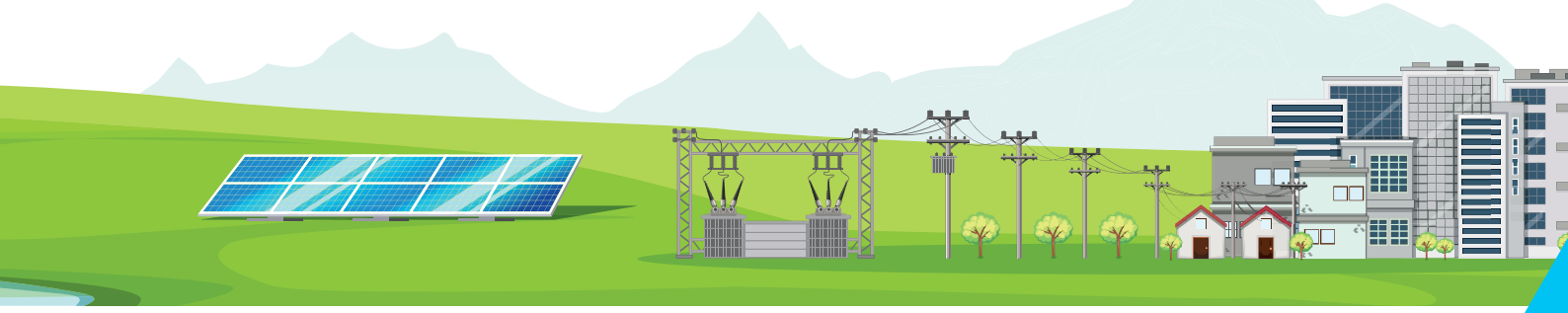
The Corporate Secretary must meet the required qualification criteria, which include knowledge of Company regulations, public relations, administrative skills, and experience that supports the execution of his duties. Furthermore, in order to carry out his duties and responsibilities, the Corporate Secretary must have academic qualifications and adequate competence.

Appointment and Dismissal of Corporate Secretary

The Board of Directors appoints and dismisses the Corporate Secretary based on the Company's internal mechanism, with the approval of the Supervisory Board.

Corporate Secretary's Duties and Responsibilities

1. *Attend Board of Directors meetings and prepare meeting minutes;*
2. *Create a Special Register, which is a list of the share ownership of members of the Supervisory Board and members of the Board of Directors, as well as their families, as a conflict of interest document.*
3. *In charge of carrying out the Joint Discussion Meeting (RPB);*



4. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan atau kegiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;
5. Mempersiapkan bahan-bahan atau materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
6. Memfasilitasi rapat-rapat dalam lingkungan Direksi, baik yangbersifat rutin maupun non-rutin;
7. Menindaklanjuti setiap keputusan rapat Direksi dan memantau tindak lanjut hasil rapat;
8. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
10. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan;
11. Menyelenggarakan program pengenalan anggota Dewan Pengawas yang baru diangkat;
12. Membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan strategis pengelolaan Perusahaan serta menyusun program dan pelaksanaannya antara lain di bidang hukum, humas, pendidikan masyarakat;
13. Memastikan tersedianya informasi yang boleh diakses oleh Pemilik Modal sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan;
14. Memastikan bahwa Perum Jasa Tirta II mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku dan wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan tugasnya kepada Direksi secara berkala dan kepada Dewan Pengawas apabila diminta oleh Dewan Pengawas;
15. Mengkoordinasikan isu strategis Perusahaan lintas biro/divisi;
16. Menyampaikan Laporan Tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.

Fungsi Sekretaris Perusahaan

1. Memastikan bahwa Perusahaan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Menjadi penghubung (liaison officer); dan

4. *Prepare the necessary materials related to Board of Directors reports or routine activities to be submitted to external parties;*
5. *Prepare the necessary materials or materials related to matters requiring a decision from the Board of Directors regarding the Company's management;*
6. *Facilitate both routine and non-routine Board of Directors meetings.*
7. *Follow up on every decision made at the Board of Directors meeting and monitor the meeting's outcomes;*
8. *Ensure that the Company complies with disclosure regulations in accordance with the implementation of GCG principles.*
9. *Provide information requested by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular and/or as-needed basis;*
10. *Administering and storing Company documents;*
11. *Organizing an orientation program for newly appointed Supervisory Board members;*
12. *Assisting the Board of Directors in determining strategic policies for the Company's management, as well as preparing and implementing programs in the fields of law, public relations, and public education;*
13. *Ensuring the availability of information that Capital Owners can access in accordance with the reasonable needs of stakeholders;*
14. *Ensuring that Perum Jasa Tirta II complies with the regulations regarding applicable disclosure requirements and is required to provide information related to its duties to the Board of Directors on a regular basis and to the Supervisory Board if requested by the Supervisory Board;*
15. *Coordinate the Company's strategic issues across bureaus/divisions;*
16. *Submit an Annual Report to the Board of Directors on the implementation of its duties.*

The Corporate Secretary's Duties

1. *Ensure that the Company complies with regulations regarding disclosure requirements in accordance with the implementation of GCG principles;*
2. *Provide information needed by the Board of Directors and Supervisory Board on a regular basis and/or at any time if requested;*
3. *Become a liaison officer; and*



4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemilik Modal, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan RPB.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Perum Jasa Tirta II membekali pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan melalui pengikutsertaan dalam pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara formal maupun informasi. Informasi mengenai program pelatihan dan pendidikan Sekretaris Perusahaan telah disajikan dalam Laporan Tahunan ini, bab "Profil Perusahaan", sub bab "Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Pengawas, Direksi, Komite- komite, Sekretaris Perusahaan , dan Satuan Pengawasan Intern".

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program kerja, antara lain:

1. Penyelenggaraan Rapat Pembahasan Bersama (RPB);
2. Penyelenggaraan kegiatan Rapat Direksi serta rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
3. Mendokumentasikan dan membuat risalah rapat Direksi dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi;
4. Menyusun pembuatan Annual Report dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2023;
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan *assessment GCG*;
6. Mendukung sosialisasi penerapan GCG di lingkungan Perusahaan;
7. Penyelenggaraan kegiatan terkait *corporate communication* melalui publikasi, press release, kegiatan *sponsorship, corporate branding* dan kegiatan lainnya;
8. Pemeliharaan hubungan Perusahaan dengan *regulator*.

4. *Administer and store Company documents, including but not limited to the Register of Capital Owners, Special Register, and minutes of Board of Directors meetings, Supervisory Board meetings, and Executive Committee meetings.*

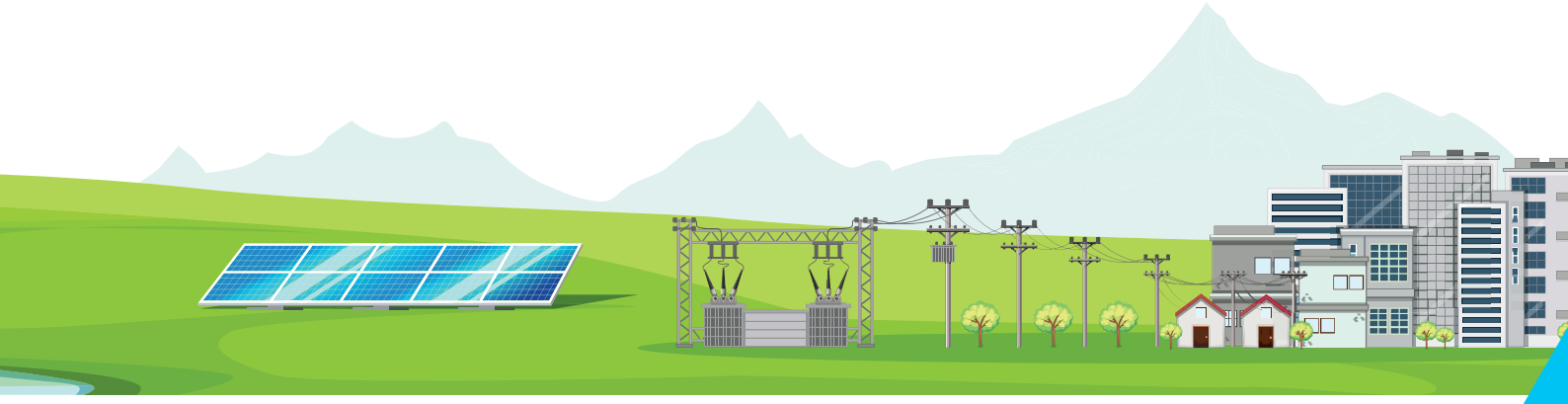
Competency Development of the Corporate Secretary

Perum Jasa Tirta II equips the Corporate Secretary's knowledge and competence through participation in formal and informational training and education. This Annual Report includes information about the Corporate Secretary's training and education program in the chapter "Company Profile," subchapter "Education and/or Training of the Supervisory Board, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit."

Report on the Execution of the Corporate Secretary's Duties in 2023

Various activities and work programs were carried out by the Corporate Secretary in 2023, including:

1. *Setting up a Joint Discussion Meeting (RPB);*
2. *Organizing the activities of the Board of Directors Meeting, as well as joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors;*
3. *Documenting and recording the Board of Directors Meeting and joint meetings of the Supervisory Board and the Board of Directors;*
4. *Prepare the Annual Report and the Sustainability Report for the fiscal year 2023;*
5 *Coordination of the GCG assessment implementation;*
6. *Supporting the socialization of GCG implementation within the Company;*
7. *Organizing corporate communication activities such as publications, press releases, sponsorship, corporate branding, and other activities;*
8. *Maintaining the Company's relationship with regulators.*



Akses Dan Keterbukaan Informasi
Information Access And Disclosure

Komitmen Perum Jasa Tirta II terhadap prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyampaian informasi terkini terkait setiap perkembangan yang terjadi secara akurat, tercatat, diolah, dan dirangkum menjadi sebuah laporan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Penyebaran informasi kepada semua Pemilik Modal Perusahaan merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan dapat membantu menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi positif dari para Pemilik Modal terhadap kebijakan dan kegiatan Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II telah menyediakan berbagai akses informasi melalui sarana dan media sebagai berikut:

Website Perusahaan:
www.jasatirta2.co.id
Kontak Sekretaris Perusahaan:
Telp. : (0264) 201972
Fax. : (0264) 201971
Email : pjt2@jasatirta2.co.id

Media Sosial
Instagram : jasatirta.2
Facebook : Perum Jasa Tirta II
Twitter : jasatirta_2
YouTube : Perum Jasa Tirta II

Keterbukaan Informasi dan Data Perusahaan
Sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, Perum Jasa Tirta II secara berkala menyebarluaskan informasi material mengenai aktivitas dan kinerja yang sejalan dengan kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator, yakni sebagai berikut:

Perum Jasa Tirta II's commitment to the principle of transparency and compliance with applicable laws and regulations related to information disclosure is realised through the delivery of the latest information related to any developments that occur accurately, recorded, processed, and summarised into a report submitted to stakeholders.

Dissemination of information to all Capital Owners of the Company is an important part of enhancing the principle of information transparency internally and externally, which is expected to help maintain and improve the knowledge, understanding, and positive perception of the Capital Owners towards the policies and activities of Perum Jasa Tirta II. Perum Jasa Tirta II has provided various access to information through the following facilities and media:

Company Website:
www.jasatirta2.co.id
Corporate Secretary Contact
Telp. : (0264) 201972
Fax. : (0264) 201971
Email : pjt2@jasatirta2.co.id

Social Media
Instagram : jasatirta.2
Facebook : Perum Jasa Tirta II
Twitter : jasatirta_2
YouTube : Perum Jasa Tirta II

Company Information and Data Disclosure
As a form of transparency to the public, Perum Jasa Tirta II disseminates material information regarding activities and performance on a regular basis, in accordance with the regulator's obligation to fulfill the established information disclosure requirements, which are as follows:

BENTUK KETERBUKAAN INFORMASI Forms Of Information Disclosure	JUMLAH Total
Laporan Tahunan / *Annual Report*	1
Laporan Berkelanjutan / *Sustainability Report*	1



Website Perusahaan

Perum Jasa Tirta II memiliki situs website resmi yaitu www.jasatirta2.co.id yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Situs tersebut menyajikan informasi mengenai profil dan sejarah Perusahaan, informasi mengenai manajemen Perseroa, layanan, informasi kinerja keuangan, berita terkini mengenai Perusahaan, serta sejumlah dokumen keterbukaan informasi lainnya.

Laporan Tahunan

Perum Jasa Tirta II menerbitkan Laporan Tahunan yang merupakan dokumentasi resmi atas pencapaian kinerja Perusahaan di tahun buku. Laporan Tahunan didistribusikan kepada Pemilik Modal dan segenap Pemilik Modal lainnya. Dalam penyusunannya, Laporan Tahunan telah mengikuti kriteria dan ketentuan yang berlaku serta diikutsertakan dalam ajang *Annual Report Awards (ARA)*.

Aktivitas Hubungan Investor

Perum Jasa Tirta II berupaya menjaga hubungan yang sinergis dengan Pemilik Modal dan Pemilik Modal melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kinerja Perusahaan secara berkala baik secara formal maupun informal.

Komunikasi Internal

Perum Jasa Tirta II senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada karyawan melalui berbagai media komunikasi dalam rangka menciptakan iklim komunikasi internal yang kondusif untuk mendukung pencapaian kinerja. Hubungan komunikasi dengan pihak internal Perusahaan dilakukan melalui penyediaan buletin dan penyebaran email blasting internal untuk menyampaikan informasi material bagi internal Perum Jasa Tirta II.

The Company's Website

Perum Jasa Tirta II has an official website, which can be accessed by all stakeholders, namely www. Jasatirta2.co.id. The site contains information on the Company's profile and history, information on the Company's management, services, financial performance data, the most recent news about the Company, and a variety of other information disclosure documents.

Report Annual

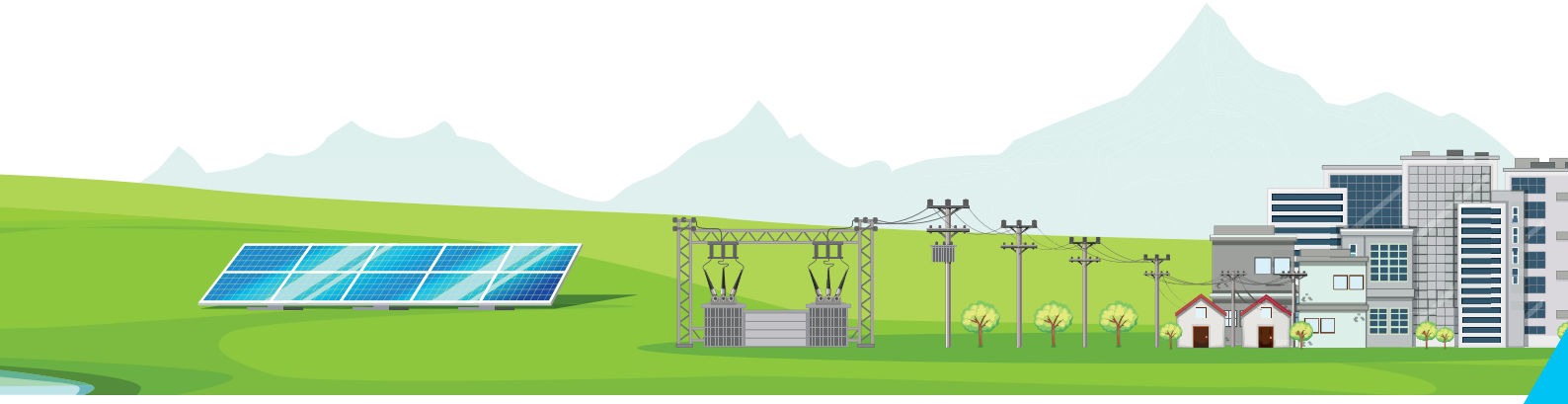
Perum Jasa Tirta II issues an Annual Report, which serves as official documentation of the Company's performance accomplishments during the fiscal year. The Capital Owners and all other Capital Owners receive the Annual Report. The Annual Report was prepared in accordance with the applicable criteria and conditions, and it was selected for the Annual Report Awards (ARA).

Activities in Investor Relations

Perum Jasa Tirta II seeks to maintain a synergistic relationship with Capital Owners and Capital Owners by formally and informally meeting the Company's performance reporting obligations on a regular basis.

Communication within the organization

Perum Jasa Tirta II always encourages two-way communication with employees via various communication channels in order to foster an environment conducive to performance achievement. Communication with the Company's internal parties is carried out through the distribution of internal email blasts and the distribution of bulletins to convey material information to the internal parties of Perum Jasa Tirta II.



Satuan Pengawasan Internal

Internal Supervision Unit

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*.

Perum Jasa Tirta II has an Internal Audit Function carried out by the Internal Audit Unit (SPI) in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Government Regulation Number 25 of 2022 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II. In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for management that can be trusted, acts professionally, objectively, and independently so that it can provide added value to the achievement of the Company's goals through efforts to increase the effectiveness of risk management, compliance with regulations and legislation and Good Corporate Governance.

Struktur dan Kedudukan SPI

SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan.

Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-17/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern adalah sebagai berikut:

Structure and Position of SPI

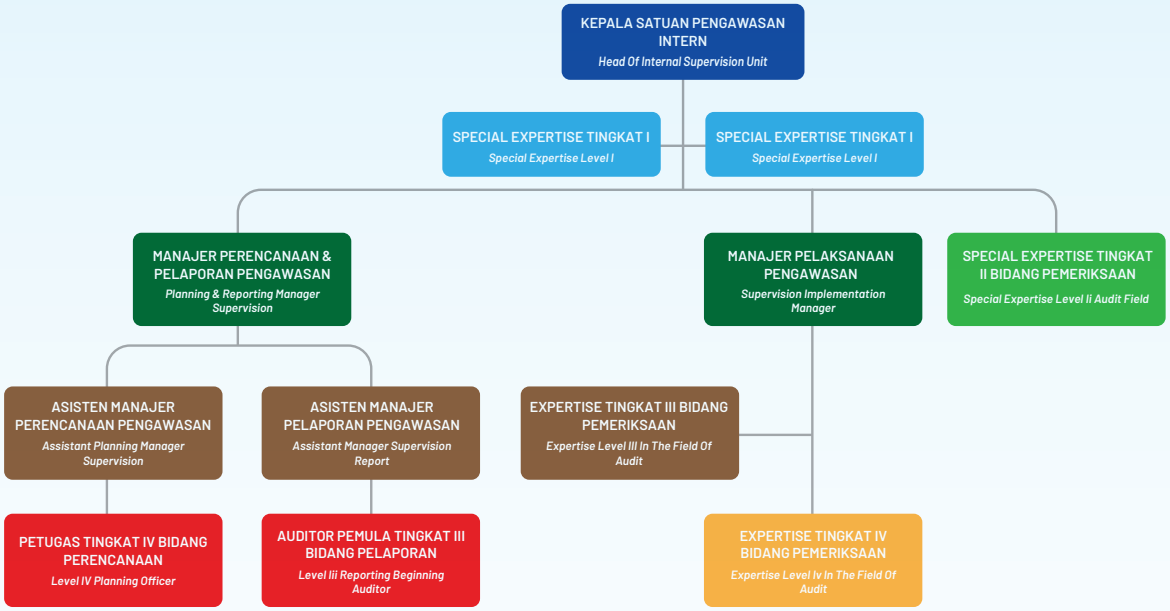
SPI has a direct position under the President Director to guarantee as required by Laws and Government Regulations. The appointment of the Head of SPI by the President Director must meet the qualifications and competencies and obtain the approval of the Supervisory Board as the representative of the owner of the Company.

As stipulated in the organizational structure of the Board of Directors of Jasa Tirta II Public Company (Perum) Regulation Number: PRD-17/DIR/12/2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Jasa Tirta II Public Company, the Organizational Structure of the Internal Audit Unit is as follows:



Struktur Organisasi Karyawan Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II

Employee Organizational Structure Perum Jasa Tirta Ii Internal Supervision Unit



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan SPI
SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Pengawas.

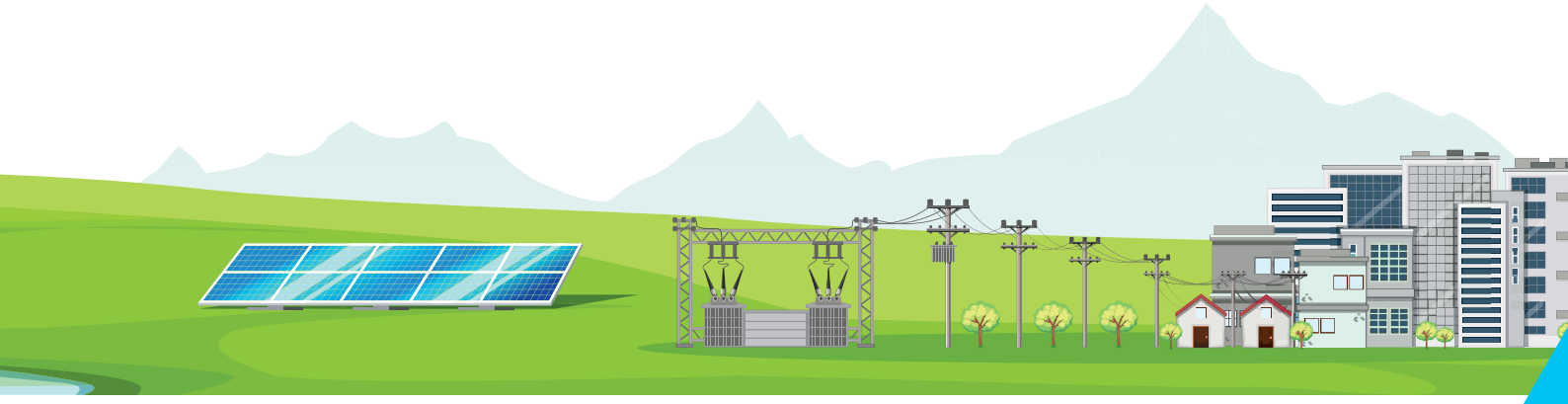
Jumlah dan Komposisi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2023, personil SPI berjumlah 12 (dua belas) orang dengan 1 (satu) orang Kepala SPI, 10 orang auditor, dan 1 orang petugas Tata Usaha (TU).

Parties Appointing and Dismissing SPI The SPI is led by a Head of SPI, who is appointed and dismissed by the President Director with the Supervisory Board's approval.

SPI Personnel Number and Composition

SPI personnel are 12 (twelve) as of December 31, 2023, with 1 (one) Head of SPI, 10 auditors, and 1 Administrative officer (TU).



Profil Kepala SPI
Profile of Head of SPI



NANDANG MUNANDAR, SE, M. AKT
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Warga Negara Indonesia, lahir di Purwakarta, 12 Februari 1972. Memperoleh gelar Sarjana dari STIE YPKP dan Magister Akuntansi dari Universitas Budi Luhur Jakarta (2010). / *Indonesian citizen, born in Purwakarta, February 12, 1972. He obtained his Bachelor's degree from STIE YPKP and Master's Degree in Accounting from Budi Luhur University, Jakarta (2010).*

Sertifikasi Personil SPI

Sampai dengan 31 Desember 2023 Perum Jasa Tirta II memiliki beberapa auditor tersertifikasi.

Piagam SPI

Landasan SPI Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern *(Internal Audit Charter)* didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)*. Internal Audit Charter yang disusun sebagai pedoman standar yang memuat kriteria minimal tentang fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Perusahaan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Internal, sehingga dapat tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah disepakati dalam Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.

SPI Personnel Certification

As of 31 December 2023 Perum Jasa Tirta II has several certified auditors.

Charter of the SPI

In carrying out its duties and functions, Perum Jasa Tirta II has an Internal Audit Charter based on the Decree of the Minister of SOEs No. Kep-117/M- MBU/2002 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of Decree of the Minister of SOEs No. Kep-117/M- MBU/2002 regarding the Adoption of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises, Copy of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises' Decree No. SK16/S. MBU/2012 on Indicators/Parameters for Assessing and Evaluating Good Corporate Governance Implementation. The Internal Audit Charter is prepared as a standard guideline that contains minimum criteria regarding the Internal Audit function that must be carried out by the Company and aspects related to the implementation of Internal Audit, in order to create a common understanding and basis regarding the level of maintenance of all parties related to the Company's interests and commitments.

The contents of the SPI charter are as follows in carrying out the duties, functions, and responsibilities as agreed in the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II concerning Guidelines for Good Corporate Governance



Visi dan Misi SPI

Visi

Menjadi unit kerja dan mitra yang dapat memberikan fungsi pengawasan, konsultansi dan katalisator secara profesional sehingga dapat memberikan kontribusi atas upaya pencapaian target-target Perusahaan.

Misi

Mengendalikan kegiatan Perusahaan dari aspek kepatuhan terhadap peraturan

- Memberikan saran konstruktif dan terjangkau atas pelaksanaan kegiatan Perusahaan
- Membantu memberikan percepatan dalam upaya pelaksanaan alur proses sistem manajemen

Tugas dan Tanggung Jawab, dan Fungsi SPI

Tugas SPI adalah melaksanakan sebagian tugas Perusahaan di bidang pengawasan terhadap operasional Perusahaan berdasarkan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II SPI mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko, program kerja, dan Key Performance Indicator (KPI) SPI;
2. Penyusunan, review, dan sosialisasi aturan/pedoman/prosedur;
   1). Pemeriksaan (audit) operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (POTT) dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   2). Pemeriksaan (audit) internal sistem manajemen mutu;
   3). Evaluasi pengendalian internal;
   4). Penilaian program jaminan kualitas SPI;
   5). Piagam SPI *(SPI Charter)*
3. Penyusunan usulan RKAP termasuk kelengkapan dokumen namun tidak terbatas pada Project Dogest Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan RAB untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangan;
5. Penyusunan rencana paket pengadaan barang/jasa berdasarkan RKAP;
6. Pembuatan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa

Vision and Missio

Vision

To become a work unit and a partner capable of providing professional supervision, consulting, and catalytic functions in order to contribute to efforts to achieve the Company's goals.

Mission

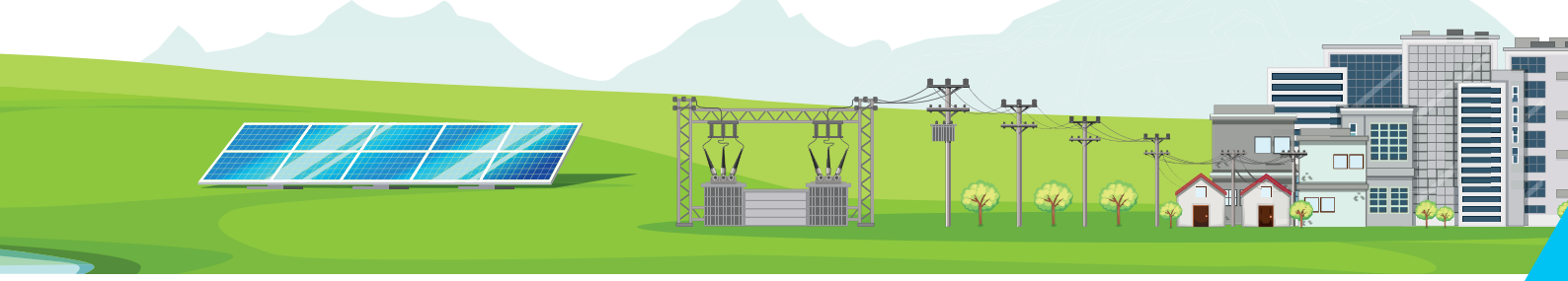
Managing the Company's activities in terms of regulatory compliance;

- *Providing constructive and affordable advice on the implementation of the Company's activities; and*
- *Assisting in the acceleration of efforts to implement the management system process flow.*

SPI's Duties and Responsibilities

The task of SPI is to carry out part of the Company's duties in the field of supervision of the Company's operations based on the Regulation of the Board of Directors of Public Company (Perum) Jasa Tirta II SPI has the following responsibilities and functions:

1. *Risk management, work plans, and SPI Key Performance Indicators (KPI);*
2. *Rules/guidelines/procedures preparation, review, and dissemination;*
   1). Operational and financial audits, audits with a specific purpose (POTT), and monitoring of follow-up evaluations of inspection results;
   2). Internal audit (audit) of the quality management system;
   3). Internal control evaluation;
   4). Evaluation of SPI's quality assurance program
   5). SPI Charter
3. *Preparation of RKAP proposal, including but not limited to Project Dogest Terms of Reference (KAK) and RAB for consulting services work in accordance with applicable regulations.*
4. *Execution of goods/services procurement in accordance with authority;*
5. *Development of a package plan for the acquisition of goods/services based on the RKAP;*
6. *Preparation of the procurement plan document, including but not limited to the Terms of Reference (KAK), Self Estimated Price (HPS), and Draft Contract for consulting services work in accordance with the*



konsultansi sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
7. Penyiapan naskah Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi;
8. Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) SPI;
9. Pelaksanaan pemeriksaan operasional dan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan internal sistem manajemen mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Pendampingan kegiatan pemeriksaan/penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan tugas dan fungsi;
11. Monitoring dan evaluasi atas progres tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal;
12. Penyelenggaraan pemeriksaan sistem manajemen mutu oleh pihak eksternal;
13. Penyelenggaraan Penilaian atau *Assessment* Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance/GCG)* yang dilakukan oleh pihak eksternal;
14. Evaluasi *(self assessment)* implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan manajemen risiko;
15. Evaluasi efektivitas pelaksanaan pengendalian internal Perusahaan;
16. Penyelenggaraan penilaian program jaminan kualitas (quality assurance) kinerja SPI;
17. Fungsi konsultansi perbaikan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
18. Penyelenggaraan rapat koordinasi bidang pengawasan dengan Komite Audit;
19. Memonitor tindaj lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan;
20. Pengendalian bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi;
21. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
22. Pengelelolaan dan pertanggungjawaban uang muka kerja unit kerja

Kode Etik SPI

Panduan pelaksanaan tugas SPI senantiasa mengacu pada ketentuan perilaku dan etika pelaksanaan audit yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, tujuan serta visi misi

applicable procurement guidelines for goods and services;
7. *Writing a Memorandum of Understanding (MoU) and/or a Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions;*
8. *SPI Annual Audit Work Program (PKPT) preparation;*
9. *Conduct operational and financial audits, audits with specific objectives, and internal quality management system audits in accordance with applicable regulations;*
10. *Assisting external parties with inspection/assessment activities in accordance with their duties and functions;*
11. *Monitoring and evaluating the progress of follow-up on the findings of internal and external audits;*
12. *Inspection of the quality management system by third parties;*
13. *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Implementation Assessment or External Assessment;*
14. *Self-assessment of Good Corporate Governance implementation and risk management;*
15. *Evaluation of the effectiveness of the Company's internal control implementation;*
16. *Implementation of a quality assurance program to assess SPI performance;*
17. *Consultancy function for internal control system improvement, risk management, and Good Corporate Governance.*
18. *Organizing coordination meetings in the field of supervision with the Audit Committee;*
19. *Monitoring follow-up on the reported results of the examination;*
20. *Control of evidence of work implementation of duties and functions;*
21. *Preparation of reports on the results of work implementation of duties and functions; and*
22. *Work unit advancement management and accountability*

SPI Code of Ethics

Guidelines for carrying out SPI duties always refer to the provisions of conduct and ethics for auditing in accordance with applicable laws and regulations, the Articles of Association, the Company's objectives, vision,



Perusahaan. Dalam mendukung tujuan tersebut, SPI memiliki Kode Etik yang mengatur standar etika yang wajib dimiliki oleh setiap auditor internal, antara lain:

1. Jujur, objektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya;
2. Loyal terhadap profesi, Perusahaan , dan unit SPI;
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi internal pemeriksa atau Perusahaan;
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara objektif;
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari unit kerja yang diperiksa, pegawai, ataupun mitra bisnis Perusahaan yang patut diduga dapat memengaruhi pertimbangan profesional;
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya;
7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan Perusahaan;
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap Perusahaan ;
9. Mengungkapkan semua fakta untuk menghindari distorsi informasi dan praktik-praktik yang melanggar hukum;
10. Senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya serta mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan.

Pengembangan Kompetensi SPI

Dalam mengakomodasi kebutuhan audit internal yang dinamis, Perum Jasa Tirta II memberikan program pengembangan kompetensi bagi Satuan Pengawasan Intern (SPI) secara sistematis dan berjenjang melalui program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.

Adapun pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal diselenggarakan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan audit. Sementara perkembangan kompetensi yang dilaksanakan secara internal dikelola oleh Perusahaan sendiri.

Informasi mengenai pelatihan dan pendidikan yang diikuti SPI selama tahun 2023 telah dimuat dalam Laporan Realisasi PKPT Tahun 2023.

and mission. In SPI has a Code of Ethics that regulates ethical standards that must be owned by every internal auditor, including:

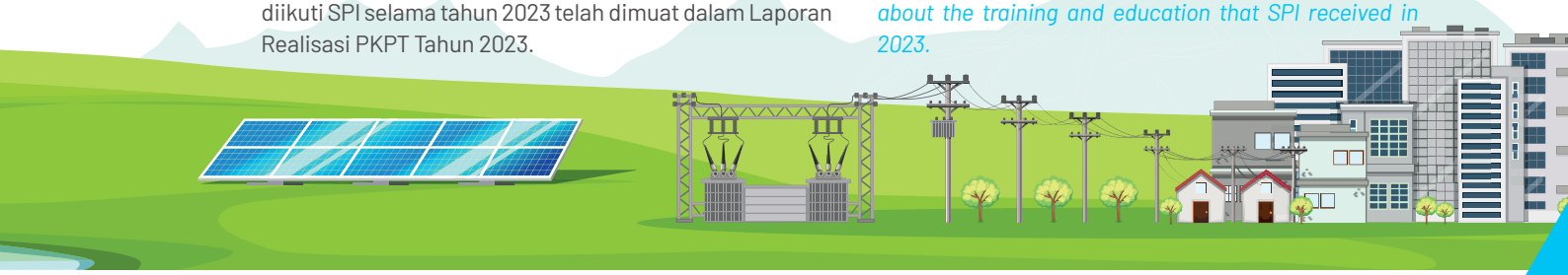
1. *Honest, objective, and sincere in carrying out their duties and fulfilling their responsibilities;*
2. *Loyal to the profession, the Company, and the SPI unit;*
3. *Must not be involved in actions or activities that can bring the internal audit profession or the Company into disrepute.*
4. *Refrain from activities that may create a conflict of interest with the Company, or activities that may create prejudice that calls into question the ability to carry out tasks and responsibilities objectively;*
5. *Not accepting any form of compensation from the audited work units, employees, or business partners of the Company that is reasonably suspected of influencing professional judgment;*
6. *Carrying out all assignments using professional competence;*
7. *Fully complying with the Internal Audit Professional Standards, Company policies, and regulations;*
8. *Not using the information obtained for personal gain, violating the law, or causing harm to the Company;*
9. *Disclosing all facts to avoid information distortion and illegal practices;*
10. *Constantly improving their skills, effectiveness, and quality of duty execution and participation in continuing professional education.*

SPI Competency Enhancement

In accommodating the dynamic needs of internal audit, Perum Jasa Tirta II provides a systematic and tiered competency development programme for the Internal Audit Unit (SPI) through competency development programmes held internally and externally.

Competency development at external institutions is organised through formal training in the form of courses or seminars/workshops related to audit issues and developments. Meanwhile, competency development carried out internally is managed by the Company itself.

The 2023 PKPT Realization Report includes information about the training and education that SPI received in 2023.



Laporan Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2023

Program *Monitoring* dan Evaluasi

Perum Jasa Tirta II telah memiliki Fungsi Audit Internal yang dijalankan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Dalam menjalankan fungsinya, SPI berperan sebagai mitra strategis bagi manajemen yang dapat dipercaya, bertindak profesional, objektif, dan independen sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Perusahaan melalui upaya peningkatan efektivitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* SPI mempunyai kedudukan langsung di bawah Direktur Utama untuk menjamin sebagaima Peraturan Pemerintah. Penetapan Kepala SPI oleh Direktur Utama harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta mendapat persetujuan Dewan Pengawas selaku wakil dari pemilik Perusahaan.

Sebagaimana ditetapkan pada struktur organisasi pada Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: PRD-18/DIR/11/2020 dan PRD-19/DIR/11/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

Internal Audit Implementation Report 2023

Monitoring and Evaluation

Perum Jasa Tirta II has an Internal Audit Function run by the Internal Audit Unit (SPI) in accordance with the mandate of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) and Government Regulation Number 7 of 2010 concerning Public Company (Perum) Jasa Tirta II.

In carrying out its functions, SPI acts as a strategic partner for trustworthy management, acting professionally, objectively, and independently in order to add value to the achievement of the Company's objectives through efforts to improve risk management effectiveness, compliance with laws and regulations, and good corporate governance (Good Corporate Governance) SPI reports directly to the President Director to ensure compliance with government regulations The appointment of the Head of SPI by the President Director must meet the qualifications and competencies, as well as obtain the approval of the Supervisory Board as the Company's representative.

According to the organizational structure specified in the Regulation of the Board of Directors of the Jasa Tirta II Public Company (Perum) Numbers: PRD-18/DIR/11/2020 and PRD19/DIR/11/2020 Concerning the Organizational Structure and Work Procedure of the Jasa Tirta II Public Company (Perum).



Pengendalian Internal

Kegiatan evaluasi pengendalian internal bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan bisnis Perusahaan secara efisien, efektif dan ekonomis; mengamankan investasi dan aset Perusahaan; menjamin tersedianya pelaporan keuangan; meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta mengurangi risiko terjadinya kerugian. Sebagai bentuk dari realisasi kegiatan ini Perusahaan telah menetapkan Pedoman Pengendalian Intern sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran X Keputusan Bersama Dewan Pengawas & Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: 1/DP/68/KBS/10/2019 – KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2020 tentang Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governence*) Perum Jasa Tirta II.

Selanjutnya evaluasi pengendalian intern dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pengawasan oleh SPI secara periodik, evaluasi pengelolaan risiko perusahaan, pengukuran/*assessment* implementasi GCG, *Assessment* implementasi Sistem Manajemen.

1) Pemeriksaan Operasional & Keuangan

Program kegiatan pemeriksaan operasional & keuangan tahun 2023 dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk memberikan keyakinan pada manajemen atas proses bisnis perusahaan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkesinambungan dengan mentaati azas kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan pedoman dan kaidah-kaidah pemeriksaan (audit) yang berlaku secara objektif dan independen dengan mengutamakan kepentingan perusahaan secara komprehensif.

Program pemeriksaan operasional & keuangan tahun 2023 dilaksanakan setiap semester, yang terdiri dari Pemeriksaan Operasional & Keuangan I dan II terhadap bidang pemeriksaan (*object audit*) yang ditetapkan berdasarkan skala risiko *(risk base audit)* dan FGD (Forum Diskusi Grup).

Realisasi Program Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Tahun 2023 telah dilaksanakan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN:09/DU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 periode pelaksanaan selama 45 hari kerja sejak tanggal ditetapkan tentang

Internal Control

Internal control evaluation activities aim to ensure the implementation of the Company's business management efficiently, effectively and economically; secure the Company's investments and assets; ensure the availability of financial reporting; improve compliance with applicable laws and regulations; and reduce the risk of loss. As a form of realisation of this activity, the Company has established Internal Control Guidelines as stated in Appendix X of the Joint Decree of the Board of Supervisors & Directors of Perum Jasa Tirta II Number: 1/DP/68/KBS/10/2019 - KBS-01/DIR/10/2019 dated 30 October 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance of Perum Jasa Tirta II.

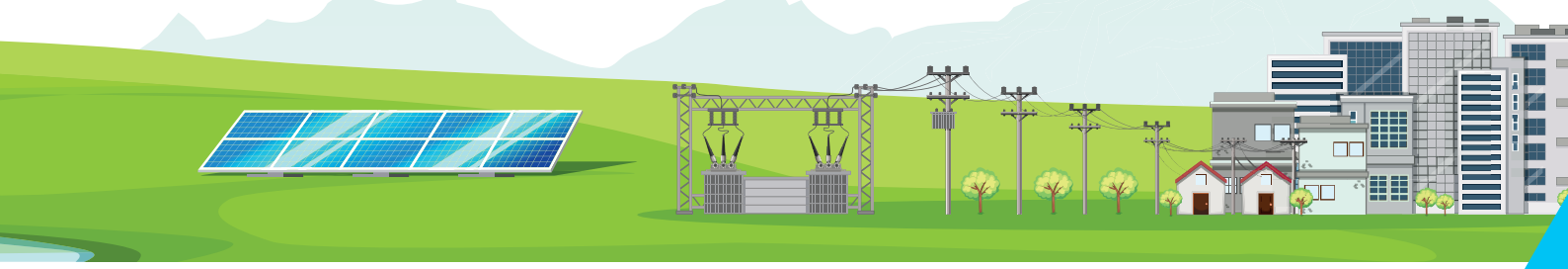
Furthermore, internal control evaluation is carried out through periodic supervisory activities by SPI, evaluation of company risk management, measurement/assessment of GCG implementation, Assessment of Management System implementation.

1) Operational & Financial Audit

The programme of operational & financial audit activities in 2023 is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) to provide assurance to management that the company's business processes have been carried out effectively, efficiently and sustainably by adhering to the principles of compliance with applicable laws and regulations. Examination activities are carried out based on the guidelines and rules of examination (audit) that apply objectively and independently by prioritising the interests of the company comprehensively.

The operational & financial audit programme in 2023 is carried out every semester, which consists of Operational & Financial Audit I and II against audit objects (object audit) determined based on risk scale (risk base audit) and FGD (Group Discussion Forum).

The realisation of the Operational & Financial Audit Program I Year 2023 has been carried out based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN: 09/DU/03/2023 dated 24 March 2023 for an implementation period of 45 working days from



Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Perum Jasa Tirta II.

Untuk Pemeriksaan Operasional & Keuangan II Tahun 2023 sedang dilaksanakan pada bulan September s.d. November 2023.

the date of stipulation of the Operational & Financial Audit I of the Internal Audit Unit (SPI) within Perum Jasa Tirta II.

For the Operational & Financial Audit II Year 2023 is being carried out from September to November 2023.

2) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/ Pemeriksaan Khusus

Program Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan operasional dan keuangan yang dilaksanakan atas perintah dan penugasan khusus dari Direktur Utama.

Realisasi telah dilaksanakan pemeriksaan khusus berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama nomor: 20/SPN/06/2023 tanggal 7 Juni 2023 dan Nota Dinas Kepala SPI nomor : ND-169/SPI.DU/PW/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

2) Examination with Specific Purpose (PDTT)/Special Examination

Examination Programmes conducted with special purposes outside of operational and financial examinations carried out on special orders and assignments from the President Director.

The realisation has been carried out a special examination based on the Assignment Letter of the President Director number: 20/SPN/06/2023 dated 7 June 2023 and Memorandum of Service of the Head of SPI number: ND-169/SPI.DU/PW/06/2023 dated 22 June 2023 regarding the Report on the Results of Examination with Specific Purposes.

3) Audit Sistem Manajemen

Program Audit Sistem Manajemen adalah kegiatan audit dan evaluasi penilaian atas konsistensi pelaksanaan Sistem Manajemen Perusahaan sesuai standar yang dipersyaratkan International Standard Organization (ISO).

a. Survailance ISO 37001:2016

Survailance ISO 37001:2016 adalah kegiatan resertifikasi dengan cara audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian terhadap persyaratan ISO 37001:2016 yang masih konsisten dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Perusahaan.

Realisasi Survailance/Resertifikasi ISO 37001:2016 telah dilaksanakan pada triwulan I tanggal 27 – 28 Februari 2023 oleh PT Sucofindo International Certification Services.

3) Management System Audit

The Management System Audit Programme is an audit and evaluation of the consistency of the implementation of the Company's Management System in accordance with the standards required by the International Standard Organization (ISO).

a. Survailance ISO 37001:2016

Survailance ISO 37001: 2016 is a recertification activity by means of an Anti-Bribery Management System audit carried out by an external party which aims to ensure compliance with the requirements of ISO 37001: 2016 which are still consistently implemented on an ongoing basis by the Company.

The realisation of Survailance/Recertification of ISO 37001: 2016 was carried out in the first quarter on 27-28 February 2023 by PT Sucofindo International Certification Services.



b. Survailance ISO 9001:2015

Survailance ISO 9001:2015 adalah kegiatan resertifikasi dengan cara audit Sistem Manajemen Mutu yang dilaksanakan oleh pihak eksternal yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian terhadap persyaratan ISO 9001:2015 yang masih konsisten dilaksanakan oleh Perusahaan.

Realisasi Survailance Resertifikasi ISO 9001:2015 telah dilaksanakan pada triwulan I tanggal 02-03 Maret 2023 oleh PT Indah Karya *Register Certification Services* (IKRCS).

c. Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016

Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 merupakan upaya untuk menanamkan budaya anti penyuapan dan menerapkan pengendalian kepatuhan anti penyuapan yang tepat di lingkungan Perusahaan.

Realisasi Audit Internal SMAP 37001:2016 pada triwulan III berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-25/DU/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Tim Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 ke-4 Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala SPI nomor ND-184/SPI.DU/PW/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Laporan Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ke-4 Tahun 2023. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 merupakan evaluasi/pengendalian terhadap mutu dari peraturan/prosedur yang berlaku di Perusahan terhadap implementasi dalam realisasi proses bisnis Perusahaan.

Realisasi Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 ke-48 pada triwulan III berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor SPN-25/DU/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Tim Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 ke-4 Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala SPI nomor ND-191/SPI.DU/PW/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal Laporan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu (SMM) ke-48 Tahun 2023.

b. Survailance ISO 9001:2015

Survailance ISO 9001:2015 is a recertification activity by means of a Quality Management System audit carried out by an external party which aims to ensure compliance with ISO 9001:2015 requirements that are still consistently implemented by the Company.

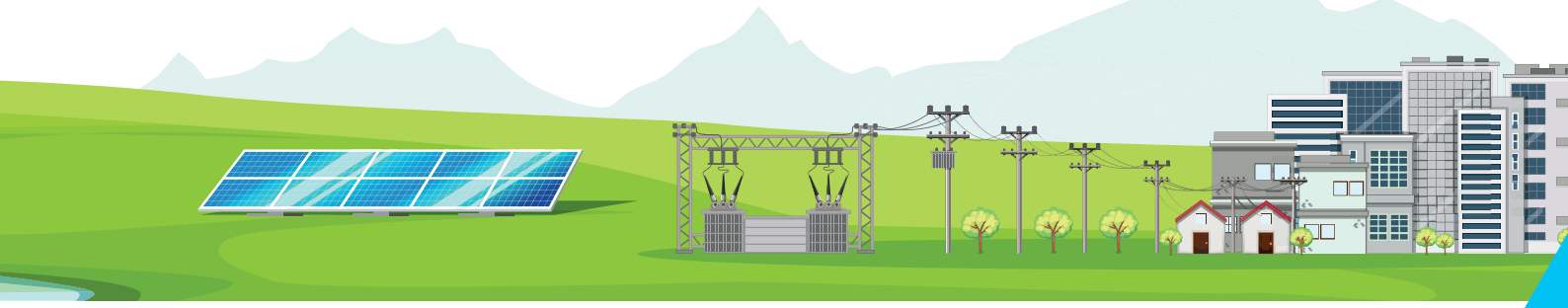
The realisation of the ISO 9001:2015 Recertification Survailance was carried out in the first quarter on 02-03 March 2023 by PT Indah Karya Register Certification Services (IKRCS).

c. Internal Audit of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

The ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Internal Audit is an effort to instil an anti-bribery culture and implement appropriate anti-bribery compliance controls within the Company.

The realisation of the 37001:2016 SMAP Internal Audit in the third quarter was based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-25/DU/06/2023 dated 21 June 2023 concerning the 4th ISO 37001:2016 SMAP Internal Audit Team in 2023 and the Memorandum of Service of the Head of SPI number ND-184/SPI.DU/PW/07/2023 dated 11 July 2023 regarding the 4th Anti-Bribery Management System (SMAP) Internal Audit Report in 2023. Internal Audit of ISO 9001: 2015 Quality Management System is an evaluation/control of the quality of the regulations/procedures applicable in the Company against the implementation in the realisation of the Company's business processes.

Realization of the 48th ISO 9001:2015 Quality Management System Internal Audit in the third quarter based on the President Director's Assignment Letter Number SPN-25/DU/06/2023 dated June 21, 2023 concerning the 4th ISO 37001:2016 SMAP Internal Audit Team in 2023 and the Head of SPI's Official Note number ND-191/SPI.DU/PW/07/2023 dated July 18, 2023 concerning the 48th Quality Management System (QMS) Internal Audit Report in 2023.



d. Prognosa Bidang Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

1) Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Audit oleh Eksternal/ Internal.
Program kegiatan monitoring & evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tahun 2023 dilaksanakan secara periodik sebanyak 4 (empat) kali. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja *auditee* atas temuan hasil pemeriksaan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor SPI.

Realisasi kegiatan Monitoring & Evaluasi pada triwulan I, II dan III telah dilaksanakan, sehingga laporannya dapat memberikan gambaran kondisi progres tindak lanjut atas temuan internal/ eksternal sampai dengan Triwulan III sebagai berikut:

d. Prognosa Bidang Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

1) Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Audit oleh Eksternal/ Internal.
Program kegiatan monitoring & evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tahun 2023 dilaksanakan secara periodik sebanyak 4 (empat) kali. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja auditee atas temuan hasil pemeriksaan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), Kantor Akuntan Publik (KAP) dan auditor SPI.

Realisasi kegiatan Monitoring & Evaluasi pada triwulan I, II dan III telah dilaksanakan, sehingga laporannya dapat memberikan gambaran kondisi progres tindak lanjut atas temuan internal/eksternal sampai dengan Triwulan III sebagai berikut:

1) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2018 s.d. Triwulan III Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Temuan/ Rekomendasi	Jumlah Temuan/ Rekomandasi (Telah Sesuai)	Sisa Temuan/ Rekomendasi
1.	Temuan	14	10	4
2.	Rekomendasi	28	23	5

2) Tindak Lanjut Pemeriksaan KAP s.d. Triwulan III Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Tindaklanjut s.d Tw I 2023 dan Berpotensi Tuntas	Sisa Temuan
1.	Kepatuhan Terhadap Perundang Undangan Tahun 2021	2	2	0
2.	Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Tahun 2021	6	6	0
	JUMLAH	**8**	**8**	**0**

3) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan SPI s.d. Triwulan III Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan OK I Tahun 2023	Progres Tindak Lanjut Temuan Periode Tw III Tahun 2023	Sisa Temuan
1.	Temuan	4	1	3



4) Tindak Lanjut Temuan Audit Internal SMM ISO 9001:2015 s.d. Triwulan III 2023

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Progres Tindak Lanjut Temuan Periode TW II Tahun 2023	Sisa Temuan
1.	Temuan	1	-	1

5) Tindak Lanjut Temuan Audit Internal SMAP 37001:2016 s.d. Triwulan III 2023

No.	Uraian	Jumlah Temuan	Progres Tindak Lanjut Temuan Periode TW II Tahun 2023	Sisa Temuan
1.	Temuan	1	-	1

2. Rapat Koordinasi dengan Komite Audit

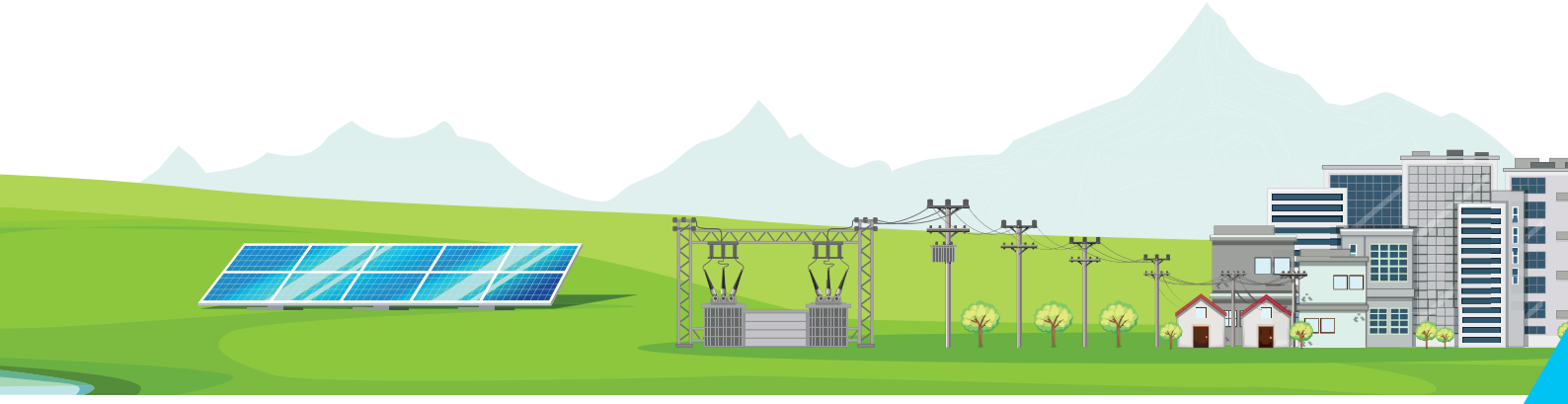
   Program kegiatan rapat koordinasi dengan Komite Audit direncanakan dan dilaksanakan untuk membahas hal-hal berkaitan dengan realiasasi pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Perusahaan. Kegiatan rapat kordinasi dengan Komite Audit tahun 2023 dilaksanakan secara periodik sebanyak 4 (empat) kali atau per triwulan.

   Realisasi kegiatan rapat koordinasi telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit Nomor: Und-04/KA/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Undangan Rapat dan Triwulan II tahun 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit Nomor: Und-10/KA/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Undangan Rapat dan akan dilaksanakan rapat koordinasi berkelanjutan dengan Komite Audit setiap triwulan.

2. Rapat Koordinasi dengan Komite Audit

Program kegiatan rapat koordinasi dengan Komite Audit direncanakan dan dilaksanakan untuk membahas hal-hal berkaitan dengan realiasasi pelaksanaan fungsi pengawasan di lingkungan Perusahaan. Kegiatan rapat kordinasi dengan Komite Audit tahun 2023 dilaksanakan secara periodik sebanyak 4 (empat) kali atau per triwulan.

Realisasi kegiatan rapat koordinasi telah dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit Nomor: Und-04/KA/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Undangan Rapat dan Triwulan II tahun 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit Nomor: Und-10/KA/2023 tanggal 06 Juni 2023 perihal Undangan Rapat dan akan dilaksanakan rapat koordinasi berkelanjutan dengan Komite Audit setiap triwulan.



Register Risiko SPI
Register Risiko SPI

No	KENDALA YANG DIHADAPI *Obstacles encountered*	MITIGASI *Mitigation*
1.	Tingkat kepatuhan unit kerja masih rendah terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan perusahaan. *The level of compliance of work units is still low with the rules and regulations that apply within the company.*	SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Opersional & Keuangan I dan II, Audit ISO 37001 : 2016 SMAP Audit ISO 9001 : 2015 SMM, dan Quality Assurance. *SPI has conducted Operational & Financial Audit I and II, ISO 37001 Audit: 2016 SMAP Audit ISO 9001: 2015 SMM Audit, and Quality Assurance.*
2.	Pelaksanaan kegiatan Audit internal ISO belum dilaksanakan secara maksimal.hasil kegiatan Audit tidak optimal. *The implementation of ISO internal audit activities has not been carried out optimally, so the results of audit activities are not optimal.*	SPI telah mengusulkan dan melaksanakan Pendidikan & Pelatihan. *SPI has proposed and implemented Education & Training.*
3.	*Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan oleh auditor SPI tidak objektif sesuai kondisi temuan.* *Recommendations for audit findings by SPI auditors are not objective according to the conditions of the findings.*	SPI telah melaksanakan monitorting & evaluasi tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal dan Internal, Rapat Koordinasi dengan Komite Audit dan Evaluasi Manajemen Risiko. *SPI has carried out monitorting & evaluation of follow-up results of External and Internal examinations, Coordination Meetings with the Audit Committee and Risk Management Evaluation.*
4.	Pelaksanaan pengendalian internal perusahaan belum berdasarkan pedoman pelaksanaan. *The company's internal control implementation is not yet based on implementation guidelines.*	SPI telah melaksanakan telaahan/ kajian staf Bidang Pengawasan pada bulan Februari 2023. *SPI has conducted a staff review of the Supervision Division in February 2023.*
5.	Target budget deviation tidak tercapai. *Target budget deviation was not achieved.*	Kegiatan Pengawasan berdasarkan ketersedian anggaran. (Dilaksanakan Tentative apabila sangat diperlukan). *Monitoring activities based on budget availability. (Implemented Tentatively if urgently needed).*



Audit Eksternal
External Audit

Penguatan terhadap independensi dan akuntabilitas pemeriksaan audit dilakukan dengan melibatkan Auditor Eksternal. Auditor eksternal dalam hal ini merupakan pihak independen profesional dalam melakukan audit, baik audit laporan keuangan, audit terkait mutu (Sistem Manajemen Mutu), audit Sistem Manajemen Keselamatan dan KeseSistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2015 dan ISO 37001:2016, hatan Kerja (SMK3), maupun kegiatan audit lainnya.

The External Auditor is used to strengthen the independence and accountability of audit audits. In this case, the external auditor is a professional independent party who conducts audits, including financial statement audits, quality-related audits (Quality Management System), audits of Safety Management Systems and Quality Management Systems) ISO 9001:2015 and ISO 37001:2016, work safety (SMK3), and other audit activities.

Khusus dalam menangani audit laporan keuangan, Perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan prosedur penunjukan sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kriteria independensi dan bebas benturan kepentingan, standar profesional akuntan publik, dan perjanjian kerja sama serta ruang lingkup audit yang wajib dipenuhi oleh KAP.

The Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) to handle the audit of financial statements, taking into account the appointment procedure in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, criteria for independence and free of conflict of interest, professional standards of public accountants, and cooperation agreements, as well as the audit scope, must be met by KAP.

Ruang Lingkup Audit Kantor Akuntan Publik

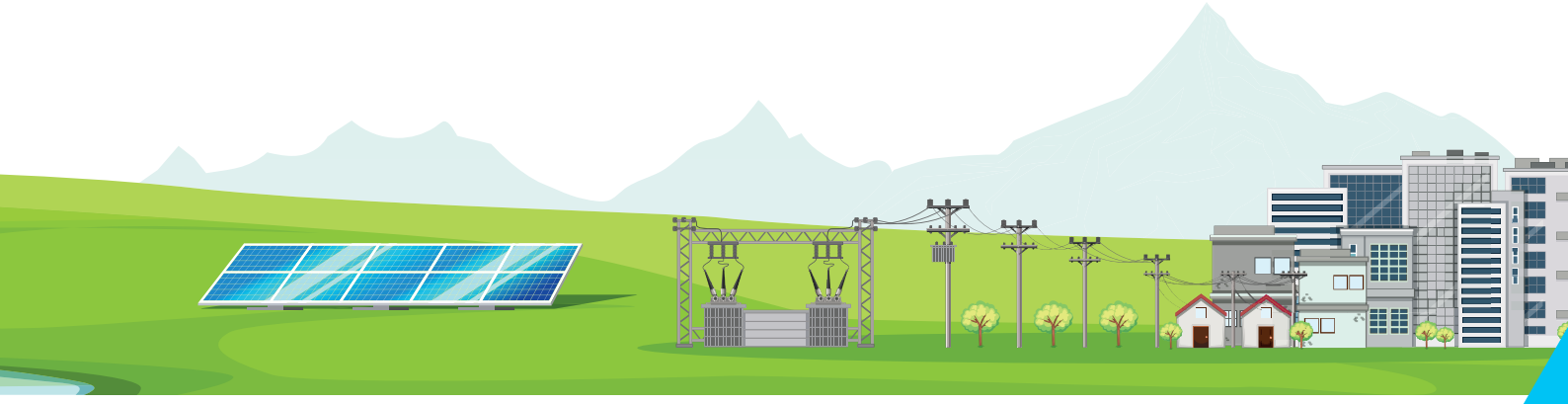
1. Audit atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023, bertujuan untuk memberikan pendapat akuntan atas kewajaran laporan keuangan yang meliputi:
   - Laporan Posisi Keuangan
   - Laporan Laba Komprehensif
   - Laporan Perubahan Ekuitas
   - Laporan Arus Kas
   - Catatan atas Laporan Keuangan
2. Memberikan rekomendasi atas kelemahan struktur pengendalian internal yang ditemukan selama audit dalam bentuk *Management Letter* & laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan pengendalian Internal.
3. Jasa lainnya.

Audit of a Public Accounting Firm

1. *The Audit of Financial Statements for the Fiscal Year Ended December 31, 2023 seeks to provide the accountant's opinion on the fairness of financial statements such as:*
   - *Statement of Financial Position*
   - *Statement of Comprehensive Income*
   - *Statement of Changes in Equity*
   - *Statement of Cash Flows*
   - *Financial Statement Notes*
2. *Provide recommendations in the form of Management Letters and reports on compliance with laws and regulations and internal control on weaknesses in the internal control structure discovered during the audit.*
3. *Additional services*

Laporan review penilaian tingkat kesehatan Laporan *review* atas laporan *key performance indicators*. Laporan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL).

Report on the Health Level Assessment Review Examine reports on key performance indicators. Report on the Partnership and Community Development Program (TJSL) funds management.



Partisipasi dalam Asosiasi Internal Audit / *Membership in the Internal Audit Association*

Nama Kegiatan/Organisasi *Name Of Activity/Organisation*	Jabatan *Position*	Waktu *Time*
Ikatan Auditor (BPK) *Auditors' Association (CPC)*	Anggota *Member*	-

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan

Kantor Akuntan Publik dan nama Akuntan yang bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta II untuk melaksanakan audit dan menyajikan laporan keuangan tahunan adalah sebagai berikut;

The name of Public Accounting Firms

The Public Accounting Firm and the name of the Accountant who cooperate with Perum Jasa Tirta II to carry out the audit and present the annual financial statements are as follows;

Tahun *Year*	Kantor Akuntan Publik *Public Accounting Firm*	Akuntan Publik *Public Accountant*	Opini *Opinion*
2023	**KAP Amir Abadi Jusuf Mawar & Rekan (RSM Indonesia)**	**Endang Pramuwati, SE, M.Ak, CA., CPA**	Opini tanpa modifikasi / *Unmodified opinion*
2022	**KAP Amir Abadi Jusuf Mawar & Rekan (RSM Indonesia)**	**Endang Pramuwati, SE, M.Ak, CA., CPA**	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / *Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph*
2021	**KAP Djoko, Sidik & Indra**	**Drs. Abubakar Sidik, MS., CA., CPA.**	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / *Unmodified opinion with other matters paragraph*
2020	**KAP Djoko, Sidik & Indra**	**Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA**	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / *Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph*
2019	**KAP Djoko, Sidik & Indra**	**Drs. Djoko Sutardjo, Ak., CA., CPA**	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain / *Unmodified opinion with emphasizing one matter and other matters paragraph*
2018	**KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan**	**Drs. Salam Manan, Ak., MM, CPA., CA**	Opini tanpa modifikasi dengan paragraf lain / *Unmodified opinion with other matters paragraph*

Selain Kantor Akuntan Publik, terdapat juga Auditor Eksternal lain yang melakukan audit sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perum Jasa Tirta II, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang salah satu tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada bidang kekayaan Negara yang dipisahkan (BUMN) di antaranya melalui audit atas kinerja Perusahaan dan/atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

In addition to the Public Accounting Firm, there are also other External Auditors who conduct audits in connection with the implementation of Perum Jasa Tirta II's business activities, namely the Supreme Audit Agency (BPK RI), one of whose duties is to examine the management and financial responsibility of the State in the field of separated State assets (BUMN), including through audits of the Company's performance and/or examinations with specific objectives.



Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan suatu Perusahaan. Penerapan Sistem Pengendalian Internal yang tepat dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara Efisien, Efektif, dan Ekonomi (3E), mengamankan investasi dan aset Perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan yang andal, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian.

Internal Control System is an important instrument in the management of a Company. Proper implementation of the Internal Control System can assist the Board of Directors in managing the Company's business efficiently, effectively and economically (3E), securing the Company's investments and assets, ensuring the availability of reliable financial reporting, improving compliance with applicable laws and regulations, and reducing the risk of loss.

Ketetapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) mengharuskan Direksi BUMN menetapkan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN.

The provisions stipulated in Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER- 01/MBU/2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance jo. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011 dated 1 August 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance requires the Board of Directors of SOEs to establish an effective Corporate Internal Control System to secure SOE investments and assets.

Berkaitan dengan hal tersebut, Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu BUMN strategis di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, berkomitmen menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif yang diawali dengan merancang dan menetapkan Pedoman Umum Sistem Pengendalian Internal.

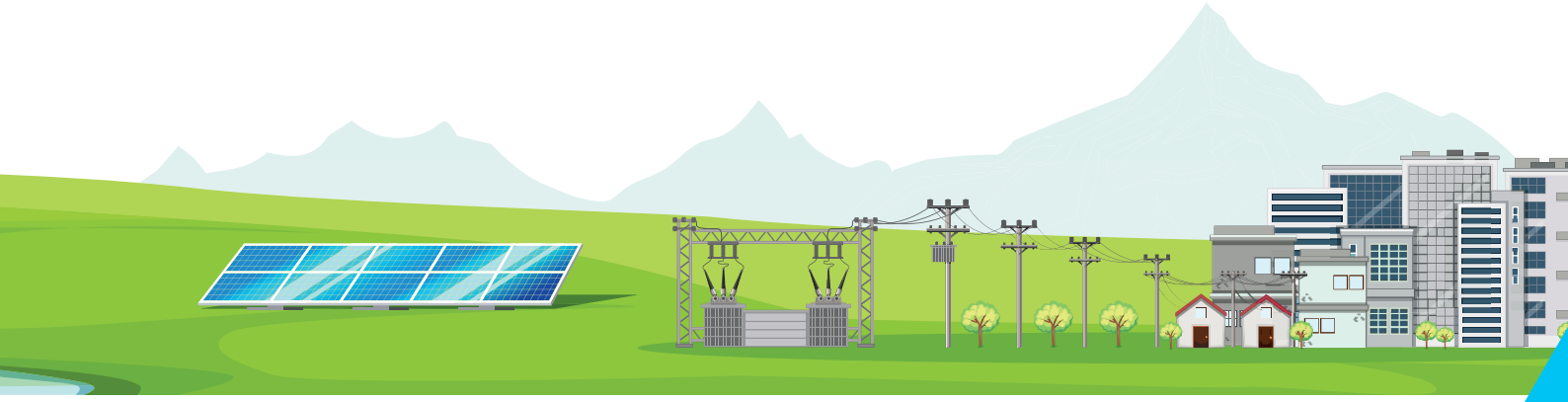
In this regard, Perum Jasa Tirta II as one of the strategic SOEs in the field of Water Resources Management, is committed to implementing an effective Internal Control System which begins with designing and establishing General Guidelines for Internal Control Systems.

Tujuan Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Perusahaan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, menjamin adanya keamanan atas pengelolaan harta Perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Internal Control's Purpose

Internal Control System is an integrated process that is linked to actions and activities that are carried out continuously by the leadership and all employees to provide adequate assurance on the achievement of the Company's organizational goals through effective and efficient activities, ensuring the security of the Company's assets, the reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations.



Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat menjaga dan mengamankan aset Perusahaan, mengurangi dampak/kerugian penyimpangan termasuk kecurangan fraud; menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional Perusahaan; meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada organisasi secara menyeluruh.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam manajemen pengelolaan Perusahaan, antara lain Dewan Pengawas, Direksi, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Pejabat, dan karyawan Perum Jasa Tirta II, dan pihak eksternal lainnya yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang andal dan efektif, agar tujuan keterlibatan mereka terjaga secara aman, berhasil guna, dan berdaya guna.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Kerangka sistem pengendalian internal PJT II telah sesuai dengan kerangka kerja yang diakui secara internasional, yakni *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)*. Menurut COSO, sistem pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan Dewan Pengawas, Direksi, serta personil lainnya. Hal ini sejalan dengan sistem pengendalian internal PJT II dalam membangun sistem kontrol organisasi dengan melibatkan seluruh sumber daya yang ada. Adapun sistem pengendalian internal PJT II terdiri dari lima unsur pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian yang diwujudkan dalam bentuk kondisi yang dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif, mengembangkan dan melaksanakan kompetensi, independensi, integritas, serta patuh pada peraturan yang berlaku di Perusahaan ;
2. Penilaian Risiko merupakan tindakan untuk menentukan pengaruh negatif suatu peristiwa yang tidak diharapkan dan bila terjadi akan menghalangi pencapaian tujuan Perusahaan ;

The purpose of the Internal Control System is as an organisational framework and financial and non-financial operational work procedures that can provide assurance that every implementation of activities within the Company can maintain and secure the Company's assets, reduce the impact/loss of irregularities including fraud; ensure the implementation of all business activities of the Company in accordance with applicable laws and regulations; provide correct, complete and timely financial and management information; improve efficiency, effectiveness and economy in the Company's operational activities; improve the effectiveness of risk management in the organisation as a whole.

The implementation of a reliable and effective Internal Control System is the responsibility of all parties involved in the management of the Company's management, including the Supervisory Board, Board of Directors, Internal Supervisory Unit (SPI), Officers, and employees of Perum Jasa Tirta II, and other external parties with an interest in the implementation of a reliable and effective Company Internal Control System, so that the objectives of their involvement are maintained safely, successfully, and efficiently.

Internal Control System Framework

The internal control system framework of PJT II is based on an internationally recognized framework, namely the Treadway Commission's Committee of Sponsoring Organizations (COSO). The internal control system, according to COSO, is a process that involves the Supervisory Board, the Board of Directors, and other personnel. This is consistent with PJT II's internal control system, which involves all existing resources in the development of an organizational control system. The PJT II internal control system is made up of five control elements:

1. *Control environment, which is realized in the form of conditions that can create a conducive working environment, develop and implement competence, independence, and integrity in the Company, and comply with applicable regulations;*
2. *Risk assessment is an action that determines the negative impact of an unexpected event and how it will impede the achievement of the Company's objectives if it occurs.*



3. Kegiatan Pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ada secara konsisten dipatuhi;
4. Informasi dan Komunikasi yang meliputi unsur pengendalian yaitu penggunaan informasi yang relevan, komunikasi internal, dan eksternal;
5. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal pada Perusahaan berjalan dengan baik.

Sistem Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal PJT II merupakan kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan dapat:

1. Menjaga dan mengamankan aset Perusahaan ;
2. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud;
3. Menjamin pelaksanaan semua kegiatan bisnis PJT II sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menyediakan informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu;
5. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan dalam kegiatan operasional PJT II;
6. Meningkatkan efektivitas manajemen risiko (risk management) pada organisasi secara menyeluruh.

Evaluasi atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023

Dalam pemantauan sistem pengendalian internal, terdapat tiga komponen yaitu evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, serta evaluasi dan komunikasi kelemahan untuk perbaikan.

Sepanjang tahun 2023, PJT II telah melaksanakan monitoring evaluasi di mana dilakukan penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan operasional Perusahaan. Evaluasi tersebut mencakup proses penilaian atas capaian kualitas pengendalian intern dalam jangka waktu satu tahun buku. Kemudian dilakukan evaluasi terpisah oleh Satuan PengawasanIntern (SPI) PJT II dan pihak eksternal yaitu auditor eksternal serta dilakukan audit atau self assessment yang diidentifikasi oleh SPI dan pihak lain untuk dilaporkan kepada Direksi.

3. *Control activities include the development of control policies and procedures, as well as a verification process to ensure that existing policies and procedures are followed consistently.*
4. *Information and Communication, which includes control elements such as the use of relevant information as well as internal and external communications;*
5. *Inspecting the Internal Control System to ensure that the Company's internal control system is functioning properly.*

System of Financial and Operational Control

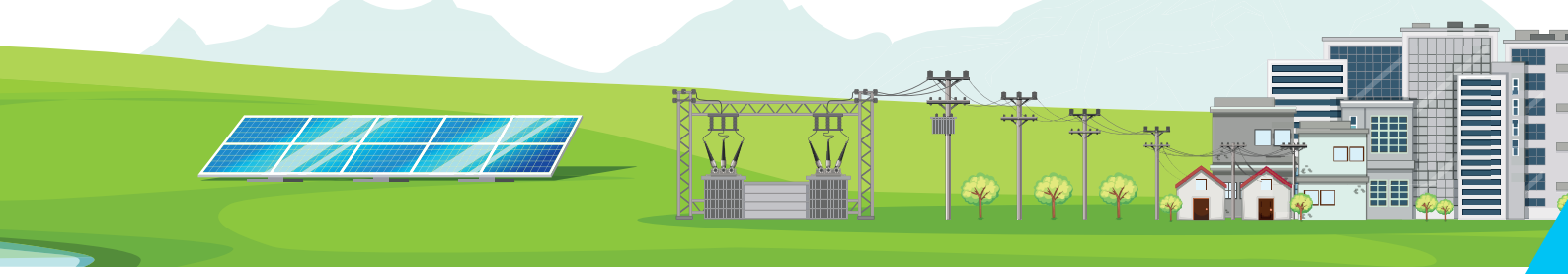
The internal control system at PJT II is an organizational framework and work procedures for financial and non-financial operations that can provide assurance that every activity carried out within the Company can:

1. *Maintain and secure the Company's assets;*
2. *Reduce financial impact/losses, irregularities, including fraud/fraud; and*
3. *Ensure the implementation of all PJT II business activities in accordance with applicable laws and regulations.*
4. *Provide accurate, complete, and timely financial and management information;*
5. *Improve efficiency, effectiveness, and economy in PJT II operational activities;*
6. *Improve the overall effectiveness of risk management (risk management).*

Evaluation of the Internal Development System for 2023

In monitoring the internal control system, there are three components: continuous evaluation, separate evaluation, and evaluation and communication of weaknesses for improvement.

Throughout 2023, PJT II has carried out evaluation monitoring where an assessment of the quality of internal control system performance is carried out continuously and integrated into the Company's operational activities. The evaluation includes the process of assessing the achievement of internal control quality within a period of one fiscal year. Then a separate evaluation is carried out by the PJT II Internal Audit Unit (SPI) and external parties, namely external auditors and audits or self-assessments identified by SPI and other parties to be reported to the Board of Directors.



Hubungan Dengan Pemilik Modal
Relationship With Capital Owner

Perusahaan berkomitmen untuk selalu tunduk dan patuh terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan dalam berinteraksi dan berperilaku sesuai dengan etika guna memenuhi tanggung jawabnya kepada Pemilik Modal.

The Company is committed to always comply with applicable laws and regulations and uphold the Company's values in interacting and behaving in accordance with ethics in order to fulfil its responsibilities to the Capital Owners.

Untuk itu, Perum Jasa Tirta II senantiasa menjaga hubungan baik dengan segenap pemangku kepentingannya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Hubungan baik tersebut dilaksanakan dalam kaidah perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pemilik Modal adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.

For this reason, Perum Jasa Tirta II always maintains good relations with all its stakeholders in order to maintain business continuity. Such good relations are carried out within the rules of applicable laws and regulations. Capital Owners are parties who have an interest in the Company either directly or indirectly.

Stakeholder primer merupakan penentu utama dalam proses pengambilan keputusan karena memiliki kaitan kepentingan secara langsung pada suatu kebijakan, program, dan proyek Perusahaan. Tanpa partisipasi berkelanjutan dari stakeholder primer, Perusahaan tidak dapat bertahan. Adapun contoh stakeholder primer yaitu Pemilik Modal (Kementerian BUMN, Kementerian PUPR), kreditor, karyawan, pemasok, konsumen (PDAM DKI Jakarta, PDAM Kabupaten/Kota, PLN, dan konsumen lainnya), penyalur, pesaing atau rekanan.

Primary stakeholders are key determinants in the decision-making process as they have a direct interest in the Company's policies, programmes and projects. Without the continuous participation of primary stakeholders, the Company cannot survive. Examples of primary stakeholders are capital owners (Ministry of SOEs, Ministry of PUPR), creditors, employees, suppliers, consumers (PDAM DKI Jakarta, Regency / City PDAMs, PLN, and other consumers), distributors, competitors or partners.

Stakeholder sekunder tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek. Akan tetapi, pihak ini memiliki kepedulian *(concern)* sehingga turut berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal Pemerintah. *Stakeholder* ini juga didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh Perusahaan tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan Perusahaan. Adapun yang termasuk dalam stakeholder sekunder adalah Pemerintah setempat (Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemda Kab. Purwakarta, pemerintah asing (JICA), kelompok sosial (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), media massa, dan pihak lainnya.

Secondary stakeholders do not have a direct interest in policies, programmes and projects. However, they have concerns that influence public attitudes and legal decisions of the Government. These stakeholders are also defined as parties that affect or are affected by the Company but they are not involved in transactions with the Company. Secondary stakeholders include the local government (DKI Jakarta Provincial Government, West Java Provincial Government, Purwakarta Regency Government, foreign government (JICA), social groups (NARBO, KNIBB, INACID, ICOLD), mass media, and other parties.

Stakeholder kunci memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi. Adapun yang termasuk dalam *stakeholder* kunci adalah Pemerintah Kabupaten (Pemprov DKI Jakarta, Pemda Kota Bekasi, Pemda Kabupaten Bekasi, Pemda Kabupaten Karawang, DPRD, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan.

Key stakeholders have legal authority in terms of decision-making. The stakeholders in question are executive elements according to their level, legislative and agencies. The key stakeholders include the Jakarta Provincial Government, Bekasi City Government, Bekasi Regency Government, Karawang Regency Government, DPRD, and the agency directly in charge of the project concerned.



Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Untuk mencapai keseimbangan dalam pengelolaan *stakeholders*, Perusahaan harus memperhatikan pola hubungannya, antara lain:

- Pola hubungan Perusahaan dengan pemilik
  Pemilik Modal seperti Pemilik Modal bersifat pola hubungan yang proaktif (proactive), di mana Perusahaan cenderung berusaha untuk mengantisipasi kepentingan-kepentingan para stakeholders. Hal ini diimplementasikan dengan membentuk departemen khusus yang berada di bawah Sekretaris Perusahaan:
  - Bidang Hubungan Masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hubungan Perusahaan dengan para *stakeholders*, media massa, LSM, dan masyarakat pada umumnya.
  - *Government Relation Officer* yang berfungsi sebagai pejabat yang ditunjuk khusus untuk menjadi penghubung antara Perusahaan dengan *stakeholders* Pemerintah seperti Kementerian PUPR, Kementerian BUMN maupun instansi Pemerintah lainnya.

- Pola Hubungan yang Interaktif (interactive) tercermin antara hubungan Perusahaan dengan para pelanggannya. Dengan adanya Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan serta kegiatan survei kepuasan pelanggan yang dilaksanakan setiap semester, Perusahaan menggunakan pendekatan interaktif untuk mendapatkan masukan serta memenuhi kebutuhan para pelanggan.

  Perusahaan juga membuka komunikasi dengan para stakeholders melalui berbagai media (surat, telepon, email, media sosial) serta memiliki prosedur untuk menangani keluhan dari para stakeholders khususnya pelanggan, yaitu dengan ditetapkannya Prosedur No. 37 tahun 2018. Hal ini bertujuan untuk:
  - Mengetahui respons stakeholders maupun pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
  - Menangani dan mengevaluasi keluhan pelanggan terhadap produk dan layanan PJT II;
  - Menjadikan umpan balik pelanggan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen dalam meningkatkan kinerja Perusahaan.

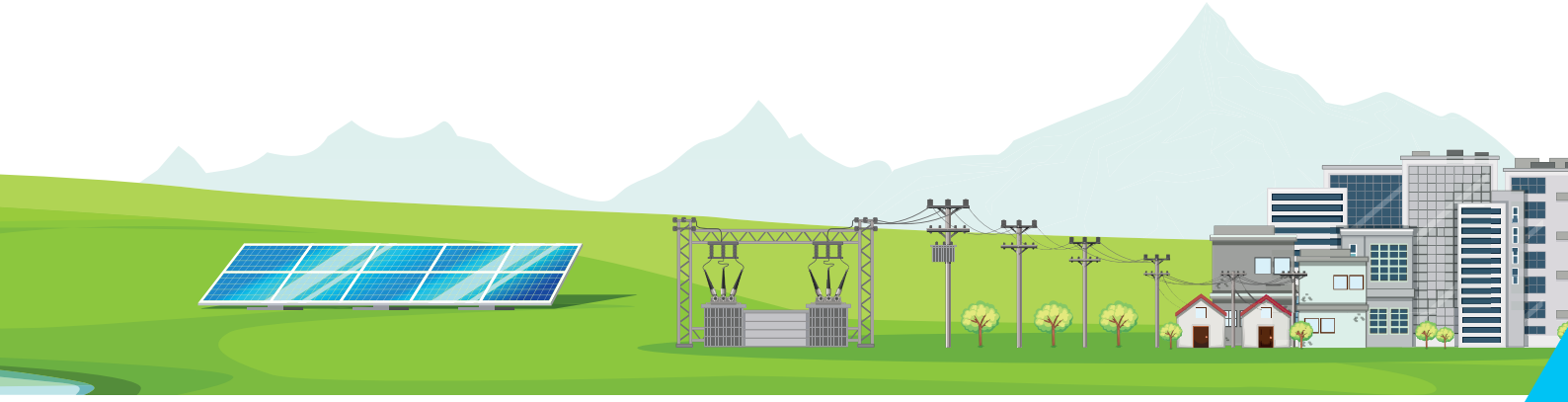
Pola Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

To achieve a balance in stakeholder management, the Company must pay attention to the relationship pattern, among others:

- *Pattern of the Company's relationship with the owner Capital Owners such as Capital Owners have a proactive relationship pattern, where the Company tends to try to anticipate the interests of stakeholders. This is implemented by establishing a specialised department under the Corporate Secretary:*
  - *Public Relations Division which functions to maintain the Company's relationship with stakeholders, mass media, NGOs, and the public in general.*
  - *Government Relation Officer who functions as a specially appointed official to liaise between the Company and Government stakeholders such as the Ministry of PUPR, Ministry of BUMN and other Government agencies.*

- *The interactive relationship pattern is reflected in the Company's relationship with its customers. With the Commercial and Customer Service Division and the customer satisfaction survey conducted every semester, the Company uses an interactive approach to obtain feedback and fulfil customer needs.*

  The company also opens communication with stakeholders through various media (mail, telephone, email, social media) and has a procedure for handling complaints from stakeholders, especially customers, namely with the establishment of Procedure No. 37 of 2018. This aims to:
  - *Knowing the response of stakeholders and customers to PJT II products and services;*
  - *Handle and evaluate customer complaints against PJT II products and services;*
  - *Making customer feedback as a material for management decision-making in improving the Company's performance.*



Rincian Program Kerja Pengawasan Tahunan Satuan Pengawasan Intern Perum Jasa Tirta II dengan rincian sebagai berikut:

A. Pemeriksaan/Audit

Program kerja pemeriksaan operasional dan keuangan tahun 2023 adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan pelaksanaan program kerja pada Semester I di lingkungan Perum Jasa Tirta II terhadap ketentuan peraturan internal perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku, sesuai etika dan norma-norma Pedoman Pemeriksaan SPI serta pokok-pokok audit internal *(SP/ Charter)* Perum Jasa Tirta II.

Pemilihan dan penetapan objek pemeriksaan bidang operasional dan keuangan dilaksanakan dalam program audit berdasarkan skala prioritas terhadap risk base audit dengan pertimbangan:

Berdasarkan risiko-risiko Perusahaan yang didapat dari data Sistem Manajemen Risiko tahun 2023. Fenomena kegiatan perusahaan yang menjadi isu manajemen atas pelaksanaan kegiatan program kerja oleh unit kerja di lingkungan perusahaan.

- Dampak risiko secara finansial atau teknik yang akan ditimbulkan terhadap proses bisnis perusahaan dan pelaksanaan kegiatan program kerja oleh unit kerja di lingkungan perusahaan.

1. **Pemeriksaan Operasional & Keuangan I**
   Pemeriksaan Operasional & Keuangan I telah dilaksanakan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor SPN-101DU/05/2023 tanggal 20 Mei 2023, SPN-15/DU/0612023 tanggal 10 Juni 2023 dan SPN-17/DU/06/2023 tanggal 17 Juni 2023 periode pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkan tentang Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Tahun 2023 Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Perum Jasa Tirta II serta Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Kepala Satuan Pengawasan Intern:

Details of the Annual Monitoring Work Programme of Perum Jasa Tirta II Internal Audit Unit with the following details:

A. Inspection/Audit

The operational and financial audit work programme in 2023 is an examination of compliance with the implementation of the work programme in Semester I within Perum Jasa Tirta II against the provisions of the company's internal regulations and applicable laws, in accordance with the ethics and norms of the SPI Audit Guidelines and internal audit principles (SP /Charter) Perum Jasa Tirta II.

The selection and determination of operational and financial audit objects are carried out in the audit programme based on the priority scale of the risk base audit with consideration:

Based on Company risks obtained from Risk Management System data in 2023. The phenomenon of company activities that become management issues for the implementation of work programme activities by work units within the company.

- *The financial or technical impact of risks on the company's business processes and the implementation of work programme activities by work units within the company.*

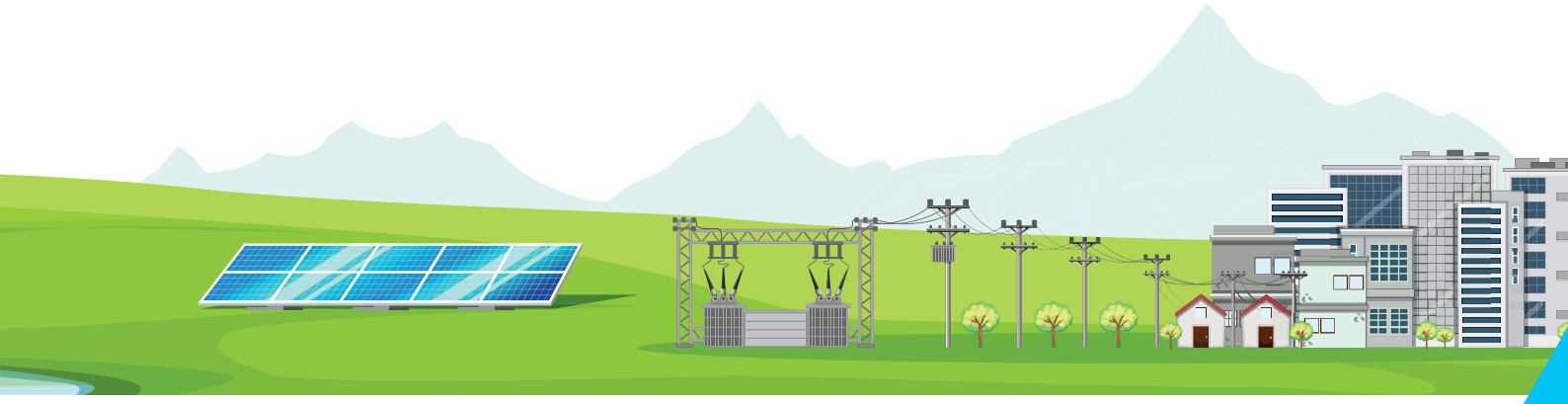
1. ***Operational & Financial Audit I***
   Operational & Financial Audit I has been carried out based on the Assignment Letter of the President Director Number SPN-101DU/05/2023 dated 20 May 2023, SPN-15/DU/0612023 dated 10 June 2023 and SPN-17/DU/06/2023 dated 17 June 2023 for an implementation period of 45 (forty five) working days from the date of determination of the Operational & Financial Audit I Year 2023 of the Internal Audit Unit (SPI) within Perum Jasa Tirta II and the Task Order for Operational & Financial Audit I of the Head of Internal Audit Unit:



ND.SPTP-119/SPI.DU/PW/05/2023 tgl. 31 Mei 2023 di Unit Wilayah	*ND.SPTP-119/SPI.DU/PW/05/2023 dated 31 May 2023 in the Regional Unit*
ND.SPTP-133/SPI.DU/PW/06/2023 tgl. 13 Juni 2023 di Unit Wilayah II	*ND.SPTP-133/SPI.DU/PW/06/2023 dated 13 June 2023 in Region II Unit*
ND.SPTP-141/SP1.DU/PW/06/2023 tgl. 17 Juni 2023 di Unit PLTA	*ND.SPTP-141/SP1.DU/PW/06/2023 dated 17 June 2023 in Hydropower Unit*
ND.SPTP-145/SPI.DU/PW/06/2023 tgl. 29 Juni 2023 di Unit Wilayah IV	*ND.SPTP-145/SPI.DU/PW/06/2023 dated 29 June 2023 in Region IV Unit*
ND.SPTP-156/SPI.DU/PW/06/2023 tgl. 06 Juli 2023 di Unit Wilayah III	*ND.SPTP-156/SPI.DU/PW/06/2023 dated 06 July 2023 in Region III Unit*
ND.SPTP-166/SPI.DU/PW10612023 tgl. 06 Juli 2023 di Unit Pariwisata & Hotel	*ND.SPTP-166/SPI.DU/PW10612023 dated 06 July 2023 in Tourism & Hotel Unit*
ND.SPTP-175/SPI.DU/PW107/2023 tgi. 20 Juli 2023 di Kantor Pusat	*ND.SPTP-175/SPI.DU/PW107/2023 tgi. 20 July 2023 at Head Office*

Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan Operasional & Keuangan I Tahun 2023 /
Recapitulation of Operational & Financial Audit Findings I Year 2023

No.	UNIT KERJA *Working Unit*	JUMLAH TEMUAN / *Number Of Findings*					JUMLAH *Total*
		PENGADAAN BARANG & JASA / *Procurement Goods & Services*	PENDAPATAN / *Income*	PEMBIAYAAN / *Financing*	INVENTARISASI ASET / *Inventory Assets*	PENGUSAHAAN / *Funding*	
1.	Unit Wilayah I / *Region I Unit*	1	0	0	2	0	3
2.	Unit Wilayah II / *Region Unit II*	0	1	0			1
3.	Unit Mayan III / *Mayan III Unit*			1	0		3
4.	Unit Wilayah IV / *Region IV Unit*	2	0	0	0		2
5.	Unit PLTA / *Hydropower Unit*		0	0	0	0	1
6.	Unit Usaha Pariwisata & Hotel / *Tourism & Hotel Business Unit*	2	0	0			
7.	Divisi IPAK / IPAK Division	0	0	0			
8.	Divisi RMTIK / *RMTIK Division*		0	0	0	0	
	Total Temuan / *Total Findings*						14



2. Pemeriksaan Operasional & Keuangan 11

Pemeriksaan Operasional & Keuangan II telah dilaksanakan berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-32/DU/10/2023 tanggal 19 Oktober 2021 periode pelaksanaan selama 43 (empat puluh tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkan tentang Pemeriksaan Operasional & Keuangan II tahun 2023 di lingkungan Perum Jasa Tirta II, serta Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Operasional & Keuangan II Kepala Satuan Pengawasan Intern:

ND.SPTP-270/SPI.DU/PW110/2023 tgl. 21 Oktober 2023 di Unit Wilayah I

ND.SPTP-277/SPI.DU/PW/10/2023 tgl. 31 Oktober 2023 di Unit Wilayah II

ND.SPTP-293/SPI.DU/PW/11/2023 tgl. 08 November 2023 di Unit Wilayah III

ND.SPTP-300/SPI.DU/PW/11/2023 tgl. 14 November 2023 di Unit Wilayah IV

ND.SPTP-308/SPI.DU/PW/11/2023 tgl. 22 November 2023 di Unit PLTA

ND.SPTP-321/SPI.DU/PW/11/2023 tgl. 29 November 2023 di Unit Pariwisata & Hotel

ND.SPTP-330/SPI.DU/PW/07/2023 tgl. 07 Desember 2023 di Kantor Pusat

2. Operational & Financial Audit 11

Operational & Financial Audit II has been carried out based on Letter Assignment Letter of the President Director Number: SPN-32/DU/10/2023 dated 19 October 2021 for an implementation period of 43 (forty-three) working days from the date of determination of the Operational & Financial Audit II in 2023 within Perum Jasa Tirta II, as well as the Operational & Financial Audit Task Order II of the Head of the Internal Audit Unit:

ND.SPTP-270/SPI.DU/PW110/2023 dated 21 October 2023 in Region I Unit

ND.SPTP-277/SPI.DU/PW/10/2023 dated 31 October 2023 in Regional Unit II

ND.SPTP-293/SPI.DU/PW/11/2023 dated 08 November 2023 in Region III Unit

ND.SPTP-300/SPI.DU/PW/11/2023 dated 14 November 2023 in Region IV Unit

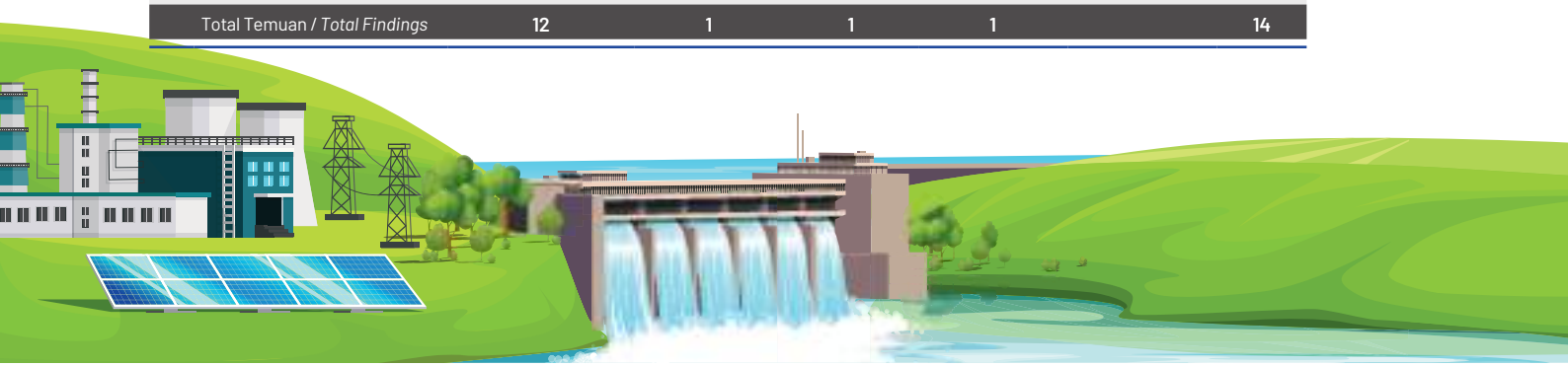
ND.SPTP-308/SPI.DU/PW/11/2023 dated 22 November 2023 in Hydropower Unit

ND.SPTP-321/SPI.DU/PW/11/2023 dated 29 November 2023 in Tourism & Hotel Unit

ND.SPTP-330/SPI.DU/PW/07/2023 dated 07 December 2023 in Head Office

Rekapitulasi Temuan Hasil Pemeriksaan Operasional & Keuangan II Tahun 2023 /
Recapitulation of Operational & Financial Audit Findings II Year 2023

No.	UNIT KERJA *Working Unit*	JUMLAH TEMUAN / Number Of Findings					JUMLAH *Total*
		PENGADAAN BARANG & JASA / *Procurement Goods & Services*	PENDAPATAN / *Income*	PEMBIAYAAN / *Financing*	INVENTARISASI ASET / *Inventory Assets*	PENGUSAHAAN / *Funding*	
1.	Unit Wilayah I / *Region I Unit*	3		0			3
2.	Unit Wilayah II / *Region Unit II*	0	1	0	0		1
3.	Unit Mayan III / *Mayan III Unit*	0	0	0	0	0	0
4.	Unit Wilayah IV / *Region IV Unit*	3	0	0	1	0	4
5.	Unit PLTA / *Hydropower Unit*	3	0	1	0	0	4
6.	Unit Usaha Pariwisata & Hotel / *Tourism & Hotel Business Unit*	0	0			0	1
7.	Clivisi Umurn & TJSt / *Clivisi Umurn & TJSt*	2	0	0	0	0	2
	Total Temuan / *Total Findings*	**12**	**1**	**1**	**1**		**14**



Untuk meningkatkan kualitas Pengendalian Internal dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Operasional & Keuangan Satuan Pengawasan Intern (SPI) menghimbau kepada setiap Kepala Unit Kerja untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari auditor Internal. Selain itu SPI berupaya untuk meningkatkan pemahaman pelaksanan Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan yang sistematis sehingga jika terjadi penggantian karyawan atau pejabat (mutasi/ promosi) tidak mengganggu upaya pelaksanaan pengendalian internal unit kerja.

3. Audit Sistem Manajemen

Pelaksanaan Sistem Manajemen adalah kegiatan audit dan penilaian atas konsistensi pelaksanan Sistem Manajemen di lingkungan Perusahaan sesuai standar yang dipersyaratkan International Standar Organization (ISO).

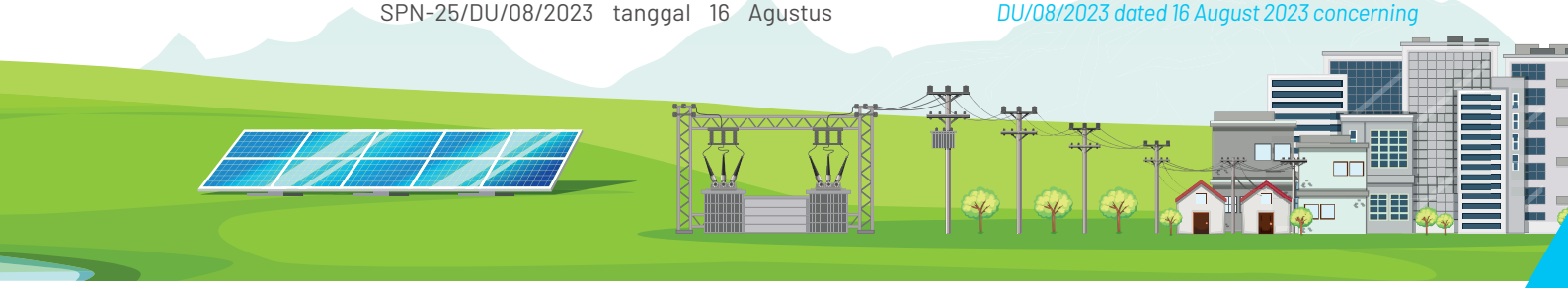
a. Survaillence ISO 9001:2015
   Telah dilaksanakan Surveilance SMM ISO 9001:2015 berdasarkan SPK Nomor: SPK-1/ SEKPER.DU/02/2023 tanggal 7 Februari 2023 antara PJT II dengan PT. IKRCS dan Surat Penugasan Kepala SPI nomor : SPN-01/SPI. DU/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Tim Pendamping Pekerjaan Surveilance SMM ISO 9001:2015.
b. Surveilance Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
   Telah dilaksanakan Surveilance SMAP ISO 37001:2016 oleh pihak eksternal berdasarkan SPK Nomor: SPK-4/SEKPERDU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 antara PJT II dengan PT. Sucopindo dan Surat Penugasan Kepala SPI nomor SPN-02/SPI.DU/0212023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Tim Pendamping Pekerjaan Surveilance ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
c. Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
   Telah dilaksanakan Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 ke-47 pada triwulan III berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor : SPN-25/DU/08/2023 tanggal 16 Agustus

To improve the quality of Internal Control in the implementation of Operational & Financial audit activities, the Internal Audit Unit (SPI) urges each Head of the Work Unit to be able to follow up recommendations on the findings of the Internal auditors. In addition, SPI strives to improve understanding of the implementation of systematic Internal Control and Compliance with Regulations so that if there is a replacement of employees or officials (mutation / promotion) does not interfere with efforts to implement internal control of the work unit.

3. Management System Audit

Implementation of the Management System is an audit and assessment of the consistency of the implementation of the Management System within the Company in accordance with the standards required by the International Standards Organisation (ISO).

a. ISO 9001:2015 Surveillence
   ISO 9001:2015 SMM Surveillance has been carried out based on SPK Number: SPK-1/ SEKPER.DU/02/2023 dated 7 February 2023 between PJT II and PT IKRCS and Assignment Letter of the Head of SPI number: SPN-01/ SPI.DU/02/2023 dated 8 February 2023 concerning the Assistance Team for ISO 9001:2015 SMM Surveillance Work.
b. Surveillance of ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.
   ISO 37001:2016 SMAP Surveilance has been carried out by an external party based on SPK Number: SPK-4/SEKPERDU/02/2023 dated 22 February 2023 between PJT II and PT Sucopindo and Assignment Letter of Head of SPI number SPN-02/SPI.DU/0212023 dated 22 February 2023 concerning the Assistance Team for ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Surveilance Work.
c. Internal Audit of ISO 9001:2015 Quality Management System
   ISO 9001:2015 Quality Management System Internal Audit has been conducted: 2015 in the third quarter based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-25/ DU/08/2023 dated 16 August 2023 concerning



2023 tentang Tim Audit Internal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Ke-47 Tahun 2023 di Lingkungan PJT II dan Nota Dinas Kepala SPI Nomor: ND-240/SPI.DU/PW/09/2023 tanggal 16 September 2023 perihal Laporan Audit Internal ke-47 SMM ISO 9001:2015 Tahun 2023.

d. Audit Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001: 2016
Telah dilaksanakan Audit Internal SMAP 37001:2016 pada Triwulan III berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama Nomor: SPN-24/DU/0812023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Tim Audit Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 ke-3 Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala SPI Nomor: ND-208/SP1.DU/PW/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023.

4. *Self Assessment Quality Assurance SIN*

Program kerja *Quality Assurance* Satuan Pengawasan Intern adalah kegiatan penilaian atas kinerja SPI PJT II berdasarkan kriteria *best practice* yang telah ditetapkan oleh Direksi PJT II melalui Peraturan Direksi I nomor: PRD-31/DIR/11/2019 tanggal 14 November 2019.

Telah dilaksanakan *Self Assessment Quality Assurance* (Penilaian Penjaminan Mutu) SPI di lingkungan PJT II pada Triwulan II, berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama nomor : SPN-08/DU/04/2023 tanggal 25 April 2023 tentang Penilaian Penjaminan Kualitas SPI PJT it Tahun 2023 dan Nota Dinas Kepala Divisi SDM selaku Assessor/ Ketua Tim Penilaian nomor: ND-410/SDM.DKSMR/TU105/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Penyampaian Laporan Penilaian Penjaminan Kualitas (Self Assessment Quality Assurance) SPI PJT II Tahun 2023, dengan hasil memenuhi predikat "Bermutu" dengan capaian nilai 84,3.

the 47th ISO 9001:2015 Quality Management System Internal Audit Team in 2023 within PJT II and Memorandum of Service of the Head of SPI Number: ND-240/SPI.DU/PW/09/2023 dated 16 September 2023 regarding the 47th Internal Audit Report of ISO 9001:2015 Quality Management System in 2023.

d. Internal Audit of ISO 37001 Anti-Bribery Management System: 2016
Internal Audit of SMAP 37001:2016 has been carried out in the 3rd Quarter based on the Assignment Letter of the President Director Number: SPN-24/DU/0812023 dated 16 August 2023 concerning the 3rd ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Audit Team of 2023 and Memorandum of Service of the Head of SPI Number: ND-208/SP1.DU/PW/08/2023 dated 18 August 2023.

4. *Self Assessment Quality Assurance SIN*

The Internal Audit Unit Quality Assurance work programme is an assessment of the performance of the PJT II SPI based on best practice criteria established by the PJT II Board of Directors through Board of Directors Regulation I number: PRD-31/DIR/11/2019 dated 14 November 2019.

Self Assessment Quality Assurance (Quality Assurance Assessment) of SPI within PJT II has been carried out in Quarter II, based on the Assignment Letter of the President Director number: SPN-08/DU/04/2023 dated 25 April 2023 concerning Quality Assurance Assessment of SPI PJT it Year 2023 and Service Memorandum of the Head of HR Division as Assessor / Assessment Team Leader number: ND-410/SDM.DKSMR/TU105/2023 dated 31 May 2023 regarding Submission of Quality Assurance Assessment Report (Self Assessment Quality Assurance) SPI PJT II Year 2023, with the results meeting the predicate "Excellent" with a score of 84.3.



5. *Assessment Good Corporate Governance (GCG)*

Program kerja self assessment GCG adalah kegiatan penilaian perusahaan oleh eksternal terhadap implementasi terselenggaranya praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Balk *(Good Corporate Governance)* pada proses bisnis perusahaan. Program kerja assessment GCG dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.

Telah dilaksanakan self assessment

a) Pendampingan Penilaian *Good Corporate Governance (GCG)*

Telah dilaksanakan Assessment GCG pada Triwulan I tahun 2023 berdasarkan Surat Surat BPKP Provinsi Jawa Barat nomor: LGCG-200/PW10/4.2/2023 tanggal 18 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG Pada Perum Jasa Tirta II mencapai predikat Baik dengan skor 83,6103 dan Surat Penugasan Direksi Nomor: SPN-3/DKS/1/2023 tanggal 3 Januari 2023, periode tanggal pelaksanaan 3 Januari s.d 25 Februari 2023 tentang Tim Pendamping.

Program kegiatan *Asessment COG* tahun 2023 dilaksanakan oleh BPKP Provinsi Jawa Barat pada periode bulan November s.d. Desember 2023 yang dilanjutkan pada periode bulan Januari s.d Maret 2023.

b) Evaluasi/*Seif Assesment Good Corporate Governance (GCG)*

Telah dilaksanakan *Self Assessment* Implementasi GCG Tahun 2023 pada Triwulan IV tahun 2023 berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama PJT II nomor: SPN-34/DU/10/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Tim Evaluasi/ Self Assesment Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/*Good Corporate Governance (GCG)* Tahun 2023 di lingkungan PJT 11, mencapai predikat Baik dengan skor 84,98.

5. *Good Corporate Governance (GCG) Assessment*

GCG self-assessment work programme is an external assessment of the company's implementation of Good Corporate Governance practices in the company's business processes. The GCG assessment work programme is carried out 1 (one) time a year.

Self assessment has been carried out

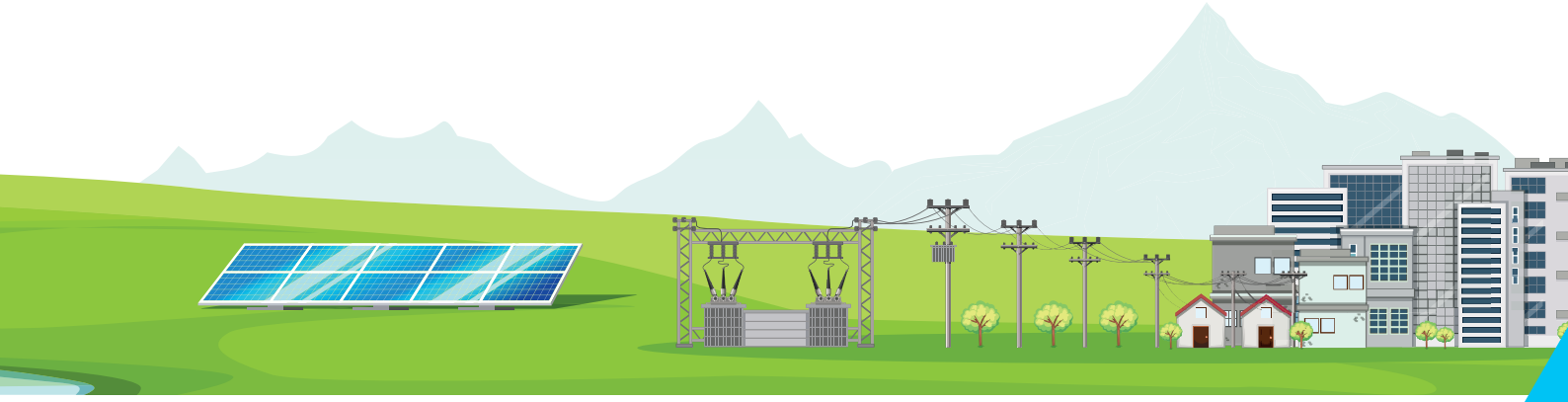
a) *Assistance for Good Corporate Governance (GCG) Assessment*

GCG Assessment has been carried out in the first quarter of 2023 based on the West Java Province BPKP Letter number: LGCG-200/PW10/4.2/2023 dated 18 March 2023 regarding the Report on the Assessment Results of GCG Implementation at Perum Jasa Tirta II achieving a Good predicate with a score of 83.6103 and Board of Directors Assignment Letter Number: SPN-3/DKS/1/2023 dated 3 January 2023, implementation date period 3 January to 25 February 2023 regarding the Assistance Team.

The COG assessment activity programme for 2023 was carried out by BPKP West Java Province in the period November to December 2021 which was continued in the period January to March 2023.

b) *Evaluation/Self-Assessment of Good Corporate Governance (GCG)*

Self Assessment of GCG Implementation in 2023 has been carried out in the fourth quarter of 2023 based on the Assignment Letter of PJT II President Director number: SPN-34/DU/10/2023 dated 27 October 2023 concerning the Evaluation / Self-Assessment Team for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2023 within PJT 11, achieving a Good predicate with a score of 84.98.



6. **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)**
   Program kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan yang dilakuan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan operasional dan keuangan yang dilaksanakan secara khusus dari waktu maupun penugasannya. Program kerja Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan berdasarkan perintah dan penugasan khusus dari Direktur Utama.

   Realisasi: Tidak ada pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

6. ***Examination with Specific Purpose (PDTT)***
   The Specific Purpose Examination (PDTT) work programme is an examination carried out with a special purpose outside of operational and financial examinations that are carried out specifically from the time and assignment. The Specific Purpose Audit work programme is carried out based on specific orders and assignments from the President Director.

   Realisation: There is no implementation of Examination with Specific Purpose (PDTT).

B. Monitoring & Evaluasi

1. ***Monitoring* & Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan**
   Program kerja *monitoring* & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan memonitor & mengevaluasi untuk mengetahui progress tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal yang telah dilaksanakan dan hambatan oleh unit kerja dilingkungan perusahaan. Pelaksanaan kegiatan *monitoring* dan evaluasi tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan ditujukan
   - Mendorong unit kerja auditan untuk melaksanakan tindaklanjut perbaikan atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor ekternal.
   - Melakukan evaluasi kesesuaian tindaklanjut perbaikan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja auditan sesuai dengan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
   - Melakukan evaluasi terhadap kendala atau hambatan tidak dilaksanakannya tindaklanjut perbaikan sesuai rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.
   - Melakukan evaluasi tingkat ketaatan dan konsistensi penanggungjawab objek audit terhadap pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan.

     a) Realisasi *Monitoring* & Evaluasi Triwulan I Tahun 2023
     Telah dilaksanakan *monitoring* & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan I berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor:

B. Monitoring & Evaluation

1. ***Monitoring & Evaluation of Follow-up Examination***
   The work programme for monitoring & evaluation of follow-up on examination results is an activity to monitor & evaluate to determine the progress of follow-up on the findings of internal and external auditors' examinations that have been carried out and obstacles by work units within the company. The implementation of monitoring and evaluation activities for the follow-up of audit findings is aimed at
   - *Encouraging the audited work unit to carry out follow-up improvements to the recommendations on the audit findings of internal and external auditors.*
   - *Evaluate the suitability of follow-up improvements that have been implemented by the audited work unit in accordance with the recommendations of the audit findings.*
   - *Evaluate the obstacles or barriers to the non-implementation of follow-up improvements in accordance with the recommendations of the audit findings.*
   - *Evaluate the level of compliance and consistency of the person in charge of the audit object towards the implementation of follow-up improvements on the recommendations of the audit findings.*

     a) Monitoring & Evaluation Realisation for the First Quarter of 2023
     Monitoring & evaluation of follow-up of examination results in the first quarter has been carried out based on the Memorandum of



ND-90/SPI.DU/PW/04/2023 tanggal 11 April 2023 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan I tahun 2023.

b) Realisasi *Monitoring* & Evaluasi Triwulan II Tahun 2023
Telah dilaksanakan monitoring & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan II berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-155/SPI.DU/PW/07/2023 tanggal 5 Juli 2023 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan II tahun 2023.

c) Realisasi *Monitoring* & Evaluasi Triwulan III Tahun 2023
Telah dilaksanakan monitoring & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan III berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-254/SPI.DU/PW/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan III tahun 2023.

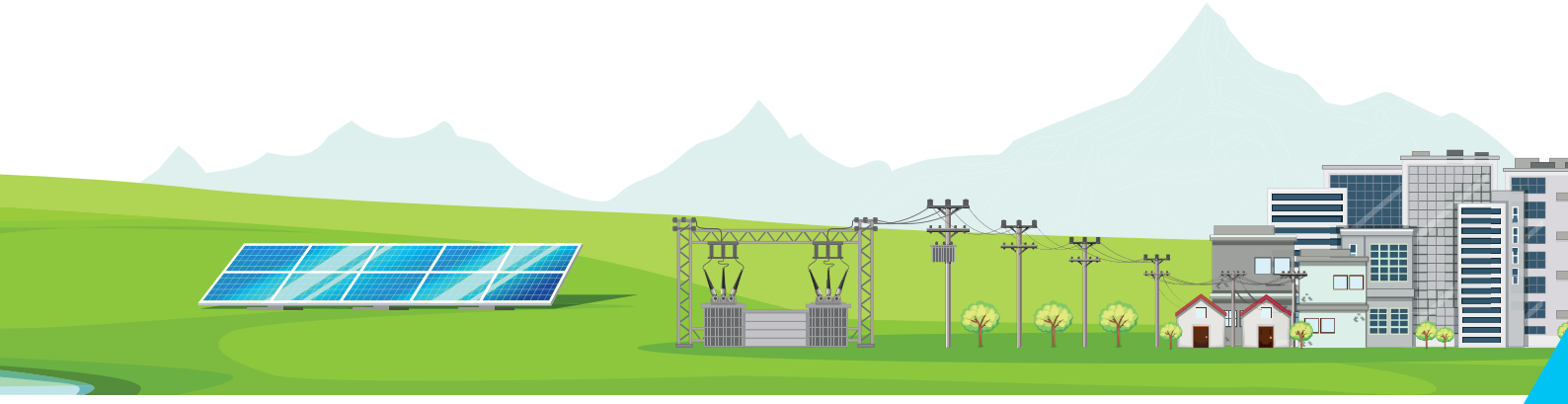
d) Realisasi *Monitoring* & Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023
Telah dilaksanakan monitoring & evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Triwulan IV berdasarkan Nota Dinas Kepala SPI nomor: ND-05/SPI.DU/PW/12/2023 tanggal 06 Januai 2023 perihal Laporan Monitoring & Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan periode Triwulan IV tahun 2023.

Office of the Head of SPI number: ND-90/SPI.DU/PW/04/2023 dated 11 April 2023 regarding the Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Audit Results for the first quarter of 2023.

b) Monitoring & Evaluation Realisation for the Second Quarter of 2023
Monitoring & evaluation of follow-up of examination results in the second quarter has been carried out based on the Memorandum of Office of the Head of SPI number: ND-155/SPI.DU/PW/07/2023 dated 5 July 2023 regarding the Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Audit Results for the second quarter of 2023.

c) Realisation of Monitoring & Evaluation for the Third Quarter of 2023
Monitoring & evaluation of follow-up of examination results in the third quarter has been carried out based on the Memorandum of Office of the Head of SPI number: ND-254/SPI.DU/PW/10/2023 dated 05 October 2023 regarding Monitoring & Evaluation Report of Follow-up of Audit Results for the third quarter period of 2023.

d) Realisation of Monitoring & Evaluation Quarter IV Year 2023
Monitoring & evaluation of follow-up examination results in the fourth quarter has been carried out based on the Memorandum of Service of the Head of SPI number: ND-05/SPI.DU/PW/12/2023 dated 06 January 2023 regarding the Monitoring & Evaluation Report on Follow-up of Audit Results for the fourth quarter of 2023.



2. Rapat Koordinasi Dengan Komite Audit

Program kerja kegiatan rapat koordinasi dengan Komite Audit adalah kegiatan pertemuan antara Satuan Pengawasan Internal dan Komite Audit untuk membahas progres capaian dan hambatan perbaikan tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan auditor internal dan auditor ekternal serta arahan dan kebijakan pengawasan oleh organ Dewan Pengawas terhadap kegiatan program kerja pengawasan oleh unit kerja di lingkungan internal perusahaan.

a) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan I Tahun 2023 Telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor: Und-01/KAI2023 tanggal 21 Januari 2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan IV Tahun 2021.
b) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan II Tahun 2023 Telah dilaksanakan pada tanggal 21 April 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor : Und-05/KA/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan I Tahun 2023.
c) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan 111Tahun 2023 Telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor Und-09/KA/2021 tanggal 20 Juli 2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan 11-2023.
d) Realisasi Rapat Koordinasi dengan Komite Audit Triwulan IV Tahun 2023 Telah dilaksanakan pada tanggal 24 November 2023 berdasarkan Surat Undangan Ketua Komite Audit nomor Und-151KA/2023 tanggal 22 November 2023 perihal Undangan Rapat Pembahasan Money Triwulan III-2023.

3. Evaluasi Manajemen Risiko

Program kerja Evaluasi Manajemen Risiko adalah kegiatan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan manajemen risiko termasuk upaya mitigasi risiko terhadap risiko oleh setiap unit kerja di lingkungan perusahaan.

2. Coordination Meeting with Audit Committee

The work programme of coordination meetings with the Audit Committee is a meeting between the Internal Audit Unit and the Audit Committee to discuss the progress of achievements and obstacles to the improvement of follow-up recommendations on the findings of the examination of internal auditors and external auditors as well as directions and supervisory policies by the Supervisory Board organs on supervisory work programme activities by work units in the company's internal environment.

a) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for the first quarter of 2023 was held on 25 January 2023 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number: Und-01/KAI2023 dated 21 January 2023 regarding the Invitation to the Meeting to Discuss Money for the fourth quarter of 2021.
b) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for the Second Quarter of 2023 was held on 21 April 2023 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number: Und-05/KA/2023 dated 18 April 2023 regarding the Invitation to the Money Discussion Meeting for the First Quarter of 2023.
c) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for Quarter 111 of 2023 was held on 25 July 2023 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number Und-09/KA/2021 dated 20 July 2023 regarding the Invitation to the Money Discussion Meeting for Quarter 11-2023.
d) Realisation of the Coordination Meeting with the Audit Committee for the 4th Quarter of 2023 has been carried out on 24 November 2023 based on the Invitation Letter of the Chairman of the Audit Committee number Und-151KA/2023 dated 22 November 2023 regarding the Invitation to the Money Discussion Meeting for the 3rd Quarter of 2023.

3. Risk Management Evaluation

The Risk Management Evaluation work programme is an activity to evaluate the effectiveness of risk management implementation including risk mitigation efforts against risks by each work unit within the company.



Telah dilaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko pada tanggal Triwulan III tahun 2023, berdasarkan Surat Penugasan Direktur Utama nomor: SPN-291DU/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Tim Evaluasi Manajemen Risiko di lingkungan PJT II.

Kesimpulan hasil Evaluasi Manajemen Risiko PJT II yaitu masih perlu penyelarasan menu/ fitur antara Aplikasi SimRisk sebagai mendia informasi manajemen risiko dengan Prosedur/ Instruksi Kerja yang berlaku serta masih perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan/ sertifikasi manajemen risiko kepada karyawan RTU (Risk Taking Unit) wilayah secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Unit Pengelola Risiko dan *Risk Owner* RTU Wilayah.

Risk Management Evaluation has been carried out on the III Quarter of 2023, based on the Assignment Letter of the President Director number: SPN-291DU/09/2023 dated 20 September 2023 concerning the Risk Management Evaluation Team within PJT II.

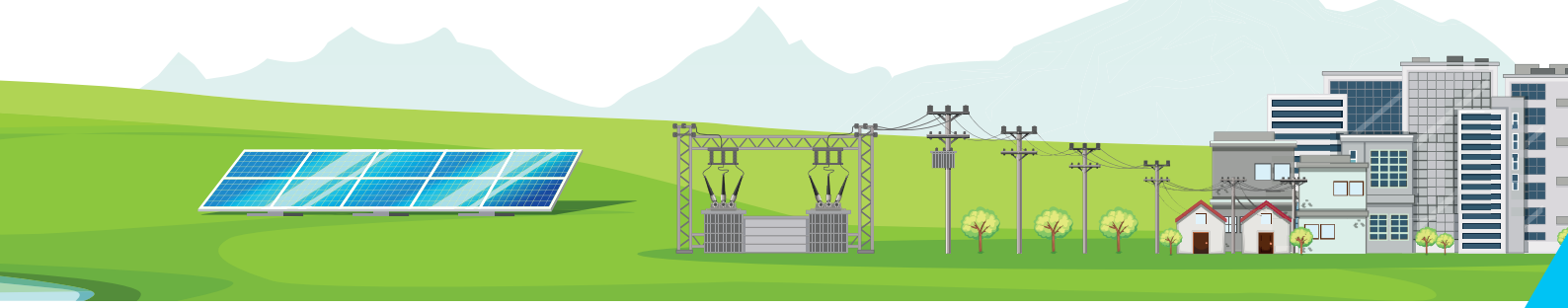
The conclusion of the PJT II Risk Management Evaluation results is that there is still a need to align the menu / features between the SimRisk Application as a risk management information media with the applicable Procedures / Work Instructions and there is still a need for socialisation and risk management training / certification to RTU (Risk Taking Unit) employees in the region in stages and continuously by the Risk Management Unit and RTU Regional Risk Owner.

C. Peningkatan Wawasan Auditor

1. Pendidikan dan Pelatihan.
   Program kerja pendidikan dan pelatihan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi dan memenuhi kriteria auditor Satuan Pengawasan Internal dengan mengikut sertakan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan pada lembaga pendidikan & pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan. Program kerja pendidik dan pelatihan dilaksanakan sesuai standirisasi kebutuhan auditor pemeriksaaan operasional & keuangan dan pemeriksaan sistem manajemen.
   - Telah dilaksanakan Diktat Komunikasi & Psikologi pada 08 s.d.16 Agustus 2023 oleh 2 orang (SE Tk IV dan Auditor Pemula Tk.III)
   - Telah dilaksanakan Sertifikasi Auditor Madya pada tanggal 01 September 2023 oleh 2 orang (SE Tk.IV dan Auditor Pemula Tk.III)
   - Telah dilaksanakan Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 pada tanggal 17-19 Oktober 2023 oleh Kepala SPI.
     - Telah dilaksanakan Pelatihan Finance for Non Finance pada tanggal 08 s.d. 10 November 2023 oleh Manajer Perencanaan & Pelaporan Pengawasan.
     - Telah dilaksanakan Diktat Audit Operasional & Assessment pada tanggal 08 s.d. 16 November 2023 oleh SE Tk. III Bidang Pemeriksaan.

C. Auditor Insight Improvement

1. *Education and Training.*
   Education and training work programme of education and training activities aimed at improving competence and meeting the criteria of the Internal Audit Unit auditors by including in education and training activities at education & training institutions in a tiered and sustainable manner. The education and training work program is carried out in accordance with the standardised needs of operational & financial auditors and management system auditors.
   - *Communication & Psychology Diktat has been carried out on 08 to 16 August 2023 by 2 people (SE Tk IV and Beginner Auditor Tk.III).*
   - *Intermediate Auditor Certification has been carried out on 01 September 2023 by 2 people (SE Tk.IV and Beginner Auditor Tk.III)*
   - *ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System Training has been carried out on 17-19 October 2023 by the Head of SPI.*
     - *Finance for Non Finance Training has been conducted on 08 to 10 November 2023 by the Manager of Supervisory Planning & Reporting.*
     - *Operational Audit & Assessment Diktat has been conducted on 08 to 16 November 2023 by SE Tk. III Audit Division.*



- Telah dilaksanakan Pelatihan Manajemen Risiko pada tanggal 08 s.d. 16 November 2023 oleh Manajer Pelaksanaan Pemeriksaan & SE Tk. III Bidang Pemeriksaan.
  - Telah dilaksanakan Pelatihan Finance for Non Finance pada tanggal 07 s.d. 09 Desember 2023 oleh Asmen Pelaporan & SE Tk.III Bidang Pemeriksaan.

2. Seminar
   Program kerja lokakarya / mukemas / seminar adalah kegiatan pengembangan wawasaan auditor Satuan Pengawasan Internal dengan terlibat dan mengikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan kegiatan lokakarya / Mukernas FKSPI / seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi Auditor Intern (AM) dan Asosiasi Sistem Manajemen Mutu (ISO) serta kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh lembaga lainnya.

   Tidak ada pelaksanaan seminar selama di tahun 2023.

D. Pendukung Kegiatan SPI Lainnya

1. Pengendalian Internal
   Telah dilaksanakan evaluasi terhadap pengendalian internal berdasarkan Laporan Sistem Pengendalian Internal nomor: ND-363/SPI.DU/PW/12/2023 tanggal 30 Desember 2023 mencapai predikat Baik dengan nilai 88,83.
2. Telahaan Staf Realisasi. Tidak ada kegiatan telaahan staf di tahun 2023.
3. Pendampingan Audit Eksternal
   Program pendampingan Satuan Pengawasan Intern terkait dengan audit yang dilakukan oleh eksternal, antara lain:
   1) Pendampingan Penilaian *Good Corporate Governance (GCG)*
      Telah dilaksanakan Assessment GCG pada Triwulan I tahun 2023 berdasarkan Surat Surat BPKP Provinsi Jawa Barat nomor: LGCG-2001PW10/4.2/2023 tanggal 18 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG Pada Perum Jasa.

- *Risk Management Training has been conducted on 08 to 16 November 2023 by Manager of Audit Implementation & SE Tk. III of Audit Division.*
  - *Finance for Non Finance Training has been conducted on 07 to 09 December 2023 by Reporting Assistant & SE Tk.III of Examination Division.*

2. *Seminars*
   The workshop / mukemas / seminar work program is an activity to develop the awareness of Internal Audit Unit auditors by engaging and participating in workshop activities / FKSPI National Meeting / seminars held by the Internal Auditor Association (AM) and the Quality Management System Association (ISO) as well as seminar activities held by other institutions.

   There were no seminars organised in 2023.

D. Other SPI Activity Support

1. *Internal Control*
   An evaluation of internal control has been carried out based on the Internal Control System Report number: ND-363/SPI.DU/PW/12/2023 dated 30 December 2023, achieving a Good predicate with a score of 88.83.
2. *Staff Review Realisation. There were no staff review activities in 2023.*
3. *External Audit Assistance*
   The Internal Audit assistance programme is related to audits conducted by external auditors, among others:
   1) *Assistance for Good Corporate Governance (GCG) Assessment*
      GCG Assessment has been carried out in the first quarter of 2023 based on the West Java Province BPKP Letter number: LGCG-2001PW10/4.2/2023 dated 18 March 2023 regarding the Assessment Report on GCG Implementation at Perum Jasa.



Manajemen Risiko
Risk Management

Pelaksanaan aktivitas bisnis Perum Jasa Tirta II tidak terlepas dari berbagai eksposur risiko yang memiliki potensi dampak terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Dalam mengantisipasi risiko tersebut, Perum Jasa Tirta II memiliki Sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagai salah satu komponen penting dalam manajemen dan memastikan Perusahaan dalam keadaan sehat, aman, dan baik, sehingga seluruh aktivitas usaha dapat membawa Perusahaan pada misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perum Jasa Tirta II memiliki komitmen kuat yang secara berkelanjutan terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko yang terpadu dan komprehensif, yang bertujuan untuk melindungi Perusahaan dari risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan mengeksplorasi peluang untuk meningkatkan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi manajemen risiko, Perusahaan dihadapkan pada kebutuhan untuk menerapkan praktik terbaik manajemen risiko di seluruh kegiatan operasional, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Seluruh elemen Perusahaan memiliki peran dalam pengelolaan risiko dengan risikonya masing-masing, sehingga dalam mendukung keberhasilannya dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang mengatur setiap prosedur dan mekanisme manajemen risiko. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. Menerapkan Manajemen Risiko secara terpadu sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* untuk mencapai Visi, Misi, dan tujuan Perusahaan ;
2. Menjadikan Manajemen Risiko sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) berbasis risiko untuk mencapai realisasi setiap proses secara efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kesadaran budaya risiko dalam keseharian kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik bisnis Perusahaan dan pengambilan keputusan;
4. Menjadikan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko sebagai dasar pemeriksaan dan pengawasan (risk based audit) dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas;
5. Menginformasikan, mengelola, dan melakukan pengendalian serta penanganan (mitigasi) risiko secara berkala sebagai dasar upaya perbaikan berkesinambungan dalam penerapan manajemen risiko.

The execution of Perum Jasa Tirta II's business activities is inextricably linked to various risk exposures that may have an impact on the Company's long-term viability. Perum Jasa Tirta II has an effective Risk Management System as an important component in management to anticipate these risks and ensure the Company is in a healthy, safe, and good condition, so that all business activities can bring the Company to the mission and goals that have been set.

Perum Jasa Tirta II is committed to continuously developing and improving the framework of an integrated and comprehensive risk management system, with the goal of protecting the Company from risks that have a negative impact on the achievement of objectives and exploring opportunities to increase benefits for all stakeholders.

Policy on Risk Management

In optimising the effectiveness and efficiency of risk management, the Company is faced with the need to implement risk management best practices in all operational activities, both in the internal and external environment. All elements of the Company have a role in risk management with their respective risks, so that in supporting its success, policies are needed that regulate every risk management procedure and mechanism. These policies include:

1. *Implementing integrated risk management in accordance with Good Corporate Governance in order to achieve the Company's Vision, Mission, and Objectives; and*
2. *Making Risk Management the basis for the preparation of a risk-based Corporate Budget Work Plan (RKAP) to achieve the realisation of each process effectively and efficiently;*
3. *Increase awareness of risk culture in daily work so that it becomes an integrated part of the Company's business practices and decision-making;*
4. *Making the results of identification, analysis, evaluation, and risk management the basis for inspection and supervision (risk based audit) in order to improve performance and accountability;*
5. *Informing, managing, and controlling and managing (mitigating) risks on a regular basis as the basis for continuous improvement efforts in the implementation of risk management.*



Pengelola Manajemen Risiko

Pengelolaan Manajemen Risko Perum Jasa Tirta II tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko dan STOK

Bidang Manajemen Risiko Perusahaan

(1) Bidang Manajemen Risiko Perusahaan melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang manajemen risiko perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Manajemen Risiko Perusahaan mempunyai fungsi
   a. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan risiko, program kerja dan KPI Bidang Manajemen Risiko Perusahaan,
   b. Menyiapkan, mengarah dan mengevaluasi penyusunan road man manajemen risiko Perusahaan;
   c. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan, reviu, dan melaksanakan sosialisasi aturan pedoman/prosedur terkait manajemen risiko Perusahaan;
   d. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kelengkapan dokumen usulan RKAP namun tidak terbatas pada Project Digest, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan penyusunan RKAP yang berlaku,
   e. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan rencana paket pengadaan barang/ jasa sesuai batas kewenangan Divisi Rencana Strategi, Manajemen Risiko dan teknologi Informasi Komunikasi;
   f. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendin/ *HPS (Owner Estimate)* dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
   g. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan naskah *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan/atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan. fungsi

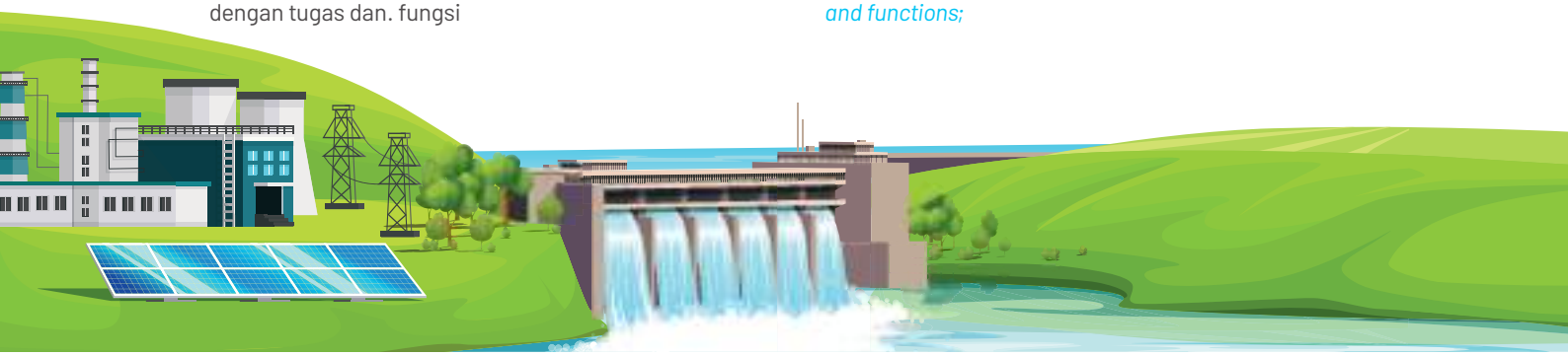
Risk Management Manager

Perum Jasa Tirta II's Risk Management Management is contained in the Risk Management Guidelines and STOK

Corporate Risk Management

(1) The Corporate Risk Management Division carries out the main tasks in the activities of preparing, directing and evaluating and reporting on applicable activities in the field of corporate risk management in accordance with applicable regulations in the Company.

(2) In carrying out the tasks as referred to in paragraph (1), the Company's Risk Management Division has the functions of
   a. Prepare, direct and evaluate risk management, work programs and KPIs for the Company's Risk Management Division,
   b. Prepare, direct and evaluate the preparation of the Company's risk management road man;
   c. Prepare, direct, and evaluate the preparation, review, and socialization of risk management guidelines/procedures for the Company;
   d. Prepare, direct, and evaluate the completeness of the RKAP proposal document (including, but not limited to, the Project Digest, Terms of Reference (KAK), and Detailed Budget (RAB)) for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable RKAP preparation
   e. Prepare, direct, and evaluate the preparation of the package plan for the procurement of goods/services in accordance with the Division of Strategic Planning, Risk Management, and Information Communication Technology's authority limits;
   f. Prepare, direct, and evaluate the completeness of the procurement plan document, including but not limited to the Terms of Reference (KAK), the Estimated Price Sendin / HPS (Owner Estimate), and the Draft Contract for the work of consulting services in accordance with the provisions of the current procurement of goods and services;
   g. Draft, direct, and assess a Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions;



h. Menganalisis konteks internal dan eksternal Perusahaan;
i. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan ruang lingkup dan kriteria risiko Perusahaan;
j. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan daftar risiko Perusahaan;
k. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan rencana pengendalian danmitigasi risiko Perusahaan;
l. Menganalisis risiko investas erusahaan;
m. Melaksanakan pemantauan dan tinjauan pengelolaan risiko;
n. Mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan pengelolaan risiko Perusahaan,
o. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan *draft* laporan pengelolaan Perusahaan, risiko Perusahaan;
p. Melaksanakan assesment maturity manajemen risiko;
q. Mengendalikan bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, dan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

h. Aanalyze the Company's internal and external context;
i. Prepare, direct, and evaluate the Company's scope and risk criteria;
j. Prepare, direct, and evaluate the risk register for the company;
k. Prepare, direct, and evaluate the Company's risk control and mitigation plan;
l. Examine the investment risk of the company;
m. Carry out risk management monitoring and review;
n. Communicate with and consult with the Company's risk management team;
o. Prepare, direct, and evaluate the preparation of draft reports on Company management, Company risks;
p. Conduct risk management maturity assessment,
q. Control evidence of work implementation of duties and functions, and prepare, direct, and evaluate the preparation of reports in accordance with the duties and functions.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 7 karyawan Perum Jasa Tirta II telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko, 2 karyawan bersertifikat *Certified Risk Management Profesional (CRMP)* dan 5 karyawan bersertifikat *Certified Risk Management Organization*.

Roadmap Manajemen Risiko

Perusahaan telah menetapkan arah pengembangan manajemen risiko dengan mengacu pada roadmap manajemen risiko 2015 – 2021.

Infrastruktur Manajemen Risiko

Penyusunan infrastruktur dan proses manajemen risiko menjadi perangkat bagi Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan melaporkan potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam setiap proses bisnis Perusahaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif bagi Perusahaan untuk memetakan potensi peluang maupun kerugian, sehingga proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan dapat menimbang serta mengefektifkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.

Certification in Risk Management

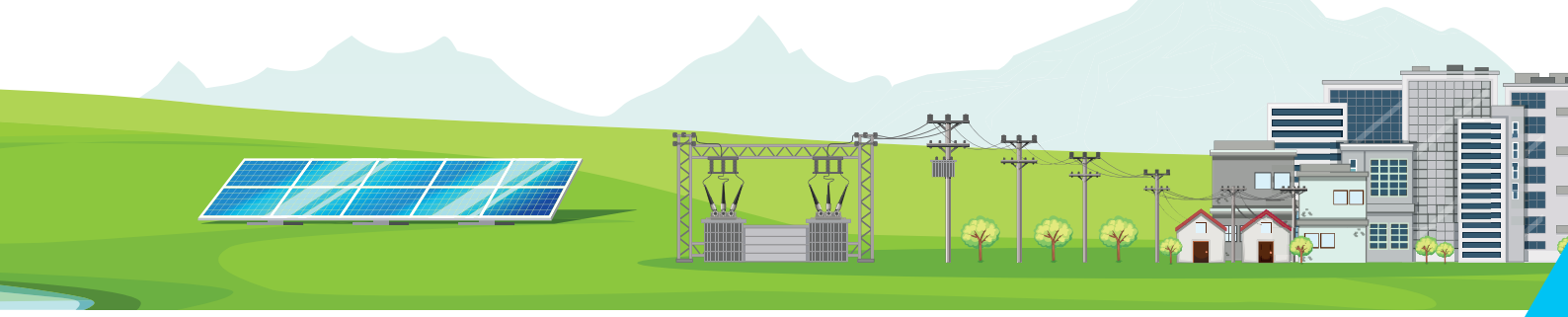
Until the end of 2023 as many as 7 Perum Jasa Tirta II employees have Risk Management Certification, 2 employees are Certified Risk Management Professional (CRMP) and 5 employees are Certified Risk Management Organisation.

Risk Management Roadmap

The Company has set the direction of risk management development by referring to the 2015-2021 risk management roadmap.

Infrastructure for Risk Management

The development of risk management infrastructure and processes is a tool for the Company to identify, measure, monitor and report potential risks faced in every business process of the Company. This aims to provide a comprehensive picture for the Company to map potential opportunities and losses, so that the decision-making process and policy formulation can weigh and streamline every policy and decision taken.



Penerapan dan pengembangan manajemen risiko di lingkungan Perum Jasa Tirta II berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* Pada Badan Usaha Milik Negara. Adapun proses dan penerapan manajemen risiko Perum Jasa Tirta II dibagi menjadi proses dasar, proses inti, dan proses penunjang.

Proses Dasar

Proses dasar manajemen risiko meliputi kegiatan membangun lingkungan intern yang kondusif untuk berlangsungnya proses risiko berikutnya, serta menyusun konteks untuk menempatkan proses inti manajemen risiko. Dalam mendukung proses dasar tersebut, PJT II telah memiliki aplikasi berbasis web simrisk.jasatirta2.co.id. Adapun dalam implementasi proses dasar, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

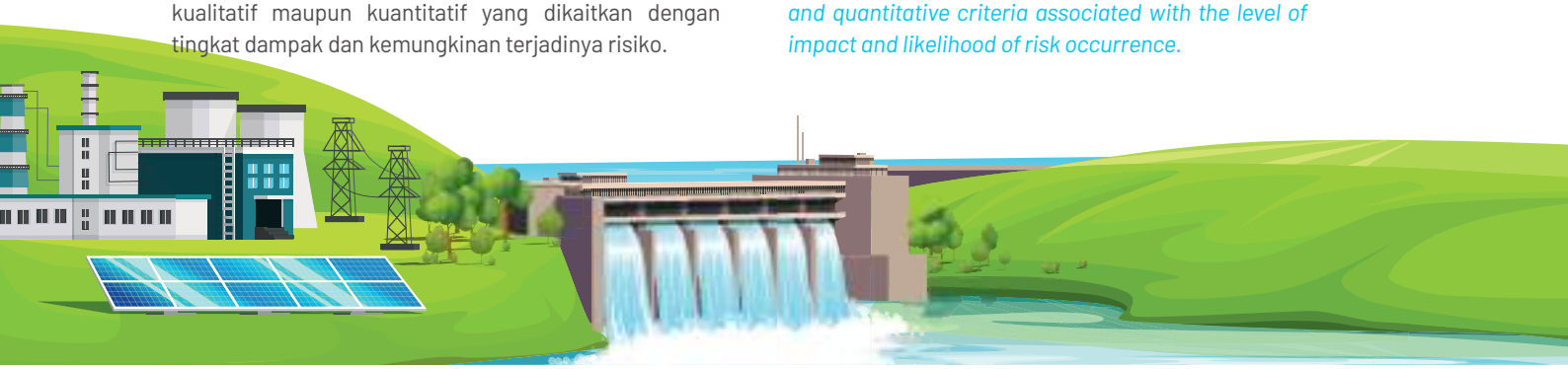
- Dalam membangun lingkungan manajemen risiko, Direksi menetapkan kebijakan/pedoman manajemen risiko, membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko melalui sosialisasi kepada risk owner, menyiapkan organisasi/fungsi yang menangani manajemen risiko serta menyediakan sumber daya yang menangani manajemen risiko.
- Dalam penyusunan konteks risiko, Divisi PKRSM dan/atau risk owner menyusun dan mempelajari hubungan/kaitan peristiwa risiko yang mungkin terjadi terhadap sasaran kegiatan rutin maupun kegiatan non rutin (proyek/investasi) sebagai dasar kegiatan identifikasi risiko.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan strategi Perusahaan dan perlu pengelolaan secara berlanjut terhadap kemungkinan terjadinya, dampak, serta pengaruhnya bagi kelangsungan usaha Perusahaan untuk kemudian dikelompokkan dalam risiko strategis.
- Risiko kegiatan rutin yang mempunyai kaitan dengan kegiatan tertentu dari operasional tahunan Perusahaan dan pengelolaannya diperlukan sesuai dengan tingkat kualitas nilai risikonya, dikelompokkan dalam risiko operasional.
- Risiko strategis maupun risiko operasional secara tertulis dikompilasi dalam Dokumen Register Risiko.
- Konteks risiko digunakan untuk menetapkan level kriteria kualitatif maupun kuantitatif yang dikaitkan dengan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.

The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises PER01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, guides the implementation and development of risk management within Perum Jasa Tirta II. The risk management process and application at Perum Jasa Tirta II are divided into three parts: basic processes, core processes, and supporting processes.

The Fundamental Procedure

The risk management foundational process includes building an internal environment that is conducive to the next risk process, as well as setting the context in which the core risk management process will take place. In supporting the basic process, PJT II has a web-based application simrisk.jasatirta2.co.id. As for the implementation of the basic process, things that need to be considered include:

- *In developing a risk management environment, the Board of Directors establishes risk management policies/guidelines, generates and maintains a risk-aware culture through socialization to risk owners, prepares organizations/functions that handle risk management, and provides risk management resources.*
- *To prepare the risk context, the PKRSM Division and/or risk owner compiles and studies the relationship/linkage of risk events that may occur to the targets of routine and non-routine activities (projects/investments) as the foundation for risk identification activities.*
- *Risks of routine activities that are related to the Company's strategy and need continuous management of the likelihood of occurrence, impact, and influence on the Company's business continuity to be grouped into strategic risks.*
- *Routine activity risks that are related to specific activities of the Company's annual operations and whose management is required according to the quality level of the risk value, are categorised under operational risks.*
- *Strategic risks and operational risks are compiled in writing in the Risk Register Document.*
- *Risk context is used to establish the level of qualitative and quantitative criteria associated with the level of impact and likelihood of risk occurrence.*



Proses Inti

Proses inti manajemen risiko secara garis besar meliputi kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko, serta tanggapan/tindak lanjut terhadap risiko. Setelah melalui tahap analisis dan evaluasi risiko, Perusahaan menyusun rencana tindakan untuk memitigasi risiko yang nilainya tinggi dengan mengacu pada daftar atau register risiko serta risiko strategis Perusahaan. Rencana tindakan ini digunakan sebagai bahan analisis manfaat dan biaya sebelum manajemen memutuskan memberikan tanggapan/perlakuan terhadap risiko. Berikut adalah proses dan penerapan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II:

1. Pelaksanaan Identifikasi Risiko
   - Identifikasi risiko dilaksanakan dengan mengamati indikasi risiko, sumber dan penyebab terjadinya risiko, jenis kegiatan yang terpengaruh risiko, akibat dan konsekuensi (biaya) bila terjadi risiko tersebut, serta pendokumentasian risiko.
   - Indikasi risiko dideteksi dari masalah yang timbul di masa lalu atau selama periode berjalan, baik kasus-kasus internal maupun kasus eksternal yang sejenis, tingkat kerumitan proses suatu kegiatan, adanya perubahan peraturan atau perubahan proses kegiatan, serta opini pakar dan masyarakat.
   - Sumber risiko secara garis besar dapat berasal dari risiko lingkungan, risiko proses, dan risiko informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan ISO 31000:2018. Risiko proses dan risiko informasi merupakan risiko internal Perusahaan yang umumnya masih dalam kendali manajemen *(controllable)*. Risiko lingkungan sebagian besar berasal dari eksternal yang umumnya bersifat di luar kendali manajemen *(uncontrollable)*.
   - Risiko yang sifatnya controllable dapat disusun action plan-nya secara langsung, sedangkan risiko yang sifatnya *uncontrollable* perlu dilaporkan atau dikoordinasikan dengan pejabat eksternal yang terkait.
   - Risiko yang diidentifikasi adalah risiko awal *(risiko inherent)* yang belum ditindaklanjuti dengan action plan.

2. Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko
   - Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko digunakan untuk mengetahui tingkat besarnya risiko yang dapat menunjukkan besarnya pengaruh risiko terhadap tujuan Perusahaan , serta untuk menyusun prioritas risiko yang memerlukan perlakuan tertentu.
   - Besaran nilai risiko merupakan hasil perkalian antara tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan taksiran besarnya nilai dampak bila peristiwa risiko benar-benar terjadi.

Fundamental Procedures

Risk identification, risk analysis, and risk evaluation, as well as response/follow-up, are the core processes of risk management. against risk. Following the risk analysis and evaluation stage, the Company develops an action plan to mitigate high-value risks by consulting the risk register or register of risks as well as the Company's strategic risks. Before management decides to respond to/treat risks, this action plan is used as material for an analysis of benefits and costs. The process and implementation of Perum Jasa Tirta II Risk Management are as follows:

1. Risk Identification Implementation
   - *Risk identification is carried out by observing indications of risk, sources and causes of risk occurrence, types of activities affected by risk, consequences and costs if the risk occurs, and risk documentation.*
   - *Risk indications are detected from problems that have arisen in the past or during the current period, both internal cases and similar external cases, the level of complexity of the process of an activity, changes in regulations or changes in activity processes, as well as expert and public opinions.*
   - *Sources of risk can broadly come from environmental risk, process risk, and information risk for decision making based on ISO 31000: 2018. Process risk and information risk are internal risks of the Company that are generally within management control (controllable). Environmental risks are mostly external risks that are generally beyond management control (uncontrollable).*
   - *Controllable risks can have their action plans developed directly, while uncontrollable risks need to be reported or coordinated with relevant external officials.*
   - *The risks identified are initial risks (inherent risks) that have not been followed up with an action plan.*

2. Risk Assessment and Evaluation
   - *Risk Analysis and Risk Evaluation are used to determine the level of risk, which can indicate the magnitude of risk's impact on the Company's objectives, as well as to prioritize risks that require specific treatment.*
   - *The magnitude of the risk value is the product of the probability of a risk occurring multiplied by the estimated value of the impact if the risk event occurs.*



- Nilai risiko dinilai melalui perhitungan Nilai Kemungkinan dan Nilai Dampak. Nilai Kemungkinan yang dimaksud adalah probabilitas dari suatu peristiwa yang terjadi, sedangkan Nilai Dampak adalah penilaian dampak dari risiko yang dapat diukur dari sasaran atau tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam *Key Performance Indicator (KPI)*.

3. Penilaian Tingkat Risiko
   - Penilaian risiko ditentukan dengan perkalian antara nilai kemungkinan dan nilai dampak. penilaian tingkat risiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan risiko.
   - Skala rating untuk kolom kemungkinan terjadinya dan kolom dampak dari peristiwa risiko yang paling kecil dimulai dengan level 1 sedangkan yang paling besar dinilai dengan level 5, karena rumus/notasi risiko adalah nilai dampak dikalikan nilai kemungkinan maka nilai peristiwa risiko berkisar antara 1 sampai dengan 25.
   - Pengendalian Risik
4. Proses pengendalian risiko melibatkan komparasi nilai risiko yang muncul dan analisis proses prioritas dan persyaratan yang ada. Berdasarkan hasil penilaian risiko, makan dilakukan pengendalian risiko sesuai dengan tingkat risiko dan menentukan prioritasnya dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- *Risk value is calculated using the Likelihood Value and Impact Value. The Likelihood Value is the likelihood of an event occurring, while the Impact Value is an assessment of the risk's impact based on the Company's goals or objectives as stated in the Key Performance Indicators (KPI).*

3. Risk Assessment
   - *The risk assessment is determined by multiplying the likelihood value and the impact value. The risk level assessment determines how to follow up on risk handling.*
   - *The rating scale for the likelihood of occurrence column and the impact column of the smallest risk event starts with level 1 while the largest is rated with level 5, because the risk formula/notation is the impact value multiplied by the likelihood value, the risk event value ranges from 1 to 25..*
   - *Risk Control*
4. *The risk management process entails comparing the value of emerging risks as well as analyzing priority processes and existing requirements. Risk control is carried out based on the results of the risk assessment and determines the priority by using the following provisions:*

TINGKAT RISIKO Risk Level	PENGENDALIAN RISIKO Risk Control
Ekstrim/Strategis / *Extreme/Strategic*	Memerlukan tindakan segera karena sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian dan hancurnya Perusahaan. *Requires immediate action because the distribution of potential risks allows the loss and collapse of the Company.*
Tinggi / *High*	Memerlukan tindakan cepat (maksimal 3 bulan), karena potensi dampaknya melemahkan organisasi. *Requires quick action (maximum 3 months) because the potential impact weakens the organization.*
Sedang / *Moderate*	Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan (antara 3 – 6 bulan). Risiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya kegagalan proses. *Requires treatment with an action plan (between 3 - 6 months). This risk is acceptable, but efforts are needed to reduce the likelihood of process failure.*
Rendah / *Low*	Merupakan batas risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan, namun selalu memantau dan mengevaluasi risiko tersebut. *Risk limit that is acceptable to the Company, but the Company always monitors and evaluates the risk.*
Sangat Rendah / *Very Low*	Dikaji, dipantau, dan dievaluasi minimal setahun sekali. *Is reviewed, monitored, and evaluated at least once a year.*



Proses Penunjang

Proses penunjang manajemen risiko meliputi kegiatan pemantauan dan pengkajian ulang *(review)*, komunikasi, konsultasi, dan pendokumentasian.

1. Pemantauan & Kaji Ulang *(Monitoring & Review)* Pemantauan terhadap risiko yang berprioritas tinggi harus dievaluasi lebih sering.
2. Pemantauan atas efektivitas implementasi pengelolaan risiko pada unit-unit fungsional organisasi *(risk owner)* harus dilakukan secara mandiri *(self assessment)* oleh pimpinan unit yang bertanggungjawab.
3. Pengkajian ulang risiko meliputi pengkajian perubahan status tingkat dampak dan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dikaitkan dengan perubahan kondisi internal dan eksternal, serta perubahan rencana tindakan.
4. Pelaporan *monitoring* dan pengkajian ulang disampaikan kepada Direksi, paling tidak setiap tahun, mencakup efektivitas rencana tindakan, analisa manfaat dan biaya mitigasi, perubahan prioritas risiko, dan posisi nilai total risiko saat ini dibandingkan periode yang lalu.
5. Evaluasi penerapan manajemen risiko Perusahaan dapat dilakukan secara mandiri *(self assessment)* atau oleh pihak eksternal.
6. Evaluasi penerapan manajemen risiko secara mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan *check list, questionnaire*, atau *flowcharting*.

Komunikasi dan Pelaporan

Penerapan manajemen risiko harus disampaikan kepada karyawan operasional meliputi sosialisasi untuk membangkitkan dan memelihara budaya sadar risiko, meliputi pemahaman secara bertahap, membangkitkan partisipasi pengamatan indikasi risiko serta partisipasi dalam usulan rencana tindakan *(action plan)*.

- Komunikasi internal manajemen risiko antar risk owner meliputi kemungkinan terjadinya risiko yang sama, kejadian pengulangan atau risiko baru termasuk rencana tindakannya, pembandingan nilai dampak dari risiko yang sejenis serta pelaporan kepada Atasan atau Direksi untuk memperoleh pertimbangan rencana tindakan dan keputusan perlakuan risiko.
- Komunikasi internal manajemen risiko kepada Divisi PKRSM dan SPI, meliputi proses inti manajemen risiko, sebagai alat pemantauan dan saran pengembangan

Supporting Processes

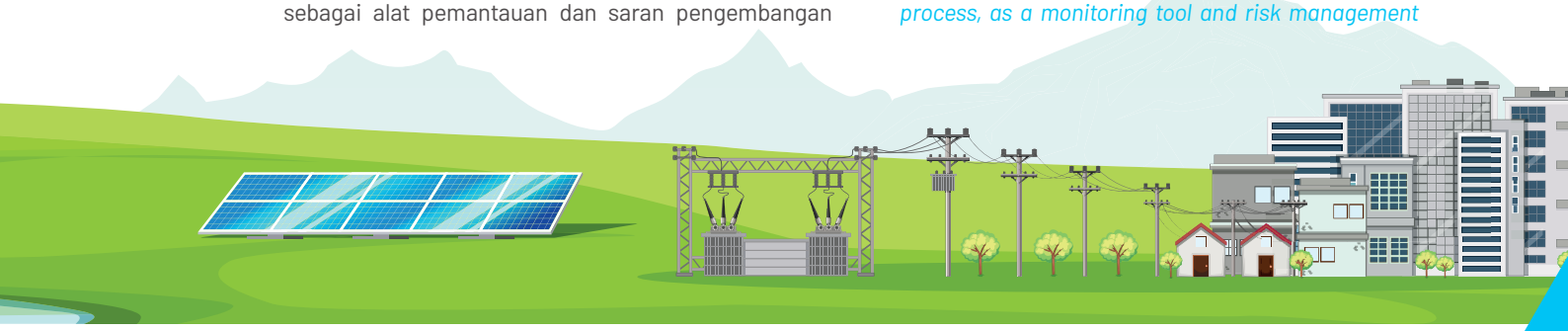
Processes that help Monitoring and review activities, communication, consultation, and documentation are examples of risk management support processes.

1. *Monitoring and Review (Monitoring and Review) High-priority risks should be monitored more frequently.*
2. *The responsible unit leader must independently (self-assess) monitor the effectiveness of risk management implementation in the functional units of the organization (risk owner).*
3. *Changes in the status of the impact level and the level of possibility of the occurrence of risks associated with changes in internal and external conditions, as well as changes in action plans, are assessed as part of the risk assessment.*
4. *Monitoring and review reports covering the effectiveness of the action plan, analysis of the benefits and costs of mitigation, changes in risk priorities, and the position of the current total risk value compared to the previous period are submitted to the Board of Directors at least annually.*
5. *The Company's risk management implementation can be evaluated independently (self-assessment) or by third parties.*
6. *Independent evaluation of risk management implementation can be done using a check list, questionnaire, or flowcharting.*

Reporting and communication

Risk management must be communicated to operational employees, including socialization, in order to generate and maintain a risk-aware culture, which includes gradual understanding, increasing participation in observing risk indicators, and participation in proposed action plans.

- *Internal risk management communication among risk owners includes the possibility of the same risk, recurrence or new risks, as well as the action plan, a comparison of the impact value of similar risks, and reporting to superiors or the Board of Directors to obtain consideration of action plans and risk treatment decisions.*
- *Internal risk management communication to PKRSM Division and SPI, covering the core risk management process, as a monitoring tool and risk management*



manajemen risiko serta bahan pelaksanaan audit berbasis risiko.
- Komunikasi eksternal manajemen risiko kepada Dewan Pengawas meliputi risiko-risiko strategis dalam daftar prioritas risiko Perusahaan, rencana tindakan serta keputusan perlakuan risiko oleh Direksi.
- Komunikasi eksternal kepada pemilik modal mencakup perlakuan khusus mengenai risiko strategis, serta rencana tindakan dan perlakuan risiko oleh Direksi, maupun pelaporan manajemen risiko sebagai bagian materi RKAP dan laporan tahunan Perusahaan.
- Dalam hal keterbukaan informasi penerapan manajemen risiko, Direksi harus memperhatikan komunikasi kepada publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Kepada Publik.

3. Konsultasi
   - Konsultasi dilakukan untuk membantu unit-unit pemilik risiko, terutama dalam mengidentifikasi dan asesmen risiko.
   - Konsultasi internal dilakukan oleh Divisi PKSM dan/atau SPI.
   - Untuk pertama kali Perusahaan mendesain sistem manajemen risiko, pelaksanaan self assessment serta pengembangan konsep manajemen risiko lebih lanjut (misalnya audit internal berbasis risiko), konsultasi dapat dilaksanakan oleh konsultan eksternal atau pakar bidang khusus yang terkait.

4. Pendokumentasian
   - Pendokumentasi manajemen risiko dilakukan melalui aplikasi simrisk.jasatirta2.co.id.
   - Pendokumentasian manajemen risiko dilaksanakan oleh risk owner dan Divisi PKSM.
   - *Risk Owner* mendokumentasikan identifikasi risiko di unitnya masing-masing, meliputi uraian indikasi risiko, sumber, penyebab dan akibat risiko serta kertas kerja penetapan kriteria skala rating tingkat kemungkinan, tingkat dampak risiko secara ordinal, dan uraian perhitungan secara nominal.
   - Divisi PKSM mendokumentasikan rekapitulasi risiko, kertas kerja penggabungan dan eliminasi risiko, register risiko, prioritas risiko, keputusan Direksi tentang perlakuan risiko, pelaporan/surat-surat internal dan eksternal yang terkait dengan kegiatan manajemen risiko.

development advice as well as material for risk-based audit implementation.
- *External risk management communication to the Supervisory Board includes strategic risks in the Company's risk priority list, action plans, and risk treatment decisions by the Board of Directors.*
- *External communication to the owners of capital includes specific treatment of strategic risks, as well as action plans and risk treatment by the Board of Directors, as well as risk management reporting as part of the RKAP material and the Company's annual report.*
- *In terms of information disclosure on risk management implementation, the Board of Directors must pay attention to communication to the public, in accordance with Law No. 14 of 2009 on Information Disclosure to the Public.*

3. Consultation
   - *Consultation is carried out to assist risk owner units, particularly in risk identification and assessment.*
   - *The PKRSM and/or SPI Division conduct internal consultations.*
   - *For the first time the Company designs a risk management system, conducts a self-assessment and further develops the risk management concept (e.g. risk-based internal audit), consultation can be carried out by external consultants or experts in the relevant specialised fields.*

4. Documentation
   - *Risk management documentation is carried out using the simrisk.jasatirta2 application. co.id.*
   - *Risk management documentation is completed by the risk owner and the PKRSM Division.*
   - *For the first time the Company designs a risk management system, conducts a self-assessment and further develops the risk management concept (e.g. risk-based internal audit), consultation can be carried out by external consultants or experts in the relevant specialised fields.*
   - *The PKRSM Division records risk recapitulation, risk combination and elimination working papers, risk registers, risk priorities, Board of Directors decisions on risk treatment, and internal and external risk management reporting/letters.*



Dalam pengelolaan risiko, terdapat 3 (tiga) komponen yang saling terkait, yaitu prinsip-prinsip manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan proses pengelolaan risiko.

Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Proses Manajemen Risiko

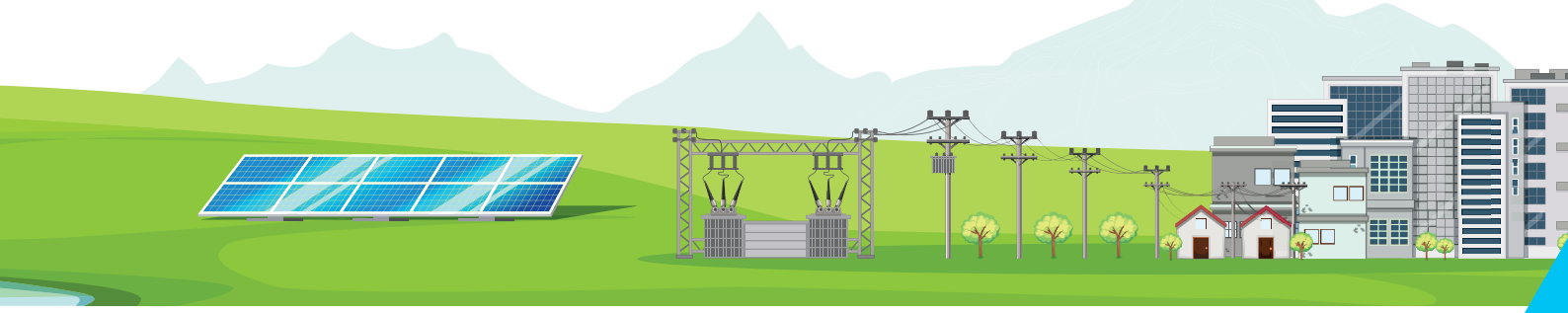
1. Komunikasi dan Konsultasi
   Komunikasi dilakukan untuk membangun kesadaran dan pemahaman terhadap risiko sementara, konsultasi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan untuk komunikasi dan konsultasi adalah metode matriks *RACI (Responsible, Accountable, Consulted)*, dan Informed) untuk mendeteksi tingkat keterlibatan para pihak dalam setiap tahap proses manajemen risiko.
2. Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
   Tujuan penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria adalah untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan perlakuan risiko yang memadai.
   - Ruang lingkup manajemen risiko meliputi Regular Objective Direktorat / Divisi / Unit Usaha / Anak Perusahaan dan *Specific Objective* / khusus.
   - Konteks risiko meliputi Konteks Eksternal dan Konteks Internal
   - Kriteria risiko disesuaikan dengan konteks risiko
3. Asesmen/Penilaian Risiko
   Penilaian risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketidakpastian yang ada dalam pencapaian sasaran Perusahaan. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko.
4. Perlakuan Risiko
   Perlakuan risiko melibatkan proses berulang meliputi:
   - Formulasi dan seleksi opsi-opsi perlakuan risiko;
   - Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko;
   - Penilaian keefektifan perlakuan risiko;
   - Pengambilan keputusan apakah risiko tersisa dapat diterima.

Risk management consists of three (three) interconnected components: risk management principles, risk management framework, and risk management processes.

This risk management framework is outlined in policies, procedures, authorities, and other provisions, as well as various risk management tools that are applicable throughout the scope of the project.

Process of Risk Management

1. *Consultation and Communication*
   Communication is used to raise risk awareness and understanding, while consultation is used to gather feedback from information needed for decision making. The RACI matrix method (Responsible, Accountable, Consulted, and Informed) is used for communication and consultation to determine the level of involvement of the parties in each stage of the risk management process.
2. *Criteria, Scope, and Context*
   The goal of defining the scope, context, and criteria is to adapt the risk management process, allowing for effective risk assessment and risk treatment.
   - *The scope of risk management includes Regular Objective of Directorate/Division/Business Unit/ Subsidiary and Specific Objective.*
   - *The risk context includes both the external and internal contexts.*
   - *The risk criteria are tailored to the risk environment.*
3. *Risk Evaluation/Assessment*
   Risk assessment is a systematic approach to identifying and analyzing the uncertainties that may exist in achieving the Company's goals. Risk identification, risk analysis, and risk evaluation are all components of risk assessment.
4. *Risk Treatment*
   Risk treatment is an iterative process that includes:
   - *Formulating and selecting risk treatment options;*
   - *Planning and implementing risk treatment;*
   - *Assessing risk treatment effectiveness; and*
   - *Deciding whether the remaining risk is acceptable.*



5. Pemantauan dan Tinjauan
6. Pemantauan dan tinjauan dilakukan secara periodik secara teratur dalam tahun berjalan minimal per triwulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan. Adapun mekanisme pemantauan dan tinjauan dilakukan dengan cara self-assessment, audit internal atau eksternal, *Forum Group Discussion/Executive Briefing*, dan/atau umpan balik dari karyawan dan *stakeholder*
7. Pencatatan dan Pelaporan
8. Mekanisme proses pencatatan dan pelaporan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses pada manrisk.jasatirta2.co.id.

Register Risiko dan Profil Risiko Strategis Perusahaan

Risk Appetite, Risk Tolerance, dan *Key Risk Indicators*

- *Risk Appetite*
  Perusahaan hanya mengelola risiko strategis dan risiko tinggi, karena memerlukan tindakan segera, sebaran potensi risiko memungkinkan kerugian, hancurnya Perusahaan, potensi dampaknya melemahkan organisasi. Risiko tersebut dapat dialihkan ke pihak lain.
- *Risk Tolerance*
  Perusahaan menetapkan risk tolerance, yaitu batasan kuantitatif untuk menentukan kelompok risiko yang dapat ditoleransi serta yang tidak dapat ditoleransi. Risiko sedang merupakan batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh Perusahaan. Namun diperlukan usaha untuk menurunkan kemungkinan munculnya penyebab kegagalan proses, atau menurunkan potensi dampak kegagalan proses. Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan [antara 3 – 6 bulan]. Pengendalian / mitigasi risiko oleh *Risk Owner* / Kepala Unit Kerja
- *Key Risk Indicators*
  Key Risk Indicator adalah indicator risiko utama Perusahaan yang dipilih dan dipantau sebagai pemberitahuan dini terhadap adanya perubahan yang dapat menimbulkan risiko bagi Perusahaan.

5. *Monitoring and Evaluation*
6. *Monitoring and review are conducted on a regular basis in the current fiscal year, at least quarterly, and at any time if necessary. Self-assessment, internal or external audits, Forum Group Discussion/Executive Briefing, and/or feedback from employees and stakeholders are used to carry out the monitoring and review mechanism.*
7. *Documentation and reporting*
8. *The mechanism of recording and reporting processes for risk identification, analysis, and evaluation is carried out on a regular basis using a web-based application accessible via manrisk. services tirta 2.co.id.*

Risk Register and Company's Strategic Risk Profile

Risk Appetite, Risk Tolerance, and Key Risk Indicators

- *Appetite for Risk*
  Because it requires immediate action, the company only manages strategic and high risks. The spread of potential risks allows loss and destruction of the company, the potential impact of which weakens the organization. The risk can be passed on to a third party.
- *Tolerance for Risk*
  The company determines risk tolerance, which is a quantitative limit that determines which risk groups can and cannot be tolerated. The risk tolerance limit that the Company can accept is moderate risk. However, efforts must be made to reduce the likelihood of the emergence of process failure causes or the potential impact of process failure. Treatment with an action plan is required [between 3 and 6 months]. Risk management/mitigation is the responsibility of the Risk Owner/Head of Work Units.
- *Important Risk Indicators Key*
  Risk Indicators are the Company's primary risk indicators, which are chosen and monitored to provide early warning of any changes that may pose a risk to the Company.

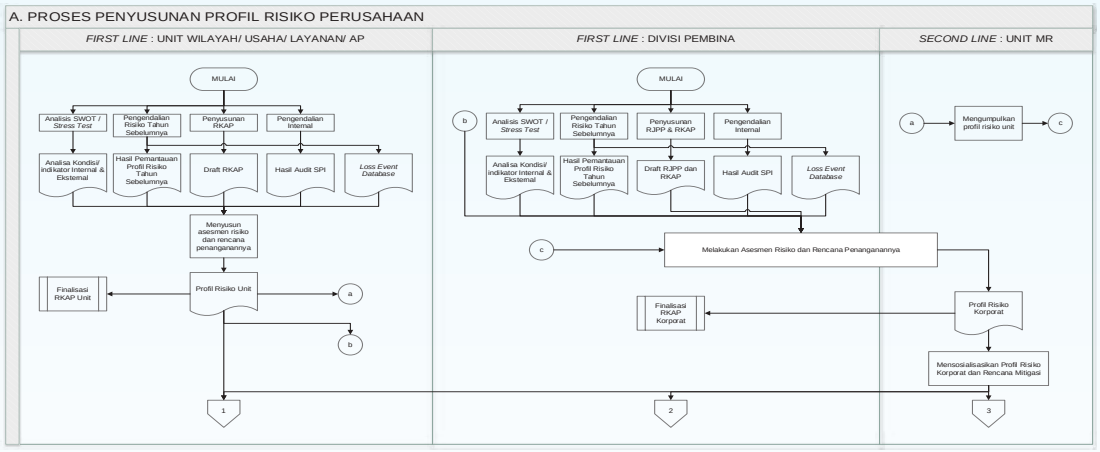


1 LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

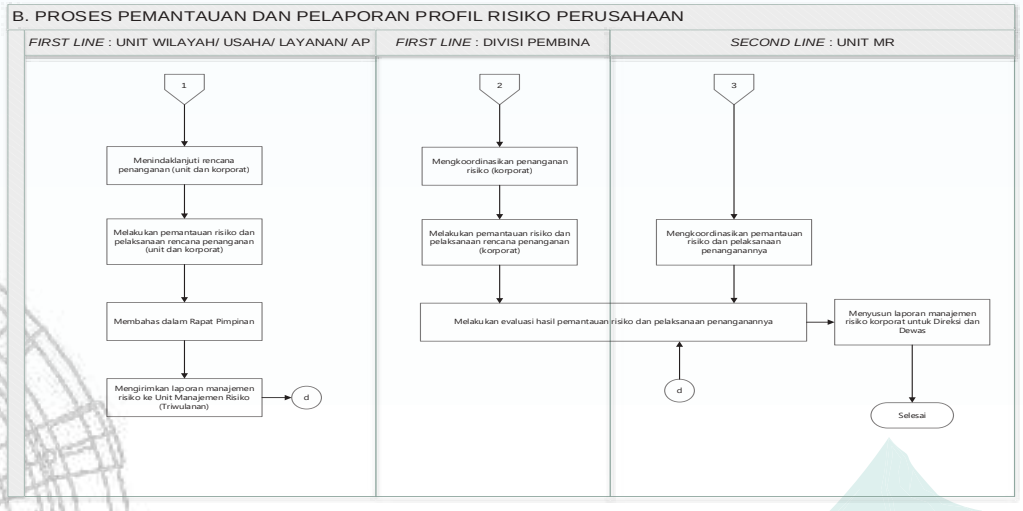
Laporan Pemantauan Risiko disusun untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan kondisi risiko Perusahaan pada periode tertentu. Dalam Laporan Pemantauan Risiko ini, periode yang dilaporkan adalah tahunan yaitu untuk tahun 2023 (per 31 Desember 2023).

1. Profil Risiko

   Profil risiko Perusahaan memuat informasi antara lain peristiwa risiko yang terjadi karena penyebab risiko yang telah atau hampir terjadi dan yang belum terjadi, realisasi kontrol yang telah dilakukan dan penilaian efektivitasnya, serta dampak risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja Perusahaan. Terdapat 26 unit kerja di Perusahaan, sehingga diperlukan Prioritisasi Risiko yang selanjutnya akan ditentukan menjadi profil risiko utama Perusahaan.



Gambar 1 Proses Penyusunan Profil Risiko Perusahaan



Gambar 2 Proses Pemantauan Pelaporan Profil Risiko Perusahaan

Pada periode tahun 2023, Perusahaan memiliki 15 Peristiwa Risiko Utama yang muncul karena untuk mencapai sasaran:

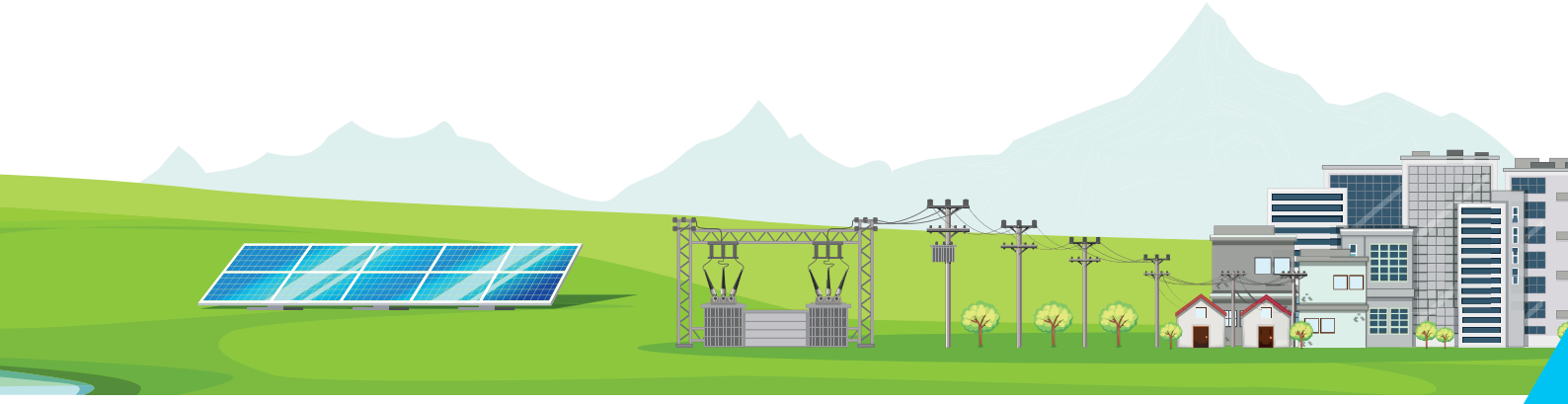
a. Pendapatan air baku (BJPSDA) tahun 2023 Rp 290,72 Miliar
b. Pendapatan usaha listrik tahun 2023 sebesar Rp 499,43 Miliar
c. Pemberian air irigasi 4.881,51 juta M^3
d. Piutang usaha tahun 2023 Rp 165,5 Miliar
e. Pendapatan SPAM Kota Baru Parahyangan tahun 2023 Rp 3,5 Miliar
f. Optimalisasi Pengusahaan Lahan (Target pendapatan 2023 Rp 62,5 Miliar)
g. Menjaga Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas Air di Waduk dan Wilayah Sungai
h. Rasio kecukupan dana (Dana Pensiun)
i. Terealisasinya Pembayaran BJPSDA PLTA Djuanda Semester II Tahun 2022 dan Seterusnya

Tabel 1 Profil Risiko Utama Perusahaan Tahun 2023
Table 1 Company's Key Risk Profile in 2023

PENDAPATAN AIR BAKU (BJPSDA) TAHUN 2023 RP 290,72 MILIAR			
R1	**Peristiwa Resiko:** BJPSDA menjadi PNBP tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh perusahaan		**Kategori Risiko:** Resiko Strategis
	Penyebab belum terjadi: BJPSDA menjadi PNBP Dampak: Rp... Target pendapatan air baku (BJPSDA) tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: 1. Rapat dengan KBUMN pada tanggal 3 Februari 2023 dan dengan KPUPR pada tanggal 8 Februari 2023 2. Menghadiri sosialisasi PP No. 21 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di KPUPR 3. Melakukan koordinasi bersama KBUMN dan PJT I pada tanggal 23 Juni 2023	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif sebagian 2. Cukup dan Efektif sebagian 3. Cukup dan Efektif sebagian
R2	**Peristiwa Resiko:** Pelanggan tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA)		**Kategori Risiko:** Risiko Strategis
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: Proses penerbitan SIPSDA relatif lama Dampak Rp... Target pendapatan air baku (BJPSDA) tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: 1. Melakukan monev (invetarisasi) pada RKT I - III kepada Unit Wilayah terkait mengenai pemanfaatan air baku yang ijinnya akan segera habis masa berlakunya 2. FGD Implementasi BJPSDA dalam Perijinan dan Pemanfaatan SDA antara PJT II dengan Perum Perhutani, Mitra Perum Perhutani, Asosiasi Air Indonesia (ASPADIN), pada tanggal 9 Agustus 2023 berlokasi di Bandung 3. Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pengajuan pendapatan BJPSDA	Penilaian: 1. Cukup dan efektif sebagian 2. Cukup dan efektif sebagian 3. Cukup dan efektif sebagian
R3	**Peristiwa Risiko:** Produksi air baku dibawah target		**Kategori Risiko:** Risiko Operasional
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: Pelanggan memanfaatkan air baku dibawah volume minimum Dampak: Rp..... Target pendapatan air baku (BJPSDA) tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: Melakukan monev ke unit wilayah I, II, III dan IV untuk pengecekan Water Meter	Penilaian: Cukup dan Efektif sebagian



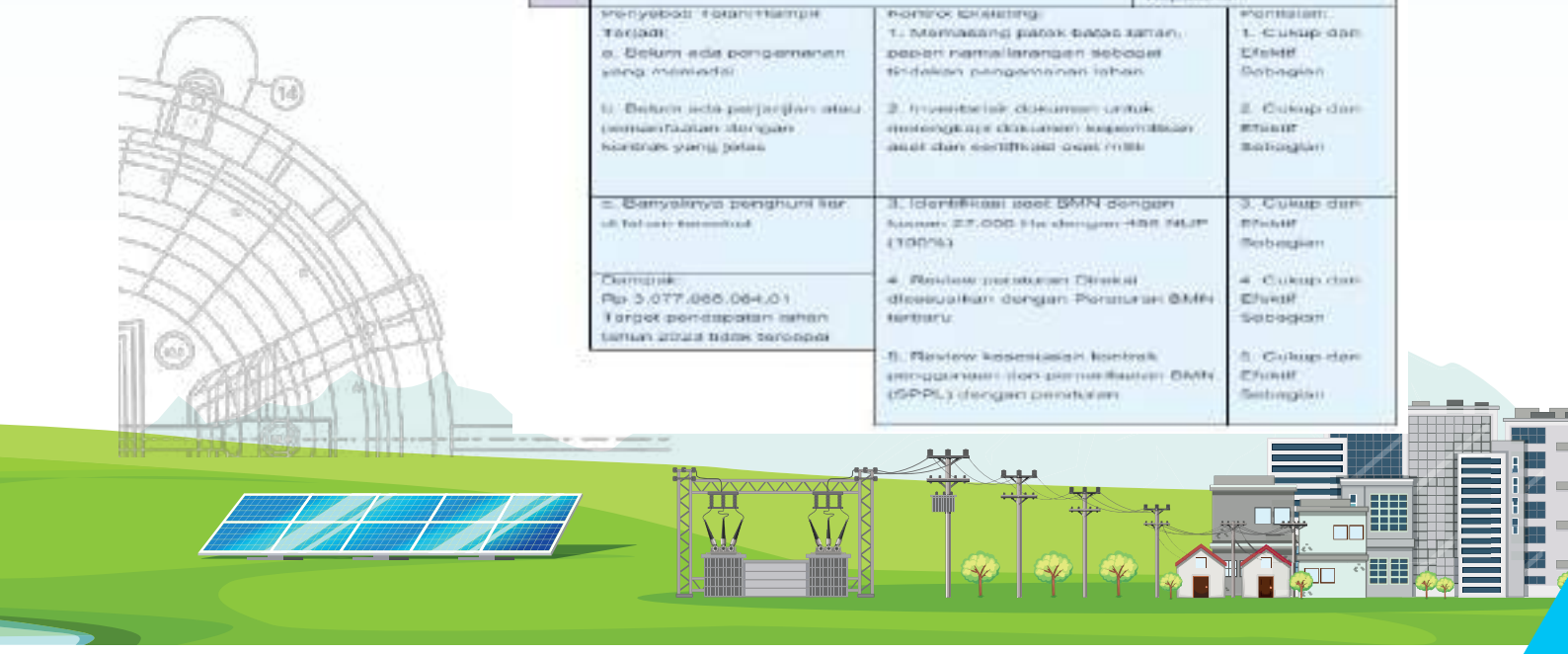
PENDAPATAN USAHA LISTRIK TAHUN 2023 SEBESAR RP 499,43 MILLIAR			
R4	**Peristiwa Resiko:** Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda lebih rendah dari Batas Operasi Normal (BON)		**Kategori Risiko:** Risiko Operasional
	Penyebab belum terjadi: a. TMA Waduk Ir. H. Djuanda dipengaruhi pola operasi waduk Saguling dan Cirata b. Iklim dan cuaca Dampak: Rp... Target Pendapatan Usaha Listrik tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: 1. Menyusun Rencana Operasi Bendungan Kaskade Citarum Tahun 2023 2. Melakukan evaluasi dan menyusun rencana operasi bulanan Waduk Kaskade Citarum (Saguling, Citrarum, Jatiluhur) dengan memperhatikan kebutuhan air baku dan air irigasi pada Rapat Tim Koordinasi Pengelolaan Bendungan Kaskade Citarum (TKPBKC) antara BBWS Citarum, PJT II, PT. PLN Nusantara Power Bulan Januari s.d Agustus 2023 3. Perencanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif sebagian 2. Cukup dan Efektif sebagian 3. Cukup dan Efektif sebagian
R5	**Peristiwa Resiko:** Kerusakan unit produksi PLTA Ir. H. Djuanda		**Kategori Risiko:** Risiko Operasional
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: 1. Umur Teknis 2. Faktor Lingkungan (H2S) dapat menyebabkan korosif Dampak Rp... Target pendapatan usaha listrik tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: 1. Pemeliharaan rutin sesuai prosedur pemeliharaan peralatan listrik (Generator, turbin, panel AVR, trafo utama, alat bantu penting) pada RKT I - III 2. Rehabilitasi sistem pendingin unit PLTA (unit 1 - 6) 3. Penggantian sistem Hydraulic Governor (unit 2 dan unit 3) 4. Penggantian Sistem Kontrol utama (unit 1, 4 dan 5) 5. Rehabilitasi alat pemadam kebakaran trafo utama 3 unit (Unit 4, 5, 6) 6. Rehabilitasi sistem power supply unit PLTA (unit 1 - 6)	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif sebagian 2. Cukup dan Efektif sebagian 3. Cukup dan Efektif sebagian 4. Cukup dan Efektif sebagian 5. Cukup dan Efektif sebagian 6. Cukup dan Efektif sebagian
R6	**Peristiwa Risiko:** Kerusakan unit distribusi		**Kategori Risiko:** Risikom Operasional
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: 1. Umur Teknis 2. Faktor Lingkungan (H2S) dapat menyebabkan korosif Dampak Rp... Target pendapatan usaha listrik tahun 2023	Kontrol Eksisting: 1. Pemeliharaan rutin sesuai prosedur pemeliharaan peralatan Listrik 2. Pemeliharaan rutin unit distribusi 3. Penggantian Sparepart 4. Penertiban KJA	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif sebagian 2. Cukup dan Efektif sebagian 3. Cukup dan Efektif sebagian 4. Cukup dan Efektif sebagian
R7	**Peristiwa Risiko:** Gangguan Listrik Industri di bawah perjanjian jual-beli		**Kategori Risiko:** Risiko Strategis
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: Pembedaan tarif listrik PLN dan Non-PLN Dampak: Rp..... Target pendapatan usaha listrik tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: 1. Optimalisasi produk listrik disesuaikan dengan kebutuhan air irigasi 2. Penyesuaian tarif listrik 3. Sistem take or pay (80% x daya terpasang x tarif)	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif sebagian 2. Cukup dan Efektif sebagian 3. Cukup dan Efektif sebagian



PEMBARIAN AIR IRIGASI 4.881, 51 JUTA M³			
R8	**Peristiwa Resiko:** Gangguan Penyaluran Air Irigasi Kepada Para Petani		**Kategori Risiko:** Risiko Operasional
	Penyebab belum terjadi: a. Beban Operasi dan pemeliharaan lebih besar daripada pendapatan usaha BJPSDA b. Kerusakan saluran induk c. Kerusakan pintu bendung dan pintu air d. Kerusakan pompa air Tarum Barat, PETT e. Sedimentasi lumpur pada saluran induk Penyebab Belum Terjadi: f. Kondisi struktural bendungan Ir. H. Djuanda g. Realisasi tanam tidak sesuai dengan SK Gurbernur Jawa Barat Dampak: Rp... Target pemberian air irigasi tahun 2023 tercapai	Kontrol Eksisting: 1. Menyusun skala prioritas pemeliharaan SDA berdasarkan angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan (AKNOP) dilaksanakan 1 kali di awal tahun 2. Menyusun Rencana Tata Tanam Global (RTTG) di DI. Jatiluhur Tahun 2022/2023 dilaksanan 1kali diawal masa tanam (bulan juli setiap tahun) 3. Menyusun Rencana Pokok Penyediaan dan penggunaan air (RPPPA) tahun 2022/2023 dilaksanakan 1 kali diawal masa tanam (bulan September setiap tahun) 4. Melakukan evaluasi tanam dan pemberian air dalam Rapat Tim Koordinasi Operasi Sumber Daya Air (TKOSDA) pada bulan Januari - Agustus Minggu ke 22023 (per 2 minggu) dimana hasilnya dituangkan dalam risalah rapat TKOSDA 5. Melakukan monitoring dan evaluasi operasi SDA & SDL pada RKT I - III2023 6. Melaksanakan Kalibrasi alat ukur/bangunan air pada RKT I - III 7. Melaksanakan Operasi dan Pemeliharaan peralatan hidrometri (AWLR/ARR/WQS/AWS) pada RKT I - III 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sistem telemetri hidrometri pada RKT I - III 9. Melaksanakan pengembangan aplikasi SISDA pada RKT I & III	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif sebagian 2. Cukup dan Efektif sebagian 3. Cukup dan Efektif sebagian 4. Cukup dan Efektif sebagian 5. Cukup dan Efektif sebagian 6. Cukup dan Efektif sebagian 7. Cukup dan Efektif sebagian 8. Cukup dan Efektif sebagian 9. Cukup dan Efektif sebagian

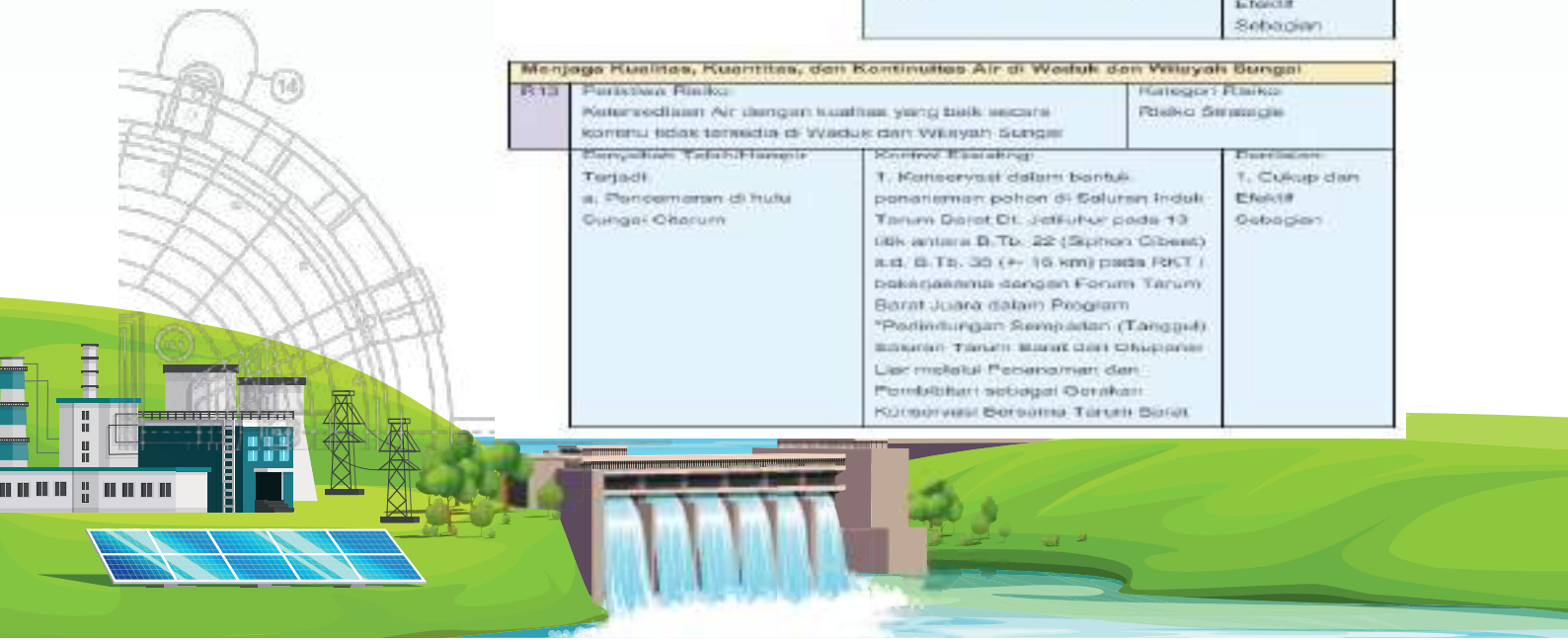


Piutang usaha tahun 2023 Rp 165,5 Miliar			
R9	Peristiwa Risiko: Piutang Macet		Kategori Risiko: Risiko Keuangan
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: a. Under performing PT SHS, PDAM Kabupaten & Kota b. Pelanggan terlambat membayar kewajiban	Kontrol Eksisting: 1. Dilakukan rapat koordinasi antara PT. SHS dengan PJT II membahas pembayaran piutang PT. SHS 2. Melakukan koordinasi dengan PT Sang Hyang Seri dengan hasil mediasi dari Kementerian BUMN 3. Reschedule terkait pembayaran piutang PT. Sang Hyang Seri	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif Sebagian 2. Cukup dan Efektif Sebagian 3. Cukup dan Efektif Sebagian
	Dampak: Rp 128.333.087.924,00 Nilai Piutang Macet sampai dengan November 2023	4. Penagihan secara intensif	4. Cukup dan Efektif Sebagian
Pendapatan SPAM Kota Baru Parahyangan tahun 2023 Rp 3,5 Miliar			
R10	Peristiwa Risiko: Keterlambatan produksi SPAM KBP		Kategori Risiko: Risiko Operasional
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: a. Keterlambatan penyelesaian proyek WTP KBP	Kontrol Eksisting: 1. Melaksanakan kegiatan proyek sesuai dengan target waktu yang ditentukan	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif Sebagian
	b. Proses koordinasi dengan Indonesia Power sebagai pengelola wilayah Saguling tidak membuahkan hasil yang mendukung penyelesaian SPAM KBP	2. Melakukan pengawasan saat dibangun WTP	2. Cukup dan Efektif Sebagian
	Dampak: Rp 3.544.725.240,00 Target Pendapatan SPAM KBP tidak tercapai	3. Melakukan koordinasi melalui pertemuan dengan Indonesia Power, saat ini sudah mengajukan pertemuan untuk pembahasan bersama.	3. Cukup dan Efektif sebagian
		4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada PT PLN IP tentang rencana pembangunan intake dengan disebutkannya SIPSDA	4. Cukup dan Efektif Sebagian
Optimalisasi Penguasahaan Lahan (Target pendapatan 2023 Rp 82,5 Miliar)			
R11	Peristiwa Risiko: Penyerobotan lahan		Kategori Risiko: Risiko Hukum dan Kepatuhan
	Penyebab Telah/Hampir Terjadi: a. Belum ada pengamanan yang memadai b. Belum ada perjanjian atau kesepakatan dengan kontrak yang jelas	Kontrol Eksisting: 1. Memasang patok batas lahan, papan nama/larangan sebagai tindakan pengamanan lahan 2. Inventarisir dokumen untuk melengkapi dokumen kepemilikan aset dan sertifikat aset milik	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif Sebagian 2. Cukup dan Efektif Sebagian
	c. Banyaknya penghuni liar di lahan tersebut	3. Identifikasi aset BMN dengan luasan 27.000 Ha dengan 488 NUP (100%)	3. Cukup dan Efektif Sebagian
	Dampak: Rp 3.077.066.064,01 Target pendapatan lahan tahun 2023 tidak tercapai	4. Review perjanjian Direksi disesuaikan dengan Peraturan BMN terbaru 5. Review kesesuaian kontrak penggunaan dan pemanfaatan BMN (SPPL) dengan penduduk	4. Cukup dan Efektif Sebagian 5. Cukup dan Efektif Sebagian



	6. Membuat laporan ke BBWS dan Kemen PUPR Pusat terkait kasus penggunaan barang secara periodik (monthly) 7. Pemasangan patok batas, papan nama/rambu dan pengawasan aset milik 8. Membantu menyiapkan dokumen untuk program sertifikasi BMN dan BBWS 9. Identifikasi aset milik dengan luasan 940 Ha yang tersebar atas 157 bidang (100%) 10. Melakukan optimalisasi terhadap 2 aset yang sudah bersertifikasi di Bidik Pintar Kerawang, Kp. Bongas (50%) 11. Upaya penerbitan aset yang bermasalah hukum	5. Cukup dan Efektif Sebagian 7. Cukup dan Efektif Sebagian 8. Cukup dan efektif Sebagian 9. Cukup dan Efektif Sebagian 10. Cukup dan Efektif Sebagian 11. Cukup dan efektif Sebagian	
R12	Peristiwa Risiko: Pemanfaatan lahan tanpa ada perikatan jasa lahan	Kategori Risiko: Risiko Operasional	
	Penyebab Belum Terjadi: a. Berkurangnya pelanggan yang menyewa lahan b. Tarif sewa lahan yang mahal Dampak: Rp 3.077.086.084,01 Target pendapatan lahan tahun 2023 tidak tercapai	Kontrol Existing: 1. Memasang patok batas lahan sebagai tindakan pengamanan lahan 2. Melakukan koordinasi dengan Pemda untuk penertiban lahan yang dipergunakan tanpa perikatan 3. Pengawasan dan pemberitahuan kepada pemanfaat lahan yang tidak memiliki perikatan 4. Bekerjasama dengan Pemda dan APH untuk penertiban	Penilaian: 1. Cukup dan efektif Sebagian 2. Cukup dan Efektif Sebagian 3. Cukup dan efektif Sebagian 4. Cukup dan Efektif sebagian
	5. Mengurangi potensi transaksional antara petugas perusahaan dengan pelanggan 6. Dalam perjanjian harus dilakukan mitigasi risiko transaksional	5. Cukup dan Efektif Sebagian 6. Cukup dan Efektif Sebagian	
	7. Melakukan review secara periodik penggunaan lahan dengan dilengkapi dokumentasi penggunaan lahan sebelum digunakan dan kondisi saat ini 8. Mereview Pros. Pengamanan penggunaan dan pemanfaatan lahan 9. Optimalisasi aplikasi SIMPEL untuk pengelolaan pelanggan	7. Cukup dan Efektif Sebagian 8. Cukup dan Efektif Sebagian 9. Cukup dan Efektif Sebagian	
	10. Menerapkan cashless payment	10. Cukup dan Efektif Sebagian	

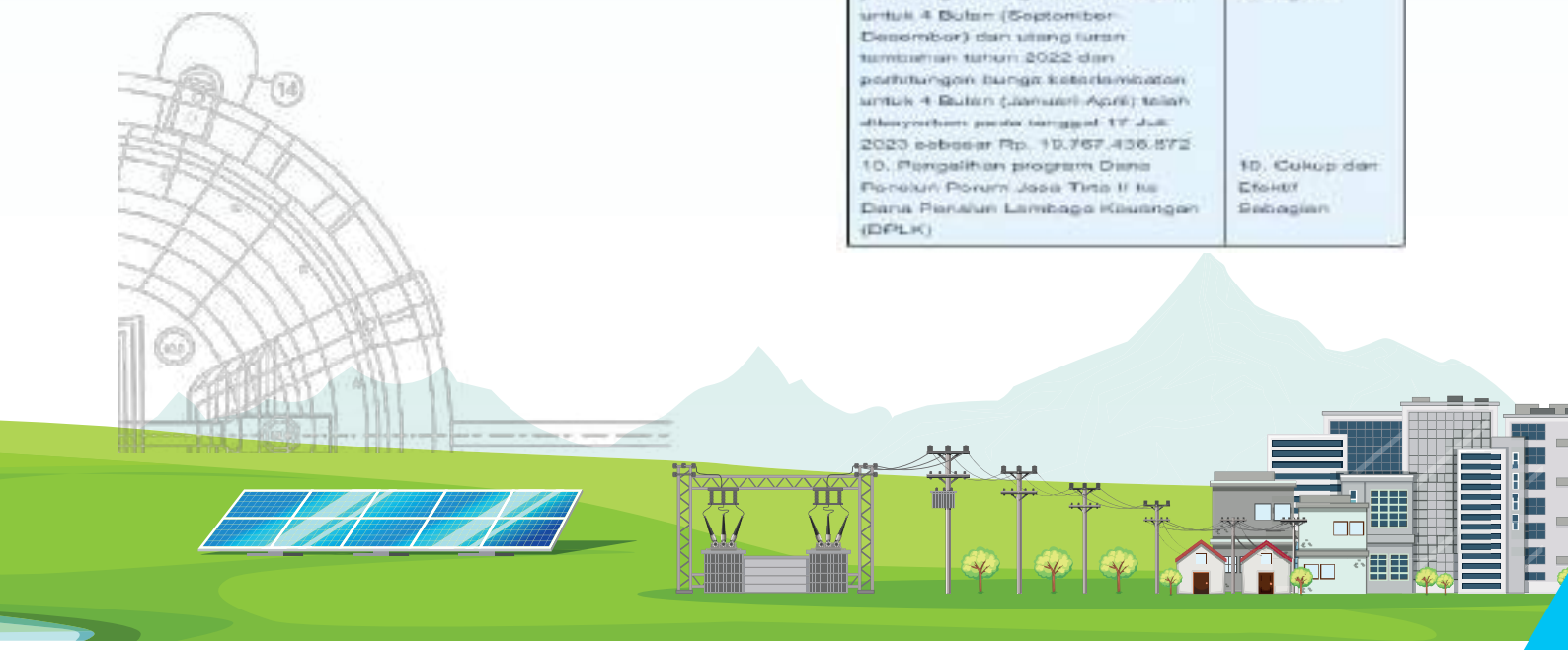
Menjaga Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas Air di Waduk dan Wilayah Sungai			
R13	Peristiwa Risiko: Ketersediaan Air dengan kualitas yang baik secara kontinu tidak tersedia di Waduk dan Wilayah Sungai	Kategori Risiko: Risiko Strategis	
	Penyebab Telah/Harapan Terjadi: a. Pencemaran di hulu Sungai Citarum	Kontrol Existing: 1. Konservasi dalam bentuk penanaman pohon di Saluran Induk Tarum Barat DI. Jatiluhur pada 13 titik antara B.Tb. 22 (Siphon Cibeet) s.d. B.Tb. 35 (+- 16 km) pada RKT I bekerjasama dengan Forum Tarum Barat Juara dalam Program "Perlindungan Sempadan (Tanggul) Saluran Tarum Barat dan Ciherang Lor melalui Penanaman dan Pemeliharaan sebagai Gerakan Konservasi Bersama Tarum Barat	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif Sebagian



	Jurnal" dengan jenis Pohon Pucuk Merah, berjumlah 1.000 btng.	
b. Biaya pemeliharaan sarana prasarana meningkat Penyebab Belum Terjadi: a. Kurangnya debit air di Waduk Jatiluhur b. Waduk Jatiluhur mengalami pendangkalan	2. Melakukan evaluasi terhadap pemeliharaan kualitas air di SPAM di WS Citarum Bulan Januari - Agustus 2023 3. Menghitung indeks kualitas air (IKA) dan melakukan pelaporan kepada stakeholder bulan Januari - Agustus 2023	2. Cukup dan Efektif Sebagian 3. Cukup dan Efektif Sebagian

Rasio kecukupan dana (Dana Pensiun)		
R14	Peristiwa Risiko: Defisit pendanaan dana pensiun	Kategori Risiko: Risiko Keuangan
Penyebab Terjadinya Peristiwa Risiko: a. Penghasilan investasi di bawah expected return b. Menurunnya harga saham berharga (saham dan obligasi) yang diinvestasikan Dampak: Rp 26.050.000.000.00 Pengalihan program ke DPLK menimbulkan penambahan biaya administrasi dan umum	Kontrol Existing: 1. Menilai kecukupan pendanaan menggunakan jasa konsultan aktuaria 2. Menerima kewajiban iuran tambahan oleh Pendiri kepada Dana Pensiun sesuai ketentuan keuangan Perusahaan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap instrumen investasi yang kondisinya mengalami penurunan nilai wajar 4. Melakukan uji tuntas evaluasi Tingkat Kesehatan dan Pengelolaan Dana Pensiun di lingkungan BUMN sebagai bagian penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif Sebagian 2. Cukup dan Tidak Efektif 3. Cukup dan Efektif Sebagian 4. Cukup dan Efektif Sebagian

5. Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengelolaan Aset Investasi Dana Pensiun Jasa Tirta II antara PT. BPUI dan PJT II	5. Cukup dan Efektif Sebagian
6. Meningkatkan kinerja laba bersih PT. Pilar Jati Persada selaku entitas untuk memberikan dividen kepada Dana Pensiun selaku pemilik saham 7. Penempatan dana untuk investasi pada instrumen investasi yang memiliki prospek return yang lebih baik 8. Mengevaluasi kinerja manajer investasi eksisting dan melakukan due diligent fit and proper test terhadap manajer investasi baru yang profesional dan kompeten dalam mengelola investasi dana pensiun 9. Pendanaan utang iuran tambahan tahun 2021 dan perhitungan bunga kelambatan untuk 4 Bulan (September-Desember) dan utang iuran tambahan tahun 2022 dan perhitungan bunga kelambatan untuk 4 Bulan (Januari-April) telah dibayarkan pada tanggal 17 Juli 2023 sebesar Rp. 10.767.436.872 10. Pengalihan program Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	6. Cukup dan Efektif Sebagian 7. Cukup dan Efektif Sebagian 8. Cukup dan Efektif Sebagian 9. Cukup dan Efektif Sebagian 10. Cukup dan Efektif Sebagian



Terealisasinya Pembayaran BJPSDA PLTA Djuanda Semester II Tahun 2022 dan Seterusnya			
RKB	Peristiwa Risiko: Terjadinya Keterlambatan Pembayaran BJPSDA PLTA Djuanda		Kategori Risiko: Risiko Keuangan
	Penyebab: Telah/Harapan Terjadi Adanya perubahan terkait mekanisme pembayaran di internal PT PLN (Persero) yang semula dilakukan secara manual untuk sekarang menggunakan Aplikasi Vendor Invoicing Portal (VIP)	Kontrol Eksisting: 1. Telah dilaksanakannya Berita Acara Verifikasi Kegiatan Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (JPSDA) PLTA Ir. H. Djuanda Semester II Tahun 2022 antara Perum Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) Nomor PJT II - BA. 07/OPSDAL.DOP/06/2023 dan Nomor PT PLN 3366.BA/KIT.01/01/062023 tanggal 5 Juni 2023.	Penilaian: 1. Cukup dan Efektif Sebagian
	Dampak: Rp 4.086.161.967,84 Target pendapatan BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda tidak tercapai	2. Telah dilakukan sosialisasi oleh pihak PT PLN kepada semua Vendor pada tanggal 11 Juli 2023 mengenai pembayaran Tagihan Energi Listrik di PT PLN (Persero) UIP2B Jamali.	2. Cukup dan Efektif Sebagian
		3. Berkoordinasi kepada PT PLN (Persero) mengenai tindaklanjut proses mekanisme pembayaran BJPSDA PLTA Djuanda Semester II Tahun 2022.	3. Cukup dan Efektif Sebagian
		4. Sosialisasi lanjutan centralized payment pembangkit IPP di PLN UIP2B Jawa, Madura dan Bali	4. Cukup dan Efektif Sebagian

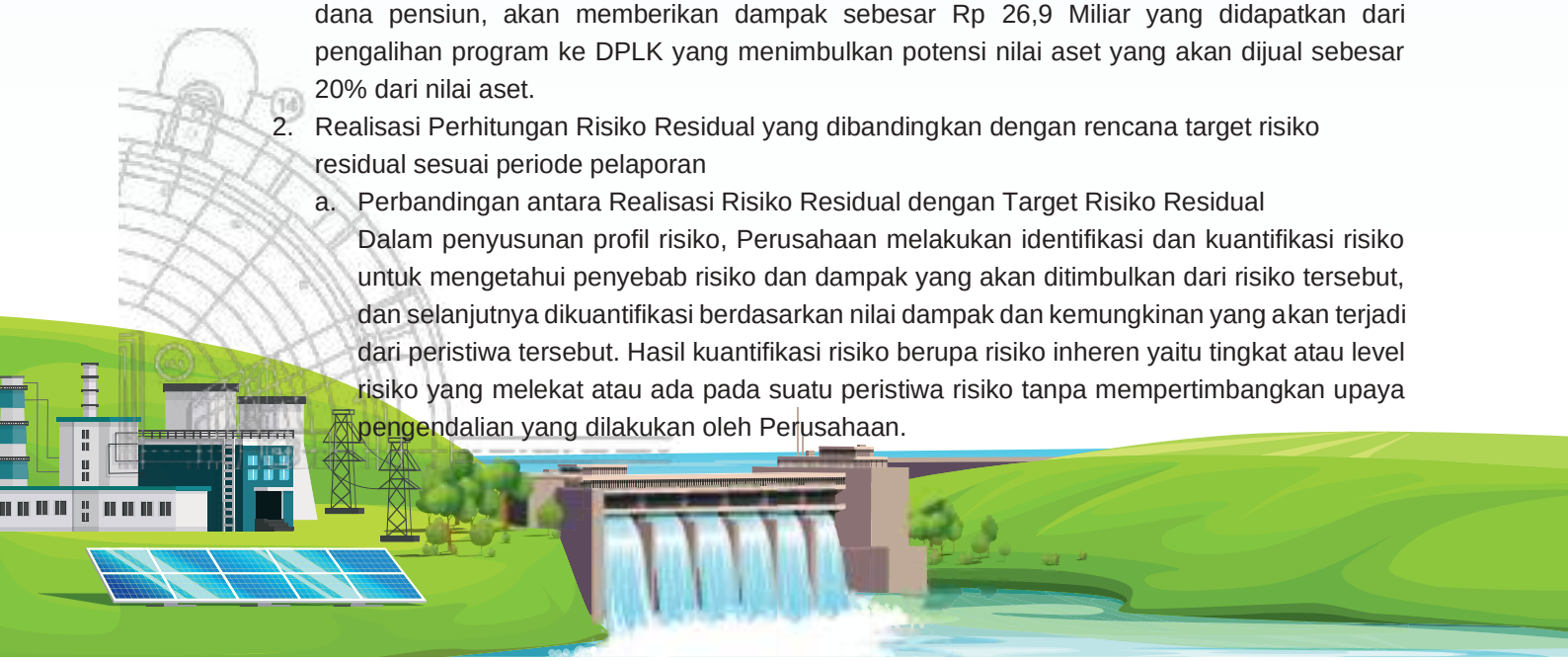
Dari 15 risiko utama yang dimiliki oleh Perusahaan hingga akhir tahun 2023, masih terdapat peristiwa risiko yang penyebab risikonya belum terjadi. Sedangkan untuk penilaian efektivitas atas kontrol eksisting risiko utama adalah sebesar 98,9% (87 dari 88 kontrol eksisting) kontrol eksisting telah dilaksanakan dengan "Cukup dan Efektif Sebagian" dalam mengontrol risiko utama perusahaan, sedangkan terdapat 1 (satu) kontrol eksisting yang mendapatkan penilaian "Cukup dan Tidak Efektif" untuk kontrol eksisting pemenuhan kewajiban iuran tambahan oleh Pendiri kepada Dana Pensiun sesuai kemampuan keuangan Perusahaan untuk peristiwa risiko "Defisit pendanaan dana pensiun".

Untuk peristiwa risiko piutang macet terdapat dampak kuantifikasi sebesar Rp 128,3 Miliar yaitu nilai piutang macet sampai dengan November 2023, untuk peristiwa keterlambatan produksi SPAM KBP berdampak kepada target pendapatan SPAM KBP yang tidak tercapai akan memberikan dampak sebesar Rp 3,5 Miliar. Sedangkan untuk peristiwa risiko defisit pendanaan dana pensiun, akan memberikan dampak sebesar Rp 26,9 Miliar yang didapatkan dari pengalihan program ke DPLK yang menimbulkan potensi nilai aset yang akan dijual sebesar 20% dari nilai aset.

2. Realisasi Perhitungan Risiko Residual yang dibandingkan dengan rencana target risiko residual sesuai periode pelaporan

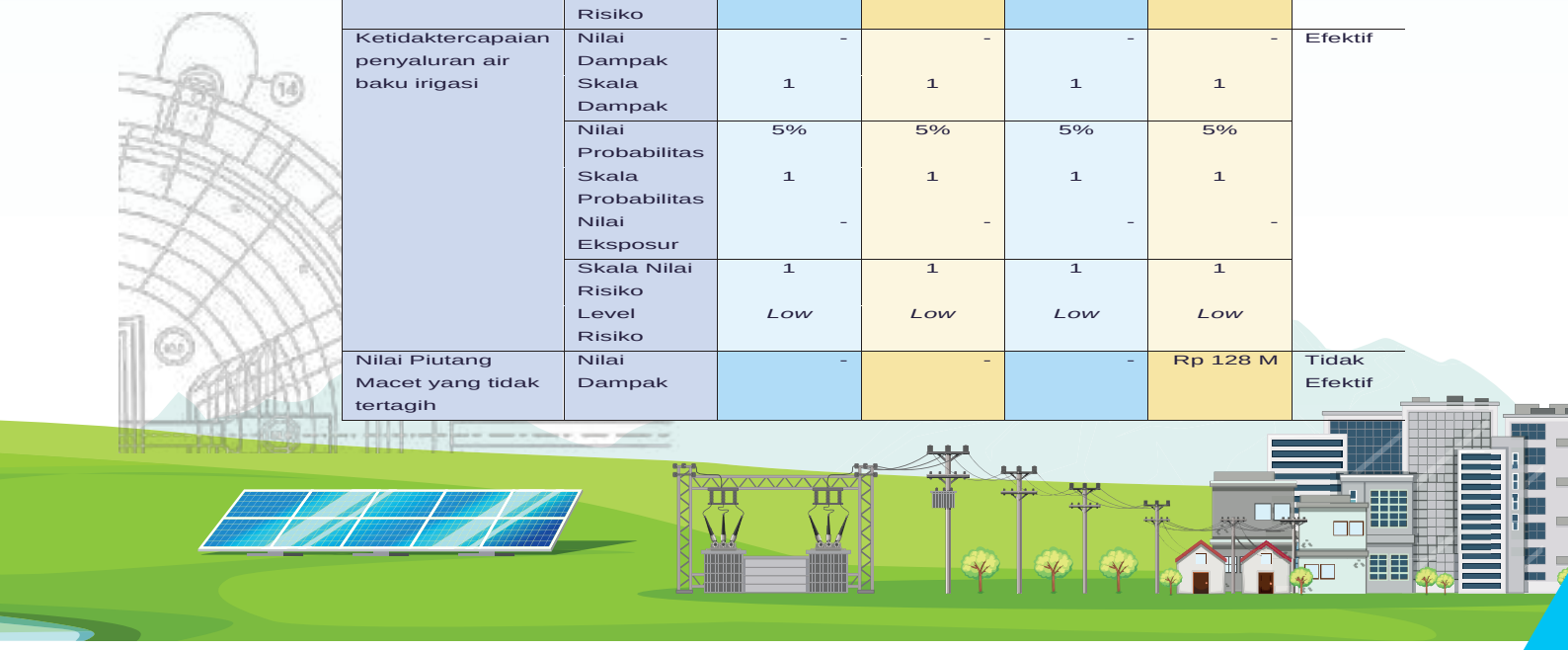
   a. Perbandingan antara Realisasi Risiko Residual dengan Target Risiko Residual

      Dalam penyusunan profil risiko, Perusahaan melakukan identifikasi dan kuantifikasi risiko untuk mengetahui penyebab risiko dan dampak yang akan ditimbulkan dari risiko tersebut, dan selanjutnya dikuantifikasi berdasarkan nilai dampak dan kemungkinan yang akan terjadi dari peristiwa tersebut. Hasil kuantifikasi risiko berupa risiko inheren yaitu tingkat atau level risiko yang melekat atau ada pada suatu peristiwa risiko tanpa mempertimbangkan upaya pengendalian yang dilakukan oleh Perusahaan.



Ketika upaya pengendalian telah dilakukan maka tingkat risiko tersebut akan berubah menjadi risiko residual atau level risiko yang tetap ada atau tersisa atau tidak dapat dihilangkan sepenuhnya meskipun upaya pengendalian telah dilakukan. Perusahaan memiliki level risiko residual target yang dijadikan sebagai acuan rencana hasil pengendalian risiko yang diharapkan pada akhir tahun dan disesuaikan dengan strategi pengendalian risiko Perusahaan. Target tersebut dijadikan acuan untuk melaksanakan pengendalian risiko di setiap unit kerja. Maka dari itu, untuk melihat bagaimana kesesuaian upaya pengendalian yang dilakukan dengan target level risiko yang diharapkan, dibuatlah tabel realisasi perbandingan risiko residual dengan rencana target risiko residual, sebagai berikut:

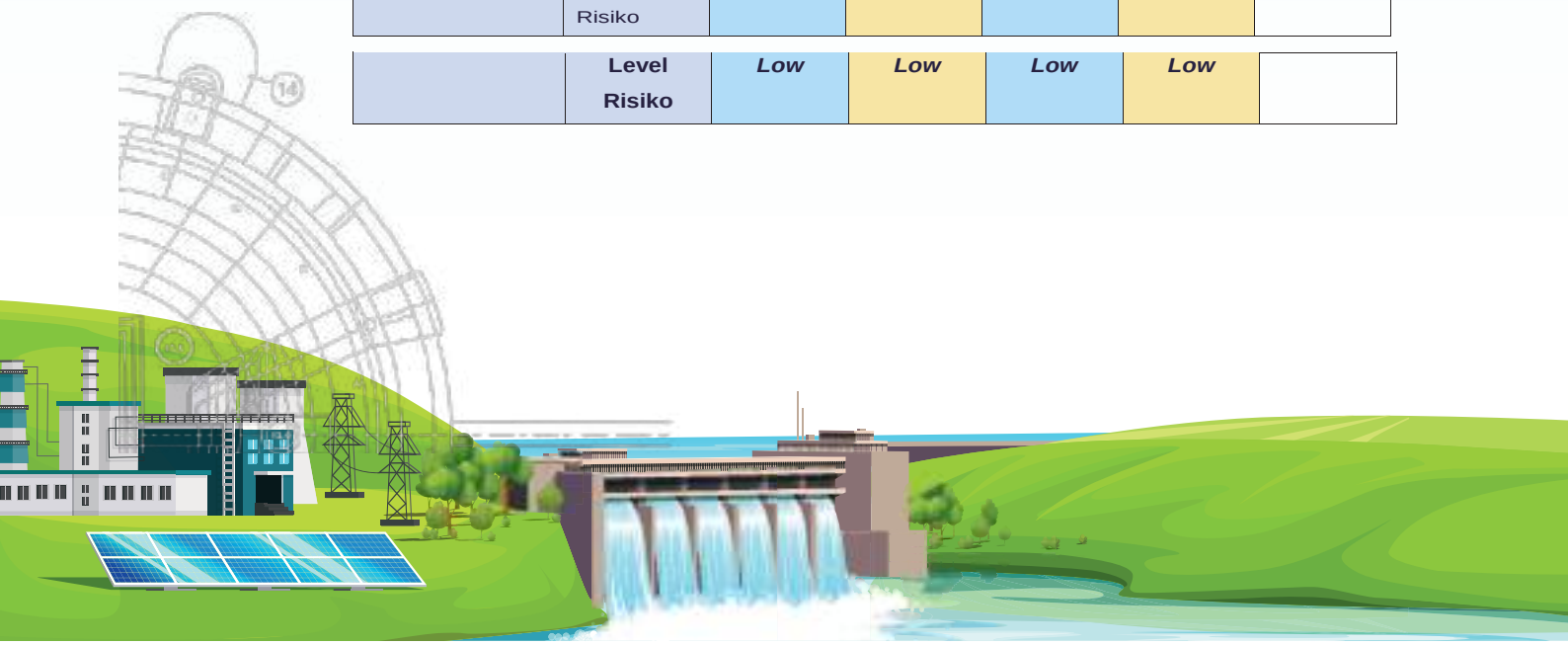
		Q1	Q2	Q3	Q4	Efektifitas Perlakuan Risiko
Ketidaktercapaian target pendapatan usaha air baku	Nilai Dampak	-	Rp 0.5 M	Rp 10.2 M	-	Efektif
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	30%	50%	70%	10%	
	Skala Probabilitas	**2**	**3**	**4**	**1**	
	Nilai Eksposur	-	Rp 0.2 M	Rp 7.1 M	-	
	Skala Nilai Risiko	2	3	4	1	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*Low*	
Ketidaktercapaian target pendapatan usaha listrik	Nilai Dampak	-	-	-	-	Efektif
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	10%	10%	10%	10%	
	Skala Probabilitas	1	1	1	1	
	Nilai Eksposur	-	-	-	-	
	Skala Nilai Risiko	1	1	1	1	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*Low*	
Ketidaktercapaian penyaluran air baku irigasi	Nilai Dampak	-	-	-	-	Efektif
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	5%	5%	5%	5%	
	Skala Probabilitas	1	1	1	1	
	Nilai Eksposur	-	-	-	-	
	Skala Nilai Risiko	1	1	1	1	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*Low*	
Nilai Piutang Macet yang tidak tertagih	Nilai Dampak	-	-	-	Rp 128 M	Tidak Efektif



Nilai Piutang Macet yang tidak tertagih	**Nilai Dampak**	**-**	**-**	**-**	**Rp 128 M**	**Tidak Efektif**
	Skala Dampak	1	1	1	5	
	Nilai Probabilitas	10%	10%	10%	100%	
	Skala Probabilitas	1	1	1	5	
	Nilai Eksposur	-	-	-	Rp 128 M	
	Skala Nilai Risiko	1	1	1	25	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*High*	

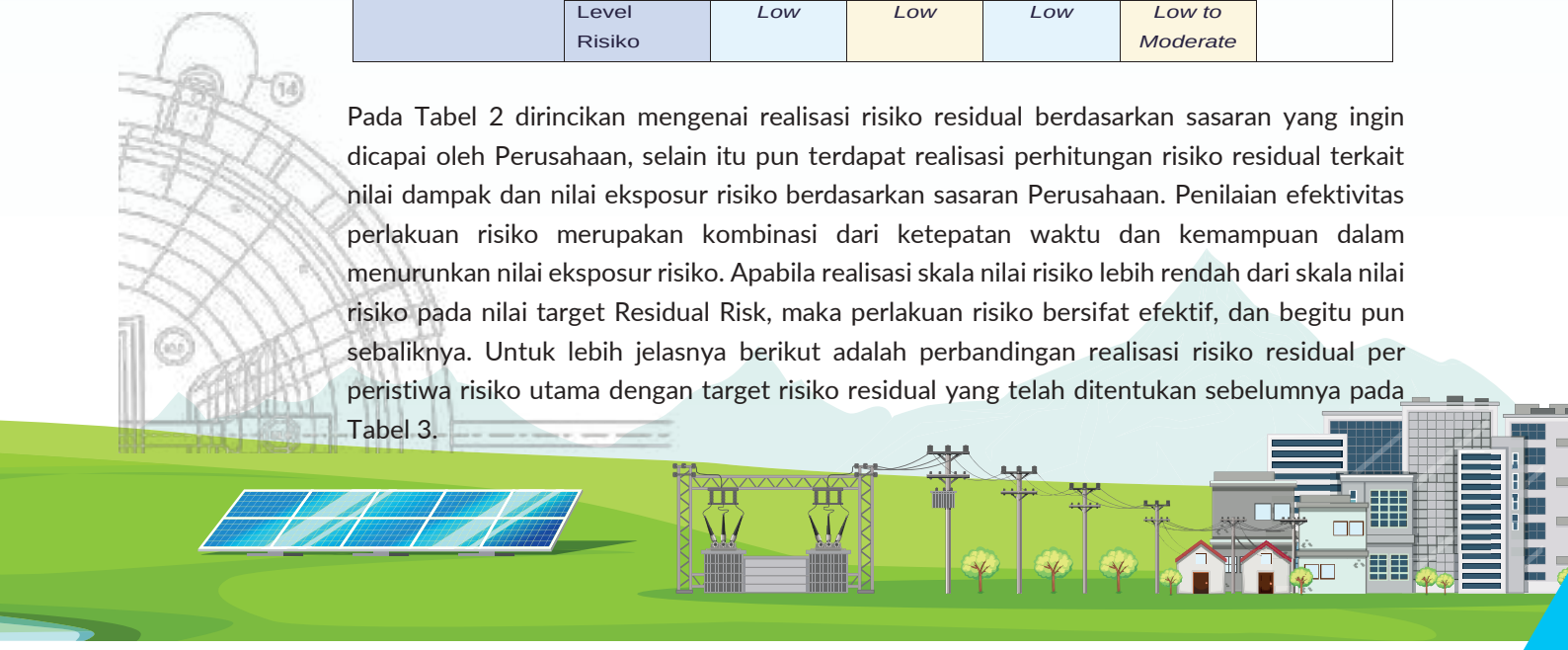
Ketidaktercapaian target pendapatan usaha SPAM KBP	**Nilai Dampak**	**-**	**Rp 1.2 M**	**Rp 2.4 M**	**Rp3.6 M**	**Tidak Efektif**
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	30%	50%	70%	100%	
	Skala Probabilitas	2	3	4	5	
	Nilai Eksposur	-	Rp 0.59 M	Rp 1.7 M	Rp 3.6 M	
	Skala Nilai Risiko	2	3	4	7	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*Low to Moderate*	

Ketidaktercapaian target pengusahaan lahan	**Nilai Dampak**	**-**	**-**	**-**	**Rp 6.2 M**	**Tidak Efektif**
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	10%	10%	30%	100%	
	Skala Probabilitas	1	1	2	5	
	Nilai Eksposur	-	-	-	Rp 6.2 M	
	Skala Nilai Risiko	1	1	2	3	
	Level Risiko	***Low***	***Low***	***Low***	***Low***	



Apabila air yang tersedia kualitasnya tidak baik atau Waduk Ir. H. Djuanda kering, maka akan mempengaruhi keseluruhan proses bisnis di Perum Jasa Tirta II terutama yang berada pada lokasi hilir Bendungan Ir. H. Djuanda	**Nilai Dampak**	-	-	-	-	**Efektif**
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	10%	10%	10%	10%	
	Skala Probabilitas	1	1	1	1	
	Nilai Eksposur	-	-	-	-	
	Skala Nilai Risiko	1	1	1	1	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*Low*	
luran yang harus dibayar oleh Pendiri kepada Dana Pensiun	**Nilai Dampak**	**Rp 141 M**	**Rp 141 M**	**Rp 141 M**	**Rp 26.9 M**	**Tidak Efektif**
	Skala Dampak	5	5	5	3	
	Nilai Probabilitas	90%	90%	90%	90%	
	Skala Probabilitas	3	3	3	3	
	Nilai Eksposur	Rp 126 M	Rp 126 M	Rp 126 M	Rp 24.2 M	
	Skala Nilai Risiko	23	23	23	13	
	Level Risiko	*High*	*High*	*High*	*Moderate*	
Ketidaktercapaian target pendapatan BJPSDA PLTA Ir. H. Djuanda	**Nilai Dampak**	-	-	-	**Rp 4.1 M**	**Efektif**
	Skala Dampak	1	1	1	1	
	Nilai Probabilitas	10%	10%	10%	100%	
	Skala Probabilitas	1	1	1	5	
	Nilai Eksposur	-	-	-	Rp 4.1 M	
	Skala Nilai Risiko	1	1	1	7	
	Level Risiko	*Low*	*Low*	*Low*	*Low to Moderate*	

Pada Tabel 2 dirincikan mengenai realisasi risiko residual berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan, selain itu pun terdapat realisasi perhitungan risiko residual terkait nilai dampak dan nilai eksposur risiko berdasarkan sasaran Perusahaan. Penilaian efektivitas perlakuan risiko merupakan kombinasi dari ketepatan waktu dan kemampuan dalam menurunkan nilai eksposur risiko. Apabila realisasi skala nilai risiko lebih rendah dari skala nilai risiko pada nilai target Residual Risk, maka perlakuan risiko bersifat efektif, dan begitu pun sebaliknya. Untuk lebih jelasnya berikut adalah perbandingan realisasi risiko residual per peristiwa risiko utama dengan target risiko residual yang telah ditentukan sebelumnya pada Tabel 3.



Tabel V. 1
Perbandingan realisasi risiko residual dengan target risiko residual tiap peristiwa risiko utama

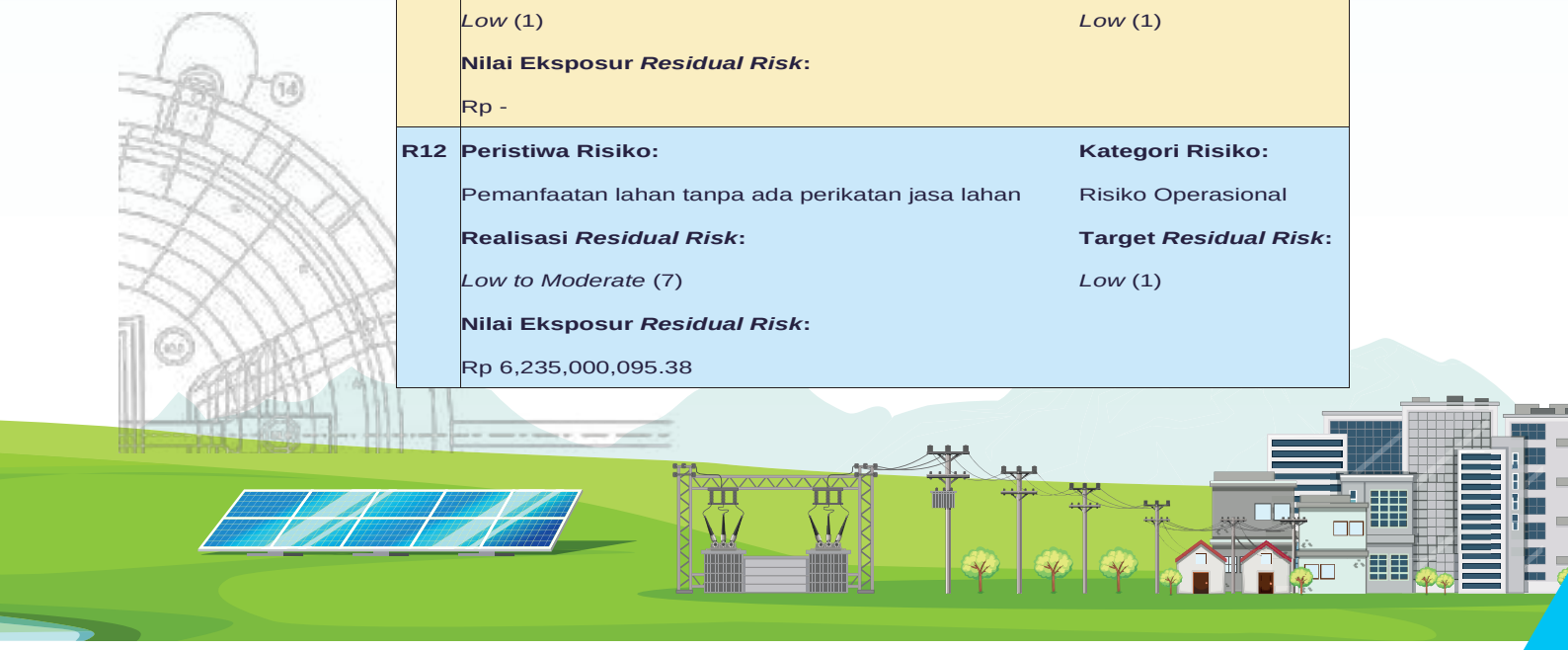
R1	**Peristiwa Risiko:** BJPSDA menjadi PNBP Tidak dapat langsung dimanfaatkan oleh Perusahaan	**Kategori Risiko:** Risiko Strategis
	Realisasi *Residual Risk*: *Low* (1) Nilai Eksposur *Residual Risk*: Rp –	**Target *Residual Risk*:** *Moderate* (15)
R2	**Peristiwa Risiko:** Pelanggan tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA)	**Kategori Risiko:** Risiko Strategis
	Realisasi *Residual Risk*: *Low* (1) Nilai Eksposur *Residual Risk*: Rp –	**Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
R3	**Peristiwa Risiko:** **Produksi air baku dibawah target**	**Kategori Risiko:** **Risiko Operasional**
	Realisasi *Residual Risk*: *Low* (1) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp -	**Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
R4	**Peristiwa Risiko:** Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda lebih rendah dari Batas Operasi Normal (BON)	**Kategori Risiko:** Risiko Operasional
	Realisasi *Residual Risk*: *Moderate* (12) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp 19,971,189,061.34	**Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
	Realisasi *Residual Risk*: ***Low* (1)** **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp -	**Target *Residual Risk*:** ***Low* (1)**
R6	**Peristiwa Risiko:** Kerusakan unit distribusi	**Kategori Risiko:** Risiko Operasional
	Realisasi *Residual Risk*: *Low* (1)	**Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
	Nilai Eksposur *Residual Risk*: Rp –	



R7	**Peristiwa Risiko:** **Penggunaan listrik industri di bawah perjanjian jual beli** **Realisasi *Residual Risk*:** *Low* (1) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp -	**Kategori Risiko:** **Risiko Strategis** **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
R8	**Peristiwa Risiko:** Gangguan Penyaluran Air Irigasi Kepada Para Petani **Realisasi *Residual Risk*:** *Low* (1) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp -	**Kategori Risiko:** Risiko Operasional **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)

R9	**Peristiwa Risiko:** **Piutang Macet** **Realisasi *Residual Risk*:** *High* (25) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp 128,333,087,924	**Kategori Risiko:** **Risiko Keuangan** **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
R10	**Peristiwa Risiko:** Keterlambatan produksi SPAM KBP **Realisasi *Residual Risk*:** *Low to Moderate* (7) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp 3,544,725,240	**Kategori Risiko:** Risiko Operasional **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)

R11	**Peristiwa Risiko:** **Penyerobotan lahan** **Realisasi *Residual Risk*:** *Low* (1) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp -	**Kategori Risiko:** **Risiko Hukum dan Kepatuhan** **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
R12	**Peristiwa Risiko:** Pemanfaatan lahan tanpa ada perikatan jasa lahan **Realisasi *Residual Risk*:** *Low to Moderate* (7) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp 6,235,000,095.38	**Kategori Risiko:** Risiko Operasional **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)



	Realisasi *Residual Risk*: ***Low to Moderate* (7)** **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp –	**Target *Residual Risk*:** ***Moderate* (15)**
R14	**Peristiwa Risiko:** Defisit pendanaan dana pensiun **Realisasi *Residual Risk*:** *Moderate* (13) **Nilai Eksposur *Residual Risk*:** Rp 24,178,500,000	**Kategori Risiko:** Risiko Keuangan **Target *Residual Risk*:** *Low* (1)
R15	**Peristiwa Risiko:** Terjadinya Keterlambatan Pembayaran BJPSDA PLTA Djuanda **Realisasi *Residual Risk*:** *Low to Moderate* (7)	**Kategori Risiko:** Risiko Keuangan **Target *Residual Risk*:** *Low to Moderate* (11)
	Nilai Eksposur *Residual Risk*:	

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa 20% (3 dari 15) realisasi risiko residual dari risiko utama Perusahaan sudah melebihi target risiko residual, dan 46,7% (7 dari 15) realisasi risiko residual dari risiko utama Perusahaan sesuai dengan target risiko residual, sedangkan 33,3% (5 dari 15) realisasi risiko residual dari risiko utama Perusahaan tidak memenuhi target risiko residual. 5 (lima) peristiwa risiko perusahaan yang belum memenuhi target risiko residual adalah :

R4. Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda lebih rendah dari Batas Operasi Normal (BON)
Realisasi level risiko residual pada akhir tahun 2023 mencapai Moderate, dimana untuk skala risiko berada di skala 12 dan belum mencapai target risiko residual yang berada di skala 1 dengan nilai eksposur risiko sebesar Rp 19,97 Miliar. Eksposur risiko ini merupakan akibat dari pengaruh iklim dan cuaca pada waduk Ir. H. Djuanda sehingga terjadi penurunan Tinggi Muka Air (TMA) yang pada Triwulan IV mencapai kurang dari level Batas Operasi Normal (BON) Bawah yaitu 87,5 mdpl. Perusahaan telah melakukan mitigasi dengan menggunakan Teknik Modifikasi Cuaca, namun hasil yang didapat belum mampu mengendalikan penurunan Tinggi Muka Air.

R9. Piutang Macet
Realisasi level risiko residual pada akhir tahun 2023 mencapai High, dimana untuk skala risiko berada di skala 25 dan belum mencapai target risiko residual yang berada di skala 1 dengan nilai eksposur risiko sebesar Rp 128,33 Miliar. Eksposur risiko ini merupakan akibat dari banyaknya pelanggan yang belum membayar piutang yang secara mayoritas pelanggan tersebut dalam kondisi pailit/ bangkrut, sudah tidak beroperasi, tersangkut kasus hukum dan tidak ada catatan data transaksi.

R10. Keterlambatan Produksi SPAM KBP
Realisasi level risiko residual pada akhir tahun 2023 berada pada skala risiko 7 dengan level risiko Low to Moderate dan eksposur risiko residual sebesar Rp 3,55 Miliar.



Nilai eksposur tersebut terjadi karena hingga tanggal 31 Desember 2023 SPAM KBP belum dapat beroperasi. Belum beroperasinya SPAM KBP karena UBP Saguling belum berkenan dengan lokasi intake dari SPAM KBP.

R12. Pemanfaatan lahan tanpa ada perikatan jasa lahan
Realisasi le
vel risiko residual pada akhir tahun 2023 mencapai Low to Moderate, dimana untuk skala risiko berada di skala 7 dan belum mencapai target risiko residual yang berada di skala 1 dengan nilai eksposur risiko sebesar Rp 6,24 Miliar.

R14. Defisit pendanaan dana pensiun
Realisasi level risiko residual pada akhir tahun 2023 mencapai Moderate, dimana untuk skala risiko berada di skala 13 dan belum mencapai target risiko residual yang berada di skala 1 dengan nilai eksposur risiko sebesar Rp 24,18 Miliar. nilai tersebut didapat dari pengalihan program ke DPLK yang menimbulkan penambahan beban administrasi dan umum untuk penyelesaian kewajiban Perusahaan kepada Dana Pensiun, penambahan iuran tambahan bulan Januari 2024, beban imbalan kerja (pesangon dan manfaat lainnya).

b. Perbandingan antara Realisasi Risiko Residual dengan Batasan Risiko dan Toleransi Risiko

Perusahaan telah merencanakan Residual Risk dengan batasan dan toleransi risiko yang mengacu kepada Prosedur Pengelolaan Peluang dan Risiko Perusahaan. Sesuai dengan dinamika perubahaan kebijakan dari pemilik modal, Perusahaan berupaya untuk menyesuaikan perhitungan nilai eksposur, batasan risiko dan toleransi risiko sesuai dengan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN. Batasan risiko dan toleransi risiko berperan dalam membentuk pendekatan Manajemen Risiko Perusahaan. Batasan risiko menetapkan suatu kerangka kerja yang menunjukkan tingkat maksimum risiko yang dapat diterima, sementara toleransi risiko memberikan petunjuk sejauh mana suatu organisasi bersedia mengambil risiko. Risiko residual kemudian dievaluasi terhadap batasan dan toleransi risiko untuk memastikan bahwa tingkat risiko yang diterima sesuai dengan tujuan dan strategi Perusahaan. Adapun perbandingan realisasi risiko residual yang didapat dari nilai eksposur realisasi risiko residual terhadap risiko utama Perusahaan dengan batasan dan toleransi risiko perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel V. 2
Perbandingan Nilai Eksposur Realisasi Risiko
dengan Batasan dan Toleransi Risiko Perusahaan

Nilai Total Eksposur Residual	Nilai Batasan Risiko	Nilai Toleransi Risiko
Rp 34.350.774.338,10	Rp 64.060.500.000,00	Rp 128.121.000.000,00

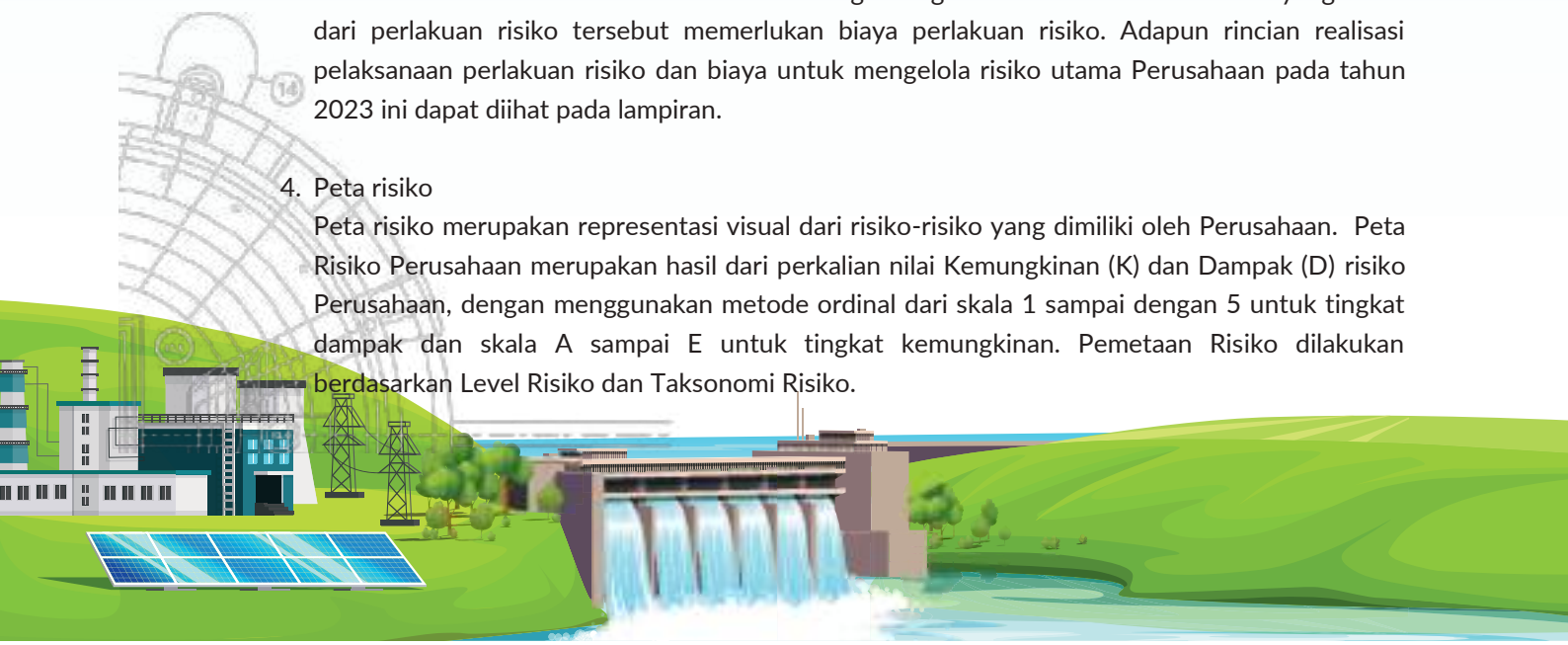
Nilai total eksposur residual di dapat dari total nilai eksposur residual risiko hingga 31 Desember 2023, sedangkan untuk nilai batasan risiko didapat dari 5% dikali dengan nilai kapasitas risiko Perusahaan yang berasal dari nilai ekuitas Perusahaan sebesar Rp 1,28 Triliun. Sedangkan untuk nilai toleransi risiko didapat dari 10% dikali dengan nilai kapasitas risiko Perusahaan, maka nilai batasan dan toleransi risiko Perusahaan adalah sebesar Rp 64,1 Miliar dan Rp 128,1 Miliar. Nilai total eksposur residual risiko Perusahaan pada periode akhir tahun 2023 masih di bawah limit atau batasan risiko korporat Perusahaan.

c. Proyeksi perhitungan Risiko Residual hingga akhir tahun berdasarkan eksposur realisasi risiko
Dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berubah, pemahaman mendalam terkait risiko residual sangat penting bagi Perusahaan. Dengan berlandaskan pada eksposur aktual terhadap risiko yang telah terjadi, proyeksi perhitungan risiko residual hingga akhir tahun menjadi suatu aspek kritis dalam manajemen risiko perusahaan. Analisis ini memberikan pandangan menyeluruh terhadap sisa risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan dan operasional perusahaan. Melalui pendekatan ini, Perusahaan dapat lebih siap menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang terinformasi guna mengoptimalkan strategi risiko mereka.

Laporan Manajemen Risiko Tahunan tahun 2023 ini disusun per 31 Desember 2023, sehingga perhitungan realisasi risiko residual dan eksposur realisasi risiko sudah berada pada periode akhir tahun 2023. Berdasarkan analisis pada poin 2a dan 2b, dapat disimpulkan bahwa total nilai realisasi eksposur risiko tidak melebihi nilai limit risiko sebesar Rp 64,1 Miliar. Risiko utama Perusahaan yang masih menghasilkan eksposur risiko per 31 Desember 2023 adalah Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda lebih rendah dari Batas Operasi Normal (BON), Keterlambatan produksi SPAM KBP, Pemanfaatan lahan tanpa ada perikatan jasa lahan, dan Defisit pendanaan dana pensiun, dengan total nilai eksposur risiko sebesar Rp 34,35 Miliar. Dari beberapa risiko utama Perusahaan di tahun 2023, terdapat beberapa risiko yang masih menjadi risiko utama atau penyebab risiko Perusahaan di tahun 2024.

3. Realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya
Dalam melaksanakan mitigasi dari risiko-risiko utama Perusahaan maka diputuskan perlakuan risiko untuk menurunkan nilai risiko sesuai dengan target risiko residual Perusahaan yang mana dari perlakuan risiko tersebut memerlukan biaya perlakuan risiko. Adapun rincian realisasi pelaksanaan perlakuan risiko dan biaya untuk mengelola risiko utama Perusahaan pada tahun 2023 ini dapat diihat pada lampiran.

4. Peta risiko
Peta risiko merupakan representasi visual dari risiko-risiko yang dimiliki oleh Perusahaan. Peta Risiko Perusahaan merupakan hasil dari perkalian nilai Kemungkinan (K) dan Dampak (D) risiko Perusahaan, dengan menggunakan metode ordinal dari skala 1 sampai dengan 5 untuk tingkat dampak dan skala A sampai E untuk tingkat kemungkinan. Pemetaan Risiko dilakukan berdasarkan Level Risiko dan Taksonomi Risiko.



a. Taksonomi Risiko

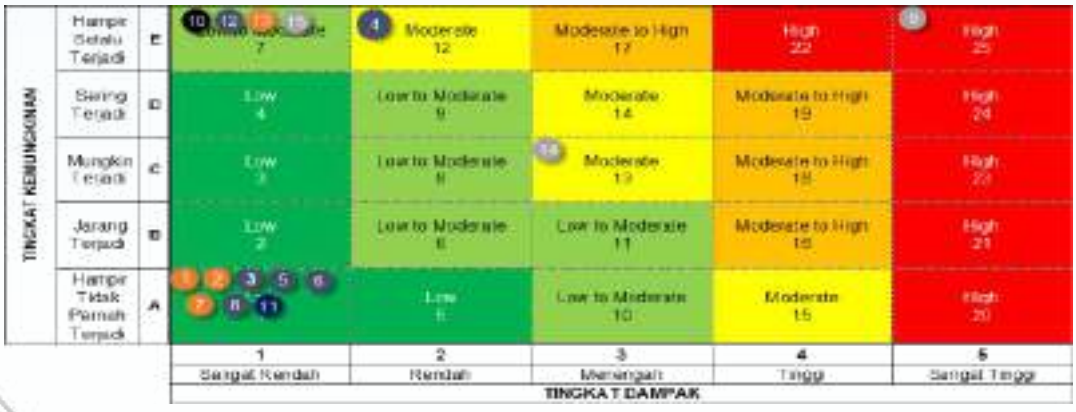
Perusahaan telah menerapkan taksonomi risiko yaitu penjabaran risiko berdasarkan Tema Risiko (T1), Kategori Risiko (T2) dan Peristiwa Risiko (T3) yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023. Taksonomi risiko Perusahaan, selanjutnya digambarkan ke dalam Taksonomi Portofolio Perusahaan yang dapat dilihat dari gambar berikut :



b. Peta Warna Risiko

Berdasarkan Taksonomi Portofolio Perusahaan tersebut, maka dapat dipetakan risiko-risiko utama Perusahaan yang memuat hasil realisasi Risiko Residual yang dibandingkan dengan target Risiko Residual. Adapun gambar Peta Warna (Heatmap) Risiko berdasarkan taksonomi risiko Perusahaan adalah sebagai berikut :

Tabel V. 3
Peta Warna Risiko



Gambar 5 Heatmap berdasarkan Taksonomi Risiko Perusahaan

Keterangan:

- = Risiko Strategis
- = Risiko Operasional
- = Risiko Keuangan
- = Risiko Hukum dan Kepatuhan
- = Risiko Operasional dari Anak Perusahaan

Dari Gambar 5 dapat pula dipetakan antara realisasi risiko residual dan target risiko residual perusahaan. Berikut adalah peta warna risiko untuk perbandingan realisasi risiko residual dengan target risiko residual Perusahaan :



Gambar 6 Heatmap Perbandingan Realisasi Risiko Residual dengan Target Risiko Residual

Keterangan:

= Realisasi Risiko Residual

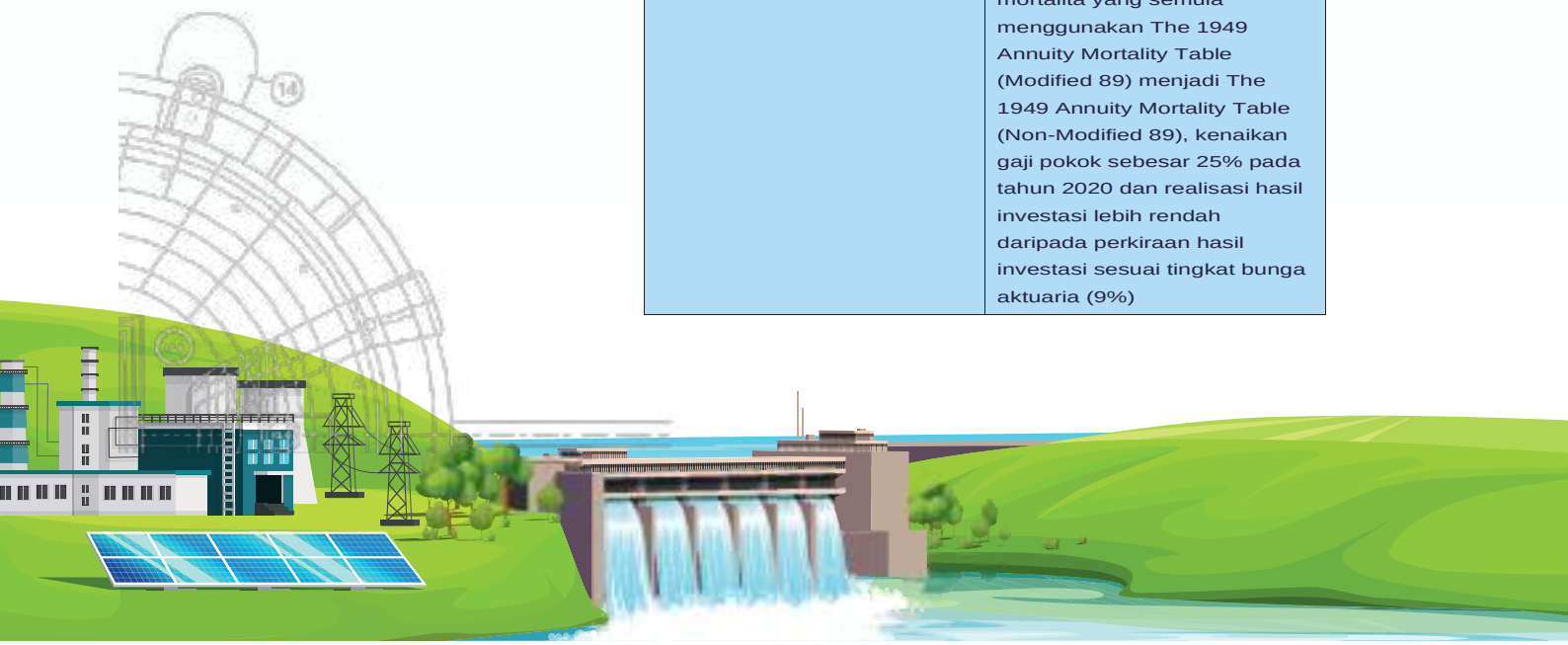
= Target Risiko Residual

5. Catatan kejadian kerugian (Loss Event Database)

Loss event adalah suatu peristiwa/kondisi kejadian Risiko yang telah menimbulkan kerugian/kerusakan/kehilangan kesempatan bagi Perusahaan. Loss Event Database adalah suatu database yang berisikan seluruh loss event yang terjadi di Perusahaan.

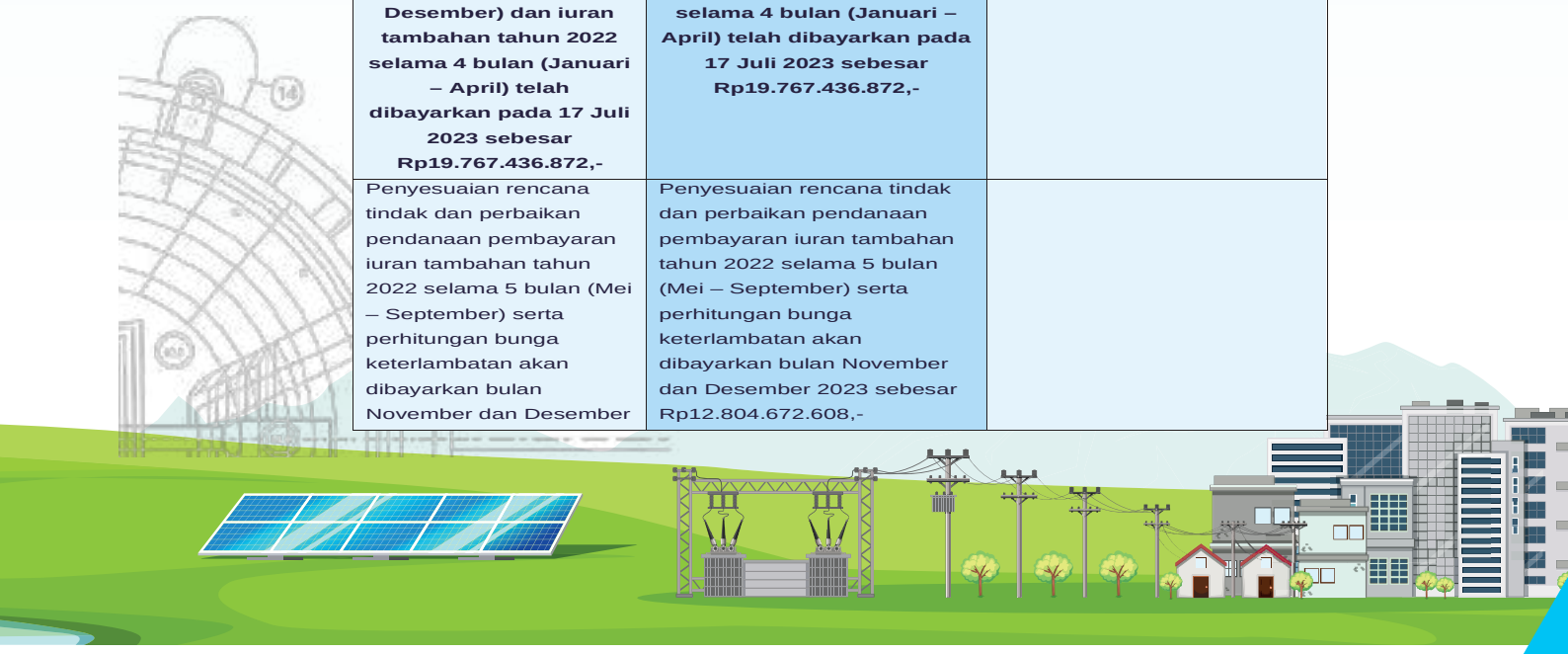
Tabel V. 4
Loss Event Database

1	**Defisit Pendanaan Dana Pensiun**	Identifikasi kejadian:	Defisit pendanaan dana pensiun
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Eksternal
		Penyebab Kejadian	Dikarenakan adanya perubahan asumsi table mortalita yang semula menggunakan The 1949 Annuity Mortality Table (Modified 89) menjadi The 1949 Annuity Mortality Table (Non-Modified 89), kenaikan gaji pokok sebesar 25% pada tahun 2020 dan realisasi hasil investasi lebih rendah daripada perkiraan hasil investasi sesuai tingkat bunga aktuaria (9%)

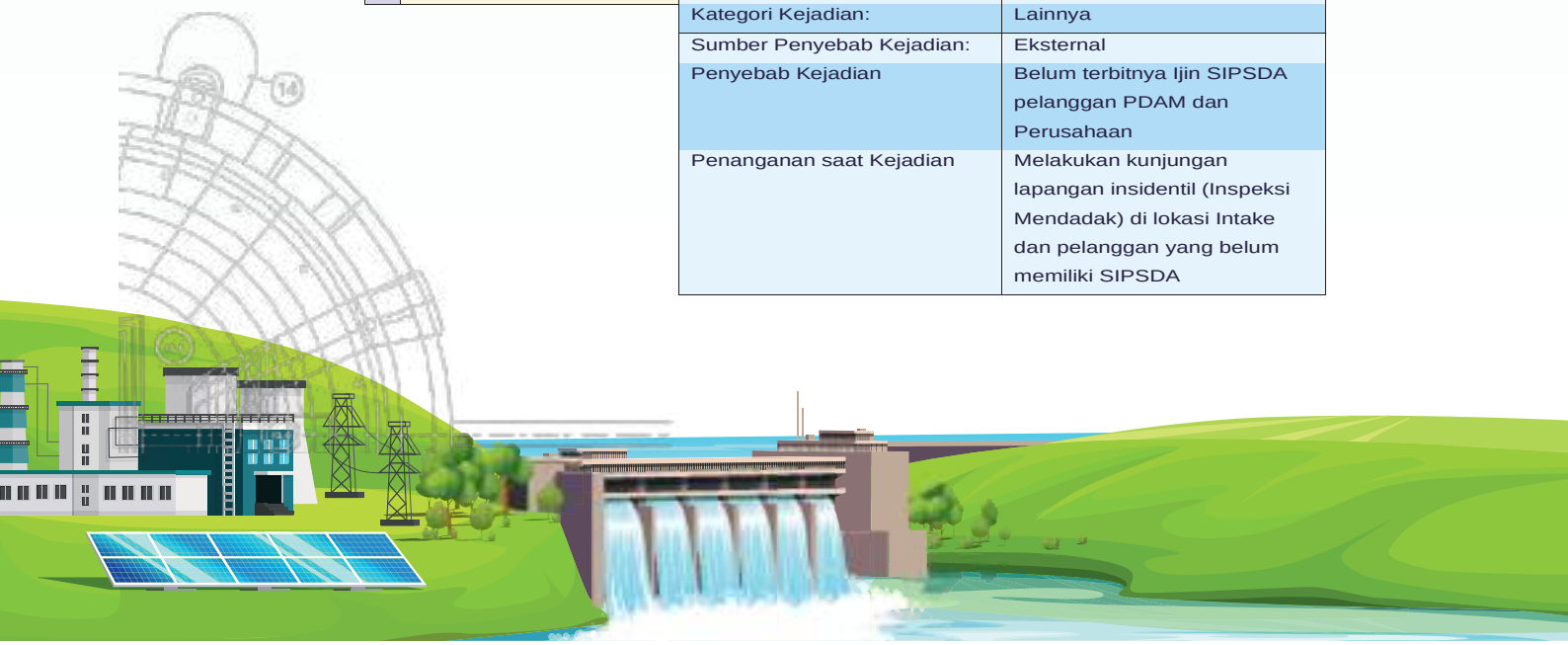


Penanganan saat Kejadian	Melakukan perencanaan pembayaran iuran tambahan
Deskripsi Kejadian - Risk Event	Jumlah kekayaan untuk pendanaan lebih kecil dari jumlah nilai kini aktuarial
Kategori Risiko BUMN	Risiko keuangan
Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Keuangan
Penjelasan Kerugian	Kewajiban iuran tambahan yang harus dibayar Pendiri kepada Dana Pensiun semakin bertambah yang berdampak pada cashf*Low* keuangan Pendiri
Nilai Kerugian	Rp 141.000.000.000,00
Kejadian Berulang	Tidak

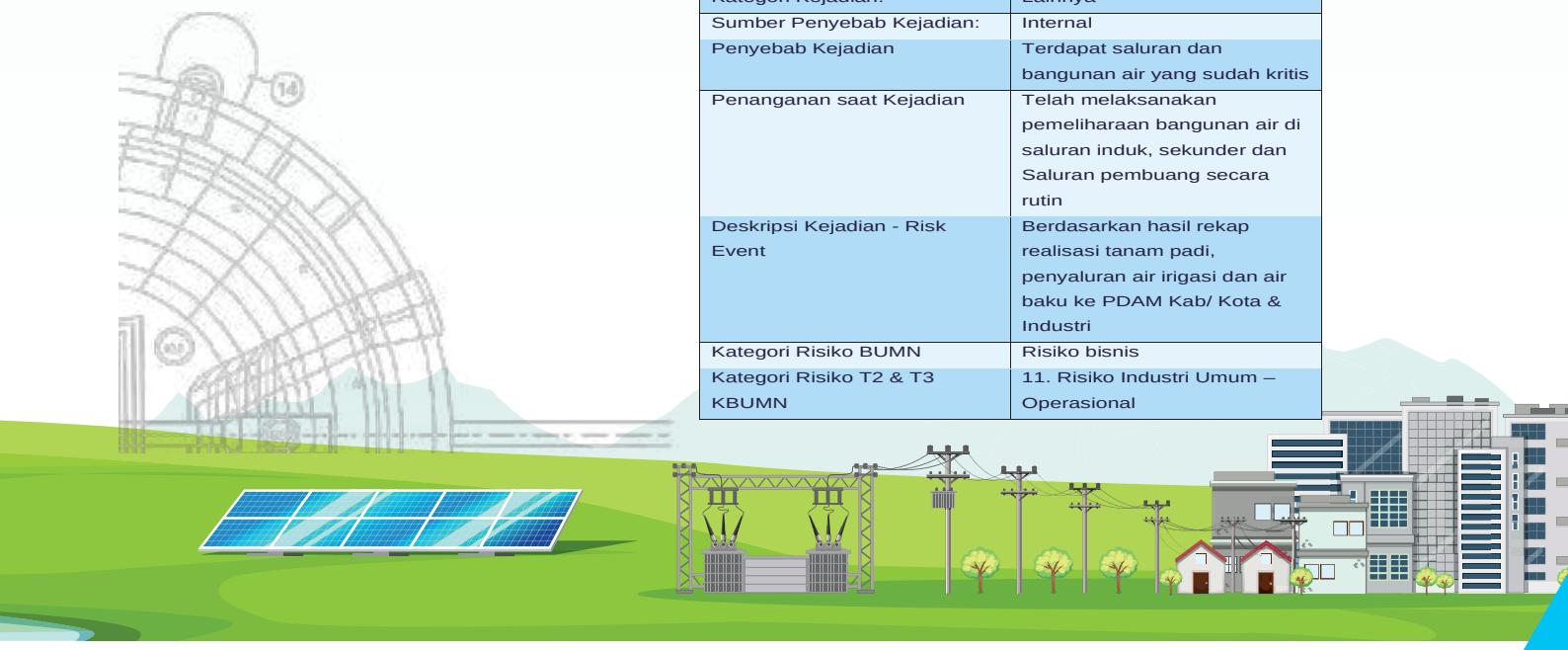
Mitigasi yang Direncanakan	Realisasi Mitigasi	Perbaikan Mendatang
Iuran tambahan tahun 2021 selama 5 bulan (Januari-Mei) telah dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp11.441.077.800,-, iuran tambahan tahun 2021 beserta bunga keterlambatan untuk 3 bulan (Juni s.d Agustus) telah dibayarkan sebesar Rp7.156.394.163,- pada tanggal 27 Desember 2022	Iuran tambahan tahun 2021 selama 5 bulan (Januari-Mei) telah dibayarkan pada tahun 2021 sebesar Rp11.441.077.800,-, iuran tambahan tahun 2021 beserta bunga keterlambatan untuk 3 bulan (Juni s.d Agustus) telah dibayarkan sebesar Rp7.156.394.163,- pada tanggal 27 Desember 2022	Sebagai langkah penyehatan Dana Pensiun Jasa Tirta II pada rapat BoD tanggal 09 Oktober 2023, Direksi sepakat menyetujui untuk mengubah jenis program pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan mengalihkan penyelenggaraannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Penyesuaian rencana tindak dan perbaikan pendanaan pembayaran utang iuran tambahan tahun 2021 dan perhitungan bunga keterlambatan untuk 4 bulan (September-Desember) dan iuran tambahan tahun 2022 selama 4 bulan (Januari – April) telah dibayarkan pada 17 Juli 2023 sebesar Rp19.767.436.872,-	**Penyesuaian rencana tindak dan perbaikan pendanaan pembayaran utang iuran tambahan tahun 2021 dan perhitungan bunga keterlambatan untuk 4 bulan (September-Desember) dan iuran tambahan tahun 2022 selama 4 bulan (Januari – April) telah dibayarkan pada 17 Juli 2023 sebesar Rp19.767.436.872,-**	
Penyesuaian rencana tindak dan perbaikan pendanaan pembayaran iuran tambahan tahun 2022 selama 5 bulan (Mei – September) serta perhitungan bunga keterlambatan akan dibayarkan bulan November dan Desember	Penyesuaian rencana tindak dan perbaikan pendanaan pembayaran iuran tambahan tahun 2022 selama 5 bulan (Mei – September) serta perhitungan bunga keterlambatan akan dibayarkan bulan November dan Desember 2023 sebesar Rp12.804.672.608,-	



		Pihak terkait	**Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko**
2	Piutang BJPSDA PT. SHS	Status Asuransi Identifikasi kejadian:	Tidak Piutang Macet
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Eksternal
		Penyebab Kejadian	Terdapat permasalahan keuangan intern PT. Sang Hyang Seri
		Penanganan saat Kejadian	Dilakukan rapat koordinasi antara PT. SHS dengan PJT II membahas pembayaran piutang PT. SHS
		Deskripsi Kejadian - Risk Event	Sejak tahun 2011 PT. SHS sudah tidak mendapatkan subsidi dari Kementerian Pertanian sehingga mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran BJPSDA dan terus berlangsung hingga saat ini.
		Kategori Risiko BUMN	**Risiko keuangan**
		Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Keuangan
		Penjelasan Kerugian	Terganggunya cashf*Low* PJT II
		Nilai Kerugian	Rp 61.834.638.497
		Kejadian Berulang	Tidak
	Mitigasi yang Direncanakan Melakukan koordinasi dengan PT Sang Hyang Seri dengan hasil mediasi dari Kementerian BUMN	Realisasi Mitigasi	Perbaikan Mendatang
		Penyelesaian piutang melalui mekanisme aset settlement	
		Pihak terkait	Direktur Pengembangan Usaha
		Status Asuransi	Tidak
3	**Berkurangnya pendapatan BJPSDA PJT II dari pemanfaat SDA**	**Identifikasi kejadian:**	**Pelanggan tidak memiliki Ijin Pemanfaatan Sumber Daya Air (SIPSDA)**
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Eksternal
		Penyebab Kejadian	Belum terbitnya Ijin SIPSDA pelanggan PDAM dan Perusahaan
		Penanganan saat Kejadian	Melakukan kunjungan lapangan insidentil (Inspeksi Mendadak) di lokasi Intake dan pelanggan yang belum memiliki SIPSDA



		Deskripsi Kejadian - Risk Event	**Berdasarkan Rekap Data Pemanfaat Sumber Daya Air di wilayah kerja PJT II - Wilayah Sungai Citarum, Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Sekunder, dan Saluran Pembuang periode sampai dengan Desember 2023 terdapat 2 pelanggan PDAM dan 12 pelanggan perusahaan yang ijin SIPSDA-nya belum keluar**
		Kategori Risiko BUMN	Risiko keuangan
		Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Keuangan
		Penjelasan Kerugian	Pelanggan secara kontinu memanfaatkan SDA di wilayah kerja PJT II tanpa adanya pembayaran BJPSDA kepada PJT II
		Nilai Kerugian	Rp 803.006.509,7
		Kejadian Berulang	Ya
		Frekuensi Kejadian	2 kali dalam 1 tahun
	Mitigasi yang Direncanakan	**Realisasi Mitigasi**	**Perbaikan Mendatang**
	Melakukan monev (invetarisasi) pada RKT I-III kepada Unit Wilayah tekait mengenai pemanfaat air baku yang ijinnya akan segera habis masa berlakunya	Melakukan monev (invetarisasi) pada RKT I-III kepada Unit Wilayah tekait mengenai pemanfaat air baku yang ijinnya akan segera habis masa berlakunya	Mengusahakan penerbitan Legal Opinion dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait pengakuan pendapatan BJPSDA
		Pihak terkait	Direktur Pengembangan Usaha
		Status Asuransi	Tidak
4	**Tidak tercapainya target penugasan pemerintah dalam hal target pemberian air irigasi dan air baku**	**Identifikasi kejadian:**	**Gangguan Penyaluran Air Irigasi Kepada Para Petani**
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Internal
		Penyebab Kejadian	Terdapat saluran dan bangunan air yang sudah kritis
		Penanganan saat Kejadian	Telah melaksanakan pemeliharaan bangunan air di saluran induk, sekunder dan Saluran pembuang secara rutin
		Deskripsi Kejadian - Risk Event	Berdasarkan hasil rekap realisasi tanam padi, penyaluran air irigasi dan air baku ke PDAM Kab/ Kota & Industri
		Kategori Risiko BUMN	Risiko bisnis
		Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Operasional



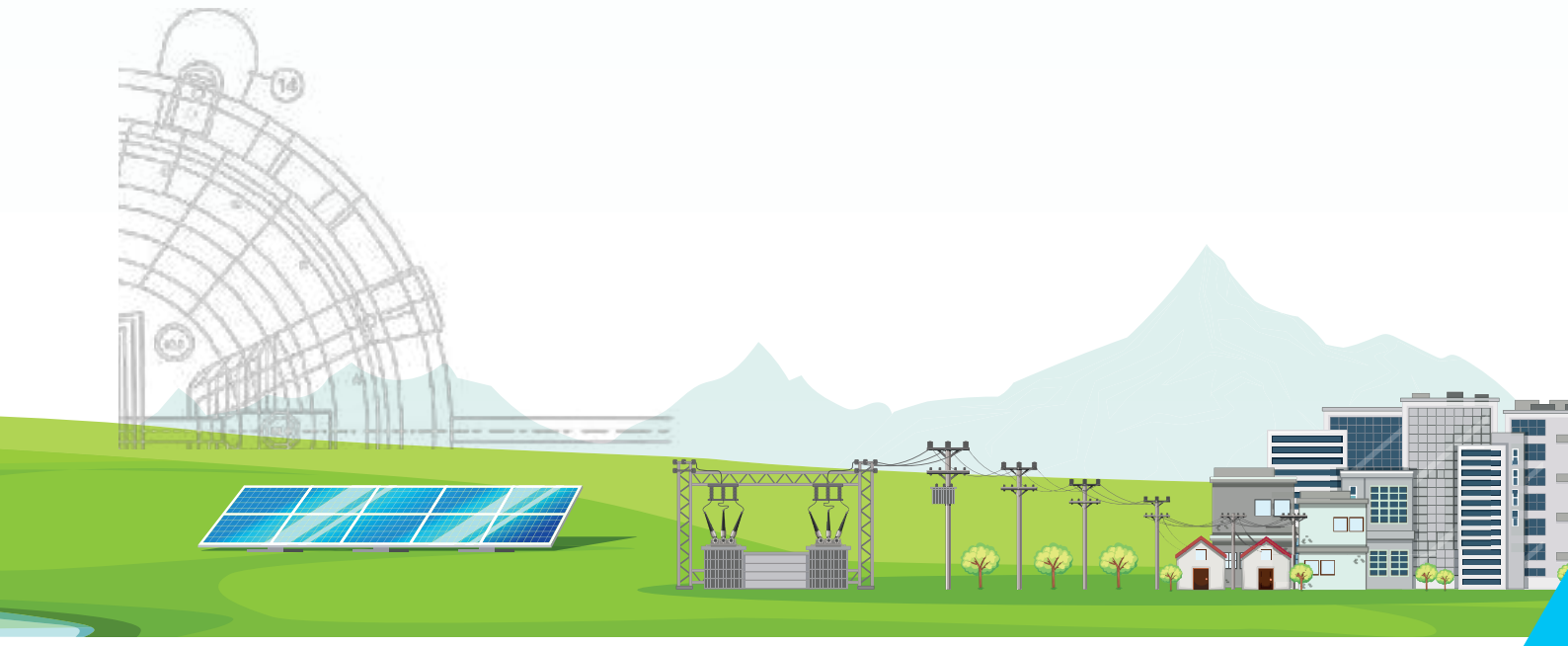
		Penjelasan Kerugian	**Gangguan pada penyaluran air akan berdampak pada reputasi Perusahaan**
		Nilai Kerugian	Rp -
		Kejadian Berulang	Tidak
	Mitigasi yang Direncanakan	Realisasi Mitigasi	Perbaikan Mendatang
	Melakukan evaluasi tanam dan pemberian air dalam Rapat Tim Koordinasi Operasi Sumber Daya Air (TKOSDA) pada bulan Januari - Desember Minggu ke 2 2023 (per 2 minggu) dimana hasilnya dituangkan dalam risalah rapat TKOSDA	Melakukan evaluasi tanam dan pemberian air dalam Rapat Tim Koordinasi Operasi Sumber Daya Air (TKOSDA) pada bulan Januari - Desember Minggu ke 2 2023 (per 2 minggu) dimana hasilnya dituangkan dalam risalah rapat TKOSDA	
		Pihak terkait	Direktur Operasi dan Pemeliharaan
		Status Asuransi	Tidak
5	**Terjadi gangguan pada Unit 6 PLTA**	**Identifikasi kejadian:**	**Kerusakan unit produksi PLTA Ir. H. Djuanda**
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Internal
		Penyebab Kejadian	Terjadi Flash Over pada Generator
		Penanganan saat Kejadian	Melakukan pengecekan terhadap Unit 6 PLTA
		Deskripsi Kejadian - Risk Event	Unit 6 tidak bisa dioperasikan
		Kategori Risiko BUMN	Risiko operasional
		Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Operasional
		Penjelasan Kerugian	Unit 6 tidak bisa beroperasi selama 5 bulan. Berpotensi kehilangan produksi Listrik 21 juta Kwh/ bulan.
		Nilai Kerugian	Rp 88.800.000.000
		Kejadian Berulang	Tidak
6	**Permasalahan hukum di pangkalan bambu**	**Identifikasi kejadian:**	**Pemanfaatan lahan tanpa ada perikatan jasa lahan**
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Eksternal
		Penyebab Kejadian	Adanya klaim dari pihak lain (bersengketa)
		Penanganan saat Kejadian	Melakukan pengamanan pada aspek legal
		Deskripsi Kejadian - Risk Event	Permasalahan lahan di pangkalan bambu seluas 33.740 m2
		Kategori Risiko BUMN	Risiko keuangan
		Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Keuangan
		Penjelasan Kerugian	Luas Lahan x NJOP sekitar tahun 2021.
		Nilai Kerugian	Rp 126.356.300.000
		Kejadian Berulang	Tidak
	Mitigasi yang Direncanakan	Realisasi Mitigasi	Perbaikan Mendatang



		Pihak terkait	**Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko**
		Status Asuransi	Tidak
7	Realisasi TMA dibawah Batas Minimum Operasi	Identifikasi kejadian:	Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda lebih rendah dari Batas Operasi Normal (BON)
		Kategori Kejadian:	Lainnya
		Sumber Penyebab Kejadian:	Eksternal
		Penyebab Kejadian	Tahun 2003 merupakan tahun kering
		Penanganan saat Kejadian	Menyesuaikan pola operasi waduk untuk menampung air
		Deskripsi Kejadian - Risk Event	Realisasi TMA Waduk Ir. H. Djuanda sebesar +77,04 mdpl
		Kategori Risiko BUMN	Risiko operasional
		Kategori Risiko T2 & T3 KBUMN	11. Risiko Industri Umum – Operasional
		Penjelasan Kerugian	Selisih Volume waduk x tarif listrik PLN (356,38)
		Nilai Kerugian	Rp 400.000.000.000
		Kejadian Berulang	Tidak

Mitigasi yang Direncanakan	**Realisasi Mitigasi**	**Perbaikan Mendatang**
Melakukan pengaturan pemberian air (air keluar)	Melakukan pengaturan pemberian air (air keluar)	
	Pihak terkait	Direktur Operasi dan Pemeliharaan
	Status Asuransi	Tidak

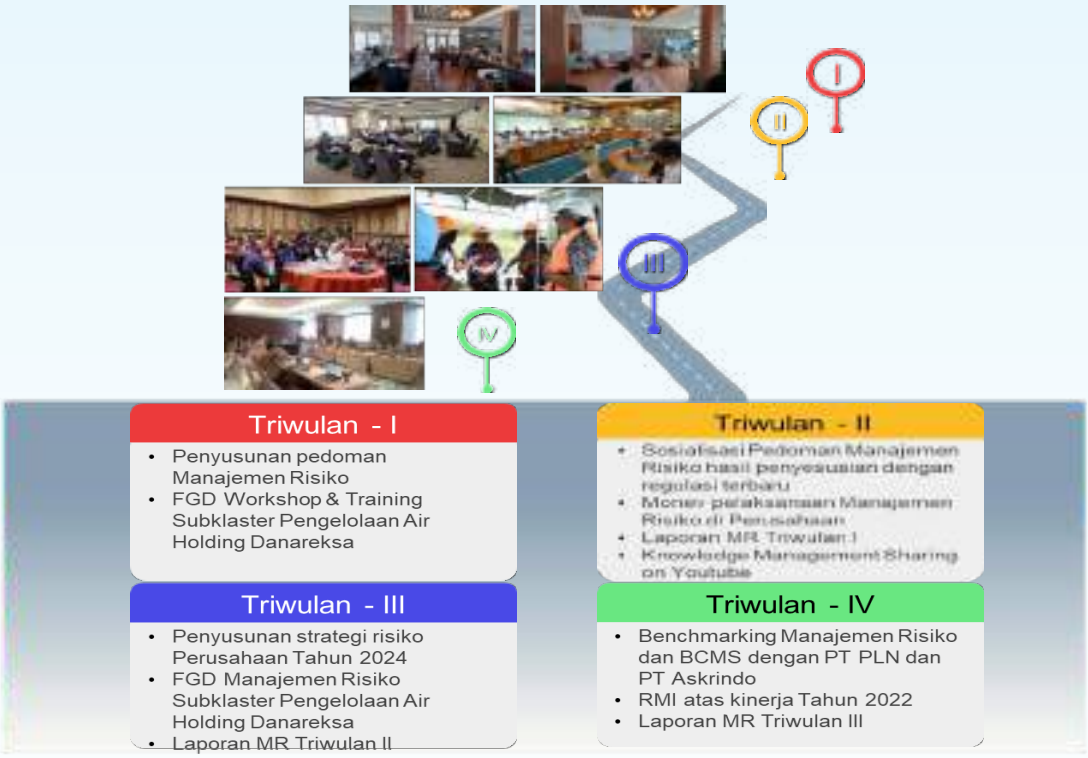
Loss Event Database ini disampaikan juga melalui email (pendok.kbumn@bumn.go.id) dan surat resmi pada Kementrian BUMN dalam bentuk excel.



5.1.2 Laporan Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023

A. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko Perusahaan tahun 2023

Perusahaan telah melaksanakan berbagai macam program dalam menerapkan manajemen risiko pada tahun 2023. Pelaksanaan program tersebut dibagi ke dalam periode pelaksanaannya yaitu pada Triwulan I hingga Triwulan IV. Adapun rincian program penerapan manajemen risiko di Perusahaan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

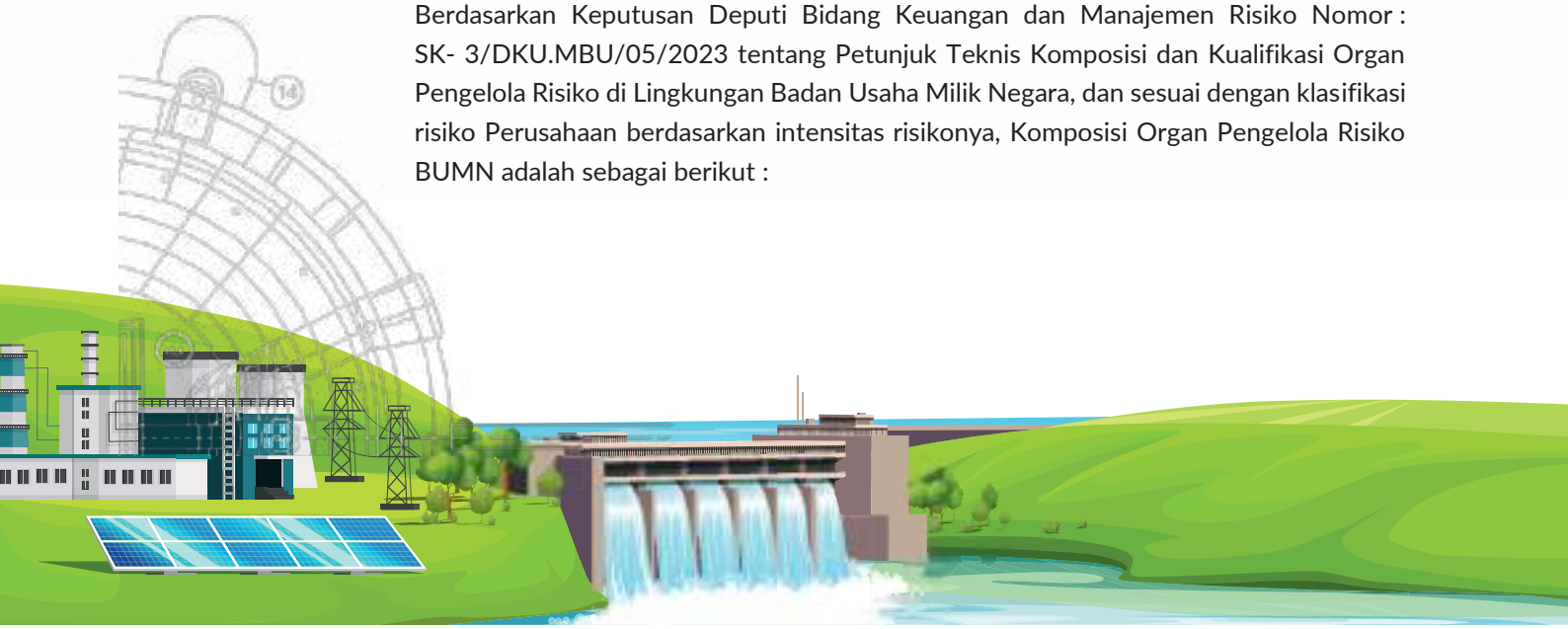


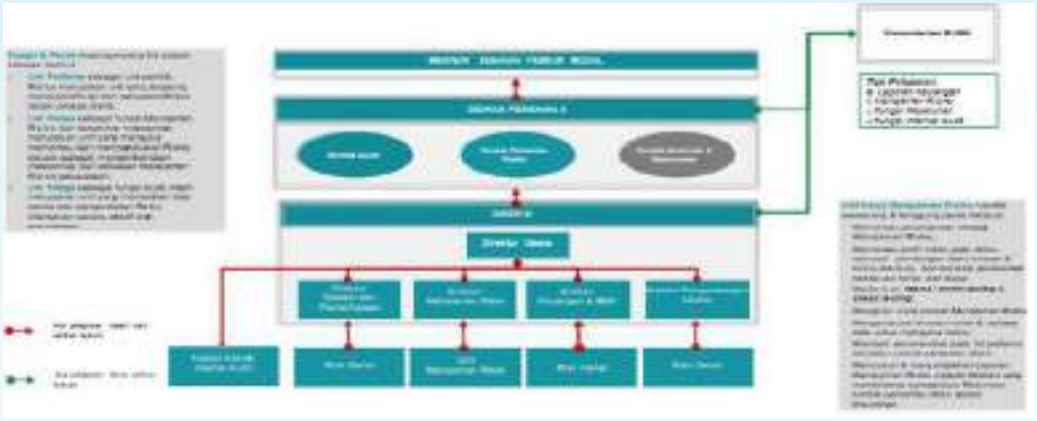
Gambar 1 Kaleidoskop Penerapan Manajemen isiko Tahun 2023

B. Pemenuhan Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

1. Pemenuhan Komposisi Organ Pengelola Risiko

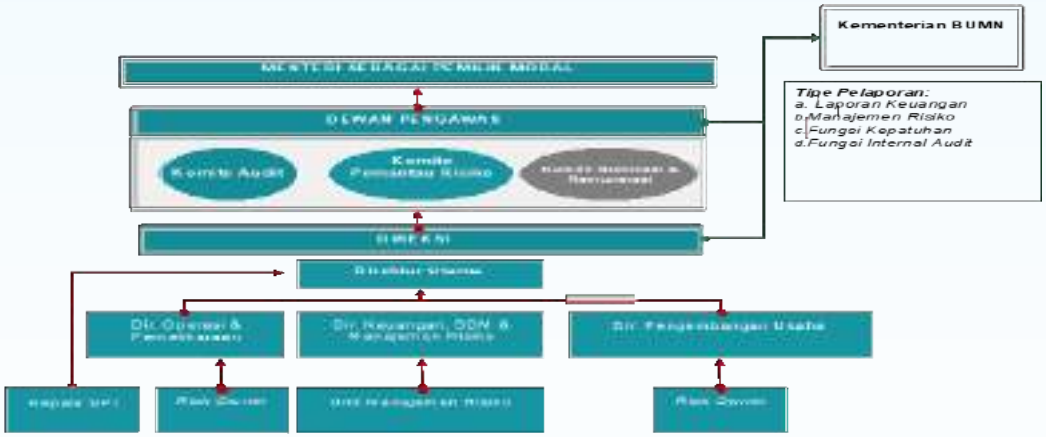
Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor : SK- 3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dan sesuai dengan klasifikasi risiko Perusahaan berdasarkan intensitas risikonya, Komposisi Organ Pengelola Risiko BUMN adalah sebagai berikut :





Gambar 8 Standar Komposisi Organ Pengelola Risiko berdasarkan PER-2/MBU/03/2023

Pada tahun 2023, Penerapan Three Lines Model di Perusahaan masih pada level D-2, dimana unit manajemen risiko berada di bawah Direktur Keuangan, SDM & Manajemen Risiko, pada lini kedua masih merangkap antara Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko seperti pada gambar berikut:



Gambar 9 Penerapan Komposisi Organ Pengelola Risiko di Perusahaan

2. Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko

Pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko menjadi hal yang sangat penting dalam konteks manajemen risiko sebuah organisasi. Organ pengelola risiko bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam upaya mencapai pemenuhan kualifikasi, Organ Pengelola Risiko melakukan pelatihan dan sertifikasi selama tahun 2023.

Adapaun program pemenuhan kualifikasi Organ Pengelola Risiko Perusahaan adalah sebagai berikut:



Pelatihan BSE GRC Masterclass – *Risk Management Effectiveness Evaluation*



Pelatihan dan Sertifikasi CRMP



Pelatihan BCMCP





International Conference Risk Beyond

C. Risk Maturity Index

Penilaian RMI tahun 2023 Perum Jasa Tirta II dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu Best Practice yang mengacu kepada ISO 31000:2018 dan metode kepatuhan yang merupakan elaborasi dari Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 dan Surat Menteri BUMN Nomor: S-683/MBU/10/2022 perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP 2023, yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Indeks Kematangan Risiko/Risk Maturity Index (RMI) Tahun 2023 dan diasistensi oleh Tim Tenaga Ahli Profesional Manajemen Risiko. Proses penilaian Indeks Kematangan Risiko/Risk Maturity Index (RMI) tahun 2023 dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu :

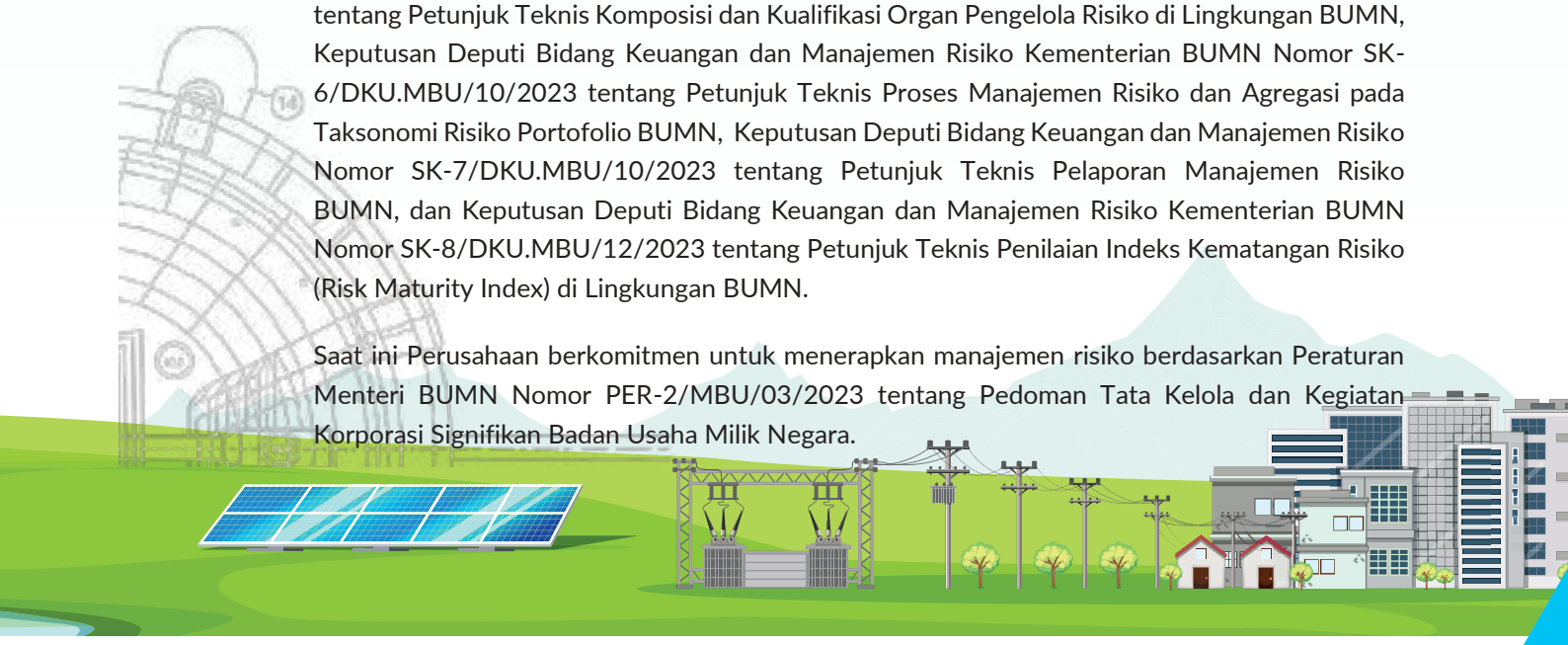
1. Kuesioner terhadap 380 karyawan (+ 37% dari total karyawan tetap atau lebih besar dari syarat minimal sampel yaitu 288 karyawan);
2. Wawancara terhadap 20 karyawan yang terdiri dari D-1 (4 orang), D-2 (2 orang), D-3 (1 orang), D-4 (1 orang), staf (12 orang);
3. Evaluasi dokumen KPI tahun 2022, laporan manajemen risiko tahun 2022 dan aplikasi E-GRC;

Hasil penilaian RMI Tahun 2023, menunjukkan bahwa Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index/RMI) sebesar 4,4 untuk Metode Best Practice dan 4,2 untuk Metode Kepatuhan dengan Kategori Strong Practice, penilaian RMI menggunakan kedua metode tersebut menghasilkan perbedaan yang tidak signifikan dan memberikan gambaran bahwa implementasi manajemen risiko Perusahaan sudah sesuai dengan kebijakan, pedoman, dan prosedur manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh Dewas dan Direksi, sehingga hasil RMI tersebut sejalan dengan pencapaian KPI Tahun 2022 yaitu sebesar 100,96 melebihi target yang ditetapkan sebesar 100.

D. Kesimpulan

Selama tahun 2023 terjadi dinamika perubahan kebijakan penerapan manajemen risiko BUMN, hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sistem penerapan manajemen risiko Perusahaan secara signifikan. Perusahaan telah berupaya untuk menyesuaikan perubahan kebijakan tersebut dengan cara melakukan reviu terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko nomor: SK- 3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan BUMN, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN, dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nomor SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (Risk Maturity Index) di Lingkungan BUMN.

Saat ini Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan manajemen risiko berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.



Pelaksanaan penerapan manajemen risiko di Perusahaan dilaksanakan dari proses perencanaan manajemen risiko sampai dengan proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan manajemen risiko.

Proses penyusunan dan pelaporan manajemen risiko Perusahaan dilakukan berdasarkan Pasal 73 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.

Namun penyusunan laporan manajemen risiko tahun 2023 masih secara bertahap mengikuti Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN dan akan dilengkapi pada penyusunan Laporan Manajemen Risiko periode berikutnya.

Laporan Manajemen Risiko tahun 2023 ini terdiri dari:
1. Laporan Pemantauan Risiko;
2. Laporan Audit Intern; dan
3. Laporan Kinerja Keuangan Tahunan Perusahaan.

Laporan Manajemen Risiko tahun 2023 ini disusun berdasarkan risiko utama Perusahaan, program audit intern, dan kinerja keuangan yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada akhir periode tahun 2023 (per 31 Desember 2023).





Permasalahan Hukum

Perum Jasa Tirta II terus berupaya dalam menjalankan kegiatan usaha yang berprinsip pada kepatuhan dan prinsip korporasi yang sehat guna menghindari potensi atau dampak negatif terlibat dalam perkara hukum. Selama tahun 2023, Perusahaan terlibat perkara hukum, baik yang bersifat perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas dan Direksi tidak terlibat atau menghadapi gugatan atau perkara hukum di lembaga peradilan dan/atau badan arbitrase mana pun.

Perkara Hukum di Entitas Anak/ Patungan

Selama tahun 2023, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak/Patungan maupun terkait dengan Dewan Pengawas dan Direksi Entitas Anak.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perum Jasa Tirta II, Dewan Pengawas, ataupun Direksi yang sedang menjabat oleh regulator dan pihak berwenang lainnya.

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Hukum yaitu resiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum yang dapat merugikan Perusahaan;
b. Risiko Reputasi, yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat atau pihak luar akan berkurang akibat adanya persepsi negatif terhadap Perusahaan;
c. Potensi Kerugian berupa kerugian finansial akibat adanya permasalahan/perkara hukum tersebut;

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga tanggal 31 Desember 2023 Perum Jasa Tirta II tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak terapat informasi mengenai perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak.

Perkara Penting yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2023 tidak terdapat perkara penting apapun yang sedang dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II .

Subsidiary/Joint Entity Legal Cases

Perum Jasa Tirta II continues to strive in carrying out business activities that are based on compliance and sound corporate principles in order to avoid the potential or negative impact of being involved in legal cases. During 2023, the Company was involved in legal cases, both civil and criminal in nature.

Administrative Penalties

The regulator and other authorities imposed no administrative sanctions on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the Board of Directors who are currently serving in 2023.

Legal Issues' Impact on the Company

During the year, there were no legal cases faced by the Subsidiaries/Foundations or related to the Supervisory Board and Directors of the Subsidiaries.

Administrative Sanctions

During 2023, there were no administrative sanctions imposed on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the incumbent Directors by regulators and other authorities.

Impact of Legal Issues on the Company

The following are some of the potential consequences:

a. Legal Risk is the risk posed by a lawsuit that could harm the Company;
b. Reputational Risk, which can cause the level of public trust or outside parties to be reduced due to negative perceptions of the Company;
c. Potential Losses in the form of financial losses due to the problem/legal case;

Important Cases Facing Subsidiaries

As of December 31, 2023, Perum Jasa Tirta II does not have any subsidiaries, so there is no information regarding important cases faced by subsidiaries.

Important Cases Facing the Supervisory Board and the Board of Directors

During 2023 there were no important cases being faced by the Supervisory Board and the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II.



Perkara Hukum di Entitas Anak/Patungan

Selama tahun 2023, tidak ada perkara hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak/Patungan maupun terkait dengan Dewan Pengawas dan Direksi Entitas Anak.

Sanksi Administratif

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhkan kepada Perum Jasa Tirta II, Dewan Pengawas, ataupun Direksi yang sedang menjabat oleh regulator dan pihak berwenang lainnya.

Dampak Permasalahan Hukum terhadap Perusahaan

Beberapa dampak yang mungkin timbul yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Hukum yaitu resiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum yang dapat merugikan Perusahaan;
b. Risiko Reputasi, yang dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat atau pihak luar akan berkurang akibat adanya persepsi negatif terhadap Perusahaan;
c. Potensi Kerugian berupa kerugian finansial akibat adanya permasalahan/perkara hukum tersebut;

Perkara Penting yang Dihadapi Entitas Anak

Hingga tanggal 31 Desember 2023 Perum Jasa Tirta II tidak memiliki entitas anak, sehingga tidak terapat informasi mengenai perkara penting yang dihadapi oleh entitas anak.

Perkara Penting yang Dihadapi Dewan Pengawas dan Direksi

Selama tahun 2023 tidak terdapat perkara penting apapun yang sedang dihadapi oleh Dewan Pengawas dan Direksi Perum Jasa Tirta II.

Pengungkapan Sanksi Administrasi dari Regulator

Selama periode tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perum Jasa Tirta II dan tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Dewan Pengawas dan Direksi.

Pengelolaan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah suatu keadaan di mana terdapat konflik antara kepentingan ekonomi Perusahaan dengan kepentingan ekonomi pribadi Direksi, Dewan Pengawas, dan Pemilik Modal. Selama tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan di Perum Jasa Tirta II. Setiap transaksi dilakukan sesuai

Disclosure of Administrative Sanctions from Regulators

During 2023, there were no legal cases faced by the Subsidiaries/Foundations or related to the Supervisory Board and Directors of the Subsidiaries.

Administrative Sanctions

During 2023, there were no administrative sanctions imposed on Perum Jasa Tirta II, the Supervisory Board, or the incumbent Directors by regulators and other authorities.

Impact of Legal Issues on the Company

Some of the impacts that may arise are as follows:

a. Legal Risk, which is the risk arising from lawsuits that can harm the Company;
b. Reputational Risk, which may cause the level of public trust or external parties to be reduced due to negative perceptions of the Company;
c. Potential Loss in the form of financial loss due to the legal issues/cases;

Important Cases Faced by Subsidiaries

As of 31 December 2023 Perum Jasa Tirta II does not have subsidiaries, so there is no information regarding important cases faced by subsidiaries.

Important Cases Faced by the Supervisory Board and Board of Directors

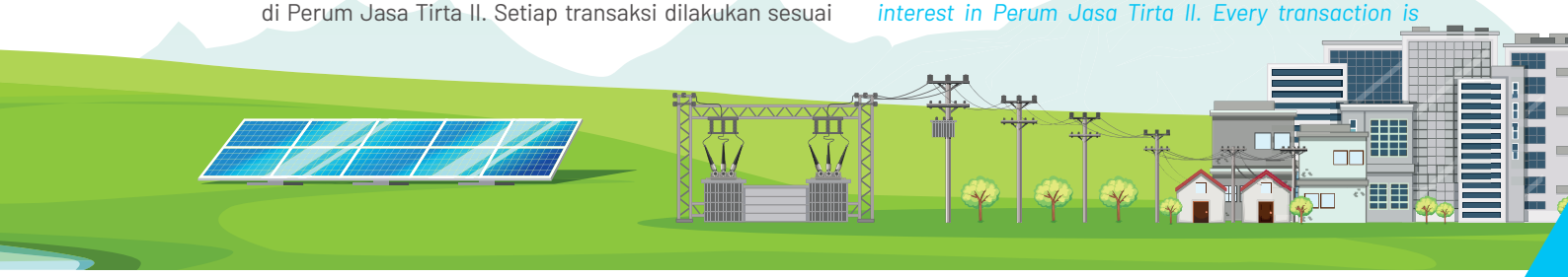
During 2023 there were no important cases faced by the Supervisory Board and Board of Directors of Perum Jasa Tirta II.

Disclosure of Administrative Sanctions from Regulators

During 2021, there were no material administrative sanctions affecting the business continuity of Perum Jasa Tirta II and there were no administrative sanctions imposed on the Supervisory Board and the Board of Directors.

Management of Conflict of Interest

Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the Company's economic interests and the personal economic interests of the Directors, Supervisory Board, and Capital Owners. During 2023, there were no transactions that had a conflict of interest in Perum Jasa Tirta II. Every transaction is



dengan ketentuan yang berlaku dan selalu memperhatikan prinsip-prinsip GCG. Setiap individu berkewajiban untuk mendahulukan kepentingan Perusahaan dan menghindari timbulnya benturan kepentingan dalam berbagai bentuk dengan Perusahaan. Dengan demikian, Perum Jasa Tirta II mengharuskan setiap individu untuk:

1. Tidak diperkenankan untuk memegang jabatan rangkap apa pun di luar Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan, kecuali dalam hubungannya dengan koperasi karyawan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak diperkenankan untuk melakukan ikatan bisnis secara pribadi maupun melibatkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan keluarga, dengan pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan bisnis dengan Perusahaan;
3. Memahami dan menaati Peraturan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II.

carried out in accordance with applicable regulations and always pays attention to GCG principles. Each individual is obliged to prioritise the interests of the Company and avoid conflicts of interest in various forms with the Company. Thus, Perum Jasa Tirta II requires each individual to:

1. *Not allowed to hold any concurrent position outside the Company that may cause a conflict of business interest with the Company, except in relation to employee cooperatives as stipulated in the applicable laws and regulations;*
2. *Not allowed to conduct business ties personally or involving family, with other parties that can cause family, with other parties that can cause conflicts of business interests with the Company;*
3. *Understand and comply with the Conflict of Interest Handling Regulations within the Public Company (Perum) Jasa Tirta II.*



Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

Perum Jasa Tirta II menempatkan keseragaman etika dan perilaku sebagai bagian tak terpisahkan dalam menunjang integritas dan akuntabilitas dalam setiap individu Perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi komitmen atas terciptanya *best practices* GCG dan mendukung keberlangsungan usaha jangka panjang. Untuk itu, Perum Jasa Tirta II telah mempunyai Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku *(Code of Conduct)* yang dijadikan pedoman dan berlaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II mulai dari Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II dalam bekerja dan berinteraksi segenap Pemilik Modal Perusahaan.

Dengan mengacu pada Budaya Perusahaan "Air Untuk Menghidupi Negeri", segenap insan Perum Jasa Tirta II berkomitmen menerapkan Kode Etik *(Code of Conduct)* secara konsisten selama menjalankan kegiatan usaha serta senantiasa mendukung terlaksananya GCG yang pada akhirnya akan meningkatkan citra Perusahaan *(corporate image)* bagi seluruh pemangku kepentingan.

Isi/Pokok Kode Etik

Pedoman Etik Usaha dan Tata Perilaku *(Code of Conduct)* Perum Jasa Tirta II memuat nilai-nilai etika dan tata perilaku sebagai suatu standar beretika dan berperilaku bagi insan Perum Jasa Tirta II yang meliputi:

- Standar Etika Usaha dalam mengatur interaksi Perusahaan dengan karyawan, pelanggan, penyedia barang dan jasa, mitra kerja, pemerintah, auditor, masyarakat, mitra binaan dan lingkungan, Serikat Pekerja, Organisasi Profesi, serta Perguruan Tinggi.
- Standar Tata Perilaku dalam mengatur sikap individu, etika kerja sama insan Perum Jasa Tirta II dengan Perusahaan, etika kerja sesama insan Perum Jasa Tirta II, perilaku sebagai atasan, perilaku sebagai bawahan, menjaga kerahasiaan data dan informasi Perusahaan, menjaga aset Perusahaan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3), mencatat data dan pelaporan, menghindari benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, kegiatan berpolitik, hadiah, cendera mata, donasi, komisi dan suap, dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) dan minuman keras.
- Penerapan dan Penegakan Standar Etika Usaha dan Tata Perilaku mengatur tentang organisasi, penegakan etika usaha dan tata perilaku, sanksi

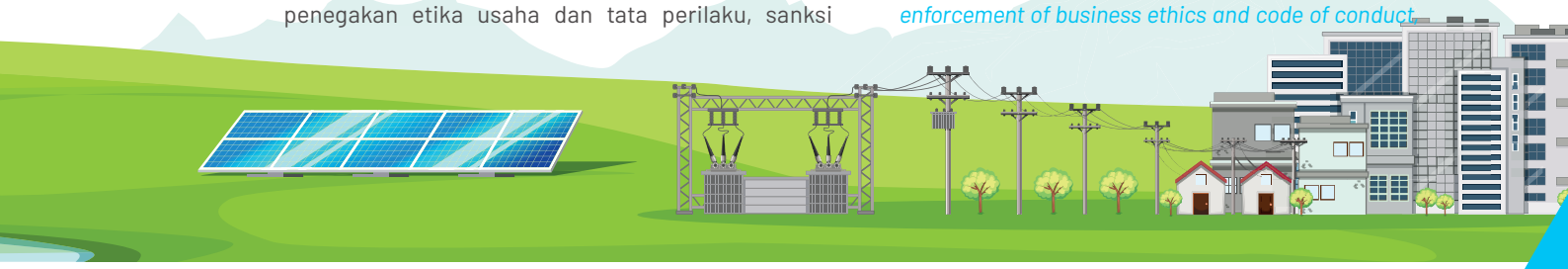
Perum Jasa Tirta II places the uniformity of ethics and behaviour as an integral part in supporting integrity and accountability in every individual of the Company. This is intended to fulfil the commitment to the creation of GCG best practices and support long-term business sustainability. For this reason, Perum Jasa Tirta II has a Code of Conduct which is used as a guideline and applies to all Perum Jasa Tirta II personnel starting from the Supervisory Board, Board of Directors and all Perum Jasa Tirta II employees in working and interacting with all Company Capital Owners.

Company Capital's owner. Referring to the Corporate Culture of "Water to Live the Nation," all personnel of Perum Jasa Tirta II are committed to consistently implementing the Code of Conduct during business activities and always supporting the implementation of GCG, which will ultimately improve the Company's image (corporate image) in the community.

Code of Ethics Guidelines

The Perum Jasa Tirta II Code of Ethics Guidelines for Business Ethics and Code of Conduct contains ethical values and a code of conduct as a standard of ethics and behavior for Perum Jasa Tirta II personnel, which include:

- *Standards of Business Ethics in regulating interactions between companies and their employees, customers, suppliers of goods and services, business partners, government, auditors, communities, fostered partners, and the environment, labor unions, professional organizations, and universities.*
- *Standards of Conduct in regulating individual attitudes, ethics of cooperation between Perum Jasa Tirta II personnel and the Company, work ethics among Perum Jasa Tirta II personnel, behavior as superiors, behavior as subordinates, maintaining confidentiality of Company data and information, safeguarding Company assets, maintaining safety and occupational health (K3), recording data and reporting, avoiding conflicts of interest and abuse of office, political activities, gifts, souvenirs, donations, commissions and bribes, and abuse of narcotics and illegal drugs (drugs) and liquor.*
- *Standards of Business Ethics and Code of Conduct Implementation and Enforcement regulates organization, enforcement of business ethics and code of conduct,*



pelanggaran etika usaha dan tata perilaku, sosialisasi dan interaksi, serta mekanisme pembaruan/revisi etika usaha dan tata perilaku.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan yaitu:

- Setiap insan Perum Jasa Tirta II memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- Membentuk karakter insan Perum Jasa Tirta II yang disiplin dan beretika dalam bergaul dengan sesama dalam Perusahaan maupun dengan pihak lain di luar Perusahaan;
- Menjadi acuan perilaku bagi individu dalam Perusahaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholders Perusahaan;
- Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
- Sebagai pedoman yang mengatur, mengawasi sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang dan jabatan setiap individu dalam Perusahaan;
- Meminimalisasi peluang terjadinya penyimpangan atau merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang tepat sehingga dapat membantu Direksi dalam mengelola bisnis Perusahaan secara efisien, efektif, dan ekonomis (3E).

Adapun tujuan penerapan *Code of Conduct* bagi Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh *stakeholders*, sehingga akhirnya pada akhirnya akan terwujud standar kerja yang maksimal bagi seluruh individu dan dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku di Perusahaan;
- Sebagai panduan perilaku bagi seluruh insan Perum Jasa Tirta II yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
- Sebagai pegangan untuk menghindari benturan kepentingan maupun litigasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh insan Perum Jasa Tirta II dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan.

sanctions for violations of business ethics and code of conduct, socialization and interaction, and mechanisms for updating/revising business ethics and code of conduct.

Purpose, Goals, and Benefits

The purpose of implementing the Code of Conduct for the Company is:

- *Every Perum Jasa Tirta II employee understands that all Company activities are based on the principles of Good Corporate Governance;*
- *Creating a character for Perum Jasa Tirta II personnel who are disciplined and ethical in their interactions with others within the Company and with other parties outside the Company;*
- *Become a behavioral reference for individuals within the Company to carry out their respective duties and responsibilities and interact with the Company's stakeholders;*
- *Creating a healthy and comfortable working environment within the Company's environment;*
- *As a guideline that regulates, supervises, and prevents the abuse of authority and position of each individual in the Company;*
- *Reduce the likelihood of a deviation or component of a proper internal control system occurring so that the Board of Directors can assist in managing the Company's business in an efficient, effective, and economical manner.(3E).*

The following are the goals of implementing the Code of Conduct for the Company:

- *As a shared commitment to realize the vision and carry out the Company's mission in a professional and ethical manner by paying attention to all stakeholders, so that in the end, maximum work standards for all individuals are realized, and by adhering to the guidelines for the Code of Conduct's implementation.*
- *As a behavioral guide for all Perum Jasa Tirta II personnel that must be followed in carrying out all Company activities;*
- *As a guide to avoid conflicts of interest or litigation caused by Perum Jasa Tirta II personnel's negligence in carrying out all Company activities.*



Pedoman Perilaku Perum Jasa Tirta II

Perum Jasa Tirta II sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk melaksanakan praktik- praktik *Good Corporate Governance (GCG)* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian visi dan misi Perusahaan . Pedoman Etika dan Tata Perilaku *(Code of Conduct)* yang terdapat pada Lampiran III Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II nomor: KBS-01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 ini merupakan salah satu wujud dari komitmen tersebut yang dituangkan dalam dokumen tertulis atas dasar perilaku etis yang diharapkan Perusahaan dari Insan Perusahaan yang mencakup perilaku yang harus dilakukan dan dilarang dilakukan.

Code of Conduct Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika usaha Perusahaan dan etika kerja setiap Insan Perusahaan yang bersifat sukarela yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku, sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja Perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Adapun komitmen-komitmen yang dimaksud adalah:

- Komitmen Terhadap Pemilik Modal
- Komitmen Terhadap Insan Perusahaan
- Komitmen Terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya
- Komitmen Terhadap Pelanggan
- Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa
- Komitmen Terhadap Pesaing
- Komitmen Terhadap Mitra Usaha
- Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar, Mitra Binaan dan Lingkungan
- Komitmen Terhadap Media Massa, LSM dan Organisasi Kemasyarakatan
- Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
- Komitmen Terhadap Anak Perusahaan

Pengungkapan *Code of Conduct*

Untuk memastikan *Code of Conduct* diketahui dan dijalankan oleh seluruh insan Perusahaan, Perum Jasa Tirta II telah melaksanakan sosialisasi dan mendistribusikan buku *Code of Conduct* kepada seluruh insan Perum Jasa Tirta II dalam bentuk Buku Saku. Setelah sosialisasi dilakukan, seluruh insan Perum Jasa Tirta II wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan Perum

Perum Jasa Tirta II's Code of Conduct

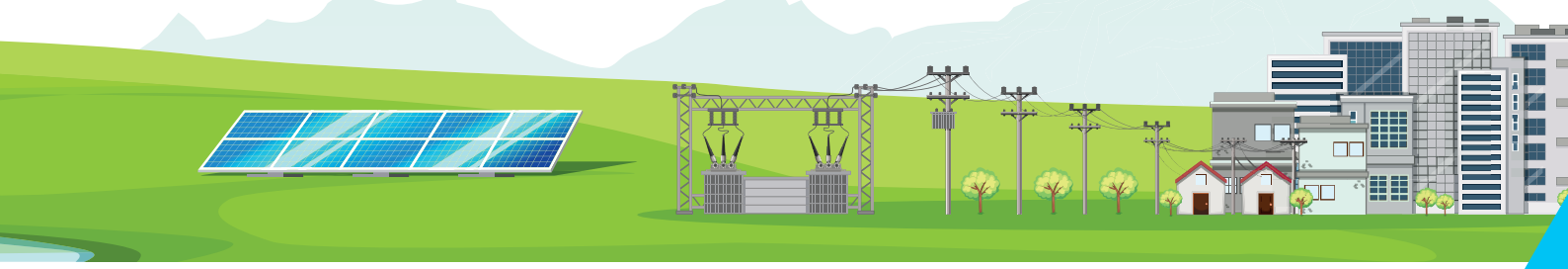
Perum Jasa Tirta II, as a State-Owned Enterprise (BUMN), is committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices as part of its efforts to improve corporate governance.
realize the vision and mission of the company The Code of Conduct (Code of Conduct) contained in Appendix III of the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Jasa Tirta II Public Company (PERUM) number: KBS-01/DIR/10/2019 dated 30 October 2019 is one manifestation of the commitment stated in a written document on the basis of the ethical behavior expected by the Company from the Company's Personnel, which includes behaviors that must be carried out and behaviors that must not be carried out.

The Company's Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's business ethics and the voluntary work ethics of each Company Personnel arranged to influence, shape, regulate and perform behavioural conformity, so as to achieve consistent output in accordance with the Company's work culture in achieving its vision and mission. The commitments in question are:

- *Commitment to Capital Owners*
- *Commitment to Company Personnel*
- *Commitment to Government, Regional Government, and other Agencies*
- *Commitment to Customers*
- *Commitment to Goods/Services Providers*
- *Commitment to Competitors*
- *Commitment to Business Partners*
- *Commitment to Communities, Fostered Partners, and the Environment*
- *Commitment to the media, non-governmental organizations, and community organizations*
- *Support for Labor Unions*
- *Subsidiary Commitment*

Code of Conduct Disclosure

To ensure that the Code of Conduct is known and implemented by all Company personnel, Perum Jasa Tirta II has carried out socialization and distributed the Code of Conduct book in the form of a Pocket Book to all personnel of Perum Jasa Tirta II. After the socialization process is completed, Perum Jasa Tirta II personnel are required to sign an Integrity Pact, which is a commitment



Jasa Tirta II untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

Penegakan dan Sosialisasi Code of Conduct

Sebagai upaya penegakan atas *Code of Conduct*, Perum Jasa Tirta II akan memberikan sanksi terhadap insan Perusahaan yang melakukan pelanggaran *Code of Conduct*. Bagi setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct*, harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi.

Perum Jasa Tirta II akan melindungi kerahasiaan setiap insan Perum Jasa Tirta II yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran *Code of Conduct*

Pelanggaran *Code of Conduct* di Perum Jasa Tirta II merupakan tindakan indisipliner dan ditindaklanjuti oleh Direktur Keuangan & SDM sebagai penanggung jawab implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* di Perusahaan. Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang mengetahui terjadinya pelanggaran *Code of Conduct* wajib melaporkan kepada unit kerja yang membidangi pengelolaan SDM, atasan langsung, dan kontak pengaduan yang bertanggung jawab untuk:

- Memonitor kepatuhan atas *Code of Conduct*;
- Mencatat semua jenis pelanggaran yang dituduhkan;
- Menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melaporkan pelanggaran kepada Direksi.

Setiap insan Perum Jasa Tirta II yang menyampaikan pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* ini tidak perlu merasa khawatir karena Perusahaan akan melindungi identitas pelapor sepanjang pelaporannya dapat dipertanggungjawabkan. Pelanggaran atas *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi atau ganjaran yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan

by Perum Jasa Tirta II personnel to implement a code of conduct that is updated as needed.

Code of Conduct Enforcement and Dissemination

As an effort to enforce the Code of Conduct, Perum Jasa Tirta II will impose sanctions on Company personnel who violate the Code of Conduct. For every Perum Jasa Tirta II employee who is aware of a situation that is believed to have the potential to violate the Code of Conduct, must immediately report to superiors or higher leaders in writing by including the identity of the reporter based on complete and accountable evidence and does not contain elements of slander and personal interest.

Perum Jasa Tirta II will protect the confidentiality of any employee who reports a violation and will immediately follow up unless the report is incorrect, in which case the whistleblower may face sanctions in accordance with applicable regulations.

Breach of the Code of Conduct

Violations of the Code of Conduct at Perum Jasa Tirta II result in disciplinary action, which is overseen by the Director of Finance & Human Resources, who is in charge of implementing Good Corporate Governance (GCG) in the Company. Every Perum Jasa Tirta II employee who becomes aware of a violation of the Code of Conduct must report it to the work unit in charge of HR management, direct supervisor, and complaint contact, who are responsible for:

- *Monitoring compliance with the Code of Conduct;*
- *Recording all types of alleged violations; and*
- *Following up on violations that occur in accordance with applicable regulations.*
- *Inform the Board of Directors of any violations.*

Every Perum Jasa Tirta II employee who reports a violation of this Code of Conduct does not need to be concerned because the Company will protect the reporter's identity as long as the reporting can be accounted for. Violations of this Code of Conduct will result in sanctions or rewards in accordance with the Company's rules and regulations. The implementation of the Code of Conduct is a shared



komitmen dan tanggung jawab bersama seluruh insan Perum Jasa Tirta II. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka insan Perum Jasa Tirta II wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

- Divisi SDM;
- Atasan Langsung;
- Kotak Pengaduan *(Whistleblowing System)*

Segenap insan Perum Jasa Tirta II dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum insan Perum Jasa Tirta II dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi, dan lain sebagainya.

Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.

Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Perusahaan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi *Code of Conduct* Tahun 2023

Pemberian sanksi atas pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh karyawan diberikan oleh Direksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Pengawas mengacu sepenuhnya pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan oleh Pemilik Modal sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila pelanggaran dilakukan oleh mitra kerja atau stakeholders lain maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak. Apabila pelanggaran terkait dengan tindak pidana, maka diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pemberian sanksi dilakukan setelah ditemukan bukti nyata terhadap terjadinya pelanggaran pedoman *Code of Conduct.*

commitment and responsibility of all Perum Jasa Tirta II personnel. In the event of a violation or deviation, Perum Jasa Tirta II employees must report it to:

- *HR Division;*
- *Direct Supervisor;*
- *Complaint Box (Whistleblowing System)*

All personnel of Perum Jasa Tirta II and external parties of the Company (Customers, Business Partners, and Community) can report violations of the Code of Conduct committed by personnel of Perum Jasa Tirta II, and the Company is required to follow up on reports that have the potential to harm materially and may damage the Company's image, such as irregularities, manipulation, and so on.

The reporter must clearly state his or her identity on the report, which must be accompanied by relevant supporting evidence. The recipient of the report must keep the identity of the reporter private.

The company is required to follow up on every report received in accordance with the applicable procedures and mechanisms. In accordance with applicable laws and regulations, the company provides legal protection.

Number of Code of Conduct Violations and Sanctions in 2023

Sanctions are imposed on employees who violate the Code of Conduct in accordance with applicable regulations, by the Board of Directors or authorized officials Meanwhile, the imposition of sanctions for violations committed by the Board of Directors and the Supervisory Board refers fully to the Company's Articles of Association and Bylaws in accordance with applicable regulations by the Capital Owners.

If the violation is committed by a partner or other stakeholder, the contract's provisions will be imposed. If the violation is related to a criminal act, it will be reported to law enforcement. Sanctions are imposed when real evidence of violations of the Code of Conduct guidelines is discovered.



Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Gratification Control Guidelines

Gratifikasi merupakan kegiatan pemberian dan/atau penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan (entertainment) kepada insan Perusahaan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.

Gratification is an activity of giving and/or receiving gifts/souvenirs and entertainment (entertainment) to Company personnel, whether received domestically or abroad and which is carried out using electronic means and/or without through electronic means.

Perum Jasa Tirta II telah menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang menjadi lampiran VII Keputusan Bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola Perusahaan yang baik Nomor: KBS- 01/DIR/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 mengenai Pedoman Gratifikasi. Pedoman tersebut memuat mengenai:

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup dan Sistematika
- Pengertian
- Dasar Hukum
- Prinsip Dasar Gratifikasi
- Kategori Gratifikasi
- Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G)
- Tugas dan Fungsi TP3G
- Koordinasi TP3G
- Pelaporan

Perum Jasa Tirta II has compiled Guidelines for Gratification Control, which is attached VII to the Joint Decree of the Supervisory Board and Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding guidelines for good corporate governance Number: KBS- 01/DIR/10/2019 dated October 30, 2019. The guidelines include the following sections:

- *Background*
- *Purpose and Objectives*
- *Scope and Systematics*
- *Definition*
- *Legal Basis*
- *Basic Principles of Gratification*
- *Gratification Category*
- *Team for Handling Violations and Gratification Complaints (TP3G)*
- *TP3G Duties and Functions*
- *TP3G Coordination*
- *Reporting Governance*

Tata Cara Pelaporan Gratifikasi

Dalam menegakkan kebijakan anti gratifikasi, setiap insan Perum Jasa Tirta II dapat melaporkan indikasi pelanggaran gratifikasi dengan mengikuti tata cara sebagai berikut:

1. Setiap penerimaan hubungan dengan Gratifikasi yang dianggap suap wajib dilaporkan kepada Direksi melalui TP3G.
2. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan kepada TP3G dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, *e-mail, website* yang telah disediakan oleh Perusahaan.

Method of Gratification Reporting

In order to enforce the anti-gratification policy, any employee of Perum Jasa Tirta II may report indications of gratification violations by following the procedures outlined below:

1. *Any acceptance of a bribe-like relationship with Gratification must be reported to the Board of Directors via TP3G.*
2. *The Gratification Report as referred to in point (1) shall be submitted to TP3G by filling out the form determined by the Board of Directors in full and attaching documents relating to Gratification, either directly or by post, e-mail, website provided by the Company.*



3. Jangka waktu pelaporan melalui TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan .
4. Apabila jangka waktu pelaporan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Insan Perusahaan , maka TP3G tidak dapat menerima laporan dimaksud dan Insan Perusahaan melaporkan langsung kepada Direksi dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Direksi secara lengkap dan melampirkan dokumen yang berkaitan dengan Gratifikasi.
5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada angka (1), TP3G meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan berdasarkan ketentuan dalam pedoman ini.
6. Apabila hasil penelitian TP3G sebagaimana dimaksud pada angka (5) merupakan Gratifikasi yang dianggap suap, TP3G menyampaikan Gratifikasi tersebut kepada Direksi dalam jangka waktu paling lambat 7 (hari) hari kerja sej ak laporan Gratifikasi tersebut diterima.

3. The reporting period via TP3G, as mentioned in number (1), is no later than 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by Company Personnel.
4. If the reporting period exceeds 20 (twenty) working days from the date the Gratification is received by the Company's Personnel, the report cannot be received by TP3G, and the Company's Personnel must report directly to the Board of Directors by completely filling out the form determined by the Board of Directors and attaching the required documents. concerning gratuities
5. Following receipt of the report referred to in number (1), TP3G examines the Gratification received to determine whether the Gratification received is a bribe or not in accordance with the provisions of this guideline.
6. If the results of the TP3G research referred to in number (5) are Gratifications that are considered bribes, TP3G submits the Gratifications to the Board of Directors within 7 (days) of receiving the Gratification report.

Pakta Integritas dan Gratifikasi

Perum Jasa Tirta II mewajibkan setiap insan Perum Jasa Tirta II untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman Etika Perusahaan. Hal tersebut diterapkan melalui penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi, serta karyawan tetap Perum Jasa Tirta II.

Dalam rangka menjaga komitmen secara berkelanjutan, penandatanganan kepatuhan terhadap Pedoman Etika Perusahaan dilakukan setiap tahun.

Integrity Pact and Gratification

Perum Jasa Tirta II requires every Perum Jasa Tirta II employee to comply with the provisions stipulated in the Corporate Ethics Guidelines. This is implemented through the signing of the Integrity Pact by the Supervisory Board, Board of Directors, and permanent employees of Perum Jasa Tirta II.

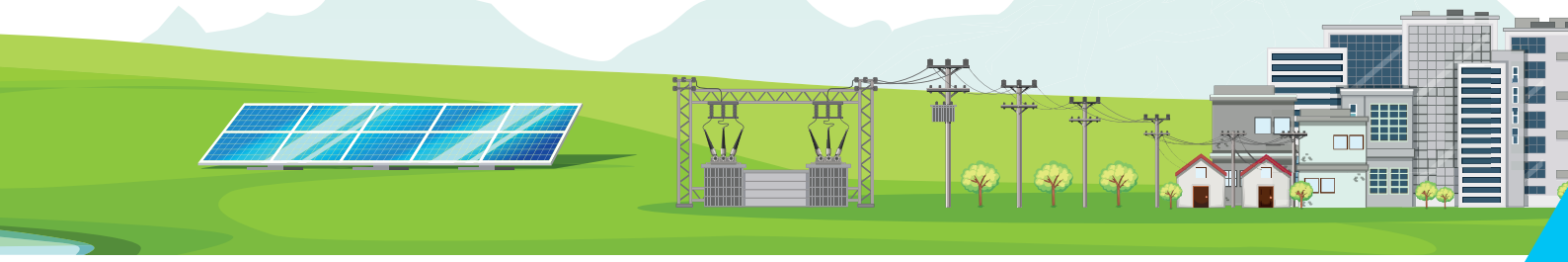
In order to maintain commitment on an ongoing basis, sign-off on compliance with the Code of Conduct is conducted annually.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Menindaklanjuti surat sekretaris kementerian BUMN Nomor: S-17S.MBU/02/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal setifikasi ISO 37001:2016. Sistem manajemen anti penyuapan, Perusahaan telah diaudit oleh pihak eksternal dan pada tanggal 28 Desember 2020. Serta hasilnya PJT II Telah mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016. Oleh karena itu Perusahaan telah Menyusun Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor: PRD-16/DIR/10/2020.

Management System for Anti-Bribery (SMAP)

Following up on the letter from the Secretary of the Ministry of SOEs dated February 17, 2020, Number: S-17S. MBU/02/2020, regarding ISO 37001:2016 certification. An external party audited the Company's anti-bribery management system on December 28, 2020. As a result, PJT II now has the ISO 37001:2016 certification. As a result, the Company developed the Anti-Bribery Management System Guidelines (SMAP), which are governed by Board of Directors Regulation Number: PRD-16/DIR/10/2020.



Sistem Pelaporan Pelanggaran
Violation Reporting System

Tujuan penerapan praktik terbaik dan prinsip-prinsip GCG yang diarahkan pada pemeliharaan kualitas kepatuhan dikukuhkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* yang berperan sebagai mekanisme deteksi dini *(Early Warning System)* yang mampu mencegah indikasi penyimpangan dan kecurangan *(fraud)* di lingkungan Perusahaan . Perum Jasa Tirta II juga telah membentuk Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* sebagai dasar dalam komitmen untuk memperhatikan dan menjaga kepentingan para Pemilik Modal berdasarkan asasi kewajaran dan kesetaraan.

Dalam hal ini, Sistem Pelaporan Pelanggaran *(Whistleblowing System)* menjadi media bagi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan dengan berlandaskan pada kejujuran dan bukan bersifat fitnah dengan disertai bukti yang kuat.

Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran telah ditetapkan melalui Lampiran VI Keputusan bersama Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II tentang pedoman tata kelola Perusahaan yang baik Nomor: KBS-01/DIR/06/2021 tanggal 30 juni 2021.

Maksud, Tujuan dan Manfaat

Whistleblowing System adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak semestinya secara rahasia, anonim, dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan Perum Jasa Tirta II dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

Adapun maksud, tujuan dan manfaat *Whistleblowing System*, di antaranya:
- Sebagai dasar atau pedoman dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari para pemangku kepentingan;
- Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian Pengaduan Pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh para pemangku kepentingan;
- Menghindari publikasi negatif terhadap Perusahaan;

The purpose of implementing best practices and GCG principles directed at maintaining the quality of compliance is confirmed through the Whistleblowing System which acts as an early detection mechanism (Early Warning System) that is able to prevent indications of irregularities and fraud within the Company. Perum Jasa Tirta II has also established the Whistleblowing System Guidelines as a basis for commitment to pay attention to and safeguard the interests of the Capital Owners based on the principles of fairness and equality.

In this case, the Whistleblowing System serves as a channel for the reporter to convey information about violations that occurred within the Company that is based on honesty rather than slander and is supported by strong evidence.

The Violation Complaint Management Guidelines have been stipulated through Appendix VI of the Joint Decree of the Supervisory Board and the Board of Directors of Public Company (PERUM) Jasa Tirta II regarding good corporate governance guidelines Number: KBS-01/DIR/06/2021 dated 30 June 2021.

Purpose, Goals, and Benefits

Whistleblowing System is a system that manages complaints / disclosures regarding illegal behaviour, unethical or improper actions in a confidential, anonymous and independent manner used to optimise the participation of Perum Jasa Tirta II employees and other parties in disclosing violations that occur within the Company.

The purpose, objectives and benefits of the Whistleblowing System include:
- *As a basis or guideline in dealing with Complaints of Violations from stakeholders;*
- *Ensuring the implementation of an effective Complaints Complaints settlement mechanism by stakeholders within an adequate period of time;*
- *Avoid negative publicity towards the Company;*



- Mendukung asas kesetaraan *(fairness)* dalam hubungan antara Perusahaan dengan para Pemilik Modal sebagai pelaku usaha dan mitra Perusahaan ;
- Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

- *Support the principle of equality (fairness) in the relationship between the Company and the owners of capital as business actors and partners of the Company;*
- *As part of the effort to disclose various problems in the Company that do not conform to the Company's ethical standards.*

Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup pengaduan yang dapat disampaikan pada *Whistleblowing System* Perum Jasa Tirta II meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Penyimpangan dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di uar Perusahaan;
- Pemerasan;
- Perbuatan curang *(fraud)*;
- Benturan kepentingan;
- Gratifikasi

Reporting Scope

The scope of complaints that can be submitted to the Whistleblowing System of Perum Jasa Tirta II includes the following matters:

- *Deviations from applicable laws and regulations;*
- *Abuse of position for other interests outside the Company;*
- *Blackmail;*
- *Fraud;*
- *Conflict of interest;*
- *Gratifications*

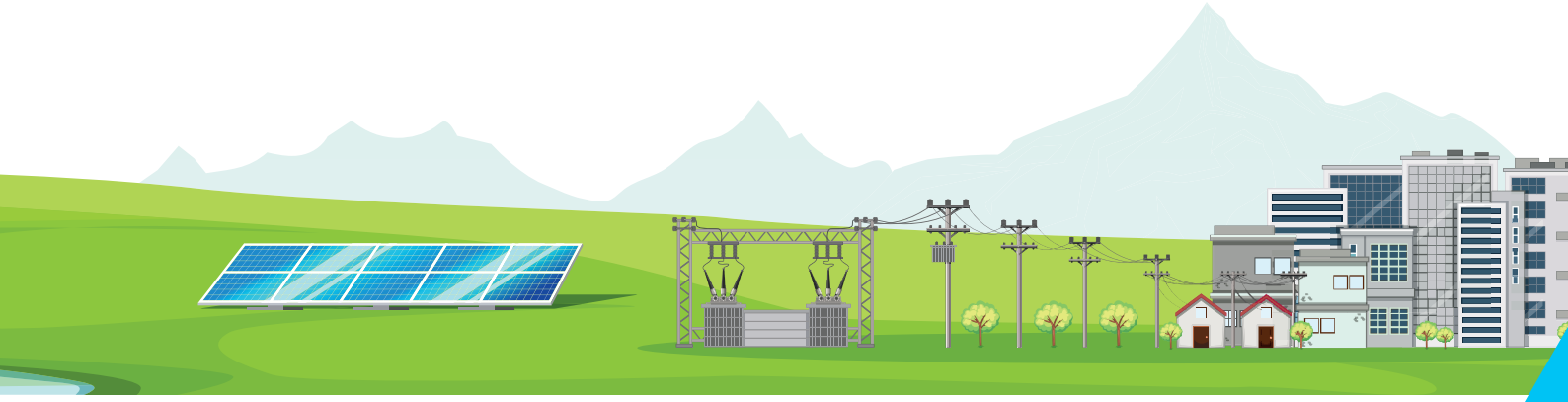
Struktur Pengelola *Whistleblowing System*

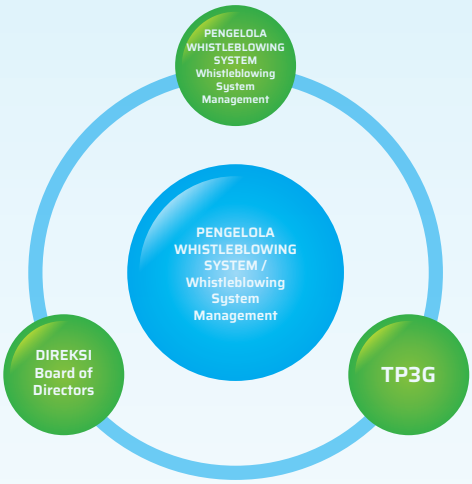
Pengelolaan *Whistleblowing System* dilakukan oleh 3 (tiga) organ, yaitu Dewan Pengawas, Direksi, dan Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G). Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab organ- organ tersebut dalam pengelolaan *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

The Structure of Whistleblowing System

The Whistleblowing System is managed by three (three) organs: the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Team for Handling Violations and Gratifications (TP3G). These organs' duties and responsibilities in the management of the Whistleblowing System are as follows:

ORGAN PENGELOLA WBS / *WBS Management Organs*	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB / *Functions and Responsibilities*
Dewan Pengawas / *Supervisory Board*	Bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi. / *Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of both the Supervisory Board, and the Board of Directors.*
Direksi / *Board of Directors*	Bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan Penanganan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan. / *Responsible in implementing the policies for the violations allegedly committed by the Employees.*





ORGAN PENGELOLA WBS / *WBS Management Organs*	FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB / *Functions and Responsibilities*
Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan Gratifikasi (TP3G) / *Whistleblowing Handling Team (TP3G)*	• TP3G jalur Direksi adalah tim yang dibentuk oleh Direksi dan beranggotakan perwakilan dari Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Internal (SPI), Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi PKRSM serta pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Direksi adalah Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI). / *TP3G Board of Directors is a team formed by the Board of Directors and consists of representatives from the Corporate Secretary, Internal Audit Unit (SPI), Human Resources Division, PKRSM Division, and others required in accordance with their competence and expertise. TP3G of the Board of Directors is headed by the Head of Internal Audit Unit (SPI).*
	• TP3G jalur Dewan Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Dewan Pengawas dan beranggotakan perwakilan dari Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Komite Audit serta pihak independen lainnya yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Ketua TP3G jalur Dewan Pengawas adalah Anggota Dewan Pengawas. / *TP3G of the Supervisory Board is a team established by the Supervisory Board and comprising representatives from members of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board, the Audit Committee and other Independent parties required in accordance with their competence and expertise. TP3G of Supervisory Board is headed by the member of Supervisory Board.*

Mekanisme Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Mekanisme pengelolaan *Whistleblowing System* yang sedang dikembangkan Perum Jasa Tirta II mengikuti alur sebagai berikut:

1. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh karyawan ditujukan kepada Direksi Perusahaan.
2. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi ditujukan kepada Dewan Pengawas Perusahaan.

Management Mechanism of the Violation Reporting System

The management mechanism being developed by Perum Jasa Tirta II for the Whistleblowing System follows the following flow:

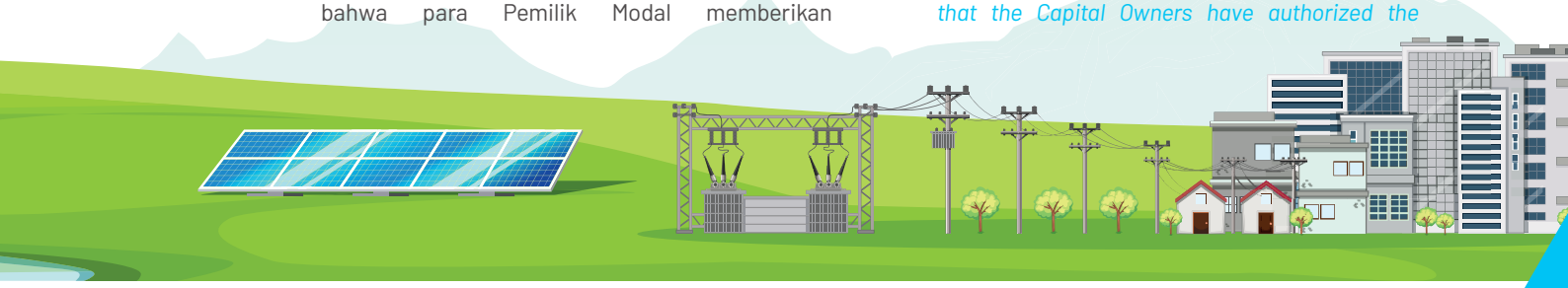
1. *Employee complaints about alleged violations are directed to the Company Directors.*
2. *Complaints of violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board and Supporting Organs of the Board of Directors*



3. Pengaduan Pelanggaran dilakukan dalam jam kerja.
4. Apabila penerima Pengaduan Pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan wajib meneruskan Pengaduan Pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan menerima setiap Pengaduan Pelanggaran yang diajukan oleh para Pemilik Modal dan/atau Perwakilan para Pemilik Modal baik secara lisan maupun tertulis.
6. Perusahaan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat Pemilik Modal dan/atau perwakilan para Pemilik Modal mengajukan Pengaduan Pelanggaran.
7. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Karyawan dilakukan secara tertulis melalui website resmi Perusahaan dan/atau menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Perusahaan c.q. Direksi, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat: Direksi Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat
8. Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Pengawas, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke Perusahaan dengan alamat: Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Jl. H. Agus Salim No. 69 Jakarta Pusat.
9. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis beridentitas wajib dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
10. Pengaduan Pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/ atau Pengaduan Pelanggaran yang akan disampaikan.
11. Pengaduan Pelanggaran yang disampaikan wajib dilengkapi dengan data (bukti pendukung).
12. Perusahaan memberikan tanda terima, jika Pengaduan Pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
13. Apabila Pengaduan Pelanggaran diajukan oleh perwakilan para pemangku kepentingan, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:
    - Fotokopi bukti identitas para Pemilik Modal dan perwakilan para pemangku kepentingan;
    - Surat kuasa dari para Pemilik Modal kepada perwakilan para Pemilik Modal yang menyatakan bahwa para Pemilik Modal memberikan

are addressed to the Company's Supervisory Board.

3. *Violation complaints are made during working hours.*
4. *If the person receiving the Complaint of Violations is not a member of the Board of Directors or the Supervisory Board, the person must forward the Complaint of Violation to the Board of Directors or the Supervisory Board.*
5. *The Company accepts any Complaints of Violations submitted orally or in writing by Capital Owners and/ or Representatives of Capital Owners.*
6. *When Capital Owners and/or representatives of Capital Owners file a Complaint of Violation, the Company explains the policies and procedures.*
7. *Complaints about alleged violations committed by employees are made in writing via the Company's official website and/or by submitting an official letter addressed to the Company cq the Board of Directors, by direct delivery, or by post to the Company at the following address: Directors of Perum Jasa Tirta II Jalan Lurah Kawi, Jatiluhur Purwakarta, West Java*
8. *Complaints of violations allegedly committed by members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board and Supporting Organs of the Board of Directors are made in writing by submitting an official letter addressed to the Supervisory Board, by hand delivery, or by post to the Company at the address: Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Jl. H. Agus Salim No. 69 Central Jakarta.*
9. *Written complaints of violations must be accompanied by photocopies of identification and supporting evidence, such as documents relating to the transactions carried out and/or the Complaints of Violations that will be submitted.*
10. *Written infringement complaints without identifying information must be accompanied by supporting evidence documents relating to the transactions carried out and/or the infringement complaints that will be submitted.*
11. *Violation complaints must be accompanied by data (supporting evidence).*
12. *If the Complaint of Violation is submitted in writing with an identity, the company issues a receipt.*
13. *If the Complaint of Violations is submitted by representatives of the stakeholders, the following documents must be submitted in addition to the above:*
    - *Photocopies of proof of identity of the Capital Owners and representatives of the stakeholders;*
    - *Power of attorney from the Capital Owners to the representatives of the Capital Owners stating that the Capital Owners have authorized the*



kewenangan bertindak untuk dan atas nama para pemangku kepentingan. Jila perwakilan para Pemilik Modal adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

representatives of the Capital Owners to act for and on behalf of the stakeholders. If the Capital Owners' representative is an institution or legal entity, the complaint must be accompanied by documentation proving that the party filing the complaint is authorized to represent the institution or legal entity.

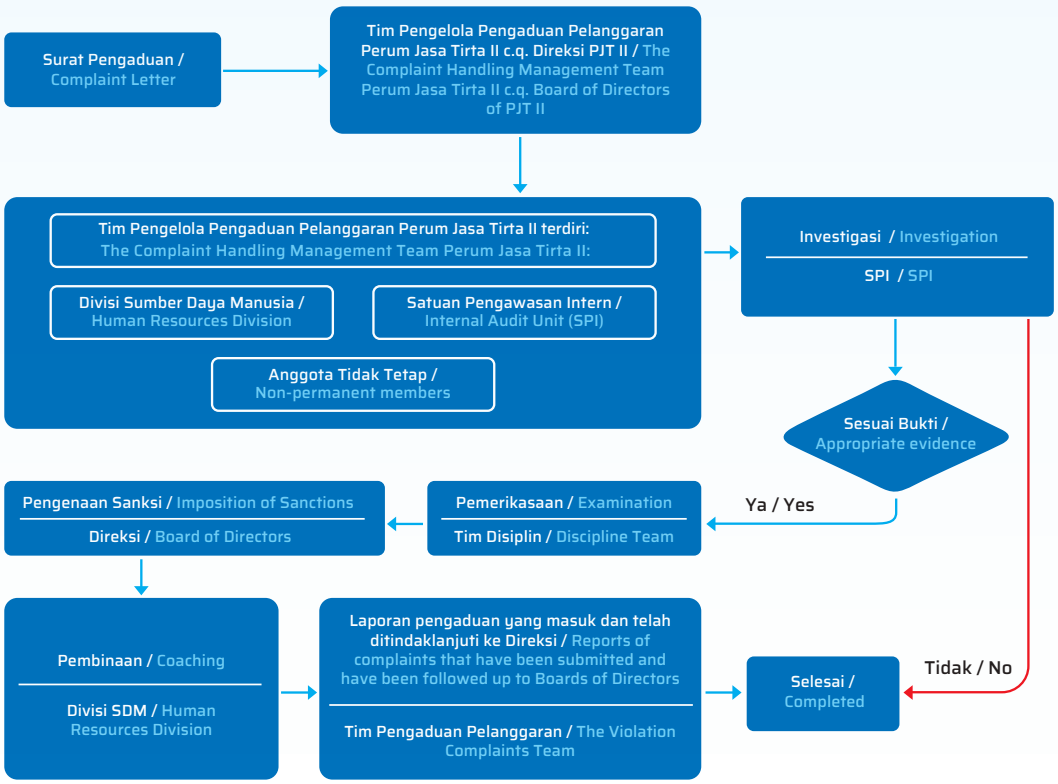
14. Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima Pengaduan Pelanggaran kepada para Pemilik Modal dan/ perwakilan Pemilik Modal yang mengajukan Pengaduan.

14. The company must provide proof of receipt of the Complaint of Violations to the Capital Owners and/or their representatives who filed the Complaint.

Adapun bagan mekanisme pelaporan pengaduan penanganan pelanggaran digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

The following diagram depicts the mechanism for reporting complaints and handling violations:

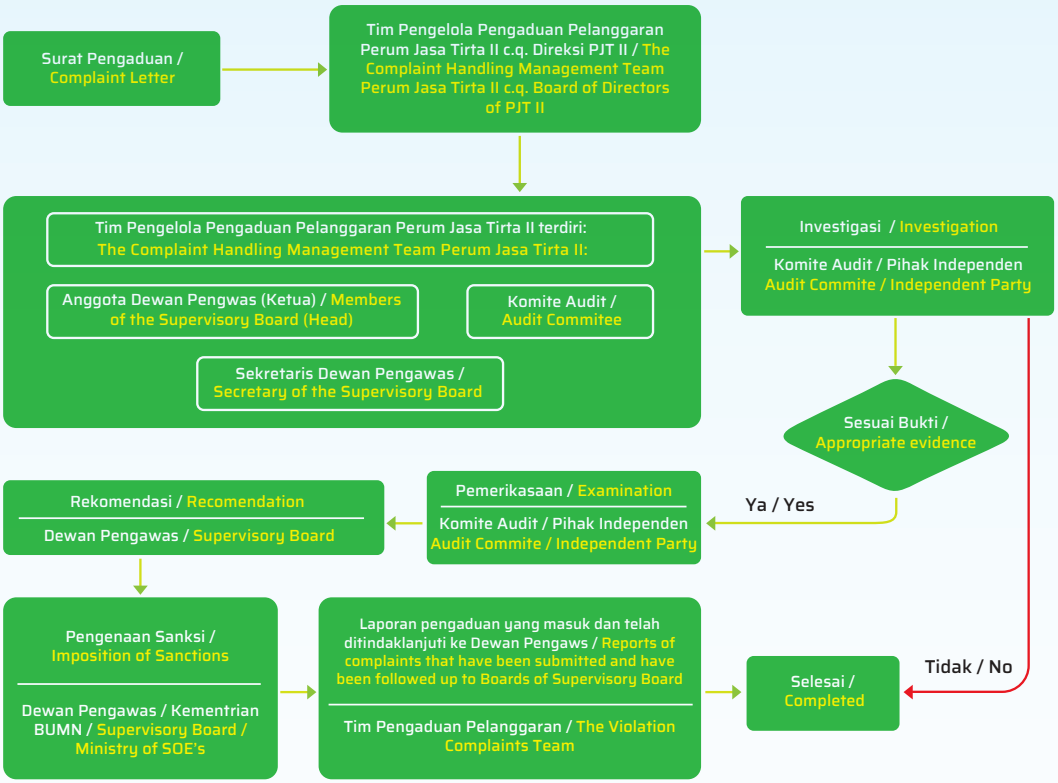
Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Karyawan Perum Jasa Tirta II
Reporting Mechanism for Violations Committed by Employees

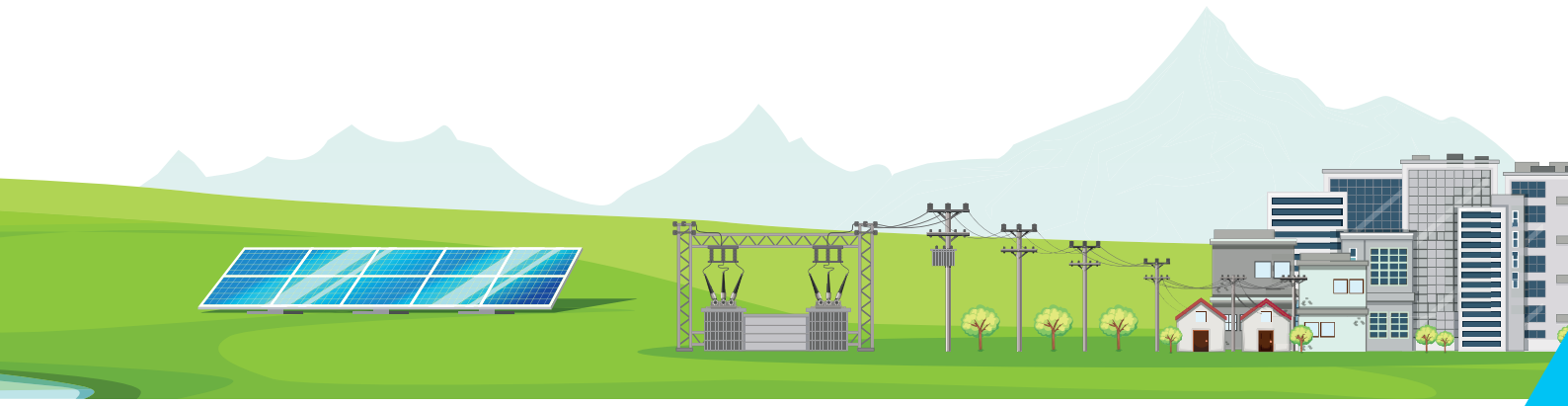




Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas, dan Organ Penunjang Direksi.

Whistleblowing Mechanism for Violations Committed by Member of the Board Of Directors, Members of Supervisory Board, Supporting Organs of Supervisory Board and Board of Directors





Perlindungan bagi Pelapor

Perum Jasa Tirta II memberikan perlindungan terhadap pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme *Whistleblowing System*. Adapun kebijakan perlindungan bagi pelapor adalah sebagai berikut:

- Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada Perusahaan.
- Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyingkapan tersebut. Selain perlindungan di atas, Perum Jasa Tirta II juga akan menyediakan perlindungan hukum. Diharapkan dengan adanya jaminan perlindungan ini, akan mendorong setiap insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan Pelapor dan keluarganya.

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

- Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas Pengaduan Pelanggaran dalam periode 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran uang melibatkan oknum karyawan yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Direksi untuk diinvestigasi Satuan Pengawasan Intern (SPI).
- Rekomendasi hasil dari investigasi yang dilakukan oleh SPI tersebut diajukan kepada Tim Disiplin untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Direksi.
- Terkait Pengaduan Pelanggaran yang melibatkan oknum anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi yang memerlukan investigasi wajib ditindaklanjuti oleh Dewan Pengawas untuk diinvestigasi Komite Audit atau melimpahkan kepada pihak independen.

Whistleblower Protection

Whistleblowers who report alleged violations through the Whistleblowing System mechanism are protected under Perum Jasa Tirta II. The following are the whistleblower protection policies:

- *The Company guarantees the whistleblower's identity.*
- *The Company guarantees the Whistleblower's protection from all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintains the confidentiality of the reported violation to the Company.*
- *Whistleblower protection also applies to parties conducting investigations and parties providing information related to the complaint/disclosure. In addition to the aforementioned safeguards, Perum Jasa Tirta II will provide legal protection. It is hoped that this guarantee of protection will encourage all Company employees and other Whistleblowers to report violations in order to ensure the safety of the Whistleblower and his or her family.*

Processing of Violation Reports

- *The Whistleblower Complaint Management Team verifies the incoming report based on the team's records. The Whistleblower Complaint Management Team will decide whether or not to investigate the Whistleblower Complaint within a period of 30 (thirty) days and can be extended for a maximum of 30 (thirty) working days.*
- *If the verification results show that there are indications of violations accompanied by sufficient evidence, the complaint can be processed to the investigation stage.*
- *Related to money violations complaints involving unscrupulous employees that require investigation must be followed up by the Board of Directors to be investigated by the Internal Audit Unit (SPI).*
- *Recommendations resulting from the investigation conducted by SPI are submitted to the Discipline Team to be followed up and reported to the Board of Directors.*
- *Related to Violation Complaints involving members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board and Supporting Organs of the Board of Directors that require investigation must be followed up by the Supervisory Board to be investigated by the Audit Committee or delegate to an independent party.*



- Direksi akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Tim Disiplin, untuk Dewan Pengawas akan memutuskan tindak lanjut atas rekomendasi Komite Audit/Independen.
- Dalam hal hasil investigasi yang dapat dibuktikan menyangkut karyawan, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Direksi tanpa melibatkan pihak- pihak yang terlibat.
- Dalam hal hasil investigasi yang dibuktikan menyangkut anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Organ Penunjang Dewan Pengawas dan Organ Penunjang Direksi, maka tindak lanjut diselesaikan oleh Dewan Pengawas tanpa melibatkan pihak-pihak yang terlibat.
- Pelaku Pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- *The Board of Directors will decide on the follow-up to the recommendations of the Disciplinary Team, while the Supervisory Board will decide on the follow-up to the recommendations of the Audit Committee/Independent.*
- *In the event that the investigation results that can be proven concern employees, the follow-up is completed by the Board of Directors without involving the parties involved.*
- *In the event that the proven results of the investigation concern members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, Supporting Organs of the Supervisory Board and Supporting Organs of the Board of Directors, the follow-up is completed by the Supervisory Board without involving the parties involved.*
- *Offenders who have been proven based on the results of the investigation, will be processed in accordance with applicable regulations.*

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Dalam memudahkan dan memastikan bahwa seluruh insan Perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan mengetahui kebijakan dan mekanisme *Whistleblowing System*, Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi melalui presentasi langsung kepada karyawan dan pemangku kepentingan. Sosialisasi *Whistleblowing System* didukung juga oleh internalisasi prinsip GCG dan materi *Code of Conduct* sehingga diharapkan seluruh insan Perusahaan dapat senantiasa patuh dan berlaku etis sesuai dengan peraturan Perusahaan.

Whistleblowing System Socialization

To facilitate and ensure that all Company personnel and other interested parties are aware of the Whistleblowing System policies and mechanisms, the Company Socialization and internalization are carried out through direct presentations to employees and stakeholders. Internalization of GCG principles and Code of Conduct materials also aids in the socialization of the Whistleblowing System, with the hope that all Company personnel will always comply and behave ethically in accordance with Company regulations.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2023

Selama tahun 2023, tidak terdapat pelaporan pengaduan pelanggaran yang masuk ke *Whistleblowing System* Perum Jasa Tirta II.

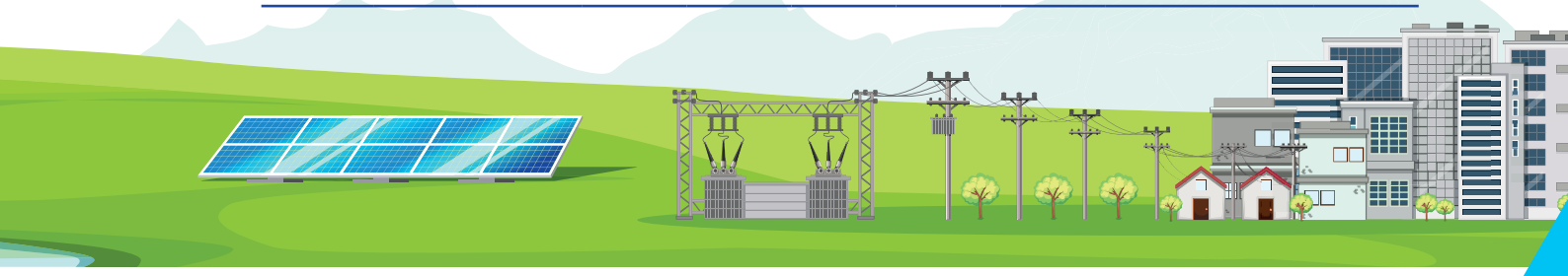
Number of Complaints and Follow-up of Complaints in 2023

There were no reports of complaints of violations that entered the Perum Jasa Tirta II Whistleblowing System in 2023.

Jumlah Pengaduan

The quantity of Complaints

Tahun *Year*	Media Penyampaian / *Delivery Media*					Klasifikasi Laporan / *Report Classification*			Ditindak Lanjuti / *Follow Up*	Selesai / *Done*
	Surat/ *Letter*	Surel/ *Email*	Web/ *Web*	Wa/ *Sms*	Lain-Lain/ *Etc*	*Fraud*	Non *Fraud*	Lainnya / *Other*		
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Management of Assets Reports of State Providers (LHKPN)

Dukungan Perum Jasa Tirta II terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari koRPBi, kolusi, dan nepotisme (KKN) diwujudkan melalui pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan dan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi wajib lapor ditujukan untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, menanamkan kepatuhan, kejujuran, dan integritas, serta transparansi di kalangan penyelenggara negara.

Dasar Hukum LHKPN

Dasar hukum kebijakan pelaporan LHKPN didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4. PRD-14/DIR/12/2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-12/DIR/07/2021 Tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II

Wajib Lapor LHKPN

Sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor LHKPN di lingkungan Perusahaan antara lain:

1. Dewan Pengawas dan Direksi;
2. Pejabat struktur sampai dengan dua tingkat di bawah Direksi;
3. Direksi Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Asosiasi;
4. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

Perum Jasa Tirta II's support for a clean and free state administration free of corruption, collusion, and nepotism (KKN) is realized through the implementation and management of policies and mechanisms for submitting the State Administrators Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK). The requirement for those who are required to report assets is intended to prevent abuse of position and authority by instilling compliance, honesty, and integrity, as well as transparency, among state administrators.

LHKPN's Legal Foundation

The following laws and regulations serve as the legal foundation for LHKPN's reporting policy:

1. *Law Number 28 of 1999 Concerning Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion, and Nepotism;*
2. *Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises; and*
3. *Law Number 13 of 2003 concerning Labour.*
4. *PRD-14/DIR/12/2022 Second Amendment to the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-12/DIR/07/2021 Regarding Guidelines for State Organisers' Wealth Report (LHKPN) for Officials in the Environment of Public Company (Perum) Jasa Tirta II*

LHKPN Mandatory Reporting

According to the applicable laws and regulations, mandatory reporting of LHKPN within the Company includes, among other things:

1. *The Supervisory Board and the Board of Directors;*
2. *Structural officials up to two levels below the Board of Directors;*
3. *Directors of Subsidiaries and/or Associated Companies; and*
4. *Other officials with strategic responsibilities in relation to state administrators.*



Mekanisme Pelaporan LHKPN

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perusahaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, di mana wajib lapor berkewajiban untuk:

1. Diperiksa kekayaan sebelum, selama, dan sesudah menjabat;
2. Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun;
3. Mengumumkan harta kekayaanya.

Mechanism for LHKPN Reporting

The mechanism for reporting Company officials' assets is carried out in accordance with Law Number 28 of 1999, which requires reporting obligations to:

1. *Check assets before, during, and after serving;*
2. *Report his assets at the time of first serving, transfers, promotions, and retirements; and*
3. *Announce his assets.*

Pelaksanaan Lapor LHKPN Tahun 2023

Perum Jasa Tirta II telah menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tahun buku 2022 yang dilaporkan di tahun 2023 oleh pejabat Perusahaan dengan jumlah dan rekapitulasi sebagai berikut:

Implementation of the LHKPN

Report for 2023 Perum Jasa Tirta II reported the following amounts and recapitulation to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2021 fiscal year, which was reported in 2023 by Company officials:

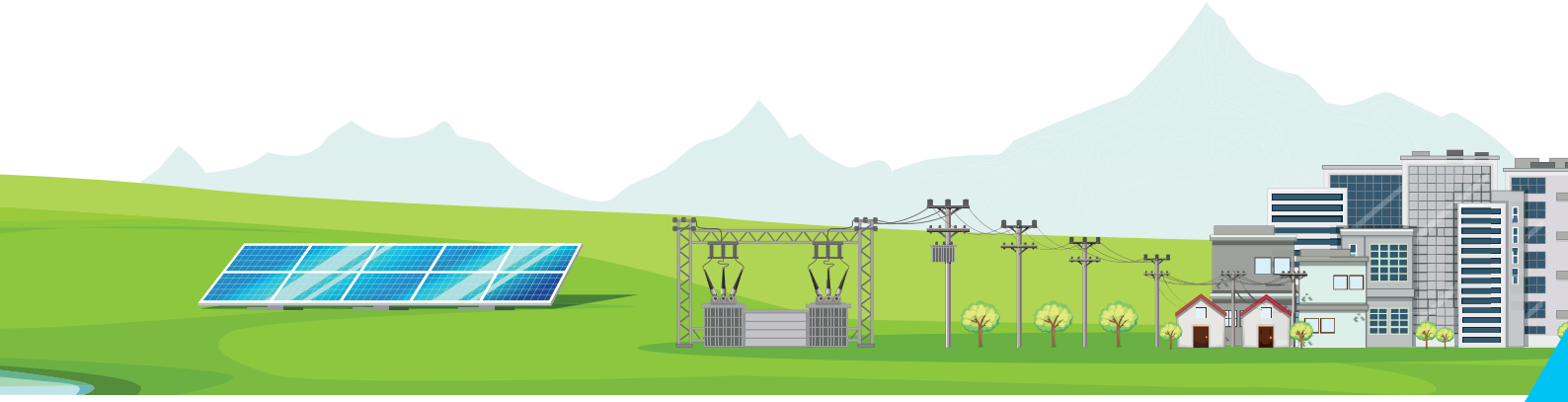
Unit Kerja/Bisnis/Anak Perusahaan / *Business/ Work Unit/Subsidiary*	Total Wajib Lapor / *Total Officials*	Pelaporan 2023 / *Reporting In 2023*			
		Telah Melaporkan / *Have Report*	%	Belum Melaporkan / *Have Not Report*	%
- Dewan Pengawas / *Supervisory Board* - Direksi / *Board of Directors* - BOD-1 (Struktural) / *BOD-1 (Structural)* - BOD-2 (Struktural) / *BOD-2 (Structural)*	39	39	100	0	0

Sosialisasi LHKPN

Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Socialization of the LHKPN

As part of its commitment to LHKPN compliance, the Company conducts routine socialization and training on procedures for using e-LHKPN to follow up on KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Organizing Announcements and Examining State Administrators' Assets.



Pengadaan Barang Dan Jasa
Procurement Of Goods And Services

Pelaksanaan dan pengelolaan barang dan jasa Perum Jasa Tirta II dilakukan melalui optimalisasi sinergi BUMN sebagai upaya pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan dengan tetap berprinsip pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparansi, fleksibilitas, jujur, adil, serta bebas dari benturan kepentingan. Penunjukan penyedia barang dan jasa dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, di mana Perusahaan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam proses pengadaan akan menjadi mudah apabila didukung oleh seluruh komponen yang terlibat dalam proses pengadaan baik Divisi Pengadaan, Unit Kerja terkait dan Penyedia. Semua pihak haruslah bersama memahami dan serentak mengimplementasikan semua etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel) yang telah terkandung dalam pasal-pasal kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen menegluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor: PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor: PRD-8/DIR/03/2020 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan PJT II.

The implementation and management of Perum Jasa Tirta II goods and services is carried out by optimizing SOE synergy in an effort to empower SOEs with the principle of mutual benefit while adhering to the principles of compliance with applicable laws and regulations, transparency, flexibility, honesty, fairness, and the absence of conflicts of interest. The appointment of providers of goods and services is done openly and through fair competition to parties who meet the requirements. The entire procurement process is carried out in accordance with clear and transparent provisions and procedures, with the Company also having its Own Estimated Price (HPS) calculated with expertise and based on accountable data.

The application of good corporate governance (GCG) principles in the procurement process will be easier if all components involved in the procurement process, including the Procurement Division, related Work Units, and Providers, support it. All parties must understand and implement all procurement ethics and principles (efficient, effective, transparent, open, competitive, fair, and accountable) outlined in the articles of the Company's Goods and Services procurement policy.

Policy Legal Foundation for Goods and Services Procurement

The procurement policy used in the process refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER- 08/MBU/12/2019 concerning general guidelines for the implementation of procurement of goods and services for State-Owned Enterprises. As a result, management issued a board of directors regulation to adopt the regulation via the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the PJT II Board of Directors Regulation Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning the guidelines for the implementation of procurement of goods/services in the PJT II environment.



Sebagai wujud komitmen terhadap kepatuhan LHKPN, Perusahaan rutin melaksanakan sosialisasi dan pelatihan terkait tata cara penggunaan e-LHKPN untuk menindaklanjuti Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

As part of Its commitment to LHKPN compliance, the Company routinely conducts socialization and training related to procedures for using e-LHKPN to ensure compliance with KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Implementing Announcements and Examination of State Administrators' Assets.

Dasar Hukum Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Kebijakan yang diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa mengacu pada peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, oleh karena itu manajemen mengeluarkan peraturan direksi untuk mengadopsi aturan tersebut melalui Peraturan Direksi Nomor: PRD-21/DIR/11/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PJT II Nomor: PRD-8/DIR/03/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di lingkungan PJT II.

Legal Basis of Policy for the Procurement of Goods and Services

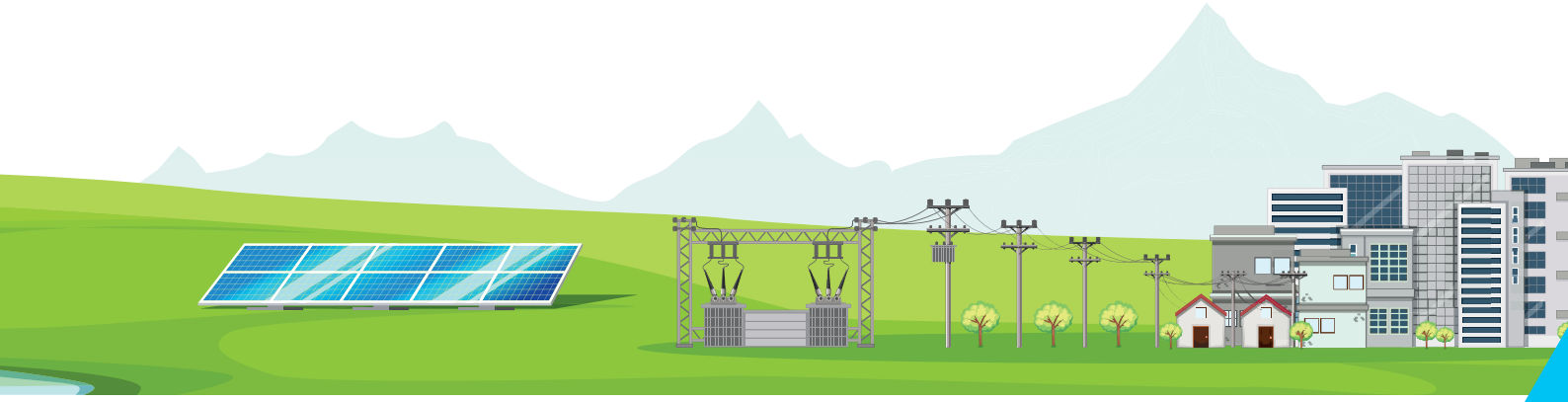
The policy applied in the process of procurement of goods and services refers to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER08/MBU/12/2019 concerning General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services for State-Owned Enterprises, therefore Therefore, management issued a board of directors regulation to adopt the regulation through the Board of Directors Regulation Number: PRD-21/DIR/11/2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the PJT II Board of Directors Number: PRD-8/DIR/03/2020 concerning Guidelines for the Implementation of the Procurement of Goods/Services in PJT II environment.

Prosedur dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa

Prosedur pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perum Jasa Tirta II dilakukan secara sistematis, dimulai dari rencana pengadaan, proses pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, serta pemakaian, penggunaan, dan manajemen aset oleh divisi terkait untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan merencanakan transformasi sistem dalam mengelola dan mengendalikan kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dengan target memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Procedures and Realization of Goods and Services

Procurement Procedures for the procurement of goods and services within Perum Jasa Tirta II are carried out systematically, starting from the procurement plan, procurement process, receipt and storage, as well as the use, use, and management of assets by the relevant divisions for approval. The company plans a system transformation in managing and controlling policies and activities related to the procurement of goods and services with the target of selecting Goods and Services Providers who are experienced and able to provide the best service quality, competitive prices, best after-sales guarantees and are carried out by experienced companies that have the appropriate expertise. with the need for goods and services.



Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program

Program anti korupsi dapat menjadi nilai tambah bagi Perusahaan dan memberikan keunggulan dari korporasi lainnya. Dalam menjalankan program ini Perum Jasa Tirta II menerapkan sistem dan prosedur yang transparan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur serta pengelolaan supplier secara obyektif berdasarkan kualifikasi dan kinerjanya. Disamping itu, Perum Jasa Tirta II mengeluarkan himbauan kepada seluruh vendor untuk tetap menjaga dan mendukung Perum Jasa Tirta II dengan tidak memberikan/melayani permintaan berupa imbalan atau hadiah dalam bentuk apapun kepada seluruh pejabat maupun karyawan Perum Jasa Tirta II.

The anti-corruption programme can be an added value for the Company and provide an advantage over other corporations. In running this programme, Perum Jasa Tirta II implements transparent systems and procedures to avoid abuse of authority and errors in the implementation of procedures and management of suppliers objectively based on their qualifications and performance. In addition, Perum Jasa Tirta II issued an appeal to all vendors to maintain and support Perum Jasa Tirta II by not providing / serving requests in the form of rewards or gifts in any form to all Perum Jasa Tirta II officials and employees.

Kebijakan Gratifikasi

Program Pengendalian Gratifikasi merupakan program kerja sama yang dilakukan antara Perum Jasa Tirta II dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik (KPK). Adapun penerapan Program Pengendalian Gratifikasi diawali dengan penerapan budaya Perusahaan yang didalamnya terdapat tata nilai atau nilai-nilai utama yang menjadi *corporate value* Perum Jasa Tirta II . Program Pengendalian Gratifikasi adalah sekumpulan perangkat dan rangkaian kegiatan serta mekanisme pengendalian gratifikasi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawai dari praktik gratifikasi yang dilarang.

Dalam mewujudkan komitmen Program Pengendalian Gratifikasi maka *corporate value* Perum Jasa Tirta II dijabarkan dalam bentuk *code of conduct* (etika usaha dan tata perilaku) untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh pegawai Perum Jasa Tirta II dalam mengelola Perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan . Salah satu etika perilaku yang terdapat pada *code of conduct* yaitu standar etika untuk menghindari benturan kepentingan (penanganan benturan kepentingan/*conflict of interest*) dan penyalahgunaan jabatan serta etika untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan.

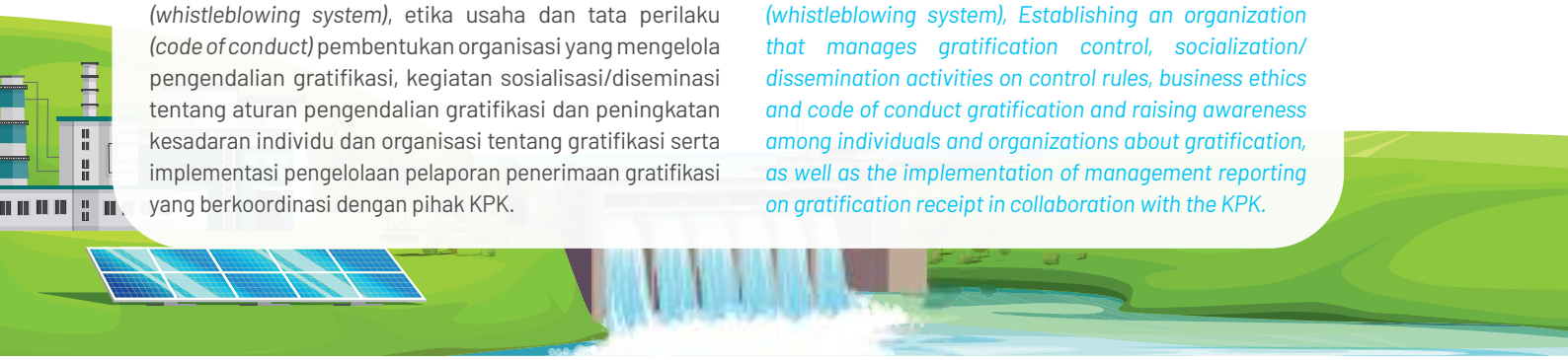
Program pengendalian gratifikasi terdiri dari pembuatan perangkat aturan tentang pengendalian gratifikasi, perluasan harta kekayaan pegawai, tata kerja pelaporan pengaduan *(whistleblowing system)*, etika usaha dan tata perilaku *(code of conduct)* pembentukan organisasi yang mengelola pengendalian gratifikasi, kegiatan sosialisasi/diseminasi tentang aturan pengendalian gratifikasi dan peningkatan kesadaran individu dan organisasi tentang gratifikasi serta implementasi pengelolaan pelaporan penerimaan gratifikasi yang berkoordinasi dengan pihak KPK.

Policy on Gratification

The Gratification Control Program is a joint initiative of Perum Jasa Tirta II and the Republican Corruption Eradication Commission (KPK). The implementation of the Gratification Control Program begins with the establishment of a corporate culture in which there are core values or values that become Perum Jasa Tirta II's corporate values. The Gratification Control Program is a collection of tools and activities, as well as a continuous gratification control mechanism, designed to protect employees from prohibited gratification practices.

In order to fulfill the commitment of the Gratification Control Program, Perum Jasa Tirta II's corporate values are described in the form of a code of conduct (business ethics and behavior) to serve as a behavioral reference for the Supervisory Board, Board of Directors, and all employees of Perum Jasa Tirta II in managing the Company in order to achieve the Company's vision, mission, and objectives. One of the ethical behaviors outlined in the code of conduct is the requirement to avoid conflicts of interest (handling conflicts of interest) and abuse of office, as well as the prohibition on accepting any form of gratuity related to positions.

The gratification control program consists of developing a set of gratification control rules, expanding employee assets, working procedures for reporting complaints (whistleblowing system), Establishing an organization that manages gratification control, socialization/ dissemination activities on control rules, business ethics and code of conduct gratification and raising awareness among individuals and organizations about gratification, as well as the implementation of management reporting on gratification receipt in collaboration with the KPK.



Pakta Integritas

Dalam rangka menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan setiap pegawai Perusahaan telah menandatangi pakta integritas untuk berkomitmen sebagi berikut:

1. Senantiasa mematuhi Hukum dan Ketentuan-etentuan Peraturan perundang-Undangan;
2. Bertindak objektif dan berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen;
3. Berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara amanah dan professional sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* guna memberikan hasil terbaik bagi Perusahaan;
4. Tidak pernah dan tidak akan pernah membuat keputusan dan/atau memberikan perintah yang bertujuan akan memanfaatkan Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menguntungkan saya secara pribadi, keluarga dan/atau golongan tertentu;
5. Berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadinya tindakan Fraud dilingkungan Perusahaan dan tidak akan melakukan segala bentuk tindakan Fraud serta menghindarkan diri dari perbuatan yang mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindakan *Fraud*;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
7. Tidak mempunyai jabatan lain pada Badan Usaha lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan;
8. Akan mengajak pelaku-pelaku usaha yang berkaitan di Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk juga melaksanakan Pakta Integritas, serta menyampaikan informasi kepada Perusahaan tentang terjadinya dan ataupun indikasi adanya *Fraud*, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Penguru dan/atau Pekerja Perusahaan;
9. Telah memahami dan bersedia untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya:
   a. Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan;
   b. Standar Etika Perusahaan;
   c. Budaya Perusahaan;
   d. Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko serta budaya Anti *Fraud*;
   e. Demi tercapainya tata kelola Perusahaan yang baik.

Pact of Integrity

In order to uphold Good Corporate Governance in the Company, every employee of the Company has signed an integrity pact to commit as follows:

1. *Always comply with the Law and the Provisions of the Laws and Regulations;*
2. *Act objectively and adhere to ethical and moral values, be fair, transparent, consistent and uphold honesty and commitment;*
3. *Committed to carrying out duties and responsibilities in a trustworthy and professional manner in accordance with the principles of Good Corporate Governance to provide the best results for the Company;*
4. *Never and will never make a decision and/or give an order that aims to utilise the Company, either directly or indirectly, to benefit me personally, my family and/or certain groups;*
5. *Participate actively in fraud prevention and eradication efforts and are willing to report fraudulent actions within the Company; will not engage in all forms of fraudulent behavior; and will avoid actions that facilitate or provide opportunities for others to engage in fraudulent behavior.*
6. *Establishing a work environment free of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN);*
7. *Having no other positions in other Business Entities that may cause a direct or indirect conflict of interest with the Company;*
8. *Will invite related business actors in the Company either directly or indirectly to also implement the Integrity Pact, and convey information to the Company about the occurrence and or indications of Fraud, violations or other illegal acts committed by the Company's Teachers and/or Workers;*
9. *Have comprehended and are willing to carry out as effectively as possible:*
   a. *Good Corporate Governance Guidelines for the Company;*
   b. *Ethical Standards for the Company;*
   c. *Corporate Culture;*
   d. *Compliance Culture, Risk Culture, and Anti-Fraud Culture;*
   e. *In order to achieve good corporate governance.*



Pengelolaan Pengendalian Gratifikasi

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

Laporan Gratifikasi Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib untuk menyampaikan laporan Gratifikasi dalam hal:

1. Telah menerima Gratifikasi;
2. Telah menolak suatu penerimaan dan/atau permintaan Gratifikasi;
3. Telah memberikan Gratifikasi;
4. Sama sekali tidak melakukan praktek Gratifikasi (dalam hal ini Pimpinan/Kepala Unit Kerja tidak menerima Laporan atas penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi, maka wajib melakukan pelaporan paling lambat setiap tanggal 15 Bulan berikutnya).

Pegawai Perusahaan atau Pihak Ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Pedoman ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan melalui Divisi Kepatuhan. Perusahaan menjamin bahwa proses pelaporan Gratifikasi yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun Pihak Ketiga akan dijaga kerahasiaannya. Proses pelaporan dalam program pengendalian Gratifikasi antara lain:

1. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi Dalam Kedinasan kepada Divisi Kepatuhan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan Gratifikasi.
2. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan penolakan atas Penerimaan Gratifikasi kepada Divisi Kepatuhan.
3. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan atas Pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.
4. Setiap Pegawai Perusahaan harus melaporkan permintaan dari Pihak Ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan/atau pemaksaaan yang terkait dengan kelancaran proses Bisnis Perusahaan kepada Unit Kerja terkait untuk selanjutnya disampaikan kepada Divisi Kepatuhan.
5. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Divisi Kepatuhan menyampaikan Lembar Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola setiap bulan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Gratification Management Gratification

Control Mechanism Reporting

Report on Gratification Every Gratification Reporting Compulsory is required to submit a Gratification report in the following circumstances:

1. *Received Gratification;*
2. *Rejected an acceptance and/or request for Gratification;*
3. *Given Gratification;*
4. *Completely not practicing Gratification (If the Head/ Head of Work Unit does not receive a Report on the Acceptance and/or Granting of Gratification, it is required to report it by the 15th of the following month).*

Employees of the Company or Third Parties who become aware of any violation of the provisions of this Code must immediately report the violation to the Compliance Division in accordance with the applicable provisions in the Company. The Company guarantees that the gratification reporting process will be kept confidential by Company Personnel and Third Parties. The reporting process in the Gratification control program includes the following steps:

1. *Every employee of the Company must report the receipt of Gratification which is considered a bribe and Gratification in Service to the Compliance Division no later than 7 (seven) working days after receiving the Gratification.*
2. *Every Employee of the Company must report the rejection of Gratification Acceptance to the Compliance Division.*
3. *Every employee of the company must report on giving to a third party that is not in accordance with the provisions of the gift.*
4. *Every Employee of the Company shall report requests from Third Parties that lead to extortion and/or coercion related to the smooth running of the Company's Business process to the relevant Work Unit to be further submitted to the Compliance Division.*
5. *The Compliance Division submits the Handling Submission Sheet for the Reporting of Gratification Receipt to the Corruption Eradication Commission.*
6. *The Compliance Division submits the Recapitulation Sheet of Handling and Follow-up of Revenue Reporting managed every month to the Corruption Eradication Commission.*



7. Divisi Kepatuhan menyampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi kepada Direksi setiap periode 3 (tiga) bulan.

7. The Compliance Division submits the Recapitulation of Handling and Follow-up Reporting of Acceptance and Giving of Gratuities to the Board of Directors every 3 (three) month period.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

Perusahaan senantiasa selalu mensosialisasikan terkait penerapan Gratifikasi kepada setiap insan Perusahaan melalui media elektronik seperti pada media sosial Perusahaan, pamphlet dan melalui penerbitan slogan-slogan anti Gratifikasi.

Policy of Gratification Socialization

The Company always socialises the implementation of Gratification to every employee of the Company through electronic media such as on the Company's social media, pamphlets and through the publication of anti-gratification slogans.

Laporan Gratifikasi 2023

Selama tahun 2023 pada Perum Jasa Tirta II tidak terdapat laporan gratifikasi.

Gratification Report 2023

There was no gratification report at Perum Jasa Tirta II in 2023.

Sanksi/Tindaklanjut atas Pengaduan tahun 2023

Selama tahun 2023 tidak terdapat sanksi dan *fraud*.

Sanctions/Complaint Follow-up in 2023

During 2023 there were no sanctions and no fraud.

Pelanggaran *(Fraud)* Internal

Pelanggaran *(Fraud)* Internal dilakukan oleh internal Perusahaan mapun internal yang berkolusi dengan eksternal. Pemeriksaan atas pelanggaran *(fraud)* internal dilakukan oleh Internal Audit.

Internal Fraud

Internal Fraud is committed by the Company's internal or internal colluding with external. Examination of internal offences (fraud) is carried out by Internal Audit.

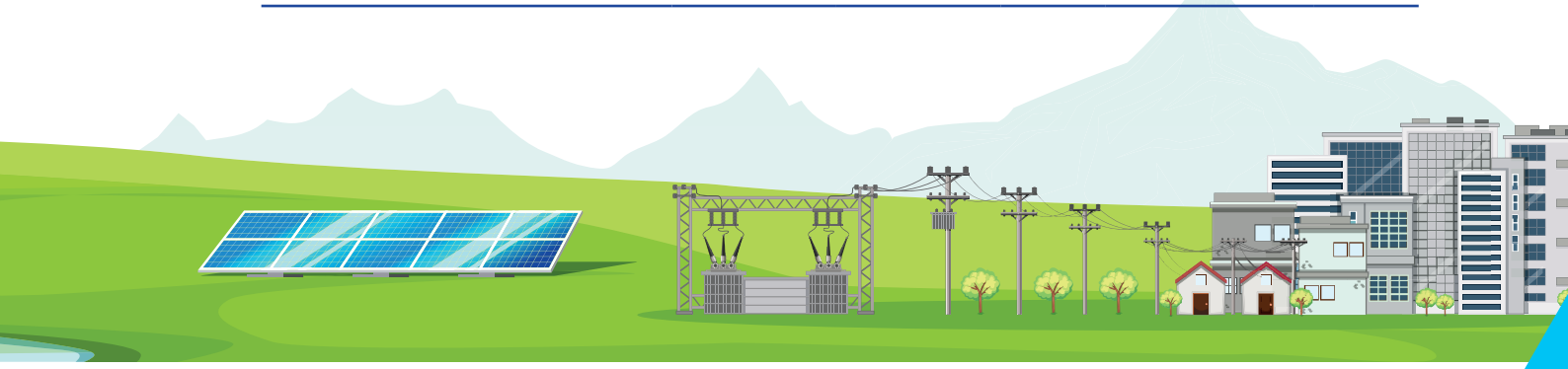
Korupsi Internal

Kecurangan internal dilakukan oleh pihak internal atau internal yang berkolusi dengan pihak eksternal perusahaan. Audit Internal bertanggung jawab untuk menyelidiki kecurangan internal.

Internal Corruption

Internal fraud is committed by internal parties or internal parties in collusion with external parties of the company. Internal Audit is responsible for investigating internal fraud.

Internal Fraud / *Internal Fraud*	Jumlah Fraud Yang Dilakukan / *Number Of Frauds Permitted*					
	Anggota Dewan Pengawas / *Members Of The Supervisory Board*		Pegawai Tetap / *Permanent Employee*		Pegawai Tidak Tetap / *Temporary Employees*	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total Penyimpangan / *Total Fraud*	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan / *Telah diselesaikan*	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di Internal Perseroan / *In the process of completion in the Company's Internal*	0	0	0	1	0	0
Belum diupayakan penyelesaian / *No solution yet*	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum / *Has been followed up through the Legal Process*	0	0	0	0	0	0



Buyback Saham Dan *Buyback* Obligasi
Stock Buyback and Bond Buyback

Buyback Saham

Hingga 31 Desember 2023 Perum Jasa Tirta II tidak pernah menawarkan dan/atau menjual sahamnya kepada pihak manapun, sehingga tidak pernah melakukan pembelian kembali *(buyback)* sahamnya.

Share Repurchase

Until 31 December 2023 Perum Jasa Tirta II has never offered and/or sold its shares to any party, thus it has never bought back its shares.

Buyback Obligasi

Hingga 31 Desember 2023 Perum Jasa Tirta II tidak pernah menerbitkan obligasi, sehingga tidak pernah melakukan pembelian kembali *(buyback)* obligasi.

Bond Purchase

Perum Jasa Tirta II had never issued bonds as of December 31, 2023, so it had never bought back (buyback) bonds.

Rencana Strategis Perusahaan
Company's Strategic Plan

Rencana Strategis Perusahaan, baik jangka panjang maupun menengah telah dijelaskan pada bagian Strategi Perum Jasa Tirta II tahun 2023 Bab Analisis dan Pembahasaan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

The Company's Strategic Plan, both long and medium term, has been explained in the Perum Jasa Tirta II Strategy 2023 section of the Management Discussion and Analysis chapter in this Annual Report.

Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan
Transactions Containing Conflict of Interest

Selama tahun 2023, tidak terjadi transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

During 2023, there were no transactions containing conflicts of interest.

Perselisihan Internal Perusahaan

Selama tahun 2023 tidak pernah terjadi perselisihan internal di dalam Perum Jasa Tirta II, sehingga tidak ada informasi mengenai perselisihan internal Perum Jasa Tirta II.

Disputes within the Company

There was no internal conflict within Perum Jasa Tirta II in 2023, so there is no information regarding the internal conflict of Perum Jasa Tirta II.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam *(Insider Trading)*

Perum Jasa Tirta II hingga tanggal 31 Desember 2023 tidak pernah mencatatkan sahamnya ataupun obligasi ke Bursa Efek Indoensia (BEI) ataupun bursa mnapun, sehingga tidak ada peristiwa yang berpotensi memunculkan praktik *insider trading*.

Prevention of Insider Transactions

Perum Jasa Tirta II has never listed its shares or bonds on the Indonesia Stock Exchange (IDX) or any other exchange as of December 31, 2023, so there are no events that could lead to insider trading practices.



Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan

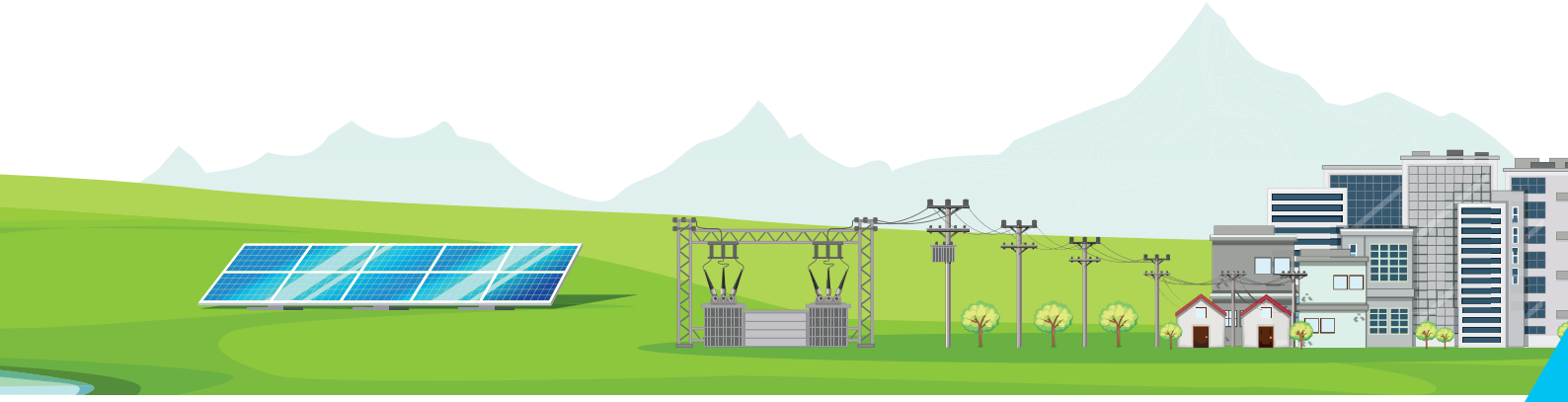
Perum Jasa Tirta II memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs *web* Perusahaan sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs *web* BI dan Perum Jasa Tirta II.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Perum Jasa Tirta II.
3. Laporan Tahunan Perum Jasa Tirta II yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada *regulator*, *rating agency*, lembaga pengembangan perPerusahaan an, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs *web* Perum Jasa Tirta II.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang diantaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Pengawas dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata Kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs *web* Perum Jasa Tirta II.
5. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan termasuk jaringan kantornya dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs *web* Perum Jasa Tirta II, agar konsumen, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Perum Jasa Tirta II.
6. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Konsumen dalam menggunakan layanan Perusahaan yang dipublikasikan melalui situs web Perum Jasa Tirta II untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Transparency of the Company's Financial and Non-Financial Condition

The company Perum Jasa Tirta II fulfills its transparency and publication of financial and non-financial conditions in accordance with applicable regulations by submitting and publishing the following information through print media and the Company's website:

1. *Monthly Financial Reports to regulators, which are also published through the websites of BI and Perum Jasa Tirta II.*
2. *Quarterly Financial Reports to Regulators, which are also made available in print and on the Perum Jasa Tirta II website.*
3. *Perum Jasa Tirta II Annual Report prepared and presented in accordance with the provisions and submitted to regulators, rating agencies, corporate development institutions, research institutions and financial magazines and published through Perum Jasa Tirta II website.*
4. *Corporate Governance Information, which includes the Corporate Governance Annual Report, Vision, Mission, Corporate Values, Composition and Profile of the Supervisory Board and Board of Directors, as well as internal provisions related to governance ranging from the Articles of Association to the Charter of the Committees which are also published through the Perum Jasa Tirta II website.*
5. *Information on the Company's products and services including its office network is published through the Annual Report and Perum Jasa Tirta II website, so that consumers, investors and the wider community can easily access information on Perum Jasa Tirta II's products and services.*
6. *Information on Complaint Submission Procedure, Information Security Policy and Tips for Consumers in using the Company's services published through Perum Jasa Tirta II's website for the implementation of consumer protection provisions.*
7. *Other information that aims to support information disclosure, financial education and services to the public.*



Praktik *Bad Corporate Governance*

Bad Corporate Governance Practice

Salah satu komitmen Perum Jasa Tirta II dalam menjalankan praktik terbaik GCG diwujudkan melalui pencegahan dan minimalisasi potensi terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* yang mampu membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perusahaan. Evaluasi atas keberhasilan pencegahan terjadinya praktik *Bad Corporate Governance* dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Selama tahun 2023, tidak terdapat laporan terkait indikasi aktivitas kegiatan usaha Perusahaan yang mencemari lingkungan sekitar.

Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Selama tahun 2023 Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Hal tersebut juga sejalan dengan tidak terdapatnya teguran kepada Perusahaan terkait permasalahan perpajakan.

Kasus Terkait Buruh dan Pegawai

Selama tahun 2023 tidak tercatat adanya kasus yang melibatkan Perusahaan dengan buruh atau pegawai Perusahaan. Rekapitulasi perkara dan gugatan baik yang dilakukan dan/atau ditunjukkan kepada Perusahaan telah dijabarkan dalam pembahasan informasi Permasalahan Hukum dalam Laporan Tahunan ini.

Hubungan dengan Pejabat Publik dan Pejabat Pemerintah

Perusahaan memiliki kebijakan yang mengatur hubungan dengan pejabat publik dan pejabat Pemerintah melalui ketentuan hubungan kerja yang dimuat dalam Pedoman Perilaku ***(Code of Conduct)*** Perusahaan.

One of Perum Jasa Tirta II's commitments in implementing GCG best practices is realized through the prevention and minimization of the potential for Bad Corporate Governance practices that can negatively impact the Company's business sustainability. The following description describes the evaluation on the success of preventing the occurrence of Bad Corporate Governance practices:

Report on Company Activities that Pollute the Environment

There were no reports of the Company's business activities polluting the surrounding environment during 2023.

Report on Fulfilment of Tax Obligations

The Company met all of its tax obligations in 2023. This is also consistent with the absence of a tax warning to the Company.

Labour and Employee Related Cases

There were no recorded cases involving the Company and its employees or employees of the Company in 2023. The discussion of Legal Issues information in this Annual Report includes a recapitulation of cases and lawsuits that have been made and/or presented to the Company.

Relationships with Public Officials and Government Officials

Through the employment relationship provisions in the Company's Code of Conduct, the Company has a policy that regulates relations with public officials and government officials.



Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola

Penerapan GCG Perum Jasa Tirta II secara optimal dilakukan dengan penguatan berbagai kebijakan dan manual GCG untuk mencapai praktik-praktik terbaik, system dan prosedur yang andal sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi perPerusahaan an. Perum Jasa Tirta II melengkapi pelaksanaan GCG dengan berbagai kebijakan dan *Standard Operating Procedures (SOP)* antara lain:

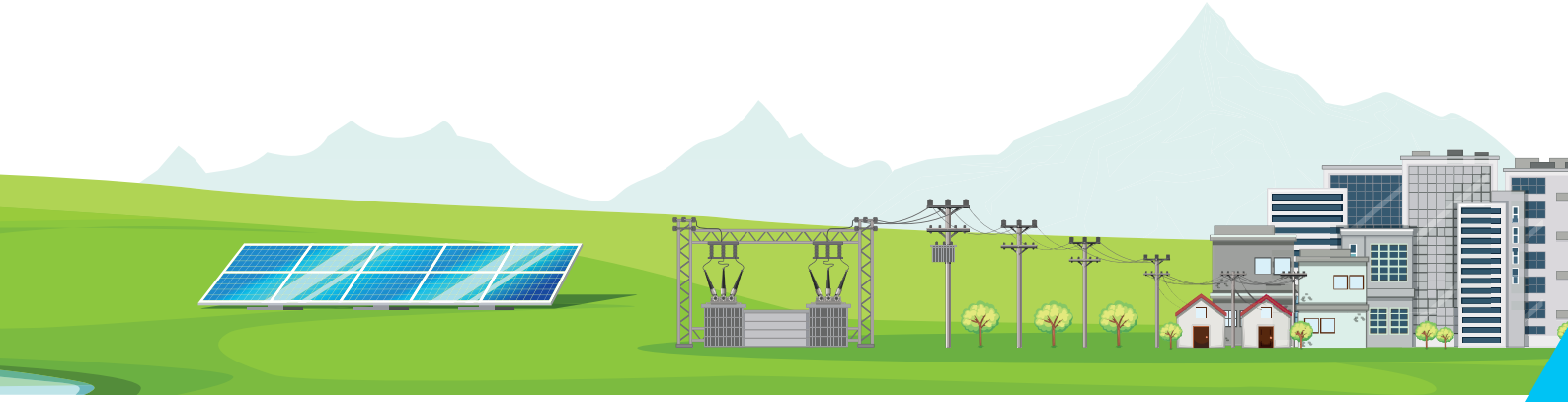
- Penyusunan Buku Pedoman Tata Kelola Perusahaan *(Good Corporate Governance)*;
- *Charter* Dewan Pengawas
- *Charter* Direksi
- *Charter* Komite Audit
- *Charter* Komite Pemantau Resiko
- *Charter* Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Koordinasi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan dengan Dewan Pengawas
- *Charter* Internal Audit
- *Code of Conduct*
- Kebijakan dan SOP Lainnya

Perum Jasa Tirta II has developed and implemented operational policies for all work units in accordance with corporate governance principles in order to improve the quality and scope of sustainable governance implementation.

GCG Implementation Governance Policy

Perum Jasa Tirta II is carried out optimally by strengthening various GCG policies and manuals in order to achieve best practices, dependable systems, and procedures in accordance with business developments and company regulations. Perum Jasa Tirta II supplements GCG implementation with a variety of policies and Standard Operating Procedures (SOP), such as:

- *Preparation of the Good Corporate Governance Manual;*
- *Supervisory Board Charter*
- *Charter of the Board of Directors*
- *Audit Committee Charter*
- *Risk Monitoring Committee Charter*
- *Remuneration and Nomination Committee Charter*
- *Charter of Coordination of the Director in Charge of Compliance Function and Compliance Working Unit with the Supervisory Board*
- *Internal Audit Charter*
- *Code of Conduct*
- *Other Policies and SOPs*







TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology

Laporan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Manajemen Mutu

Information Technology (IT) Report and Quality Management System

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumberdaya air, PJT II senantiasa melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem teknologi informasi pada semua aspek operasional sesuai dengan perkembangan dan standar yang berlaku. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, PJT II melakukan langkah-langkah perubahan yang strategis di bidang TI dalam rangka peningkatan pelayanan PJT II .

As a company engaged in the management of water resources, PJT II continues to improve the application of information technology systems in all operational aspects in accordance with applicable developments and standards. To anticipate the increasing needs and development of information technology, PJT II takes strategic change steps in the IT field in order to improve PJT II services.

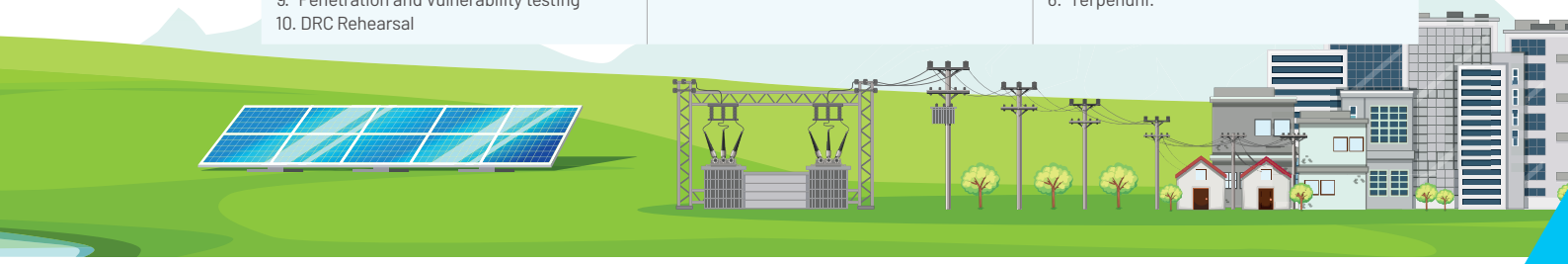
Sepanjang tahun 2022 fokus PJT II dalam bidang TI adalah:

Throughout 2022 the focus of PJT II in the IT field is:

URAIAN *Description*	STATUS *Status*	KETERANGAN *Information*
Pemenuhan Standar IT Danareksa Holding pada Aspek Infrastruktur dan IT Security. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. Ketersediaan *Email Domain* Perusahaan; 2. Ketersediaan Data Center (DC) 3. Penerapan Sistem *Backup* dan Replikasi 4. Ketersediaan *Primary Link Internet* (Kantor, DC & DRC) 5. Ketersediaan *Secondary Link Internet* (Kantor dan DC) 6. Penerapan *Virtualisasi Server* 7. Penerapan Sistem *Monitoring Server* dan Jaringan 8. Penerapan *Firewall (VPN IPSEC, IPS)* 9. Penerapan Antivirus 10. Penerapan *SSL (Secure Socket Layer)* 11. Penerapan *Active Directory/LDAP* 12. *Disaster Recovery Center (DRC)* 13. *SIEM (Security Information and Event Management)*	*Terpenuhi (Close)*	*Terpenuhi (Close)*
Pemenuhan Standar IT Danareksa Holding pada Aspek Business Process. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: a. Sistem Pencatatan Keuangan / ERP b. HRIS c. Website Korporasi d. E-Office (Digital Signature) e. Dashboard Management f. GRC (Governance, Risk, Compliance System	1. Sistem Pencatatan Keuangan / *ERP (Close)* 2. *Human Resource Information System (HRIS) Close* 3. *Website Korporasi (Close)* 4. *E-Office Digital Signature (Open)* e. *Dashboard Management (Open)* f. *GRC (Governance, Risk, Compliance System (Close)*	1. Terhitung sejak tahun 2017 PJT II telah menggunakan Tools ERP (Odoo) untuk mendukung sistem Pencatatan Keuangan. Sistem ini kemudian dikembangkan pada Sd. Tahun 2022 Audited tahun 2022 dari eksternal Perusahaan guna mempertinggi tingkat akurasi proses pelaporan keuangan. 2. Terhitung sejak tahun 2020 PJT II telah mengunakan Sistem Informasi Karyawan guna mendukung pengelolaan database karyawan, penggajian dan pengelolaan absensi secara online. Sistem ini kemudian dikembangkan pada Sd. Tahun 2022 Audited tahun 2022 oleh Pengembang dari Eksternal Perusahaan guna mempertinggi tingkat akurasi dan melengkapi modul-modul pengelolaan data Karyawan Perusahaan. 3. –



URAIAN *Description*	STATUS *Status*	KETERANGAN *Information*
		4. PJT II telah menggunakan aplikasi tata persuratan yang diberinama "JatiVio" sejak tahun 2020, namun sehubungan dengan belum terimplementasinya digital signature, maka pada tanggal 28 Oktober 2022 PJT II telah mengajukan kebutuhan E-Office+E- Signature kepada Danareksa Holding sesuai surat Dinas Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Nomor: SD- /DKSMR/TI/10/2022 sebagai salah satu bentuk dukungan kepesertaan IT Shared Service Danareksa (ITSSD) 5. Semula PJT II telah mempersiapkan *Dashboard Management* sebagai portal informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang digunakan di lingkungan Perusahaan, namun demikian sebagai tindak lanjut upaya mendukung implementasi *Dashboard Management Danareksa Holding*, maka pada tahun 2023 PJT II telah mengalokasikan anggaran "aktivasi akun" agar dapat mengakses dan meng-upload informasi terkait PJT II pada *Dashboard Management* Danareksa 6. Aplikasi E-GRC merupakan aplikasiyang dikembangkan untuk membantu pengelolaan peraturan, risiko dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku; Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi SIMRISK yang telah digunakan PJT II sejak tahun 2019 dengan menambah fungsi audit dan compliance. Proses pembangunan aplikasi ini diselenggarakan selama 4 (empat) bulan didampingi oleh narasumber dari unit-unit proses bisnis untuk memastikan ketetepatan pemenuhan modul-modul yang diperlukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pemenuhan Standar IT Danareksa Holding pada Aspek Tata Kelola. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut: 1. IT Master Plan 2. Kebijakan Teknologi Informasi 3. Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi 4. Kebijakan Operasional Teknologi Informasi 5. Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi 6. Disaster Recovery Plan (DRP) 7. Asesmen IT Maturity 8. Asesmen INDI 4.0 9. Penetration and Vulnerability testing 10. DRC Rehearsal	a. *IT Master Plan (Close)* b. Kebijakan Pengembangan dan Operasional Teknologi Informasi serta Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Open) c. Disaster Recovery Plan d. *Asesmen IT Maturity (Close)* e. *Asesmen INDI 4.0 (Close)* f. *Penetration and Vulnerability testing (Close)* *a. DRC Rehearsal*	1. Sudah Terpenuhi dengan adanya ITMP PJT II Tahun 2020 s/d 2024 2. Kebijakan Pengembangan dan Operasional Teknologi Informasi serta Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi telah selesai disusun oleh Konsultan IT, namun mengingat belum dapat diimplementasikan pada tahun 2022 maka kebijakan ini direncanakan ditetapkan melalui Peraturan Direksi PJT II pada Triwulan I Tahun 2023. 3. Terpenuhi. 4. Terpenuhi dengan skor 2,09 5. Terpenuhi dengan skor 2,05 6. Terpenuhi.



Laporan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Manajemen Mutu
Information Technology (IT) Report and Quality Management System



Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya.

The development of information technology that is growing rapidly and competition between companies is increasingly competitive requires PJT II to organize and improve the quality of services based on information technology to provide the best service to customers and the public. Because technology is the main key that enables us to provide products and services to customers, measure and track business performance, and make the right management decisions for business continuity.

Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

In order to maintain the effectiveness and efficiency as well as the relevance of IT use, the Company strives to create sustainable innovation by taking into account business needs, both in policies, processes, and the infrastructure it owns. Supported by regular evaluation mechanisms, the presence of competent IT human resources, and careful planning, the Company is optimistic that it can move progressively towards achieving the stated vision, mission and business goals.

Pada tahun 2022, PJT II kembali melaksanakan penyesuaian IT Masterplan selaras dengan Perubahan pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

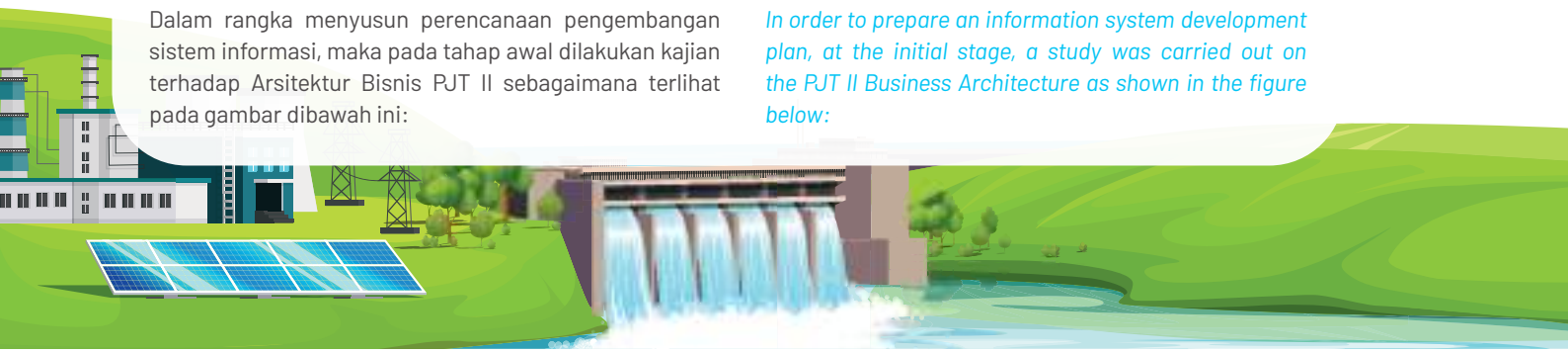
In 2022, PJT II will again carry out adjustments to the IT Master Plan in line with the Changes in the Company's Long-Term Plan (RJPP).

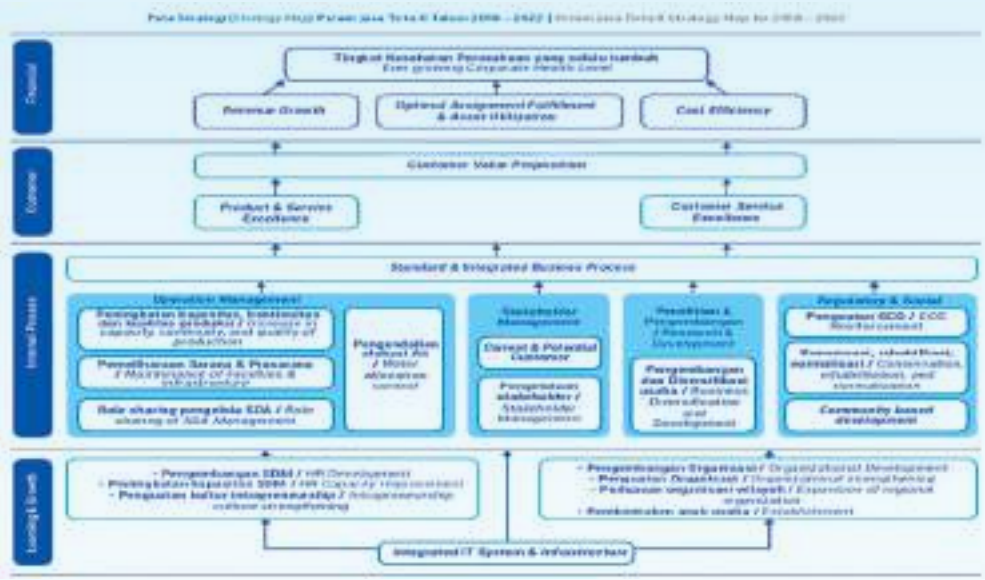
Didalam dokumen tersebut terdapat 3 (tiga) kategori perencanaan pengembangan IT, yang meliputi perencanaan pengembangan sistem informasi atau aplikasi, penguatan infrastruktur dan perbaikan tata kelola IT perusahaan.

In this document, there are 3 (three) categories of IT development planning, which include planning for information system development or applications, strengthening infrastructure and improving corporate IT governance.

Dalam rangka menyusun perencanaan pengembangan sistem informasi, maka pada tahap awal dilakukan kajian terhadap Arsitektur Bisnis PJT II sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:

In order to prepare an information system development plan, at the initial stage, a study was carried out on the PJT II Business Architecture as shown in the figure below:





Peta Strategi TI

Tujuan Perusahaan dalam memelihara komitmen pengembangan TI secara berkelanjutan yang terarah dan terukur diwujudkan melalui penyusunan peta strategi *(strategy map)* TI sebagai acuan dasar yang memuat strategi utama pengembangan dan pengelolaan TI dalam proses bisnis yang dijalankan. Adapun penyusunannya didasarkan pada kebutuhan Perusahaan untuk memperkuat lini fungsional serta arah pengembangan bisnis ke depan.

Rantai Nilai Pengelolaan Bisnis

Sebuah perusahaan pada dasarnya merupakan sebuah kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mendesain, menghasilkan, memasarkan, menyajikan dan mendukung produk atau jasa yang dihasilkan. Kesatuan aktivitas tersebut direpresentasikan ke dalam suatu bentuk rantai nilai *(value chain)*. Pendekatan rantai nilai ini membedakan aktivitas bisnis ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (1) aktivitas utama *(primary activities)* yang berkaitan langsung dengan *core business* Perusahaan; dan (2) aktivitas pendukung *(supporting business)* yang tidak berkaitan langsung dengan *core business*, tetapi pengelolaannya dapat menentukan kesuksesan aktivitas utama.

Aktivitas-aktivitas tersebut dikelola oleh perusahaan menggunakan instrumen unit/fungsi bisnis yang dimuat dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam

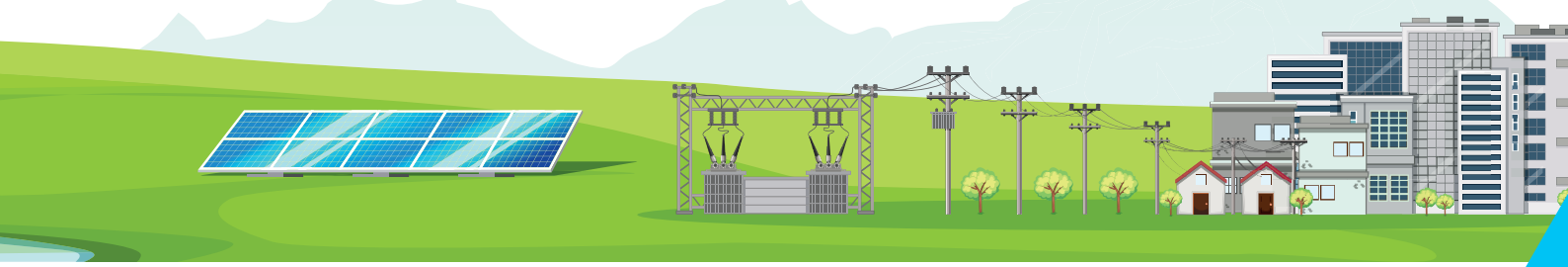
IT Strategy Map

The Company's objective in maintaining IT development commitment that is directed and measurable is realized through the preparation of the IT strategy map as a basic reference that contains the main strategies for developing and managing IT in the business processes that are carried out. The preparation is based on the Company's need to strengthen functional lines and the direction of business development going forward.

Business Management Value Chain

A company is basically a collection of activities carried out to design, produce, market, present and support the products or services it produces. All of these activities can be represented in the form of a value chain. This value chain approach distinguishes business activities into 2 (two) large groups, namely (1) Primary activities, which are directly related to the company's core business; and (2) supporting activities that are not directly related to the core business but their management can determine the success of the main activities.

These activities are managed by the company using business unit/function instruments contained in the organizational structure responsible for managing

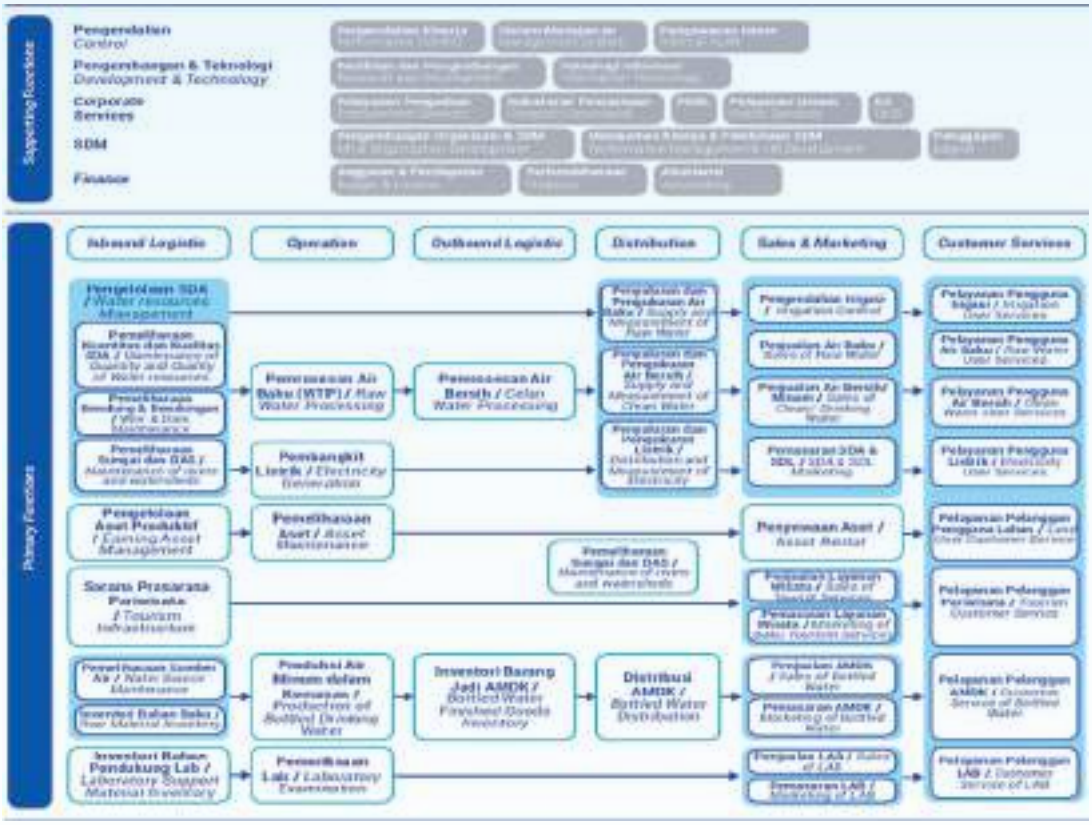


mengelola efektivitas dan efisiensi aktivitas bisnis secara keseluruhan. Dengan demikian, guna memahami bisnis yang dikelola Perum jasa Tirta II maka perlu dilakukan identifikasi terhadap seluruh fungsi bisnis yang terdapat di Perusahaan sehingga dapat dianalisis sejauh mana kebutuhan fungsi, dukungan, dan infrastruktur TI bagi kelancaran operasional bisnis yang dijalankan.

the effectiveness and efficiency of overall business activities. Thus, in order to understand the business managed by Perum Jasa Tirta II, it is necessary to identify all business functions in the Company so that it can be analyzed the extent to which the needs of functions, support, and IT infrastructure for the smooth running of business operations are run.

Adapun model rantai nilai bisnis Perum Jasa Tirta II diuraikan dalam arsitektur bisnis sebagai berikut:

The Perum Jasa Tirta II business value chain model is described in the business architecture as follows:



STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA TI / *It Management Organizational Structure*



Tata Kelola Dan Manajemen TI

Pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan Perum Jasa Tirta II diarahkan pada pemenuhan best practices *Good Corporate Governance (GCG)* dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2018 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, regulasi eksternal relevan lainnya, serta peraturan internal Perusahaan. Analisis dilakukan terhadap ketiga komponen tata kelola, yaitu (1) Struktur Tata Kelola TIK Korporat; (2) Proses tata kelola TIK; dan (3) Struktur Organisasi Pengelola TI.

Struktur Tata Kelola TIK Korporat Struktur tata kelola TIK Korporat diorientasikan dan diarahkan pada optimalisasi investasi dan infrastruktur TI sehingga manfaat yang dihasilkan dapat terasa dan berdampak positif bagi proses dan aktivitas bisnis secara keseluruhan.

Pengembangan SDM Di Bidang TI

Sejalan dengan pengembangan teknologi informasi, Perusahaan turut menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pengembanga kompetensi SDM di bidang TI. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilannya.

Dalam mendukung tujuan tersebut, Perusahaan telah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya TI yang mengatur tatanan pengelolaan sumber daya TI Perum Jasa Tirta II yang menjamin efektivitas dan efisiensi produk TI yang dihasilkan. Kebijakan tersebut terdiri dari :

- Prosedur pengelolaan SDM TI
- Prosedur pengelolaan data/informasi
- Prosedur pengelolaan *hardware/software*
- Prosedur pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (data center dan jaringan komputer)

Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA)

PJT II sebagai perusahaan umum mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengusahaan SDA di wilayah sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan SDA di wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2022.

Untuk menunjang penugasan tersebut, PJT II membangun Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) sejak tahun 2013 yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi pengelolaan SDA di seluruh wilayah kerja.

IT Governance And Management

Management of Information Technology in Perum Jasa Tirta II is directed at meeting the best practices of Good Corporate Governance (GCG) by referring to SOE Ministerial Regulation Number PER-02/MBU/02/2018 concerning Principles of Information Technology Governance in the Ministry of State-Owned Enterprises, external regulations other relevant, and internal company regulations. The analysis was carried out on the three components of governance, namely (1) Corporate ICT Governance Structure; (2) ICT governance processes; and (3) IT Management Organizational Structure.

Corporate ICT governance Structure The corporate ICT governance structure is oriented and directed at optimizing IT investment and infrastructure so that the benefits generated can be felt and have a positive impact on the overall business processes and activities.

HR Development In IT Field

In line with the development of information technology, the Company also pays attention to meeting the needs of developing HR competencies in the IT field. This is intended to prepare competent human resources and able to adapt to technological developments, both in terms of knowledge and skills.

In support of these objectives, the Company has prepared an IT resource management policy that governs the management of Perum Jasa Tirta II's IT resources that ensures the effectiveness and efficiency of IT products generated. The policy consists of :

- *IT HR management procedures*
- *Data/information management procedures*
- *Hardware/software management procedures*
- *Information technology infrastructure management procedures (data center and computer networks)*

Water Resources Information System

PJT II as a public company is assigned to carry out its duties and responsibilities in the exploitation of water resources in the river area and some of the tasks and responsibilities in the field of water resource management in the working area according to Government Regulation No. 25 of 2022.

To support this assignment, PJT II has built a Water Resources Information System (SISDA) since 2013 which is used to obtain information on the management of water resources in all working areas.



Data-data yang tersedia pada SISDA tersebut antara lain meliputi:

Data Spasial

- DAS dan Sub DAS WS
- Citarum dan sebagian WS Ciliwung – Cisadane
- Jaringan hidrologi
- Prasarana SDA

Data Tabular

- Debit air di pos hidrologi
- Debit air di bending
- Data curah hujan
- Iklim
- Pengusahaan air baku
- Data kualitas air
- Batimetri Waduk Ir. H. Djuanda

Model

- Simulasi debit sesaat
- Simulasi debit harian

The data available on the SISDA include:

Spatial Data

- *Watershed and sub-watershed for WS*
- *Citarum and part of WS Ciliwung – Cisadane*
- *Hydrological network*
- *Water Resources Infrastructure*

Tabular Data

- *Water discharge at the hydrology post*
- *Water discharge in bending*
- *Rainfall data*
- *Climate*
- *Raw water exploitation*
- *Water quality data*
- *Bathymetry of Ir. H. Juanda*

Model

- *Simulation of instantaneous discharge*
- *Daily debit simulation*



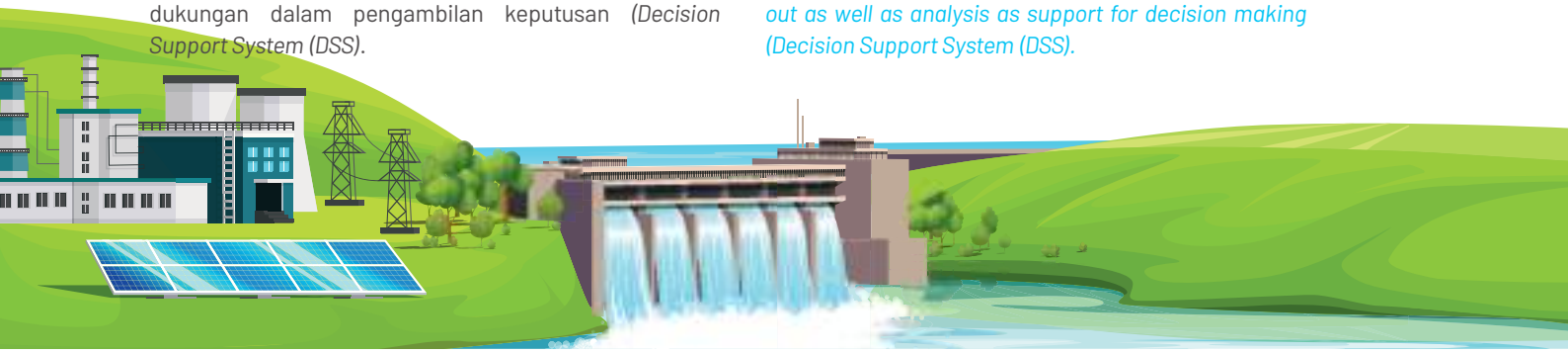






Pengembangan SISDA terus dilakukan sebagai satu kesatuan sistem informasi yang menampung data pantau operasi sarana prasarana SDA sehingga dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi serta analisis sebagai dukungan dalam pengambilan keputusan *(Decision Support System (DSS)*.

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS).







PJT II juga memiliki *Network Operation Center (NOC)* yang merupakan perangkat infrastruktur untuk melakukan kontrol baik pengawasan maupun pengendalian aktivitas jaringan sekaligus memastikan agar jaringan data center SISDA tetap berfungsi baik. Dengan kata lain, NOC ini merupakan ruang kendali DSS.

The development of SISDA continues to be carried out as a unified information system that accommodates monitoring data on the operation of water resource facilities so that control and evaluation can be carried out as well as analysis as support for decision making (Decision Support System (DSS).



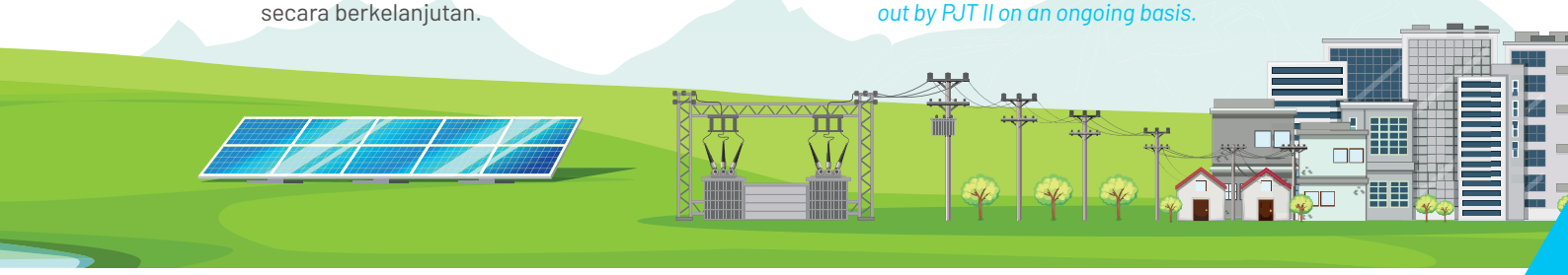


Bertepatan dengan peringatan hari jadi PJT II yang ke 53, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah diluncurkan aplikasi SISDA berbasis smartphone. Di tahun 2020 ini dilakukan investasi pemasangan telemetri hidrometri berbasis *Internet of Things (IoT)* melalui pekerjaan *West-East Tarum Canal Water Security System* and Bekasi *Flood Warning System* di 14 lokasi sebagai bagian dari proses digitalisasi dan otomatisasi pengiriman data dari lapangan.

To coincide with the 53rd anniversary of PJT II, on August 26, 2020, the smartphone-based SISDA application was launched. In 2020, an investment in the installation of Internet of Things (IoT) based hydrometric telemetry was made through the work of the West-East Tarum Canal Water Security System and Bekasi Flood Warning System in 14 locations as part of the digitization process and automation of data transmission from the field.

Proses digitalisasi, otomatisasi dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini merupakan bagian dari penerapan *Smart Water Operation Management (SWOM)* yang akan terus dilakukan PJT II secara berkelanjutan.

The process of digitizing, automating and using Information and Communication Technology is part of the implementation of Smart Water Operation Management (SWOM) which will continue to be carried out by PJT II on an ongoing basis.



Laporan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Manajemen Mutu
Information Technology (IT) Report and Quality Management System



Hal ini menjadi bukti nyata bahwa PJT II bertransformasi menjadi Badan Usaha yang siap menghadapi era disruptif Revolusi Industri 4.0 serta sejalan pula dengan RPJMN tahun 2020-2024 dan Visium Kementerian PUPR 2030 bahwa kegiatan pengelolaan SDA didukung pilar strategis informasi, komunikasi dan teknologi.

This is clear evidence that PJT II is transforming into a Business Entity that is ready to face the disruptive era of the 4.0 Industrial Revolution and is also in line with the 2020-2024 RPJMN and the Vision of the Ministry of PUPR 2030 that water resource management activities are supported by strategic pillars of information, communication and technology.

Pengembangan TI Tahun 2022

Pada tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah melakukan peningkatan sistem teknologi informasi sebagai berikut:

1. Integrasi Infrastruktur Jaringan Luas *(Wide Area Network)* Perum Jasa Tirta II di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor- kantor Cabang (Wilayah);
2. Implementasi Perangkat *Video Conference* antara Kantor Pusat dengan kantor-kantor cabang (Wilayah);
3. Implementasi Aplikasi Pendukung Proses Bisnis, antara lain Sistem Informasi Manajemen Risiko, Sistem Informasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Sistem Informasi Karyawan, dan Sistem Informasi Geografis Aset Perum Jasa Tirta II.

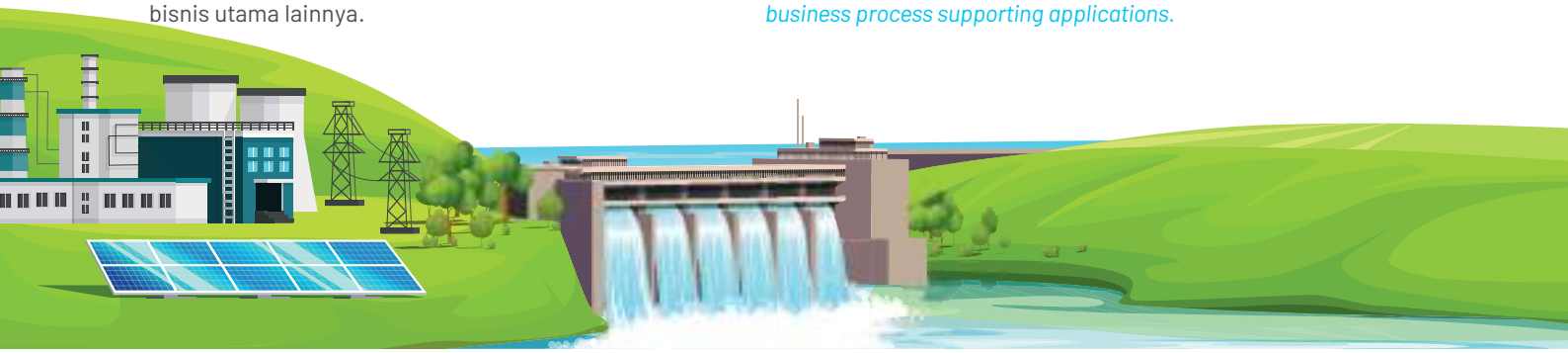
Rencana Pengembangan TI Tahun 2022 Berkaca dari peta strategi TI yang telah disusun, pengembangan dan pemanfaatan TI Perusahaan di tahun mendatang diarahkan pada implementasi Sistem Terintegrasi (Enterprise Resource Planning) di lingkungan PJT II, yang meliputi Aplikasi *Accounting, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management*, dan aplikasi-aplikasi pendukung proses bisnis utama lainnya.

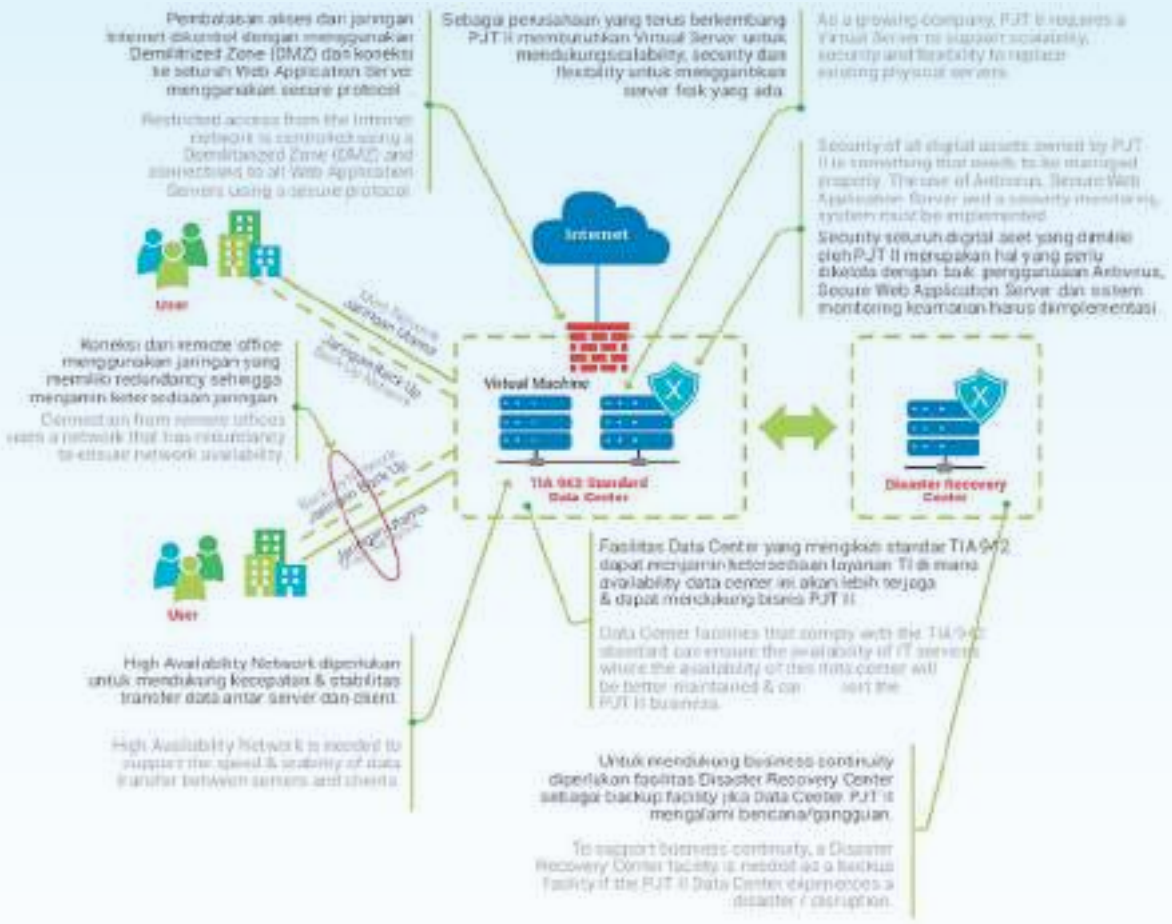
IT Development in 2022

In 2022, Perum Jasa Tirta II has improved the information technology system as follows:

1. *Integration of Wide Area Network Infrastructure of Perum Jasa Tirta II with in the Head Office and Branch Offices (Regional);*
2. *Implementation of Video Conference Equipment between Head quarters and branch offices (Regions);*
3. *Implementation of Business Process Supporting Applications, including Risk Management Information System, Partnership and Community Development Program Information System, Employee Information System, and Geographic Information System of Perum Jasa Tirta II.*

IT Development Plan for 2022 Reflecting on the IT strategy map that has been prepared, the development and utilization of the Company's IT in the coming year is directed at the implementation of the Integrated System (Enterprise Resource Planning) in the PJT II environment, which includes Accounting Application, Human Resource Management (HRM), Procurement, Maintenance, Project Management , and other key business process supporting applications.





Laporan Teknologi Informasi (TI)

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan air, PJT II senantiasa melakukan peningkatan terhadap penerapan sistem teknologi informasi pada semua aspek operasional sesuai dengan perkembangan dan standar yang berlaku. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi, PJT II melakukan langkah-langkah perubahan yang strategis di bidang TI dalam rangka peningkatan pelayanan PJT II.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah dengan melakukan peningkatan dan pembenahan infrastruktur Sistem Teknologi Informasi yang menunjang aspek operasional di lingkungan PJT II.

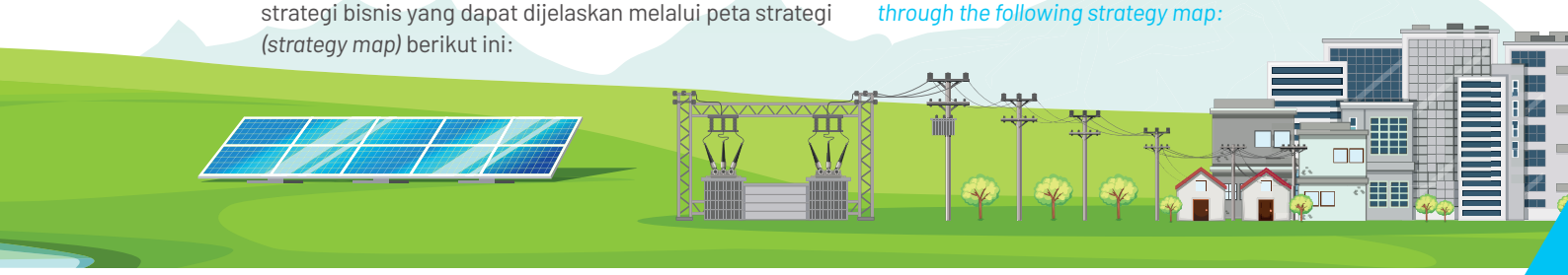
Dalam rangka untuk mencapai sasaran-sasaran bisnis yang telah dicanangkan tersebut, maka PJT II menyusun strategi bisnis yang dapat dijelaskan melalui peta strategi *(strategy map)* berikut ini:

Information Technology (IT) Report

As a company engaged in water management, PJT II continues to improve the application of information technology systems in all operational aspects in accordance with developments and applicable standards. To anticipate the increasing need and development of information technology, PJT II undertakes strategic changes in the IT sector in order to improve PJT II services.

The steps taken include improving and revamping the Information Technology System infrastructure that supports operational aspects within the PJT II environment.

In order to achieve these business goals, PJT II has developed a business strategy that can be explained through the following strategy map:



Laporan Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Manajemen Mutu
Information Technology (IT) Report and Quality Management System



Sumber: RJPP PJT II 2017-2021 versi Akhir Maret 2018 / *Source: RJPP PJT II 2017-2021 version End of March 2018*
Sumber: RJPP PJT2, Kuesioner, Analisa tim PGNCom menggunakan framework Balanced Scorecard / *Source: RJPP PJT2, Questionnaire, Analysis of the PGNCom team using the Balanced Scorecard framework*

Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif mengharuskan PJT II untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan masyarakat. Karena teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan kami menyediakan produk dan jasa kepada pelanggan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Guna menjaga efektivitas dan efisiensi serta relevansi pemanfaatan TI, Perusahaan berupaya menciptakan inovasi berkelanjutan dengan memperhatikan kebutuhan bisnis, baik pada kebijakan, proses, hingga infrastruktur yang dimiliki. Didukung oleh mekanisme evaluasi secara berkala, kehadiran SDM di bidang TI yang kompeten, serta perencanaan yang matang, Perusahaan optimis dapat bergerak progresif menuju pencapaian visi misi serta tujuan bisnis yang telah ditetapkan.

In order to provide the best service to clients and the general public, PJT II must organize and enhance the quality of information technology-based services. This is due to the development of technology, particularly information technology, which is expanding quickly and becoming more competitive between companies. Because technology is the primary tool that enables us to deliver goods and services to customers, monitor and assess business performance, and make the best management choices for the long-term success of their enterprise. The Company works to develop sustainable innovations by taking into account business demands in policies, processes, and infrastructure in order to preserve the effectiveness, efficiency, and relevance of IT utilization. The Company is confident that, with the help of a regular review process, the availability of skilled IT human resources, and careful planning, it can take steps forward towards attaining the vision, mission, and business goals that have been established.

Pada tahun 2022, PJT II melaksanakan layanan pembuatan aplikasi pendukung proses bisnis sesuai *IT Master Plan* dan kebutuhan unit kerja serta memberikan layanan dukungan infrastruktur dilingkungan perusahaan.

According to the IT Master Plan and the requirements of the work units, PJT II will carry out business process support application development services in 2022 and offer infrastructure support services inside the business.

Layanan pembuatan aplikasi pendukung proses bisnis sesuai *IT Master Plan* dan kebutuhan Unit Kerja serta memberikan layanan dukungan infrastruktur dilingkungan perusahaan, diantaranya:

Offering infrastructure support services within the organization as well as services for creating business process support applications in accordance with the IT Master Plan and the demands of the Work Unit, including:



1. *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur IT
2. Pemeliharaan Sistem Informasi Akuntasi
3. Pemeliharaan Data *Center*
4. Pemeliharaan Jaringan LAN dan WAN
5. Pemeliharaan *Webmail Server* PJT II

Kinerja TI Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Implementasi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI)

Penerapan RSTI atau IT Masterplan, terdiri dari:

a) Implementasi Aplikasi

Berdasarkan IT Masterplan tahun 2020 s/d 2024, terdapat beberapa aplikasi yang perlu diterapkan di lingkungan Perum Jasa Tirta II sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini:

1. Performance evaluation of the IT infrastructure
2. Upkeep of Accounting Information Systems
3. Upkeep of Data Centers
4. Network maintenance for LAN and WAN
5. Upkeep of the PJT II Webmail Server

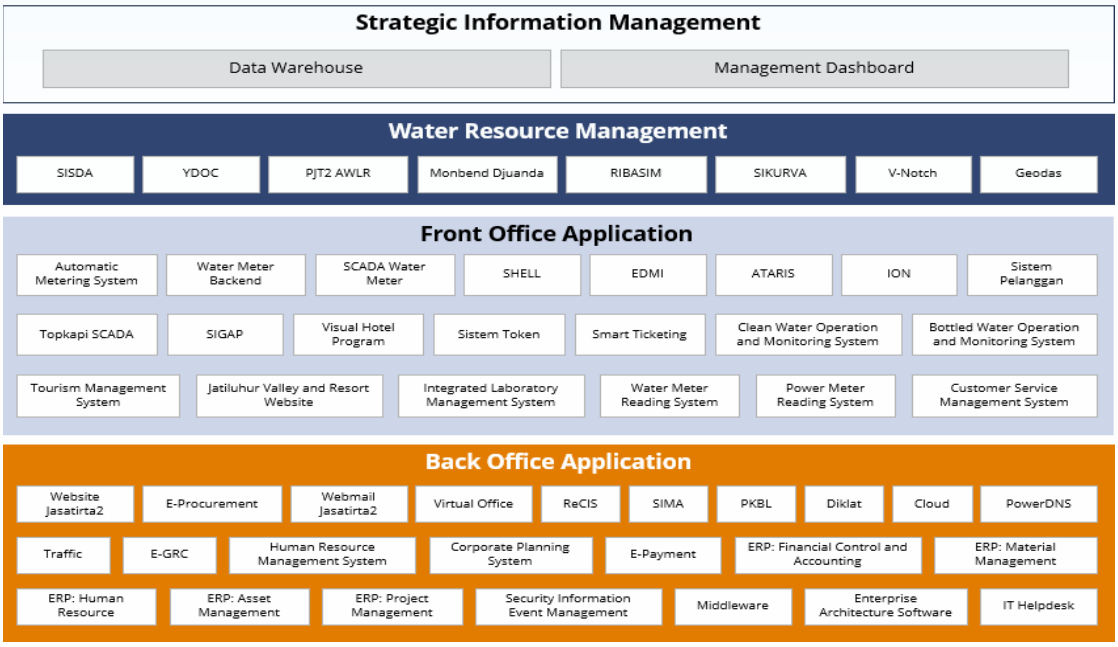
Perum Jasa Tirta II's IT performance in 2023 broadly includes the following:

1) Implementation of Information Technology Strategic Plan (RSTI)

Implementation of RSTI or IT Masterplan, consisting of:

a) Application Implementation

Based on the IT Masterplan for 2020 to 2024, there are several applications that need to be implemented within Perum Jasa Tirta II as listed in the figure below:

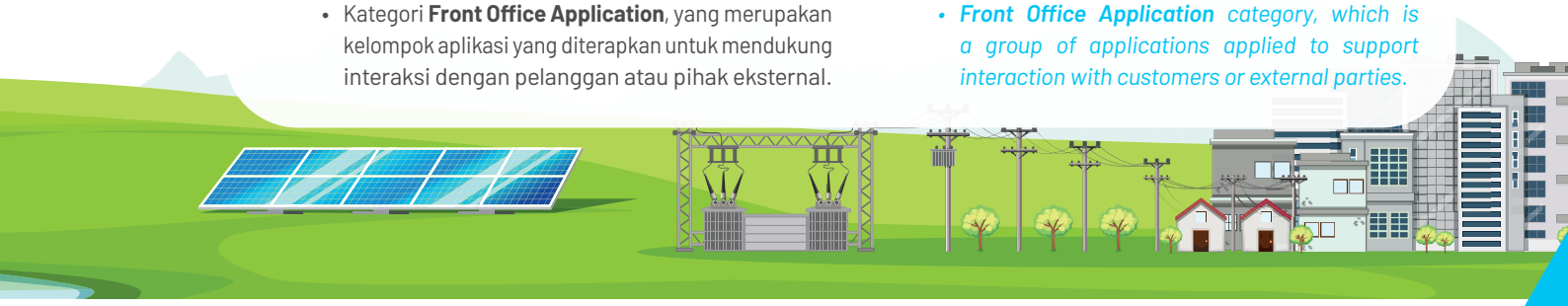


Aplikasi yang dibangun dibagi kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- Kategori **Back Office Application**, yang merupakan kelompok aplikasi yang diterapkan untuk mendukung proses administratif perusahaan, yang meliputi aplikasi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, logistik dan lain-lain.
- Kategori **Front Office Application**, yang merupakan kelompok aplikasi yang diterapkan untuk mendukung interaksi dengan pelanggan atau pihak eksternal.

The applications built are divided into 4 (four) categories, namely:

- ***Back Office Application*** *category, which is a group of applications applied to support the company's administrative processes, which include human resource management applications, finance, logistics and others.*
- ***Front Office Application*** *category, which is a group of applications applied to support interaction with customers or external parties.*



- Kategori **Water Resource Management Application**, yang merupakan kelompok aplikasi untuk mendukung pengeloalan core bussiness Perusahaan, yaitu pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Kategori **Strategic Information Management**, yaitu penerapan 1 (satu) portal berupa dashboard application yang telah terintegrasi dengan data warehouse sebagai media penyimpanan seluruh data source dari berbagai aplikasi baik water resource management, front office dan back office untuk menampilkan data kinerja perusahaan secara lebih cepat dan akurat guna mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja bisnis dalam proses pengambilan keputusan.

- ***Water Resource Management Application*** *category, which is a group of applications to support the management of the Company's core business, namely in the field of Water Resource Management.*
- ***Strategic Information Management*** *category, which is the application of 1 (one) portal in the form of a dashboard application that has been integrated with a data warehouse as a storage medium for all data sources from various applications both water resource management, front office and back office to display company performance data more quickly and accurately to facilitate monitoring and evaluation of business performance in the decision-making process.*

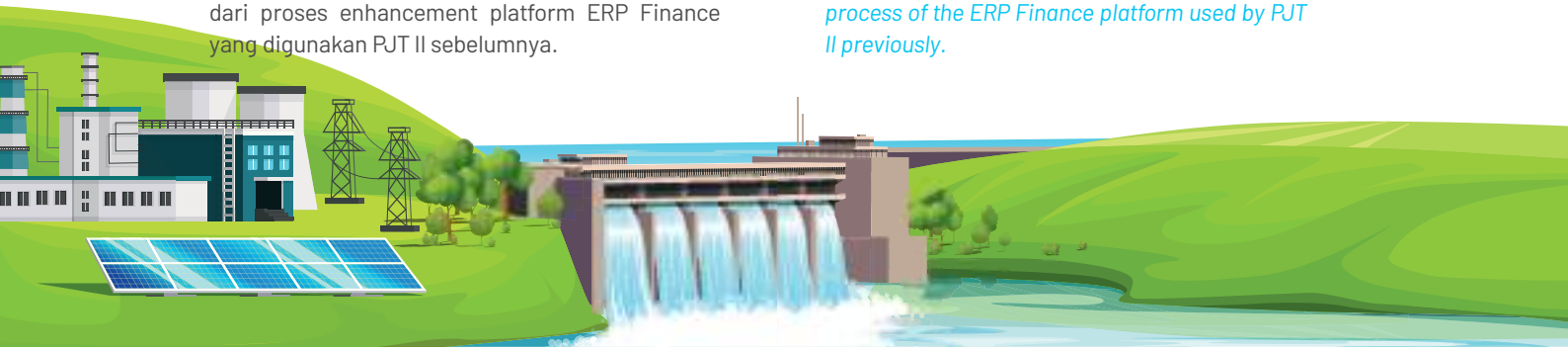
Dari sejumlah aplikasi yang telah ditargetkan, penerapan aplikasi yang telah terealisasi (diberi tanda warna kuning) sampai dengan triwulan 3 tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Of the targeted applications, the applications that have been realised (marked in yellow) up to quarter 3 of 2023, are as follows:



Dimulai pada triwulan 4 tahun 2023, sedang dilakukan upaya untuk mengimplementasi ERP Financial Control and Accounting sebagai bagian dari proses enhancement platform ERP Finance yang digunakan PJT II sebelumnya.

Starting in the 4th quarter of 2023, efforts are being made to implement ERP Financial Control and Accounting as part of the enhancement process of the ERP Finance platform used by PJT II previously.



Adapun sisa aplikasi yang belum diterapkan akan dibangun pada tahun 2024 sebagai tahun tahun terakhir target penerapan aplikasi sebagaimana tercantum pada IT Master Plan Perum Jasa Tirta II Tahun 2020 s/d 2024.

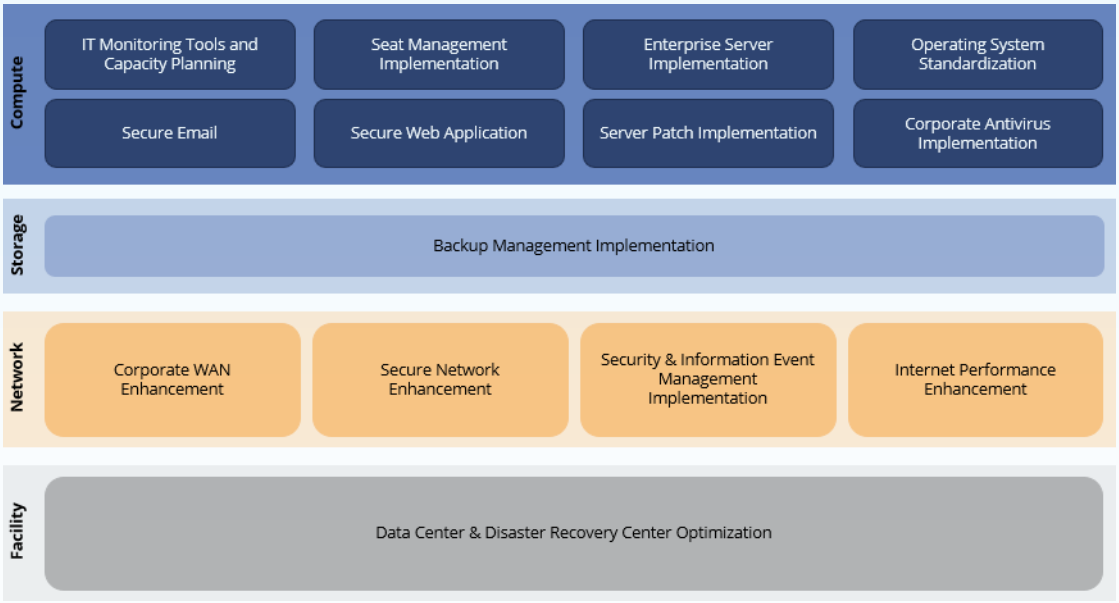
The remaining applications that have not been implemented will be built in 2024 as the last year of the application implementation target as stated in the IT Master Plan Perum Jasa Tirta II Year 2020 to 2024.

b) Implementasi Teknologi Pendukung Operasional Aplikasi (Infrastruktur)

Berdasarkan IT Masterplan tahun 2020 s/d 2024, terdapat beberapa program penguatan infrastruktur teknologi informasi yang menjadi pendukung operasional aplikasi sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini:

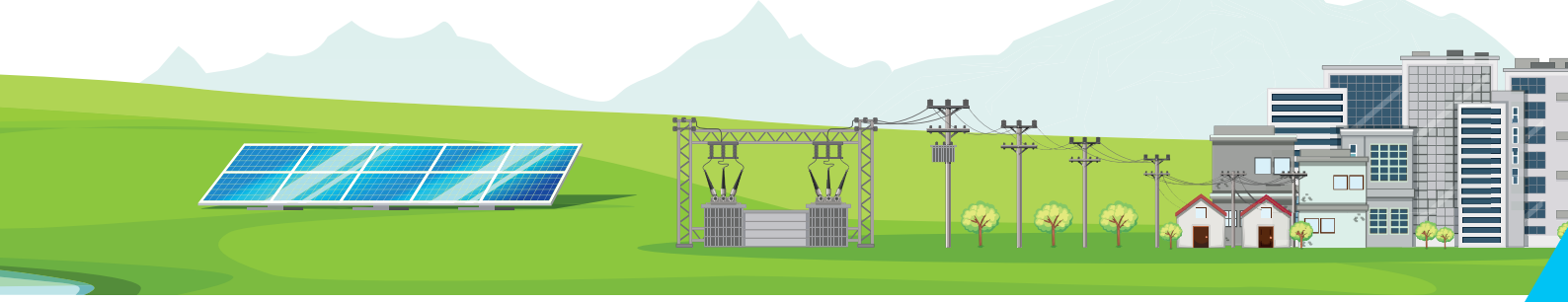
b) Implementation of Application Operational Support Technology (Infrastructure)

Based on the IT Master Plan for 2020 to 2024, there are several information technology infrastructure strengthening programmes that support application operations as listed in the figure below:



Dari sejumlah program penguatan infrastruktur teknologi informasi yang telah ditargetkan sejak tahun 2020 s/d 2024, Perusahaan telah menerapkan seluruh program di atas sampai dengan triwulan 3 tahun 2023. Untuk selanjutnya Perum Jasa Tirta II akan berfokus pada optimalisasi dan penguatan infrastruktur cyber security untuk melindungi aset digital, informasi sensitif, dan operasi bisnis seperti data pelanggan, data keuangan, dan informasi penting lainnya dari akses yang tidak sah atau pencurian dan dari serangan siber seperti malware, virus, ransomware, dan lainnya yang dapat merusak sistem dan operasional perusahaan.

From a number of information technology infrastructure strengthening programmes that have been targeted from 2020 to 2024, the Company has implemented all of the above programmes until the 3rd quarter of 2023. Going forward, Perum Jasa Tirta II will focus on optimising and strengthening cyber security infrastructure to protect digital assets, sensitive information, and business operations such as customer data, financial data, and other important information from unauthorised access or theft and from cyber attacks such as malware, viruses, ransomware, and others that can damage the company's systems and operations.



c) Implementasi Model Operasional TI (IT Operating Model)

Berdasarkan IT Masterplan tahun 2020 s/d 2024, terdapat beberapa program penyelerasan struktur, proses dan peran yang terlibat dalam pengelolaan TI yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka menjalankan target implementasi aplikasi dan teknologi pendukungnya yaitu:

(1) Pembentukan Komite Pengarah TI (IT Steering Committee)

- IT Steering Committee, yaitu komite yang dibentuk untuk mengarahkan strategi dan pengelolaan teknologi informasi (TI) di lingkungan Perum Jasa Tirta II telah dibentuk sesuai Surat Penugasan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: SPN-24/DIR/12/2021 tanggal 02 Desember 2021
- Komite ini dibentuk untuk membantu Perum Jasa Tirta II dalam merumuskan strategi TI yang sejalan dengan tujuan bisnis dan kebutuhan perusahaan, kemudian menentukan prioritasi proyek TI yang harus dijalankan berdasarkan pertimbangan bisnis, anggaran dan dampak yang dihasilkan, membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan TI, serta memastikan perusahaan tetap relevan dalam mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.

(2) Pembentukan IT PMO (Information Technology Project Management Office)

- Pembentukan IT PMO di lingkungan Perum Jasa Tirta II hingga saat ini masih dalam proses kajian manajemen.
- Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi proyek-proyek TI, yang meliputi implementasi aplikasi, keamanan siber, dan proyek transformasi digital di lingkungan perusahaan, seperti pengenalan teknologi baru atau perubahan proses bisnis sehubungan dengan implementasi aplikasi.
- Tujuan utama pembentukan IT PMO adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proyek-proyek TI, memastikan proyek-proyek TI berjalan sesuai

c) Implementation of IT Operating Model

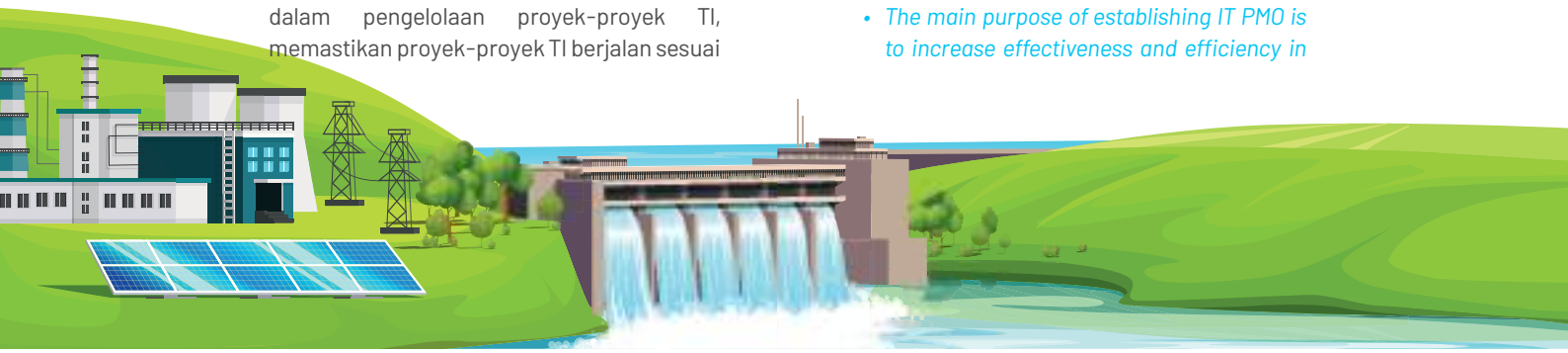
Based on the IT Masterplan for 2020 to 2024, there are several programmes to streamline the structure, processes and roles involved in IT management that need to be followed up in order to carry out the target implementation of applications and supporting technology, namely:

(1) Establishment of IT Steering Committee

- *IT Steering Committee, a committee formed to direct the strategy and management of information technology (IT) within Perum Jasa Tirta II, has been formed in accordance with the Assignment Letter of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: SPN-24/DIR/12/2021 dated 02 December 2021.*
- *This committee was formed to assist Perum Jasa Tirta II in formulating IT strategies that are in line with the business objectives and needs of the company, then determine the prioritisation of IT projects that should be carried out based on business considerations, budget and resulting impact, assist in identifying and managing IT-related risks, and ensure the company remains relevant in adopting new technologies that can improve efficiency and competitiveness.*

(2) Establishment of IT PMO (Information Technology Project Management Office)

- *The establishment of IT PMO within Perum Jasa Tirta II is still in the process of management review.*
- *This organisation is responsible for managing and overseeing IT projects, which include application implementation, cybersecurity, and digital transformation projects in the corporate environment, such as the introduction of new technologies or business process changes in connection with application implementation.*
- *The main purpose of establishing IT PMO is to increase effectiveness and efficiency in*



jadwal, anggaran, dan ruang lingkup yang telah ditentukan, memastikan penggunaan sumber daya yang optimal, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul serta memberikan laporan berkala kepada pemangku kepentingan mengenai kemajuan proyek, masalah yang dihadapi.

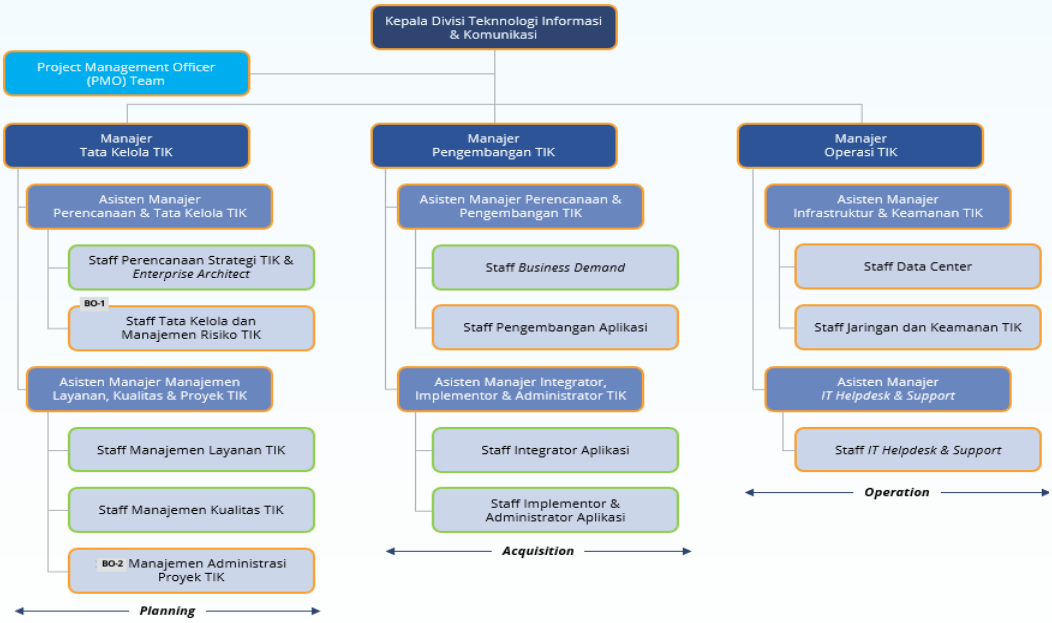
(3) Re-organisasi Unit Kerja IT

- Realisasi re-organisasi unit kerja IT hingga triwulan 3 tahun 2023 masih dalam proses kajian manajemen
- Re-organisasi unit kerja IT ditujukan agar unit kerja IT siap menjalankan program-program penerapan aplikasi dan penguatan infrastruktur IT sebagaimana tercantum pada IT Masterplan Perum Jasa Tirta II Tahun 2020 s/d 2024
- Organisasi yang direkomendasikan di dalam IT Operating Model Tahun 2020 s/d 2024 adalah sebagai berikut:

the management of IT projects, ensure IT projects run according to predetermined schedule, budget, and scope, ensure optimal use of resources, identify and manage risks that may arise and provide regular reports to stakeholders regarding project progress, problems encountered.

(3) Re-organisasi Unit Kerja IT

- *Realisasi re-organisasi unit kerja IT hingga triwulan 3 tahun 2023 masih dalam proses kajian manajemen*
- *Re-organisasi unit kerja IT ditujukan agar unit kerja IT siap menjalankan program-program penerapan aplikasi dan penguatan infrastruktur IT sebagaimana tercantum pada IT Masterplan Perum Jasa Tirta II Tahun 2020 s/d 2024*
- *Organisasi yang direkomendasikan di dalam IT Operating Model Tahun 2020 s/d 2024 adalah sebagai berikut:*



(4) Sentralisasi Layanan IT

Sentralisasi Layanan IT diselenggarakan sebagai tindaklanjut re-organisasi unit kerja IT, yang meliputi:

(a) Sentralisasi Rencana Program Kerja dan Anggaran IT

- Apabila terdapat usulan rencana program kerja terkait pengembangan IT dari

(4) Centralisation of IT Services

Centralisation of IT Services was held as a follow-up to the re-organisation of the IT work unit, which included:

(a) Centralisation of IT Work Program and Budget Plan

- *If there is a proposed work programme*



Unit-unit Kerja Pemilik Proses Bisnis (Bussiness Process Owner/BPO), maka usulan tersebut akan dialihkan menjadi program kerja Unit Kerja IT
- Semua program kerja terkait pengembangan IT dipusatkan ke Unit Kerja IT.

(b) Sentralisasi Permintaan Pengembangan Layanan IT
- Semua permintaan pengembangan layanan IT dari BPO ditujukan kepada Unit Kerja IT sebagai penyedia layanan IT di Perusahaan baik yang tertuang di RKAP maupun di luar RKAP.
- Apabila terdapat permintaan pengembangan IT di luar RKAP dan bersifat strategis dan urgent dari BPO, maka perlu persetujuan dari IT Steering Committee untuk pelaksanaan pengembangan layanan IT.

(c) Sentralisasi Akuisisi Layanan IT
- Strategi akuisisi layanan IT meliputi pengembangan secara internal (in-house) dan eksternal (vendor).
- Unit Kerja IT dengan BPO terkait melakukan kajian bersama mengenai strategi akuisisi layanan IT

Sentralisasi layanan IT telah diselenggarakan sejak tahun 2021, namun belum sepenuhnya dapat diselaraskan dengan rekomendasi re-organisasi unit kerja IT dimana hingga saat ini masih dalam proses kajian manajemen.

2) Hasil Asesmen Maturitas TI / Audit Penyelenggaraan TI Tahun 2023

Trend Hasil Penilaian Asesmen Tingkat Kematangan Penyelenggaraan TI Perum Jasa TIrta II terus mengalami peningkatan terhitung sejak tahun 2018 senilai 1,01 menjadi 1,28 pada tahun 2020 dan 2,09 pada tahun 2022.

Audit Tingkat Kematangan TI di atas telah menggunakan standar / framework COBIT *(Control Objectives for Information and Related Technology)*

plan related to IT development from the Business Process Owner (BPO) Work Units, then the proposal will be transferred to the IT Work Unit work programme.
- *All work programmes related to IT development are centralised to the IT Work Unit.*

(b) Centralisation of IT Service Development Requests
- *All IT service development requests from BPO are addressed to the IT Work Unit as an IT service provider in the Company, both those contained in the RKAP and outside the RKAP.*
- *If there is a request for IT development outside the RKAP and is strategic and urgent from BPO, it requires approval from the IT Steering Committee for the implementation of IT service development.*

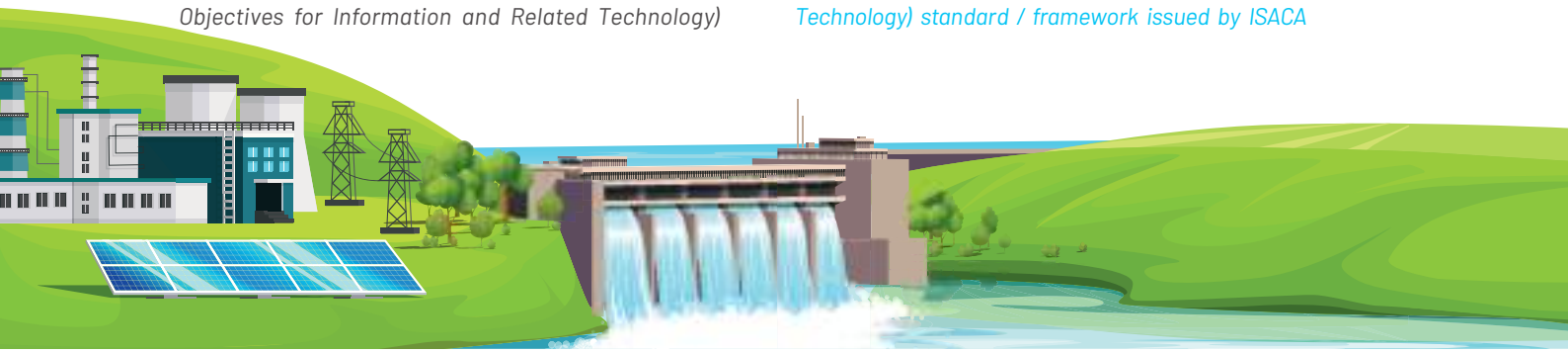
(c) Centralisation of IT Service Acquisition
- *IT service acquisition strategies include in-house and external (vendor) development.*
- *IT Work Unit with related BPO conducts joint study on IT service acquisition strategy*

Centralisation of IT services has been carried out since 2021, but it has not yet been fully aligned with the recommendations for the re-organisation of the IT work unit, which is still in the process of management review.

2) IT Maturity Assessment Results / IT Implementation Audit Year 2023

The Trend of Maturity Level Assessment Results of IT Implementation Perum Jasa TIrta II continues to increase starting from 2018 worth 1.01 to 1.28 in 2020 and 2.09 in 2022.

The IT Maturity Level Audit above has used the COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) standard / framework issued by ISACA





yang dikeluarkan oleh ISACA (*Information Systems Audit and Control Association*) dan ITGI (*Information Technology Governance Institute*) serta telah diadopsi oleh Kementerian BUMN untuk diikuti seluruh BUMN terhitung sejak tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan TI BUMN, tanggal 18 Februari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2018 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Pelaksanaan Asesmen IT Maturity dan Audit Efektivitas Implentasi IT pada tahun 2023 sedang berjalan, dan baru selesai pada 8 November 2023. Target tingkat kematangan TI tahun 2023 dengan skor minimal 2,5 dan prognosa 2023 untuk tingkat kematangan TI mencapai skor 2,63 atau masih di bawah yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN yaitu 3.0.

3) Hasil Asesmen INDI 4.0

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Making Indonesia 4.0. melalui Asesmen INDI 4.0 guna mengukur tingkat kesiapan Perusahaan bertransformasi menuju era 4.0, maka terhitung sejak tahun 2022 Perum Jasa Tirta II telah mengikuti Asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) pada 5 Pilar Parameter

(Information Systems Audit and Control Association) and ITGI (Information Technology Governance Institute) and has been adopted by the Ministry of SOEs to be followed by all SOEs starting from 2013 in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/2013 concerning Guidelines for the Preparation of SOE IT Management, dated 18 February 2013 as amended by the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/02/2018 and the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises.

The implementation of the IT Maturity Assessment and IT Implementation Effectiveness Audit in 2023 is ongoing, and was only completed on 8 November 2023. The target IT maturity level in 2023 with a minimum score of 2.5 and the 2023 prognosis for the IT maturity level reached a score of 2.63 or still below that set by the Ministry of SOEs, namely 3.0.

3) INDI 4.0 Assessment Results

In order to support the government programme Making Indonesia 4.0. through the INDI 4.0 Assessment to measure the level of readiness of the Company to transform towards the 4.0 era, starting from 2022 Perum Jasa Tirta II has participated in the Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) Assessment on 5 Pillars



Penilaian, yaitu Pilar Manajemen dan Organisasi, Orang dan Budaya, Produk dan Layanan, Teknologi serta Operasi.

of Assessment Parameters, namely Management and Organisation Pillars, People and Culture, Products and Services, Technology and Operations.

Hasil asesmen INDI 4.0 yang diperoleh Perum Jasa Tirta II berada pada level **Kesiapan Sedang** guna bertransformasi menuju era 4.0.

The INDI 4.0 assessment results obtained by Perum Jasa Tirta II are at the Medium Readiness level to transform towards the 4.0 era.

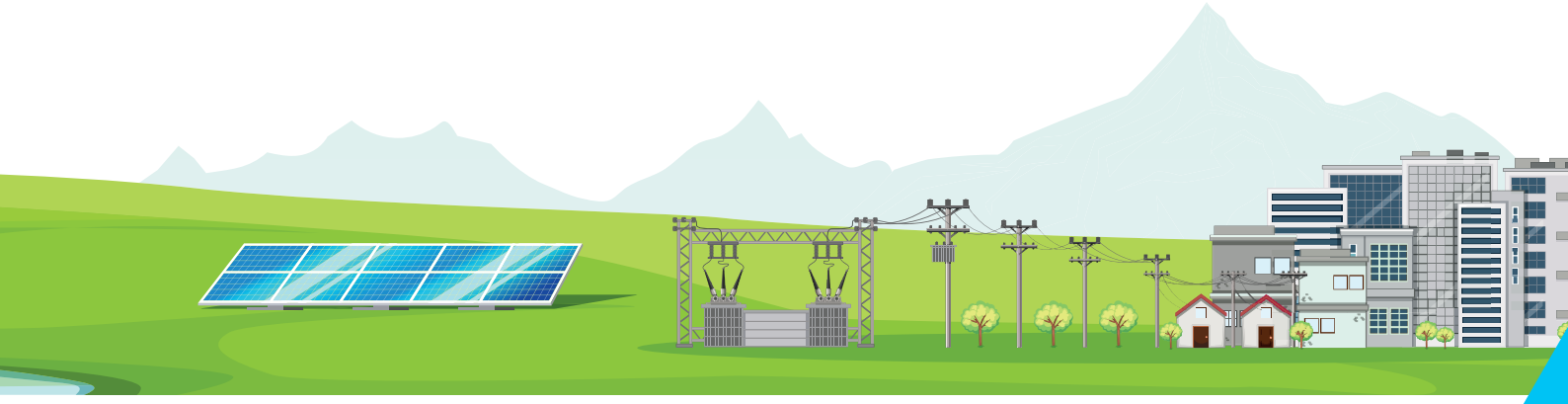
Sejumlah rekomendasi improvement telah ditindaklanjuti hingga saat ini adalah sebagai berikut:

A number of improvement recommendations have been followed up to date as follows:

No	Pilar INDI 4.0	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	**Manajemen dan Organisasi**	1. Perlunya komitmen manajemen dalam mendukung transformasi menuju industri 4.0 dimana komitmen terlihat melalui adanya strategi yang jelas dalam dokumen perencanaan perusahaan terkait arah transformasi perusahaan. 2. Perlunya penyamaan persepsi dari top down terkait arah transformasi perusahaan. 3. Perlunya benchmarking terkait implementasi industri 4.0 dan pendampingan independent assurance dalam mengawal dan evaluasi program transformasi, sehingga bisa memberikan insight yang luas dan dapat termonitor dan terukur. 4. Perlunya penyamaan persepsi dari top down terkait arah transformasi perusahaan	
2	**Orang dan Budaya**	1. Membuat *HC Master Plan* yang lengkap dengan *road map HC* yang merupakan penurunan dari strategi RJPP bidang Sumber Daya Manusia. a. Perlu perhatian khusus terkait Journey budaya dan timeline yang clear, serta adanya komitmen dan dukungan yang kuat oleh manajemen (BOD) terkait siapa-siapa saja yang akan menjalankan dan memonitor journey budaya tersebut. b. Mengedukasi dan *upskill* pegawai untuk siap bertranformasi secara terus menerus dan memastikan seluruh pegawai sudah terbuka terhadap teknologi dengan melakukan survey keterbukaan. 2. Perlunya *Change Management*, dengan melakukan: a. Pembuatan kebijakan-kebijakan perusahaan yang mendukung proses transformasi Industri 4.0. b. Pembentukan Tim Transformasi Industri 4.0.	
		c. Dukungan top dan middle management baik sebagai role model maupun instruksi kepada subordinat dibawahnya untuk mendukung transformasi Industri 4.0. d. Pembentukan key user dalam implementasi sistem untuk memastikan kesesuaian sistem yang diimplementasikan dengan kebutuhan user serta mengkomunikasikannya dengan seluruh user di unit bisnis terkait. e. Peningkatan kompetensi karyawan dalam bidang Teknologi Digital. f. Meningkatkan *awareness* seluruh karyawan terkait transformasi Industri 4.0. 3. Perlu melakukan mapping kompetensi seluruh karyawan berdasarkan persyaratan kompetensi masing-masing jabatan sehingga akan didapatkan *gap* untuk dasar pengembangan kompetensi pegawai yang lebih terarah dan bisa menunjang kebutuhan transformasi perusahaan.	



No	Pilar INDI 4.0	Rekomendasi	Tindaklanjut
3	**Produk dan Layanan**	Perlunya peningkatan customer experience melalui implementasi produk cerdas yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan customer di semua lini bisnis yang ada di Perum Jasa Tirta II dengan menerapkan teknologi OT dan IT yang terintegrasi sesuai dengan proses bisnis di Perum Jasa Tirta II.	• Penerapan IOT guna mendukung peningkatan customer experience telah direalisasikan dengan menerapkan teknologi OT dan IT yang terintegrasi untuk mendukung keamanan Bendungan (Dam Safety) Ir. H. Djuanda dengan menerapkan perangkat geoteknik, yaitu sensor untuk menghasilkan data tekanan air pori, rembesan, tinggi muka air tanah, dan lainnya, perangkat hidro klimatologi, yang meliputi Automatic Water Level Recorder (AWLR), Automatic Weather Sensor (AWS), Automatic Rainfall Recorder (ARR), Water Quality Sensor (WQS), Sunshine Recorder dan Evaporasi Waduk serta perangkat SEISMIK / Akselerograf untuk mendeteksi getaran gempa. • Seluruh perangkat diatas menghasilkan data alat ukur, yang kemudian ditampilkan kedalam sebuah sistem informasi berbasis web sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen dan pihak-pihak terkait.
4	**Teknologi**	1. Perlunya penguatan Cyber security mulai dari sisi proses, orang, maupun infrastruktur 2. Menyusun tindak lanjut pengelolaan dan pengembangan bidang Teknologi Informasi yang sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. 3. Perlu kajian integrasi seluruh aplikasi/sistem yang ada di semua unit binis yang ada di Perum Jasa Tirta II, untuk dapat mengembangkan sistem yang terintegrasi yang memudahkan untuk monitoring dan evaluasi proses operasional perusahaan.	1. Penguatan Cyber security yang telah diterapkan adalah sebagai berikut: a. Process: • Penerapan SIEM • Penerapan Vulnerability Sistem • Penerapan Tool Monitoring Jaringan b. People: • Penyusunan draft Kebijakan dan Prosedur Keamanan dan Disaster Recovery Plan • Sharing Knowledge Keamanan Siber c. Infrastruktur • Penerapan Firewall • Penerapan Anti Virus, Anti Malware, Anti SPAM, Web Filtering Application Control dan IPS/IDS • Penerapan *Secure Socket Layer* (SSL) • Penerapan Disater Recovery Center (DRC) melalui mekanisme VPS
5	**Operasi Perusahaan**	1. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi esensial enabler Industri 4.0 untuk menunjang proses operasional di Perum Jasa Tirta II 2. Inline dengan pendekatan yang dilakukan, kegiatan operasi perusahaan menyesuaikan dengan pola dan standar kinerja yang dicanangkan serta teknologi yang digunakan.	-



4) Implementasi Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan TI dan Pemrosesan Informasi

Beberapa upaya yang telah diterapkan dalam rangka menunjang keamanan siber di lingkungan Perum Jasa Tirta II, yaitu penerapan:

(a) Penerapan **Firewall** untuk mengendalikan lalu lintas dan mencegah akses yang tidak diinginkan ke sistem yang dikelola Perum Jasa Tirta II;

(b) Penerapan **Antivirus dan Antimalware** untuk mendeteksi dan menghapus malware yang berpotensi merusak sistem;

(c) Penerapan **SIEM** untuk mendeteksi dan merespons cepat terhadap insiden keamanan;

(d) **Pemantauan Jaringan secara Aktif** untuk mendeteksi tanda-tanda aktivitas mencurigakan atau peretasan;

(e) Penyusunan draft **Kebijakan dan Prosedur Keamanan dan Disaster Recovery Plan;**

(f) Penerapan ***Secure Socket Layer* (SSL)** pada aplikasi dan situs web;

(g) Penerapan **Vulnerability Sistem** dengan software NESUS guna mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan keamanan, mengevaluasi risiko, mencegah serangan dan mengembangkan rencana keamanan yang lebih baik;

(h) Penerapan **Disater Recovery Center (DRC)** melalui mekanisme VPS melalui share service Danareksa guna mencegah kehilangan data jika terjadi kegagalan operasi pada DC Perum Jasa Tirta II.

4) Implementasi Keamanan Siber dalam Penyelenggaraan TI dan Pemrosesan Informasi

Several efforts have been implemented in order to support cybersecurity within Perum Jasa Tirta II, namely implementation:

*(a) **Firewall** implementation to control traffic and prevent unwanted access to systems managed by Perum Jasa Tirta II;*

*(b) Implementation of **Antivirus and Antimalware** to detect and remove malware that could potentially damage the system;*

*(c) Implementation of **SIEM** to detect and respond quickly to security incidents;*

*(d) **Active Network Monitoring** to detect signs of suspicious activity or hacking;*

*(e) Drafted **Security Policies and Procedures and Disaster Recovery Plan**;*

*(f) Implementation of **Secure Socket Layer (SSL)** on applications and websites;*

*(g) Implementation of **System Vulnerability** with NESUS software to identify weaknesses, improve security, evaluate risks, prevent attacks and develop better security plans;*

*(h) Implementation of **Disater Recovery Centre (DRC)** through VPS mechanism through Danareksa's shared service to prevent data loss in case of operation failure at DC Perum Jasa Tirta II.*









TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

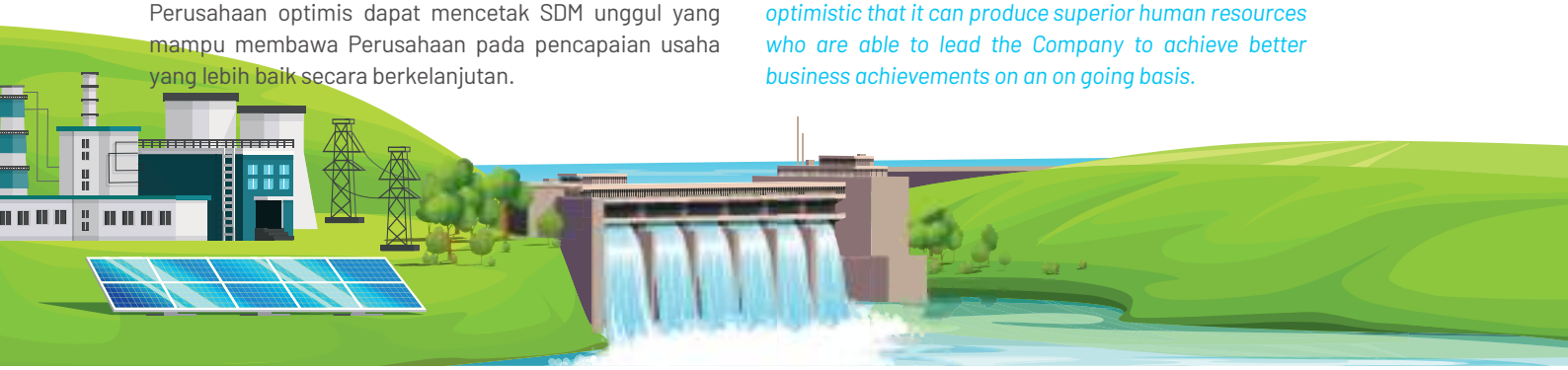
Overview of Business Support

Sumber Daya Manusia
Human Resources



Sumber Daya Manusia memiliki peran penting sebagai katalisator penggerak keberlangsungan usaha Perusahaan, sehingga kehadirannya dimaknai sebagai aset utama Perusahaan yang membutuhkan pengelolaan yang baik. Kehadiran SDM terbaik yang profesional, kompeten, berdedikasi, dan berintegritas akan membuat Perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam rangka memenuhi kepentingan tersebut, Perum Jasa Tirta II telah mengembangkan kebijakan akomodatif dalam pengelolaan SDM dengan berbasis pada strategi dan rencana bisnis Perusahaan, di antaranya Sistem Kinerja Berbasis Kompetensi yang terdiri dari Kamus Kompetensi dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan, Sistem Penilaian Kinerja, Pengembangan Kompetensi Karyawan Pembinaan dan Pengembangan Karir Karyawan, Pembentukan Komite Appraisal, dan Sistem Remunerasi Karyawan. Berbekal kebijakan pengelolaan tersebut, Perusahaan optimis dapat mencetak SDM unggul yang mampu membawa Perusahaan pada pencapaian usaha yang lebih baik secara berkelanjutan.

Human Resources have an important role as a catalyst for driving the Company's business continuity, so that its presence is interpreted as the Company's main asset that requires good management. The presence of the best human resources who are professional, competent, dedicated, and with integrity will make the Company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve the vision and mission that has been set. In order to fulfill these interests, Perum Jasa Tirta II has developed an accommodative policy in HR management based on the Company's strategy and business plan, including a Competency-Based Performance System consisting of a Competency Dictionary and Position Competency Needs, Performance Assessment System, Employee Competency Development Coaching and Employee Career Development, Establishment of Appraisal Committee, and Employee Remuneration System. Armed with these management policies, the Company is optimistic that it can produce superior human resources who are able to lead the Company to achieve better business achievements on an on going basis.

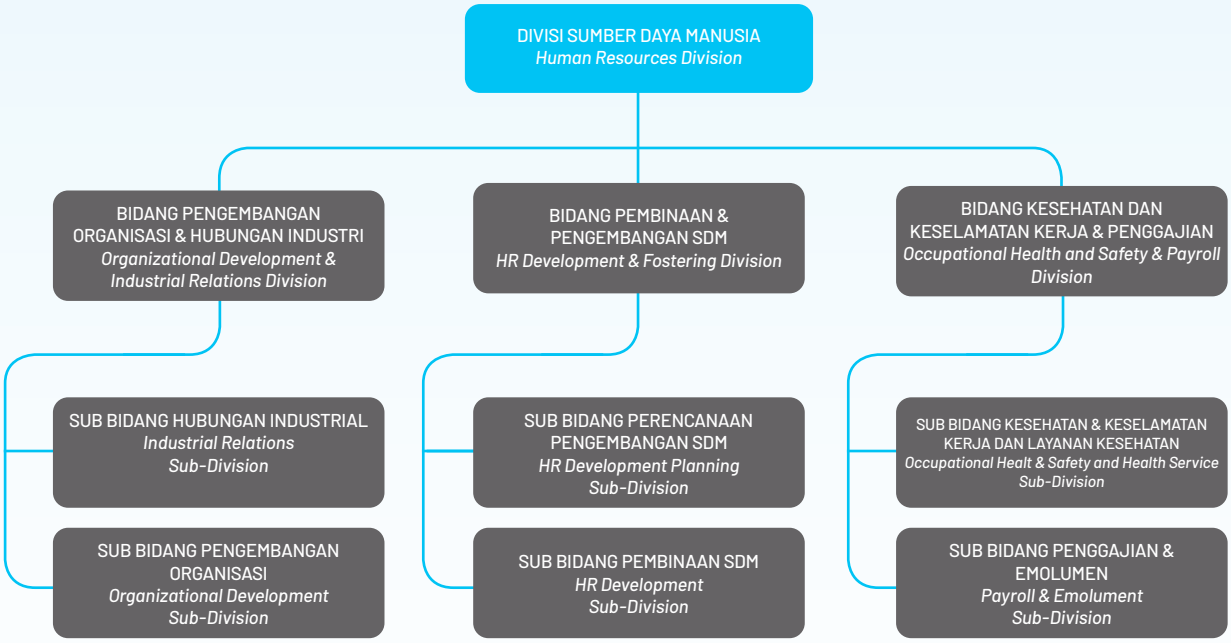


Struktur Pengelola SDM

Pengelolaan SDM di Perum Jasa Tirta II berada di bawah Divisi Sumber Daya Manusia, yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Resiko. Saat ini, Kepala Divisi SDM dijabat oleh Euis Rina Rismayanti Profil beliau telah tercantum pada Laporan Tahunan ini, di bagian Profil Kepala Divisi.

HR Management Structure

HR management at Perum Jasa Tirta II is under the Human Resources Division, which reports to the Director of Finance, HR and Risk Management. At present, the Head of the HR Division is held by Euis Rina Rismayanti. His profile is contained in this Annual Report, in the Division Head Profile section.



Tugas Pokok Divisi Sumber Daya Manusia

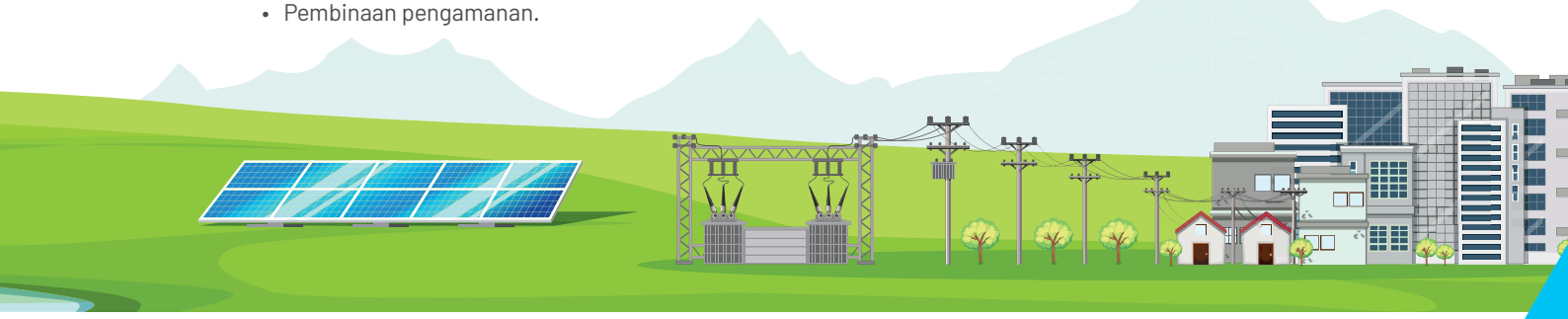
Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II memiliki tugas pokok dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Pengelolaan organisasi;
- Membuat peraturan kepegawaian dan sumber daya yang meliputi pengembangan organisasi, budaya kerja, dan peraturan dan prosedur kepegawaian;
- Perencanaan karyawan;
- Pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja karyawan;
- Pembinaan pengamanan.

Main Duties Of The Human Resources Division

The Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has the following main duties and responsibilities:

- *Organizational management;*
- *Issue staffing and resource regulations covering organizational development, work culture, and staffing rules and procedures;*
- *Employee planning;*
- *Employee development and training, employee welfare, health and safety;*
- *Security training.*



Program Divisi Sumber Daya Manusia

Program kerja Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

- Memastikan rencana kerja dan anggaran yang disusulkan telah mempertimbangkan risiko;
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Memastikan adanya rencana strategi jangka pendek, menengah, dan panjang mengenai kebijakan dan pengelolaan organisasi, peraturan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia;
- Menjamin berjalannya kegiatan pemenuhan dan alokasi karyawan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku serta kebutuhan perusahaan.
- Menjamin terlaksananya program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan potensi karyawan;
- Menjamin pengelolaan data kepegawaian secara terintegritas dan berbasiskan sistem informasi;
- Memberi bimbingan teknis dan sosialisasi kepada unit kerja dalam hal pengembangan organisasi, budaya kerja, peraturan dan prosedur kepegawaian, perencanaan karyawan, pengembangan dan pembinaan karyawan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan serta pengamanan;
- Melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja lain terkait dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- Membuat pelaporan kinerja penyelenggaraan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya.

Human Resources Division Program

The work programs of Perum Jasa Tirta II HumanmResources Division are as follows :

- *Ensure that the proposed work plan and budget has taken risks into consideration;*
- *Carry out supervision and training of the implementation of organizational development activities, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;*
- *Ensure that there are short, medium and longterm strategic plans regarding organizational policies and management, staffing regulations and human resources management;*
- *Ensuring the fulfillment and allocation of employee activities in accordance with applicable provisions and procedures and company needs.*
- *Ensure the implementation of education programs, training, and employee development in accordance with company needs and employee potential;*
- *Guarantee the management of staffing data in an integrated and information-based system;*
- *Provide technical guidance and dissemination to work units in terms of organizational development, work culture, staffing regulations and procedures, employee planning, employee development and guidance, employee welfare, health and safety as well as security;*
- *Coordinate and build work relations with other work units related to other parties in carrying out their duties;*
- *Prepare a performance report on the implementation of tasks in accordance with their fields.*

Komposisi Dan Jumlah Karyawan Perum Jasa Tirta II

Adapun rekapitulasi data pegawai Perum Jasa Tirta II Tahun 2022 Audited disajikan berikut:

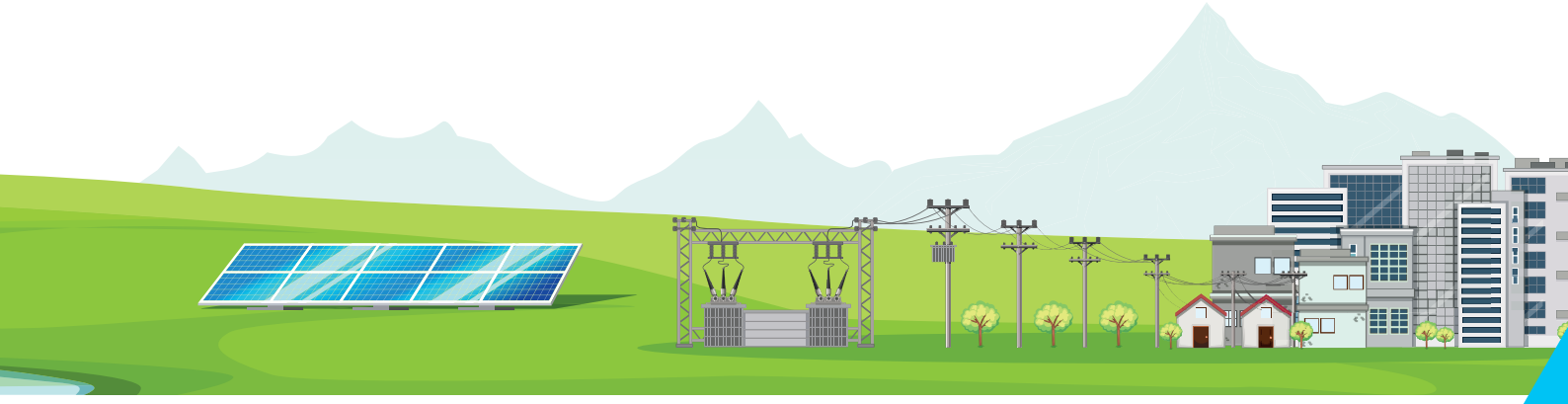
Composition And Number Of Employees Of Perum Jasa Tirta II

The recapitulation of data on Perum Jasa Tirta II employees in 2022 Audited is presented below:



Rekapitulasi Data Pegawai Perum Jasa Tirta II
Recapitulation of Perum Jasa Tirta II Employee Data

NO	URAIAN / *Description*	s.d TAHUN 2023 / *up to YEAR 2023*	s.d TAHUN 2022 / *up to YEAR 2022*	s.d TAHUN 2021 / *up to YEAR 2021*
A	**PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN** / *Employees By Position*			
	1. Sekper, Kepala Satuan / Divisi / General Manajer / S.E. Tk.I / PM	31	32	33
	2. Manajer / Manajer Operasional / S.E. Tk. II	71	65	57
	3. As. Manajer / As. Manajer Operasional / S.E. Tk. III	141	137	133
	4. Supervisor / S.E. Tk. IV	275	265	283
	5. Staf / Pengemudi / Petugas Keamanan / Capeg	524	550	540
	JUMLAH / *Total*	**1.042**	**1.049**	**1.046**
B	**PEGAWAI BERDASARKAN STATUS** / *Employees By Status*			
	1. Pegawai Murni	1.028	1.049	1.041
	2. Calon Pegawai	14	0	5
	JUMLAH / *Total*	**1.042**	**1.049**	**1.046**
C	**PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN** / *Employees By Education*			
	1. Pasca Sarjana (S2/S3)	59	45	44
	2. Sarjana (S1)	286	273	244
	3. Sarjana Muda (D3)	87	89	88
	4. SLTA	609	638	659
	5. SLTP	1	2	6
	6. SD	0	2	5
	JUMLAH / *Total*	**1.042**	**1.049**	**1.046**
D	**PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN** / *Employees by Class*			
	1. Golongan IV	86	77	78
	2. Golongan III	440	444	366
	3. Golongan II	516	528	602
	JUMLAH / *Total*	**1.042**	**1.049**	**1.046**



Hubungan Industrial Yang Harmonis

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan, diperlukan hubungan industrial yang harmonis antara karyawan dan Perusahaan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II telah membentuk Serikat Karyawan sebagai wadah penyampaian aspirasi karyawan kepada Perusahaan.

Hubungan yang saling mendukung dan terpenuhinya hak serta kewajiban kedua belah pihak dikukuhkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perum Jasa Tirta II yang merupakan hasil perundingan antara kedua belah pihak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PKB Perum Jasa Tirta II telah terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.220209001/B/III/2022.

Selain itu, dalam rangka menciptakan suasana lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis sekaligus membangun keterikatan karyawan baik lini vertikal maupun horizontal, Perum Jasa Tirta II juga setiap tahunnya menyelenggarakan *Gathering* Perum Jasa Tirta II yang diikuti mulai dari tingkat Pelaksana sampai tingkat Direksi dan Dewan Pengawas.

Guna menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan, Perum Jasa Tirta II membentuk Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 4 guna memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Seiring dengan perjalanan waktu, Serikat Karyawan Jasa Tirta II selain sebagai wadah berserikat dan penghubung antara pegawai dan manajemen, juga berfungsi sebagai marwah proses bisnis Perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik *(Good Corporate Governance)*.

Struktur organisasi pengurus Serikat Karyawan Perum Jasa Tirta II untuk periode 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

Harmonious Industrial Relations

Perum Jasa Tirta II realizes that to increase employee productivity and involvement, harmonious industrial relations are needed between employees and the Company. Therefore, Perum Jasa Tirta II has formed an Employee Union, as a forum for delivering employee aspirations to the Company.

This mutually supportive relationship between the Employee Union and the Company is set forth in the Perum Jasa Tirta II Collective Labor Agreement (PKB) which is the result of negotiations between the two parties which contain work conditions, rights and obligations of both parties based on statutory provisions. PKB Perum Jasa Tirta II has been registered in the Decree of the Director General of Industrial Relations Development and Workers' Social Security No. KEP.4/HI.00.01/00.0000.220209001/B/III/2022.

In addition, in order to create an atmosphere of a harmonious and dynamic work environment while at the same time building employees' ties both vertically and horizontally, Perum Jasa Tirta II also annually organizes the Perum Jasa Tirta II Gathering which starts from the level Implementing up to the level of Directors and Supervisory Board.

In order to guarantee freedom of association for employees, Perum Jasa Tirta II established the Perum Jasa Tirta II Employee Union based on 1945 Constitution article 4 to provide protection, defense of rights and interests, as well as to improve decent welfare for workers/laborers and their families. Along with the passage of time, the Tirta II Workers Employee Union, aside from being a union and liaison between employees and management, also functions as a part of the Company's business processes in accordance with the principles of good corporate governance.

The organizational structure of the management of the Perum Tirta II Employee Union for the period 2021 - 2025 is as follows:

NAMA / *Name*	JABATAN / *Position*
Lir Syahril Mubarok	Ketua Umum / *Chairman*
Sugeng Riyanto	Sekretaris Jenderal / *Secretary General*
Yedi Apriyadi	Bendahara Umum / *General Treasurer*



Manajemen Jenjang Karier

Sebagai bagian dari program pengelolaan dan pengembangan karyawan berkelanjutan, Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan jenjang karier karyawan guna memberikan peluang bagi insan Perusahaan untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan jabatan dalam organisasi dan potensi individual yang dimiliki. Manajemen pengembangan karier ditujukan tidak hanya sebagai perencanaan suksesi dan manpower planning bagi Perusahaan, tetapi juga sebagai salah satu upaya retensi karyawan. Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menyusun proyeksi jenjang yang akan dilalui oleh karyawan selama meniti karier di Perusahaan.

Pengembangan karier karyawan melalui mutasi (promosi dan rotasi) dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek utama, antara lain hasil penilaian kinerja, kebutuhan Perusahaan, kompetensi dan pengalaman kerja. Sesuai dengan kebijakan dasar dalam pengelolaan SDM, Perum Jasa Tirta II menerapkan asas kesetaraan dalam menetapkan mutasi karyawan tanpa membedabedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau kondisi fisik. Pada level jabatan tertentu, Perusahaan juga mempertimbangkan kriteria kepemimpinan dan beberapa kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang memerlukan kebijakan dalam mempertimbangkan sesuatu dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Penilaian Kinerja Karyawan

Komitmen Perusahaan terhadap kualitas SDM unggul diwujudkan melalui implementasi penilaian kinerja karyawan secara berkala dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Divisi Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta II telah merancang program penilaian kinerja karyawan yang komprehensif, objektif, dan transparan. Program tersebut telah terintegrasi dan diatur dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berdasarkan pada pencapaian dan pemenuhan *Key Performance Indicator (KPI)* yang telah ditetapkan. Implementasi penilaian kinerja karyawan juga memungkinkan Perusahaan untuk menjaga komunikasi dan *controlling* yang tepat dan terukur dari atasan kepada karyawannya.

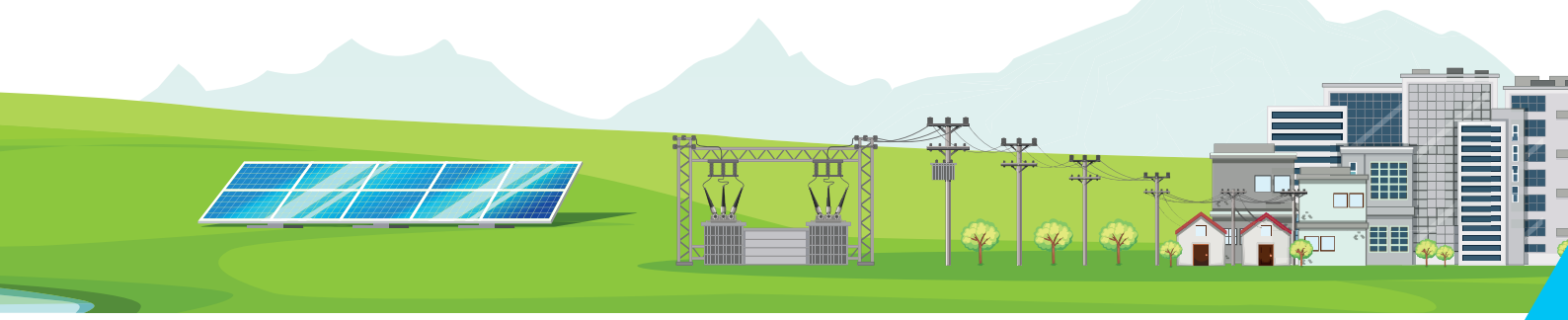
Career Management

As part of the ongoing employee management and development program, Perum Jasa Tirta II has a career path policy for employees to provide opportunities for Company people to develop themselves in accordance with the needs of positions in the organization and individual potential they possess. Career development management is aimed not only at succession planning and manpower planning for the company, but also as an effort to retain employees. The Company's management is responsible for planning and preparing projected levels that will be passed by employees during their careers at the Company.

Employee career development through mutation (promotion and rotation) is done by taking into account the main aspects, including the results of performance appraisal, company needs, competencies and work experience. In accordance with basic policies in the management of human resources, Perum Jasa Tirta II applies the principle of equality in determining employee mutations without discriminating against ethnicity, religion, race, class, gender, or physical condition. At a certain level of position, the Company also considers leadership criteria and several other criteria that are appropriate to the position needs that require policy in considering something and accuracy in decision making.

Employee Performance Assessment

The Company's commitment to producing excellent quality human resources is realized through the implementation of employee performance appraisals on a regular and ongoing basis. In this case, the Human Resources Division of Perum Jasa Tirta II has designed a comprehensive, objective and transparent employee performance evaluation program. The program has been integrated and regulated in a Performance Management System (SMK) based on the achievement and fulfillment of a Key Performance Indicator (KPI) that has been determined. The implementation of employee performance appraisal also allows the Company to maintain precise and measured communication and control from superiors to their employees.



Penilaian kinerja dilakukan secara online yang terbagi ke dalam beberapa tahapan, antara lain tahapan perencanaan, pemantauan, dan pengukuran kinerja karyawan. Hasil penilaian kinerja karyawan selanjutnya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi manajemen untuk menyusun proyeksi pengembangan karier, sistem remunerasi dan penghargaan, hingga sistem pengembangan kompetensi. Adapun kriteria yang turut dipertimbangkan dalam penilaian kinerja antara lain kompetensi teknis, kompetensi perilaku, cara kerja, dan output atau hasil yang dicapai berdasarkan KPI yang telah ditetapkan.

Performance appraisal is conducted online which is divided into several stages, including the stages of planning, monitoring, and measuring employee performance. The results of the employee performance appraisal will further serve as a basis for management to prepare projections for career development, remuneration and reward systems, and competency development systems. The criteria included in the performance evaluation include technical competencies, behavioral competencies, work methods, and outputs or results achieved based on established KPIS.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Menggenapi tujuan pengelolaan karyawan berkelanjutan, Perusahaan memastikan bahwa kompetensi dan keahlian karyawan senantiasa sesuai dan relevan dengan perkembangan pengetahuan dan kondisi industri yang dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Perusahaan memberlakukan program pengembangan kompetensi karyawan. Pengembangan kompetensi menjadi salah satu bagian dari perencanaan bisnis serta kebutuhan jabatan Perusahaan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan keahlian dan kompetensi yang disyaratkan.

Adapun program pengembangan kompetensi karyawan yang diberikan berupa pelatihan, pendidikan, seminar, dan/atau workshop baik yang diselenggarakan oleh internal Perusahaan maupun pihak eksternal.

Employee Competency Development

Fulfilling the objectives of sustainable employee management, the Company ensures that employee competencies and expertise are always appropriate and relevant to the development of knowledge and dynamic industry conditions. To realize this goal, the Company has implemented an employee competency development program. Competency development is a part of business planning and the needs of the Company's position by adjusting to therequired expertise and competency requirements.

The employee competency development program provided is in the form of training, education, seminars, and/or workshops held both by the internal company and external parties.

Rekrutmen Karyawan Tahun 2023

Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Batch 1 Tahun 2023 Calon Karyawan dilaksanakan bersama dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) mulai tanggal 11 Mei 2023 hingga Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut berikut:

1. Perum Jasa Tirta II menyampaikan kebutuhan Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2023 sebanyak 13 (tiga belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang berasal dari Rekrutmen Fresh Graduate dan 1 (satu) orang berasal dari Rekrutmen Disabilitas.

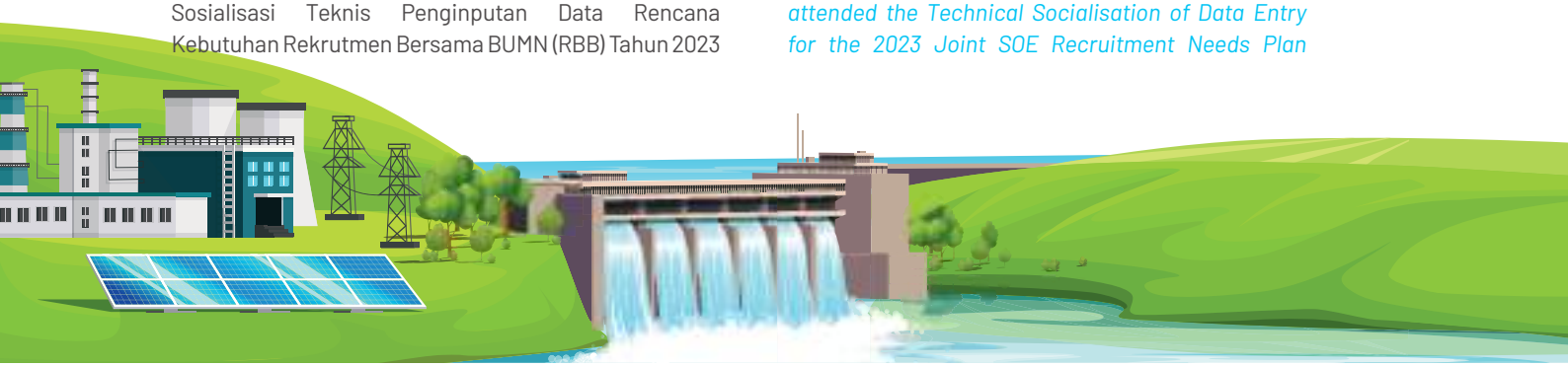
2. Perusahaan telah menunjuk PIC Koordinator, menghadiri Sosialisasi Teknis Penginputan Data Rencana Kebutuhan Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2023

Employee Recruitment in 2023

Joint Recruitment of SOEs (RBB) Batch 1 Year 2023 Prospective Employees is held together with the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) from 11 May 2023 to August 2023, with the following details:

1. *Perum Jasa Tirta II submitted the need for Joint SOE Recruitment in 2023 as many as 13 (thirteen) people consisting of 12 (twelve) people from Fresh Graduate Recruitment and 1 (one) person from Disability Recruitment.*

2. *The company has appointed a PIC Coordinator, attended the Technical Socialisation of Data Entry for the 2023 Joint SOE Recruitment Needs Plan*



yang diselenggarakan oleh FHCI BUMN, menyampaikan Surat Pernyataan Tentang Keikutsertaan dan Dukungan Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Perum Jasa Tirta II dan melakukan pengisian pada portal Rekrutmen Bersama BUMN yang dapat diakses secara terbatas oleh PIC BUMN pada tanggal 18 April dan 5 Mei 2023.

3. Rekrutmen Disabilitas, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
   a). Perusahaan menyampaikan kebutuhan disabilitas sebanyak 1 (satu) orang untuk posisi Staf Perpajakan penempatan Divisi Keuangan dan Akuntansi.
   b). FHCI melakukan rekapitulasi requirement data kebutuhan disabilitas Perum Jasa Tirta II bekerjasama dengan salah satu vendor yang ditunjuk oleh FHCI yaitu PT. Disabilitas Kerja Indonesia.
   c). Rangkaian Test yang dilaksanakan meliputi Tes Kemampuan Dasar, Core Values AKHLAK, Test Kemampuan Bidang dan Wawancara User serta Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) di Laboratorium Klinik Kimia Farma;
   d). Pengumuman akhir Peserta Lulus rangkaian tahapan seleksi Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2023 untuk disabilitas dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh FHCI BUMN

4. Rekrutmen Fresh Graduate dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan, yaitu :
   - Pelaksanaan registrasi online dan seleksi administrasi dilaksanakan oleh FHCI BUMN, kemudian Tes Kemampuan Dasar dan AKHLAK dilaksanakan oleh FHCI BUMN tanggal 12-20 Juni 2023, Tes Bahasa Inggris dilaksanakan oleh FHCI BUMN tanggal 16-20 Juli 2023, Test Digital Mindset & Online Psikotest serta Social Media Analytic yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2023 oleh vendor FHCI BUMN yaitu PT. Infomedia by Telkom Indonesia, Test User interview pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2023 melalui Online Meeting oleh internal Pewawancara PJT II yang ditetapkan melalui Surat Penugasan Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Nomor SPN-129/DKSMR/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tim Wawacara Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2023 di Lingkungan Perum Jasa Tirta II, dan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) pada tanggal 21 dan 22 Agustus 2023 oleh BUMN Kesehatan yang telah bekerjasama

(RBB) held by FHCI BUMN, submitted a Statement of Participation and Support for the 2023 Joint SOE Recruitment (RBB) signed by the President Director and the Director of Finance, HR and Risk Management of Perum Jasa Tirta II and filled in the Joint SOE Recruitment portal which can be accessed by SOE PICs on 18 April and 5 May 2023.

3. Disability Recruitment, carried out with the following stages:
   a). The company submits a disability requirement of 1 (one) person for the position of Taxation Staff for the placement of the Finance and Accounting Division.
   b). FHCI recapitulates the disability data requirements of Perum Jasa Tirta II in collaboration with one of the vendors appointed by FHCI, namely PT Disabilitas Kerja Indonesia.
   c). The series of tests carried out include Basic Ability Tests, AKHLAK Core Values, Field Ability Tests and User Interviews and Medical Check Up at the Kimia Farma Clinical Laboratory;
   d). The final announcement of participants who passed the series of selection stages of the Joint Recruitment of SOEs (RBB) Year 2023 for disabilities will be held on 31 August 2023 by FHCI SOEs

4. Fresh Graduate Recruitment is carried out with stages of implementation, namely:
   - *Online registration and administrative selection carried out by FHCI BUMN, then Basic Ability Test and AKHLAK carried out by FHCI BUMN on 12-20 June 2023, English Language Test carried out by FHCI BUMN on 16-20 July 2023, Digital Mindset Test & Online Psychotest and Social Media Analytic held on 7 and 8 August 2023 by FHCI BUMN vendor, PT. Infomedia by Telkom Indonesia, Test User interview on 16 and 18 August 2023 through Online Meeting by PJT II internal interviewers determined through the Assignment Letter of the Director of Finance, Human Resources and Risk Management Number SPN-129/DKSMR/07/2023 dated 25 July 2023 concerning the SOE Joint Recruitment (RBB) Interview Team for 2023 within Perum Jasa Tirta II, and Medical Check Up on 21 and 22 August 2023 by SOE Health which has collaborated with FHCI BUMN, namely PT. Kimia*



dengan oleh FHCI BUMN yaitu PT. Kimia Farma (Laboratorium Klinik Kimia Farma) dan selanjutnya dilakukan Penentuan Akhir (Pantukhir).
- Berdasarkan hasil Rapat BoD tanggal 25 Agustus 2023, diperoleh hasil Penentuan Akhir (Pantukhir) peserta terpilih Rekrutmen Bersama BUMN Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 sebanyak 14 orang;
- Hasil kandidat terpilih tersebut disampaikan kepada FHCI BUMN melalui Portal Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) yang diakses terbatas oleh PIC BUMN pada tanggal 27 Agustus 2023;
- Sosialisasi Hasil Akhir Peserta Lulus rangkaian tahapan seleksi Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh FHCI BUMN.

5. Perum Jasa Tirta II melalui Divisi Sumber Daya Manusia telah mengundang 15 (lima belas) peserta Kandidat Lulus Seleksi Akhir untuk mengikuti Briefing Calon Karyawan Perum Jasa Tirta II Tahun 2023 pada tanggal 5 September 2023 melalui Online Zoom Meeting sebagaimana Surat Dinas Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Nomor: SD.UND-36/SDM. DKSMR/SM/09/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Briefing Calon Karyawan Perum Jasa Tirta II Tahun 2023. Berdasarkan undangan tersebut, 1 kandidat mengundurkan diri, Dengan demikian diperoleh 14 (empat belas) peserta menyatakan konfirmasi bersedia menjadi Calon Karyawan Perum Jasa Tirta II dan 1 (satu) peserta menyatakan mengundurkan diri. Informasi peserta yang mengundurkan diri setelah pengumuman Seleksi Akhir telah disampaikan kepada Direktur Eksekutif FHCI melalui Surat Dinas Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko Nomor: SD-484 /DKSMR/SM/09/2023 tanggal 11 September 2023.

6. Pelaksanaan Pelaksanaan Inagurasi masih belum ditentukan oleh FHCI mengingat belum adanya kepastian jadwal dari Kementerian BUMN, sehingga FHCI memberikan kesempatan pada BUMN untuk melakukan onboarding sesuai kebutuhan BUMN.

7. Pembekalan terhadap 14 (empat belas) peserta Calon Karyawan dilaksanakan pada tanggal 11-15 September 2023 berupa program induksi pengenalan mengenai Perum Jasa Tirta II dan kunjungan ke Unit Wilayah Kerja PJT II.

Farma (Kimia Farma Clinical Laboratory) and then the Final Determination (Pantukhir).
- *Based on the results of the BoD Meeting on 25 August 2023, the results of the Final Determination (Pantukhir) of the selected participants of the Joint Recruitment of BUMN Perum Jasa Tirta II in 2023 were 14 people;*
- *The results of the selected candidates were submitted to the SOE FHCI through the SOE Joint Recruitment Portal (RBB) which was accessed only by the SOE PIC on 27 August 2023;*
- *Dissemination of Final Results of Participants Passing the series of selection stages of the Joint Recruitment of SOEs (RBB) Year 2023 was carried out on 31 August 2023 by FHCI BUMN.*

5. *Perum Jasa Tirta II through the Human Resources Division has invited 15 (fifteen) participants of Final Selection Passing Candidates to attend the Briefing of Prospective Employees of Perum Jasa Tirta II Year 2023 on 5 September 2023 through Online Zoom Meeting as stated in the Letter from the Head of Human Resources Division Number: SD.UND-36/SDM.DKSMR/SM/09/2023 dated 4 September 2023 regarding Briefing of Prospective Employees of Perum Jasa Tirta II Year 2023. Based on the invitation, 1 candidate withdrew, thus 14 (fourteen) participants confirmed that they were willing to become Perum Jasa Tirta II Employee Candidates and 1 (one) participant withdrew. Information on participants who resigned after the announcement of the Final Selection has been submitted to the Executive Director of FHCI through the Office Letter of the Director of Finance, Human Resources and Risk Management Number: SD- 484 / DKSMR/SM/09/2023 dated 11 September 2023.*

6. *The implementation of the Inauguration has not yet been determined by FHCI considering that there is no certainty of the schedule from the Ministry of SOEs, so FHCI provides an opportunity for SOEs to carry out onboarding according to the needs of SOEs.*

7. *Debriefing of 14 (fourteen) Employee Candidate participants was carried out on 11-15 September 2023 in the form of an induction program for the introduction of Perum Jasa Tirta II and a visit to the PJT II Working Area Unit.*



8. Calon Karyawan yang telah mengikuti program Pembekalan (program induksi) akan melaksanakan orientasi kerja di 7 (tujuh) unit kerja secara bergantian dengan durasi 2 (dua) hari kerja di setiap unit kerja mulai tanggal 18 September sd. 06 Oktober 2023, dengan rincian unit kerja:
   a). Divisi Inventarisasi, Pengendalian Aset dan Kearsipan.
   b). Divisi Komersil dan Pelayanan Pelanggan.
   c). Divisi Sumber Daya Manusia.
   d). Unit PLTA.
   e). Unit Wilayah I.
   f). Unit Usaha Pariwisata dan Hotel.
   g). Unit Layanan Laboratorium.

8. Prospective Employees who have participated in the Debriefing program (induction program) will carry out work orientation in 7 (seven) work units alternately with a duration of 2 (two) working days in each work unit from 18 September to 06 October 2023, with details of work units:
a). Inventory, Asset Control and Archives Division.
b). Commercial and Customer Service Division.
c). Human Resources Division.
d). Hydropower Unit.
e). Region I Unit.
f). Tourism and Hotel Business Unit.
g). Laboratory Service Unit.

KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Remunerasi

Perum Jasa Tirta II senantiasa menjunjung asas kesetaraan *(fairness)* dan kompetitif *(competitiveness)* dengan industri sejenis dalam penyediaan remunerasi karyawan yang disesuaikan dengan faktor internal seperti bobot kerja serta faktor eksternal seperti ketentuan pengupahan yang berlaku. Perusahaan meyakini bahwa penyediaan kompensasi yang kompetitif dan sesuai dengan bobot kerja yang diemban mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja terbaik sekaligus menarik calon karyawan potensial serta mempertahankan karyawan terbaik di Perusahaan.

Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan pengupahan yang berlaku, struktur remunerasi yang disediakan meliputi:

Penghasilan tetap yang terdiri dari:

- Gaji Pokok
- Tunjangan *Grade*
- Tunjangan Posisi
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Khusus Pajak

Penghasilan tidak tetap berupa:

- Tunjangan kinerja I, yang terdiri dari tunjangan Jasa Produksi (Jasprod) & Insentif.
- Tunjangan hari raya keagamaan
- Tunjangan Kinerja II
- Tunjangan Penempatan Wilayah Kerja

EMPLOYEE WELFARE POLICY

Remuneration

Perum Jasa Tirta II always upholds the principle of fairness and competitiveness with similar industries in providing employee remuneration that is adjusted to internal factors such as work weight and external factors such as applicable wage provisions. The Company believes that providing competitive compensation in accordance with the workload carried out can encourage employees to produce the best performance while attracting potential employees and retaining the best employees in the Company.

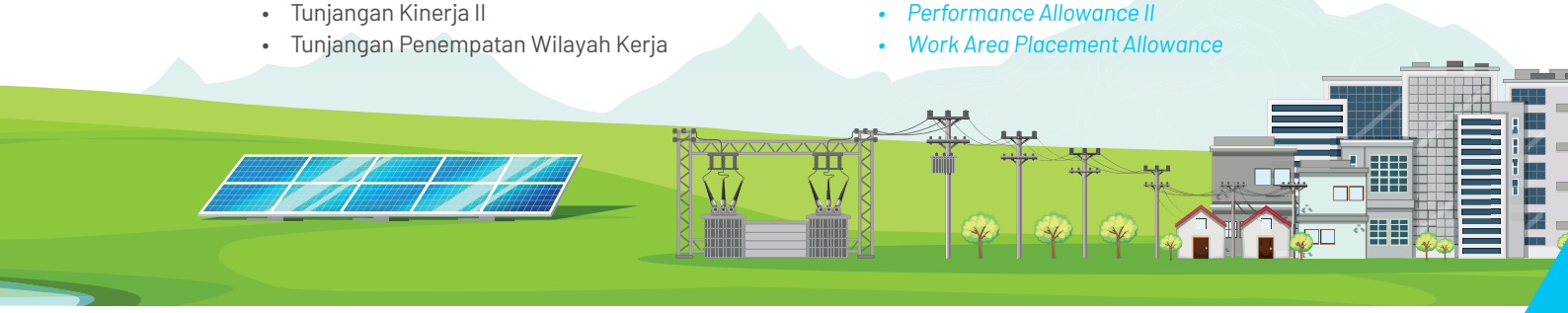
As stipulated in the Collective Labor Agreement and applicable wage provisions, the remuneration structure provided includes:

Fixed income consisting:

- *Basic salary*
- *Grade allowance*
- *Position allowance*
- *Family allowances*
- *Special Tax Allowance*

Non-permanent income in the form of:

- *Performance allowance I, which consists of allowances ProductionServices& Incentive.*
- *Religious holiday allowance*
- *Performance Allowance II*
- *Work Area Placement Allowance*



Dalam menentukan besaran penghasilan tetap, yakni gaji pokok, Perum Jasa Tirta II mengacu pada aspek aturan hukum yang mengatur upah minimum dan kelayakan yang didasarkan pada beberapa indikator, termasuk inflasi. Sedangkan besaran penghasilan tidak tetap dihitung berdasarkan unjuk kerja perusahaan dan ketentuan yang berlaku serta dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.

In determining the amount of fixed income, namely basic salary, Perum Jasa Tirta II refers to aspects of the legal rules that regulate minimum wages and feasibility based on several indicators including inflation. Meanwhile the amount of nonfixed income is calculated based on the company's performance and applicable regulations and by taking into account the company's capabilities.

Pelayanan Kesehatan

Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dan keluarganya serta karyawan purnabakti beserta istri/suami dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karyawan purnabakti beserta istri/suami yang sah juga diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung setelah memasuki masa pensiun.

Health Services

The company includes all employees and their families and retired employees and their wives/husbands in a health insurance program organized by the Health Social Security Organizing Agency (BPJS). For full-time employees and their legal wives/husbands, they are included in the health insurance program for a period of 2 (two) years after retirement.

Program Imbalan Pasca Kerja

Perum Jasa Tirta II menaruh perhatian kepada karyawan yang telah berkarya dan mengabdikan kontribusinya kepada Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Selain program jaminan kesehatan dan pelatihan persiapan masa purnabakti, Perusahaan memberikan program pensiun guna menjamin kesejahteraan bagi karyawan setelah memasuki masa kerja. Perusahaan memiliki lembaga pengelola dana pensiun independen bagi karyawan Perum Jasa Tirta II yang pembentukannya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP.151/KM.17/2000 tanggal 15 Mei 2000 terhitung mulai tanggal 1 Januari 2000.

Selain Program Pensiun Manfaat Pasti, Perum Jasa Tirta II juga memberikan program imbalan pasca kerja manfaat pasti dalam bentuk Uang Pesangon/Uang Jasa yang diatur dalam peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor PRD-9/DIR/06/2020 dan Perjanjian Kerja Bersama tahun 2019-2021.

Di samping penyediaan pengelolaan imbalan pasca kerja, Perusahaan juga memberikan pembekalan mental dan peluang pasca kerja bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun berupa seminar dan sosialisasi peluang-peluang berwirausaha guna memotivasi karyawan untuk meraih kesejahteraan yang baik di masa pensiun.

Post-employment Rewards Program

Perum Jasa Tirta II pays attention to employees who have worked and dedicated their contributions to the Company within a certain period of time In addition to the health insurance program and post-retirement preparation training, the Company provides a pension program to ensure the welfare of employees after entering service. The company has an independent pension fund management institution for employees of Perum Jasa Tirt II, the establishment of which has been determined based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. KEP.151/KM.17/2000 dated May 15, 2000 starting from January 1, 2000.

In addition to the Defined Benefit Pension Program, Perum Jasa Tirta II also provides defined benefit postemployment benefits in the form of severance pay/service fees, which are stipulated in the regulation of PJT II Directors' Decree Number PRD- 9/DIR/06/2020 and Collective Labor Agreement 2019-2021.

In addition to providing post-employment benefits management, the Company also provides mental training and post-employment opportunities for employees who are entering retirement in the form of seminars and socialization of entrepreneurial opportunities to motivate employees to achieve good welfare in retirement.



Penghargaan Karyawan

Perum Jasa Tirta II memiliki kebijakan pemberian penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk mencetak produktivitas dan kreativitas kerja sekaligus memelihara kebanggaan dan semangat kerja karyawan. Penghargaan diberikan kepada karyawan yang terbukti telah menunjukkan kesetiaan dalam mengabdikan masa kerjanya dalam jangka waktu tertentu, meraih prestasi kerja yang luar biasa, atau telah berjasa kepada Perusahaan.

Jenis penghargaan yang diberikan terdiri atas Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, Satya Karya Tiga Puluh Tahun, dan Tunjangan Kinerja II berupa uang tunai dan/atau Natura sebagai bentuk penghargaan dari Direksi. Adapun prestasi yang dikategorikan layak untuk memperoleh penghargaan antara lain pelaksanaan tugas dan kewajiban secara luar biasa, penemuan temuan baru, kontribusi ekstra dari karyawan secara individual maupun kelompok, dan prestasi serta kontribusi lainnya yang dianggap berjasa bagi Perusahaan.

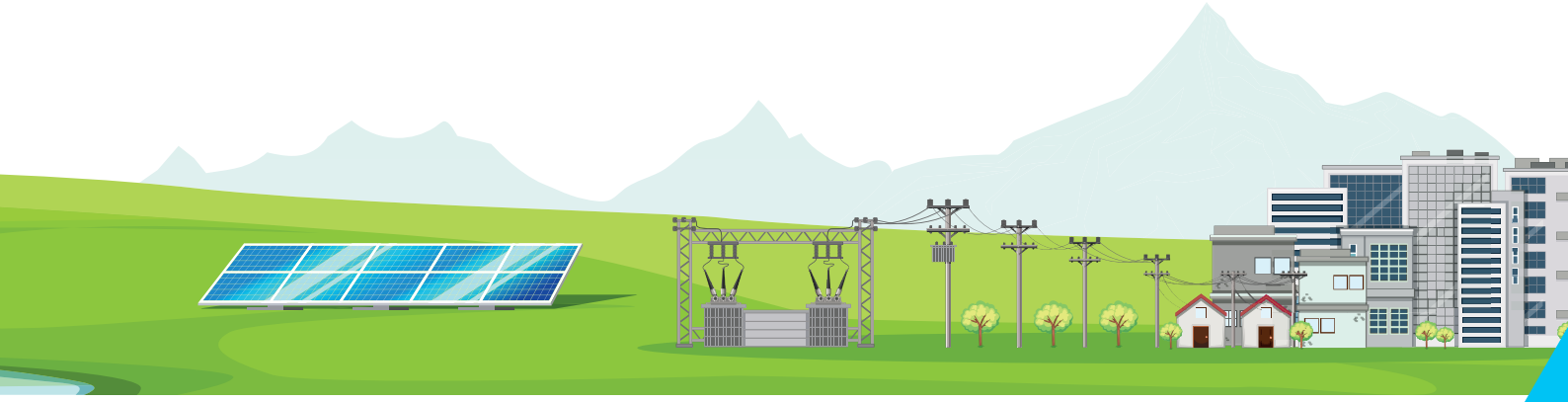
Employee Award

Perum Jasa Tirta II has an award policy that aims to motivate employees to produce work productivity and creativity while maintaining employee pride and enthusiasm. Awards are given to employees who have been shown to show loyalty in dedicating their tenure to a certain period of time, achieving outstanding work performance, or have served the Company.

The types of awards that are given consist of Satya Karya Sepuluh Tahun, Satya Karya Dua Puluh Tahun, and Satya Karya Thirty Years and Performance Allowance II in the form of cash and/or Natura which is a Board of Directors award given to employees for carrying out duties and obligations outside usual, finding new findings, extra contributions from employees, both individuals and groups that are considered meritorious for the Company.

Penetapan Penghargaan
Determination of Awards

INDIKATOR / *Indicator*	BENTUK / *Form*	WAKTU PEMBERIAN / *Time of Awarding*	JUMLAH PENERIMA TAHUN 2023 (DALAM ORANG) / *Total Awardees in 2023 (in person)*
Satya Karya Sepuluh Tahun	Piagam dan uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / *Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient*	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 10 tahun / *Employees who had continuous and uninterrupted years of services for at least 10 year*	95
Satya Karya Dua Puluh Tahun	Piagam dan uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / *Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient*	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 20 tahun / *Employees who had continuous and uninterrupted years of services for at least 20 year*	100
Satya Karya Tiga Puluh Tahun	Piagam dan uang sejumlah gaji pokok penerima penghargaan / *Certificate of Merit and the amount of the basic salary of the award recipient*	Karyawan yang telah mempunyai masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sekurang-kurangnya 30 tahun / *Employees who had continuous and uninterrupted years of services for at least 30 year*	0



Kebijakan Kesetaraan Gender

Mengintegrasikan tujuan pengelolaan SDM yang adil dan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), Perusahaan menerapkan kebijakan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh karyawan tanpa membeda-bedakan gender, agama, ras, suku, golongan, maupun kondisi fisik dalam rekrutmen dan seleksi karyawan, penilaian dan evaluasi kinerja, pemberian kesempatan pengembangan karier dan kompetensi, maupun pemenuhan hak remunerasi dan kompensasi.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Menjadi bagian dari tanggung jawab Perusahaan, Perum Jasa Tirta II menempatkan pentingnya pemeliharaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) karyawan sebagai prioritas. Hal ini ditujukan agar setiap karyawan dapat bekerja secara aman, nyaman, dan sehat serta bebas dari faktorfaktor yang berpotensi mengurangi produktivitas dan membahayakan diri sendiri dan lingkungan. Oleh karena itu, Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk melakukan Continuous Improvement dalam pengelolaan K3 secara menyeluruh dan difokuskan pada terciptanya kinerja K3 yang *zero accident* atau tingkat kecelakaan nihil.

Dalam menjamin pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di lingkungan operasional, Perum Jasa Tirta telah mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di salah satu unit kerja yang memiliki high risk atau potensi risiko tinggi yaitu Unit Usaha PLTA.

Selama tahun 2022, Perum Jasa Tirta II telah merealisasikan program pengembangan dan pemeliharaan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), antara lain:

1. Pelaksanaan Bulan K3 dengan mengadakan seminar *"Fire Behaviour"* di Triwulan I Tahun 2022.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi K3 di Triwulan II, III, dan IV Tahun 2022.
3. Pelaksanaan Medical Check Up (MCU) RisikoTinggi di Triwulan II Tahun 2022.
4. Pelaksanaan kegiatan Donor Darah di setiap triwulan tahun 2022.
5. Pelaksanaan kegiatan Dokter Keliling di setiap triwulan ahun 2022.

Gender Equality Policy

Integrating the objectives of managing human resources fairly and upholding the principles of Human Rights (HAM), the Company applies a policy of equality and justice for all employees without discriminating gender, religion, race, ethnicity, class, or physical conditions in employee recruitment and selection, assessment and performance evaluation, career opportunity and competency development opportunities, as well as fulfillment of remuneration and compensation rights.

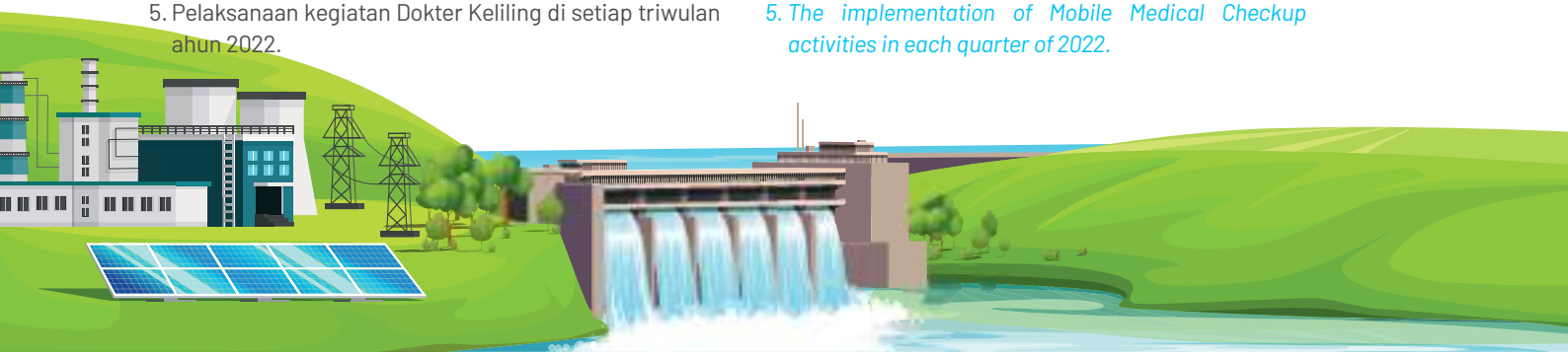
Occupational Health And Safety (Ohs)

Being part of the Company's responsibilities, Perum Jasa Tirta II places importance on maintaining the occupational health and safety (OHS) aspects of employees as a priority. It is intended that every employee can work safely, comfortably, and healthily and free from factors that have the potential to reduce productivity and endanger themselves and the environment. Therefore, Perum Jasa Tirta II is committed to carrying out Continuous Improvement in overall OHS management and is focused on creating OHS performance with zero accident or zero accident rate.

In ensuring the fulfillment of occupational health and safety aspects for employees in the operational environment, Perum Jasa Tirta has implemented Government Regulation Number 50 Year 2012 concerning the Implementation of Occupational Health and Safety Management Systems, in one work unit that has a high risk, namely the Business Unit Hydropower.

During 2022, Perum Jasa Tirta II has implemented a development and maintenance program on Occupational Health and Safety (OHS) quality, including:

1. *Implementation of OHS Month by holding a seminar on "Fire Behavior" in the First Quarter of 2022.*
2. *OHS Monitoring and Evaluation Implementation in Quarter II, III and IV of 2022.*
3. *Implementation of High-Risk Medical Check Up (MCU) in the Second Quarter of 2022.*
4. *Implementation of Blood Donation activities in each quarter of 2022.*
5. *The implementation of Mobile Medical Checkup activities in each quarter of 2022.*



6. Pelaksanaan simulasi kebakaran di unit usaha Wilayah II di Triwulan IV tahun 2022.
7. Pendistribusian kekurangan seragam tahun 2021 dan seragam *wearpack* tahun 2022.
8. Pelaksanaan kegiatan olahraga setiap hari Jumat.

Laporan Pelaksanaan Manajemen Sdm Berbasis Kompetensi Tahun 2023

Selama tahun 2022, Perusahaan telah melaksanakan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK) oleh Divisi Sumber Daya Manusia. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

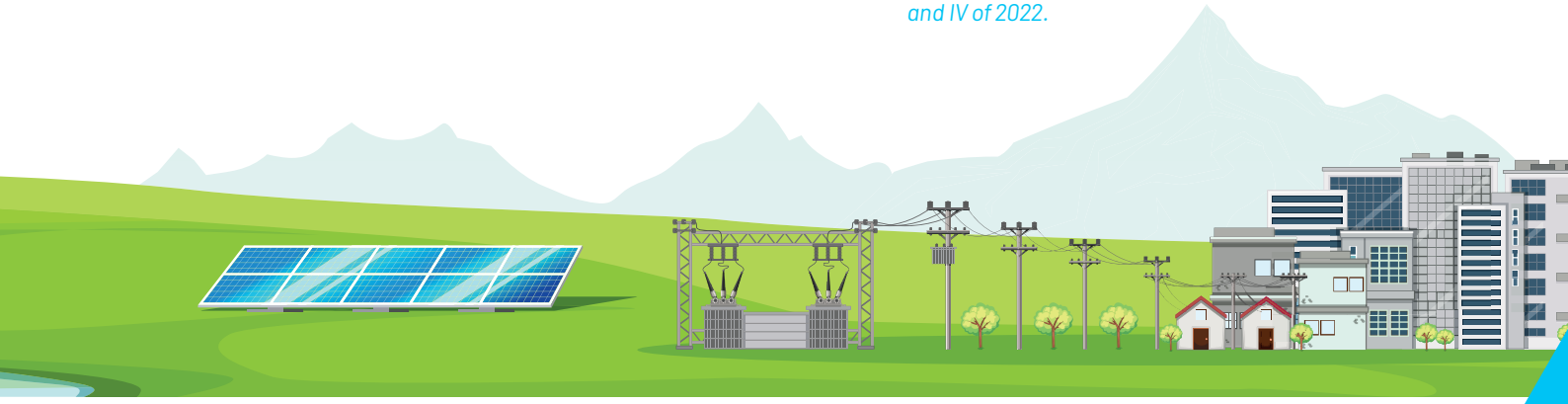
1. Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester I Tahun 2022 dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 serta Penilaian terhadap realisasi Sasaran Kerja Karyawan (SKK) dan Penilaian Kompetensi Individu Karyawan periode Semester II Tahun 2022 dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022.
2. Survei Persepsi Karyawan meliputi Survei Kepuasan Karyawan dan Survei Keterikatan Karyawan periode Semester I Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 serta periode Semester II Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022.
3. Inspeksi Mendadak (Sidak) pada Triwulan I, II, dan IV Tahun 2022.
4. *Monitoring* dan Evaluasi Kepegawaian pada Triwulan I dan III Tahun 2022.
5. Pemutakhiran Data Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada Triwulan I, II dan IV Tahun 2022.
6. Evaluasi Penilaian Calon Karyawan Triwulan II dan IV Tahun 2022.
7. Pelaksanaan Asesmen Calon Direksi pada Triwulan III Tahun 2022.
8. Pelaksanaan Asesmen Calon Manajemen Utama pada Triwulan III dan IV Tahun 2022.
9. Pelaksanaan Uji Portofolio pada Triwulan I Tahun 2022.
10. Pemberian Piagam Satya Karya pada Triwulan II Tahun 2022.
11. Pemberian Logam Mulia kepada Pensiunan PJT II pada Triwulan III dan IV Tahun 2022.

6. Implementation of fire simulations in Region II business units in Quarter IV of 2022.
7. Distribution of 2021 uniform shortages and 2022 uniform wearpack.
8. Implementation of sports activities every Friday.

Report On The Implementation Of Competency-Based Hr Management In 2023

During 2022, the Company has carried out Competency Based Human Resources Management (MSDM-BK) by the Human Resources Division. The activities that have been carried out include:

1. *Evaluation of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Individual Employee Competency Assessment for Semester I of 2022 was conducted in Quarter III of 2022 and Assessment of the realization of Employee Work Targets (SKK) and Assessment of Employee Individal Competency for Semester II of 2022 carried out in Quarter IV of 2022.*
2. *The Employee Perception Survey covers the Employee Satisfaction Survey and the Employee Engagement Survey for Semester I of 2022 conducted in Quarter III 2022 and Semester II of 2022which was conducted in Quarter IV of 2022.*
3. *Sudden Inspection (Sidak) in Quarter I, II, and IV of 2022.*
4. *Personnel Monitoring and Evaluation in Quarter I and III of 2022.*
5. *Updating of Certificate Data for Obtaining Family Benefits Payment (SKUMPTK) in Quarter I, II and IV of 2022.*
6. *Evaluation of Employee Candidates for Quarter II and IV of 2022.*
7. *Implementation of Assessment of Prospective Directors in Quarter III of 2022.*
8. *Implementation of the Main Management Candidate Assessment in Quarter III and IV of 2022.*
9. *Implementation of Portfolio Test in the First Quarter of 2022.*
10. *Award of Satya Karya Charter in the Third Quarter of 2022.*
11. *Awarding Logam Mulia to Retired PJT II in Quarter III and IV of 2022.*



Laporan Sumber Daya Manusia

Human Resources Report

PJT II menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis Perusahaan yang berkelanjutan. / *PJT II realizes that HR is the most valuable strategic asset to achieve sustainable business growth for the Company.*

Kami memperlakukan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai partner usaha strategis dalam menjalankan bisnis Perusahaan. Kehadiran Karyawan yang profesional, berkompeten, berdedikasi dan berintegritas akan membuat perusahaan memiliki dasar yang kuat untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai tujuannya.

We treat Human Resources (HR) as a strategic business partner in running the Company's business. The presence of employees who are professional, competent, dedicated and with integrity will make the company have a strong foundation to continue to grow and develop to achieve its goals.

Kami senantiasa berkomitmen memiliki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif, profesional dan berkemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta menjawab tantangan baru. Kami terus berupaya mengembangkan program pelatihan khusus dan berkala yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan profesionalisme.

We are always committed to having quality Human Resources (HR) who are productive, professional and capable of creating added value and responding to new challenges. We continuously strive to develop specific and periodic training programs aimed at improving quality, capability and professionalism.

Pimpinan dan sumber daya manusia PJT II , telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam mengelola bisnis Perusahaan. Sejalan dengan tantangan bisnis kedepan, terutama dalam menghadapi persaingan di era digitalisasi, PJT II merespon secara tepat, baik dari aspek bisnis, operasional, maupun dari aspek pengelolaan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, PJT II telah menyusun perencanaan strategis pengelolaan sumber daya manusia PJT II , yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan, guna menjamin keberlangsungan usaha PJT II kedepan.

The leadership and human resources of PJT II have competence and experience in managing the Company's business. In line with future business challenges, especially in facing competition in the digitalization era, PJT II responds appropriately, both from a business, operational and human resource management aspect. Therefore, PJT II has prepared a strategic plan for managing PJT II's human resources, which is in line with the needs of the company, in order to ensure the continuity of PJT II's business going forward.

Perusahaan senantiasa memperlakukan SDM sebagai aset yang paling berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur gender maupun ras. Perseroan menjamin hak dan kewajiban setiap Karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Undang-Undang No.02 Tahun 2022.

The company always treats HR as the most valuable asset in a fair manner and values every contribution made regardless of gender or race. The Company guarantees the rights and obligations of each employee by complying with the provisions of Law No. 13 of 2003 concerning employment and Law No. 02 of 2022.

Komposisi Karyawan

Jumlah pegawai Perum Jasa Tirta II per 31 Desember 2022 berjumlah 1.049 orang, jika dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2021 berjumlah 1.046 orang, adanya penambahan calon pegawai sebanyak 3 orang dan pengurangan pegawai sebanyak 39 orang karena meninggal, pensiun dan mengundurkan diri.

Employee Composition

The number of employees of Perum Jasa Tirta II as of December 31, 2022 was 1,049 people, when compared to the number of employees as of December 31, 2021 there were 1,046 people, there were 3 additional prospective employees and a reduction of 39 employees due to death, retirement and resignation.

Kegiatan Sumber Daya Manusia

Sepanjang tahun 2022, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan terkait dengan Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai Perkembangan Perusahaan.

Human Resources Activities

Throughout 2022, the Company has carried out various activities related to Improving the Organizational Structure and Work Procedures in Accordance with Company Development.

Roadmap Pengembangan SDM

HR Development Roadmap

Sistem pengembangan sumber daya manusia di PJT II dikembangkan sesuai dan selaras dengan strategi bisnis Perusahaan menuju kinerja bisnis terbaik di era digital. PJT II menjadikan SDM sebagai tenaga pendukung utama setiap aktivitas operasional. Perencanaan SDM dibuat dengan memperhatikan beberapa faktor yaitu perkiraan beban kerja, rencana pensiun pegawai, dan rencana anggaran yang ditinjau secara periodik.

PJT II menyusun perencanaan SDM jangka panjang untuk mendukung rencana pengembangan bisnis sejalan tuntutan pembangunan daerah dan tuntutan pasar. Perencanaan SDM PJT II dibuat sebelum tahun berjalan sebagai salah satu program kerja Divisi Sumber Daya Manusia. Perencanaan SDM meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi Karyawan yang dibutuhkan pada tahun berjalan, analisis ketersediaan Karyawan, dan analisis pemenuhan kebutuhan SDM.

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia

Strategi pengelolaan SDM yang diterapkan PJT II merupakan *alignment* terhadap visi dan misi, strategi serta budaya Perusahaan. Untuk itu, PJT II melakukan serangkaian upaya yang berkesinambungan dan terarah dalam melakukan program pengembangan SDM. Untuk mempertahankan kesinambungan dalam pengembangan organisasi, PJT II menerapkan pengelolaan SDM melalui strategi-strategi peningkatan kualitas SDM PJT II sebagai berikut,

1. Proses rekrutmen yang selektif baik yang bersifat *replacement* maupun pengisian posisi-posisi vacant sesuai dengan kebutuhan.
2. Program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan Karyawan melalui berbagai program baik *in-house* maupun *public training* seiring dengan perkembangan bisnis dan volume usaha Perusahaan.
3. Proses rotasi, mutasi dan promosi Karyawan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan organisasi Perusahaan sekaligus sebagai jenjang karir Karyawan.
4. Pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan Karyawan secara terus menerus seiring dengan pencapaian dan perkembangan bisnis dan usaha Perusahaan.
5. Penerapan peraturan internal sebagai panduan Perusahaan dan Karyawan agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, dan dinamis.

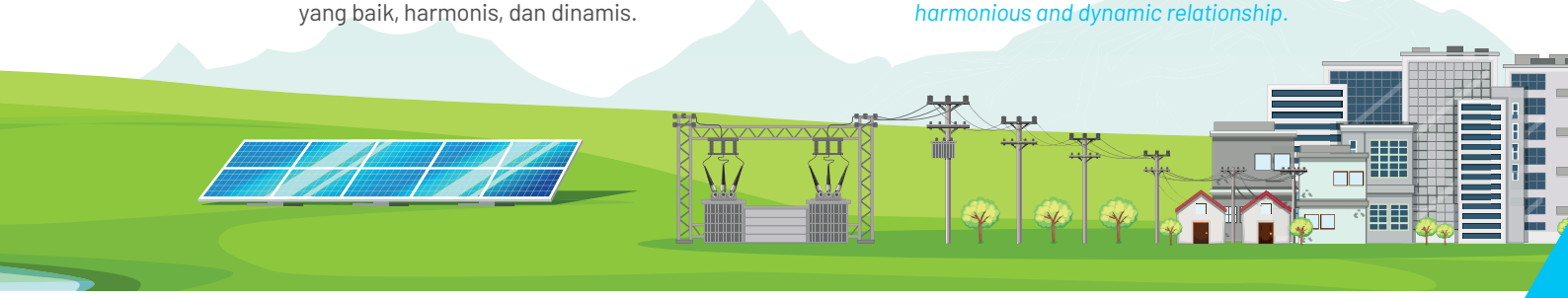
The human resource development system in PJT II is developed in accordance and in line with the Company's business strategy towards the best business performance in the digital era. PJT II makes HR as the main supporting force for every operational activity. HR planning is made by considering several factors, namely workload estimates, employee retirement plans, and budget plans that are reviewed periodically.

PJT II prepares long-term HR planning to support business development plans in line with regional development demands and market demands.
PJT II HR planning is made before the current year as one of the work programmes of the Human Resources Division. HR planning includes planning the number and qualifications of employees needed in the current year, analysing the availability of employees, and analysing the fulfilment of HR needs.

Human Resource Management Strategy

The HR management strategy implemented by PJT II is an alignment with the vision and mission, strategy and culture of the Company. For this reason, PJT II makes a series of continuous and directed efforts in conducting HR development programmes. To maintain continuity in organisational development, PJT II implements HR management through strategies to improve the quality of PJT II's human resources as follows,

1. *Selective recruitment process both for replacement and filling vacant positions as needed.*
2. *Employee education, training and development programmes through various programmes both in-house and public training in line with the Company's business development and business volume.*
3. *Employee rotation, transfer and promotion process in accordance with the needs and development of the Company's organisation as well as employee career path.*
4. *Maintenance of Employees' health and welfare continuously in line with the achievement and development of the Company's business and business.*
5. *Implementation of internal regulations as a guide for the Company and Employees to establish a good, harmonious and dynamic relationship.*



Roadmap Pengembangan SDM
HR Development Roadmap

Dalam rangka pengembangan bisnis dan usaha serta produktivitas, PJT II secara terus menerus dan berkesinambungan berusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif serta memberikan kesempatan bagi Karyawan dalam meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan dan kemampuan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rekrutmen

Kebijakan rekrutmen dilaksanakan untuk memenuhi sumber daya manusia yang bertanggung jawab serta memenuhi standar kualitas yang telah diterapkan sehingga menjamin terpenuhinya upaya peningkatan Bisnis Perusahaan. PJT II memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perusahaan, tanpa memandang unsur gender, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan fair, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan Karyawan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Ruang lingkup proses rekrutmen meliputi:
1. Perencanaan dan persiapan rekrutmen.
2. Pelaksanaan seleksi.
3. Hasil seleksi.

Kebijakan rekrutmen bertujuan untuk:
1. Merancang proses rekrutmen yang handal, sehingga calon Karyawan yang akan menjalani seleksi sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.
2. Mencapai visi dan misi Perusahaan secara optimal melalui ketersediaan sumber daya manusia yang bekerja secara profesional.
3. Memperoleh Karyawan yang berkualitas berdasarkan syarat dan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

PJT II menyadari SDM memiliki peran penting dalam menunjang keberlanjutan kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan. Keterlibatan SDM yang berkualitas akan memberikan pengaruh positif dan menjadi faktor kunci bagi keberlanjutan bisnis Perusahaan. Oleh karena itu, PJT II senantiasa berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan antara lain dengan menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan *workshop*, baik yang dilakukan oleh pihak internal melalui Lembaga Pendidikan, maupun bekerjasama dengan berbagai pihak eksternal.

In the context of business and business development and productivity, PJT II continuously and continuously strives to create a conducive work atmosphere and provide opportunities for employees to improve knowledge, insight, skills and abilities.

Policy and Implementation of Recruitment

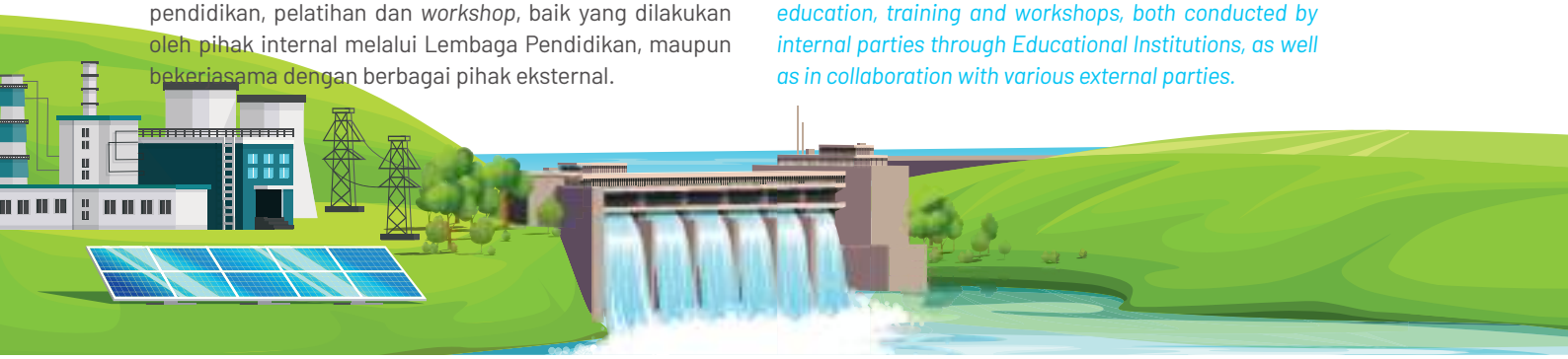
Recruitment policy is implemented to fulfil responsible human resources and meet the quality standards that have been applied so as to ensure the fulfilment of the Company's business improvement efforts. PJT II provides equal and equal opportunities to every best child of the nation to work and work in the Company, regardless of gender, religion, race, or other things that are discriminatory. This recruitment system is carried out in a transparent and fair manner, which is based on employee needs planning to support the achievement of the Company's goals and objectives in the short and long term.

The scope of the recruitment process includes:
1. Recruitment planning and preparation.
2. Implementation of selection.
3. Selection results.

The recruitment policy aims to:
1. *Design a reliable recruitment process, so that prospective employees who will undergo selection in accordance with the objectives to be achieved.*
2. *Achieve the Company's vision and mission optimally through the availability of human resources who work professionally.*
3. *Obtaining qualified employees based on the requirements and job specifications required by the Company.*

Policy and Implementation of Competency Development

PJT II realises that HR has an important role in supporting the sustainability of the Company's business and operational activities. The involvement of qualified human resources will have a positive influence and become a key factor for the sustainability of the Company's business. Therefore, PJT II is always committed to continue to develop the potential of human resources consistently and continuously, among others, by organising various education, training and workshops, both conducted by internal parties through Educational Institutions, as well as in collaboration with various external parties.



Perencanaan pengembangan sumber daya manusia disusun setiap tahun, yang meliputi antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk Karyawan, Direksi dan Komisaris, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

Human resource development planning is prepared annually, which includes, among others, plans for HR education and training needs, including education and training cost or budget plans for employees, Directors and Commissioners, as well as plans for implementing risk management certification for management and certain officials.

Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir

Pengembangan karir dapat dipahami sebagai pendekatan formal dalam upaya peningkatan atau perbaikan, pertumbuhan, kepuasan kerja, pengetahuan dan kemampuan Karyawan agar dapat memastikan bahwa orang-orang yang berkualifikasi dan pengalaman yang tepat tersedia ketika dibutuhkan, dengan demikian perencanaan dan pengembangan karir yang jelas akan membantu Karyawan dan organisasi dalam meraih keberhasilan.

Pengembangan karir harus dilihat secara holistik, tidak hanya dari sisi promosi tetapi juga dari sisi peningkatan kapabilitas, perluasan kewenangan, pengembangan individu dan peningkatan remunerasi.

Career Development Policy and Implementation

Career development can be understood as a formal approach in an effort to increase or improve, growth, job satisfaction, knowledge and abilities of Employees in order to ensure that people with the right qualifications and experience are available when needed, thus clear career planning and development will help Employees and organisations in achieving success.

Career development should be viewed holistically, not only in terms of promotion but also in terms of increased capability, expanded authority, individual development and increased remuneration.

Pengembangan SDM

Peningkatan sumber daya manusia PJT II melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan tahun 2022 untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara menyeluruh baik proses seleksi, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pendidikan.

Untuk mencapai peningkatan kinerja yang telah ditargetkan, PJT II mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan potensi Karyawan secara konsisten dan berkesinambungan melalui proses pembelajaran, antara lain menyelenggarakan berbagai pendidikan, pelatihan dan workshop baik secara internal maupun secara eksternal bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Pendidikan dan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Karyawan dalam meningkatkan produktivitas kerja, pengelolaan risiko, budaya Perusahaan serta profesionalitas.

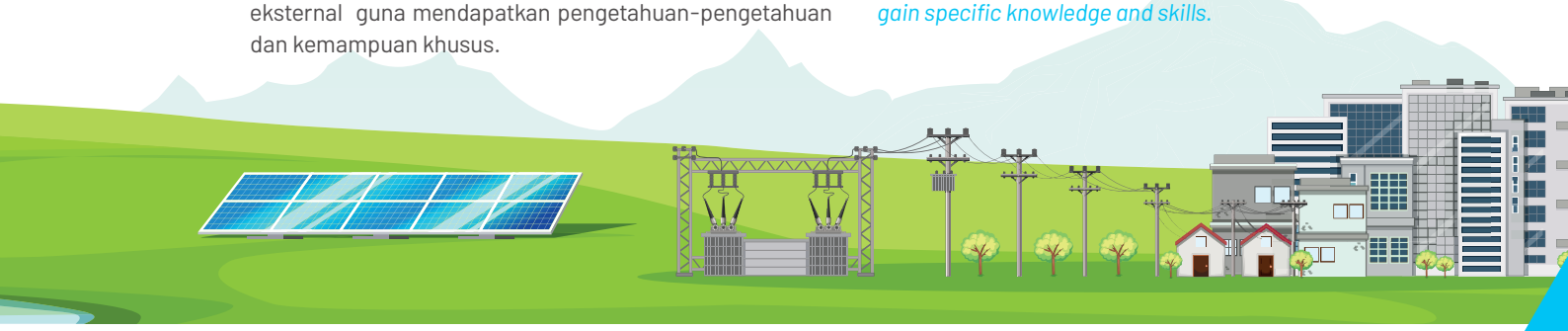
Dalam tahun 2022, Perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi Karyawan melalui pendidikan dan latihan, *Workshop*, dan *Coaching* yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan khusus.

Human Resource Development

Increasing PJT II's human resources through education and training held in 2022 to increase business growth and development which is increasing every year. The development of human resources is carried out thoroughly both the selection process, performance appraisal, and training and education.

To achieve the targeted performance improvement, PJT II has a commitment to continue to develop the potential of employees consistently and continuously through the learning process, including organising various education, training and workshops both internally and externally in collaboration with educational institutions. This education and training is expected to increase Employee knowledge and skills in improving work productivity, risk management, corporate culture and professionalism.

In 2022, the Company seeks to improve Employee competence through education and training, workshops, and coaching organised by external parties in order to gain specific knowledge and skills.



Manajemen dan Penilaian Kinerja

Manajemen dan Penilaian Kinerja merupakan alat evaluasi pencapaian target dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh Karyawan maupun satuan kerja yang disusun berdasarkan visi, misi dan tujuan jangka panjang perusahaan serta KPI Perusahaan . Penilaian Kinerja masing-masing individu Karyawan yang dilaksanakan secara objektif, berjenjang, periodik, dan transparan.

Penerapan Penghargaan dan Sanksi

Perusahaan senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan Karyawan berdasarkan pencapaian kinerja secara adil dan obyektif. Prestasi kinerja terbaik akan memperoleh penghargaan demikian sebaliknya bagi Karyawan yang tidak berprestasi maupun melakukan pelanggaran memperoleh sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Remunerasi Karyawan

Penentuan dan pemberian remunerasi Karyawan tunduk pada ketentuan dan perundang undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMR), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan peraturan terkait lainnya.

Kesejahteraan dan Jaminan Sosial

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang ketenagakerjaan serta dalam rangka meretensi Karyawan, Perusahaan senantiasa berupaya terus meningkatkan kesejahteraan Karyawan melalui berbagai aspek antara lain:

- Pemberian dan perbaikan remunerasi dan benefit, kepesertaan jaminan sosial BPJS Kesehatan, kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, fasilitas kesehatan serta Asuransi.
- Program pengembangan Karyawan seperti program peningkatan jenjang Pendidikan.
- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanan kegiatan keagamaan.
- Dukungan pada kebutuhan Karyawan untuk melaksanakan kegiatan olah raga dengan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran pelaksanan kegiatan olah raga.

Performance Management and Assessment

Performance Management and Appraisal is an evaluation tool for the achievement of targets and goals that must be achieved by all employees and work units that are prepared based on the company's vision, mission and long-term goals and KPIs. Performance Appraisal of each individual Employee is carried out objectively, tiered, periodically, and transparently.

Implementation of Rewards and Sanctions

The Company always strives to improve Employee welfare based on fair and objective performance achievement. The best performance achievements will receive awards and vice versa for Employees who do not perform or commit violations receive sanctions in accordance with the applicable provisions in the Company with due observance of applicable laws and regulations.

Employee Remuneration

The determination and provision of Employee remuneration is subject to applicable laws and regulations, including the Provincial Minimum Wage (UMR) limit, Minister of Labour Regulation and other relevant regulations.

Welfare and Social Security

In order to implement the mandate of the Labour Law and in order to retain Employees, the Company always strives to continue to improve Employee welfare through various aspects, among others:

- *Provision and improvement of remuneration and benefits, BPJS Health social security membership, BPJS Employment membership, health facilities and insurance.*
- *Employee development programmes such as education upgrading programmes.*
- *Support for the needs of Employees to carry out worship according to religion and belief by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing religious activities.*
- *Support for the needs of employees to carry out sports activities by providing facilities and infrastructure as well as the budget for implementing sports activities.*



- Bantuan bagi Karyawati/Isti Karyawan yang melahirkan.
- Bantuan bagi Karyawan yang mengalami duka cita.
- Ditahun ini Perusahaan juga membuat program kepemilikan kendaraan bermotor *(Car Ownership Program)* untuk Para Pejabat Perusahaan guna meretensi Karyawan yang potensial.

- *Assistance for Employees who give birth.*
- *Assistance for Employees who experience bereavement.*
- *This year the Company also made a car ownership programme for Company Officials to retain potential employees.*

Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada Karyawan, Perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan juga Karyawan telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Implementation of the National Social Security System (SJSN)

Providing health insurance to employees, the Company includes the National Health Insurance (JKN) programme at BPJS Health, and for participation in BPJS Employment in addition to the programmes that have been followed, namely Work Accident Insurance (JKK), Death Insurance (JKM), Old Age Insurance (JHT), Pension Insurance (JP) and also employees have been included in a new programme, namely the Job Loss Insurance Program (JKP).

Sistem Manajemen Kinerja

PJT II memiliki sistem penilaian kinerja Karyawan yang berkaitan dengan sistem penilaian unit kerja masing-masing yaitu berupa *Key Performance Indicator (KPI)* untuk menilai performa/kinerja unit kantor yang dinilai setiap triwulan/tahunan dan Sasaran Kinerja Individu (SKI) untuk mengukur kinerja Karyawan setiap setahun sekali. Penilaian SKI secara aktif akan membimbing para Karyawan dalam setiap unit kerja dalam mencapai sasaran unitnya dalam kerangka mencapai sasaran usaha PJT II serta memberikan penilaian kinerja dan potensi secara lebih objektif.

Performance Management System

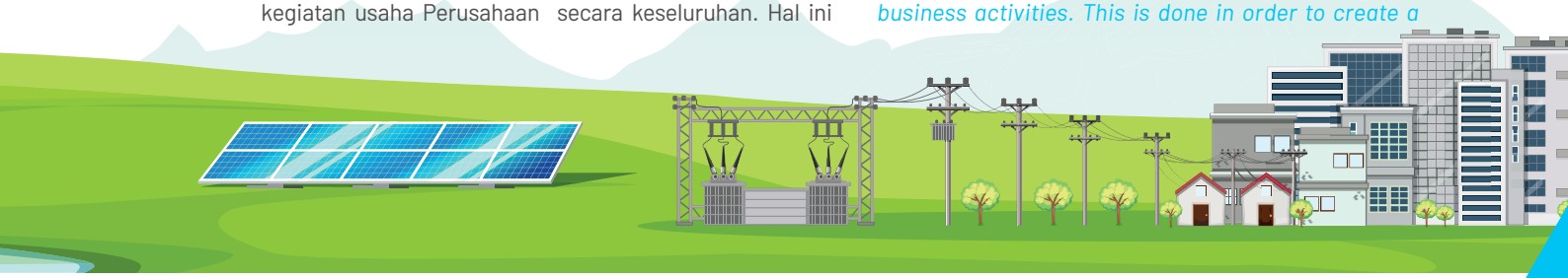
PJT II has an Employee performance assessment system that is related to the assessment system of each work unit, namely in the form of Key Performance Indicator (KPI) to assess the performance of office units which are assessed every quarter / year and Individual Performance Objectives (SKI) to measure Employee performance once a year. The SKI assessment will actively guide Employees in each work unit in achieving their unit's goals within the framework of achieving PJT II's business goals and provide a more objective assessment of performance and potential.

Internalisasi Budaya

Menyadari sepenuhnya bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, maka pengelolaan SDM menjadi salah satu fokus utama PJT II . Program penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM senantiasa dilakukan secara berkesinambungan, dimana PJT II juga telah menetapkan budaya Perusahaan yang ditanamkan melalui serangkaian program internalisasi visi, misi dan nilai-nilai budaya Perusahaan. Penerapan budaya kerja adalah suatu hal penting bagi PJT II untuk memastikan setiap Karyawan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Perusahaan, menjalankan secara penuh implementasi *good corporate governance* serta berjalan selaras dengan strategi dan kegiatan usaha Perusahaan secara keseluruhan. Hal ini

Culture Internalisation

Fully aware that Human Resources (HR) is an important asset in maintaining the sustainability of the Company, HR management is one of the main focuses of PJT II. The HR management policy improvement program is always carried out on an ongoing basis, where PJT II has also established a corporate culture that is instilled through a series of internalisation programs of the Company's vision, mission and cultural values. The implementation of work culture is an important thing for PJT II to ensure that every Employee is able to uphold the Company's values, fully implement good corporate governance and run in harmony with the Company's overall strategy and business activities. This is done in order to create a



dilakukan demi menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis agar loyalitas Karyawan dapat meningkat sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap keberlangsungan usaha PJT II.

Tim Internalisasi Budaya

Dalam menjalankan internalisasi budaya Perusahaan, PJT II melibatkan seluruh Karyawan mulai dari level yang tertinggi sampai terendah, dibantu oleh tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan internalisasi budaya di setiap Unit Kerja.

Program Internalisasi Budaya

Selama tahun 2023 PJT II telah melaksanakan program internaslisasi budaya, di antaranya sebagai berikut,

a. Mengenalkan dan mensosialisasikan sejak awal tentang budaya Perusahaan yang berlaku di PJT II yaitu sejak Karyawan mengikat kontrak kerja dengan PJT II.
b. Selalu mensosialisasikan kepada Karyawan disetiap kesempatan misalnya pada saat briefing pagi atau pada pertemuan-pertemuan internal lainnya.
c. Membuat dan memberikan buku saku yang berisi budaya Perusaahan kepada Karyawan.

Pengembangan Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia

PJT II memberikan kesempatan yang sama bagi Karyawan untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan kinerja Perusahaan. Program pengembangan SDM dilakukan melalui pendidikan karir, pelatihan dan sertifikasi profesi, keterampilan, serta berbagai kursus, pelatihan, sosialisasi, seminar, workshop dan pelatihan manajemen dan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan.

Sebelum menentukan program pelatihan, maka dilakukan kajian kebutuhan melalui berbagai tahapan. Metode pelatihan dan pengembangan dalam pengelolaan pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di PJT II dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis kebutuhan.
2. Penetapan Tujuan.
3. Pengembangan Metode Pelatihan.
4. Pengembangan Materi Pelatihan.

comfortable and harmonious work environment so that Employee loyalty can increase so that in the long run it will have a positive effect on the sustainability of PJT II's business.

Performance Management System

In carrying out the internalisation of the Company's culture, PJT II involves all Employees from the highest to the lowest level, assisted by a special team responsible for internalising the culture in each Work Unit.

Culture Internalisation

During 2023 PJT II has implemented cultural internalisation programmes, including the following,

a. Introducing and socialising from the beginning about the Corporate culture that applies in PJT II, namely since the Employee binds the work contract with PJT II.
b. Always socialise to Employees at every opportunity for example during morning briefing or other internal meetings.
c. Create and provide a pocket book containing corporate culture to Employees.

Human Resource Management Competency Development

PJT II provides equal opportunities for Employees to continue to grow along with the development of the Company's performance. HR development programmes are conducted through career education, professional training and certification, skills, as well as various courses, training, socialisation, seminars, workshops and management and technical training tailored to the needs of the Company.

Before determining the training programme, a needs assessment is conducted through various stages. Training and development methods in the management of training and development of Human Resources in PJT II are carried out through several stages, namely as follows:

1. Needs analysis.
2. Goal setting.
3. Development of Training Methods.
4. Development of Training Materials.



5. Pelaksanaan Pelatihan.
6. Evaluasi Pelatihan.

Penentuan pelatihan berfokus pada tugas, pekerjaan, atau posisi yang spesifik yang membuat seseorang menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, topik pelatihan ditentukan oleh tingkat kepentingannya.

Tujuan Pelatihan

Setiap Karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan karir Karyawan itu sendiri. Karyawan akan mengikuti program pelatihan baik dalam rangka meningkatkan keterampilan maupun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sekarang dan antisipasi pengembangan tugas ke depan.

Program Pengembangan Kualitas Dan Kompetensi Karyawan

Pengembangan kualitas dan kompetensi Karyawan dilaksanakan sesuai dengan pedoman blue print edukasi PJT II yang telah dirumuskan sebagai berikut:

Kesempatan Dan Keselamatan Kerja

PJT II merupakan Perusahaan yang bergerak dalam lingkungan kerja yang tidak memicu banyak risiko kecelakaan kerja, namun PJT II berusaha untuk memberikan perlindungan dalam bekerja, sehingga semua pihak dapat melakukan aktivitas dengan nyaman. PJT II berupaya memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja serta tercapainya kecelakaan nihil pada setiap unit kerja. Risiko yang diminimalisir berupa bahaya kebakaran, bahaya pencurian, dan fasilitas kesehatan. Penjelasan lebih lengkap terkait kesehatan dan keselamatan kerja ada pada bagian *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Penilaian Kinerja Karyawan

PJT II menetapkan standarisasi penilaian kinerja Karyawan menggunakan kamus dan *balance scorecard* untuk setiap jabatan yang disebut dengan istilah *Key Performance Indicator (KPI)*. Penilaian ini sangat mempengaruhi jenjang karir, promosi, dan rotasi masing-masing Karyawan. Namun penilaian ini sedang dalam proses perbaikan dan perubahan untuk lebih memberikan nilai-nilai keadilan bagi seluruh Karyawan.

5. Training Implementation.
6. Training Evaluation.

Training assignments focus on the specific tasks, jobs, or positions that enable a person to complete their job. Therefore, training topics are determined by their level of importance.

Training Objectives

Every Employee has the same opportunity to obtain education in accordance with the Employee's own career needs. Employees will participate in training programmes both in order to improve skills and in carrying out their current duties and anticipate the development of future duties.

Employee Quality and Competency Development Programme

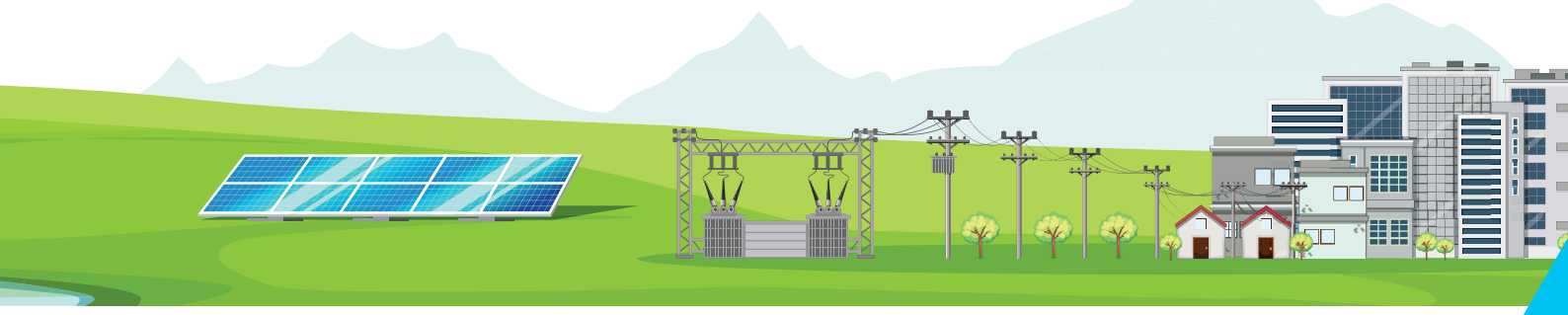
Employee quality and competency development is carried out in accordance with PJT II education blue print guidelines that have been formulated as follows:

Work Opportunity and Safety

PJT II is a company engaged in a work environment that does not trigger many risks of work accidents, but PJT II strives to provide protection at work, so that all parties can carry out activities comfortably. PJT II strives to meet occupational health and safety standards and achieve zero accidents in each work unit. Risks are minimised in the form of fire hazards, theft hazards, and health facilities. A more complete explanation of occupational health and safety is in the Corporate Social Responsibility (CSR) section.

Employee Performance Assessment

PJT II standardises employee performance appraisal using dictionary and balance scorecard for each position called Key Performance Indicator (KPI). This assessment greatly affects the career path, promotion, and rotation of each Employee. However, this assessment is in the process of improvement and change to better provide fairness values for all Employees.



Reward And Punishment

Sistem *reward and punishment* dari manajemen penting untuk diterapkan oleh Perusahaan. Sistem reward and punishment membantu manajemen dalam mewujudkan visi, misi, strategi, dan tujuan Perusahaan. Selain itu, sistem *reward and punishment* dari manajemen menjadi alat manajemen untuk dapat memberikan pengaruh kepada Karyawan agar bertindak positif guna pencapaian tujuan Perusahaan. Karyawan akan kooperatif apabila manajemen dapat mengembangkan dan mengelola Karyawan dengan tepat, sehingga target Perusahaan dapat berjalan sesuai harapan manajemen.

Sistem *reward and punishment* dari manajemen juga dirancang untuk memotivasi Karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. *Reward* merupakan salah satu alat pengendalian penting yang digunakan oleh Perusahaan untuk memotivasi personel agar mencapai tujuan Perusahaan dengan perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh Perusahaan. Sedangkan punishment merupakan sesuatu yang tidak disukai/disenangi oleh Karyawan untuk menghasilkan efek jera sehingga tidak akan melakukan perbuatan dan kesalahan yang sama. Bentuk-bentuk punishment antara lain kehilangan pekerjaan, tidak menerima kenaikan gaji, dihapus dari daftar Karyawan yang akan dipromosi, kegagalan mendapatkan *reward*, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 2023, PJT II telah memberikan 4 (empat) orang *reward* dan 2 (dua) orang *punishment*.

Rencana Pengembangan SDM Di Tahun 2024

Penerimaan Sumber Daya Manusia baru akan dilaksanakan guna menunjang pemenuhan Karyawan pada jaringan kantor, mengisi formasi atau jenis pekerjaan baru, mengganti Karyawan yang berhenti baik karena alasan pensiun ataupun lainnya serta pertimbangkan hasil *Work Load Analysis (WLA)*.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menawarkan banyak sekali kemudahan, salah satunya ialah memudahkan informasi menyebar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Proses pembelajaran secara serempak dapat dilaksankan untuk lingkup sasaran yang kecil maupun besar, dimanapun dan kapan pun serta dapat diikuti setiap Karyawan.

Reward And Punishment

The reward and punishment system from management is important to be implemented by the Company. The reward and punishment system helps the management in realising the Company's vision, mission, strategy and goals. In addition, the reward and punishment system from management is a management tool to be able to influence employees to act positively to achieve the Company's goals. Employees will cooperate if management can develop and manage employees appropriately, so that the Company's targets can run as expected by management.

The reward and punishment system from management is also designed to motivate employees to achieve company goals. Reward is one of the important control tools used by the Company to motivate personnel to achieve the Company's goals with the behaviour expected by the Company. Meanwhile, punishment is something that is disliked by Employees to produce a deterrent effect so that they will not commit the same actions and mistakes. Forms of punishment include losing a job, not receiving a salary increase, being removed from the list of employees to be promoted, failure to get a reward, termination of employment, and so on.

Throughout 2023, PJT II has given 4 (four) rewards and 2 (two) punishments.

HR Development Plan in 2024

The recruitment of new Human Resources will be carried out to support the fulfilment of employees in the office network, filling new formations or types of work, replacing employees who quit either for retirement or other reasons and considering the results of Work Load Analysis (WLA).

The development of communication and information technology offers many conveniences, one of which is making it easier for information to spread without being limited by time and space. Simultaneous learning processes can be carried out for small or large target scopes, anywhere and anytime and can be followed by every Employee.









Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Pemberdayaan Masyarakat

Pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.

The management of Social and Environmental Responsibility (TJSL) funds is carried out based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning the Social and Environmental Responsibility Program of State-Owned Enterprises. The financial reports and the implementation of the SOE TJSL Program are integrated with the periodic reports and annual reports on the performance of SOEs which are set out in separate chapters.

Pengertian Program TJSL adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

The definition of the CSR program is an activity that is the Company's commitment to sustainable development by providing economic, social, environmental and legal benefits and governance with more integrated, targeted, measurable and accountable principles and is part of the company's business approach.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

The implementation of the SOE CSR Program can be carried out in the form of:
a. Financing and fostering micro and small businesses; and/or
b. Assistance and/or other activities.

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang sebelumnya bernama Program Kemitraan diharapkan dapat memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II). Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Perusahaan Umum Jasa Tirta II dikelola oleh Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ("TJSL") yang bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko.

In the context of implementing the SOE TJSL Program for financing and fostering micro and small businesses, SOEs may specifically establish a Micro and Small Business Funding Program. The Micro and Small Business Funding Program, previously known as the Partnership Program, is expected to expand employment and business opportunities for the community around the working area of the Jasa Tirta II Public Company (PJT II). The Micro and Small Business Funding Program at Jasa Tirta II Public Company is managed by the General Division and Social and Environmental Responsibility ("TJSL") which is responsible to the Director of Finance, Human Resources and Risk Management.

PJT II selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan melakukan pembinaan terhadap usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

PJT II as a State-Owned Enterprise (BUMN) is required to provide guidance to micro and small businesses to become strong and independent.



Komitmen Pada Tanggung Jawab Sosial

Perum Jasa Tirta II menyadari bahwa kinerja positif Perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan dan kinerja bisnis semata. Kontribusi dalam pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan karyawan, dan kepuasan pelanggan merupakan bagian dari kinerja positif dan kunci keberhasilan Perusahaan secara berkelanjutan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan (TJSL) yang secara konsisten dilakukan oleh Perusahaan.

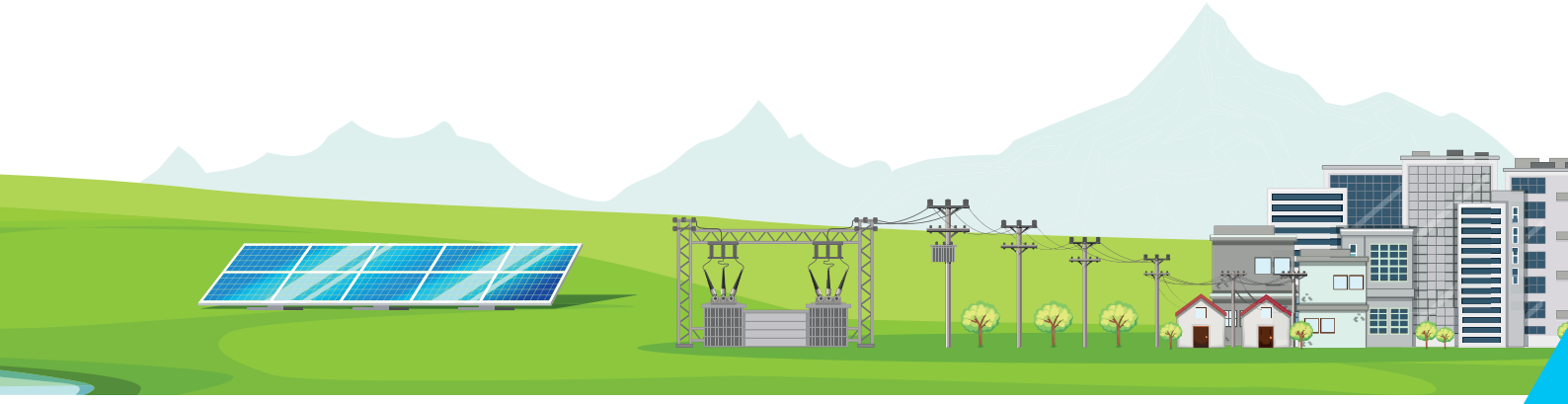
Commitment To Social Responsibility

Perum Jasa Tirta II realizes that the Company's positive performance is not only measured by business growth and performance. Contributions to environmental preservation, community empowerment, employee welfare, and customer satisfaction are part of the positive performance and the key to the Company's sustainable success. This is the background for the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (TJSL) which is consistently carried out by the Company.



Program TJSL Perusahaan dilakukan melalui berbagai inisiatifdengan mengadopsi pendekatanISO 26000 *Social responsibility* yang secara holistik dan komprehensif mengatur 7 (tujuh) aspek utama dalam tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut menjadi pendekatan ideal yang digunakan organisasi dan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial yang berprinsip pada tujuan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)*

The Company's CSR program is carried out through various initiatives by adopting the ISO 26000 Social responsibility approach which holistically and comprehensively regulates 7 (seven) main aspects of social responsibility. This approach is the ideal approach used by organizations and companies in carrying out social responsibility based on the principles of sustainable development goals (Sustainable Development Goals).

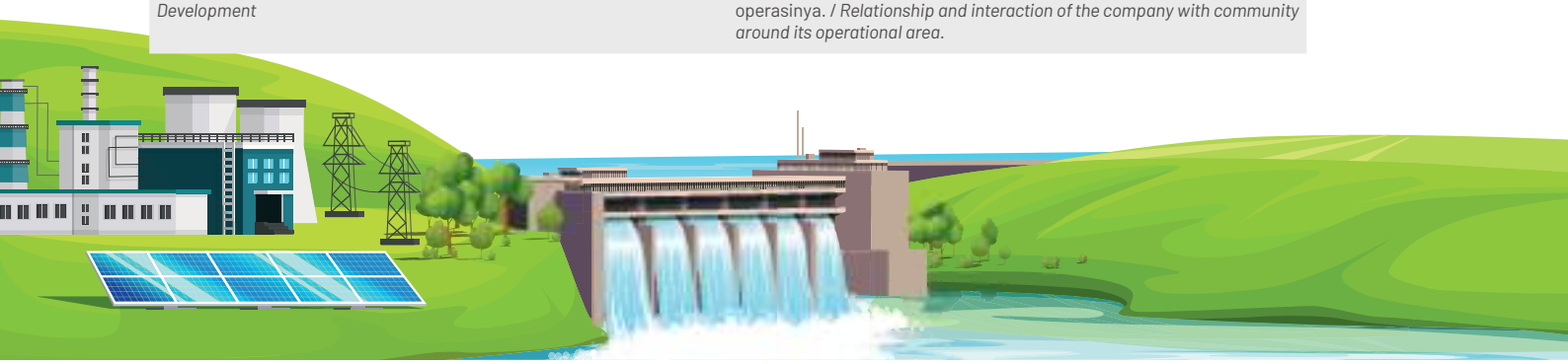


7 Prinsip Utama CSR Berdasarkan ISO 26000 / *7 Main Principles Of CSR Based On ISO 26000*



ISO 26000 *Social Responsibility* mengatur mengenai tujuh fokus tanggung jawab sosial dengan uraian sebagai berikut / *ISO 26000 Social Responsibility regulates the seven focuses of social responsibility with the following descriptions:*

FOKUS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN / *Corporate Responsibility Focus*	URAIAN / *Description*
Tata Kelola Organisasi / *Organizational Governance*	Penetapan, pengambilan, dan penerapan keputusan strategis sehingga prinsip tanggung jawab sosial dapat diterapkan. / *Determination, the making, and application of strategic decisions so that the principles of social responsibility can be applied.*
Hak Asasi Manusia / *Human Rights*	Hak dasar yang dimiliki semua orang sebagai manusia, antara lain mencakup hak sipil. Politik, ekonomi, sosial, dan budaya. / *Basic rights that all people have as humans, including civil, Political, economic, social and cultural rights.*
Praktik Ketenagakerjaan / *Labour Practices*	Kebijakan dan praktik terkait pekerjaan dan ketenagakerjaan. / *Policies and practices related to job and labour.*
Lingkungan / *Environment*	Tanggung jawab atas dampak lingkungan kepada masyarakat dari kegiatan bisnis yang dilakukan. / *Responsibility on environmental impact on the community from business activities carried out.*
Operasi yang Adil / *Fair Operating Practices*	Penerapan perilaku etis dan adil saat berinteraksi dengan pemangku kepentingan. / *Implementation of ethical and fair behaviour when interacting with stakeholders.*
Isu Pelanggan / *Consumer Issues*	Pemenuhan hak-hak pelanggan terkait produk dan layanan yang diberikan, kejelasan informasi, dan perlakuan yang adil. / *Fulfillment of consumer rights related to product and services given, information clariy, and fair treatment.*
Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat / *Community Involvement and Development*	Hubungan dan interaksi perusahaan dengan masyarakat di lingkungan operasinya. / *Relationship and interaction of the company with community around its operational area.*



Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program Pendanaan UMK bagi Perum Jasa Tirta II adalah menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri agar dapat berkembang menjadi usaha menengah serta meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan lapangan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan serta memperkokoh struktur perekonomian nasional.

Tujuan Program TJSL adalah menciptakan keseimbangan sosial dan menggalang kebersamaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan terdekat sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pelaksanaan operasi dan pengembangan perusahaan.

Dasar Kebijakan Pelaksanaan CSR

Pelaksanaan program CSR PJT II mengacu pada peraturan perundang-undangan di Indonesia baik yang mengatur secara umum maupun khusus mengenai CSR antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UU PT).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum tanggungjawab dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut, Perusahaan menyusun kebijakan dan program TJSL baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis. Perusahaan telah memiliki kebijakan tertulis dari pimpinan Perusahaan terkait program TJSL. Di samping itu, Perum Jasa Tirta II telah memiliki *Standard Operating Procedure (SOP)* TJSL yang mengatur segala macam panduan kebijakan

Objective

The objectives to be achieved in the implementation of the UMK Funding Program for Perum Jasa Tirta II are to grow and improve the ability of small businesses to become resilient and independent businesses so that they can develop into medium-sized businesses and increase the role of small businesses in the formation of national products, expanding employment opportunities and trying to increase exports. , increasing and equitable distribution of income as well as strengthening the structure of the national economy.

The objective of the CSR Program is to create a social balance and to build togetherness with the local community in the immediate vicinity so as to create a conducive climate for the implementation of the company's operations and development.

Policy Basic Implementation of CSR

The implementation of the PJT II CSR program refers to the laws and regulations in Indonesia, both those that regulate in general and specifically regarding CSR, including:

- *Law Number 25 of 2007 concerning Investment (UU PM).*
- *Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT).*
- *Government Regulation Number 32 of 1998 concerning Small Business Guidance and Development.*
  Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.
- *Law Number 13 of 2011 concerning Handling the Poor.*
- *Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 13 of 2012 concerning the Forum for the Responsibility of the Business World in the Implementation of Social Welfare.*
- *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility.*
- *Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 of 2017 concerning Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals.*

Referring to a number of these policies, the Company formulates CSR policies and programs both conceptually and in written implementation targets. The company already has a written policy from the company leadership regarding the CSR program. In addition, Perum Jasa Tirta II has a TJSL Standard Operating Procedure (SOP) which regulates all kinds



dalam melaksanakan program- program TJSL agar bisa berjalan efektif dan memberi dampak optimal kepada para pemangku kepentingan. SOP juga dimaksudkanuntuk menegakkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)* dalam pelaksanaan program TJSL.

Kegiatan Utama:

1) Memberikan Pembinaan
   Pembinaan yang diberikan oleh Unit TJSL BUMN kepada para UMK Binaan adalah Bantuan pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas UMK Binaan, serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Pendanaan UMK.

2) Memberikan Pendanaan UMK Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, jumlah pinjaman untuk setiap UMK binaan dari Program Pendanaan UMK maksimum sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kecuali pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan UMK binaan yang jumlahnya paling banyak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Metode Program TJSL

Kebijakan TJSL Perum Jasa Tirta II mengacu kepada konsep *triple bottom line* yaitu profit, *people*,dan planet. Dalam konsep ini, Perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan *(profit)* semata, namun berkontribusi memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karyawan, dan pemangku kepentingan lain *(people)* serta turut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Guna mengimplementasikan prinsip tersebut, Perusahaan menerapkan tanggung jawab sosialdimulai dari aspek yang terkecil, sebagai contoh dengan memiliki kebijakan dan menjalankan program kerja yang tidak mengeksploitasi alam.

Perusahaan merancangdan melaksanakan program TJSL secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan TJSL dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar

of policy guidelines in implementing CSR programs so that they can run effectively and have an optimal impact on stakeholders. The SOP is also intended to enforce the principles of Good Corporate Governance in the implementation of the CSR program.

Main Activities:

1) *Providing Coaching*
   The guidance provided by the SOE TJSL Unit to the fostered MSEs is assistance in education, training, marketing, promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the productivity of the fostered MSEs, as well as for studies/research related to the MSE Funding Program.

2) *Providing MSE Funding Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility of State-Owned Enterprises, the loan amount for each UMK fostered from the UMK Funding Program is a maximum of Rp. 250,000,000 (two hundred and fifty million rupiah), except for additional loans to finance needs. short-term in nature in order to fulfill orders from partners of UMK fostered in the maximum amount of Rp. 100,000,000 (one hundred million rupiah).*

TJSL Program Method

The TJSL policy of Perum Jasa Tirta II refers to the triple bottom line concept, namely profit, people, and planet. In this concept, the Company does not only aim to pursue profit (profit), but also contributes to paying attention to and being involved in fulfilling the welfare of the community, employees, and other stakeholders (people) as well as actively participating in preserving the environment (planet). In order to implement these principles, the Company implements social responsibility starting from the smallest aspects, for example by having policies and implementing work programs that do not exploit nature.

The company designs and implements the CSR program in a systematic and integrated manner. The implementation of CSR is carried out using a participatory method, namely by empowering the existing regional



dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

potential in order to increase the ability, income, and welfare of the community in a sustainable manner.

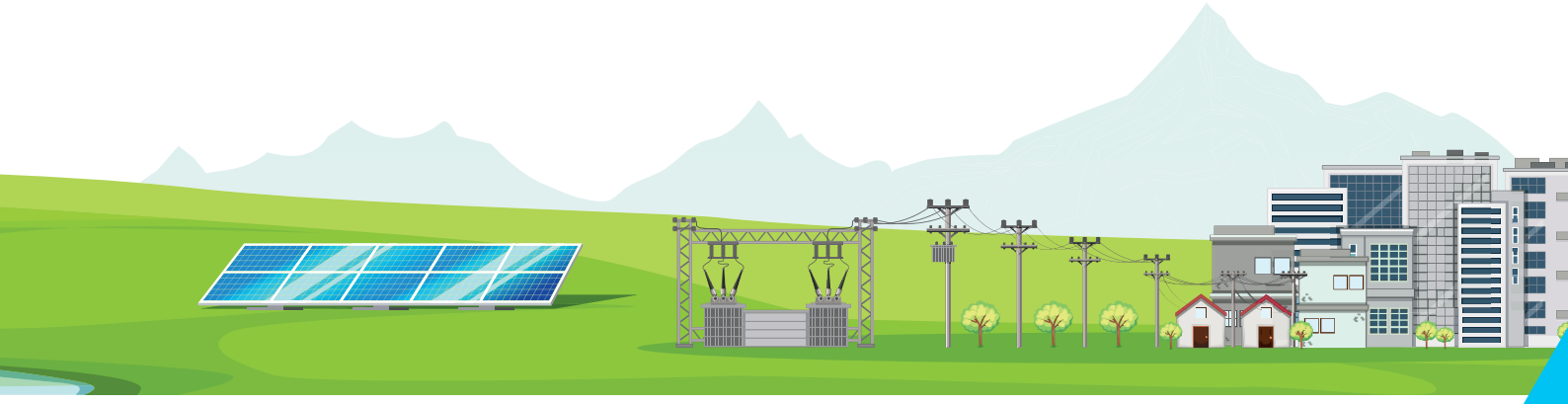
Struktur Organisasi

Keputusan Direksi Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, bahwa Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berada dua tingkat di bawah Direksi yaitu Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko (Direktur KSMR) dan Kepala Divisi Umum dan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan. Pengelolaan Unit TJSL di bawah Divisi Umum dan TJSL Perusahaan melalui Bidang TJSLbertanggung jawab kepada Direktur KSMR. Pejabat Unit TJSL Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

Organizational Structure

Decision of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. PRD-16/DIR/12/2021 concerning the Organizational Structure and Work Procedure of Jasa Tirta II Public Company, that the Social and Environmental Responsibility (TJSL) is two levels below the Board of Directors, namely the Director of Finance, Human Resources and Risk Management (Director of KSMR) and Head of General Division and Social and Environmental Responsibility. The management of the TJSL Unit under the General Division and the Company's TJSL through the TJSL Division is responsible to the Director of KSMR. The officials of the TJSL Unit of Perum Jasa Tirta II are as follows:





Metode *Due Diligence* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Dari Aktivitas Perusahaan

Dalam memetakan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha, Perusahaan melakukan identifikasi dan pengukuran tingkat urgensi dampak keberlanjutan yang dihasilkan setiap aktivitas usahanya. Pelaksanaan metode *due diligence* dilakukan dengan melibatkan unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya guna memetakan skala prioritas atas isu-isu keberlanjutan yang diangkat. Hasil metode *due diligence* selanjutnya menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menyusun kegiatan dan program yang dikhususkan untuk membidik isu-isu keberlanjutan tersebut.

Dalam menetapkan isu-isu keberlanjutan, Perusahaan melakukan identifikasi dengan berlandaskan pada 4 (empat) langkah yang disyaratkan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang material dan *boundary* (langkah identifikasi);
2. Membuat prioritas atas aspek-aspek pada langkah sebelumnya (langkah Prioritas);
3. Melakukan validasi atas aspek-aspek material tersebut (langkah Validasi);
4. Melakukan *review* atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya (langkah *Review*).

Tugas Dan Tanggung Jawab

Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

1) Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melaksanakan tugas pokok dalam kegiatan menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang berlaku di bidang TJSL sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bidang TJSL mempunyai fungsi:
   a. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi pengelolaan nisiko, program kerja dan KPI Bidang TJSL.
   b. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan, reviu, dan melaksanakan sosialisasi aturan/ pedoman/ prosedur pengelolaan TJSL

Social, Economic, And Environmental Impacts Of Company Activities: Due Diligence Method

The company determines and assesses the level of urgency of the sustainability impacts produced by each of its business activities while mapping the social, economic, and environmental effects coming from business activities. Work units and other stakeholders are included in the implementation of the due diligence technique in order to map out the priority scale for the sustainability issues raised. The company will use the findings of the due diligence approach as a guide for creating activities and programs that are expressly designed to address these sustainability challenges.

The following are the four (four) steps the company uses to identify sustainability issues:

1. *Identify the boundaries and material components (the identification process);*
2. *Give the elements from the prior step (Priority step) a higher priority;*
3. *Verify the tangible elements (validation stage);*
4. *Reviewing reports after they are published to raise the caliber of the report for the following year (Review step)*

The Duty And The Responsibility

Social and Environmental Responsibility Bidang

1) The Division of Social and Environmental Responsibility (TJSL) carries out the main tasks of preparing, directing and evaluating and reporting activities that apply in the field of CSR in accordance with the rules that apply in the Company

2) In carrying out the tasks as referred to in paragraph (1). The TJSL field has the following functions:
   a. Preparing, directing and evaluating risk management, work programs and KPIs for the TJSL Sector.
   b. Prepare, direct and evaluate the preparation, review, and socialization of TJSL management rules/guidelines/procedures



c. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi kelengkapan dokumen usulan RKAP termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), *Project Digest*, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan penyusunan RKAP yang berlaku d. menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi rencana paket pengadaan barang/jasa sesuai dengan batas kewenangan Divisi Umum dan TJSL
e. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi kelengkapan dokumen rencana pengadaan termasuk namun tidak terbatas pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri HPS *(Owner Estimate)* dan Rancangan Kontrak untuk pekerjaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku 1 menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi naskah *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan/ atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan tugas dan fungsi g merencanakan, mengelola dan mengevaluasi kinerja TJSL
h. Menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi laporan keuangan TJSL,
i. Berkoordinasi dengan Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL, pemetaan dan penyusunan Program TJSL
j. Mengendalikan bukti kerja pelaksanaan tugas dan fungsi, dan k menyiapkan, mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan laporan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Bidang TJSL terdiri dari
   a. Sub Bidang TJSL Pendanaan UMK dan Bantuan,
   b. Sub Bidang Administrasi dan Keuangan.

c. Prepare, direct and evaluate the completeness of the proposed RKAP document including but not limited to the Terms of Reference (KAK), Project Digest, and Budget Details (RAB) for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable RKAP preparation d. prepare, direct and evaluate the package plan for the procurement of goods/services in accordance with the limits of authority of the General Division and TJSL
e. Prepare, direct and evaluate the completeness of the procurement plan document including but not limited to the Terms of Reference (TOR), the HPS Self Estimate (Owner Estimate) and the Draft Contract for consulting services work in accordance with the provisions of the applicable procurement of goods and services 1 prepare, direct and evaluate the text of the Memorandum of Understanding (MoU) and/or Cooperation Agreement (PKS) in accordance with the duties and functions of planning, managing and evaluating the performance of TJSL
h. Prepare, direct and evaluate TJSL financial statements,
i. Coordinate with the Social and Environmental Responsibility Committee in order to formulate objectives and guidelines for the implementation of the CSR program, mapping and preparing the CSR program
j. Control the evidence of work implementation of duties and functions, and k prepare, direct and evaluate the preparation of reports in accordance with the duties and functions.

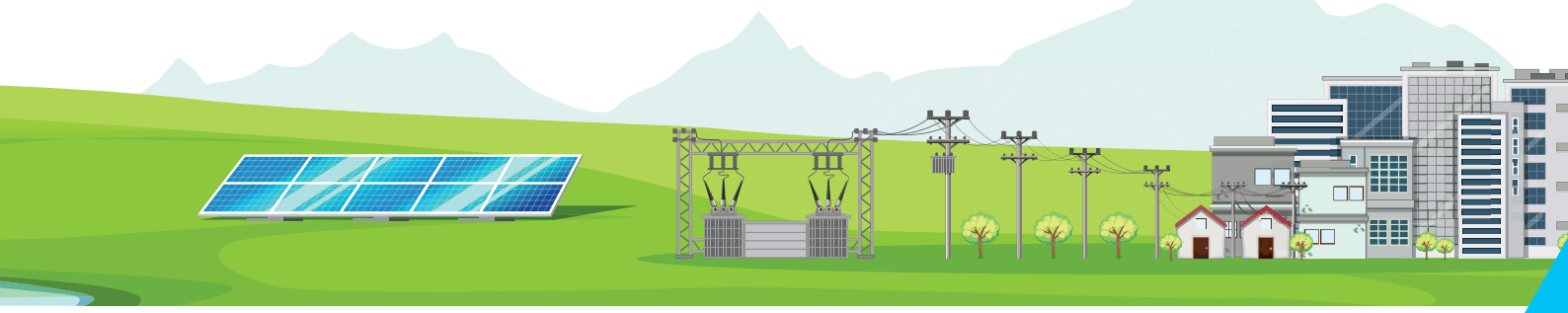
3) The CSR field consists of
   a. TJSL Sub-Sector UMK Funding and Assistance,
   b. Sub Division of Administration and Finance.

Metoda Dan Lingkup *Due Diligent* Terhadap Dampak Sosial, Ekonomidan Lingkungan Dari Aktivitas Perusahaan

Dalam rangka mencegah terjadinya dampak negatif dari keputusan dan kegiatan Perusahaan, maka PJT II telah memiliki berbagai kebijakan, mekanisme pemantauan dan mekanisme penanganan keluhan. Metode dan lingkup *due diligent* disajikan sebagai berikut:

Due Diligent Methods And Scope On Social, Economic And Environmental Impacts Of Company Activities

In order to prevent negative impacts from the Company's decisions and activities, PJT II already has various policies, monitoring mechanisms and complaints handling mechanisms. The methods and scope of due diligence are presented as follows:



Subjek Inti / *Core Subject*	Lingkup / *Scope*	Kebijakan / *Policy*	Mekanisme Pemantauan / *Monitoring Mechanism*	Mekanisme Penangangan Keluhan / *Complaints Handling Mechanism*
Hak Azasi Manusia / *Human Rights*	Penerapan prinsip-prinsip HAM kepada seluruh Pekerja / *Application of human rights principles to all workers*	• Perjanjian Kerja / Employment Agreement • Bersama *Code of Conduct/ CoC / Together with the Code of Conduct*	Survei kepuasan karyawan / *Employee Satisfaction Survey*	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. / *Complaints can be submitted directly through the leadership.*
Operasi Yang Adil / *Fair Operation*	Pencegahan benturan kepentingan, implementasi Whistleblowing System dan Code of Conduct, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain. / *Prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.*	• Kebijakan pengendalian internal / *Internal control policy* • *Whistleblowing System (WBS) / Whistleblowing System (WBS)* • Kode Etik / *Code of Conduct* • Kebijakan Gratifikasi / *Gratuity Policy*	Assessment GCG sebagai penilaian dalam pelaksanaan operasi yang adil. / *GCG assessment as an assessment in the implementation of fair operations.*	Pengaduan dilaporkan kepada Tim Pengelola Laporan Pelanggaran melalui Whistle Blowing System. / *Complaints are reported to the Violation Report Management Team through the Whistle Blowing System.*
Lingkungan Hidup / *Environment*	Efisiensi di lingkungan internal Perusahaan, pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup serta penerapan keuangan berkelanjutan. / *Efficiency in the Company's internal environment, environmental preservation and implementation of sustainable finance.*	Kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal. / *Policies related to environmental aspects, both internally and externally.*	Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) / *Evaluation of the implementation of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB)*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.*
Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja / *Occupational Health and Safety*	Berbagai program ketenagakerjaan seperti kesetaraan gender dalam kesempatan bekerja, kesetaraan dalam program pendidikan dan pelatihan kebebasan berserikat dan lainnya. Selain itu, dalam lingkup kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan memiliki program untuk memberikan fasilitas kesehatan serta memberikan jaminan keselamatan kerja kepada seluruh karyawan. / *Various employment programs such as gender equality in employment opportunities, equality in education and training programs on freedom of association and others. In addition, within the scope of occupational health and safety activities, the Company have a program to provide health facilities and provide work safety guarantees to all employees.*	Peraturan Standar K3 PJT II / *PJT II K3 Standard Regulations*	Survei Kepuasan Karyawan / Employee Satisfaction Survey	Pengaduan dapat disampaikan melalui pimpinan secara langsung. / *Complaints can be submitted directly through the leadership.*
Tanggung Jawab Pelanggan / *Customer Responsibilities*	• Kemudahan akses informasi dan jaringan layanan Perusahaanan. / *Ease of access to information and the Company's service network.* • Peningkatan kualitas layanan. / *Improved service quality.* • Program literasi Perusahaanan. / *Company literacy program.*	• SK Direksi tentang Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Pelanggan Perusahaan / Decree of the Board of Directors regarding the Company's Customer Complaint Resolution Policy. • SK Direksi / *Director's Decree*	Laporan pelaksanaan CSR / *CSR implementation report*	Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.*
Pengembangan Sosial Kemasyarakatan / *Community Social Development*	Kontribusi kepada masyarakat / *Contribution to society*	Kebijakan internal terkait pelaksanaan kegiatan CSR PJT II / *Internal policies related to the implementation of PJT II CSR activities*		Pengaduan dapat disampaikan langsung ke Kantor Pusat atau Kantor Cabang terdekat PJT II. / *Complaints can be submitted directly to the Head Office or the nearest PJT II Branch Office.*



Stakeholder Penting Yang Terdampak Atau Berpengaruh Pada Dampak Dari Kegiatan Perusahaan PJT II

Mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perusahaan. Berdasarkan hasil identifikasi, keterlibatan Pemangku Kepentingan PJT II dapat dilihat pada tabel berikut:

Important Stakeholders That Impact Or Influence On The Impact Of PJT II Company Activities

Identify its stakeholders based on their interests and relationship with the Company. Based on the identification results, the involvement of PJT II Stakeholders can be seen in the following table:

PEMANGKU KEPENTINGAN *Stakeholders*	TOPIK UTAMA YANG DIAJUKAN *Main Subjects*
Topik Utama yang Diajukan / *Main Topic Proposed*	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Perusahaan/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Perusahaan. / *Financial performance/ non-financial performance of the Company/updated information on the Company's strategic actions and directions.*
Karyawan / *Employee*	Kinerja keuangan/kinerja non finansial Perusahaan/informasi terkini tentang aksi dan arahan strategis Perusahaan. / *Financial performance/ non-financial performance of the Company/updated information on the Company's strategic actions and directions.*
Pelanggan / *Customer*	Pelayanan Pelanggan/kerahasiaan data Pelanggan. / *Customer service/ customer data confidentiality.*
Pemerintah / *Government*	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. / *Compliance with applicable laws and regulations.*
Masyarakat / *Public*	Kontribusi kepada masyarakat. / *Contribution to society.*

Isu Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Penting Terkait Dampak Kegiatan Perusahaan

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para Pemangku Kepentingan, PJT II melakukan *Focus Group Discussion* kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting pendidikan, sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan adalah sebagai berikut:

- Ekonomi
- Kepatuhan Lingkungan
- Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Kerja
- Pendidikan dan Pelatihan
- Kepuasan Karyawan
- Kesejahteraan Masyarakat

Important Social, Economic And Environmental Issues Related To The Impact Of Company Activities

In presenting the latest issues, data and information relevant to the rights of the Stakeholders, PJT II conducts Focus Group Discussions with stakeholders. The important educational, social, cultural, economic and environmental issues are as follows:

- *Economy*
- *Environmental Compliance*
- *Occupational Safety, Security and Health*
- *Education and training*
- *Employee Satisfaction*
- *Public welfare*

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Baik Yang Merupakan Kewajiban Maupun Yang Melebihi Kewajiban

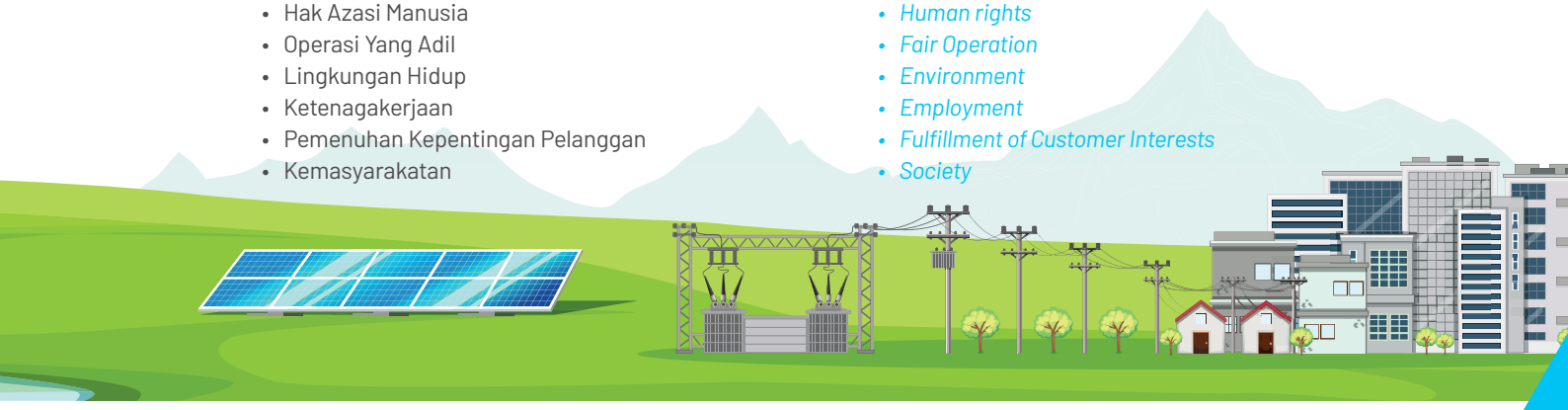
Lingkup tanggung jawab sosial PJT II adalah sebagai berikut:

- Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial
- Hak Azasi Manusia
- Operasi Yang Adil
- Lingkungan Hidup
- Ketenagakerjaan
- Pemenuhan Kepentingan Pelanggan
- Kemasyarakatan

Scope Of Corporate Social Responsibility Whether That Is A Liability Or Exceeds An Obligation

PJT II's scope of social responsibility is as follows:

- *Social Responsibility Governance*
- *Human rights*
- *Fair Operation*
- *Environment*
- *Employment*
- *Fulfillment of Customer Interests*
- *Society*



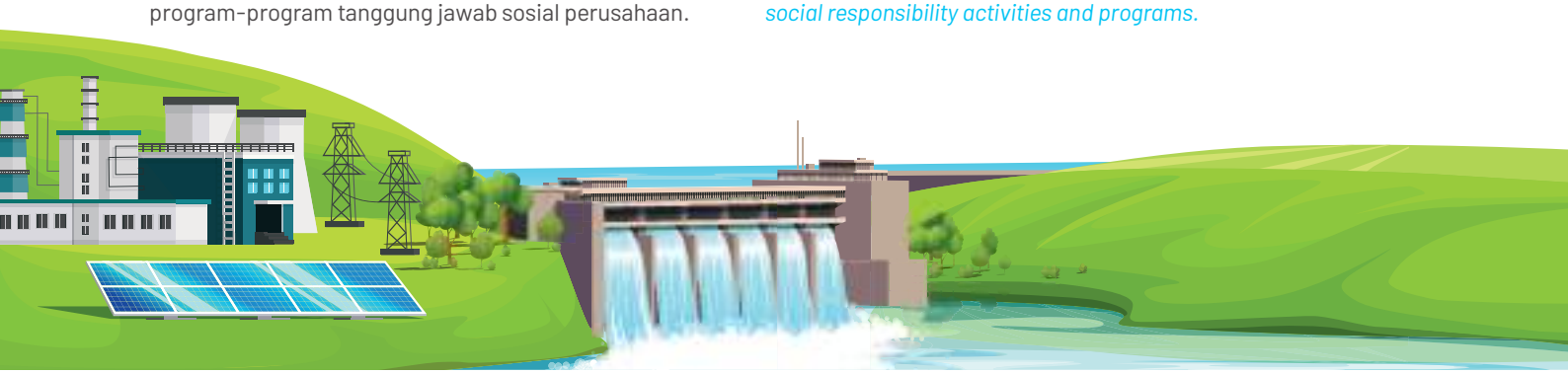
Perusahaan telah melaksanakan berbagai program CSR, baik yang merupakan kewajiban *(mandatory)* maupun melebihi kewajiban *(voluntary)*. Rincian kegiatankegiatan tersebut diungkapkan sebagai berikut:

The company has implemented various CSR programs, both mandatory and voluntary. The details of these activities are disclosed as follows:

SUBJEK INTI / *Core Subject*	PERATURAN TERKAIT / *Related Rules*
Hak Asasi Manusia / *Human Rights*	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan Sektor Jasa Keuangan. / *Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Protection of Customers in the Financial Services Sector.* • Peraturan Perusahaan Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Pelanggan. / *Indonesian Company Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning Settlement of Customer Complaints.*
Operasi Yang Adil / *Fair Operation*	Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. / *Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.*
Lingkungan Hidup / *Environment*	• Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas / *Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 About Changes to* • Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi / *Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes*
Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja / *Employment, Health and Safety*	UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 13 tahun 2013 / *The Manpower Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2013*
Pelanggan / *Customers*	• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Pelanggan Sektor Jasa Keuangan. / *Financial Services Authority Regulation No. 1/POJK.07/2013 concerning Protection of Customers in the Financial Services Sector.* • PeraturanPerusahaan IndonesiaNo.7/7/PBI/2005tentangPenyelesaianPengaduan Pelanggan , dimana telah diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008 Tentang perlindungan Pelanggan. / *Indonesian Company Regulation No. 7/7/PBI/2005 concerning the Resolution of Customer Complaints, which has been amended by PBI No. 10/10/PBI/2008 About Customer protection.*
Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan / *Social and Community Development*	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: PER- 02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. / *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.*

Sedangkan lingkup tanggung jawab sosial yang melebihi kewajiban yaitu Perusahaan turut mendukung dan berpartisipasi dalam mencapai Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) melalui pelaksanaan aktivitas dan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.

Meanwhile, the scope of social responsibility that exceeds obligations is that the Company supports and participates in achieving the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) through the implementation of corporate social responsibility activities and programs.



Strategi Dan Program Kerja Dalam Dalam Upaya *Stekeholders Engagement* Dan Meningkatkan Nilai *Stakeholders*

PJT II telah mengidentifikasi pemangku kepentingannya dalam menangani isu-isu sosial, ekonomi dalam upaya *stakeholders engagement* dan meningkatkan *value* untuk *stakeholder* dan *shareholder*. Keterlibatan Pemangku Kepentingan PJT II dapat dilihat pada tabel berikut:

Strategies And Work Programs In The Effort Of Stekeholders Engagement And Increasing Stakeholders Value

PJT II has identified its stakeholders in dealing with social, economic issues in an effort to engage stakeholders and increase value for stakeholders and shareholders. The involvement of PJT II Stakeholders can be seen in the following table:

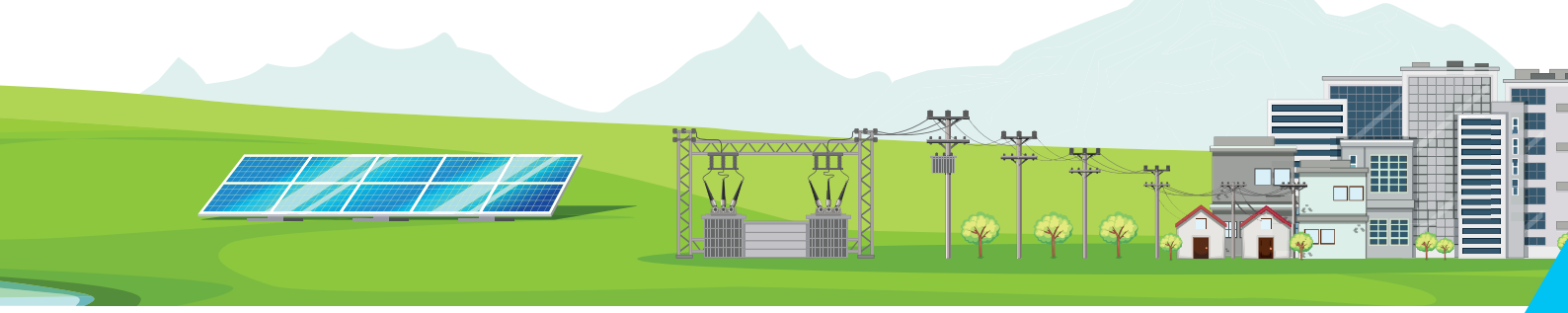
PEMANGKU KEPENTINGAN / *Stakeholders*	METODE PELIBATAN / *Engagement Methods*	FREKUENSI / *Frequency*
Pemilik Modal / *Capital owners*	Rapat Umum Pemilik Modal / *General Meeting of Capital Owners*	Minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. / *Minimum 1 (one) time in 1 (one) year.*
Pelanggan / *Customer*	Pertemuan langsung dengan Pelanggan / *Face-to-face meeting with customers*	Sesuai dengan kebutuhan / *As needed*
Karyawan / *Employee*	Berkumpul / *Gathering*	Minimal 1 (satu) tahun sekali / *Minimum 1 (one) year*
Mitra Kerja / *Work partners*	Proses Operasional / *Operational Process*	Sesuai dengan kebutuhan / *As needed*
Masyarakat / *Public*	Penerapan CSR / *CSR Implementation*	Penerapan CSR / *CSR Implementation*

Di samping itu, strategi dan program kerja tanggungjawab sosial untuk tiap-tiap *core subject* tanggung jawab sosial disampaikan sebagai berikut:

- Hak Asasi Manusia Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia yaitu menekankan pada pemenuhan prinsip hak asasi manusia terhadap Pekerja. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain, pemenuhan hak pekerja dan program-program relevan lainnya.
- Operasi Yang Adil Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil yaitu menekankan pada kegiatan operasional yang sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil antara lain, pengadaan barang dan jasa serta program-program relevan lainnya.
- Lingkungan Hidup Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup menekankan pada pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta penghematan energi listrik dan pengurangan emisi. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup antara lain, Penghematan energi listrik dan pengurangan emisi, penghematan penggunaan air, pengelolaan limbah, dan program- program relevan lainnya.

In addition, strategies and work programs for social responsibility for each core subject of social responsibility are presented as follows:

- *Human Rights The strategy in social responsibility related to human rights is to emphasize the fulfillment of human rights principles for workers. Work programs in social responsibility related to human rights include the fulfillment of workers' rights and other relevant programs.*
- *Fair Operations The strategy in social responsibility related to fair operations is to emphasize operational activities that are in accordance with applicable business ethics and business ethics. Work programs in social responsibility related to fair operations, among others, procurement of goods and services as well as other relevant programs.*
- *Environment The strategy in social responsibility related to the environment emphasizes the management and protection of the environment as well as saving electrical energy and reducing emissions. Work programs in social responsibility related to the environment include saving electricity and reducing emissions, saving water use, waste management, and other relevant programs.*



- Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja yaitu menekankan pada hubungan industrial yang sehat dan kondusif antara Perusahaan dengan karyawan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja antara lain, program-program kesejahteraan pekerja, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan, serta program-program relevan lainnya.
- Pelanggan Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait Pelanggan yaitu menekankan pada upaya perlindungan Pelanggan serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait Pelanggan antara lain, kemudahan akses informasi dan jaringan layanan perPerusahaan an, peningkatan kualitas layanan Pelanggan , program literasi perPerusahaan an serta program-program relevan lainnya.
- Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan Strategi dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan yaitu menekankan pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program kerja dalam tanggung jawab sosial terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan antara lain, program Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSL) serta program-program relevan lainnya.

Anggaran Dan Realisasi Biaya Tanggung Jawab Sosial

PJT II memandang CSR sebagai sebuah investasi dalam jangka panjang, sehingga perencanaan harus diperhitungkan secara matang guna kelancaran realisasi semua program CSR dan pencapaian targetnya. Faktor penting dari pelaksanaan program CSR adalah tersedianya dana atau anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan CSR.

Perum Jasa Tirta II telah melakukan TJSL dalam bentuk Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sejak tahun 1991 baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan Pembinaan yang bersifat hibah.

- *Employment, Health, and Occupational Safety The strategy in social responsibility related to employment, health and safety at work is to emphasize healthy and conducive industrial relations between the Company and employees. Work programs in social responsibility related to employment, occupational health and safety include, among others, worker welfare programs, implementation of health checks, and other relevant programs.*
- *Customers The strategy in customer-related social responsibility is to emphasize efforts to protect customers and improve product and service quality. Work programs in customer-related social responsibility, among others, ease of access to information and the Company's service network, improvement of customer service quality, the Company's literacy program and other relevant programs.*
- *Social and Community Development The strategy in social responsibility related to social and community development is to emphasize sustainable economic development. Work programs in social responsibility related to social and community development include the Partnership and Community Development program (TJSL) and other relevant programs.*

Budget And Cost Realization Of Social Responsibility

PJT II views CSR as an investment in the long term, so that planning must be carefully considered for the smooth realization of all CSR programs and achieving their targets. An important factor in implementing CSR programs is the availability of funds or budgets allocated specifically for CSR activities.

Perum Jasa Tirta II has conducted CSR in the form of Micro and Small Business Funding (UMK) since 1991, both in the form of loans and assistance in the form of grants. Cumulative distribution of UMK Funding.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related To Human Rights

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

PJT II memiliki komitmen penuh terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait HAM meliputi pencegahan tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. PJT II juga memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya, termasuk dalam hal pengangkatan calon pekerja.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Lingkup tanggung jawab sosial Perusahaan terkait dengan Hak Asasi Manusia, yakni berkaitan dengan ketenagakerjaan meliputi perlakuan/tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi Serikat Pegawai, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerja jika ada sesuatu hal.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendukung kelancaran operasional Perusahaan dan Tidak diterimanya laporan terkait pelanggaran HAM.

Pelaksanaan Dan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Asasi Manusia

Setiap tahun, PJT II senantiasa menyusun perencanaan kegiatan yang dituangkan dalam program kerja yang dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran PJT II (RKAP). Program kerja tersebut ditujukan untuk menjamin proses kerja di PJT II telah memperhatikan juga implementasi HAM antara lain pengalokasian biaya untuk kegiatan-kegiatan pegawai.

Commitment And Corporate Social Responsibility Policy In Human Rights Sector

PJT II is fully committed to the enforcement of Human Rights (HAM). The scope of social responsibility related to human rights includes preventing acts of discrimination, freedom of association, working time arrangements, permits due to emergency conditions, and opportunities to practice worship. PJT II also provides equal rights and opportunities to work regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions, including the appointment of prospective workers.

Scope Of Corporate Social Responsibility For Human Rights

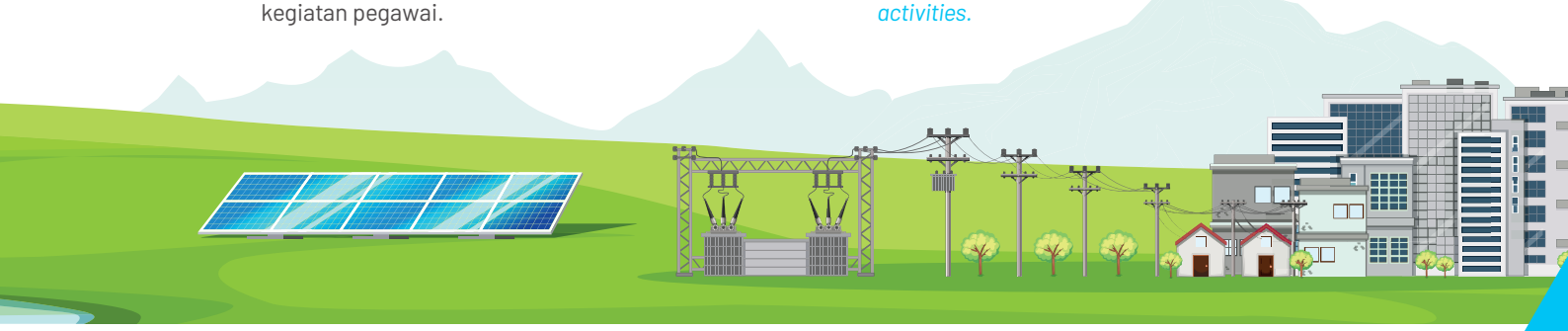
The scope of the Company's social responsibility related to Human Rights, which is related to employment includes discrimination treatment/actions, recognition and guarantees for the Employee Union, the right to work time, annual leave, permission to rest in case of childbirth/miscarriage or illness due to menstruation, permission to worship as well as permission to leave the worker if there is something wrong.

Corporate Social Responsibility Planning For Human Rights

Establishing a harmonious working relationship and in accordance with the provisions of the law. Creating a conducive work environment to support the smooth operation of the Company and not receiving reports related to human rights violations.

Implementation And Initiatives Of Corporate Social Responsibility In Human Rights Sector

Every year, PJT II always prepares activity plans as outlined in the work program contained in the PJT II Work Plan and Budget (RKAP). The work program is intended to ensure that the work process at PJT II has also taken into account the implementation of human rights, including the allocation of costs for employee activities.



Waktu Kerja

- Memperhatikan kelancaran operasional Perusahaan, kerja lembur dapat dilaksanakan dengan persetujuan bersama antara PJT II dengan Pegawai guna menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan untuk itu PJT II akan membayar upah kerja lembur kepada Pegawai.
- Waktu Kerja Lembur disesuaikan dengan kebutuhan operasional Perusahaan dan Perusahaan menetapkan fasilitas lembur. Terhadap besarnya upah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Bagi pegawai *teller, customer service*, dan pegawai operasional lainnya pada jama-jam istirahat tetap melayani Pelanggan , selanjutnya waktu istirahat dapat diatur secara bergilir dengan rekan sekerja lainnya.
- Khusus bagi pegawai wanita yang menyusui, telah diberikan kesempatan yang sepatutnya untuk melakukan laktasi dan atau menyusui anaknya selama waktu kerja.

Izin Pernikahan

- Bagi pegawai yang akan melangsungkan pernikahan harus mengajukan izin tertulis kepada Direksi melalui unit kerja dengan ketentuan bagi pegawai pria untuk istri pertama, bagi pegawai wanita menjadi istri pertama dengan menyebutkan identitas calon istri/ suami.
- Permohonan izin tersebut harus melampirkan Surat Keterangan Belum Menikah atau yang bisa dipersamakan dari kantor kelurahan/kepala desa dari instasi berwenang lainnya bagi pegawai atau calon yang memiliki status belum pernah melakukan perkawinan.

Cuti Tahunan

- Cuti tahunan diberikan kepada Pegawai yang telah bekerja di Perusahaan selama 1 (satu) tahun secara terus menerus.
- Selama menjalani masa cuti tahunan, Pegawai tetap menerima gaji penuh.
- Lamanya cuti tahunan ditentukan berdasarkan jabatan Pegawai yang diatur oleh Perusahaan .
- Ketentuan pelaksanaan cuti tahunan diatur oleh Perusahaan.
- Hak cuti tahunan dilaksanakan berdasarkan permintaan pegawai dan/atau penugasan oleh Perusahaan dan disesuaikan dengan beban kerja/kebutuhan Perusahaan

Working Time

- *Taking into account the smooth operation of the Company, overtime work can be carried out with mutual agreement between PJT II and employees in order to complete work that cannot be delayed and for that PJT II will pay overtime wages to employees .*
- *Overtime hours are adjusted to the Company's operational needs and the Company determines overtime facilities. The amount of wages refers to the applicable laws and regulations.*
- *For teller employees, customer service, and other operational employees during break hours they continue to serve customers, then rest periods can be arranged in rotation with other co-workers.*
- *Especially for female employees who are breastfeeding, have been given appropriate opportunities to do lactation and or breastfeed their children during working hours.*

Marriage Permit

- *For employees who are going to get married, they must apply for written permission to the Board of Directors through the work unit with provisions for male employees to be the first wife, for female employees to be the first wife by stating the identity of the prospective wife/husband.*
- *The permit application must attach a Certificate of Unmarried or an equivalent from the kelurahan office/village head from other authorized agencies for employees or candidates who have never married status.*

Annual Leave

- *Annual leave is given to Employees who have worked in the Company for 1 (one) year continuously.*
- *During the period of annual leave, employees continue to receive their full salary.*
- *The length of annual leave is determined based on the employee's position as regulated by the Company.*
- *Provisions for the implementation of annual leave are regulated by the Company.*
- *The right to annual leave is carried out based on the request of the employee and/or assignment by the Company and adjusted to the workload/needs of the Company.*



- Bagi pegawai yang mengajukan rencana cuti tahunan namun ditolak oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, maka diwajibkan kepada kepala unit dimaksud untuk memberikan alasan penolakannya secara tertulis dan ditembuskan ke unit kerja *Human Capital*.

Izin Menjalankan Ibadah

PJT II senantiasa memberikan ijin kepada Pegawai untuk menjalankan ibadah yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh PJT II, termasuk izin untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh.

Izin Meninggalkan Pekerjaan

Setiap pegawai yang berhalangan hadir di kantor karena alasan apapun wajib memberitahukan hal tersebut baik secara tertulis maupun secara lisan pada hari yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan secara lisan, harus disusun pemberitahuan secara tertulis kepada atasannya paling lambat pada kesempatan pertama masuk kantor. Izin meninggalkan pekerjaan diberikan pada saat:

- Peristiwa khusus yaitu pernikahan pegawai, pegawai menikahkan anak, suami/istri/anak/menantu/orang tua/ mertua/anggota dalam satu rumah meninggal dunia, kelahiran anak, istri pegawai mengalami keguguran kandungan, khitanan anak, dan lain-lain.
- Sakit, yaitu sakit dengan surat dokter selama maksimum 3 (tiga) hari, sakit tanpa surat dokter selama 1 (satu) hari dan sakit dengan rawat inap.
- Keperluan pribadi yang penting, mendadak dan tidak dapat diwakilkan.

PJT II telah mengatur ketentuan pelaksanaan ijin meninggalkan pekerjaan.

Capaian Dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Hak Azasi Manusia

Dengan memberikan izin cuti dan menjamin pelaksanaan ibadah masing-masing pegawai, berdampak pada peningkatan kinerja karyawan serta kesungguhan dalam bekerja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip HAM, PJT II dapat meningkatkan keharmonisan dalam kegiatan operasional Perusahaan. Selain itu, para karyawan akan merasa nyaman berada di lingkungan Perusahaan. Hal ini berdampak pada meningkatnya survei kepuasan karyawan. Pada tahun 2022, PJT II belum mendapatkan penghargaan terkait hak asasi manusia.

- *For employees who submit an annual leave plan but are rejected by the head of the work unit concerned, it is obligatory for the head of the unit to provide the reasons for his refusal in a formal manner. in writing and copied to the Human Capital work unit*

Permission to Run Worship

PJT II always gives permission to employees to carry out worship whose implementation provisions are regulated by PJT II, including permission to carry out Hajj and Umrah.

Permission to Leave Work

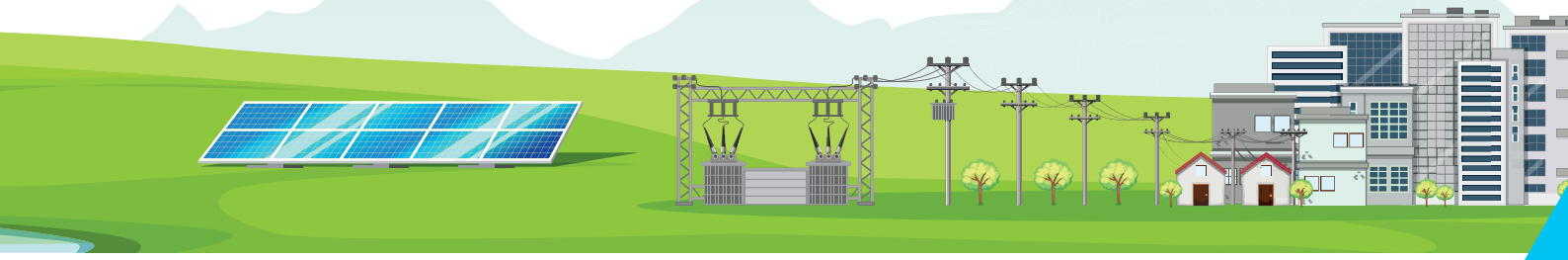
Every employee who is unable to attend the office for any reason must notify this matter either in writing or orally on the day concerned. In the case of verbal notification, a written notification must be prepared to his superior no later than the first opportunity to enter the office. Permission to leave work is given when:

- *Special events, namely employee marriage, employee marrying off their child, husband/wife/child/son-in-law/parent/in-law/member in one house dies, child is born, employee's wife experiences miscarriage, child circumcision, and others.*
- *Sickness, namely illness with a doctor's letter for a maximum of 3 (three) days, illness without a doctor's letter for 1 (one) day and illness with hospitalization.*
- *Important personal needs, urgent and can not be represented.*

PJT II has set the conditions for the implementation of the permit to leave work.

Achievements And Awards Of Corporate Social Responsibility Initiatives In Human Rights Sector

By giving leave permits and guaranteeing the implementation of worship for each employee, it has an impact on increasing employee performance and sincerity in work. By applying the principles of human rights, PJT II can improve harmony in the Company's operational activities. In addition, employees will feel comfortable in the Company's environment. This has an impact on increasing employee satisfaction surveys. In 2022, PJT II has not yet received an award related to human rights.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Related To Fair Operations

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Sebagai salah satu perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PJT II memiliki komitmen untuk senantiasa menjalankan praktik-praktik operasi yang adil. PJT II telah memiliki berbagai kebijakan yang mengatur dilaksanakan operasi yang adil diantaranya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi. Kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat. Ruang lingkup pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang ditekankan oleh PJT II saat ini adalah pencegahan benturan kepentingan, penerapan anti korupsi, kompetisi yang sehat, dan pencegahan perilaku insiders. Penerapan anti koRPBi diwujudkan melalui pelaksanaan WBS, *Code of Conduct* dan Kebijakan Gratifikasi.

Rumusan Dan Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait operasi yang adil meliputi pencegahan benturan kepentingan, implementasi *Whistleblowing System* dan *Code of Conduct*, larangan perilaku insiders serta hubungan dengan organisasi lain.

Perencanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Operasi Yang Adil

PJT II senantiasa mentargetkan dalam perencanaan tahunannya untuk menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Setiap pelanggaran yang terjadi akan dikenakan sanksi dengan tegas sesuai kebijakan PJT II dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait dengan praktik operasi yang adil yang secara konsisten dilaksanakan oleh PJT II meliputi hal-hal berikut ini:

Fair Operations Commitment And Corporate Social Responsibility Policy

As a manifestation of the implementation of good corporate governance, PJT II is committed to always implementing fair operating practices. PJT II already has various policies that regulate fair operations, including internal control policies, Whistleblowing System (WBS), Code of Conduct, and gratification policies. This policy is specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing healthy business activities. The scope of the implementation of social responsibility related to fair operating practices that are currently emphasized by PJT II are prevention of conflicts of interest, application of anti-corruption, healthy competition, and prevention of insider behavior. The implementation of anti-corruption is realized through the implementation of WBS, Code of Conduct and Gratification Policy.

Formulation And Scope Of Corporate Social Responsibility Field Of Operating Fair

The scope of social responsibility activities related to fair operations includes prevention of conflicts of interest, implementation of the Whistleblowing System and Code of Conduct, prohibition of insiders behavior and relationships with other organizations.

Fair Operating Corporate Social Responsibility Planning

PJT II always targets in its annual planning to ensure the implementation of all fair operating practice policies. Any violations that occur will be subject to strict sanctions in accordance with PJT II policies and applicable regulations.

Implementation Of Social Responsibility Initiatives In Fair Operations

The implementation of social responsibility related to fair operating practices consistently carried out by PJT II includes the following:



Pencegahan Benturan Kepentingan

PJT II melalui penerapan kode etik telah menegaskan kembali Larangan Pencegahan/Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi seluruh jajaran PJT II. Hal ini terkait dengan komitmen bersama sebagaimana tertuang dalam Kode Etik dan Nilai- nilai Budaya Perusahaan, yang antara lain mengatur mengenai *conflict of interest*, larangan penyalahgunaan jabatan dan pengaturan integritas karyawan Perusahaan sangat menyadari perlunya menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan Pelanggan, rekanan dan seluruh stakeholder dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan yang dikategorikan sebagai gratifikasi dan menciptakan budaya anti Korupsi.

Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sanksi pelanggaran bagi yang melakukan gratifikasi adalah :

- Setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi, baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau UPG, sedara hukum dapat diancam pidana sebagai pemberi suap, sepanjang unsurunsur pasal bagi pemberi suap, yaitu: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi.
- Dalam hal penerima gratifikasi tidak melaporkan barang gratifikasi yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diatur di atas, maka penerimaan tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan.
- Bagi insan Perusahaan yang menerima gratifikasi dan tidak melaporkan penerimaan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Ketentuan sanksi atas tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui UPG PJT II.

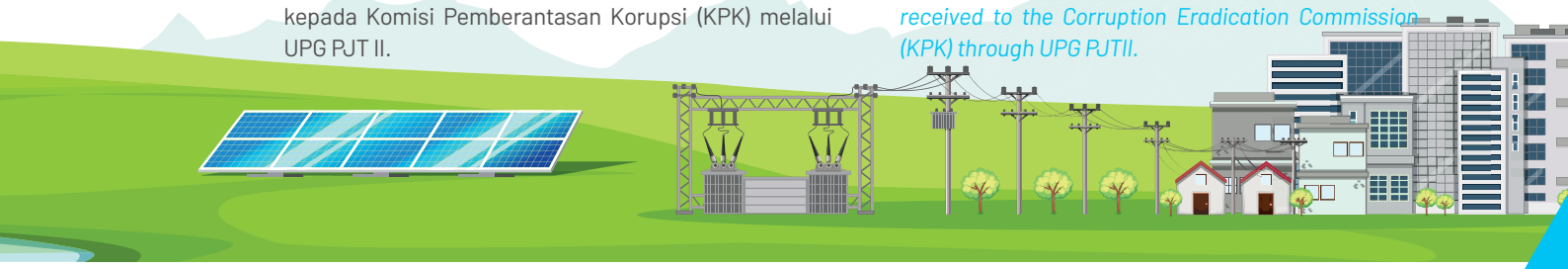
Prevention of Conflict of Interests

PJT II through the implementation of the code of ethics has reaffirmed the Prohibition of Prevention/Anti-Corruption and Gratification for all ranks of PJT II. This is related to the shared commitment as stated in the Code of Ethics and Corporate Cultural Values, which among others regulates conflicts of interest, prohibits abuse of office and regulates employee integrity. The Company is very aware of the need to maintain good cooperative relationships with customers, partners and all stakeholders. by paying attention to ethics and avoiding things that lead to actions that are categorized as gratification and creating an anti-corruption culture.

Misapplication of Position and Gratification

Gratification is a broad term for the provision of money, goods, commission rebates (discounts), interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other services. Gratuities are received both domestically and internationally, and are carried out either electronically or manually. The following are the penalties for gratification violations:

- *Anyone who gives gratification to the recipient of gratification, whether in the condition that the recipient of gratification reports or does not report the gratification he has received to the KPK or UPG, legally can be threatened with a criminal offense as a bribe giver, as long as the elements of the article are for the bribe giver. , namely: Article 5 paragraph (1) and Article 13 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption are fulfilled.*
- *In the event that the recipient of the gratuity does not report the gratuity that has been received according to the period stipulated above, the acceptance is considered a bribe until proven otherwise in court.*
- *Company personnel who receive gratification and do not report the receipt are threatened with life imprisonment or imprisonment for a minimum of 4 (four) years and a maximum of 20 (twenty) years, and a fine of at least Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) and a maximum of Rp.1,000,000,000.00 (one billion rupiah).*
- *The above sanctions provisions do not apply if the recipient of the gratuity reports the gratuity he received to the Corruption Eradication Commission (KPK) through UPG PJTII.*



Implementasi *Whistleblowing System*

Dalam rangka penyelenggaraan operasional Perusahaan yang sehat dan penerapan tata kelola yang baik, seluruh pegawai/pejabat PJT II wajib melaporkan setiap dugaan tindakan penyimpangan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Kebijakan *whistleblowing* diimplementasikan untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PJT II untuk melaporkan *fraud* yang terjadi. Lingkup pengaduan meliputi:

a. Perbuatan *fraud*.
b. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
- Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
- Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan.
- Menginformasikan / mengungkapkan rahasia Pelanggan dan Perusahaan.
- Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian Perusahaan.
- Penyelewengan uang/kas Perusahaan. Penggelapan aset dan/atau inventaris Perusahaan.
- Pemerasan.
- Perbuatan Asusila

Capaian Dan Penghargaan Inisiatif Tanggung Jawab Sosial Bidang Operasi Yang Adil

Komitmen PJT II dalam penerapan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil telah meningkatkan kepercayaan para stakeholders kepada PJT II. Dengan meningkatnya kepercayaan dari *stakeholder* diharapkan dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Sampai dengan tahun 2022, Perusahaan tidak dikenakan sanksi dalam perkara hukum serta diakuinya kinerja Perusahaan oleh pihak eksternal. Sampai dengan Desember 2022, PJT II belum memiliki penghargaan terkait operasi yang adil. mengurangi kualitas layanan energi. Sekitar 45

Whistleblowing System Implementation

All PJT II employees/officers are required to report any alleged irregularities that occur within the Company in the context of implementing healthy Company operations and good governance. The whistleblowing policy is in place to encourage and educate PJT II employees and officials about reporting fraud. The following are the types of complaints:

a. Fraud.
b. Examples of Code of Ethics violations are:
- *Misuse and falsification of data and/or documents*
- *Misuse and corruption data and/ordocuments misuse of Position for Personal/Group Interests or Other Outside Interests*
- *Informing/disclosing Customer and Company Secrets*
- *Accept and/or disbursement of gratuities that may influence decision-making and/or result in losses to the company.*
- *Misappropriation of company funds taking Company assets and/or inventory.*
- *Extortion.*
- *Immoral Behavior*

Fair Operations Achievements And Awards Initiatives For Social Responsibility

The commitment of PJT II to implementing social responsibility in the form of fair operating practices has increased stakeholders' trust in the company. It is expected that increased trust from stakeholders will improve the Company's performance. Until 2022, the Company is not subject to legal sanctions, and its performance is recognized by third parties. PJT II does not yet have a fair operations award as of December 2022.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN LINGKUNGAN HIDUP

Environmental Social Responsibility In Corporate

Komitmen Dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Sebagai salah satu penerapan keuangan berkelanjutan, PJT II telah memiliki beberapa kebijakan terkait dengan aspek lingkungan hidup, baik di internal maupun eksternal.

Dampak Dan Risiko Lingkungan

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup oleh PJT II juga dapat memberikan dampak dan risiko pada lingkungan. Risiko tersebut yaitu, jika Perusahaan memberikan fasilitas kredit kepada Pelanggan menggunakan fasilitas tersebut ke dalam usaha yang dapat mencemari dan juga merusak lingkungan. Dalam hal ini, Perusahaan harus melakukan seleksi dalam memberikan kredit agar kredit yang diberikan tersebut dapat berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena berkembangan Perusahaan tergantung pada fasilitas kreditnya.

Target/Rencana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan Hidup

Terjadinya efisiensi di lingkungan internal PJT II sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan profit kepada Perusahaan dengan menekan biaya operasional. Sedangkan untuk kegiatan eksternal, dapat dijalin hubungan yang baik antara masyarakat dan Perusahaan, sehingga citra PJT II di masyarakat dapat terjaga.

Kegiatan Lingkungan Hidup Terkait Dengan Kegiatan Operasional Perusahaan

Wujud dukungan PJT II terhadap pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup tercermin dalam setiap kegiatan Perusahaan baik itu operasional di kantor pusat maupun kegiatan bisnisnya, antara lain sebagai berikut.

Peduli Lingkungan Internal

PJT II terus berupaya untuk meningkatkan kinerja Perusahaan termasuk kinerja kami pada lingkungan. Oleh sebab itu, PJT II senantiasa menerapkan peduli lingkungan di lingkungan operasional Perusahaan. Perusahaan menyadari, efisiensi energi dan air tidak

Commitment And Responsibility Policy Social Entrepreneurship Environmental Field Live

As one of the sustainable finance implementations, PJT II has several environmental policies, both internally and externally.

Impacts And Risks On The Environment

The implementation of social responsibility related to the environment by PJT II can also have an impact and risk on the environment. The risk is, if the Company provides credit facilities to customers using these facilities into businesses that can pollute and also damage the environment. In this case, the Company must make a selection in providing credit so that the credit provided can participate in environmental management, because the development of the Company depends on the credit facility.

Corporate Social Responsibility Target/Plan In The Environmental Sector

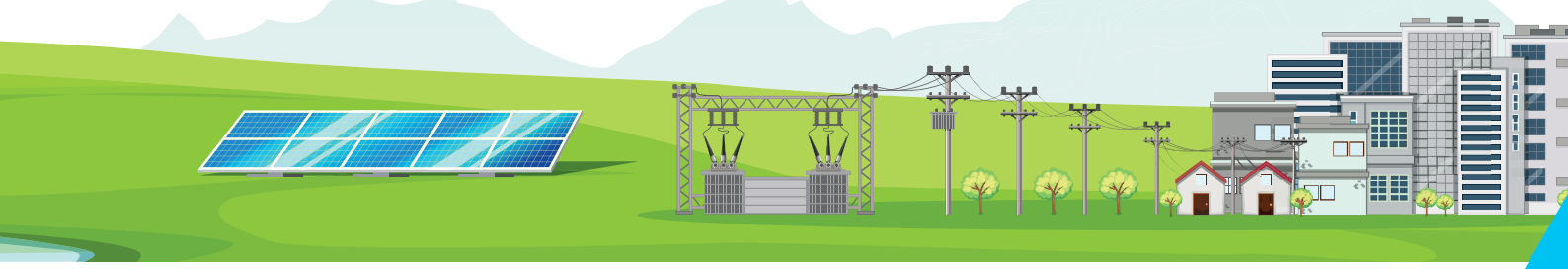
The occurrence of efficiency in the internal environment of PJT II so that in the end it can increase profits to the Company by reducing operational costs. As for external activities, a good relationship can be established between the community and the Company, so that the image of PJT II in the community can be maintained.

Environmental Activities In Connection With Company Operations

The form of PJT II's environmental preservation support is reflected in every activity of the Company, both operational at the headquarters and business activities, including the following.

PJT II Care For The Internal Environment

PJT II continues to strive to improve the Company's performance including our performance on the environment. Therefore, PJT II always applies environmental care in the Company's operational environment. The Company realises that energy and



hanya baik untuk keberlanjutan lingkungan, namun juga sebagai salah satu upaya penghematan biaya perusahaan dalam menghadapi perlambatan ekonomi. PJT II membuat kebijakan terkait lingkungan internal yaitu melalui program PJT II *Go Green*. Melalui program PJT II *Go Green* ini, seluruh pegawai diminta untuk peduli akan 5 (lima) hal, yakni:

- Gunakan air sehemat mungkin;
- Nyalakan listrik jika diperlukan;
- Tanam pohon sebanyak mungkin;
- Gunakan bahan yang mudah didaur ulang;
- Buang sampah pada tempatnya.

Selain hal tersebut, manajemen telah menentukan kebijakan antara lain hemat penggunaan listrik terutama di gedung kantor pusat PJT II dimana seluruh bagian gedung akan dimatikan saat jam 18.00 sore untuk penghematan. Selain itu dalam melaksanakan rapat sudah jarang digunakan kertas dalam menduplikasi bahan rapat melainkan dengan presentasi melaui TV atau *Infocus*, selain itu dalam penggunaan kertas juga diminimalisasi dengan penggunaan *email* dan kertas yang sudah terpakai untuk dimanfaatkan sisi yang masih bisa digunakan.

water efficiency is not only good for environmental sustainability, but also as one of the company's cost saving efforts in the face of economic slowdown. PJT II makes policies related to the internal environment, namely through the PJT II Go Green programme. Through this PJT II Go Green programme, all employees are asked to care about 5 (five) things, namely:

- *Use water as sparingly as possible;*
- *Turn on power only when necessary;*
- *Plant as many trees as possible;*
- *Use easily recyclable materials;*
- *Put garbage in its proper place.*

In addition to this, management has determined policies such as saving electricity usage, especially in the PJT II head office building where all parts of the building will be turned off at 18.00 pm for savings. In addition, in conducting meetings, paper is rarely used in duplicating meeting materials but with presentations via TV or Infocus, in addition to the use of paper is also minimised by using email and paper that has been used to be used on the side that can still be used.





Kinerja Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perum Jasa Tirta II

Social And Environmental Responsibility Program Performance Perum Jasa Tirta II

Kondisi Umum

General Conditions

Pengelolaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.

Perum Jasa Tirta II telah melakukan TJSL dalam bentuk Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sejak tahun 1991 baik dalam bentuk pinjaman maupun bantuan Pembinaan yang bersifat hibah. Penyaluran dana Program Pendanaan UMK secara kumulatif dari tahun 1992 s.d. tahun 2022 berupa pinjaman sebesar Rp32.056.117.500,00 kepada 2725 UMK Binaan dengan dana Pembinaan kemitraan sebesar Rp2.150.267.440,00, sedangkan realisasi penyaluran kolaborasi melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2023 sebesar Rp676.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah disalurkan kepada 26 Mitra Binaan. Sehingga penyaluran dana program pendanaan UMK sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp32.732.117.500,00 kepada 2751 UMK Binaan.

Penyaluran dana Program TJSL Bantuan tahun 2023 dengan sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina. Program TJSL Bantuan secara kumulatif dari tahun 2002 s.d tahun 2022 sebesar Rp41.589.888.050,00 sedangkan penyaluran TJSL Bantuan pada tahun 2023 sebesar Rp6.710.391.452,00 sehingga penyaluran dana Program TJSL Bantuan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp48.300.279.502,00.

The management of Social and Environmental Responsibility (CSR) funds is carried out based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programmes of State-Owned Enterprises. The financial report and report on the implementation of the SOE's CSR programme are integrated into the quarterly report and annual report on the SOE's performance as outlined in a separate chapter.

Perum Jasa Tirta II has conducted CSR in the form of Micro and Small Enterprises (MSEs) Funding since 1991 both in the form of loans and development assistance in the form of grants. The cumulative distribution of MSE Funding Program funds from 1992 to 2022 in the form of loans amounting to Rp32,056,117,500.00 to 2725 Assisted MSEs with partnership Development funds amounting to Rp2,150,267,440.00, while the realisation of collaboration distribution through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. in 2023 amounted to Rp676,000,000.00 and as of 31 December 2023 had been distributed to 26 Assisted Partners. So that the distribution of MSE funding program funds up to 31 December 2023 amounted to Rp32,732,117,500.00 to 2751 Assisted MSEs.

Disbursement of funds for the TJSL Assistance Programme in 2023 with the source of budget funds calculated as costs from the BUMN Pembina. The TJSL Assistance Program cumulatively from 2002 to 2022 amounted to Rp41,589,888,050.00 while the distribution of TJSL Assistance in 2023 amounted to Rp6,710,391,452.00 so that the distribution of TJSL Assistance Program funds until 31 December 2023 amounted to Rp48,300,279,502.00.



Gambaran Singkat Kinerja Program TJSL Tahun 2023

Brief Overview of SER Program Performance Year 2023

1. Gambaran TPB Keseluruhan Yang Dilaksanakan Perum Jasa Tirta II

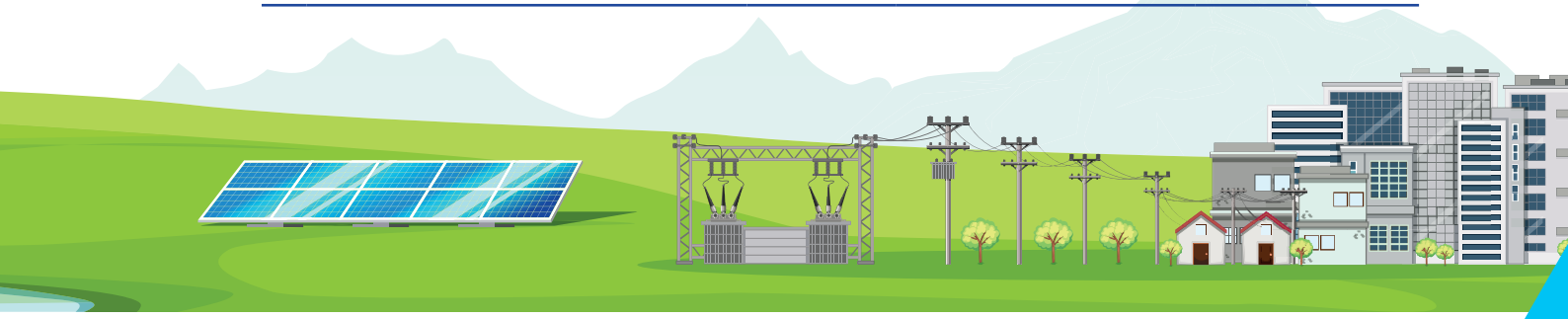
Gambaran TPB Keseluruhan yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut :

1. Overview of Overall TPB Implemented by Perum Jasa Tirta II

The overall picture of TPB implemented by Perum Jasa Tirta II is as follows:

Tabel 1. Program CID & Non CID / *Table 1. CID & Non CID Programs*

No	TPB / SDG	Realisasi Tahun 2022 / 2022 Realization (Rp)	Tahun 2023 / Year 2023		Presentase Capaian / Percentage of Achievement	
			RKA 2023 / 2023 Draft Plan (Rp)	Realisasi 2023/ 2023 Realization (Rp)	Real/Tahun 2022	Real/RKA Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A	**Pilar Sosial/** *Social Pilars*					
1	TPB 1 - Tanpa Kemiskinan / *SDG 1 - No Poverty*	359,455,000	300,000,000	215,967,000	60.08%	71.99%
2	TPB 2 - Tanpa Kelaparan / *SDG 2 - No Hunger*	1,040,414,812	750,000,000	1,122,060,500	107.85%	149.61%
3	TPB 3 - Kehidupan Sehat & Sejahtera / *SDG 3 - Healthy & Prosperous Life*	100,000,000	150,000,000	206,500,000	206.50%	137.67%
4	TPB 4 - Pendidikan Berkualitas / *SDG 4 - Quality Education*	1,102,800,000	1,465,500,000	1,266,929,100	114.88%	86.45%
	SUB TOTAL	**2,602,669,812**	**2,665,500,000**	**2,811,456,600**	**108.02%**	**105.48%**
B	**Pilar Ekonomi /** *Economic Pilars*					
1	TPB 7 - Energi Bersih & Terjangkau / *SDG 7 - Clean & Affordable Energy*	1,130,000,000	805,000,000	715,000,000	63.27%	88.82%
2	TPB 8 - Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi / *SDG 8 - Decent Work & Growth Economic*	1,810,882,653	1,940,000,000	2,350,349,168	129.79%	121.15%
	SUB TOTAL	**2,940,882,653**	**2,745,000,000**	**3,065,349,168**	**104.23%**	**111.67%**
C	**Pilar Lingkungan /** *Environmental Pillars*					
1	TPB 6 - Air Bersih & Sanitasi Layak / *SDG 6 - Clean Water & Adequate Sanitation*	10,924,405,450	8,561,914,000	8,039,245,650	73.59%	93.90%
2	TPB 11 - Kota & Pemukiman Yang Berkelanjutan / *SDG 11 - Sustainable Cities & Settlements Sustainable*	240,000,000	240,000,000	240,000,000	100.00%	100.00%
3	TPB 12 - Konsumsi & Produksi Yang Bertanggung Jawab / *SDG 12 - Responsible Consumption & Production*	1,436,022,474	1,112,500,000	1,276,521,352	88.89%	114.74%
4	TPB 15 - Ekosistem Daratan / *SDG 6 - terrestrial ecosystems*	100,000,000	200,000,000	149,315,000	149.32%	74.66%
	SUB TOTAL	**12,700,427,924**	**10,114,414,000**	**9,705,082,002**	**76.42%**	**95.95%**
D	**Pilar Hukum Dan Tata Kelola /** *Legal And Governance Pillars*					
1	TPB 16 - Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Yang Tangguh / *SDG 16 - Peace, Justice & Strong Institutions*	127,688,000	100,000,000	99,000,000	77.53%	99.00%
	SUB TOTAL	**127,688,000**	**100,000,000**	**99,000,000**	**77.53%**	**99.00%**
	TOTAL	**18,371,668,389**	**15,624,914,000**	**15,680,887,770**	**85.35%**	**100.36%**



Realisasi penyaluran Dana TJSL tahun 2023 sebesar Rp15.680.887.770,00 atau mencapai 100,36% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp15.624.914.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp18.371.668.389,00 mencapai 85,35% yang terdiri dari:

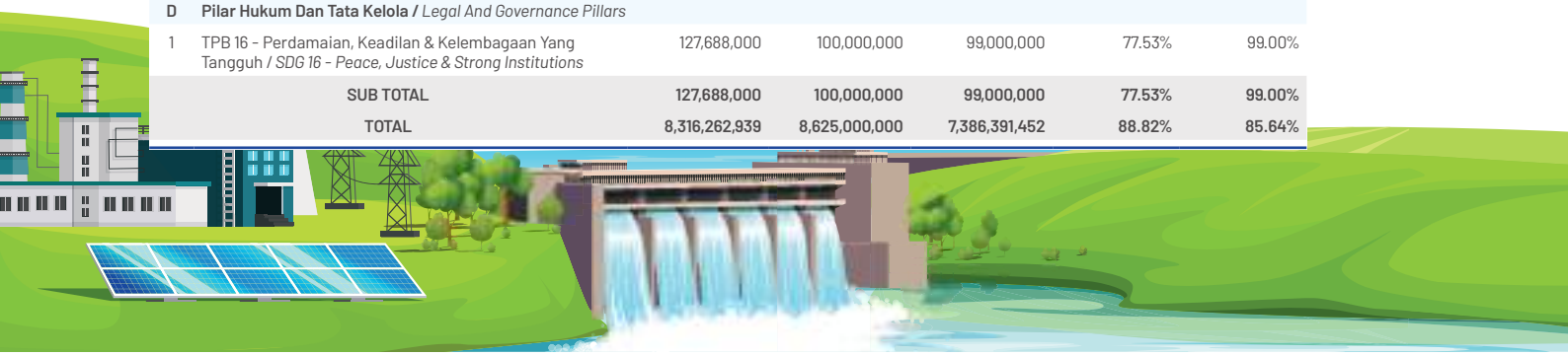
1. Program TJSL non PUMK yang dijalankan oleh unit TJSL (CID) dan bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada tahun 2023 sebesar Rp6.710.391.452,00 atau 89,17% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp7.525.000.000,00;
2. Program TJSL non PUMK yang dijalankan di luar unit TJSL (Non CID) bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada tahun 2023 sebesar Rp8.294.496.318 atau 118,49% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp6.999.914.000,00;
3. Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2023 sebesar Rp676.000.000,00 atau 61,45% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00.

The realisation of the distribution of TJSL Funds in 2023 amounted to Rp15,680,887,770.00 or reached 100.36% of the 2023 RKA of Rp15,624,914,000.00 and when compared to the realisation in 2022 of Rp18,371,668,389.00 reached 85.35% consisting of:

1. *Non-PUMK SJSL programmes run by the TJSL unit (CID) and sourced from the budget calculated as costs in 2023 amounting to Rp6,710,391,452.00 or 89.17% of the 2023 RKA of Rp7,525,000,000.00;*
2. *Non-PUMK JSP programmes run outside the JSP unit (Non CID) sourced from the budget calculated as costs in 2023 amounting to Rp8,294,496,318 or 118.49% of the 2023 RKA of Rp6,999,914,000.00;*
3. *MSE Funding TJSL Programme sourced from the revolving fund of MSE Funding Programme in 2023 amounting to Rp676,000,000.00 or 61.45% of the 2023 RKA of Rp1,100,000,000.00.*

Tabel 2. Program CID (PUMK & Non PUMK) / *Table 2. CID Programs (SMEs Financing Program & Non SMEs Financing Program)*

No	TPB / *SDG*	Tahun 2022 / *Year 2022 (Rp)*	Tahun 2023 / *Year 2023*		Presentase Capaian / *Percentage of Achievement*	
			RKA 2023/ *2023 Draft Plan*	Realisasi 2023 / *2023 Realization* (Rp)	Real/Tahun 2022/*2022 Real*	Real/RKA Tahun 2023 / *2023 Draft Plan Real*
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
A	**Pilar Sosial/** *Social Pilars*					
1	TPB 1 - Tanpa Kemiskinan / *SDG 1 - No Poverty*	359,455,000	300,000,000	215,967,000	60.08%	71.99%
2	TPB 2 - Tanpa Kelaparan / *SDG 2 - No Hunger*	1,040,414,812	750,000,000	1,122,060,500	107.85%	149.61%
3	TPB 3 - Kehidupan Sehat & Sejahtera / *SDG 3 - Healthy & Prosperous Life*	100,000,000	150,000,000	147,000,000	147.00%	98.00%
4	TPB 4 - Pendidikan Berkualitas / *SDG 4 - Quality Education*	1,102,800,000	1,465,500,000	972,929,100	88.22%	66.39%
	SUB TOTAL	**2,602,669,812**	**2,665,500,000**	**2,457,956,600**	**94.44%**	**92.21%**
B	**Pilar Ekonomi /** *Economic Pilars*					
1	TPB 7 - Energi Bersih & Terjangkau / *SDG 7 - Clean & Affordable Energy*	1,130,000,000	805,000,000	715,000,000	63.27%	88.82%
2	TPB 8 - Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi / *SDG 8 - Decent Work & Growth Economic*	1,810,882,653	1,940,000,000	1,387,686,000	76.63%	71.53%
	SUB TOTAL	**2,940,882,653**	**2,745,000,000**	**2,102,686,000**	**71.50%**	**76.60%**
C	**Pilar Lingkungan /** *Environmental Pillars*					
1	TPB 6 - Air Bersih & Sanitasi Layak / *SDG 6 - Clean Water & Adequate Sanitation*	869,000,000	1,562,000,000	1,148,912,500	132.21%	73.55%
2	TPB 11 - Kota & Pemukiman Yang Berkelanjutan / *SDG 11 - Sustainable Cities & Settlements Sustainable*	240,000,000	240,000,000	240,000,000	100.00%	100.00%
3	TPB 12 - Konsumsi & Produksi Yang Bertanggung Jawab / *SDG 12 - Responsible Consumption & Production*	1,436,022,474	1,112,500,000	1,188,521,352	82.76%	106.83%
4	TPB 15 - Ekosistem Daratan / *SDG 15 - terrestrial ecosystems*	100,000,000	200,000,000	149,315,000	149.32%	74.66%
	SUB TOTAL	**2,645,022,474**	**3,114,500,000**	**2,726,748,852**	**103.09%**	**87.55%**
D	**Pilar Hukum Dan Tata Kelola /** *Legal And Governance Pillars*					
1	TPB 16 - Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Yang Tangguh / *SDG 16 - Peace, Justice & Strong Institutions*	127,688,000	100,000,000	99,000,000	77.53%	99.00%
	SUB TOTAL	**127,688,000**	**100,000,000**	**99,000,000**	**77.53%**	**99.00%**
	TOTAL	**8,316,262,939**	**8,625,000,000**	**7,386,391,452**	**88.82%**	**85.64%**



Realisasi penyaluran Dana TJSL tahun 2023 sebesar Rp7.386.391.452,00 atau mencapai 85,64% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp8.625.000.000,00 dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp8.316.262.939,00 mencapai 88,82% yang terdiri dari :

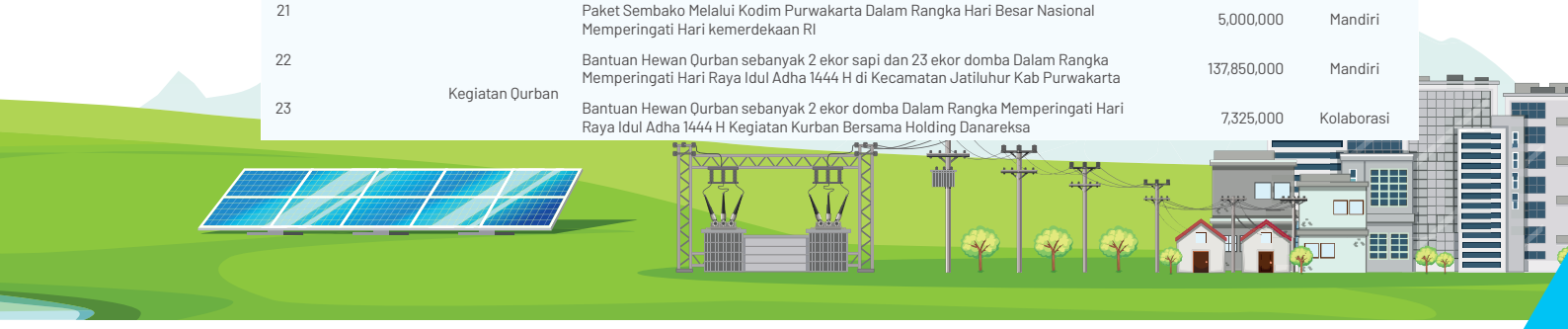
1. Program TJSL non PUMK yang dijalankan oleh unit TJSL (CID) dan bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada tahun 2023 sebesar Rp6.710.391.452,00 atau 89,17% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp7.525.000.000,00;
2. Program TJSL Pendanaan UMK yang bersumber dari dana bergulir Program Pendanaan UMK tahun 2023 sebesar Rp676.000.000,00 atau 61,45% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00. Rincian Realisasi penyaluran Dana TJSL tahun 2023 sebagai berikut:

The realization of the distribution of TJSL funds in 2023 amounted to Rp7,386,391,452.00 or reached 85.64% of the 2023 RKA of Rp8,625,000,000.00 and when compared to the realization in 2022 of Rp8,316,262,939.00 reached 88.82% consisting of :

1. *The Non-SMEs Financing Program SER program run by the SER unit (CID) and sourced from the budget calculated as costs in 2023 amounted to Rp6,710,391,452.00 or 89.17% of the 2023 RKA of Rp7,525,000,000.00;*
2. *SER Program for MSE Funding sourced from MSE Funding Program revolving funds in 2023 amounting to Rp676,000,000.00 or 61.45% of the 2023 RKA of Rp1,100,000,000.00. Details of the Realization of the distribution of TJSL Funds in 2023 are as follows:*

Tabel 3. Rincian Program CID & Non CID / *Table 3. Details of CID & Non CID Programs*

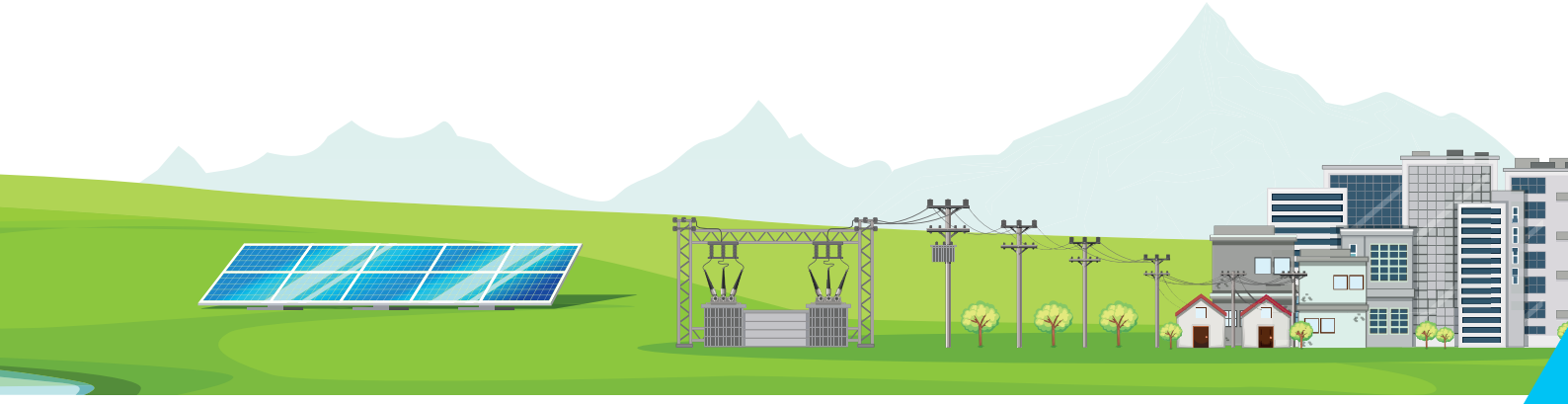
No	Nomor TPB / *No. SDG*	Nama Program / *Program Name*	Uraian Program / *Program Description*	Nilai Penyaluran / *Disbursement Value*	Keterangan / *Description*
a. Pilar Sosial / *Social Pillars*					
1	TPB 1 - Tanpa Kemiskinan / *SDG 1 - No Poverty*	Bantuan Bencana Alam	Program Mitigasi Bencana Elnino Yayasan BUMN Untuk Indonesia	100,000,000	Kolaborasi
2			Bantuan Pengiriman Air Bersih Akibat Kekeringan di Kec. Jatiluhur & Kec Sukasari Kab. Purwakarta	49,192,000	Mandiri
3			Bantuan Perbaikan Rumah Akibat Bencana Gempa Bumi Ds. Jatimekar Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta	29,000,000	Mandiri
4			Bantuan Air Bersih sebanyak 100 tanki Untuk Masyarakat terdampak Kekeringan di Kec Jatiluhur. Tegalwaru & Sukasari Kab Purwakarta	17,775,000	Mandiri
5			Bantuan Perbaikan Rumah Akibat Kebakaran Kec Sukasari Kab Purwakarta	20,000,000	Mandiri
6	TPB 2 - Tanpa Kelaparan / *SDG 2 - No Hunger*	Akses Pangan Murah dan Terjangkau	Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Jatiluhur	58,380,000	Mandiri
7			Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kecamatan Jatiluhur	25,020,000	Mandiri
8			Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Bogor	201,229,000	Insidentil
9			Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Depok	199,998,000	Insidentil
10			Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Kab. Bogor	49,999,500	Insidentil
11			Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Kab. Bogor	49,999,500	Insidentil
12			Program Paket Sembako Untuk Masyarakat Kab. Bekasi	49,999,500	Insidentil
13			Dukungan Air Minum dan Paket Sembako untuk Masyarakat melalui Korem dalam rangka HUT ke 78 Tentara Negara Indonesia di Kab Purwakarta	11,560,000	Mandiri
14			Bantuan 200 Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Karawang	20,000,000	Mandiri
15			Bantuan 150 Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Purwakarta Melalui Kejari Purwakarta	15,000,000	Mandiri
16			Bantuan 1.000 Paket Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Purwakarta	96,200,000	Mandiri
17			Bantuan 175 Paket Sembako Dalam Rangka Memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 H (Perum Depalumbon Residance Blok D No.9 Karawang)	36,575,000	Mandiri
18			Bantuan 325 Paket Sembako Dalam Rangka Memperingati Hari Raya Idul Fitri 1444 H (Perumahan Aka 2 Blok E6 Jalan Bolerang Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut)	67,925,000	Mandiri
19			Bantuan Dana untuk Paket Sembako Masyarakat Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Melalui Sanggar Seni Pesona Putra Talaga	20,000,000	Mandiri
20			Bantuan Paket Sembako Untuk Purnabhakti Perum Jasa Tirta II Dalam Rangka Memperingati HUT PJT II	70,000,000	Mandiri
21			Paket Sembako Melalui Kodim Purwakarta Dalam Rangka Hari Besar Nasional Memperingati Hari kemerdekaan RI	5,000,000	Mandiri
22		Kegiatan Qurban	Bantuan Hewan Qurban sebanyak 2 ekor sapi dan 23 ekor domba Dalam Rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H di Kecamatan Jatiluhur Kab Purwakarta	137,850,000	Mandiri
23			Bantuan Hewan Qurban sebanyak 2 ekor domba Dalam Rangka Memperingati Hari Raya Idul Adha 1444 H Kegiatan Kurban Bersama Holding Danareksa	7,325,000	Kolaborasi



No	Nomor TPB / *No. SDG*	Nama Program / *Program Name*	Uraian Program / *Program Description*	Nilai Penyaluran / *Disbursement Value*	Keterangan / *Description*
24	TPB 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera / *SDG 3 - Healthy & Prosperous Life*	Bantuan Kesejahteraan	Khitanan Massal Anak Yatim Piatu Fakir Miskin dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur	25,000,000	Mandiri
25			Santunan kepada 210 Anak Yatim Piatu Dalam Rangka Safari Ramadhan 1444 H di Bekasi, Karawang, Subang dan Purwakarta	50,000,000	Mandiri
26			Bantuan Dana untuk Santunan Anak Yatim Piatu di Desa Cikao Bandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Melalui Sanggar Seni Pesona Putra Talaga	10,000,000	Mandiri
27			Santunan Anak Yatim Piatu Dalam Rangka Dharmawanita Berbagi Kecamatan Jatiluhur Kab Purwakarta	12,000,000	Mandiri
28			Kegiatan Khitanan Massal di laksanakan di Klinik PJT II Untuk Masyarkat Sekitaran Kecamatan Jatiluhur Kab Purwakarta	50,000,000	Mandiri
29	TPB 4 - Pendidikan Berkualitas / *SDG 4 - Quality Education*	Bantuan Prasarana Pendidikan	Program Beasiswa Untuk 3 Atlit Olahraga Air Berprestasi jenjang SMP	13,500,000	Mandiri
30			Program Beasiswa Untuk 6 Atlit Olahraga Air Berprestasi jenjang SMA	36,000,000	Mandiri
31			Program Beasiswa Untuk 13 Atlit Olahraga Air Berprestasi jenjang Perguruan Tinggi	150,280,000	Mandiri
32			Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan di KB Al Khoeriyah Desa Cibining Kecamatan Jatiluhur Kabupaten	13,000,000	Mandiri
33			Program Rehabilitasi Madrasah Nurul Ula di Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta	10,000,000	Mandiri
34			Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah Takmaliyah Awwaliyah Miftahussa'Adah di Kelurahan tegalmunjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta	10,000,000	Mandiri
35			Bantuan Sarana Prasarana TQ/TPQ Aini Al-Hikmah di Jl. Dalang No.4A RT.009/05 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur	57,260,000	Insidentil
36			Bantuan Perbaikan Gedung Sekolah di Kampung Ilmu Yayasan Nurani Dunia Kec Tegalwaru Kab Purwakarta	271,239,100	Mandiri
37			Bantuan Perbaikan Perpustakaan SDN 3 Jatiluhur	25,000,000	Mandiri
38			Bantuan Psarana & Prasarana Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Indah Lelea Indramayu	50,000,000	Insidentil
39			Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Gereja Kristen Pasundan Purwakarta	20,000,000	Mandiri
40			Program Anjungan Belajar Mandiri Holding Danareksa	16,650,000	Kolaborasi
41			Pembangunan Asrama Pondok Peantren Raudotul Musyarofah di Kp. Sintok RT 02 RW 05 Desa Sukadan	50,000,000	Insidentil
42			Rehabilitasi Ruang Kelas Paud Al-Mudzakir Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor	50,000,000	Insidentil
43			Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Asrama Santri Yayasan Zahratul Hidayah	50,000,000	Insidentil
44			Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Riyadussholihin Kabupaten Karawang	100,000,000	Insidentil
45			Rehabilitasi Gedung Sekolah SMK 1 Yapa 1 Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor	50,000,000	Insidentil
Total a. Pilar Sosial				**2,457,956,600**	
b. Pilar Ekonomi / *Economic Pillars*					
1	TPB 7 - Energi Bersih & Terjangkau / *SDG 7 - Clean & Affordable Energy*	Biogas di Kawasan Citarum Hulu	Program Pembuatan 16 Degister Biogas di Pangalengan	280,000,000	Mandiri
2			Program Perbaikan 35 Degister Biogas di Lembang	245,000,000	Mandiri
3		Bantuan Sosial Kemasyarakatan - Elektrifikasi	Bantuan Elektrifikasi kepada 65 KK Rumah Tangga Belum Teraliri Listrik Kec. Pondok Salam, Kec. Jatiluhur, Kec. Sukatani dan Kec. Plered Kab. Jatiluhur, Kec Pasawahan	190,000,000	Mandiri



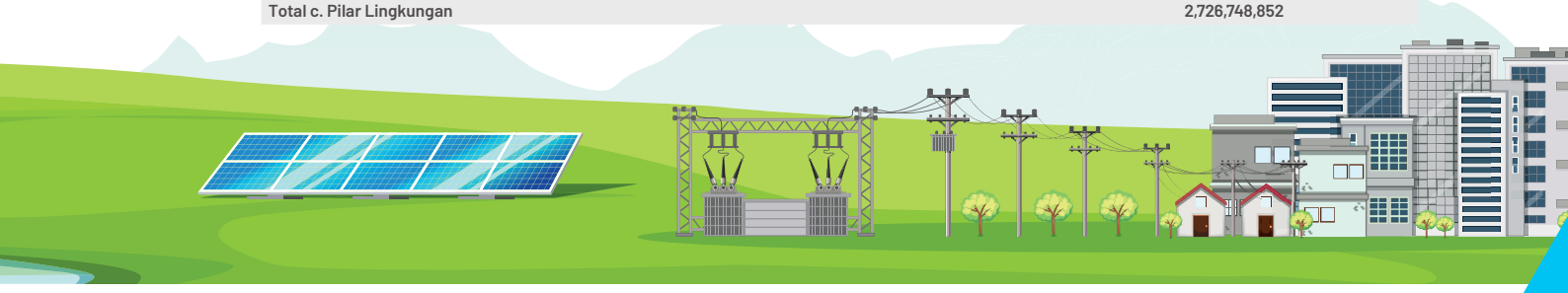
No	Nomor TPB / *No. SDG*	Nama Program / *Program Name*	Uraian Program / *Program Description*	Nilai Penyaluran / *Disbursement Value*	Keterangan / *Description*
4	TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi / *SDG 8 - Decent Work & Growth Economic*	Pendanaan UMK	Pinjaman Tambahan Modal Usaha Program Pendanaan UMK Kolaborasi dengan BRI Tahap II & III	676,000,000	Kolaborasi
5		Pelatihan UMK	Bantuan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi kepada 20 Peternak Sapi di Lembang dan 60 Peternak Sapi di Pangalengan	100,000,000	Mandiri
6		Bantuan Pengembangan UMK	Program Sertifikasi Halal Untuk UMKM Purwakarta dan Karawang	50,000,000	Mandiri
7			Bantuan Alat Kerja UMKM Produk Makanan Ringan Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Purwakarta	18,876,000	Mandiri
8			Bantuan Alat Kerja UMKM Produk Minuman Herbal Kp. Cisantri Desa Cilandak Kec. Cibatu Purwakarta	12,000,000	Mandiri
9			Bantuan Alat Kerja UMKM Produk Gula Aren Desa Sukasari Kec. Sukasari Purwakarta	50,000,000	Mandiri
10			Pengembangan UMK Melalu Bazzar UMK Purwakarta dan Karawang	25,650,000	Mandiri
11			Program Untuk Perlombaan KIMfest 2023 Tingkat Nasional	15,000,000	Mandiri
12			Bazzar 12 UMK Binaan di Acara ITB International Triathlon 2023 di Jatiluhur	15,000,000	Mandiri
13			Program Kandang Cacing 20 Peternak Sapi di Pangalengan & 20 Peternak Sapi di Lembang	240,000,000	Mandiri
14			Bantuan Life Jacket Untuk Mitigasi Pencegahan Bencana Pada Keadaan Cuaca Buruk 60 pcs kepada Kelompok	21,000,000	Mandiri
15			Bantuan Alat Untuk Pengrajin eceng Gondok	10,000,000	Mandiri
16			Pembinaan UMK Melalui Bazzar UMKM di Ciwalk Bandung Bersama Idea Craft	50,000,000	Mandiri
17			Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II melalui Bazzar UMK Binaan di Acara Dharmawanita Berbagi	25,000,000	Mandiri
18			Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II Dalam Jamuan Dharmawanita Berbagi	10,000,000	Mandiri
19			Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II melalui Bazzar UMK Binaan di Acara Harbak PJT II	65,000,000	Mandiri
20			Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II melalui Acara Sarasehan PJT II	4,160,000	Mandiri
Total b. Pilar Ekonomi				**2,102,686,000**	
c. Pilar Lingkungan / *Environmental Pillars*					
1	TPB 6 - Air Bersih & Sanitasi Layak / *SDG 6 - Clean Water & Adequate Sanitation*	Bantuan Sarana Air Bersih	Pembangunan Sarana Air Bersih di Kp.Neglasari RT 009 RW 002 Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta	28,000,000	Mandiri
2			Bantuan Sarana Air Bersih 2 unit di kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta dan Kec Baleendah Kab Bandung	50,000,000	Mandiri
3			Pembangunan Instalasi Air Bersih/ Perlindungan Mata Air Bagi Masyarakat Kampung Cipancur (Mata Air Nangka) Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung	25,000,000	Mandiri
4			Bantuan Perbaikan dan Penambahan Saluran Air Bersih Kp. Babakan Gunung Buleud RW 002 Dusun 01 Desa Ciririp Kec. Sukasari Kab. Purwakarta	25,000,000	Mandiri
5		Pengolahan Limbah Komunal	Pembangunan Limbah Komunal di Kp. Curug RT 03 RW 06 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung	25,000,000	Mandiri
6			Pembangunan Limbah Komunal di RW 01 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung	25,000,000	Mandiri



No	Nomor TPB / *No. SDG*	Nama Program / *Program Name*	Uraian Program / *Program Description*	Nilai Penyaluran / *Disbursement Value*	Keterangan / *Description*
7	TPB 6 - Air Bersih & Sanitasi Layak / SDG 6 - Clean Water & Adequate Sanitation	Bantuan Sosial Kemasyarakatan - MCK	Pembangunan Sarana MCK di Situ Cipatahunan RT 07 RW 05 Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung	24,000,000	Mandiri
8			Pembangunan MCK di Kp. Curug RT 03 RW 06 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung	24,000,000	Mandiri
9			Pembangunan MCK di RW 01 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung	24,000,000	Mandiri
10			Pembangunan MCK Masjid AL Barokah di Kp. Babakan Gunung Buleud Desa Ciririp Kec. Sukasari Kab. Purwakarta	24,000,000	Mandiri
11			Bantuan Pembangunan Sarana MCK 4 titik di Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta dan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang	96,000,000	Mandiri
12			Program Pengolahan Sampah Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat	142,500,000	Mandiri
13			Program Pengolahan Sampah Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat	142,500,000	Mandiri
14			Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok di Desa Galumpit	19,250,000	Mandiri
15			Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok di Pesantren Miftahul Jannah	24,250,000	Mandiri
16			Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok Pemuda Tani Karawang	21,500,000	Mandiri
17			Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok Pemuda Tani Purwakarta	40,000,000	Mandiri
18			Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah	21,900,000	Mandiri
19		Konservasi di Wilayah Kerja Perusahaan	Program Konservasi di Lahan Kosong Sekolah	6,125,000	Mandiri
20			Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah	29,610,000	Mandiri
21			Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah Melalui Koramil Jatiluhur	70,070,000	Mandiri
22			Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah Jatiluhur Purwakarta	41,380,000	Mandiri
23			Program THSL Bank Sampah Kolaborasi BUMN di Desa Kuta Kec. Pujut Mandalika	15,000,000	Kolaborasi
24			Bantuan 3 pompa untuk Konservasi Taman Kota di Jakarta Timur	29,827,500	Mandiri
25			Kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch III sebanyak 10 Orang Relawan dari berbagai BUNM yang di laksanakan di Jatiluhur "Dari Jatiluhur Untuk Indonesia Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok"	150,000,000	Kolaborasi
26			Padat Karya Tunai Bersih-Bersih Eceng Gondok di Sekitaran Waduk Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur Kab Purwakarta	25,000,000	Mandiri
27	TPB 11 - Kota & Pemukiman Yang Berkelanjutan / *SDG 11 - Sustainabl Cities & Settlement Sustainable*	Bantuan Sosial Kemasyarakatan - Rutilahu	Program Bhakti Rumah Tidak Layak Huni di Wilayah Kp. Gunung Batu Desa Kembangkuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Melalui Polsek Jatiluhur	30,000,000	Mandiri
28			Program Perbaikan 6 Rumah Tidak layak di Kec. Ciasem Kab. Subang, Kec. Cempaka, Kec. Sukasari dan Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	210,000,000	Mandiri
29			Program Perbaikan Rumah Tidak layak Huni Melalui Melalui Kodim 0619 Purwakarta 2 Unit Rumah		



No	Nomor TPB / *No. SDG*	Nama Program / *Program Name*	Uraian Program / *Program Description*	Nilai Penyaluran / *Disbursement Value*	Keterangan / *Description*
30			Sponsorship Program Bumi Disabilitas	10,000,000	Mandiri
31			Beuwate Inclusive Fun Run And Festival Jl. Jogging I No.30 Sukamiskin Arcamanik Kota Bandung	10,000,000	Mandiri
32	TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / *SDG 12 - Responsible Consumption & Production*	Bantuan Partisipasi Kegiatan Sosial	Kagiatan Nonton Bola Bareng BUMN di Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat	10,000,000	Mandiri
33			agiatan Nonton Bola Bareng BUMN di Desa Baleendah Kecamatan Baleendaah Kabupaten Bandung	10,000,000	Mandiri
34			Mudik Bersama BUMN Tahun 2023 untuk 200 pemudik 4 Bus ke kota Surabaya, Purworjo, Jogjakarta & Semarang	168,521,352	Kolaborasi
35			Bantuan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Lomba Agustusan Bareng BUMN	30,000,000	Kolaborasi
36			Renovasi Mushola At Taqwa di Jl. Kebon Pala II RT 012 RW 04 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
37			Pembangunan GKPI Pondok Ranggon di Jl. Kavling RT 04/06 Harjamukti Cimanggis Depok	50,000,000	Insidentil
38		Bantuan Perbaikan & Pembangunan Sarana Ibadah	Pembangunan Mushola Al-Muttaqin di RT 06 RW 03 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
39			Pembangunan Yayasan Nurul Palah Assopariyah Al Islami di Kp. Pasirmalang RT 004 RW 005 Desa Sindangraja Kec. Sukaluyu Kab. Cianjur	50,000,000	Insidentil
40			Renovasi Mushola Nurul Huda Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon	50,000,000	Insidentil
41			Bantuan Pembangunan TPQ Masjid Al Makmur Kabupaten Klaten Jawa Tengah	50,000,000	Mandiri
42			Pembangunan Renovasi Masjid Jami At-Tuqo Kab Cirebon	50,000,000	Insidentil
43			Bantuan Sarana dan Prasarana RT 013 RW 17 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
44	TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab / *SDG 12 - Responsible Consumption & Production*		Bantuan Peningkatan Jalan Gang Dulman Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon	50,000,000	Insidentil
45			Bantuan Sarana dan Prasarana RW 08 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
46			Bantuan Peralatan RW 001 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
47			Renovasi Balai RW 09 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	50,000,000	Insidentil
48		Bantuan Sarana Umum dan Sarana Lainnya	Pembangunan Sekertariat RT 003/03 09 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan	50,000,000	Insidentil
49			Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah di Desa Bangodua Kec. Klangen Kab. Cirebon	50,000,000	Insidentil
50			Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Kreyo Kec. Klangen Kab Cirebon	50,000,000	Insidentil
51			Pengadaan Tenda Kampung di RT 001 RW 07 Kp. Gandaria Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
52			Kegiatan Peningkatan Kapasitas 1 Kelompok Tani Hutan Munjul Sinambung Jakarta Timur	50,000,000	Insidentil
53			Pengadaan Sarana Prasarana RT 05 RW 09 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan	50,000,000	Insidentil
54			Pembangunan Sumur Bor di Desa Cipacung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan	50,000,000	Insidentil
55	TPB 15 - Ekosistem Daratan / SDG 15 - terrestrial ecosystems	Pelestarian Satwa yang ada di Lingkungan Wilayah Sungai	Program Penebaran Benih Ikan Endemik dan Ikan Konsumsi	129,500,000	Mandiri
56			Bantuan Program Pendederan Ikan Patin di Kampung Ilmu Yayasan Nurani Dunia	19,815,000	Mandiri
Total c. Pilar Lingkungan				**2,726,748,852**	



No	Nomor TPB / *No. SDG*	Nama Program / *Program Name*	Uraian Program / *Program Description*	Nilai Penyaluran / *Disbursement Value*	Keterangan / *Description*
d. Pilar Hukum dan Tata Kelola					
1	TPB 16 - Perdamaian, Keadilan & Kelembagaan Yang Tangguh / *SDG 16 - Peace, Justice & Strong Institutions*	Penanggulangan Terorisme	Bantuan Alat Kerja Untuk Eks Napiter dan Penyitas di Kabupaten Bekasi	35,000,000	Mandiri
2			Bantuan Alat Kerja Untuk Eks Napiter dan Penyitas di Kota Depok	52,500,000	Mandiri
3			Bantuan Beasiswa Anak Eks Napiter dan Penyitas di Kota Depok	11,500,000	Mandiri
Total d. Pilar Hukum dan Tata Kelola				**99,000,000**	
Total Program Pendanaan UMK				**676,000,000**	
Total Program Mandiri				**4,364,409,600**	
Total Program Kolaborasi				**487,496,352**	
Total Program Insidentil				**1,858,485,500**	
Grand Total CID (a+b+c+d)				**7,386,391,452**	
	NON CID				
1	TPB 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Bantuan Kesejahteraan	Bantuan Sumbangan Kematian Pensiunan PJT III	59,500,000	NON CID
2	TPB 4 - Pendidikan Berkualitas	Bantuan Sumbangan	Bantuan Sumbangan Pendidikan di Wilayah Kerja Perusahaan	294,000,000	NON CID
3	TPB 6 - Ekosistem Daratan	Konservasi SDA	Penanaman pohon, penebaran benih ikan & pelepasan unggas di Wilayah Kerja Perusahaan	499,445,000	NON CID
4			Pemeliharaan Tanaman Konservasi di Wilayah Kerja Perusahaan	671,215,150	NON CID
5			Pengangkatan Eceng di Waduk Ir. H. Djuanda	3,469,964,300	NON CID
6			Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA)	2,249,708,700	NON CID
7	PB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan	Pemberdayaan kelompok Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dengan Konsep Integrated Farming Area Waduk Cirata	712,763,500	NON CID
8		Biogas di sekitar DAS Saguling	Program pembuatan 7 Digester Biogas di DAS Saguling	249,899,668	NON CID
9	TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Bantuan Sumbangan	Bantuan Sumbangan Rumah Ibadah di Wilayah Kerja Perusahaan	88,000,000	NON CID
Total Program Non CID				**8,294,496,318**	
Grand Total CID & Non CID				**15,680,887,770**	



2. Program CSV

2. CSV Programme

Gambaran TPB Program CSV tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

The SDG overview of the CSV Programme in 2023 implemented by Perum Jasa Tirta II is as follows:

Tabel 4. Program CSV / *CSV Programme*

No	Program	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023		Presentase Capaian		Nilai Manfaat CSV Bagi Perusahaan
			RKA (Rp)	Realisasi (Rp)	Real/Tahun 2022	Real/RKA Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4	8
1	Pengolahan Sampah Kotoran Hewan	910,000,000	865,000,000	865,000,000	95.05%	100.00%	Pemberdayaan masyarakat yang berada di DAS Citarum Melalui Program Biogas yang mengolah limbah kotoran sapi menjadi gas sebagai energi alternative (kompor dan lampu/penerangan) dan pupuk cair serta untuk mengatasi pencemaran air sungai Citarum
2	Penanaman Pohon	475,000,000	350,000,000	169,085,000	35.60%	48.31%	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan
3	Pengolahan Limbah Eceng Gondok	-	320,000,000	280,000,000	-	87.50%	Pemanfaatan limbah eceng gondok menjadi pupuk dan kerajinan tangan dengan pemberdayaan masyarakat membantu perusahan dalam penanganan permasalahan eceng gondok serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penjualan hasil pengelolaan eceng yaitu pupuk dan kerajinan tangan
4	Pengolahan Sampah	-	300,000,000	300,000,000	-	100.00%	Pemanfaatan Sampah yang berasal dari rumah tangga dan yang berada di saluran untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan khususnya di sungai dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
	TOTAL	**1,385,000,000**	**1,835,000,000**	**1,614,085,000**	**116.54%**	**87.96%**	

a. Pengolahan Sampah Kotoran Hewan

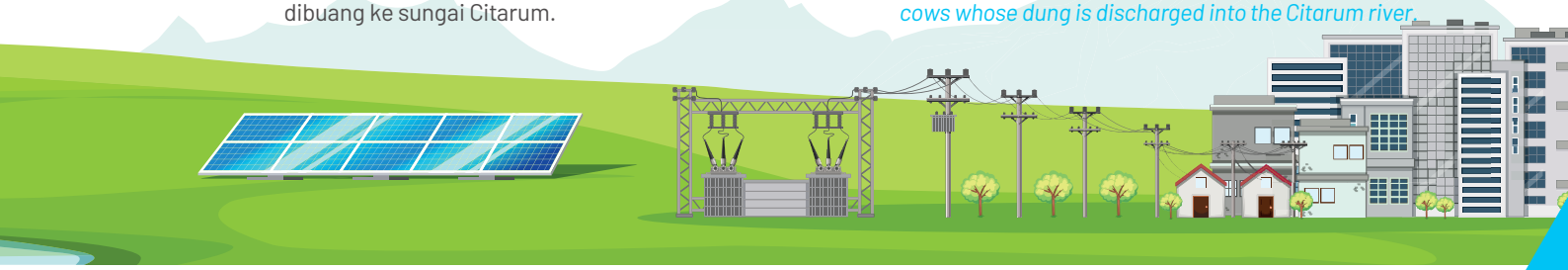
Latar belakang pemilihan program Pengolahan Sampah Kotoran Hewan adalah pembuangan limbah ternak dalam hal ini kotoran sapi ke Citarum dan Anak Sungai Citarum menyebabkan terjadinya pencemaran yang memerlukan penanganan dengan mengedukasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang berada di DAS Citarum Melalui Program Biogas, Pembangunan Rumah Cacing dan Pelatihan mengolah limbah kotoran sapi menjadi gas sebagai energi alternative (kompor dan listrik), pupuk cair dan budidaya cacing untuk mengatasi pencemaran air sungai Citarum dari kotoran sapi yang diperkirakan sebanyak 36 ribu sapi yang kotorannya dibuang ke sungai Citarum.

a. Animal Manure Waste Treatment

The background to the selection of the Animal Manure Waste Management programme is that the disposal of livestock waste, in this case cow dung, into the Citarum and its tributaries causes pollution that needs to be addressed by educating the community.

Empowerment of communities in the Citarum watershed through the Biogas Programme, Construction of Worm Houses and Training to process cow dung waste into gas as alternative energy (stoves and electricity), liquid fertiliser and worm cultivation to overcome the pollution of the Citarum river water from cow dung, which is estimated to be 36 thousand cows whose dung is discharged into the Citarum river.



Program pembuatan Diegester Biogas dimulai pada tahun 2017, dan sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 146 Diegester Biogas. Program pembuatan Kandang Cacing dimulai pada tahun 2021, dan sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 97 Kandang Cacing. Program Pengolahan Sampah kotoran Hewan pada tahun 2023 sebesar Rp865.000.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi pembangunan dan perbaikan digester biogas Tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp525.000.000,00 atau mencapai 100% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp525.000.000,00, dengan rincian Pembangunan 16 digester biogas sebesar Rp280.000.000,00 yang berlokasi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung dan perbaikan 35 digester biogas sebesar Rp245.000.000,00 yang berlokasi di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.
- Realisasi pembuatan kandang cacing Tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp240.000.000,00 atau mencapai 100% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp240.000.000,00 yang berlokasi di Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kab. Bandung dengan jumlah 40 kandang cacing.
- Realisasi bantuan Pelatihan Biogas dan Budidaya Cacing Tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 atau 100% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp100.000.000,00 kepada 80 Peternak Sapi di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

b. Penanaman Pohon

Pelestarian sumber mata air melalui konservasi dalam bentuk penanaman pohon sangat penting karena berimbas pada potensi sumber mata air yang menurun. Jika produktifitas sumber mata air menurun atau bahkan hilang, maka bukan tidak mungkin lagi akan menyebabkan permasalahan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan Perum Jasa Tirta II yang core businesnya mengelola sumber daya air. Perum Jasa Tirta II berkomitmen untuk melakukan Konservasi melalui Penanaman Pohon setiap tahun, kegiatan Penanaman pohon di wilayah kerja Perusahaan masuk kedalam Pilar Lingkungan TPB 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak, melalui perbaikan lahan kritis dan keanekaragaman hayati daratan di wilayah kerja perusahaan. Pada tahun 2023 Perum Jasa Tirta II menanam 1.090 pohon keras dan buah disekitar wilayah kerja Perusahaan dengan nilai Rp169.085.000,00 atau mencapai 48,31% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,00.

The Biogas Diegester construction programme started in 2017, and by 2022 146 Biogas Diegesters have been built. The programme to build Worm Cages started in 2021, and by 2022 97 Worm Cages have been built. The Animal Dung Processing Programme in 2023 amounted to Rp865,000,000,-, with the following details:

- *The realisation of the construction and repair of biogas digesters in 2023 with a value of Rp525,000,000.00 or reached 100% of the RKA in 2023 of Rp525,000,000.00, with details of the construction of 16 biogas digesters amounting to Rp280,000,000.00 located in Pangalengan District, Bandung Regency and the repair of 35 biogas digesters amounting to Rp245,000,000.00 located in Lembang District, Bandung Regency.*
- *The realisation of the construction of worm cages in 2023 with a value of Rp240,000,000.00 or reaching 100% of the RKA in 2023 of Rp240,000,000.00 located in Pulosari Village, Pangalengan District, Bandung Regency with a total of 40 worm cages.*
- *Realisation of Biogas and Worm Cultivation Training assistance in 2023 with a value of Rp100,000,000.00 or 100% of the RKA in 2023 of Rp100,000,000.00 to 80 Cattle Farmers in Pangalengan District, Bandung Regency.*

b. Tree Planting

The preservation of springs through conservation in the form of tree planting is very important because it has an impact on the declining potential of springs. If the productivity of water sources decreases or even disappears, it is no longer impossible to cause very basic problems for the sustainability of people's lives and Perum Jasa Tirta II whose core busines manage water resources. Perum Jasa Tirta II is committed to conservation through tree planting every year, tree planting activities in the Company's working area are included in SDG Environmental Pillar 6 - Clean Water and Adequate Sanitation, through the improvement of critical land and terrestrial biodiversity in the company's working area. In 2023 Perum Jasa Tirta II planted 1,090 hard and fruit trees around the Company's working area with a value of Rp169,085,000.00 or reached 48.31% of the 2023 RKA of Rp350,000,000.00.



c. Pengolahan Limbah Eceng Gondok

Limbah eceng gondok di Waduk Jatiluhur memberikan dampak yang cukup serius yaitu menurunkan kualitas air, mempercepat pendangkalan air serta dapat mengganggu operasional bendungan. Pemanfaatan limbah eceng gondok menjadi pupuk dan kerajinan tangan dengan pemberdayaan masyarakat membantu perusahan dalam penanganan permasalahan eceng gondok serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penjualan hasil pengelolaan eceng yaitu pupuk dan kerajinan tangan. Pengolahan limbah eceng gondok dimulai pada tahun 2022 melalui kolaborasi bersama 14 BUMN yang dimulai dengan pelatihan, pendampingan dan pembuatan Shelter untuk pengolahan kerajinan tangan dan pupuk. Realisasi bantuan pengolahan eceng gondok tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp280.000.000,00 atau mencapai 87,50% dari RKA Tahun 2023 sebesar Rp320.000.000,00. Bantuan ini berupa alat pengolahan Eceng Gondok disekitar wilayah kerja Perusahaan dan Kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch III di Jatiluhur "Dari Jatiluhur Untuk Indonesia Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok".

d. Pengolahan Sampah

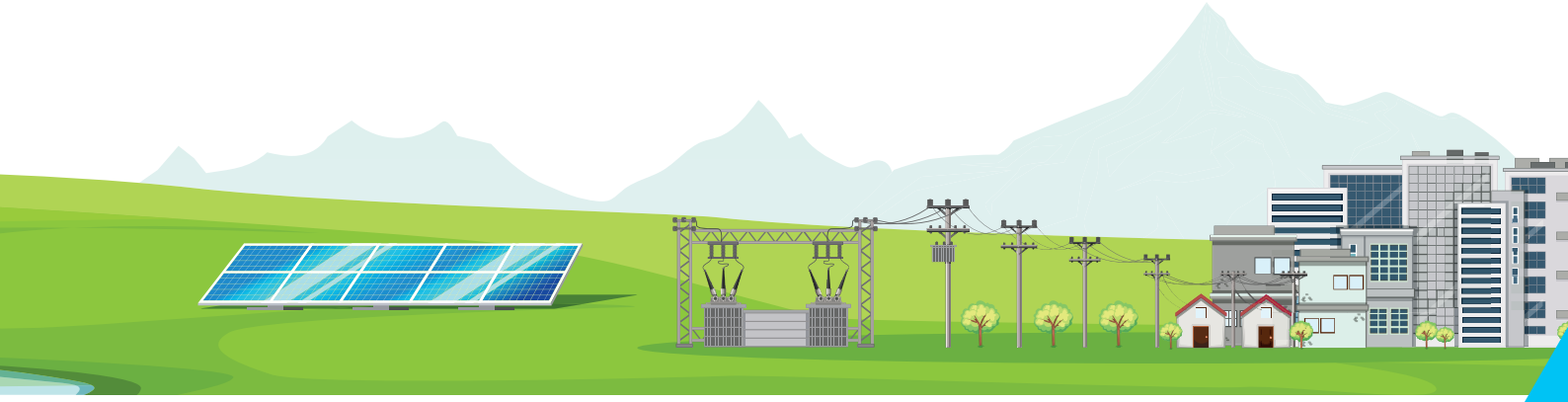
Pemanfaatan Sampah yang berasal dari rumah tangga dan yang berada di saluran untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan khususnya di sungai dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan Pengolahan Sampah masuk kedalam Pilar Lingkungan TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak dengan rencana nilai bantuan sebesar Rp300.000.000,-. Pada tahun 2023 Perusahaan telah membuat 2 (dua) pengolahan sampah yang ada di Kampung Arang Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dengan memberdayakan 2 (dua) Kelompok Masyarakat, yaitu Kelompok Karya Ibu dan Kelompok Bakti Saluyu.

c. Water Hyacinth Waste Treatment

Water hyacinth waste in Jatiluhur Reservoir has a serious impact, namely reducing water quality, accelerating water siltation and can interfere with dam operations. Utilisation of water hyacinth waste into fertiliser and handicrafts with community empowerment helps the company in handling water hyacinth problems and can improve the community's economy through the sale of water hyacinth management products, namely fertiliser and handicrafts. Water hyacinth waste processing began in 2022 through collaboration with 14 SOEs starting with training, mentoring and making shelters for processing handicrafts and fertiliser. The realisation of water hyacinth processing assistance in 2023 with a value of Rp280,000,000.00 or reached 87.50% of the 2023 RKA of Rp320,000,000.00. This assistance is in the form of water hyacinth processing equipment around the Company's working area and the Batch III SOE Volunteer Activity in Jatiluhur 'From Jatiluhur to Indonesia Welfare of the Community Through Water Hyacinth Processing'.

d. Waste Management

Utilisation of waste from households and those in the channel to help reduce environmental pollution, especially in rivers and can improve the community's economy. Waste Management activities are included in the SDG Environmental Pillar 6 Clean Water and Adequate Sanitation with a planned assistance value of IDR 300,000,000. In 2023 the Company has made 2 (two) waste processing in Kampung Arang, Cibodas Village, Lembang District, West Bandung Regency by empowering 2 (two) Community Groups, namely Karya Ibu Group and Bakti Saluyu Group.



3. Program Prioritas

Gambaran TPB Program Prioritas Yang Dilaksanakan Oleh Perum Jasa Tirta II adalah sebagai berikut:

I. Program Prioritas Di Bidang Pendidikan

2. Priority Programme

An overview of the SDGs Priority Programmes Implemented by Perum Jasa Tirta II is as follows:

I. Priority programmes in Education

Tabel 5. Program Prioritas di Bidang Pendidikan / *Priority Programmes in Education*

NO	PROGRAM PRIORITAS	RKA TAHUN 2023 (RP)	REALISASI TAHUN 2023 (RP)	PRESENTASE CAPAIAN	LOKASI
I	**Beasiswa untuk Atlet Olahraga Air yang Berprestasi**	**213,000,000**	**199,780,000**	**93.79%**	
1	Program Beasiswa Untuk Atlit Olahraga Air Berprestasi		199,780,000		Kabupaten Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat
II	**Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Wilayah Kerja Perusahaan**	**500,000,000**	**773,149,100**	**154.63%**	
1	Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan di KB Al Khoeriyah Desa Cibining Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta		13,000,000		Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
2	Program Rehabilitasi Madrasah Nurul Ula di Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta		10,000,000		Desa Sukamulya Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta
3	Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah Takmaliyah Awwaliyah Miftahussa'Adah		10,000,000		Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
4	Program Anjungan Belajar Mandiri Holding Danareksa		16,650,000		Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Gambir Jakarta Pusat
5	Bantuan Perbaikan Gedung Sekolah di Kampung Ilmu Yayasan Nurani Dunia		271,239,100		Desa Cisarua Lecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta
6	Bantuan Perbaikan Perpustakaan SDN 3 Jatiluhur		25,000,000		Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
7	Bantuan Psarana & Prasarana Pusat kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nusa Indah Lelea Indramayu		50,000,000		Jalan Tugu - Lelela Blok D/ Liyep RT 13/RW 07 Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu
8	Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Gereja Kriten Pasundan Purwakarta		20,000,000		Jl. Jendral Sudirman 226-28 Purwakarta
9	Rehabilitasi Ruang Kelas Paud Al- Mudzakir Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor		50,000,000		Rehabilitasi Ruang Kelas Paud Al-Mudzakir Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor
10	Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Asrama Santri Yayasan Zahratul Hidayah		50,000,000		Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Asrama Santri Yayasan Zahratul Hidayah
11	Rehabilitasi Gedung Sekolah SMK 1 Yapa		50,000,000		Rehabilitasi Gedung Sekolah SMK 1 Yapa 1 Ciampea Kec. Ciampea Kab. Bogor
12	Bantuan Sarana Prasarana TQ/TPQ Aini Al-Hikmah		57,260,000		Jl. Dalang No.4A RT.009/05 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur
13	Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Riyadussholihin		100,000,000		Dusun Krajan RT/RW 013/03 Desa Tegalurung Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang
14	Pembangunan Asrama Pondok Peantren Raudotul Musyarofah di		50,000,000		Kp. Sintok RT 02 RW 05 Desa Sukadan Kec. Campaka Kab. Cianjur
III	**Program Kolaborasi Bantuan Pendidikan**	**752,500,000**			
	Jumlah	**1,465,500,000**	**972,929,100**	**66.39%**	



Tujuan 4 Pendidikan Berkulitas : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua. Realisasi Program TJSL tahun 2023 Bidang Pendidikan yaitu sebesar Rp972.929.100,00 telah mencapai 66,39% dari RKA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.465.500.000,00.

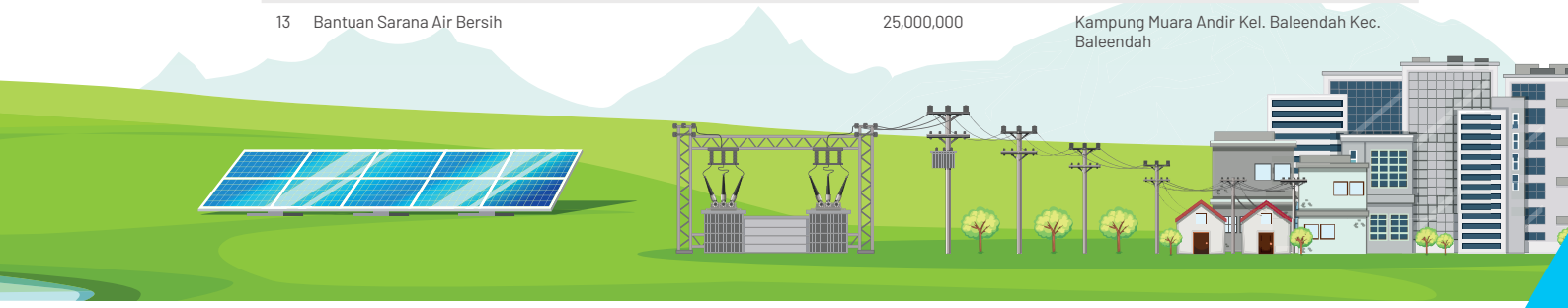
Goal 4 Quality Education: Ensure Inclusive and Equitable Education Quality and Increase Lifelong Learning Opportunities for All. The realisation of the TJSL Program in 2023 for the Education Sector, amounting to Rp972,929,100.00, has reached 66.39% of the 2023 RKA of Rp1,465,500,000.00.

II. Program Prioritas Di Bidang Pendidikan

II. Priority programmes in Education

Tabel 6. Program Prioritas di Bidang Lingkungan / *Priority Programmes in the Environment Sector*

NO	PROGRAM PRIORITAS	RKA TAHUN 2023 (RP)	REALISASI TAHUN 2023 (RP)	PRESENTASE CAPAIAN	LOKASI
I	**Konservasi**	**550,000,000**	**318,400,000**	**57.89%**	
1	Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah		21,900,000		Desa Ciririp Kacamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta
2	Program Konservasi di Lahan Kosong Sekolah		6,125,000		Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta
3	Program Konservasi di Lahan Kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah		29,610,000		Desa Kutamanah Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta
4	Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah Melalui Koramil Jatiluhur		70,070,000		Jatiluhur Purwakarta
5	Program Konservasi di Lahan kritis Melalui Penanaman Pohon Keras dan Buah		41,380,000		Jatiluhur Purwakarta
6	Program Penebaran Benih Ikan Endemik dan Ikan Konsumsi		129,500,000		Waduk Jatiluhur
7	Bantuan Program Pendederan Ikan Patin di Kampung Ilmu Yayasan Nurani Dunia		19,815,000		Desa Cisarua Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta
II	**Sanitasi**	**1,254,500,000**	**970,000,000**	**77.32%**	
1	Pembangunan Sarana Air Bersih di Kp.Neglasari RT 009 RW 002 Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta		28,000,000		Kp.Neglasari RT 009 RW 002 Desa Jatiluhur Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
2	Pembangunan MCK di Kp. Curug RT 03 RW 06 Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung		24,000,000		RW 06 Mekar Luyu Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung
3	Pembangunan MCK di RW 01 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung		24,000,000		RW 01 Wargamekar Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung
4	Bantuan Perbaikan dan Penambahan Saluran Air Bersih		25,000,000		Kp. Babakan Gunung Buleud RW 002 Dusun 01 Desa Ciririp Kec. Sukasari Kab. Purwakarta
5	Pembangunan Instalasi Air Bersih/ Perlindungan Mata Air Bagi Masyarakat Kampung Cipancur (Mata Air Nangka) Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung		25,000,000		Kampung Cipancur (Mata Air Nangka) Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung
6	Pembangunan Sarana MCK di Situ Cipatahunan RT 07 RW 05 Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung		24,000,000		RT 07 RW 05 Kelurahan Baleendah Kabupaten Bandung
7	Pembangunan MCK Masjid AL Barokah di Kp. Babakan Gunung Buleud Desa Ciririp Kec. Sukasari Kab. Purwakarta		24,000,000		Kp. Babakan Gunung Buleud Desa Ciririp Kec. Sukasari Kab. Purwakarta
8	Bantuan Pembangunan Sarana MCK di Lapangan Sepak Bola Poponcol Desa Poponcol Kidul Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang		24,000,000		Desa Poponcol Kidul Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
9	Bantuan Pembangunan Sarana MCK di Madrasah Taman Pendidikan Al-Quran Al-Ikhlas		24,000,000		Jl Pramuka No.144 RT 011 RW 033 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur Purwakarta.
10	Bantuan Pembangunan Sarana MCK		24,000,000		RT 10 RW 10 Desa Bunder Kecamatan Jatiluhur
11	Bantuan Pembangunan Sarana MCK		24,000,000		Desa Mekargalih Kec. Jatiluhur
12	Bantuan Sarana Air Bersih		25,000,000		Dusun Pasirmuncang Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Purwakarta
13	Bantuan Sarana Air Bersih		25,000,000		Kampung Muara Andir Kel. Baleendah Kec. Baleendah



NO	PROGRAM PRIORITAS	RKA TAHUN 2023 (RP)	REALISASI TAHUN 2023 (RP)	PRESENTASE CAPAIAN	LOKASI
14	Pembangunan Limbah Komunal di Kp. Curug RT 03 RW 06 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung		25,000,000		RW 06 Mekar Luyu Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung
15	Pembangunan Limbah Komunal di RW 01 Kel Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung		25,000,000		RW 01 Wargamekar Kel. Wargamekar Kec. Baleendah Kab. Bandung
16	Bantuan Sarana dan Prasarana RT 013 RW 17 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur		50,000,000		RT 013 RW 17 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
17	Bantuan Peningkatan Jalan Gang Dulman Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon		50,000,000		Desa Gagasari Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon
18	Bantuan Sarana dan Prasarana RW 08 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta		50,000,000		RW 08 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur
19	Bantuan Peralatan RW 001 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur		50,000,000		RW 001 Kel. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur
20	Pembangunan Sumur Bor di Desa Cipacung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan		50,000,000		Desa Cipacung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan
21	Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah di Desa Bangodua Kec. Klangen Kab. Cirebon		50,000,000		Desa Bangodua Kec. Klangen Kab. Cirebon
22	Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Desa Kreyo Kec. Klangen Kab Cirebon		50,000,000		Desa Kreyo Kec. Klangen Kab Cirebon
23	Pengadaan Tenda Kampung di RT 001 RW 07 Kp. Gandaria Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur		50,000,000		RT 001 RW 07 Kp. Gandaria Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur
24	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Munjul Sinambung Jakarta Timur		50,000,000		Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
25	Pengadaan Sarana Prasarana RT 05 RW 09 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan		50,000,000		RT 05 RW 09 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan
26	Renovasi Balai RW 09 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan		50,000,000		RW 09 Kelurahan Kramat Pela Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
27	Pembangunan Sekertariat RT 003/03 09 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan		50,000,000		RT 003/03 09 Kelurahan Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan
III	**Pengolahan Limbah dan Sampah Terintegrasi**	**1,485,000,000**	**1,445,000,000**	**97.31%**	
1	Program TJSL Bank Sampah Kolaborasi BUMN di Desa Kuta Kec. Pujut Mandalika		15,000,000		Desa Kuta Kec. Pujut Mandalika
2	Program Pengolahan Sampah		142,500,000		Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
3	Program Pengolahan Sampah		142,500,000		Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
4	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok di Desa Galumpit		19,250,000		Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru Kab. Purwakarta
5	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok di Pesantren Miftahul Jannah		24,250,000		Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Purwakarta
6	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok Pemuda Tani Karawang		21,500,000		Karawang - Indonesia
7	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok Pemuda Tani Purwakarta		40,000,000		Purwakarta - Indonesia
8	Pelatihan Pemanfaatan Limbah ternak Sapi Menjad Biogas Kandang Cacing dan Pupuk		25,000,000		Kecamatan Panaglengan Kabupaten Bandung
9	Pelatihan Pemanfaatan Limbah ternak Sapi Menjad Biogas Kandang Cacing dan Pupuk		25,000,000		Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
10	Program Kandang Cacing di Pangalengan		60,000,000		Desa Margamekar Kecamatan Panaglengan Kabupaten Bandung
11	Program Kandang Cacing di Pangalengan		60,000,000		Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
12	Program Pembuatan Degister Biogas di Pangalengan		52,500,000		Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung



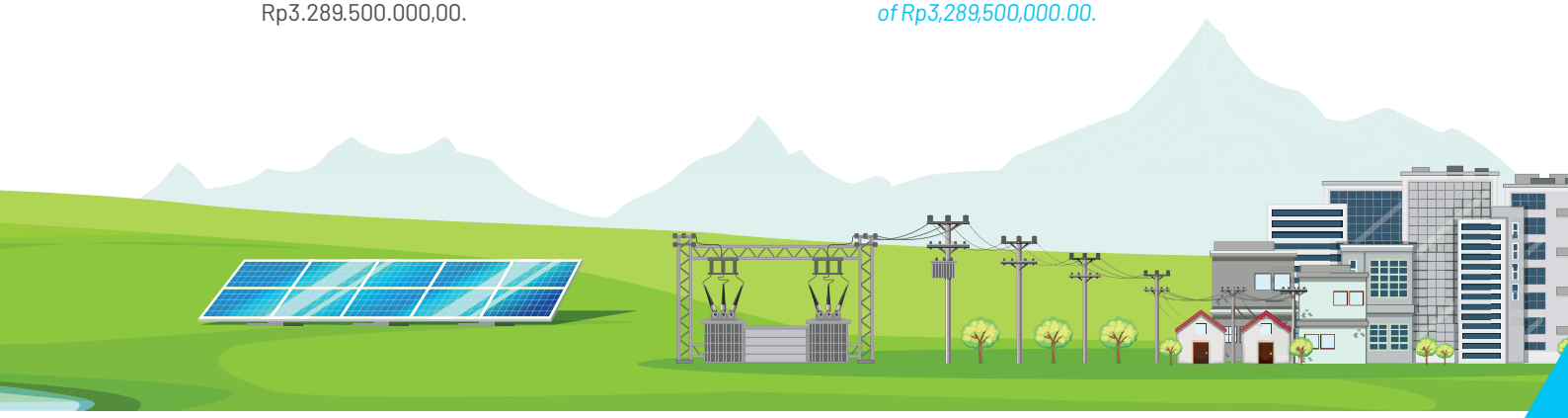
NO	PROGRAM PRIORITAS	RKA TAHUN 2023 (RP)	REALISASI TAHUN 2023 (RP)	PRESENTASE CAPAIAN	LOKASI
13	Program Perbaikan Degister Biogas di Lembang		63,000,000		Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
14	Program Pembuatan Degister Biogas di Pangalengan		52,500,000		Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
15	Program Perbaikan Degister Biogas di Lembang		35,000,000		Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
16	Cost Sharing Kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch III di Jatiluhur "Dari Jatiluhur Untuk Indonesia Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok"		142,565,500		Pondok Cikunir Indah Jl. Cendrawasih 1 Blk DX Nomor 27 Jatibening Pondokgede Bekasi
17	Kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch III di Jatiluhur "Dari Jatiluhur Untuk Indonesia Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok"		7,434,500		Kabupaten Purwakarta
18	Padat Karya Tunai Bersih-bersih Eceng Gondok di Sekitar Waduk Jatiluhur		25,000,000		Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
19	Program Kandang Cacing di Pangalengan		60,000,000		Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
20	Bantuan Pelatihan Pemanfaatn Limbah Ternak Sapi		25,000,000		Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
21	Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung		105,000,000		Program Pembuatan Degister Biogas di Pangalengan
22	Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat		70,000,000		Program Perbaikan Degister Biogas di Lembang
23	Program Kandang Cacing di Pangalengan		60,000,000		Desa Pulosari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
24	Bantuan Pelatihan Pemanfaatn Limbah Ternak Sapi		25,000,000		Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
25	Program Pembuatan Degister Biogas di Pangalengan		70,000,000		Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung
26	Program Perbaikan Degister Biogas di Lembang		77,000,000		Desa Cibodas Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
Jumlah		**3,289,500,000**	**2,733,400,000**	**83.09%**	

- Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua.
- Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan.
- Tujuan 15 Ekosistem Daratan : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.

Realisasi Program TJSL tahun 2023 Bidang Lingkungan dengan nilai sebesar Rp2.733.400.000,00 telah mencapai 83,09% dari RKA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp3.289.500.000,00.

- *Goal 6 Clean Water and Sanitation: Ensure Availability and Sustainable Management of Clean Water and Sanitation for All.*
- *Goal 12 Responsible Consumption and Production: Ensure sustainable production and consumption patterns.*
- *Goal 15 Terrestrial Ecosystems: Protect, Restore and Enhance Sustainable Use of Terrestrial Ecosystems, Sustainably Manage Forests, Halt Desertification, Reverse Land Degradation, and Halt Biodiversity Loss.*

The realisation of the 2023 TJSL Program in the Environmental Sector with a value of Rp2,733,400,000.00 has reached 83.09% of the 2023 RKA of Rp3,289,500,000.00.



III. Program Prioritas Di Bidang Pengembangan UMK *III. Priority Programmes in UMK Development*

Tabel 7. Program Prioritas di bidang Pengembangan UMK / *Priority Programmes in MSE Development*

No	Program Prioritas	Rka Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Presentase Capaian	Lokasi
I	**Pelatihan, Pameran dan Promosi Produk UMK**	**300,000,000**	**194,810,000**	**64.94%**	
1	Pengembangan UMK Melalu Bazzar UMK		25,650,000		Purwakarta dan Karawang
2	Bazzar UMK Binaan di Acara ITB International Triathlon 2023 di Jatiluhur		15,000,000		Purwakarta
3	Pembinaan UMK Melalui Bazzar UMKM di Ciwalk Bandung Bersama Idea Craft		50,000,000		Bandung
4	Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II melalui Bazzar UMK Binaan di Acara Dharmawanita Berbagi		25,000,000		Kabupaten Purwakarta
5	Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II Dalam Jamuan Dharmawanita Berbagi		10,000,000		Kabupaten Purwakarta
6	Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II melalui Bazzar UMK Binaan di Acara Harbak PJT II		65,000,000		Kabupaten Purwakarta
7	Pengembangan UMK Binaan Perum Jasa Tirta II melalui Acara Sarasehan PJT II		4,160,000		Kabupaten Purwakarta
II	**Bantuan Peralatan Penunjang Produktifitas UMK**	**150,000,000**	**216,876,000**	**144.58%**	
1	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok di Desa Galumpit		19,250,000		Desa Galumpit Kecamatan Tegalwaru Kab. Purwakarta
2	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok di Pesantren Miftahul Jannah		24,250,000		Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Purwakarta
3	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok Pemuda Tani Karawang		21,500,000		Karawang - Indonesia
4	Bantuan Alat pengolahan Eceng Gondok Pemuda Tani Purwakarta		40,000,000		Purwakarta - Indonesia
5	Bantuan Alat Kerja UMKM Produk Makanan Ringan		18,876,000		Desa Cibinong Kecamatan Jatiluhur Purwakarta
6	Bantuan Alat Kerja UMKM Produk Minuman Herbal		12,000,000		Kp. Cisantri Desa Cilandak Kec. Cibatu Purwakarta
7	Bantuan Alat Kerja UMKM Produk Gula Aren		50,000,000		Desa Sukasari Kec. Sukasari Purwakarta
8	Bantuan Life Jacket Untuk Mitigasi Pencegahan Bencana Pada Keadaan Cuaca Buruk		21,000,000		Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
9	Bantuan Alat Untuk Pengrajin eceng Gondok		10,000,000		Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta
III	**Bantuan Ijin Usaha / Sertifikasi**	**50,000,000**	**50,000,000**	**100.00%**	
1	Program Sertifikasi Halal Untuk UMKM		50,000,000		Purwakarta dan Karawang
Jumlah		**500,000,000**	**461,686,000**	**92.34%**	

Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua. Realisasi Program TJSL tahun 2023 Bidang Pengembangan UMK yaitu sebesar Rp461.686.000,00 telah mencapai 92,34% dari RKA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp500.000.000,00.

Goal 8 Decent Work and Economic Growth : Promote Inclusive and Sustainable Economic Growth, Productive and Comprehensive Employment Opportunities, and Decent Work for All. The realisation of the TJSL Program in 2023 for the MSE Development Sector is Rp461,686,000.00, which has reached 92.34% of the 2023 RKA of Rp500,000,000.00.



Kinerja Program TJSL Tahun 2023
Performance of TJSL Programme in 2023

1. Sumber Dana dan Penggunaan Dana

1.1 Program TJSL Bantuan

a. Program TJSL Bantuan Sumber dana Alokasi Laba BUMN Pembina

Program TJSL Bantuan tahun 2023 tidak ada tambahan Alokasi laba BUMN Pembina.

b. Program TJSL Bantuan Sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina.

Pada tahun 2023 Program TJSL Bantuan Sumber dana anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya adalah sebagai berikut:

1. Source of Funds and Use of Funds

1.1 TJSL Assistance Programme

a. TJSL programme Assistance Source of funds Profit Allocation of Supervising SOEs

The TJSL Assistance Programme in 2023 has no additional profit allocation for BUMN Pembina.

b. TJSL Programme Assistance Source of funds Budget that is accounted for as a cost of the Supervising SOE.

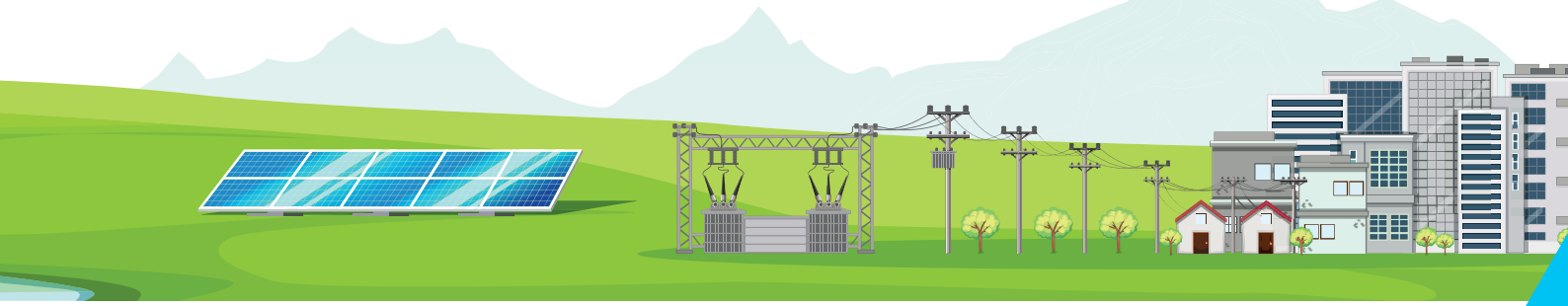
In 2023 JSP Programme Assistance The sources of budget funds accounted for as costs are as follows:

Tabel 8. Program TJSL Bantuan Sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina /
Tabel 8. Program TJSL Bantuan Sumber dana Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dari BUMN Pembina

Uraian		Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023		Presentase Capaian	
			RKA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Real/ Tahun 2022	Real/RKA Tahun 2023
1		2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3
I	**TJSL BUMN Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya Dana Tersedia**					
1	Saldo Awal	-	-	-	-	-
2	Tambahan Dana dari BUMN Pembina	7,190,900,000	7,525,000,000	6,710,888,952	93.32%	89.18%
3	**Jumlah Dana Tersedia (1 s.d. 2)**	**7,190,900,000**	**7,525,000,000**	**6,710,888,952**	**93.32%**	**89.18%**
II	**Realisasi Pelaksanaan Program TJSL dikelompokan dalam 4 (empat) Pilar TPB sebagai berikut :**					
4	Pilar Pembangunan Sosial	2,602,669,812	2,665,500,000	2,457,956,600	94.44%	92.21%
5	Pilar Pembangunan Ekonomi	1,807,882,653	1,645,000,000	1,426,686,000	78.91%	86.73%
6	Pilar Pembangunan Lingkungan	2,645,022,474	3,114,500,000	2,726,748,852	103.09%	87.55%
7	Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	127,688,000	100,000,000	99,000,000	77.53%	99.00%
8	**Jumlah Penyaluran Dana (4 s.d. 7)**	**7,183,262,939**	**7,525,000,000**	**6,710,391,452**	**93.42%**	**89.17%**
9	**Setor Tunai**	**7,637,061**	**-**	**497,500**	**-**	**-**
	Saldo Dana (3-8-9)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Realisasi penyaluran Dana TJSL Bantuan tahun 2023 anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dengan sumber dana dari anggaran BUMN Pembina yang dibiayakan sebesar Rp6.710.391.452,00 atau mencapai 89,17% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp7.525.000.000,00, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.183.262.939,00 mencapai 93,42%.

The realisation of the distribution of TJSL Assistance Funds in 2023, the budget calculated as a cost with the source of funds from the BUMN Pembina budget, amounted to Rp6,710,391,452.00 or reached 89.17% of the 2023 RKA of Rp7,525,000,000.00, when compared to the 2022 Realisation of Rp7,183,262,939.00 reached 93.42%.



1.2 Program Pendanaan UMK

Realisasi Pengelolaan Program Pendanaan UMK yang telah dilaksanakan oleh Perum Jasa Tirta II tahun 2023 dibandingkan dengan RKA Tahun 2023 dan dan Realisasi Tahun 2022 sebagai berikut:

1.2 UMK Funding Programme

The realisation of MSE Funding Program Management that has been implemented by Perum Jasa Tirta II in 2023 compared to the 2023 RKA and 2022 Realisation as follows:

Tabel 9. Program Pendanaan UMK / *UMK Funding Programme*

	Tahun 2022 (Rp.)	Tahun 2023		Presentase Capaian	
		RKA (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Real/ Tahun 2022	Real/RKA Tahun 2023
1	2	3	4	5 = 4 : 2	6 = 4 : 3
Saldo Awal	**24,758,131**	**-**	**21,577,330**	**-**	**-**
Penerimaan :					
Alokasi Bagian Laba dari BUMN Pembina	-	-	-	-	-
Pengembalian Pinjaman UMK Binaan	1,039,216,014	1,027,991,052	701,773,905	67.53%	68.27%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	89,467,760	71,108,948	47,805,336	53.43%	67.23%
Pendapatan Jasa Giro	1,135,425	900,000	5,789,307	509.88%	643.26%
Jumlah Penerimaan	**1,129,819,199**	**1,100,000,000**	**755,368,548**	**66.86%**	**68.67%**
Jumlah dana yang tersedia	**1,154,577,330**	**1,100,000,000**	**776,945,878**	**67.29%**	**70.63%**
Pengeluaran :					
Pinjaman pada UMK Binaan	563,000,000	-	-	-	-
Penyaluran Pendanaan UMK Kolaborasi dengan BRI	570,000,000	1,100,000,000	676,000,000	118.60%	61.45%
Jumlah Pengeluaran	**1,133,000,000**	**1,100,000,000**	**676,000,000**	**-**	**61.45%**
Saldo Akhir Dana	**21,577,330**	**-**	**100,945,878**	**-**	**-**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Realisasi penyerapan dana Program Pendanaan UMK untuk tahun 2023 sebesar Rp676.000.000,00 atau 87,01% dari Jumlah dana tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp776.945.878,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.133.000.000,00 mencapai 59,67%.
- Realisasi Penerimaan Pengembalian Pinjaman UMK Binaan tahun 2023 sebesar Rp701.773.905,00 atau 68,27% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp1.027.991.052,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.039.216.014,00 mencapai 67,53%.
- Realisasi Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman tahun 2023 sebesar Rp47.805.336,00, atau 67,23% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp71.108.948,00, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp89.467.760,00 mencapai 53,43%.
- Realisasi Penerimaan Pendapatan Jasa Giro tahun 2023 sebesar Rp5.789.307,00 atau 643,26% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp900.000,00 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.135.425,00 mencapai 509,88%.

From the table above, it can be explained as follows:

- *The realisation of the absorption of funds for the MSE Funding Program for 2023 amounted to Rp676,000,000.00 or 87.01% of the total available funds in 2023 of Rp776,945,878.00, when compared to the realisation in 2022 of Rp1,133,000,000.00 reached 59.67%.*
- *The realisation of Assisted MSE Loan Repayment Receipt in 2023 amounted to Rp701,773,905.00 or 68.27% of the 2023 RKA of Rp1,027,991,052.00, when compared to the realisation in 2022 of Rp1,039,216,014.00 reached 67.53%.*
- *The realisation of Loan Administration Services Revenue in 2023 amounted to Rp47,805,336.00, or 67.23% of the 2023 RKA of Rp71,108,948.00, when compared to the realisation in 2022 of Rp89,467,760.00 reached 53.43%.*
- *Realisation of Current Account Revenue in 2023 amounting to Rp5,789,307.00 or 643.26% of the RKA in 2023 of Rp900,000.00 when compared to the realisation in 2022 of Rp1,135,425.00 reached 509.88%.*



- Realisasi penyaluran pinjaman untuk Tahun 2023 sebesar Rp676.000.000,00 atau 61,45% dari RKA tahun 2023 sebesar Rp1.100.000.000,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 1.133.000.000,00 mencapai 59,66%.
- Dana tersedia per 31 Desember 2023 sebesar Rp100.945.878,00.

- *The realisation of loan disbursement for 2023 amounted to Rp676,000,000.00 or 61.45% of the 2023 RKA of Rp1,100,000,000.00 when compared to the 2022 Realisation of Rp 1,133,000,000.00 reached 59.66%.*
- *Available funds as of 31 December 2023 amounted to Rp100,945,878.00.*

Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Pendanaan UMK sebagai berikut:

Realisation of Accumulated Disbursement of MSE Funding Program as follows:

Tabel 10. Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Pendanaan UMK /
Realisation of Accumulated Disbursement of UMK Funding Program as follows:

Sektor Usaha UMK Binaan	Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023		Realisasi Sampai dengan Tahun 2023	
	Jumlah UMK Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah UMK Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah UMK Binaan	Jumlah Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(2)	(7) = (5)+(3)
I. Penyaluran Pinjaman Propinsi Jawa Barat	**2,725**	**32,056,117,500**	**26**	**676,000,000**	**2,751**	**32,732,117,500**
Sektor Usaha Industri	316	2,923,000,000	-	-	316	2,923,000,000
Sektor Usaha Perdagangan	1,072	13,916,000,000	-	-	1,072	13,916,000,000
Sektor Usaha Pertanian	267	1,591,417,500	-	-	267	1,591,417,500
Sektor Usaha Peternakan	81	989,500,000	-	-	81	989,500,000
Sektor Usaha Perkebunan	15	222,500,000	-	-	15	222,500,000
Sektor Usaha Perikanan	471	5,239,500,000	-	-	471	5,239,500,000
Sektor Usaha Jasa	261	3,481,200,000	-	-	261	3,481,200,000
Sektor Usaha Lainnya	241	3,115,500,000	-	-	241	3,115,500,000
Propinsi Banten			**-**	**-**		
Sektor Usaha Lainnya	1	7,500,000	-	-	1	7,500,000
Penyaluran Pendanaan UMK melalui BRI	**0**	**570,000,000**	**26**	**676,000,000**	**26**	**1,246,000,000**
II. Dana Pembinaan	**-**	**2,150,267,440**	**-**	**-**	**-**	**2,150,267,440**
Jumlah	**2,725**	**34,206,384,940**	**26**	**676,000,000**	**2,751**	**34,882,384,940**

Jumlah UMK Binaan Perum Jasa Tirta II tahun 2023 sebagai berikut :

The number of UMK assisted by Perum Jasa Tirta II in 2023 is as follows:

Tabel 11. UMK Binaan berdasarkan Jenis Usaha / *Assisted UMK by Business Type*

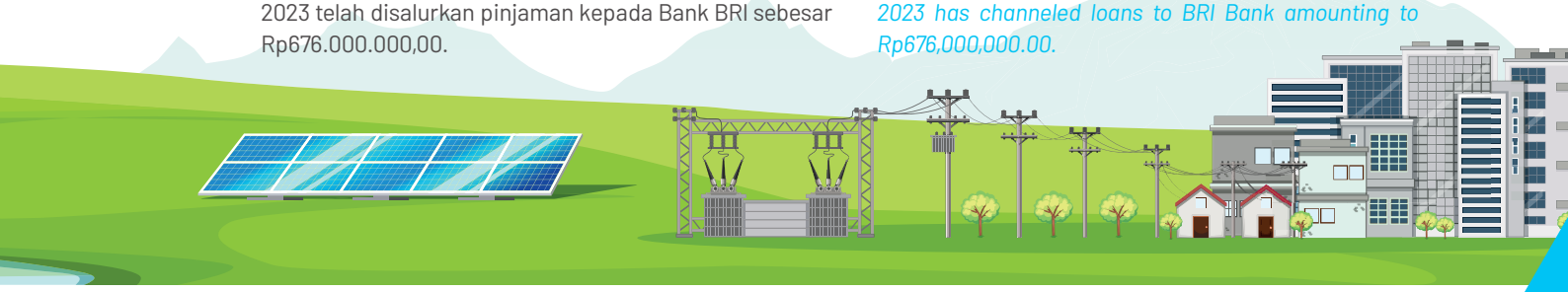
No	Uraian	s.d. Tahun 2022			Penyaluran Tahun 2023			s.d. Tahun 2023		
		UMK Baru	UMK Lanjutan	Jumlah UMK	UMK Baru	UMK Lanjutan	Jumlah UMK	UMK Baru	UMK Lanjutan	Jumlah UMK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Koperasi	148	70	218	-	2	2	148	72	220
2	Usaha Kecil	1779	706	2485	26	20	46	1,805	726	2,531
Jumlah		**1927**	**776**	**2703**	**26**	**22**	**48**	**1953**	**798**	**2751**

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah UMK Binaan sampai dengan tahun 2023 yaitu 2.751 UMK Binaan dan Program Pendanaan UMK tahun 2023 telah disalurkan pinjaman kepada Bank BRI sebesar Rp676.000.000,00.

The table above can be explained as follows:

The number of assisted MSEs until 2023 is 2,751 assisted MSEs and the MSE Funding Program in 2023 has channeled loans to BRI Bank amounting to Rp676,000,000.00.



2. Laporan Keuangan

2. Financial Report

2.1 Laporan Posisi Keuangan Yang Disajikan Secara Komparatif

2.1 Comparative Statement of Financial Position

Tabel 12. Laporan Posisi Keuangan / *Statement of Financial Position*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2023		Presentase Capaian	
		RKA	Realisasi		
	1	2	3	4 = 3 : 1	5 = 3 : 2
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan Setara Kas	21,577,330	-	100,945,878	467.83%	
Piutang Pinjaman Mitra Binaan Bersih	1,411,623,669	519,252,003	497,993,498	35.28%	95.91%
(Setelah dikurangi penyisihan piutang UMK Binaan pada Audit 2022, RKA Tahun 2023 dan Realisasi tahun 2023 masing-masing sebesar Rp1.565.013.999,-, Rp255.626.479,- dan Rp1.846.730.209,)					
JUMLAH ASET LANCAR	**1,433,200,999**	**519,252,003**	**598,939,376**	**41.79%**	**115.35%**
ASET TIDAK LANCAR					
Piutang Jangka Panjang	570,000,000	1,700,000,000	1,255,276,831		
Piutang Bermasalah					
(Setelah dikurangi penyisihan piutang bermasalah pada Audit 2022, RKA Tahun 2023 dan Realisasi Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp3.575.548.157,-, Rp2.842.380.660,- dan Rp3.501.147.214,-)	-	-	-		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	**570,000,000**	**1,700,000,000**	**1,255,276,831**	**220.22%**	**73.84%**
JUMLAH ASET	**2,003,200,999**	**2,219,252,003**	**1,854,216,207**	**92.56%**	**83.55%**
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Kelebihan Pembayaran Angsuran					
Angsuran Belum Teridentifikasi					
JUMLAH LIABILITAS					
ASET NETTO					
Aset Neto Tidak Terikat	2,003,200,999	2,219,252,003	1,854,216,207	92.56%	83.55%
JUMLAH ASET NETTO	**2,003,200,999**	**2,219,252,003**	**1,854,216,207**	**92.56%**	**83.55%**
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETTO	**2,003,200,999**	**2,219,252,003**	**1,854,216,207**	**92.56%**	**83.55%**



2.2 Laporan Aktivitas Yang Disajikan Secara Komparatif

2.2 Comparative Statement of Activities

Tabel 13. Laporan Aktivitas / *Activity Report*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023		Presentase Capaian	
		RKA	Realisasi		
	1	2	3	4 = 3 : 1	5 = 3 : 2
PERUBAHAN ASET NETTO TIDAK TERIKAT					
PENDAPATAN					
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	92,000,085	103,431,197	52,541,166	57.11%	50.80%
Pendapatan Bunga Jasa Giro	1,135,425	900,000	5,789,307	509.88%	643.26%
Penerimaan Lain-Lain	84,827,372	-	74,400,945		
JUMLAH PENDAPATAN (1)	**177,962,882**	**104,331,197**	**132,731,418**	**74.58%**	**127.22%**
BEBAN					
Beban Penyisihan Piutang	(524,036,790)	(63,906,620)	(281,716,210)	53.76%	440.82%
JUMLAH BEBAN (2)	**(524,036,790)**	**(63,906,620)**	**(281,716,210)**	**53.76%**	**440.82%**
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETTO TIDAK TERIKAT(3)=(1)+(2)	**(346,073,908)**	**40,424,577**	**(148,984,792)**	**43.05%**	**-368.55%**
ASET NETTO PADA AWAL PERIODE (4)	**2,349,274,907**	**2,178,827,426**	**2,003,200,999**	**85.27%**	**91.94%**
ASET NETTO PADA AKHIR PERIODE (5)=(3)+(4)	**2,003,200,999**	**2,219,252,003**	**1,854,216,207**	**92.56%**	**83.55%**

Realisasi Aset Neto per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.854.216.207,00 turun sebesar Rp148.984.792,00 atau 7,44% dari Aset Neto per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.003.200.999,00.

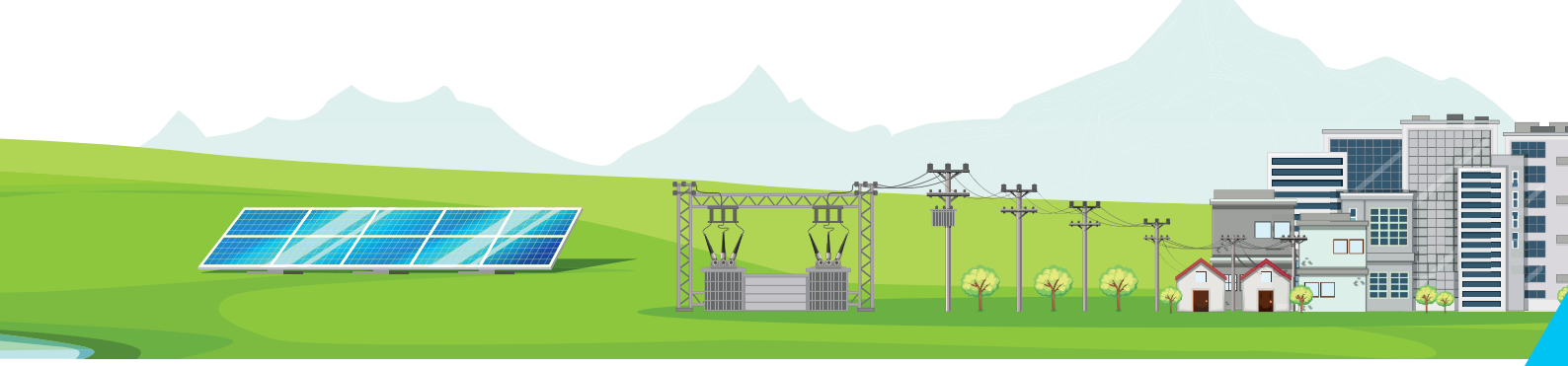
Realisation of Net Assets as of 31 December 2023 amounting to Rp1,854,216,207.00 decreased by Rp148,984,792.00 or 7.44% from Net Assets as of 31 December 2022 amounting to Rp2,003,200,999.00.

2.3 Laporan Arus Kas Yang Disajikan Secara Komparatif

2.3 Comparative Statement of Cash Flows

Tabel 14. Laporan Arus Kas / *Cash Flow Statement*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023		Presentase Capaian	
		RKA	Realisasi		
	1	2	3	4 = 3 : 1	5 = 3 : 2
AKTIVITAS OPERASI					
KAS DITERIMA DARI :					
Angsuran Pokok Pinjaman	1,039,216,010	1,027,991,052	701,773,905	67.53%	68.27%
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	89,467,756	71,108,948	47,805,336	53.43%	67.23%
Pendapatan Bunga Jasa Giro	1,135,433	900,000	5,789,307	509.88%	643.26%
JUMLAH PENERIMAAN KAS (1)	**1,129,819,199**	**1,100,000,000**	**755,368,548**	**66.86%**	**68.67%**
KAS DIKELUARKAN UNTUK :					
Program Pendanaan UMK	(563,000,000)			-	-
Penyaluran Program Pendanaan UMK Kolaborasi Melalui BRI	(570,000,000)	(1,100,000,000)	(676,000,000)	-	-
JUMLAH PENGELUARAN KAS (2)	**(1,133,000,000)**	**(1,100,000,000)**	**(676,000,000)**	**59.66%**	**61.45%**
KAS DITERIMA (DIGUNAKAN) UNTUK AKTIVITAS OPERASI (3)= (1)+(2)	**(3,180,801)**	**-**	**79,368,548**	**2495.24%**	**-**



Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023		Presentase Capaian	
		RKA	Realisasi		
	1	2	3	4 = 3 : 1	5 = 3 : 2
Aktivitas Pendanaan :					
Kas Diterima Dari :					
Jumlah Penerimaan Kas (4)	-	-	-	-	-
Kas Dikeluarkan Untuk :					
Penyaluran Pendanaan Umk Hibah Kepada Bri	-	1,100,000,000	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Kas (5)	-	1,100,000,000	-	-	-
Kas Diterima (Digunakan) Untuk Aktivitas Pendanaan (6)= (4)+(5)	-	1,100,000,000	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Dalam Kas	(3,180,801)	1,100,000,000	79,368,548	-2495.24%	-
Dan Setara Kas (7)= (3)+(6)					
Kas Dan Setara Kas Pada Awal Tahun (8)	24,758,131	-	21,577,330	87.15%	-
Kas Dan Setara Kas Pada Akhir Tahun (9)=(7)+(8)	21,577,330	1,100,000,000	100,945,878	467.83%	-

3. Piutang UMK Binaan Tahun 2023

Saldo piutang UMK Binaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.324.087.368,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.951.460.353,00. Sesuai dengan tingkat kelancarannya Saldo Piutang UMK Binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

3.Assisted UMK Receivables in 2023

Saldo piutang UMK Binaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.324.087.368,00 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.951.460.353,00. Sesuai dengan tingkat kelancarannya Saldo Piutang UMK Binaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

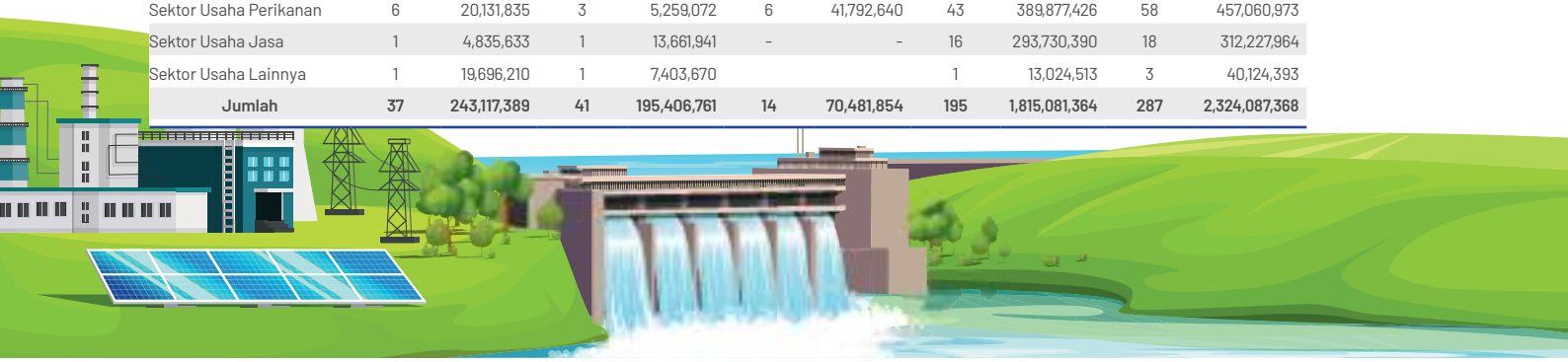
	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
	MB	(Rp)	MB	(Rp)
Lancar	37	243,117,389	74	883,349,277
Kurang Lacar	41	195,406,761	55	375,145,099
Diragukan	14	70,481,854	22	208,307,181
Macet	195	1,815,081,364	161	1,484,658,796
	287	**2,324,087,368**	**312**	**2,951,460,353**

Dari data diatas berikut rincian posisi piutang berdasarkan sektor dan kualitas piutang:

From the data above, the following is a breakdown of the position of receivables by sector and quality of receivables:

Tabel 15. Rincian Posisi Piutang Berdasarkan Sektor dan Kualitas Piutang /
Details of Receivables Position by Sector and Quality of Receivables

Sektor Usaha Mitra Binaan	Lancar		Kurang Lancar		Diragukan		Macet		Total	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah
Propinsi Jawa Barat										
Sektor Usaha Industri	3	18,802,802	10	14,467,053	3	10,408,616	54	427,848,389	70	471,526,860
Sektor Usaha Perdagangan	26	179,650,909	16	80,882,282	5	18,280,598	63	568,624,785	110	847,438,574
Sektor Usaha Pertanian	-	-	1	4,576,271	-	-	3	19,917,492	4	24,493,763
Sektor Usaha Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sektor Usaha Peternakan	-	-	9	69,156,472	-	-	15	102,058,369	24	171,214,841
Sektor Usaha Perikanan	6	20,131,835	3	5,259,072	6	41,792,640	43	389,877,426	58	457,060,973
Sektor Usaha Jasa	1	4,835,633	1	13,661,941	-	-	16	293,730,390	18	312,227,964
Sektor Usaha Lainnya	1	19,696,210	1	7,403,670			1	13,024,513	3	40,124,393
Jumlah	**37**	**243,117,389**	**41**	**195,406,761**	**14**	**70,481,854**	**195**	**1,815,081,364**	**287**	**2,324,087,368**



Kondisi piutang UMK Binaan tahun 2023 dengan kategori piutang lancar, kurang lancar, diragukan dan macet mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian TJSL Perum Jasa Tirta II tetap melakukan penagihan piutang termasuk piutang dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet dan bermasalah.

The condition of receivables of assisted MSEs in 2023 with the categories of current, substandard, doubtful and bad debts has decreased compared to the previous period. However, TJSL Perum Jasa Tirta II continues to collect receivables including receivables in the substandard, doubtful, bad and problematic categories.

Piutang bermasalah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.501.147.214,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.575.548.157,00 mengalami penurunan sebesar Rp74.400.943,00 dibandingkan piutang bermasalah periode sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya mitra binaan yang melunasi dan mencicil kembali pinjaman.

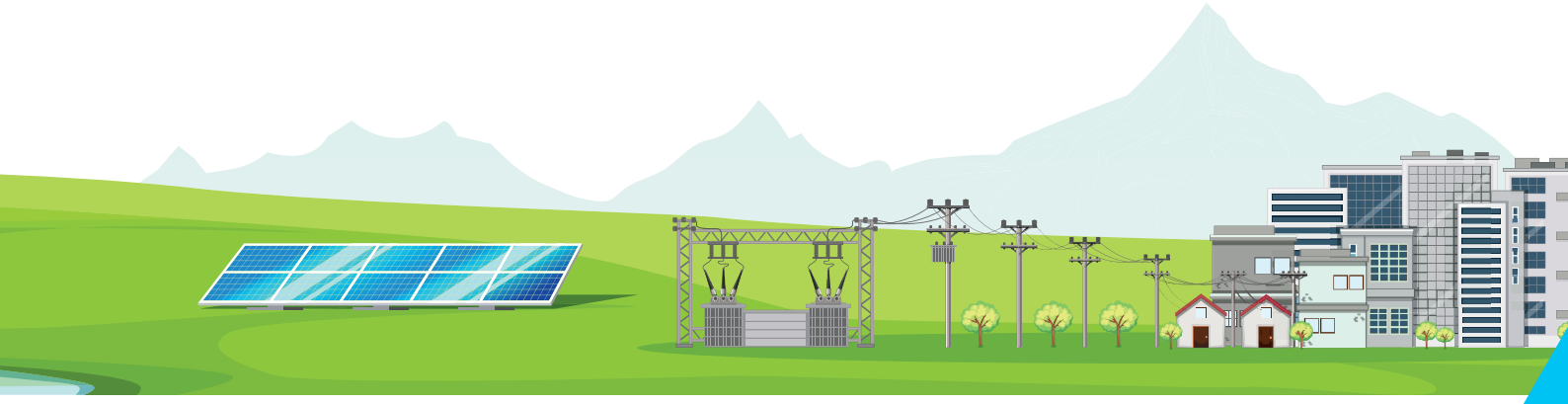
Non-performing receivables as of 31 December 2023 amounted to Rp3,501,147,214.00 while as of 31 December 2022 it amounted to Rp3,575,548,157.00, a decrease of Rp74,400,943.00 compared to the previous period's non-performing receivables, this is due to the fostered partners paying off and repaying loans.

Berikut posisi piutang bermasalah berdasarkan sektor usaha:

The following is the position of non-performing receivables by business sector:

Tabel 16. Posisi Piutang Bermasalah Berdasarkan Sektor Usaha /
Outstanding Receivables Position by Business Sector

Sektor Usaha Mitra Binaan	Tahun 2022		Tahun 2023		Persentase Dibandingkan Tahun Sebelumnya	
	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Jumlah Unit Mitra Binaan	Jumlah Rupiah	Persentase Jumlah Mitra Binaan	Persentase Jumlah Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)/(2)	(7) = (5)/(3)
Propinsi Jawa Barat	**394**	**3,569,478,970**	**386**	**3,495,078,027**	**97.97**	**97.92**
Sektor Usaha Industri	115	1,203,091,948	114	1,186,799,002	99.13	98.65
Sektor Usaha Perdagangan	104	740,721,894	104	719,198,844	100.00	97.09
Sektor Usaha Pertanian	19	279,825,013	16	267,444,638	84.21	95.58
Sektor Usaha Peternakan	32	425,391,077	31	413,742,586	96.88	97.26
Sektor Usaha Perkebunan	4	33,411,394	4	33,411,394	100.00	100.00
Sektor Usaha Perikanan	42	379,187,488	41	379,187,490	97.62	100.00
Sektor Usaha Jasa	31	209,904,532	31	206,814,533	100.00	98.53
Sektor Usaha Lainnya	47	297,945,624	45	288,479,540	95.74	96.82
Propinsi Banten	**1**	**6,069,187**	**1**	**6,069,187**	**100.00**	**100.00**
Sektor Usaha Lainnya	1	6,069,187	1	6,069,187	100.00	100.00
Jumlah	**395**	**3,575,548,157**	**387**	**3,501,147,214**	**97.97**	**97.92**



4. Kinerja

4.1 Key Performance Indicators (KPI)

Sesuai dengan Risalah Rapat Pembahasan RKA TJSL Tahun 2023 Perum Jasa Tirta II bersama Kementrian BUMN Nomor : RIS- 06/DSI.MBU.B/12/2022 Tanggal 19 Desember 2022, realisasi pencapaian target *Key Performance Indicators* (KPI) TJSL Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

4. Performance

4.1 Key Performance Indicators (KPI)

In accordance with the Minutes of the 2023 TJSL RKA Discussion Meeting of Perum Jasa Tirta II with the Ministry of SOEs Number: RIS- 06/DSI.MBU.B/12/2022 Dated 19 December 2022, the realisation of the achievement of the TJSL Key Performance Indicators (KPI) target for 2023 is as follows:

Tabel 17. *Key Performance Indicators* (KPI) / *Key Performance Indicators*

No.	Indikator	Target	%	Realisasi 2023	% Realisasi
1	Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode Social Return on Investment (SROI) (minimal 3 program)	3 Program	20.00%	3	20.00%
2	Menetapkan kebijakan levelling unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut	BOD-2	20.00%	1	20.00%
3	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN	7 (tujuh) Laporan Lengkap dan tepat waktu	20.00%	7	20.00%
4	Meningkatkan kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program (minimal 3 program)	3 program	20.00%	3	20.00%
5	Melibatkan peran serta karyawan secara aktif dalam program TJSL	Seluruh karyawan minimal 1 program	20.00%	1	20.00%
	Total				**100.00%**

Dari tabel diatas dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut:

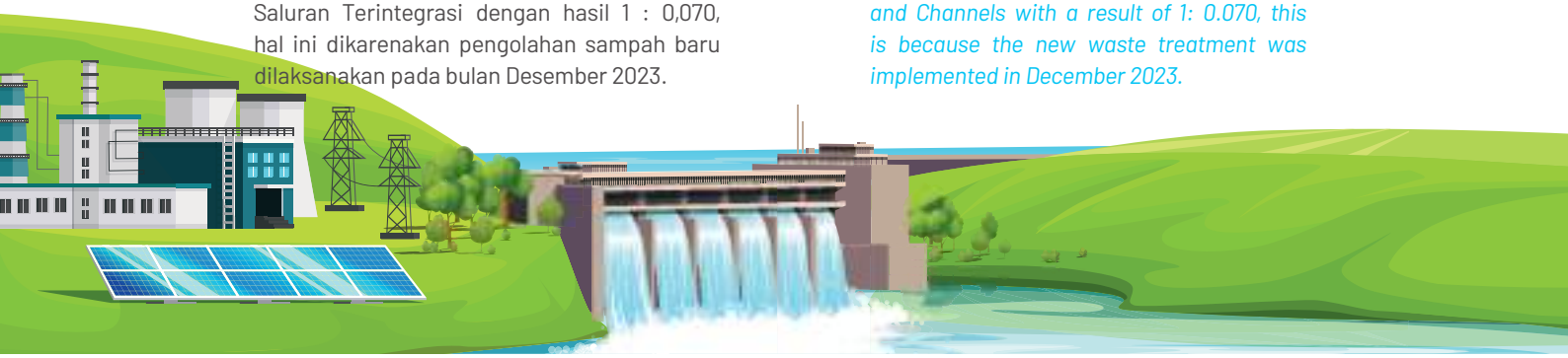
1. Melakukan pengukuran dampak terhadap program TJSL dengan metode Social Return On Investment (SROI) terhadap program- program sebagai berikut:
   - Pengolahan Limbah Kotoran Hewan dengan target 1 : 2,5
   - Pengolahan Limbah Eceng Gondok dengan target 1 : 2
   - Pengolahan Sampah Sekitar Sungai dan Saluran Terintegrasi dengan target 1 : 1,5

   Pada tanggal 26 September 2023 bertempat di Menara Danareksa diadakan Workshop Pengukuran *Social Return on Investement* (SROI), dengan hasil pengukuran:
   - Pengolahan Limbah Kotoran Hewan dengan target 1 : 2,53
   - Pengolahan Limbah Eceng Gondok dengan hasil 1 : 2,02
   - Pengolahan Sampah Sekitar Sungai dan Saluran Terintegrasi dengan hasil 1 : 0,070, hal ini dikarenakan pengolahan sampah baru dilaksanakan pada bulan Desember 2023.

From the table above, we can explain the following:

1. *Measured the impact of TJSL programmes using the Social Return On Investment (SROI) method for the following programmes:*
   - *Animal Manure Waste Treatment with a target of 1: 2,5*
   - *Water Hyacinth Waste Treatment with a target of 1: 2*
   - *Integrated Waste Management Around Rivers and Channels with a target of 1 : 1.5*

   On 26 September 2023 at Menara Danareksa a Social Return on Investment (SROI) Measurement Workshop was held, with measurement results:
   - *Animal Manure Waste Treatment with a target of 1: 2,53*
   - *Water Hyacinth Waste Treatment with a result of 1: 2,02*
   - *Integrated Waste Treatment Around Rivers and Channels with a result of 1: 0.070, this is because the new waste treatment was implemented in December 2023.*



2. Menetapkan kebijakan levelling unit kerja TJSL menjadi setingkat BOD-1 atau disesuaikan dengan hasil kajian terkait hal tersebut : Kebijakan Levelling Unit Kerja TJSL disampaikan Paling lambat tanggal 30 Juni 2023 target BOD-2.

   Mengacu pada hasil kajian Konsultan Professional PT SRW Asia maka rekomendasi struktur organisasi Unit Kerja TJSL yaitu setingkat BOD-2, dengan mempertimbangkan hasil kajian analisa internal dan hasil kajian analisa eksternal.

   Adapun hasil kajian tersebut di sampaikan melalui surat Dinas Nomor SD-159/DIR/SM/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 Perihal Penyampaian Kajian Kebijakan *Levelling* Unit Kerja TJSL kepada Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam program TJSL, termasuk untuk pemenuhan pengisian sistem informasi berbasis teknologi informasi Kementerian BUMN 7 (tujuh) Laporan lengkap dan tepat waktu.

   Pada tahun 2023 telah menyampaikan Laporan Triwulan IV 2022, Laporan Audited 2022, Laporan Triwulan I 2023, Laporan Triwulan II 2023, Laporan triwulan III 2023, Laporan Prognosa 2023 dan RKA 2024.

4. Meningkatkan Kolaborasi antar BUMN maupun dengan pihak lain yang sesuai kompetensinya dalam pelaksanaan program TJSL, dengan tujuan untuk meningkatkan dampak positif program antara lain:
   - Prioritas Pendidikan : Kolaborasi fasilitas pendidikan berupa perpustakaan digital, buku-buku dan mesin anjungan melalui Balai Pustaka yang semula direncanakan di Desa Sukasari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat menjadi dilakukan bersama Holding Danareksa di luar Desa Sukasari sebesar Rp16,5 juta.
   - Prioritas Lingkungan: Pengolahan Limbah Eceng Gondok. Pada Triwulan I Tahun 2023 telah dilaksanakan Program Relawan Bakti

2. Establish a policy of levelling the TJSL work unit to the level of BOD-1 or adjusted to the results of studies related to this matter: TJSL Work Unit Levelling Policy submitted no later than 30 June 2023 target BOD-2.

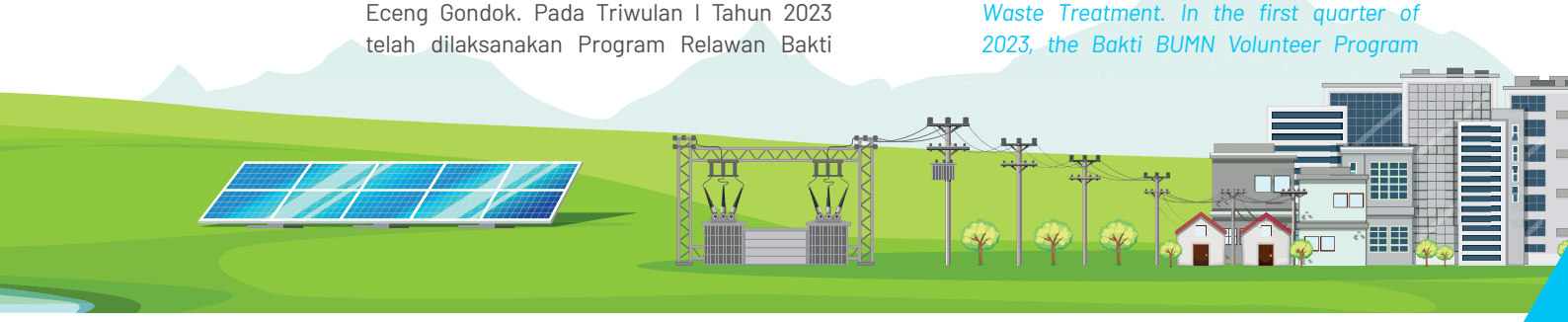
Referring to the results of the PT SRW Asia Professional Consultant study, the recommended organisational structure of the TJSL Work Unit is at the BOD-2 level, taking into account the results of the internal analysis study and the results of the external analysis study.

The results of the study were submitted through the Department's letter Number SD-159/DIR/SM/06/2023 Dated 27 June 2023 Regarding Submission of the Study of the TJSL Work Unit Levelling Policy to the Deputy for Human Resources, Technology and Information of the Ministry of State-Owned Enterprises.

3. Improve the use of information technology in the JJSL programme, including for the fulfilment of the Ministry of SOE's information technology-based information system 7 (seven) Complete and timely reports.

In 2023, it has submitted the 2022 Fourth Quarter Report, 2022 Audited Report, 2023 First Quarter Report, 2023 Second Quarter Report, 2023 Third Quarter Report, 2023 Prognosis Report and 2024 RKA.

4. Increasing collaboration between SOEs and other parties with appropriate competencies in the implementation of TJSL programmes, with the aim of increasing the positive impact of the programme, among others:
   - *Education Priority: Collaboration of educational facilities in the form of digital libraries, books and platform machines through Balai Pustaka, which was originally planned in Sukasari Village, Purwakarta Regency, West Java, to be carried out with Holding Danareksa outside Sukasari Village for IDR 16.5 million.*
   - *Environmental Priorities: Water Hyacinth Waste Treatment. In the first quarter of 2023, the Bakti BUMN Volunteer Program*



BUMN Untuk Indonesia Batch III pada tanggal 7 sampai dengan 10 Maret 2023 di Jatiluhur, Perum Jasa Tirta II berkolaborasi bersama PT Pegadaian dan Perum Airnav Indonesia dengan tema "Dari Jatiluhur Untuk Indonesia: Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok".

- Prioritas Pengembangan UMK : Kolaborasi bersama BUMN yang semula direncanakan kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah eceng gondok menjadi kerajinan tangan, menjadi pembuatan *Quick Response Code Indonesian Standard* (Qris) kepada 73 UMK oleh Bank BNI dan Bazar 100 UMK dalam event "Jasa Tirta II *Grateful Pathways* 2023" yang dilaksanakan pada 29 Agustus 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh UMK Binaan dari beberapa BUMN, Pemerintah Daerah, Keluarga Karyawan & warga sekitar dengan rincian sebagai berikut:

for Indonesia Batch III was held on 7 to 10 March 2023 in Jatiluhur, Perum Jasa Tirta II collaborated with PT Pegadaian and Perum Airnav Indonesia with the theme 'From Jatiluhur For Indonesia: Welfare of the Community Through Water Hyacinth Processing'.

- *UMK Development Priority: Collaboration with BUMN, which was originally planned for training activities on the use of water hyacinth waste into handicrafts, became the creation of Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) to 73 UMK by Bank BNI and 100 UMKs Bazaar in the 'Jasa Tirta II Grateful Pathways 2023' event held on 29 August 2023. The activity was attended by assisted UMK from several BUMN, local governments, employee families & local residents with the following details:*

Instansi	Qris	Bazar
Perum Jasa Tirta II	17 UMK	34 UMK
Bank BRI	10 UMK	10 UMK
Bank Mandiri	4 UMK	6 UMK
Bank BSI	6 UMK	6 UMK
Bank BJB	1 UMK	4 UMK
Bank BTN	1 UMK	2 UMK
Bank BNI	6 UMK	6 UMK
PT PLN Nusantara Power UP Cirata	- UMK	2 UMK
Pemerintah Daerah	7 UMK	8 UMK
Keluarga Karyawan & Warga sekitar	21 UMK	22 UMK
Jumlah	**73** UMK	**100** UMK

5. Melibatkan peran serta seluruh karyawan secara aktif dalam program TJSL yaitu Program Konservasi (penanaman pohon dan penebaran benih ikan).

   Pada tanggal 21 Februari 2023 Perum Jasa Tirta II memperingati Hari Peduli Sampah Nasional 2023 dengan melaksanakan Kegiatan Gerakan Bersih Sampah. Adapun tema dari kegiatan tersebut yaitu "Tuntas Kelola Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat".

5. *Actively involving all employees in the TJSL programme, namely the Conservation Programme (tree planting and fish seed stocking).*

   On 21 February 2023 Perum Jasa Tirta II commemorated the 2023 National Waste Care Day by carrying out Waste Clean-Up Movement Activities. The theme of the activity is 'Completely Manage Waste for Community Welfare'.



Kegiatan Gerakan Bersih Sampah dilaksanakan di lingkungan wilayah kerja Perusahaan dan diikuti oleh seluruh karyawan Perum Jasa Tirta II, dengan rincian sebagai berikut:

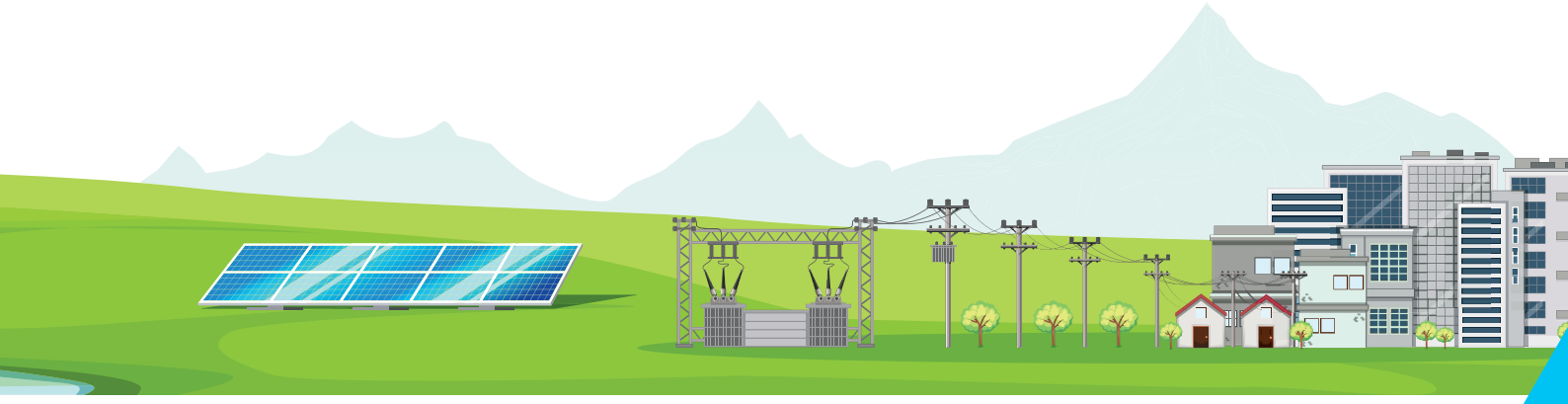
- Kantor Pusat sebanyak 307 Karyawan/ti, berlokasi di sekitar Lingkungan Kantor Pusat;
- Unit Wilayah I sebanyak 152 Karyawan/ti, berlokasi di Bendung Tarum Barat 54b & sekitar Unit Kerja Wilayah I;
- Unit Wilayah II sebanyak 168 Karyawan/ti, berlokasi di Bendung Walahar & sekitar Unit Kerja Wilayah II;
- Unit Wilayah III sebanyak 164 Karyawan/ti, berlokasi di Bendung Leuwi Nangka & sekitar Unit Kerja Wilayah III;
- Unit Wilayah IV sebanyak 97 Karyawan/ti, berlokasi di Ubrug Jatiluhur & sekitar Unit Kerja Wilayah IV;
- Unit PLTA sebanyak 140 Karyawan/ti, berlokasi di Power House PLTA & sekitar Unit Kerja PLTA;
- Unit Usaha Pariwisata dan Hotel sebanyak 15 Karyawan/ti, berlokasi di Jatiluhur Water World & sekitar Unit Kerja Pariwisata.

Kegiatan Gerakan Bersih Sampah dipilih karena sesuai dengan Program Konservasi Sumber Daya Air, yang salah satunya yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Diharapkan dengan kegiatan tersebut kualitas air yang dihasilkan menjadi lebih baik dan kelestarian air sungai menjadi terjaga.

The Waste Cleanup Movement activities were carried out in the Company's working area and participated by all Perum Jasa Tirta II employees, with the following details:

- *Head Office is 307 employees, located in the vicinity of the Head Office;*
- *Region I Unit as many as 152 employees, located at West Tarum Dam 54b & around the Region I Work Unit;*
- *Region II Unit as many as 168 employees, located at Walahar Dam & around the Region II Work Unit;*
- *Region III Unit as many as 164 employees, located at Leuwi Nangka Dam & around the Region III Work Unit;*
- *Region IV Unit as many as 97 employees, located in Ubrug Jatiluhur & around the Region IV Work Unit;*
- *Hydropower Unit with 140 employees, located in the Hydropower Power House & around the Hydropower Work Unit;*
- *Tourism and Hotel Business Unit as many as 15 employees, located at Jatiluhur Water World & around the Tourism Work Unit.*

The Clean Waste Movement activity was chosen because it is in accordance with the Water Resources Conservation Programme, one of which is water quality management and water pollution control. It is expected that with these activities, the quality of water produced will be better and the sustainability of river water will be maintained.



Dokumentasi Program TJSL
TJSL Programme Documentation

1. Bidang Pendidikan / *Education Sector*

Beasiswa Untuk Atlet Olah Raga Air yang Berprestasi / *Scholarships for Outstanding Water Sports Athletes*





Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan / *Education Facilities and Infrastructure Assistance*



Bantuan Perbaikan Gedung Sekolah di Kampung Ilmu Yayasan Nurani Dunia



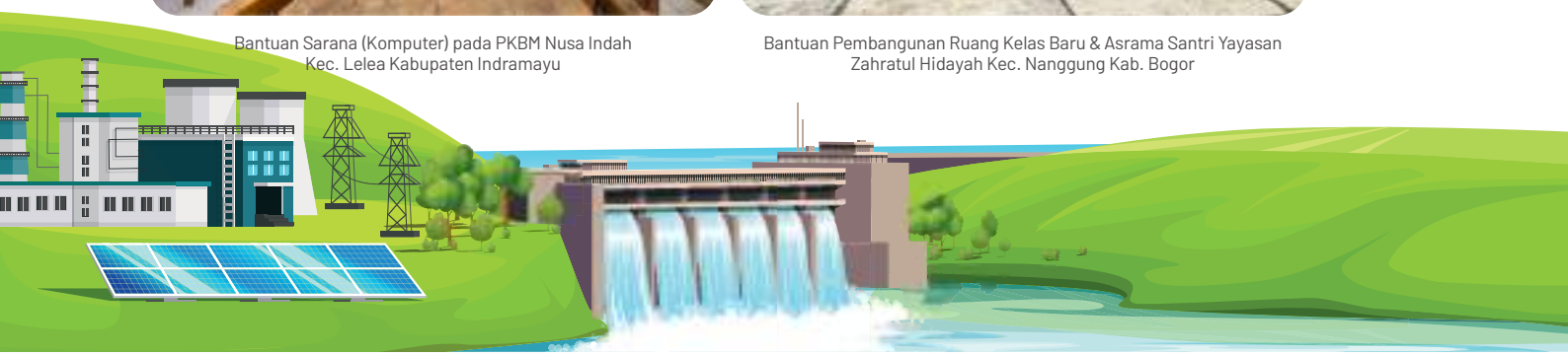
Bantuan Pembangunan SD Gereja Kristen Pasundan Purwakarta



Bantuan Sarana (Komputer) pada PKBM Nusa Indah Kec. Lelea Kabupaten Indramayu



Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru & Asrama Santri Yayasan Zahratul Hidayah Kec. Nanggung Kab. Bogor





Rehabilitasi Ruang Kelas Paud
Al-Mudzakir Kec. Cariu Kab. Bogor



Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru & Asrama Santri
Yayasan Zahratul Hidayah Kec. Nanggung Kab. Bogor



Bantuan Perbaikan Perpustakaan
SDN 3 Jatiluhur Purwakarta

2. Bidang Lingkungan / *Environmental Field*

Program Biogas / *Biogas Programme*



Program Pembuatan Degister Biogas di Pangalengan Kab. Bandung



Program Perbaikan Degister Biogas di Lembang Kab. Bandung Barat














Program Pembuatan Kandang Cacing
di Lembang Kab. Bandung




Bantuan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi kepada 20 Peternak Sapi
di Pangalengan Kabupaten Bandung




Bantuan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi kepada 20 Peternak Sapi
di Pangalengan Kabupaten Bandung



Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni / *Repair of uninhabitable houses*



Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kec. Sukatani K abupaten Purwakarta



Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Ciririp Kec. Sukasari
Kabupaten Purwakarta



Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
di Kabupaten Purwakarta

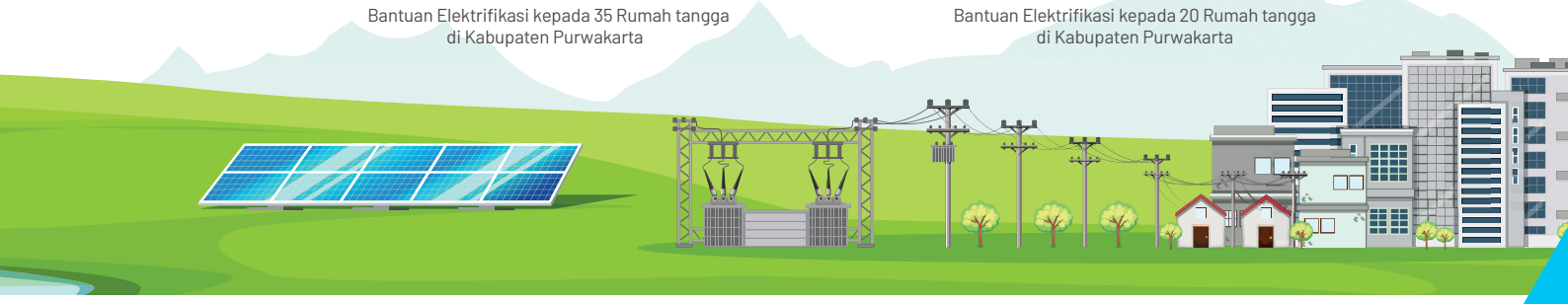
Bantuan Elektrifikasi / *Electrification Assistance*



Bantuan Elektrifikasi kepada 35 Rumah tangga
di Kabupaten Purwakarta



Bantuan Elektrifikasi kepada 20 Rumah tangga
di Kabupaten Purwakarta



Bantuan Sarana Air Bersih & Mandi Cuci Kakus / *Clean Water & Bathing & Washing Facilities*



Bantuan Sarana MCK di Kecamatan Bunder
Kabupaten Purwakarta



Bantuan Sarana MCK
di Kabupaten Karawang



Bantuan Sarana Air Bersih di Kecamatan Kiarapedes
Kabupaten Purwakarta



Bantuan Sarana Air Bersih di Kecamatan Baleendah
Kabupaten Bandung



Bantuan Sarana Air Bersih di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan



Pengolahan Limbah Eceng Gondok / *Water Hyacinth Waste Treatment*







Program Relawan Bakti BUMN Untuk Indonesia Batch III dengan tema "Dari Jatiluhur Untuk Indonesia : Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pengolahan Eceng Gondok"

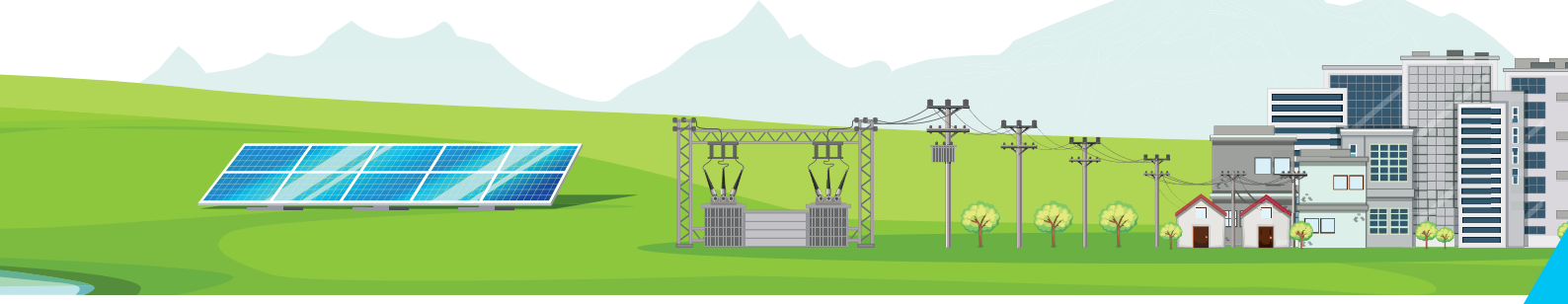
Penanaman Pohon / *Tree Planting*



Penanaman pohon dalam Kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch III



P enanaman pohon di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta



Penebaran Benih Ikan / *Fish Seed Stocking*



Penebaran Benih Ikan dalam Kegiatan Relawan Bakti BUMN Batch III



Penebaran benih ikan oleh Srikandi Perum Jasa Tirta II dalam memperingati Hari Ibu Tahun 2023

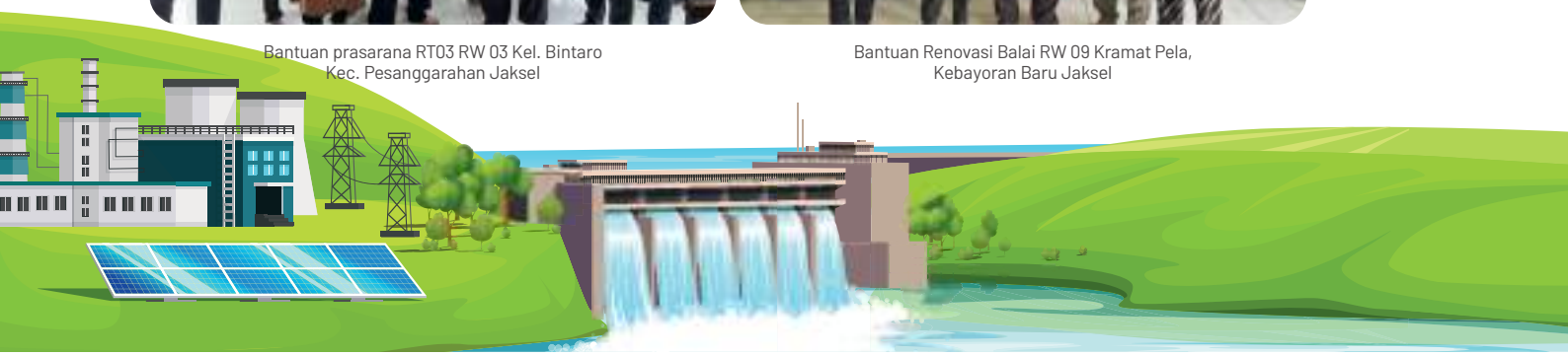
Bantuan Sarana Umum / *Public Facilities Assistance*



Bantuan prasarana RT03 RW 03 Kel. Bintaro Kec. Pesanggarahan Jaksel



Bantuan Renovasi Balai RW 09 Kramat Pela, Kebayoran Baru Jaksel



Bantuan Sarana Ibadah / *Worship Facilities Assistance*



Bantuan sarana ibadah Masjid Jami At-Tuqo Cirebon Desa Citemu
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Kegiatan Sosial / *Social Activities*



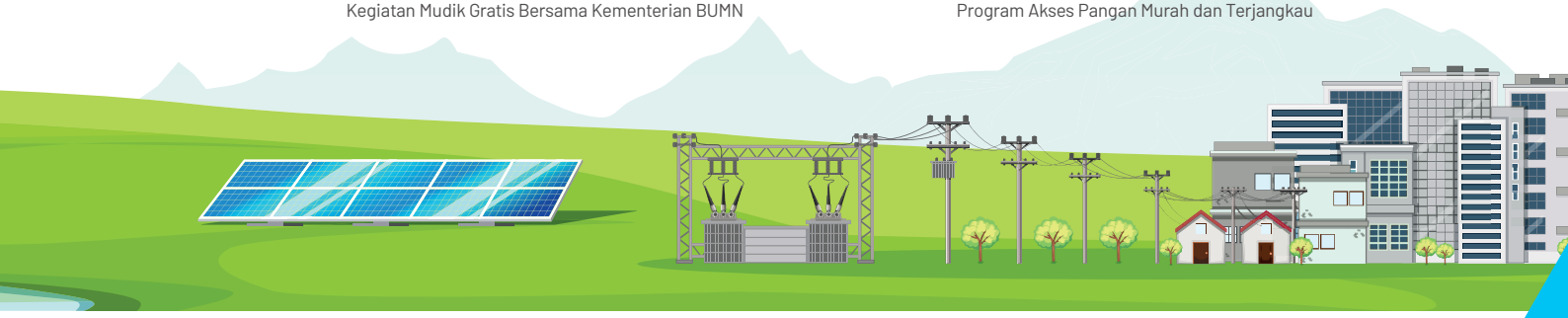




Kegiatan Mudik Gratis Bersama Kementerian BUMN



Program Akses Pangan Murah dan Terjangkau






Bantuan Hewan Qurban Hari Raya Idul Adha 1444 H




Santunan Anak Yatim




Khitanan Masal




Bantuan Air Bersih di Kec. Jatiluhur, Tegalwaru & Sukasari Kab. Purwakarta



3. Bidang Pengembangan UMK / *UMK Development Division*





Bazzar UMK Binaan dalam Rangka M emperingati Hari Krida Pertanian





Bazzar UMK Binaan Memperingati HUT RI ke-78 dan HUT PJT II ke-56



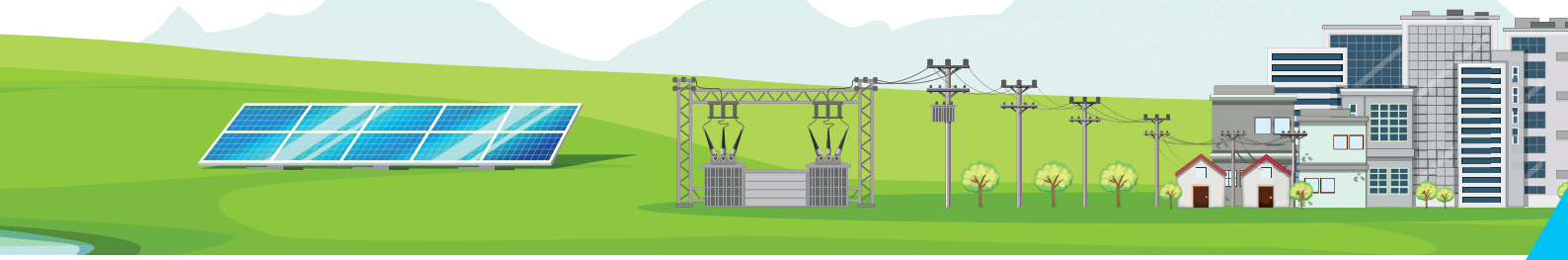
Bazzar UMK Binaan di Acara ITB International Triathlon 2023 di Jatiluhur



Bantuan Penunjang Alat Kerja & Sertifikasi Halal



Pembinaan UMK Melalui Bazzar UMKM di Ciwalk Bandung





Perum Jasa Tirta II
Air Untuk Menghidupi Negeri



Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 PERUM JASA TIRTA II DAN ENTITAS ANAK

Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022 PERUM JASA TIRTA II AND SUBSIDIARIES

Tahun

2023

Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur - Purwakarta

(0264) 201972 (0264) 201971

Website : jasatirta2.co.id

BUMN UNTUK INDONESIA

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES

Daftar Isi

Halaman/
Page

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		***Directors' Statement Letter***
Laporan Auditor Independen		***Independent Auditor's Report***
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		***Consolidated Financial Statements For the Years Ended December 31, 2023 and 2022***
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	*Consolidated Statements of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statements of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	*Consolidated Statements of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II DAN ENTITAS ANAK

DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2023 AND 2022 PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II AND SUBSIDIARY

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We the undersigned:*

1. Nama / *Name 1.*	:	**Imam Santoso**	:	
Alamat Kantor / *Office Address*	:	Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat	:	
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas / *Domicile as stated in ID Card*	:	Jl. Warga I No. 7 RT/RW 014/003 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta	:	
Nomor Telepon / *Phone Number*	:	(0264) 201972	:	
Jabatan / *Position*	:	Direktur Utama/ *President Director*	:	
2. Nama / *Name 2.*	:	Indriani Widiastuti	:	
Alamat Kantor / *Office Address*	:	Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat	:	
Alamat Domisili sesuai KTP atau Identitas / *Domicile as stated in ID Card*	:	Jl. Siaga I Gg. Lukis No. 36 RT/RW 004/005 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan, DKI Jakarta	:	
Nomor Telepon / *Phone Number*	:	(0264) 201972	:	
Jabatan / *Position*	:	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ *Finance, Human Resources and Risk Management*	:	

Menyatakan bahwa: / *State that:*

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan Entitas Anak (Grup). / *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and Subsidiary (Group).*
2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. / *The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar. / *All information contained in the consolidated financial statements of the Group are complete and correct.*
   b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. / *The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material facts and nor do they omit material information or facts.*
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup / *We are responsible for the Group's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. / *This is our declaration, which has been made truthfully.*

Atas nama dan mewakili Direksi/ *For and on behalf of the Board of Directors*
Purwakarta, 15 Maret / March 15, 2024

Imam Santoso	**Indriani Widiastuti**
Direktur Utama/ *President Director*	Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko/ *Finance, Human Resources and Risk Management*

RSM

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
Registered Public Accountants

RSM Indonesia
Pakuwon Center
Tunjungan Plaza 5, 11th Floor, Unit 6
Jl. Embong Malang No. 1
Surabaya 60261
Indonesia

T +62 31 3597 5222
F +62 31 3597 9111

www.rsm.id

Nomor/ *Number* : 00015/3.0310/AU.1/05/0500-3/1/III/2024

Laporan Auditor Independen/
Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi/
The Shareholders, Boards of Supervisory and Directors

Perusahaan Umum Jasa Tirta II

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of Perusahaan Umum Jasa Tirta II and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including an information of material accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan is a member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

License: KMK No. 543/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Head Office
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standard on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is*

terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in or auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian internal adalah tanggung jawab manajemen Grup. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan kesimpulan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Grup berdasarkan audit kami. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal tersebut kami laksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Pernyataan Standar Audit No. 62 (SA Seksi 801) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

We also have tested on the Group's compliance with certain laws and regulations and internal controls. The compliance with certain laws and regulations and internal controls are the responsibility of the Group's management. Our responsibility is to express conclusion on the Group's compliance with certain laws and regulations and internal controls based on our audit. Testing of the compliance with certain laws and regulations and internal controls that we performed were in accordance with State Financial Auditing Standards established by Supreme Audit Board of the Republic Indonesia and Statement as Standards on Auditing No. 62 (SA Section 801) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Laporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal disampaikan secara terpisah kepada manajemen, masing-masing dalam laporan kami No. R/011.AAT/epw/2024 dan No. R/012.AAT/epw/2024.

The reports of compliance to certain regulations and internal controls, are submitted to the management, separately in our reports No. R/011.AAT/epw/2024 and No. R/012.AAT/epw/2024.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Endang Pramuwati
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0500/
Public Accountant License Number: AP.0500

Surabaya,15 Maret / March 15, 2024

00015



PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2023 Rp	2022*) Rp	
ASET				***ASSETS***
Aset Lancar				***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	5, 38	732,175,855,725	567,815,077,826	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha				*Accounts Receivable*
Pihak Berelasi	6, 38	94,349,446,114	91,311,668,388	*Related Parties*
Pihak Ketiga	6	16,890,473,962	6,094,248,832	*Third Parties*
Piutang Retensi	7	2,478,300,560	1,544,313,386	*Retention Receivables*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima				*Accrued Revenue*
Pihak Berelasi	8, 38	146,525,420,053	176,886,461,652	*Related Parties*
Pihak Ketiga	8	52,087,918,998	60,144,716,604	*Third Parties*
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja				*Gross Amount Due from Customers*
Pihak Berelasi	9, 38	8,687,686,862	--	*Related Parties*
Pihak Ketiga	9	613,746,156	7,707,817,958	*Third Parties*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	10	1,927,000,377	701,279,719	*Other Current Financial Assets*
Persediaan	11	1,556,683,153	1,927,827,777	*Inventories*
Pembayaran di Muka	12a	7,237,463,454	6,650,384,379	*Prepayments*
Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar	29a	2,056,613,465	17,834,374,167	*Prepaid Taxes - Current Portion*
Jumlah Aset Lancar		**1,066,586,608,879**	**938,618,170,688**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar				***Non-Current Assets***
Investasi pada Entitas Asosiasi	13	--	--	*Investments in Associates*
Investasi Jangka Panjang Lainnya	14	--	--	*Other Long-Term Investment*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya		67,275,000	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Pembayaran di Muka	12b	5,504,545,278	504,656,172	*Prepayments*
Aset Tetap	15	852,984,424,531	804,196,873,850	*Fixed Assets*
Aset Takberwujud	16	7,503,405,754	9,017,107,242	*Intangible Assets*
Aset Hak-Guna	17	8,461,757,976	15,056,815,780	*Right-of-Use Assets*
Setara Kas yang Dibatasi Penggunaanya	18	2,134,881,591	--	*Restricted Cash Equivalents*
Pajak Dibayar di Muka - Setelah				*Prepaid Taxes - Less*
Dikurangi Bagian Lancar	29a	10,790,648,544	48,241,227,669	*Current Portion*
Aset Pajak Tangguhan	29d	101,459,959,146	97,493,791,869	*Deferred Tax Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	19	8,772,039,068	220,577,800	*Other Non-Current Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**997,678,936,888**	**974,798,325,382**	***Total Non-Current Asset***
JUMLAH ASET		**2,064,265,545,767**	**1,913,416,496,070**	***TOTAL ASSETS***

*) Direklasifikasi (Catatan 45)

**) As reclassified (Note 45)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (Continued)
As of December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2023 Rp	2022*) Rp	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas Jangka Pendek				***Current Liabilities***
Utang Usaha				*Accounts Payable*
Pihak Berelasi	20, 38	12,280,653,659	2,827,633,246	*Related Parties*
Pihak Ketiga	20	20,449,061,886	10,645,404,760	*Third Parties*
Utang Retensi	21	1,381,831,809	1,180,062,311	*Retention Payables*
Beban Akrual	22	86,626,991,825	71,777,435,621	*Accrued Expenses*
Uang Muka Penjualan	23	133,130,907	1,514,794,098	*Sales Advances*
Utang Pajak	29b	58,250,124,404	58,885,527,161	*Taxes Payable*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	25	36,152,305,098	44,701,634,041	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang - Bagian Lancar:				*Long-Term Liabilities - Current Portion:*
Pendapatan Diterima di Muka	24	22,828,919,910	25,213,379,194	*Deferred Revenue*
Liabilitas Sewa	26	1,383,134,838	6,160,381,683	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	28	3,300,000,000	2,200,000,000	*Other Financial Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja	27	7,974,953,158	6,278,499,682	*Employee Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**250,761,107,494**	**231,384,751,797**	***Total Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang				***Non-Current Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Lancar:				*Long-Term Liabilities - Less Current Portion:*
Pendapatan Diterima di Muka	24	7,490,912,310	4,814,688,858	*Deferred Revenue*
Liabilitas Sewa	26	7,361,705,157	8,921,459,629	*Lease Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	28	9,730,129,200	10,830,129,200	*Other Financial Liabilities*
Liabilitas Imbalan Kerja	27	279,080,300,289	274,739,479,761	*Employee Benefits Liabilities*
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		**303,663,046,956**	**299,305,757,448**	***Total Non-Current Liabilities***
JUMLAH LIABILITAS		**554,424,154,451**	**530,690,509,245**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal Pemerintah	30	164,547,635,935	164,547,635,935	*Government Capital*
Cadangan Umum		13,943,023,591	13,943,023,591	*General Reserve*
Cadangan Bertujuan		1,027,001,112,300	1,027,001,112,300	*Appropriated Reserve*
Penghasilan Komprehensif Lain		(190,446,535,859)	(179,544,761,143)	*Other Comprehensive Income*
Komponen Ekuitas Lainnya		193,963,239	193,963,239	*Other Equity Component*
Saldo Laba		487,860,682,389	349,067,919,953	*Retained Earnings*
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan:				***Total Equity Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		1,503,099,881,595	1,375,208,893,875	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non-Pengendali	31	6,741,509,721	7,517,092,950	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Ekuitas		**1,509,841,391,316**	**1,382,725,986,825**	***Total Equity***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**2,064,265,545,767**	**1,913,416,496,070**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

*) Direklasifikasi (Catatan 45)

**) As reclassified (Note 45)*

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2023 Rp	2022 Rp	
PENDAPATAN USAHA				***OPERATING REVENUE***
Pendapatan Sumber Daya Air	32	964,785,650,966	870,180,878,007	*Water Resources Revenue*
Pendapatan Non Sumber Daya Air	32	115,385,459,452	110,866,273,868	*Non Water Resources Revenue*
JUMLAH PENDAPATAN		**1,080,171,110,418**	**981,047,151,875**	***TOTAL REVENUE***
BEBAN POKOK PENDAPATAN				***COST OF REVENUE***
Beban Sumber Daya Air	33	(629,840,001,107)	(527,707,345,081)	*Water Resources Expenses*
Beban Non Sumber Daya Air	33	(83,661,410,229)	(72,563,957,505)	*Non Water Resources Expenses*
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN		**(713,501,411,336)**	**(600,271,302,586)**	***TOTAL COST OF REVENUE***
LABA KOTOR		**366,669,699,082**	**380,775,849,289**	***GROSS PROFIT***
Beban Pemasaran	34	(6,548,059,011)	(5,794,215,282)	*Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	35	(200,430,033,026)	(187,159,972,250)	*General and Administrative Expenses*
Pendapatan Keuangan - Bersih	36	26,075,049,882	10,879,375,103	*Financial Income - Net*
Beban Lain-lain - Bersih	37	(12,113,975,186)	(6,845,748,016)	*Other Expenses - Net*
JUMLAH BEBAN USAHA		**(193,017,017,341)**	**(188,920,560,445)**	***TOTAL OPERATING EXPENSES***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**173,652,681,742**	**191,855,288,844**	***PROFIT BEFORE TAXES***
Beban Pajak Penghasilan	29c	(35,635,675,652)	(46,607,162,979)	*Income Tax Expense*
LABA TAHUN BERJALAN		**138,017,006,090**	**145,248,125,865**	***PROFIT FOR THE CURRENT YEAR***
Penghasilan Komprehensif Lain:				***Other Comprehensive Income:***
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi				***Items that Will Not be Reclassified to Profit or Loss***
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti	27	(13,976,412,307)	(56,063,257,039)	*Remeasurement of Defined Benefit Plans*
Pajak Penghasilan Terkait	27	3,074,810,708	12,333,916,549	*Related Income Tax*
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		**(10,901,601,599)**	**(43,729,340,490)**	***Other Comprehensive Income for the Current Year***
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**127,115,404,491**	**101,518,785,375**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				***Profit for the Current Year Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		138,792,762,436	145,803,424,155	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali		(775,756,346)	(555,298,290)	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Laba Tahun Berjalan		**138,017,006,090**	**145,248,125,865**	***Total Profit for the Current Year***
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan ke:				***Total Comprehensive Income for the Current Year Attributable to:***
Pemilik Entitas Induk		127,890,987,720	102,074,299,523	*The Owners of Parent Entity*
Kepentingan Non Pengendali		(775,583,229)	(555,514,148)	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		**127,115,404,491**	**101,518,785,375**	***Total Comprehensive Income for the Current Year***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk/ *Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity*									
		Modal Pemerintah Republik Indonesia/ *Government Capital of Republic of Indonesia*	Cadangan Umum/ *General Reserve*	Cadangan Bertujuan/ *Appropriated Reserve*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Components*	*Saldo Laba/ Retained Earnings*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan Non Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Jumlah/ *Total*	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Saldo 31 Desember 2021		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**1,027,001,112,300**	**(135,815,636,511)**	**193,963,239**	**203,264,495,798**	**1,273,134,594,352**	**8,072,607,098**	**1,281,207,201,450**	***Balance as of December 31, 2021***
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	27	--	--	--	(43,729,124,632)	--	--	(43,729,124,632)	(215,858)	(43,729,340,490)	*Loss on Remeasurement of Defined Benefits Plan*
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	145,803,424,155	145,803,424,155	(555,298,290)	145,248,125,865	*Profit for Current Year*
Saldo 31 Desember 2022		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**1,027,001,112,300**	**(179,544,761,143)**	**193,963,239**	**349,067,919,953**	**1,375,208,893,875**	**7,517,092,950**	**1,382,725,986,825**	***Balance as of December 31, 2022***
Kerugian Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti	27	--	--	--	(10,901,774,716)	--	--	(10,901,774,716)	173,117	(10,901,601,599)	*Loss on Remeasurement of Defined Benefits Plan*
Laba Tahun Berjalan		--	--	--	--	--	138,792,762,436	138,792,762,436	(775,756,346)	138,017,006,090	*Profit for Current Year*
Saldo 31 Desember 2023		**164,547,635,935**	**13,943,023,591**	**1,027,001,112,300**	**(190,446,535,859)**	**193,963,239**	**487,860,682,389**	**1,503,099,881,595**	**6,741,509,721**	**1,509,841,391,316**	***Balance as of December 31, 2023***

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II
AND SUBSIDIARIES
THE CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Full of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ *Notes*	2023 Rp	2022 Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan dari Pelanggan		1,145,834,123,550	968,711,407,169	*Receipts from Customers*
Penerimaan Restitusi Pajak		42,550,476,366	49,687,283,764	*Receipts of Tax Refunds*
Penghasilan Bunga		29,029,559,315	13,071,919,361	*Interest Income*
Pembayaran Kas kepada:				*Cash Payments to:*
Pemasok dan Pihak Ketiga Lainnya		(397,127,474,424)	(333,453,692,805)	*Suppliers and Other Third Parties*
Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan		(337,860,100,274)	(273,446,037,110)	*Supervisory Board, Directors and Employees*
Pembayaran Pajak		(183,073,647,103)	(187,836,013,119)	*Tax Payment*
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**299,352,937,430**	**236,734,867,260**	***Net Cash Flows Provided by Operating Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				***Cash Flows from Investing Activities***
Perolehan Aset Tetap	15, 42	(114,621,130,893)	(110,443,054,809)	*Acquisition of Fixed Assets*
Perolehan Aset Takberwujud	16	--	(2,011,368,076)	*Acquisition of Intangible Assets*
Perolehan Aset Hak-Guna	17	(172,246,328)	(704,000,000)	*Acquisition of Right-of-Use Assets*
Pembayaran Uang Muka		(5,504,545,278)	(504,656,172)	*Advances Payment*
Pembayaran Pemeliharaan Aset Serah Kelola		(9,168,636,741)	--	*Handover Assets Maintenance Payments*
Penempatan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya		(2,134,881,591)	--	*Placement of Restricted Cash Equivalents*
Penerimaan Ganti Rugi Pelepasan Aset Tetap		2,031,704,771	--	*Receipt of Disposal of Fixed Assets Compensation*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(129,569,736,060)**	**(113,663,079,057)**	***Net Cash Flows Used in Investing Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan				***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan:				*Receipts:*
Utang Lain-lain		2,750,000,000	--	*Other Payables*
Pembayaran:				*Payments of:*
Liabilitas Sewa	41	(5,835,277,317)	(6,085,023,805)	*Lease Liabilities*
Utang Lain-lain		(600,000,000)	--	*Other Payables*
Pembayaran Bunga	35	(1,737,146,154)	(1,502,342,593)	*Interest Payment*
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(5,422,423,471)**	**(7,587,366,398)**	***Net Cash Flows Used in Financing Activities***
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas		**164,360,777,899**	**115,484,421,805**	***Net Increase in Cash and Cash Equivalents***
Kas dan Setara Awal Tahun		**567,815,077,826**	**452,330,656,021**	***Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year***
Kas dan Setara Akhir Tahun		**732,175,855,725**	**567,815,077,826**	***Cash and Cash Equivalents at the End of the Year***
Kas dan Setara Kas Terdiri Dari:				***Cash and Cash Equivalents are as follows:***
Kas		730,371,905	1,179,036,948	*Cash*
Bank		181,445,483,820	106,636,040,878	*Banks*
Deposito		550,000,000,000	460,000,000,000	*Time Deposits*
Jumlah		**732,175,855,725**	**567,815,077,826**	***Total***

Transaksi nonkas dan rekonsiliasi yang timbul dari aktivitas pendanaan disajikan di Catatan 42.

Non-cash transactions and reconciliation of liabilities arising from financing activities are presented in Note 42.

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements

1. Umum / *1. General*

a. Pendirian dan Informasi Umum

Pembangunan Bendungan/Waduk PLTA Ir. H. Djuanda dimulai tahun 1957 dan selesai tahun 1967. Dengan selesainya pembangunan tersebut, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1967, Pemerintah menetapkan berdirinya Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur yang bertugas menyelenggarakan Eksploitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bendungan/Waduk dan PLTA Ir. H. Djuanda serta merintis pengembangan proyek-proyek selanjutnya. Dengan berfungsinya sebagian besar prasarana pengairan yang meliputi waduk, bendungan utama dan PLTA Ir. H. Djuanda serta jaringan irigasi, maka berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1970, Pemerintah menetapkan pendirian Perum Otorita Jatiluhur (POJ) yang kemudian diubah dengan PP Nomor 35 Tahun 1980. PP Nomor 20 Tahun 1970 jo. PP Nomor 35 Tahun 1980 disesuaikan dan disempurnakan menjadi PP Nomor 42 Tahun 1990 yang memperluas kewenangan, tugas serta lapangan usaha Perusahaan, selanjutnya dengan diterbitkannya PP Nomor 94 Tahun 1999, Perum Otorita Jatiluhur (POJ) diubah menjadi Perum Jasa Tirta II yang selanjutnya diatur kembali dengan PP Nomor 7 Tahun 2010 dan PP Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ("Perusahaan").

a. Establishment and General Information

Construction of Dam/Reservoir of HEPP Ir. H. Djuanda began in 1957 and was completed in 1967. With the completion of the construction, then according to Government Regulation (PP) Number 8 Year 1967, the Government established the Perusahaan Negara (PN) Djatiluhur that is in charge of Exploitation and Maintenance of Dam/Reservoir Facilities and Infrastructure of HEPP Ir. H. Djuanda and pioneering the development of further projects. With the functioning of most irrigation infrastructure by which includes reservoirs, main dams and HEPP Ir. H. Djuanda as well as irrigation networks, then according to PP Number 20 Year 1970, the Government establishes the establishment of the Perum Otorita Jatiluhur (POJ) to which then amended by PP Number 35 Year 1980. PP Number 20 Year 1970 jo. PP Number 35 Year 1980 was adjusted and refined to PP Number 42 Year 1990 which expanded the authority, duties and field of business of the Company, then with the issuance of PP Number 94 Year 1999, the Perum Otorita Jatiluhur (POJ) was changed to Perum Jasa Tirta II by which it is regulated further with PP Number 7 Year 2010 and PP Number 25 Year 2022 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II ("The Company").

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang Pengusahaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam rangka melaksanakan maksud dan tujuan, Perusahaan melakukan kegiatan usaha:

1) Pelayanan air baku untuk air minum, industri, pertanian, penggelontoran, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik dan pemenuhan kebutuhan air lainnya;

2) Penyediaan tenaga listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara dan/atau selain PT Perusahaan Listrik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Purpose and Objective

The purpose and objective of the Company is to participate in implementing and supporting Government policies and programs in the national economy and development sector in general, especially in the field of Undertaking and Managing Water Resources as well as optimizing the utilization of Company resources to produce goods and services based on good corporate governance (GCG). In order to carry out the aims and objectives, the Company conducts business activities:

1) Raw water services for drinking water, industry, agriculture, flushing out, power plants and other water needs;

2) Supply of electricity to PT Perusahaan Listrik Negara and/or other than PT Perusahaan Listrik Negara in accordance with the provisions of laws and regulations;

3) Menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara lokal dan/atau regional sampai dengan unit produksi, beserta perlengkapan dan perangkat operasionalnya bagi pemenuhan kebutuhan air minum dan/atau penyelenggara SPAM lainnya, dengan didasarkan pada rencana induk pengembangan SPAM yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

3) Carry out the development of Drinking Water Supply Systems (SPAM) locally and/or regionally up to production units, along with operational equipment and devices to meet the needs of drinking water and/or other SPAM operators, based on the SPAM development master plan stipulated by the Central Government and/or Regional Government;

4) Mengembangkan pembangkit listrik melalui Energi Baru Terbarukan (EBT);

4) Develop power plants through Renewable Energy (EBT);

5) Penyediaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan usaha minuman dalam kemasan lainnya;

5) Supply of Bottled Drinking Water (AMDK) and other packaged beverage businesses;

6) Budidaya perikanan pada Sumber Daya Air;

6) Aquaculture in Water Resources;

7) Usaha air bersih untuk kebutuhan industri termasuk, tetapi tidak terbatas pada, proses produksi seperti air untuk sistem pendingin mesin;

7) Clean water business for industrial needs including, but not limited to, production processes such as water for engine cooling systems;

8) Melakukan eksplorasi, eksploitasi dan pemurnian bahan tambang dan sumber air;

8) Exploring, exploiting and refining mining materials and water sources;

9) Melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi kemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki;

9) Carrying out business activities in order to optimize the utilization of potential resources owned;

10) Pembangkitan, penyaluran listrik tenaga air, air minum, usaha jasa konsultasi di bidang teknologi Sumber Daya Air, penyewaan alat besar dan jasa laboratorium kualitas air; dan

10) Generation, distribution of hydropower, drinking water, business consulting services in the field of Water Resources technology, large equipment rental and water quality laboratory services; and

11) Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum).

11) Development of SPAM (Drinking Water Supply System).

c. Lokasi Perusahaan dan Wilayah Kerja

Lokasi Usaha Perusahaan
Jl. Lurah Kawi No. 01, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat.

c. The Company Location and Work Area

Working areas of the Company
Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta, West Java.

Unit Usaha	**Lokasi/ *Location***	***Business Unit***
Unit Wilayah I	Bekasi	*Regional I Unit*
Unit Wilayah II	Karawang	*Regional II Unit*
Unit Wilayah III	Subang	*Regional III Unit*
Unit Wilayah IV	Jatiluhur	*Regional IV Unit*
Unit Wilayah V	Lampung	*Regional V Unit*
Unit Wilayah VI	Banten	*Regional VI Unit*
Unit Wilayah VII	Cirebon	*Regional VII Unit*
Unit PLTA	Jatiluhur	*Hydroelectric Power Plant Unit*
Unit Usaha Pariwisata dan Hotel	Jatiluhur	*Tourism and Hotel Business Unit*

d. Dewan Pengawas dan Perangkat Kerjanya, Direksi dan Karyawan

Dewan Pengawas

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II No: SK-214/MBU/09/2022 tanggal 21 September 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, memutuskan memberhentikan Mohamad Sofwan dan mengangkat Fakthurohman Taufik sebagai anggota Dewan Pengawas. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

d. Board of Supervisors and Its Working Units, Directors and Employees

Board of Supervisory

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the Representative of the Government as the Shareholder of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II No: SK-214/MBU/09/2022 dated September 21, 2022 concerning Dismissal and Appointment of the Members of the Supervisory Board of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, decided to dismiss Mohamad Sofwan and appointed Fakthurohman Taufik. The Supervisory Board as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023	2022	
Ketua	Kelik Wirawan Wahyu W	Kelik Wirawan Wahyu W	*Chairman*
Anggota	Nuning Sri Rejeki W	Nuning Sri Rejeki W	*Member*
Anggota	Romy Marcandi	Romy Marcandi	*Member*
Anggota	Fatkhurohman Taufik	Fatkhurohman Taufik	*Member*
Sekretaris Dewan Pengawas	Yusuf Abdullah Musthofa	Yusuf Abdullah Musthofa	*Secretary of the Supervisory Board*

Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-222/MBU/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Nomor: SK-196/MBU/06/2020 tanggal 11 Juni 2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: SK-350/MBU/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: SK-301/MBU/09/2021 tanggal 9 September 2021 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-420/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Directors

Based on the Decree of the Minister of SOE Number: SK-222/MBU/08/2018 dated August 1, 2018 concerning Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, Number: SK-196/MBU/06/2020 dated June 11, 2020 regarding Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: SK-350/MBU/10/2020 dated October 27, 2020 concerning Dismissal and Appointment of the President Director of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and Number: SK-301/MBU/09/2021 dated September 9, 2021 concerning Changes in Position Nomenclature and Transfer of Duties of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Number: SK-420/MBU/12/2021 dated December 29, 2021 concerning Dismissal, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, composition of the Board of Directors on December 31, 2023 and 2022 as follows:

	2023	2022	
Direktur Utama	Imam Santoso	Imam Santoso	*President Director*
Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Manajemen Risiko	Indriani Widiastuti	Indriani Widiastuti	*Director of Finance Human Resources (HR) and Risk Management*
Direktur Operasi dan Pemeliharaan	Anton Mardiyono	Anton Mardiyono	*Director of Operating and Maintenance*
Direktur Pengembangan Usaha	Dikdik Permadi Yoffana	Dikdik Permadi Yoffana	*Director of Business Development*

Komite Audit
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: KEP-02/DEWAS/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 dan Nomor:KEP-04/DEWAS/XI/2022 tanggal 14 Oktober 2022, susunan keanggotaan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Audit Committees
Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II concerning the Dismissal and Appointment of the Chairman of the Audit Committee of Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Number: KEP-02/DEWAS/I/2021 dated January 29, 2021 and Number: KEP/DEWAS/XI/2022 dated October 14, 2022, the composition of the Audit Committee membership as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023	2022	
Ketua	Nuning Sri Rejeki W	Nuning Sri Rejeki W	*Chairman*
Anggota	Emirio Fajar	Emirio Fajar	*Member*
Anggota	Agus Waluyo	Agus Waluyo	*Member*

Komite Pemantau Manajemen Risiko
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta II Nomor: KEP-84/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua Komite Pemantau Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dan Nomor: KEP-85/DEWAS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Risk Management Monitoring Committee
Based on the Decree of the Supervisory Board of Perum Jasa Tirta II Number: KEP-84/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of the Chairman of the Risk Monitoring Committee of Public Company (Perum) Jasa Tirta II and Number: KEP-85/DEWAS/XI/2020 dated November 5, 2020 regarding the Appointment of Members of the Risk Management Monitoring Committee for Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, the composition of the membership of the Risk Management Monitoring Committee on December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023	2022	
Ketua	Romy Marcandi	Romy Marcandi	*Chairman*
Anggota	Kandianawati	Kandianawati	*Member*

e. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah SDM Perusahan terdiri dari (tidak diaudit):

e. Human Resources (HR)
As of December 31, 2023 and 2022, the total HR of the Company consists of (unaudited):

	2023	2022	
Organik	1,042	1,049	*Organic*
Non Organik	1	2	*Non Organic*
Jumlah	**1,043**	**1,051**	***Total***

f. Struktur Grup

Pada laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai "Grup". Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, struktur Grup adalah sebagai berikut:

f. Group Structure

In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as "the Group". As of December 31, 2023 and 2022 the structure of the Group is as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Lokasi/ *Location*	Kegiatan Usaha/ *Scope of Business*	Tahun Berdiri/ *Year of Establishment*	Persentase Kepemilikan dan Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ *Percentage of Ownership and Total Assets Before Elimination*			
				2023		2022	
				%	Rp	%	Rp
Dikonsolidasi/ *Consolidated*							
Kepemilikan Langsung/ *Direct Ownership*							
PT Jasa Tirta Luhur	Bekasi	Jasa Sistem Penyediaan Air Minum dan Konstruksi/ *Drinking Water Supply System Service and Construction*	2018	99.00%	77,649,689,527	99.00%	60,621,444,591
Kepemilikan Tidak Langsung Melalui Entitas Anak/ *Indirect Ownership Through Subsidiaries*							
PT Tegar Mandiri Cemerlang	Bekasi	Industri dan Pengelolaan Air/ *Industry and Water Management*	2013	51.00%	41,646,803,261	51.00%	44,803,388,902

Kepemilikan Langsung

PT Jasa Tirta Luhur (JTL)

PT Jasa Tirta Luhur didirikan berdasarkan Akta No. 46 tanggal 29 Agustus 2018, dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya No. AHU-0042191.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018. Akta Pendirian ini mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 155 tanggal 11 Mei 2021 dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor tentang pengalihan saham PT Pilar Jati Persada ke PT Air Sumber Kemakmuran. Perubahan ini telah diterima pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-0308897 tanggal 17 Mei 2021.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan atau Kerjasama Operasional No: 7 tanggal 2 September 2022 dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, notaris di Bogor, Perusahaan sepakat untuk membentuk Kerjasama Operasi dengan PT Air Sumber Kemakmuran dengan nama Jasa Tirta Luhur JO Air Kemakmuran. Keikutsertaan modal (*sharing*) dalam Kerjasama Operasi adalah 60% untuk Perusahaan dan 40% untuk PT Air Sumber Kemakmuran, dimana masing

Direct Ownership

PT Jasa Tirta Luhur (JTL)

PT Jasa Tirta Luhur was established based on Deed No. 46 dated August 29, 2018, from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notary in Bogor and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights through its decree No. AHU-0042191.AH.01.01 Year 2018 dated September 5, 2018. This Deed of Establishment has been amended several times, most recently by Deed No. 155 dated May 11, 2021 from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notary in Bogor regarding the transfer of shares of PT Pilar Jati Persada to PT Air Sumber Kemakmuran. Notification of this change has been received from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-AH.01.03-0308897 dated May 17, 2021.

Based on the Deed of Partnership Agreement or Joint Operation No. 7 dated September 2, 2022 from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, a Notary in Bogor, the Company agreed to form a Joint Operation with PT Air Sumber Kemakmuran under the name of Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber Kemakmuran. Capital participation (sharing) percentage in this Joint Operation is 60% for the Company and 40% for PT Air Sumber Kemakmuran, where each participant

masing peserta akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari Kerjasama Operasi.

will take part according to the sharing percentage in terms of expenses, profits and losses from the Joint Operation.

Kepemilikan Tidak Langsung

PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC)

PT Tegar Mandiri Cemerlang didirikan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 16 Mei 2013, dari Soeleman Odang, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusannya No. AHU-44847.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 27 Agustus 2013. Akta Pendirian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 08 tanggal 6 Agustus 2020, dari Henry Susanto, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Karawang tentang Perubahan Maksud dan Tujuan Perseroan. TMC beroperasi sejak Agustus 2018.

Indirect Ownership

PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC)

PT Tegar Mandiri Cemerlang was established based on Deed No. 16 dated May 16, 2013, of Soeleman Odang, Notary in Jakarta and has received approval from the Minister of Law and Human Rights through his decree No. AHU-44847.AH .01.01. Year 2013 dated August 27, 2013. The Deed of Establishment was amended several times, most recently with Deed No. 08 dated August 6, 2020, of Henry Susanto, S.H., M.Kn, Notary in Karawang Regency regarding Changes in the Purposes and Objectives of the Company. TMC has been operating since August 2018.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2. Information of Material Accounting Policies

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup. Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap semua tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Group. These policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

a. Compliance with the Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK - IAI).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

b. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generallybased on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup. Setiap entitas di dalam Grup mengatur mata uang fungsional itu sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

The consolidated statement of cash flow is presented based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group. Each entity in the Group manages the functional currency itself and the elements in the financial statements of each entity are measured based on the functional currency.

c. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintesikan";
- Amendemen PSAK 25: "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal"; dan
- Revisi PSAK 107: "Akuntansi Ijarah".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

c. New and Revised Statements and Interpretation of Financial Accounting Standards Effective in the Current Year

The following are amendments and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2023, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 1: "Presentation of Financial Statements regarding Disclosure of Accounting Policies";*
- *Amendments PSAK 1: "Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as a Current or Non-Current";*
- *Amendments PSAK 16: "Fixed Assets regarding Yield Before Intended Use";*
- *Amendments PSAK 25: "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors regarding Definition of Accounting Estimates";*
- *Amendments PSAK 46: "Income Tax regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction"; and*
- *Revised PSAK 107: "Accounting for Ijarah".*

The implementation of these standards does not result in substantial changes to the Group's accounting policies and has no significant impact on the consolidated financial statements in the current period or the previous year.

d. Penerapan Amendemen PSAK 46 tentang Pajak Penghasilan

Grup telah menerapkan amendemen PSAK 46: "Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal" secara retrospektif dengan

d. Application of Amendment to PSAK 46 regarding Income Tax

The Group has implemented amendments to PSAK 46: "Income Taxes regarding Deferred Taxes related to Assets and Liabilities arising from Single Transactions" retrospectively by

menyajikan kembali pada pengungkapan pajak tangguhan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 (Catatan 17) dengan dampak sebagai berikut:

restating in the disclosure of deferred tax for the year ended December 31, 2022 (Note 17) with the following impacts:

	31 Desember 2022/ *December 31,2022*			
	Sebelum Penyajian Kembali/ *Before Restate* Rp	Penyesuain/ *Adjustments* Rp	Setelah Penyajian Kembali/ *After Restate* Rp	
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan Perusahaan				***Deferred Tax Assets (Liabilitias) The Company***
Liabilitas Sewa	41,523,557	1,399,576,097	1,441,099,654	*Lease Liabilities*
Aset Hak-Guna	--	(1,399,576,097)	(1,399,576,097)	*Right-of-Use Assets*
Jumlah	**41,523,557**	**--**	**41,523,557**	***Total***
Entitas Anak				***The Subsidiaries***
Liabilitas Sewa	2,512,174	1,780,630,041	1,783,142,215	*Lease Liabilities*
Aset Hak-Guna	--	(1,780,630,041)	(1,780,630,041)	*Right-of-Use Assets*
Jumlah	**2,512,174**	**--**	**2,512,174**	***Total***

e. Prinsip - Prinsip Konsolidasian

Entitas anak merupakan semua entitas, dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan suatu entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasi sejak tanggal pengendalian beralih kepada Grup dan tidak lagi dikonsolidasi sejak tanggal hilangnya pengendalian.

Saldo, transaksi, penghasilan dan beban intra grup dieliminasi. Keuntungan dan kerugian hasil dari transaksi intra grup yang diakui dalam aset juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak telah diubah seperlunya untuk memastikan konsistensi penerapan kebijakan oleh Grup.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan nonpengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

e. Principles of Consolidation

Subsidiaries are all entities, over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity.

Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to the Group. They are de-consolidated from the date when that control ceases.

Intragroup balances, transactions, income and expenses are eliminated. Profits and losses resulting from intragroup transactions that are recognized in assets are also eliminated. The accounting policies of subsidiaries have been amended where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

The Group attributed the profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent entity.

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayarkan dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non-pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Transactions with non-controlling interests that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiaries is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group losses of control, the Group will:

a) Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;

a) Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries at their carrying amounts at the date when control is lost;

b) Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan nonpengendali);

b) Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiaries at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);

c) Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;

c) Recognizes the fair value of the consideration received (if any) from the transaction, event or circumstances that resulted in the loss of control;

d) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;

d) Recognizes any investment retained in the former subsidiaries at fair value at the date when control is lost;

e) Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak;

e) Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAKs, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiaries;

f) Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

f) Recognizes any resulting difference as a gain or loss in profit or loss which attributable to the parent.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

f. Transactions with Related Parties
A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

i. Has control or joint control over the reporting entity;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

ii. Has significant influence over the reporting entity; or

iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

   i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);

   ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);

   iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;

   iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

   v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;

   vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);

   vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).i memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

   viii. Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:

   i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiaries and fellow subsidiaries is related to the others);

   ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);

   iii. Both entities are joint ventures of the same third party;

   iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

   v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;

   vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

   vii. A person identified in (a).i has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity); or

   viii. The entity or any members of a group of which it is a part, provides key management personel service to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the State Minister for State Owned Enterprises as a shareholder's representative.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

g. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang mana investor memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpatisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

g. Investments in Associates

An associate is an entity in which the investor has significant influence. Significant influence is the power to participate in financial and operating policy decisions investee, but not control or joint control over those policies.

Jika entitas memiliki secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara *investee*, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika entitas memiliki, secara langsung mapun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara *investee*, maka entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi entitas untuk memiliki pengaruh signifikan.

If the entity has directly or indirectly (e.g through subsidiaries), 20% or more of the voting power of the investee, it shall be deemed to have significant influence, unless it can be clearly demonstrated that the entity does not have significant influence. Conversely, if an entity has, directly or indirectly (e.g through subsidiaries), less than 20% of the voting rights investee, it shall be considered not to have significant influence, unless such a significant influence can be clearly demonstrated. Substantial or majority ownership by another investor does not preclude an entity to have a significant influence.

Penyisihan kerugian penurunan nilai atas penyertaan saham dibentuk apabila berdasarkan pendapat manajemen terdapat penurunan nilai secara permanen atas nilai penyertaan.

The allowance for impairment losses on investments in shares is made when in the opinion of the management, there is a permanent decline in the value of the investment.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi. Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Investment in associates accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount plus or minus to recognize the investor's share of the profit or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognized in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment. Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate interest in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of property, plant and equipment and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

a. Jika *investee* menjadi entitas anak.

b. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.

c. Ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

a. If the investee becomes a subsidiaries.

b. If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.

c. When the Group discontinue the use of the equity method, the Group account for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.

h. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh atau menerbitkan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan untuk memperoleh aset keuangan dan menerbitkan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

h. Financial Instruments

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position when and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures financial assets and financial liabilites, at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not measured at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, serta aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar, yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial assets.

i. Financial Assets Measured at Amortized Costs
A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan

b. Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest* - SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")
Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

a. The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and

b. Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")
The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

a. The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial asset; and

b. The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flow that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income, except for impairment losses and gain or loss on foreign exchange, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")
Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

iii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")
Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or FVTOCI. Hence, these are measured at FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designated an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as measured at FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

i. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.

i. Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.

ii. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.

iii. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitment selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

a. Jumlah penyisihan kerugian dan
b. Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.

iv. Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

i. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai *"accounting mismatch")* yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau

ii. Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk

ii. Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.

iii. Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:

a. The amount of the loss allowance and
b. The amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 72.

iv. Contingent consideration recognized by an acquirer in a business combination to which PSAK 22 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

The Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

i. It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

ii. A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed, and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or nvestment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities
The Group derecognized a financial asset when and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive

menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Group transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group derecognize the financial asset and recognize separately as asset or liabilities for any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Group neither transfers nor retains substantially all risks and benefits of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continue to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

The Group removes a financial liability when and only when, it is extinguished, i.e. when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Impairment of Financial Assets

Group recognize expected credit loss for its financial assets measured at amortized cost.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition.

Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Grup mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss (stage 1) is recognized.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual

kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

period over which the Group is exposed to credit risk.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income. The expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

The expected credit loss of financial intruments are conducted by a means which reflect:

i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;

i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;

ii. Nilai waktu uang; dan

ii. Time value of money; and

iii. Informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an

keuangan dengan peringkat *"investment grade"* berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

increase in significant credit risk since initial recognition.

Metode Suku Bunga Efektif
Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasikan arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak - pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

The Effective Interest Method
The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets of financial liabilities) and method of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an intergral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reklasifikasi
Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset keuangan jika dan hanya jika, terjadi perubahan model bisnis.

Reclassification
The Group can reclassify all its financial assets if and only if, a change in the business model.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka Perusahaan menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Grup tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTPL, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi. Pada saat Grup melakukan reklasifikasi sebaliknya, yaitu dari aset keuangan kategori FVTPL menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, maka

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi. Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan sebaliknya, yaitu keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification. Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost. This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL, the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to sell off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasikan untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengakuan dapat diobservasi dan signifikan input tehadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

i. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

ii. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);

iii. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apablia nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

i. Quotation price (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);

ii. Inputs other than quotation prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);

iii. Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, Group uses valuation techniques that appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

i. Kas dan Setara Kas
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposits with maturity of 3 (three) months or less from the placement date and are not pledged as collateral and are not restricted.

j. Piutang Retensi
Piutang retensi merupakan piutang Grup kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak. Piutang retensi

j. Retention Receivable
Retention receivable represents the Group's receivable from owner of the project which will be paid after completion of the contract or fulfillment of certain condition in the contract.

dicatat pada saat pemotongan sejumlah persentase tertentu dari setiap tagihan termin untuk ditahan oleh pemberi kerja sampai suatu kondisi setelah penyelesaian kontrak dipenuhi.

Retention receivable is recorded when certain percentage deduction is applied in every invoice which retained by the owner of the project until certain condition after completion of the contract has been met.

k. Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya
Setara kas yang dibatasi penggunaannya adalah penempatan kas di bank yang digunakan atas tantiem yang ditangguhkan selama 3 tahun.

k. Restricted Cash Equivalents
Restricted cash equivalents are placement of cash in a bank that is used as deferred bonus for 3 years.

l. Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja
Tagihan bruto dari pemberi kerja merupakan piutang yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan untuk pemberi kerja namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan.

l. Gross Amount Due From Customer
Gross amount due from customer is receivable arising from construction contracts undertaken for the customers while the work undertaken is in progress.

Tagihan bruto dari pemberi kerja diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode persentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara pekerjaan, dimana faktur belum dapat ditagihkan karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (*progres*) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the consolidated statements of financial position date.

m. Persediaan
Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan terdiri dari seluruh biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan metode FIFO (*first in, first out*). Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

m. Inventories
Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprises all costs incurred in bringin the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the FIFO (first in, first out) method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan fisik persediaan pada akhir periode.

Allowance for decrease in value of inventory is provided based on the physical check of inventory at the end of the period.

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognizes as an expense in the period in which the reversal occurs.

n. Pembayaran di Muka
Pembayaran di muka terdiri atas biaya dibayar di muka dan uang muka.

n. Prepayments
Prepayments consist of prepaid expenses and advances.

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Prepaid expenses represent expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more.

Biaya dibayar di muka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan Grup untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

Advances are an amount of cash out or costs incurred by the Group for an activity or something that will be accounted for within a specified and predetermined time.

o. Aset Tetap

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

o. Fixed Assets

The initial of acquisition cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the fixed assets to its working condition and location for its intended-on use.

Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat *(carrying amount)* aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

The cost includes the cost of replacing part of the fixed asset when the cost occurs, if it meets the recognition criteria. Further, when a significant inspection is performed, the cost of the inspection is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if it meets the recognition criteria. All maintenance and repair costs that do not meet the ecognition criteria are recognized in the statement of income as incurred.

Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

The Group has chosen to use the cost model as the accounting policy for the measurement of its fixed assets.

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada.

Fixed assets, except land and landrights, are stated at acqusition cost less any accumulated depreciation and impairment losses, if any.

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

The carrying values of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Grup yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode Kerjasama Operasi (KSO).

The joint operation assets are the Group's land used to conduct joint operation activities. The office buildings acquired as compensation in the joint operation and the related earnings in advanced are recognized when the assets are completed and ready for its intended use. Unearned income is recognized during the period of Joint Operation (JO).

Aset dan aset KSO dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Assets and the joint operation (JO) assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumtances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognized)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

The carrying amount of fixed asset is derecognized at the time of disposal or when no future economic benefit is expected from its use or disposal. Fixed asset sold or disposed of, are removed from the accounts with the accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses associated with fixed asset. Gains or losses arising from the termination of recognition of fixed assets are determined at the difference between the net amount of disposal proceeds, if any, and the carrying amount of fixed assets and recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in the year of the cessation of the recognition.

Biaya kemudian setelah biaya perolehan pertama kali

Costs then after the first acquisition costs

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

The cost of maintenance and repairs is charged as an expense when incurred. Expenditures which extend the useful life of an asset or provide further economic benefits by increasing the capacity or quality of production of the asset, are capitalized and depreciated based on the applicable depreciation rate.

Penyusutan

Depreciation

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis yang menghasilkan persentase penyusutan tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

Depreciation starts at commencement of assets or when the assets are ready to use, using the straight-line method based on the estimated useful lives of the economies resulting in an annual percentage of depreciation of the following cost:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat Ekonomis/ *Economic Useful Life* (Tahun/*Year*)	*Group of Assets*
Bangunan	10-50	*Buildings*
Sarana	10-20	*Facilities*
Instalasi dan Jaringan	2-20	*Installations and Networks*
Suku Cadang Penyangga	4-10	*Supporting Spareparts*
Perabotan dan Peralatan	4-5	*Furnitures and Equipments*
Alat Angkut dan Alat Berat	4-5	*Vehicles and Heavy Equipments*
Tanaman Konservasi	40	*Plant Conservation*

Aset Dalam Pelaksanaan (ADP)
Aset dalam pelaksanaan dinyatakan sebesar biaya perolehan sesuai persentase penyelesaian pekerjaan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Ketika telah selesai dan siap digunakan, akumulasi biaya perolehan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sebenarnya.

Assets Under Construction (ADP)
Assets under construction are stated at acquisition cost based on the percentage of completion and presented as a part of of fixed assets. Once it is completed and ready to use, accumulated acquisition costs are reclassified to the actual fixed assets account.

Aset Tanaman Konservasi
Merupakan tanaman hidup yang digunakan dalam rangka konservasi yang jangka waktu tanamannya lebih dari 1 (satu) periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidensial.

Plant Conservation Assets
Represents plants used in the context of conservation by which the plant period is more than 1 (one) period and have very rare possibilities to be sold as agricultural products, except for residual sales that are insidential.

Tanaman konservasi terdiri dari:

Plant conservation assets consist of:

- **Tanaman Konservasi – Dewasa**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian tidak memerlukan lagi biaya untuk menunjang pertumbuhan yang bersangkutan. Dengan demikian, segala pengeluaran yang berkenaan dengan Tanaman Konservasi – Dewasa (jika ada) diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan tanaman.

- ***Conservation Plants – Mature**, is conservation plants that technically do not require more agricultural costs to support the growth of the plants. Thus, all expenses in relation to Conservation Plants - Mature (if any) are classified as plant maintenance expenses.*

- **Tanaman Konservasi – Dalam Pertumbuhan**, yaitu tanaman konservasi yang secara teknis pertanian masih memerlukan pembiayaan dalam rangka pertumbuhan biologis sampai dengan tanaman tersebut menjadi dewasa. Biaya yang timbul meliputi biaya perolehan bibit, penyemaian, penanaman, pemupukan, biaya penjagaan/pengamanan dan biaya-biaya pertumbuhan tanaman lainnya sampai dengan tanaman tersebut siap menjadi dewasa (*mature*).

- ***Conservation Plants – In Growth**, is conservation plants that are in agricultural technical still need financing to support biological growth until the plants mature. Costs incurred include costs for obtaining seedlings, seeding, planting, fertilizing, safeguarding costs, and costs for the growth of other plants until they are ready to mature.*

Aset Tidak Produktif/ Tidak Berfungsi
Merupakan aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif/ tidak berfungsi dan disajikan pada aset tidak lancar lainnya.

Non-Productive/ Non-Functioning Assets
Represents fixed assets that do not provide benefits in production activity, or no future economic benefits are expected from the use or disposal of assets are classified as non-productive/ non-functioning and are presented in other non-current assets.

Aset tidak produktif/ tidak berfungsi dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Non-productive/ non-functioning assets will be impaired at its carrying amount at the time those assets are no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non-productive assets is formed as the application of the accounting of impairment.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

The write-off and the alienation of fixed assets is in accordance with the regulation designated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and Alienation of Fixed Assets of State-Owned Enterprises.

Aset tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham.

Non-productive assets are derecognized when write-off approval from the Board of Commissioners and/or Shareholders has been received.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

Any gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group income or other expenses.

Reviu atas Masa Manfaat Aset dan Nilai Sisa

Grup menerapkan besaran nilai residu setiap jenis aset tetapnya yaitu Rp1.000.

Taksiran masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan direviu minimal setiap akhir tahun buku dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi diterapkan secara prospektif.

Review of Useful Lives of Assets and Residual Value

The Group applies the residual value of each type of fixed asset at Rp1,000.

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at least every year end and the effect of any changes in accounting estimate are applied on a prospective basis.

Aset Kelola

Aset kelola adalah aset berwujud milik negara yang digunakan dalam aktivitas operasi Grup, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Grup, tetapi tidak dicatat sebagai harta Grup sesuai kebijakan pemerintah. Aset kelola terdiri dari sungai, waduk, bendungan, saluran induk, tanggul, jalan inspeksi, stasiun pompa air Curug, *tower Morning Glory* dan *minihydro* PLTA.

Managed Assets

Managed assets represent stated-owned tangible assets that is used in the Group's operational activities, not intended for sale in the Group's normal activities nor recorded as the Group's assets in accordance with government policy. Managed assets consist of rivers, reservoirs, dams, primary canal, levees, inspection road, Curug pumping station, Morning Glory tower and HEPP minihydro.

p. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari perangkat lunak (*software*) dan lisensi. Aset takberwujud diakui jika kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

p. Intangible Assets

Intangible assets consist of software and license. An intangible asset is recognized when it is probable that the Group will obtain future economic benefits from the intangible asset and the cost of the asset can be measured reliably.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their estimated useful lives. The Group estimates the recoverable amount of an intangible assets.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud, di

Softwares are amortized using the straight-line method based on the estimated useful lives of the intangible assets, whereas software are

mana untuk perangkat lunak (*software*) diamortisasi selama 4 (empat) tahun tanpa nilai residu, sedangkan untuk lisensi diamortisasi selama 10 (sepuluh) tahun tanpa nilai residu sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tanggal 2 April 2018 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Barang Aset Takberwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

amortized for 4 (four) years with no residue value, while for licenses are amortized for 10 (ten) years with no residual value according to the Decree of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 81/KM.6/2018 concerning Amendments to the Decree of Minister of Finance Number 620/KM.6/2015 dated April 2, 2018 concerning Useful Lives in the Context of Amortization of State-Owned Property in the Form of Intangible Assets in Central Government Entities.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

An intangible asset is derecognized when the asset is disposed of or when no future economic benefits are expected from the use or disposal of the asset. The difference between the carrying amount of the asset and the net proceeds received from disposal is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas di masa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

q. Deferred Revenue

Deferred revenue are money received from other parties in relation to the services of products that will be performed by entities in the future, but the services have yet delivered to that party.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup mengakui pendapatan sesuai dengan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", dengan melakukan analisis transaksi melalui metode lima langkah pengakuan pendapatan sebagai berikut:

i. Identifikasi kontrak dengan pelanggan dengan kriteria sebagai berikut;
   - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
   - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan
   - Kontrak memiliki substansi komersial
   - Besar kemungkinan Grup akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan

ii. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;

r. Revenue and Expense Recognition

The Group recognizes revenues in accordance with PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", by performing transaction analysis through the five steps of income recognition model as follows:

i. Identify contract(s) with a customer with certain criteria as follows:
   - *The contract has been agreed by the parties involved in the contract*
   - *The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred*
   - *The contract has commercial substance*
   - *It is probable that the Group will receive benefits for goods or sevices which is diverted.*

ii. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;

iii. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;

iii. Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;

iv. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah marjin;

iv. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost-plus margin;

v. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

v. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).

Dengan terpenuhi lima kriteria seluruhnya tersebut di atas, Grup mengakui pendapatan sebagai berikut:

With all of five criterias above are fulfilled, the Group recognizes revenue as follows:

i. Pendapatan Listrik diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan yang menghasilkan jumlah tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.

i. Electricity Revenue is recognized when the Minutes of Monthly Electricity Usage multiplied by a predetermined rate which resulted in the amount of bills to be paid by the customer.

ii. Pendapatan Air diakui pada saat dibuat Berita Acara Pemakaian Bulanan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan atau tagihan yang harus dibayar oleh pelanggan.

ii. Water Revenue is recognized when Minutes of Monthly Usage are made multiplied by a predetermined rates or charges to be paid by the customer.

iii. Pendapatan Konstruksi diakui sepanjang waktu kontrak yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada keadaan fisik kemajuan pekerjaan. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

iii. Construction Revenue is recognized over time which accounted for using the percentage of completion method. Under this method, the revenue recognized equals the latest estimate of the total value of the contract multiplied by the actual completion rate determined by reference to the physical state of progress of the works. The loss is provided for in full as soon as it is can be reliably measured, irrespective of the completion rate,

iv. Pendapatan Pariwisata diakui pada saat jasa tersebut diberikan atau dimanfaatkan oleh pengunjung pariwisata, setelah dikurangi kewajiban pajak dan pelayanan.

v. Pendapatan Pemanfaatan Lahan diakui saat timbulnya hak atas pemanfaatan lahan/ diterbitkan tagihan dan sebesar kas diterima sesuai masa sewa periode akuntansi, tidak termasuk pajak.

iv. Tourism Revenue is recognized when the services are provided or utilized by tourism visitors, net of tax liabilities and services.

v. Land Utilization Revenue is recognized when the right of utilization/ issuance of invoice and the amount of cash received according to the lease term for the accounting period, excluding tax.

Beban
Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada periode yang bersangkutan (*acrual basis*).

Expense
Expenses are recognized in accordance with the useful life of the period (accrual basis).

s. Program Imbalan Kerja
Imbalan Kerja Jangka Pendek
Imbalan kerja janga pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, jasa produksi, tantiem dan imbalan nonmoneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek diukur sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

s. Employment Benefit Plan
Short-Term Employee Benefits
Short-term employee benefits uch as wages, social security contributions, production service, tantiem and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Imbalan Pascakerja
Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarka Undang-undang Cipta Kerja No. 10/2020 untuk tahun 2023 dan 2022 atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), mana yang lebih tinggi.

Post-employment Benefits
Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on the Omnibus Law No. 10/2020 for the year 2023 and 2022 or Collective Labor Agreement (PKB), whichever is higher.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.* Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the deifned benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unt Credit method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit and loss.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses,the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Imbalan Jangka Panjang Lainnya
Grup memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk cuti besar dan penghargaan masa kerja. Perkiraan biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang hampir sama dengan metodologi yang digunakan dalam program imbalan pascakerja manfaat pasti, kecuali untuk keuntungan dan kerugian aktuaria yang diakui pada laba rugi.

Other Long-Term Benefits
The Group provides other long-term employee benefits in the form of grand leave and long service award. The expected costs of these benefits are accrued over the period of employment, using accounting methodology similar to that for post-employment defined benefit plans, except for actuarial gain and losses which is recognised in profit or loss.

Pesangon
Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

a. Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
b. Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Termination Benefits
The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

a. When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
b. When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 57 and involves payment of termination benefits.

t. Pajak Penghasilan
Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia

t. Income Tax
Tax expense is the aggregate amount included in the determinination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax

untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

losses and unused tax credits can be utilized.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

A deferred tax liability shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. Pengakuan awal *goodwill*; atau

a. The initial recognition of goodwill; or

b. Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

b. The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilised, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

a. Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan

b. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
   i. Entitas kena pajak yang sama; atau
   ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

a. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan

b. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

a. The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and

b. The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:
   i. The same taxable entity; or
   ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

a. Has a legally enforceable right to set off a recognized amount; and

b. Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

u. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)
Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar Keputusan/ Rapat Pembahasan Bersama direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian laba atau dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban *(expense)* melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

u. Use of Retained Earnings Based on Joint Discussion Meetings ("RPB")
The use of retained earnings on the basis of Decisions/ Minutes of Joint Discussion Meetings ("RPB") is realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to profit or dividends, employee costs and allowance for retained earnings to general reserves. Profit sharing is not treated as expense but rather as a distribution / deduction of retained earnings.

v. Sewa
Grup sebagai Penyewa
Pada permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

v. Lease
The Group as a Lessee
At inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup akan menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna pada saat di awal, diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa;
- Biaya langsung awal yang dikeluarkan; dan
- Estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa.

Untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau nonsewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai, jika ada.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group will assess whether:

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and*
- *The Group has the right to direct the use of the asset.*

At the commencement date of the lease, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liability. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises:

- *The initial amount of the lease liability;*
- *Lease payment made at or before the commencement date, less any lease incentive;*
- *Initial direct cost incurred; and*
- *An estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.*

For a contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

After the commencement date, the Group measures right-of-use assets at cost less any accumulated depreciation and any accumulated impairment losses, if any.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using

ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- Harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- Penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee;*
- *The exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and*
- *Penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.*

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liablitas sewa dengan:

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

- *Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- *Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- *Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Short-term leases and low-value leases

The Group has elected not to recognise right- of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and low-value leases. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

Lease modification

The Group accounts for a lease modification as a separate lease if:

- Modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan

- *The modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and*

- Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

- *The consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.*

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- Mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- Menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- Mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Pada tanggal efektif modifikasi, tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Grup untuk sisa masa sewa;
- Menurunkan jumlah tercatat aset hak- guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- Membuat penyesuaian terkait aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

- *Remeasures and allocates the consideration in the modified contract;*
- *Determines the lease term of the modified lease;*
- *Remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate. At the effective date of the modification, the revised discount rate is determined as the Group's incremental borrowing rate for the reminder of the lease term;*
- *Decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and*
- *Makes a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.*

Grup sebagai Pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Grup akan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak, maka merupakan sewa operasi.

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

The Group as a Lessor

When the Group acts as a lessor, it will classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease.

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership. A lease is classified as an operating lease if the lease does not transfer substantially all the risks and benefits related to ownership of the asset.

Klasifikasi sewa sebagai pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya. Contoh dari situasi yang secara individual atau gabungan dalam kondisi normal mengarah pada sewa yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa.
2. Penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.
3. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan.
4. Pada awal sewa nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan, dan;
5. Aset sewaan bersifat khusus dan dimana hanya lessee yang dapat menggunakannya tanpa perlu dimodifikasi secara material.

Indikator dari situasi yang secara individual atau gabungan dapat juga menunjukkan bahwa sewa diklasifikasikan sebagai pembiayaan adalah:

1. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka rugi pesewa yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh penyewa.
2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada penyewa (sebagai contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa), dan
3. Penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang secara subtansial lebih rendah dari nilai pasar sewa.

The classification of leases as financing or operating leases is based on the substance of the transaction and not on the form of the contract. Examples of situations that individually or in combination under normal conditions leading to leases classified as financing are:

1. *Leases transfer ownership of assets to the lessee at the end of the lease period.*
2. *The lessee has the option to purchase assets at a price that is quite low compared to the fair value at the date the option can be exercised so that at the beginning of the lease it is certain that the option will be implemented.*
3. *The lease period is for the majority of the economic life of the asset even though the ownership rights are not transferred.*
4. *At the beginning of the lease, the present value of the minimum lease payments is substantially close to the fair value of the leased asset, and;*
5. *Leased assets are special and where only the lessee can use them without needing to be modified materially.*

Indicators of situations that individually or collectively can also show that leases are classified as financing are:

1. *If the lessee can cancel the lease, the lessor's loss related to the cancellation is borne by the lessee.*
2. *Gains or losses from fluctuations in the fair value of residuals are charged to the lessee (for example, in the form of a discounted rental price and which is equivalent to the majority of the proceeds of residual sales at the end of the lease), and*
3. *The lessee can continue leasing for a second period with a rental value that is substantially lower than the rental market value.*

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Kritis

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgments

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir

The preparation of the Group' consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting

periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

a. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian untuk menilai piutang usaha dan piutang yang masih akan diterima dan pendekatan umum untuk menilai investasi jangka panjang. Nilai tercatat piutang usaha dan piutang yang masih akan diterima telah diungkapkan masing-masing dalam Catatan 6 dan 8.

a. Impairment of Financial Assets

The Group assesses impairment losses of financial assets at amortized cost at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgment as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. The Group applies simplified approach to measure accounts receivable and accrued revenue and general approach to measure long-term investments. The carrying amounts of accounts receivable and accrued revenue are disclosed in Notes 6 and 8.

b. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

b. Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Karena Grup tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management uses the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate,

menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

In determining the lease term, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Nilai tercatat liabilitas sewa disajikan di Catatan 25.

Carrying amount of lease liabilities is presented in Note 25.

c. Pajak Penghasilan

Perhitungan beban pajak penghasilan Grup memerlukan pertimbangan dan asumsi dalam menentukan pengurangan beban tertentu selama proses pengestimasian. Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen dapat dipertanyakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ("DJP").

c. Income Taxes

The calculations of income tax expense for the Group require judgements and assumptions in determining the deductability of certain expenses during the estimation process. All judgement and estimates made by management may be challenged by the Directorate General of Taxes ("DGT").

Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan pajak. Resolusi posisi pajak yang diambil oleh Grup, melalui negosiasi dengan otoritas pajak yang relevan dapat berlangsung bertahun-tahun dan sangat sulit untuk memprediksi hasil akhirnya. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. The resolution of tax position taken by the Group, through negotiations with the relevant tax authorities can take several years to complete and, in some cases, it is difficult to predict the ultimate outcome. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax reserve in the year in which this determination is made.

Penghasilan yang diperoleh Perusahaan dalam Grup kadang-kadang dapat dikenakan pajak final dan nonfinal. Penentuan penghasilan yang dikenakan pajak final dan non final dan juga biaya pengurang pajak sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan pajak non final memerlukan pertimbangan dan estimasi.

The revenue of the companies within the Group is sometimes also subject to both final and non-final income tax. Determining the amount of revenue subject to final and nonfinal tax as well as expenses relating to revenue from the non-final income tax regime requires judgments and estimates.

Aset pajak tangguhan, termasuk yang timbul dari rugi fiskal, penyisihan modal, dan perbedaan temporer lainnya, diakui hanya apabila dianggap lebih mungkin daripada tidak bahwa mereka dapat diterima kembali, dimana hal ini tergantung pada kecukupan pembentukan laba kena pajak di masa depan. Asumsi atas pembentukan laba kena pajak sangat dipengaruhi oleh estimasi dan asumsi manajemen atas tingkat produksi yang diharapkan, volume penjualan, harga komoditas, dan lain-lain, yang mana terpapar risiko dan ketidakpastian, sehingga ada kemungkinan perubahan estimasi dan asumsi akan mengubah proyeksi laba kena pajak di masa mendatang.

Deferred tax assets, including those arising from tax losses carried forward, capital allowances and other temporary differences, are recognised only where it is considered more likely than not that they will be recovered, which depends on the generation of sufficient future taxable profits. Assumptions about the generation of future taxable profits are heavily affected by Management's estimates and assumptions regarding the expected production levels, sales volume, commodity prices, etc, which are subject to risk and uncertainty, and hence there is a possibility that changes in circumstances will alter the projected future taxable profits.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

d. Liabilitas Imbalan Kerja

Nilai kini kewajiban pensiun tergantung pada sejumlah pensiun yang ditentukan berdasarkan basis dari aktuaria dengan menggunakan sejumlah asumsi. Asumsi yang digunakan dalam menentukan beban/(pendapatan) bersih untuk pensiun termasuk tingkat diskonto, perubahan remunerasi masa depan, tingkat pengurangan karyawan, tingkat harapan hidup dan periode sisa yang diharapkan dari masa aktif karyawan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat atas kewajiban pensiun.

d. Employee Benefits Liabilities

The present value of the pension obligation depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for pensions include the discount rate, future remuneration changes, employee attrition rates, life expectancy and expected remaining periods of service of employees. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of the pension obligation.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun. Tingkat suku bunga inilah yang digunakan untuk menentukan nilai kini dari estimasi arus kas keluar masa depan yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pensiun. Dalam menentukan tingkat diskonto yang sesuai, Grup menggunakan tingkat suku bunga obligasi korporat berkualitas tinggi (atau obligasi pemerintah, dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan memiliki waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo kewajiban pensiun yang bersangkutan.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the related pension obligation. In determining the appropriate discount rate, the Group considers using the interest rates of high quality corporate bonds (or Government bonds, if there is no deep market for high quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension obligation.

Asumsi kunci lainnya untuk kewajiban pensiun didasarkan sebagian pada kondisi pasar saat ini, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 26.

Other key assumptions for pension obligation benefits are based in part on current market conditions, as disclosed in Note 26.

e. Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud
Manajemen melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi fisik dan teknis serta perkembangan teknologi mesin dan peralatan di masa depan. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas (Catatan 15 dan 16).

e. Estimating the Useful Life of Fixed Assets and Intangible Assets
Management makes a periodic review of the useful lives of fixed assets and intangible assets based on several factors such as physical and technical conditions and development of equipment technology in the future. The results of future operations will be materially influenced by the change in estimate as caused by changes in the factors mentioned above (Notes 15 and 16).

4. Perizinan dan Aset yang Diserah Operasikan

4. Licensing and the Assets Handed-over Operations

Pemanfaatan sumber daya air (SDA) oleh pelanggan harus memiliki Surat Ijin Penggunaan Sumber Daya Air (SIPSDA) untuk menggunakan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2019, tentang Sumber Daya Air, pada pasal 10 dinyatakan, bahwa: Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) bertugas, yang salah satunya sebagaimana tersebut pada huruf-f, yaitu menyelenggarakan progres perijinan penggunaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis nasional. Penerbitan SIPSDA tersebut kepada para pelanggan harus mendapat rekomendasi dari Perusahaan bilamana memanfaatkan aliran sungai Citarum. Dengan belum dimilikinya SIPSDA oleh pelanggan dari Perusahaan, mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya dapat ditagihkan bilamana SIPSDA tersebut telah terbit.

The use of water resources (SDA) by customers must have a Water Resources Usage Permit (SIPSDA) to use water resources in accordance with the provisions of the Indonesian Republic Law No. 17 Year 2019, regarding Water Resources, Article 10 states, that: In regulating and managing Water Resources, the Central Government as referred to in article 9 paragraph (1) is in charge, one of which is as referred to in letter-f, namely carrying out progress licensing for the use of water resources in transnational river areas, interprovincial river areas and nationally strategic river basins. The issuance of the SIPSDA to customers must obtain a recommendation from the Company when utilizing the Citarum river flow. By not having SIPSDA by customers from the Company, it has resulted in a loss of potential revenue that could have been billed if the SIPSDA had been published.

Untuk melakukan penjualan listrik, maka Perusahaan seharusnya memiliki Surat Ijin Usaha Pengusahaan Tenaga Listrik (SIUPTL) sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2012, tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pasal 31 ayat (3) yang menyebutkan Penjualan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya, tentunya dengan rekomendasi dari PT PLN (Persero); dan oleh karena itu salah satu sumber pendapatan perusahaan adalah jasa penjualan listrik, baik ke industri swasta dan PLN.

In order to sell electricity, the Company should have an Electricity Concession Business License (SIUPTL) in accordance with the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 14 Year 2012, concerning the Business Activities of Electricity Supply Article 31 paragraph (3) which states that Sales as mentioned in paragraph (1) must obtain approval from the Minister, Governor or Regent/ Mayor in accordance with their authority, of course with a recommendation from PT PLN (Persero); and therefore, one of the company's revenue sources is electricity sales services, to both private industry and PLN.

Bahwa salah satu pendapatan usaha Perusahaan adalah dari penyewaan lahan dimana atas kawasan/ wilayah kerja Perusahaan yang disewakan kepada pihak lain, bahwa sebagian belum memiliki legalitas kepemilikan berupa Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Meskipun demikian, beberapa lahan telah dimiliki perusahaan dengan adanya sertifikat HGB.

Whereas one of the Company's business revenues is from land leasing where the working area / area of the Company is leased to other parties, that some of them do not have legal ownership in the form of Land Management Rights (HPL). However, some of the land has been owned by the company with the HGB certificate.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/KPTS/1994, tanggal 8 Pebruari 1994, tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara yang Dikelola oleh Perusahaan Umum (Perum) Otoritas Jatiluhur, dimana Perusahaan dalam aktivitas usahanya sebagai pengelola barang di kawasan tersebut maka ditunjuk/ ditetapkan sebagai Pengurus Barang atas penyerahan barang inventaris sesuai Daftar Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan. Dalam surat keputusan tersebut bahwa status kepemilikan barang inventaris tersebut tetap berada pada Departemen Pekerjaan Umum c.q. Ditjen Pengairan.

In accordance with the Decree of the Minister of Public Works No.39/KPTS/1994, dated February 8, 1994, concerning the Determination of the Amount and Types of State Property/ Property Inventory that are Managed by the Public Company (Perum) of the Jatiluhur Authority, where the Company in its business activities as the goods manager in the area is then appointed/ stipulated as the Goods Manager for the delivery of the inventory items in accordance with the State Property/ Property Inventory List within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation. The decree states that the ownership status of the inventory items remains with the Department of Public Works c.q. Directorate General of Irrigation.

Beberapa jenis barang yang masuk dalam Daftar Barang Inventaris Kekayaan/ Milik Negara di lingkungan Ditjen Irigasi I – Ditjen. Pengairan sebagai berikut:

Several types of goods are included in the Inventory List of Wealth/ State Owned Goods within the Directorate General of Irrigation I - Ditjen. Irrigation as follows:

- Tanah persil bangunan gedung: 104.216.865 m^2;
- Tanah persil bangunan bukan gedung: 16.342.481.898 ha;
- Bangunan gedung tempat kerja;
- Bangunan gedung tempat tinggal: 39 BH.

- *Building parcel land: 104,216,865 sqm;*
- *Building parcel land not building: 16,342,481,898 ha;*
- *Workplace building;*
- *Residential buildings: 39 BH.*

Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tersebut maka, Perusahaan tidak dapat mencatatkan ke dalam buku / daftar aset tetap atau aset lainnya, mengingat hanya sebagai Pengurus Barang. Dilain pihak optimalisasi pemanfaatan aset di kawasan bendungan Jatiluhur, secara fisik tidak dapat dipisahkan dengan aset-aset tersebut diatas dimana Perusahaan sebagai Pengurus Barang, sekaligus memberikan kepastian hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

With the existence of the Decree of the Minister of Public Works, the Company cannot record it in the book / list of fixed assets or other assets, considering that it is only a Goods Manager. On the other hand, optimizing the use of assets in the Jatiluhur dam area, physically it cannot be separated from the assets mentioned above, where the Company as the Goods Manager, while providing legal certainty in accordance with applicable regulations.

HPL bukan merupakan hak atas tanah, dan tidak diatur dalam UU Pokok Agraria, tetapi dalam:

HPL is not a right to land, and is not regulated in the Basic Agrarian Law, but in:

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1953, tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara; dan

- *Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 8 Year 1953, concerning Control of State Lands; and*

- Permen. Agraria / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; dan
- Ketentuan – Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.

HPL tidak mempunyai jangka waktu kepemilikan dan diberikan hanya atas tanah negara yang dikuasai oleh PEMDA, BUMN dan BUMD yang bertujuan untuk mengontrol *zoning* dan *land use*, agar sesuai dengan perencanaan tata ruangnya.

Diatas HPL masih dapat diletakkan Hak atas Tanah, antara lain:

- Hak Guna Bangunan (“HGB”);
- Hak Guna Usaha (“HGU”); dan
- Hak Pakai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40, Tahun 1996 menyatakan bahwa, di atas tanah HPL dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah, yaitu:

- Hak Guna Bangunan (“HGB”); dan
- Hak Pakai (“HP”).

HGB atau HP yang berada di atas tanah HPL diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul (rekomendasi) dari Pemegang HPL kepada calon pemegang HGB / HP.

Tanah-tanah Hak Pengelolaan, yaitu tanah negara yang dikuasai dengan Hak Pengelolaan, yang merupakan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan hak menguasai dari negara kepada pemegang haknya.

Dalam Permeneg Agraria / Kepala BPN No. 9 TH.1999, tanggal 24 Oktober 1999, tentang Tata-cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Pasal-67, dinyatakan bahwa:

1. Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada:
   a. Instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah;
   b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
   c. Badan Usaha Milik Daerah;
   d. PT Persero;
   e. Badan Otorita;
   f. Badan-badan hukum Pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

- *Permen. Agraria / Head of BPN No. 9 Year 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights; and*
- *Terms of the Further Policy.*

HPL does not have a period of ownership and is given only to state land controlled by the local government, state-owned enterprises and local-owned enterprises with the aim of controlling zoning and land use, so that it is in accordance with their spatial planning.

Above the HPL can still be placed the Right to Land, among others:

- *Building Use Rights (“HGB”);*
- *Business Use Rights (“HGU”); and*
- *Right of Use.*

Based on Government Regulation (PP) No. 40, Year 1996 states that, HPL land can be granted or charged with land rights, namely:

- *Building Use Rights (“HGB”); and*
- *Right of Use (“HP”).*

HGB or HP that is on HPL land is granted by a decision to grant rights by the Minister or an appointed official based on a recommendation (recommendation) from the HPL Holder to the prospective HGB / HP holder.

Management Rights Land, namely state land controlled with Management Rights, which is the delegation of the exercise of part of the authority over the right to control from the state to the right holders.

In Permeneg Agraria / Head of BPN No. 9 TH.1999, dated 24 October 1999, concerning Procedures for Granting and Cancellation of Rights to State Land and Management Rights, Article 67, states that:

1. Management rights can be granted to:
   a. Government Agencies, including Local Governments;
   b. State Owned Enterprises (BUMN);
   c. Regional owned enterprises;
   d. PT Persero;
   e. Authority Agency;
   f. Other Government legal entities appointed by the government.

2. Badan-badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak Pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolan tanah.

2. Legal entities as referred to in paragraph (1) can be granted Management Rights as long as they are in accordance with their main tasks and functions related to land management.

Dengan demikian, Hak Pengelolaan (selanjutnya disebut Hak Pengelolaan Lahan atau HPL) sesuai ketentuan di atas dapat diurus oleh Perusahaan, atas kawasan Bendungan Jatiluhur dan bantaran sungai Citarum yang tentunya bertujuan menjaga konservasi alam dan lingkungannya.

Thus, the Management Rights (hereinafter referred to as Land Management Rights or HPL) according to the above provisions can be administered by the Company, over the Jatiluhur Dam area and the banks of the Citarum river which of course aims to preserve nature and its environment.

Kewenangan Subyek HPL, sesuai Pasal 6, Permenag No. 9 Tahun 1999 menjelaskan HPL memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk:

The authority of HPL Subjects, according to Article 6, Permenag No. 9 Year 1999 describes HPL as giving authority to its holders to:

a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;

a. Planning the allocation and use of the land;

b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;

b. Use the land for the purposes of carrying out his duties;

c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun;

c. Hand over parts of the land to a third party with usufructuary rights for a period of 6 (six) years;

d. Menerima uang pemasukan/ ganti rugi dan/ atau uang wajib tahunan.

d. Receive income/ compensation and/ or mandatory annual money.

Selanjutnya, sesuai Pasal 4 jo. Pasal 16 jo. Pasal 53 jo. Peraturan Pemerintah (PP) No. 40/1996 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/1996 bahwa, negara memberikan berbagai jenis hak atas tanah, yang terdiri dari:

Furthermore, according to Article 4 jo. Article 16 jo. Article 53 jo. Government Regulation (PP) No. 40/1996 and Government Regulation (PP) No. 41/1996 that, the state grants various types of land rights, which consist of:

a. Hak individual yang bersifat perdata;

a. Individual rights that are civil in nature;

b. Hak Pengelolaan, yaitu hak istimewa yang diberikan oleh negara pada instansi-instansi tertentu untuk dikelola dan diambil manfaat atasnya;

b. Management rights, namely special rights granted by the state to certain agencies to be managed and taken advantage of;

c. Tanah wakaf yaitu hak atas tanah yang semula merupakan hak primer (HM, HGB, HGU, HP atau tanah girik) dan kemudian diwakafkan atau diserahkan oleh pemiliknya kepada badan keagamaan ataupun badan sosial lainnya untuk di wakafkan.

c. Waqf land is the right to land that was originally a primary right (HM, HGB, HGU, HP or girik land) and then waqfed or handed over by the owner to a religious body or other social body to be waqfed.

5. Kas dan Setara Kas / *5. Cash and Cash Equivalents*

	2023 Rp	2022 Rp
Kas/ *Cash on Hand*	730,371,905	1,179,036,948
Kas di Bank/ *Cash in Banks*		
Pihak Berelasi (Catatan 38)/ *Related Parties (Note 38)*	178,004,919,601	104,549,151,670
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank CIMB Niaga Tbk	3,348,228,992	1,989,309,988
PT Bank Index Selindo	92,335,227	97,579,220
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	3,440,564,219	2,086,889,208
Jumlah Kas di Bank/ *Total of Cash in Banks*	**181,445,483,820**	**106,636,040,878**
Deposito Berjangka/ *Time Deposits*		
Pihak Berelasi (Catatan 38)/ *Related Parties (Note 38)*	535,000,000,000	460,000,000,000
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	15,000,000,000	--
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	15,000,000,000	--
Jumlah Deposito Berjangka/ *Total of Time Deposits*	**550,000,000,000**	**460,000,000,000**
Jumlah/ *Total*	**732,175,855,725**	**567,815,077,826**

Seluruh kas dan setara kas pada 31 Desember 2023 dan 2022 dalam mata uang Rupiah.

All cash and cash equivalents as of December 31, 2023 and 2022 are in Rupiah.

Jangka waktu deposito berjangka adalah 1 sampai dengan 3 bulan.

Terms of time deposits are 1 up to 3 months.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka konvensional pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 4,90% - 7,40% dan 4,90% - 6%.

The annual interest rates of conventional time deposits as of December 31, 2023 and 2022 are 4.90% - 7.40% and 4.90% - 6%, respectively.

Tingkat bagi hasil tahunan doposito berjangka syariah pada tahun 2023 dan 2022 masing-masing adalah 63,90% - 81,60% dan 47%.

The annual nisbah rates of sharia time deposits in 2023 and 2022 is 63.90% - 81.60% and 47%, respectively.

6. Piutang Usaha / *6. Accounts Receivable*

	2023 Rp	2022 Rp
a. Berdasarkan Pelanggan/ *By Customers*		
Pihak Berelasi (Catatan 38)/ *Related Parties (Note 38)*	123,828,067,258	127,986,184,749
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable - Related Parties*	(29,478,621,144)	(36,674,516,361)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ *Sub Total - Related Parties*	94,349,446,114	91,311,668,388

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Perumda Tirta Kahuripan IPA Gunung Putri	4,365,350,226	--
PT Tenang Jaya Sejahtera	3,266,175,811	3,284,614,010
PT Multi Optimal Sentosa	2,419,650,165	--
PT Mutiara Energy	1,967,824,620	1,967,824,620
PT Indograha Samudra Persada Realty	1,838,961,020	1,838,961,020
PT South Pacific Viscose	1,557,791,548	859,680,418
PT Belaputera Intiland	1,209,824,880	--
PT Surya Cipta Swadaya	1,197,418,776	--
PT Karawang Sport Centre Indonesia	1,019,480,160	2,985,000
PT Archindo Development	1,018,881,000	1,018,881,000
PT Pindodeli Pulp And Paper Mills	887,055,399	53,096,749
PT Kahatex	814,388,200	359,859,810
PT Sinar Bahana Mulya	778,170,384	137,576,865
PT Amartha Sejahtra	775,272,839	1,538,697,810
PT Hutchison 3 Indonesia	719,778,037	157,542,946
PT Hosaindo Sejahtera Abadi	706,360,026	706,360,026
PT PGAS Telekomunikasi Indonesia	703,143,284	513,475,465
PT Alexandra Citra Pertiwi	672,830,400	672,830,400
PT Indo Bharat Rayon	643,274,400	643,274,400
PT Tridaya Kreasi	573,278,000	573,278,000
PT Global Citra Primakarya	565,741,278	465,808,447
PT Hebel Indonesia	536,581,873	536,581,873
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	24,070,155,177	23,727,480,008
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	52,307,387,503	39,058,808,867
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha - Pihak Ketiga/ *Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable - Third Parties*	(35,416,913,541)	(32,964,560,035)
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	16,890,473,962	6,094,248,832
Jumlah/ *Total*	**111,239,920,076**	**97,405,917,220**
b. Berdasarkan Umur/ *By Age*		
Belum Jatuh Tempo/ *Not Yet Due*	29,206,689,690	42,480,523,698
Jatuh Tempo/ *Past Due*		
1 - 30 hari/ *days*	12,115,231,539	1,738,562,698
31 - 60 hari/ *days*	3,890,431,231	2,576,964,265
61 - 90 hari/ *days*	1,580,212,404	7,077,962,050
Di atas 91 hari/ *More than 91 days*	129,342,889,898	113,170,980,905
Sub Jumlah/ *Sub Total*	176,135,454,761	167,044,993,616
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha/ *Allowance for Impairment Losses on Accounts Receivable*	(64,895,534,685)	(69,639,076,396)
Jumlah/ *Total*	**111,239,920,076**	**97,405,917,220**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses on accounts receivable is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal	69,639,076,396	70,292,233,810	*Beginning Balance*
Pemulihan	(11,004,942,071)	(14,970,370,574)	*Recovery*
Kerugian Penurunan Nilai	6,261,400,360	14,317,213,160	*Impairment Losses*
Saldo Akhir	**64,895,534,685**	**69,639,076,396**	***Ending balance***

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh piutang usaha disajikan dalam Rupiah.

As of December 31, 2023 and 2022, all of accounts receivable are denominated in Rupiah.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada piutang usaha yang dijadikan jaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no accounts receivable as collateral.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha telah mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses on accounts receivable are adequate to cover loss on uncollectible receivables.

7. Piutang Retensi / *7. Retention Receivables*

	2023 Rp	2022 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ *By Customers*		
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Multi Optimal Sentosa	2,044,580,228	1,512,080,435
PT Belaputera Intiland	433,720,332	32,232,951
Jumlah/ *Total*	**2,478,300,560**	**1,544,313,386**

Piutang retensi kepada PT Multi Optimal Sentosa merupakan piutang retensi atas pekerjaan konstruksi Pembangunan Sistem Jaringan Penyediaan Air Industri untuk Kawasan Jatiluhur *Industrial Smart City* berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor MOS-0062/SPK-JTL/VI/2021 beserta addendumnya dan Pekerjaan Pembuatan *Tower* Menara Air 300 x 2 m^3 di Kawasan Jatiluhur *Industrial Smart City* berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor MOS-0100/SPK-JTL/VIII/2022 beserta addendumnya.

Retention receivable to PT Multi Optimal Sentosa represents retention receivable for the construction work of the Construction of Industrial Water Supply Network System for Jatiluhur Industrial Smart City Area based on Work Order Letter Number MOS-0062/SPK-JTL/VI/2021 and its addendum and Construction Work for a 300 x 2 cbm Water Tower for Jatiluhur Industrial Smart City Area based on Work Order Letter Number MOS-0100/SPK-JTL/VIII/2022 and its addendum.

Piutang retensi kepada PT Belaputera Intiland atas Pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum 100L/Detik Kota Baru Parahyangan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 133/BI/TECH-LOA/VII/2022.

Retention receivable to PT Belaputera Intiland for the Work of the 100L/Second Drinking Water Treatment System in Kota Baru Parahyangan based on Work Order Letter Number 133/BI/TECH-LOA/VII/2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen tidak melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai piutang retensi karena piutang tersebut belum jatuh tempo dan manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

As of December 31, 2023 and 2022, management did not calculate the allowance for impairment losses on retention receivables since those receivables are not due yet and management believes that there are no credit risk which concentrated significantly.

8. Pendapatan yang Masih Akan Diterima / *8. Accrued Revenue*

	2023 Rp	2022 Rp	
Sumber Daya Air			*Water Resources*
Air Baku	165,005,403,897	170,635,754,419	*Raw Water*
Listrik	34,582,743,367	52,767,047,897	*Electricity*
Air Bersih	7,515,325,035	7,440,093,035	*Clean Water*
Sub Jumlah	207,103,472,299	230,842,895,351	*Sub Total*
Non Sumber Daya Air			*Non Water Resources*
Pemanfaatan Lahan	14,165,812,390	17,177,060,274	*Land Utilization*
Pariwisata	2,456,848,710	2,512,031,886	*Tourism*
Air Minum Dalam Kemasan	1,390,645,712	1,486,141,522	*Bottled Drinking Water*
Jasa Laboratorium	674,844,752	929,603,112	*Laboratory Service*
Pendapatan Bunga	99,627,525	--	*Interest Income*
Sub Jumlah	18,787,779,089	22,104,836,794	*Sub Total*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pendapatan yang Masih Akan Diterima	(27,277,912,338)	(15,916,553,889)	*Allowance for Impairment Losses on Accrued Revenue*
Jumlah	**198,613,339,050**	**237,031,178,256**	***Total***

Rincian pendapatan yang masih akan diterima berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of accrued revenue based on customers are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ *By Customers*		
Pihak Berelasi (Catatan 38)/ *Related Parties (Note 38)*	159,450,923,918	178,450,607,068
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Berelasi/ *Allowance for Impairment Losses - Related Parties*	(12,925,503,865)	(1,564,145,416)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ *Sub Total - Related Parties*	146,525,420,053	176,886,461,652
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Indotama Ferro Alloys	10,667,912,359	12,942,459,602
PT Elegant Textile	9,343,747,582	9,895,489,474
PT Cikarang Listrindo	5,833,581,315	5,703,711,628
PT South Pacific Viscose	3,532,562,860	--
PT Indo Bharat Rayon	2,969,010,320	--
PT Indorama Synthetics Tbk	1,940,591,994	859,123,216
PT Indograha Samudra Persada Realty	1,755,356,200	1,755,356,200
PT Logos Indonesia Prima One	1,127,703,000	1,127,703,000
PT Indonesia Libolon Fiber System	1,118,663,082	869,269,668
PT Kahatex	985,194,950	72,542,440
PT Indosat Tbk	906,338,888	537,862,270
PT Pindodeli Pulp and Paper Mills	771,411,254	755,346,100
PT Bangunperkasa Adhitamasentra	676,678,591	676,443,994
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	24,811,575,075	39,301,817,485
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	66,440,327,471	74,497,125,077
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Pihak Ketiga/ *Allowance for Impairment Losses - Third Parties*	(14,352,408,473)	(14,352,408,473)
Sub Jumlah - Pihak Berelasi/ *Sub Total - Related Parties*	52,087,918,998	60,144,716,604
Jumlah/ *Total*	**198,613,339,051**	**237,031,178,256**

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

Movement of allowance for impairment losses on accrued revenues is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal	15,916,553,889	15,643,252,568	*Beginning Balance*
Pemulihan	--	(431,708,084)	*Recovery*
Kerugian Penurunan Nilai	11,361,358,449	705,009,405	*Impairment Losses*
Saldo Akhir	**27,277,912,338**	**15,916,553,889**	***Ending balance***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pendapatan yang masih akan diterima telah mencukupi untuk menutup kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya pendapatan yang masih akan diterima.

Management believes that the allowance for impairment losses on accrued revenue is adequate to cover loss on uncollectible accrued revenue.

9. Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja / *9. Gross Amount Due from Customers*

	2023 Rp	2022 Rp	
Biaya Konstruksi	29,818,376,747	19,360,516,075	*Construction Costs*
Laba yang Diakui	2,913,422,614	1,832,110,678	*Profit Recognized*
Pendapatan Kontraktual	32,731,799,361	21,192,626,753	*Contractual Revenue*
Dikurangi: Progres Ditagihkan	23,430,366,343	13,484,808,795	*Less: Progress Billed*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	**9,301,433,018**	**7,707,817,958**	***Gross Amount Due from Customers***

Rincian tagihan bruto dari pemberi kerja berdasarkan pemberi kerja adalah sebagai berikut:

The details of gross amount due from customers based on customers are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 38)	8,687,686,862	--	*Related Party (Note 38)*
Pihak Ketiga			*Third Parties*
PT Multi Optimal Sentosa	613,746,156	7,103,380,298	*PT Multi Optimal Sentosa*
PT Belaputera Intiland	--	604,437,660	*PT Belaputera Intiland*
Sub Jumlah - Pihak Ketiga	613,746,156	7,707,817,958	*Sub Total - Third Parties*
Jumlah	**9,301,433,018**	**7,707,817,958**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen tidak melakukan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto dari pemberi kerja karena manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan atas tagihan bruto kepada pemberi kerja tersebut.

As of December 31, 2023 and 2022, management did not calculate the allowance for impairment losses on gross amount due from customers since the management believes that there are no credit risk which concentrated significantly over gross amount due from customers.

10. Aset Keuangan Lancar Lainnya / *10. Other Current Financial Assets*

	2023 Rp	2022 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Piutang Talangan Asuransi Karyawan	2,245,384,059	2,245,384,059	*Bailout Receivables on Employee Insurance*
Piutang Bunga Deposito	683,811,506	617,706,802	*Interest Deposit Receivables*
Piutang Karyawan	48,982,981	70,491,763	*Employee Receivables*
Piutang Lainnya	144,205,890	13,081,154	*Other Receivables*
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Talangan Asuransi Karyawan	(2,245,384,059)	(2,245,384,059)	*Allowance for Impairment Losses on Bailout Receivables on Employee Insurance*
Sub Jumlah - Perusahaan	877,000,377	701,279,719	*Sub Total - The Company*
Entitas Anak			***The Subsidiaries***
Nevo Ginting	1,050,000,000	--	*Nevo Ginting*
Sub Jumlah - Entitas Anak	1,050,000,000	--	*Sub Total - The Subsidiaries*
Jumlah	**1,927,000,377**	**701,279,719**	***Total***

Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya) merupakan piutang karyawan atas premi awal yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan dan telah dihitung penurunan nilainya (Catatan 39.iv).

Employee Receivables (Jiwasraya Insurance) represent receivables on initial premium which was initially paid by the Company and has been assessed the allowance for impairment losses (Note 39.iv).

11. Persediaan / *11. Inventories*

	2023 Rp	2022 Rp	
Suku Cadang	747,450,000	747,450,000	*Spareparts*
Bahan Baku - Air Minum Dalam Kemasan	397,173,606	609,995,794	*Raw Materials - Bottled Drinking Water*
Bahan Kimia	312,959,835	306,998,935	*Chemicals*
Bahan Farmasi	55,590,367	160,918,621	*Pharmaceuticals*
Bahan dan Perlengkapan Lain	147,815,000	153,672,000	*Other Materials and Equipments*
Barang Jadi - Air Minum Dalam Kemasan	--	32,337,839	*Finished Goods - Bottled Drinking Water*
Bahan Makanan dan Minuman	59,391,614	56,998,378	*Food and Beverages*
Bahan Perlengkapan Perhotelan	13,840,181	31,962,310	*Hospitality Equipments*
Bahan Perlengkapan Bar dan Restoran	11,745,750	16,777,100	*Bar and Restaurant Equipments*
Sub Jumlah	**1,745,966,353**	**2,117,110,977**	***Sub Total***
Dikurangi:			*Less:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	(189,283,200)	(189,283,200)	*Allowance for Impairment Losses on Inventories*
Jumlah	**1,556,683,153**	**1,927,827,777**	***Total***

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, manajemen tidak melakukan penambahan penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan karena manajemen berpendapat bahwa seluruh persediaan berada dalam kondisi baik dan tidak terdapat persediaan usang.

As of December 31, 2023 and 2022, management did not provide any additional allowance for impairment losses on inventory since management believes that all inventories are in a good condition and there are no existing obsolete stock.

12. Pembayaran di Muka / *12. Prepayments*

a. Aset Lancar / *a. Current Assets*

	2023 Rp	2022 Rp	
Personalia	6,688,996,555	6,623,504,185	*General Affairs*
Bahan dan Perlengkapan	12,194,235	26,490,454	*Material and Supplies*
Uang Muka Operasional	536,272,664	389,740	*Operational Advances*
Jumlah	**7,237,463,454**	**6,650,384,379**	***Total***

Biaya personalia merupakan biaya gaji dibayar di muka dengan rincian sebagai berikut:

General affairs expenses represent prepaid salary costs with details as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Gaji	154,873,151	3,236,206,196	*Salary*
Tunjangan dan Honorarium	6,534,123,404	3,386,797,989	*Allowances and Honorarium*
Lain-lain	--	500,000	*Others*
Jumlah	**6,688,996,555**	**6,623,504,185**	***Total***

b. Aset Tidak Lancar / *b. Non-Current Assets*

	2023 Rp	2022 Rp
Uang Muka Pengadaan Aset Tetap/ *Procurement of Fixed Assets Advances*		
PT Guna Rogate Indha	3,928,734,000	--
PT Nindya Beton	1,575,811,278	--
CV Jatiluhur Faris Purnama	--	208,227,120
PT Intra Indotama Karya	--	197,025,000
CV Semesta Estetika	--	99,404,052
Jumlah/ *Total*	**5,504,545,278**	**504,656,172**

13. Investasi pada Entitas Asosiasi / *13. Investments in Associates*

	2023 Rp	2022 Rp
Metode Ekuitas/ *Equity Method*		
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I		
Saldo Awal/ *Beginning Balance*	5,236,705,577	5,236,705,577
Penambahan Tahun Berjalan/ *Current Year Addition*	--	--
Saldo Akhir/ *Ending Balance*	5,236,705,577	5,236,705,577
Akumulasi Bagian Rugi Entitas Asosiasi/ *Accumulated Loss on Associates*	(5,236,705,577)	(5,236,705,577)
Nilai Penyertaan - Bersih/ *Investments - Net*	**--**	**--**

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (PT BUMN HL I)

Berdasarkan surat dari PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I No. SB/A.II/3790/XI/2008 tanggal 3 November 2008, Perusahaan menginvestasikan dananya sebesar Rp1.400.000.000 atau 20% dari total modal yang disetor. Pada tahun 2011 dan 2012, Perusahaan menambah modal disetor masing-masing sebesar Rp750.000.000 dan Rp250.000.000, sehingga total modal disetor sebesar Rp2.400.000.000 yang telah diaktakan oleh Notaris Irma Rahmawati, S.H.

PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I (PT BUMN HL I)

Based on a letter from PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I No. SB/A.II/3790/XI/2008 dated November 3, 2008, the Company invested its funds amounting to Rp1,400,000,000 or 20% of the total paid-in capital. In 2011 and 2012, the Company increased its paid-in capital by Rp750,000,000 and Rp250,000,000, respectively, so that the total paid-up capital amounted to Rp2,400,000,000 which was notarized by Notary Irma Rahmawati, S.H.

Berdasarkan Risalah RUPS PT BUMN Hijau Lestari I tanggal 6 Mei 2013 bahwa PT BUMN Hijau Lestari II melakukan *merger* dengan PT BUMN Hijau Lestari I, dengan Akta Penggabungan PT BUMN Hijau Lestari II ke dalam PT BUMN HL I yang dibuat oleh Notaris Rachmawati No. 16 tanggal 6 Juli 2015 yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU – 0105825.AH.01.10. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, menyatakan total modal disetor Perusahaan sebanyak 3.800 lembar saham dengan nilai nominal Rp3.800.000.000 atau 20,54% dari total saham ditempatkan sebanyak 18.504 lembar saham.

Based on the Minutes of the GMS of PT BUMN Hijau Lestari I dated May 6, 2013 that PT BUMN Hijau Lestari II carried out a merger with PT BUMN Hijau Lestari I, with the Deed of Merger of PT BUMN Hijau Lestari II into PT BUMN HL I made by Notary Rachmawati No. 16 dated July 6, 2015 approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU – 0105825.AH.01.10. Year 2015 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Company Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I, states that the total paid-up capital of the Company is 3,800 shares with a nominal value of Rp3,800,000,000 or 20.54% of the total issued shares were 18,504 shares.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan melakukan pencatatan kekurangan penyertaan sebesar Rp1.436.705.577 atas peningkatan modal PT BUMN HL I menjadi sebesar Rp25.500.000.000 berdasarkan Keputusan Sirkulir Pemegang Saham PT BUMN HL I yang berlaku efektif serta mengikat sejak tanggal 5 Agustus 2015. Pencatatan ini dilakukan atas Laporan Hasil Reviu atas Rencana Pembubaran PT BUMN HL I tanggal 26 Oktober 2021 dan pada 31 Desember 2021, Perusahaan telah mengakui bagian kerugian atas penyertaan tersebut.

As of December 31, 2021, the Company recorded a lack of investment amounting to Rp1,436,705,577 for the increase in the capital of PT BUMN HL I amounting to Rp25,500,000,000 based on the Circular Decision of the Shareholders of PT BUMN HL I which was effective and binding since August 5, 2015. This recording is carried out on the Review Report on the Dissolution Plan of PT BUMN HL I dated October 26, 2021, and on December 31, 2021, the Company has recognized the share of losses on the investment.

Pada tanggal 7 Februari 2022, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT BUMN HL I ditandatangani oleh Para Pemegang Saham, yaitu menyetujui dan menetapkan:

1. Menyetujui pembatalan RUPS yang tercantum dalam Risalah RUPS LB tanggal 17 Desember 2020, yaitu "kekurangan modal disetor Perum Jasa Tirta II sebesar Rp1.400.000.000 akan disetorkan setelah proses likuidasi disetujui Kementerian BUMN".

2. Menyetujui bahwa kekurangan modal disetor Perusahaan sebesar Rp1.436.705.577 akan disetorkan paling lambat 5 hari setelah berlaku efektifnya Keputusan Sirkuler ini.

On February 7, 2022, the Shareholders' Circular Resolution outside the GMS of PT BUMN HL I was signed by the Shareholders, namely agreeing and stipulating:

1. *Approved the cancellation of the GMS which was stated in the Minutes of the Extraordinary GMS dated December 17, 2020, namely "a lack of paid-up capital of Perum Jasa Tirta II amounting to Rp1,400,000,000 will be deposited after the liquidation process is approved by the Ministry of SOEs".*

2. *Approved that the lack of Company's paid-up capital amounting to Rp1,436,705,577 will be deposited no later than 5 days after the effectiveness of this Circular Decree.*

Pada tanggal 13 Juli 2022, Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT BUMN HL I ditandatangani oleh Para Pemegang Saham, yaitu menyetujui dan menetapkan:

1. Penggunaan setoran modal Perusahaan untuk pelunasan kewajiban Perseroan dilaksanakan setelah dana tersedia untuk memenuhi kewajiban.

2. Menyetujui aset Perseroan yang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik dijual kepada Perhutani atau pihak lainnya.

3. Menyetujui hasil penjualan aset Perseroan diprioritaskan untuk pemenuhan kewajiban Perseroan kepada eks karyawan dan kewajiban lain yang belum terselesaikan.

4. Menugaskan *Personnel In-Charge* Perseroan untuk melaksanakan hal-hal terkait kegiatan penjualan aset dimaksud.

5. Memberhentikan dan mengangkat *Personnel In-Charge* PT BUMN HL I termasuk persetujuan honorarium PIC Perseroan.

On July 13, 2022, the Shareholders' Circular Resolution outside the GMS of PT BUMN HL I was signed by the Shareholders, namely agreeing and stipulating:

1. *The use of the Company's paid-in capital to pay off the Company's obligations is carried out after the funds are available to fulfill obligations.*

2. *Approve Company's assets that have been assessed by Public Appraisal Service Firm to be sold to Perhutani or other parties.*

3. *Approved the proceeds from the sale of the Company's assets to prioritize the fulfillment of the Company's obligations to former employees and other unresolved obligations.*

4. *Assign the Personnel In-Charge of the Company to carry out matters related to the said asset sale activities.*

5. *Dismissing and appointing the Personnel In-Charge of PT BUMN HL I including the approval of the Company's PIC honorarium.*

Pada tanggal 22 November 2022, dilaksanakan pembahasan terkait hutang Perseroan kepada eks karyawan dan rencana RUPS pertanggung-jawaban PT BUMN HL I. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut selanjutnya disusun *draft* RUPS PT BUMN HL I yang selanjutnya disampaikan oleh Perum Perhutani melalui surat No. 0741/001.2/PP/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian *Draft* RUPS PT BUMN HL I.

On November 22, 2022, a discussion was held regarding the Company's debt to former employees and plans for an accountability GMS for PT BUMN HL I. Based on the results of the discussion, a draft of the GMS of PT BUMN HL I was then prepared, which was then submitted by Perum Perhutani through letter No. 0741/001.2/PP/2022 dated December 26, 2022 regarding Submission of the PT BUMN HL I GMS Draft.

14. Investasi Jangka Panjang Lainnya / *14. Other Long-Term Investment*

	2023 Rp	2022 Rp
Metode Biaya/ *Cost Method*		
PT Air Minum Indonesia	100,000,000	100,000,000
PT Padi Energi Nusantara	2,000,000,000	2,000,000,000
Dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/		
Less Allowance for Impairment Losses	(2,100,000,000)	(2,100,000,000)
Jumlah/*Total*	**--**	**--**

PT Air Minum Indonesia
Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Air Minum Indonesia No. 04 tanggal 30 Juli 2015 yang dibuat oleh Notaris Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-2449637.AH.01.01 Tahun 2015 dan surat dari PT Air Minum Indonesia No. 03/AMI/2015 tanggal 7 September 2015, Perusahaan menyetorkan modal sebesar Rp100.000.000 yang mewakili 10% kepemilikan di PT Air Minum Indonesia.

PT Air Minum Indonesia
In accordance with the Deed of Establishment of a Limited Liability Company PT Air Minum Indonesia No. 04 dated July 30, 2015 made by Notary Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-2449637.AH.01.01 Year 2015 and a letter from PT Air Minum Indonesia No. 03/AMI/2015 dated September 7, 2015, the Company's made paid-up capital amounting to Rp100,000,000 which represents 10% of ownership in PT Air Minum Indonesia.

Berdasarkan surat Direktur Jendral Cipta Karya No: PR.01-03DC/374 tanggal 4 April 2017 tentang Tindak Lanjut Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur untuk penyediaan air minum wilayah Jakarta, Bekasi dan Karawang yang menyatakan bahwa proyek SPAM Regional Jatiluhur I akan dilaksanakan dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha) dimana Perusahaan akan bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan tidak akan tergabung dalam konsorsium Badan Usaha Pelaksana Proyek. Untuk itu, Perusahaan agar menarik partisipasi dalam PT Air Minum Indonesia dan melepaskan kepemilikan saham pada PT Air Minum Indonesia dan menarik anggota Direksi dan Dewan Dewan Pengawas yang berasal dari Perusahaan.

Based on letter from the General Director of Cipta Karya No: PR.01-03-DC/374 dated April 4, 2017 regarding Follow-up to the Cooperation in the Implementation of the Development of the Jatiluhur Drinking Water Supply System (SPAM) for the supply of drinking water in Jakarta, Bekasi and Karawang areas which stated that SPAM Regional Jatiluhur I project will be implemented with KPBU (Government Business Entity Cooperation) scheme in which the Company will act as the Project In-Charge of the Cooperation (PJPK) and will not be part of the Project Implementing Business Entity consortium. For this reason, the Company must withdraw its participation in PT Air Minum Indonesia and relinquish its share ownership in PT Air Minum Indonesia and withdraw members of the Board of Directors and Board of Supervisory from the Company.

PT Padi Energi Nusantara (PEN)
Berdasarkan Surat dari Kementerian BUMN No: S-899/MBU/2008 tentang persetujuan Pendirian PEN tanggal 17 November 2008, Perusahaan melakukan penyertaan sebesar Rp2.000.000.000 atau 6,9% dari total modal yang disetor pada PEN yang telah tercatat dalam akta Pendirian PEN Nomor 12 tanggal 30 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Neny Saadah, S.H.

PT Padi Energi Nusantara (PEN)
Based on Letter of Ministry of SOEs No: S-899/MBU/2008 concerning the agreement of Establishment of PEN dated November 17, 2008, the Company invested Rp2,000,000,000 or 6.9% of total paid-up capital of PEN as shown in the Deed of Establishment of PEN Number 12 dated December 30, 2008 which issued by Notary Neny Saadah, S.H.

Berdasarkan hasil *Financial Due Diligence* dari konsultan PT Saraswati Perdana, nilai ekuitas proforma PEN per 31 Desember 2012 sebesar Rp882.000.000 yang terbagi atas 29.000 saham atau Rp30.430 per saham. Penyertaan saham Perusahaan pada PEN adalah 2.000 saham dengan total nominal Rp2.000.000.000. Sehingga, berdasarkan hasil *Financial Due Diligence* tersebut, nilai saham Perusahaan menjadi sebesar Rp60.860.000.000. Karena kondisi PEN menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya, diperkirakan nilai penyertaan saham perusahaan pada PEN per 31 Desember 2013 sebesar nihil atau mengalami penurunan nilai sebesar Rp2.000.000.000 (100%).

Based on Financial Due Diligence report by consultant PT Saraswati Perdana, PEN's pro forma equity value as of December 31, 2012 amounting to Rp882,000,000 to which divided into 29,000 shares or Rp30,430 per share. The Company's investment in PEN is 2,000 shares with a total nominal value of Rp2,000,000,000. Therefore, based on the Financial Due Diligence report, the Company's nominal value is Rp60,860,000,000. Since the condition of PEN shows that there is great doubt about its ability to maintain its going concern, it is estimated that the value of the company's investment in PEN as of December 31, 2013 is amounting to nil or a decrease by Rp2,000,000,000 (100%).

Pada tanggal 13 April 2022, dilaksanakan rapat pembahasan *Draft* Keputusan Pemegang Saham PT PEN terkait rencana penggantian likuidator dan tambahan biaya likuidasi dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Masing-masing perwakilan Pemagang Saham akan mengajukan persetujuan prinsip kepada manajemen masing-masing terhadap rencana pergantian likuidator PT PEN termasuk biaya penyelesaian likuidasi PT PEN sebagaimana diuraikan dalam lampiran serta mereviu *Draft* Keputusan Pemegang Saham (KPS). Persetujuan manajemen dimaksud dan hasil *review draft* KPS akan disampaikan kepada PT Pupuk Kaltim paling lambat tanggal 18 April 2022.
2. Terkait teknis pemberhentian Bapak Bahrul Ilmi Yakub selaku likuidator PT PEN yang lama dan pertanggungjawabannya akan dibahas lebih lanjut oleh Pemegang Saham PT PEN.

On April 13, 2022, a discussion meeting was held to discuss the PT PEN Shareholders' Draft Decision regarding the plan to replace the liquidator and additional liquidation costs with the results of the discussion as follows:

1. *Each representative of the Shareholders will submit in-principle approval to their respective management for the plan to change PT PEN's liquidator including the cost of completing PT PEN's liquidation as described in the attachment and review the Draft Shareholder Decision (KPS). The intended management approval and the review results of the KPS draft will be submitted to PT Pupuk Kaltim no later than April 18, 2022.*
2. *Regarding the technicality of dismissing Mr. Bahrul Ilmi Yakub as the former PT PEN's liquidator and his responsibilities will be discussed further by PT PEN's Shareholders.*

Akta pernyataan RUPS No. 89 tanggal 28 Juni 2022, Akta Notaris Mahendra Adinegara S.H., M.Kn., telah terbit berdasarkan RUPS Sirkuler menyetujui dan menetapkan:

1. Mencabut keputusan Pemegang Saham terkait penunjukan KAP Ellya Noorlisyati & Rekan untuk melakukan *general audit*.
2. Memberhentikan Bahrul Ilmi Yakup & Partners sebagai likuidator PT PEN.
3. Menunjuk Rahmatsyah S.H. yang merupakan Advokat dari Ertiga *Law Firm* sebagai Likuidator PT PEN (DL) ("Likuidator") didampingi sesuai keperluannya oleh mantan Direktur PT PEN (DL) untuk melakukan penyelesaian likuidasi PT PEN.

Deed of GMS statement No. 89 dated June 28, 2022, Deed of Notary Mahendra Adinegara S.H., M.Kn., has been issued based on the Circular GMS agreed and determined:

1. *Revoke the Shareholders' decision regarding the appointment of KAP Ellya Noorlisyati & Partners to conduct a general audit.*
2. *Dismissing Bahrul Ilmi Yakup & Partners as PT PEN's liquidator.*
3. *Appoint Rahmatsyah S.H. who is an Advocate from Ertiga Law Firm as Liquidator of PT PEN (DL) ("Liquidator") accompanied as needed by the former Director of PT PEN (DL) to carry out the liquidation settlement of PT PEN.*

4. Menunjuk PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai wakil dari Pemegang Saham Perseroan untuk melakukan perikatan dengan Likuidator.

5. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Likuidator untuk menunjuk auditor laporan keuangan independen dan tenaga profesional-profesional lainnya yang diperlukan sehubungan dengan proses pembubaran/ likuidasi Perseroan.

6. Meminta Likuidator untuk menyelesaikan pemberesan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan likuidasi PT PEN.

7. Menyetujui kompensasi/ upah (*fee*) yang harus diberikan kepada Likuidator yang akan ditanggung oleh Pemegang Saham Perseroan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham masing-masing.

8. Apabila terdapat utang-utang terkait pajak dalam rangka penyelesaian likuidasi (jika ada) Perseroan dan sisa hasil likuidasi tidak cukup untuk melunasi utang-utang pajak tersebut, maka ditanggung oleh Pemegang Saham Perseroan secara proporsional sesuai persentase kepemilikan saham masing-masing.

9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Likuidator Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham Perseroan menyatakan kembali segala sesuatu yang diputuskan dalam Keputusan ini di hadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang bila diperlukan, dan untuk menandatangani setiap akta atau dokumen-dokumen yang terkait dengannya, melaporkan dan mendaftarkan akta kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang dipandang perlu dan bermanfaat guna terlaksananya maksud dan tujuan Keputusan ini.

4. Appointed PT Pupuk Kalimantan Timur as a representative of the Company's Shareholders to enter into an engagement with the Liquidator.

5. Agree to give authority to the Liquidator to appoint an independent financial report auditor and other professionals needed in connection with the dissolution/ liquidation process of the Company.

6. Asking the Liquidator to complete the settlement of matters in relation to the liquidation of PT PEN.

7. Approve the compensation/ wages (fees) that must be given to the Liquidator which will be borne by the Company's Shareholders proportionally according to the percentage of each share ownership.

8. If there are tax-related debts in the context of settlement of the liquidation (if any) of the Company and the remaining liquidation proceeds are not sufficient to pay off these tax debts, then they shall be borne by the Company's Shareholders proportionally to their respective share ownership percentages.

9. To grant power of attorney with substitution rights to the Company's Liquidators to represent the Company's Shareholders restate everything decided in this Decree before a Notary or an authorized Officer if necessary, and to sign any deed or documents related to it, report and register deed to the authorized institute and take all actions deemed necessary and useful in order to carry out the aims and objectives of this Decree.

15. Aset Tetap / *15. Fixed Assets*

	2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	23,491,033,051	626,352,320	--	1,051,293,450	25,168,678,821	*Land*
Sarana	22,336,796,918	2,974,968,527	--	2,619,557,423	27,931,322,868	*Facilities*
Bangunan	235,004,884,265	21,219,193,768	1,432,856,280	18,061,964,740	272,853,186,493	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	3,828,336,831	--	--	--	3,828,336,831	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	839,463,749,388	42,632,993,209	--	30,736,975,404	912,833,718,001	*Installation and Networks*
Alat Angkut dan Alat Berat	121,403,735,482	5,584,408,507	--	--	126,988,143,989	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	206,113,297,005	15,704,056,907	--	619,656,943	222,437,010,855	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	1,451,641,832,940	88,741,973,238	1,432,856,280	53,089,447,960	1,592,040,397,858	*Sub Total*

2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Dalam Penyelesaian						***Assets Under Construction***
Tanah	2,436,603,450	1,817,304,919	--	(1,051,293,450)	3,202,614,919	*Land*
Sarana	2,619,557,423	1,381,206,510	--	(2,619,557,424)	1,381,206,509	*Facilities*
Bangunan	18,061,964,740	11,552,467,875	--	(18,061,964,740)	11,552,467,875	*Buildings*
Instalasi dan Jaringan	31,356,632,346	28,482,964,660	--	(31,356,632,346)	28,482,964,660	*Installation and Networks*
Perabotan dan Peralatan	--	2,264,888,401	--	--	2,264,888,401	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	54,474,757,959	45,498,832,365	--	(53,089,447,960)	46,884,142,364	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Sarana	12,946,585,906	1,045,549,053	--	--	13,992,134,959	*Facilities*
Bangunan	89,548,698,643	11,605,697,577	1,247,450,966	--	99,906,945,254	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	2,415,569,787	217,437,939	--	--	2,633,007,726	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	366,188,878,872	36,952,425,161	--	--	403,141,304,033	*Installation and Networks*
Alat Angkut dan Alat Berat	66,457,826,418	16,599,602,146	--	--	83,057,428,564	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	164,362,157,423	18,847,137,732	--	--	183,209,295,155	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	701,919,717,049	85,267,849,608	1,247,450,966	--	785,940,115,691	*Sub Total*
Nilai Buku	**804,196,873,850**				**852,984,424,531**	***Book Value***

2022

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan						***Acquisition Cost***
Tanah	16,635,043,301	--	--	6,855,989,750	23,491,033,051	*Land*
Sarana	21,678,368,228	658,428,690	--	--	22,336,796,918	*Facilities*
Bangunan	213,002,325,595	18,432,850,835	--	3,569,707,835	235,004,884,265	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	3,828,336,831	--	--	--	3,828,336,831	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	764,892,712,414	46,669,308,753	--	27,901,728,221	839,463,749,388	*Installation and Networks*
Alat Angkut dan Alat Berat	105,997,398,762	9,387,845,150	--	6,018,491,570	121,403,735,482	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	195,864,056,223	10,249,240,782	--	--	206,113,297,005	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	1,321,898,241,354	85,397,674,210	--	44,345,917,376	1,451,641,832,940	*Sub Total*
Aset Dalam Penyelesaian						***Assets Under Construction***
Tanah	7,440,602,425	1,851,990,775	--	(6,855,989,750)	2,436,603,450	*Land*
Sarana	--	2,619,557,423	--	--	2,619,557,423	*Facilities*
Bangunan	4,216,990,679	17,414,681,896	--	(3,569,707,835)	18,061,964,740	*Buildings*
Instalasi dan Jaringan	32,773,413,305	31,356,632,346	--	(32,773,413,305)	31,356,632,346	*Installation and Networks*
Alat Angkut dan Alat Berat	6,018,491,570	--	--	(6,018,491,570)	--	*Heavy Equipment and Vehicle*
Sub Jumlah	50,449,497,979	53,242,862,440	--	(49,217,602,460)	54,474,757,959	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan						***Accumulated Depreciation***
Sarana	11,993,592,403	952,993,503	--	--	12,946,585,906	*Facilities*
Bangunan	77,207,127,321	12,341,571,322	--	--	89,548,698,643	*Buildings*
Suku Cadang Penyangga	2,198,131,849	217,437,938	--	--	2,415,569,787	*Spareparts*
Instalasi dan Jaringan	332,596,359,371	33,592,519,501	--	--	366,188,878,872	*Installation and Networks*
Alat Angkut dan Alat Berat	52,680,783,692	13,777,042,726	--	--	66,457,826,418	*Heavy Equipment and Vehicle*
Perabotan dan Peralatan	142,929,027,183	21,433,130,240	--	--	164,362,157,423	*Furnitures and Equipment*
Sub Jumlah	619,605,021,819	82,314,695,230	--	--	701,919,717,049	*Sub Total*
Nilai Buku	**752,742,717,514**				**804,196,873,850**	***Book Value***

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, aset tetap tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya.

As of December 31, 2023 and 2022, fixed assets are not insured against fire, theft and other possible risks.

Pada tahun 2022, Aset Dalam Penyelesaian berupa Instalasi dan Jaringan sebesar Rp32.773.413.305 direklasifikasi ke Aset Takberwujud dan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp4.871.685.084 dan Rp27.901.728.221.

In 2022, Assets Under Construction in the form of Installation and Networks amounting to Rp32,773,413,305 has been reclassified to Intangible Assets and Fixed Assets amounting to Rp4,871,685,084 and Rp27,901,728,221, respectively.

Harga perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp351.169.975.010 dan Rp280.604.410.303.

Acquisition cost of fixed assets which has been fully depreciated yet are still used for the Company's operational activities as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp351,169,975,010 and Rp280,604,410,303, respectively.

Beban penyusutan aset tetap untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan masing-masing pada:

Depreciation expenses of fixed assets for the years ended as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are allocated to:

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 33)			*Cost of Revenue (Note 33)*
Sumber Daya Air	67,666,983,199	59,357,113,287	*Water Resources*
Non Sumber Daya Air	8,468,579,691	12,442,249,991	*Non Water Resources*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 35)	9,132,286,718	10,515,331,952	*General and Administrative Expenses (Note 35)*
Jumlah	**85,267,849,608**	**82,314,695,230**	***Total***

Rincian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of assets under construction as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023		
	Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost*	**Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion***	**Estimasi Tahun Penyelesaian/ *Estimated Year of Completion***
Tanah/ *Land*	3,202,614,920	0.96% - 55%	Maret 2024/ *March 2024*
Bangunan/ *Building*	11,552,467,875	65%	Februari 2024/ *February 2024*
Instalasi dan Jaringan/ *Installation and Network*	28,482,964,660	34.07% - 90%	Februari - September 2024/ *February - September 2024*
Sarana/ *Facilities*	1,381,206,510	32%	Maret 2024/ *March 2024*
Perabotan dan Peralatan/ *Furnitures and Equipments*	2,264,888,400	58%	Maret 2024/ *March 2024*
Jumlah/ *Total*	**46,884,142,365**		

	2022		
	Biaya Perolehan/ *Acquisition Cost*	**Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion***	**Estimasi Tahun Penyelesaian/ *Estimated Year of Completion***
Tanah/ *Land*	2,436,603,450	40% - 97%	Agustus - September 2023/ *August - September 2023*
Bangunan/ *Building*	18,061,964,740	62% - 98%	Maret - April 2023/ *March - April 2023*
Instalasi dan Jaringan/ *Installation and Network*	31,356,632,346	77% - 97%	Februari - Maret 2023/ *February - March 2023*
Sarana/ *Facilities*	2,619,557,423	24% - 87%	Februari - Maret 2023/
Jumlah/ *Total*	**54,474,757,959**		

Pada tahun 2023, terdapat pelepasan aset tetap dengan perhitungan keuntungan atau kerugian sebagai berikut:

In 2023, there were disposals of fixed assets with the calculation of profit or loss as follows:

Pelepasan Aset Tetap: / *Disposal of Fixed Assets:*

	2023 Rp	2022 Rp	
Harga Perolehan	690,768,680	--	*Acquisition Cost*
Akumulasi Depresiasi	(505,363,366)	--	*Accumulated Deprectiation*
Nilai Buku	185,405,314	--	*Book Value*
Nilai Ganti Rugi	(2,031,704,771)		*Compensation Value*
Laba Pelepasan Aset Tetap	**(1,846,299,457)**	**--**	***Gain on Disposal of Fixed Assets***

Penghapusan Aset Tetap: / *Write-off of Fixed Assets:*

	2023 Rp	2022 Rp	
Harga Perolehan	742,087,600		*Acquisition Cost*
Akumulasi Depresiasi	(742,087,600)		*Accumulated Deprectiation*
Nilai Buku	**--**	**--**	***Book Value***

16. Aset Takberwujud / *16. Intangible Assets*

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak Komputer	5,769,412,643	--	--	5,769,412,643	*Computer Software*
Lisensi	1,113,640,517	--	--	1,113,640,517	*License*
Sub Jumlah	6,883,053,160	--	--	6,883,053,160	*Sub Total*
Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian					***Intangible Assets Under Construction***
Perangkat Lunak Komputer	3,238,955,498	195,338,439	--	3,434,293,937	*Computer Software*
Sub Jumlah	3,238,955,498	195,338,439	--	3,434,293,937	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Perangkat Lunak Komputer	1,081,515,593	1,442,353,163		2,523,868,756	*Computer Software*
Lisensi	23,385,823	266,686,764	--	290,072,587	*License*
Sub Jumlah	1,104,901,416	1,709,039,927	--	2,813,941,343	*Sub Total*
Nilai Buku	**9,017,107,242**			**7,503,405,754**	***Book Value***

	2022				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Reklasifikasi dan Koreksi/ *Reclassification and Correction*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya Perolehan					***Acquisition Cost***
Perangkat Lunak Komputer	--	897,727,559	4,871,685,084	5,769,412,643	*Computer Software*
Lisensi	--	1,113,640,517	--	1,113,640,517	*License*
Sub Jumlah	--	2,011,368,076	4,871,685,084	6,883,053,160	*Sub Total*
Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian					***Intangible Assets Under Construction***
Perangkat Lunak Komputer	--	3,238,955,498	--	3,238,955,498	*Computer Software*
Sub Jumlah	--	3,238,955,498	--	3,238,955,498	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan					***Accumulated Depreciation***
Perangkat Lunak Komputer	--	1,081,515,593		1,081,515,593	*Computer Software*
Lisensi	--	23,385,823	--	23,385,823	*License*
Sub Jumlah	--	1,104,901,416	--	1,104,901,416	*Sub Total*
Nilai Buku	**--**			**9,017,107,242**	***Book Value***

Beban penyusutan aset takberwujud untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan pada Beban Umum dan Administrasi (Catatan 35).

Depreciation expenses of intangible assets for the year ended as of December 31, 2023 and 2022 are allocated to General and Administrative Expenses (Note 35).

17. Aset Hak-Guna / *17. Right-of-Use Assets*

	2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Hak-Guna:						***Right-of-Use Assets:***
Tanah	10,702,147,190	--	--	(667,082,870)	10,035,064,320	*Land*
Bangunan	704,000,000	--	--	--	704,000,000	*Building*
Kendaraan	15,045,395,912	172,246,328	--	--	15,217,642,240	*Vehicle*
Sub Jumlah	26,451,543,102	172,246,328	--	(667,082,870)	25,956,706,560	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Tanah	2,608,374,278	476,104,289	--	--	3,084,478,567	*Land*
Bangunan	102,666,667	176,000,004	--	--	278,666,671	*Building*
Kendaraan	8,683,686,377	5,448,116,969	--	--	14,131,803,346	*Vehicle*
Sub Jumlah	11,394,727,322	6,100,221,262	--	--	17,494,948,584	*Sub Total*
Nilai Buku	**15,056,815,780**				**8,461,757,976**	***Book Value***

	2022					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deduction*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset Hak-Guna:						***Right-of-Use Assets:***
Tanah	3,329,839,502	7,372,307,688	--	--	10,702,147,190	*Land*
Bangunan	1,329,545,455	704,000,000	1,329,545,455	--	704,000,000	*Building*
Kendaraan	16,441,637,655	1,105,782,958	2,502,024,701	--	15,045,395,912	*Vehicle*
Sub Jumlah	21,101,022,612	9,182,090,646	3,831,570,156	--	26,451,543,102	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan:						***Accumulated Depreciation:***
Tanah	1,942,406,377	665,967,901	--	--	2,608,374,278	*Land*
Bangunan	1,287,878,788	144,333,334	1,329,545,455	--	102,666,667	*Building*
Kendaraan	5,327,034,511	5,459,419,154	2,102,767,288	--	8,683,686,377	*Vehicle*
Sub Jumlah	8,557,319,676	6,269,720,389	3,432,312,743	--	11,394,727,322	*Sub Total*
Nilai Buku	**12,543,702,936**				**15,056,815,780**	***Book Value***

Beban penyusutan aset hak-guna untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dialokasikan masing-masing pada:

Depreciation expenses of right-of-use assets for the years ended as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are allocated to:

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Pokok Pendapatan (Catatan 33)			*Cost of Revenue (Note 33)*
Sumber Daya Air	2,730,457,176	3,083,304,955	*Water Resources*
Non Sumber Daya Air	385,994,010	360,065,457	*Non Water Resources*
Beban Umum dan Administrasi (Catatan 35)	2,983,770,076	2,826,349,977	*General and Administrative Expenses (Note 35)*
Jumlah	**6,100,221,262**	**6,269,720,389**	***Total***

Sewa tanah merupakan tanah yang disewa oleh PT Tegar Mandiri Cemerlang (Entitas Anak dari PT Jasa Tirta Luhur) ke PT Tegar Primajaya berdasarkan "Perjanjian Sewa Menyewa Kavling" No. 003/PSMK-LGL/TP/I/2019 tanggal 28 Januari 2019, seluas 4.485 m^2 dengan jangka waktu perjanjian selama 5 tahun dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2024.

Land lease represents land leased by PT Tegar Mandiri Cemerlang (a Subsidiary of PT Jasa Tirta Luhur) to PT Tegar Primajaya based on the "Plot Lease Agreement" No. 003/PSMK-LGL/TP/I/2019 dated January 28, 2019, covering an area of 4,485 sqm with an agreement term of 5 years and ends on January 31, 2024.

Berdasarkan Perjanjian No. 031/TP-LGL/ADD-1/IX/2020 tanggal 8 September 2020, PT Tegar Primajaya menyetujui pengurangan luas lahan menjadi 3.935 m^2, dengan tarif sebesar Rp15.750/m^2.

Based on Agreement No. 031/TP-LGL/ADD-1/IX/2020 dated September 8, 2020, PT Tegar Primajaya agreed to reduce the land area to 3,935 sqm at a rate of Rp15,750/sqm.

Pada tanggal 31 Desember 2023, PT Tegar Mandiri Cemerlang telah menyesuaikan nilai aset hak-guna dan liabilitasnya dikarenakan pengurangan luasan lahan dari 3.935 m^2 menjadi 3.248 m^2. Tarif yang ditetapkan Rp15.750/m2 dengan kenaikan tarif 5% setiap tahunnya berdasarkan addendum perjanjian tanggal 31 Januari 2024 (catatan 44).

On December 31, 2023, PT Tegar Mandiri Cemerlang has adjusted the value of its right-of-use assets and liabilities due to a reduction in land area from 3,935 sqm to 3,248 sqm. Tariff is set at Rp15,750/sqm with a tariff increase of 5% annually based on the addendum to the agreement dated January 31, 2024 (note 44).

18. Setara Kas yang Dibatasi Pengunaannya / *18. Restricted Cash Equivalents*

Merupakan penempatan dana tantiem yang belum dibayarkan untuk Direktur Utama, Anggota Direksi lainnya, Ketua Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas yang ditangguhkan sebesar 21% selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SR-5/Wk.MBU.09/07/2023 tanggal 23 Juli 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Represents a placement of unpaid bonus funds for the President Director, other Members of the Board of Directors, Chairman of the Supervisory Board, and the Supervisory Board which is suspended by 21% for 3 (three) years based on the Letter of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SR-5/Wk.MBU.09/07/2023 dated July 23, 2023. The balance as of December 31, 2023 are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp
Direksi/ *Directors*	1,499,869,167	--
Dewan Pengawas/ *Board of Supervisory*	635,012,424	--
Jumlah/ *Total*	**2,134,881,591**	**--**

19. Aset Tidak Lancar Lainnya / *19. Other Non-Current Assets*

	2023 Rp	2022 Rp	
Rehabilitasi			*Handover Assets*
Aset Serah Kelola	8,551,461,268	--	*Rehabilitation*
Keanggotaan *Golf Club*	213,500,000	213,500,000	*Golf Club Membership*
Barang Usang/ Besi Tua	6,379,400	6,379,400	*Obsolence Goods*
Aset Tidak Produktif	698,400	698,400	*Non-productive Assets*
Jumlah	**8,772,039,068**	**220,577,800**	***Total***

Aset Serah Kelola

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 39/KPTS/1994 dari Eks Perum Otorita Jatiluhur dan Eks Proyek Serbaguna Jatiluhur, Perum Jasa Tirta II menerima aset serah kelola tanah seluas 16.306,86 hektar dan bangunan Eks Perum Otorita Jatiluhur dan Eks Proyek Serbaguna Jatiluhur. Dari aset tersebut, Perusahaan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan reinventarisasi yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Reinventarisasi (Pendataan Ulang) Aset yang Diserahoperasikan kepada Perum Jasa Tirta II Nomor: 03/BAST/II/2014 tanggal 21 Februari 2014 sehingga total luas tanah serah operasi menjadi 27.461 hektar dan bangunan seluas 2.430.750 m^2.

Handover Assets

Based on the Decree of the Minister of Public Works No. 39/KPTS/1994 from the Ex Perum Otorita Jatiluhur and the Ex Jatiluhur Multipurpose Project, Perum Jasa Tirta II received handed-over of land covering an area of 16,306.86 hectares and the buildings of the Ex Perum Otorita Jatiluhur and the Ex Jatiluhur Multipurpose Project. From these assets, the Company together with the Ministry of Public Works and Public Housing carried out reinventarization activities which were then outlined in the Minutes of Reinventory Results (Data Recollection) of Assets Handed Over to Perum Jasa Tirta II Number: 03/BAST/II/2014 dated February 21, 2014 bringing the total the land area handed over to operations is 27,461 hectares and the building area is 2,43,750 sqm.

	Bangunan/ *Building* *(sqm)*	**Tanah/ *Land* *(ha)***	
Unit Wilayah I	264,210	9,085	*Regional Unit I*
Unit Wilayah II	239,282	3,211	*Regional Unit II*
Unit Wilayah III	561,689	5,343	*Regional Unit III*
Unit Wilayah IV	1,365,570	9,822	*Regional Unit IV*
Jumlah	**2,430,750**	**27,461**	***Total***

Selama tahun 2023, Perusahaan melakukan rehabilitasi terhadap Aset Serah Kelola dan disusutkan dengan estimasi masa manfaat ekonomis paling lama 5 tahun dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2023, the Company will carry out rehabilitation of Handover Assets and depreciate them with an estimated economic useful life of a maximum of 5 years with the following details:

	2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Nilai Perolehan Aset Serah Kelola:					***Acquisition Cost of Handover Assets:***
Tanah	--	1,189,146,330	--	1,189,146,330	*Land*
Instalasi dan Jaringan	--	8,038,716,015	--	8,038,716,015	*Installation and Networks*
Sub Jumlah	--	9,227,862,345	--	9,227,862,345	*Sub Total*
Akumulasi Penyusutan:					***Accumulated Depreciation:***
Tanah	--	138,733,739	--	138,733,739	*Land*
Instalasi dan Jaringan	--	537,667,338	--	537,667,338	*Installation and Networks*
Sub Jumlah	--	676,401,077	--	676,401,077	*Sub Total*
Nilai Buku	**--**			**8,551,461,268**	***Book Value***

Beban penyusutan aset serah kelola untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dialokasikan seluruhnya ke Beban Pokok Pendapatan (Catatan 33).

Depreciation expense of handover assets for the year ended December 31, 2023 is allocated entirely in Cost of Revenue (Note 33).

Keanggotaan *Golf Club*
Merupakan keanggotaan *golf club* di PT Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya *Golf and Country Club* Bogor).

Golf Club Membership
Represents golf club membership in PT Surya Mas Duta Makmur (Rancamaya Golf and Country Club Bogor).

Aset Tidak Produktif
Aset tidak produktif merupakan aset tanah milik Perusahaan di Ciganea yang digunakan untuk jalan Tol Cipularang. Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan lahan pengganti yang terletak di Kampung Bongas, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dengan luas 40.230 m^2 melalui pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Tingkat II Purwakarta.

Non-Productive Assets
Non-productive assets represent land owned by the Company in Ciganea that built for Cipularang Toll road. The Ministry of Public Works has prepared a replacement land that located in Bongas Village, Sindangkasih Ward, Purwakarta District, Puwarkarta Regency, with an area of 40,230 sqm through discussion conducted by The Land Procurement of Purwakarta District Level II Committee.

Direksi telah mengirim surat ke Kementerian BUMN tanggal 28 November 2013 perihal Laporan Perkembangan Penyelesaian Permasalahan dan Usulan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Milik Perusahaan dengan Mekanisme Tukar Menukar.

The Directors had sent a letter to Ministry of SOEs dated November 28, 2013 regarding Progress Report of Problem Solving and Proposal of the Company's Fixed Assets Write-offs in Swap Scheme.

Tukar menukar tanah milik Perusahaan yang berlokasi di Ciganea dengan tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas saat ini telah diselesaikan. Sehingga tanah pengganti yang terletak di Kampung Bongas tercatat sebagai aset Perusahaan, namun untuk tanah Ciganea sampai saat ini belum dapat dikeluarkan dari daftar aset Perusahaan. Hal ini disebabkan karena harus menunggu persetujuan Kementerian untuk dilakukan penghapusan.

The swap of land owned by the Company located in Ciganea for a replacement land located in Bongas village has now been completed. So that the replacement land located in Bongas Village is recorded as the Company's assets, but for Ciganea land has not been removed from the Company's asset list. This is because they have to wait for the approval of the Ministry for write-off.

Berdasarkan Surat Sekertariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PS.0402-Sj/356 tanggal 20 April 2021 mengenai penyelesaian Tukar Menukar Tanah Perum Jasa Tirta II yang Terdampak Proyek Jalan Tol Cipularang di Kp. Ciganea, Desa Mekargalih, Kecamatan Purwakarta, menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan pelaksanaan tukar menukar secara definitif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

According to the Letter of the Secretariat General of the Ministry of Public Works and Public Housing No. PS.0402-Sj/356 dated April 20, 2021 regarding the completion of the Land Swap for Perum Jasa Tirta II Affected by the Cipularang Toll Road Project in Kp. Ciganea, Mekargalih Village, Purwakarta District, instructed the Directorate General of Highways of the Ministry of Public Works and Public Housing to immediately complete the definitive swap in accordance with the provisions of the legislation.

20. Utang Usaha / *20. Accounts Payable*

	2023 Rp	2022 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 38)/ *Related Parties (Note 38)*	12,280,653,659	2,827,633,246
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
Lembaga Pengembangan Ilmu dan Teknologi ITB	4,117,372,173	--
PT Bangun Eka Nusantara	2,682,634,125	--
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB	2,256,701,151	--
PT Virama Karya (Persero)	2,216,402,267	2,284,686,083
CV Tri Putri Dewi	1,188,934,875	--
CV Tunas Prima Darsa	1,011,620,644	--
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	933,586,850	--
PT Tirta Sarama Mulia Technology	730,543,593	1,143,210,377
PT Cogindo Daya Bersama	692,107,200	--
CV Djaja Sampurna Sinergi	549,734,160	--
PT Kartika Cipta Indonesia	--	2,501,329,500
Kantor Hukum K&K Advocates	--	723,250,000
PT SRW Asia	--	544,500,000
PT Inatama Metal Sejahtera	--	534,049,387
PT Adi Sarana Armada	--	40,817,392
Lainnya (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500* million)	4,069,424,848	2,873,562,021
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	20,449,061,886	10,645,404,760
Jumlah/ *Total*	**32,729,715,545**	**13,473,038,006**

Seluruh utang usaha pada 31 Desember 2023 dan 2022 dalam mata uang Rupiah.

All accounts payable as of December 31, 2023 and 2022 are in Rupiah.

21. Utang Retensi / *21. Retention Payables*

	2023 Rp	2022 Rp
PT Tirta Sarana Mulia Technology	704,902,294	397,198,624
PT Duta Rama	410,712,500	560,712,500
PT Tirta Sari Mandiri	213,630,477	213,630,478
Arra Janrafsasih	43,059,493	--
Lain-lain/ *Others*	9,527,045	8,520,709
Jumlah/ *Total*	**1,381,831,809**	**1,180,062,311**

22. Beban Akrual / *22. Accrued Expenses*

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Pegawai	67,013,802,607	61,253,845,784	*Employee Expenses*
Beban Non-Pegawai	19,613,189,218	10,523,589,837	*Non-Employee Expenses*
Jumlah	**86,626,991,825**	**71,777,435,621**	***Total***

Beban pegawai dialokasikan sebagai berikut: / *Employee expenses are allocated as follows:*

	2023 Rp	2022 Rp	
Insentif	25,543,778,620	21,506,819,929	*Incentive*
Beban Jasa Produksi	24,747,323,280	24,626,546,275	*Bonus Expenses*
Tantiem	15,000,000,000	10,150,000,000	*Tantiem*
Biaya Rumah Sakit	668,308,800	4,451,116,891	*Hospital Expenses*
Beban Pegawai Lainnya	1,054,391,907	519,362,689	*Other Employee Expenses*
Jumlah	**67,013,802,607**	**61,253,845,784**	***Total***

Beban non-pegawai dialokasikan sebagai berikut: / *Non-employee expenses are allocated as follows:*

	2023 Rp	2022 Rp	
Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan	16,019,247,740	7,347,292,048	*Construction, Operational and Maintenance*
Utilitas	1,332,952,293	1,405,402,177	*Utilities*
Bunga Pinjaman	269,843,864	82,500,000	*Interest Loan*
Konsultan	92,526,000	55,200,000	*Consultant*
Beban Penyediaan Air Baku	53,218,100	794,591,328	*Raw Water Supply Expenses*
Lainnya	1,845,401,221	838,604,284	*Others*
Jumlah	**19,613,189,218**	**10,523,589,837**	***Total***

23. Uang Muka Penjualan / *23. Sales Advances*

	2023 Rp	2022 Rp	
PT Multi Optimal Sentosa	133,130,907	462,000,000	*PT Multi Optimal Sentosa*
PT Belaputera Intiland	--	1,052,794,098	*PT Belaputera Intiland*
Jumlah	**133,130,907**	**1,514,794,098**	***Total***

Merupakan uang muka penjualan yang diterima dari PT Belaputera Intiland dan PT Multi Optimal Sentosa atas pekerjaan konstruksi.

Represent sales advances received from PT Belaputera Intiland and PT Multi Optimal Sentosa for construction work.

24. Pendapatan Diterima di Muka / *24. Deferred Revenue*

	2023 Rp	2022 Rp
Berdasarkan Pelanggan/ *By Customers*		
Pihak Berelasi (Catatan 38)/ *Related Parties (Note 38)*	7,385,702,571	7,278,711,168
Pihak Ketiga/ *Third Parties*		
PT Cikarang Listrindo	4,970,170,600	5,060,738,235
PT Indo Bharat Rayon	1,464,400,736	2,440,667,894
PT Triguna Internusa	1,269,445,667	2,031,113,067
PT Mora Telemática Indonesia	611,614,700	954,735,063
PT Gunung Raja Paksi	600,247,470	142,734,298
PT XL Axiata Tbk	551,755,100	17,100,000
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	13,466,495,376	12,102,268,327
Sub Jumlah - Pihak Ketiga/ *Sub Total - Third Parties*	22,934,129,649	22,749,356,884
Jumlah/ *Total*	30,319,832,220	30,028,068,052
Bagian Jangka Pendek/ *Current Portion*	(22,828,919,910)	(25,213,379,194)
Bagian Jangka Panjang/ *Non-Current Portion*	**7,490,912,310**	**4,814,688,858**

25. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya / *25. Other Short-Term Liabilities*

	2023 Rp	2022 Rp	
Pembelian Aset Tetap	21,467,352,851	31,539,521,003	*Acquisition of Fixed Assets*
Rekening Koran dalam Penyelesaian	4,565,488,122	4,957,013,091	*Bank Statements in Settlement*
Titipan Pemerintah Daerah Jawa Barat (Catatan 39-iv)	3,727,156,218	6,380,840,656	*Local Government of West Java Deposits (Note 39-iv)*
Titipan Tantiem	2,134,881,591	--	*Tantiem Deposits*
Pinjaman Dana	2,050,000,000	--	*Loans*
Uang Jaminan	528,489,012	528,489,012	*Deposits*
Asuransi	718,204,079	510,640,766	*Insurance*
Angsuran Rumah Dinas	151,146,153	151,146,153	*Official House Installments*
Jasa/ Pelayanan Pariwisata	138,814,648	106,474,772	*Tourism Services*
Lain-lain	670,772,424	527,508,588	*Others*
Jumlah	**36,152,305,098**	**44,701,634,041**	***Total***

Rincian pembelian aset tetap dari masing-masing *vendor* pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

List of acquisition of fixed assets from each vendors as of December 31, 2023 and 2022 is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp
PT Alaric Abadi Cemerlang	11,552,467,875	--
PT Infomedia Nusantara	1,806,473,609	3,238,955,498
PT Bisetta	1,758,040,200	1,738,829,674
PT Mulia Mandiri Marine	1,713,618,000	--
PT Spektrum Krisindo Elektrika	687,090,525	2,198,710,200
PT Air Surya Radiator	654,792,051	830,070,529
CV Tri Bangun Karya Persada	513,341,910	--
PT Ridha Tri Utama	--	4,069,347,584
PT Gelora Megah Sejahtera	--	3,015,578,500
KSO Anugerah Bangun Kencana dan Karya Konstrindo	--	2,641,255,989
PT Borneo Mitra Sinergi	--	2,011,551,447
PT Quantum Inti Utama	--	1,178,475,456
CV Djaja Sampurna Mandiri	--	994,193,700
CV Raisya Putri	--	991,017,990
PT Intra Indotama Karya	--	935,868,750
PT Arkindo	--	794,197,280
PT Kita Teknologi Indonesia	--	732,233,700
PT Energi Trans Mandiri	--	641,779,800
PT Perlinas Energi Utama	--	625,663,266
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	2,781,528,681	4,901,791,640
Jumlah	**21,467,352,851**	**31,539,521,003**

26. Liabilitas Sewa / *26. Lease Liabilities*

	2023 Rp	2022 Rp	
Liabilitas Sewa Bruto - Pembayaran Sewa Minimum			***Gross Lease Liabilities - Minimum Lease Payments***
Tidak Lebih dari 1 Tahun	2,138,173,500	6,751,857,546	*Not Later than 1 Year*
Lebih dari 1 Tahun	11,097,726,085	13,021,551,120	*Later than 1 Year*
Sub Jumlah	13,235,899,585	19,773,408,666	*Sub Total*
Dikurangi: Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(4,491,059,590)	(4,691,567,354)	*Less: Future Finance Charges on Leases*
Nilai Kini Liabilitas Sewa	**8,744,839,995**	**15,081,841,312**	***Present Value of Lease Liabilities***
Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo dalam Waktu 1 Tahun	(1,383,134,838)	(6,160,381,683)	*Less: Current Portion Mature within 1 Year*
Bagian Jangka Panjang	**7,361,705,157**	**8,921,459,629**	***Non-Current Portion***
Liabilitas Sewa Berdasarkan Jatuh Tempo			***Lease Liabilities by Due Date***
Tidak Lebih dari 1 Tahun	1,383,134,838	6,160,381,683	*Not Later than 1 Year*
Lebih dari 1 Tahun	7,361,705,157	8,921,459,629	*Later than 1 Year*
Jumlah	**8,744,839,995**	**15,081,841,312**	***Total***

Merupakan liabilitas sewa sehubungan dengan Aset Hak-Guna (Catatan 17).

Represent the lease liabilities in accordance to Right-of-Use Assets (Note 17).

27. Liabilitas Imbalan Kerja / *27. Employee Benefits Liabilities*

	2023 Rp	2022 Rp	
Imbalan Pascakerja	103,971,092,001	97,683,759,446	*Post-Employee Benefits*
Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	17,438,727,637	16,267,785,078	*Other Long-Term Benefits*
Manfaat Pensiun	165,645,433,809	167,066,434,919	*Pension Benefits*
Sub Jumlah	287,055,253,447	281,017,979,443	*Sub Total*
Bagian Jangka Pendek	(7,974,953,158)	(6,278,499,682)	*Current Portion*
Bagian Jangka Panjang	**279,080,300,289**	**274,739,479,761**	***Non-Current Portion***

Berdasarkan Surat Edaran Perum Jasa Tirta II Nomor: SD-24/DIR/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan menetapkan pemberian hak karyawan akibat Pemutusan Kerja mengacu pada ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II Nomor: PRD-09/DIR/06/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II, yang berpedoman pada Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Based on the Circular Letter of Perum Jasa Tirta II Number: SD-24/DIR/12/2021 dated December 31, 2021, the Company stipulates that the granting of employee rights due to Termination refers to the calculation provisions as stipulated in the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II Number: PRD-09/ DIR/06/2020 concerning Guidelines for the Management of Human Resources in Perum Jasa Tirta II, which is guided by Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower.

Perusahaan memiliki tiga program, yaitu imbalan pascakerja, imbalan kerja janga panjang lainnya dan manfaat pensiun.

The Company has three programs, namely post-employment benefits, other long-term benefits and pension benefit.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja dihitung oleh aktuaris independen dari Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Steven & Mourits dengan No. 0480/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 untuk tahun 2023 dan No. 0897/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 untuk tahun 2022.

Calculation of employee benefits liabilities is calculated by an independent actuary from the Actuarial Consulting Office (KKA) Steven & Mourits with No. 0480/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2024 dated February 6, 2024 for the year 2023 and No. 0897/ST-HR-PSAK24-PUJTII/II/2023 dated February 23, 2023, for the year 2022.

Perusahaan memberikan imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003) dan sesuai surat edaran nomor: SED-24/DIR/12/2021 imbalan tersebut tidak didanai.

The Company provides post-employment benefits and other long-term liabilities in accordance with the benefits based on Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003) and according to circular letter number: SED-24/DIR/12/2021 the benefits are not funded.

Asumsi dan metode yang digunakan dalam menghitung imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The assumptions and methods used in calculating employee benefits are as follows:

a. Asumsi Imbalan Pascakerja / ***a. Post-Employment Benefits Assumptions***

	2023	2022	
Asumsi Ekonomi			***Economic Assumptions***
Tingkat Diskonto:			*Discount Rate:*
Dana Pensiun	6.85%	7.40%	*Pension Benefit*
Imbalan Pascakerja	6.75%	7.30%	*Post-Employee Benefit*
Imbalan Jangka Panjang Lainnya	7.30%	7.05%	*Other Long-Term Benefit*
Kenaikan Gaji per Tahun	7.00%	7.00%	*Salary Increase per Annum*
Tingkat Inflasi Emas per Tahun	7.00%	7.00%	*Gold Inflation Rate per Annum*
Asumsi Demografi			***Demography Assumptions***
Tingkat Kematian			*Mortality Rate*
Dana Pensiun			*Pension Funds*
Sebelum Pensiun	TMI IV 2019(P/W)	TMI IV 2019(P/W)	*Before Pension*
Setelah Pensiun	*AMT/ANN* -1949 (P/W)	*AMT/ANN* -1949 (P/W)	*After Pension*
IPK-PKB dan IJPL	TMI IV 2019 (P/W)		*PEB-CLA and OL TEB*
Tingkat Pengunduran Diri (per Tahun)	1% per tahun sampai usia 20 dan menurun secara linier ke 0% di usia 56 tahun *1% p.a. up to age 20 years old and reducing linearly to 0% p.a. at age 56 years old*		*Resignation Rate (per Annum)*
Tingkat Kecacatan (per Tahun)	1% x Tingkat Mortalita	*1% x Morality Rate*	*Disability Rate (per Annum)*
Tingkat Pensiun (di Usia Pensiun)	100%	100%	*Retirement Rate (at Retirement Age)*
Asumsi Lainnya			***Other Assumptions***
Selisih Usia Suami Istri (IPK-Dana Pensiun)	5 tahun	*5 years*	*Spouse Age Difference (PEB-Pension Funds)*
Cadangan Manfaat Pensiun Anak (IPK-Dana Pensiun)	1% x Cadangan Manfaat Pensiun Peserta/ *1% x Member Pension Benefit Reserves*		*Pension Benefit Reserves for Child (PEB-Pension Funds)*

b. Imbalan Pascakerja

Perincian liabilitas imbalan kerja pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

b. Post-Employment Benefits

Details of employee benefit liabilities obligations as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Nilai Kini Kewajiban - Awal Tahun	97,683,759,446	81,082,059,297	*Present Value of Liabilities - Beginning of the Year*
Penyesuaian Liabilitas atas Reklasifikasi Imbalan	--	2,751,739,477	*Liabilities Adjustment on Reclassification in Benefits*
Beban Tahun Berjalan	14,883,479,689	13,384,229,440	*Current Year Expenses*
Biaya Jasa Lalu atas Perubahan Imbalan	--	14,339,203,425	*Cost of Past Service on Changes on Benefits*
Penyesuaian atas Penerapan Perubahan Atribusi Imbalan Kerja	--	(10,806,467,824)	*Adjustment Due to Implementation of Change on Employee Benefits Attribution*
Beban/ (Penghasilan) Komprehensif Lain	(1,169,973,374)	3,803,665,016	*Other Comprehensive Expenses/ (Income)*
Pembayaran Imbalan	(7,426,173,760)	(6,870,669,385)	*Benefit Payments*
Nilai Kini Liabilitas Akhir Tahun - Perusahaan	**103,971,092,001**	**97,683,759,446**	***Present Value of Liabilities at End of Year - The Company***

Perincian beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of employee benefit expenses are recognized in the income statement in 2023 and 2022 is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Penyesuaian Liabilitas atas Reklasifikasi Imbalan	--	2,751,739,477	*Liabilities Adjustment on Reclassification of Benefits*
Biaya Bunga	6,873,145,016	5,812,987,094	*Interest Cost*
Biaya Jasa Kini	8,010,334,673	7,571,242,346	*Current Service Cost*
Biaya Jasa Lalu atas Perubahan Imbalan	--	14,339,203,425	*Cost of Past Service on Changes on Benefits*
Penyesuaian atas Penerapan Perubahan Atribusi Imbalan Kerja	--	(10,806,467,824)	*Adjustment Due to Implementation of Change on Employee Benefits Attribution*
Jumlah	**14,883,479,689**	**19,668,704,518**	***Total***

Rekonsiliasi ekuitas imbalan pascakerja – penghasilan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan:

Post-employment benefit equity reconciliation – other comprehensive income on the statement of financial position:

	2023 Rp	2022 Rp	
Penghasilan Komprehensif Lain - Awal Tahun	(62,384,504,987)	(66,188,170,003)	*Other Comprehensive Income - Beginning of the Year*
Asumsi Aktuaria	2,470,681,406	608,579,784	*Actuary Assumption*
Penyesuaian atas Pengalaman	(3,640,654,780)	3,195,085,232	*Adjustment on Experience*
Penghasilan Komprehensif Lain - Akhir Tahun	**(63,554,478,361)**	**(62,384,504,987)**	***Other Comprehensive Income - End of Year***

	2023 Rp	2022 Rp	
Pajak Penghasilan Terkait			***Related Income Tax***
Saldo Awal	13,724,591,096	14,561,397,400	*Beginning Balance*
Mutasi Tahun Berjalan	257,394,142	(836,806,304)	*Movement in Current Year*
Saldo Akhir	13,981,985,238	13,724,591,096	*Ending Balance*
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Akhir Tahun	**(49,572,493,123)**	**(48,659,913,891)**	***Comprehensive Income (Loss) at the End of the Year***

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya / *c. Other Long-Term Benefits*

	2023 Rp	2022 Rp	
Liabilitas Bersih Awal Tahun	16,267,785,078	11,535,772,367	*Net Liabilities Beginning of the Year*
Penyesuaian atas Reklasifikasi	--	(2,751,739,477)	*Adjustment on Reclasification*
Beban Tahun Berjalan	3,207,955,159	8,918,253,578	*Current Year Expenses*
Pembayaran Manfaat	(2,037,012,600)	(1,434,501,390)	*Benefits Payment*
Liabilitas Bersih Akhir Tahun	**17,438,727,637**	**16,267,785,078**	***Net Liabilities End of Year***

Perincian beban imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui dalam laporan laba rugi pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Details of other long-term benefits expenses are recognized in the income statement in 2023 and 2022 is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Biaya Bunga	1,660,869,531	552,461,053	*Interest Cost*
Biaya Jasa Kini	1,095,920,908	1,289,582,485	*Current Service Cost*
Pengukuran Kembali atas NKKP	451,164,720	7,076,210,040	*Remeasurementof PVDBO*
Jumlah	**3,207,955,159**	**8,918,253,578**	***Total***

d. Manfaat Pensiun / *d. Pension Benefits*

	2023 Rp	2022 Rp	
Saldo Awal Tahun	167,066,434,919	120,284,374,803	*Beginning of the Year Balance*
Beban Tahun Berjalan	18,410,231,776	8,877,899,322	*Current Year Expenses*
Pembayaran Iuran	(34,977,618,567)	(14,355,431,229)	*Contribution Payments*
Manfaat/ Kerugian dari Perubahan Asumsi	15,146,385,681	52,259,592,023	*Gain/ Loss from Changes in Assumptions*
Saldo Akhir Tahun	**165,645,433,809**	**167,066,434,919**	***End of Year Balance***

Beban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif:

Pension benefits expense recognized in the statement of comprehensive income:

	2023 Rp	2022 Rp	
Biaya Jasa Kini	7,452,471,081	6,677,020,024	*Current Service Cost*
Bunga Neto atas Liabilitas (Aset)	29,049,656,868	25,687,106,779	*Net Interest of Liabilities (Assets)*
Imbal Hasil Ekspektasian	(18,091,896,173)	(17,745,861,148)	*Expected Benefit Return*
Penerapan Perubahan Atribusi Imbalan Kerja	--	(5,740,366,333)	*Implementation of Change on Employee Benefit Attribution*
Beban yang Diakui	**18,410,231,776**	**8,877,899,322**	***Recognized Expenses***

Rekonsiliasi aset program:

Reconciliation of program assets:

	2023 Rp	2022 Rp	
Nilai Kini Liabilitas Manfaat Pasti	418,662,219,441	403,361,922,924	*Present Value of Defined Benefit Plan*
Nilai Wajar Aset Program	(253,016,785,632)	(236,295,488,005)	*Fair Value of Plan Assets*
Posisi Pendanaan	**165,645,433,809**	**167,066,434,919**	***Funding Position***
Nilai Wajar Aset Program Awal Tahun	(236,295,488,005)	(238,438,219,194)	*Fair Value of Plan Assets Beginning of the Year*
Bunga atas Aset Program	(18,091,896,173)	(17,745,861,148)	*Interest on Plan Asset*
Pembayaran Iuran - Pemberi Kerja	(34,977,618,567)	(14,355,431,229)	*Contributions Payments - Employer*
Pembayaran Iuran - Peserta Program	(2,999,556,827)	(2,966,035,549)	*Contributions Payments - Plan Participants*
Pembayaran Manfaat Pensiun	21,412,185,756	20,991,420,683	*Benefit Pension Payments*
Kerugian Aktuaria	17,935,588,184	16,218,638,432	*Actuarial Loss*
Nilai Wajar Aset Program Akhir Tahun	**(253,016,785,632)**	**(236,295,488,005)**	***Fair Value of Plan Assets at the End of the Year***

Rekonsiliasi ekuitas manfaat pensiun – penghasilan komprehensif lain pada laporan posisi keuangan:

Reconciliation of pension benefit equity – other comprehensive income on the statement of financial position:

	2023 Rp	2022 Rp	
Pengukuran Kembali Liabilitas (Aset) Imbalan Pasti Neto - Awal	292,570,372,938	240,310,780,915	*Net Defined Benefit Liabilities (Assets) Remeasurement*
Perubahan Asumsi Keuangan	7,403,243,873	22,806,993,254	*Changes in Financial Assumption*
Penyesuaian Liabilitas Program	(10,192,446,376)	13,233,960,337	*Adjustments for Lialibilities Program*
Imbal Hasil atas Aset Program	17,935,588,184	16,218,638,432	*Benefit Return of Plan Assets*
Penghasilan Komprehensif Lain Akhir Tahun	**307,716,758,619**	**292,570,372,938**	***Other Comprehensive Income End of Year***

	2023 Rp	2022 Rp	
Pajak Penghasilan Terkait			***Related Income Tax***
Saldo Awal	(64,365,482,047)	(52,868,371,802)	*Beginning Balance*
Mutasi Tahun Berjalan	(3,332,204,850)	(11,497,110,245)	*Current Year Movement*
Saldo Akhir	(67,697,686,897)	(64,365,482,047)	*Ending Balance*
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Akhir Tahun	**240,019,071,722**	**228,204,890,891**	***Other Comprehensive Income (Loss) End of Year***

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefits and other long-term benefit is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Estimasi Imbalan yang Dibayarkan Tahun Depan	7,974,953,158	6,278,499,682	*Benefits Estimation Paid in Following Year*
Tahun ke - 2	11,177,016,332	5,498,300,349	*Second Year*
Tahun ke - 3	13,038,300,906	7,689,195,277	*Third Year*
Tahun ke - 4	14,645,114,725	11,711,001,465	*Fourth Year*
Tahun ke - 5	18,130,433,608	13,448,751,260	*Fifth Year*
Tahun ke - 6 sampai dengan Tahun ke - 10	112,059,285,543	98,704,244,195	*Sixth Year to Tenth Year*

Program imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko tingkat bunga dan risiko gaji, sebagai berikut:

A defined benefit plan provides the Group's exposure to interest rate risk and salary risk, as follows:

a. Risiko Tingkat Bunga
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi. Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

a. Interest Rate Risk
The present value of the defined pension obligation is calculated using discount rate determinated by reference to yields on high quality corporate bonds. Decrease bond interest rate would increase the liability bond program.

b. Risiko Gaji
Nilai kini kewajiban pensiun imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

b. Salary Risk
The present value of the defined benefit pension obligation is calculated by referring to the salary of the future program participants. Thus, the salary increase program participants will increase the program's liabilities.

Diasumsikan bahwa tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa depan berdampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laba rugi. Satu persen perubahan diasumsikan pada tingkat bunga dan kenaikan upah akan memiliki dampak sebagai berikut:

An assumption has been made that discount rate and future salary growth rates have a significant effect on the amounts recognized in profit or loss. One percent of change in the assumption of interest rate and wage growth will have the following impact:

	Imbalan Pascakerja/ *Post-Employment Benefits*	Imbalan Pascakerja Lainnya/ *Other Post-Employment Benefits*	Manfaat Pensiun/ *Pension Benefits*	
Tingkat Bunga +1%	90,648,497,000	15,310,563,000	389,119,729,472	*Interest Rate +1%*
Tingkat Bunga -1%	104,421,269,000	17,343,367,000	419,832,360,776	*Interest Rate -1%*

	Imbalan Pascakerja/ *Post-Employment Benefits*	Imbalan Pascakerja Lainnya/ *Other Post-Employment Benefits*	Manfaat Pensiun/ *Pension Benefits*	
Kenaikan Upah +1%	104,577,959,000	17,043,003,000	419,691,269,797	*Increase in Wage +1%*
Kenaikan Upah -1%	90,438,580,000	15,563,126,000	388,984,039,731	*Increase in Wage -1%*

28. Liabilitas Keuangan Lainnya / *28. Other Financial Liabilities*

	2023 Rp	2022 Rp
PT Bandung Management Economic Center	1,660,692,000	1,660,692,000
PT Dua Ribu Satu Pangripta	1,469,437,200	1,469,437,200
PT Marunda Mandiri Internasional	9,900,000,000	9,900,000,000
Jumlah/ *Total*	13,030,129,200	13,030,129,200
Bagian Jangka Pendek/ *Current Portion*	(3,300,000,000)	(2,200,000,000)
Bagian Jangka Panjang/ *Non-Current Portion*	**9,730,129,200**	**10,830,129,200**

Utang ke PT Bandung Management Economic Center dan PT Dua Ribu Satu Pangripta merupakan saldo reklasifikasi atas saldo utang usaha yang tidak dapat diselesaikan dan dilunaskan dalam siklus operasi normal.

Payables to PT Bandung Management Economic Center and PT Dua Ribu Satu Pangripta are reclassified balances of accounts payable balances that cannot be settled and paid in the normal operating cycle.

Utang ke PT Marunda Mandiri Internasional merupakan *Shareholder Loan* kepada PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 011/MMI-TMC/XI/2019 tanggal 4 November 2019 dan No. 001/MMI-TMC/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, PT Marunda Mandiri Internasional memberikan pinjaman dana kepada TMC masing-masing sebesar Rp8.000.000.000 dan Rp3.000.000.000, dimana uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran penyelesaian proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Marunda kepada kontraktor dan modal kerja operasional SPAM Marunda. Utang tersebut dikenakan bunga 8,5% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Februari 2030. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.900.000.000.

Payable to PT Marunda Mandiri Internasional represents Shareholder Loan to PT Tegar Mandiri Cemerlang (TMC). Based on the Loan Agreement No. 011/MMI-TMC/XI/2019 dated November 4, 2019 and No. 001/MMI-TMC/I/2020 dated January 17, 2020, PT Marunda Mandiri Internasional provided loan funds to TMC amounting to Rp8,000,000,000 and Rp3,000,000,000, respectively, wherein the money was used to pay for the completion of the Marunda Drinking Water Supply System (SPAM) project to contractors and working capital for the Marunda SPAM operation. The loan bears interest at 8.5% per annum and will mature on February 16, 2030. The balance as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp9,900,000,000, respectively.

29. Perpajakan / *29. Taxation*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

	2023 Rp	2022 Rp	
Pajak Dibayar di Muka - Bagian Lancar			***Prepaid Taxes - Current Portion***
Perusahaan			***The Company***
PPh Pasal 25	2,056,613,465	17,723,164,276	*Income Tax Article 25*
Entitas Anak			***The Subsidiaries***
PPN Masukan	--	111,209,891	*VAT In*
Sub Jumlah	2,056,613,465	17,834,374,167	*Sub Total*
Pajak Dibayar di Muka - Bagian Tidak Lancar			***Prepaid Taxes - Non-Current Portion***
Pajak Penghasilan Pasal 28a:			*Income Tax Article 28a:*
Tahun 2023	10,790,648,544	--	*Year 2023*
Tahun 2021	--	48,241,227,669	*Year 2021*
Sub Jumlah	10,790,648,544	48,241,227,669	*Sub Total*
Jumlah	**12,847,262,009**	**66,075,601,836**	***Total***

Uang muka Pajak Penghasilan Pasal 25 sejumlah Rp2.056.613.465 merupakan uang muka pajak atas kelebihan pembayaran utang pajak penghasilan pasal 29 dari pembetulan SPT Badan Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2023 yang dipindahbukukan dalam perhitungan pajak penghasilan tahun 2024 berdasar bukti pemindabukuan nomor: KET-00027/PBK/KPP.1903/2024 tanggal 5 Januari 2024.

The advance on Article 25 Income Tax in the amount of Rp2,056,613,465 represents a tax advance on the overpayment of income tax payable article 29 from the correction of the 2022 Corporate Tax dated December 27, 2023 which was overbooked to the calculation of income tax in 2024 based on document overbooked number: KET-00027/PBK/KPP.1903/2024 dated January 5, 2024.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan tahun 2021 No: 00057/406/21/051/23 tanggal 26 September 2023, Perusahaan ditetapkan lebih bayar atas Pajak Penghasilan tahun 2021 sebesar Rp42.587.974.211 dari jumlah yang dibukukan sebesar Rp48.241.227.669. Berdasarkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No: 00772A tanggal 10 Oktober 2023, jumlah lebih bayar yang disetujui setelah dikurangi kompensasi hutang pajak sejumlah Rp37.497.845 melalui pemotongan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sejumlah Rp42.550.476.366.

Based on the in 2021 Income Tax Overpayment Assessment Letter No: 00057/406/21/051/23 dated September 26, 2023, the Company is determined to have overpaid the Income Tax in 2021 amounting to Rp42,587,974,211 from sum recorded amounting to Rp48,241.227,669. Based on Letter of the Order to Pay the Excess Tax No: 00772A dated October 10, 2023, the approved overpayment after deducting the tax payable compensation amounting to Rp37,497,845 through the withholding of the Letter of Order for Paying Excess Tax (SPMKP) amounting to Rp42,550,476,366.

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

	2023 Rp	2022 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Pertambahan Nilai - Keluaran	20,542,445,404	15,436,692,494	*Value Added Tax - Out*
Pajak Pertambahan Nilai - Masukan Wajib Pungut	7,498,482,131	4,155,551,248	*Value Added Tax - In Withholding Tax*
PPh Pasal 21	25,109,915,258	10,075,866,427	*Income Tax Article 21*
PPh Pasal 22	173,816,155	178,431,949	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	654,369,698	274,647,721	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 4 (2) Final	1,737,153,207	2,422,538,167	*Income Tax Article 4 (2) Final*
PPh Pasal 29	--	10,961,208,599	*Income Tax Article 29*
Pajak Penerangan Jalan	1,148,463,546	6,822,268,877	*Street Lighting Tax*
Pajak Hotel dan Restoran	156,170,717	119,502,801	*Hotel and Restaurant Tax*
Pajak Pengambilan Air Permukaan	133,286,000	8,369,289,000	*Ground Water Intake Tax*
Pajak Parkir	5,649,000	3,808,500	*Parking Tax*
Sub Jumlah	57,159,751,116	58,819,805,783	*Sub Total*
Entitas Anak			***The Subsidiaries***
PPh Pasal 21	6,733,960	2,304,412	*Income Tax article 21*
PPh Pasal 23	26,573,709	41,441,723	*Income Tax article 23*
PPh Pasal 4 (2)	111,022,103	2,649,438	*Income Tax article 4(2)*
Pajak Pertambahan Nilai	946,043,516	19,325,805	*Value Added Tax*
Sub Jumlah	1,090,373,288	65,721,378	*Sub Total*
Jumlah	**58,250,124,404**	**58,885,527,161**	***Total***

c. Beban (Manfaat) Pajak / *c. Tax Expenses (Benefits)*

	2023 Rp	2022 Rp	
Perusahaan			***The Company***
Pajak Kini	30,873,778,760	53,833,157,400	*Current Tax*
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak No. 00057/406/21/051/23	5,653,253,458	--	*Adjustment on Notice of Tax Assessment No. 00057/406/21/051/23*
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak No. 00010/406/20/051/22	--	3,221,638,529	*Adjustment on Notice of Tax Assessment No. 00010/406/20/051/22*
Beban Pajak Tangguhan	(539,242,924)	(9,463,768,198)	*Deferred Tax Expenses*
Sub Jumlah	35,987,789,294	47,591,027,731	*Sub Total*
Entitas Anak			***The Subsidiaries***
Beban Pajak Tangguhan	(352,113,642)	(983,864,752)	*Deferred Tax Expenses*
Sub Jumlah	(352,113,642)	(983,864,752)	*Sub Total*
Jumlah	**35,635,675,652**	**46,607,162,979**	***Total***

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current Tax

A reconciliation between income before tax per statements of comprehensive income and taxable income is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan Badan	173,652,681,742	191,855,288,844	*Consolidated Profit Before Corporate Income Tax*
Dikurangi:			*Less:*
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	(3,505,751,514)	(4,989,163,871)	*Loss Before Income Tax of Subsidiaries*
Laba Sebelum Pajak	177,158,433,256	196,844,452,715	*Profit Before Tax*
Perbedaan Tetap			***Permanent Differences***
Pendapatan Pemanfaatan Lahan yang dikenakan Pajak Final - Bersih	(57,826,111,767)	(67,510,752,785)	*Land Utilization Revenue Subjected to Final Tax - Net*
Bunga Jasa Giro dan Deposito Berjangka	(27,815,935,553)	(12,355,690,395)	*Current Account and Time Deposits Interest*
Kesejahteraan Sosial	10,058,186,591	10,863,231,584	*Social Welfare*
Beban Pajak Final Lahan	5,782,611,179	6,751,075,280	*Land Final Tax Expenses*
Jamuan	2,278,630,777	1,712,805,220	*Entertainment*
Majalah dan Surat Kabar	175,151,500	161,827,500	*Magazine and Newspaper*
Biaya Overhead Sewa Lahan yang Telah Dikenakan Pajak Final	966,530,458	1,308,592,913	*Overhead Cost of Land Utilization Subjected to Final Tax*
Beban Lainnya	7,309,157,117	20,964,131,853	*Other Expenses*
Beban Pajak Lainnya	9,759,197,299	12,999,027,141	*Other Tax Expense*
Biaya Perawatan	--	21,619,261,886	*Medical Expenses*
Biaya Personalia	--	2,526,863,840	*General Affair Expenses*
Beban Promosi dan Pemasaran	8,674,249,811	5,794,215,282	*Promotion and Marketing Expenses*
Jumlah	(40,638,332,588)	4,834,589,319	*Total*
Perbedaan Waktu			***Timing Differences***
Beban Penyusutan Aset Tetap	(5,780,424,783)	(5,139,018,862)	*Depreciation Expenses of Fixed Assets*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	6,177,411,700	(379,856,093)	*Allowance for Impairment Losses on Account Receivable*
Jasa Produksi	130,306,355	12,560,386,187	*Bonuses*
Tantiem	6,981,500,000	2,650,000,000	*Tantiem*
Insentif	4,055,488,041	21,506,819,929	*Incentive*
Beban Imbalan Kerja	(7,822,468,852)	11,819,425,091	*Employee Benefit Expenses*
Aset Hak-Guna	5,624,116,973	5,362,148,338	*Right-of-Use Assets*
Liabilitas Sewa	(5,550,671,241)	(5,362,776,415)	*Lease Liabilities*
Jumlah	3,815,258,192	43,017,128,175	*Total*
Laba Kena Pajak	**140,335,358,860**	**244,696,170,209**	***Taxable Income***
Pembulatan	**140,335,358,000**	**244,696,170,000**	***Rounded***

	2023 Rp	2022 Rp	
Rincian Beban dan Utang (Piutang) Pajak Kini adalah sebagai berikut:			*Details of Expenses and Payables (Receivables) on Current Tax are as follows:*
Beban Pajak Kini			*Current Tax Expenses*
Tarif 22%	30,873,778,760	53,833,157,400	*22% Tariff*
Pajak Dibayar di Muka			*Prepaid Taxes*
PPh Pasal 22	3,516,955,088	3,162,322,525	*Income Tax Article 22*
PPh Pasal 23	3,570,493,782	1,933,368,408	*Income Tax Article 23*
PPh Pasal 25	34,576,978,434	37,776,257,868	*Income Tax Article 25*
Jumlah	41,664,427,304	42,871,948,801	*Total*
Kurang/ (Lebih) Bayar Pajak Penghasilan	**(10,790,648,544)**	**10,961,208,599**	***Under/ (Over) Payment of Income Tax***

d. Pajak Tangguhan

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

d. Deferred Tax

The detail of the deferred tax is as follows:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022* Rp	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak/ *Tax Base Correction* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Income for the Year* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ *Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year* Rp	31 Desember 2023/ *December 31, 2023* Rp	
Perusahaan						***The Company***
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	19,316,223,155	(254,863,377)	1,359,030,574	--	20,420,390,352	*Allowance for Impairment Losses on Financial Assets*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan	41,642,304	--	--	--	41,642,304	*Allowance for Impairment Losses on Inventory*
Jasa Produksi	5,417,840,181	--	28,667,398	--	5,446,507,579	*Bonuses*
Tantiem	2,233,000,000	--	1,535,930,000	--	3,768,930,000	*Tantiem*
Insentif	4,731,500,384	--	892,207,369	--	5,623,707,753	*Incentive*
Imbalan Kerja	61,706,856,344	--	(1,720,943,147)	3,079,693,491	63,065,606,688	*Employee Benefits*
Beban Penyusutan Aset Tetap	690,680,145	(7,717,321)	(1,271,693,452)	--	(588,730,628)	*Depreciation of Fixed Assets*
Aset Hak-Guna	(1,399,576,097)	132,654,345	1,237,305,734	--	(29,616,018)	*Right-of-Use Assets*
Liabilitas Sewa	1,441,099,654	(170,187,525)	(1,221,147,673)	--	49,764,456	*Lease Liabilities*
Jumlah Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	**94,179,266,070**	**(300,113,878)**	**839,356,802**	**3,079,693,491**	**97,798,202,485**	***Total Deferred Tax (Liabillities) Assets***
Entitas Anak	3,314,525,801	91,795,704	260,317,938	(4,882,783)	3,661,756,661	***The Subsidiaries***
Jumlah	**97,493,791,871**	**(208,318,174)**	**1,099,674,740**	**3,074,810,708**	**101,459,959,146**	***Total***

	31 Desember 2021/ *December 31, 2021* Rp	Koreksi Dasar Pengenaan Pajak/ *Tax Base Correction* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laporan Laba Rugi/ *Credited (Charged) to Income for the Year* Rp	Dikreditkan (Dibebankan) ke Pendapatan Komprehensif Lain/ *Credited (Charged) to Others Comprehensive Income for the Year* Rp	31 Desember 2022/ *December 31, 2022* Rp	
Perusahaan						***The Company***
Cadangan Kerugian						*Allowance for Impairment Losses*
Penurunan Nilai Aset Keuangan	19,399,791,495	--	(83,568,340)	--	19,316,223,155	*on Financial Assets*
Cadangan Kerugian						*Allowance for Impairment Losses*
Penurunan Nilai Persediaan	41,642,304	--	--	--	41,642,304	*on Inventory*
Jasa Produksi	2,654,555,220	--	2,763,284,961	--	5,417,840,181	*Bonuses*
Tantiem	1,650,000,000	--	583,000,000	--	2,233,000,000	*Tantiem*
Insentif	--	--	4,731,500,384	--	4,731,500,384	*Incentive*
Imbalan Kerja	46,778,754,572	--	2,600,273,520	12,327,828,252	61,706,856,344	*Employee Benefits*
Beban Penyusutan Aset Tetap	1,821,264,295	--	(1,130,584,150)	--	690,680,145	*Depreciation of Fixed Assets*
Aset Hak-Guna	--	(2,579,248,732)	1,179,672,634	--	(1,399,576,097)	*Right-of-Use Assets*
Liabilitas Sewa	41,661,734	2,579,248,732	(1,179,810,811)	--	1,441,099,654	*Lease Liabilities*
Jumlah Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan	**72,387,669,620**	**--**	**9,463,768,198**	**12,327,828,252**	**94,179,266,070**	***Total Deferred Tax (Liabillities) Assets***
Entitas Anak	2,324,572,750		983,864,752	6,088,297	3,314,525,799	***The Subsidiaries***
Jumlah	**74,712,242,370**		**10,447,632,950**	**12,333,916,549**	**97,493,791,869**	***Total***

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to income before tax is as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Laba Konsolidasian Sebelum Pajak Penghasilan Badan	173,652,681,742	191,855,288,844	*Consolidated Profit Before Corporate Income Tax*
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Anak	(3,505,751,514)	(4,989,163,871)	*Loss Before Income Tax of Subsidiaries*
Laba Sebelum Pajak	177,158,433,256	196,844,452,715	*Profit Before Tax*

	2023 Rp	2022 Rp	
Tarif Pajak yang Berlaku			*Applicable Effective Tax Rate*
22% x Rp177.158.433.256	(38,974,855,316)	--	*22% x Rp177,158,433,256*
22% x Rp196.844.452.715	--	(43,305,779,597)	*22% x Rp196,844,452,715*
Pengaruh Pajak atas Beban yang Tidak Dapat Dikurangkan Menurut Pajak:			*Tax Effect on Non Deductible Expense:*
Bunga Jasa Giro dan Deposito Berjangka	6,119,505,822	2,718,251,887	*Current Account and Time Deposits Interest*
Pendapatan Pemanfaatan Lahan yang Dikenakan Pajak Final	12,721,744,589	14,852,365,613	*Land Utilization Income Subject to Final Tax*
Kesejahteraan Sosial	(2,212,801,050)	(2,389,910,948)	*Social Welfare*
Beban Pajak Final Lahan	(1,272,174,459)	(1,485,236,562)	*Land Final Tax Expenses*
Jamuan	(501,298,771)	(376,817,148)	*Entertainment*
Majalah dan Surat Kabar	(38,533,330)	(35,602,050)	*Magazines and Newspaper*
Biaya atas Pendapatan yang Pajaknya Telah Dikenakan Final	(212,636,701)	(287,890,441)	*Costs over Revenue which Tax is Subjected to Final*
Beban Lainnya	(1,608,014,566)	(4,612,109,008)	*Other Expenses*
Beban Pajak Lainnya	(2,147,025,239)	(2,859,785,971)	*Other Tax Expense*
Biaya Perawatan	--	(4,756,237,615)	*Medical Costs*
Biaya Personalia	--	(555,910,045)	*General Affair Cost*
Beban Promosi dan Pemasaran	(1,908,334,958)	(1,274,727,362)	*Promotion and Marketing Expenses*
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	**(30,034,423,979)**	**(44,369,389,247)**	***Total Income (Expense) Tax Benefit***
Beban Pajak Kini	(30,873,778,760)	(53,833,157,400)	*Current Tax Expense*
Manfaat Pajak Tangguhan	839,356,802	9,463,768,198	*Deferred Tax Benefits*
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak	(300,113,878)	--	*Tax Base Correction*
Penyesuaian atas Surat Ketetapan Pajak	(5,653,253,458)	(3,221,638,529)	*Adjustment on Notice of Tax Assessment*
Jumlah Beban Pajak	**(35,987,789,294)**	**(47,591,027,731)**	***Total Tax Expenses***
Entitas Anak			***The Subsidiaries***
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	352,113,642	983,864,752	*Deferred Tax Expenses (Benefits)*
Sub Jumlah	352,113,642	983,864,752	*Sub Total*
Jumlah	**(35,635,675,652)**	**(46,607,162,979)**	***Total***

30. Modal Pemerintah / *30. Government Capital*

	2023 Rp	2022 Rp	
Modal Dasar	46,000,000,000	46,000,000,000	*Authorized Capital*
Penambahan Modal	118,547,635,935	118,547,635,935	*Additional Paid-Up Capital*
Jumlah	**164,547,635,935**	**164,547,635,935**	***Total***

1. Penetapan Modal Perusahaan, tanggal 1 Januari 1991 berdasarkan SK Menteri Keuangan No. 202/KMK.13/1992 tanggal 5 Februari 1992.	46,000,000,000	*1. Company's Capital dated January 1, 1991 based on Ministry of Finance Decree No. 202/KMK.13/1992 dated February 5, 1992.*
2. Penambahan Modal Negara berupa Instalasi dan Jaringan berdasarkan PP No. 78 tahun 1998 tanggal 22 Oktober 1998.	60,287,829,310	*2. Additional Government Capital consisting of Installation and Network based on Government Regulation No. 78 year 1998 dated October 22, 1998.*
3. Penambahan Modal Negara Berupa lahan ex Departemen PU Divisi I PJT II berdasarkan PP No. 90 tahun 2000.	18,439,506,625	*3. Additional State Capital consisting of ex - Department PU's land Division I PJT II based on Government Regulation No. 90 year 2000.*
4. Penambahan Modal Negara berupa Rehabilitasi/ *up-rating* PLTA Ir. H. Djuanda berdasarkan PP No. 4 tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009.	39,820,300,000	*4. Additional Government Capital consisting of HEPP Ir. H. Djuanda rehabilitation/ up-rating based on Government Regulation No. 4 year 2009 dated January 16, 2009.*
Jumlah	**164,547,635,935**	***Total***

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-342/MBU/06/2023 tanggal 23 Juni 2023, Pemegang Saham memberikan Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahaan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2022 dan menetapkan penggunaan laba bersih konsolidasian Tahun Buku 2022 seluruhnya sebagai laba ditahan.

Based on the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-342/MBU/06/2023 dated June 23, 2023, the Shareholders approve the Annual Report and Ratification of the Financial Statements of the Company Financial Year of 2022 and stipulate the use of consolidated net profit for the Financial Year of 2022 entirely as retained earnings.

31. Kepentingan Non Pengendali / *31. Non-Controlling Interest*

	2023 Rp	2022 Rp	
PT Tegar Mandiri Cemerlang			***PT Tegar Mandiri Cemerlang***
Nilai Tercatat Awal	7,420,174,105	7,940,623,902	*Beginning Carrying Amount*
Bagian Rugi Bersih	(751,737,341)	(520,449,797)	*Net Loss Share*
Penyesuaian	--	--	*Adjustments*
Sub Jumlah	6,668,436,764	7,420,174,105	*Sub Total*
PT Jasa Tirta Luhur			***PT Jasa Tirta Luhur***
Nilai Tercatat Awal	96,918,845	131,983,196	*Beginning Carrying Amount*
Bagian Rugi Bersih	(24,019,005)	(34,848,493)	*Net Loss Share*
Kerugian Aktuaria	173,117	(215,858)	*Actuary Loss*
Penyesuaian	--	--	*Adjustments*
Sub Jumlah	73,072,957	96,918,845	*Sub Total*
Jumlah	**6,741,509,721**	**7,517,092,950**	***Total***

32. Pendapatan Usaha / *32. Operating Revenue*

	2023 Rp	2022 Rp	
Pendapatan Sumber Daya Air			*Water Resources Revenue*
Pendapatan Listrik	500,051,834,612	493,119,023,962	*Electricity Revenue*
Pendapatan Air Baku	456,051,811,448	368,007,894,097	*Raw Water Revenue*
Pendapatan Air Bersih	8,682,004,906	9,053,959,948	*Clean Water Revenue*
Sub Jumlah	964,785,650,966	870,180,878,007	*Sub Total*
Pendapatan Non Sumber Daya Air			*Non Water Resources Revenue*
Pendapatan Pemanfaatan Lahan	57,826,111,767	67,510,752,785	*Land Utilization Revenue*
Pendapatan Konstruksi	32,731,799,361	21,192,626,752	*Construction Revenue*
Pendapatan Pariwisata	11,780,666,032	11,015,802,013	*Tourism Revenue*
Pendapatan Laboratorium	8,453,587,100	7,998,874,351	*Laboratory Revenue*
Pendapatan Air Minum Dalam Kemasan	2,879,726,595	2,732,059,290	*Bottled Drinking Water Revenue*
Pendapatan Sewa	698,999,000	38,056,000	*Rent Revenue*
Pendapatan Operasional dan Pemeliharaan	653,700,258	--	*Operational and Maintenance Revenue*
Pendapatan Usaha Lainnya	360,869,339	378,102,677	*Other Operating Revenue*
Sub Jumlah	115,385,459,452	110,866,273,868	*Sub Total*
Jumlah	**1,080,171,110,418**	**981,047,151,875**	***Total***

Pendapatan Listrik

Berdasarkan Kesepakatan Interim atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda Nomor: SP.PPTL-10/DIR/12/2022 antara Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II dengan PT PLN (Persero) tanggal 29 Desember 2022, harga jual energi listrik tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp346/kWh.

Berdasarkan Peraturan Direksi Perum Jasa Tirta II No. 1/3/PRT/2015 tentang Tarif Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda Bagi Pelanggan Non-PLN yang Berada di bawah Penguasaan Perum Jasa Tirta II tanggal 30 Januari 2015, harga jual energi listrik untuk pelanggan non-PLN ditetapkan 80% dari tarif tenaga listrik yang ditetapkan pemerintah.

Electricity Revenue

Based on Interim Agreement of the Sale and Purchase of Electricity Power HEPP Ir. H. Djuanda Number: SP.PPTL-10/DIR/12/2022 between the Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II and PT PLN (Persero) on December 29, 2022, the selling price of electrical energy in 2023 and 2022 is amounting to Rp346/kWh, respectively.

Based on the Regulation of the Board of Directors of Perum Jasa Tirta II No. 1/3/PRT/2015 concerning the Electricity Tariff of HEPP Ir. H. Djuanda for Non-PLN Customers Under the Control of Perum Jasa Tirta II dated January 30, 2015, the selling price of electricity for non-PLN customers is set at 80% of the electricity tariff set by the government.

Pendapatan Air Baku

Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) untuk penggunaan sumber daya air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan untuk tahun 2023 sebesar Rp294,00/m^3 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 26/KPTS/M/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang berlaku surut.

Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi PDAM di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp130,81/m^3, bagi Industri di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp224,71/m^3 dan bagi Industri yang

Raw Water Revenue

The Water Resources Management Service Fee (BJPSDA) tariff for the use of water resources for the Regional Drinking Water Company (PDAM) for the Special Capital Region of Jakarta is set for 2023 at Rp294.00/cbm in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 26/KPTS/M/2023 dated January 12, 2023, by which apply retroactively.

The BJPSDA tariff for the use of water resources for PDAMs in West Java Province is Rp130.81/cbm, for Industry in West Java Province is Rp224.71/cbm and for Industries that take water

mengambil air langsung dari Waduk Jatiluhur sebesar Rp251,80/m^3 terhitung mulai tanggal 12 Januari 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 27/KPTS/M/2023 yang berlaku surut.

directly from Jatiluhur Reservoir amounting to Rp251.80/cbm starting from January 12, 2023 in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 27/KPTS/M/2023, by which apply retroactively.

Tarif BJPSDA untuk pemanfaatan sumber daya air bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Waduk Ir. H. Djuanda sebesar Rp85,28/kWh, Saguling sebesar Rp14,01/kWh dan Cirata sebesar Rp45,69/kWh terhitung mulai tanggal 22 November 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 935/KPTS/M/2017.

The BJPSDA tariff for the use of water resources for Hydroelectric Power Plants (HEPP) in Ir. H. Djuanda is Rp85.28/kWh, Saguling is Rp14.01/kWh and Cirata is Rp45.69/kWh starting on November 22, 2017 in accordance with the Decree of the Minister of Public Works and Public Housing No. 935/KPTS/M/2017.

Pendapatan Air Bersih
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha No. KSU-01/DIR/JTL/V/2021 tentang Pengelolaan AMDK Jatiluhur, SPAM Biki dan SPAM Curug dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta II tanggal 7 Mei 2021 dan diperbarui tanggal 30 Desember 2021, Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan Pemegang Saham untuk melakukan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Clean Water Revenue
Based on the Business Cooperation Agreement No. KSU-01/DIR/JTL/ V/2021 concerning Management of Jatiluhur AMDK, Biki SPAM and Curug SPAM with Perusahaan Umum Jasa Tirta II dated May 7, 2021 and been renewed on December 30, 2021, the Subsidiaries entered into an agreement with Shareholder to sell Bottled Drinking Water (AMDK) and clean water through the Drinking Water Supply System (SPAM). This agreement is valid until December 31, 2025.

Berdasarkan Surat Perjanjian Penggunaan Air Bersih No. SPPAB-004/DIR-JTL/SPAM.BC/2023 tanggal 4 Agustus 2023, Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan Unit PLTA Perum Jasa Tirta II untuk melakukan penjualan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Based on the Clean Water Usage Agreement Letter No. SPPAB-004/DIR-JTL/SPAM.BC/2023 dated August 4, 2023, the Subsidiaries entered into an agreement with the HEPP Unit Perum Jasa Tirta II to sell clean water through the Drinking Water Supply System (SPAM). This agreement is valid until December 31, 2025.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Air Olahan No. 16/DIR/TMC-GCP/PJB.AO/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, PT Tegar Mandiri Cemerlang mengadakan perjanjian penjualan air olahan dengan PT Global Citra Primakarya sebagai pengelola Kawasan Industri dan Pergudangan Marunda Center dengan jangka waktu perjanjian selama 20 tahun.

Based on the Processed Water Sale and Purchase Agreement No. 16/DIR/TMC-GCP/PJB.AO/X/2019 dated October 16, 2019, the PT Tegar Mandiri Cemerlang entered into an agreement of distribution of processed water with PT Global Citra Primakarya as manager of Marunda Center Industrial and Warehousing Area with an agreement term of 20 years.

Pendapatan Konstruksi
PT Multi Optimal Sentosa
Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. MOS-0062/SPK-JTL/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021, Entitas Anak mengadakan kerjasama dengan PT Multi Optimal Sentosa untuk melakukan pekerjaan konstruksi Pembangunan Sistem Jaringan Penyediaan Air Industri untuk Kawasan Industri Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) dengan nilai kontrak Rp37.500.000.000 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 15 Desember 2021. Perjanjian ini telah dilakukan addendum empat kali, dimana

Construction Revenue
PT Multi Optimal Sentosa
Based on Work Order Letter No. MOS-0062/SPK-JTL/VI/2021 dated June 14, 2021, the Subsidiaries entered into a cooperation with PT Multi Optimal Sentosa to carry out construction work for the Construction of an Industrial Water Supply Network System for the Jatiluhur Industrial Smart City Industrial Area (JISC) with a contract value amounting to Rp37,500,000,000 with a work completion period of up to December 15, 2021. This agreement has been amended four times, where the First to Third Addendums relate to the

Addendum Pertama sampai Ketiga terkait perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 30 September 2022 dan adanya penambahan pekerjaan dengan nilai kontrak Rp3.489.174.448. Addendum Keempat terkait perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 31 Januari 2023. PT Multi Optimal Sentosa menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan sampai dengan 8 Desember 2023 melalui Surat Persetujuaan Perubahan Waktu Pelaksanaan No. 082/MOS/EXT-QS/X/2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2023 dan 2022 penyelesaian kontrak masing-masing adalah 96,91% dan 92,25% untuk kontrak awal dan penyelesaian kontrak addendum masing–masing adalah 92,31% dan 67,65%.

extension of the work completion period to September 30, 2022 and the addition of work with a contract value amounting to Rp3,489,174,448. The Fourth Addendum relates to the extension of the time for completion of work until January 31, 2023. PT Multi Optimal Sentosa agreed to extend the implementation time until December 8, 2023 through Letter of Approval for Changes in Implementation Time No. 082/MOS/EXT-QS/X/2023. As of the financial reporting date of December 31, 2023 and 2022, the completion of the contract was 96.91% and 92.25%, respectively, for the initial contract and the completion of the addendum contract was 92.31% and 67.65%.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. MOS-0100/SPK-JTL/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber Kemakmuran mengadakan kerjasama dengan PT Multi Optimal Sentosa untuk melakukan pekerjaan konstruksi Pembuatan *Tower* Menara Air 300 x 2 m^3 di Kawasan Jatiluhur *Industrial Smart City* (JISC) dengan nilai kontrak Rp3.850.000.000 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 14 Februari 2023. Perjanjian ini telah dilakukan addendum, dimana Addendum Pertama terkait perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 16 Februari 2024 dan adanya penyesuaian nilai kontrak menjadi Rp3.266.300.000. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2023 dan 2022, penyelesaian kontrak masing-masing adalah 99,22% dan 16,89%.

Based on Work Order No. MOS-0100/SPK-JTL/VIII/2022 dated August 23, 2022, Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber Kemakmuran entered into a collaboration with PT Multi Optimal Sentosa to carry out construction work of 300 x 2 cbm Water Tower in the Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) Area with contract value amounting to Rp3,850,000,000 with a work completion period up to February 14, 2023. An addendum has been made to this agreement, where the First Addendum relates to an extension of the work completion period to February 16, 2024 and an adjustment to the contract value amounting to Rp3,266,300,000. As of the financial reporting dates of December 31, 2023 and 2022, contract completion was 99.22% and 16.89%, respectively.

PT Kawasan Industri Medan (Persero)
Berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPn-03-B/CEOF/COS/0123 tanggal 27 Januari 2023, PT Jasa Tirta Luhur mengadakan kerjasama dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) untuk melakukan Proyek Pembangunan Sumur Air Tanah di Kawasan Industri Medan dengan nilai kontrak Rp19.853.440.042 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 14 Februari 2023. Perjanjian ini telah dilakukan addendum dua kali, dimana Addendum Pertama dan Kedua terkait perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 27 Agustus 2023 dan adanya penyesuaian nilai kontrak menjadi Rp19.319.946.717.

PT Kawasan Industri Medan (Persero)
Based on Work Implementation Agreement No. SPn-03-B/CEOF/COS/0123 dated January 27, 2023, PT Jasa Tirta Luhur entered into a collaboration with PT Kawasan Industri Medan (Persero) to carry out a Ground Water Well Construction Project Medan Industrial Area with a contract value amounting to Rp19,853,440,042 with the work completion period until February 14, 2023. This agreement has been amended twice, where the First and Second Addendums relate to extending the work completion period to August 27, 2023 and an adjustment to the contract value amounting to Rp19,319,946,717.

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu Aksi Korporasi Pembangunan Sumur Air Tanah dan Pembangunan Reservoir dan Jaringan Distribusi Air Bersih di Kawasan Industri Medan Tahun 2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Based on the Report on the Results of the Review of Corporate Actions for Construction of Ground Water Wells and Construction of Reservoirs and Clean Water Distribution Networks in Medan Industrial Area Year 2023 from the North Sumatera Province Representative Financial and

No. PE.05.02/LHP-537/PW02/4.1/2023 tanggal 18 Agustus 2023, menyatakan bahwa:

a. PT Kawasan Industri Medan (Persero) telah mengajukan persetujuan Pengeboran Penggalian kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 12 Juni 2023, namun pengajuan tersebut dinyatakan ditolak. Penolakan tersebut berdasarkan pada Surat Keterangan Air Permukaan dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mengamanatkan untuk mengutamakan penggunaan air permukaan dibandingkan air tanah. Selain itu, PT Kawasan Industri Medan (Persero) sebagai pengelola kawasan industri dipandang mampu untuk membuat fasilitas water treatment dari sumber air permukaan menjadi air baku. Sampai dengan saat ini, Pembangunan Sumur Air Tanah di PT Kawasan Industri Medan belum mendapatkan izin pengusahaan air tanah dan izin pengeboran/ penggalian eksplorasi air tanah sehingga kontrak tidak dapat dinyatakan selesai dan mengakibatkan sumur air tanah yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan.
b. Terdapat koreksi pengurangan nilai kontrak sebesar Rp915.014.068.

Development Supervisory Agency No. PE.05.02/LHP-537/PW02/4.1/2023 dated August 18, 2023, states that:

a. PT Kawasan Industri Medan (Persero) has submitted an Excavation Drilling approval to the Ministry of Energy and Mineral Resources on June 12, 2023, however the application was declared rejected. This rejection is based on a Surface Water Certificate from the North Sumatera River Basin Center (BWS) and Law Number 17 Year 2019 concerning Water Resources which mandates prioritizing the use of surface water over ground water. Apart from that, PT Kawasan Industri Medan (Persero) as the manager of the industrial area is seen as capable of creating water treatment facilities from surface water sources to raw water. Until now, the Ground Water Well Construction at PT Kawasan Industri Medan has not received a ground water exploitation permit and ground water exploration drilling/ excavation permit so that the contract cannot be declared complete and has resulted in the ground water wells that have been built not being able to be utilized.

b. There is a correction to reduce the contract value amounting to Rp915,014,068.

Pada 27 Januari 2024, Perusahaan mengirimkan *Technical Justification* atas harga satuan pipa screen 6-*inch* kepada PT Kawasan Industri Medan (Persero) agar dilakukan justifikasi dengan BPKP dan konsultan independen. Perusahaan dapat menerima pengurangan nilai kontrak sebesar Rp536.233.149. Sampai dengan saat ini, masih belum ada tanggapan dari PT KIM dan BPKP terkait pengurangan nilai kontrak.

On January 27, 2024, the Company sent a Technical Justification for the unit price of 6-inch screen pipe to PT Kawasan Industri Medan (Persero) for justification with BPKP and independent consultants. The Company basically approved reduction of contract value amounting to Rp536,233,149. Until now, there has been no response from PT KIM and BPKP regarding the reduction in contract value.

Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2023, penyelesaian kontrak adalah 96%.

As of the financial reporting date of December 31, 2023, completion of the contract is 96%.

PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
Berdasarkan Perjanjian Kerja No. KIMA-PERU-037/DIU/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, PT Jasa Tirta Luhur mengadakan kerjasama dengan PT Kawasan Industri Makassar (Persero) untuk melakukan Pengembangan *Water Meter Digital* dalam Kawasan Industri Makassar dengan nilai kontrak Rp2.598.978.916 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 29 Mei 2023. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. KIMA.BA-307/DIU/IX2023 tentang Serah Terima Pengembangan *Water Meter Digital* dalam Kawasan Indutsri Makassar tanggal 18 September 2023, Perusahaan telah melakukan pemasangan

PT Kawasan Industri Medan (Persero)
Based on Work Agreement No. KIMA-PERU-037/DIU/II/2023 dated February 27, 2023, PT Jasa Tirta Luhur entered into a collaboration with PT Kawasan Industri Makassar (Persero) to Develop Digital Water Meters in Makassar Industrial Area with a contract value amounting to Rp2,598,978,916 with a term work completion period until May 29, 2023. Based on Inspection Minutes No. KIMA.BA-307/DIU/IX2023 concerning Handover of Digital Water Meter Development in the Makassar Industrial Area dated September 18, 2023, the Company has installed 36 water meter units from the planned 45 water meter units. The 9

36-unit *water meter* dari rencana 45-unit *water meter*. 9-unit *water meter* yang belum terpasang menunggu kesediaan *tenant* PT Kawasan Industri Makassar (Persero) tetap menjadi tanggung jawab Perusahaan. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2023, penyelesaian kontrak adalah 100%.

water units that have not been installed are waiting for the willingness of PT Kawasan Industri Medan (Persero) tenants to remain the responsibility of the Company. As of the financial reporting date of December 31, 2023, contract completion is 100%.

PT Belaputera Intiland

Berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 159/BI/TECH-PP/IX/2022 tanggal 19 September 2022, Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber Kemakmuran mengadakan kerjasama dengan PT Belaputera Intiland untuk melakukan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum Kapasitas 100L/Detik Kota Baru Parahyangan dengan nilai kontrak Rp18.621.000.000 dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 28 Februari 2023. PT Belaputera Intiland menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan menjadi 28 Februari 2024 sesuai Surat No. 021/BI/TECH-EXT/EOT/TM/XI/2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2023 dan 2022, penyelesaian kontrak masing-masing adalah 77,64% dan 11,18%.

PT Belaputera Intiland

Based on Work Order No. 159/BI/TECH-PP/IX/2022 dated September 19, 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran has an agreement with PT Belaputera Intiland for the work of the 100L/Second Drinking Water Treatment System of Kota Baru Parahyangan with a contract value of Rp18,621,000,000 and period of completion until February 28, 2023. PT Belaputera Intiland agreed to extend the time for completion of the work to February 28, 2024 in accordance with Letter No. 021/BI/TECH-EXT/EOT/TM/XI/2023. As of the financial reporting dates of December 31, 2023 and 2022, contract completion was 77.64% and 11.18%, respectively.

Pendapatan Air Minum dalam Kemasan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha No. KSU-01/DIR/JTL/V/2021 tentang Pengelolaan AMDK Jatiluhur, SPAM Biki dan SPAM Curug dengan Perusahaan Umum Jasa Tirta II tanggal 7 Mei 2021 dan diperbarui tanggal 30 Desember 2021, Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan Pemegang Saham untuk melakukan penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Bottled Drinking Water Revenue

Based on the Business Cooperation Agreement No. KSU-01/DIR/JTL/ V/2021 concerning Management of Jatiluhur AMDK, Biki SPAM and Curug SPAM with Perusahaan Umum Jasa Tirta II dated May 7, 2021 and been renewed on December 30, 2021, the Subsidiaries entered into an agreement with Shareholder to sell Bottled Drinking Water (AMDK) and clean water through the Drinking Water Supply System (SPAM). This agreement is valid until December 31, 2025.

Pendapatan Operasional dan Pemeliharaan

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan *Reservoir* dan Jaringan Distribusi Wilayah I di Kawasan Industri Medan No. SPn-17/CFGH/SUM/0823 tanggal 1 Agustus 2023, Entitas Anak mengadakan perjanjian dengan PT Kawasan Industri Medan (Persero) untuk melakukan pekerjaan operasi dan pemeliharaan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 13 Desember 2023.

Operational and Maintenance Revenue

Based on the Letter of Agreement for the Implementation of Operation and Maintenance Work for Reservoirs and Distribution Networks in Region I in Medan Industrial Area No. SPn-17/CFGH/SUM/0823 dated August 1, 2023, the Company entered into an agreement with PT Kawasan Industri Medan (Persero) to carry out operation and maintenance work. This agreement is valid until December 13, 2023.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan *Operation and Maintenance* SPAM Pamanukan No. PKS-7/DIR/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Perum Jasa Tirta II untuk melakukan pekerjaan operasi dan pemeliharaan. Perjanjian ini berlaku efektif 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Based on the Operation and Maintenance Management Cooperation Agreement for SPAM Pamanukan No. PKS-7/DIR/12/2021 dated December 28, 2021, the Company entered into an agreement with Perum Jasa Tirta II to carry out operation and maintenance work. This agreement is effective 5 years after the agreement has been signed.

Pendapatan dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 51,19% dan 49,15% (Catatan 38).

Revenue from related parties for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to 51.19% and 49.15%, respectively (Note 38).

33. Beban Pokok Pendapatan / *33. Cost of Revenue*

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Sumber Daya Air			*Water Resources Expenses*
Beban Listrik	102,807,505,833	112,300,047,310	*Electricity Expenses*
Beban Air Baku	513,928,341,984	404,471,227,456	*Raw Water Expenses*
Beban Air Bersih	13,104,153,290	10,936,070,315	*Water Expenses*
Sub Jumlah	629,840,001,107	527,707,345,081	*Sub Total*
Beban Non Sumber Daya Air			*Non Water Resources Expenses*
Beban Pariwisata	25,027,291,568	26,488,947,034	*Tourism Expenses*
Beban Pemanfaatan Lahan	11,353,245,271	10,943,699,577	*Land Utilization Expenses*
Beban Laboratorium	9,804,826,867	9,155,305,922	*Laboratory Expenses*
Beban Air Minum Dalam Kemasan	5,275,133,849	4,688,019,887	*Bottled Drinking Water Expenses*
Beban Konstruksi	31,626,871,666	20,381,352,809	*Construction Expenses*
Beban Usaha Lainnya	574,041,008	906,632,276	*Other Operating Expenses*
Sub Jumlah	83,661,410,229	72,563,957,505	*Sub Total*
Jumlah	**713,501,411,336**	**600,271,302,586**	***Total***

Rincian beban sumber daya air adalah sebagai berikut:

Details of water resource expenses are as follows:

	2023				
	Beban Listrik/ *Electricity Expenses* Rp	Beban Air Baku/ *Raw Water Expenses* Rp	Beban Air Bersih/ *Clean Water Expenses* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Beban Personalia	33,760,710,032	108,174,328,912	518,741,385	142,453,780,329	*General Affair Expenses*
Beban Umum dan Operasi Sumber Daya Air	3,063,642,717	55,318,384,510	4,521,877,085	62,903,904,312	*Water Resources General and Operational Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	3,883,704,660	5,979,905,246	125,434,161	9,989,044,067	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	6,447,487,018	25,759,071,914	67,979,953	32,274,538,885	*Maintenance Expenses*
Beban Sistem Informasi	--	460,983,764	--	460,983,764	*Information System Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	671,351,900	--	671,351,900	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	621,902,500	13,924,731,556	62,843,424	14,609,477,480	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	29,601,985,868	31,299,744,880	6,765,252,451	67,666,983,199	*Depreciation Expenses of Fixed Assets (Note 15)*
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	468,292,552	1,786,060,335	476,104,289	2,730,457,176	*Depreciation Expenses of Right-of-Use Assets (Note 17)*
Beban Penyusutan Aset Serah Kelola (Catatan 19)	213,032,428	463,368,649	--	676,401,077	*Depreciation Expenses of Handover Assets (Note 19)*
Beban *Overhead* Lainnya	24,746,748,058	270,090,410,318	565,920,542	295,403,078,918	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**102,807,505,833**	**513,928,341,984**	**13,104,153,290**	**629,840,001,107**	***Total***

	2022				
	Beban Listrik/ *Electricity Expenses*	Beban Air Baku/ *Raw Water Expenses*	Beban Air Bersih/ *Clean Water Expenses*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	30,525,463,014	102,584,361,604	512,348,435	133,622,173,053	*General Affair Expenses*
Beban Umum dan Operasi Sumber Daya Air	2,905,956,854	50,873,801,296	4,513,358,057	58,293,116,207	*Water Resources General and Operational Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	4,575,396,825	6,073,272,601	116,305,942	10,764,975,368	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	6,873,496,052	26,705,493,677	145,737,259	33,724,726,988	*Maintenance Expenses*
Beban Sistem Informasi	--	497,575,641	--	497,575,641	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	457,183,100	--	457,183,100	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	796,393,100	--	796,393,100	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	621,634,190	12,740,066,850	62,749,064	13,424,450,104	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	26,499,761,210	27,937,748,419	4,919,603,658	59,357,113,287	*Depreciation Expenses of Fixed Assets (Note 15)*
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	464,175,425	1,953,161,630	665,967,900	3,083,304,955	*Depreciation Expenses of Right-of-Use Assets (Note 17)*
Beban *Overhead* Lainnya	39,834,163,740	173,852,169,538	--	213,686,333,278	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**112,300,047,310**	**404,471,227,456**	**10,936,070,315**	**527,707,345,081**	***Total***

Rincian beban non sumber daya air adalah sebagai berikut:

Details of non-water resource expenses are as follows:

	2023						
	Beban Pariwisata/ *Tourism Expenses*	Beban Pemanfaatan Lahan/ *Land Utilization Expenses*	Beban Laboratorium/ *Laboratory Expenses*	Beban Air Minum Dalam Kemasan/ *Bottled Drinking Water Expenses*	Beban Konstruksi dan Usaha Lainnya/ *Construction and Other Operational Expenses*	Jumlah/ *Total*	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Beban Personalia	1,939,447,419	3,896,363,091	5,084,803,407	--	--	10,920,613,917	*General Affair Expenses*
Beban Rumah Tangga dan Operasi	6,595,391,483	--	958,141,795	--	--	7,553,533,278	*Household and Operating Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	2,829,017,498	--	1,447,953,459	4,839,010,833	574,041,008	9,690,022,798	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	1,337,508,112	--	177,885,504	--	--	1,515,393,616	*Maintenance Expenses*
Beban Subkonstruksi	--	--	--	--	31,626,871,666	31,626,871,666	*Subconstruction Expenses*
Beban Sistem Informasi	358,163,583	--	37,749,070	--	--	395,912,653	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	--	35,000,000	--	--	35,000,000	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	--	181,249,880	--	--	181,249,880	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	9,610,000	--	587,892,737	--	--	597,502,737	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	7,224,396,295	--	808,060,380	436,123,016	--	8,468,579,691	*Depreciation Expenses of Fixed Assets (Note 15)*
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	147,834,924	--	238,159,086	--	--	385,994,010	*Depreciation Expenses of Right-of-Use Assets (Note 17)*
Beban *Overhead* Lainnya	4,585,922,254	7,456,882,180	247,931,549	--	--	12,290,735,983	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**25,027,291,568**	**11,353,245,271**	**9,804,826,867**	**5,275,133,849**	**32,200,912,674**	**83,661,410,229**	***Total***

	2022						
	Beban Pariwisata/ *Tourism Expenses* Rp	Beban Pemanfaatan Lahan/ *Land Utilization Expenses* Rp	Beban Laboratorium/ *Laboratory Expenses* Rp	Beban Air Minum Dalam Kemasan/ *Bottled Drinking Water Expenses* Rp	Beban Konstruksi dan Usaha Lainnya/ *Construction and Other Operational Expenses* Rp	Jumlah/ *Total* Rp	
Beban Personalia	1,623,645,508	2,784,437,141	4,703,149,019	--	--	9,111,231,668	*General Affair Expenses*
Beban Rumah Tangga dan Operasi	5,611,659,423	36,831	1,098,983,951	--	--	6,710,680,205	*Household and Operating Expenses*
Beban Bahan dan Perlengkapan	2,634,247,198	--	1,380,020,329	4,226,169,840	906,632,276	9,147,069,643	*Materials and Supplies Expenses*
Beban Pemeliharaan	1,113,591,048	54,573,400	144,494,072	--	--	1,312,658,520	*Maintenance Expenses*
Beban Subkonstruksi	--	--	--	--	20,381,352,809	20,381,352,809	*Subconstruction Expenses*
Beban Sistem Informasi	143,802,859	--	40,836,060	--	--	184,638,919	*Information System Expenses*
Beban Perencanaan	--	--	74,999,300	--	--	74,999,300	*Planning Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	--	--	107,904,870	--	--	107,904,870	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment Expenses*
Beban Pelaksanaan Konservasi	9,897,500	--	263,985,870	--	--	273,883,370	*Conservation Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	10,994,292,217	--	986,107,727	461,850,047		12,442,249,991	*Depreciation Expenses of Fixed Assets (Note 15)*
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	146,879,788	--	213,185,669	--	--	360,065,457	*Depreciation Expenses of Right-of-Use Assets (Note 17)*
Beban *Overhead* Lainnya	4,210,931,493	8,104,652,205	141,639,055	--	--	12,457,222,753	*Other Overhead Expenses*
Jumlah	**26,488,947,034**	**10,943,699,577**	**9,155,305,922**	**4,688,019,887**	**21,287,985,085**	**72,563,957,505**	***Total***

34. Beban Pemasaran / *34. Marketing Expenses*

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Promosi dan Reklame	5,551,892,865	4,033,388,113	*Marketing and Advertising Expenses*
Beban Jamuan	996,166,146	1,760,827,169	*Entertainment Expenses*
Jumlah	**6,548,059,011**	**5,794,215,282**	***Total***

35. Beban Umum dan Administrasi / *35. General and Administrative Expenses*

	2023 Rp	2022 Rp	
Beban Personalia	119,047,848,428	97,382,757,938	*General Affair Expenses*
Beban Rumah Tangga dan Administrasi Kantor	50,882,820,095	48,565,064,276	*Office Household and Administration Expenses*
Beban Perencanaan	10,002,823,245	15,794,109,642	*Planning Expenses*
Beban Penyusutan Aset Tetap (Catatan 15)	9,132,286,718	10,515,331,952	*Depreciation Expenses of Fixed Assets (Note 15)*
Beban Penyusutan Aset Hak-Guna (Catatan 17)	2,983,770,076	2,826,349,977	*Depreciation Expenses of Right-of-Use Assets (Note 17)*
Beban Pemeliharaan	1,956,246,479	2,778,358,889	*Maintenance Expenses*
Beban Pemanfaatan, Evaluasi dan Pemberdayaan Masyarakat	2,721,392,303	4,958,642,852	*Utilization, Evaluation and Community Empowerment*
Beban Sistem Informasi	1,737,128,979	2,665,871,728	*Information Systems Expenses*
Beban Amortisasi (Catatan 16)	1,709,039,927	1,104,901,416	*Amortization Expense (Note 16)*
Beban Pelaksanaan Konservasi	169,271,500	568,583,580	*Conservation Implementation*
Lain-Lain	87,405,276	--	*Others*
Jumlah	**200,430,033,026**	**187,159,972,250**	***Total***

36. Pendapatan Keuangan - Bersih / *36. Financial Income - Net*

	2023 Rp	2022 Rp	
Pendapatan Keuangan			*Financial Income*
Pendapatan Bunga Deposito	22,236,839,741	10,547,548,965	*Time Deposits Income*
Pendapatan Jasa Giro	5,622,130,527	1,841,256,171	*Current Account Income*
Sub Jumlah	27,858,970,268	12,388,805,136	*Sub Total*
Beban Keuangan			*Financial Expenses*
Beban Bunga Pinjaman	1,176,983,139	1,139,266,800	*Loan Interest Expense*
Beban Bunga Sewa	597,879,354	363,075,793	*Lease Interest Expense*
Beban Bank	2,705,400	3,276,800	*Bank Fees*
Pajak Jasa Giro	6,352,493	3,810,640	*Current Account Service Tax*
Sub Jumlah	1,783,920,386	1,509,430,033	*Sub Total*
Jumlah	**26,075,049,882**	**10,879,375,103**	***Total***

37. Beban Lain-lain - Bersih / *37. Other Expenses - Net*

	2023 Rp	2022 Rp	
Pendapatan Lain-lain:			*Other Income:*
Pemulihan Kerugian Nilai	11,004,942,071	15,402,078,658	*Impairment Losses Recovery*
Penerimaan Kelebihan Pembayaran PPN Tahun 2011	--	1,386,993,856	*Receipts of VAT Overpayment Year 2011*
Pendapatan Denda	741,522,067	555,192,032	*Penalty Income*
Pendapatan Lain-lain	4,165,022,249	966,226,510	*Other Income*
Sub Jumlah	15,911,486,387	18,310,491,056	*Sub Total*
Beban Lain-lain:			*Other Expenses:*
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	17,622,758,809	15,022,222,565	*Allowance for Impairment Losses on Receivables*
Beban Pajak	4,562,156,064	5,843,371,331	*Tax Expenses*
Koreksi Pemakaian Volume Minimum Air Baku	4,799,731,579	2,892,594,333	*Correction of Minimum Surcharge of Raw Water Volume Usage*
Beban Lain	1,040,815,121	1,398,050,843	*Other Expenses*
Sub Jumlah	28,025,461,573	25,156,239,072	*Sub Total*
Jumlah	**(12,113,975,186)**	**(6,845,748,016)**	***Total***

38. Saldo, Sifat dan Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi / *38. Balances, Nature and Transactions with Related Parties*

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat-syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh Grup atas beban-beban pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

In the normal course of business, the Company entered into certain transactions with the related parties conducted by normal terms and conditions. These transactions include payments made by the Group to the related parties or vice versa. Balance of related parties accounts as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

a. Sifat Hubungan dan Transaksi
Hubungan dan sifat saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Nature of Relationship and Transactions
Nature of relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi/** ***Type of Transaction***
Kementerian Keuangan Republik Indonesia/ *Ministry of Finance of Republic of Indonesia*	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Modal Saham, Perpajakan/ *Capital Share, Taxation*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro/ *Placement of Current Account*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro dan Deposito/ *Placement of Current Account and Deposit*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro dan Deposito/ *Placement of Current Account and Deposit*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Deposito/ *Placement of Deposit*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Deposito/ *Placement of Deposit*
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Deposito/ *Placement of Deposit*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Penempatan Giro dan Deposito/ *Placement of Current Account and Deposit*
Badan Riset dan Inovasi Nasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
Balai Besar Penelitian Tanaman Padi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Balai Penelitian, Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Balai Pengembangan Budidaya Ikan Patin dan Lele	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
BPJS Kesehatan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Biaya Dibayar di Muka dan Utang Lain-lain/ *Prepaid Expenses and Other Payables*
BPJS Ketenagakerjaan	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Biaya Dibayar di Muka dan Utang Lain-lain/ *Prepaid Expenses and Other Payables*
BPP Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*

Pihak-pihak Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi/** ***Type of Transaction***
Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha, Biaya Dibayar di Muka dan Utang Lain-lain/ *Accounts Receivable, Prepaid Expenses and Other Payables*
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
High Speed Railway Contractor Consortium	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Sapta Taruna PUPR	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PAM Jaya DKI Jakarta	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Kahuripan IPA Citra	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Bhagasasi	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Patriot	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Pemerintah Daerah Jawa Barat	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Lain-lain/ *Other Payables*
Perum Perhutani Diure Jawa Barat	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Gapura Tirta Rahayu	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Raharja	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Rangga	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Tarum	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Wening	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
Perumda Tirta Darma Ayu	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Air Minum Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Investasi Jangka Panjang Lainnya/ *Other Long-Term Investment*

Pihak-pihak Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi/** ***Type of Transaction***
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Bakti Usaha Menanam Nusantara Hijau Lestari I	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment on Associates*
PT Dahana (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Hotel Indonesia Group	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Indra Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Jasa Tirta Luhur	Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Piutang Usaha, Utang Usaha, Pendapatan, Harga Pokok Pendapatan/ *Accounts Receivable, Accounts Payable, Revenue and Cost of Revenue*
PT Jasaraharja Putera	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Biaya Dibayar di Muka/ *Prepaid Expenses*
PT Jiwasraya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Biaya Dibayar di Muka/ *Prepaid Expenses*
PT Kertas Padalarang (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Kimia Farma Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Kujang Tatar Persada	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Kukuh Tangguh Sandang Mills	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Mitra Rajawali Banjaran	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Nindya Karya	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*

Pihak-pihak Berelasi/ ***Related Parties***	**Sifat Hubungan/** ***Nature of Relationship***	**Jenis Transaksi/** ***Type of Transaction***
PT Pertamina Area Geothermal Kamojang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pertamina Asset 3 Subang Field	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pertamina EP Region Jawa Field Jatibarang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pertamina Gas	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pertamina Kilang Internasional	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pabrik Gula Rajawali II	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT PLN Nusantara Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Indonesia Power	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT PP Properti Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Pupuk Kujang	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Raharja Putra Perkasa	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Sang Hyang Seri	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Sinkona Indonesia Lestari	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha dan Pendapatan/ *Accounts Receivable and Revenue*
PT Surveyor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Waskita Beton Precast Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Piutang Usaha/ *Accounts Receivable,* Pendapatan/ *Revenue*
PT Yodya Karya Persero	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Utang Usaha/ *Accounts Payable*
PT Padi Energi Nusantara	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ *Controlled by Central Government of Republic of Indonesia*	Investasi pada Entitas Asosiasi/ *Investment on Associates*

b. Rincian Transaksi dan Saldo
Transaksi-transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

b. Nature of Relationship and Transactions
Significant transactions with related parties are as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ *Percentage to Total Assets* 2023 %	2022 %
Aset/ *Assets*				
Kas di Bank (Catatan 5)/				
Cash in Banks (Note 5)				
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	97,558,003,056	91,727,776,551	4.73%	4.79%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60,852,719,418	7,006,648,561	2.95%	0.37%
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	9,676,205,419	1,474,596,522	0.47%	0.08%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,096,422,299	3,541,765,891	0.44%	0.19%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	821,569,409	798,364,145	0.04%	0.04%
Jumlah	**178,004,919,601**	**104,549,151,670**	**8.62%**	**5.46%**
Deposito Berjangka (Catatan 5/				
Time Deposits (Note 5)				
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	365,000,000,000	20,000,000,000	17.68%	1.05%
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	100,000,000,000	--	4.84%	--
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70,000,000,000	150,000,000,000	3.39%	7.84%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	240,000,000,000	--	12.54%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	50,000,000,000	--	2.61%
Jumlah	**535,000,000,000**	**460,000,000,000**	**25.92%**	**24.04%**
Piutang Usaha (Catatan 6)/				
Accounts Receivable (Note 6)				
PT Sang Hyang Seri (Persero)	64,737,620,726	61,834,638,493	3.14%	3.23%
PAM Jaya	14,517,921,112	--	0.70%	--
Perumda Tirta Wening	9,099,817,605	8,421,815,500	0.44%	0.44%
PDAM Tirta Bhagasasi	8,983,372,869	7,869,275,197	0.44%	0.41%
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	8,144,025,161	34,390,346,144	0.39%	1.80%
Perumda Gapura Tirta Rahayu	6,316,796,896	5,170,379,480	0.31%	0.27%
Perumda Tirta Tarum	3,201,031,640	3,201,031,640	0.16%	0.17%
PT Kawasan Industri Makassar	2,598,978,916	--	0.13%	--
PT Kujang Tatar Persada	2,271,873,130	2,271,873,130	0.11%	0.12%
Perumda Tirta Rangga	1,682,755,031	832,883,259	0.08%	0.04%
Perumda Tirta Kahuripan IPA Citra	557,881,300	557,881,300	0.03%	0.03%
Perumda Tirta Darma Ayu	315,600,000	--	0.02%	--
Perumda Tirta Raharja	293,210,980	--	0.01%	--
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	171,412,800	174,423,500	0.01%	0.01%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	163,713,283	145,090,248	0.01%	0.01%
PT Barata Indonesia (Persero)	141,098,311	141,098,311	0.01%	0.01%
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia	156,273,487	110,351,001	0.01%	0.01%
PT PP Properti Tbk	96,349,100	96,349,100	0.00%	0.01%
PT Waskita Beton Precast Tbk	92,745,196	74,541,196	0.00%	0.00%
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	65,912,874	--	0.00%	--
Lain-lain (di bawah Rp50 juta)/ *Others (below Rp50 million)*	219,676,841	2,694,207,250	0.01%	0.14%
Jumlah	**123,828,067,258**	**127,986,184,749**	**6.02%**	**6.71%**

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase terhadap Jumlah Aset/ *Percentage to Total Assets* 2023 %	2022 %
Pendapatan yang Masih Akan Diterima (Catatan 8)/ *Accrued Revenue (Note 8)*				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	55,678,264,783	79,447,808,962	2.70%	4.15%
PT Indonesia Power	33,864,982,525	18,804,699,682	1.64%	0.98%
PT PLN Nusantara Power	18,180,949,865	32,754,330,337	0.88%	1.71%
Perumda Tirta Bhagasasi	15,047,518,918	15,296,220,781	0.73%	0.80%
PAM Jaya	15,025,193,110	18,476,196,329	0.73%	0.97%
PT Sang Hyang Seri (Persero)	11,666,686,635	2,902,972,233	0.57%	0.15%
Perumda Tirta Wening	3,371,213,500	4,465,039,500	0.16%	0.23%
PT Pupuk Kujang	2,625,040,200	243,676,090	0.13%	0.01%
Perumda Tirta Patriot	1,058,587,778	1,036,919,690	0.05%	0.05%
PT Kilang Pertamina Internasional	921,674,403	286,842,315	0.04%	0.01%
Lain-lain (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	2,010,812,201	4,735,901,149	0.10%	0.25%
Jumlah	**159,450,923,918**	**178,450,607,068**	**7.72%**	**9.33%**
Tagihan Bruto dari Pemberi Kerja (Catatan 9)/ *Gross Amount Due from Customers (Note 9)*				
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	8,687,686,862	--	0.42%	--
Jumlah	**8,687,686,862**	**--**	**0.42%**	**0.00%**

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase terhadap Jumlah Liabilitas/ *Percentage to Total Liabilities* 2023 %	2022 %
Liabilitas/ *Liabilities*				
Utang Usaha (Catatan 20)/ *Accounts Payable (Note 20)*				
PT Indra Karya (Persero)	4,918,163,136	729,899,957	0.89%	0.14%
PT Raharja Putra Perkasa	4,166,076,420	1,928,309,760	0.75%	0.36%
PT Pilar Jati Persada	2,863,743,390	--	0.52%	--
Lainnya (di bawah Rp500 juta)/ *Others (below Rp500 million)*	332,670,713	169,423,529	0.06%	0.03%
Jumlah	**12,280,653,659**	**2,827,633,246**	**2.21%**	**0.52%**
Pendapatan Diterima di Muka (Catatan 24)/ *Deferred Revenue (Note 24)*				
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	3,955,377,124	3,886,513,226	0.71%	0.73%
PT Pertamina EP Asset 3 Subang Field	2,265,180,198	2,111,682,798	0.41%	0.40%
PT High Speed Railway Contractor	290,625,000	290,625,000	0.05%	0.05%
PT Pupuk Kujang	152,228,000	152,228,000	0.03%	0.03%
Perumda Tirta Bhagasasi	140,073,967	233,260,699	0.03%	0.04%
Lain-lain (di bawah Rp100 juta)/ *Others (below Rp100 million)*	582,218,282	604,401,445	0.11%	0.11%
Jumlah	**7,385,702,571**	**7,278,711,168**	**0.62%**	**0.64%**

	2023 Rp	2022 Rp	Persentase terhadap Jumlah Pendapatan/ *Percentage to Total Revenue* 2023 %	2022 %
Pendapatan (Catatan 32)/				
Revenue (Note 32)				
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	238,932,707,815	252,163,070,338	22.12%	25.70%
PAM Jaya	159,973,134,800	146,117,160,400	14.81%	14.89%
PT PLN Nusantara Power	76,230,863,113	29,508,405,677	7.06%	3.01%
PT Indonesia Power	36,773,823,278	16,941,170,872	3.40%	1.73%
PT Sang Hyang Seri (Persero)	10,510,528,500	7,109,908,520	0.97%	0.72%
Perumda Tirta Bhagasasi	10,671,321,634	10,244,963,073	0.99%	1.04%
Perumda Tirta Tarum	4,396,001,600	5,304,938,170	0.41%	0.54%
Perumda Tirta Raharja	3,995,936,000	3,425,544,000	0.37%	0.35%
Perumda Tirta Wening	3,194,035,000	3,705,860,000	0.30%	0.38%
Perumda Tirta Patriot	3,163,725,600	2,856,239,200	0.29%	0.29%
Perumda Tirta Rangga	2,419,986,200	2,124,870,827	0.22%	0.22%
Perumda Gapura Tirta Rahayu	1,479,915,000	1,453,807,200	0.14%	0.15%
Perumda Tirta Darma Ayu	978,778,000	1,022,990,830	0.09%	0.10%
Lain-lain (di bawah Rp500 juta/ *Others (below Rp500 million)*	173,165,400	194,572,200	0.02%	0.02%
Jumlah/ *Total*	**552,893,921,940**	**482,173,501,307**	**51.19%**	**49.15%**

c. Kompensasi Dewan Pengawas, Organ Pendukung dan Direksi

Biaya remunerasi Dewan Pengawas Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.580.251.855 dan Rp5.666.489.667.

Biaya remunerasi Dewan Direksi Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.549.979.195 dan Rp11.632.478.182.

c. Compensation for Board of Supervisory, Supporting Working Units and Directors

The remuneration for the Board of Supervisory for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp5,580,252,855. and Rp5,666,489,667.

The remuneration for the Company's Board of Directors for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp13,549,979,195 and Rp11,632,478,182.

39. Informasi Penting Lainnya / *39. Other Important Information*

Perusahaan

i. Kesepakatan Penyelesaian Piutang

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang No. BA-3/DIR/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, Perusahaan memberikan kesempatan kepada PT Sang Hyang Seri untuk mengadakan penjadwalan kembali pembayaran utang BJPSDA sejumlah Rp42.136.015.150 dengan cara diangsur 5 (lima) kali angsuran yang di bayarkan setiap tahun mulai 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.

The Company

i. Settlement of Receivables Agreement

Based on the Minutes of Receivable Settlement Agreement No. BA-3/DIR/02/2020 dated February 21, 2020, the Company provided an opportunity for PT Sang Hyang Seri to reschedule BJPSDA debt payments in the amount of Rp42,136,015,150 by means of 5 (five) times installments to be paid annually starting December 31, 2020 until December 31, 2024.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang No. BA-01/DIR/02/2021 tanggal 25 Februari 2021, Perusahaan memberikan kesempatan kepada PT Sang Hyang Seri untuk mengadakan penjadwalan kembali pembayaran utang BJPSDA tahun 2020 sejumlah Rp9.647.648.998 dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang dibayarkan setiap triwulan mulai 31 Juni 2021 sampai dengan 30 September 2022.

Based on the Minutes of Receivable Settlement Agreement No. BA-01/DIR/02/2021 dated February 25, 2021, the Company provided an opportunity for PT Sang Hyang Seri to reschedule BJPSDA debt payments for 2020 in the amount of Rp9,647,648,998 in 6 (six) times installments to be paid quarterly from June 31, 2021 to September 30, 2022.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang No. BA-02/DPU/12/2021 tanggal 1 Desember 2021, Perusahaan memberikan kesempatan kepada PT Sang Hyang Seri untuk mengadakan penjadwalan kembali pembayaran utang BJPSDA bulan Januari sampai dengan Juni 2021 sejumlah Rp3.582.270.472 dengan cara diangsur 6 (enam) kali angsuran yang dibayarkan setiap triwulan mulai 31 Maret 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.

Based on the Minutes of Receivable Settlement Agreement No. BA-02/DPU/12/2021 dated December 1, 2021, the Company provided an opportunity for PT Sang Hyang Seri to reschedule BJPSDA debt payments from January to June 2021 in the amount of Rp3,582,270,472 in 6 (six) times installments which are paid quarterly from March 31, 2022 to June 30, 2023.

Dari penjadwalan kembali, PT Sang Hyang Seri selama tahun 2022 dan 2021 telah melakukan pembayaran sejumlah Rp650.000.000 dan Rp800.000.000.

From the rescheduling, PT Sang Hyang Seri during 2022 and 2021 has made payments in the amount of Rp650,000,000 and Rp800,000,000.

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: BA-05/DIR/12/2022 dan BA-214/DIR/SHS.01/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perusahaan dan PT Sang Hyang Seri mengadakan kesepakatan penyelesaian kewajiban BJPSDA PT Sang Hyang Seri sampai dengan 31 Desember 2022 sejumlah Rp61.834.638.497 ke Perusahaan dilakukan dengan *asset settlement* dengan ketentuan:

Based on the Minutes of Agreement Number: BA-05/DIR/12/2022 and BA-214/DIR/SHS.01/XII/2022 dated December 27, 2022, the Company and PT Sang Hyang Seri entered into an agreement to settle PT Sang Hyang Seri's BJPSDA obligations until by December 31, 2022 in the amount of Rp61,834,638,497 to the Company by means of asset settlement under the following conditions:

- Penyelesaian kewajiban BJPSDA PT Sang Hyang Seri sebesar Rp61.834.638.497 dengan skema *asset settlement* sebagai bagian restrukturisasi hutang.

- *Settlement of PT Sang Hyang Seri's BJPSDA liabilities amounting to Rp61,834,638,497 with an asset settlement scheme as part of debt restructuring.*

- Aset yang digunakan sebagai *asset settlement* merupakan aset milik PT Sang Hyang Seri tidak sedang diagunkan, tidak terdapat permasalahan/sengketa dengan pihak lain, dan tidak digunakan dan/atau diduduki oleh pihak lain tanpa hak (dalam kondisi *clear and clean*).

- *Assets used as asset settlement owned by PT Sang Hyang Seri did not being used as collateral, there are no problems/disputes with other parties, and are not used and/or occupied by other parties without rights (in clear and clean conditions).*

- Pihak Perusahaan akan mengecek dan memverifikasi atas asetnya apabila tidak memenuhi potensi yang dibutuhkan, maka Perusahaan akan menyampaikan secara tertulis untuk mengajukan aset pengganti.

- *The Company will check and verify its assets if they do not meet the required potential, then the Company will submit a written request to propose replacement assets.*

- Para Pihak sepakat untuk menunjuk KJPP/ instansi/ kantor penilai yang independen untuk melakukan penilaian terhadap aset. Apabila aset yang dimaksud tidak mencapai besaran kewajibannya, maka PT Sang Hyang Seri akan mengajukan usulan aset tambahan dan apabila terjadi kelebihannya, maka atas kelebihannya Perusahaan akan melaksanakan pembayaran kelebihan tersebut.

- *The Parties agree to appoint an independent appraisal/ instance/ office to conduct an appraisal of the assets. If the stated assets in do not reach the amount of their liabilities, then PT Sang Hyang Seri will submit a proposal for additional assets and if there is an excess, then for the excess the Company will carry out the payment of the excess.*

- Para Pihak sepakat Pelaksanaan *Asset Settlement* dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan masing-masing pihak, perundang-undangan yang berlaku, mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham dengan progres sebagai berikut:
  (a) Pada tanggal 27 Desember 2023, PT Sang Hyang Seri mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris untuk meminta persetujuan penyelesaian piutang PJT II malaui mekanisme *asset settement* dan pada tanggal 28 Desember 2023, Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri telah memberikan persetujuan berdasarkan suratnya nomor: 36/DK/SHS/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
  (b) Pada tanggal 29 Desember 2023, PT Sang Hyang Seri telah mengajukan permohonan persetujuan penyelesaian piutang PJT II melalui *asset settlement* kepada Pemegang Saham Seri A dan Seri B.

  Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, pelaksanaan progres *Asset Settlement* masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN.

- *The Parties agree that the implementation of the Asset Settlement is carried out in accordance with the Articles of Association and the provisions of each party, the applicable laws, prioritizing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and after obtaining the approval of the Shareholders.*
  (a) On December 27, 2023, PT Sang Hyang Seri submitted a request to the Board of Commissioners to request approval for PJT II's receivables settlement through an asset settlement mechanism and on December 28, 2023, the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri gave approval based on letter number: 36/DK/SHS/XII/2023 dated December 28, 2023.
  (b) On December 29, 2023, PT Sang Hyang Seri submitted a request for approval for PJT II's receivables settlement through asset settlement to Series A and Series B Shareholders.

  As of the financial reporting date, the implementation of Asset Settlement progress is still awaiting approval from the Ministry of SOEs.

ii. Pendapatan BJPSDA PT Indonesia Power (PLTA Saguling) dan PT PLN Nusantara Power (PLTA Cirata)

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Cirata Nomor 072.PJ/061/PNP-PJTII/IV/2023 dengan PT PLN Nusantara Power tanggal 14 April 2023 dan Perjanjian Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Saguling Nomor 164.PJ/061/IP/2023 dengan PT Indonesia Power tanggal 12 April 2023 dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun, mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026;

ii. BJPSDA Revenue of PT Indonesia Power (HEPP Saguling) and PT PLN Nusantara Power (HEPP Cirata)

The Company has signed Agreement of Water Resources Management Service of HEPP Cirata Number 072.PJ/061/PNP-PJTII/IV/2023 with PT PLN Nusantara Power dated April 14, 2023 and Agreement of Water Resources Management Service of HEPP Saguling Number 164.PJ/061/IP/2023 with PT Indonesia Power dated April 12, 2023 by explaining the following:

a. The term of the agreement is 5 years, starting from January 1, 2022 to December 31, 2026;

b. Nilai PJPSDA progresif 60% sampai dengan 70% sampai dengan akhir jangka waktu perjanjian; dan

c. Nilai Non PJPSDA adalah 30% - 40% dari realisasi produksi kWh netto yang telah disepakati oleh PT PLN Nusantara Power (PLTA Cirata) dan PT Indonesia Power (PLTA Saguling) sesuai tarif yang telah ditentukan oleh Kementerian PUPR masing-masing sebesar Rp45,69/kWh dan Rp14,01/kWh.

b. Progressive PJPSDA value of 60% to 70% until the end of the agreement period; and

c. The Non PJPSDA value is 30% - 40% of the actual net kWh production that has been agreed upon by PT PLN Nusantara Power (HEPP Cirata) and PT Indonesia Power (HEPP Saguling) according to the tariff determind by the Ministry of PWPH amounting to Rp45.69/kWh and Rp14.01/kWh, respectively.

iii. Pembubaran Dana Pensiun Jasa Tirta II

Berdasarkan surat Perusahaan kepada Dewan Pengawas Nomor: SD-419/DIR/SM/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal "Penyampaian *Roadmap* Dana Pensiun Jasa Tirta II", Perusahaan menyampaikan:

1. Hasil *due dilligence* Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II yang telah dilaksanakan tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 27 Februari 2023, dengan hasil kondisi Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II termasuk dalan kondisi kekurangan kekayaan untuk pendanaan dari nilai kini aktuarial dengan defisit per 30 Juni 2022 sebesar Rp131.176.009.367 dengan kualitas pendanaan tingkat II dan rasio pendanaan 64%.

2. Telah melakukan kajian penyusunan *roadmap* Dana Pensiun dengan hasil mengubah jenis program pensiun dari Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan mengalihkan penyelenggaraan dan pengelolaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

3. Memperhatikan tekanan pendanaan yang semakin besar karena keharusan memperkuat asumsi tingkat bunga aktuaria dan jumlah piutang yang belum dilunasi, yang dipandang sangat memberatkan untuk meneruskan penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), selain ketersediaan dana dan kemampuan arus kas Perusahaan, diputuskan untuk mengubah jenis program pensiun dari PPMP menjadi Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan mengalihkan penyelenggaraan dan pengelolaannya ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), terhitung sejak 31 Januari 2024 (Catatan 44).

iii. Dissolution of Pension Funds Jasa Tirta II

Based on the Company's letter to the Supervisory Board Number: SD-419/DIR/SM/12/2023 dated December 22, 2023 regarding "Submission of the Jasa Tirta II Pension Fund Roadmap", the Company conveyed:

1. The results of the Pension Fund of Perum Jasa Tirta II due diligence which was carried out from October 24, 2022 to February 27, 2023 resulted in the condition of the Pension Fund of Perum Jasa Tirta II including a lack of wealth for funding from the actuarial present value with a deficit as of June 30, 2022 of Rp131,176,009,367 with level II funding quality and a funding ratio of 64%.

2. Has conducted a study on the preparation of the Pension Fund roadmap with the result of changing the type of pension program from the Defined Benefit Pension Program (PPMP) to the Defined Contribution Pension Program (PPIP) and transferring its administration and management to the Financial Institution Pension Fund (DPLK).

3. Taking into account the increasing funding pressure due to the need to strengthen actuarial interest rate assumptions and the amount of outstanding receivables, which are considered very burdensome for continuing the implementation of the Defined Benefit Pension Program (PPMP), in addition to the availability of funds and the Company's cash flow capabilities, it was decided to change the type of pension program from PPMP to the Defined Contribution Pension Program (PPIP) and transferring its administration and management to the Financial Institution Pension Fund (DPLK), starting from January 31, 2024 (Note 44).

Langkah-langkah yang telah dilakukan:

1. Penyampaian *Roadmap* Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam suratnya Nomor: SD-427/DIIR/SM/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.
2. Penyampaian permohonan pembubaran Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB Otoritas Jasa Keuangan dalam suratnya Nomor SD-416-DIR/SM/2023 tanggal 22 Desember 2023.

Berdasarkan Laporan Audit Keuangan Dapen pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan Nomor 00003/2.0890/AU.1/08/1495-1/1/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, kewajiban Pendiri adalah sebesar Rp67.178.592.961 dan rasio pendanaan 67,4%.

iv. Piutang Karyawan (Asuransi Jiwasraya)

Pada tahun 2009, Perusahaan melakukan kerja sama dengan Asuransi Jiwasraya untuk program *Past Service Liabilities* bagi Karyawan Perusahaan. Program ini merupakan pembayaran Premi Awal Asuransi Jiwasraya atas Pegawai Perusahaan yang diakui sebagai beban pada tahun 2009.

Berdasarkan hasil rapat pembahasan teknis dengan Kementerian BUMN tentang Laporan Audit Independen Perusahaan tahun 2009 tanggal 21 Mei 2010, "bahwa, beban pegawai untuk asuransi jiwasraya tidak boleh menjadi beban Perusahaan, melainkan beban masing-masing karyawan, sehingga perlu diadakan koreksi dan penyesuaian atas kelebihan beban tersebut". Direksi Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 1/606/KPT.S/2009 tanggal 31 Desember 2009, tentang pengalihan beban *Past Service Liabilities* Asuransi Jiwasraya dari Perusahaan kepada Pegawai yang menjadi peserta Asuransi Jiwasraya.

Melalui surat Direksi Perusahaan No. 1/149/2010 tanggal 25 Mei 2010, tentang hasil pembahasan teknis dengan kementerian BUMN atas Laporan Keuangan tahun buku 2009, agar dilakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan *Unaudited* tahun buku 2009 yang berakibat penurunan beban pegawai sebesar Rp4.608.301.256 yang berasal dari penurunan beban Asuransi Jiwasraya Rp11.644.694.314 dan kenaikan beban insentif

Steps that have been taken:

1. *Submission of the Pension Fund of Perum Jasa Tirta II Roadmap to the Minister of State-Owned Enterprises in letter Number: SD-427/DIIR/SM/12/2023 dated December 22, 2023.*
2. *Submission of the request for dissolution of the Pension Fund of Perum Jasa Tirta II to the Chief Executive of the Financial Services Authority IKNB Supervisor in letter Number SD-416-DIR/SM/2023 dated December 22, 2023.*

Based on the Dapen's Financial Audit Report as of December 31, 2023 which has been audited by the Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiansyah and Partners Number 00003/2.0890/AU.1/08/1495-1/1/II/2024 dated February 19, 2024, the Founder's obligations are amounting to Rp67,178,592,961 and a funding ratio of 67.4%.

iv. Employee Receivables (Jiwasraya Insurance)

In 2009, the Company held cooperation with Jiwasraya Insurance for Past Service Liabilities program for employees of the Company. The program was an Initial Premium Payment of Jiwasraya Insurance of Employees that recognized as expenses in 2009.

Based on technical discussion meeting result with Ministry of SOEs about Independent Audit Report of the Company in 2009 dated May, 21 2010, "that personnel expenses for Jiwasraya Insurance should not be Company's expenses, but the expenses of each employee, so there should be a correction and adjustment of excess from those expenses". Board of Directors of the Company issued the Directors Decree No. 1/606/KPT.S/2009 dated December 31, 2009, about the transfer of Past Service Liabilities expenses of Jiwasraya Insurance from Company to Employees who participated in Jiwasraya Insurance.

Through Letter of Directors of the Company No. 1/149/2010 dated May 25, 2010, about technical discussion result with Ministry of SOE of Financial Statements for the year 2009 that held adjustment for Financial Statements (Unaudited) of 2009 which affected the decreasing of employees expenses as amount Rp4,608,310,256 from decrease of Jiwasraya Insurance for Rp11,644,694,314 and increase of incentives expenses for Rp7,036,393,058 so

sebesar Rp7.036.393.058 sehingga diperoleh kenaikan Laba bersih sebesar Rp3.317.976.976 dan penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp3.317.976.976.

obtained the increasing of net income for Rp3,317,976,976 and decreasing of Short-Term Liabilities for Rp3,317,976,976.

Pada awal tahun 2010, berdasarkan koreksi tersebut, maka timbul piutang karyawan (Asuransi Jiwasraya) sebesar Rp6.333.195.276. Selama tahun 2010, terjadi pembayaran atas piutang pegawai tersebut, sehingga saldo piutang karyawan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp5.551.297.894, yang terdiri dari piutang pegawai yang masih aktif sebesar Rp3.307.010.964, dan piutang pegawai yang telah pensiun dan meninggal dunia sebesar Rp2.244.286.930.

At beginning of 2010, based on correction, then procured employees receivables (Jiwasraya Insurance) for Rp6,333,195,276. During 2010, occured payments of those receivables, so the employees receivables of Jiwasraya Insurance for Rp5,551,297,894 which consists of active employees receivable for Rp3,307,010,964 and pension and passed away employees receivables for Rp2,244,286,930.

Berdasarkan hal di atas, manajemen berkeyakinan bahwa piutang karyawan yang telah pensiun dan meninggal dunia tidak dapat ditagih, maka Direksi Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 1/569/SKPT.S/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Cadangan Piutang Pegawai Perusahaan, yang isinya menetapkan cadangan piutang pegawai Perusahaan sebesar Rp2.244.286.930 menjadi beban Perusahaan.

Based on above, management believes that pension and passed away employees receivables can not be collected, so Directors of the Company issued the Letter of Decree of Directors No. 1/569/SKPT.S/2010 dated December, 30 2010, about the Allowance for Doubtful Account of the Personnel Receivable of the Company, which contents about the allowance of personnel receivables of the Company for Rp2,244,286,930 became the Company's expenses.

v. Titipan Pemerintah Daerah Jawa Barat

Pada 8 September 2003, Gubernur Provinsi Jawa Barat mengirimkan Surat Resmi No. 970/2463/Sarek kepada Direksi Perusahaan perihal Kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat terkait penyesuaian tarif kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp5/m^3 untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Rp10/m^3 untuk industri atas kenaikan tarif Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan (IPEP) Prasarana Pengairan sebesar Rp45/m^3 untuk PDAM dan Rp50/m^3 untuk industri guna menunjang pembangunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Dewan Pengawas setuju untuk memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Surat Dewan Pengawas No. S-17/Dewas/2003 tanggal 10 Oktober 2003. Pada 22 Juni 2004, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia memberikan persetujuannya melalui surat No. Am01.09-Mn/314.

v. Local Government of West Java Deposits

On September 8, 2003, the Governor of West Java Province sent Official Letter No. 970/2463/Sarek to the Company's Directors regarding Contribution to Regional Original Revenue (PAD) of West Java Province regarding the adjustment of contribution rates to the West Java Provincial Government of Rp5/cbm for Regional Drinking Water Companies (PDAM) and Rp10/cbm for industry for tariff increases Exploitation and maintenance fee (IPEP) for Irrigation Infrastructure is Rp45/cbm for PDAM and Rp50/cbm for industry to support the development of the Citarum River Basin (DAS). The Supervisory Board agreed to contribute to the West Java Provincial Government through the Supervisory Board Letter No. S-17/Dewas/2003 dated October 10, 2003. On June 22, 2004, the Minister of Settlement and Regional Infrastructure of the Republic of Indonesia gave his approval through letter No. Am01.09-Mn/314.

Namun, berdasarkan Risalah Rapat mengenai Pembahasan atas Rencana Pengenaan Biaya Konservasi Wilayah Sungai Bagian Hulu dari BJPSDA di Wilayah Kerja PJT II untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Juli

However, based on the Minutes of Meeting regarding the Discussion of Plans to Imposition Costs for Upstream River Basin Conservation from the BJPSDA in the PJT II Working Area for the Provincial Government of West Java

2011 disebutkan bahwa kesepakatan tersebut sudah tidak ada payung hukumnya lagi. Melalui Surat No. 1/293/2011 tanggal 26 September 2011, Direksi Perusahaan meminta arahan dan persetujuan Menteri Pekerjaan Umum atas tindak lanjut hasil pembahasan tersebut.

dated July 27, 2011, it was stated that the agreement no longer had a legal protection. Through Letter No. 1/293/2011 dated September 26, 2011, the Company's Directors requested direction and approval from the Minister of Public Works for the follow-up of the discussion results.

Berdasarkan Surat Direksi tersebut, Perusahaan tidak akan lagi melakukan pembayaran kontribusi untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2011 dalam bentuk dana IPEP. Oleh karena itu, saldo dana IPEP yang tersisa akan dipergunakan untuk kegiatan konservasi DAS Citarum.

Based on the stated Directors' Letter, the Company will no longer make contribution payments to the West Java Provincial Government starting in 2011 in the form of IPEP funds. Therefore, the remaining IPEP fund balance will be used for Citarum watershed conservation activities.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU.JKons-05/OPSDAL.DOP/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 Pembuatan Detail Engineering Design (DED) Sumur Resapan di Provinsi Jawa Barat dengan PT Multi Pranata Mandiri Nusantara dengan nilai pekerjaan sebesar Rp375.680.610.

Based on Contract No. SP.SPU.JKons-05/OPSDAL.DOP/08/2023 dated August 9, 2023 Making Detailed Engineering Design (DED) of Infiltration Wells in West Java Province with PT Multi Pranata Mandiri Nusantara with a work value amounting to Rp375,680,610.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPK-10/OPSDAL.DOP/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Pekerjaan Launching Program Mikro DAS JAMPE (Jambore Pentahelix) Citarum Harum Juara dengan CV Big Deal Creative dengan nilai pekerjaan sebesar Rp148.852.110.

Based on Contract No. SP.SPK-10/OPSDAL.DOP/08/2023 dated August 28, 2023 Job Launching Micro DAS JAMPE Program (Pentahelix Jamboree) Citarum Harum Champion with CV Big Deal Creative with a job value amounting to Rp148,852,110.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPK-04/OPSDAL.DOP/06/2023 tanggal 2 Juni 2023 Manajemen Data Sosial – Kelembagaan Berbasis Mikro DAS di Sub DAS Cikapundung Hulu dengan Konsultan Cecep Kosasih dan Tim dengan nilai pekerjaan sebesar Rp148.584.600.

Based on Contract No. SP.SPK-04/OPSDAL.DOP/06/2023 dated June 2, 2023 DAS Micro-Based Social - Institutional Data Management in the Cikapundung Hulu Sub-Watershed with Consultant Cecep Kosasih and Team with a work value amounting to Rp148,584,600.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPK-06/OPSDAL.DOP/06/2023 tanggal 2 Juni 2023 Manajemen Data Fisik Hidrologis Berbasis Mikro DAS di Sub DAS Cikapundung dengan Konsultan Asep Tata Supriatna dan Tim dengan nilai pekerjaan sebesar Rp148.751.100.

Based on Contract No. SP.SPK-06/OPSDAL.DOP/06/2023 dated June 2, 2023 Management of Micro DAS-Based Hydrological Physical Data in the Cikapundung Sub-Watershed with Consultant Asep Tata Supriatna and Team with a work value amounting to Rp148,751,100.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPK-05/OPSDAL.DOP/06/2023 tanggal 2 Juni 2023 Penyusunan Model dan Manajemen DAS Citarum Berbasis Mikro DAS di Kawasan Bandung Utara dengan Konsultan Dhipo Adhi Saputra dan Tim dengan nilai pekerjaan sebesar Rp148.917.600.

Based on Contract No. SP.SPK-05/OPSDAL.DOP/06/2023 dated June 2, 2023 Preparation of Model and Management of the Citarum Watershed Based on Micro DAS in the North Bandung Region with Consultant Dhipo Adhi Saputra and Team with a work value amounting to Rp148,917,600.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU-JKons-17/OPSDAL.DOP/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023 Penyusunan Sistem Informasi Geografis

Based on Contract No. SP.SPU-JKons-17/OPSDAL.DOP/10/2023 dated October 2, 2023 Preparation of a Geographic Information

Pemetaan Mikro DAS di Sub DAS Citarum Hulu dengan PT Matrasarakan Sinergita dengan nilai pekerjaan sebesar Rp979.719.300. Progress pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 70%, sehingga Perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp685.803.510 dari total nilai kontrak yang disepakati.

System for DAS Micro Mapping in the Hulu Citarum Sub DAS with PT Matrasarakan Sinergita with a work value amounting to Rp979,719,300. Work progress up to December 31, 2023 reached 70%, so the Company made a payment amounting to Rp685,803,510 of the total agreed contract value.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU-JK-13/OPSDAL.DOP/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Pasir Impun – Cikandut dengan CV Sabar dengan nilai pekerjaan sebesar Rp978.354.000. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp195.670.800 dari total nilai kontrak yang disepakati.

Based on Contract No. SP.SPU-JK-13/OPSDAL.DOP/12/2023 dated December 1, 2023 Construction of an Infiltration Well in the Pasir Impun - Cikandut Area with CV Sabar with a work value amounting to Rp978,354,000. Until December 31, 2023, the Company will make a 20% down payment amounting to Rp195,670,800 of the total agreed contract value.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU-JK-12/OPSDAL.DOP/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Cijambe Impun (IPEP) dengan CV Putra Sulung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp953.245.800. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp190.649.160 dari total nilai kontrak yang disepakati.

Based on Contract No. SP.SPU-JK-12/OPSDAL.DOP/12/2023 dated December 1, 2023 Construction of the Cijambe Impun Area Infiltration Well (IPEP) with CV Putra Sulung with a work value amounting to Rp953,245,800. Until December 31, 2023, the Company will make a 20% down payment amounting to Rp190,649,160 of the total agreed contract value.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU-JK-14/OPSDAL.DOP/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Miko Mall dengan CV Biota dengan nilai pekerjaan sebesar Rp785.114.200. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp157.022.820 dari total nilai kontrak yang disepakati.

Based on Contract No. SP.SPU-JK-14/OPSDAL.DOP/12/2023 dated December 1, 2023 Construction of an Infiltration Well in the Miko Mall Area with CV Biota with a work value amounting to Rp785,114,200. Until December 31, 2023, the Company made a 20% down payment amounting to Rp157,022,820 of the total agreed contract value.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU-JK-15/OPSDAL.DOP/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Cibaduyut dengan CV Endiko dengan nilai pekerjaan sebesar Rp657.752.700. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka 20% sebesar Rp131.550.540 dari total nilai kontrak yang disepakati.

Based on Contract No. SP.SPU-JK-15/OPSDAL.DOP/12/2023 dated December 1, 2023 Construction of a Cibaduyut Area Infiltration Well with CV Endiko with a work value amounting to Rp657,752,700. Until December 31, 2023, the Company will make a 20% down payment amounting to Rp131,550,540 of the total agreed contract value.

Berdasarkan Kontrak No. SP.SPU-JK-16/OPSDAL.DOP/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 Pembangunan Sumur Resapan Wilayah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kawasan Pendidikan dengan CV Putra Agung dengan nilai pekerjaan sebesar Rp614.185.200. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan pembayaran uang

Based on Contract No. SP.SPU-JK-16/OPSDAL.DOP/12/2023 dated December 1, 2023 Construction of Infiltration Wells in the Regional Apparatus Organization (OPD) Area of the West Java Provincial Government and Education Area with CV Putra Agung with a work value amounting to Rp614,185,200. Until December 31, 2023, the Company will make a 20% down payment amounting to

muka 20% sebesar Rp122.837.040 dari total nilai kontrak yang disepakati.

Berdasarkan Permohonan Pembayaran No. 323/PP/PT-MSS/IX/2023 tanggal 18 September 2023 Pengelolaan Sampah dan Gulma Air Hulu Waduk PLTA Saguling dengan PT Mitra Saguling Sejahtera dengan nilai pekerjaan sebesar Rp165.876.175.

Berdasarkan Permohonan Pembayaran No. 324/PP/PT-MSS/IX/2023 tanggal 18 September 2023 Pengelolaan Sampah dan Gulma Air Hilir Waduk PLTA Saguling dengan PT Mitra Saguling Sejahtera dengan nilai pekerjaan sebesar Rp93.170.526.

Sampai dengan 31 Desember 2023 saldo sisa dana IPEP sebesar Rp3.727.156.218.

Rp122,837,040 of the total agreed contract value.

Based on Payment Application No. 323/PP/PT-MSS/IX/2023 dated September 18, 2023 Management of Waste and Weeds in the Upstream Water of the Saguling Hydroelectric Reservoir with PT Mitra Saguling Sejahtera with a work value amounting to Rp165,876,175.

Based on Payment Application No. 324/PP/PT-MSS/IX/2023 dated September 18, 2023 Management of Waste and Weeds Downstream of the Saguling Hydroelectric Reservoir with PT Mitra Saguling Sejahtera with a work value amounting to Rp93,170,526.

As of December 31, 2023, the remaining balance of IPEP funds is Rp3,727,156,218.

vi. Tarif Jual Beli Tenaga Listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Berdasarkan Surat Direktur Utama Perum Jasa Tirta II No. SD-49/DIR/UL/03/2022 tanggal 15 Maret 2022, Perusahaan menyampaikan usulan tarif jual beli tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp393/kWh.

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda No. 001/Tim.Amd/ DITMKIT/2022 dan No. BA.KS-01/SPN-11/ DIR/06/2022.KT/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 disepakati harga negosiasi dengan kenaikan sebesar 3% setiap tahun sebagai berikut:

vi. Electricity Purchase and Sales Tariff to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Based on the Letter from the President Director of Perum Jasa Tirta II No. SD-49/DIR/UL/03/2022 dated March 15, 2022, the Company submitted a proposed electricity purchase and sale tariff to PT PLN (Persero) amounting to Rp393/kWh.

Based on the Minutes of Negotiation of the Sale and Purchase Agreement for HEPP Ir. H. Djuanda No. 001/Tim.Amd/ DITMKIT/2022 and No. BA.KS-01/SPN-11/DIR/06/2022.KT/12/2022 dated December 16, 2022 agreed on a negotiated price with an increase of 3% every year as follows:

Tahun/ *Year*	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Harga (Rp/kWh)/ *Price (Rp/kWh)*	356.38	367.07	378.08	389.43	401.11

Berdasarkan hasil Berita Acara Kesepakatan *Levellized Tariff* Negosiasi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik PLTA Ir. H. Djuanda No. 001.BA/DALKIT-IPP/XII/2023 dan No. BA.KS01/SPN-11/DIR/06/2022.KT/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 disepakati harga jual listrik selama periode Addendum VII adalah sebesar Rp376,35/kWh dengan jangka waktu selama 5 tahun terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.

Berdasarkan hasil *Forum Group Discussion* oleh BPKP perihal Reviu *Levellized Tariff* pada tanggal 12 Januari 2023, BPKP melakukan perhitungan ulang terhadap formula tarif listrik dengan hasil perhitungan tarif minimum adalah

Based on the results of the Minutes of Levellized Tariff Agreement Negotiation of the PLTA Electric Power Purchase Agreement Ir. H. Djuanda No. 001.BA/DALKIT-IPP/XII/2023 and No. BA.KS01/SPN-11/DIR/06/2022.KT/12/2023 dated December 7, 2023, it was agreed that the selling price of electricity during the Addendum VII period was Rp376.35/kWh with a period of 5 years starting from 1 January 2023 until by December 31, 2027.

Based on the results of the Forum Group Discussion by BPKP regarding the Levelized Tariff Review on January 12, 2023, BPKP recalculated the electricity tariff formula with the minimum tariff calculation result being

Rp372,21/kWh dengan asumsi Perusahaan tidak mendapatkan keuntungan.

Rp372.21/kWh with the assumption that the Company does not make a profit.

Entitas Anak
Berdasarkan Akta Perjanjian Kemitraan atau Kerjasama Operasional No. 7 tanggal 2 September 2022 Notaris dari Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, Notaris di Bogor, Entitas Anak sepakat untuk membentuk Kerjasama Operasi dengan PT Air Sumber Kemakmuran dengan nama Jasa Tirta Luhur JO Air Kemakmuran. Keikutsertaan modal (*sharing*) dalam Kerjasama Operasi adalah 60% untuk Perusahaan dan 40% untuk PT Air Sumber Kemakmuran, dimana masing-masing peserta akan mengambil bagian sesuai *sharing* dalam hal pengeluaran, keuntungan dan kerugian dari Kerjasama Operasi.

The Subsidiaries
Based on the Deed of Partnership Agreement or Joint Operation No. 7 dated September 2, 2022 from Putranto Nur Utomo, S.H., M.Kn, a Notary in Bogor, the Subsidiaries agreed to form a Joint Operation with PT Air Sumber Kemakmuran under the name of Jasa Tirta Luhur JO Air Sumber Kemakmuran. Capital participation (sharing) percentage in this Joint Operation is 60% for the Company and 40% for PT Air Sumber Kemakmuran, where each participant will take part according to the sharing percentage in terms of expenses, profits and losses from the Joint Operation.

Kerjasama Operasi PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran
Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: MOS-0100/SPK-JTL/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran mengadakan Kerjasama dengan PT Multi Optimal Sentosa untuk melakukan pekerjaan Pembuatan Tower Menara Air 300 x 2 m^3 di Kawasan Industri Jatiluhur *Industrial Smart City (JISC)* dengan nilai kontrak Rp4.273.500.000 dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 14 Februari 2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2022, penyelesaian kontrak adalah 16,89%.

Joint Operation PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran
Based on Work Order Number: MOS-0100/SPK-JTL/VIII/2022 dated August 23, 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran has an Agreement with PT Multi Optimal Sentosa to do the construction of 300 x 2 cbm Water Tower in Jatiluhur Industrial Smart City (JISC) with a contract value of Rp4,273,500,000 and period of completion by February 14, 2023. Until the financial reporting date of December 31, 2022, the completion of contracts is 16.89%.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 159/BI/TECH-PP/IX/2022 tanggal 19 September 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran mengadakan Kerjasama dengan PT Belaputera Intiland untuk melakukan pekerjaan Sistem Pengolahan Air Minum Kapasitas 100L/Detik Kota Baru Parahyangan dengan nilai kontrak Rp20.669.310.000 dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan 28 Februari 2023. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 31 Desember 2022 penyelesaian kontrak masing-masing adalah 11,18%.

Based on Work Order Number: 159/BI/TECH-PP/IX/2022 dated September 19, 2022, PT Jasa Tirta Luhur JO PT Air Sumber Kemakmuran has an agreement with PT Belaputera Intiland for the work of the 100L/Second Drinking Water Treatment System of Kota Baru Parahyangan with a contract value of Rp20,669,310,000 and period of completion until February 28, 2023. Until the financial reporting date of December 31, 2022 the completion of contracts is 11.18%.

40. Perkara-Perkara Litigasi / *40. Litigation Cases*

a. Gugatan Perdata No. 103/Pdt.G/2019/PN.Ckr
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat seluas 9.885 m^2.

a. Civil Lawsuit No. 103/Pdt.G.2019/PN.Ckr
The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located on Cibuntu Village, Cibitung District, Bekasi Regency, West Java Province with an area of 9,885 sqm.

Perusahaan dinyatakan kalah dalam pokok perkara pada tanggal 7 Juli 2020 dalam putusannya No: 252/PDT/2020/PT BDG dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, No. 103/Pdt.G/ 2019/PN Ckr, tanggal 16 Januari 2020, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat I, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.

The Company was declared defeated on the subject matter on July 7, 2020 in verdict No: 252/PDT/2020/PT BDG with the following order:

- *Received an appeal for Apellant, formerly Defendant I.*
- *Confirmed the Decision of the Cikarang District Court, No. 103/Pdt.G/2019/PN Ckr, dated January 16, 2020, for which the appeal was requested.*
- *Fined the prior Appellant, formerly Defendant I, to pay court fees at both levels of court, which in the appeal level is set at Rp150,000.*

Perusahaan sudah mengajukan proses kasasi ke Mahkamah Agung sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi tanggal 28 September 2020.

The Company has filed an appeal process to the Supreme Court in accordance with the Minutes of Notification and Submission of The Memory of The Cassation dated September 28, 2020.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan dan Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2561 K/Pdt/2022 jo Nomor: 252/PDT/2020/PT.BDG jo Nomor: 103/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 12 Januari 2023 dimana pada intinya hasil putusan memenangkan pihak penggugat dan pihak tergugat (Perum Jasa Tirta II, Kementerian PUPR, dan RM. Katineung) agar melakukan pengosongan terhadap lahan.

Based on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia based on and the Minutes of Notification of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 2561 K / Pdt / 2022 jo Number: 252 / PDT / 2020 / PT. BDG jo Number: 103/Pdt.G/2019/PN Ckr dated January 12, 2023 where in essence the result of the decision won the plaintiff and the defendant (Perum Jasa Tirta II, Ministry of PUPR, and RM. Katineung) in order to empty the land.

Pengadilan Negeri Cikarang telah mengirimkan *Relaas* Panggilan *Aanmaning* (Surat Tercatat) Nomor: 20/Pdt.Eks.Put/2023/PN Ckr jo. Nomor: 103/Pdt.G/2019/PN Ckr jo Nomor: 252/PDT/2020/PT.BDG jo Nomor: 2561 K/Pdt/2022 tanggal 19 September 2023.

The Cikarang District Court has sent a Relaas Summons Aanmaning (Registered Letter) Number: 20/Pdt.Eks.Put/2023/PN Ckr jo. Number: 103/Pdt.G/2019/PN Ckr jo Number: 252/PDT/2020/PT. BDG jo Number: 2561 K/Pdt/2022 dated September 19, 2023.

Perum Jasa Tirta II bersama kementerian PUPR telah beritikad baik dan melaksanakan undangan *Aanmaning* berdasarkan *Relaas* Panggilan *Aanmaning* (Surat Tercatat) Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 20/Pdt.Eks.Put/2023/PN Ckr tanggal 19 September 2023 dan sampai dengan tanggal pelaporan pihak Penggugat tidak melanjutkan proses *Aanmaning.*

Perum Jasa Tirta II together with the PUPR ministry have in good faith and implemented the Aanmaning invitation based on the Aanmaning Call Relaas (Registered Letter) of the Cikarang District Court Number: 20/Pdt.Eks.Put/2023/PN Ckr dated September 19, 2023 and until the reporting date the Plaintiff did not continue the Aanmaning process.

b. Gugatan Perdata No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, seluas 418 m^2.

b. Civil Lawsuit No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks
The object of dispute about other party claimed and controlled land owned by the Company which located on Margajaya Village, South Bekasi District, Bekasi City, with an area of 418 sqm.

Perusahaan mengajukan Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 7 Januari 2021 sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Banding No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

The Company filed a request for appeal to Bekasi District Court Clerk's Office on January 7, 2021, as evidenced by the statement of appeal No. 371/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. No. 1/Bdg/2021/PN.Bks.

Berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Kasasi No. 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 522/Pdt/2021/PT.Bdg Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks, Perusahaan sebagai Pemohon Kasasi telah menyerahkan Memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.

Based on Cassation Memory Receipt No. 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 522/Pdt/2021/PT.Bdg Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks, the Company as a Cassation Petitioner has submitted a memorandum of cassation to Bekasi District Court Clerk.

Berdasarkan Risalah Pemberitahuan Mahkamah Agung RI No: 2900K/Pdt/2022 Jo No: 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 53/Akta.K/2021/PN.Bks tanggal 24 November 2022, Pengadilan Negeri Purwakarta memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Perum Jasa Tirta II.

Based on the Minutes of Notification of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No: 2900K/Pdt/2022 Jo No: 371/Pdt.G/2019/PN. Bks Jo No. 53/Deed. K/2021/PN.Bks dated November 24, 2022, Purwakarta District Court decided to reject the request for appeal by Perum Jasa Tirta II.

Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, sedang dipertimbangkan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat dengan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 717/PAN.W11.U5/HK.02/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal Undangan Verifikasi Data akan dilakukan pelaksanaan pembayaran uang konsinyasi berdasarkan putusan pengadilan.

Until financial reporting date, considerations are made pertained to filing a State Administrative Suit to invalidate a certificate controlled by the Defendant involving the State Attorney (JPN) and based on Bekasi District Court Letter Number 717/PAN. W11. U5/HK.02/II/2024 dated February 15, 2024 regarding the Data Verification Invitation, the payment of consignment money will be carried out based on a court decision.

c. Gugatan Perdata No. 161/Pdt.G/2021/PN. Cikarang

Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan yang dahulu milik Perum Jasa Tirta II, namun telah diserahkan kepada PT Adi Karya melalui Kementerian PUPR, yang terletak di Desa Jatimulya, Kecematan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, seluas 9.120 m^2.

c. Civil Lawsuit No. 161/Pdt.G/2021/PN.Cikarang

The object of dispute about other party claimed and controlled over a land once owned by the Perum Jasa Tirta II, but has been handed to PT Adi Karya through the Ministry of PWPH, located in Jatimulya Village, South Tambun District, Bekasi Regency, with an area of 9,120 sqm.

Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 161/PDT.G/2021/PN.CKR tertanggal 21 Desember 2021 mengadili dalam gugatan masal dalam konvensi, dalam Eksepsi menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian.

Cikarang District Court Decision No. 161/PDT. G/2021/PN.CKR dated December 21, 2021, adjudicates in a mass suit in the convention, in the Exchequer rejects the defendants' exoneration in its entirety in the subject matter of the case:

1. Accepting and granting the plaintiffs' claims in Part of.

2. Menyatakan Surat Pernyataan Waris tanggal 16 Januari 2021 yang telah diketahui oleh pejabat terkait adalah sah secara hukum bagi para penggugat sebagai pewaris atau keturunan dari Tju To Sih alias Gepeng.
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari Alm. Tju To Sih alias Gepeng dan Alm. Ci Orok adalah para penggugat selaku cucu kandung berdasarkan surat pernyataan waris tertanggal 16 Januari 2021.
4. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Risalah Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 26 Mei 2023 menyatakan upaya Banding ditolak. Selanjutnya Perum Jasa Tirta II bersama-sama kementerian PUPR dan PT Adhi Karya (Persero) telah mengajukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi VI Nomor: 16/Akta.Kasasi/2023/PN Ckr jo. Noor 215/PDT/2023/PT BDG jo. Nomor 161/Pdt.G/2021/PN Ckr tanggal 6 Juni 2023.

Sampai dengan tanggal pelaporan, menunggu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI.

2. Declare that the Statement of Inheritance dated January 16, 2021, that has been known by the relevant officials is legally valid for the plaintiffs as heirs or descendants of Tju To Sih as known as Gepeng.
3. Declaring the legal heirs of Alm. Tju To Sih as known as Gepeng and Alm. Ci Orok is the plaintiff as the biological grandson based on the affidavit of inheritance dated January 16, 2021.
4. Declaring the defendants to have committed unlawful acts.

Based on the decision of the Bandung High Court and the Minutes of Notification of Appeal Decision Number: 161/Pdt.G/2021/PN Ckr dated May 26, 2023, the appeal was rejected. Furthermore, Perum Jasa Tirta II together with the PUPR ministry and PT Adhi Karya (Persero) have filed a Cassation Application at the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Cikarang District Court based on the Deed of Cassation Application VI Number: 16/Akta.Kasasi/2023/PN Ckr jo. Noor 215/PDT/2023/PT BDG jo. No. 161/Pdt.G/2021/PN Ckr dated June 6, 2023.

Until the reporting date, waiting Cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

d. Gugatan Perdata No. 603/Pdt.Bth/2022/PN.BKS
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di Kampung Tapak Serang, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, seluas 42.480 m^2.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 603/Pdt.Bth/2022/PN Bks tanggal 6 Oktober 2023 (diberitahukan secara *e-court*) menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pemohon ditolak dan PJT II dinyatakan menang.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut pihak lawan mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Bandung yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

Perkara telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Banding Nomor: 694/PDT/2023/PT BDG tanggal 6 Desember 2923 yang diberitahukan kepada PJT II

d. Civil Lawsuit No. 603/Pdt.Bth/2022/PN.BKS

The object of dispute about other party claimed and controlled over a land owned by the Company which located in Kampung Tapak Serang, Lenggahjaya Village, Cabangbungin District, Bekasi Regency, with an area of 42.480 sqm.

Based on the decision of the Bekasi District Court no. 603/Pdt.Bth/2022/PN Bks dated October 6, 2023 (notified via e-court) stated that the Petitioner's challenge was rejected and PJT II was declared victorious.

Against the District Court Decision, the opposing party filed an Appeal to the Bandung High Court which was filed through the Bekasi District Court.

The case has been decided by the Bandung High Court in Appeal Decision Number: 694/PDT/2023/PT BDG dated December 6, 2923 which was notified to PJT II based on the

berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan Putusan Banding *(e-court)* pada tanggal 7 Desember 2023 yang menyatakan Perum Jasa Tirta II menang dalam perkara tersebut.

Relaas Notice of Appeal Decision (e-court) on December 7, 2023 which stated that Perum Jasa Tirta II won the case.

e. Gugatan Perdata No. 277/Pdt.Bth/2023/PN. Cikarang
Objek sengketa adanya pihak lain yang mengakui dan menguasai lahan milik Perusahaan yang terletak di di Kampung Tapak Serang, Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, seluas 42.480 m^2.

Berdasarkan *Relaas* Panggilan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 277/Pdt.Bth/2023/PN Ckr tanggal 16 November 2023 dengan agenda sidang pertama pada tanggal 4 Desember 2023 telah dilaksanakan dan sampai dengan saat pelaporan keuangan (31 Desember 2023) dalam proses pemeriksaan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cikarang.

e. Civil Lawsuit No.277/Pdt.Bth/2023/PN.Cikarang

The object of the dispute is another party who recognizes and controls land owned by the Company located in Tapak Serang Village, Lenggahjaya Village, Cabangbungin District, Bekasi Regency, covering an area of 42,480 sqm.

Based on the Cikarang District Court Summons Number: 277/Pdt.Bth/2023/PN Ckr dated November 16, 2023 with the first hearing agenda on December 4, 2023 has been carried out and until now the financial reporting is still in the process of being examined by the Panel of Judges at the Cikarang District Court.

41. Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan dan Instrumen Keuangan

41. Business and Financial Risk Management and Financial Instruments

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan
Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Grup untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat suku bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Risiko kerugian yang terkait dengan potensi penyimpangan hasil dari transaksi dan instrumen keuangan (suku bunga, nilai tukar, komoditas dan ekuitas) maupun dari pengelolaan keuangan perusahaan (likuiditas, akuntansi, kredit dan pinjaman serta permodalan, piutang dan pajak) yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal perusahaan.

Bisnis Grup mencakup aktivitas pengambilan risiko dengan sasaran tertentu dengan pengelolaan yang profesional. Fungsi utama dari manajemen risiko Grup adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko.

a. Objectives and Financial Risk Management Policy
Objectives and policies of the Group's financial risk management to ensure that adequate financial resources available for operations and business development, and to manage foreign currency risk, interest rate, credit and liquidity risk. The Company operates with the guidelines set by Board of Directors.

The risk of loss related to potential deviations result from transactions and financial instruments (interest rates, exchange rates, commodity and equity) as well as of financial management (liquidity, accounting, credit and loans and equities, debt and taxes) are caused by internal factors and by external factors.

The Group business includes risk-taking activities with specific target with professional management. The main function of corporate risk management is to identify all key risks, quantify these risks and manage risk positions.

Tujuan Grup dalam mengelola risiko keuangan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Grup.

The Group's goal is to manage the financial risks to achieve an appropriate balance between risk and return and minimize the potential effects of the deteriorating the Group's financial performance.

"Pengelolaan Risiko Usaha" khususnya dalam rangka untuk mengelola risiko keuangan secara efektif, Direksi Grup telah melaksanakan beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Grup, antara lain:

"Business Risk Management" especially in order to effectively manage financial risks, Directors of the Group has implemented several strategies for managing financial risk, which is in line with the Group's objectives, among others:

- Meminimalkan tingkat suku bunga, mata uang dan risiko pasar untuk semua jenis transaksi.
- Grup dapat berinvestasi dalam saham atau instrumen serupa hanya dalam hal terjadi kelebihan likuiditas yang bersifat sementara, dan transaksi tersebut harus disahkan oleh Dewan Pengawas.

- *Minimize the interest rate, currency and market risks for all types of transactions.*
- *The Group may invest in shares or similar instruments only in the event of excess liquidity is temporary, and the transaction must be approved by the Board of Supervisory.*

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, Grup menghadapi risiko keuangan, yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut:

In running the operating, investing, and financing, the Group faced financial risks, namely credit risk, liquidity risk and market risk and define the risks as follows:

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada Grup.

Credit Risk
Credit risk is the risk of financial losses incurred if the customer fails to meet the contractual obligations to the Group.

Nilai tercatat dari aset keuangan mencerminkan nilai eksposur kredit maksimum. Nilai eksposur kredit maksimum pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of the financial asset reflects the value of the maximum credit exposure. The maximum credit exposure value on the statements of financial position are as follows:

31 Desember 2023	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	Lebih dari 3 Bulan/ *More than 3 Month*	Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Jumlah Aset Keuangan Bersih/ *Net Total Financial Assets*	*December 31, 2023*
Aset Keuangan						***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	732,175,855,725	--	732,175,855,725	--	732,175,855,725	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	46,792,564,864	129,342,889,897	176,135,454,760	(64,895,534,685)	111,239,920,075	*Accounts Receivable*
Piutang Retensi	2,478,300,560	--	2,478,300,560	--	2,478,300,560	*Retention Receivables*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	225,891,251,389	--	225,891,251,389	(27,277,912,338)	198,613,339,051	*Accrued Revenue*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	9,301,433,018	--	9,301,433,018	--	9,301,433,018	*Gross Amount Due from Customers*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	4,172,384,436	--	4,172,384,436	(2,245,384,059)	1,927,000,377	*Other Current Financial Assets*
Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2,134,881,591	--	2,134,881,591	--	2,134,881,591	*Restricted Cash Equivalents*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	--	67,275,000	--	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Jumlah	**1,023,013,946,583**	**129,342,889,897**	**1,152,356,836,480**	**(94,418,831,082)**	**1,057,938,005,398**	***Total***

31 Desember 2022	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	Lebih dari 3 Bulan/ *More than 3 Month*	Jumlah Aset Keuangan/ *Total Financial Assets*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Jumlah Aset Keuangan Bersih/ *Net Total Financial Assets*	*December 31, 2022*
Aset Keuangan						***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	567,815,077,826	--	567,815,077,826	--	567,815,077,826	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	53,874,012,711	113,170,980,905	167,044,993,616	(69,639,076,396)	97,405,917,220	*Accounts Receivable*
Piutang Retensi	1,544,313,386	--	1,544,313,386	--	1,544,313,386	*Retention Receivables*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	252,947,732,145	--	252,947,732,145	(15,916,553,889)	237,031,178,256	*Accrued Revenue*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	7,707,817,958	--	7,707,817,958	--	7,707,817,958	*Gross Amount Due from Customers*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	2,946,663,778	--	2,946,663,778	(2,245,384,059)	701,279,719	*Other Current Financial Assets*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	--	67,275,000	--	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Jumlah	**886,902,892,804**	**113,170,980,905**	**1,000,073,873,709**	**(87,801,014,344)**	**912,272,859,365**	***Total***

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup tidak bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Pada saat ini Grup dapat membayar semua kewajiban pada saat jatuh tempo. Grup memiliki kas dan serata kas dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya, Grup berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang.

Rincian jatuh tempo liabilitas keuangan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group could not meet obligations as they fall due.

At this time the Group can pay all obligations as they fall due. The Group had cash and cash equivalents and other financial assets that can be used to meet short-term financial obligations. To meet the long-term financial obligations, the Group expected a sales increase in the future.

Details of the maturities of financial liabilities held as follows:

31 Desember 2023	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	3 Bulan sampai 1 Tahun/ *3 Month up to 1 Year*	Lebih dari 1 Tahun/ *More than 1 Year*	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2023*
Utang Usaha	32,729,715,545	--	--	32,729,715,545	*Accounts Payable*
Utang Retensi	1,381,831,809	--	--	1,381,831,809	*Retention Payables*
Liabilitas Sewa	--	1,383,134,838	7,361,705,157	8,744,839,995	*Lease Liabilities*
Beban Akrual	86,626,991,825	--	--	86,626,991,825	*Accrued Expenses*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	36,152,305,098	--	--	36,152,305,098	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	--	3,300,000,000	9,730,129,200	13,030,129,200	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**156,890,844,277**	**4,683,134,838**	**17,091,834,357**	**178,665,813,472**	***Total***

31 Desember 2022	Kurang dari 3 Bulan/ *Less than 3 Month*	3 Bulan sampai 1 Tahun/ *3 Month up to 1 Year*	Lebih dari 1 Tahun/ *More than 1 Year*	Jumlah/ *Total*	*December 31, 2022*
Utang Usaha	13,473,038,006	--	--	13,473,038,006	*Accounts Payable*
Utang Retensi	1,180,062,311	--	--	1,180,062,311	*Retention Payables*
Liabilitas Sewa	--	6,160,381,683	8,921,459,629	15,081,841,312	*Lease Liabilities*
Beban Akrual	71,777,435,621	--	--	71,777,435,621	*Accrued Expenses*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	44,701,634,041	--	--	44,701,634,041	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	--	2,200,000,000	10,830,129,200	13,030,129,200	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**131,132,169,979**	**8,360,381,683**	**19,751,588,829**	**159,244,140,491**	***Total***

Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

Grup memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Grup akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Grup akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

Pada saat ini, Grup tidak mempersiapkan kebijakan atau pengaturan tertentu untuk mengelola risiko tingkat suku bunga untuk mengurangi risiko nilai wajar yang berhubungan dengan risiko arus kas yang terkait dengan kewajiban tingkat suku bunga mengambang. Tidak terdapat aktivitas lindung nilai tingkat bunga pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Tidak ada risiko signifikan atas pengelolaan risiko usaha, kecuali upaya Grup untuk membantu pelanggan dalam mendapatkan SIPSDA.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, profil instrumen keuangan Grup adalah:

Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the cash flow of future cash flows of a financial instrument fluctuates due to changes in market interest rates.

The Group has short-term loans and long-term floating rate. The Group will closely monitor movements in market interest rates and if interest rates rise significantly, the Group will negotiate interest rates with lenders.

At this time, the Group did not prepare a specific policy or regulation to manage interest rate risk to reduce the risks associated with the fair value of cash flow risk associated with floating rate liabilities. There is no interest rate hedging activities on December 31, 2022 and 2021.

There is no significant risk for business risk management, except for the efforts of the Group to assist customers in obtaining SIPSDA.

On the statement of financial position, the Group's profile, as follows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Aset Keuangan	1,057,938,005,398	912,272,859,365	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(178,665,813,472)	(159,244,140,491)	*Financial Liabilities*
Total Aset - Bersih	**879,272,191,925**	**753,028,718,874**	***Total Assets - Net***

Tabel berikut menganalisis rincian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan sifat bunga:

The following table analyzes the financial assets and liabilities by type of interest:

	2023 Rp	2022 Rp	
Tidak Dikenakan Bunga			***Bear No Interest***
Aset Keuangan	324,357,639,987	345,636,818,487	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(152,705,962,686)	(131,132,169,979)	*Financial Liabilities*
Sub Jumlah	**171,651,677,301**	**214,504,648,508**	***Sub Total***
Tingkat Bunga Tetap			***Fixed Interest Rate***
Aset Keuangan	181,445,483,820	106,636,040,878	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(23,824,969,195)	(28,111,970,512)	*Financial Liabilities*
Sub Jumlah	**157,620,514,625**	**78,524,070,366**	***Sub Total***
Tingkat Bunga Mengambang			***Floating Interest Rate***
Aset Keuangan	552,134,881,591	460,000,000,000	*Financial Assets*
Liabilitas Keuangan	(2,134,881,591)	--	*Financial Liabilities*
Sub Jumlah	**550,000,000,000**	**460,000,000,000**	***Sub Total***
Total Aset - Bersih	**879,272,191,925**	**753,028,718,874**	***Total Assets - Net***

Kenaikan suku bunga 2% akan meningkatkan ekuitas dan laba untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.000.000.000 dan Rp9.200.000.000. Penurunan 2% suku bunga untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 akan memiliki sama tetapi berlawanan efek, atas dasar bahwa semua variabel lainnya tetap konstan.

A 2% increase in interest rates would have increased equity and profit for the years ended December 31, 2023 and 2022 by Rp11,000,000,000 and Rp9,200,000,000, respectively. Decreasing 2% in interest rates for the years ended December 31, 2023 and 2022 would have the equal but opposite effect, on the basis that all other variables remain constant.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrumen keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diakrual secara andal.

b. Fair Value of Financial Instruments

Financial instruments are presented in the statement of financial position are stated at fair value or at amortized cost. Moreover, financial instruments are stated at carrying amounts either because the amount is less than fair value or because of their fair value cannot be reliably accrued.

Nilai wajar mendekati atau setara dengan nilai tercatatnya, karena dampak dari diskonto tidak signifikan atau akan jatuh tempo dalam jangka pendek.

The fair value is close to or equal to its carrying value, due to the impact of the discount is not significant or will be due in the short term.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022:

The table below shows the carrying values and fair values of the assets and financial liabilities recorded in the statements of financial position for the years ended December 31, 2023 and 2022:

	2023		2022		
	Nilai tercatat/ *Carrying Value* Rp	Nilai wajar/ *Fair Value* Rp	Nilai tercatat/ *Carrying Value* Rp	Nilai wajar/ *Fair Value* Rp	
Aset Keuangan					***Financial Assets***
Kas dan Setara Kas	732,175,855,725	732,175,855,725	567,815,077,826	567,815,077,826	*Cash and Cash Equivalents*
Piutang Usaha	111,239,920,075	111,239,920,075	97,405,917,220	97,405,917,220	*Accounts Receivable*
Piutang Retensi	2,478,300,560	2,478,300,560	1,544,313,386	1,544,313,386	*Retention Receivables*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	198,613,339,051	198,613,339,051	237,031,178,256	237,031,178,256	*Accrued Revenue*
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja	9,301,433,018	9,301,433,018	7,707,817,958	7,707,817,958	*Gross Amount Due from Customers*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1,927,000,377	1,927,000,377	701,279,719	701,279,719	*Other Current Financial Assets*
Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2,134,881,591	2,134,881,591	--	--	*Restricted Cash Equivalents*
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	67,275,000	67,275,000	67,275,000	67,275,000	*Other Non-Current Financial Assets*
Jumlah	**1,057,938,005,397**	**1,057,938,005,398**	**912,272,859,365**	**912,272,859,365**	***Total***
Liabilitas Keuangan					***Financial Liability***
Utang Usaha	32,729,715,545	32,729,715,545	13,473,038,006	13,473,038,006	*Accounts Payable*
Utang Retensi	1,381,831,809	1,381,831,809	1,180,062,311	1,180,062,311	*Retention Payables*
Liabilitas Sewa	8,744,839,995	8,744,839,995	15,081,841,312	15,081,841,312	*Lease Liabilities*
Beban Akrual	86,626,991,825	86,626,991,825	71,777,435,621	71,777,435,621	*Accrued Expenses*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	36,152,305,098	36,152,305,098	44,701,634,041	44,701,634,041	*Other Short-Term Liabilities*
Liabilitas Keuangan Lainnya	13,030,129,200	13,030,129,200	13,030,129,200	13,030,129,200	*Other Financial Liabilities*
Jumlah	**178,665,813,472**	**178,665,813,472**	**159,244,140,491**	**159,244,140,491**	***Total***

Tidak ada risiko likuiditas yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

There is no significant liquidity risk as of December 31, 2023 and 2022.

42. Transaksi Nonkas dan Rekonsiliasi yang Timbul dari Aktivitas Pendanaan

42. Non-Cash Transactions and Reconciliation of Liabilities Arising from Financing Activities

Berikut adalah aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas, sehingga tidak disajikan dalam laporan arus kas konsolidasian:

Below are the investing and financing activities that do not require the use of cash and cash equivalents, so it is not presented in the consolidated statement of cash flows:

	2023 Rp	2022 Rp	
Perolehan Aset Takberwujud melalui:			*Acquisition of Intangible Assets through:*
Reklasifikasi dari Aset Tetap Dalam Pelaksanaan	--	4,871,685,084	*Reclassifying from Assets Under Construction*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	195,338,439	3,238,955,498	*Other Short-Term Liabilities*
Jumlah	**195,338,439**	**8,110,640,582**	***Total***
Perolehan Aset Tetap melalui:			*Acquisition of Acquisition of Fixed Assets through:*
Reklasifikasi dari Aset Tetap Dalam Pelaksanaan	53,089,447,960	--	*Reclassifying from Assets Under Construction*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	19,115,018,538	26,348,527,165	*Other Short-Term Liabilities*
Realisasi dari Uang Muka	504,656,172	1,848,954,676	*Realization from Advances*
Jumlah	**72,709,122,670**	**28,197,481,841**	***Total***
Rehabilitasi Aset Kelola melalui:			*Acquisition of Fixed Assets through:*
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	59,225,604	--	*Other Short-Term Liabilities*
Jumlah	**59,225,604**	**--**	***Total***

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2023 and 2022, as follows:

31 Desember 2023/ *December 31, 2023*

	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Arus Kas/ *Cash Flows*	Non Kas/ *Non Cash*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Liabilitas Sewa	15,081,841,312	(5,835,277,317)	(501,724,000)	8,744,839,995	*Lease Liabilities*
Beban Bunga	82,500,000	(1,737,146,154)	1,924,490,018	269,843,864	*Interest Loan*

31 Desember 2022/ *December 31, 2022*

	Saldo Awal/ *Begining Balance*	Arus Kas/ *Cash Flows*	Non Kas/ *Non Cash*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Liabilitas Sewa	12,719,623,255	(6,085,023,805)	8,447,241,862	15,081,841,312	*Lease Liabilities*
Beban Bunga	165,426,000	(1,502,342,593)	1,419,416,593	82,500,000	*Interest Loan*

43. Aset Kontinjensi / *43. Contingency Asset*

Terdapat pengguna Sumber Daya Air (*intake* pelanggan) belum memiliki SIPSDA (Non SIPSDA) dan pemakaian airnya telah dituangkan dalam Berita Acara Pemakaian Air tahun 2023 sebanyak 91 *intake* yang menjadi potensi pendapatan yang belum dapat ditagihkan sebesar Rp7.984.400.341 dan tahun 2022 sebanyak 86 *intake* yang menjadi potensi pendapatan yang belum dapat ditagihkan sebesar Rp19.276.242.360.

There are Water Resources users (customer intakes) who do not have SIPSDA (Non SIPSDA) and the use of water has been stated in the 2023 Water Usage Minutes as many as 91 intakes which are potential income that cannot be billed as much as Rp7,984,400,341 and in 2022 as many as 86 intakes which became the potential unbilled income of Rp19,276,242,360.

Potensi pendapatan BJPSDA yang belum ditagihkan tersebut di atas, dicatat secara *extraccountable* dan pendapatan dibukukan pada saat diterbitkan/ diperolehnya SIPSDA oleh Pengguna SDA tersebut.

The potential revenue of BJPSDA that has not been billed above is recorded on an extraccountable basis and the income is recorded at the time the SIPSDA is issued/acquired by the SDA User.

44. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan / *44. Events After Reporting Period*

Perusahaan

1. Berdasarkan Risalah Rapat tentang Pembahasan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran BJPSDA PT SHS kepada PJT II Melalui Mekanisme Asset Settlement tanggal 10 Januari 2024 menyatakan bahwa:
   a. Kementerian BUMN pada prinsipnya mendukung penyelesaian kewajiban BJPSDA PT SHS kepada PJT II melalui mekanisme asset settlement dengan ketentuan pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan dan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.
   b. Penyelesaian kewajiban BJPSDA PT SHS kepada PJT II periode sebelum bulan September 2022 sebesar Rp61.834.638.497 dapat dilakukan melalui mekanisme penghapusbukuan aset dengan "kondisi tertentu lainnya" yang ditetapkan oleh Menteri BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Terhadap selisih lebih atas kesepakatan nilai aset yang akan diserahkan dengan nilai utang PT SHS akan dibayarkan oleh PJT II kepada PT SHS.
   c. PT Sang Hyang Seri dan Perusahaan agar segera menjalankan tahapan lebih lanjut terkait penyelesaian utang BJPSDA melalui skema *asset settlement*, dimana prosesnya akan diselaraskan dengan proses restrukturisasi utang perbankan yang saat ini tengah berjalan di PT Sang Hyang Seri.

The Company

1. Based on the Minutes of the Meeting regarding the Discussion on the Settlement of PT SHS's BJPSDA Payment Obligations to PJT II Through the Asset Settlement Mechanism on January 10 2024, it was stated that:
   a. The Ministry of SOEs in principle supports the settlement of BJPSDA PT SHS's obligations to PJT II through an asset settlement mechanism with the implementation provisions in accordance with statutory regulations and taking into account GCG principles.
   b. Settlement of PT SHS's BJPSDA obligations to PJT II for the period before September 2022 amounting to Rp61,834,638,497 can be carried out through an asset write-off mechanism with "other certain conditions" stipulated by the Minister of SOEs in Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. The excess difference between the agreed value of the assets to be handed over and the value of PT SHS's debt will be paid by PJT II to PT SHS.
   c. PT Sang Hyang Seri and the Company should immediately carry out further stages related to resolving the BJPSDA debt through an asset settlement scheme, where the process will be aligned with the banking debt restructuring process currently underway at PT Sang Hyang Seri.

d. Agar dapat dilaksanakan kajian besama oleh PT Sang Hyang Seri dan Perusahaan sebagai upaya penurunan tarif air mengingat air baku yang digunakan PT Sang Hyang Seri bukan sepenuhnya untuk kepentingan komersial namun digunakan untuk para petani.

d. In order to be able to carry out a joint assessment by PT Sang Hyang Seri and the Company as an effort to reduce water tariffs considering that the raw water used by PT Sang Hyang Seri is not entirely used for commercial purposes but for farmers.

2. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) IPA Gunung Putri Nomor: BA-6/DIR/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, Perusahaan memberikan kesempatan kepada Perumda Tirta Kahuripan IPA Gunung Putri untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA sebesar Rp4.356.350.226 dengan cara diangsur selama 39 bulan mulai April 2024 sampai dengan Juni 2027.

2. Based on the Minutes of Agreement for Settlement of Water Resources Management Services Fee Receivables (BJPSDA) Intake Gunung Putri Number: BA-6/DIR/03/2024 dated March 4, 2024, the Company gave Perumda Tirta Kahuripan Intake Gunung Putri the opportunity to reschedule payment obligations BJPSDA receivables amounted to Rp4,356,350,226 in installments over 39 months from April 2024 to June 2027.

3. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Piutang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) IPA Citra Nomor: BA-5/DIR/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, Perusahaan memberikan kesempatan kepada Perumda Tirta Kahuripan IPA Citra untuk melakukan penjadwalan kembali kewajiban pembayaran piutang BJPSDA sebesar Rp557.881.300 dengan cara diangsur selama 31 bulan mulai April 2024 sampai dengan Oktober 2026.

3. Based on the Minutes of Agreement for Settlement of Water Resources Management Services Fee Receivables (BJPSDA) Intake Citra Number: BA-5/DIR/03/2024 dated March 4, 2024, the Company gave Perumda Tirta Kahuripan Intake Citra the opportunity to reschedule payment obligations BJPSDA receivables amounted to Rp557,881,300 in installments over 31 months from April 2024 to October 2026.

4. Berdasarkan Risalah Rapat dari undangan Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-342/PD.021/2024 tanggal 31 Januari 2024, terkait Pembubaran Dana Pensiun Perum Jasa Tirta II disampaikan hal hal sebagai berikut:
   - Penyusunan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi Dana Pensiun Jasa Tirta II yang terici sebagai berikut:

4. Based on the Minutes of Meeting invited by the Director of Insurance, Guarantee and Pension Fund Licensing, Financial Services Authority Number: S-342/PD.021/2024 dated January 31, 2024, regarding the Dissolution of the Perum Jasa Tirta II Pension Fund, the following were conveyed:
   - *Preparation of a work plan and procedures for completing the liquidation of the Jasa Tirta II Pension Fund, which is detailed as follows:*

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Penilaian *fixed assets* oleh KJPP, audit laporan keuangan Dana Pensiun, perhitungan aktuaria per 21 Januari 2024/ *Fixed assets assessment by KJPP, audit of Pension Fund financial reports, actuarial calculations as of January 21, 2024*	Februari - April 2024/ *February - April 2024*
2	Penetapan hak setiap peserta atas manfaat pensiun per 31 Januari 2024/ *Determination of each participant's right to pension benefits as of January 31, 2024*	Maret - April 2024/ *March - April 2024*
3	Surat pernyataan jaminan dari pendiri untuk meyelesaikan utang/ *Statement of guarantee from the founder to settle the debt*	April 2024/ *April 2024*
4	Penyampaian laporan keuangan audit dan lapran aktuaris per tanggal 31 Januari 2024 kepada OJK dilampirkan data kepesertaan dan hak setiap peserta atas manfaat pensiun/ *Submission of audited financial reports and actuarial reports as of January 31, 2024 to OJK includes membership data and each participant's rights to pension benefits*	April 2024/ *April 2024*

No	Uraian Kegiatan	Waktu
5	Penyelesaian aset likuid/ *Liquid asset settlement*	Triwulan I - Triwulan II 2024/ *Quarter I - Quarter II 2024*
6	Pembayaran (atau pengalihan) ke DPLK/ asuransi pilihan peserta yang haknya jatuh tempo/ Payment (or transfer) to DPLK/ *insurance of the participant's choice whose rights are due*	Triwulan II 2024/ *Quarter II 2024*
7	Penyelesaian hak pensiunan secara sekaligus/ *Settlement of pension rights at once*	Triwulan III 2024/ *Quarter III 2024*
8	Penyelesaian aset tanah bangunan/ *Settlement of building land assets*	Triwulan II 2025/ *Quarter II 2025*
9	Penyelesaian penyertaan langsung/ *Completion of direct participation*	Triwulan I 2025 - Triwulan III 2026/ *Quarter I 2025 - Quarter III 2026*
10	Audit laporan keuangan Dana Pensiun per tanggal penyelesaian likuidasi/ *Audit the Pension Fund's financial statements as of the liquidation completion date*	Triwulan III 2026/ *Quarter III 2026*

- Penyampaian kelengkapan data yang terdiri:
  1) Surat pernyataan dari masing – masing Tim Likuidasi dengan substansi.
  2) Daftar riwayat hidup dengan substansi yang menunjukan riwayat hidup, pengalaman kerja dari Tim Likuidasi, dan jabatan terakhir/saat ini dari masing-masing anggota tim Likuidasi.
  3) Penegasan mengenai jangka waktu penyelesaian hutang iuran pendiri dan perkiraan penyelesaian aset Dana Pensiun.
  4) Informasi detail Portofolio Aset Dana Pensiun untuk kondisi terkini.

- *Submission of complete data consisting of:*
  1) Statement letter from each Liquidation Team with substance.
  2) Curriculum vitae with substance showing the curriculum vitae, work experience of the Liquidation Team, and the last/current position of each member of the Liquidation team.
  3) Confirmation regarding the time period for settlement of founders' contribution debts and estimated settlement of Pension Fund assets.
  4) Detailed information on the Pension Fund Asset Portfolio for the latest conditions.

5. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Tarif Addendum VII dengan Nomor: 001.BA-K/VP-IPP/DKI/2024 dan Nomor: BA.KS-01/SPN-11/DIR/06/2022.KT/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, *Vice President* Pengendalian Pembangkit IPP menyepakati tarif jual beli tenaga listrik sebesar Rp375/kWh dan berlaku selama periode Addendum VII.

   Sampai dengan saat ini, Direktur Utama Perusahaan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) masih belum menetapkan Addendum VII beserta penyesuaian tarif jual beli tenaga listrik. Selama tahun 2023, Perusahaan masih menggunakan tarif jual beli listrik tahun 2022, yaitu Rp346/kWh.

6. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dan *Adjustment* Nilai Program Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Saguling Nomor: BA.RASGL-297/UUPML.DOP/02/2024 dan Nomor: 0024.BA/KIT.01.01/PLNIP170000/2024

5. Based on Minutes of Addendum VII Tariff Agreement with Number: 001.BA-K/VP-IPP/DKI/2024 and Number: BA.KS-01/SPN-11/DIR/06/2022.KT/02/2024 dated February 20, 2024, the Vice President for IPP Generation Control agreed to a tariff for purchase and sales of electricity amounting to Rp375/kWh and is valid during the Addendum VII period.

Until now, the Company's President Director and PT PLN (Persero)'s President Director have not yet determined Addendum VII along with adjustments to electricity purchase and sale tarifff. Throughout 2023, the Company will still use the 2022 electricity purchase and sales tariff, which was Rp346/kWh.

6. Based on the Minutes of Reconciliation and Value Adjustment of the Water Resources Management Services Program of the HEPP Saguling Number: BA.RASGL-297/UUPML.DOP/02/2024 and Number:

tanggal 29 Februari 2024, disepakati bahwa realisasi Program Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (PJPSDA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp32.888.936.307 atau sekitar 95,01% dari rencana kWh netto PLTA Saguling sebesar Rp34.616.875.260. Sedangkan realisasi kWh netto PLTA Saguling tahun 2023 adalah sebesar Rp30.443.712.060. Kelebihan PJPSDA sebesar Rp2.445.224.247 akan dijadikan pengurang PJPSDA Tahun 2024.

0024.BA/KIT.01.01/PLNIP170000/2024 dated February 29, 2024, it was agreed that the realization of the Water Resources Management Services Program (PJPSDA) in 2023 amounting to Rp32,888,936,307 or approximately 95.01% of the planned net kWh of the HEPP Saguling amounting to Rp34,616,875,260. Meanwhile, the realization of the net kWh of HEPP Saguling in 2023 is Rp30,443,712,060. The excess PJPSDA amounting to Rp2,445,224,247 will be treated as a deduction from the 2024 PJPSDA.

7. Berdasarkan addendum kelima Perjanjian dengan Asri Hening Suwasti Utami Putri, S.H Notaris Nomor: SP.SPUJKons-04/ADD/IPAK.DKSMR/09/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Sertifikasi Lahan Milik di Blok Kocobok Seluas +- 20 HA, penyelesaian pekerjaan diperpanjang hingga 5 Mei 2024.

7. *Based on the fifth addendum to the Agreement with Asri Hening Suwasti Utami Putri, S.H Notary Public Number: SP.SPUJKons-04/ADD/IPAK.DKSMR/09/2024 dated March 8, 2024 concerning Certification of Land in the Kocobok Block 20 ha, the completion of the work has been extended until May 5, 2024.*

8. Berdasarkan addendum kelima Perjanjian dengan Asri Hening Suwasti Utami Putri, S.H Notaris Nomor: SP.SPUJKons-05/ADD/IPAK.DKSMR/09/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Sertifikasi Lahan Milik di Blok Kutapohaci Tahap I, penyelesaian pekerjaan diperpanjang hingga 5 Mei 2024.

8. *Based on the fifth addendum to the Agreement with Asri Hening Suwasti Utami Putri, S.H Notary Public Number: SP.SPUJKons-05/ADD/IPAK.DKSMR/09/2024 dated March 8, 2024 concerning Certification of Land in the Kutapohaci Block Phase 1, the completion of the work has been extended until May 5, 2024.*

9. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dan Adjustment Nilai Program Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air PLTA Cirata Nomor: BA.RACRT-322/UPPML.DOP/03/2024 dan Nomor: 01.BA-PJPSDA/620/PLNNP/2024 tanggal 5 Maret 2024, disepakati bahwa realisasi Program Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (PJPSDA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp54.466.042.215 atau sekitar 96,82% dari rencana kWh netto PLTA Cirata sebesar Rp56.256.642.482. Sedangkan realisasi kWh netto PLTA Cirata tahun 2023 adalah sebesar Rp51.796.999.447. Kelebihan PJPSDA sebesar Rp2.669.042.768 akan dijadikan pengurang PJPSDA Tahun 2024.

9. *Based on the Minutes of Reconciliation and Value Adjustment of the Water Resources Management Services Program of the HEPP Cirata Number: BA.RACRT-322/UPPML.DOP/03/2024 and Number: 01.BA-PJPSDA/620/PLNNP/2024 dated March 5, 2024, it was agreed that the realization of the Water Resources Management Services Program (PJPSDA) in 2023 amounting to Rp54,446,042,215 or approximately 96.82% of the planned net kWh of the HEPP Cirata amounting to Rp56,256,642,482. Meanwhile, the realization of the net kWh of HEPP Cirata in 2023 is Rp51,796,999,447. The excess PJPSDA amounting to Rp2,669,042,768 will be treated as a deduction from the 2024 PJPSDA.*

Anak Perusahaan

Berdasarkan addendum kedua perjanjian sewa menyewa lahan no: 008/TP-LGL/ADD-2/1/2024 tanggal 30 Januari 2024, PT Tegar Mandiri Cemerlang (Anak Perusahaan PT Jasa Tirta Luhur) telah memperpanjang sewa lahan dengan mengurangi luasan lahan dari 3.935 m^2 menjadi seluas 3.248 m^2. Tarif yang ditetapkan Rp15.750/m2 dengan kenaikan tarif 5% setiap tahunnya terhitung mulai 1 Februari 2024 sampai 31 Januari 2029.

The Subsidiaries

Based on the second addendum to the land lease agreement no: 008/TP-LGL/ADD-2/1/2024 dated January 30, 2024, PT Tegar Mandiri Cemerlang (a Subsidiaries of PT Jasa Tirta Luhur) has extended the land lease by reducing the land area from 3,935 sqm to an area of 3,248 sqm. Tariff is set at Rp15,750/sqm with a tariff increase of 5% annually from February 1, 2024 to January 31, 2029.

45. Reklasifikasi Akun / *45. Reclassification of Accounts*

Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berikut adalah rincian akun-akun sebelum dan sesudah reklasifikasi:

Several accounts in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2022 have been reclassified to conform to the presentation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023, here are the details accounts before and after reclassification:

	31 Desember 2022/ *December 31, 2022*			
	Sebelum Reklasifikasi/ *Before Reclassification* Rp	Reklasifikasi/ *Reclassification* Rp	Setelah Reklasifikasi/ *After Reclassification* Rp	
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Piutang Usaha				*Accounts Receivable*
Pihak Berelasi	63,231,588,561	28,080,079,827	91,311,668,388	*Related Parties*
Pihak Ketiga	34,174,328,659	(28,080,079,827)	6,094,248,832	*Third Parties*
Pendapatan yang Masih Akan Diterima				*Accrued Revenue*
Pihak Berelasi	144,980,396,801	31,906,064,851	176,886,461,652	*Related Parties*
Pihak Ketiga	92,050,781,455	(31,906,064,851)	60,144,716,604	*Third Parties*
Pembayaran di Muka	7,155,040,551	(504,656,172)	6,650,384,379	*Prepayments*
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Pembayaran di Muka	--	504,656,172	504,656,172	*Prepayments*
JUMLAH ASET	**1,913,416,496,070**	--	**1,913,416,496,070**	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				***CURRENT LIABILITIES***
Utang Usaha				*Accounts Payable*
Pihak Berelasi	5,112,319,329	(2,284,686,083)	2,827,633,246	*Related Parties*
Pihak Ketiga	8,360,718,677	2,284,686,083	10,645,404,760	*Third Parties*
Pendapatan Diterima di Muka				*Deferred Revenue*
Pihak Berelasi	6,679,121,186	599,589,982	7,278,711,168	*Related Parties*
Pihak Ketiga	23,348,946,866	(599,589,982)	22,749,356,884	*Third Parties*
JUMLAH LIABILITAS	**530,690,509,245**	--	**530,690,509,245**	***TOTAL LIABILITIES***

46. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif / *46. Accounting Standards Issued But Not Yet Effective*

DSAK-IAI telah menerbitkan beberapa standar baru, amandemen dan penyesuaian atas standar, serta interpretasi atas standar namun belum berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 1 Januari 2024.

DSAK-IAI has issued several new standards, amendments and improvement to standards, and interpretations of the standards but not yet effective for the period beginning on January 1, 2024.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amandemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK 73: "Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik";

- *Amendments PSAK 1: "Presentation of Financial Statements: Non-Current Liabilities with Covenants";*
- *Amendments PSAK 73: "Lease Liabilities in Sale and Leaseback";*

- Amendemen PSAK 2: "Laporan Arus Kas dan PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok";
- Revisi PSAK 101: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah"; dan
- Revisi PSAK 109: "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

- *Amendments PSAK 2: "Statement of Cash Flows and PSAK 60: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Financing Agreement";*
- *Revised PSAK 101: "Presentation of Shariah Financial Statement";*
- *Revised PSAK 109: "Zakah, Infaq and Sadaqah related to Accounting of Zakah, Infaq and Sadaqah".*

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi";
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif"; dan
- Amendemen PSAK 10: "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran".

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- *PSAK 74:" Insurance Contract";*
- *Amendments PSAK 74: "Insurance Contract regarding Initial Implementation of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information"; and*
- *Amendments PSAK 10: "Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability".*

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 74: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 2: Laporan Arus Kas;
- PSAK 13: Properti Investasi;
- PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 16: Aset Tetap;
- PSAK 19: Aset Takberwujud;
- PSAK 22: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 24: Imbalan Kerja;
- PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian;
- PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 71: Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 74: Insurance Contracts, as follows:

- *PSAK 1: Presentation of Financial Statements;*
- *PSAK 2: Statement of Cash Flows;*
- *PSAK 13: Investment Property*
- *PSAK 15: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;*
- *PSAK 16: Fixed Assets;*
- *PSAK 19: Intangible Assets;*
- *PSAK 22: Business Combinations;*
- *PSAK 24: Employee Benefits;*
- *PSAK 48: Impairment of Asset;*
- *PSAK 50: Financial Instruments: Presentation;*
- *PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;*
- *PSAK 58: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;*
- *PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures*
- *PSAK 71: Financial Instruments; and*
- *PSAK 72: Income from Contracts with Customers.*

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amendemen standar dan interpretasi standar tersebut.

Until the date of the consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the adoption of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

DSAK-IAI juga mengesahkan perubahan penomoran PSAK dan ISAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, dimana perubahan ini tidak memengaruhi substansi pengaturan dalam masing-masing PSAK dan ISAK tersebut.

DSAK-IAI also ratified changes to the number of PSAK and ISAK which will be effective on January 1, 2024. This change does not affect the substance of the requirement in each PSAK and ISAK.

47. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

47. Responsibility and Authorization for Issuance of the Consolidated Financial Statements

Manajemen Perusahaan, sesuai dengan ketentuan hukum dan batasan kewenangannya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 15 Maret 2024.

The Management of the Company, to the extent fullest limited by laws and its authority is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that were authorized to be published on March 15, 2024.



KANTOR PUSAT
Jalan Lurah Kawi No. 1
Jatiluhur, Purwakarta
Jawa Barat

Telp (0264) 201 971-72
Fax (0264) 201 971-72

www.jasatirta2.co.id